2023

RKPD

(RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH)

PROVINSI SULSEL

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN

ᨔᨘᨀᨗᨕᨚᨈᨚ ᨔᨘᨈᨗᨊᨗᨑᨚ ᨒᨗᨔᨗᨑᨚ ᨀᨚᨈᨚᨊ

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI SELATAN

NOMOR 20 TAHUN 2022 TENTANG RKPD PROV. SULSEL

TAHUN 2023

GUBERNUR SULAWESI SELATAN

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI SELATAN
NOMOR 20 TAHUN 2022

TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI SELATAN,

Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (4) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang–undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 tahun

2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2022 tentang Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6775);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahaun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2017 Nomor 136);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 496);
16. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2028 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 243) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10

Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2028, (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 283);

17. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023, (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan 301) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023, (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 314);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2023.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Sulawesi Selatan.
2. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Selatan.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah Dokumen Perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) Tahun.

5. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 yang selanjutnya disingkat RKPD Tahun 2022 adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua).
6. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah Perangkat Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang mejadi kewenangan Daerah.
8. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintah wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023 adalah rencana keuangan tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga) Daerah, yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

(1) Maksud ditetapkan Peraturan Gubernur ini adalah bahwa RKPD Tahun 2023 berpedoman pada arah kebijakan dan sasaran pokok perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 serta arah kebijakan dan isu strategis Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023, untuk keselarasan program dan kegiatan pembangunan Daerah dengan pembangunan nasional dan disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan nyata Daerah dalam upaya perbaikan di segala bidang pembangunan.

(2) Tujuan disusunnya Peraturan Gubernur ini sebagai:
   a. pedoman bagi setiap Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023;
   b. acuan bagi Pemerintah Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan dalam mendukung capaian target dan sasaran pembangunan Daerah; dan

c. secara normatif, menjadi dasar penyusunan kebijakan umum anggaran pendapatan dan belanja Daerah (KUA) dan prioritas dan plafon anggaran sementara (PPAS) sebagai landasan penyusunan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023.

BAB III

PELAKSANAAN

Pasal 3

(1) RKPD Tahun 2023, yaitu Dokumen Perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2023 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.
(2) RKPD Tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas 8 (delapan) bab sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
(3) Dalam rangka pelaksanaan RKPD Tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan sasaran dan prioritas pembangunan Daerah.
(4) Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah yang terdapat dalam Bab III, tidak memproyeksikan alokasi transfer alokasi dana khusus sehingga apabila terdapat ketidaksesuaian pagu anggaran antara RKPD Tahun 2023 dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023, maka akan dilakukan perbaikan dan penyesuaian pada perubahan RKPD Tahun 2023.
(5) Sasaran dan Prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disertai dengan pagu anggaran setiap kegiatan yang sifatnya indikatif terdapat pada Bab IV.

Pasal 4

Dalam rangka penyusunan rencana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2023:

a. Pemerintah Daerah menggunakan RKPD Tahun 2023 sebagai bahan acuan pembahasan kebijakan umum anggaran pendapatan belanja Daerah dan prioritas plafon anggaran sementara anggaran pendapatan belanja Daerah bersama dewan perwakilan rakyat Daerah; dan

b. Perangkat Daerah menggunakan RKPD Tahun 2023 dalam melakukan pembahasan rencana kerja dan anggaran perangkat Daerah bersama dewan perwakilan rakyat Daerah.

Pasal 5

(1) Perangkat Daerah membuat laporan kinerja triwulan dan tahunan atas pelaksanaan rencana kerja dan anggaran yang berisi uraian tentang keluaran kegiatan dan indikator kinerja setiap program dan kegiatan.
(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Gubernur melalui Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah paling lama 14 (empat belas) hari setelah berakhirnya triwulan dimaksud.
(3) Laporan kinerja menjadi masukan dan bahan pertimbangan bagi analisis dan evaluasi usulan anggaran tahun berikutnya yang diajukan oleh Perangkat Daerah masing-masing.

Pasal 6

Pengeluaran untuk mendanai keperluan mendesak yang belum tersedia anggarannya dan/atau tidak cukup tersedia anggarannya, diformulasikan terlebih dahulu dalam Rencana Kegiatan Anggaran Perangkat Daerah dan/atau Perubahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah menelaah kesesuaian antara rencana kerja dan anggaran Perangkat Daerah Tahun 2022 hasil pembahasan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 30 Juni 2022

Plh. GUBERNUR SULAWESI SELATAN,

ttd

ABDUL HAYAT

Diundangkan di Makassar
pada tanggal 30 Juni 2022

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SULAWESI SELATAN,

ttd

ABDUL HAYAT

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2022 NOMOR 20

Daftar Isi

Bab I Pendahuluan ..... I – 1
1.1. Latar Belakang ..... I – 1
1.2. Dasar Hukum Penyusuna..... I – 4
1.3. Hubungan Antar Dokumen ..... I – 8
1.4. Maksud dan Tujuan..... I – 10
1.5. Sistematika Penyusunan Dokumen RKPD ..... I – 11

Bab II Gambaran Umum Kondisi Daerah ..... II – 1
2.1. Kondisi Umum Daerah..... II – 1
2.1.1. Aspek Geografi dan Demografi..... II – 1
2.1.1.1. Karakteristik Lokasi Wilayah Sulawesi Selatan ..... II – 1
2.1.1.2. Wilayah Rawan Bencana ..... II – 6
2.1.1.3. Kondisi Demografi ..... II – 9
2.1.1.4. Potensi Pengembangan Wilayah..... II – 11
2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat ..... II – 19
2.2.1. Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi..... II – 19
2.2.1.1. Pertumbuhan Ekonomi..... II – 19
2.2.1.2. Laju Infalsi ..... II – 26
2.2.1.3. PDRB Perkapita ..... II – 26
2.2.1.4. Indeks Gini..... II – 28
2.2.1.5. Indeks Wiliamson ..... II – 29
2.2.1.6. Persentase Penduduk Miskin diatas Garis Kemiskinan ..... II – 29
2.2.1.7. Kontribusi sektor Pertanian/ Perkebunan Terhadap PDRB..... II – 31
2.2.1.8. Kontribusi Sektor Pertanian (Tanaman Pangan) Terhadap PDRB..... II – 32
2.2.1.9. Produksi Sektor Pertanian ..... II – 32
2.2.1.10. Kontribusi Sektor Perkebunan (Tanaman Keras) Terhadap PDRB..... II – 33
2.2.1.11. Produksi Sektor Perkebunan ..... II – 33
2.2.1.12. Kontribusi Sektor Kehutanan..... II – 34
2.2.1.13. Kontribusi Sektor Perrtambangan Terhadap PDRB ..... II – 34
2.2.1.14. Kontribusi Sektor Kehutanan dan Perikanan Terhadap PDRB..... II – 35
2.2.1.15. Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB ..... II – 35
2.2.1.16. Kontribusi Sektor Industri Terhadap PDRB ..... II – 36
2.2.1.17. Kontribusi Industri Rumah Tangga Terhadap PDRB Sektor Industri..... II – 36
2.2.1.18. Pertumbuhan PDRb Industri..... II – 37

2.2.2. Aspek Kesejahteraan Sosial ..... II – 37
2.2.2.1. Indeks Pembangunan Manusia ..... II – 37
2.2.2.2. Indeks Pendidikan ..... II – 39
2.2.2.3. Angka Melek Huruf ..... II – 40
2.2.2.4. Indeks Kesehatan ..... II – 41
2.2.2.5. Presentase Balita Stunting ..... II – 41
2.2.2.6. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja ..... II – 42
2.2.2.7. Tingkat Pengangguran Terbuka ..... II – 43
2.2.2.8. Rasio Penduduk Yang Bekerja ..... II – 43
2.2.2.9. Proporsi Tenaga Kerja yang Berusaha Sendiri dan Pekerja Bebas Keluarga Terhadap Total Kesempatan Kerja ..... II – 44
2.2.2.10. Indeks Pekayanan Publik ..... II – 44
2.2.2.11. Indeks Kepuasan Masyarakat ..... II – 45
2.2.2.12. Persentase PAD Terhadap Pendapatan . II – 46
2.2.2.13. Opini Badan Pemeriksa Keuangan ..... II – 46
2.2.2.14. Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH) ..... II – 46
2.2.2.15. Penanganan Daerah Rawan Pangan ..... II – 47
2.2.2.16. Indeks Pemberdayaan Gender)IDG) ..... II – 47
2.2.2.17. Indeks Reformasi Birokrasi ..... II – 48
2.2.2.18. Nilai SAKIP Provinsi ..... II – 49
2.2.2.19. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) ..... II – 50
2.2.2.20. Potensi Penurunan Emisi GRK (Juta Ton CO2Eq) ..... II – 50
2.2.3. Seni Budaya dan Olah Raga ..... II – 51
2.3. Aspel Pelayanan Umum ..... II – 51
2.3.1. Pelayanan Urusan Wajib Dasar ..... II – 51
2.3.1.1. Pendidikan ..... II – 51
2.3.1.2. Kesehatan ..... II – 69
2.3.1.3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.. II – 84
2.3.1.4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman ..... II – 99
2.3.1.5. Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat ..... II – 116
2.3.1.6. Sosial ..... II – 123
2.3.2. Palayanan Urusan Wajib Non Dasar ..... II – 130
2.3.2.1. Ketenagakerjaan ..... II – 130
2.3.2.2. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ..... II – 137
2.3.2.3. Pangan ..... II – 141
2.3.2.4. Pertanhan ..... II – 145
2.3.2.5. Lingkungan Hidup ..... II – 147
2.3.2.6. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil ..... II – 154
2.3.2.7. Pemberdayaan Masyarakat Desa ..... II – 166

2.3.2.8. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana ..... II – 171
2.3.2.9. Perhubungan ..... II – 173
2.3.2.10. Komunikasi dan Informatika ..... II – 177
2.3.2.11. Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah ..... II – 180
2.3.2.12. Penanaman Modal dan Investasi ..... II – 187
2.3.2.13. Kepemudaaan dan Olah Raga ..... II – 190
2.3.2.14. Statistik ..... II – 194
2.3.2.15. Persandian ..... II – 194
2.3.2.16. Kebudayaan ..... II – 195
2.3.2.17. Perpustakaan ..... II – 197
2.3.2.18. Kearsipan ..... II – 199
2.3.3. Layanan Urusan Pilihan ..... II – 200
2.3.3.1. Pariwisata ..... II – 200
2.3.3.2. Pertanian ..... II – 204
2.3.3.3. Peternakan ..... II – 208
2.3.3.4. Kehutanan ..... II – 211
2.3.3.5. Energi dan Sumber daya Mineral ..... II – 214
2.3.3.6. Perdagangan ..... II – 217
2.3.3.7. Perindustrian ..... II – 220
2.3.3.8. Transmigrasi ..... II – 221
2.3.3.9. Keluatan dan Perikanan ..... II – 222
2.3.4. Penunjang Urusan ..... II – 230
2.3.4.1. Sekretariat Daerah ..... II – 230
2.3.4.2. Sekretariat Dewan ..... II – 236
2.3.4.3. Perencanaan Pembangunan ..... II – 238
2.3.4.4. Keuangan ..... II – 241
2.3.4.5. Kepegawaian Serta Pendidikan dan Pelatihan ..... II – 247
2.3.4.6. Penelitian dan Pengembangan ..... II – 250
2.3.4.7. Pengawasan ..... II – 251
2.3.4.8. Pengelolaan Penghubung ..... II – 254
2.3.4.9. Pemerintahan Umum ..... II – 255
2.4. Aspek Daya Saing Daerah ..... II – 258
2.4.1. Indeks Layanan Infrastruktur ..... II – 258
2.4.2. Produktivitas Total Daerah ..... II – 259
2.4.3. Pengeluaran Komsumsi Rumah Tangga Perkapita II – 260
2.4.4. Persentase Pengeluaran Konsumsi Non Pangan Perkapita ..... II – 261
2.4.5. Nilai Tukar Petani ..... II – 262
2.4.6. Persentase Desa Berstatus Swasembada Terhadap Total Desa ..... II – 263
2.4.7. Rasio Ekspor dan Impor Terhadap PDRB (Indikator Keterbukaan Ekonomi) ..... II – 263
2.4.8. Rasio Ketergantungan ..... II – 264
2.4.9. Angka Kriminalitas ..... II – 265

2.5. Capaian Indikator Pembangunan Daerah ..... II – 265
2.5.1. Capaian Indikator Kinerka Utama (IKU) Pemerintah Provinis Sulawesi Selatan Tahun 2022 – 2021 ..... II – 265
2.5.2. Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017 – 2021 ..... II – 273
2.5.3. Capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan ..... II – 296
2.5.4. Capaian Indikator Kinerja Program Peyelenggaraan Urusan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021 ..... II – 405
2.5.5. Capaian Target Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) ..... II – 449
2.5.6. Capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Suistanable Development Goals (TPB/SDGs) ..... II – 453
2.6. Evaluasi Capaian Indikator Pembangunan ..... II – 529
2.7. Evaluasi Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD 2021 ..... II – 540
2.8. Permasalahan Pembangunan ..... II – 593
2.8.1. Permasalahan Daerah Yang Berhubungan Dengan Priortas dan Sasaran Pembangunan Daerah ..... II – 593
2.8.2. Permasalahan untuk Penentuan Program Prioritas Daerah (Permasalahan Menurut Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah) ..... II – 598
2.8.2.1. Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar ..... II – 598
2.8.2.2. Urusan Pemerintahan Wajib Bukan Pelayanan dasar ..... II – 600
2.8.2.3. Urusan Pemerintah Pilihan ..... II – 603
2.8.2.4. Urusan Penunjang Pemerintahan ..... II – 610
2.9. Isu Strategis ..... II – 611
2.9.1. Evaluasi Pelaksanaan RKPD Tahun 2021 ..... II – 612
2.9.1.1. Isu Global ..... II – 612
2.9.1.2. Isu Strategis Nasional ..... II – 615
2.9.1.3. Isu Strategis Daerah ..... II – 617
2.10. Inovasi Daerah ..... II – 622

Bab III Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah dan Kebijakan Keuangan Daerah ..... III – 1
3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah ..... III – 1
3.1.1. Prospek dan Tantangan Perekonomian Daerah ..... III – 2
3.1.1.1. Prospek Perekonomian Daerah ..... III – 2
3.1.1.2. Tantangan Perekomian Global ..... III – 3
3.1.1.3. Tantangan Perekomian Nasional ..... III – 5
3.1.1.4. Tantangan Perekomian Daerah ..... III – 7

3.1.1.4.1. Pertumbuhan Ekonomi ..... III – 7
3.1.1.4.2. Inflansi ..... III – 10
3.1.1.4.3. Tingkat Pengangguran Terbuka ..... III – 11
3.1.1.4.4. Kemiskinan ..... III – 12
3.1.1.4.5. Gini Ration ..... III – 13
3.1.2. Arah Kebijakan Ekonomi Nasional Tahun 2023 ..... III – 14
3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah ..... III – 17
3.2.1. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah ..... III - 17
3.2.2. Realisasi dan Proyeksi Pendapatan Daerah Provinsi Sulsel Tahun 2020-2024 ..... III – 18
3.2.3. Arah Kebijakan Belanja Daerah ..... III – 21
3.2.3.1. Belanja Operasi ..... III – 22
3.2.3.2. Belanja Modal ..... III – 24
3.2.3.3. Belanja Tidak Terduga ..... III – 24
3.2.3.4. Belanja Trasfer ..... III – 25
3.2.4. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah ..... III – 61
3.2.5. Pendanaan Pembangunan Lainnya ..... III - 64
3.2.5.1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) ..... III – 64
3.2.5.2. *Corporate Social Responsibility* (Program Kemitraaan dan Bina Lingkungan (PKBL) dan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL)) ..... III – 64
3.2.5.3. Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) ..... III – 65
3.2.5.4. Pembiayaan Utang Daerah ..... III – 66

BAB IV Prioritas Dan Sasaran Pembangunan Daerah Tahun 2023 ..... IV – 1
4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan ..... IV – 1
4.2. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2023 ..... IV – 8
4.2.1. Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2023 ..... IV – 9
4.2.1.1. Tema, Sasaran, Arah Kebijakan, dan Strategi Pembangunan ..... IV – 8
4.2.1.2. Prioritas Nasional TAhun 2023 ..... IV – 15
4.2.1.3. Strategi Penhembangan Wilayah Sulawesi ..... IV – 20
4.2.2. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023 ..... IV – 22
4.2.3. Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Tahun 2023 ..... IV – 32
4.2.3.1. Strategi Pembangunan Tahun 2023 ..... IV – 32
4.2.3.2. Arah Kebijakan Pembangunan Tahun 2023 ..... IV – 56
4.3. Keselarasan dan Konsistensi Perencanaan Pembangunan Tahun 2023 ..... IV – 65
4.3.1. Kesesuaian Prioritas Pembangunan Tahun 2022 dengan Sasaran RPJMD ..... IV – 66

4.3.2. Keselarasan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan dan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2023 ..... IV – 68
4.4. Pokok – pokok Pikiran DPRD Provinsi Sulawesi Selatan..... IV – 89
4.5. Peran Pemangku Kepentingan Dalam Pencapaian Sasaran Pembangunan ..... IV – 90

BAB V Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten/Kota ..... V – 1
5.1. Capaian Pengembangan Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan ..... V – 4
5.1.1. Capaian Pembangunan Kawasan Makassar ..... V – 7
5.1.2. Capaian Pembangunan Kawasan Bulukumba ..... V – 11
5.1.3. Capaian Pembangunan Kawasan Watampone ..... V – 15
5.1.4. Pembangunan Kawasan Parepare dan sekitarnya ... V – 18
5.1.5. Pembangunan Kawasan Palopo dan sekitarnya..... V – 22
5.2. Sasaran Pembangunan Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan V – 26
5.2.1. Sasaran Pembangunan Kawasan Makassar Tahun 2023 ..... V – 27
5.2.2. Sasaran Pembangunan Kawasan Bulukumba Tahun 2023 ..... V – 30
5.2.3. Sasaran Pembangunan Kawasan Watampone Tahun 2023 ..... V – 32
5.2.4. Sasaran Pembangunan Kawasan Parepare Tahun 2023 ..... V – 34
5.2.5. Kawasan Pembangunan Palopo Tahun 2023 ..... V – 36

BAB VI Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah ..... VI – 1
6.1. Kerangka Pendanaan Tahun 2023 ..... VI – 1
6.2. Program Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2023..... VI – 2
6.3. Indikasi Rencana Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan Yang Disertai Kebutuhan Pendanaan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023 ..... VI – 27

BAB VII Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah..... VI – 1
7.1. Indikator Makro Pembangunan ..... VI – 1
7.2. Indikator Kinerja Utama (IKU) ..... VI – 3
7.3. Indikator Kinerja Kunci (IKK) ..... VI – 5
7.4. Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM)..... VI – 22
7.5. Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan / Sustainable Development Goals (TPB/SDGs) ..... VI – 25

BAB VIII Penutup..... VIII – 1
8.1. Kaidah Pelaksanaan ..... VIII – 1
8.2. Kesimpulan..... VIII – 3

Daftar Tabel

Tabel II.1.	Data Wilayah Adminstrasi Pemerintah Menurut Kabupaten/Kota	II – 2
Tabel II.2.	Kondisi Kemiringan Lereng di Provinsi Sulawesi Selatan	II – 3
Tabel II.3.	Kondisi Toografi di Provinsi Sulawesi Selatan	II – 4
Tabel II.4.	Jumlah Kejadian Bencana di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021	II – 7
Tabel II.5.	Lokasi Potensi Kawasan Relokasi Bencana Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2021	II – 8
Tabel II.6.	Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk Menurut Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan, Tahun 2021	II – 10
Tabel II.7.	Rasio Jenis Kelamin Penduduk Menurut Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan, Tahun 2021	II – 11
Tabel II.8.	Arahan Pengembangan Wilayah di Sulawesi Selatan	II – 16
Tabel II.9.	Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2017-2021	II – 19
Tabel II.10.	Perbandingan Laju Pertumbuhan Ekonomi dan Rata-Rata Capaian Wilayah Regional Sulawesi, 2017-2021	II – 20
Tabel II.11.	Perbandingan laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Sulawesi Selatan dengan Wilayah Setara di Indonesia Tahun 2021	II – 20
Tabel II.12.	Pertumbuhan Ekonomi Menurut Kabupaten Kota Di Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2017-2021	II – 21
Tabel II.13.	Pertumbuhan PDRB menurut Sektor Lapangan Usaha Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2017-2021	II – 23
Tabel II.14.	Nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha di Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2017-2021	II – 23
Tabel II.15.	Nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2017-2021	II – 24
Tabel II.16.	Kontribusi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2017-2021	II – 25
Tabel II.17.	Perbandingan Laju Inflasi Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2017 – 2022	II – 26
Tabel II.18.	PDRB PerKapita dan PDB Perkapita (ADHB) Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional 2017-2021	II – 27
Tabel II.19.	Perbandingan PDRB Perkapita Provinsi Sulawesi Selatan dengan Wilayah Setara di Indonesia tahun 2021	II – 27
Tabel II.20.	Perkembangan Indeks Gini Berdasarkan Lokasi Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017 – 2021	II – 28

Tabel II.21. Perbandingan Indeks Gini Sulawesi Selatan dengan Wilayah Setara, Tahun 2017-2021 ..... II – 28
Tabel II.22. Indeks Ketimpangan Williamson Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017-2021 ..... II – 29
Tabel II.23. Perbandingan Persentase Tingkat Kemiskinan Periode September Sulawesi Selatan dengan Wilayah Setara, 2017-2021..... II – 30
Tabel II.24. Garis Kemiskinan di Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional, Tahun 2017-2021..... II – 30
Tabel II.25. Persentase Penduduk Diatas Garis Kemiskinan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017-2021 ..... II – 31
Tabel II.26. Perbandingan Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Sulawesi Selatan dengan Wilayah Setara, 2017-2021.... II – 31
Tabel II.27. Kontribusi Sektor Pertanian/Perkebunan terhadap PDRB Tahun 2017 – 2021..... II – 32
Tabel II.28. Kontribusi Sektor Pertanian (Tanaman Pangan) Terhadap PDRB Tahun 2017 – 2021 ..... II – 32
Tabel II.29. Produksi Sektor Pertanian Tahun 2017 – 2021..... II – 33
Tabel II.30. Kontribusi Sektor Perkebunan (Tanaman Keras) terhadap PDRB Tahun 2017 – 2021 ..... II – 33
Tabel II.31. Produksi Sektor Perkebunan Tahun 2017 – 2021 ..... II – 33
Tabel II.32. Kontribusi Sektor Kehutanan Terhadap PDRB Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017-2021 ..... II – 34
Tabel II.33. Kontribusi Sektor Pertambangan Terhadap PDRB Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017-2021 ..... II – 35
Tabel II.34. Kontirbusi Sektor Kelautan dan Perikanan Terhadap PDRB Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017-2021..... II – 35
Tabel II.35. Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017-2021 ..... II – 36
Tabel II.36. Kontribusi Sektor Industri Terhadap PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017-2021..... II – 36
Tabel II.37. Kontribusi Industri Rumah Tangga terhadap PDRB sektor industry Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2017-2021..... II – 37
Tabel II.38. Pertumbuhan PDRB Industri Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2017-2021..... II – 37
Tabel II.39. Capaian IPM dan Dimensi Pembentuk IPM Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017 – 2021..... II – 38
Tabel II.40. Perbandingan Capaian Indeks Pembangunan Manusia Sulawesi Selatan dengan Wilayah Setara dan Nasional 2017-2021..... II – 39
Tabel II.41. Indeks Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017-2021..... II – 40
Tabel II.42. Perbandingan Angka Melek Huruf Penduduk Usia 15 Tahun keatas Sulawesi Selatan dan Nasional, 2017-2021..... II – 40

Tabel II.43. Indeks Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017-2021 ..... II – 41
Tabel II.44. Persentase Balita Stunting Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017-2021 ..... II – 41
Tabel II.45. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (periode Agustus) Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2017 – 2021 ..... II – 42
Tabel II.46. Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka periode Agustus (Persen) Sulawesi Selatan, Wilayah Setara, dan Nasional 2017-2021 ..... II – 43
Tabel II.47. Perbandingan Rasio penduduk bekerja (Periode Agustus) Di Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2017-2021 ..... II – 44
Tabel II.48. Proporsi Tenaga Kerja yang Berusaha Sendiri dan Pekerja Bebas Keluarga Terhadap Total Kesempatan Kerja Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017-2021 ..... II – 44
Tabel II.49. Indeks Pelayanan Publik Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017-2021 ..... II – 45
Tabel II.50. Indeks Kepuasan Masyarakat Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017-2021 ..... II – 45
Tabel II.51. Persentase PAD Terhadap Pendapatan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017-2021 ..... II – 46
Tabel II.52. Opini BPK Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017-2021 ..... II – 46
Tabel II.53. Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Pertanian Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017-202.. II – 47
Tabel II.54. Penganan Daerah Rawan Pangan (Data timpang) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017-2021 ..... II – 47
Tabel II.55. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional 2017 – 2021 ..... II – 48
Tabel II.56. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kabupaten dan Kota di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017 – 2021.. II – 48
Tabel II.57. Indeks Reformasi Birokrasi ..... II – 49
Tabel II.58. Nilai SAKIP Provinsi ..... II – 49
Tabel II.59. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) ..... II – 50
Tabel II.60. Potensi Penurunan emisi GRK (Juta Ton CO2Eq) ..... II – 51
Tabel II.61. Perkembangan Seni Budaya dan Olah raga Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018 – 2021 ..... II – 51
Tabel II.62. Persentase siswa SMA/SMK yang bebas buta aksara Al-Quran Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017-2021. II – 52
Tabel II.63. Persentase SMA/SMK yang bebas Narkoba Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017-2021 ..... II – 52
Tabel II.64. Angka Partisipasi Kasar (APK) Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2017-2021 ..... II – 53
Tabel II.65. Angka Partisipasi Kasar (APK) Menurut Kabupaten/Kota jenjang SMA/SMK/MA Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2021 ..... II – 54
Tabel II.66. Angka Partisipasi Murni (APM) Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2017-2021 ..... II – 55

Tabel II.67. Angka Partisipasi Sekolah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017-2021 ..... II – 56
Tabel II.68. Angka Putus Sekolah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017-2021..... II – 57
Tabel II.69. Angka Kelulusan (AL) SMA/SMK/MA Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017-2021 ..... II – 57
Tabel II.70. Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017-2021..... II – 58
Tabel II.71. Angka Melanjutkan (AM) Jenjang Pendidikan SMP/MTs ke SMA/SMK/MA Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2018-2021 ..... II – 58
Tabel II.72. Angka Melek Huruf Penduduk Usia 15 -64 Tahun Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2017-2021 ..... II – 60
Tabel II.73. Perkembangan Jumlah dan Kondisi Ruang Kelas pendidikan SMA/SMK di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017-2021 ..... II – 60
Tabel II.74. Persentase jumlah warga negara usia 16 -18 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah (SPM) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017-2021..... II – 61
Tabel II.75. Jumlah sekolah Luar Biasa Bagi Penyandang Disabilitas Di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017 – 2021..... II – 61
Tabel II.76. Jumlah Siswa Penyadang Disabilitas Berdasarkan Jenjang Pendidikan Di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017 – 2021..... II – 62
Tabel II.77. Jumlah Siswa Berdasarkan Kelompok Umur Penyandang Disabilitas Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017 – 2021..... II – 62
Tabel II.78. Jumlah Siswa Penyandang Disabilitas Berdasarkan Jenis Ketunaan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017 – 2021 ..... II – 63
Tabel II.79. Persentase warga negara usia 4 – 18 tahun yang termasuk dalam penduduk disabilitas yang berpartisipasi dalam pendidikan Khusus Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017-2021 ..... II – 63
Tabel II.80. Persentase Sekolah yang menerapkan kurikulum lokal penambahan waktu pelajaran agama Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017-2021 ..... II – 64
Tabel II.81. Persentase Pendidikan menengah yang telah menerapkan penyelenggaraan dan pelayanan pendidikan berbasis TIK Tahun 2017-2021..... II – 64
Tabel II.82. Rasio Guru terhadap murid pendidikan menengah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017-2021 ..... II – 65
Tabel II.83. Guru Yang Memenuhi Kualifikasi S1/D-IV Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017–2021..... II – 65
Tabel II.84. Jumlah Pendidik pada Jenjang SMA yang Memiliki Ijazah D.IV/S.1 dan Sertifikat Pendidik Menurut

	Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021	II – 66
Tabel II.85.	Persentase Guru SMA yang bersertifikat Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017-2021	II – 67
Tabel II.86.	Jumlah Pendidik pada Jenjang SMK yang Memiliki Ijazah D.IV/S.1 dan Sertifikat Pendidik Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021	II – 67
Tabel II.87.	Persentase Guru SMK yang Bersertifikat Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017-2021	II – 68
Tabel II.88.	Persentase Satuan Pendidikan Yang memperoleh Izin Penyelenggaraan Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017-2021	II – 69
Tabel II.89.	Persentase SMA/SMK yang menerbitkan karya sastra Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017-2020	II – 69
Tabel II.90.	Persentase RS Regional yang terbangun dan ditingkatkan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017 – 2021	II – 70
Tabel II.91.	Persentase RS Rujukan Provinsi yang Terakreditasi Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017-2021	II – 71
Tabel II.92.	Persentase anak yang mendapat asupan gizi pada 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017-2021	II – 72
Tabel II.93.	Persentase Jumlah Warga Negara yang terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/ atau berpotensi bencana provinsi yang mendapatkan layanan kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017-2021	II – 74
Tabel II.94.	Persentase Jumlah Warga Negara pada kondisi kejadian luar biasa provinsi yang mendapatkan layanan kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017-2021	II – 75
Tabel II.95.	Persentase ibu hamil yang mendapat asupan gizi pada 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) Provinsi Sulawesi Selatan 2017-2021	II – 76
Tabel II.96.	Persentase Ketersediaan Stok Darah Terhadap Pemenuhan Kebutuhan Darah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017-2021	II – 76
Tabel II.97.	Persentase pasien yang mendapatkan layanan sesuai dengan standar Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017-2021	II – 77
Tabel II.98.	Cakupan Ketersediaan Sarana dan Prasarana RS dalam Kondisi Baik Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017-2021	II – 77
Tabel II.99.	Rasio Tenaga Kesehatan Persatuan Penduduk Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016-2020	II – 79
Tabel II.100.	Persentase Keterpenuhan SDM Kesehatan pada Fasilitas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017-2021	II – 79
Tabel II.101.	Persentase tenaga medis yang tersertifikasi Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017-2021	II – 80

Tabel II.102. Cakupan Pelatihan dan modul yang terakreditasi Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2017-2021 ..... II – 80
Tabel II.103. Persentase Tenaga Kesehatan dan Tenaga Kesehatan Lainnya yang mengikuti pendidikan dan pelatihan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017-2021 ..... II – 81
Tabel II.104. Persentase kompetensi Sumber daya Manusia kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017-2021 ..... II – 81
Tabel II.105. Meningkatnya Kompetensi teknis SDM Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017-2021 ..... II – 82
Tabel II.106. Persentase Pemenuhan Sediaan Farmasi Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017-2021 ..... II – 83
Tabel II.107. Persentase Pemenuhan Sediaan Alat Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017-2021 ..... II – 83
Tabel II.108. Persentase Pemenuhan Sediaan Makanan Minuman Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016-2020 ..... II – 84
Tabel II.109. Persentase Kabupaten/Kota yang memiliki Kebijakan PHBS Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017-2021..... II – 84
Tabel II.110. Rehabilitasi dan Peningkatan Jaringan Irigasi Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021..... II – 85
Tabel II.111. Persentase Jaringan Irigasi Primer dan Sekunder Kondisi Baik pada DI Kewenangan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017-2021..... II – 86
Tabel II.112. Cakupan Pengelolaan Sungai, Danau, Waduk, dan Pantai Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017-2021 ..... II – 87
Tabel II.113. Pemeliharaan Embung, Pembangunan Bendung dan Normalisasi Sungai Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021 ..... II – 87
Tabel II.114. Persentase Warga Negara Memperoleh Kebutuhan Air Minum Curah Lintas Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017-2021 ..... II – 88
Tabel II.115. Cakupan Pembinaan Layanan Air Minum Kab/Kota Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017-2021 ..... II – 89
Tabel II.116. Cakupan Pembinaan Layanan TPA (Kab/Kota) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017-2021 ..... II – 90
Tabel II.117. Persentase Warga Negara yang Memperoleh Layanan Pengolahan Air Limbah Domestik Regional Lintas Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017-2021 ..... II – 90
Tabel II.118. Cakupan Pembinaan Layanan Air Limbah Domestik Kab/Kota Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017-2021 .... II – 91
Tabel II.119. Bangunan Pemerintah yang Difasilitasi Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021..... II – 92
Tabel II.120. Persentase Bangunan Pamerintah Yang di Fasilitasi Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017-2021 ..... II – 91
Tabel II.121. Jumlah Kawasan Strategis Dan Pusat Pertumbuhan Baru Yang Dilakukan Penataan Bangunan Dan Lingkungannya Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017-2021 ..... II – 93
Tabel II.122. Kegiatan Bina Marga Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021 ..... II – 94

Tabel II.123. Persentase Jalan Provinsi Dalam Kondisi Mantap Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017-2021 ..... II – 96
Tabel II.124. Kondisi Jalan Daerah Terisolir Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021 ..... II – 97
Tabel II.125. Persentase panjang terisolir pada ruas jalan provinsi yang terakses roda empat Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017-2021 ..... II – 97
Tabel II.126. Rasio tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah provinsi yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan ahli Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017-2021 ..... II – 98
Tabel II.127. Rasio ketaatan pemanfaatan ruang Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017-2021 ..... II – 99
Tabel II.128. Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah provinsi yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni kewenagan provinsi Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017-2021 ..... II – 100
Tabel II.129. Rumah Layak Huni Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021 ..... II – 102
Tabel II.130. Pembangunan PSU dan Jaringan Air Bersih Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021 ..... II – 104
Tabel II.131. Persentase Warga Negara Korban Bencana Yang Memperoleh Rumah Layak Huni Kewenangan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017-2021 ..... II – 105
Tabel II.132. Penanganan Kawasan Kumuh Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021 ..... II – 106
Tabel II.133. Persentase Luas Kawasan Kumuh Tertangani Kewenangan Provinsi Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017-2021 ..... II – 107
Tabel II.134. Luas Kawasan Kumuh Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021 ..... II – 107
Tabel II.135. Persentase rumah tangga yang berakses air bersih layak/Arsinum di kawasan Pesisir dan Kepulauan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017- 2021 ..... II – 110
Tabel II.136. Persentase Rumah Tangga Bersanitasi menurut Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021.. II – 112
Tabel II.137. Pembangunan Drainase Lingkungan pada Kawasan Permukiman Tahun 2021 ..... II – 113
Tabel II.138. Persentase Rumah Tangga Bersanitasi di Kawasan Permukiman Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017-2021 ..... II – 114
Tabel II.139. Pembangunan Jalan Lingkungan pada Kawasan Permukiman Tahun 2021 ..... II – 114
Tabel II.140. Persentase panjang jalan lingkungan yang terbangun di kawasan permukiman Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017-2021 ..... II – 115
Tabel II.141. Persentase Pengembang Perumahan Dengan Tingkat Kualifikasi Menengah Yang Tersertifikasi Dan Terregistrasi Bidang Perumahan Dan Kawasan

Permukiman Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017-2021 ..... II – 116
Tabel II.142. Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkada Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017-2021 ..... II – 117
Tabel II.143. Persentase Korban Bencana yang tertangani Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017-2021 ..... II – 117
Tabel II.144. Indeks Risiko Bencana Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2021 Provinsi Sulawesi Selatan..... II – 118
Tabel II.145. Persentase Dokumen Kebencanaan sampai dengan sah/legal yang tersedia Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017-2021 ..... II – 119
Tabel II.146. Persentase Aparat Kesiapsiagaan Bencana yang terlatih Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017-2021 .... II – 119
Tabel II.147. Data Terdampak Bencana Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2021 Provinsi Sulawesi Selatan..... II – 120
Tabel II.148. Persentase Tanggap Darurat Bencana yang Tertangani Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017-2021 ..... II – 122
Tabel II.149. Cakupan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017-2021..... II – 123
Tabel II.150. Persentase Pengawasan Pelaksanaan Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017-2021 ..... II – 123
Tabel II.151. Persentase PSKS yang mendapatkan peningkatan kemampuan dan pengetahuan kesejahteraan social Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017-2021 ..... II – 124
Tabel II.152. Persentase penanganan warga negara migran korban tindak kekerasan tindak kekerasan ..... II – 124
Tabel II.153. Persentase warga negara penyandang disabiltas terlantar yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar didalam pantie Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017-2021 ..... II – 125
Tabel II.154. Persentase warga negara Anak Terlantar yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar anak terlantar didalam panti Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017-2021..... II – 126
Tabel II.155. Persenetase warga negara lanjut usia terlantar yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar lanjut usia didalam panti Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017-2021..... II – 126
Tabel II.156. Persentase warga negara gelandangan dan pengemis yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar tuna susila didalam panti Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017-2021..... II – 127
Tabel II.157. Persentase Pelayanan dan Pemenuhan Kebutuhan dasar bagi tuna social di dalam panti Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017-2021 ..... II – 127

Tabel II.158. Persentase PPKS yang mendapatkan jaminan social Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017-2021 ..... II – 128
Tabel II.159. Persentase pengangkatan anak WNI oleh orang tua tunggal Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017-2021 .... II – 128
Tabel II.160. Persentase warga negara Korban bencana provinsi yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial pada saaat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana provinsi, Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017-2021 ..... II – 129
Tabel II.161. Persentase TMP yang dikelola Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017 - 2021 ..... II – 130
Tabel II.162. Persentase Dokumen Perencanaan Tenaga Kerja Makro Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017-2021 ..... II – 130
Tabel II.163. Persentase Perusahaan yang menyusun Perencanaan Tenaga Kerja Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017-2021 ..... II – 131
Tabel II.164. Persentase pencari kerja terlatih yang mendapatkan pekerjaan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017-2021 ..... II – 131
Tabel II.165. Persentase tenaga kerja yang dilatih berwirausaha dapat mandiri Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017-2021 ..... II – 134
Tabel II.166. Persentase Pencari kerja yang yang terdaftar dan ditempatkan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017-2021 ..... II – 134
Tabel II.167. Persentase daya serap tenaga kerja Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017-2021 ..... II – 135
Tabel II.168. Persentase perusahaan yang menerapkan peraturan perundangan bidang ketengakerjaan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017-2021 ..... II – 135
Tabel II.169. Persentase besaran pekerja /buruh yang menjadi peserta Jamsostek Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2017-2021 ..... II – 136
Tabel II.170. Persentase Penurunan resiko kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016-2019 ..... II – 136
Tabel II.171. Persentase kepatuhan penerapan norma ketenagakerjaan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017-2021 ..... II – 137
Tabel II.172. Persentase lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan yg terstandarisasi Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017-2021 ..... II – 137
Tabel II.173. Persentase kab/kota yang memenuhi indikator prasyarat PUG Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017-2021 ..... II – 138
Tabel II.174. Persentase kab/kota yg menyediakan layanan perlindungan perempuan yang terstandarisasi Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017-2021 ..... II – 138

Tabel II.175. Persentase kab/kota yg menyediakan layanan pembelajaran keluarga yang terstandarisasi Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017-2021 ..... II – 139
Tabel II.176. Persentase Kab/kota yg menyediakan Data Gender dan Anak yang terupdate Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017-2021 ..... II – 140
Tabel II.177. Persentase kabupaten/Kota Layak Anak Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017-2021 ..... II – 140
Tabel II.178. Persentase Kab/Kota yang menyediakan layanan anak korban kekerasan yang terstandarisasi Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017-2021 ..... II – 141
Tabel II.179. Cakupan kelompok pengelola infrastruktur pendukung ketahanan pangan yang di bangun Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017-2021 ..... II – 141
Tabel II.180. Persentase Ketersediaan Pangan Utama Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017-2021 ..... II – 142
Tabel II.181. Ketersediaan Energi dan Protein Perkapita Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017-2021 ..... II – 143
Tabel II.182. Jumlah Daerah Rawan Pangan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017-2021 ..... II – 144
Tabel II.183. Penanganan Daerah Rawan Pangan (Data timpang) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017-2021 ..... II – 144
Tabel II.184. Persentase Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017-2021 .... II – 145
Tabel II.185. Persentase pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang selesai tepat waktu Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017-2021 ..... II – 146
Tabel II.186. Persentase sengketa tanah negara kewenangan provinsi yang difasilitasi Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017-2021 ..... II – 147
Tabel II.187. Persentase penatagunaan tanah sesuai penyelenggaraan penatagunaan tanah di 24 kab/kota Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017-2021 ..... II – 147
Tabel II.188. Persentase pemenuhan dokumen perencanaan lingkungan hidup Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017-2021..... II – 148
Tabel II.189. Jumlah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK)..... II – 148
Tabel II.190. Persentase penurunan emisi gas rumah kaca (GRK) dari sektor limbah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017-2021..... II – 149
Tabel II.191. Persentase Tingkat pengelolaan Keanekeragaman Hayati (KeHaTi) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017-2021..... II – 150
Tabel II.192. Sampah Perkotaan yang Tertangani Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017-2021 ..... II – 151
Tabel II.193. Cakupan limbah yang dikelola Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017-2021 ..... II – 151

Tabel II.194. Persentase ketaatan pemrakarsa Usaha Terhadap Izin Lingkungan dan Izin PPLH Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017-2021 ..... II – 152
Tabel II.195. Persentase pengakuan keberadaan MHA , kearifan lokal dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017-2021 ..... II – 153
Tabel II.196. Cakupan Lembaga atau Kelompok Masyarakat yang di tingkatkan kapasitasnya dalam PPLH Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017-2021 ..... II – 153
Tabel II.197. Cakupan rekomendasi penanganan pengaduan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017-2021 ..... II – 154
Tabel II.198. Persentase Penduduk ber KTP persatuan Penduduk Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017-2021 ..... II – 155
Tabel II.199. Persentase penerbitan KTP Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017-2021 ..... II – 155
Tabel II.200. Persentase Perekaman Kartu Tanda Penduduk Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017-2021 ..... II – 156
Tabel II.201. Persentase Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017-2021 ..... II – 157
Tabel II.202. Persentase Bayi ber akte kelahiran Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017-2021 ..... II – 158
Tabel II.203. Persentase Pasangan ber akte nikah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017-2021 ..... II –160
Tabel II.204. Persentase penerbitan akta kelahiran Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017-2021 ..... II –160
Tabel II.205. Persentase Penduduk Usia 0-17 Tahun dengan kepemilikan akte kelahiran Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017-2021 ..... II – 162
Tabel II.206. Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017-2021 ..... II – 162
Tabel II.207. Persentase Akta Kematian yang Diterbitkan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017-2021 ..... II – 163
Tabel II.208. Jumlah Penduduk Menurut Kabupaten/Kota ..... II – 164
Tabel II.209. Persentase Ketersediaan dan Pemanfaatan Database Kependudukan Skala Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017-2021 ..... II – 165
Tabel II.210. Persentase Penyajian Profil Kependudukan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017-2021 ..... II – 166
Tabel II.211. Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Pemerintahan Desa Yang Baik Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017-2021 ..... II – 166
Tabel II.212. Persentase peningkatan status desa mandiri Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017-2021 ..... II – 167
Tabel II.213. Persentase pengentasan desa tertinggal Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017-2021 ..... II – 168
Tabel II.214. Persentase Desa yang menjalin kerjasama Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017-2021 ..... II – 168

Tabel II.215. Persentase PKK Aktif Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016-2020 ..... II – 169
Tabel II.216. Persentase Posyandu Aktif Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017-2021 ..... II – 169
Tabel II.217. Persentase BUM Desa yang diFasilitasi Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017-2021 ..... II – 170
Tabel II.218. Persentase Desa yang diFasilitasi Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017-2021 ..... II – 170
Tabel II.219. Persentase Kelembagaan Masyarakat yang difasilitasi dan ditingkatkan kapasitasnya (Kelompok Binaan LPM) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017-2021 ..... II – 171
Tabel II.220. Cakupan kab/kota yang mendapatkan fasilitasi pembinaan penanganan terpadu isu kependudukan di Kampung KB Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017-2021 ..... II – 171
Tabel II.221. Persentase PUS peserta KB Aktif Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017-2021 ..... II – 172
Tabel II.222. Persentase kab/kota yg meningkat capaian Indeks Pembangunan Keluarga Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017-2021 ..... II – 172
Tabel II.223. Persentase pengguna moda transportasi umum di perkotaan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017-2021 ..... II – 173
Tabel II.224. Persentase Layanan Angkutan Darat Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017-2021 ..... II – 174
Tabel II.225. Jumlah penumpang melalui terminal Tipe B per tahun Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017-2021 ..... II – 174
Tabel II.226. Cakupan prasarana LLAJ dalam kondisi baik Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017-2021 ..... II – 174
Tabel II.227. Jumlah penyelenggaraan lalu lintas pada ruas jalan provinsi Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017-2021... II – 175
Tabel II.228. Jumlah Terminal Bis terkelola Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017-2021 ..... II – 175
Tabel II.229. Jumlah arus penumpang melalui pelabuhan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017-2021 ..... II – 175
Tabel II.230. Jumlah pelabuhan strategis provinsi Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017-2021 ..... II – 176
Tabel II.231. Persentase pelabuhan yang beroperasi Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017-2021 ..... II – 176
Tabel II.232. Persentase penyelesaian pedoman standar pelayanan Sarana dan prasarana transportasi Di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017-2021 ..... II – 177
Tabel II.233. Persentase layanan informasi dan komunikasi publik Di Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2017-2021 ..... II – 178
Tabel II.234. Presentase tindak lanjut pengaduan pada Baruga Layanan Masyarakat secara Elektronik Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017-2021 ..... II – 179

Tabel II.235. Indeks sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017-2021..... II – 180
Tabel II.236. Persentase Koperasi dan UKM yang memiliki Izin usaha Simpan Pinjam Di Provinsi Sulawesi Selatan,Tahun 2017-2021 ..... II – 181
Tabel II.237. Persentase Koperasi yang mendapat Izin Pembukaan Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu dan Kantor Kas Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017-2021..... II – 181
Tabel II.238. Persentase Koperasi yang diawasi dan diperiksa Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017-2021 ..... II – 182
Tabel II.239. Persentase Koperasi yang meningkat Kepatuhannya terhadap peraturan perundang undangan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017-2021 ..... II – 182
Tabel II.240. Persentase KSP/USP Koperasi, KSPPS/USPPS Koperasi dengan Kriteria SEHAT Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017-2021 ..... II – 183
Tabel II.241. Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Penilaian Kesehatan Koperasi Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017-2021 ..... II – 184
Tabel II.242. Persentase Pengurus Koperasi Aktif yang pernah mendapatkan pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017-2021 ..... II – 184
Tabel II.243. Persentase Koperasi yang terfasilitasi pemberdayaan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017-2021 ..... II – 185
Tabel II.244. Cakupan UMKM yang diberdayakan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017-2021 ..... II – 185
Tabel II.245. Persentase UMKM yang terfasilitasi Dalam Pengembangan Usaha Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017-2021 ..... II – 186
Tabel II.246. Cakupan promosi produk UMKM Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017-2021 ..... II – 186
Tabel II.247. Persentase Peningkatan Pengelolaan Potensi Investasi yang dimamfaatkan oleh Investor Provinsi Sulawesi SelatanTahun 2017– 2021 ..... II – 187
Tabel II.248. Jumlah Realisasi PMA (Rp. Triliun) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017-2021 ..... II – 188
Tabel II.249. Jumlah Realisasi PMDN (Rp. Triliun) ..... II – 188
Tabel II.250. Persentase Ketepatan Waktu Penyelesaian Izin yang Diterbitkan Sesuai SOP Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017-2021 ..... II – 189
Tabel II.251. Persentase Perusahaan yang taat Terhadap Ketentuan peraturan Penanaman modal Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017-2021 ..... II – 189
Tabel II.252. Persentase ketersediaan data dan informasi pendukung penanaman modal Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017-2021 ..... II – 190

Tabel II.253. Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017-2021 ... II – 191
Tabel II.254. Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi social Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017-2021 ..... II – 191
Tabel II.255. Persentase Peningkatan Prestasi olah raga Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017-2021 ..... II – 192
Tabel II.256. Persentase ketersediaan sarana dan prasarana olahraga Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017-2021.. II – 193
Tabel II.257. Persentase organisasi pramuka aktif Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017-2021 ..... II – 194
Tabel II.258. Cakupan Ketersediaan Data Statistik Sektoral Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017-2021 ..... II – 194
Tabel II.259. Persentase Komunikasi daerah yang memanfaatkan persandian Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017-2021..... II – 195
Tabel II.260. Persentase Karya Budaya yang direvitalisasi dan Inventarisasi Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017-2021..... II – 196
Tabel II.261. Persentase Lembaga Sejarah yang di Fasilitasi Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017-2021 ..... II – 196
Tabel II.262. Persentase Cagar Budaya yang dilestarikan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017-2021 ..... II – 197
Tabel II.263. Persentase Kunjungan ke Musium Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017-2021 ..... II – 197
Tabel II.264. Pengunjung Perpustakaan Per tahun Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017-2021 ..... II – 198
Tabel II.265. Persentase naskah kuno yang di lestarikan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017-2021 ..... II – 199
Tabel II.266. Persentase Perangkat daerah yang mengelola arsip secara baku Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017-2021..... II – 200
Tabel II.267. Persentase peningkatan destinasi wisata menjadi destinasi wisata unggulan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017-2021 ..... II – 200
Tabel II.268. Persentase Kab/Kota yang memiliki kawasan wisata halal Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017-2021..... II – 201
Tabel II.269. Kunjungan wisata (Wisatawan Nusantara) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017-2021 ..... II – 202
Tabel II.270. Kunjungan Wisata (Wisatawan Mancanegara) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017-2021 ..... II – 202
Tabel II.271. Persentase Sub Sektor Ekonomi Kreatif yang Dikembangkan Di Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2017-2021..... II – 203
Tabel II.272. Persentase Sumber Daya Manusia Pariwisata yang Mendapatkan Pelatihan Di Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2017-2021 ..... II – 203

Tabel II.273. Persentase pelaku usaha ekonomi kreatif yang mendapatkan pelatihan Di Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2017-2021 ..... II – 204
Tabel II.274. Jumlah produksi Talas Satoimo (Ton) Di Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2017-2021 ..... II – 204
Tabel II.275. Luas Areal Pengengembangan Jeruk Keprok Selayar (Ha) Di Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2017-2021 ... II – 205
Tabel II.276. Kontribusi Sub Sektor Pertanian, Palawija, Produksi Sektor Pertanian, Kontribusi Sektor Perkebunan, Produksi Sektor Perkebunan Kontribusi Produksi Kelompok Petani Terhadap PDRB di Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2017-2021 ..... II – 205
Tabel II.277. Produktivitas Padi, Jagung, Kopi dan Kakao Di Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2017-2021 ..... II – 206
Tabel II.278. Peningkatan Ketersediaan Alat dan Mesin Pertanian Di Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2017-2021..... II – 206
Tabel II.279. Peningkatan Ketersediaan Pupuk Di Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2017-2021 ..... II – 207
Tabel II.280. Nilai Hilirisasi Produk Tanaman Pangan, Nilai Hilirisasi Produk Perkebunan Di Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2017-2021 ..... II – 207
Tabel II.281. Persentase Penurunan Serangan OPT Di Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2017-2021 ..... II – 208
Tabel II.282. Rasio Ketersediaan Penyuluh Pertanian dan Pelaku Utama Petani, Penyuluh/KEP Di Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2017-2021 ..... II – 208
Tabel II.283. Produktivitas Hasil Peternakan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017-2021 ..... II – 209
Tabel II.284. Nilai Hilirisasi Produksi Peternakan Nilai Hilirisasi Produksi Peternakan ..... II – 209
Tabel II.285. Jumlah Kasus Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017-2021 ... II – 210
Tabel II.286. Persentase Unit Usaha Yang Memiliki Rekomendasi Usaha Obat Hewan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017-2021 ..... II – 210
Tabel II.287. Rasio Ketersediaan Penyuluh Terhadap Kelompok Tani/Ternak Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017-2021 ..... II – 211
Tabel II.288. Cakupan luas lahan kritis yang direhabilitasi Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017-2021 ..... II – 211
Tabel II.289. Persentase Kerusakan Hutan pertahun Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017-2021 ..... II – 212
Tabel II.290. Jumlah produksi hasil hutan bukan kayu Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017-2021 ..... II – 212
Tabel II.291. Jumlah produksi hasil hutan kayu olahan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017-2021 ..... II – 213

Tabel II.292. Jumlah jenis tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi dan/atau tidak masuk dalam lampiran (Appendix) CITES untuk kewenangan daerah provinsi yang terdata di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017-2021 ..... II – 213
Tabel II.293. Persentase Jumlah Pemegang izin perhutanan sosial yang menjalankan pengelolaan dan pemanfaatan sesuai aturan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017-2021 ..... II – 214
Tabel II.294. Jumlah DAS yang direhabilitasi Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017-2021 ..... II – 214
Tabel II.295. Presentase Rumah Tangga Pengguna Listrik Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017-2021 ..... II – 215
Tabel II.296. Persentase Desa Berlistrik (Prioritas Desa Kepulauan) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017-2021 ..... II – 215
Tabel II.297. Persentase Pelayanan Usaha Air Tanah Berbasis Konservasi Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017-2021 ..... II – 215
Tabel II.298. Luas Wilayah Izin Usaha Pertambangan (Komoditas Batuan, Non Logam, Non Logam Jenis Tertentu) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017-2021 ..... II – 216
Tabel II.299. Penentuan dan Penetapan Blok WIUP Mineral (Komoditas Batuan, Non Logam, Non Logam Jenis Tertentu) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017-2021 II – 216
Tabel II.300. Persentase Penggunaan Gas Rumah Tangga Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017-2021 ..... II – 217
Tabel II.301. Persentase Rekomendasi SIUP MB yang dikeluarkan Di Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2017-2021 ..... II – 217
Tabel II.302. Persentase Penerbitan SKA Di Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2017-2021 ..... II – 218
Tabel II.303. Persentase Ketersediaan Sarana Distribusi Perdagangan Di Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2017-2021 ..... II – 218
Tabel II.304. Persentase barang kebutuhan pokok dan barang penting yang dapat dikendalikan harganya Di Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2017-2021 ..... II – 218
Tabel II.305. Nilai Ekspor Perdagangan Di Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2017-2021 ..... II – 219
Tabel II.306. Persentase Barang Beredar yang Diawasi, Tertib Niaga dan Pengaduan Konsumen Di Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2017-2021 ..... II – 219
Tabel II.307. Persentase jenis produk pelaku usaha yang memenuhi standar Perdagangan retail Di Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2017-2021 ..... II – 220
Tabel II.308. Persentase pertumbuhan jumlah industry Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017-2021 ..... II – 220
Tabel II.309. Persentase peningkatan pengendalian izin usaha industry Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017-2021 .. II – 220

Tabel II.310. Persentase peningkatan pengelolaan SIINAS Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017-2021 ..... II – 221
Tabel II.311. Persentase penempatan transmigrasi Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017-2021 ..... II – 221
Tabel II.312. Persentase Transmigrasi Yang Dilatih Untuk Dapat Lebih Mandiri Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017-2021 ..... II – 222
Tabel II.313. Persentase Ketersediaan Data Sarana dan Prasarana Transmigrasi Provinsi Sulaweesi Selatan Tahun 2017 – 2021 ..... II – 222
Tabel II.314. Produksi garam rakyat Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017-2021 ..... II – 223
Tabel II.315. Cakupan Ketersediaan Sarana dan Prasarana Pendukung Produksi Perikanan Di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017-2021 ..... II – 223
Tabel II.316. Cakupan Bina Kelompok Nelayan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017-2021 ..... II – 224
Tabel II.317. Persentase Produksi perikanan kelompok nelayan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017-2021 ..... II – 224
Tabel II.318. Cakupan luas kawasan konservasi perairan yang dikelola secara berkelanjutan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017-2021 ..... II – 225
Tabel II.319. Nilai Produksi Perikanan Tangkap Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017-2021 ..... II – 225
Tabel II.320. Produksi perikanan tangkap Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017-2021 ..... II – 226
Tabel II.321. Persentase Pelabuhan Perikanan yg memiliki sarana prasarana yang sesuai standar operasional Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017-2021 ..... II – 226
Tabel II.322. Nilai produksi perikanan budidaya Di Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2017-2021 ..... II – 227
Tabel II.323. Produksi perikanan budidaya di Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2017-2021 ..... II – 227
Tabel II.324. Persentase ketersediaan benur berkualitas di Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2017-2021 ..... II – 227
Tabel II.325. Persentase Kepatuhan Pelaku usaha KP terhadap ketentuan peraturan perundangan yang berlaku di Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2017-2021 ..... II – 228
Tabel II.326. Nilai Hilirisasi Produksi olahan Ikan konsumsi dan non konsumsi di Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2017-2021 ..... II – 228
Tabel II.327. Produksi olahan konsumsi dan non konsumsi di Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2017-2021 ..... II – 229
Tabel II.328. Persentase Pembinaan mutu produk perikanan di Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2017-2021 ..... II – 229
Tabel II.329. Persentase kesesuaian program prioritas dengan struktur organisasi perangkat daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017-2021 ..... II – 230

Tabel II.330. Presentase Urusan Pemerintahan Yang difasilitasi, dimonitoring, dan dievaluasi Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017-2021 ..... II – 231
Tabel II.331. Persentase Rumusan Kebijakan Bidang Kesejahteraan Rakyat yang dimanfaatkan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017-2021 ..... II – 232
Tabel II.332. Persentase Penduduk usia 15 tahun ke atas beragama Islam yang melek aksara Al-Quran Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017-2021 ..... II – 232
Tabel II.333. Persentase Penurunan kasus Kejahatan terhadap Kesusilaan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017-2021..... II – 233
Tabel II.334. Nilai Hasil Evaluasi Reformasi Birokrasi pada Penataan Peraturan Perundang-undangan di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017-2021 ..... II – 234
Tabel II.335. Persentase Perkara Hukum yang difasilitasi di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017-2021 ..... II – 234
Tabel II.336. Persentase rumusan kebijakan bidang perekonomian yang dimanfaatkan di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017-2021 ..... II – 235
Tabel II.337. Realisasi capaian program prioritas pembangunan daerah di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017-2021 II – 235
Tabel II.338. Persentase Kesesuaian pengadaan barang dan jasa dengan rencana pembangunan daerah di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017-2021 ..... II – 236
Tabel II.339. Persentase Kepuasan pelayanan pengadaan barang dan jasa di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017-2021..... II – 236
Tabel II.340. Persentase PROLEGDA yang terealisir di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017-2021 ..... II – 237
Tabel II.341. Persentase Jumlah program kerja DPRD yang terintegrasi dengan program RPJMD dan RKPD di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017-2021 ..... II – 237
Tabel II.342. Persentase Ranperda yang difasilitasi pembahasannya di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017-2021 ..... II – 237
Tabel II.343. Persentase Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD & APBD di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017-2021..... II – 238
Tabel II.344. Persentase peningkatan capaian kinerja program di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017-2021 ..... II – 239
Tabel II.345. Persentase Kesesuaian program Perangkat Daerah dengan Sasaran Pembangunan Daerah di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017-2021 ..... II – 241
Tabel II.346. Persentase Persetujuan Bersama Ranperda APBD Pokok dan APBD Perubahan Yang Tepat Waktu Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017-2021 ..... II – 242
Tabel II.347. Tingkat Kepatuhan Kabupaten/Kota Dalam Menyampaiakan Ranperda dan Ranperkada APBD

Untuk Dievaluasi Tepat Waktu Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017-2021 ..... II – 243
Tabel II.348. Tingkat Kepatuhan Kabupaten/Kota Dalam Menyampaikan Ranperda dan Ranperkada Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Untuk Dievaluasi Tepat Waktu Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017-2021 ..... II – 243
Tabel II.349. Persentase Serapan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017-2021 ..... II – 244
Tabel II.350. Persentase Penyampaian Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Yang Tepat Waktu Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017-2021..... II – 245
Tabel II.351. Persentase keterpenuhan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan kinerja tepat waktu dibidang pendapatan PAD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017-2021 ..... II – 245
Tabel II.352. Persentase Tindak Lanjut Rencana Aksi Manajemen Aset Daerah ..... II – 246
Tabel II.353. Persentase Tanah Pemprov yang Sudah Bersertifikat Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017-2021 ..... II – 247
Tabel II.354. Persentasi Peningkatan PAD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017-2021 ..... II – 247
Tabel II.355. Persentase pemenuhan kebutuhan pegawai ASN Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017-2021 ..... II – 248
Tabel II.356. Persentase ASN yang menduduki jabatan struktural dan fungsional berbasis talenta di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017-2021 ..... II – 249
Tabel II.357. Persentase ASN berkinerja baik dan sangat baik Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017 – 2021 ..... II – 249
Tabel II.358. Cakupan SDM Aparatur yang Lulus Diklat Kompetensi Managerial, Kompetensi Diklat Fungsional, Kompetensi Diklat Sosial Kultural Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017-2021 ..... II – 250
Tabel II.359. Persentase Perangkat Daerah yang mendapatkan penghargaan inovasi daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017 – 2021 ..... II – 251
Tabel II.360. Persentase Penyelesaian Tindak lanjut Perangkat Daerah terhadap Hasil Pemeriksaan APIP di Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2017-2021 ..... II – 251
Tabel II.361. Persentase Penyelesaian Tindak lanjut Hasil Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/ Kota di Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2017-2021 ..... II – 252
Tabel II.362. Persentase OPD yang hasil Nilai SAKIPnya meningkat Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017-2021 ..... II – 252
Tabel II.363. Persentase kebijakan pengawasan pemerintah yang diakomodir menjadi kebijakan pengawasan daerah di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017-2021 ..... II – 253

Tabel II.364. Presen Persentase pengaduan masyarakat terhadap OPD yang ditindaklanjuti Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017-2021 ..... II – 254
Tabel II.365. Persentase pengaduan masyarakat terhadap pemerintah Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017-2021 ..... II – 254
Tabel II.366. Persentase Pelayanan tamu daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017 – 2021..... II – 255
Tabel II.367. Persentase Peningkatan Promosi dan Kerjasama Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017 – 2021.. II – 255
Tabel II.368. Persentase keikutsertaan masyarakat dalam bela Negara Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017 – 2021.. II – 256
Tabel II.369. Persentase Tingkat partisipasi pemilih dalam pemilu Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017 – 2021..... II – 256
Tabel II.370. Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang memenuhi 4 konsensus kebangsaaan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017 – 2021..... II – 257
Tabel II.371. Persentase Penurunan Penyalahgunaan Narkoba Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017 – 2021..... II – 257
Tabel II.372. Persentase Wilayah Sulsel Berpotensi Konflik Agama yang ditangani Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017 – 2021 ..... II – 258
Tabel II.373. Persentase Penurunan jumlah konflik di lingkungan masyarakat Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017 – 2021..... II – 258
Tabel II.374. Indeks Layanan Infrastruktur Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018 – 2021..... II – 259
Tabel II.375. Proporsi Panjang Jaringan Jalan dalam Kondisi Baik Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017-2021 ..... II – 259
Tabel II.376. Produktifitas Total Daerah Tahun 2017-2021 ..... II – 260
Tabel II.377. Angka Partisipasi Angkatan Kerja Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017-2021 ..... II – 260
Tabel II.378. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Perkapita Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017-2021 ..... II – 261
Tabel II.379. Persentase Pengeluaran Konsumsi Non Pangan Perkapita Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017-2021 II – 261
Tabel II.380. Nilai Tukar Petani (NTP) Di Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2017-2021 ..... II – 262
Tabel II.381. Nilai Tukar Petani Berdasarkan Sub Sektor Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017-2021 ..... II – 262
Tabel II.382. Persentase desa berstatus swasembada terhadap total desa..... II – 263
Tabel II.383. Rasio Ekspor + Impor Terhadap PDRB Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017-2021 ..... II – 263
Tabel II.384. Rasio Ketergantungan Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2017 – 2021..... II – 264
Tabel II.385. Angka Kriminalitas di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017 – 2021..... II – 265

Tabel II.386. Target dan Capaian IKU Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan ..... II – 267
Tabel II.387. Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran sampai dengan Tahun 2021 terhadap Target Akhir RPJMD ..... II – 270
Tabel II.388. Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017 – 2021 ..... II – 274
Tabel II.389. Indikator Kinerja Kunci Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2020-2021 ..... II – 297
Tabel II.390. Hasil Analisis Terhadap Capaian Indikator Kinerja Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021 ..... II – 405
Tabel II.391. Capaian Target Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) Di Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2020-2021 (%)(Permendagri No. 100 Tahun 2018) ..... II – 450
Tabel II.392. Capaian Target Indikator TPB/SDGs Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016-2019 ..... II – 454
Tabel II.393. Hasil Analisis Terhadap Capaian Target Indikator TPB/SDGs Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021 ..... II – 481
Tabel II.394. Kinerja Pencapaian TPB/SDGs Berdasarkan 4 Pilar Pembanguanan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021 II – 539
Tabel II.395. Konsistensi Program RPJMD Kedalam RKPD dan APBD ..... II – 542
Tabel II.396. Konsistensi dan Pelaksanaan Kegiatan RKPD ..... II – 548
Tabel II.397. Konsistensi dan Pelaksanaan Sub Kegiatan RKPD..... II – 550
Tabel II.398. Penjabaran Kerangka Pendanaan RPJMD kedalam RKPD dan APBD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021 (DATA SEMENTARA) ..... II – 553
Tabel II.399. Capaian SubKegiatan RKPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021 ..... II – 558
Tabel II.400. Capaian Target Outcome Program Pembangunan Daerah dan Program Perangkat Daerah Tahun 2021 .... II – 559
Tabel II.401. Review Capaian Kinerja RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021 ..... II – 563
Tabel II.402. Komposisi Program dalam Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2022 ..... II – 582
Tabel II.403. Hasil Pelaksanaan RKPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022 ..... II – 587
Tabel II.404. Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja ..... II – 592
Tabel II.405. Daftar Inovasi Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2020-2021 ..... II – 622

Tabel III.1. Laju Pertumbuhan dan Struktur PDRB Provinsi Sulawesi Selatan Menurut ..... III – 8
Tabel III.2. Realisasi dan Proyeksi Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2020-2024 Berdasarkan Peraturan Pemerintah No 12 Tahun 2019 ..... III – 20

Tabel III.3. Realisasi dan Proyeksi Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2020-2024 ..... III – 21
Tabel III.4. Realisasi dan Proyeksi Belanja Daerah Sulawesi Selatan Tahun 2020, 2021, 2022, 2023 dan 2024 Berdasarkan Peraturan Pemerintah No 12 Tahun 2019 ..... III – 27
Tabel III.5. Proyeksi Alokasi Anggaran Belanja terhadap Urusan Wajib mendasarkan pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) di tahun 2023 ..... III – 28
Tabel III.6. Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2023 ..... III – 30
Tabel III.7. Proyeksi Pagu Belanja Perangkat Daerah Tahun 2023 .... III – 51
Tabel III.8. Proyeksi Alokasi Pagu Anggaran Program Pembangunan Daerah terhadap Tujuan TPB/SDGS Tahun 2023 ..... III – 53
Tabel III.9. Realisasi, Target dan Proyeksi Pembiayaan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2020– 2024 ..... III – 63

Tabel IV.1. Penjelasan Visi RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan 2018-2023 ..... IV – 1
Tabel IV.2. Perumusan Penjelasan Misi Perubahan RPJMD..... IV – 4
Tabel IV.3. Tujuan dan sasaran serta target Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023 ..... IV – 6
Tabel IV.4. Strategi Percepatan Pertumbuhan dan Transformasi Wilayah Sulawesi ..... IV – 20
Tabel IV.5. Strategi Pemerataan Intrawilayah Sulawesi ..... IV – 21
Tabel IV.6. Target Pengembangan Wilayah Sulawesi Tahun 2023 .... IV – 22
Tabel IV.7. Target Pengembangan Wilayah Sulawesi Per Provinsi Tahun 2023 (Persen)..... IV – 22
Tabel IV.8. Prioritas dan sasaran pembangunan Tahun 2023..... IV – 24
Tabel IV.9. Hubungan Permasalahan Pembangunan Daerah Dan Isu Strategis Terhadap Prioritas Pembangunan Tahun 2023 ..... IV – 28
Tabel IV.10. Keterkaitan Misi RPJMD dengan Prioritas Pembangunan Daerah untuk Tahun 2023 ..... IV – 31
Tabel IV.11. Prioritas dan Penjelasan Singkat Strategi Pembangunan Daerah Tahun 2023 ..... IV – 47
Tabel IV.12. Keterkaitan Prioritas Pembangunan dengan Arah Kebijakan RPJMD untuk Tahun 2023..... IV – 56
Tabel IV.13. Penjelasan arah kebijakan pembangunan daerah Tahun 2023 ..... IV – 57
Tabel IV.14. Kesesuaian Prioritas Pembangunan Tahun 2023 dengan Sasaran Perubahan RPJMD untuk Tahun 2023... IV – 66
Tabel IV.15. Keselarasan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan dan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2023..... IV – 68
Tabel IV.16. Keselarasan Sasaran pembangunan Daerah terhadap Sasaran Prioritas pembangunan Nasional Tahun 2023 .. IV – 70
Tabel IV.17. Dukungan Pemerintah Daerah Terhadap Kegiatan Prioritas Nasional Tahun 2023..... IV – 76

Tabel V.1. Target Pengembangan Wilayah Sulawesi Berdasarkan Provinsi Tahun 2023 ..... V – 2
Tabel V.2. Target Pembangunan Sulawesi Selatan Tahun 2023 ..... V – 26
Tabel V.3. Target Pembangunan Kawasan Makassar Tahun 2023 .. V – 28
Tabel V.4. Target Pembangunan pada Kawasan Bulukumba Tahun 2023 ..... V – 30
Tabel V.5. Target Pembangunan Kawasan Watampone Tahun 2023 ..... V – 32
Tabel V.6. Target Pembangunan Kawasan Parepare Tahun 2023 ... V – 34
Tabel V.7. Target Pembangunan Kawasan Palopo Tahun 2023..... V – 36

Tabel VI. 1 Rincian Kerangka Pendanaan Tahun 2023 ..... VI – 1
Tabel VI. 2 Prioritas dan Program Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023 ..... VI – 3
Tabel VI. 3 Indikasi Rencana Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan Yang Disertai Kebutuhan Pendanaan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023 ..... VI – 28

Tabel VII.1. Capaian dan Target Indikator Makro Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021-2023 ..... VII – 2
Tabel VII.2. Capaian Indikator Kinerja Utama 2020, Asumsi Capaian Target Indikator Kinerja Utama Tahun 2021, dan Penetapan Target Indikator Kinerja Utama Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022 ..... VII – 4
Tabel VII.3. Indikator Kinerja Penyelenggraan Urusan Pemerintah Daerah ..... VII – 6
Tabel VII.4. Penetapan Target Indikator SPM Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023 (Persen) (Permendagri No 100 Tahun 2018) ..... VII – 23
Tabel VII.5. Penetapan Target Indikator TPB/SDGs Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023 ..... VII – 26

Daftar Grafik

Grafik II.1. Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA Tahun 2021 ..... II – 55
Grafik II.2. Angka Melanjutkan Jenjang SMA/SMK/MA Sulawesi Selatan Tahun 2021 ..... II – 59
Grafik II.3. Persentase Guru SMA yang Bersertifikat Tahun 2021 ..... II – 66
Grafik II.4. Persentase Guru SMK yang Bersertifikat Tahun 2021 ..... II – 68
Grafik II.5. Tingkat Balita Gizi Buruk dan Gizi Kurang di Sulawesi Selatan Tahun 2021 ..... II – 72
Grafik II.6. Prevalansi Balita Stunting Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2021 ..... II – 73
Grafik II.7. Jumlah Tenaga Kesehatan Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2021 ..... II – 78
Grafik II.8. Persentase Rumah Tangga yang Menempati Hunian dengan Akses Air Minum Layak Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2021 ..... II – 89
Grafik II.9. Persentase Rumah Tangga yang Menempati Hunian dengan Akses Air Limbah Layak Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2021 ..... II – 91
Grafik II.10. Capaian Rumah Layak Huni Sulawesi Selatan Tahun 2021 ..... II – 100
Grafik II.11. Capaian RLH Berdasarkan 4 Komponen Kelayakan ..... II – 101
Grafik II.12. Rasio Rumah Layak Huni Tahun 2021 ..... II – 103
Grafik II.13. Capaian Akses Air Minum Layak Tahun 2021 ..... II – 108
Grafik II.14. Capaian Akses Sanitasi Tahun 2021 ..... II – 110
Grafik II.15. Persentase Rumah Tangga yang tidak Memiliki Fasilitas BAB ..... II – 111
Grafik II.16. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Tahun 2021 ..... II – 132
Grafik II.17. Kesempatan Kerja Tahun 2021 ..... II – 132
Grafik II.18. Pencari Kerja yang Ditempatkan Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2021 ..... II – 133
Grafik II.19. Daya Serap Tenaga Kerja Tahun 2021 ..... II – 134
Grafik II.20. Sebaran Kerawanan Pangan Sulawesi Selatan Tahun 2021 ..... II – 144
Grafik II.21. Penduduk Ber-KTP per Satuan Penduduk Tahun 2021 ..... II – 154
Grafik II.22. Kepemilikan Kartu Identitas Anak Sulawesi Selatan Tahun 2021 ..... II – 157
Grafik II.23. Bayi Ber Akte Kelahiran Tahun 2021 ..... II – 158
Grafik II.24. Pasangan Ber Akte Nikah Tahun 2021 ..... II – 159
Grafik II.25. Penduduk Usia 0-17 Tahun dengan Kepemilikan Akta Kelahiran Tahun 2021 ..... II – 161
Grafik II.26. Jumlah Penduduk Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2021 . II – 165
Grafik II.27. Jumlah Desa Status “Desa Mandiri” Tahun 2021 ..... II – 167
Grafik II.28. Jumlah Desa Tertinggal Tahun 2021 ..... II – 168
Grafik II.29. Jumlah Arus Penumpang Angkutan Umum Dalam Juta Jiwa ..... II – 173

Grafik II.30. Jumlah Gedung Olahraga Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2021 ..... II – 193
Grafik II.31. Jumlah Perpustakaan Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2021..... II – 198
Grafik II.32. Tingkat Kesesuaian Program dan Kegiatan RKPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021..... II – 547

Grafik III.1. Pertumbuhan Ekonomi Sulawesi Selatan dan Nasional, Capaian Tahun 2021, Perkiraan Capaian Tahun 2022 dan Target Tahun 2023..... III – 8
Grafik III.2. PDRB Perkapita Sulawesi Selatan, Capaian 2021, Perkiraan 2022 dan Target 2023 ..... III – 10
Grafik III.3. Tingkat Inflasi Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2021, Perkiraan Capaian 2022 dan Target 2023 ..... III – 11
Grafik III.4. Tingkat Pengangguran Terbuka Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2021, Perkiraan Capaian 2022 dan Target 2023..... III – 12
Grafik III.5. Tingkat Kemiskinan Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2021, Perkiraan Capaian 2022 dan Target 2023 . III – 13
Grafik III.6. Gini Rasio Sulawesi Selatan dan Nasional Capaian 2021, Perkiraan Capaian 2022 dan Target 2023 ..... III – 14
Grafik III.7. Alokasi Pendanaan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019-2021 (Milyar Rupiah)..... III – 64

Grafik IV. 1 Keterkaitan Pertumbuhan Ekonomi dan Tingkat Produktivitas..... IV – 9

Daftar Gambar

Gambar I.1.	Hubungan Antar Dokumen RKPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023	I – 9
Gambar I.2.	Hubungan Antara Dokumen Perencanaan Dan Penganggaran	I – 10
Gambar II.1.	Peta Administrasi Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan	II – 1
Gambar II.2.	Peta Kelas Lereng Provinsi Sulawesi Selatan	II – 3
Gambar II.3.	Peta Topografi Provinsi Sulawesi Selatan	II – 4
Gambar II.4.	Peta Daerah Aliran Sungai (DAS) Sulawesi Selatan	II – 5
Gambar II.5.	Peta Potensi Komoditi Unggulan Provinsi Sulawesi Selatan	II – 13
Gambar III.1.	Tema, Prioritas Nasional dan Arah Kebijakan RKP Tahun 2023	II – 15
Gambar III.2.	Indikator Sasaran Pembangunan Nasional Tahun 2023	II – 16
Gambar VI.1.	Penyusunan Tema Pembangunan RKP Tahun 2023	IV – 8
Gambar VI.2.	Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan	IV – 10
Gambar VI.3.	Ekonomi Inklusif	IV - 11
Gambar VI.4.	Kerangka Pikir Tema RKP Tahun 2023	IV – 12
Gambar VI.5.	Sasaran Pembangunan Nasional	IV – 13
Gambar VI.6.	Tema RKP Tahun 2023	IV – 14
Gambar VI.7.	Arah Kebijakan Pembangunan Tahun 2023	IV – 14
Gambar VI.8.	Prioritas Nasional Tahun 2023	IV – 15
Gambar VI.9.	Highlight Major Project RKP Tahun 2023	IV – 19
Gambar V.1.	Wilayah Pengembangan Kawasan Provinsi Sulawesi Selatan	V – 4
Gambar V.2.	Arah Pengembangan Kawasan Provinsi Sulawesi Selatan	V – 6
Gambar V.3.	Arah Pengembangan Kawasan Makassar Tahun 2023	V – 29
Gambar V.4.	Arah Pengembangan Kawasan Bulukumba Tahun 2023	V – 32
Gambar V.5.	Arah Pengembangan Kawasan Watampone Tahun 2023	V – 34
Gambar V.6.	Arah Kebijakan Pengembangan Kawasan Parepare Tahun 2023	V – 36
Gambar V.7.	Arah Kebijakan Pengembangan Kawasan Palopo Tahun 2023	V – 19

Daftar Diagram

Diagram II.1.	Angka Partisipasi Kasar (APK) Berdasarkan Jenjang Pendidikan Tahun 2021	II – 53
Diagram II.2.	Angka Partisipasi Murni (APM) Berdasarkan Jenjang PendidikanTahun 2021	II – 56
Diagram II.3.	Jumlah Fasilitas Kesehatan di Sulawesi Selatan Tahun 2021	II – 78
Diagram II.4.	Kondisi Jaringan Irigasi DI Kewenangan Provinsi	II – 86
Diagram II.5.	Kondisi Jaringan Jalan Kewenangan Provinsi	II – 94
Diagram II.6.	Jumlah Koperasi Aktif dan Tidak Aktif	II – 180

BAB I

PENDAHULUAN

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR SULAWESI SELATAN NOMOR 20 TAHUN 2022 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2023

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan merupakan sebuah proses yang direncanakan dalam rangka melakukan perubahan yang mengandung makna adanya kemajuan/perbaikan, pertumbuhan mencapai kondisi yang lebih baik dibanding keadaan sebelumnya. Aspek pembangunan meliputi sosial, budaya, ekonomi, infrastruktur, pertahanan dan keamanan serta politik sampai pada perkembangan adanya penyelarasan dengan konservasi lingkungan. Nilai dalam pembangunan adalah optimalisasi sumberdaya dengan tetap menjaga kesinambungan serta kualitas lingkungan yang baik. Perencanaan Pembangunan Daerah secara umum merupakan suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai stakeholder pembangunan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam suatu daerah dalam jangka waktu tertentu. Lebih lanjut lagi, pembangunan yang dilakukan di daerah, diharapkan mampu mengatasi berbagai permasalahan yang di hadapi dan mengembangkan potensi yang dimiliki guna meningkatkan daya saing daerah dalam rangka harus mendukung pelaksanaan pembangunan untuk mencapai cita-cita bersama sebagai suatu bangsa.

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada Pasal 260 ayat 1, menyatakan bahwa daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Rencana pembangunan daerah dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, dan berwawasan lingkungan. Perencanaan pembangunan daerah dilakukan dengan prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dalam. sistem perencanaan pembangunan nasional;
2. Perencanaan pembangunan daerah kabupaten/kota merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan daerah;
3. Perencanaan pembangunan daerah dilakukan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing;
4. Perencanaan pembangunan daerah mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah;
5. Perencanaan pembangunan daerah dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki daerah, sesuai dinamika perkembangan daerah dan nasional;

6. Perencanaan pembangunan daerah dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, berkeadilan, dan berkelanjutan dengan memperhatikan pemberdayaan perempuan, anak dan disabilitas;
7. Perencanaan pembangunan daerah dirumuskan dengan spesifik (specific), terukur (measurable), dapat dilaksanakan (achievable), memperhatikan ketersediaan sumber daya (resources availability) dan memperhatikan fungsi waktu (times), yang disingkat SMART.

Sesuai amanat Pasal 263 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dokumen perencanaan pembangunan terdiri atas: Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk pembangunan 20 Tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk pembangunan 5 (lima) tahun dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk pembangunan tahunan.

RKPD merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan program strategis nasional.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023 disusun dengan memperhatikan hasil evaluasi target dan capaian pembangunan tahun 2021 serta target akhir RPJMD Prov. Sulsel Tahun 2018-2023, sehingga seluruh kebijakan, strategi dan program/kegiatan/sub kegiatan pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2023 akan fokus pada pencapaian target akhir Visi Misi Kepala Daerah yang tertuang Dalam RPJMD dengan focus pada pemantapan kesejahteraan melalui pembangunan manusia yang produktif dan berkarakter sesuai yang tertuang pada arah kebijakan Tahun 2023 pada RPJMD Prov. Sulsel Tahun 2018-2023. Selain itu, Sebagai gambaran awal untuk capaian Indikator Ekonomi Makro Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021 yaitu: Pertumbuhan Ekonomi 4,65%, Tingkat Kemiskinan 8,53% (September), Tingkat Pengangguran Terbuka 5,72, Gini Rasio 0,382, Indeks Pembangunan Manusia 72,24 dan PDRB Perkapita (ADHB) 59,66 Juta/Rp. Selain memperhatikan capaian indicator ekonomi makro, Penyusunan RKPD Prov. Sulsel Tahun 2023 juga diselaraskan dengan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023, RPJMN 2020-2024 dan mendukung pada pencapaian Agenda Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/*Sustainable Development Goals* (SDGs), *Road Map* Reformasi Birokrasi Nasional Tahun 2020-2024, serta implementasi peraturan perundang-undangan yang terbaru yang relevan dengan Penyusunan RKPD.

Dokumen ini mempunyai kedudukan, peran, dan fungsi yang sangat strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagai berikut:

1. Secara substansial, memuat arah kebijakan ekonomi dan keuangan daerah, rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pagu indikatif, kelompok sasaran, lokasi kegiatan, prakiraan maju, dan Perangkat Daerah penanggung jawab yang wajib dilaksanakan pemerintahan daerah dalam 1 (satu) tahun;

2. Secara normatif, menjadi dasar penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang akan diusulkan oleh kepala daerah untuk disepakati bersama dengan DPRD sebagai landasan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD);
3. Secara operasional, memuat arahan untuk peningkatan kinerja pemerintahan dibidang pelayanan dan pemberdayaan masyarakat serta pemerintah daerah yang menjadi tanggung jawab masing-masing kepala perangkat daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya yang ditetapkan dalam Renja Perangkat Daerah; dan
4. Secara faktual, menjadi tolok ukur untuk menilai capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah merealisasikan program dan kegiatan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Penyusunan dokumen RKPD 2023 mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang mengamanatkan bahwa RKPD disusun dengan tahapan yaitu, persiapan penyusunan, penyusunan rancangan awal, penyusunan rancangan, Pelaksanaan Musrenbang, perumusan rancangan akhir, dan penetapan.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023 merupakan penjabaran tahun ke V (ke-lima) atau tahun akhir pelaksanaan RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018 – 2023 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023 yang dalam pelaksanaannya, Peraturan Daerah tentang RPJMD dilakukan perubahan dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 Tentang RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023, sehingga dalam penyusunan RKPD Tahun 2023 telah mengakomodir tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan dan program perangkat daerah serta target kinerja pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam Perda perubahan RPJMD Prov. Sulsel Tahun 2018-2023.

RKPD ini merupakan pedoman dalam Penyusunan Rencana Kerja perangkat Daerah Serta menjadi acuan di dalam penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Penentuan Prioritas dan Plafond Anggaran Sementara (PPAS). Selanjutnya, KUA dan PPAS yang telah disepakati akan digunakan sebagai acuan dalam proses penyusunan RAPBD Tahun Anggaran 2023.

Dalam rangka memenuhi indikator penilaian pada Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) yang sejalan dengan amanat Pasal 12 Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 86 Tahun 2017, maka dokumen RKPD Prov. Sulsel Tahun 2023 disusun berorientasi pada substansi dengan menggunakan pendekatan Holistik-Tematik, Integratif, dan Spasial (THIS) yang lebih dirinci diuraikan pada pembahasan arah kebijakan pembangunan kab/kota.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Penyusunan RKPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023 didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Tenggara dan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2102) juncto Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Tenggara dan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara Tengah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

12. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
13. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
14. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757)
15. Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6139);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
20. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20l9 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
22. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);

23. Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
24. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 259);
25. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
26. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indinesia Tahun 2019 Nomor 112);
27. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indinesia Tahun 2020 Nomor 10);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarustamaan Gender Di Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarustamaan Gender Di Daerah;
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 1114);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 Tentang Kode Dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1327);
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 1447);
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019

tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 288);

34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 581);
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 496);
38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2021 Nomor 1419);
39. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2022 tentang Rancanngan Rencana Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 486);
40. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023;
41. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
42. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2028 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008 Nomor 10, Tambahan lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 243), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan 2008-2028 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015 Nomor 7, Tambahan lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 283);
43. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Propinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 286);
44. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 293), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor

11 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 309);

45. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 314);
46. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 321).

1.3 Hubungan Antar Dokumen

Sistem Perencanaan Pembangunan adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat baik di tingkat pusat maupun daerah. Sebagaimana disebutkan pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, hubungan antar dokumen perencanaan daerah terdiri atas dokumen perencanaan yang berdimensi jangka panjang yakni 20 (dua puluh) tahun, perencanaan jangka menengah yakni 5 (lima) tahun, dan dokumen perencanaan jangka pendek (operasional) yang berdimensi tahunan yakni 1 (satu) tahun. Sedangkan berdasarkan struktur, dokumen perencanaan dibagi atas dokumen perencanaan berskala nasional dan dokumen perencanaan berskala daerah.

RKPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023 disusun dengan berpedoman pada Perubahan RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023, Perubahan RTRW Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009 – 2029, arah kebijakan dan isu strategis RKP Tahun 2023, dan RPJMN Tahun 2020-2024.

Adapun hubungan antara dokumen dalam penyusunan RKPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022, dapat dilihat pada gambar dibawah ini:

Gambar 1.1
Hubungan Antar Dokumen RKPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023

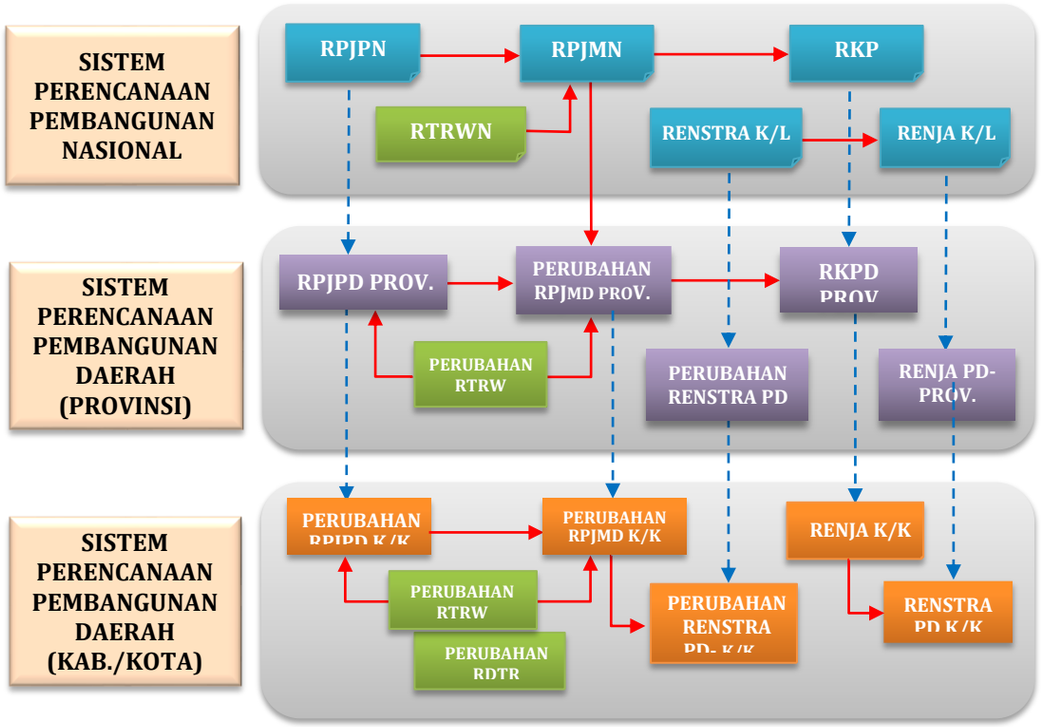

Sumber: Permendagri 86 Tahun 2017, diolah

Perencanaan pembangunan daerah dilakukan pemerintah daerah bersama para pemangku kepentingan di daerah berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing, selain itu juga dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki daerah, sesuai dinamika perkembangan lingkungan internal maupun eksternal baik di tingkat regional, nasional maupun internasional. Penyusunan Dokumen RKPD berpedoman pada RKP Tahun 2023 yang terkait dengan program strategis, kegiatan serta tujuan dan sasaran pembangunan, selain itu juga menyangkut penyelarasan, sinergi dan sinkronisasi kebijakan Pemerintah Daerah dengan kebijakan Pemerintah Pusat.

Perencanaan dan penganggaran daerah merupakan cermin dari efektifitas pengelolaan keuangan daerah yang baik untuk menunjang keberhasilan desentralisasi fiskal. Proses perencanaan dimulai dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dengan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN). RPJPD merupakan suatu dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun yang digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk setiap jangka waktu 5 (lima) tahun. RPJMD kemudian dijabarkan kedalam RKPD untuk setiap tahunnya. Sesuai dengan Pasal 105 ayat 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 mengamanahkan bahwa Peraturan Gubernur tentang RKPD provinsi dijadikan pedoman penyusunan Rancangan Kebijakan Umum APBD provinsi serta Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara provinsi, sebagai landasan penyusunan rancangan APBD yang akan dibahas antara Gubenur dengan DPRD sebelum ditetapkan menjadi Perda APBD. Adapun hubungan antara dokumen perencanaan dan penganggaran, dapat dilihat pada gambar dibawah ini:

Gambar 1.2
Hubungan Antara Dokumen Perencanaan Dan Penganggaran

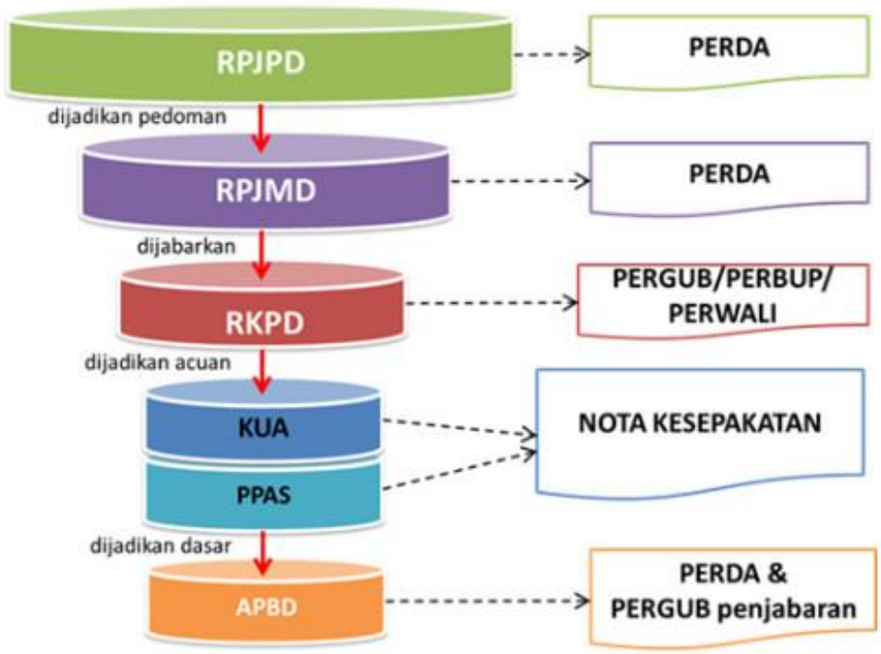

Sumber: Permendagri 86 Tahun 2017, diolah

1.4 Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya RKPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022 sebagai berikut:

1. Penjabaran dari Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)Prov. Sulsel Tahun 2018-2023;
2. Pedoman perumusan penyempurnaan Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah Tahun 2023;
3. Pedoman penyelarasan prioritas pembangunan Provinsi dengan kabupaten/kota tahun 2023; dan
4. Pedoman penyusunan Rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) Tahun 2023 serta Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2023.

Adapun tujuan dari RKPD Provinsi Sulawesi Selatan:

1. Mewujudkan efisiensi dan efektifitas dalam perencanaan alokasi sumberdaya dalam pembangunan daerah;
2. Menjadi acuan bagi seluruh pelaku pembangunan dalam menentukan prioritas program dan kegiatan Tahun 2023;
3. Menciptakan iklim pemerintahan yang partisipatif, transparansi, responsive dan kondusif dalam melaksanakan pembangunan yang berkelanjutan;
4. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan;
5. Sebagai instrument dalam melakukan evaluasi kinerja penyelengaraan pemerintahan daerah;
6. Mewujudkan pencapaian target dan sasaran pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan.

1.5 Sistematika Penyusunan Dokumen RKPD

RKPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023, disusun dengan mengacu pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 pada Lampiran C.3 Penyajian Dokumen RKPD dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN; Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan dokumen RKPD agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik. Pada Sub Bab Latar Belakang mengemukakan pengertian ringkas tentang RKPD, proses penyusunan RKPD, kedudukan RKPD tahun rencana dalam periode dokumen RPJMD, keterkaitan antara dokumen RKPD dengan dokumen RPJMD, Renstra Perangkat Daerah, Renja Perangkat Daerah serta tindaklanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD. Pada Sub Bab Dasar Hukum Penyusunan memberikan uraian ringkas tentang dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan RKPD, baik yang berskala nasional, maupun lokal. Pada Sub Bab Hubungan Antar Dokumen menjelaskan hubungan RKPD dengan dokumen lain yang relevan beserta penjelasannya. Pada Sub Bab Maksud dan Tujuan menjelaskan uraian ringkas tentang tujuan dan sasaran penyusunan dokumen RKPD bagi daerah. Pada Sub Bab Sistematika mengemukakan penyusunan dokumen RKPD terkait dengan pengaturan bab serta garis besar isi setiap bab didalamnya.

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH; Bab ini menjelaskan Evaluasi pelaksanaan RKPD yang menguraikan tentang hasil evaluasi RKPD tahun lalu, selain itu juga memperhatikan dokumen RPJMD dan dokumen RKPD tahun berjalan sebagai bahan acuan serta menjelaskan gambaran kondisi umum kondisi daerah meliputi aspek Geografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, aspek daya saing daerah dan Evaluasi pelaksanaan program kegiatan RKPD sampai tahun berjalan dan realisasi RPJMD serta Permasalahan pembangunan daerah.

BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH; Bab ini menjelaskan tentang kondisi ekonomi tahun lalu dan perkiraan tahun berjalan, yang antara lain mencakup indikator pertumbuhan ekonomi daerah, sumber-sumber pendapatan dan kebijakan pemerintah daerah yang diperlukan dalam pembangunan perekonomian daerah meliputi pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah.

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH; Bab ini Mengemukakan secara eksplisit perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah berdasarkan hasil analisis terhadap hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD, identifikasi permasalahan ditingkat daerah dan nasional, rancangan kerangka ekonomi daerah beserta kerangka pendanaan.

BAB V ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KABUPATEN/KOTA; Bab ini memberikan gambaran tentang kondisi pengembangan wilayah Provinsi Sulawesi Selatan, arah pengembangan wilayah Provinsi Suawesi Selatan dan sasaran pembangunan Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan.

BAB VI RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH; Bab ini Mengemukakan secara eksplisit rencana program dan kegiatan prioritas daerah yang disusun

berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan, kedudukan tahun rencana (RKPD) dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH; Bab ini menggambarkan penetapan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah bertujuan untuk memberi panduan dalam pencapaian kinerja tahunan yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir tahun perencanaan.

BAB VIII PENUTUP; Bab ini menjelaskan kaidah pelaksanaan dan kesimpulan dokumen yang menjadi harapan berkenaan dengan pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023.

BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

BAB II
GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1. Kondisi Umum Daerah

2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi

2.1.1.1 Karakteristik Lokasi Wilayah Sulawesi Selatan

Provinsi Sulawesi Selatan yang terletak dibagian selatan semenanjung pulau Sulawesi, merupakan salah satu lokasi wilayah yang strategis ditengah-tengah kepulauan Indonesia dan sekaligus menjadi jembatan penghubung antara kawasan barat dan timur Indonesia, sehingga wilayah ini ditetapkan sebagai pintu gerbang Kawasan Timur Indonesia (KTI) yang mempunyai luas wilayah sekitar 45.704,16 Km^2 dan secara administratif terbagi 21 wilayah Kabupaten, dan 3 wilayah kota. Kabupaten Luwu Utara merupakan daerah dengan wilayah terluas dengan luasan sebesar 7.518,71 Km^2 atau sebesar 16,45 persen dari luas wilayah Sulawesi Selatan, sedangkan Kota Parepare merupakan daerah dengan wilayah terkecil dengan luasan sebesar 89,69 Km^2 atau 0,19 persen dari luas wilayah Provinsi Sulawesi Selatan.

Secara Geografis Provinsi Sulawesi Selatan terletak di antara 0°12’ Lintang Selatan -8° Lintang Selatan dan 116°48’ Bujur Timur – 122°36’ Bujur Timur, dengan batas wilayah:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Provinsi Sulawesi Tengah
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Laut Flores
- Sebelah Timur berbatasan dengan Teluk Bone dan Provinsi Sulawesi Tenggara
- Sebelah Barat berbatasan dengan Provinsi Sulawesi Barat dan Selat Makassar

Gambar II. 1
Peta Administrasi Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan

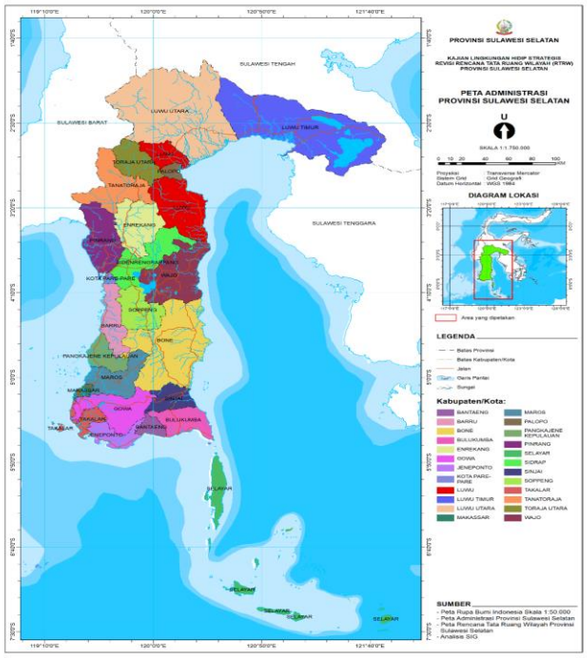

Sumber : Dokumen KLHS Revisi RTRW Provinsi Sulawesi Selatan

Posisi geografis tersebut menjadikan Sulawesi Selatan sebagai hub distribusi barang dan jasa dari dan ke timur-barat Indonesia wilayah perdagangan dan jasa, karena posisi Sulawesi Selatan yang berbatasan langsung dengan Selat Makassar merupakan salah satu jalur pelayaran internasional, dan berfungsi sebagai titik simpul transportasi laut dan udara yang menghubungkan Asia Timur dan Benua Australia.

Luasan wilayah Provinsi Sulawesi Selatan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2021 yang diatur dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-145 Tahun 2022 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau Tahun 2021 menetapkan luasan wilayah Provinsi Sulawesi Selatan sebesar 45.704,16 Km^2.

Tabel II.1.
Data Wilayah Administrasi Pemerintah Menurut Kabupaten/Kota

No.	Kabupaten/Kota	Luas Wilayah		Jumlah Penduduk (Jiwa)
		Km^2	%	
1	Kepulauan Selayar	1.180,52	2,58	140.180
2	Bulukumba	1.170,71	2,56	445.699
3	Bantaeng	395,96	0,86	201.799
4	Jeneponto	797,50	1,74	415.294
5	Takalar	554,78	1,21	304.856
6	Gowa	1.811,38	3,96	768.682
7	Sinjai	864,72	1,89	265.026
8	Maros	1.435,04	3,13	388.466
9	Pangkajene Kepulauan	889,01	1,94	351.983
10	Barru	1.202,16	2,63	189.208
11	Bone	4.571,03	10,00	812.842
12	Soppeng	1.370,41	2,99	237.720
13	Wajo	2.628,44	5,75	383.005
14	Sidenreng Rappang	1.790,31	3,91	320.645
15	Pinrang	1.884,36	4,12	407.882
16	Enrekang	1.821,53	3,98	227.927
17	Luwu	3.048,49	6,67	372.723
18	Tana Toraja	2.088,87	4,57	270.489
19	Luwu Utara	7.518,71	16,45	329.703
20	Luwu Timur	6.965,81	15,24	304.727
21	Toraja Utara	1.196,13	2,61	254.936
22	Makassar	177,96	0,38	1.462.442
23	Pare Pare	89,69	0,19	153.459
24	Palopo	250,64	0,54	182.928
Sulawesi Selatan		**45.704,16**	**100**	**9.192.621**

Sumber : Keputusan Menteri Dalam Negeri 050-145 Tahun 2022

Topografi merupakan salah satu faktor pembatas pemanfaatan ruang untuk pembangunan. Daerah yang memiliki topografi miring dan berbukit memiliki lapisan tanah yang lebih tipis dan memiliki tingkat erosi yang tinggi yang dipengaruhi oleh kecepatan pengaliran air. Kondisi topografi wilayah Provinsi Sulawesi Selatan pada umumnya memiliki permukaan yang bervariasi. Provinsi Sulawesi Selatan membentang dari ketinggian antara 0-500 mdpl berupa dataran rendah, 500-1000 mdpl merupakan dataran tinggi dan ketinggian diatas 1000 mdpl merupakan kawasan pegunungan dan perbukitan.

Berdasarkan tingkat kemiringan, wilayah Provinsi Sulawesi Selatan dengan kemiringan 0- 2% menempati luasan terbesar, dimana Kabupaten Wajo mendominasi dalam tingkat kemiringan ini sebesar 203.225 Ha atau sekitar 15,27% dari total luasan dalam tingkat kemiringan 0-2% ini. Kemudian disusul tingkat kemiringan 15-30% dengan dominasi luasan berada di Kabupaten Luwu Utara sebesar 280.873 Ha atau sekitar 22,84% dari total luasan dalam tingkat kemiringan 15-30%. Selanjutnya tingkat kemiringan 5-15% didominasi oleh Kabupaten Luwu Timur dengan 171.832 Ha atau 16,84%. Sementara tingkat kemiringan 30- 40% menempati luasan terkecil.

Tabel II.2.
Kondisi Kemiringan Lereng di Provinsi Sulawesi Selatan

No.	Kemiringan Lereng (%)	Luasan	
		Ha	%
1	0 – 2%	1.330.065,30	29,27
2	2 – 5%	406.193,15	8,94
3	5 – 15%	1.019.915,58	22,44
4	15 – 30%	1.229.223,73	27,05
5	30 -40%	264.084,14	5,81
6	> 40%	294.884,78	6,49
Sulawesi Selatan		**4.554.366,68**	**100**

Sumber : Dokumen KLHS Revisi RTRW Provinsi Sulawesi Selatan

Gambar II. 2
Peta Kelas Lereng Provinsi Sulawesi Selatan

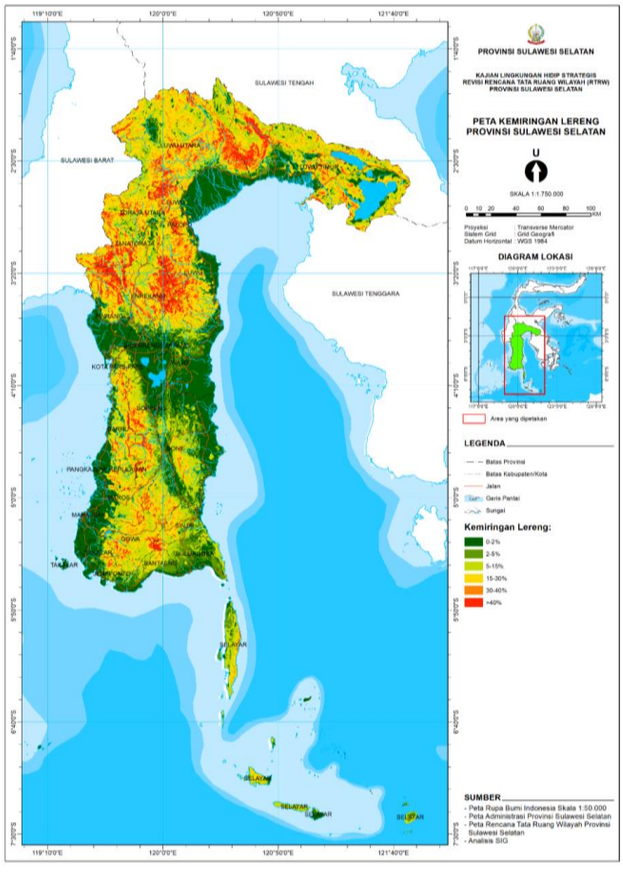

Sumber : Dokumen KLHS Revisi RTRW Provinsi Sulawesi Selatan

Berdasarkan kondisi ketinggian lahan, wilayah Sulawesi Selatan terbagi dalam 7 (tujuh) kategori yang didominasi oleh wilayah dengan ketinggian 0 – 300 mdpl seluas 2.176.516,80 Ha atau sebesar 47,89 persen dari luas wilayah Provinsi Sulawesi Selatan, sedangkan ketinggian lahan yang paling kecil luasan wilayahnya adalah wilayah dengan ketinggian di atas 2.500 mdpl seluas 20.600,07 Ha atau sebesar 0,45 persen dari luas wilayah Sulawesi Selatan.

Tabel II.3.
Kondisi Topografi di Provinsi Sulawesi Selatan

No.	Elevasi (mdpl)	Luas Wilayah	
		Ha	%
1	0 -300	2.176.516,80	47,89
2	300 – 500	521.673,90	11,48
3	500 – 1000	759.588,35	16,71
4	1000 -1500	574.747,71	12,65
5	1500 – 2000	355.551,01	7,82
6	2000 – 2500	135.688,83	2,99
7	> 2500	20.600,07	0,45
Sulawesi Selatan		**4.554.366,68**	**100**

Sumber : Dokumen KLHS Revisi RTRW Provinsi Sulawesi Selatan

Gambar II. 3
Peta Topografi Provinsi Sulawesi Selatan

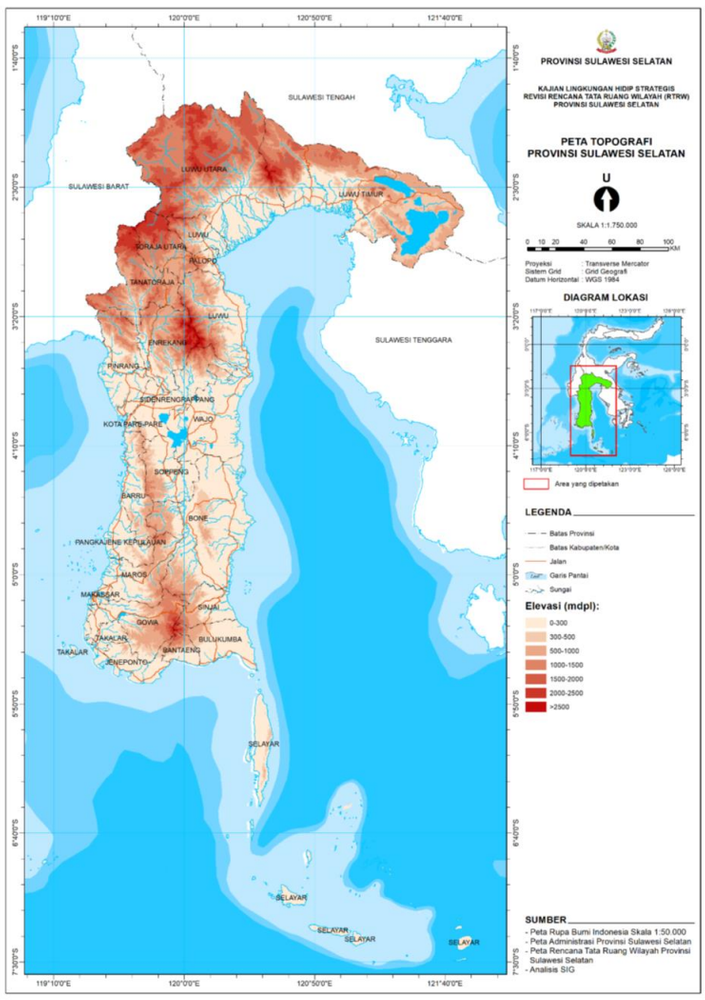

Sumber: Dokumen KLHS Revisi RTRW Provinsi Sulawesi Selatan

Kondisi hidrologi Provinsi Sulawesi Selatan sangat berkaitan dengan tipe iklim dan kondisi geologi yang ada di wilayah ini. Kondisi hidrologi permukaan ditentukan oleh sungai-sungai yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan. Provinsi Sulawesi Selatan memiliki 73 Daerah Aliran Sungai (DAS) yang tersebar di 24 Kabupaten/kota, diantara DAS tersebut terdapat 2 DAS prioritas dari 15 DAS prioritas nasional yaitu DAS Jeneberang dan DAS Saddang. DAS Saddang merupakan DAS terbesar di Sulawesi Selatan dengan luasan sekitar 649.320 Ha yang melintasi 11 wilayah Kabupaten/kota yaitu Kabupaten Maros, Pangkajene Kepulauan, Barru, Bone, Soppeng, Sidenreng Rappang, Pinrang, Enrekang, Tana Toraja, Toraja Utara dan Kota Parepare.

Gambar II. 4
Peta Daerah Aliran Sungai (DAS) Sulawesi Selatan

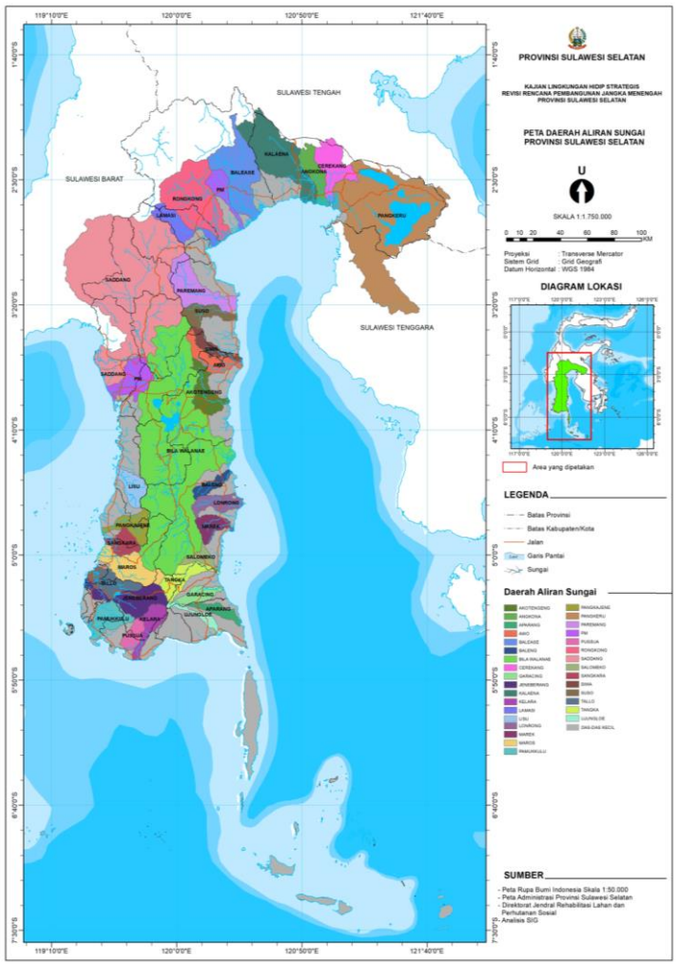

Sumber : KLHS Revisi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Sulawesi Selatan

Berdasarkan aspek klimatologi, Provinsi Sulawesi Selatan pada umumnya sama dengan daerah lain yang ada di Indonesia, mempunyai dua musim yaitu musim kemarau yang terjadi pada bulan Juni sampai September dan musim penghujan yang terjadi pada bulan Desember sampai dengan Maret. Berdasarkan klasifikasi Oldeman, Provinsi Sulawesi Selatan memiliki 5 jenis iklim,yaitu: Tipe Iklim A, Tipe iklim ini dinotasikan sebagai iklim sangat basah dengan curah hujan rata-rata pada iklim tipe A adalah 3500 – 4000 mm/tahun. Wilayah yang termasuk ke dalam tipe ini adalah Kabupaten Luwu, Luwu Utara, Luwu Timur, dan Enrekang. Tipe iklim B, Tipe iklim ini dinyatakan sebagai iklim basah dengan curah hujan rata-rata 3000 – 3500 mm/tahun. Wilayah

yang memiliki karakteristik iklim basah antara lain, yaitu: Kabupaten Tana Toraja, Toraja Utara, Luwu Utara, Luwu Timur, Gowa, Bulukumba, dan Bantaeng. Tipe iklim C, Tipe ini merupakan tipe iklim agak basah, dengan dengan curah hujan rata-rata 2500 – 3000 mm/tahun. Wilayah yang masuk ke dalam iklim C terdiri dari Kabupaten Wajo, Luwu, Tana Toraja, Bulukumba, Bantaeng, Barru, Pangkajene Kepulauan, Enrekang, Maros, Makassar, Jeneponto, Sinjai, Gowa, Toraja Utara, Parepare, dan Kepulauan Selayar. Tipe iklim D, Tipe iklim ini memiliki curah hujan rata-rata 2000 – 2500 mm/tahun. Wilayah yang masuk ke dalam tipe iklim D meliputi Kabupaten Wajo, Bone, Soppeng, Luwu, Tana Toraja, Enrekang, Soppeng, Sinjai, Maros,Bulukumba, Jeneponto, Takalar, Makassar, Pangkajene Kepulauan, dan Gowa. Tipe iklim E, Tipe iklim ini merupakan iklim kering yang memiliki curah hujan rata-rata antara 1500 – 2000 mm/tahun. Tipe iklim E terdapat di Kabupaten Maros, Bone, Enrekang, Kepulauan Selayar, Bantaeng, dan Maros dengan curah hujan rata-rata 2500 – 3000 mm/tahun.

2.1.1.2 Wilayah Rawan Bencana

Berdasarkan proses terbentuknya Pulau Sulawesi, maka terdapat garis sesar gempa memanjang dari perairan kanan dan kiri Pulau Selayar menuju ke utara melewati Kabupaten Bulukumba, Kabupaten Soppeng, Kabupaten Sidrap, bercabang di Kabupaten Enrekang yang merupakan kawasan pengaruh gempa. Garis sesar gempa ini menunjukkan daerah rawan gempa di daerah yang melewatinya dan berpusat di Kabupaten Bone, Kabupaten Pinrang, Kabupaten Tana Toraja, Kabupaten Luwu, Kabupaten Luwu Utara. Selain daripada itu garis sesar di sebelah barat Kabupaten Pinrang dan di sebelah selatan Selat Kota Makassar menyebabkan daerah pantai di Kabupaten Pinrang, Kabupaten Bulukumba, dan Kabupaten Kepulauan Selayar serta Kota Makassar rawan terhadap bencana Tsunami.

Berdasarkan data BPBD Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2021, jumlah kejadian bencana di Sulawesi Selatan sebanyak 629 kejadian, yang didominasi oleh bencana banjir sejumlah 149 kejadian, bencana banjir bandang sejumlah 3 kejadian, bencana kebakaran sejumlah 148 kejadian, bencana tanah longsor sejumlah 101 kali kejadian, bencana gempa bumi sejumlah 5 kejadian, bencana puting beliung sejumlah 58 kejadian, bencana angin kencang sejumlah 147 kejadian, bencana abrasi sejumlah 10 kejadian, bencana gelombang pasang sejumlah 5 kejadian. Bencana banjir merupakan bencana yang paling banyak menimbulkan kerugian yaitu jumlah korban jiwa yang terdampak dan mengungsi sebanyak 121.474 orang dan sejumlah 58.259 rumah dan sarana prasarana yang terdampak banjir. Tingkat kejadian bencana di Provinsi Sulawesi Selatan yang disajikan sebagai berikut:

Tabel II.4.
Jumlah Kejadian Bencana di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021

No.	Kabupaten / Kota	Jumlah									
		Banjir	Gelombang Pasang	Tanah Longsor	Banjir Bandang	Cuaca Ekstrim	Gempa Bumi	Kebakaran	Angin Kencang	Putting Beliung	Abrasi
1	Kep. Selayar	1	-	2	-	-	1	5	16	-	1
2	Bulukumba	2	1	1	-	1	-	1	8	3	2
3	Bantaeng	5	-	3	-	-	-	1	-	-	-
4	Jeneponto	3	-	-	-	-	-	-	4	2	-
5	Takalar	4	-	-	-	-	-	6	3	4	4
6	Gowa	3	-	-	-	-	-	1	-	-	-
7	Sinjai	4	-	11	-	-	-	1	7	1	-
8	Maros	1	-	-	-	-	-	4	11	-	-
9	Pangkep	4	1	-	-	-	-	11	16	10	-
10	Barru	3	-	3	-	1	-	4	6	4	1
11	Bone	7	-	7	-	-	-	19	14	11	-
12	Soppeng	3	-	-	-	-	-	-	-	2	-
13	Wajo	25	-	2	1	-	-	5	19	5	-
14	Sidrap	6	-	3	-	-	-	20	8	-	-
15	Pinrang	5	-	9	-	-	-	17	9	1	2
16	Enrekang	2	-	4	1	-	-	5	2	-	-
17	Luwu	15	-	3	1	-	-	-	2	3	-
18	Tana Toraja	6	-	42	-	-	-	6	4	-	-
19	Luwu Utara	39	1	4	-	-	-	9	4	6	-
20	Luwu Timur	-	-	1	-	-	4	7	5	-	-
21	Toraja Utara	1	-	2	-	-	-	2	-	1	-
22	Makassar	4	-	-	-	-	-	24	1	4	-
23	Parepare	3	2	2	-	-	-	-	6	-	-
24	Palopo	3	-	2	-	-	-	-	2	1	-
JUMLAH		**149**	**5**	**101**	**3**	**2**	**5**	**148**	**147**	**58**	**10**

Sumber: BPBD Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2021

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa tingkat bencana di Provinsi Sulawesi Selatan untuk bencana yang sering terjadi di Provinsi Sulawesi Selatan yakni banjir, tanah longsor, angin kencang dan kebakaran. Jika diamati pada distribusi peta rawan banjir dan longsor, dapat dilihat gambaran bahwa distribusi spasial kejadian banjir sering terjadi didaerah-daerah yang relatif datar di seluruh wilayah Kabupaten khususnya di bagian selatan Provinsi Sulawesi Selatan sedangkan untuk kejadian longsor umumnya terjadi pada morfologi perbukitan di Provinsi Sulawesi Selatan, khususnya pada wilayah-wilayah Kabupaten yang berada di bagian utara Provinsi Sulawesi Selatan.

Pemerintah melalui Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, mengatur penyelenggaraan penanggulangan bencana pada tahap pasca bencana yang meliputi rehabilitasi dan rekonstruksi. Pelaksanaan rekonstruksi pascabencana dilakukan untuk memacu kembali perkembangan kegiatan perekonomian, sosial, dan budaya dengan mengacu pada Rencana Tata Ruang. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan telah menetapkan jalur evakuasi bencana pada struktur ruang wilayah dan kawasan rawan bencana pada pola

ruang wilayah. Berdasarkan arahan peruntukan kawasan permukiman pada RTRWK, maka lokasi potensi relokasi pasca bencana pada Kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan adalah:

Tabel II.5.
Lokasi Potensi Kawasan Relokasi Bencana Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2021

No.	Kabupaten/-Kota	Risiko Bencana	Lokasi Potensi Relokasi Pasca Bencana
1	Kota Makassar	Banjir Cuaca Ekstrim Tsunami	Kecamatan Makassar, Mamajang, Mariso, Rappocini, Ujung Pandang, Biringkanaya, dan Wajo
2	Kota Parepare	Cuaca Ekstrim Longsor Kebakaran	Kel. Kampung Pisang, Kel. Ujung Lare, Kel. Lakessi, Kel. Kampung Baru, Kel. Watang Soreang, Kel. Ujung Bulu, Kel. Tiro Sompe, Kel. Mallusetasi, Kel. Cappa Galung, dan Kel. Ujung Sabbang.
3	Kota Palopo	Banjir Longsor Kebakaran Kekeringan Cuaca Ekstrim	Kec. Telluwanua; Kec. Wara, Kec. Wara Selatan, Kec. Wara Barat, Kec. Wara Utara, Kec. Mungkajang, Kec. Sendana
4	Barru	Longsor Banjir Cuaca Ekstrim Kebakaran	Kelurahan Lalolang, Sepe'E, Lompo Riaja, Desa Batupute, dan Desa Nepo
5	Soppeng	Cuaca Ekstrim Gempa Banjir Longsor	Desa Watu dan Desa Goarie Kecamatan Marioriwawo; Desa Baringeng dan Desa Tetewatu di Kecamatan Lilirilau; Desa Panincong di Kecamatan Marioriawa;
6	Wajo	Banjir Cuaca Ekstrim Gempa	Kelurahan Maroangin, Kec. Pammana, Kelurahan Solo Kec. Bola, Kel. Jalang dan Salo Bulo Kec. Sajoanging, dan Kel. Peneki dan Kel. Botto, Kec. Takkalalla
7	Sidrap	Banjir Cuaca Ekstrim Gempa	Desa Kulo, Kec. Kulo; Kaw. Baranti Kec. Baranti; Kaw. Bilokka, Kec. Panca Lautang
8	Enrekang	Longsor Cuaca Ekstrim Banjir Kebakaran	Desa Kalosi, Pana di Kec. Alla; Desa Baba di Kec. Cendana; Desa Kaluppang di Kec. Maiwa; Desa Kotu, Rurah, Cendana, Sossok, Singki di Kec. Anggeraja
9	Pinrang	Longsor Cuaca Ekstrim Banjir Gempa	Kawasan Waetuoe, Kec. Lanrisang
10	Toraja Utara	Longsor Cuaca Ekstrim Kebakaran	Kawasan Rantebua Sanggalangi, Kec. Rantebua
11	Tana Toraja	Longsor Cuaca Ekstrim Kebakaran	Kec. Makale Utara; Kec. Malimbong Belepe; Kec. Mappak; Kec. Mengkendek; Kec. Rano; Kec. Rantetayo
12	Luwu	Longsor Banjir Cuaca Ekstrim Abrasi	Kec. Latimojong, Kec. Larompong, Kec. Larompong Selatan, Kec. Bajo, Kec. Bajo Barat, Kec. Suli, Kec. Suli Barat, Kec. Bastem, Kec. Bupon, Kec. Bua, Kec. Walenrang Utata, Kec. Walenrang Barat, Kec. Belopa, Kec. Belopa Utara, Kec. Kamanre, Kec. Ponrang, Kec. Ponrang Selatan, Kec. Walenrang Timur, Kec. Lamasi Timur, Kec. Bassesangtempe, Kec. Bassesangtempe Utara

No.	Kabupaten/-Kota	Risiko Bencana	Lokasi Potensi Relokasi Pasca Bencana
13	Luwu Utara	Banjir	Desa Kapidi di Kecamatan Mappedeceng; Desa Pao di Kecamatan Malangke Barat; Desa Baebunta di Kecamatan Baebunta;
		Cuaca Ekstrim	
14	Luwu Timur	Kekeringan	Burau, Wonorejo, Kertoraharjo, Wasuponda, Solo, Kalaena dan Wawondula
		Banjir	
		Longsor	
		Gempa Bumi	
15	Gowa	Longsor	Kaw. Ballabatua, Kec. Bajeng Barat; Kaw. Pencong, Kec. Biring Bulu; Kaw. Ulugalung, Kec. Tompobulu; Kaw. Buki-Buki Kec. Tombolo Pao
		Banjir	
		Cuaca Ekstrim	
		Kekeringan	
16	Takalar	Tsunami	Kec. Polombangkeng Utara; Kec. Polombangkeng Selatan; Kec. Mappakasunggu; Kec. Galesong Selatan, Kec. Mangarabombang
		Banjir	
		Cuaca Ekstrim	
17	Bantaeng	Longsor	Kaw. Bonto Maccini, Kec. Sinoa; Kaw. Bonto Marannu, Kec. Ulu Ere; Kaw. Gantarang Keke, Kec. Gantarang Keke; Kaw. Ulugalung, Kec. Eremerasa
		Banjir	
		Cuaca Ekstrim	
		Kekeringan	
18	Bulukumba	Banjir	Kawasan Tanah Beru, Kec. Bontobahari; Kawasan Palampang, Kec. Rilau Ale
		Cuaca Ekstrim	
		Kekeringan	
19	Sinjai	Longsor	Kaw. Manipi, Kec. Sinjai Barat; Kaw. Bulupoddo, Kec. Bulupoddo; Kaw. Bikeru, Kec. Sinjai Selatan
		Banjir	
		Cuaca Ekstrim	
		Kekeringan	
20	Bone	Banjir	Lalebbata, Kec. Lamuru; Kaw. Pompanua, Kec. Ajangale; Kaw. Bojo, Kec. Kajuara; Kaw. Appala, Kec. Barebbo; Kaw. Bengo, Kec. Bengo; Kaw. Tokaseng, Kec. Tellu Siattinge
		Cuaca Ekstrim	
		Kebakaran	
21	Maros	Longsor	Kaw. Ladange; Kaw. Padaelo; Kaw. Samaenre; Kaw. Barugae; dan Kaw. Batu Putih, Kec. Mallawa
		Banjir	
		Cuaca Ekstrim	
		Kekeringan	
22	Pangkep	Banjir	Kaw. Balang Lompo, Mattiro Sompe, Mattiro Bone, Kec. Liukang Tupabbiring, Kaw. Biraeng, Bontokio, Kalabbirang, Kec. Minasa Te'ne
		Cuaca Ekstrim	
		Kekeringan	
23	Jeneponto	Banjir	Kec. Bangkala, Kec. Bangkala Barat, Kec. Binamu, Kec. Arungkeke, Kaw. Rumbia, Kec. Rumbia; Kaw. Paitana, Kec. Turatea; Kec. Kelara, Kec. Tamalatea; Kaw. Bontoramba, Kec. Bontoramba
		Cuaca Ekstrim	
		Angin Putting Beliung	
		Kekeringan	
24	Selayar	Longsor	Kaw. Matalalang, Kec. Bontoharu; Kaw. Polebungin, Kec. Bontomanai; Kaw. Buki, Kec. Buki
		Banjir	
		Tsunami	
		Kebakaran	

Sumber : Hasil Analisis RTRW Kabupaten/Kota se Provinsi Sulawesi Selatan

2.1.1.3 Kondisi Demografi

Perkembangan jumlah penduduk di Sulawesi Selatan menunjukkan adanya peningkatan setiap tahun, dengan laju pertumbuhan penduduk tahun periode 2017-2021 sebesar 0,55 persen, dimana Jumlah penduduk Sulawesi Selatan pada Tahun 2017 sebesar 8.690.294 jiwa meningkat menjadi sebesar 9.073.508 jiwa pada Tahun 2021. Terdapat 2 kabupaten yang laju pertumbuhan penduduknya berkurang, yaitu Kabupaten Wajo sebesar dan

Kota Makassar sebesar %. Sedangkan 3 kabupaten yang mempunyai Laju pertumbuhan penduduk tertinggi, yaitu Kabupaten Tana Toraja sebesar 1,17%, Kabupaten Palopo sebesar 1,07% dan Kabupaten Luwu Timur sebesar 0,95%.

Tabel II.6.
Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk Menurut Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan, Tahun 2021

No.	Kabupaten/-Kota	Jumlah Penduduk (Ribu)					Laju Pert. Penduduk per Tahun (%)
		2017	2018	2019	2020	2021	
1	Selayar	133,003	134,426	135,624	135.218	136.118	0,49
2	Bulukumba	415,713	418,332	420,603	420.347	421.959	0,43
3	Bantaeng	185,581	186,694	187,626	188.361	189.202	0.45
4	Jeneponto	359,787	361,910	363,792	365.503	367.160	0,73
5	Takalar	292,983	296,059	298,688	296.932	298.717	0,46
6	Gowa	748,200	761,294	772,684	770.864	780.138	0,73
7	Sinjai	241,208	242,776	244,125	244.443	245.501	0,55
8	Maros	346,383	349,985	353,121	354.521	357.320	0,98
9	Pangkep	329,791	332,924	335,514	337.123	339.575	0,53
10	Barru	172,767	173,544	174,323	174.517	175.023	0,44
11	Bone	751,026	755,082	758,589	755.818	757.741	0,47
12	Soppeng	26,466	226,647	226,991	229.143	229.539	0,13
13	Wajo	395,583	396,770	397,814	404.258	406.091	0,06
14	Sidrap	296,125	299,353	301,972	300.914	302.918	0,75
15	Pinrang	372,230	374,985	377,119	378.995	381.114	0,63
16	Enrekang	203,320	205,008	206,387	208.450	209.974	0,78
17	Luwu	356,305	359,405	362,027	366.876	369.924	0,38
18	Tana Toraja	231,519	232,792	234,002	237.913	239.516	1,17
19	Luwu Utara	308,001	310,681	312,883	315.699	318.064	0,49
20	Luwu Timur	287,874	294,207	299,673	298.889	303.479	0,95
21	Toraja Utara	228,414	229,876	231,214	235.456	237.259	0,88
22	Makassar	1,489,011	1,509,262	1,526,677	1.538.207	1.555.088	0,20
23	Pare Pare	142,097	143,831	145,178	145.783	147.090	0,73
24	Palopo	176,907	181,047	184,614	184.532	187.671	1,07
Sulawesi Selatan		**8,690,294**	**8,776,888**	**8,851,240**	**8.888.762**	**9,022, 276**	**0,55**

Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2021

Adapun perbandingan rasio penduduk berdasarkan jenis kelamin menurut kabupaten/kota pada tahun 2021 berdasarkan data yang bersumber dari Dinas Catatan Sipil Provinsi Sulawesi Selatan menunjukkan nilai sebesar 95,60 yang berarti bahwa menunjukkan bahwa terdapat 98 penduduk laki-laki per 100 perempuan.

Tabel II.7.
Rasio Jenis Kelamin Penduduk Menurut Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan, Tahun 2021

No.	Kabupaten/-Kota	Tahun 2021			
		Laki-Laki	Perempuan	Total Jumlah Penduduk	Rasio Jenis Kelamin
1	Selayar	68.906	71.274	140.180	96,68
2	Bulukumba	217.268	228.431	445.699	95,11
3	Bantaeng	99.748	102.051	201.799	97,74
4	Jeneponto	205.586	209.708	415.294	98,03
5	Takalar	148.582	156.274	304.856	95,08
6	Gowa	381.055	387.627	768.682	98,30
7	Sinjai	131.408	133.618	265.026	98,35
8	Maros	397.754	415.088	812.842	95,82
9	Pangkep	194.770	193.696	388.466	100,55
10	Barru	172.685	179.298	351.983	96,31
11	Bone	92.921	96.287	189.208	96,50
12	Soppeng	114.559	123.161	237.720	93,02
13	Wajo	185.851	197.154	383.005	94,27
14	Sidrap	159.189	161.456	320.645	98,60
15	Pinrang	201.389	206.493	407.882	97,53
16	Enrekang	116.009	111.918	227.927	103,66
17	Luwu	187.787	184.936	372.723	101,54
18	Tana Toraja	139.436	131.053	270.489	106,40
19	Luwu Utara	166.669	163.034	329.703	102,23
20	Luwu Timur	157.164	147.563	304.727	106,51
21	Toraja Utara	129.860	125.076	254.936	103,82
22	Makassar	727.970	734.472	1.462.442	99,11
23	Pare Pare	76.098	77.361	153.459	98,37
24	Palopo	91.516	91.412	182.928	100,11
Sulawesi Selatan		4.564.180	4.628.441	9.073.509	98,61

Sumber : Kependudukan dan Catatan Sipil, Tahun 2021

Data penduduk Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2021 menunjukkan adanya perbedaan antara data yang peroleh dari BPS dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

2.1.1.4 Potensi Pengembangan Wilayah

Pengembangan wilayah Provinsi Sulawesi Selatan diarahkan dengan mengacu pada Rencana Tata Ruang, baik Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) maupun Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) Sulawesi Selatan Nomor 3 tahun 2022 untuk mengarahkan pembangunan di Provinsi Sulawesi Selatan dengan memanfaatkan ruang wilayah secara berdaya guna, berhasil guna, serasi, selaras, seimbang, terpadu, dan berkelanjutan dalam

rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, yang bertujuan untuk mewujudkan ruang yang produktif, kompetitif, inklusif, inovatif, dan berkelanjutan melalui pendekatan kemandirian lokal menuju provinsi yang terkemuka di Indonesia.

RPJMN 2020 -2024 mengamanatkan pendekatan pengembangan wilayah melalui dua pendekatan utama, yaitu pendekatan pertumbuhan dan pendekatan pemerataan, sebagaimana tercermin dari pendekatan koridor pertumbuhan dan koridor pemerataan. Koridor pertumbuhan berorientasi untuk memacu pertumbuhan ekonomi nasional melalui percepatan pengembangan kawasan-kawasan pertumbuhan, meliputi 2 Kabupaten dan 1 Kota yaitu Kabupaten Maros dan Kabupaten Gowa serta Kota Makassar yang berada pada Pusat kegiatan Nasional (PKN); 2 Kabupaten dan 1 kota yang berada pada Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) yaitu Kabupaten Barru dan kabupaten Pangkep serta Kota Palopo; dan 5 Kabupaten yang berda pada Pusat Kegiatan Lokal yaitu Kabupaten Luwu Utara, Luwu Timur, Luwu, Pinrang, Wajo, dan Soppeng. Sementara koridor pemerataan berorientasi untuk pemenuhan pelayanan dasar yang lebih merata melalui pengembangan PKW yang berada pada Kabupaten Bone dan Bulukumba, serta pengembangan PKL yang berada di Kabupaten Tana Toraja. Toraja Utara dan Sinjai. Sehingga melalui koridor pengembangan diharapkan terbentuk pusat-pusat pelayanan dasar baru yang menjangkau daerah pelayanan yang lebih luas, pada kabupaten/kota pada koridor pemerataan.

RTRW Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 3 Tahun 2022 merupakan wujud struktur ruang dan pola ruang. Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hirarkis memiliki hubungan fungsional dan pola ruang adalah distribusi peruntukan Ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan Ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan Ruang untuk fungsi budi daya. pembagian pemanfaatan ruang dalam beberapa kawasan sebagaimana terbuat dalam RTRW Provinsi Sulawesi selatan terlihat pada peta berikut.

Gambar II. 5
Pola Ruang Provinsi Sulawesi Selatan

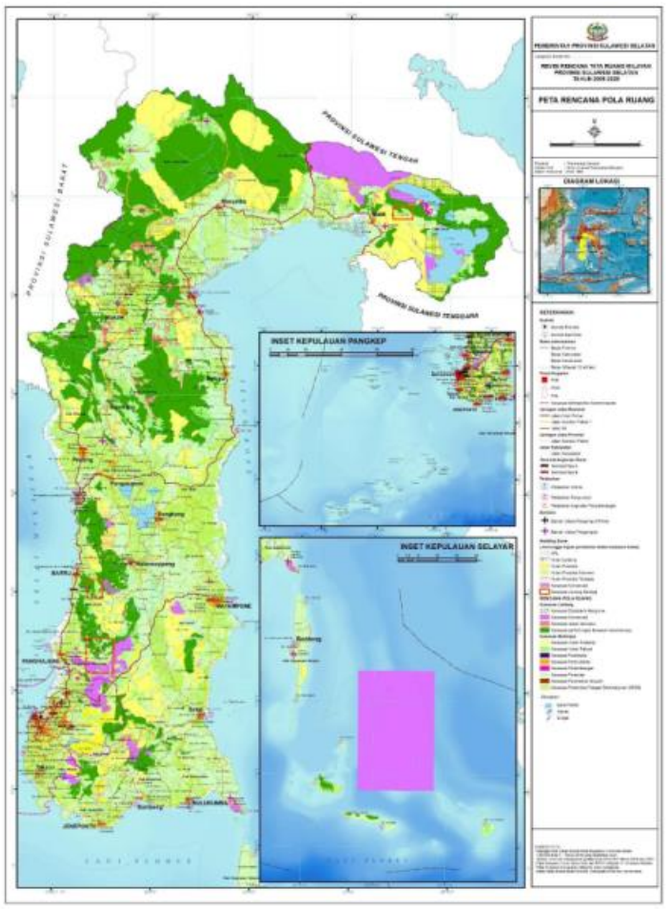

Sumber: KLHS Revisi RTRW Provinsi Sulawesi Selatan

1. Kawasan Pertanian

Kawasan perikanan adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk kegiatan perikanan tangkap dan perikanan budi daya. Termasuk di dalamnya kawasan pengelolaan ekosistem pesisir. Kegiatan perikanan tangkap berdasarkan Perda Nomor 3 Tahun 2022 tentang RTRW Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022 - 2041 dilakukan di perairan Laut kewenangan provinsi sampai dengan 12 (dua belas) mil dari garis pantai meliputi perairan Selat Makasar, Laut Flores, Laut Jawa, dan Teluk Bone, yang merupakan kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apapun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya. Adapun kegiatan perikanan budi daya berupa budi daya Laut dan budi daya payau tersebar di seluruh Wilayah perairan Kabupaten/Kota yang terdiri dari kegiatan untuk membenihkan, memelihara, membesarkan dan/atau membiakkan ikan dan memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol.

Kawasan Strategis Provinsi (KSP) dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi menetapkan kawasan perikanan terpadu pada beberapa wilayah yaitu kawasan perikanan terpadu di kabupaten Pinrang, kawasan perikanan terpadu Pangkajene kepulauan – Maros – Barru, kawasan perikanan terpadu Takalar – Jeneponto, serta kawasan industri perikanan terpadu di pesisir pantai Teluk

Bone yang meliputi Kabupaten Wajo, Kabupaten Bone, Kabupaten Sinjai, Kabupaten Bulukumba, dan Kabupaten Kepulauan Selayar. Disamping itu pengembangan sebagian Kawasan pesisir untuk kegiatan industri bisnis perikanan terpadu di Kabupaten Kepulauan Selayar

Indikasi arahan zonasi untuk Kawasan perikanan disusun dengan memperhatikan: a. diperbolehkan Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan perikanan budi daya dan perikanan tangkap; b. diperbolehkan Pemanfaatan Ruang untuk sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan perikanan; c. diperbolehkan dengan syarat sarana dan utilitas sesuai ketentuan teknis yang berlaku; d. diperbolehkan dengan syarat untuk kegiatan wisata, penelitian, dan pendidikan; e. diperbolehkan dengan syarat Pemanfaatan Ruang untuk permukiman; f. tidak diperbolehkan kegiatan yang mengakibatkan pencemaran dan kerusakan ekosistem perairan; g. tidak diperbolehkan kegiatan yang mengakibatkan terganggunya alur pelayaran, alur migrasi biota dan infrastruktur dalam Laut lainnya; dan h. tidak diperbolehkan kegiatan yang mengganggu akses keluar masuk nelayan tradisional.

2. Kawasan Perikanan

Sumber daya kemaritiman dan kelautan termasuk di dalamnya perikanan merupakan salah satu Sumber Daya Alam (SDA) yang menjadi modal utama dalam pembangunan Sulawesi Selatan. Pengelolaan kawasan perikanan di Sulawesi Selatan diarahkan dengan kebijakan pengembangan perikanan tangkap dan perikanan budidaya, khususnya pada komoditas yang bernilai tinggi untuk dikembangkan sebagai komoditas unggulan guna mendukung target ekspor dan ketahanan pangan.

Pengembangan kawasan perikanan tangkap di Sulawesi Selatan diarahkan dengan mengacu pada Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) Provinsi Sulawesi Selatan yang meliputi Perairan Selat Makassar, Laut Flores, Laut Jawa, Teluk Bone, Kepulauan Spermonde, Kepulauan Selayar dan sekitar Kepulauan Tana Keke yang meliputi wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar, Bulukumba, Sinjai, Pangkajene Kepulauan, Bone, dan Kota Makassar.

Pengembangan kawasan perikanan budidaya meliputi kawasan peruntukan budidaya laut yang lokasi pengembangannya dialokasikan di Kabupaten Bantaeng, Jeneponto, Barru, Pangkajene Kepulauan, Luwu, Luwu Timur, Luwu Utara, Sinjai, Pinrang, Kepulauan Selayar, Takalar, Bone, Bulukumba, Kabupaten Wajo, dan Kota Palopo. Sedangkan pengembangan kawasan peruntukan perikanan budidaya air payau dialokasikan di Kabupaten Luwu Timur, Luwu Utara, Luwu, Wajo, Bone, Bulukumba, Takalar, Pangkajene Kepulauan, Barru, dan Kabupaten Pinrang.

Selain kawasan perikanan, pengembangan sumber daya kemaritiman dan kelautan di Sulawesi Selatan juga diarahkan untuk memprioritaskan pengembangan komoditas garam di Kabupaten Jeneponto, Pangkajene Kepulauan, Kepulauan Selayar dan Kabupaten Takalar.

3. Kawasan Industri

Kebijakan pembangunan nasional mengamanatkan pencapaian pertumbuhan ekonomi yang berkualitas melalui transformasi struktural yang

membutuhkan dukungan berupa revitalisasi industri pengolahan. Kebijakan tersebut sejalan dengan kebijakan Pemerintah Sulawesi Selatan yang dituangkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan yang menetapkan kawasan industri yang meliputi Kawasan peruntukan industri yang terdapat di Kabupaten Bantaeng, Kabupaten Barru, Kabupaten Enrekang, Kabupaten Gowa, Kabupaten Jeneponto, Kabupaten Kepulauan Selayar, Kabupaten Luwu Timur, Kabupaten Luwu Utara, Kabupaten Maros, Kabupaten Pangkajene Kepulauan, Kabupaten Pinrang, Kabupaten Takalar, Kabupaten Wajo, Kota Makassar, Kota Palopo, dan Kota Pare Pare.

4. Kawasan Pariwisata

Pengembangan pariwisata merupakan salah satu prioritas nasional dalam mendukung pengembangan ekonomi nasional melalui peningkatan nilai tambah ekonomi yang diharapkan dapat mendorong pertumbuhan yang inklusf dan berkualitas. Peningkatan nilai tambah pariwisata difokuskan pada peningkatan lama tinggal dan pengeluaran wisatawan sebagai hasil dari perbaikan aksesibilitas, atraksi dan amenitas. Adapun peningkatan nilai tambah pariwisata tersebut melalui diversifikasi wisata pada potensi wisata alam; wisata budaya dan wisata buatan.

Kawasan pariwisata adalah Kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata baik alam, buatan, maupun budaya. Yang terdiri atas kawasan wisata di darat dan kawasan wisata di laut. Arahan pengembangan potensi pariwisata Sulawesi Selatan yang berada dalam kawasan strategis provinsi (KSP) untuk kepentingan pertumbuhan ekonomi meliputi a). Kawasan Eduwisata Pucak di Kabupaten Maros; b). Kawasan agrowisata Bantaeng-Bulukumba-Sinjai; c). Kawasan agrowisata Barru di Kabupaten Barru; d). Kawasan agrowisata Enrekang di Kabupaten Enrekang; e). Kawasan agrowisata Bone-Wajo ; f). Kawasan ekonomi khusus pariwisata Selayar di Kabupaten Kepulauan selayar. Sedangkan KSP untuk kepentingan sosial budaya khususnya kawasan wisata budaya dan agrowisata berada pada Kabupaten Tana Toraja dan Kabupaten Toraja Utara.

Pengembangan wisata laut di Provinsi Sulawesi Selatan tersebar pada kabupaten dan kota yang berada pada wilayah Perairan Selat Makassar, Teluk Pare-Pare, Laut Flores dan Teluk Bone dengan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan untuk usaha wisata edukasi, usaha wisata dayung, usaha wisata selam, usaha kegiatan hiburan dan rekreasi, usaha jasa perjalanan wisata, usaha wisata snorkeling, usaha wisata tontonan, usaha wisata berenang, dan usaha wisata alam perairan.

5. Sistem Perkotaan

Sistem perkotaan di Sulawesi Selatan berdasarkan arahan Rencana Tata Ruang, meliputi: Sistem perkotaan nasional berupa Pusat Kegiatan Nasional (PKN) dan Pusat Kegiatan Wilayah (PKW), dan sistem perkotaan provinsi berupa Pusat Kegiatan Lokal (PKL) yang merupakan kawasan perkotaan mengemban fungsi sebagai pusat pengolahan dan distribusi barang dan jasa, simpul transportasi, pusat jasa pemerintahan Kabupaten/kota serta pusat pelayanan publik berskala kabupaten/kota atau beberapa kecamatan.

Pusat Kegiatan Nasional (PKN) merupakan Kawasan Perkotaan Mamminasata yang terdiri atas: a. seluruh Wilayah Kota Makassar; b. seluruh Wilayah Kabupaten Takalar; c. sebagian Wilayah Kabupaten Gowa yang mencakup 11 (sebelas) Wilayah kecamatan meliputi Kecamatan Somba Opu, Kecamatan Bontomarannu, Kecamatan Pallangga, Kecamatan Bajeng, Kecamatan Bajeng Barat, Kecamatan Barombong, Kecamatan Manuju, Kecamatan Pattallassang, Kecamatan Parangloe, Kecamatan Bontonompo, dan Kecamatan Bontonompo Selatan; dan d. sebagian Wilayah Kabupaten Maros yang mencakup 12 (dua belas) Wilayah kecamatan, meliputi Kecamatan Maros Baru, Kecamatan Turikale, Kecamatan Marusu, Kecamatan Mandai, Kecamatan Moncong Loe, Kecamatan Bontoa, Kecamatan Lau, Kecamatan Tanralili, Kecamatan Tompobulu, Kecamatan Bantimurung, Kecamatan Simbang, dan Kecamatan Cenrana.

Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) meliputi : a. Kawasan Perkotaan Pangkajene Kabupaten Pangkajene Kepulauan; b. Kawasan Perkotaan Jeneponto Kabupaten Jeneponto; c. Kota Palopo; d. Kawasan Perkotaan Watampone Kabupaten Bone; e. Kawasan Perkotaan Bulukumba Kabupaten Bulukumba; f. Kawasan Perkotaan Barru Kabupaten Barru; dan g. Kota Pare Pare.

Pusat Kegiatan Lokal (PKL) meliputi: a. Kawasan Perkotaan Bantaeng sebagai ibu kota Kabupaten Bantaeng; b. Kawasan Perkotaan Enrekang sebagai ibu kota Kabupaten Enrekang; c. Kawasan Perkotaan Masamba sebagai ibu kota Kabupaten Luwu Utara; d. Kawasan Perkotaan Belopa sebagai ibu kota Kabupaten Luwu; e. Kawasan Perkotaan Malili sebagai ibu kota Kabupaten Luwu Timur; f. Kawasan Perkotaan Pinrang sebagai ibu kota Kabupaten Pinrang; g. Kawasan Perkotaan Pangkajene sebagai ibu kota Kabupaten Sidenreng Rappang; h. Kawasan Perkotaan Benteng sebagai ibu kota Kabupaten Kepulauan Selayar; i. Kawasan Perkotaan Sinjai sebagai ibu kota Kabupaten Sinjai; j. Kawasan Perkotaan Watansoppeng sebagai ibu kota Kabupaten Soppeng; k. Kawasan Perkotaan Makale sebagai ibu kota Kabupaten Tana Toraja; l. Kawasan Perkotaan Rantepao sebagai ibu kota Kabupaten Toraja Utara; m. Kawasan Perkotaan Sengkang sebagai ibu kota Kabupaten Wajo; n. Kawasan Perkotaan Siwa Kabupaten Wajo; o. Kawasan Perkotaan Batusitanduk Kabupaten Luwu; dan p. Kawasan Perkotaan Palattae Kabupaten Bone.

Tabel II.8.
Arahan Pengembangan Wilayah di Sulawesi Selatan

No.	Kab/Kota	Sistem Perkotaan Nasional		Sistem Perkotaan Provinsi
		Pusat Kegiatan Nasional	Pusat Kegiatan Wilayah	Pusat Kegiatan Lokal
1	Kepulauan Selayar			Kawasan Perkotaan Benteng dan Pamatata Sektor unggulan agrion dustri dan perikanan

No.	Kab/Kota	Sistem Perkotaan Nasional		Sistem Perkotaan Provinsi
		Pusat Kegiatan Nasional	Pusat Kegiatan Wilayah	Pusat Kegiatan Lokal
2	Bulukumba		Kawasan Perkotaan Bulukumba. Sektor unggulan Agroindustri, Pertanian, Pariwisata dan Perikanan	
3	Bantaeng			Kawasan Perkotaan Bantaeng. Sektor unggulan perdagangan dan jasa
4	Jeneponto		Kawasan Perkotaan Jeneponto. Sektor unggulan Agroindustri, Perikanan, Pertanian dan Pariwisata	
5	Takalar	Kawasan Perkotaan Mamminasata. Sektor unggulan Perdagangan dan Jasa		
6	Gowa	Kawasan Perkotaan Mamminasata. Sektor unggulan Perdagangan dan Jasa		
7	Sinjai			Kawasan Sinjai. Sektor unggulan perdagangan dan jasa
8	Maros	Kawasan Perkotaan Mamminasata. Sektor unggulan Perdagangan dan Jasa		
9	Pangkep		Kawasan Perkotaan Pangkejene. Sektor unggulan Agroindustri, Perikanan dan Pariwisata	
10	Barru		Kawasan Perkotaan Barru. Sektor unggulan Agroindustri, perikanan, pertanian dan perkebunan	
11	Bone		Kawasan Perkotaan Watampone. Sektor unggulan Agroindustri, Perikanan dan Pertanian	Kawasan Perkotaan Palattae sektor unggulan Perdagangan dan jasa
12	Soppeng			Kawasan Perkotaan Watansoppeng. Sektor unggulan perdagangan dan jasa
13	Wajo			Kawasan Perkotaan Sengkang. Sektor unggulan perdagangan dan jasa Kawasan Perkotaan Siwa Sektor Unggulan perdagangan

No.	Kab/Kota	Sistem Perkotaan Nasional		Sistem Perkotaan Provinsi
		Pusat Kegiatan Nasional	Pusat Kegiatan Wilayah	Pusat Kegiatan Lokal
14	Sidrap			Kawasan Perkotaan Pangkajene. Sektor unggulan perdagangan dan jasa
15	Pinrang			Kawasan Perkotaan Pinrang. Sektor unggulan perdagangan dan jasa
16	Enrekang			Kawasan Perkotaan Enrekang. Sektor unggulan pertanian dan perdagangan dan jasa
17	Luwu			Kawasan Perkotaan Batusitanduk. Sektor unggulan perdagangan dan jasa
				Kawasan Perkotaan Belopa Sektor Unggulan
18	Tana Toraja			Kawasan Perkotaan Makale. Sektor unggulan perdagangan dan jasa dan pariwisata
19	Luwu Utara			Kawasan Perkotaan Masamba. Sektor unggulan Agropolitan dan Agroindustri
20	Luwu Timur			Kawasan Perkotaan Malili. Sektor unggulan agroindustri
21	Toraja Utara			Kawasan Perkotaan Rantepao Sektor Unggulan Perdagangan dan Jasa
22	Makassar	Kawasan Perkotaan Mamminasata. Sektor unggulan Perdagangan dan Jasa		
23	Pare Pare		Parepare. Sektor unggulan Agroindustri, Perdagangan dan Jasa	
24	Palopo		Palopo. Sektor unggulan Agroindustri, Perkebunan, Pertanian	

Sumber : RTRWN dan RTRWP Sulawesi Selatan, diolah tahun 2022

Dalam mewujudkan tujuan pembangunan wilayah sebagaimana Tema Pembangunan Sulawesi Selatan tahun 2022, maka pembangunan infrastruktur wilayah Sulawesi Selatan diarahkan untuk mendukung pengembangan kawasan perkotaan Mamminasata dan koridor pertumbuhan serta koridor pemerataan di Sulawesi Selatan, dengan prioritas pada penguatan konektivitas

dan mengacu pada rencana struktur ruang wilayah Sulawesi Selatan yaitu penguatan konektivitas antarmoda laut, sungai, darat dan udara yang terintegrasi melalui pembangunan jalur KA Makassar-Parepare; pembangunan jaringan pelabuhan utama terpadu Makassar, pembangunan pelabuhan pengumpul dan pelabuhan pengumpan regional.

2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

2.2.1. Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

2.2.1.1. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator makro untuk melihat kinerja perekonomian secara riil di suatu wilayah. Pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan dari tahun 2017 hingga tahun 2020 mengalami tren yang menurun, pada tahun 2017 pertumbuhan ekonomi Sulawesi selatan mencapai 7,23 persen, laju pertumbuhan ekonomi terus menurun hingga tahun 2020 yaitu sebesar -0,70 persen. Angka pertumbuhan tersebut merupakan yang terendah bagi Sulawesi Selatan. Pandemi Covid-19 yang melanda sejak akhir 2019 menjadi pemicu utama melambatnya laju pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan pada tahun 2020. Namun pada tahun 2021 Pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan telah mengalami peningkatan Perekonomian Sulawesi Selatan pada tahun 2021 tumbuh sebesar 4,65 persen, dibandingkan pada tahun 2020 yang mengalami kontraksi hingga -0,70 persen. Pertumbuhan Ekonomi Sulawesi Selatan Tahun 2021 tersebut memenuhi target yang direncanakan sebesar 4,10 – 5,5 persen. Hal ini menunjukkan mulai terjadinya pemulihan ekonomi secara significant dalam masa pandemic covid-19. Ekonomi Sulawesi Selatan dan Nasional pada tahun 2021 tumbuh positif. Pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan menunjukkan kinerja lebih baik dibanding dengan pertumbuhan ekonomi nasional dengan perbedaan sebesar 0,96 persen. Perbandingan pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan dan Nasional tahun 2017 – 2021 selengkapnya pada tabel berikut.

Tabel II.9.
Pertumbuhan Ekonomi
Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2017-2021

Indikator	Satuan	Tahun					
		2017	2018	2019	2020	Target 2021	Capaian 2021
Sulawesi Selatan	%	7,23	7,06	6,92	-0,70	4,10–5,55	4,65
Nasional	%	5,07	5,17	5,02	-2,07	5,3 – 5,7	3,69

Sumber: Badan Pusat StatistikProvinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2022

Membaiknya pertumbuhan ekonomi Sulawesi selatan Tahun 2021 didukung oleh peningkatan PDRB terbesar berasal dari sektor pertanian, perkebunan dan perikanan sebesar Rp. 13,51 Triliun dengan laju pertumbuhan sebesar 6,4 persen. Kemudian disusul oleh sektor perdagangan dengan peningkatan PDRB sebesar Rp. 6,51 Triliun dan kontribusi terbesar ke tiga berasal dari sektor konstruksi dengan peningkatan PDRB sebesar Rp. 6,14 Triliun.

Pulau Sulawesi memberikan kontribusi terhadap perekonomian Indonesia sebesar 6,89 persen dengan pertumbuhan sebesar 5,67%. Laju Pertumbuhan ekonomi tahun 2021 pada semua provinsi yang berada pada wilayah Regional Sulawesi menunjukkan nilai pertumbuhan positif. Laju pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan berada dibawah laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Sulawesi Tengah yang mencapai nilai 11,7 persen. Tingginya laju pertumbuhan Ekonomi Provinsi Sulawesi Tengah dari sisi produksi menunjukkan pertumbuhan terbesar terjadi pada Lapangan Usaha Industri Pengolahan sebesar 19,62 persen. Sementara dari sisi pengeluaran, pertumbuhan tertinggi terjadi pada komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto sebesar 49,10 persen. Sedangkan Provinsi Gorontalo memiliki laju pertumbuhan ekonomi terendah dengan nilai 2,41 persen. Perbandingan laju pertumbuhan ekonomi dan rata-rata capaian 5 tahun terakhir terlihat pada tabel berikut.

Tabel II.10.
Perbandingan Laju Pertumbuhan Ekonomi dan Rata-Rata Capaian Wilayah Regional Sulawesi, 2017-2021

Provinsi	Pertumbuhan Ekonomi (%)					Rata-Rata Capaian
	2017	2018	2019	2020	2021	
Sulawesi Utara	6,31	6,01	5,66	-0,99	4,19	4,23
Sulawesi Tengah	7,1	6,28	7,15	4,86	11,7	7,41
Sulawesi Selatan	7,21	7,06	6,92	-0,7	4,65	5,02
Sulawesi Tenggara	6,76	6,42	6,51	-0,65	4,10	4,63
Gorontalo	6,73	6,5	6,41	-0,02	2,41	4,40
Sulawesi Barat	6,67	6,23	4,67	2,24	2,56	4,47

Sumber : BPS Nasional, Tahun 2017-2022

Pertumbuhan ekonomi Provinsi Sulawesi Selatan dibandingkan dengan wilayah setara dengan pembagian kelompok wilayah berdasarkan persentil 33 dan persentil 67, maka Provinsi Sulawesi Selatan berada dalam kelompok bersama-sama Provinsi Lampung, Sumatera Selatan, Banten, Kalimantan Timur, Riau, Sumatera Utara, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur dan DKI Jakarta. Capaian rata – rata pertumbuhan ekonomi dalam wilayah setara tersebut adalah 3,47 persen sehingga capaian laju pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan Tahun 2021 masih lebih tinggi dari capaian rata-rata wilayah setaranya bersama dengan Provinsi Banten. selengkapnya terlihat pada tabel berikut :

Tabel II.11.
Perbandingan laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Sulawesi Selatan dengan Wilayah Setara di Indonesia Tahun 2021

No.	Provinsi	PDRB ADHK (Rp. Milyar)		LPE 2021
		2020	2021	
1.	Lampung	240.294	247.002	2,79
2.	Sumatera Selatan	315.129	326.408	3,58
3.	Sulawesi Selatan	328.155	343.403	4,65
4.	Banten	441.139	460.740	4,44

No.	Provinsi	PDRB ADHK (Rp. Milyar) 2020	2021	LPE 2021
5.	Kalimantan Timur	472.555	484.297	2,48
6.	Riau	489.984	506.458	3,36
7.	Sumatera Utara	533.746	547.652	2,61
8.	Jawa Tengah	965.226	997.317	3,32
9.	Jawa Barat	1.453.381	1.507.746	3,74
10.	Jawa Timur	1.611.508	1.669.117	3,57
11.	DKI Jakarta	1.792.403	1.856.301	3,56
Rata-Rata LPE Wilayah Setara :				3,47

Sumber : BPS,2022

Pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan Tahun 2021 menunjukkan nilai tertinggi dibanding provinsi setaranya, hal ini didorong oleh meningkatnya produksi diseluruh lapangan usaha tanpa dipangeruhi oleh inflasi. Peran terbesar dalam menunjang perekonomian Sulawesi Selatan tahun 2021 berada pada lapangan usaha pertanian, kehutan dan perikanan yang mencpai 22,55 persen.

Pertumbuhan ekonomi menurut kabupaten/kota di Sulawesi Selatan dari tahun 2017 sampai tahun 2021 mengalami fluktuatif. Kondisi perekonomian pada tahun 2021 ditargetnya bertumbuh positif pada seluruh wilayah, dengan target tertinggi ditetapkan Kabupaten Bantaeng sebesar 4,29 – 5,72. Data selengkapnya pertumbuhan ekonomi pada masing-masing kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan pada tabel berikut.

Tabel II.12.
Pertumbuhan Ekonomi Menurut Kabupaten Kota
Di Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2017-2021

No.	Kabupaten/ Kota	Pertumbuhan Ekonomi (%)					
		2017	2018	2019	2020	Target 2021	Capaian 2021
1	Kep. Selayar	7,61	8,75	7,68	-1,78	4,12 – 5,50	4,02
2	Bulukumba	6,89	5,05	5,49	0,43	3,26 – 4,34	4,76
3	Bantaeng	7,31	8,13	10,75	0,52	4,29 – 5,72	8,86
4	Jeneponto	8,25	6,29	5,47	0,16	3,70 – 4,93	5,40
5	Takalar	7,37	6,66	6,87	-0,61	3,70 – 4,94	5,05
6	Gowa	7,21	7,14	7,46	1,76	4,02 – 5,36	7,26
7	Sinjai	7,23	7,44	6,12	1,55	3,30 – 4,40	5,23
8	Maros	6,81	6,19	1,24	-10,87	2,96 – 3,94	1,36
9	Pangkep	6,6	4,76	6,41	-1,69	3,45 – 4,60	3,46
10	Barru	6,48	7,11	7,41	0,87	3,99 – 5,32	4,77
11	Bone	8,41	8,91	7,01	-0,25	3,77 – 5,03	5,53
12	Soppeng	8,29	8,11	7,69	2,19	4,14 – 5,52	6,15

No.	Kabupaten/ Kota	Pertumbuhan Ekonomi (%)					
		2017	2018	2019	2020	Target 2021	Capaian 2021
13	Wajo	5,21	1,08	4,06	-1,17	3,26 – 4,35	6,77
14	Sidrap	7,09	5,02	4,65	-0,59	3,38 – 4,51	5,54
15	Pinrang	7,84	6,91	6,53	0,44	3,52 – 4,69	5,04
16	Enrekang	6,84	3,26	5,43	1,25	3,67 – 4,90	6,36
17	Luwu	6,79	6,86	6,26	1.30	3,37 – 4,50	6,03
18	Tana Toraja	7,47	7,89	7,22	-0,28	3,89 – 5,18	5,19
19	Luwu Utara	7,6	8,39	7,11	-0,59	3,83 – 5,11	3,90
20	Luwu Timur	3,07	3,39	1,17	1,46	1,61 – 2,15	-1,39
21	Toraja Utara	8,22	8,07	7,56	0,17	4,07 – 5,43	4,05
22	Makassar	8,2	8,42	8,79	-1,27	3,98 – 5,31	4,47
23	Parepare	6,97	5,58	6,65	-0,08	3,08 – 4,77	4,41
24	Palopo	7,17	7,52	6,75	0,45	3,63 – 4,85	5,41
Sulawesi Selatan		**7,21**	**7,06**	**6,92**	**-0,7**	**4,10 – 5,55**	**4,65**

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2022

Tabel II.13 diatas menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan tahun 2021 telah mulai bertumbuh dan menuju pemulihan ekonomi meski masih dalam kondisi covid 19. Dari 24 Kabupaten kota yang terdapat di Provinsi Sulawesi Selatan, 62,5 persen menunjukkan angka pertumbuhan melebihi target yang ditetapkan tahun 2021, dan 20,8% sesuai target serta hanya 16,7 persen yang tidak mencapai target. Kabupaten dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi dicapai oleh Kabupaten Bantaeng dengan capaian 8,86 persen, tingginya pertumbuhan ekonomi Kabupaten Banteng didukung oleh pertumbuhan ekonomi dari sector pertanian, konstruksi, perdagangan dan industry pengolahan sebesar 69,39 persen. Industri pengolahan termasuk didalamnya smelter dan industri makanan dan minuman yang ada di Kabupaten Bantaeng.

Sumber pertumbuhan tertinggi berasal dari pengadaan listrik dan gas yang mencapai pertumbuhan sebesar 10,87 Sektor lain yang juga cukup baik pertumbuhannya di tahun 2021 adalah sektor perdagangan besar dan eceran serta sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan, selengkapnya pada tabel berikut.

Tabel II.13.
Pertumbuhan PDRB menurut Sektor Lapangan Usaha
Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2017-2021

Sektor Lapangan Usaha		Pertumbuhan PDRB				
		2017	2018	2019	2020	2021
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
a	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	5,56	5,27	2,80	-0,83	6,40
b	Pertambangan dan Penggalian	3,80	1,11	2,68	0,21	-0,59
c	Industri Pengolahan	5,03	0,94	9,91	-4,57	3,02
d	Pengadaan Listrik dan Gas	6,10	7,26	6,21	2,59	10,87
e	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	7,89	5,49	1,73	6,61	4,07
f	Konstruksi	8,74	8,55	8,92	1,56	4,14
g	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda	10,42	11,57	9,15	-3,07	6,50
h	Transportasi dan Pergudangan	8,37	10,32	1,74	-21,35	5,17
i	Akomodasi & Makan Minum	11,94	12,71	6,16	-11,87	2,96
j	Informasi dan Komunikasi	10,52	11,99	10,99	10,84	6,39
k	Jasa Keuangan dan Asuransi	4,39	4,67	4,01	2,43	1,14
l	Real Estat	4,48	4,63	5,42	3,79	2,58
m,n	Jasa Perusahaan	8,44	10,02	10,53	-10,05	6,23
o	Administrasi Pemerintah, Pertahanan dan Jaminan Sosial	5,20	9,96	9,98	-0,04	2.92
p	Jasa Pendidikan	9,72	9,77	6,93	5,73	3,67
q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	8,80	8,59	8,05	10,06	7,77
r,s,t,u	Jasa Lainnya	9,58	13,13	9,73	-12,02	7,56
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)		**7,23**	**7,06**	**6,92**	**-0,70**	**4,65**

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan, 2018 – 2022

Nilai PDRB atas dasar harga konstan Provinsi Sulawesi Selatan mencapai Rp.343,40 Triliun, nilai tertinggi berasal dari lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perinanan yaitu Rp.70,37 triliun, nilai meningkat dari tahun sebelumnya sebesar 6,40 persen, setelah tahun 2019 ke tahun 2020 mengalami kontraksi sebesar 0,71 persen. Data selengkapnya pada tabel berikut.

Tabel II.14.
Nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha di Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2017-2021

LAPANGAN USAHA	NILAI PDRB-ADHK (Trilyun Rupiah)				
	2017	2018	2019	2020	2021
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	61,60	64,84	66,62	66,14	70,37
Pertambangan dan Galian	16,60	16,79	17,24	17,33	17,23
Industri Pengolahan	40,41	40,79	44,83	42,78	44,07
Pengadaan Listrik dan Gas	0,27	0,29	0,31	0,32	0,35

LAPANGAN USAHA	NILAI PDRB-ADHK (Trilyun Rupiah)				
	2017	2018	2019	2020	2021
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,34	0,36	0,37	0,39	0,41
Konstruksi	34,87	37,85	41,23	41,88	43,61
Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	42,25	47,13	51,38	49,80	53,04
Transportasi dan Pergudangan	10,68	11,78	11,98	9,41	9,90
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	4,09	4,61	4,91	4,24	4,36
Informasi dan Komunikasi	18,78	21,03	23,34	25,87	27,52
Jasa Keuangan dan Asuransi	10,28	10,75	11,19	11,46	11,59
Real Estate	10,22	10,70	11,28	11,70	12,01
Jasa Perusahaan	1,24	1,36	1,51	1,36	1,44
Administrasi Pemerintahan, Pertanahan & Jaminan Sosial Wajib	11,93	13,11	14,42	14,42	14,84
Jasa Pendidikan	15,69	17,22	18,41	19,47	20,18
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	5,72	6,21	6,71	7,38	7,96
Jasa Lainnya	3,86	4,37	4,79	4,22	4,53
Total PDRB (ADHK)	**288,81**	**309,20**	**330,51**	**328,15**	**343,40**

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2018-2022

Nilai PDRB atas dasar harga berlaku Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2021 menunjukkan nilai Rp. 545,23 Triliun, mengalami kenaikan sebesar Rp. 41,17 Triliun dari tahun sebelumnya. Sejalan dengan nilai PDRB atas dasar harga konstan, kontribusi terbesar berasal dari lapangan usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan.

Tabel II.15.
Nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2017-2021

LAPANGAN USAHA	NILAI PDRB-ADHB (Trilyun Rupiah)				
	2017	2018	2019	2020	2021
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	96,11	103,96	107,66	109,46	122,97
Pertambangan dan Galian	20,41	22,17	23,30	23,54	25,90
Industri Pengolahan	57,45	59,45	66,43	64,32	68,14
Pengadaan Listrik dan Gas	0,27	0,30	0,32	0,32	0,37
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,43	0,46	0,48	0,51	0,54
Konstruksi	53,56	62,57	71,16	72,42	78,56
Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	56,98	66,44	74,62	72,98	79,49
Transportasi dan Pergudangan	17,51	19,76	21,21	15,48	16,74
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	5,71	6,53	7,13	6,30	6,56
Informasi dan Komunikasi	19,93	22,78	25,49	28,31	30,30
Jasa Keuangan dan Asuransi	15,80	17,28	18,43	18,91	19,79
Real Estate	15,87	17,14	18,41	19,21	19,75

LAPANGAN USAHA	NILAI PDRB-ADHB (Trilyun Rupiah)				
	2017	2018	2019	2020	2021
Jasa Perusahaan	1,85	2,11	2,37	2,18	2,35
Administrasi Pemerintahan, Pertanahan & Jaminan Sosial Wajib	18,19	20,65	23,33	23,75	24,67
Jasa Pendidikan	21,76	24,43	26,54	28,24	29,21
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	8,19	9,19	10,16	11,64	12,80
Jasa Lainnya	5,57	6,51	7,29	6,48	7,07
Total Nilai PDRB	**415,59**	**461,72**	**504,32**	**504,06**	**545,23**

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2018 – 2022

Struktur PDRB Sulawesi Selatan menurut lapangan usaha atas dasar harga berlaku pada tahun 2021 masih didominasi oleh empat lapangan usaha yaitu Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (22,55 persen); Perdagangan Besar dan Eceran Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (14,58 persen); Konstruksi (14,41 persen); serta Industri Pengolahan (12,50 persen). Peranan keempat lapangan usaha tersebut dalam perekonomian Sulawesi Selatan mencapai 64,04 persen. Tingginya kontribusi dari ector pertanian, kehutanan dan perikanan didorong oleh adanya program hilirisasi produk pertanian di Provinsi Sulawesi Selatan, kontribusi PDRB ADHB menurut lapangan usaha tahun 2017 – 2021 selengkapnya pada tabel berikut.

Tabel II.16.
Kontribusi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2017-2021

LAPANGAN USAHA	Kontribusi PDRB ADHB (%)				
	2017	2018	2019	2020	2021
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	23,13	22,77	21,35	21,72	22,55
Pertambangan dan Galian	4,91	4,86	4,62	4,67	4,75
Industri Pengolahan	13,82	13,02	13,17	12,76	12,50
Pengadaan Listrik dan Gas	0,06	0,07	0,06	0,06	0,07
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,10	0,10	0,09	0,10	0,10
Konstruksi	12,89	13,70	14,11	14,37	14,41
Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	14,43	14,55	14,80	14,48	14,58
Transportasi dan Pergudangan	4,21	4,33	4,21	3,07	3,07
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1,37	1,43	1,41	1,25	1,20
Informasi dan Komunikasi	4,80	4,99	5,05	5,62	5,56
Jasa Keuangan dan Asuransi	3,80	3,78	3,65	3,75	3,63
Real Estate	3,82	3,75	3,65	3,81	3,62
Jasa Perusahaan	0,45	0,46	0,47	0,43	0,43
Administrasi Pemerintahan, Pertanahan & Jaminan Sosial Wajib	4,38	4,52	4,63	4,71	4,53

LAPANGAN USAHA	Kontribusi PDRB ADHB (%)				
	2017	2018	2019	2020	2021
Jasa Pendidikan	5,24	5,35	5,26	5,60	5,36
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,97	1,36	2,02	2,31	2,35
Jasa Lainnya	4,37	0,96	1,45	1,29	1,30
Total Kontribusi PDRB	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2022

2.2.1.2. Laju Inflasi

Inflasi merupakan kecenderungan naiknya harga barang dan jasa pada umumnya yang berlangsung secara terus menerus, nainya harga barang dan jas tersebut menyebabkan turunnya nilai uang sehingga infalsi dapat juga diartikan sebagai menurunnya nilai uang terhadap nilai barang dan jasa tertentu. Laju inflasi nasional sejak tahun 2017 hingga 2020 terus mengalami penurunan, namun sedikit mengalami peningkatan kembali ditahun 2021, namun demikian peningkatan ini masih terkendali. Hasil Pengendalian ini tidak terlepas dari koordinasi yang kuat antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas harga. Nilai Inflasi Sulawesi Selatan sepanjang tahun 2021 relatif terkendali, yaitu tercatat diangka 2,04 persen angka tersebut masih berada dalam sasaran inflasi nasional pada tahun 2021 yang sebedar 3 persen plus minus 1 persen. Inflasi terjadi pada seluruh kelompok pengeluaran terutama kelompok makanan, minuman dan tembakau; transportasi; dan perumahan, air listrik dan bahan bakar rumah tangga. Komoditas penyumbang inflasi utamadiantaranya adalah cabe rawit, minyak goring dan cabai merah. Harga minyak meningkat seiring dengan tren peningkatan harga crude palm oil (CPO) dunia yang berlanjut di bulan desember 2021. Laju inflasi Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2017 hingga 2021 selengkapnya pada tabel berikut.

Tabel II.17.
Perbandingan Laju Inflasi Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional
Tahun 2017 – 2022

Laju Inflasi	Satuan	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
Sulawesi Selatan	%	4,44	3,50	2,35	2,04	2,40
Nasional	%	3,61	3,13	2,72	1,68	1,87

Sumber : BPS, 2017 – 2022

2.2.1.3. PDRB Perkapita

PDRB perkapita merupakan indikator yang menggambarkan pendapatan rata-rata penduduk yang didapat dari hasil bagi antara PDRB dengan populasi penduduk ditahun tertentu. PDRB perkapita Sulawesi Selatan sejak tahun 2017 menunjukkan peningkatan, kecuali pada tahun 2020 yang mengalami penurunan sebesar 2,2 persen dari tahun sebelumnya, namun tahun 2021 kembali mengalami perbaikan yang bergerak hingga 7,14% dari tahun sebelumnya, kondisi ini seiring dengan mulai membaiknya pertumbuhan ekonomi yang telah mengalami penyesuaian terhadap kondisi covid 19 yang

masih berlangsung hingga tahun 2021 ini. Perbandingan PDRB Perkapita dan PDB Nasional tahun 2017 – 2021 selengkapnya pada tabel berikut.

Tabel II.18.
PDRB PerKapita dan PDB Perkapita (ADHB)
Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional 2017-2021

Indikator	Satuan	Tahun					
		2017	2018	2019	2020	Target 2021	Capaian 2021
Sulawesi Selatan :							
PDRB Perkapita (ADHB)	Juta	47,82	52,64	57,18	55,68	59,23	59,66
PDRB Perkapita (ADHK)	Juta	33,23	35,24	37,47	36,25	37,43	33,23
Nasional							
PDB Perkapita (ADHB)	Juta	51,89	55,99	59,3	57,3	67,21 – 67,64	62,2
PDB Perkapita (ADHK)	Juta	37,85	39,34	41,02	39,78	42.47-42.74	40,78

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional, Tahun 2022

PDRB perkapita Provinsi Sulawesi Selatan jika dibandingkan dengan kelompok provinsi dalam wilayah setara berdasarkan persentil 33 dan persentik 67, berada bersama-sama dengan 10 Provinsi lainnya yaitu Provinsi DI Yogyakarta, Jawa Barat, Sumatera Selatan, Kalimantan Selatan, Bali, Sulawesi Utara, Papua, Sulawesi Tenggara, Sumatera Utara dan Kepualuan Bangka Belitung. Capaian Laju Pertumbuhan PDRB perkapita Provinsi Sulawesi Selatan masih diatas rata-rata wilayah setaranya dengan nilai 3,66. Sedangkan capaian rata-rata wilayah setaranya adalah 3,06. Capaian tersebut sama dengan 3 provinsi lainnya yaitu DI Yogyakarta, Papua dan Kepualuan Bangka Belitung.selengkapnya pada tabel berikut.

Tabel II.19.
Perbandingan PDRB Perkapita Provinsi Sulawesi Selatan dengan Wilayah Setara di Indonesia tahun 2021

No.	Provinsi	PDRB Perkapita ADHK (Rp. Ribu)		Laju Pertumbuhan PDRB Perkapita
		2020	2021	
1.	DI YOGYAKARTA	27.750,38	28.901,58	4,15
2.	JAWA BARAT	30.180,54	30.907,59	2,41
3.	SUMATERA BARAT	30.694,42	31.360,00	2,17
4.	KALIMANTAN SELATAN	32.210,58	32.846,66	1,97
5.	BALI	34.221,73	32.977,09	(3,64)
6.	SULAWESI UTARA	33.670,44	34.787,33	3,32
7.	PAPUA	32.108,51	36.416,72	13,42
8.	SULAWESI TENGGARA	35.709,02	36.581,89	2,44
9.	SUMATERA UTARA	36.175,16	36.666,20	1,36
10.	SULAWESI SELATAN	36.246,26	37.573,32	3,66
11.	KEP. BANGKA BELITUNG	36.302,97	37.579,45	3,52
Rata-Rata Laju Pertumbuhan PDRB Perkapita wilayah setara				3,06

Sumber : BPS diolah, 2022

2.2.1.4. Indeks Gini

Tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Sulawesi Selatan yang diukur dengan Indeks Gini. Nilai Indeks Gini pada periode September 2021 menunjukkan nilai 0,377 angka ini menurun sebesar 0,005 poin dibanding Indeks Gini September 2020. Capaian tersebut juga telah melampaui target yang tetapkan sebesar 0,382. Kondisi ini menunjukkan bahwa selama periode tersebut terjadi perbaikan pemerataan pengeluaran di Sulawesi Selatan. Nilai Indeks Gini berdasarkan lokasi 2021 menunjukkan bahwa tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk perkotaan lebih besar 0,053 poin dibanding tingkat ketimpangan penduduk pedesaan yang sebesar 0,334. Perkembangan indeks gini berdasarkan lokasi di Provinsi Sulawesi selatan Tahun 2017 hingga 2021 selengkapnya pada tabel berikut.

Tabel II.20.
Perkembangan Indeks Gini Berdasarkan Lokasi Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017 – 2021

Indeks Gini	Satuan	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
Perkotaan	Indeks	0,444	0,391	0,393	0,384	0,387
Perdesaan	Indeks	0,332	0,353	0,354	0,352	0,334
Perkotaan + Perdesaan	Indeks	0,429	0,388	0,391	0,382	0,377

Sumber : BPS Provinsi Sulawesi Selatan, 2022

Perbandingan Indeks Gini Sulawesi Selatan dengan wilayah setara pada 10 provinsi liannya di Indonesia menunjukkan bahwa capaian Indeks Gini Sulawesi Selatan masih lebih baik dibandingkan 7 Provinsi lain yaitu Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Tenggara, Papua, Jawa Barat, Gorongtalo, DKI Jakarta dan DI Yogyakarta. Selengkapnya pada tabel berikut.

Tabel II.21.
Perbandingan Indeks Gini Sulawesi Selatan dengan Wilayah Setara, Tahun 2017-2021

Wilayah	Indeks Gini				
	2017	2018	2019	2020	2021
Jawa Tengah	0,365	0,357	0,358	0,359	0,368
Papua Barat	0,387	0,391	0,381	0,376	0,374
Bali	0,379	0,364	0,370	0,369	0,375
Sulawesi Selatan	0,429	0,388	0,391	0,382	0,377
Nusa Tenggara Barat	0,378	0,391	0,374	0,386	0,384
Sulawesi Tenggara	0,404	0.392	0,393	0,388	0,394
Papua	0,398	0,398	0,391	0,395	0,396
Jawa Barat	0,393	0,405	0,398	0,398	0,406
Gorontalo	0,405	0,417	0,406	0,406	0,409
DKI Jakarta	0,409	0,390	0,391	0,400	0,411
DI Yogyakarta	0,440	0,422	0,428	0,437	0,436
Indonesia	0,391	0,384	0,380	0,385	0,381

Sumber : BPS Nasional, Tahun 2017-2021

2.2.1.5. Indeks Williamson

Indeks Williamson di Provinsi Sulawesi Selatan merupakan pendekatan yang digunakan mengukur derajat ketimpangan antar wilayah berdasarkan PDRB perkapita masing-masing kabupaten kota di Provinsi Sulawesi Selatan. Nilai indeks willianson tahun 2021 menunjukkan nilai 0,568 yang menunjukkan bahwa capaian tersebut telah melampaui target yang ditetapkan dalam RPJMD Perubahan tahun 2018 – 2023 Provinsi Sulawesi Selatan yaitu sebesar 0,610. Data tahun 2017 hingga 2021 menunjukkan bahwa peningkatan nilai ketimpangan wilayah dari tahun 2017 – 2019 dan mulai mengalami perbaikan dengan penurunan nilai indeks Williamson dari tahun 2019 hingga tahun 2021. Perbedaan konsentrasi kegiatan ekonomi wilayah menjadi salah satu factor yang berpengaruh ketimpangan pembangunan ekonomi daerah. Kebijakan membuka akses wilayah terisolir di Provinsi Sulawesi Selatan menjadi salah satu ector pendorong yang dapat menurunkan Indeks Williamson, data selengkapnya terlihat pada tabel berikut.

Tabel II.22.
Indeks Ketimpangan Williamson
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017-2021

Indikator	Tahun					
	2017	2018	2019	2020	Target 2021	Capaian 2021
Indeks Ketimpangan Williamson	0,610	0,622	0,639	0,620	0,610	0,568

Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2017-2022

2.2.1.6. Persentase Penduduk diatas Garis Kemiskinan

Persentase penduduk miskin Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2021 sebesar 8,53 persen, nilai tersebut menunjukkan adanya perbaikan dengan penurunan sebesar 0,46 poin dari tahun 2020. Jumlah penduduk miskin pada September 2021 sebesar 765,46 ribu orang menurun sebesar 34,78 ribu orang terhadap September 2020. Peningkatan persentase penduduk miskin dari tahun 2019 ke tahun 2020 dipicu oleh pandemic covid 19 yang berpengaruh terhadap pembatasan aktivitas ekonomi masyarakat, perbaikan yang terjadi ditahun 2021 merupakan pengaruh dari pasca covid khususnya pada ector UMKM dan pariwisata yang mulai membuka peluang lapangan kerja dan perbaikan pendapatan masyarakat.

Tingkat kemiskinan Provinsi Sulawesi Selatan jika dibandingkan dengan wilayah setara menunjukkan bahwa persentase penduduk miskin Sulawesi Selatan masih lebih tinggi dibanding 10 wilayah lainnya, namun lebih baik dibanding Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Lampung dan Sulawesi Tenggara. Data selengkapnya perbandingan tingkat kemiskinan Sulawesi Selatan dengan wilayah setara selengkapnya pada tabel berikut.

Tabel II.23.
Perbandingan Persentase Tingkat Kemiskinan Periode September Sulawesi Selatan dengan Wilayah Setara, 2017-2021

Provinsi	Persentase Penduduk Miskin (%)				
	2017	2018	2019	2020	2021
KALIMANTAN BARAT	7,86	7,37	7,28	7,24	6,84
RIAU	7,41	7,21	6,90	7,04	7,00
SULAWESI UTARA	7,90	7,59	7,51	7,78	7,36
JAMBI	7,90	7,85	7,51	7,97	7,67
JAWA BARAT	7,83	7,25	6,82	8,43	7,97
SUMATERA UTARA	9,28	8,94	8,63	9,14	8,49
SULAWESI SELATAN	4,70	8,87	8,56	8,99	8,53
JAWA TIMUR	11,20	10,85	10,20	11,46	10,59
JAWA TENGAH	12,23	11,19	10,58	11,84	11,25
LAMPUNG	13,04	13,01	12,30	12,76	11,67
SULAWESI TENGGARA	11,97	11,32	11,04	11,69	11,74

Sumber : BPS Nasional, Tahun 2017-2022

Garis kemiskinan pada Sepetember 2021 sebesar 384.455 per kapita perbulan yang menujukkan adanya kenaikan sebesar 6,19 persen dibanding periode September 2020. Berdasarkan komponen garis kemiskinan yang terdiri dari garis kemiskinan makanan dan garis kemiskinan non makanan maka peran garis kemiskinan makanan masih lebih besar dibanding garis kemiskinan non makanan. Perkembangan garis kemiskinan tahun 2017 hingga tahun 2021 yang merupakan representasi jumlah rupiah minimum yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan pokok makanan dan bukan makanan menunjukkan tren peningkatan dari tahun 2017 hingga tahun 2021. Data selengkapnya garis kemiskinan perkotaan dan pedesaan Provinsi Sulawesi Selatan, terlihat pada tabel berikut.

Tabel II.24.
Garis Kemiskinan di Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional, Tahun 2017-2021

Wilayah	Satuan	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
Garis Kemiskinan Sulawesi Selatan						
Perkotaan	Rupiah/ Kapita/Bulan	303.834	327.725	354.770	375.463	403.751
Perdesaan	Rupiah/ Kapita/Bulan	287.788	306.250	331.063	350.791	368.465
Perkotaan + Perdesaan	Rupiah/ Kapita/Bulan	287.788	315.738	341.555	362.031	384.455
Garis Kemiskinan Nasional						
Perkotaan	Rupiah/ Kapita/Bulan	400.995	425.770	442.063	475.477	502.730
Perdesaan	Rupiah/ Kapita/Bulan	370.910	392.154	404.398	437.902	464.474
Perkotaan + Perdesaan	Rupiah/ Kapita/Bulan	387.160	410.670	440.538	458.947	486.168

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2021

Tabel II.25.
Persentase Penduduk Diatas Garis Kemiskinan
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017-2021

Indikator	Satuan	Tahun					
		2017	2018	2019	2020	Target 2021	Capaian 2021
Sulawesi Selatan	%	90,52	91,13	91,44	91,04	90,20	91,47

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2020

Indeks kedalaman kemiskinan merupakan salah satu dimensi untuk mengukur persoalan kemiskinan. Indeks kedalaman kemiskinan menunjukkan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Indeks kedalaman kemiskinan (P1) periode September 2021 menunjukkan penurunan sebesar 0,25 poin dibanding tahun 2020. Adapun Indeks kedalaman kemiskinan Provinsi Sulawesi Selatan dibanding nasional masih lebih baik dengan selisih nilai sebesar 0,27 poin. Indeks kedalaman kemiskinan Provinsi Sulawesi Selatan dibanding dengan 6 wilayah dan setaranya dan Nasional terlihat pada tabel berikut.

Tabel II.26.
Perbandingan Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Sulawesi Selatan dengan Wilayah Setara, 2017-2021

Provinsi	Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)				
	2017	2018	2019	2020	2021
Sulawesi Utara	1,30	1,31	0,89	1,23	1,04
Riau	0,99	0,96	0,78	0,99	0,96
Jambi	0,99	1,26	1,17	1,18	1,09
Banten	0,78	0,91	0,80	1,14	1,20
Jawa Barat	1,39	1,13	1,06	1,28	1,29
Sulawesi Selatan	1,92	1,68	1,63	1,65	1,40
Sumatera Utara	1,50	1,46	1,48	1,60	1,45
Jawa Timur	2,09	2,07	1,61	1,97	1,58
Lampung	2,11	2,06	1,99	2,11	1,85
Sulawesi Barat	1,81	1,56	1,44	1,95	1,90
Jawa Tengah	2,12	1,63	1,84	1,94	1,94
DI Yogyakarta	2,09	1,65	1,54	2,08	2,06
Indonesia	1,79	1,63	1,5	1,75	1,67

Sumber : BPS NaDsional, Tahun 2018 - 2022

2.2.1.7. Kontribusi Sektor Pertanian/Perkebunan terhadap PDRB

Kontribusi sektor Pertanian/Perkebunan terhadap PDRB tahun 2021 menunjukkan nilai capaian yang belum sesuai target yang ditetapkan sebesar 23,94 persen, meskipun demikian kintribusi sector ini menunjukkan tren peningkatan dari tahun 2018 hingga tahun 2021, hal ini dipengaruhi oleh meningkatnya nilai PDRB dari sub sektor tanaman perkebunan dengan persen peningkatan dari tahun 2020 ke tahun 2021 sebesar 11,60 persen, sementara sub sektor tanaman pangan peningkatannya sebesar 5,3 persen. Data selengkapnya terlihat pada tabel berikut.

Tabel II.27.
Kontribusi Sektor Pertanian/Perkebunan terhadap PDRB
Tahun 2017 – 2021

Komoditas	Satuan	Tahun					
		2017	2018	2019	2020	Target 2021	Capaian 2021
Kontribusi Sektor Pertanian/Perkebunan terhadap PDRB	%	23,13	22,54	21,35	21,72	23,94	22,55

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2022

2.2.1.8. Kontribusi Sektor Pertanian (Tanaman Pangan) Terhadap PDRB

Capaian kontribusi sektor pertanian khususnya pada komoditas tanaman pangan seperti padi, jagung dan umbi-umbian menunjukkan trend penurunan sejak tahun 2017 hingga 2021, Pada tahun 2021 mengalami penurunan sebesar 0,17 persen, kondisi ini dipengaruhi oleh gagal panen dibeberapa lokasi di Provinsi Sulawesi selatan akibat bencana banjir pada sentra-sentra produksi pangan seperti Kabupaten Soppeng, Wajo dan Sidrap. Kontribusi sektor pertanian khususnya tanaman pangan terhadap PDRB selengkapnya pada tabel berikut.

Tabel II.28.
Kontribusi Sektor Pertanian (Tanaman Pangan) Terhadap PDRB
Tahun 2017 - 2021

Komoditas	Satuan	Tahun					
		2017	2018	2019	2020	Target 2021	Capaian 2021
Kontribusi Sektor Pertanian (Tamanan Pangan) Terhadap PDRB	%	7,55	7,16	6,34	6,50	8,69	6,33

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2022

2.2.1.9. Produksi Sektor Pertanian

Capaian produksi sektor pertanian khususnya produksi padi, jagung dan kedelai pada tahun 2021 belum mencapai target yang ditetapkan, meskipun demikian produksi padi Provinsi Sulawesi Selatan dari tahun 2020 ke tahun 2021 menunjukkan peningkatan dari 4.708.464,97 ton menjadi 5.152.871,43 ton. Belum tercapainya target produksi sektor pertanian ditahun 2021 dipengaruhi oleh gagal panen pada beberapa lokasi sentra produksi padi akibat bencana banjir di Kabupaten Soppeng pada musim tanam April – September seluas 3.957,51 Ha, pada Kabupaten Wajo seluas 16.824 Ha demikian pula halnya di Kabupaten Barru, Sidrap dan Pangkep. Produksi sector pertanian ditahun 2021 selengkapnya pada tabel berikut.

Tabel II.29.
Produksi Sektor Pertanian Tahun 2017 – 2021

Komoditas	Satuan	Tahun					
		2017	2018	2019	2020	Target 2021	Capaian 2021
Produksi sektor pertanian	Trilyun Rp	231,64	225,89	60,19	156,61	125,64	398,63

2.2.1.10. Kontribusi Sektor Perkebunan (Tanaman Keras) Terhadap PDRB

Capaian kontribusi sektor perkebunan terhadap PDRB ditahun 2021 menunjukkan capaian yang telah melampaui target yang ditetapkan. Kontribusi jenis komoditas yang mengalami peningkatan adalah komoditas kelapa, karet dan kopi. Data selengkapnya terkait kontribusi sektor perkebunan terhadap PDRB selengkapnya pada tabel berikut.

Tabel II.30.
Kontribusi Sektor Perkebunan (Tanaman Keras) terhadap PDRB
Tahun 2017 – 2021

Komoditas	Satuan	Tahun					
		2017	2018	2019	2020	Target 2021	Capaian 2021
Kontribusi Sektor Perkebunan (Tanaman Keras) Terhadap PDRB	%	4,33	4,26	3,88	3,94	1,89	4,07

Sumber : BPS Sulawesi selatan, 2022

2.2.1.11. Produksi Sektor Perkebunan

Produksi sektor perkebunan tahun 2021 tidak mencapai target yang ditetapkan. Kondisi ini di pengaruhi oleh penurunan produksi pada komoditas kelapa sawit dari 237.712.000 ton pada tahun 2020 menjadi 85.794.000 ton pada tahun 2021, komoditas kakao dari 106.582.000 ton pada tahun 2020 menjadi 106.380.000 pada tahun 2021, komoditas tebu dari 2.231.000 ton pada tahun 2020 menjadi 16.000 ton pada tahun 2021, serta tembakau dengan produksi 1.137.000 ton pada tahun 2020 menjadi 1.025.000 ton pada tahun 2021. Data produksi sektor perkebunan 2021 terlihat pada tabel berikut.

Tabel II.31.
Produksi Sektor Perkebunan Tahun 2017 – 2021

Komoditas	Satuan	Tahun					
		2017	2018	2019	2020	Target 2021	Capaian 2021
Produksi sektor perkebunan	Trilyun Rp	8,75	11,19	10,95	8,60	11	10,91

Produksi sektor perkebunan yang tahun 2021 menunjukkan nilai yang belum mencapai target, meskipun demikian nilai tersebut mengalami peningkatan dari capaian tahun 2020. Kondisi ini dipengaruhi oleh usaha pemulihan ekonomi yang mulai terjadi dalam masa covid 19, disamping dari 9 komoditas perkebunan yang tercatat menunjukkan peningkatan pada 6 komoditas yaitu komoditas pala, kakao, cengkeh, kopi arabika, kepala hibrida dan kelapa dalam. Penurunan produksi hanya terjadi pada 2 komoditas, yaitu komoditas kopi robusta dan lada.

2.2.1.12. Kontribusi Sektor Kehutanan

Kontribusi sektor kehutanan terhadap PDRB tahun 2021 sebesar 0,06 %, capaian ini belum mencapai target yang ditetapkan Sementara target tahun 2021 sebesar 0.09 %. Hal ini *disebabkan* adanya upaya dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dalam pemulihan ekonomi. Pada sektor kehutanan upaya yang ditempuh dengan mengoptimalkan produksi hasil hutan kayu, hasil hutan bukan kayu, serta jasa lingkungan (ekowisata). Data selengkapnya pada tabel berikut..

Tabel II.32.
Kontribusi Sektor Kehutanan Terhadap PDRB
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017-2021

Indikator	Satuan	Tahun					
		2017	2018	2019	2020	Target 2021	Capaian 2021
Kontribusi Sektor Kehutanan Terhadap PDRB	%	0,07	0,06	0,06	0,07	0,09	0,06

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2022

2.2.1.13. Kontribusi Sektor Pertambangan Terhadap PDRB

Kontribusi sector pertambangan terhadap PDRB Provinsi Sulawesi Selatan kembali mengalami peningkatan mulai tahun 2020, dengan capaian ditahun 2021 sebesar 4,75 persen. Hal ini didorong oleh peningkatan kontribusi PDRB dari sub sector pertambangan minyak, gas dan panas bumi sebesar 0,14 persen. Data Kontribusi sector pertambanagn terhadap PDRB Provinsi Sulawesi Selatan selengkapnya pada tabel berikut.

Tabel II.33.
Kontribusi Sektor Pertambangan Terhadap PDRB
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017-2021

Indikator	Satuan	Tahun					
		2017	2018	2019	2020	Target 2021	Capaian 2021
Kontribusi Sektor Pertambangan Terhadap PDRB	%	4,91	4,80	4,62	4,67	6,72	4,75

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2022

2.2.1.14. Kontribusi Sektor Kelautan dan Perikanan Terhadap PDRB

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi perekonomian daerah dalam periode tertentu. Terkait dengan perikanan semakin banyak jumlah usaha perikanan dan nilai investasinya akan memberikan dampak yang positif terhadap PDRB di provinsi Sulawesi Selatan. Kedua faktor itu merupakan komponen yang tidak dapat dipisahkan untuk mendorong pertumbuhan sektor perikanan. Berikut ini dapat dilihat perkembangan kontribusi sektor Kelautan dan Perikanan terhadap PDRB di Provinsi Sulawesi Selatan pada 5 tahun terakhir.

Tabel II.34.
Kontirbusi Sektor Kelautan dan Perikanan Terhadap PDRB
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017-2021

Indikator	Satuan	Tahun					
		2017	2018	2019	2020	Target 2021	Capaian 2021
Kontribusi Sektor Kelautan dan Perikanan Terhadap PDRB	%	8,44	8,40	8,84	8,53	9,81	9,43

Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2022

Sektor Kelautan dan Perikanan merupakan salah satu penopang utama pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sulawesi Selatan. Kontribusi sektor Kelautan dan Perikanan terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Sulawesi selatan terus meningkat sejak 2017. Kontribusi sektor kelautan perikanan terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) mencapai 9,43 persen dengan nilai Rp. 40,56 Triliun hingga triwulan III 2021. Capaian tersebut telah melampaui target 2021 dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Sulsel 2018 – 2023. Peningkatan yang terjadi, menunjukkan bahwa sub sektor kelautan dan perikanan mempunyai potensi di masa depan dengan menjadi salah satu sub sektor sebagai prime mover pembangunan. Salah satu sub sektor yang berpotensi besar untuk dioptimalkan adalah perikanan budidaya, utamanya tambak udang, ikan, rumput laut.

2.2.1.15. Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB

Target kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB Tahun 2021 sebesar14,95%, hingga November 2021 capaian yang diperoleh sebesar 14,73%. Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB Provinsi Sulawesi Selatan dalam lima tahun terakhir dapat dikatakan terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Walaupun pada tahun 2020, diketahui bahwa capaian mengalami penurunan, hal tersebut disebabkan oleh adanya pandemi covid-19 yang menyebabkan banyaknya arus barang yang tidak berjalan.

Tabel II.35.
Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017-2021

Indikator	Satuan	Tahun					
		2017	2018	2019	2020	Target 2021	Capaian 2021
Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB	%	13,71	14,38	14,80	14,48	14,95	14,58

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2022

2.2.1.16. Kontribusi Sektor Industri Terhadap PDRB

Kontribusi sector industri terhadap PDRB Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021 menenpati urutan ke 5 tertinggi dari 17 lapangan usaha yang dinilai kontribusinya. Sektor industry sendiri terdiri dari 16 jenis industri yang memberikan kontribusi yang bervariasi terhadap capaian PDRB tahun 2021. Data menunjukkan bahwa capaian yang diperoleh tahun 2021 sebesar 12,50 persen telah melampaui target yang diharapkan sebesar 8,3 persen meskipun terjadi penurunan dari tahun 2019 hingga tahun 2021. Penurunan ini dipengaruhi oleh penrunan nilai pada jenis industri bahan galian bukan logam dan industri kayu berupa barang dari kayu dan gabus serta barang anyaman dari banbu rotan dan sejenisnya). Kontribusi sektor industi terhadap PDRB tahun 2017 – 2021 selengkapnya pada tabel berikut:

Tabel II.36.
Kontribusi Sektor Industri Terhadap PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017-2021

Indikator	Satuan	Tahun					
		2017	2018	2019	2020	Target 2021	Capaian 2021
Kontribusi Sektor Industri Terhadap PDRB	%	13,82	12,87	13,17	12,76	8,3	12,50

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2022

2.2.1.17. Kontribusi Industri Rumah Tangga Terhadap PDRB Sektor Industri

Kontribusi industry rumah tangga terhadap PDRB Provinsi Sulawesi Selatan di Tahun 2021 mencapai 8,91 persen, nilai tersebut belum mencapai target yang ditetapkan sebesar 9,3 persen. Kondisi ini disebabkan oleh pandemic covid 19 yang menerapkan kebijan pembatasa gerak dengan pemberlakuan PPKM sehingga berdapmak terhadap keterbatasan dan tingginya harga bahan baku, pengurangan tenaga kerja dan pemasaran produk. Data kontribusi industry rumah tangga terhadap PDRB Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017 – 2021 selengkapnya pada tabel berikut.

Tabel II.37.
Kontribusi Industri Rumah Tangga terhadap PDRB sektor industri
Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2017-2021

Indikator	Satuan	Tahun					
		2017	2018	2019	2020	Target 2021	Capaian 2021
Kontribusi Industri Rumah Tangga terhadap PDRB sektor industri	%	7,22	6,79	7,35	7,35	9,3	8,91

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2022

2.2.1.18. Pertumbuhan PDRB Industri

Pertumbuhan PDRB sektor industry di Provinsi Sulawesi Selatan kembali mengalami perbaikan ditahun 2021, setelah sebelumnya terkontraksi sebesar 4,57 persen di tahun 2020. Capaian pertumbuhan PDRB sektor industri tahun 2021 adalah 3,02 persen, meskipun kondisi ini belum mencapai target namun diharapkan dapat terus mengalami peningkatan seiring dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi di Sulawesi Selatan. Perbaikan pertumbuhan PDRB sektor industry didorong oleh tiga sub sector dengan tingkat pertumbuhan positif dan terbesar yang terdiri ddari sub sektor industri pengolahan tembakau dengan pertumbuhan 27,94 persen, industri kertas percetakan dan reproduksi media rekaman sebesar 22,08 persen dan sub sektor industri logam dasar sebesar 68,45 persen sebagai sub sektor yang memberikan kontribusi terbesar. Pertumbuhan PDRB sektor industri tahun 2017 hingga tahun 2021 selengkapnya pada tabel berikut.

Tabel II.38.
Pertumbuhan PDRB Industri
Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2017-2021

Indikator	Satuan	Tahun					
		2017	2018	2019	2020	Target 2021	Capaian 2021
Pertumbuhan PDRB Industri	%	5,03	0,94	9,92	-4,57	6,8	3,02

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2022

2.2.1. Aspek Kesejahteraan Sosial

2.2.2.1. Indeks Pembangunan Manusia

Capaian Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Sulawesi Selatan menunjukkan peningkatan sebesar 0,31 point dibandingkan capaian tahun 2020 atau bertumbuh sebesar 0,43 persen. Kondisi ini menunjukkan terjadinya percepatan pertumbuhan dibanding tahun 2020 yang sebesar 0,38 persen. Capaian nilai IPM sangat dipengaruhi oleh dimensi pembentuk IPM yang terdiri dari dimensi umur panjang dan hidup sehat, dimensi pengetahuan dan dimensi standar hidup layak. Pada dimensi umur panjang dan hidup sehat diukur dengan komponen angka harapan hidup sejak lahir (AHH), seiring dengan

pandemic covid 19 nilai AHH Sulawesi Selatan tahun 2020 dan 2021 mengalami perlambatan pertumbuhan dibanding nilai UHH 2019 dan 2020.

Dimensi pengetahuan pada IPM dibentuk oleh dua indikator, yaitu Harapan Lama Sekolah (HLS) penduduk usia 7 tahun ke atas dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) penduduk usia 25 tahun ke atas. Capaian menunjukkan bahwa Harapan Lama Sekolah (HLS) tahun 2021 mengalami peningkatan sebesar 0,07 point dari 13,45 di tahun 2020 menjadi 13,52 ditahun 2021, namun nilai tersebut mengalami perlambatan dibanding pada tahun 2020 yang meningkatannya dari tahun 2019 sebesar 0,09 point. Demikian pula halnya dengan komponen Rata-rata Lama Sekolah (RLS) yang mengalami peningkatan sebesar 0,08 point dari 8,38 ditahun 2020 menjadi 8,46 ditahun 2021.Perlanbatan pada kedua komponen tersebut masih sangat dipengaruhi oleh pandemic covid 19 yang masih berlangsung.

Adapun dimensi standar hidup layak yang direpresentasikan oleh pengeluaran per kapita (atas dasar harga konstan 2012) yang disesuaikan. Pada tahun 2021, pengeluaran per kapita yang disesuaikan masyarakat Sulawesi Selatan mencapai Rp11,18 juta. Angka ini meningkat dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 0,95 persen. Kondisi ini menunjukkan bahwa setelah lebih dari satu tahun pandemi COVID-19 melanda Indonesia, pengeluaran per kapita Sulawesi Selatan mulai kembali meningkat setelah di tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 0,35 persen. Adapun Capaian IPM dan Dimensi Pembentuk IPM Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2017 – Tahun 2021 selengkapnya pada tabel berikut.

Tabel II.39.
Capaian IPM dan Dimensi Pembentuk IPM Provinsi Sulawesi Selatan
Tahun 2017 – 2021

Indikator	Satuan	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
Angka Harapan Hidup (AHH)	Tahun	69,84	70,08	70,43	70,57	70,66
Harapan Lama Sekolah (HLS)	Tahun	13,28	13,34	13,36	13,45	13,52
Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	Tahun	7,95	8,02	8,26	8,38	8,46
Pengeluaran Perkapita (ADHK)	Ribu Rupiah/org	10.489	10.814	11.118	11.079	11.184
IPM	Nilai	70.34	70.9	71.66	71.93	72,24

Sumber :BPS Nasional, Tahun 2017 – 2021

Pencapain nilai IPM Provinsi Sulawesi Selatan berdasarkan pengklasifikasian BPS dalam lima tahun terakhir telah masuk dalam kategori IPM tinggi yang berada diantara nilai 70 dan 80. Meskipun demikian masih diperlukan upaya untuk meningkatkan nilai capaian agar dapat masuk dalam kategori sangat tinggi dengan nilai capaian diatas 80.

Provinsi Sulawesi Selatan berdasarkan pengklasifikasian daerah setara, berada pada wilayah persentil diatas 67 bersama-sama dengan 10 provinsi lainnya yaitu Jawa Barat, Sumatera Barat. Banten, Riau. Sulawesi Utara, Bali. Kepulauan Riau. Kalimantan Timur, DI Yogyakarta, dan DKI Jakarta, dalam

kelompok capaian IPM tinggi. Dibandingkan daerah setara lainnya, IPM Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2021 berada pada posisi terendah dengan nilai IPM 72,24 dan provinsi dengan IPM tertinggi yaitu DKI Jakarta sebesar 81,11. Sementara itu jika dibandingkan dengan capaian wilayah lainnya untuk wilayah Regional Sulawesi, IPM Sulawesi Selatan masih dibawah IPM Sulawesi Utara dengan capaian 73,3. Namun demikian dari sisi pertumbuhan, capaian pertumbuhan IPM Sulawesi Selatan Tahun 2021 telah berada diatas rata-rata wilayah setara dengan nilai capaian sebesar 0,43 persen. Perbandingan capaian IPM Provinsi Sulawesi Selatan dengan Wilayah setara terlihat pada tabel berikut.

Tabel II.40.
Perbandingan Capaian Indeks Pembangunan Manusia Sulawesi Selatan dengan Wilayah Setara dan Nasional 2017-2021

Provinsi	Tahun					Pertumbuhan IPM 2021 (%)
	2017	2018	2019	2020	2021	
Sulawesi Selatan	70,34	70,9	71,66	71,93	72,24	0,43
Jawa Barat	70,69	71,3	72,03	72,09	72,45	0,50
Sumatera Barat	71,24	71,73	72,39	72,38	72,65	0,37
Banten	71,42	71,95	72,44	72,45	72,72	0,37
Riau	71,79	72,44	73	72,71	72,94	0,32
Sulawesi Utara	71,66	72,2	72,99	72,93	73,3	0,51
Bali	74,3	74,77	75,38	75,5	75,69	0,25
Kep, Riau	74,45	74,84	75,48	75,59	75,79	0,26
Kalimantan Timur	75,12	75,83	76,61	76,24	76,88	0,84
DI Yogyakarta	78,89	79,53	79,99	79,97	80,22	0,31
DKI Jakarta	80,06	80,47	80,76	80,77	81,11	0,42
Nasional	70,81	71,39	71,92	71,94	73,29	0,49
Rata-Rata Pertumbuhan IPM Daerah Setara						**0,42**

Sumber : BPS Nasional, Tahun 2017-2022

2.2.2.2. Indeks Pendidikan

Indeks pendidikan berdasarkan metode baru yang digunakan oleh BPS memperhitungkan 2 faktor yakni Harapan Lama sekolah (HLS) dan rata-rata lama sekolah (RLS). indeks pendidikan Provinsi Sulawesi selatan tahun 2017 hingga 2021 menunjukkan trend peningkatan setiap tahunnya, meskipun belum mencapai target yang diharapkan, namun hal ini menunjukkan semakin membaiknya harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah. Data selengkapnya pada tabel berikut.

Tabel II.41.
Indeks Pendidikan
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017-2021

Indikator	Satuan	Tahun					
		2017	2018	2019	2020	Target 2021	Capaian 2021
Indeks Pendidikan	Nilai	63,39	63,79	64,64	65,29	66.29	65,76

Sumber : Badan Pusat Statistik Sulawesi Selatan, Tahun 2022

2.2.2.3. Angka Melek Huruf

Angka melek huruf merupakan persentase penduduk usia 15 tahun ke atas yang dapat membaca dan menulis serta mengerti sebuah kalimat sederhana dalam hidupnya sehari-hari. Angka melek huruf di Provinsi Sulawesi Selatan dari tahun 20217 hingga tahun 2020 menunjukkan adanya trend peningkatan setiap tahunnya, namun pada tahun 2021 terjadi penurunan sebesar 0,16 persen dengan nilai capaian sebesar 92,49 persen. Kondisi ini belum mencapai target yang diharapakan sebesar 95,21 persen. Capaian tersebut menunjukkan bahwa masih terdapat 7, 51 persen penduduk usia 15 tahun keatas di Provinsi Sulawesi Selatan yang tidak dapat membaca dan menulis. Hal ini dapat dipengaruhi oleh sistem pembelajaran yang berubah dari tatap muka menjadi dalam jaringan (daring) di masa pandemi Covid-19. Disamping itu jika dibandingkan dengan data jumlah penduduk miskin Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021 yang juga mengalami peningkatan, menunjukkan bahwa bertambahnya penduduk miskin mengakibatkan angka melek huruf menurun sebab masyarakat lebih focus pada pemenuhan ekonominya pada masa pandemic covid 19 dibanding usaha untuk meningkatkan kemampuan baca tulis. Penduduk yang bisa baca tulis diasumsikan memiliki kemampuan dan keterampilan karena dapat menyerap informasi baik itu lisan maupun tulisan Jika dibandingkan dengan capaian nasional, angka melek huruf di Provinsi Sulawesi Selatan Masih lebih rendah dibanding nasional. Sehingga peningkatan kemampuan baca tulis bagi masyarakat khsusunya yang berusia 15 tahun keatas perlu mendapat perhatian mengingat penduduk yang bisa baca tulis diasumsikan memiliki kemampuan dan keterampilan karena dapat menyerap informasi baik itu lisan maupun tulisan. Angka melek huruf Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional Selengkapnya pada tabel berikut.

Tabel II.42.
Perbandingan Angka Melek Huruf Penduduk Usia 15 Tahun keatas
Sulawesi Selatan dan Nasional, 2017-2021

Provinsi/Nasional	Satuan		Tahun				
		2017	2018	2019	2020	Target 2021	2021
Sulawesi Selatan	%	91,65	91,81	92,45	92,56	95,21	92,49
Nasional	%	95,50	95,66	95,90	96,00		96,04

Sumber : BPS, 2022

2.2.2.4. Indeks Kesehatan

Indeks kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan sejak tahun 2017 hingga 2021 terus mengalami perbaikan hal ini terlihat dengan semakin meningkatnya capaian tersebut. Capaian tahun 2020 dan tahun 2021 telah melampaui target yang ditetapkan, capaian tahun 2021 meningkat sebesar 0,14 poin persen. Indeks kesehatan ini disadarkan pada kesehatan fisik, mental, infrastruktur kesehatan dan perawat guna mencegah berbagai wabah atau penyakit, yang ditunjukkan dengan dengan Angka harapan hidup (AHH) panjang dan sehat sebagai komponen penyusun dalam dimensi kesehatan. Data selengkapnya pada tabel berikut.

Tabel II.43.
Indeks Kesehatan
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017-2021

Indikator	Satuan	Tahun					
		2017	2018	2019	2020	Target 2021	Capaian 2021
Angka Harapan Hidup (UHH)	Tahun	69,84	70,08	70,43	70,57	70,66	70,66
Indeks Kesehatan	nilai	76,68	77,05	77,58	77,80	77.76	77,94

Sumber : BPS, 2022

2.2.2.5. Presentase Balita Stunting

Persentase balita stunting di Provinsi Sulawesi Selatan dari tahun 2017 hingga tahun 2021 berfluktuasi namun mulai mengalami penurunan pada tahun 2018 hingga tahun 2021. Meskipun telah mengalami penurunan namun belum mencapai target yang ditetapkan tahun 2021. Data persentase balita stunting tahun 2017 – 2021 selengkpnya pada tabel berikut.

Tabel II.44.
Persentase Balita Stunting
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017-2021

Indikator	Satuan	Tahun					
		2017	2018	2019	2020	Target 2021	Capaian 2021
Persentase Balita Stunting	%	34.8	35.6	30.6	Tidak dilakukan survey	24,59	27,4

Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2022

Faktor pendorong tercapainya penurunan persentase balita stunting dari tahun 2018 hingga 2021 adalah tersedianya alokasi makanan tambahan ibu hamil KEK bersumber dana Penugasan/DAK Fisik 2021 sejumlah 51.990 ton dan PMT (Pemberian Makanan Tambahan) bersumber dari dana Dekonsentrasi/Kemenkes RI, tersedianya alokasi makanan tambahan balita gizi kurang bersumber dari dana Penugasan / DAK Fisik 2021 sejumlah 82.363

ton serta adanya data balita gizi kurang by name by address sasaran PMT dari data aplikasi e-PPGBM (aplikasi online Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat). Beberapa faktor penghambat diantaranya alokasi distribusi di tingkat Puskesmas belum merata sehingga masih ada puskesmas yang kelebihan / kekurangan stok PMT , masih ada puskesmas yang terlambat mendistribusikan PMT ke sasaran serta masih ada puskesmas yang tidak mendistribusikan PMT ke sasaran sesuai kebutuhan anak dan ibu hamil dengan alasan pemerataan.

2.2.2.6. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Jumlah penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) Provinsi Sulawesi Selatan Agustus 2021 sebanyak 6.817.600 orang. Penduduk Usia Kerja terbagi atas 2 yaitu : 1) Bukan Angkatan Kerja sebanyak 2.404.818 orang menurun sebanyak 63.666 orang dibanding tahun 2020. 2) Angkatan kerja mencapai 4.412.782 orang, naik 136.782 orang dibanding Agustus 2020. Angkatan kerja terdiri dari penduduk bekerja 4.160.433 orang dan pengangguran 252.349 orang. Dibandingkan Agustus 2020, jumlah penduduk yang bekerja bertambah 150.433 orang, sedangkan pengangguran turun sebanyak 17.468 orang.

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) merupakan jumlah angkatan kerja dibagi dengan jumlah penduduk usia kerja, dan merupakan indikator yang dapat menggambarkan keadaan penduduk yang berumur 15 tahun keatas yang berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi. Tingginya angka TPAK perlu dicermati karena apabila disebabkan oleh bertambahnya penduduk yang bekerja menunjukkan partisipasi yang baik, akan tetapi jika disebabkan oleh bertambahnya jumlah pencari kerja, maka menunjukkan rendahnya kesempatan kerja.

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) pada Agustus 2021 sebesar 64.73 persen. Indikator ini meningkat 1,32 persen dibanding TPAK Agustus 2020. Peningkatan TPAK disebabkan meningkatnya angkatan kerja. Selengkapnya pada tabel berikut.

Tabel II.45.
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (periode Agustus)
Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2017 – 2021

Indikator	Satuan	Tahun Target Capaian					
		2017	2018	2019	2020	Target 2021	Capaian 2021*
Angkatan Kerja	Orang	3.812.358	3.988.029	4.030.400	4.280.000	4..451.275	4.412.782
Bekerja	Orang	3.598.663	3.774.924	3.830.096	4.010.000	4.086.752	4.160.433
Pengangguran	Orang	213.695	213.105	200.304	269.817	264.522	252.349
Bukan Angkatan Kerja	Orang	2.439.019	2.340.550	2.376.885	2.468.484	2.477.958	2.404.818
Penduduk Usia Kerja	Orang	6.251.377	6.328.579	6.407.285	6.744.921	6.829.233	6.817.600
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	%	60,98	63,02	62,90	63,40	63,72	64,73

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2016-2020 (des)
**nilai Agustus 2021*

2.2.2.7. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Tingkat pengangguran terbuka Provinsi Sulawesi Selatan 2021 menunjukkan capaian sebesar 5,72 persen, capaian ini telah melampaui target yang ditetapkan sebesar 6,08 persen. Faktor yang mendorong tercapainya perbaikan pada tingkat pengangguran terbuka dibanding capaian tahun sebelumnya adalah meningkatkan tingkat partisipasi angkatan sebesar 1,32 persen poin. Lapangan kerja yang mengalami peningkatan persentase terbesar adalah sektor perdangan besar dan eceran sebesar 0,89 persen poin. Jika dibandingkan dengan tingkat penganguran terbuka pada wilayah setaranya, terdapat 8 provinsi lainnya yang menunjukkan capaian yang lebih baik. Namun demikian capaian Provinsi Sulawesi Selatan lebih baik jika dibanding daerah setaranya yang berada di Provinsi Jawa Timur dan Kalimantan Barat. Data selengkapnya terkait perbandingan Tingkat pengangguran terbuka Provinsi Sulawesi Selatan, wilayah setara dan nasional pada tabel berikut.

Tabel II.46.
Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka periode Agustus (Persen)
Sulawesi Selatan, Wilayah Setara, dan Nasional 2017-2021

Provinsi/ Nasional	Tingkat Pengangguran Terbuka				
	2017	2018	2019	2020	2021
KALIMANTAN UTARA	5,54	5,11	4,49	4,97	4,58
LAMPUNG	4,33	4,04	4,03	4,67	4,69
MALUKU UTARA	5,33	4,63	4,81	5,15	4,71
KALIMANTAN SELATAN	4,77	4,35	4,18	4,74	4,95
SUMATERA SELATAN	4,39	4,27	4,53	5,51	4,98
KEP. BANGKA BELITUNG	3,78	3,61	3,58	5,25	5,03
JAMBI	3,87	3,73	4,06	5,13	5,09
BALI	1,48	1,40	1,57	5,63	5,37
SULAWESI SELATAN	5,61	4,94	4,62	6,31	5,72
JAWA TIMUR	4,00	3,91	3,82	5,84	5,74
KALIMANTAN BARAT	4,36	4,18	4,35	5,81	5,82
Nasional	**5,50**	**5,30**	**5,23**	**7,07**	**6,49**

Sumber : BPS Nasional, Tahun 2017-2022

2.2.2.8. Rasio Penduduk yang Bekerja

Rasio penduduk yang bekerja di Provinsi Sulawesi Selatan menunjukkan mulai adanya peningkatan dari tahun 2020 ke tahun 2021 sebagai bentuk usaha pemulihan ekonomi dalam menghadapi covid 19, meskipun demikian nilai yang diperoleh sebesar 94,28 perseratus penduduk belum mencapai target yang diharapkan sebesar 94,69 perseratus penduduk, kondisi ini dipengaruhi oleh masih menurunnya penyerapan tenaga kerja pada lapangan pekerjaan utama tertentu dari tahun 2020 ke tahun 2021, lapangan kerja utama yang mengalami penurunan penyerapan jumlah tenaga kerja adalah pada setor pertanian, kehutanan dan perikanan mengalami penurunan sebesar 2,4 persen, sektor pengadaan listrik dan gas mengalami penurunan sebesar 19,24 persen, sektor transfortasi dan pergudangan mengalami penurunan sebesar 7,69

persen dan sector real estate 14,33 persen. Data perbandingan persentase penduduk bekerja Provinsi Sulawesi selatan dan Nasional selengkapnya pada tabel berikut.

Tabel II.47.
Perbandingan Rasio penduduk bekerja (Periode Agustus)
Di Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2017-2021

Persen	Satuan	Tahun					
		2017	2018	2019	2020	Target 2021	Capaian 2021
Sulawesi Selatan	Perseratus Penduduk	94,39	94,65	95,03	93,69	94,69	94,21
Nasional	Perseratus Penduduk	94,50	94,66	94,72	93,69	90.9-92.3	95,06

Sumber: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2022

2.2.2.9. Proporsi Tenaga Kerja yang Berusaha Sendiri dan Pekerja Bebas Keluarga Terhadap Total Kesempatan Kerja

Proporsi tenaga kerja yang berusaha sendiri dan bekerja bebas keluarga terhadap total kesempatan kerja adalah merupakan jumlah tenaga kerja yang berusaha sendiri ditambah dengan jumlah pekerja bebas keluarga terhadap total kesempatan kerja. Tahun 2021 menunjukkan adanya peningkatan nilai sebesar 0,35 persen poin dari target yang ditetapkan sebesar 36,97 persen selengkapnya pada tabel berikut.

Tabel II.48.
Proporsi Tenaga Kerja yang Berusaha Sendiri dan
Pekerja Bebas Keluarga Terhadap Total Kesempatan Kerja
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017-2021

Uraian	Satuan	Tahun					
		2017	2018	2019	2020	Target 2021	Capaian 2021
Proporsi Tenaga Kerja yang Berusaha Sendiri dan Pekerja Bebas Keluarga Terhadap Total Kesempatan Kerja	%	37,3	36,5	36,9	36,9	36,97	37,32

Sumber: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Selatan, ,Tahun 2022

2.2.2.10. Indeks Pelayanan Publik

Indeks pelayanan publik yang merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan publik dilingkungan pemerintah daerah berdasarkan aspek kebijakan pelayanan, aspek profesionalisme SDM, aspek samara dan prasarana, aspek system informasi pelayanan public, aspek konsultasi dan pengaduan serta aspek inovasi. Capaian Indeks Pelayanan Publik Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021 memperlihatkan capaian yang meningkat dari tahun 2020 menjadi nilai 4,10 atau kategori A. Capaian tersebut melampaui target yang berasal dari 2 unit pelayanan yaitu pelayanan Dinas Penanaman Modal – Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) dan Samsat. Capaian indeks pelayanan publik tahun 2018 – 2021 selangkapnya pada tabel berikut.

Tabel II.49.
Indeks Pelayanan Publik Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017-2021

Indikator	Satuan	Tahun					
		2017	2018	2019	2020	Target 2021	Capaian 2021
Indeks Pelayanan Publik	%	NA	B- (3,49)	B (4)	B (4,02)	B(3,51 – 4)	A- (4,10)

Sumber: Kemenpan RB, Tahun 2022

2.2.2.11. Indeks Kepuasan Masyarakat

Indeks kepuasan masyarakat merupakan salah satu tolak ukur untuk menggambarkan persepsi penerimaan pelayanan public terhadap pelayanan public yang diselenggarakan oleh pemberi pelayanan publik. Capaian tahun 2021 menunjukkan peningkatan nilai namun masih dalam kategori yang sama yaitu kategori B. Adapun indeks pelayanan public yang dicapai dari masing-masing institusi yang terdiri dari institusi perizinan, institusi pelayanan kependudukan dan institusi pelayanan kesehatan menunjukkan capaian dalam kelompok kategori B. Data selengkapnya pada tabel berikut.

Tabel II.50.
Indeks Kepuasan Masyarakat Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017-2021

Indikator	Satuan	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	Capaian 2021
Indeks Kepuasan Masyarakat	%	44,63	51,55	80,92	77,32	78,31 (B)
IKM Institusi Pelayanan Peizinan	%	Tidak dilakukan survey	85,36	83,61	80,15	83,60
IKM Institusi Pelayanan Kependudukan	%	Tidak dilakukan survey	Tidak dilakukan survey	Tidak dilakukan survey	Tidak dilakukan survey	82,71
IKM Institusi Pelayan Kesehatan	%	Tidak dilakukan survey	77,05	77,58	77,8	77,94

Sumber : PTSP, Dukcapil, Dinas Kesehatan, 2022

2.2.2.12. Persentase PAD Terhadap Pendapatan

Pendapatan daerah yang berasal dari pendapatan asli daerah provinsi Sulawesi Selatan tahun 2021 menunjukkan peningkatan sebesar 3,11 persen dari capaian tahun 2020. Berdasarkan PP nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah, terdapat 4 komponen penyusun pendatan asli daerah yaitu pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Dari keempat komponen tersebut, factor yang memberikan kontribusi cukup besar terhadap

peningkatan PAD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021 adalah komponen pajak daerah yang mengalami peningkatan 14,88 persen dan komponen retribusi daerah dengan peningkatan sebesar 14,39 persen. Persentase PAD terhadap pendapatan Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2017 hingga 2021 selengkapnya pada tabel berikut.

Tabel II.51.
Persentase PAD Terhadap Pendapatan
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017-2021

Indikator	Satuan	Tahun					
		2017	2018	2019	2020	Target 2021	Capaian 2021
Persentase PAD Terhadap Pendapatan	%	40,62	42,67	43,23	41,54	42,07	44,65

Sumber : Bapenda Provinsi Sulawesi Selatan, 2022

2.2.2.13. Opini Badan Pemeriksa Keuangan

Capaian untuk indikator opini BPK terhadap kinerja pengelolaan keuangan dan asset daerah pemerintah provinsi Sulawesi Selatan tahun 2021 menunjukkan capaian yang yang sesuai target yang diharapkan yaitu WTP setelah sebelumnya mendapat opini WDP. Hal ini disebabkan oleh penyajian laporan keuangan yang telah sesuai dengan standar akuntabilitas pemerintah, tidak terdapat ketidakpatuhan yang berpengaruh langsung pada material serta lancer dalam melakukan pengendalian intern yang memadai. Opini BPK Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017 hingga 2021 selengkapnya pada tabel berikut.

Tabel II.52.
Opini BPK Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017-2021

Indikator	Satuan	Tahun					
		2017	2018	2019	2020	Target 2021	Capaian 2021
Opini BPK	%	WTP	WTP	WTP	WDP	WTP	WTP

Sumber: BPK RI, 2022

2.2.2.14. Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH)

Skor Pola Pangan Harapan (PPH) merupakan angka yang menunjukkan keberhasilan terhadap penganekaragaman konsumsi pangan yang tercermin dari makin beragam dan berimbangnya pola konsumsi pangan penduduk. Capaian tahun 2021 mengalami penurunan sebesar 3,94% dari tahun sebelumnya, hal ini disebabkan tingkat kesadaran masyarakat untuk mengkonsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang dan aman belum sesuai yang diharapkan, karena masih didominasi oleh unsur karbohidrat, khsusnya beras, sedangkan unsur protein dan mineral masih kurang. Data capaian skor pangan harapan (PPH) selengkapnya pada tabel berikut.

Tabel II.53.
Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Pertanian
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017-2021

Indikator	Satuan	Tahun					
		2017	2018	2019	2020	Target 2021	Capaian 2021
Skor Pola Pangan Harapan	%	92,60	82,60	83,40	83,7	85,3	80,40

Sumber:Dinas Tanaman Pangan Holtikultura dan Perkebunan, Tahun 2022

2.2.2.15. Penanganan Daerah Rawan Pangan

Penanganan daerah rawan pangan merupakan upaya untuk menangani kondisi ketidakcukupan pangan dan gizi yang dialami oleh masyarakat.

Tabel II.54.
Penganan Daerah Rawan Pangan (Data timpang)
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017-2021

Komoditas	Satuan	Tahun					
		2017	2018	2019	2020	Target 2021	Capaian 2021
Penanganan Daerah Rawan Pangan (Data timpang)	%	5,88	5,21	16,29	7,49	6,97	25,64

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan, Tahun 2022

2.2.2.16. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)

Capaian Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) mulai tahun 2018 hingga 2021 mulai meningkatkan, dengan capaian tahun 2021 sebesar 76,32 persen. Capaian IDG menunjukkan peran aktif wanita dalam kehidupan ekonomi dan politik. Menurunnya capaian IDG tahun 2021 disebabkan oleh masih perlunya peningkatan partisipasi politik dan pengambilan keputusan yang mempertimbangkan proporsi laki-laki dan perempuan yang seimbang, serta partisipasi dan pengambilan keputusan dari aspek ekomoni yang mempertimbangkan kesetaraan posisi pekerjaan dan pendapatan laki-laki dan perempuan. Namun demikian capaian 74,76 persen masih lebih baik dibanding rata-rata capaian IDG Kabupaten dan kota di provinsi Sulawesi selatan yang memperoleh angka 65,87%. Adapun capaian IDG Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2019 dan 2020 telah melebihi capaian nasional, namun tahun 2021 mengalami penurunan sehingga berada dibawa capaian nasional. Data selengkapnya terlihat pada tabel berikut.

Tabel II.55.
Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)
Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional 2017 - 2021

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Satuan	Tahun					
		2017	2018	2019	2020	Target 2021	Capaian 2021
Sulawesi Selatan	%	70,57	69,14	76,01	76,32	75,21	74,76
Nasional	%	71,74	72,10	75,24	75,57	73,50	76,26

Sumber:BPS, Tahun 2022

Tabel II.56.
Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kabupaten dan Kota
di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017 – 2021

Kabupaten/Kota	Tahun				
	2017	2018	2019	2020	2021
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
Kepualauan Selayar	64,74	64,69	68,03	70,06	68,07
Bulukumba	67,16	66,78	69,89	68,22	67,10
Bantaeng	77,74	80,53	80,27	80,26	81,20
Jeneponto	67,93	72,37	68,04	68,24	68,68
Takalar	66,60	70,55	70,66	68,78	70,67
Gowa	69,01	61,06	78,31	77,97	79,71
Sinjai	72,56	70,24	72,48	73,46	73,59
Maros	65,16	65,48	69,93	72,43	72,38
Pangkep	56,96	56,20	57,03	59,44	59,94
Barru	63,54	69,24	63,41	63,96	63,98
Bone	62,75	63,16	58,55	56,86	57,55
Soppeng	69,35	73,75	71,45	71,15	70,54
Wajo	60,62	61,07	55,09	56,24	56,30
Sidenreng Rappang	49,02	52,71	56,80	56,86	56,39
Pinrang	59,61	61,73	67,92	68,11	68,43
Enrekang	58,68	59,36	58,28	60,32	56,51
Luwu	61,61	63,58	55,89	57,15	57,29
Tana Toraja	73,99	74,14	69,32	68,50	68,77
Luwu Utara	44,98	46,24	38,92	38,11	41,11
Luwu Timur	45,96	46,06	50,76	50,76	54,09
Toraja Utara	56,04	56,15	62,58	60,98	62,75
Kota Makassar	68,73	67,89	78,32	77,61	76,59
Kota Pare-Pare	61,56	66,62	73,86	74,06	70,86
Kota Palopo	70,85	74,87	77,53	77,47	73,10

Sumber : BPS, 2022

2.2.2.17. Indeks Reformasi Birokrasi

Capaian indeks reformasi birokrasi tahun 2021 diperoleh nilai 61,18 dengan kategori B, capaian ini tidak mencapai target yang ditetapkan sebesar 71 – 80 dengan kategori BB. Penurunan ini disebabkan oleh semakin banyaknya focus yang evaluasi serta adanya perubahan instrument penilaian Reformasi birokrasi yang penekanannya pada pencapaian hasil. Sehingga meskipun belum mencapai target, nilai indeks reformasi birokrasi Provinsi Sulawesi Selatan sedikit mengalami peningkatan dari tahun 2020. Data selengkapnya pada tabel berikut.

Tabel II.57.
Indeks Reformasi Birokrasi

Indikator	Satuan	Tahun					
		2017	2018	2019	2020	Target 2021	Capaian 2021
Indeks Reformasi Birokrasi	%	CC	B	B	B (60,07)	BB (71 – 80)	B (61,18)

Sumber :

2.2.2.18. Nilai SAKIP Provinsi

Capaian nilai SAKIP di lingkungan pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2020 menunjukkan penurunan sebesar 2,04 poin dari nilai sebelumnya di tahun 2019. Kondisi ini memerlukan perbaikan yang significan untuk dapat mencapai target kriteria BB yang diharapkan pada tahun 2021. Capaian 2021 yang tersaji pada tabel merupakan angka sementara sebagai prediksi capaian berdasarkan perbaikan yang telah dilakukan selama ini, Angka resmi baru akan didapatkan dari Kementerian ….., data selengkapnya terlihat pada tabel berikut.

Tabel II.58.
Nilai SAKIP Provinsi

Indikator	Satuan	Tahun					
		2017	2018	2019	2020	Target 2021	Capaian 2021
Nilai SAKIP Provinsi			B (64,28)	B (65,06)	B (63,02)	BB (>70-80)	B (65,01)

Sumber: Kemenpan, Tahun 2022

Dalam mendorong peningkatan capaian nilai SAKIP beberapa hal yang dapat disarankan dalam hal pelaksanaan implementasi SAKIP adalah sebagai berikut :

a. Perlu peningkatan komitmen dan konsistensi dalam hal penerapan perencanaan/pengalokasian anggaran berbasis kinerja dan pelaksanaan anggaran yang lebih memprioritaskan pada kegiatan atau aktivitas yang lebih berpengaruh terhadap capaian kinerja;
b. Perlu dilakukan perbaikan dalam penyusunan perjanjian kinerja sehingga memuat kinerja utama (sasaran dan indikator kinerja utama);
c. Perlu dilakukan penyempurnaan rumusan kinerja pada tingkat eselon III pada seluruh perangkat daerah, sehinmgga selaras dengan indikator kinerja utama masing-masing perangkat daerah;
d. Memperbaiki kualias penyajian maupun kualitas pengukuran data kinerja pada laporan kinerja, terutama laporan kinerja perangkat daerah;
e. Mendorong penguatan system merit melalui pemanfaatan hasil pengukuran kinerja yang sudah dibangun sebagai dasar pemberian penghargaan dan hukuman;

f. Mulai menerapkan budaya kinerja, dengan melakukan monitoring dan evalausi secara berkala dan berkelanjutan terhadap pencapaian kinerja yang telah diperjanjikan pada perjanjian kinerja, yang dipimpin langsung oleh pimpinan perangkat daerah;

g. Laporan kinerja telah dimanfaatkan sebagai umpan balik dalam

2.2.2.19. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)

Nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017 hingga tahun 2021 menunjukkan nilai yang fluktuatif, namun jika dikaji lebih lanjut fluktuasi nilai tersebut dipengaruhi oleh adanya penambahan indikator yang pada tahun 2020 yaitu indikator indeks kualitas air laut (IKAL). Sehingga nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup pada tahun 2017 – 2019 mengalami peningkatan dengan indikator pembangun Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara dan Indeks Kualitas Lahan. Pada tahun 2019 ke tahun 2020 terjadi penurunan nilai, kondisi ini dipengaruhi oleh penurunan nilai indeks kualitas air dan adanya penambahan 1 jenis indikator yaitu Indeks Kualitas Air Laut. Namun di tahun 2021 mengalami peningkatan sebesar 2,08 persen yang dipengaruhi oleh peningkatan indeks kualitas air, indeks kualitas udara dan indeks kualitas air laut.

Tabel II.59.
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)

Indikator	Satuan	Tahun					
		2017	2018	2019	2020	Target 2021	Capaian 2021
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Angka	73,24	74,83	75,12	71,74	72,25	73,23

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup, Tahun 2022

2.2.2.20. Potensi Penurunan emisi GRK (Juta Ton CO2Eq)

Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan berkomitmen mendukung kebijakan nasional Pembangunan Rendah Karbon (PRK). Dukungan tersebut diwujudkan dengan penetapan PERGUB Nomor 11 Tahun 2020 tentang tentang perubahan atas peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 59 Tahun 2012 tentang Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Provinsi Sulawesi Selatan. Pergub ini antara lain mengatur pelibatan pemerintah kabupaten/kota dalam melaporkan kegiatan aksi mitigasi GRK dan menetapkan target penurunan emisi gas rumah kaca (GRK) tahun 2030.

Berdasarkan hasil kaji ulang Rencana Aksi Daerah penurunan emisi gas rumah kaca (RAD- GRK), target penurunan emisi GRK hingga tahun 2030 sebesar 3,5 juta ton CO^2 eq atau sebesar 5,6% terhadap nilai Business as usual (BAU). Berdasarkan data capaian indikator kinerja, potensi penurunan emisi gas rumah kaca (GRK) Tahun 2019 sampai tahun 2021 dapat tercapai. Target penurunan emisi tahun 2021 adalah sebesar 1,07 juta ton CO2 eq dengan realisasi sebesar 1,13 juta ton CO2 eq. Tingkat capaian penurunan emisi gas rumak kaca (GRK) hingga tahun 2021 adalah 105,61%, jumlah kegiatan aksi mitigasi sebesar 704 kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah provinsi dan

pemerintah kabupaten kota. Perkembangan kondisi penurunan emisi Gas Rumah kaca Provinsi Sulawesi selatan tahun 2017 hingga 2021 selengkapnya pada tabel berikut.

Tabel II.60.
Potensi Penurunan emisi GRK (Juta Ton CO2Eq)

Indikator	Satuan	Tahun					
		2017	2018	2019	2020	Target 2021	Capaian 2021
Potensi Penurunan emisi GRK	(Juta Ton CO2Eq)	0,79	0,84	0,89	0,96	1,07	1,13

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup, Tahun 2021

2.2.3. Seni Budaya dan Olah Raga

Ketersediaan gedung lembaga sanggar kesenian diprovinsi Sulawesi Selatan tidak mengalami perubahan yang signifikan dari tahun 2018 hingga tahun 2021. Data menunjukkan setiap 100.000 penduduk terdapat 5 lembaga sanggar seni di Provinsi Sulawesi Selatan. Demikian pula halnya dengan jumlah gedung kesenian yang tidak mengalami peningkatan dari yahun 2018 hingga 2021, kondisi ini disebabkan oleh titik berat pembangunan masih difokuskan pada kesehatan dan pemulihan ekonomi yang perpengaruh langsung terhadap peningkatan pendapatan dan perbaikan daya beli masyarakat. Data selengkapnya terkait dengan perkembangan seni budaya dan olah raga di Sulawesi Selatan, selengkapnya pada tabel berikut.

Tabel II.61.
Perkembangan Seni Budaya dan Olah raga Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018 – 2021

Indikator	Satuan	Tahun			
		2018	2019	2020	2021
Jumlah Lembaga Sanggar Kesenian	Lembaga/10.000 penduduk	0,0452	0,0471	0,0468	0,0468
Jumlah gedung kesenian	Unit/10.000 penduduk	0,0001	0,0001	0,0001	0,0001
Jumlah Gedung Olah Raga	Unit/10.000 penduduk	0,0025	0,0026	0,0074	0,0074

Sumber :

2.3 Aspek Pelayanan Umum

2.3.1 Pelayanan Urusan Wajib Dasar

2.3.1.1 Pendidikan

2.3.1.1.1 Persentase Siswa SMA/SMK Yang Bebas Buta Aksara Al-Quran

Salah satu program prioritas Gubernur Sulawesi Selatan dalam pengentasan buta aksara Al-Qur'an adalah meningkatkan kemampuan siswa SMA/SMK dalam memahami bacaan Al-Qur'an. Oleh karena itu pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan melalui Dinas Pendidikan melaksanakan kegiatan pendidikan Al-Qur'an bagi siswa SMA/SMK se Sulawesi Selatan. Capaian indikator persentase siswa SMA/SMK yang bebas buta aksara Al-Qur'an belum

dilakukan pengukuran pada tahun 2017 hingga 2020 karena menyesuaikan dengan indicator program yang terdapat pada Perubahan RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan 2018-2023. Sejumlah 477 SMA dan 336 SMK menerapkan pembelajaran AL-Qur'an dari total 1.122 SMA/SMK di Sulawesi Selatan. Sehingga diharapkan dengan penerapan pembelajaran Al-Qur'an sebagai kurikulum tambahan dapat meningkatkan persentase siswa SMA/SMK yang bebas buta aksara Al-Qur'an. Capaian target persentase siswa SMA/SMK yang bebas buta aksara Al-Qur'an tahun 2021 melampaui target yang ditetapkan dengan capaian 75 persen.

Tabel II.62.
Persentase siswa SMA/SMK yang bebas buta aksara Al-Quran
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017-2021

Indikator	Satuan	Tahun					
		2017	2018	2019	2020	Target 2021	Capaian 2021
Persentase siswa SMA/SMK yang bebas buta aksara Al-Qur'an	%	Belum diukur				60,25	75,00

Sumber: Dinas Pendidikan Prov. Sulawesi Selatan, Tahun 2021

2.3.1.1.2 Persentase SMA/SMK Yang Bebas Narkoba

Sejak tahun 2019 salah satu syarat dalam penerimaan siswa baru tingkat SMA/SMK adalah bebas narkoba sehingga siswa yang dinyatakan lulus dalam penerimaan siswa baru wajib mengikuti tes narkoba yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan bekerjasama dengan Badan Narkotika Nasional (BNN). Capaian indikator persentase SMA/SMK yang bebas Narkoba belum dilakukan pengukuran pada tahun 2017 hingga 2018 karena tahun 2019 merupakan tahun pertama pelaksanaan program RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan 2018-2023. Sejumlah 504 SMA/SMK menjadi sampel dalam program tersebut dengan capaian 91,50 persen SMA/SMK dinyatakan bebas narkoba.

Tabel II.63.
Persentase SMA/SMK yang bebas Narkoba
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017-2021

Indikator	Satuan	Tahun					
		2017	2018	2019	2020	Target 2021	Capaian 2021
Persentase SMA/SMK yang bebas Narkoba	%	Belum diukur		90,00	91,00	91,45	91,50

Sumber: Dinas Pendidikan Prov. Sulawesi Selatan, Tahun 2021

2.3.1.1.3 Persentase jumlah warga negara usia 16 -18 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah (SPM)

Kinerja pembangunan pendidikan Sulawesi Selatan dapat digambarkan dari beberapa indikator keberhasilan antara lain angka partisipasi sekolah dan penyediaan sarana dan prasarana pendidikan sesuai standar. Angka partisipasi

sekolah diukur dari Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM) pada setiap jenjang pendidikan. Angka partisipasi kasar tertinggi dicapai pada jenjang pendidikan SD/MI 106,85 persen dan secara nasional sebesar 106,20 persen. Adapun jenjang dengan APK terendah adalah PAUD baik di Provinsi Sulawesi Selatan maupun secara nasional yang capaiannya masih dibawa 40,17 persen.

Tabel II.64.
Angka Partisipasi Kasar (APK)
Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2017-2021

Jenjang Pendidikan	Satuan	Angka Partisipasi Kasar (APK)				
		2017	2018	2019	2020	2021
Sulawesi Selatan						
PAUD	%	67,51	34,50	31,17	23,74	30,49
SD/MI	%	109,63	110,28	108,46	106,99	106,85
SMP/MTs	%	83,97	86,97	84,22	86,97	86,82
SMA/SMK/MA	%	83,14	81,74	86,09	86,44	90,05
Nasional						
PAUD	%	74,28	38,85	32,53	37,52	40,17
SD/MI	%	108,50	108,61	107,46	106,32	106,20
SMP/MTs	%	90,23	91,52	90,57	92,06	92,80
SMA/SMK/MA	%	82,84	80,68	83,98	84,53	85,23

Sumber: Dinas Pendidikan Prov. Sulawesi Selatan, Tahun 2021

Diagram II.1.
Angka Partisipasi Kasar (APK) Berdasarkan Jenjang Pendidikan
Tahun 2021

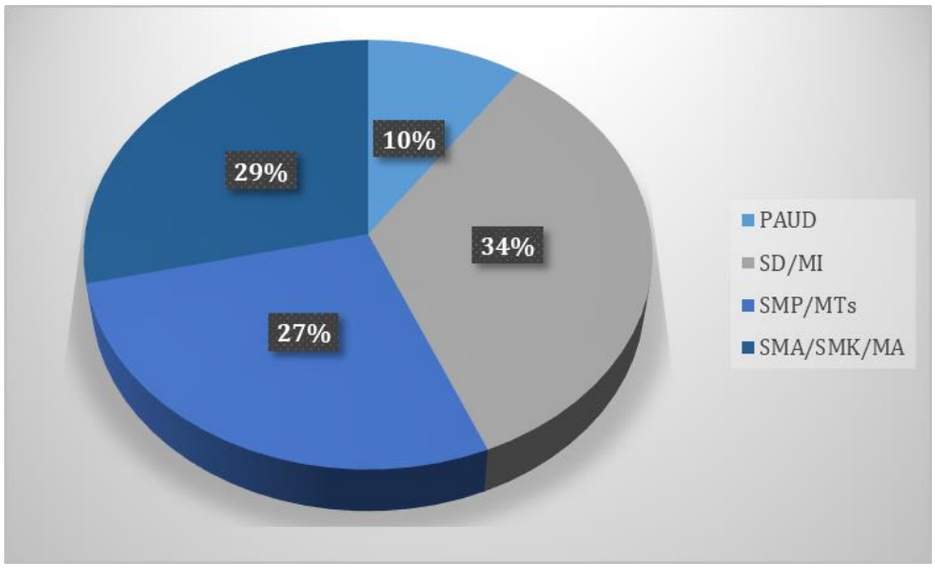

Sumber: Dinas Pendidikan Prov. Sulawesi Selatan, Tahun 2021

Secara kewenangan Angka Partisipasi Kasar SMA/SMK/MA yang merupakan kewenangan pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan mengalami peningkatan, bahkan pencapaiannya pada tahun 2021 sebesar 90,05 persen, diatas Angka Partisipasi Kasar Nasional yang nilainya sebesar 85,23 persen.

Angka Partisipasi Kasar pada tahun 2021 menurut kabupaten/kota tertinggi, terdapat yaitu Kota Palopo mencapai angka 117,19 persen.

Tabel II.65.
Angka Partisipasi Kasar (APK) Menurut Kabupaten/Kota jenjang SMA/SMK/MA Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2021

No.	Kabupaten/Kota	Angka Partisipasi Kasar (APK)			
		2018	2019	2020	2021
1	Kepulauan Selayar	86,45	76,84	78,29	85,74
2	Bulukumba	80,02	91,48	89,22	100,23
3	Bantaeng	72,80	89,09	89,32	95,87
4	Jeneponto	69,15	79,50	81,00	86,89
5	Takalar	97,92	74,17	75,30	110,69
6	Gowa	79,97	89,99	90,32	86,28
7	Sinjai	76,19	85,25	84,95	92,59
8	Bone	64,84	87,87	88,98	78,66
9	Maros	77,24	92,19	90,50	90,30
10	Pangkajene Kepulauan	93,15	84,85	87,01	86,51
11	Barru	72,09	69,27	70,86	111,24
12	Soppeng	89,49	91,15	92,45	90,82
13	Wajo	61,40	79,57	80,69	72,14
14	Sidenreng Rappang	80,80	81,63	81,24	75,26
15	Pinrang	83,65	80,96	81,12	86,89
16	Enrekang	92,92	96,40	97,26	81,38
17	Luwu	87,97	93,98	94,59	99,66
18	Tana Toraja	84,06	73,91	74,77	89,64
19	Luwu Utara	82,22	93,96	91,27	83,16
20	Luwu Timur	77,46	85,93	87,33	104,45
21	Toraja Utara	63,81	81,21	83,60	102,89
22	Makassar	96,09	90,11	90,52	87,52
23	Pare-Pare	82,11	90,86	92,07	116,61
24	Palopo	91,56	110,74	107,53	117,19
Sulawesi Selatan		**81,74**	**86,09**	**86,44**	**90,05**

Sumber: Dinas Pendidikan Prov. Sulawesi Selatan, Tahun 2021

Grafik II. 1
Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA Tahun 2021

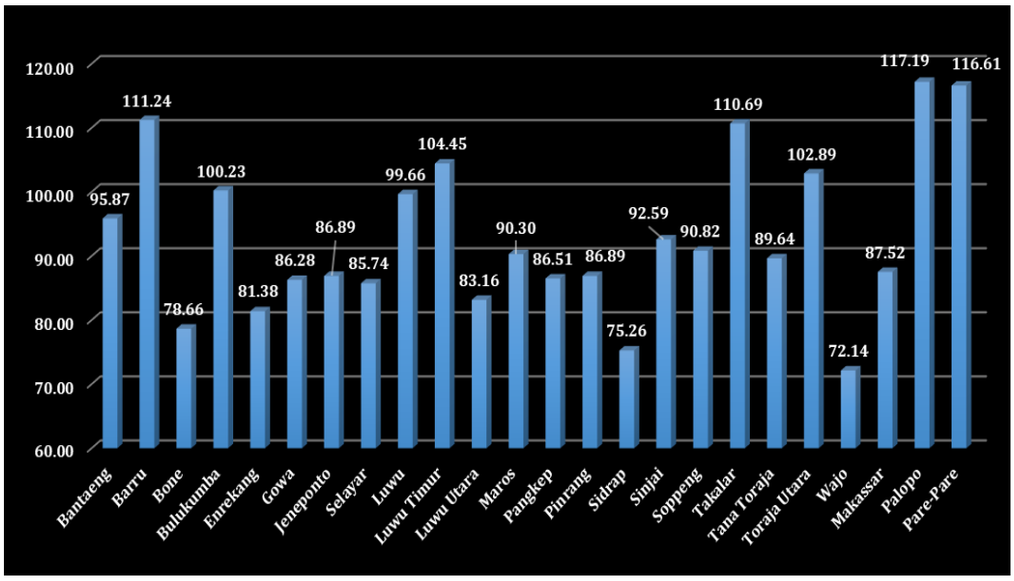

Sumber: Dinas Pendidikan Prov. Sulawesi Selatan, Tahun 2021

Angka Partisipasi Murni (APM) menunjukkan partisipasi sekolah penduduk usia sekolah di tingkat pendidikan tertentu. APM pada tiap jenjang pendidikan di Sulawesi Selatan menunjukkan adanya peningkatan setiap tahunnya, namun jika dibandingkan dengan APM Nasional maka dapat digambarkan bahwa, hanya jenjang pendidikan SD Sederajat yang capaian APM-nya tahun 2021 diatas rata-rata Nasional yaitu 98,26 persen dan secara Nasional hanya mencapai 97,80 persen. Sedangkan pada jenjang pendidikan SMP Sederajat capaian APM-nya masih berada dibawah rata-rata capaian nasional. Capaian APM SM Sederajat pada tahun 2021 mencapai 67,40 persen mengalami peningkatan setiap tahun dan berada diatas APM SM Nasional.

Tabel II.66.
Angka Partisipasi Murni (APM) Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2017-2021

Jenjang Pendidikan	Satuan	Angka Partisipasi Murni (APM)				
		2017	2018	2019	2020	2021
Sulawesi Selatan						
SD Sederajat	%	97,49	98,03	98,06	97,98	98,26
SMP Sederajat	%	74,36	75,13	75,82	76,17	77,20
SM Sederajat	%	59,86	60,03	60,14	60,63	67,40
Nasional						
SD Sederajat	%	97,19	97,58	97,64	97,69	97,80
SMP Sederajat	%	78,40	78,84	79,40	80,12	80,59
SM Sederajat	%	60,37	60,67	60,84	61,25	61,65

Sumber: Dinas Pendidikan Prov. Sulawesi Selatan, Tahun 2021

Diagram II.2.
Angka Partisipasi Murni (APM) Berdasarkan Jenjang Pendidikan
Tahun 2021

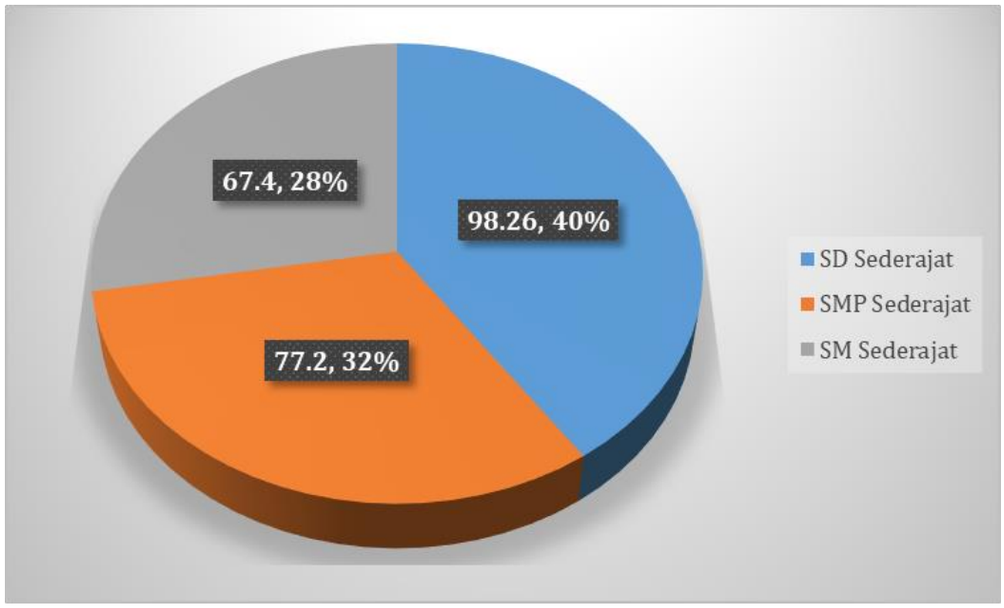

Sumber: Dinas Pendidikan Prov. Sulawesi Selatan, Tahun 2021

Angka Partisipasi Sekolah merupakan proporsi dari penduduk kelompok usia sekolah tertentu yang sedang bersekolah (tanpa memandang jenjang pendidikan yang ditempuh) terhadap penduduk kelompok usia sekolah. Capaian Angka Partisipasi Sekolah Sulawesi Selatan pada setiap kelompok umur menunjukkan peningkatan peningkatan dari tahun 2016 hingga tahun 2021. Sementara jika dibandingkan Angka Partisipasi Sekolah dengan Nasional pada penduduk usia sekolah 16-18 tahun, maka diperoleh gambaran bahwa Angka Partisipasi Sekolah pada penduduk usia 16-18 tahun di Sulawesi Selatan yang capaiannya 71,21 persen berada di bawah rata-rata Nasional yaitu 73,09 persen.

Tabel II.67.
Angka Partisipasi Sekolah
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017-2021

Kelompok Umur	Satuan	Angka Partisipasi Sekolah (APS)				
		2017	2018	2019	2020	2021
Sulawesi Selatan						
Penduduk Usia 7-12 Tahun	%	99,16	99,25	99,23	99,25	99,29
Penduduk Usia 13-15 Tahun	%	93,09	93,13	93,22	93,34	93,55
Penduduk Usia 16-18 Tahun	%	70,60	70,18	70,85	70,89	71,21
Penduduk Usia 19-24 Tahun	%	32,16	33,72	34,44	34,51	35,08
Nasional						
Penduduk Usia 7-12 Tahun	%	99,14	99,22	99,24	99,26	99,19
Penduduk Usia 13-15 Tahun	%	95,08	95,36	95,51	95,74	95,99
Penduduk Usia 16-18 Tahun	%	71,42	71,99	72,36	72,72	73,09
Penduduk Usia 19-24 Tahun	%	24,77	24,40	25,21	25,56	26,01

Sumber: Dinas Pendidikan Prov. Sulawesi Selatan, Tahun 2021

Capaian angka putus sekolah pada jenjang pendidikan SMA/SMK/MA dari tahun 2017 sebanyak 1,18 persen dan mengalami penurunan sampai Tahun 2019 menjadi 0.71 persen. Angka ini menunjukan adanya kondisi pemerataan dan keterjangkauan layanan pendidikan yang semakin baik. Keberhasilan ini didukung adanya pendanaan dana BOS nasional yang setiap tahunnya meningkat dan adanya sebagian daerah (Kab/Kota) menyediakan BOSDA. Pada tahun 2020 angka putus sekolah mengalami peningkatan menjadi 1,35 persen dan pada tahun 2021 mengalami penurunan yaitu sebesar 1,02 persen.

Tabel II.68.
Angka Putus Sekolah
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017-2021

Jenjang Pendidikan	Satuan	Angka Putus Sekolah				
		2017	2018	2019	2020	2021
SMA/SMK/MA	%	1,18	1,00	0,71	1,35	1,02

Sumber : Dinas Pendidikan Prov. Sulawesi Selatan, Tahun 2021

Kondisi angka kelulusan jenjang pendidikan SMA/SMK/MA dari tahun 2017 sampai ke tahun 2021 mengalami peningkatan. Pada tahun 2017, angka kelulusan jenjang pendidikan SMA/SMK/MA sebesar 99,95 persen, pada tahun 2018 meningkat menjadi 99,98 persen, pada tahun 2019 hingga 2021 mencapai 99,99 persen. Hal ini menunjukkan, bahwa hampir seluruhnya penduduk usia 16-18 tahun di Sulawesi selatan telah lulus pada jenjang pendidikan SMA/SMK/MA.

Tabel II.69.
Angka Kelulusan (AL) SMA/SMK/MA
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017-2021

Jenjang Pendidikan	Satuan	Angka Kelulusan (AL)				
		2017	2018	2019	2020	2021
SMA/SMK/MA	%	99,95	99,98	99,99	99,99	99,99

Sumber : Dinas Pendidikan Prov. Sulawesi Selatan, Tahun 2021

Berdasarkan data BPS dari tahun 2017 sampai tahun 2021, menunjukkan angka melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA mengalami peningkatan, yaitu dari 94,65 persen pada tahun 2017 menjadi 98,99 pada tahun 2018. Sementara pada tahun 2019 terjadi penurunan hingga tahun 2021 menjadi 93,82 persen, dimana salah satu penyebabnya adalah kondisi pandemic covid-19. Kondisi ini menunjukkan, menurunnya kemampuan masyarakat untuk dapat melanjutkan pendidikan hingga tingkat SMA/MA/SMK.

Tabel II.70.
Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017-2021

Jenjang Pendidikan	Satuan	Angka Kelulusan (AL)				
		2017	2018	2019	2020	2021
SMP/MTs ke SMA/SMK/MA	%	94,65	98,99	97,20	92,07	93,82

Sumber : Dinas Pendidikan Prov. Sulawesi Selatan, Tahun 2021

Sementara angka melanjutkan dari jenjang pendidikan SMP/MTs ke SMA/SMK/MA menurut Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan sampai pada tahun 2021 93,82 persen, menunjukkan penduduk kabupaten/kota usia 13-15 tahun yang melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi mencapai 93,82 persen, meningkat jika dibandingkan pada tahun 2020 dengan capaian 92,07 persen. Pada tahun 2021 terdapat 6 Kabupaten/kota yang angka melanjutkan pendidikan SMP/MTs ke SMA/SMK/MA tertinggi adalah Kota Palopo sebesar 115,95 persen, Kota Parepare 114,31 persen, Kabupaten Bantaeng 113,82 persen, Kabupaten Takalar 107,53 persen, dan Kota Makassar 104,54 persen. Adapun angka melanjutkan pendidikan SMP/MTs ke SMA/SMK/MA terendah adalah Kabupaten Sidrap yang hanya sebesar 87,68 persen.

Tabel II.71.
Angka Melanjutkan (AM) Jenjang Pendidikan SMP/MTs ke SMA/SMK/MA
Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2018-2021

No.	Kabupaten/Kota	Angka Melanjutkan (AM)			
		2018	2019	2020	2021
1	Kepulauan Selayar	97,06	95,56	97,16	95,79
2	Bulukumba	97,87	92,76	85,20	91,05
3	Bantaeng	97,15	112,57	105,11	113,82
4	Jeneponto	96,33	98,65	86,56	96,59
5	Takalar	97,91	107,53	100,14	107,53
6	Gowa	97,53	90,39	91,52	94,59
7	Sinjai	97,59	99,18	83,02	88,17
8	Bone	98,56	93,11	90,15	97,44
9	Maros	98,03	92,94	98,70	105,38
10	Pangkajene Kepulauan	97,57	94,69	86,51	91,23
11	Barru	98,39	95,11	87,28	89,69
12	Soppeng	97,26	98,33	94,20	95,81
13	Wajo	97,58	88,40	84,10	88,54
14	Sidenreng Rappang	98,50	89,42	81,58	87,68
15	Pinrang	97,33	93,96	86,55	89,21
16	Enrekang	98,36	98,04	91,56	100,40
17	Luwu	98,95	91,11	88,25	91,13
18	Tana Toraja	98,84	100,60	96,69	97,64

No.	Kabupaten/Kota	Angka Melanjutkan (AM)			
		2018	2019	2020	2021
19	Luwu Utara	96,26	90,35	90,75	95,02
20	Luwu Timur	98,09	92,73	87,75	92,33
21	Toraja Utara	97,81	96,28	96,63	98,00
22	Makassar	98,68	103,80	96,16	104,54
23	Pare-Pare	99,02	120,56	104,97	114,31
24	Palopo	99,16	124,43	112,45	115,94
Sulawesi Selatan		**98,15**	**97,20**	**92,07**	**93,82**

Sumber : Dinas Pendidikan Prov. Sulawesi Selatan, Tahun 2021

Salah satu indikator penilaian mendasar dari tingkat pendidikan penduduk di suatu daerah adalah dengan melihat angka melek huruf (AMH). Melek huruf sendiri adalah kemampuan membaca dan menulis, dimana seseorang mempunyai kemampuan membaca dan menulis huruf latin dan atau huruf lainnya. Sedangkan seseorang hanya dapat membaca dan menulis saja belum dianggap sebagai melek huruf. Indikator ini dapat dijadikan gambaran peningkatan kualitas sumber daya manusia disuatu daerah. Angka melek huruf Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017– 2021, mengalami peningkatan dimana pada tahun 2017 berada pada angka 91,65 persen meningkat menjadi 94,16 persen pada tahun 2021.

Grafik II. 2
Angka Melanjutkan Jenjang SMA/SMK/MA Sulawesi Selatan Tahun 2021

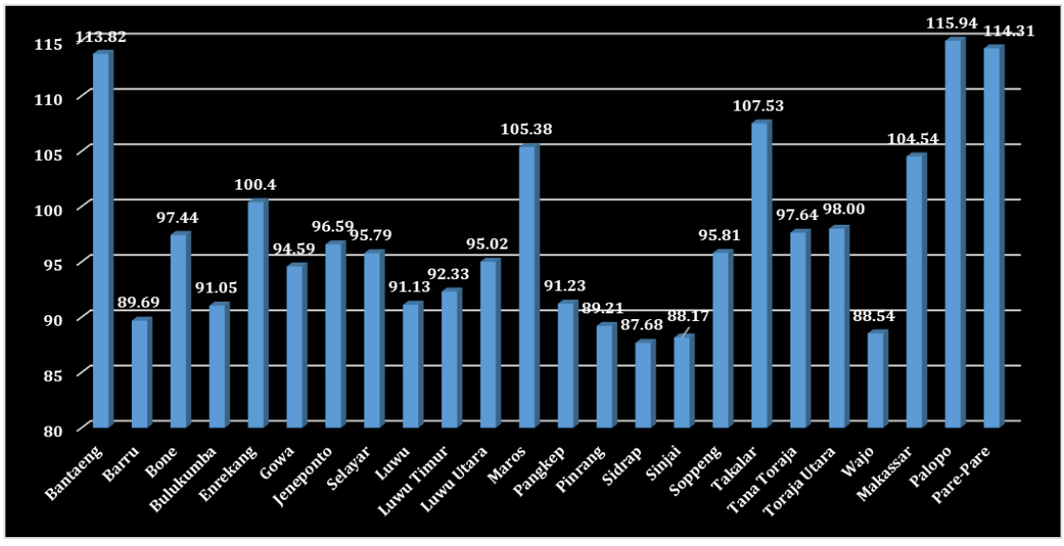

Sumber: Dinas Pendidikan Prov. Sulawesi Selatan, Tahun 2021

Tabel II.72.
Angka Melek Huruf Penduduk Usia 15 -64 Tahun
Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2017-2021

Indikator	Satuan	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
Banyaknya Penduduk Usia 15-64 Tahun Yang Melek Huruf	Orang	4.799.328	5.281.145	5.404.659	5.523.289	5.598.898
Jumlah Penduduk Usia 15-64 Tahun	Orang	5.713.674	5.779.141	5.840.507	5.901.873	5.945.547
Angka Melek Huruf	%	91,65	91,38	92,54	93,58	94,16

Sumber : Dinas Pendidikan Prov. Sulawesi Selatan, Tahun 2021

Hingga tahun 2021 jumlah bangunan gedung sekolah SMA dan SMK di Provinsi Sulawesi Selatan sebanyak 1.027 unit dengan persentase bangunan dengan kondisi baik sejumlah 48,31 persen. Pada tahun 2017 persentase bangunan sekolah SMA dan SMK kondisi baik sebesar 50,11 persen, dan pada tahun 2018 menurun menjadi 35,66 persen kemudian mengalami peningkatan pada tahun 2019 menjadi 44,75 persen hingga tahun 2020 sebesar 49,29 persen. Selanjutnya perkembangan jumlah dan kondisi bangunan gedung sekolah pendidikan SMA/SMK di Provinsi Sulawesi Selatan selama tahun 2017-2021 disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel II.73.
Perkembangan Jumlah dan Kondisi Ruang Kelas pendidikan SMA/SMK di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017-2021

No.	Sekolah	Kondisi Ruang Kelas	2017	2018	2019	2020	2021
1	SMA	Baik (%)	45,43	30,01	39,71	48,45	48,79
		Rusak Ringan/Sedang (%)	51,14	63,26	55,33	51,50	51,18
		Rusak Berat (%)	3,43	6,73	4,96	0,05	0,03
		Jumlah Bangunan Gedung (Unit)	569	582	581	595	600
2	SMK	Baik (%)	56,34	43,17	51,44	50.13	47.83
		Rusak Ringan/Sedang (%)	40,96	53,75	46,6	49,75	52,15
		Rusak Berat (%)	2,7	3,08	1,96	0,12	0,02
		Jumlah Bangunan Gedung (Unit)	428	435	431	446	427
3	SMA dan SMK	Baik (%)	50,11	35,66	44,75	49,29	48,31
		Rusak Ringan/Sedang (%)	46,77	59,18	51,58	50,62	51,67
		Rusak Berat (%)	3,12	5,16	3,67	0,08	0,02
		Jumlah Bangunan Gedung (Unit)	997	1.017	1.012	1.041	1.027

Sumber : Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2021 (diolah)

Capaian persentase jumlah warga negara usia 16-18 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pada tahun 2021 telah mencapai target nasional terkait pencapaian SPM Pendidikan sebesar 100 persen..

Tabel II.74.
Persentase jumlah warga negara usia 16 -18 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah (SPM) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017-2021

Indikator	Satuan	Tahun					
		2017	2018	2019	2020	Target 2021	Capaian 2021
Persentase warga negara usia 16 -18 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah (SPM)	%	70,54	74,23	75,25	76,62	100	100

Sumber: Dinas Pendidikan Prov. Sulawesi Selatan, Tahun 2021

2.3.1.1.4 Persentase warga negara usia 4 – 18 tahun yang termasuk dalam penduduk disabilitas yang berpartisipasi dalam pendidikan Khusus

Jumlah sekolah khusus bagi penyandang Disabilitas sejak tahun 2017 hingga tahun 2021 mengalami peningkatan, namun jumlah tersebut untuk proporsi pada jenjang SMPLB masih sangat kurang, sedangkan bila dibandingkan usia sekolah pada tingkat tersebut belum sebanding dengan jumlah sekolah yang tersedia. Hingga tahun 2021 total SLB berjumlah 245 unit. Data jumlah sekolah khusus bagi penyandang disabilitas selengkapnya pada tabel berikut:

Tabel II.75.
Jumlah sekolah Luar Biasa Bagi Penyandang Disabilitas Di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017 – 2021

No.	Jenis Sekolah	Satuan	2018	2019	2020	2021
1	SDLB	Unit	1	1	84	87
2	SMPLB	Unit	1	0	84	85
3	SMLB	Unit	79	82	84	73
Total SLB		**Unit**	**81**	**83**	**252**	**245**

Sumber : Dinas Pendidikan Prov. Sulawesi Selatan, Tahun 2021 (diolah)

Siswa penyandang disabilitas pada jenjang pendidikan SDLB merupakan jumlah siswa terbanyak sepanjang tahun 2017 – 2021, namun semakin tinggi jenjang pendidikan jumlah siswa menunjukkan data yang semakin menurun, hal ini menunjukkan bahwa tidak semua siswa melanjutkan kejenjang pendidikan yang lebih tinggi, sebagian besar hanya sampai pada jenjang SDLB. Hal ini menjadi tantangan tersendiri untuk dapat mendorong motivasi bersekolah bagi penyandang disabilitas dan penyediaan sarana dan prasarana

pendidikan yang cukup dan memadai. Data siswa penyandang disabilitas berdasarkan jenjang pendidikannya selengkapnya pada tabel berikut:

Tabel II.76.
Jumlah Siswa Penyadang Disabilitas Berdasarkan Jenjang Pendidikan Di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017 - 2021

No.	Jenis Sekolah	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021
1	SDLB	Orang	3.240	3.102	2.970	2.821	2.501
2	SMPLB	Orang	1.000	1.037	1.014	1.023	1.033
3	SMLB	Orang	480	620	684	652	630
Total Siswa		**Orang**	**4.720**	**4.759**	**4.668**	**6.141**	**4.164**

Sumber : Dinas Pendidikan Prov. Sulawesi Selatan, Tahun 2021 (diolah)

Jumlah siswa penyandang disabilitas berdasarkan kelompok umur di Provinsi Sulawesi Selatan di sepanjang tahun 2017 – 2021 dominasi oleh siswa dengan usia 7 – 12 tahun. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah sekolah untuk usia tersebut masih sangat dibutuhkan, mengingat bahwa data menunjukkan jumlah sekolah SDLB hanya sebanyak 87 pada tahun 2021. Untuk siswa penyandang disabilitas usia 16-18 tahun pada tahun 2021 sejumlah 630 orang mengalami penurunan 30,9 persen dari tahun sebelumnya. Data selengkapnya terkait jumlah siswa bedasarkan usia terlihat pada tabel berikut:

Tabel II.77.
Jumlah Siswa Berdasarkan Kelompok Umur Penyandang Disabilitas Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017 – 2021

No.	Kelompok Umur	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021
1	< 7 Tahun	Orang	102	99	102	118	135
2	7 - 12 Tahun	Orang	1.818	1.820	1.816	1.796	1.801
3	13 - 15 Tahun	Orang	1.136	1.056	954	987	1.033
4	16 - 18 Tahun	Orang	824	885	913	876	630
5	> 18 Tahun	Orang	840	899	883	719	565
Total :		**Orang**	**4.720**	**4.759**	**4.668**	**4.496**	**4.164**

Sumber : Dinas Pendidikan Prov. Sulawesi Selatan, Tahun 2021 (diolah)

Berdasarkan jenis ketunaan, jumlah siswa terbanyak berdasarkan data tahun 2017-2021 adalah siswa tuna grahita dan tuna rungu. Khusus siswa tuna rungu pada tahun 2021 berjumlah 1.183 mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Olehnya itu sarana prasarana khusus bagi penyandang tuna grahita dan tuna rungu dalam pelaksanaan pendidikan siswa disabilitas perlu menjadi perhatian. Data selengkapnya pada tabel berikut:

Tabel II.78.
Jumlah Siswa Penyandang Disabilitas Berdasarkan Jenis Ketunaan
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017 – 2021

No.	Jenis Ketunaan	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021
1	Tuna Netra	Orang	265	53	213	221	101
2	Tuna Rungu	Orang	1.066	419	1.038	1.083	1.183
3	Tuna Grahita	Orang	1.978	107	2.099	2.525	2.279
4	Tuna Daksa	Orang	286	4	289	282	483
5	Autisme	Orang	818	-	28	379	114
6	Tuna Ganda	Orang	307	31	1.001	1.113	4

Sumber: Dinas Pendidikan Prov. Sulawesi Selatan, Tahun 2021 (diolah)

Capaian indikator persentase warga negara usia 4 – 18 tahun yang termasuk dalam penduduk disabilitas yang berpartisipasi dalam pendidikan Khusus tahun 2021 mencapai 100 persen dengan jumlah 4.164 penyandang disabilitas berdasarkan 6 jenis ketunaan. Tahun 2017 belum dilakukan pengukuran indikator untuk periode RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan 2018-2023.

Tabel II.79.
Persentase warga negara usia 4 – 18 tahun yang termasuk dalam penduduk disabilitas yang berpartisipasi dalam pendidikan Khusus Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017-2021

Indikator	Satuan	Tahun					
		2017	2018	2019	2020	Target 2021	Capaian 2021
Persentase warga negara usia 4 – 18 tahun yang termasuk dalam penduduk disabilitas yang berpartisipasi dalam pendidikan Khusus (SPM)	%	Belum diukur	80,00	80,00	81,00	100	100

Sumber: Dinas Pendidikan Prov. Sulawesi Selatan, Tahun 2021

2.3.1.1.5 Persentase Sekolah Yang Menerapkan Kurikulum Lokal Penambahan Waktu Pelajaran Agama

Sejak tahun 2020 sejumlah 618 dari total 1.122 SM/SMK/MA sederajat menerapkan kurikulum lokal penambahan waktu pelajaran agama. Kurikulum tersebut bertujuan untuk meningkatkan pemahaman siswa terhadap pendidikan agama. Capaian persentase sekolah yang menerapkan kurikulum lokal penambahan waktu pelajaran agama tahun 2021 sebesar 80 persen mengalami peningkatan dari tahun 2020. Tahun 2017 hingga 2019 belum dilakukan pengukuran capaian indikator.

Tabel II.80.
Persentase Sekolah yang menerapkan kurikulum lokal penambahan waktu pelajaran agama Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017-2021

Indikator	Satuan	Tahun					
		2017	2018	2019	2020	Target 2021	Capaian 2021
Persentase Sekolah yang menerapkan kurikulum lokal penambahan waktu pelajaran agama	%	Belum diukur			50,05	54,25	80,00

Sumber : Dinas Pendidikan Prov. Sulawesi Selatan, Tahun 2021

2.3.1.1.6 Persentase Pendidikan Menengah yang Telah Menerapkan Penyelenggaraan Dan Pelayanan Pendidikan Berbasis TIK

Dari total 1.122 sekolah tingkat pendidikan menengah terdapat sejumlah 42 sekolah yang masuk kategori wilayah tertinggal, terdepan dan terluar (3T) yang tidak menerapkan penyelenggaraan dan pelayanan pendidikan berbasis TIK karena keterbatasan dan jangkauan terhadap teknologi informasi yang tidak memadai. Salah satu contoh penerapan penyelenggaraan dan pelayanan Pendidikan berbasis TIK bagi sekolah yang masuk kategori 3T adalah tidak melaksanakan ujian nasional berbasis teknologi informasi. Capaian persentase pendidikan menengah yang telah menerapkan penyelenggaraan dan pelayanan pendidikan berbasis TIK pada tahun 2021 melampaui target serta mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya dengan capaian 81 persen. Tahun 2017 hingga 2018 belum dilakukan pengukuran capaian indikator.

Tabel II.81.
Persentase Pendidikan menengah yang telah menerapkan penyelenggaraan dan pelayanan pendidikan berbasis TIK Tahun 2017-2021

Indikator	Satuan	Tahun					
		2017	2018	2019	2020	Target 2021	Capaian 2021
Persentase Pendidikan menengah yang telah menerapkan penyelenggaraan dan pelayanan pendidikan berbasis TIK	%	Belum diukur		63,00	75,00	80,00	81,00

Sumber : Dinas Pendidikan Prov. Sulawesi Selatan, Tahun 2021

2.3.1.1.7 Rasio Guru Terhadap Murid Pendidikan Menengah

Rasio guru terhadap murid adalah jumlah guru dibandingkan dengan jumlah murid pada setiap jenjang pendidikan. Rasio guru terhadap murid dapat memberikan gambaran mengenai besarnya beban kerja guru dalam mengajar.

Rasio guru terhadap murid digunakan untuk mengetahui rata-rata jumlah siswa yang dilayani oleh satu orang guru di suatu sekolah atau daerah tertentu. Rasio guru terhadap murid pendidikan menengah di Sulawesi Selatan pada tahun 2021 sebesar 1:13. Hal ini menunjukkan bahwa 1 orang guru mempunyai beban kerja dalam mengajar dan mengawasi 13 murid.

Tabel II.82.
Rasio Guru terhadap murid pendidikan menengah
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017-2021

Indikator	Satuan	Tahun					
		2017	2018	2019	2020	Target 2021	Capaian2021
Jumlah Murid SMA/MA/SMK	Orang	279.292	290.422	295.634	415.158	422.588	422.588
Jumlah Guru SMA/MA/SMK	Orang	22.700	20.015	20.469	31.216	33.191	33.191
Rasio Guru Terhadap Murid Pendidikan Menengah	Guru: Murid	1:12	1:15	1:14	1:13	1:13	1:13

Sumber : Dinas Pendidikan Prov. Sulawesi Selatan, Tahun 2021

2.3.1.1.8 Persentase Guru SMA yang Bersertifikat

Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV di Sulawesi Selatan pada tahun 2017 mencapai 91,80 persen mengalami peningkatan hingga tahun 2020 mencapai 98,84 persen. Pada tahun 2021 guru yang memenuhi kualifikasi S.1/D.IV mengalami penurunan dengan capaian 94,83 persen.

Tabel II.83.
Guru Yang Memenuhi Kualifikasi S1/D-IV
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017–2021

Indikator	Satuan	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
Guru yang Memenuhi Kualifikasi S.1/D-IV	%	91,80	98,63	98,69	98,84	94,83

Sumber : Dinas Pendidikan Prov. Sulawesi Selatan, Tahun 2021

Dari total jumlah 15.215 pendidik pada jenjang Pendidikan sekolah menengah atas (SMA) hingga tahun 2021 sebesar 8.531 Guru SMA baik negeri maupun swasta yang memiliki ijazah Diploma Empat (D.IV) atau Sarjana (S.1) serta Sertifikat Pendidik mengalami peningkatan dari tahun-tahun sebelumnya dengan capaian 56,07 persen melampaui dari target yang ditetapkan.

Tabel II.84.
Jumlah Pendidik pada Jenjang SMA yang Memiliki Ijazah D.IV/S.1 dan Sertifikat Pendidik Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021

No	Kabupaten/Kota	Jenjang Pendidikan SMA				% Pendidik ≥ S1 dan Sertifikasi
		L	P	Jumlah	≥ S1 & Sertifikasi	
1	Makassar	875	1.522	2.397	1.419	59,20
2	Bone	421	790	1.211	687	56,73
3	Gowa	339	700	1.039	460	44,27
4	Bulukumba	278	474	752	373	49,60
5	Pangkajene Kepulauan	243	393	636	328	51,57
6	Luwu	227	510	737	399	54,14
7	Wajo	193	324	517	359	69,44
8	Pinrang	180	305	485	276	56,91
9	Jeneponto	202	366	568	269	47,36
10	Takalar	205	456	661	385	58,25
11	Luwu Utara	219	412	631	273	43,26
12	Maros	262	416	678	389	57,37
13	Sinjai	187	367	554	281	50,72
14	Enrekang	207	332	539	294	54,55
15	Toraja Utara	179	276	455	242	53,19
16	Soppeng	138	216	354	304	85,88
17	Tana Toraja	173	320	493	262	53,14
18	Sidenreng Rappang	185	240	425	294	69,18
18	Bantaeng	118	166	284	142	50,00
20	Luwu Timur	194	340	534	265	49,63
21	Barru	104	162	266	145	54,51
22	Kepulauan Selayar	106	206	312	138	44,23
23	Palopo	174	240	414	293	70,77
24	Pare-Pare	107	166	273	254	93,04
Sulawesi Selatan		**5.516**	**9.699**	**15.215**	**8.531**	**56,07**

Sumber : Dinas Pendidikan Prov. Sulawesi Selatan, Tahun 2021

Grafik II. 3
Persentase Guru SMA yang Bersertifikat Tahun 2021

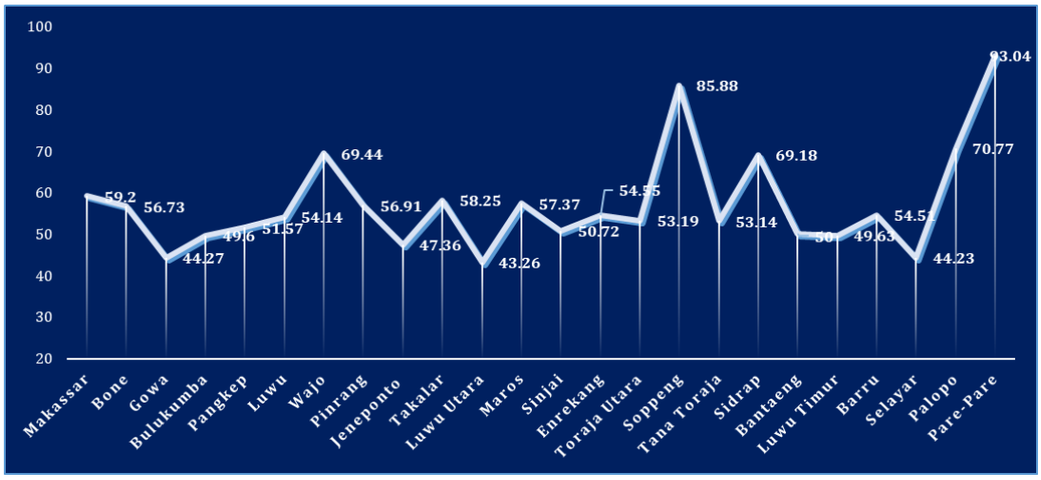

Sumber : Dinas Pendidikan Prov. Sulawesi Selatan, Tahun 2021

Tabel II.85.
Persentase Guru SMA yang bersertifikat
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017-2021

Indikator	Satuan	Tahun					
		2017	2018	2019	2020	Target 2021	Capaian 2021
Persentase Guru SMA yang bersertifikat	%	44,44	53,76	53,78	51,02	52,00	56,07

Sumber : Dinas Pendidikan Prov. Sulawesi Selatan, Tahun 2021

2.3.1.1.9 Persentase Guru SMK yang Bersertifikat

Dari total jumlah 10.015 pendidik pada jenjang sekolah menengah kejuruan (SMK) hingga tahun 2021 sebesar 5.232 Guru SMK baik negeri maupun swasta yang memiliki ijazah Diploma Empat (D.IV) atau Sarjana (S.1) serta Sertifikat Pendidik, mengalami peningkatan dari tahun-tahun sebelumnya dengan capaian 52,24 persen melampaui dari target yang ditetapkan.

Tabel II.86.
Jumlah Pendidik pada Jenjang SMK yang Memiliki Ijazah D.IV/S.1 dan Sertifikat Pendidik Menurut Kabupaten/Kota
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021

No	Kabupaten/Kota	Jenjang Pendidikan SMK				% Pendidik ≥ S1 dan Sertifikasi
		L	P	Jumlah	≥ S1 & Sertifikasi	
1	Makassar	696	1.002	1.698	1.027	60,48
2	Bone	170	313	483	193	39,96
3	Gowa	211	371	582	302	51,89
4	Bulukumba	148	239	387	163	42,12
5	Pangkajene Kepulauan	130	279	409	189	46,21
6	Luwu	155	338	493	165	33,47
7	Wajo	223	332	555	192	34,59
8	Pinrang	110	173	283	183	64,66
9	Jeneponto	154	240	394	175	44,42
10	Takalar	116	208	324	163	50,31
11	Maros	100	178	278	117	42,09
12	Luwu Utara	122	223	345	109	31,59
13	Sinjai	64	145	209	92	44,02
14	Enrekang	112	167	279	173	62,01
15	Toraja Utara	240	251	491	219	44,60
16	Tana Toraja	202	263	465	280	60,22
17	Soppeng	122	224	346	231	66,76
18	Sidenreng Rappang	134	185	319	208	65,20
18	Bantaeng	44	68	112	58	43,23
20	Luwu Timur	104	199	303	131	51,79
21	Barru	81	139	216	123	56,94
22	Kepulauan Selayar	85	165	250	118	47,20
23	Palopo	200	241	441	307	69,61
24	Pare-Pare	158	195	353	314	88,95
Sulawesi Selatan		**3.881**	**6.134**	**10.015**	**5.232**	**52,24**

Sumber : Dinas Pendidikan Prov. Sulawesi Selatan, Tahun 2021

Grafik II. 4
Persentase Guru SMK yang Bersertifikat Tahun 2021

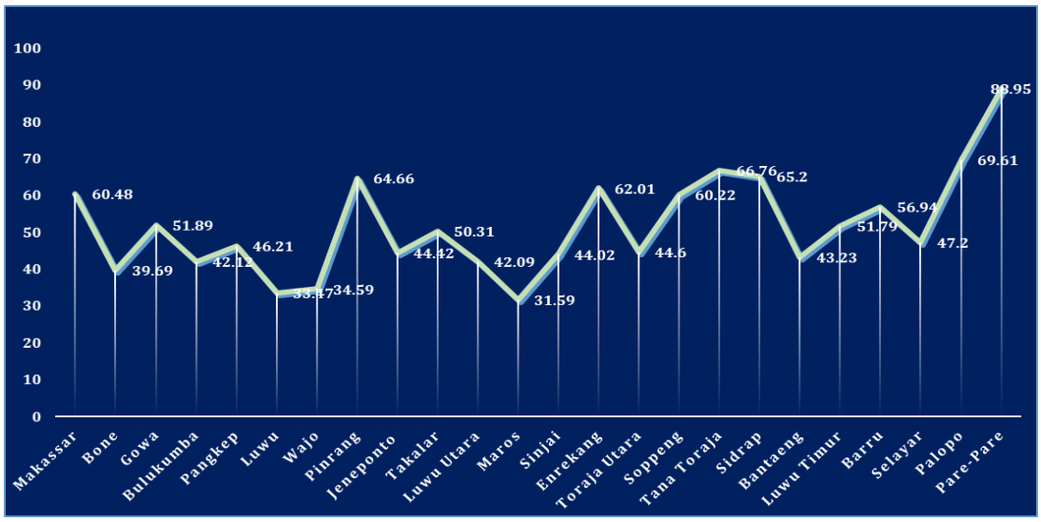

Sumber : Dinas Pendidikan Prov. Sulawesi Selatan, Tahun 2021

Tabel II.87.
Persentase Guru SMK yang Bersertifikat
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017-2021

Indikator	Satuan	Tahun					
		2017	2018	2019	2020	Target 2021	Capaian 2021
Persentase Guru SMK yang bersertifikat	%	31,60	42,41	45,60	44,25	45,10	52,24

Sumber: Dinas Pendidikan Prov. Sulawesi Selatan, Tahun 2021

2.3.1.1.10 Persentase Satuan Pendidikan Yang Memperoleh Izin Penyelenggaraan Pendidikan

Setiap tahun dilakukan perpanjangan izin operasional**,** pada tahun 2021 jumlah SMA Swasta yang memperoleh izin penyelenggaraan pendidikan sejumlah 19 sekolah dan SMK Swasta sejumlah 7 sekolah. Dalam memperoleh izin penyelenggaraan pendidikan setiap satuan pendidikan wajib memenuhi syarat pengajuan izin baik izin baru, perpanjangan maupun perubahan. Capaian indikator persentase satuan pendidikan yang memperoleh izin penyelenggaraan Pendidikan mencapai 100 persen pada tahun 2021. Tahun 2017 hingga 2020 belum dilakukan pengukuran karena menyesuaikan dengan indicator program yang terdapat pada Perubahan RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan 2018-2023.

Tabel II.88.
Persentase Satuan Pendidikan Yang memperoleh Izin Penyelenggaraan Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017-2021

Indikator	Satuan	Tahun					
		2017	2018	2019	2020	Target 2021	Capaian 2021
Persentase Satuan Pendidikan Yang memperoleh Izin Penyelenggaraan Pendidikan	%	Belum diukur				100	100

Sumber: Dinas Pendidikan Prov. Sulawesi Selatan, Tahun 2021

2.3.1.1.11 Persentase SMA/SMK Yang Menerbitkan Karya Sastra

Berdasarkan Pasal 10 dan Pasal 11 Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 79 Tahun 2019 bahwa Gubernur mewajibkan satuan pendidikan jenjang Pendidikan menengah untuk menjajarkan Bahasa Daerah yaitu sastra Bugis, Makassar, dan Toraja yang digunakan secara turun temurun oleh masyarakat di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan. Pelaksanaan kegiatan yang terkait dengan sastra yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan berupa karya tulis sastra, pentas seni, lukisan, tarian daerah, pelatihan bahasa daerah untuk tenaga pendidik yang mendukung peningkatan kearifan lokal dan kebudayaan daerah. Capaian indikator persentase SMA/SMK yang menerbitkan karya sastra pada tahun 2021 sebesar 100 persen. Tahun 2017 hingga 2020 belum dilakukan pengukuran karena menyesuaikan dengan indicator program yang terdapat pada Perubahan RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan 2018-2023.

Tabel II.89.
Persentase SMA/SMK yang menerbitkan karya sastra
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017-2020

Indikator	Satuan	Tahun					
		2017	2018	2019	2020	Target 2021	Capaian 2021
Persentase SMA/SMK yang menerbitkan karya sastra	%	Belum diukur				48, 25	48,25

Sumber: Dinas Pendidikan Prov. Sulawesi Selatan, Tahun 2021

2.3.1.2 Kesehatan

2.3.1.2.1 Persentase RS Regional Yang Terbangun Dan Ditingkatkan

Persentase RS Regional yang terbangun dan ditingkatkan tahun 2020 baru mencapai 17 persen dalam hal ini peningkatan RS Ainun Habibie di Kota Parepare melalui Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan kepada Pemerintah Kota Parepare. Seiring dengan hal tersebut, telah berproses pula rencana pembangunan Rumah Sakit Regional Bone, Palopo dan Wajo sejak tahun 2018 yang diawali dengan pelaksanaan pekerjaan Feasibility Study,

Master Plan dan AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan), namun pada tahun 2020 hingga tahun 2021 terjadi Pandemi Covid-19 sehingga proses pembangunan berjalan lambat akibat terjadinya refocusing anggaran untuk penanggulangan Pandemi Covid-19. Hingga kini, Pembangunan Rumah Sakit Regional yang masih berlanjut adalah pembangunan RS Regional Bone. Proses pembangunan RS Regional Bone saat ini telah sampai pada tahap pematangan lahan dan telah selesai 100 persen. Rumah Sakit ini direncanakan akan terbangun dan beroperasi pada bulan Desember 2022. Pelaksanaan kegiatan pembangunan RS Regional Kelas C Kab. Bone TA. 2021 sudah sesuai dengan Nota Kesepakatan yang dilaksankan secara Tahun Jamak (*Multy Years)*. Untuk Indikator Persentase RS yang dibangun dan ditingkatkan tahun 2021 dari target Renstra 33 persen (Pembangunan RS Regional Kelas C Kab. Bone dan Peningkatan RS Elim) yang terlaksana hanya Pembangunan RS Regional Kelas C Kab. Bone, sehingga untuk target pekerjaan pembangunan RS Regional Kelas C Kab.Bone Tahun 2021 sebesar 16,5 persen. Maka berdasarkan besaran bobot pekerjaan tahun 2021 sebesar 4,80 persen maka capaian indikator tersebut sebesar 4,60 persen. Tahun 2017 hingga 2018 belum dilakukan pengukuran indikator karena menyesuaikan dengan indikator program yang terdapat pada Perubahan RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan 2018-2023.

Tabel II.90.
Persentase RS Regional yang terbangun dan ditingkatkan
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017 – 2021

Indikator	Satuan	Tahun					
		2017	2018	2019	2020	Target 2021	Capaian 2021
Persentase RS Regional yang terbangun dan ditingkatkan	%	Belum diukur		17,00	17,00	33,00	4,60

Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2021

Berdasarkan Nota Kesepakatan antara Pemerintah Sulawesi Selatan dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor: 075/VIII/PEM-MoU/DISKES dan Nomor: 02/VIII/DPRD/2021 tentang Pelaksanaan Sub Kegiatan Tahun Jamak Pembangunan Rumah Sakit Regional Kelas C Kabupaten Bone Provinsi Sulawesi Selatan diperoleh kesepakatan untuk pelaksanakan kegiatan pembangunan RS Regional Kelas C Kabupaten Bone dilaksanakan tahun Jamak yaitu Tahun 2021, Tahun 2022 dan Tahun 2023. Terdapat 4 rincian kegiatan Pembangunan RS Regional Kelas C Kabupaten Bone yang dilaksanakan secara tahun jamak (*multy years*) yaitu:

1. Pekerjaan Jasa Konsultasi Konstruksi Perencanaan RS (Tahun 2021 – 2022)
2. Pekerjaan Konstruksi Pembangunan RS (Tahun 2022 – 2023)
3. Pekerjaan Jasa Konsultan Manajemen Konstruksi (Tahun 2022 – 2023)
4. Pengelolaan Kegiatan (Tahun 2021, 2022, 2023).

Adapun Realisasi/Capaian pelaksanaan kegiatan dan anggaran tahun 2021, yaitu:

1. Pekerjaan Jasa Konsultan Perencana Penyiapan Lahan (CV. Idea Warna), capaian kegiatan 100 persen.
2. Pekerjaan Penyiapan Lahan (CV. New Kenshu Pratama), capaian kegiatan 100 persen.
3. Pekerjaan Jasa Konsultasi Konstruksi Perencanaan (PT. Pandu Persada KSO PT. Primatama Prima Konsultama), capaian kegiatan 100 persen.
4. Pengelolaan Kegiatan 80 persen.
5. Total capaian kegiatan tahun 2021 sebesar 95 persen.

2.3.1.2.2 Persentase RS Rujukan Provinsi yang Terakreditasi

Persentase RS Rujukan Provinsi yang terakreditasi tahun 2017 hingga tahun 2021 cenderung meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2021 belum mencapai target karena terdapat penambahan 8 (delapan) rumah sakit yang baru operasional dan beberapa RS yang seharusnya melakukan proses akreditasi, baik pertama kali proses akreditasi maupun re-akreditasi akan tetapi tidak dapat dilaksanakan karena adanya Pandemi Covid 19.

Tabel II.91.
Persentase RS Rujukan Provinsi yang Terakreditasi
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017-2021

Indikator	Satuan	Tahun					
		2017	2018	2019	2020	Target 2021	Capaian 2021
Persentase RS Rujukan Provinsi yang Terakreditasi	%	63,00	70,00	85,00	82,00	87,00	75,00

Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2021

2.3.1.2.3 Persentase Anak yang Mendapat Asupan Gizi Pada 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK)

Tahun 2021 persentase balita gizi buruk di Sulawesi Selatan mencapai 6,2 persen dimana dari 24 kabupaten/kota Kabupaten Takalar merupakan kabupaten yang tingkat balita gizi buruknya tertinggi sebesar 10,7 persen. Sedangkan balita persentase gizi kurang di Sulawesi Selatan mencapai 19,0 persen dimana tingkat gizi kurang tertinggi di Kabupaten Takalar sebesar 27,7 persen.

Grafik II. 5
Tingkat Balita Gizi Buruk dan Gizi Kurang di Sulawesi Selatan
Tahun 2021

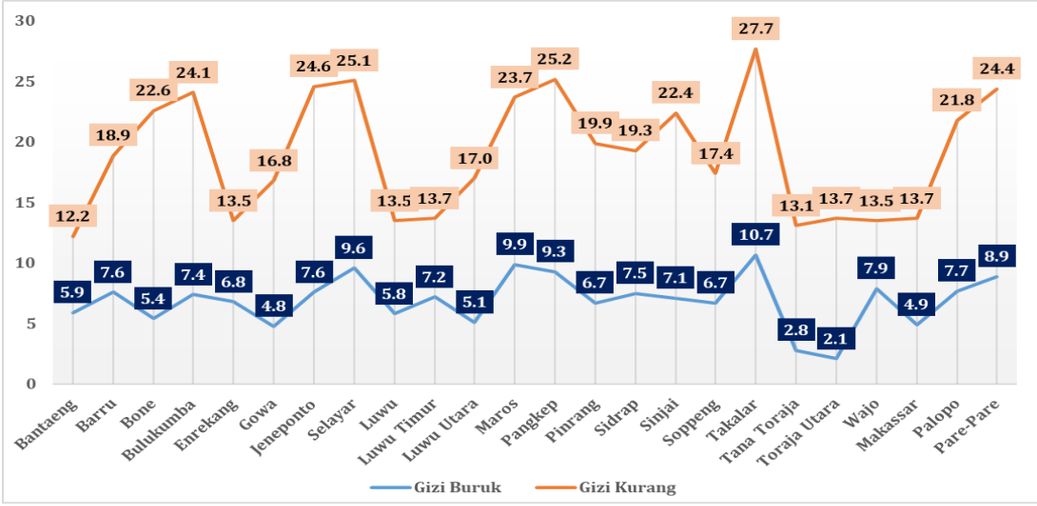

Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2021 (data diolah)

Persentase Anak yang mendapat Asupan Gizi pada 1000 Hari Pertama Kehidupan sejak tahun 201 hingga tahun 2021 masih berfluktuasi namun cenderung mengalami peningkatan. Pada tahun 2021 capaian per November sebesar 4,50 persen, diharapkan pada akhir Desember capaian ini dapat mencapai target yang telah ditetapkan. Faktor pendorong yang mendukung pemberian asupan gizi pada 1000 HPK adalah tersedianya alokasi makanan tambahan ibu hamil KEK bersumber dana Penugasan/DAK Fisik 2021 sejumlah 51.990 ton dan PMT (Pemberian Makanan Tambahan) bersumber dari dana Dekonsentrasi/Kemenkes RI, tersedianya alokasi makanan tambahan balita gizi kurang bersumber dari dana Penugasan/DAK Fisik 2021 sejumlah 82.363 ton serta adanya data balita gizi kurang by name by address sasaran PMT dari data aplikasi e-PPGBM (aplikasi online Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat. Adapun faktor penghambat diantaranya alokasi distribusi di tingkat Puskesmas belum merata sehingga masih ada puskesmas yang kelebihan/kekurangan stok PMT, masih ada puskesmas yang terlambat mendistribusikan PMT ke sasaran serta masih ada puskesmas yang tidak mendistribusikan PMT ke sasaran sesuai kebutuhan anak dan ibu hamil dengan alasan pemerataan.

Tabel II.92.
Persentase anak yang mendapat asupan gizi pada 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017-2021

Indikator	Satuan	Tahun					
		2017	2018	2019	2020	Target 2021	Capaian 2021
Persentase anak yang mendapat asupan gizi pada 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK)	%	3,13	4,24	6,70	6,52	6,50	4,50

Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2021

Grafik II. 6
Prevalansi Balita Stunting Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2021

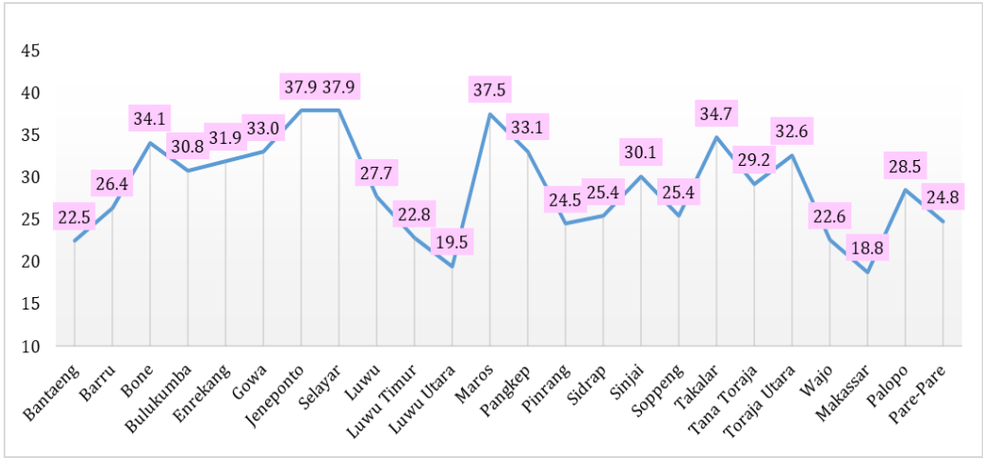

Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2021 (data diolah)

2.3.1.2.4 Jumlah Warga Negara yang terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/ atau berpotensi bencana provinsi yang mendapatkan layanan kesehatan

Jumlah warga negara yang terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana Provinsi yang mendapatkan layanan kesehatan tahun 2017-2021 mencapai 100% setiap tahunnya. Pada tahun 2021, jumlah total warga terdampak krisis yang harus dilayani sebanyak 65.460 orang dan telah terlayani seluruhnya. Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam penanganan warga terdampak Krisis/Bencana/KLB diantaranya pelaporan SPM belum sesuai dengan peraturan pelaksanaan SPM Provinsi untuk Pengelola Program Provinsi dan Kabupaten/Kota, ketenagaan kabupaten/kota sebagai pendukung dalam melakukan pengumpulan data di lapangan masih terbatas, kapasitas petugas kabupten/kota dalam melakukan pengumpulan data perlu ditingkatkan, responden/masyarakat tidak sepenuhnya memberikan data yang diperlukan dalam penanganan KLB, belum ada perhitungan kebutuhan pelayanan KLB sesuai standar dari penanggung jawab pelayanan KLB di Provinsi/Kab/Kota, pelaksanaan pelayanan KLB banyak terkendala Pandemi COVID-19, Logistik yang diperlukan belum sepenuhnya cukup tersedia dalam pemberian pelayanan KLB.

Adapun tindak lanjut yang dapat dilakukan adalah melaksanakan sosialisasi Permendagri Nomor 100 tahun 2018 tentang Penerapan SPM di Kabupaten/Kota, perlu ketersediaan Tim Penanggulangan KLB di Kabupaten/Kota yang dapat dilegalkan melalui SK Penetapan Tim peningkatan kapasitas petugas kabupaten/kota, pelayanan KLB melibatkan LS/LP terkait seperti tenaga Promkes dan lain-lain, perlu dilakukan workshop perhitungan kebutuhan pelayanan SPM, dibutuhkan dukungan anggaran pelayanan KLB dari APBD Kabupaten/Kota dan Provinsi, pelayanan KLB tetap dilaksanakan pada masa Pandemi dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan, serta penyediaan logistik untuk mendukung pelayanan. Khusus pelayanan dalam rangka penanggulangan COVID-19 dilakukan dengan mengoptimalkan semua sumber daya yang dimiliki baik di Provinsi maupun di Kabupaten/Kota. Data kasus konfirmasi COVID-19 Provinsi Sulawesi sampai tanggal 31 Desember 2021 adalah sebanyak 110.000 kasus. Pelayanan Kesehatan akibat pandemi

COVID-19 dilakukan melalui kegiatan peningkatan testing, Pelacakan Kontak/ Tracer, Isolasi/Karantina dan tatalaksana klinis, Penegakan Protokol Kesehatan serta pelaksanaan Vaksinasi COVID-19. Kegiatan tersebut diselenggarakan dengan melibatkan banyak sektor terutama dari pihak Pemerintah Daerah dengan dukungan dari Pemerintah Pusat, unsur Forkopimda terutama TNI/Polri, LSM, pihak swasta dll.

Kegiatan testing dilakukan dengan meningkatkan pengambilan sampel untuk ditest baik dari pelaksanaan skrining, maupun untuk testing dari hasil pelacakan kontak. Sedangkan untuk kasus pelacakan kontak dilakukan dengan melibatkan TNI/Polri/Kader dan Relawan untuk membantu tenaga kesehatan di lapangan. Untuk isolasi/karantina dilakukan secara terpusat maupun yang dilakukan secara mandiri, untuk kasus yang memerlukan isolasi pada fasilitas kesehatan telah disediakan rumah sakit rujukan untuk menampung kasus-kasus tersebut. Upaya penanganan COVID-19 yang sementara digalakkan oleh Pemerintah adalah pelaksanaan Vaksinasi, yang capaian kumulatif dosis pertama telah mencapai target Nasional diatas 70%. Capaian tersebut didapatkan melalui dukungan dari banyaknya sekor terkait yang secara bersama-sama bergerak dalam pelaksanaan Vaksinasi COVID-19.

Tabel II.93.
Persentase Jumlah Warga Negara yang terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/ atau berpotensi bencana provinsi yang mendapatkan layanan kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017-2021

Indikator	Satuan	Tahun					
		2017	2018	2019	2020	Target 2021	Capaian 2021
Persentase warga negara yang terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi yang mendapatkan layanan kesehatan (SPM)	%	100	100	100	100	100	100

Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2021

2.3.1.2.5 Jumlah Warga Negara Pada Kondisi Kejadian Luar Biasa Provinsi yang Mendapatkan Layanan Kesehatan

Jumlah warga negara pada kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) yang mendapatkan layanan kesehatan tahun 2017-2021 mencapai 100% setiap tahunnya. Pada tahun 2021, jumlah total warga terdampak krisis yang harus dilayani sebanyak 3.244 orang dan telah terlayani seluruhnya. Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam penanganan warga terdampak Krisis/Bencana/KLB diantaranya pelaporan SPM belum sesuai dengan peraturan pelaksanaan SPM Provinsi untuk Pengelola Program Provinsi dan Kabupaten/Kota, ketenagaan kabupaten/kota sebagai pendukung dalam

melakukan pengumpulan data di lapangan masih terbatas, kapasitas petugas kabupten/kota dalam melakukan pengumpulan data perlu ditingkatkan, responden/masyarakat tidak sepenuhnya memberikan data yang diperlukan dalam penanganan KLB, belum ada perhitungan kebutuhan pelayanan KLB sesuai standar dari penanggung jawab pelayanan KLB di Provinsi/Kab/Kota, pelaksanaan pelayanan KLB banyak terkendala Pandemi COVID-19, Logistik yang diperlukan belum sepenuhnya cukup tersedia dalam pemberian pelayanan KLB.

Adapun tindak lanjut yang dapat dilakukan adalah melaksanakan sosialisasi Permendagri Nomor 100 tahun 2018 tentang Penerapan SPM di Kabupaten/Kota, perlu ketersediaan Tim Penanggulangan KLB di Kabupaten/Kota yang dapat dilegalkan melalui SK Penetapan Tim peningkatan kapasitas petugas kabupaten/kota, pelayanan KLB melibatkan LS/LP terkait seperti tenaga Promkes dan lain-lain, perlu dilakukan workshop perhitungan kebutuhan pelayanan SPM, dibutuhkan dukungan anggaran pelayanan KLB dari APBD Kabupaten/Kota dan Provinsi, pelayanan KLB tetap dilaksanakan pada masa Pandemi dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan, serta penyediaan logistik untuk mendukung pelayanan.

Tabel II.94.
Persentase Jumlah Warga Negara pada kondisi kejadian luar biasa provinsi yang mendapatkan layanan kesehatan
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017-2021

Indikator	Satuan	Tahun					
		2017	2018	2019	2020	Target 2021	Capaian 2021
Persentase warga negara pada kondisi kejadian luar biasa provinsi yang mendapatkan layanan kesehatan (SPM)	%	100	100	100	100	100	100

Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2021

2.3.1.2.6 Persentase Ibu Hamil yang Mendapat Asupan Gizi pada 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK)

Persentase Ibu Hamil yang Mendapat Asupan Gizi pada 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) sejak tahun 2017-2021 masih berfluktuasi dan cenderung mengalami peningkatan. Faktor pendorong yang mendukung pemberian asupan gizi pada 1000 HPK adalah tersedianya alokasi makanan tambahan ibu hamil KEK bersumber dana Penugasan/DAK Fisik 2021 sejumlah 51.990 ton dan PMT (Pemberian Makanan Tambahan) bersumber dari dana Dekonsentrasi/Kemenkes RI, tersedianya alokasi makanan tambahan balita gizi kurang bersumber dari dana Penugasan/DAK Fisik 2021 sejumlah 82.363 ton serta adanya data balita gizi kurang by name by address sasaran PMT dari data aplikasi e-PPGBM (aplikasi online Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat). Adapun faktor penghambat diantaranya alokasi distribusi di tingkat Puskesmas belum merata sehingga masih ada puskesmas yang

kelebihan/kekurangan stok PMT, masih ada puskesmas yang terlambat mendistribusikan PMT ke sasaran serta masih ada puskesmas yang tidak mendistribusikan PMT ke sasaran sesuai kebutuhan anak dan ibu hamil dengan alasan pemerataan.

Tabel II.95.
Persentase ibu hamil yang mendapat asupan gizi pada 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) Provinsi Sulawesi Selatan 2017-2021

Indikator	Satuan	Tahun					
		2017	2018	2019	2020	Target 2021	Capaian 2021
Persentase ibu hamil yang mendapat asupan gizi pada 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK)	%	8,38	12,13	12,79	11,95	12,00	38,48

Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2021

2.3.1.2.7 Persentase Ketersediaan Stok Darah Terhadap Pemenuhan Kebutuhan Darah

Persentase ketersediaan stok darah terhadap pemenuhan kebutuhan darah belum mencapai target, faktor penghambatnya disebabkan oleh jumlah pendonor yang berkurang dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2021 syarat untuk menjadi pendonor darah ditambah dengan indikator vaksin dan riwayat demam, sehingga pendonor darah lebih tersaring yang mengakibatkan jumlahnya semakin sedikit.

Tabel II.96.
Persentase Ketersediaan Stok Darah Terhadap Pemenuhan Kebutuhan Darah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017-2021

Indikator	Satuan	Tahun					
		2017	2018	2019	2020	Target 2021	Capaian 2021
Persentase Ketersediaan Stok Darah Terhadap Pemenuhan Kebutuhan Darah	%	77,00	78,85	78,85	79,00	80,00	68,19

Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2021

2.3.1.2.8 Persentase Pasien Yang Mendapatkan Layanan Sesuai dengan Standar

Cakupan pasien yang tertangani sesuai dengan standar pelayanan sudah terpenuhi. Hal ini berkaitan erat dengan akreditasi Rumah Sakit dimana pemenuhan standar pelayanan rumah sakit masuk dalam standar penilaian akreditasi.

Tabel II.97.
Persentase pasien yang mendapatkan layanan sesuai dengan standar
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017-2021

Indikator	Satuan	Tahun					
		2017	2018	2019	2020	Target 2021	Capaian 2021
Persentase pasien yang mendapatkan layanan sesuai dengan standar	%	100	100	100	100	100	100

Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2021

2.3.1.2.9 Cakupan Ketersediaan Sarana dan Prasarana RS dalam Kondisi Baik

Cakupan ketersediaan sarana dan prasarana RS dalam kondisi baik setiap tahun mengalami peningkatan, namun belum mencapai target 80 persen, hal ini disebabkan oleh masih adanya beberapa Rumah Sakit bangunan lama yang mengalami rusak ringan perlu renovasi, tetapi terkendala di dana pemeliharaan dan renovasi, sangat tergantung anggaran yang diperoleh Rumah Sakit. Tahun 2021 cakupan ketersediaan sarana dan prasarana RS dalam kondisi baik mencapai 91,49 persen. Tahun 2017 belum dilakukan pengukuran capaian indikator.

Tabel II.98.
Cakupan Ketersediaan Sarana dan Prasarana RS dalam Kondisi Baik
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017-2021

Indikator	Satuan	Tahun					
		2017	2018	2019	2020	Target 2021	Capaian 2021
Cakupan Ketersediaan Sarana dan Prasarana RS dalam Kondisi Baik	%	Belum diukur	81,43	90,38	90,38	80,00	91,49

Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2021

2.3.1.2.10 Rasio Tenaga Kesehatan Persatuan Penduduk

Rasio tenaga kesehatan per satuan penduduk mengalami peningkatan pada tahun 2017 hingga tahun 2019 dan pada tahun 2020 mengalami penurunan disebabkan karena beberapa hal tertentu. Tahun 2017 rasio tenaga kesehatan belum mencapai target karena data tenaga kesehatan belum terinput secara keseluruhan dari masing-masing fasilitas pelayanan kesehatan (Fasyankes) seperti Toko Obat, Klinik, Institusi Pendidikan, Praktek Nakes, Fasyankes lainnya, tahun 2018 hingga tahun 2019 rasio tenaga kesehatan mencapai target karena adanya penerimaan tenaga Non ASN (Sukarela, Kontrak, Nusantara Sehat) dan ASN di masing-masing Fasyankes, tahun 2020 rasio tenaga kesehatan terjadi penurunan karena adanya pengurangan tenaga

Non ASN (Sukarela) di fasyankes (Puskesmas, RS Pemerintah) karena berpengaruh pada pemenuhan Tenaga Kesehatan melalui Nusantara Sehat, sementara tahun 2021 rasio tenaga kesehatan meningkat karena adanya penerimaan ASN pada masing-masing fasyankes dan tenaga Nusantara Sehat di Puskesmas. Tahun 2021 jumlah tenaga kesehatan/medis masing-masing terdiri dari Dokter sejumlah 1.219 orang, Perawat sejumlah 4.459 orang dan Bidan sejumlah 4.114orang.

Grafik II. 7
Jumlah Tenaga Kesehatan Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2021

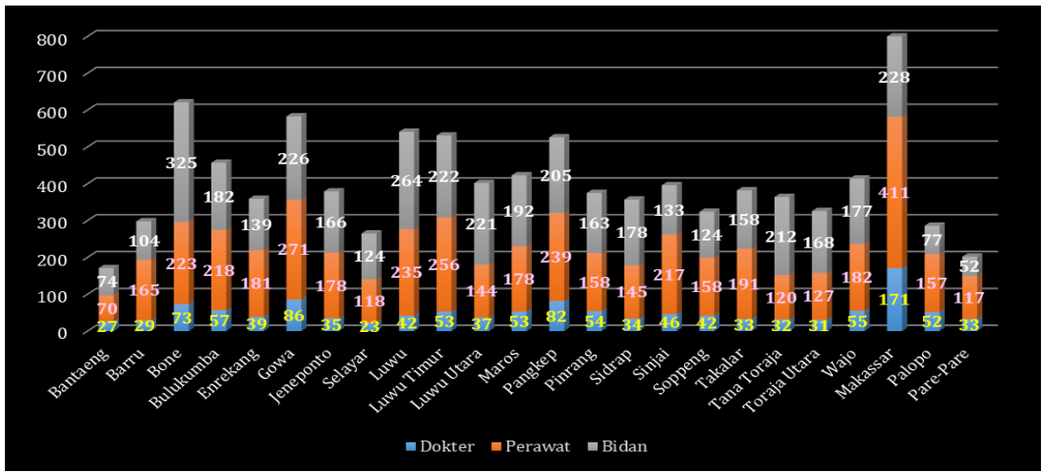

Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2021 (data diolah)

Faktor pendukung tercapainya rasio tenaga kesehatan adalah adanya Aplikasi SISDMK (Sistem Informasi Sumber Daya Manusia Kesehatan) yang mendukung ketersediaan data dan dijadikan acuan dalam pemenuhan tenaga kesehatan, adanya pengelola data SISDMK di masing-masing Fasyankes, dilaksanakannya kegiatan Sinkronisasi Data SDMK Provinsi dengan SDMK Kabupaten/Kota dan Pertemuan Pemutahiran Data Tingkat Fasyankes. Adapun faktor penghambat adalah kurangnya anggaran untuk sosialisasi dan advokasi dengan lintas sektor terkait upaya pemenuhan NAKES serta terbatasnya keuangan daerah untuk merekrut tenaga kesehatan sesuai standar WHO, sehingga pemenuhannya dilakukan secara bertahap.

Diagram II.3.
Jumlah Fasilitas Kesehatan di Sulawesi Selatan Tahun 2021

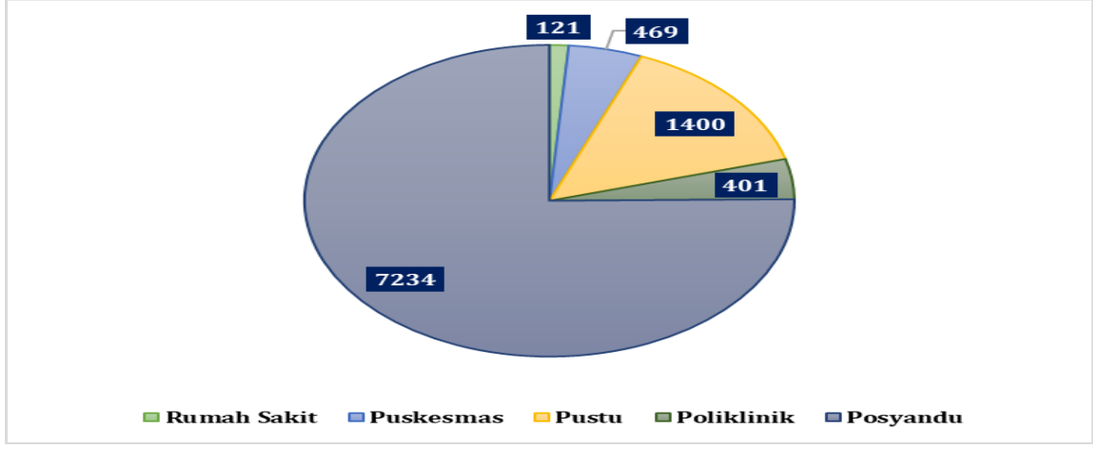

Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2021 (data diolah)

Tabel II.99.
Rasio Tenaga Kesehatan Persatuan Penduduk
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016-2020

Indikator	Satuan	Tahun					
		2017	2018	2019	2020	Target 2021	Capaian 2021
Rasio tenaga kesehatan persatuan penduduk	Rasio	21	29	27	18	23/100.000 Penduduk	24

Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2021

2.3.1.2.11 Persentase Keterpenuhan SDM Kesehatan pada Fasilitas Kesehatan

Persentase keterpenuhan SDM Kesehatan pada fasilitas kesehatan mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2021, capaian sebesar 63.77 persen telah melebihi target Indikator Kinerja Program BPPSDMK Tahun 2021 sebesar 47 persen, karena adanya pengadaan tenaga kesehatan dari masing-masing Kabupaten/Kota secara bertahap.

Tabel II.100.
Persentase Keterpenuhan SDM Kesehatan pada Fasilitas Kesehatan
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017-2021

Indikator	Satuan	Tahun					
		2017	2018	2019	2020	Target 2021	Capaian 2021
Persentase Keterpenuhan SDM Kesehatan pada Fasilitas Kesehatan	%	25,84	29,04	41,26	45,36	47,00	63,77

Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2021

2.3.1.2.12 Persentase Tenaga Medis yang Tersertifikasi

Persentase tenaga medis yang tersertifikasi tahun 2017-2021 mengalami peningkatan setiap tahunnya. Capaian tahun 2017-2018 masih rendah karena tenaga medis memiliki Surat Izin Praktek lebih dari satu fasilitas pelayanan kesehatan, sementara tahun 2019-2021 mengalami peningkatan karena karena adanya penambahan tenaga medis di masing-masing fasilitas pelayanan kesehatan. Faktor yang mendukung pencapaian tersebut adalah adanya Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan serta adanya Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 83 Tahun 2019 tentang Registrasi Tenaga Kesehatan. Adapun faktor penghambat adalah beberapa tenaga medis tidak bisa mendokumentasikan pengumpulan nilai SKP dengan baik karena tugas rangkap jabatan sehingga menjadi penghambat untuk proses perpanjangan Surat Tanda Registrasi (STR) mereka karena Tenaga Kesehatan yang tidak bisa memperpanjang STR-nya dianggap tidak tersertifikasi serta

kurangnya sosialisasi terkait tata cara perpanjangan STR yang dilakukan secara online.

Tabel II.101.
Persentase tenaga medis yang tersertifikasi
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017-2021

Indikator	Satuan	Tahun					
		2017	2018	2019	2020	Target 2021	Capaian 2021
Persentase tenaga medis yang tersertifikasi	%	32,17	39,22	55,67	69,38	40,00	71,34

Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2021

2.3.1.2.13 Cakupan Pelatihan Dan Modul yang Terakreditasi

Cakupan pelatihan dan modul yang terakreditasi telah terpenuhi. Pelatihan yang dilaksanakan dan modul yang digunakan telah terakreditasi sesuai dengan hasil standarisasi dari Pusat Pelatihan PPSDM Kementerian Kesehatan RI. Beberapa pelatihan yang telah dilaksanakan adalah Pelatihan Manajemen Puskesmas, Keluarga Sehat, Komunikasi Perubahan Perilaku, Tim Gerak Cepat, Penguji UKOM (Uji Kompetensi), Sanitasi Total Berbasis Masyarakat, Surveilans Epidemiologi Bagi Petugas Puskesmas, Jabatan Fungsional Promkes dan Pandu PTM (Penyakit Tidak Menular). Faktor pendukung adalah ketersediaan anggaran dari dana Dekonsentrasi, adanya Pengampu pelaksanaan pelatihan dari BBPK (Balai Besar Pelatihan Kesehatan) serta tersedianya fasilitator yang terlatih. Sementara faktor yang menjadi penghambat adalah terjadinya Pandemi Covid-19, sehingga kegiatan pelatihan tidak dapat dilaksanakan secara optimal.

Tabel II.102.
Cakupan Pelatihan dan modul yang terakreditasi
Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2017-2021

Indikator	Satuan	Tahun					
		2017	2018	2019	2020	Target 2021	Capaian 2021
Cakupan Pelatihan dan modul yang terakreditasi	%	100	100	100	100	100	100

Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2021

2.3.1.2.14 Persentase Tenaga Kesehatan Dan Tenaga Kesehatan Lainnya yang Mengikuti Pendidikan Dan Pelatihan

Persentase tenaga kesehatan dan tenaga kesehatan lainnya yang mengikuti pendidikan dan pelatihan tahun 2017-2021 cenderung mengalami peningkatan. Pada tahun 2021, jumlah tenaga kesehatan yang mengikuti pendidikan dan pelatihan sebanyak 7.500 dari 34.933 tenaga kesehatan sesuai dengan data yang dilaporkan dalam aplikasi SISDMK (Sistem Informasi Sumber Daya Manusia Kesehatan). Faktor pendukung adalah tersedianya anggaran

untuk pelaksanaan kegiatan pendidikan dan pelatihan serta sarana/prasarana untuk pelaksanaan pelatihan Adapun faktor penghambat adalah adanya refocusing anggaran akibat Pandemi Covid-19 serta syarat untuk mengikuti pendidikan lebih diperketat selama masa pandemi Covid-19.

Tabel II.103.
Persentase Tenaga Kesehatan dan Tenaga Kesehatan Lainnya yang mengikuti pendidikan dan pelatihan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017-2021

Indikator	Satuan	Tahun					
		2017	2018	2019	2020	Target 2021	Capaian 2021
Persentase Tenaga Kesehatan dan Tenaga Kesehatan Lainnya yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	%	12,93	13,09	13,85	21,05	20,00	22,37

Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2021

2.3.1.2.15 Persentase Kompetensi Sumber Daya Manusia Kesehatan

Persentase kompetensi SDM Kesehatan meningkat setiap tahunnya dan mencapai 90,41 persen pada tahun 2021, hal ini ditunjang oleh kebijakan bahwa semua tenaga kesehatan yang memiliki pendidikan D1 ke atas yang memberikan pelayanan, wajib memiliki Surat Tanda Registrasi (2017-2019) dan semua tenaga kesehatan yang memiliki pendidikan D3 ke atas yang memberikan pelayanan, wajib memiliki Surat Tanda Registrasi (2020-2021). Faktor pendukung terpenuhinya kompetensi SDM Kesehatan adalah adanya Permenkes RI No 83 Tahun 2019 tentang Registrasi Tenaga Kesehatan serta Permenpan RB (Reformasi Birokrasi) terkait uraian tugas masing-masing pejabat fungsional kesehatan. Faktor penghambat pelaksanaan kegiatan adalah keterbatasan anggaran, sehingga tidak dapat dilakukan secara optimal.

Tabel II.104.
Persentase kompetensi Sumber daya Manusia kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017-2021

Indikator	Satuan	Tahun					
		2017	2018	2019	2020	Target 2021	Capaian 2021
Persentase kompetensi Sumber daya Manusia kesehatan	%	86,92	86,94	87,19	90,21	55,9	90,41

Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2021

2.3.1.2.16 Meningkatnya Kompetensi teknis SDM

Meningkatnya kompetensi teknis SDM tahun 2017-2021 mengalami peningkatan setiap tahunnya dan mencapai 98,07 persen pada tahun 2021, hal ini didukung oleh kebijakan bahwa setiap tenaga kesehatan yang menduduki jabatan fungsional untuk kenaikan jenjang jabatan wajib mengikuti Uji Kompetensi khususnya 6 jenis Tenaga Kesehatan yaitu Perawat, Perawat Gigi, Radiografer, Teknisi Elektoromedis, Perekam Medis dan Pembimbing Kesehatan Kerja. Faktor pendukung terpenuhinya kompetensi SDM Kesehatan adalah adanya Permenkes RI Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Uji Kompetensi Jenjang Jabatan. Faktor penghambat pelaksanaan kegiatan adalah tidak tersedianya anggaran APBD secara rutin untuk pelaksanaan kegiatan UKOM (Uji Kompetensi) serta masih sangat sedikit jumlah tim penguji yang memiliki sertifikat sebagai tim penguji.

Tabel II.105.
Meningkatnya Kompetensi teknis SDM
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017-2021

Indikator	Satuan	Tahun					
		2017	2018	2019	2020	Target 2021	Capaian 2021
Meningkatnya Kompetensi teknis SDM	%	93,36	93,62	93,71	95,93	70,00	98,07

Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2021

2.3.1.2.17 Persentase Pemenuhan Sediaan Farmasi

Pemenuhan Sediaan Farmasi sejak tahun 2017-2021 mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2021, pemenuhan sediaan farmasi dengan tingkat ketersediaan obat baru mencapai 85% untuk 24 Instalasi Farmasi Kabupaten/Kota , 24 Instalasi Farmasi RSU/RSUD Kabupaten/Kota, 7 RSU Provinsi dan 3 UPT yaitu Balai Kesehatan Kulit dan Kelamin, Balai Kesehatan Gigi dan Mulut serta Unit Pelayanan Kesehatan yang telah melaksanakan penyediaan obat secara e-Purchasing/e-Catalog dan melaksanakan Pelayanan Farmasi sesuai standar Pharmaceutical Care. Beberapa faktor pendorong yang mendukung upaya pemenuhan sediaan farmasi adalah SDM Provinsi dan Kabupaten/Kota telah memenuhi persyaratan sesuai PP Nomor 51/2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian, perencanaan obat telah dilakukan oleh Provinsi dan 24 Kabupaten/Kota melalui sistem RKO (Rencana Kebutuhan Obat)/Katalog Obat serta telah dilakukan monitoring ketersediaan obat per triwulan dengan sistem pelaporan e-Monev Obat. Adapun faktor penghambat/kendala yang mempengaruhi pemenuhan sediaan farmasi antara lain dalam proses pengadaan Obat terjadi putus kontrak karena penyedia tidak mampu menyelesaikan Nota Pesanan pada tahun berjalan, Daftar Obat yang ada dalam e-Katalog belum mampu memenuhi nama dan jenis item obat yang dibutuhkan dalam pelayanan Kefarmasian serta anggaran belum maksimal dibandingkan jumlah penduduk yang dilayani.

Tabel II.106.
Persentase Pemenuhan Sediaan Farmasi
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017-2021

Indikator	Satuan	Tahun					
		2017	2018	2019	2020	Target 2021	Capaian 2021
Persentase Pemenuhan Sediaan Farmasi	%	65,00	70,00	75,00	80,00	85,00	85,00

Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2021

2.3.1.2.18 Persentase Pemenuhan Sediaan Alat Kesehatan

Persentase pemenuhan sediaan alat kesehatan tahun 2017-2021 telah terpenuhi. Pada tahun 2020 dan 2021, uji sampling sediaan produk alat kesehatan dalam rangka pengawasan alkes yang bermutu, keamanan dan manfaat tidak dapat dilaksanakan karena terjadinya Pandemi Covid-19 serta adanya efisiensi dana baik sumber APBN maupun APBD.

Tabel II.107.
Persentase Pemenuhan Sediaan Alat Kesehatan
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017-2021

Indikator	Satuan	Tahun					
		2017	2018	2019	2020	Target 2021	Capaian 2021
Persentase Pemenuhan Sediaan Alat Kesehatan	%	91,04	100	100	100	85,00	100

Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2021

2.3.1.2.19 Persentase Pemenuhan Sediaan Makanan Minuman

Pemenuhan Sediaan Makanan dan Minuman dengan kegiatan pembinaan CPPB (Cara Produksi Pangan yang Baik) terhadap Sarana PIRT (Perusahaan Industri Rumah Tangga) hanya mencapai 35%, belum mencapai target tahun 2021 di Provinsi/Kabupaten/Kota. Hal ini disebabkan beberapa faktor antara lain pemenuhan sediaan makanan dan minuman saat ini regulasinya sudah menjadi tugas dan kewenangan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), anggarannya masuk dalam kegiatan DAK BPOM yang meliputi 24 Kabupaten/Kota, belum ada kegiatan identifikasi dan pemetaan sarana PIRT di Kabupaten/Kota karena anggaran yang disiapkan oleh daerah belum maksimal, terjadi Wabah Covid-19 tahun 2020 hingga 2021 sehingga banyak sarana PIRT tidak beroperasi atau ditutup sehingga tidak dapat dilakukan pembinaan atau tidak ada akses untuk melakukan pembinaan dan penyuluhan CPPB dan tidak ada sarana PIRT mengajukan Proses Perizinan PIRT di Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota.

Tabel II.108.
Persentase Pemenuhan Sediaan Makanan Minuman
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016-2020

Indikator	Satuan	Tahun					
		2017	2018	2019	2020	Target 2021	Capaian 2021
Persentase Pemenuhan Sediaan Makanan Minuman	%	28,00	30,00	35,00	35,00	45,00	35,00

Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2021

2.3.1.2.20 Persentase Kabupaten/Kota yang memiliki Kebijakan PHBS

Persentase Kabupaten/Kota yang memiliki Kebijakan PHBS masih berfluktuasi setiap tahunnya, namun cenderung meningkat. Beberapa faktor pendorong meningkatnya capaian kinerja ini, pada tahun 2017 dengan terbitnya Inpres No. 1 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas), maka kabupaten/kota menindaklanjuti dengan membuat regulasi Germas. Pada tahun 2020, dengan adanya Pandemi Covid-19, Kabupaten/kota membuat regulasi terkait Covid-19. Disamping itu kerjasama lintas sector berjalan cukup baik dalam pengembangan kebijakan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS). Adapun faktor penghambat sehingga beberapa tahun diperoleh hasil yang rendah adalah proses pembuatan regulasi membutuhkan waktu yang lama, terbatasnya pelaksanaan kegiatan akibat adanya Pandemi Covid-19, pelaksanaan advokasi dan pembinaan dari Provinsi yang masih kurang serta diperlukan adanya motivasi melalui sharing pengalaman dengan kabupaten/kota yang sudah terbit regulasinya.

Tabel II.109.
Persentase Kabupaten/Kota yang memiliki Kebijakan PHBS
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017-2021

Indikator	Satuan	Tahun					
		2017	2018	2019	2020	Target 2021	Capaian 2021
Persentase Kabupaten/Kota yang memiliki Kebijakan PHBS	%	79,16	29,16	45,83	75,00	66,00	75,00

Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2021

2.3.1.3 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

2.3.1.3.1 Persentase Jaringan Irigasi Primer Dan Sekunder Kondisi Baik Pada DI Kewenangan Provinsi

Jaringan irigasi adalah saluran dan bangunan yang merupakan satu kesatuan dan diperlukan untuk pengaturan air irigasi mulai dari penyediaan, pengambilan, pembagian pemberian dan penggunaannya. Jaringan irigasi ada 2 (dua) yaitu;

1. Jaringan irigasi primer adalah membawa air dari bangunan sadap menuju saluran sekunder dan ke petak-petak tersier yang diairi. Batas ujung saluran primer adalah pada bangunan bagi yang terakhir.
2. Jaringan irigasi sekunder adalah membawa air dari bangunan yang menyadap dari saluran primer menuju petak-petak tersier yang dilayani oleh saluran sekunder tersebut batas akhir dari saluran sekunder adalah bangunan sadap terakhir.

Beberapa kegiatan rehabilitasi dan peningkatan jaringan irigasi yang dilaksanakan pada tahun 2021 dalam rangka optimalisasi kinerja jaringan irigasi pada daerah irigasi kewenangan provinsi diuraikan pada tabel berikut ini:

Tabel II.110.
Rehabilitasi dan Peningkatan Jaringan Irigasi
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021

No	Uraian Kegiatan	Satuan	Volume		Lokasi
			Target	Realisasi	
1	Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Lanca (DAK)	m	3.619,37	2.212	Kab. Bone
2	Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Makawa (DAK)	m	6.004,53	5.686,72	Kab.Luwu
3	Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Alekarajae (DAK)	m	2.935,88	2.490,63	Kab.Sidrap
4	Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Bili-bili (DAK)	m	15.107	14.947	Kab.Gowa
5	Rehabilitasi DI Kalosi (HIBAH IPDMIP)	m	17.000	13.649	Kab.Pinrang
6	Rehabilitasi DI. Aparang 1 (PEN)	m	1.770,22	824	Kab.Bone
7	Rehabilitasi DI. Bettu 1 (PEN)	m	1.960,88	4.571	Kab.Bulukumba
8	Peningkatan DI. Bungadidi (PEN)	m	8.289	6.436	Kab.Luwu Utara
9	Rehabilitasi DI. Kalamisu 1 (PEN)	m	1.987,98	1.100	Kab.Sinjai
10	Rehabilitasi DI. Laiya (PEN)	m	647,54	176	Kab.Maros
11	Rehabilitasi DI. Lanrae 1 (PEN)	m	1.082,16	1.665,21	Kab.Barru
12	Peningkatan D.I Matajang (PEN)	m	2.687	2.359	Kab.Barru
13	Rehabilitasi DI. Salomekko (PEN)	m	1.273,67	1.268	Kab.Bone
14	Peningkatan D.I. Waru - Waru 1 (PEN)	m	20.300	910	Kab.Bone

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2021

Diagram II.4.
Kondisi Jaringan Irigasi DI Kewenangan Provinsi

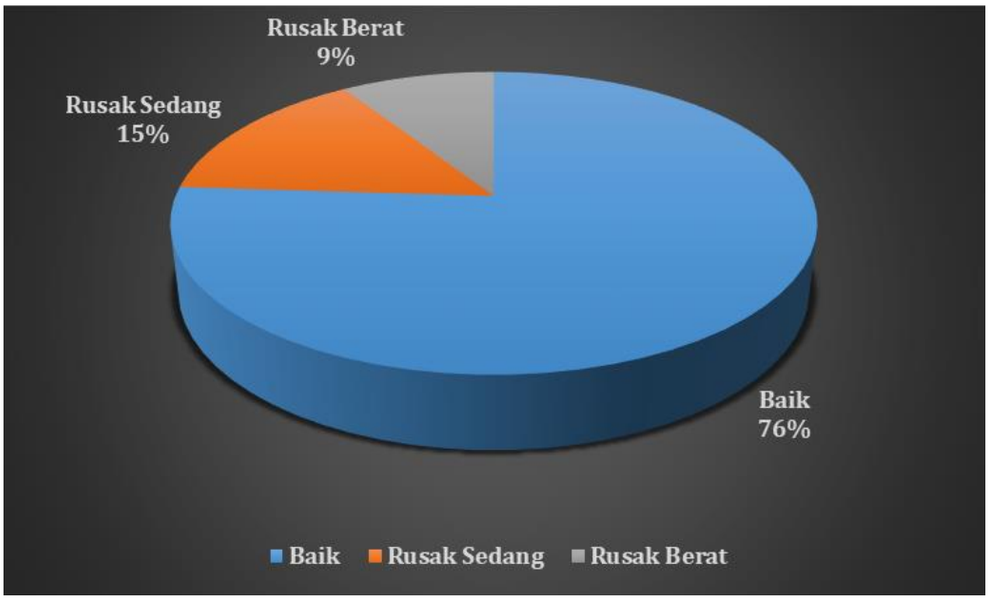

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2021

Panjang Jaringan Irigasi Primer dan Sekunder pada DI kewenangan Provinsi adalah 473.650 meter, dengan kondisi baik tahun 2019 mencapai 72,71 persen dan terdata mengalami penurunan kondisi berdasarkan hasil pendataan tahun 2020 menjadi 59,31 persen. Pendataan Kembali dilakukan tahun 2021 berbasis e-paksi sebagaimana digunakan secara nasional dan tercatat bahwa kondisi sampai 2021 mengalami peningkatan kondisi baik menjadi 76,00 persen atau sepanjang 359.974 meter.

Tabel II.111.
Persentase Jaringan Irigasi Primer dan Sekunder Kondisi Baik pada DI Kewenangan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017-2021

Indikator	Satuan	Tahun					
		2017	2018	2019	2020	Target 2021	Capaian 2021
Persentase Jaringan Irigasi Primer dan Sekunder kondisi baik pada DI Kewenangan Provinsi	%	32,55	69,16	72,71	59,31	77,00	76,00

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2021

2.3.1.3.2 Cakupan Pengelolaan Sungai, Danau, Waduk, Dan Pantai

Pengelolaan Sungai, danau dan waduk untuk sumber daya air adalah pemanfaatan, konservasi, serta pengendalian daya rusak air. Upaya pemanfaatan dipriorotaskan pada pemenuhan kebutuhan air baku, upaya konservasi dan pengendalian daya rusak berupa pencegahan banjir dan

kekeringan, pencegahan erosi dan sedimentasi, pencegahan kerusakan bantaran sungai, pencegahan tercemarnya sumber air, dan juga untuk menghindari konflik dan degradasi sumber daya alam dan lingkungan. Pengelolaan sungai, danau dan waduk dilakukan secara terintegrasi dan bersifat multisektor dan multiaktor. Penanganan sungai pada skala kecil ditangani oleh Pemerintah Provinsi sedangkan pengelolaan sungai skala besar dilakukan dengan koordinasi dan Kerjasama Pemerintah melalui Balai Besar kementerian PUPR serta Pemerintah Daerah terkait.

Tabel II.112.
Cakupan Pengelolaan Sungai, Danau, Waduk, dan Pantai
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017-2021

Indikator	Satuan	Tahun					
		2017	2018	2019	2020	Target 2021	Capaian 2021
Cakupan pengelolaan sungai, danau, waduk, dan pantai	%	100	100	100	100	100	100

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2021

Kegiatan pemeliharaan embung, pembangunan bendung dan normalisasi sungai yang dilaksanakan pada tahun 2021 dilaksanakan dalam rangka pencapaian target cakupan pengelolaan sungai, danau, waduk dan pantai diuraikan pada tabel berikut ini:

Tabel II.113.
Pemeliharaan Embung, Pembangunan Bendung dan Normalisasi Sungai
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021

No	Uraian Kegiatan	Satuan	Volume		Lokasi
			Target	Realisasi	
1	Pemeliharaan Embung Bonto Cani	m	65,7	65,7	Kab.Bone
2	Pembangunan Bendung Lalengrie 1 (PEN)	m	24.352,09	9.064,58	Kab.Bone
3	Normalisasi Saluran Pembuangan Sungai Manakai (PEN)	m	905	910	Kab.Luwu
4	Normalisasi Sungai Pawesoi (PEN)	m	1.192	1.192,76	Kab.Luwu Timur

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2021

2.3.1.3.3 Persentase Warga Negara Memperoleh Kebutuhan Air Minum Curah Lintas Kabupaten/Kota

Air Minum Curah adalah air hasil olahan instalasi pengolahan air pada Sistem Penyediaan Air Minum lintas kabupaten/kota. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang

berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal. Kebutuhan air minum curah merupakan kewenangan Pemerintah Privovinsi sebagaimana dipertegas dalam UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa pemenuhan air bersih bagi masyarakat merupakan salah satu tanggung jawab pemerintah dan pemerintah daerah sebagai bagian dari pelayanan publik yang harus mereka lakukan. Hingga saat ini belum terdapat kebutuhan layanan air minum curah, sehingga kewajiban layanan pemenuhan kebutuhan air minum curah masih terpenuhi walaupun belum terdapat layanan SPAM Regional. Antisipasi pemenuhan kebutuhan air minum curah diperkirakan akan dibutuhkan pada tahun 2024 berdasarkan hasil kajian Rencana Indusk Sistem Pengembangan Air Minum (RISPAM), dan antisipasi tersebut telah dilakukan dengan mengembangkan SPAM Regional Kawasan perkotaan Mamminasata yang telah memasuki tahap pembangunan fisik pada tahun 2022.

SPAM Regional Mamminasata dengan kapasitas 1.100 liter/detik merupakan proyek multiyears 2022-2026 dengan cakupan wilayah pelayanan yaitu Kota Makassar meliputi 2 kecamatan, Kabupaten Maros meliputi 6 kecamatan, Kabupaten Gowa meliputi 8 kecamatan, dan Kabupaten Takalar meliputi 2 kecamatan. Sumber air baku SPAM Regional Mamminasata berasal dari Waduk Bili-Bili dengan rincian IPA Tompobalang Gowa, IPA Palangga Gowa, IKK Bontomarannu Borongloe Gowa, IKK Patalassang Gowa, IPA Sombaopu Makassar. Total penerima manfaat ±80.000 sambungan rumah atau 400.000 jiwa dengan rincian kapasitas Kota Makassar 600 liter/detik melayani 48.000 SR, Kabupaten Gowa 200 liter/detik melayani 16.000 SR, Kabupaten Maros 130 liter/detik melayani 10.400 SR, dan Kabupaten Takalar 70 liter/detik melayani 5.600 SR.

Tabel II.114.
Persentase Warga Negara Memperoleh Kebutuhan Air Minum Curah Lintas Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017-2021

Indikator	Satuan	Tahun					
		2017	2018	2019	2020	Target 2021	Capaian 2021
Persentase warga negara memperoleh kebutuhan air minum curah lintas kabupaten/kota (SPM)	%	100	100	100	100	100	100

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2021

2.3.1.3.4 Cakupan Pembinaan Layanan Air Minum Kabupaten/Kota

Layanan air minum untuk pemenuhan SPM Air minum layak merupakan kewajiban Pemerintah dan Pemerintah Daerah, sehingga penguatan peran Pemerintah Kabupatan/Kota saat ini menjadi prioritas utama dalam penyediaan SPM. Mutu Pelayanan Dasar adalah ukuran kuantitas dan kualitas barang dan/atau jasa kebutuhan dasar serta pemenuhannya secara minimal dalam Pelayanan Dasar sesuai standar teknis agar hidup secara layak adalah air minum yang memenuhi 4 kriteria diantaranya: kualitas air sesuai dengan standar air minum, kuantitas yang mengacu pada standar penyediaan yaitu 60 liter/hari/orang, kontinuitas atau tersedia secara terus menerus, serta

keterjangkauan yaitu akses dan harga terjangkau. Oleh karena itu, mengetahui tingkat layanan air minum dan tingkat penyediaan prasarana yang ada saat ini di 24 Kabupaten/kota merupakan hal yang harus dilakukan secara berkala. Analisis yang memperlihatkan besarnya kebutuhan dasar serta kebutuhan pengembangan dengan memperhatiakan teknologi yang siap pakai, standar-standar yang ada, serta perencanaan yang menggunakan teknologi non standar.

Grafik II. 8
Persentase Rumah Tangga yang Menempati Hunian dengan Akses Air Minum Layak Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2021

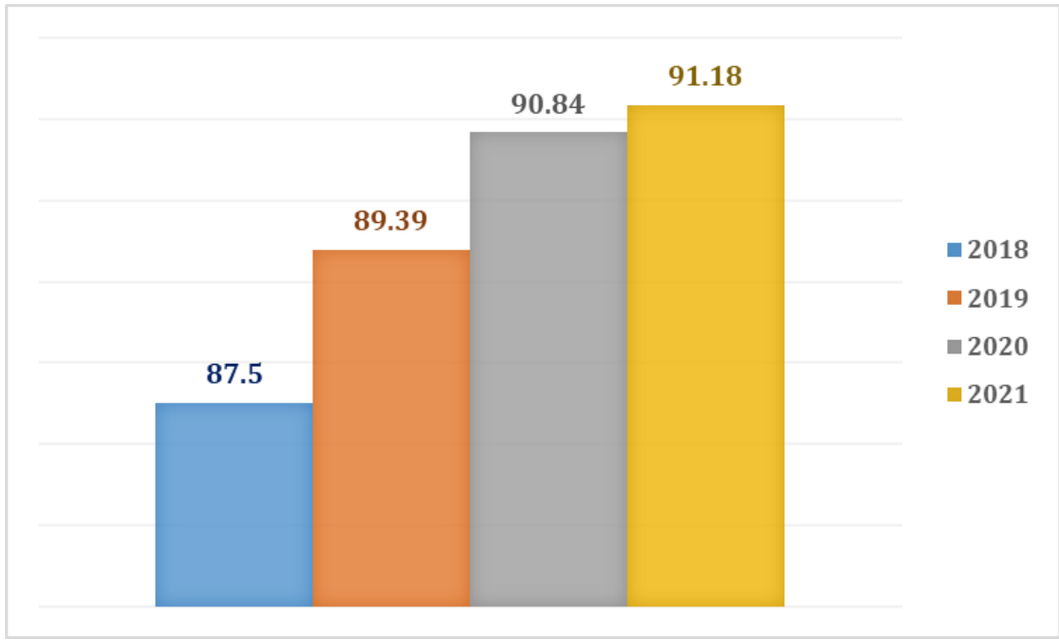

Sumber : Pokja PKP Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021 (data diolah)

Tabel II.115.
Cakupan Pembinaan Layanan Air Minum Kab/Kota
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017-2021

Indikator	Satuan	Tahun					
		2017	2018	2019	2020	Target 2021	Capaian 2021
Cakupan Pembinaan Layanan Air Minum Kab/Kota	%	100	100	100	100	100	100

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2021

2.3.1.3.5 Cakupan Pembinaan Layanan TPA (Kab/Kota)

Layanan penangannan persampahan saat ini masih merupakan tugas Pemerintah Kabupaten/Kota, mengingat belum adanya layanan TPA Regional yang menjadi kewajiban layanan Pemerintah Provinsi. Peningkatan peran aktif Pemerintah di 24 Kabupaten/Kota, peran masyarakat dan usaha/swasta sebagai mitra pengelolaan sampah, pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan persampahan serta mengoptimalkan penyebaran informasi melalui berbagai media dan pembinaan langsung kepada masyarakat dilakukan setiap tahun.

Tabel II.116.
Cakupan Pembinaan Layanan TPA (Kab/Kota)
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017-2021

Indikator	Satuan	Tahun					
		2017	2018	2019	2020	Target 2021	Capaian 2021
Cakupan Pembinaan Layanan TPA (Kab/Kota)	%	100	100	100	100	100	100

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2021

2.3.1.3.6 Persentase Warga Negara yang Memperoleh Layanan Pengolahan Air Limbah Domestik Regional Lintas Kabupaten/Kota

Air limbah domestik adalah hasil buangan dari perumahan, perdagangan, perkantoran, dan sarana sejenisnya. Pelayanan pengolahan air limbah domestik dapat dilaksanakan oleh pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota, sesuai dengan kewenangannya. Pelaksanaan SPM Provinsi dilaksanakan bila terdapat Pemerintah Kabupaten/Kota yang memiliki keterbatasan dalam melaksanakan pelayanan pengolahan air limbah domestik sehingga tidak dapat melaksanakan seluruh atau sebagian pelayanan pengolahan air limbah domestiknya di dalam wilayah kabupaten/kota dan membutuhkan kerjasama dengan Pemerintah Kabupaten/Kota lainnya dalam pelaksanaan pelayanan pengolahan air limbah domestik. Untuk saat ini, belum terdapat dan belum direncanakan untuk kebutuhan pemenuhan layanan regional dan seluruh layanan ALD masih di fokuskan pada penguatan layanan kabupaten/kota.

Tabel II.117.
Persentase Warga Negara yang Memperoleh Layanan Pengolahan Air Limbah Domestik Regional Lintas Kabupaten/Kota
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017-2021

Indikator	Satuan	Tahun					
		2017	2018	2019	2020	Target 2021	Capaian 2021
Persentase warga negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik regional lintas kabupaten/kota (SPM)	%	100	100	100	100	100	100

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2021

2.3.1.3.7 Cakupan Pembinaan Layanan Air Limbah Domestik Kab/Kota

Penguatan peran Pemerintah 24 Kabupaten/Kota untuk pengelolaan layanan limbah domestik merupakan foskus utama saat ini. Pendataan kondisi dan ketersediaan layanan, fasilitasi pengembangan rencana infrastruktur, serta peningkatan peran masyarakat dalam Sistem Pengelolaan Air Limbah Permukiman untuk meningkatkan pelayanan pengelolaan air limbah domestik rumah tangga adalh hal yang dilakukan dalam pemenuha target ini.

Peningkatan peran, koordinasi, sinergi, sumber daya manusia pada OPD terkait dalam mengatasi masalah limbah melalui sosialisasi dan promosi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam berbudaya.

Grafik II. 9
Persentase Rumah Tangga yang Menempati Hunian dengan Akses Air Limbah Layak Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2021

Sumber : Pokja PKP Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021 (data diolah)

Tabel II.118.
Cakupan Pembinaan Layanan Air Limbah Domestik Kab/Kota Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017-2021

Indikator	Satuan	Tahun					
		2017	2018	2019	2020	Target 2021	Capaian 2021
Cakupan Pembinaan Layanan Air Limbah Domestik Kab/Kota	%	100	100	100	100	100	100

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2021

2.3.1.3.8 Persentase Bangunan Pemerintah yang di Fasilitasi

Fasilitasi layanan bangunan pemerintah dilakukan melalui pembangunan, pendampingan pengawasan, pembinaan teknis, serta fasilitasi administrasi bangunan gedung sesuai usulan dan permintaan dari berbagai pihak. Capaian kinerja terlihat dari progress pemenuhan pembangunan fisik bangunan Gedung, serta layanan lainnya sebagaimana diusulkan dan dilaksanakan pada tahun anggaran 2021. Kegiatan dalam rangka pencapaian target persentase bangunan pemerintah yang difasilitasi diuraikan pada tabel berikut ini:

Tabel II.119.
Bangunan Pemerintah yang Difasilitasi
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021

No	Uraian Kegiatan	Satuan	Volume		Lokasi
			Target	Realisasi	
1	Pembangunan Cabang Rutan Kelas I Makassar	Paket	1	1	Kota Makassar
2	Pembangunan Flat Dalmas Polda Sulsel	Paket	1	1	Kota Makassar
3	Pematangan Lahan SPN Maros	Paket	1	1	Kab.Maros
4	Pembangunan Makomen Brimob (Lanjutan)	Paket	1	1	Kota Makassar
5	Hibah Uang dalam rangka pembangunan fasilitas Kodam XIV Tahun 2021	Paket	1	1	Kota Makassar
6	Hibah Uang Renovasi Gedung SAT PJR Ditlantas Polda Sulawesi selatan	Paket	1	1	Kota Makassar
7	Pembangunan Masjid 99 Kubah	Gedung	1	1	Kota Makassar
8	Rehabilitasi Lanjutan Gedung LPTQ	Gedung	1	1	Kota Makassar
9	Pembangunan Gedung Islamic Center Tahap III	Aula	1	1	Kab.Bone
10	Penyediaan Jaringan Air Bersih dan Penataan Gedung Brigade Siaga Bencana (BSB)	Paket	1	1	Kota Makassar
11	Pengadaan Meubelier Gedung Islamic Center	Paket	1	1	Kab.Bone

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2021

Capaian indikator persentase bangunan pemerintah yang difasilitasi pada tahun 2021 mencapai 85 persen belum mencapai target namun mengalami peningkatan dari tahun 2020. Tahun 2017 hingga 2019 belum dilakukan pengukuran indikator.

Tabel II.120.
Persentase Bangunan Pamerintah Yang di Fasilitasi
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017-2021

Indikator	Satuan	Tahun					
		2017	2018	2019	2020	Target 2021	Capaian 2021
Persentase bangunan pemerintah yang difasilitasi	%	Belum diukur			75,04	100	85,00

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2021

2.3.1.3.9 Jumlah Kawasan Strategis Dan Pusat Pertumbuhan Baru Yang Dilakukan Penataan Bangunan Dan Lingkungannya

Salah satu yang menjadi prioritas Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2018-2023 adalah pengembangan pusat pertumbuhan baru dan pengembangan Kawasan strategis. Pengembangan Kawasan tersebut diwujudkan pada penyediaan sarana dan prasarana pada Kawasan Strategis serta pengembangan Rest Area. Adapun Kawasan strategis sebagaimana tertuang pada Perda Tata Ruang adalah : (1) Kawasan pusat bisnis terpadu CPI di Mamminasata, (2) Kawasan Pendidikan Tinggi Mamminasata, (3) Kawasan Wisata Kabupaten Bulukumba dan sekitanya, (4) Kawasan Pengembangan Peternakan SERA (Seko-Rampi), (5) Kawasan Pengembangan Pertenakan SIPAENRE (Sidenreng Rappang, Pinrang, Enrekang), (6) Kawasan Minapolitan pesisir pantai Pangkajene Kepulauan-Maros-Barru Kawasan Agropolitan Kabupaten Enrekang dan Sekitarnya, (7) Kawasan Agropolitan Bantaeng dan Bulukumba, (8) Taman Miniatur Sulawesi Selatan di Situs Kerajaan Gowa Benteng Sombaopu, (9) Kawasan wisata Budaya dan Agrowisata Toraja dan sekitarnya, (10) Kawasan Wisata Alam Malino di Kabupaten Gowa, (11) Kawasan Wisata Alam Lejja dan sekitarnya di Kabupaten Soppeng, (12) Kawasan Kebun Raya Pucak di Kabupaten Maros, (13) Kawasan Sungai Tello dan Sekitarnya, (14) Kawasan Danau Tempe dan sekitarnya, (15) Kawasan Danau Matano-Towuti dan sekitarnya, (16) Kawasan Lompobattang dan sekitarnya, (17) Kawasan Geopark Maros Pangkep, serta (18) Pengembangan Rest Area sebagai pusat pertumbuhan baru di beberapa lokasi. Adapun lokasi yang dilakukan intervensi hingga tahun 2021 adalah Kawasan CPI, Kawasan Wisata Bulukumba dan sekitarnya, Kawasan Seko Rampi, Kawasan Toraja dan Sekitarnya, Kawasan Kebun raya Pucak, Kawasan Danau Tempe, serta Kawasan Geopark Maros Pangkep, serta 2 Lokasi Pembangunan Rest Area yang masih berlanjut di Kab. Sidrap dan Kab. Jeneponto. Capaian ini belum mencapai target karena pertimbangan optimalisasi pemanfaatan Rest Area yang telah ada sehingga tidak ada penambahan lokasi Rest Area. Tahun 2017 hingga 2018 belum dilakukan pengukuran indikator karena mengacu pada periode RPJMD 2018-2023.

Tabel II.121.
Jumlah Kawasan Strategis Dan Pusat Pertumbuhan Baru Yang Dilakukan Penataan Bangunan Dan Lingkungannya Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017-2021

Indikator	Satuan	Tahun					
		2017	2018	2019	2020	Target 2021	Capaian 2021
Jumlah kawasan strategis dan pusat pertumbuhan baru yang dilakukan penataan bangunan dan lingkungannya	Kawasan	Belum diukur		7	13	11	9

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2021

2.3.1.3.10 Persentase Jalan Provinsi Dalam Kondisi Mantap

Dalam pembangunan transportasi jalan di Provinsi Sulawesi Selatan, kondisi jalan tidak mengalami perubahan panjang jalan berdasarkan SK tahun 2017 dengan jalan kewenangan Provinsi sepanjang 2.009,35 Km. Kondisi jalan mantap tahun 2017 sebesar 63,57 persen mengalami penurunan pada tahun 2018 sebesar 58,00 persen, hal ini disebabkan karena adanya penambahan panjang jalan kewenangan provinsi menjadi 2.009,35 Km dari Panjang jalan sebelumnya 1.500,15 Km. Pada tahun 2019 kondisi jalan mantap mengalami peningkatan cukup signifikan hingga mencapai 70,01 persen pada tahun 2021. Kondisi jalan baik pada tahun 2017 adalah 34,41 persen, meningkat pada tahun 2021 sebesar 38,98 persen. Akan tetapi peningkatan kondisi ini belum mencapai target RPJMD sebagaimana ditargetkan mencapai 72,3 persen di tahun 2021. Hal ini disebabkan karena terdapat beberapa pekerjaan pembangunan jalan yang tidak rampung dan berhenti karena beberapa faktor penghambat, selain itu terdapat penurunan kondisi kemantapan jalan pada beberapa ruas yang sebelumnya pada kondisi baik dan sedang.

Diagram II.5.
Kondisi Jaringan Jalan Kewenangan Provinsi

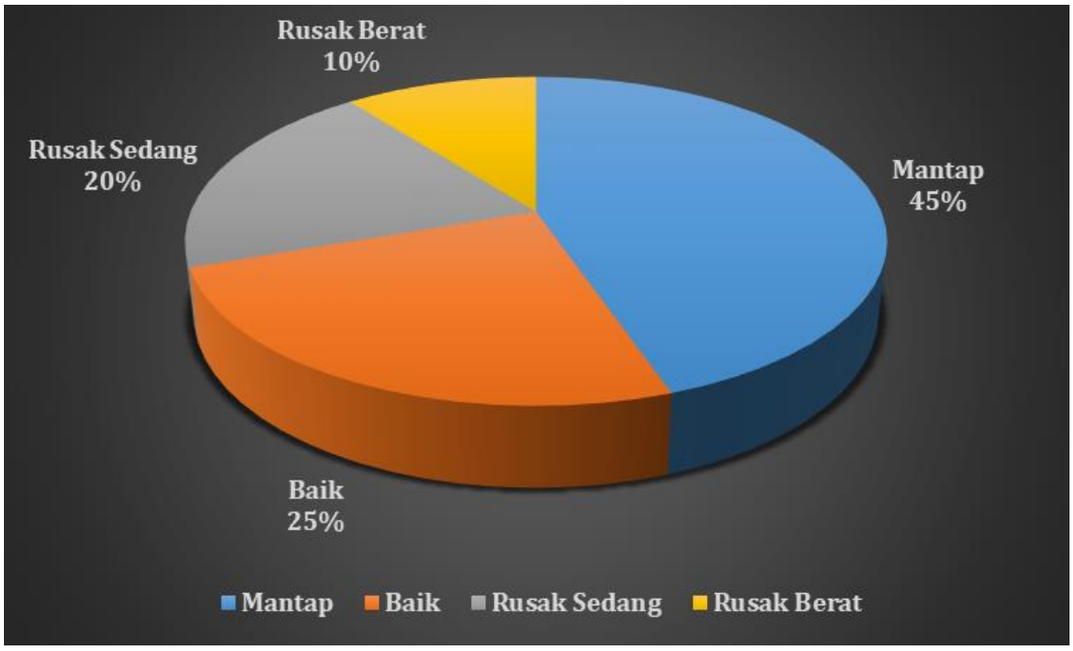

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2021

Kegiatan yang mendukung pencapaian target kemantapan jalan pada tahun 2021 diuraikan sebagai berikut:

Tabel II.122.
Kegiatan Bina Marga
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021

No	Uraian Kegiatan	Satuan	Volume		Lokasi
			Target	Realisasi	
1	Rehabilitasi Jalan dengan Program Hibah Jalan Daerah (PHJD)	Km	50	50	Kab.Tana Toraja dan Kab.Toraja

No	Uraian Kegiatan	Satuan	Volume		Lokasi
			Target	Realisasi	
					Utara
2	Preservasi Jalan Ruas Tanabau - Ngapaloka - Pattumbukang	Km	3	3	Kab.Selayar
3	Preservasi Jalan Ruas Impa Impa - Anabanua	Km	3,6	3,6	Kab.Wajo
4	Preservasi Jalan Ruas Pekkae - Takkalalla	Km	1,22	1,22	Kab.Soppeng
5	Preservasi Jalan Ruas Boro – Jeneponto	Km	2,75	0	Kab.Jeneponto
6	Preservasi Jalan Ruas Waempubbu – Pompanua (PEN)	Km	3	3	Kab.Bone
7	Pemel Berkala / Rehab Jalan dan Rekons / Peningkatan Kapasitas Struktur Jalan Ruas Cabbenge - Soppeng (DAK REGULER)	Km	3,43	3,43	Kab.Soppeng
8	Pembangunan Jalan Ruas Bts. Soppeng - Pangkajene S	Km	3,1	3,1	Kab.Sidrap
9	Pembangunan Jalan Ruas Bua - Rantepao Kab. Toraja Utara/Luwu (DAK PENUGASAN)	Km	5,81	5,1	Kab.Toraja Utara dan Kab.Luwu
10	Pembangunan Jalan Ruas Latuppa - Bongko - Salulimbong - Pantilang 1 (PEN)	Km	6,1	6,1	Kota Palopo
11	Pembangunan Jalan Ruas Bua - Rantepao 1 (PEN)	Km	10	10	Kab.Luwu
12	Pembangunan Jalan Ruas Sabbang - Tallang 1 (PEN)	Km	1,85	1,85	Kab. Luwu Utara
13	Pembangunan Jalan Ruas Ussu - Nuha - Beteleme Batas Prov. Sulteng 1 (PEN)	Km	7,2	7,2	Kab. Luwu Timur
14	Pembangunan Jalan Ruas Passobo - Matangli - Massupu 1 (PEN)	Km	8,5	8,5	Kab.Tana Toraja
15	Pembangunan Jalan Ruas Rantepao - Pangngala - Bts. Prov. Sulbar 1 (PEN)	Km	10,8	10,8	Kab.Toraja Utara
16	Pembangunan Jalan Ruas Rantepao - Sadan - Batusitanduk 1 (PEN)	Km	11,4	11,4	Kab.Toraja Utara
17	Pembangunan Jalan Ruas	Km	5,5	5,5	Kab.Barru

No	Uraian Kegiatan	Satuan	Volume		Lokasi
			Target	Realisasi	
	Takkalasi - Bainange - Lawo 1 (PEN)				
18	Pemb. Jln Ruas Soppeng - Bts. Sidrap (PEN)	Km	7,1	7,1	Kab.Soppeng
19	Pembangunan Jalan Ruas Palampang - Munte - Botolempangan 1 (PEN)	Km	4,5	4,5	Kab.Sinjai
20	Proteksi Rumaja Ruas Jalan Sungguminasa - Malino	Km	2,52	0,96	Kab.Gowa

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2021

Tabel II.123.
Persentase Jalan Provinsi Dalam Kondisi Mantap
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017-2021

Indikator	Satuan	Tahun					
		2017	2018	2019	2020	Target 2021	Capaian 2021
Persentase jalan provinsi dalam kondisi mantap	%	63,57	58,00	61,52	66,20	72,30	70,01

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2021

2.3.1.3.11 Persentase Panjang Terisolir Pada Ruas Jalan Provinsi Yang Terakses Roda Empat

Ruas jalan terisolir (belum tembus/jalan tanah) kewenangan Provinsi di tahun 2020 terdiri dari 14 ruas dengan panjang ruas 543.07 km diantaranya; (1) Tuppu - Pao - Pamulungan - Batas Kab. Tana Toraja, (2) Sa'bang – Tallang, (3) Tallang – Sae, (4) Sae - Bts. Sulbar, (5) Ussu - Nuha - Beteleme Batas Prov. Sulteng, (6) Latuppa - Bonglo - Salulimbong – Pantilang, (7) Passobbo - Matangli – Masuppu, (8)Masuppu - Batas Kab. Pinrang, (9) Takkalasi - Bainange – Lawo, (10) Palampang - Munte – Botolempangan, (11) Bua - Bts. Kab. Toraja Utara, (12) Bts. Kab. Luwu - Tedong Bonga, (13) Rantepao - Pangalla - Baruppu - Bts. Prov. Sulbar, (14) Rantepao - Sa'dan - Batusitanduk. Adapun sampai dengan tahun 2021 masih tersisa kebutuhan pembangunan jalan yang belum tembus sepanjang 138,29 Km. Indikator persentase panjang terisolir pada ruas jalan provinsi yang terakses roda empat pada tahun 2017 hingga 2018 belum dilakukan pengukuran. Pembangunan jalan terisolir menjadi prioritas utama tahun 2021 yang telah mencapai 74,53 persen. Pembangunan jalan akan terus dilaksanakan untuk mengurangi daerah terisolir yang di Sulawesi Selatan.

Tabel II.124.
Kondisi Jalan Daerah Terisolir
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021

No	Nama Ruas	Panjang Ruas (Km)	Tipe Permukaan/ Kondisi Ruas Jalan (Km)					Lokasi
			Tanah/ Belum Tembus	Baik	Sedang	Rusak Ringan	Rusak Berat	
1	Tallang - Sae	49,50	16,3	0,7	26,3	1	21,5	Luwu Utara
2	Sae - Batas Sulbar	34,00	34	0	0	0	34	Luwu Utara
3	Bua - Batas Kab.Toraja Utara	31,50	3	0,2	11,9	2	17,4	Luwu
4	Rantepao - Pangalla - Baruppu - Bts. Prov.SulBar	61,21	31,2	8,4	10,01	5,1	37,7	Toraja Utara
5	Passobbo - Matangli - Masuppu	33,93	6,2	7,1	10,5	0,1	16,23	Tana Toraja
6	Masuppu - Batas Kab.Pinrang	55,09	20,99	0	0	8,8	46,29	Tana Toraja
7	Takkalasi - Bainange Batas Kab. Soppeng	19,9	9,8	1,8	8,3	0	9,8	Barru
8	Tuppu - Pao - Pamulungan - Batas Kab. Tator	40,2	12,2	2	10,3	5,6	22,30	Pinrang
9	Batas Pangkep - Mallawa	17,5	5,7	12,7	3	1,8	0	Maros
10	Botolempangan - Munte - Palampang	24,34	4,6	9,14	3	6,6	5,6	Sinjai
11	Tana Bau - Ngapaloka - Pattumbukang	44,10	13,1	14,1	6,8	14,1	9,1	Selayar

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2021

Tabel II.125.
Persentase panjang terisolir pada ruas jalan provinsi yang terakses roda empat Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017-2021

Indikator	Satuan	Tahun					
		2017	2018	2019	2020	Target 2021	Capaian 2021
Persentase panjang terisolir pada ruas jalan provinsi yang terakses roda empat	%	Belum diukur		20,48	42,72	42,72	74,53

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2021

2.3.1.3.12 Rasio Tenaga Kerja Konstruksi Yang Terlatih Di Wilayah Provinsi Yang Dibuktikan Dengan Sertifikat Pelatihan Ahli

Berdasarkan Permendagri Nomor 18 Tahun 2020 tentang indikator kinerja kunci laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah, capaian kinerja Bidang Jasa Konstruksi yaitu untuk Rasio tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah provinsi merupakan perbandingan jumlah tenaga konstruksi tersertifikasi sejumlah 752 orang dengan jumlah tenaga konstruksi pada tahun 2021. Indikator rasio tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah provinsi yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan ahli tidak dilakukan pengukuran tahun 2017 hingga 2020 karena mengikuti Perubahan RPJMD 2018-2023.

Tabel II.126.
Rasio tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah provinsi yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan ahli
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017-2021

Indikator	Satuan	Tahun					
		2017	2018	2019	2020	Target 2021	Capaian 2021
Rasio tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah provinsi yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan ahli	Rasio	Belum diukur				0,5	19,95

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2021

2.3.1.3.13 Rasio Ketaatan Pemanfaatan Ruang

Pemerintah daerah baik Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan 24 Pemerintah Kabupaten/Kota telah memiliki Rencana Tata Ruang Wilayah yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah. Oleh karena itu, pembangunan wilayah serta pemanfaatan ruang harus menjadikan RTRW sebagai acuan pelaksanaan pembangunan. Selain Penyediaan Perda RTRW yang mutakhir, upaya penyediaan Rencana Rinci/Rencana Detail Tata Ruang Pemerintah Kabupaten/Kota, serta pengendalian pemanfaatan menjadi prioritas yang dilakukan setiap tahunnya. Capaian indikator rasio ketaatan pemanfaatan ruang tahun 2017 hingga 2018 belum dilakukan pengukuran. Hingga tahun 2021 rasio ketaatan pemanfaatan ruang mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya dengan capain 0,80 persen.

Tabel II.127.

Rasio ketaatan pemanfaatan ruang
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017-2021

Indikator	Satuan	Tahun					
		2017	2018	2019	2020	Target 2021	Capaian 2021
Rasio ketaatan pemanfaatan ruang	Rasio	Belum diukur		0,70	0,75	0,80	0,80

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2021

2.3.1.4 Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman

2.3.1.4.1 Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah provinsi yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni kewenagan provinsi

Pencapaian persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah provinsi yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni kewenagan provinsi pada tahun 2017-2018 berupa penyusunan DED penyediaan rumah bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah provinsi yang berlokasi di Kota Makassar, Kabupaten Maros, Kabupaten Pangkep, Kabupaten Barru dan Kota Pare-Pare. Tahun 2019-2021 tidak ada warga negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah provinsi yang difasilitasi untuk peyediaan rumah layak huni. Pencapaian terhadap indikator Persentase Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah provinsi yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni kewenangan provinsi (SPM) belum optimal karena mayoritas masyarakat yang terkena relokasi tidak menginginkan relokasi melainkan ganti untung. Selain itu pada tahun 2021 telah dilaksanakan sosialisasi tentang mekanisme Penggantian Hak Atas Tanah dan Bangunan yang melibatkan stakeholder dari 24 kabupaten/kota. Kegiatan ini dimaksudkan meminimalisir konflik pertanahan yang memerlukan penanganan masing-masing pihak sesuai dengan kewenangan demi terciptanya tertib administrasi pertanahan, dan bertujuan untuk terfasilitasinya penanganan permasalahan urusan mekanisme pergantian hak atas tanah dan bangunan.

Tabel II.128.
Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah provinsi yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni kewenagan provinsi Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017-2021

Indikator	Satuan	Tahun					
		2017	2018	2019	2020	Target 2021	Capaian 2021
Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah provinsi yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni kewenagan provinsi (SPM)	%	100	100	100	100	100	100

Sumber: Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Prov. Sulawesi Selatan, Tahun 2021

2.3.1.4.2 Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni kewenangan provinsi

Capaian Akses Rumah Tangga terhadap Rumah Layak Huni (RLH) di Sulawesi Selatan Tahun 2016-2021 mengalami peningkatan selama 6 (enam) tahun terakhir capaian RLH di perdesaan selalu lebih rendah dibanding di perkotaan, namun peningkatan capaian di perdesaan cenderung lebih cepat dibandingkan di perkotaan. Capaian RLH Sulawesi Selatan tahun 2021 diatas capaian nasional sebesar 60,90 persen digambarkan pada diagram berikut:

Grafik II. 10
Capaian Rumah Layak Huni Sulawesi Selatan Tahun 2021

Sumber: Susenas, 2021 (data diolah)

Capaian akses rumah layak huni tahun 2021 berdasarkan sub sektor fisik bangunan, luas bangunan, akses air minum layak dan akses sanitasi layak digambarkan pada grafik berikut ini:

Grafik II. 11
Capaian RLH Berdasarkan 4 Komponen Kelayakan

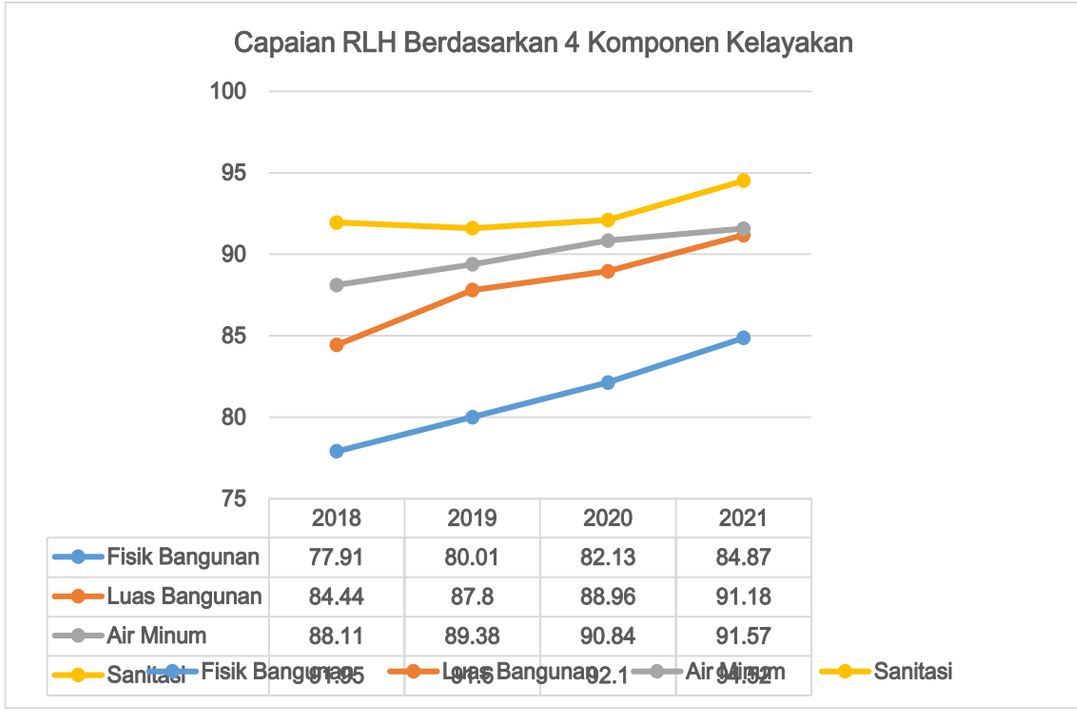

Sumber: Susenas, 2021 (data diolah)

Fisik bangunan menjadi sub indikator dengan capaian paling rendah dibandingkan sub indikator yang lainnya. Disusul dengan akses sanitasi, akses air minum dan luas bangunan. Fisik bangunan menjadi faktor terbesar penyebab rumah tidak layak huni (RTLH) di provinsi Sulawesi Selatan baik di perkotaan maupun perdesaan. Persentasenya di perkotaan mencapai 6,49 persen dan di perdesaan 14,21 persen.

Pada tahun 2019, alokasi anggaran untuk SPM Perumahan berupa penyusunan dokumen identifikasi daerah rawan bencana pada kawasan permukiman, serta *prototype* 2 unit rumah contoh korban bencana dalam bentuk rumah instan sederhana sehat (RISHA). Pada tahun 2020 pemerintah provinsi memberikan bantuan keuangan untuk penanganan bencana banjir bandang dan tanah longsor yang terjadi di Kabupaten Luwu Utara yang ditetapkan oleh Kepala Daerah Penanganan Bencana Skala Provinsi berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan nomor 1707/VII/2020 tanggal 16 Juli 2020 tentang penetapan penanganan bencana skala provinsi di Kecamatan Masamba, Kecamatan Baebunta, Kecamatan Baebunta Selatan, Kecamatan Sabbang, Kecamatan Malangke Barat, dan Kecamatan Malangke Kabupaten Luwu Utara. Bantuan keuangan tersebut dialokasikan untuk bantuan logistik, penyediaan hunian sementara (Huntara) serta pembangunan rumah baru atau hunian tetap (Huntap). Adapun yang telah mendapatkan fasilitasi penyediaan rumah layak huni melalui bantuan keuangan pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan kepada pemerintah Kabupaten

Luwu Utara sebanyak 50 unit rumah, serta 72 unit rumah dari pendanaan APBN melalui Kementerian PUPR. Pada tahun yang sama pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan memberikan bantuan keuangan untuk penanganan banjir di Kabupaten Bantaeng yaitu pembangunan rumah layak huni sejumlah 69 unit.

Tahun 2021 telah tertangani warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni berupa terbangunnya 886 unit rumah dari pendanaan APBN melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) bagi warga negara korban banjir bandang dan tanah longsor yang terjadi pada tahun 2020 di Kabupaten Luwu Utara. Pada akhir tahun 2021 terjadi bencana alam gempa bumi di Kabupaten Selayar sehingga pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan memberikan bantuan keuangan sejumlah 8 Milyar rupiah untuk pembangunan rumah/hunian tetap (Huntap) sejumlah 160 unit rumah bagi warga negara yang terdampak bencana gempa di Kecamatan Pasilambena dan Kecamatan Pasimarannu Kabupaten Kepulauan Selayar. Rasio rumah layak huni pada tahun 2011 sejumlah 0,216 mengalami penurunan dari tahun sebelumnya dengan penurunan 1,3 persen. Selain pembangunan Huntap untuk korban bencana, pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan membangun prasarana dan sarana utilitas bagi rumah korban bencana berupa pembangunan drainase lingkungan dan jalan lingkungan di Kabupaten Luwu Utara serta pembangunan sistem jaringan air bersih pada daerah rawan bencana di Kota Makassar dan Kabupaten Gowa dengan cakupan rumah tangga terlayani 1.577 rumah tangga.

Tabel II.129.
Rumah Layak Huni Menurut Kabupaten/Kota
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021

No	Kabupaten/ Kota	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Jumlah Rumah (Unit)	Rumah Layak Huni (Unit)	Persen	Rasio
1	Kepulauan Selayar	140.322	34.993	32.934	94,12	0,235
2	Bulukumba	448.218	110.399	106.439	96,41	0,237
3	Bantaeng	201.960	49.019	45.225	92,26	0,224
4	Jeneponto	415.462	98.218	76.905	78,30	0,185
5	Takalar	311.949	75.350	65.218	86,55	0,209
6	Gowa	768.868	178.392	171.904	96,36	0,224
7	Sinjai	266.479	58.183	57.572	98,95	0,216
8	Maros	388.783	86.386	50.355	58,29	0,130
9	Pangkajene Kepulauan	352.229	83.073	67.342	81,06	0,191
10	Barru	189.877	45.975	41.027	89,24	0,216
11	Bone	813.211	186.089	180.004	96,73	0,221
12	Soppeng	237.875	61.150	54.410	88,98	0,229
13	Wajo	392.437	95.716	93.052	97,22	0,237
14	Sidenreng Rappang	320.761	77.106	72.307	93,78	0,225
15	Pinrang	408.109	95.800	88.571	92,45	0,217
16	Enrekang	228.087	50.799	49.409	97,26	0,217
17	Luwu	372.876	80.709	76.956	95,35	0,206
18	Tana Toraja	270.597	55.788	54.501	97,69	0,201
19	Luwu Utara	329.934	77.815	74.923	96,28	0,227
20	Luwu Timur	304.938	72.952	71.568	98,10	0,235

No	Kabupaten/ Kota	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Jumlah Rumah (Unit)	Rumah Layak Huni (Unit)	Persen	Rasio
21	Toraja Utara	255.140	55.952	55.133	98,54	0,216
22	Makassar	1.463.089	339.464	336.974	99,27	0,230
23	Pare-Pare	154.524	34.803	31.727	91,16	0,205
24	Palopo	183.056	39.115	38.049	97,28	0,208
Sulawesi Selatan		**9.192.621**	**2.137.015**	**1.986.705**	**92,97**	**0,216**

Sumber: Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Prov. Sulawesi Selatan, Tahun 2021

Rasio rumah layak huni di Sulawesi Selatan tahun 2021 sebesar 0,216 dengan rasio rumah layak huni terendah 0,130 di Kabupaten Maros dengan jumlah rumah layak huni sebesar 50.355 unit dari total 86.386 unit rumah.

Grafik II. 12
Rasio Rumah Layak Huni Tahun 2021

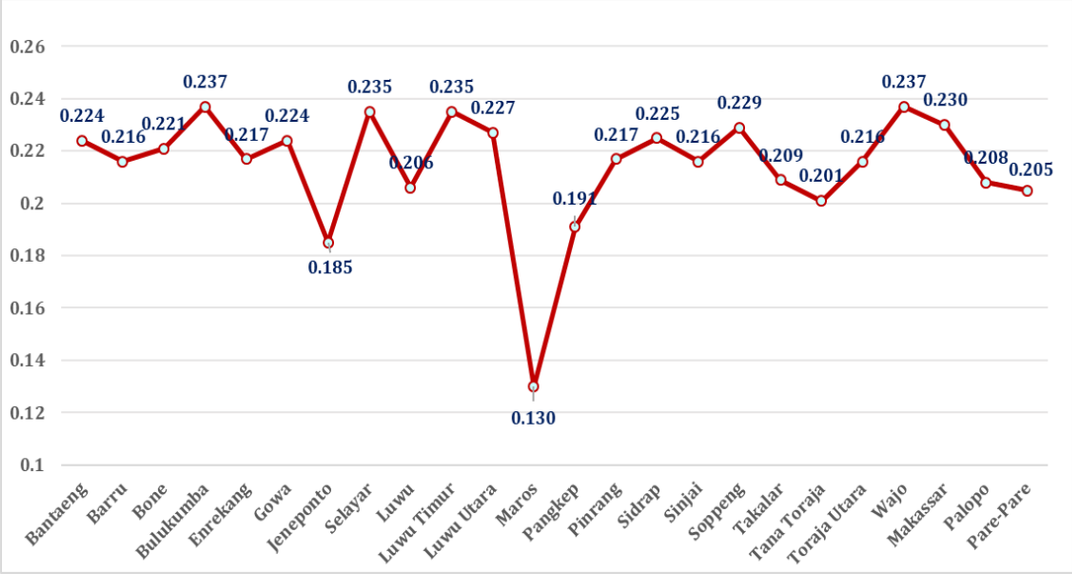

Sumber: Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Prov. Sulawesi Selatan, Tahun 2021

Selain pembangunan rumah layak huni melalui bantuan keuangan kepada pemerintah kabupaten bagi warga negara korban bencana, melalui program pengembangan perumahan dilaksanakan kegiatan pembangunan PSU bagi rumah korban bencana dan sistem jaringan air bersih pada daerah rawan bencana, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel II.130.
Pembangunan PSU dan Jaringan Air Bersih
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021

No	Paket Pekerjaan	Volume	Cakupan Rumah Tangga Terlayani
A	**Pembangunan PSU Bagi Rumah Korban Bencana**		
1	Pembangunan Jalan Lingkungan Kelurahan Bone Tua, Kecamatan Masamba Utara, Kabupaten Luwu Utara	106 m	20 Ruta
2	Pembangunan Drainase Lingkungan Kelurahan Bone Tua, Kecamatan Masamba Utara, Kabupaten Luwu Utara	160 m	20 Ruta
B	**Pembangunan Sistem Jaringan Air Bersih pada Daerah Rawan Bencana**		
1	**Kota Makassar**		
-	Balang Tojang, Kelurahan Antang, Kecamatan Manggala	3.250 m	250 Ruta
2	**Kabupaten Gowa**		
-	Desa Bontolempangan, Kecamatan Bontolempangan	1.150 m	176 Ruta
-	Desa Jonjo, Kecamatan Parigi	1.300 m	200 Ruta
-	Desa Majannang, Kecamatan Parigi	1.680 m	180 Ruta
-	Dusun Galla, Desa Bilanrengi, Kecamatan Parigi	1.350 m	220 Ruta
-	Desa Lassa-Lassa, Desa Lassa-Lassa, Kecamatan Bontolempangan	1.700 m	176 Ruta
-	Kelurahan Lauwa, Kecamatan Bungaya	1.150 m	150 Ruta
-	Desa Mining Bohay, Kecamatan Parigi	1.600 m	225 Ruta

Sumber: Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Prov. Sulawesi Selatan, Tahun 2021

Tabel II.131.
Persentase Warga Negara Korban Bencana Yang Memperoleh Rumah Layak Huni Kewenangan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017-2021

Indikator	Satuan	Tahun					
		2017	2018	2019	2020	Target 2021	Capaian 2021
Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni kewenangan provinsi (SPM)	%	Belum diukur	100	100	100	100	100

Sumber: Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Prov. Sulawesi Selatan, Tahun 2021

2.3.1.4.3 Persentase Luas Kawasan Kumuh Tertangani Kewenangan Provinsi

Perubahan RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023 penanganan Kawasan kumuh di Sulawesi Selatan diamanatkan melalui Program Kawasan Permukiman dengan melakukan pembinaan penanganan Kawasan kumuh kabupaten/kota melalui kegiatan Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 Ha sampai dengan dibawah 15 Ha dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 Ha sampai dengan dibawah 15 Ha. Tahun 2020 Target dan Capaian Persentase kawasaan kumuh tertangani kewenangan provinsi telah menggunakan Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor; 956/III/Tahun 2020 tentang Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Kewenangan Provinsi menyatakan bahwa Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Provinsi Sulawesi Selatan, sehingga persentase capaian antara tahun 2019-2020 terjadi ketimpangan dari capaian tahun sebelumnya yang menggunakan Basis Data Kumuh 2016.

Pada tahun 2021 ditargetkan penurunan luas Kawasan kumuh sebesar 13,69 persen dari 1.183 Ha yang menjadi kewenangan provinsi. Capaian kinerja berupa tersusunnya Dokumen Rencana Tapak (Site Plan) dan DED Revitalisasi Kawasan Kumuh pada 26 kawasan di 20 kabupaten/kota. Sedangkan untuk kegiatan Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh dengan luas 10 Ha sampai dengan dibawah 15 Ha mendukung pencapaian penurunan luas Kawasan Kumuh tahun 2021 sebesar 18,03 persen atau 152,51 Ha Kawasan kewenangan provinsi. Sementara untuk kegiatan Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha capaian penurunan luas kawasan kumuh sampai akhir tahun 2021 sebesar 18,03 persen dari total luasan kawasan kumuh kewenangan Provinsi. Adapun Infrastruktur yang terbangun dalam Kawasan Kumuh yaitu Jalan Lingkungan sepanjang 1.1824,5 m, Drainase sepanjang 1.730,17 m, serta pengadaan 2 Unit Motor Sampah. Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan

Luas 10 Ha sampai dengan dibawah 15 Ha dilaksanakan melalui kegiatan Pembangunan Drainase Lingkungan di Kabupaten Bantaeng, Kabupaten Bone, Kabupaten Gowa, Kabupaten Luwu Timur, Kabupaten Pinrang, dan Kabupaten Soppeng, serta kegiatan Pembangunan Jalan Lingkungan di Kabupaten Bantaeng, Kabupaten Bone, Kabupaten Enrekang, Kabupaten Gowa, Kabupaten Soppeng, dan Kabupaten Wajo. Pembangunan dan Pengadaan Pengelolaan Persampahan di Kabupaten Bantaeng diharapkan dapat mengurangi tingkat kekumuhan di Kabupaten Bantaeng.

Tabel II.132.
Penanganan Kawasan Kumuh Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021

No	Lokasi	Volume	
Kabupaten Bantaeng			
- Kecamatan Bantaeng (Kawasan Letta)			
1	Pemb. Jaringan Drainase	214	m'
2	Pemb. Jalan Lingkungan	554,8	m'
3	Pengadaan Motor Pengangkut Sampah	1	Unit
- Kecamatan Bissapu (Kawasan Bontosunggu)			
1	Pemb. Jaringan Drainase	183,3	m'
2	Pemb. Jalan Lingkungan	207	m'
3	Pengadaan Motor Pengangkut Sampah	1	Unit
Kabupaten Bone			
- Kecamatan Tanete Riattang Timur (Kawasan Toro/Lonrae)			
1	Pemb. Jaringan Drainase	217	m'
2	Pemb. Jalan Lingkungan	257,6	m'
Kabupaten Wajo			
- Kecamatan Tempe (Kawasan Paccecang)			
1	Pemb. Jalan Lingkungan	131,1	m'
Kabupaten Soppeng			
- Kecamatan Lilirilau (Kawasan Macanre)			
1	Pemb. Jaringan Drainase	401,3	m'
2	Pemb. Jalan Lingkungan	130	m'
Kabupaten Enrekang			
- Kecamatan Enrekang (Kawasan Juppandang)			
1	Pemb. Jalan Lingkungan	64	m'
Kabupaten Gowa			
- Kecamatan Somba Opu (Kawasan Karetappa)			
1	Pemb. Jaringan Drainase	84	m'
2	Pemb. Jalan Lingkungan	167	m'
Kabupaten Luwu Timur			
- Kecamatan Nuha (Kawasan Nikel)			
1	Pemb. Jaringan Drainase	182,57	m'
Kabupaten Pinrang			
- Kecamatan Paleteang (Kawasan Ongkoe)			
1	Pemb. Jaringan Drainase	447,2	m'
2	Pemb. Jalan Lingkungan	115	m'

No	Lokasi	Volume
- Kecamatan Paleteang (Kawasan Lerang-lerang)		
1	Pemb. Jalan Lingkungan	262 m'

Sumber: Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Prov. Sulawesi Selatan, Tahun 2021

Tabel II.133.
Persentase Luas Kawasan Kumuh Tertangani Kewenangan Provinsi
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017-2021

Indikator	Satuan	Tahun					
		2017	2018	2019	2020	Target 2021	Capaian 2021
Persentase Luas Kawasan Kumuh Tertangani Kewenangan Provinsi	%	13,96	20,16	52,70	6,67	13,69	18,03

Sumber: Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Prov. Sulawesi Selatan, Tahun 2021

Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan nomor 956/III/Tahun 2020 tentang Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Kewenangan Provinsi menyatakan bahwa Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Sulawesi Selatan seluas 4.073 Ha tersebar di 20 kabupaten/kota, 49 kecamatan, 90 kelurahan, serta 97 kawasan dengan luas total 1.183 Ha.

Tabel II.134.
Luas Kawasan Kumuh Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021

No	Kabupaten/Kota	Luas Kawasan Kumuh Sulsel (Ha)	Luas Kawasan Kumuh Kewenangan Provinsi (Ha)	Jumlah Lokasi
1	Kabupaten Bantaeng	171,94	45,80	11
2	Kabupaten Barru	31,04	-	6
3	Kabupaten Bone	219,05	67,61	17
4	Kabupaten Bulukumba	118,37	10,84	40
5	Kabupaten Enrekang	38,47	15,62	10
6	Kabupaten Gowa	231,03	213,78	74
7	Kabupaten Jeneponto	365,92	86,20	59
8	Kabupaten Kepulauan Selayar	128,12	146,18	16
9	Kabupaten Luwu	117,45	10,43	10
10	Kabupaten Luwu Timur	114,90	33,57	2
11	Kabupaten Luwu Utara	251,35	70,70	114
12	Kabupaten Maros	101,30	34,93	11
13	Kabupaten Pangkajene Kepulauan	60,70	-	24
14	Kabupaten Pinrang	108,25	53,40	11

No	Kabupaten/Kota	Luas Kawasan Kumuh Sulsel (Ha)	Luas Kawasan Kumuh Kewenangan Provinsi (Ha)	Jumlah Lokasi
15	Kabupaten Sidenreng Rappang	105,77	36,27	11
16	Kabupaten Sinjai	115,34	24,66	21
17	Kabupaten Soppeng	97,85	37,99	8
18	Kabupaten Takalar	110,65	25,16	10
19	Kabupaten Tana Toraja	14,25	-	9
20	Kabupaten Toraja Utara	143,50	37,98	16
21	Kabupaten Wajo	256,79	59,72	28
22	Kota Makassar	650,74	77,92	127
23	Kota Palopo	426,37	95,03	47
24	Kota Pare-Pare	94,77	-	30
Sulawesi Selatan		**4.073,92**	**1.183,79**	**712**

Sumber: Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Prov.Sulawesi Selatan, Tahun 2021

2.3.1.4.4 Persentase rumah tangga yang berakses air bersih layak/Arsinum di Kawasan Pesisir dan Kepulauan

Berdasarkan data BPS, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Tahun 2021 terhadap capaian akses air minum layak kabupaten/kota di Sulawesi Selatan dari total 24 kabupaten/kota sejumlah 13 kabupaten masih berada dibawah rata-rata provinsi 91,18 persen serta rata-rata nasional 90,78 persen untuk capaian akses air minum layak yang digambarkan pada diagram berikut ini:

Grafik II. 13
Capaian Akses Air Minum Layak Tahun 2021

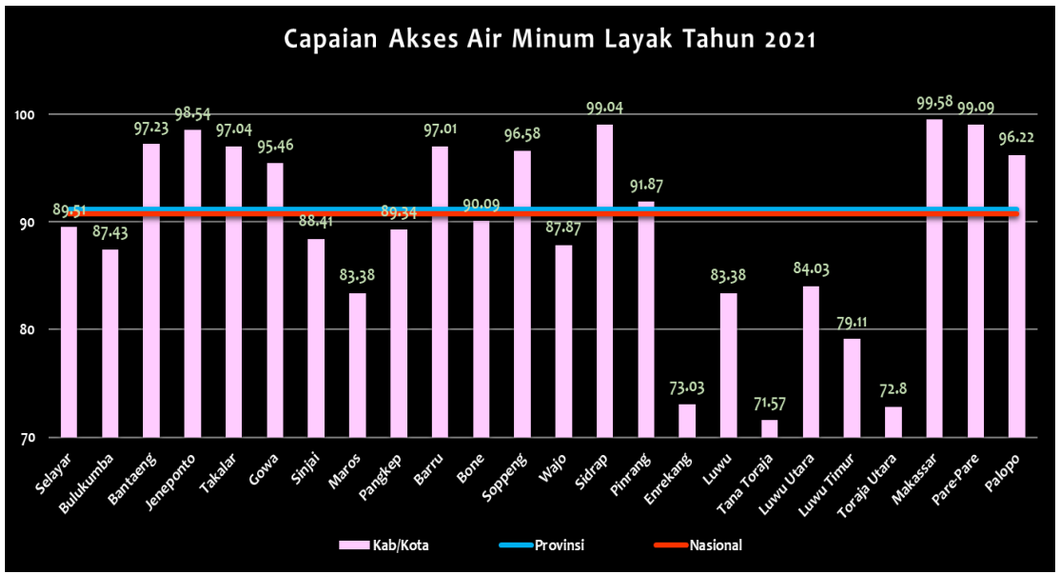

Sumber: Susenas, 2021 (data diolah)

Masih terdapat rumah tangga yang menggunakan sumber air minum tidak layak yaitu bersumber dari sumur tidak terlindungi dan mata air tidak terlindungi, serta masih terdapat rumah tangga yang tidak memiliki akses air minum dengan mengambil langsung dari air permukaan (sungai, danau, waduk, kolam, irigasi, dll). Berdasarkan data Susenas 2021 sejumlah 35,34 persen sumber air minum rumah tangga bersumber dari air dalam kemasan. Namun

akses terhadap air minum dalam kemasan dikategorikan rumah tangga dengan akses air minum layak jika rumah tangga dalam melakukan aktivitas masak, mandi dan mencuci masih menggunakan sumber air yang tidak layak. Tingginya persentase rumah tangga yang memilih air dalam kemasan sebagai sumber air minum utama khususnya masyarakat yang tinggal di wilayah pesisir dan kepulauan disebabkan karena selain lebih mudah diperoleh juga dinilai lebih hyginis.

Pemenuhan air minum layak/ARSINUM di kawasan pesisir dan kepulauan sejalan dengan amanah UU No.1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman yang menjadi dasar pokok pelaksanaan PSU Permukiman di daerah. Untuk memenuhi kebutuhan air bersih pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan membangun instalasi Air Siap Minum (ARSINUM) di Kawasan pesisir dan kepulauan yang dimulai sejak tahun 2019 sejumlah 1 unit di Pulau Barrang Caddi Kota Makassar yang merupakan Bantuan Hibah dari Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) yang difasilitasi oleh pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Tahun 2020 telah terbangun instalasi ARSINUM sejumlah 3 (tiga) unit di Pulau Samalona, Pulau Langkai, dan Pulau Lanjukang Kota Makassar. Masing-masing ARSINUM pada 4 lokasi terbangun memiliki kapasitas produksi 5.000 liter/hari atau 80 galon dengan cakupan pelayanan 625 rumah tangga. Tahun 2021 telah dibangun Prasarana Air Bersih pada 4 (empat) lokasi yaitu 1 titik di Kabupaten Bone dengan kapasitas produksi 9.000 liter/jam yang cakupan pelayanannya mampu melayani 600 rumah tangga, serta pembangunan prasarana air bersih pada 3 (tiga) lokasi di Kabupaten Bulukumba masing-masing di Desa Jojolo Kecamatan Bulukumba, Desa Padang Kecamatan Gantara, dan Desa Matekko Kecamatan Gantara dengan kapasitas produksi masing-masing 3.000 liter/jam dengan cakupan layanan hingga 200 rumah tangga. Selain itu terdapat bantuan CSR untuk pembangunan instalasi ARSINUM dari PT.Sucofindo di Pulau Balang Datu Kabupaten Takalar sehingga pada tahun 2021 dengan cakupan layanan 625 rumah tangga. Sehingga target persentase rumah tangga berakses air bersih layak/ARSINUM di Kawasan pesisir dan kepulauan tercapai 100 persen. Capaian indikator persentase rumah tangga yang berakses air bersih layak/Arsinum di kawasan Pesisir dan Kepulauan pada tahun 2017 hingga 2018 belum dilakukan pengukuran karena menyesuaikan pelaksanaan program periode RPJMD 2018-2023.

Tabel II.135.
Persentase rumah tangga yang berakses air bersih layak/Arsinum di kawasan Pesisir dan Kepulauan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017-2021

Indikator	Satuan	Tahun					
		2017	2018	2019	2020	Target 2021	Capaian 2021
Persentase rumah tangga yang berakses air bersih layak/Arsinum di kawasan Pesisir dan Kepulauan	%	Belum diukur		100	100	100	100

Sumber: Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Prov. Sulawesi Selatan, Tahun 2021

2.3.1.4.5 Persentase Rumah Tangga Bersanitasi Di Kawasan Permukiman

Berdasarkan data BPS, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Tahun 2021 terhadap capaian akses sanitasi layak kabupaten/kota di Sulawesi Selatan digambarkan pada diagram berikut ini:

Grafik II. 14
Capaian Akses Sanitasi Tahun 2021

Sumber: Susenas, 2021 (data diolah)

Terdapat 11 kabupaten dengan capaian akses sanitasi layak berada dibawah rata-rata provinsi 91,57 persen serta rata-rata nasional 80,29 persen. Masih terdapat rumah tangga di 21 kabupaten/kota yang tidak memiliki akses jamban.

Grafik II. 15
Persentase Rumah Tangga yang tidak Memiliki Fasilitas BAB

Sumber: Susenas, 2021 (data diolah)

UU No.1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman yang menjadi dasar pokok pelaksanaan PSU Permukiman di daerah yang ditindaklanjuti dengan PP No.14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman yang menjelaskan kembali pentingnya penyelenggaraan perumahan dan Kawasan permukiman yang mencakup kegiatan perencanaan, pembangunan, pemanfaatan dan pengendalian termasuk didalamnya pengembangan kelembagaan, pedoman dan system pembiayaan serta peran masyarakat yang terkoordinasi dalam lintas fungsi yang berelanjutan dan terpadu. Sebagai salah satu kebutuhan dasar masyarakat baik yang berada diluar permukiman umum maupun di Kawasan kumuh meliputi air bersih, drainase lingkungan (sanitasi) dan jalan lingkungan yang merupakan prasrana permukiman menjadi tanggungjawab negara agar masyarakat mampu bertempat tinggal dan menghuni rumah layak huni. Saat ini masih banyak polemik terkait ketersediaan atau sengketa lahan, oleh karena itu dibutuhkan peran serta pemerintah kabupaten/kota untuk menjaga perencanaan awal lokasi sampai dengan penyerahan hasil pelaksanaan kegiatan. Selain itu dengan terbitnya Permen LHK No. 4 tahun 2021 tentang Daftar Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelola maka segala bentuk pembangunan dan peningkatan infrastruktur PSU permukiman wajib mempedomani hal tersebut maka dari itu dilakukan uji petik terkait pekerjaan dilapangan karena sampai saat ini belum dilakukan sosialisasi kepada stakeholder terkait.

Tabel II.136.
Persentase Rumah Tangga Bersanitasi menurut Kabupaten/Kota
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021

No	Kabupaten / Kota	Jumlah Penduduk	Jumlah Rumah Tangga	Jumlah Penduduk Bersanitasi	Jumlah Rumah Tangga Bersanitasi	Persentase
1	Kepulauan Selayar	140.322	43.136	170.600	42,864	99,37
2	Bulukumba	448.218	148.499	468.194	113,364	76,34
3	Bantaeng	201.906	65.816	214.484	52,699	80,07
4	Jeneponto	415.462	126.901	491.294	111,153	87,59
5	Takalar	311.949	97.792	412.938	95,367	97,52
6	Gowa	768.868	230.891	955.413	219,635	95,12
7	Sinjai	266.479	79.717	293.090	65,276	81,88
8	Maros	388.738	115.540	503.834	112,212	97,12
9	Pangkep	352.229	106.740	455.418	101,883	95,45
10	Barru	189.877	61.383	248.667	59.066	96,22
11	Bone	813.211	246.078	1.044.449	235.767	95,81
12	Soppeng	237.875	79.714	281.379	70.698	88,69
13	Wajo	392.437	134.874	528.173	126.660	93,91
14	Sidrap	320.761	100.465	425.610	100.380	99,91
15	Pinrang	408.109	130.330	556.272	129.366	99,26
16	Enrekang	228.087	67.312	286.728	64.145	95,29
17	Luwu	372.876	110.937	496.761	107.992	97,35
18	Tana Toraja	270.597	79.578	306.917	70.072	88,06
19	Luwu Utara	329.934	102.486	429.410	100.564	98,13
20	Luwu Timur	304.938	92.660	380.657	88.115	95,10
21	Toraja Utara	255.140	75.289	311.278	67.376	89,49
22	Makassar	1.463.089	437.008	1.897.097	429.207	98,22
23	Pare Pare	154.524	45.827	204.822	45.719	99,77
24	Palopo	183.056	56.715	253.689	55.391	97,67
	TOTAL	**9.218.736**	**2.835.688**	**11.617.176**	**2.664.972**	**93,98**

Sumber: Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Prov. Sulawesi Selatan, Tahun 2021

Tahun 2019 jumlah rumah tangga yg tersebar di 24 Kabupaten/Kota yaitu sebanyak 2.032.113 Rumah Tangga sedangkan jumlah rumah tangga yang bersanitasi yaitu sebesar 1.824.220 atau sebesar 89,77 persen, tahun 2020 capaian rumah tangga yang berakses sanitasi mengalami peningkatan sebesar 93,79 atau sebesar 1.922.346 Rumah Tangga sedangkan untuk tahun 2021 jumlah rumah tangga bersanitasi sebanyak 2.664.972 atau sebesar 93,98 persen. Pada tahun 2021 pencapaian target persentase rumah tangga bersanitasi di kawasan permukiman melebihi target dengan capaian 93,98 persen mengalami peningkatan 0,2 persen dari tahun 2020. Penyediaan PSU Permukiman berupa pembangunan drainase lingkungan dalam rangka peningkatan rumah tangga bersanitasi di kawasan permukiman dilaksanakan pada 6 Kabupaten dengan gambaran sebagai berikut:

Tabel II.137.
Pembangunan Drainase Lingkungan pada Kawasan Permukiman
Tahun 2021

No	Lokasi	Volume	Cakupan Rumah Tangga Terlayani
Kabupaten Luwu			
1	Desa Balla Kecamatan Bajo	234 m'	34
2	Desa Mario Kecamatan Ponrang	240 m'	35
3	Desa Puty Kecamatan Bua	255 m'	36
4	Kelurahan Balo-Balo Kecamatan Belopa	230 m'	32
5	Desa Tallang Bulawang Kecamatan Bajo	240 m'	34
		1.199 m'	**171**
Kota Palopo			
1	Kelurahan Temmalebba Kecamatan Bara	243 m'	35
2	Kelurahan Buntu Datu Kecamatan Bara	226 m'	33
3	Kelurahan Songka Kecamatan Wara Selatan	243 m'	35
4	Kelurahan Sumarambu Kecamatan Telluwanua	247 m'	36
5	Kelurahan Takkalala Kecamatan Wara Selatan	247 m'	36
6	Kelurahan Balandai Kecamatan Bara	250 m'	36
		1.456 m'	**211**
Kabupaten Luwu Utara			
1	Desa Pombakka Kecamatan Masamba	126 m'	18
		126 m'	**18**
Kabupaten Luwu Timur			
1	Desa Kalatiri Kecamatan Burau	130 m'	19
		130 m'	**19**
Kabupaten Tana Toraja			
1	Kawasan Permukiman Tondong Mallu Kecamatan Makale	215 m'	31
		215 m'	**31**
Kabupaten Toraja Utara			
1	Kawasan Permukiman Bt.Mamullu Kecamatan Kepala Pitu	209 m'	30
2	Kawasan Permukiman Ba'tan Kecamatan Kessu'	158 m'	23
3	Kawasan Permukiman Salu Sarre Kecamatan Sopai	209 m'	30
		576 m'	**83**
Total Keseluruhan		**3.702 m'**	**533**

Sumber: Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Prov. Sulawesi Selatan, Tahun 2021

Tabel II.138.
Persentase Rumah Tangga Bersanitasi di Kawasan Permukiman
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017-2021

Indikator	Satuan	Tahun					
		2017	2018	2019	2020	Target 2021	Capaian 2021
Jumlah rumah tangga berakses sanitasi	Ruta	1.713.087	1.729.089	1.824.220	1.922.346		2.664.972
Jumlah rumah tangga	Ruta	2.029.478	2.048.450	2.032.113	2.049.645		2.835.688
Persentase rumah tangga bersanitasi di kawasan permukiman	%	84,41	84,41	89,77	93,79	91,00	93,98

Sumber: Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Prov. Sulawesi Selatan, Tahun 2021

2.3.1.4.6 Persentase Panjang Jalan Lingkungan yang Terbangun Di Kawasan Permukiman

Dengan diberlakukannya Permendagri No.77 Tahun 2020 tentang pedoman teknis pengelolaan keuangan daerah, maka segala aturan teknis tentang hibah dan bansos telah dicabut. Oleh karena itu melalui proses penganggaran yang telah disepakati pada Permendagri No.90 tahun 2020 dan Kepmen No.050-5889 Tahun 2021, maka pelaksanaan penyelenggaraan PSU Permukiman terkait air bersih dan jalan lingkungan dapat dilakukan sesuai kewenangan pemerintah provinsi. Pada tahun 2021 telah terbangun jalan lingkungan pada 10 kawasan dengan total panjang jalan lingkungan yang terbangun 1.788 m pada 11 kawasan di 5 kabupaten dengan rincian sebagai berikut:

Tabel II.139.
Pembangunan Jalan Lingkungan pada Kawasan Permukiman Tahun 2021

No	Lokasi	Volume
Kabupaten Luwu		
1	Kelurahan Balo Balo Kecamatan Belopa	195 m'
Kota Palopo		
1	Kelurahan Balandai Kecamatan Bara	220 m'
Kabupaten Tana Toraja		
1	Kawasan Permukiman Lempangan Tampak Lua Bungin Kecamatan Makale Utara	260 m'
2	Kawasan Permukiman Rantekalua Kecamatan Mangkendek	189 m'
3	Kawasan Permukiman Lipungan Tanete Kecamatan Kurra	185 m'
Kabupaten Toraja Utara		
1	Kawasan Lembang Bua Kecamatan Kesu	178 m'
Kabupaten Bulukumba		
1	Kelurahan Benjala (Jalan Lorong Gudang)	100 m'
2	Desa Lembanna (Jalan Taheo)	161 m'

No	Lokasi	Volume
3	Desa Ara (Jalan Tinadung Ruas 2)	100 m'
4	Kelurahan Sapolehe (Jalan Jana)	100 m'
5	Desa Lembanna (Jalan Goa Pasea Ruas 2)	100 m'
Total Keseluruhan		**1.788 m'**

Sumber: Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Prov. Sulawesi Selatan, Tahun 2021

Capaian indikator persentase panjang jalan lingkungan yang terbangun di kawasan permukiman tahun 2017 hingga 2018 belum dilakukan pengukuran karena menyesuaikan pelaksanaan program periode RPJMD 2018-2023.

Tabel II.140.
Persentase panjang jalan lingkungan yang terbangun di kawasan permukiman Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017-2021

Indikator	Satuan	Tahun					
		2017	2018	2019	2020	Target 2021	Capaian 2021
Persentase panjang jalan lingkungan yang terbangun di kawasan permukiman	%	Belum diukur		17,10	17,10	60,00	195,9

Sumber: Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Prov. Sulawesi Selatan, Tahun 2021

2.3.1.4.7 Persentase Pengembang Perumahan Dengan Tingkat Kualifikasi Menengah Yang Tersertifikasi Dan Terregistrasi Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman

Dalam meningkatkan layanan dan perlindungan kepada masyarakat dan konsumen, serta memastikan ketersediaan pasok perumahan maka perlu mengatur asosiasi pengembang perumahan dan pengembang perumahan dalam menyelenggarakan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, Pemerintah bertanggung jawab atas pembinaan penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman melalui sertifikasi, kualifikasi, klasifikasi, dan registrasi keahlian kepada orang atau badan yang menyelenggarakan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman. Proses Pelaksanaan Akreditasi Asosiasi Pengembang Perumahan dan Registrasi Asosiasi Pengembang Perumahan serta Sertifikasi Pengembang Perumahan dan Registrasi Pengembang Perumahan telah dilaksanakan dengan melakukan koordinasi dengan berbagai pihak terkait diantaranya: a) Rapat awal persiapan penerbitan sertifikasi dan registrasi pengembang perumahan dengan kualifikasi menengah lingkup Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Selatan; b) Koordinasi awal bersama Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (APERSI); c) Koordinasi awal bersama Persatuan Perusahaan Realestat Indonesia (REI); d) Koordinasi ke Kementerian Pekerjaan Umum dan

Perumahan Rakyat Direktorat Jenderal Bina Konstruksi; e) Koordinasi lanjutan bersama Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (APERSI) dan Persatuan Perusahaan Realestat Indonesia (REI); f) Manghadiri Asistensi Penganggaran dan Pelaporan Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan dan Permukiman tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Bidang Urusan Perumahan dan Permukiman di Manado; Koordinasi lanjutan bersama Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (APERSI); g) Koordinasi lanjutan bersama Persatuan Perusahaan Realestat Indonesia (REI); h) Melakukan Studi Tiru ke Semarang terkait Penyelenggaraan Standar Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan; i) Koordinasi kembali ke Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Direktorat Jenderal Bina Konstruksi. Capaian indikator persentase pengembang perumahan dengan tingkat kualifikasi menengah yang tersertifikasi dan terregistrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman tahun 2017 hingga 2020 belum dilakukan pengukuran karena menyesuaikan Perubahan RPJMD 2018-2021.

Tabel II.141.
Persentase Pengembang Perumahan Dengan Tingkat Kualifikasi Menengah Yang Tersertifikasi Dan Terregistrasi Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017-2021

Indikator	Satuan	Tahun					
		2017	2018	2019	2020	Target 2021	Capaian 2021
Persentase pengembang perumahan dengan tingkat kualifikasi menengah yang tersertifikasi dan terregistrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	%	Belum diukur				14,29	7,15

Sumber: Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Prov. Sulsel, Tahun 2021

2.3.1.5 Kententraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

2.3.1.5.1 Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkada di Provinsi

Dalam penerapan dan pencapaian SPM Pemerintah Daerah mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal dalam mencapai SPM selama kurun waktu tertentu, termasuk perhitungan pembiayaannya dengan menetapkan target dan indikator Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkada di Provinsi. Capaian pada tahun 2021 adalah sebesar 100 persen dengan formula perhitungan jumlah laporan masyarakat yang dilayani terhadap jumlah laporan masyarakat yang

diterima. Pencapaian Pelaksanaan SPM Pemeliharaan Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat dan Perlindungan Masyarakat pada Tahun 2021 tidak terlepas dari dukungan personil yang lebih memadai, dimana saat ini terdapat 148 orang tenaga ASN dan 72 orang dengan jabatan fungsional khusus serta 484 orang tenaga Non ASN.

Tabel II.142.
Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkada
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017-2021

Indikator	Satuan	Tahun					
		2017	2018	2019	2020	Target 2021	Capaian 2021
Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkada di Provinsi (SPM)	%	55	80	89	100	100	100

Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja Sulawesi Selatan, Tahun 2021

2.3.1.5.2 Persentase Korban Bencana yang Tertangani

Capaian persentase korban bencana yang tertangani berdasarkan jumlah laporan korban bencana yang diterima selama tahun 2021 mencapai target 100 persen. Penanganan kebencanaan dilaksanakan berdasarkan laporan kejadian bencana pada 24 kabupaten/kota. Capaian indikator persentase korban bencana yang tertangani belum dilakukan pengukuran pada tahun 2017 hingga 2020 karena menyesuaikan Perubahan RPJMD 2018-2023.

Tabel II.143.
Persentase Korban Bencana yang tertangani
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017-2021

Indikator	Satuan	Tahun					
		2017	2018	2019	2020	Target 2021	Capaian 2021
Persentase Korban Bencana yang tertangani	%	Belum diukur				100	100

Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja Sulawesi Selatan, Tahun 2021

2.3.1.5.3 Persentase Dokumen Kebencanaan Sampai Dengan Sah/Legal Yang Tersedia

Persentase dokumen kebencanaan sampai dengan sah/legal yang tersedia merupakan indikator kinerja program yang didukung oleh pencapaian sub kegiatan Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Periode Tahun 2021-2025 dengan cara menghitung perbandingan antara kemajuan

pekerjaan dokumen yang disusun dengan jumlah 1 (satu) dokumen draft Ranpergub Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) yang telah dikirim ke Biro Hukum untuk diproses pengesahannya sesuai mekanisme aturan yang berlaku. Pada Tahun 2021 telah tercapai 100 persen dari target yang direncanakan. Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) disusun untuk memberikan arahan yang jelas, terkoordinasi dan kolaboratif dalam rangka penyelenggaraan penanggulangan bencana di Sulawesi Selatan. Dokumen RPB Sulawesi Selatan disusun berdasarkan kajian resiko bencana dan histori kejadian bencana yang menempatkan bencana banjir/banjir bandang, tanah longsor, angin kecang/angin putting beliung, kekeringan, gempa bumi dan tsunami, gelombang ekstrim dan abrasi, serta Pandemi Covid-19 sebagai bencana prioritas untuk ditangani pada periode 2021-2025.

Tabel II.144.
Indeks Risiko Bencana Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2021
Provinsi Sulawesi Selatan

No	Kabupaten/Kota	2020		2021	
		Skor	Kelas Risiko	Skor	Kelas Risiko
1	Palopo	211,20	Tinggi	198,94	Tinggi
2	Luwu Timur	202,00	Tinggi	195,10	Tinggi
3	Luwu	192,23	Tinggi	187,71	Tinggi
4	Bone	191,20	Tinggi	183,85	Tinggi
5	Luwu Utara	185,25	Tinggi	169,57	Tinggi
6	Barru	180,40	Tinggi	162,65	Tinggi
7	Wajo	179,20	Tinggi	179,20	Tinggi
8	Pinrang	179,20	Tinggi	161,57	Tinggi
9	Pangkajene Kepulauan	168,40	Tinggi	168,40	Tinggi
10	Sinjai	165,60	Tinggi	165,60	Tinggi
11	Bulukumba	163,20	Tinggi	163,20	Tinggi
12	Maros	157,93	Tinggi	157,93	Tinggi
13	Kepulauan Selayar	155,20	Tinggi	155,20	Tinggi
14	Pare-Pare	155,20	Tinggi	155,20	Tinggi
15	Jeneponto	151,20	Tinggi	151,20	Tinggi
16	Enrekang	150,00	Tinggi	144,23	Tinggi
17	Tana Toraja	150,00	Tinggi	150,00	Tinggi
18	Toraja Utara	150,00	Tinggi	150,00	Tinggi
19	Takalar	135,04	Sedang	131,33	Sedang
20	Kota Makassar	131,78	Sedang	127,18	Sedang
21	Soppeng	131,20	Sedang	131,20	Sedang
22	Sidenreng Rappang	119,20	Sedang	119,20	Sedang
23	Gowa	114,42	Sedang	106,27	Sedang
24	Bantaeng	107,73	Sedang	102,20	Sedang

Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Sulawesi Selatan, Tahun 2021

Tabel II.145.
Persentase Dokumen Kebencanaan sampai dengan sah/legal yang tersedia Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017-2021

Indikator	Satuan	Tahun					
		2017	2018	2019	2020	Target 2021	Capaian 2021
Persentase Dokumen Kebencanaan sampai dengan sah/legal yang tersedia	%	100	100	100	100	100	100

Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Sulawesi Selatan, Tahun 2021

2.3.1.5.4 Persentase Aparat Kesiapsiagaan Bencana Yang Terlatih

Persentase aparat kesiapsiagaan bencana yang terlatih merupakan indikator kinerja yang mendukung pencapaian target program berupa pelatihan yang melibatkan aparat kebencanaan dari seluruh kabupaten/kota se Sulawesi Selatan. Pada tahun 2021 dengan target 100% telah dicapai melalui pelaksanaan sub kegiatan Pelatihan Tim Reaksi Cepat (TRC) dan Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana. Pada tahun 2021 jumlah aparatur yang ikut pengembangan kapasitas TRC sejumlah 200 orang, sedangkan jumlah aparatur yang ikut pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana sejumlah 100 orang.

Tabel II.146.
Persentase Aparat Kesiapsiagaan Bencana yang terlatih
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017-2021

Indikator	Satuan	Tahun					
		2017	2018	2019	2020	Target 2021	Capaian 2021
Persentase Aparat Kesiapsiagaan Bencana yang terlatih	%	100	100	100	100	50	100

Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Sulawesi Selatan, Tahun 2021

2.3.1.5.5 Persentase Tanggap Darurat Bencana yang Tertangani

Persentase tanggap darurat bencana yang tertangani merupakan indikator kinerja pada kegiatan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana melalui pemenuhan jenis dan pencapaian mutu pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana yang dilaksanakan pada sub kegiatan respon cepat penanganan darurat bencana dan penyediaan logistik penyelamatan dan evakuasi korban bencana, dijabarkan sebagai berikut:

a. Jumlah total bencana alam yang terjadi di Provinsi Sulawesi Selatan pada Tahun 2021 adalah 629 kejadian dengan jenis bencana Banjir, Banjir Bandang, Tanah Longsor, Angin Kencang, Puting Beliung, Kebakaran, Abrasi,

Cuaca Ekstrim, Gelombang Pasang, Kekeringan dan Gempa Bumi yang tersebar pada 24 kabupaten/kota yang disikapi oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Sulawesi Selatan dengan pelayanan respon cepat dan bantuan logistik pada 24 Kabupaten/Kota tersebut sebanyak 8.700 paket yang terdiri dari Logistik Pangan sebanyak 3.000 paket, Logistik Perlengkapan Bayi sebanyak 2.000 paket, Logistik Perlengkapan Keluarga sebanyak 2.000 paket dan Shelter Kit sebanyak 1.700 paket.

b. Jenis sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap Bencana yang tersedia sejumlah 6 jenis, antara lain: mobile single cabin, perahu karet silinger, pelampung, mesin tempel perahu, dan tenda serbaguna dan operasional helikopter.

c. Jumlah aparatur yang mengikuti kegiatan Pelatihan Manajemen Logistik Bencana dan Manajemen Posko Tanggap Darurat Bencana sebanyak 200 orang yang melibatkan aparatur BPBD dan OPD terkait dari 24 Pemerintah Kabupaten/Kota se Sulawesi Selatan Pada tahun 2021.

Tabel II.147.
Data Terdampak Bencana Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2021
Provinsi Sulawesi Selatan

No	Kabupaten/Kota	Jenis Bencana	Jumlah		
			Kejadian	Korban	Sarana
1	Kepulauan Selayar	Banjir	1	0	0
		Tanah Longsor	2	0	10
		Angin Kencang	16	1	4
		Kebakaran	5	6	0
		Abrasi	1	0	0
		Gempa Bumi	1	16.635	624
2	Sinjai	Banjir	4	0	3
		Tanah Longsor	11	0	3
		Angin Kencang	7	12	25
		Putting Beliung	1	0	18
		Kebakaran	1	0	2
3	Bulukumba	Banjir	2	0	5
		Tanah Longsor	1	0	0
		Angin Kencang	8	0	3
		Putting Beliung	3	0	19
		Kebakaran	1	0	1
		Abrasi	2	30	6
		Cuaca Ekstrim	1	0	0
		Gelombang Pasang	1	0	70
4	Bantaeng	Banjir	5	5.000	2.423
		Tanah Longsor	3	0	79
		Kebakaran	1	0	1
5	Jeneponto	Banjir	3	0	10
		Angin Kencang	4	0	2
		Putting Beliung	2	0	6
6	Takalar	Banjir	4	0	3.175
		Angin Kencang	3	1	3
		Putting Beliung	4	4	72
		Kebakaran	6	3	16
		Abrasi	4	0	44
7	Gowa	Banjir	3	270	401
		Kebakaran	1	0	3
8	Makassar	Banjir	4	4.738	283
		Angin Kencang	1	0	1

No	Kabupaten/Kota	Jenis Bencana	Jumlah		
			Kejadian	Korban	Sarana
		Putting Beliung	4	314	79
		Kebakaran	24	809	254
9	Maros	Banjir	1	0	90
		Angin Kencang	11	29	37
		Kebakaran	4	0	4
10	Pangkajene Kepulauan	Banjir	4	25	5.051
		Angin Kencang	16	0	41
		Putting Beliung	10	0	168
		Kebakaran	11	0	13
		Gelombang Pasang	1	0	0
11	Barru	Banjir	3	0	0
		Angin Kencang	6	184	134
		Tanah Longsor	3	5	2
		Kebakaran	4	95	40
		Putting Beliung	4	31	13
		Abrasi	1	0	1
		Cuaca Ekstrim	1	0	0
12	Pare-Pare	Banjir	3	0	0
		Tanah Longsor	2	0	1
		Angin Kencang	6	0	91
		Gelombang Pasang	2	2	0
13	Sidenreng Rappang	Banjir	6	0	708
		Tanah Longsor	3	0	0
		Angin Kencang	8	58	195
		Kebakaran	20	72	29
14	Wajo	Banjir	25	88.796	28.029
		Banjir Bandang	1	283	87
		Tanah Longsor	2	0	0
		Angin Kencang	19	181	62
		Putting Beliung	5	1.098	399
		Kebakaran	5	1	12
15	Pinrang	Banjir	5	0	1
		Tanah Longsor	9	0	0
		Angin Kencang	9	0	53
		Putting Beliung	1	0	2
		Kebakaran	17	5	21
		Abrasi	2	0	0
16	Soppeng	Banjir	3	1	7.593
		Putting Beliung	2	0	154
17	Bone	Banjir	7	0	59
		Tanah Longsor	7	1	0
		Angin Kencang	14	0	3
		Putting Beliung	11	3	125
		Kebakaran	19	18	25
18	Enrekang	Banjir	2	0	900
		Banjir Bandang	1	0	0
		Tanah Longsor	4	0	0
		Angin Kencang	2	16	2
		Kebakaran	5	26	7
19	Tana Toraja	Banjir	6	1	40
		Tanah Longsor	42	11	17
		Angin Kencang	4	6	1
		Kebakaran	6	9	6
20	Toraja Utara	Banjir	1	0	0
		Tanah Longsor	2	0	0
		Putting Beliung	1	0	2
		Kebakaran	2	23	6
21	Luwu	Banjir	15	616	2.331
		Banjir Bandang	1	2.093	734

No	Kabupaten/Kota	Jenis Bencana	Jumlah		
			Kejadian	Korban	Sarana
		Tanah Longsor	3	12.364	167
		Angin Kencang	2	0	6
		Putting Beliung	3	253	114
		Kekeringan	1	0	1
22	Palopo	Angin Kencang	2	0	0
		Banjir	3	54	560
		Tanah Longsor	2	0	1
		Putting Beliung	1	0	336
23	Luwu Utara	Banjir	39	21.976	6.666
		Tanah Longsor	4	16	4
		Angin Kencang	4	1	24
		Putting Beliung	6	97	49
		Kebakaran	9	41	25
		Gelombang Pasang	1	0	10
24	Luwu Timur	Tanah Longsor	1	5	1
		Angin Kencang	5	47	12
		Kebakaran	7	116	14
		Gempa Bumi	4	0	0
Jumlah Total			**629**	**156.482**	**62.924**

Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Sulawesi Selatan, Tahun 2021

Tabel II.148.
Persentase Tanggap Darurat Bencana yang Tertangani
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017-2021

Indikator	Satuan	Tahun					
		2017	2018	2019	2020	Target 2021	Capaian 2021
Persentase Tanggap Darurat Bencana yang tertangani	%	100	100	100	100	100	100

Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Sulawesi Selatan, Tahun 2021

2.3.1.5.6 Cakupan Pelayanan Penyelamatan Dan Evakuasi Korban Kebakaran

Cakupan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran yang terjadi pada 24 kabupaten/kota memiliki beberapa hambatan antara lain: a) Secara kelembagaan masih berada dibawah OPD Satpol PP dengan kata lain tidak berdiri sendiri sebagai satu OPD tersendiri sehingga memperpanjang jalur birokrasi; b) Keterbatasan sarana dan prasarana kebakaran di kabupaten/kota; c) Minimnya SDM apparat pemadam kebakaran di kabupaten/kota; d) Keterbatasan posko Damkar di tingkat kecamatan; e) Keterbatasan tim relawan di tingkat desa/kelurahan. Capaian cakupan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran pada tahun 2021 sebesar 37 persen. Capaian indikator cakupan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban tahun 2017 hingga 2020 belum dilakukan pengukuran karena menyesuaikan Perubahan RPJMD 20218-2023.

Tabel II.149.
Cakupan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017-2021

Indikator	Satuan	Tahun					
		2017	2018	2019	2020	Target 2021	Capaian 2021
Cakupan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	%	Belum diukur				37	37

Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja Sulawesi Selatan, Tahun 2021

2.3.1.6 Sosial

2.3.1.6.1 Persentase Pengawasan Pelaksanaan Undian Gratis Berhadiah Dan Pengumpulan Uang Atau Barang

Pada Tahun 2017 jumlah pengawasan pelaksanaan Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang sebanyak 63 kegiatan. Tahun 2018 Jumlah pengawasan pelaksanaan Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang sebanyak 87 kegiatan. Tahun 2019 Jumlah pengawasan pelaksanaan Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang sebanyak 108 kegiatan, Tahun 2020 Jumlah pengawasan pelaksanaan Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang sebanyak 76 kegiatan, Tahun 2021 Jumlah pengawasan pelaksanaan Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang sebanyak 45 kegiatan dan semua kegiatan pengawasan pada tahun 2017-2021 seluruhnya terealisasi sesuai target yang direncanakan.

Tabel II.150.
Persentase Pengawasan Pelaksanaan Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017-2021

Indikator	Satuan	Tahun					
		2017	2018	2019	2020	Target 2021	Capaian 2021
Persentase Pengawasan pelaksanaan undian gratis berhadiah dan pengumpulan uang atau barang	%	100	100	100	100	100	100

Sumber : Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2021

2.3.1.6.2 Persentase PSKS yang mendapatkan peningkatan kemampuan dan pengetahuan kesejahteraan sosial

Target PSKS yang mendapatkan peningkatan kemampuan dan pengetahuan kesejahteraan sosial pada tahun 2017 sebanyak 520 orang dan

realisasinya sebanyak 606 orang, Tahun 2018 target PSKS yang mendapatkan peningkatan kemampuan sebanyak 610 Orang dan Realisasinya sebanyak 604 Orang. Tahun 2019 target PSKS yang mendapatkan peningkatan kemampuan sebanyak 246 Orang dan realisasinya sebanyak 150 Orang. Tahun 2020 target PSKS yang mendapatkan peningkatan kemampuan sebanyak 257 Orang dan realisasinya sebanyak 100 Orang. Pada Tahun 2021 target PSKS yang mendapatkan peningkatan kemampuan sebanyak 400 Orang namun realisasinya hanya sejumlah 260 Orang sehingga capaian kinerja PSKS yang mendapatkan peningkatan kemampuan dan pengetahuan kesejahteraan sosial 65 persen.

Tabel II.151.
Persentase PSKS yang mendapatkan peningkatan kemampuan dan pengetahuan kesejahteraan sosial
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017-2021

Indikator	Satuan	Tahun					
		2017	2018	2019	2020	Target 2021	Capaian 2021
Persentase PSKS yang mendapatkan peningkatan kemampuan dan pengetahuan kesejahteraan sosial	%	100	99,05	60,97	38,91	100	65,00

Sumber : Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2021

2.3.1.6.3 Persentase Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan

Penanganan Warga Negara Migran pada Tahun 2017 – 2020 dengan target sebanyak 300 Orang dan telah terealisasi sesuai target. Pada Tahun 2021 target penanganan warga negara migran sebanyak 300 orang namun terealisasi hanya sejumlah 167 Orang sehingga capaian kinerja warga negara migran korban tindak kekerasan yang tertangani 55,66 persen.

Tabel II.152.
Persentase penanganan warga negara migran korban tindak kekerasan
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017-2021

Indikator	Satuan	Tahun					
		2017	2018	2019	2020	Target 2021	Capaian 2021
Persentase penanganan warga negara migran korban tindak kekerasan	%	100	100	100	100	100	55,66

Sumber : Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2021

2.3.1.6.4 Persentase warga negara penyandang disabiltas terlantar yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar didalam panti

Pada tahun 2017 jumlah penyandang disabilitas terlantar sebanyak 19.713 Orang dan penyandang disabiltas terlantar yang mendapatkan bantuan sebanyak 1.173 Orang. Tahun 2018 jumlah penyandang disabilitas terlantar sebanyak 19.013 Orang dan penyandang disabiltas terlantar yang mendapatkan bantuan sebanyak 1.562 Orang. Tahun 2019 jumlah penyandang disabilitas terlantar sebanyak 19.013 Orang dan penyandang disabiltas terlantar yang mendapatkan bantuan sebanyak 3.961 Orang. Tahun 2020 populasi penyandang disabilitas terlantar yang membutuhkan rehabilitasi sebanyak 373 Orang dan penyandang disabiltas terlantar yang mendapatkan bantuan sebanyak 131 Orang. Pada Tahun 2021 populasi penyandang disabilitas terlantar yang membutuhkan rehabilitasi sebanyak 324 Orang dan penyandang disabiltas terlantar yang mendapatkan bantuan sebanyak 24 orang. Capaian kinerja warga negara penyandang disabiltas terlantar yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar didalam panti mencapai 100 persen.

Tabel II.153.
Persentase warga negara penyandang disabiltas terlantar yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar didalam pantie Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017-2021

Indikator	Satuan	Tahun					
		2017	2018	2019	2020	Target 2021	Capaian 2021
Persentase warga negara penyandang disabiltas terlantar yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar didalam panti (SPM)	%	5,95	8,21	20,83	35,12	100	100

Sumber : Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2021

2.3.1.6.5 Persentase warga negara Anak Terlantar yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar anak terlantar didalam panti

Pada Tahun 2017 jumlah Anak Terlantar sebanyak 56.009 Orang dan Anak Terlantar yang mendapatkan bantuan sebanyak 1.278 Orang. Tahun 2018 jumlah Anak Terlantar sebanyak 55.939 Orang dan Anak Terlantar yang mendapatkan bantuan sebanyak 1.729 Orang. Tahun 2019 jumlah Anak Terlantar sebanyak 11.472 Orang dan Anak Terlantar yang mendapatkan bantuan sebanyak 3.453 Orang. Tahun 2020 populasi Anak Terlantar yang membutuhkan rehabilitasi di dalam panti sebanyak 6.434 Orang dan Anak Terlantar yang mendapatkan bantuan sebanyak 250 Orang. Pada Tahun 2021 populasi Anak Terlantar yang membutuhkan rehabilitasi sebanyak 1.806 Orang dengan capaian 100 persen.

Tabel II.154.
Persentase warga negara Anak Terlantar yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar anak terlantar didalam panti
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017-2021

Indikator	Satuan	Tahun					
		2017	2018	2019	2020	Target 2021	Capaian 2021
Persentase warga negara Anak Terlantar yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar anak terlantar didalam panti (SPM)	%	2,28	3,09	30,09	3,88	100	100

Sumber : Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2021

2.3.1.6.6 Persenetase warga negara lanjut usia terlantar yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar lanjut usia didalam panti

Pada Tahun 2017–2021 jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan Rehabilitasi di dalam panti Mappaksunggu Pare-Pare sejumlah 75 orang sesuai dengan target yang ditetapkan.

Tabel II.155.
Persenetase warga negara lanjut usia terlantar yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar lanjut usia didalam panti
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017-2021

Indikator	Satuan	Tahun					
		2017	2018	2019	2020	Target 2021	Capaian 2021
Persentase warga negara lanjut usia terlantar yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar lanjut usia didalam panti (SPM)	%	100	100	100	100	100	100

Sumber : Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2021

2.3.1.6.7 Persentase Warga Negara Gelandangan Dan Pengemis Yang Mendapatkan Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Susila Didalam Panti

Pada Tahun 2017 Gelandangan dan Pengemis Dalam LKS Mitra Kerja Dinas Sosial sebanyak 1.048 Orang dan yang mendapat bantuan sebanyak 150 Orang. Tahun 2018 Gelandangan dan Pengemis Dalam LKS Mitra Kerja Dinas Sosial sebanyak 898 Orang dan yang mendapat bantuan sebanyak 100 Orang. Tahun 2019 Gelandangan dan Pengemis Dalam LKS Mitra Kerja Dinas Sosial sebanyak 1.761 Orang dan yang mendapat bantuan sebanyak 200 Orang. Tahun

2020 Gelandangan dan Pengemis Dalam LKS Mitra Kerja Dinas Sosial sebanyak 819 Orang dan Semuanya mendapatkan bantuan. Pada Tahun 2021 capaian kinerja warga negara gelandangan dan pengemis yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar tuna susila didalam panti mencapai 100 persen.

Tabel II.156.
Persentase warga negara gelandangan dan pengemis yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar tuna susila didalam panti
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017-2021

Indikator	Satuan	Tahun					
		2017	2018	2019	2020	Target 2021	Capaian 2021
Persentase warga negara gelandangan dan pengemis yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar tuna susila didalam panti (SPM)	%	14,31	11,30	11,35	100	100	100

Sumber : Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2021

2.3.1.6.8 Persentase Pelayanan Dan Pemenuhan Kebutuhan Dasar Bagi Tuna Sosial Di Dalam Panti

Pada Tahun 2017 terdapat Populasi sebanyak 4323 orang tuna sosial (Eks Narapidana, Napza dan Odha) dan yang dibantu sebanyak 265 Orang. Tahun 2018 terdapat Populasi sebanyak 3619 orang tuna sosial (Eks Narapidana, Napza dan Odha) dan yang dibantu sebanyak 250 Orang. Tahun 2019 terdapat Populasi sebanyak 3619 orang tuna sosial (Eks Narapidana, Napza dan Odha) dan yang dibantu sebanyak 200 Orang. Tahun 2020 terdapat Populasi sebanyak 3619 orang tuna sosial (Eks Narapidana, Napza dan Odha) dan yang dibantu sebanyak 100 Orang, dan Pada Tahun 2021 target tuna sosial yang mendapatkan rehabilitasi dalam panti Mattirodeceng yaitu sebanyak 100 Orang dan terealisasi sesuai dengan target yang direncanakan.

Tabel II.157.
Persentase Pelayanan dan Pemenuhan Kebutuhan dasar bagi tuna sosial di dalam panti Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017-2021

Indikator	Satuan	Tahun					
		2017	2018	2019	2020	Target 2021	Capaian 2021
Persentase Pelayanan dan Pemenuhan Kebutuhan dasar bagi tuna sosial di dalam panti	%	6,13	6,90	5,52	100	100	100

Sumber : Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2021

2.3.1.6.9 Persentase PPKS Yang Mendapatkan Jaminan Sosial

Pada Tahun 2017 Populasi PPKS sebanyak 584.240 Orang dan yang mendapatkan bantuan jaminan sosial (PKH) sebanyak 178.594 orang. Tahun 2018 Populasi PPKS sebanyak 503.847 Orang dan yang mendapatkan bantuan jaminan sosial (PKH) sebanyak 314.420 orang. Tahun 2019 Populasi PPKS sebanyak 462.125 Orang dan yang mendapatkan bantuan jaminan social (PKH) sebanyak 232.935 orang. Tahun 2020 Populasi PPKS sebanyak 415.310 Orang dan yang mendapatkan bantuan jaminan sosial (PKH) sebanyak 313.357 orang. Tahun 2021 Populasi PPKS sebanyak 415.310 Orang dan yang mendapatkan bantuan jaminan social (PKH) sebanyak 365.669 orang, sehingga capaian kinerja PPKS yang mendapatkan jaminan sosial sejumlah 88,04 persen.

Tabel II.158.
Persentase PPKS yang mendapatkan jaminan sosial
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017-2021

Indikator	Satuan	Tahun					
		2017	2018	2019	2020	Target 2021	Capaian 2021
Persentase PPKS yang mendapatkan jaminan sosial	%	30,56	62,40	50,40	75,45	3,50	88,04

Sumber : Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2021

2.3.1.6.10 Persentase Pengangkatan Anak WNI Oleh Orang Tua Tunggal

Pada Tahun 2017 yang mengajukan proses pengangkatan anak sebanyak 16 Orang dan semuanya terealisasi. Tahun 2018 yang mengajukan proses pengangkatan anak sebanyak 30 Orang dan semuanya terealisasi. Tahun 2019 yang mengajukan proses pengangkatan anak sebanyak 33 Orang dan semuanya terealisasi. Tahun 2020 yang mengajukan proses pengangkatan anak sebanyak 33 Orang dan yang diterima sebanyak 32 Orang. Pada Tahun 2021 yang mengajukan proses pengangkatan anak sebanyak 17 Orang dan semua pengajuan pengangkatan anak WNI oleh orang tua tunggal diterima, sehingga target kinerja tercapai 100 persen.

Tabel II.159.
Persentase pengangkatan anak WNI oleh orang tua tunggal
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017-2021

Indikator	Satuan	Tahun					
		2017	2018	2019	2020	Target 2021	Capaian 2021
Persentase pengangkatan anak WNI oleh orang tua tunggal	%	100	100	100	96,96	100	100

Sumber : Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2021

2.3.1.6.11 Persentase warga negara Korban bencana provinsi yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial pada saaat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana provinsi

Pada Tahun 2017 jumlah Populasi Korban Bencana sebanyak 19.219 Orang dengan jumlah korban bencana yang mendapatkan bantuan sebanyak 15.789 Orang. Tahun 2018 jumlah Populasi Korban Bencana sebanyak 33.660 Orang dan semua Korban bencana mendapatkan bantuan. Tahun 2019 jumlah Populasi Korban Bencana sebanyak 62.618 Orang dan semua Korban bencana mendapatkan bantuan. Tahun 2020 jumlah Populasi Korban Bencana sebanyak 38.246 Orang dengan jumlah korban bencana yang mendapatkan bantuan sebanyak 5.979 Orang. Pada Tahun 2021 jumlah Populasi Korban Bencana sebanyak 9.494 Orang dan semua Korban bencana pada tahun ini mendapatkan bantuan, sehingga target kinerja tercapai 100 persen.

Tabel II.160.
Persentase warga negara Korban bencana provinsi yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial pada saaat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana provinsi
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017-2021

Indikator	Satuan	Tahun					
		2017	2018	2019	2020	Target 2021	Capaian 2021
Persentase warga negara Korban bencana provinsi yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial pada saaat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana provinsi (SPM)	%	82,15	100	100	15,63	100	100

Sumber : Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2021

2.3.1.6.12 Persentase TMP yang dikelola

Pengelolaan Taman Makam Pahlawan pada tahun 2017 – 2021 yaitu sebanyak 2 Taman Makam Pahlawan (TMP)/Makam Pahlawan Nasional (MPN) yang dikelola sesuai target yang direncanakan.

Tabel II.161.
Persentase TMP yang dikelola
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017-2021

Indikator	Satuan	Tahun					
		2017	2018	2019	2020	Target 2021	Capaian 2021
Persentase TMP yang dikelola	%	100	100	100	100	100	100

Sumber : Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2021

2.3.2 Pelayanan Urusan Wajib Non Dasar

2.3.2.1. Ketenagakerjaan

2.3.2.1.1. Persentase Dokumen Perencanaan Tenaga Kerja Makro

Tabel II.162.
Persentase Dokumen Perencanaan Tenaga Kerja Makro
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017-2021

Indikator	Satuan	Tahun					
		2017	2018	2019	2020	Target 2021	Capaian 2021
Persentase Dokumen Perencanaan Tenaga Kerja Makro	%	Belum diukur	95,83	95,83	95,83	100	91,67

Sumber : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2021

Capaian indikator persentase penyusunan dokumen perencanaan tenaga kerja makro tidak dilakukan pengukuran pada tahun 2017. Pada tahun 2021 adalah sebesar 91,67 persen turun sebesar 4,16 persen dari tahun 2020 sebesar 95,83 persen serta belum mencapai target sebesar 100 persen. Penurunan capaian persentase dokumen perencanaan tenaga kerja makro ini disebabkan dari target 24 kabupaten/kota yang menyusun, ternyata hanya 22 kabupaten yang menyusun dan 2 kabupaten tidak menyusun. Kedua Kabupaten tersebut adalah Kabupaten Bantaeng dan Kabupaten Soppeng.

2.3.2.1.2. Persentase Perusahaan yang menyusun Perencanaan Tenaga Kerja

Persentase perusahaan yang menyusun perencanaan tenaga kerja mikro pada tahun 2021 adalah sebesar 10 persen dari target 5 persen. Dari total jumlah perusahaan yang didata sebanyak 20 perusahaan, yang telah menyusun perencanaan tenaga kerja mikro hanya 2 perusahaan. Tahun 2017 hingga 2019 belum pernah dilakukan pendataan terhadap perusahaan yang menyusun perencanaan tenaga kerja mikro, sehingga mulai tahun 2021 sesuai amanah dalam Permendagri 18 Tahun 2020 dilakukan pendataan terhadap perusahaan yang menyusun perencanaan tenaga kerja.

Tabel II.163.
Persentase Perusahaan yang menyusun Perencanaan Tenaga Kerja
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017-2021

Indikator	Satuan	Tahun					
		2017	2018	2019	2020	Target 2021	Capaian 2021
Persentase Perusahaan yang menyusun Perencanaan Tenaga Kerja	%	Belum diukur				5,00	10,00

Sumber: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Prov. Sulawesi Selatan, Tahun 2021

2.3.2.1.3. Persentase Pencari Kerja Terlatih Yang Mendapatkan Pekerjaan

Capaian indikator persentase pencari kerja terlatih yang mendapatkan pekerjaan tahun 2017 hingga 2020 belum dilakukan pengukuran karena menyesuaikan RPJMD Perubahan 2018-2021. Pada tahun 2021 adalah sebesar 73,00 persen atau meningkat sebanyak 0,18 persen dari target 72,92 persen. Dari total jumlah pencari kerja yang dilatih sebanyak 200 orang, berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi terhadap pencari kerja yang dilatih ternyata yang telah mendapatkan pekerjaan adalah sebanyak 146 orang atau sekitar 73,00 persen.

Tabel II.164.
Persentase pencari kerja terlatih yang mendapatkan pekerjaan
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017-2021

Indikator	Satuan	Tahun					
		2017	2018	2019	2020	Target 2021	Capaian 2021
Persentase pencari kerja terlatih yang mendapatkan pekerjaan	%	Belum diukur				72,92	73,00

Sumber: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Prov. Sulawesi Selatan, Tahun 2021

2.3.2.1.4. Persentase Tenaga Kerja Yang Dilatih Berwirausaha Dapat Mandiri

Tingkat partisipasi angkatan kerja tahun 2019 hingga 2021 mengalami peningkatan, dimana tingkat partisipasi angkatan kerja tertinggi pada tahun 2021 di Kabupaten Tana Toraja sebesar 77,99 persen dengan jumlah penduduk yang berekrja sebsar 130.483 orang. Sedangkan tingkat partisipasi angkatan kerja terendah di Kabupaten Pinrang sebesar 57,78 persen.

Grafik II. 16
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Tahun 2021

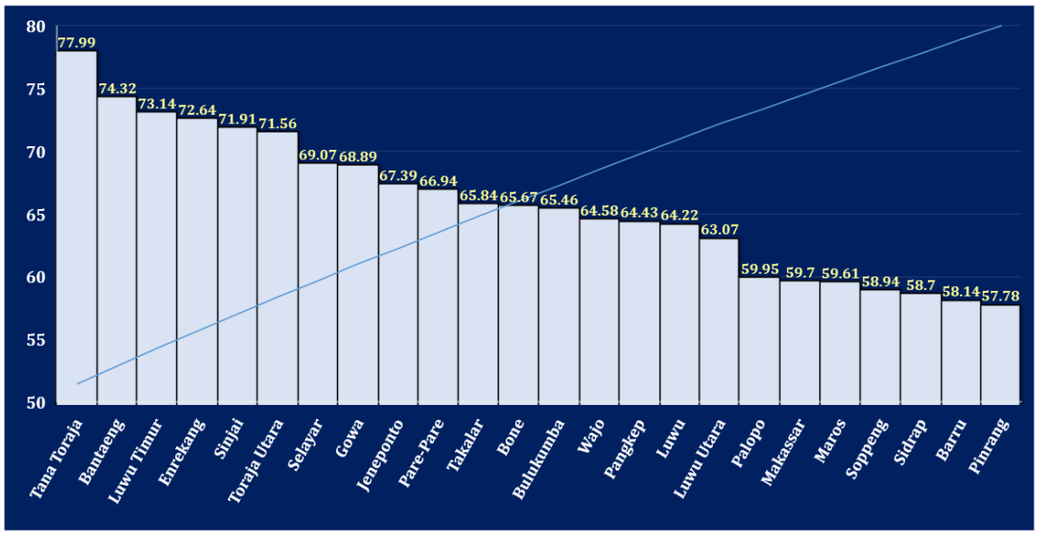

Sumber : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Prov. Sulawesi Selatan, Tahun 2021 (data diolah)

Jumlah tenaga kerja yang berusaha sendiri dan pekerja bebas keluarga pada tahun 2021 mengalami peningkatan 0,99 persen dari tahun sebelumnya dengan jumlah 1.552.570 orang.

Grafik II. 17
Kesempatan Kerja Tahun 2021

Sumber: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Prov. Sulawesi Selatan, Tahun 2021 (data diolah)

Capaian indikator persentase tenaga kerja yang dilatih berwirausaha dapat mandiri pada tahun 2017 hingga 2020 belum dilakukan pengukuran karena menyesuaikan Perubahan RPJMD 2018-2021. Tahun 2021 adalah sebesar 81,25 persen lebih tinggi 6,25 persen dari target 75,00 persen. Dari total 320 orang peserta pelatihan yang berbasis kewirausahaan yang telah mandiri sebanyak 212 orang, meliputi pelatihan kewirausahaan sebanyak 12 orang dan pelatihan kelompok usaha mandiri (KUM) sebanyak 200 orang dan sisanya sebanyak 60 orang baru mulai merintis usaha.

Tabel II.165.
Persentase tenaga kerja yang dilatih berwirausaha dapat mandiri
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017-2021

Indikator	Satuan	Tahun					
		2017	2018	2019	2020	Target 2021	Capaian 2021
Persentase tenaga kerja yang dilatih berwirausaha dapat mandiri	%	Belum diukur				75,00	81,25

Sumber: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Prov. Sulawesi Selatan, Tahun 2021

2.3.2.1.5. Persentase Pencari Kerja Yang Yang Terdaftar Dan Ditempatkan

Pada tahun 2018 hingga tahun 2020 jumlah pencari kerja yang terdaftar dan ditempatkan mengalami penurunan, namun pada tahun 2021 jumlah pencari kerja yang terdaftar dan ditempatkan mengalami peningkatan dari tahun 2020 dengan jumlah 51.012 orang. Gambaran jumlah pencari kerja yang terdaftar dan ditempatkan pada tahun 2021 diuraikan pada diagram berikut ini:

Grafik II. 18
Pencari Kerja yang Ditempatkan Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2021

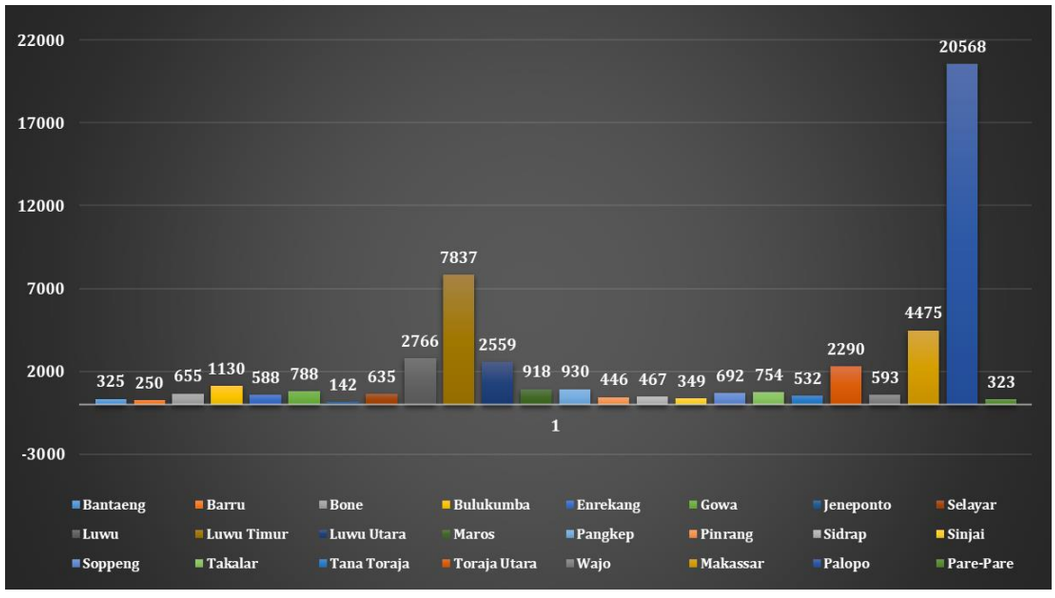

Sumber: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Prov. Sulawesi Selatan, Tahun 2021 (data diolah)

Persentase pencari kerja yang terdaftar dan ditempatkan pada tahun 2021 adalah sebesar 5,60 persen lebih tinggi 1,69 persen dari target 3,91 persen. Berdasarkan hasil monitoring di 24 kabupaten/kota jumlah pencari kerja sebanyak 311.117 orang dan yang ditempatkan sebanyak 17.424 orang yang terdiri dari AKAL (Antar Kerja Antar Luar) sebanyak 14.108 orang, AKAD (Antar Kerja Antar Daerah) sebanyak 3.120 orang, Disabilitas sebanyak 19 orang dan PMI (Pekerja Migran Indonesia) sebanyak 177 orang.

Tabel II.166.
Persentase Pencari kerja yang yang terdaftar dan ditempatkan
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017-2021

Indikator	Satuan	Tahun					
		2017	2018	2019	2020	Target 2021	Capaian 2021
Persentase Pencari kerja yang yang terdaftar dan ditempatkan	%	51,20	3,19	4,36	3,29	3,91	5,60

Sumber : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Prov. Sulawesi Selatan, Tahun 2021

2.3.2.1.6. Persentase Daya Serap Tenaga Kerja

Persentase daya serap tenaga kerja merupakan perbandingan antara jumlah penduduk yang bekerja dibagi dengan jumlah penduduk usia kerja. Capaian indikator persentase daya serap tenaga kerja tahun 2017 hingga 2020 belum dilakukan pengukuran karena menyesuaikan Perubahan RPJMD 2018 hingga 2023. Pada tahun 2021 adalah sebesar 61,58 persen melampaui 2,8 persen dari target 58,78 persen. Daya serap tenaga kerja pada tahun 2021 tertinggi di Kota Makassar (15,14 persen), Kabupaten Gowa (9,37 persen), dan Kab.Bone (8,85 persen).

Grafik II. 19
Daya Serap Tenaga Kerja Tahun 2021

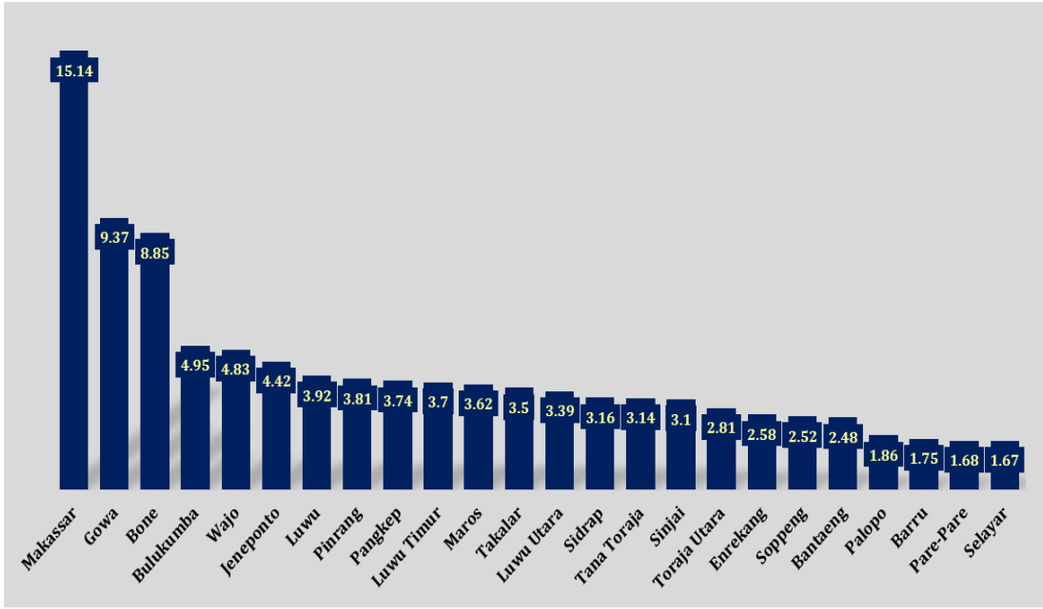

Sumber: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Prov. Sulawesi Selatan, Tahun 2021 (data diolah)

Berdasarkan data rilis BPS Agustus 2021 jumlah penduduk usia kerja sebanyak 6.817.600 orang, meningkat sebanyak 72.679 orang dibanding tahun 2020 dari 6.744.921 orang, sementara jumlah penduduk yang bekerja sebanyak 4.160.433 orang pada tahun 2021 dan meningkat sebanyak 159.813 orang pada tahun 2020 dari 4.005.990 orang.

Tabel II.167.
Persentase daya serap tenaga kerja
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017-2021

Indikator	Satuan	Tahun					
		2017	2018	2019	2020	Target 2021	Capaian 2021
Persentase daya serap tenaga kerja	%	Belum diukur				58,78	61,58

Sumber : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Prov. Sulawesi Selatan, Tahun 2021

2.3.2.1.7. Persentase Perusahaan Yang Menerapkan Peraturan Perundangan Bidang Ketengakerjaan

Capaian indikator persentase perusahaan yang menerapkan peraturan perundang-undangan tahun 2017 hingga 2020 belum dilakukan pengukuran karena menyesuaikan Perubahan RPJMD 2018 hingga 2023. Pada tahun 2021 adalah sebesar 60,98 persen melampaui 3,88 persen dari target 57,10 persen. Persentase besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian bersama sebesar 60,98 persen yang diukur dari jumlah kasus yang dicatatkan sebanyak 41 kasus dan jumlah kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama sebanyak 25 kasus dan sisanya adalah anjuran.

Tabel II.168.
Persentase perusahaan yang menerapkan peraturan perundangan bidang ketengakerjaan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017-2021

Indikator	Satuan	Tahun					
		2017	2018	2019	2020	Target 2021	Capaian 2021
Persentase perusahaan yang menerapkan peraturan perundangan bidang ketengakerjaan	%	Belum diukur				57,10	60,98

Sumber : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Prov. Sulawesi Selatan, Tahun 2021

2.3.2.1.8. Persentase Besaran Pekerja/Buruh Yang Menjadi Peserta Jamsostek

Persentase besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta jamsostek merupakan rasio antara jumlah pekerja/buruh yang mengikuti jamsostek dibagi dengan total jumlah pekerja, pada tahun 2021 persentase besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta jamsostek adalah sebesar 47,12 persen lebih tinggi 0,52 persen dari target 46,60 persen. Berdasarkan data BPJS yang tercatat jumlah pekerja/buruh sebanyak 2.265.109 orang dan yang menjadi peserta jamsostek sebanyak 1.067.251 orang.

Tabel II.169.
Persentase besaran pekerja /buruh yang menjadi peserta Jamsostek Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2017-2021

Indikator	Satuan	Tahun					
		2017	2018	2019	2020	Target 2021	Capaian 2021
Persentase besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta Jamsostek	%	71,23	64,51	63,55	77,99	46,60	47,12

Sumber: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Prov. Sulawesi Selatan, Tahun 2021

2.3.2.1.9. Persentase Penurunan Resiko Kecelakaan Kerja Dan Penyakit Akibat Kerja

Capaian indikator persentase penurunan resiko kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja tahun 2017 hingga 2020 belum dilakukan pengkuran karena menyesuaikan Perubahan RPJMD 2018-2023. Pada tahun 2021 adalah sebesar 100 persen lebih tinggi 15,00 persen dari target 85,00 persen. Secara keseluruhan jumlah perusahaan sesuai Permen 09 Tahun 2005 sebanyak 20.189 perusahaan. Sementara jumlah perusahaan yang melapor dan telah menerapkan K3 berdasarkan hasil pemeriksaan oleh Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan dan Fungsional Pengawas Ketenagakerjaan sebanyak 12.113 perusahaan, keseluruhannya telah menerapkan K3. Namun jika dibandingkan secara total jumlah perusahaan, maka prosentase hanya 60,09 persen. Hal ini disebabkan jumlah fungsional pengawas ketenagakerjaan hanya 55 orang, dimana masing-masing pengawas mempunyai tugas pokok melakukan pemeriksaan sebanyak 5 perusahaan setiap bulannya, disamping tugas-tugas lainnya.

Tabel II.170.
Persentase Penurunan resiko kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016-2019

Indikator	Satuan	Tahun					
		2017	2018	2019	2020	Target 2021	Capaian 2021
Persentase Penurunan resiko kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja	%	Belum diukur				85,00	100

Sumber: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Prov. Sulawesi Selatan, Tahun 2021

2.3.2.1.10. Persentase Kepatuhan Penerapan Norma Ketenagakerjaan

Capaian persentase kepatuhan penerapan norma ketenagakerjaan tahun 2018 hingga 2020 belum dilakukan pengukuran karena menyesuaikan Perubahan RPJMD 2018-2023. Pada tahun 2021 adalah sebesar 100 persen

lebih tinggi 20,00 persen dari target 80,00 persen. Berdasarkan hasil pemeriksaan penerapan norma ketenagakerjaan yang dilakukan oleh fungsional pengawas pada 3.300 perusahaan keseluruhannya telah merapkan norma kepatuhan.

Tabel II.171.
Persentase kepatuhan penerapan norma ketenagakerjaan
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017-2021

Indikator	Satuan	Tahun					
		2017	2018	2019	2020	Target 2021	Capaian 2021
Persentase kepatuhan penerapan norma ketenagakerjaan	%	Belum diukur				80,00	100

Sumber: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Prov. Sulawesi Selatan, Tahun 2021

2.3.2.2. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

2.3.2.2.1. Persentase Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan yang Terstandarisasi

Capaian persentase lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan yang terstandarisasi tahun 2017 belum dilakukan pengukuran karena menyesuaikan pelaksanaan program RPJMD 2018-2023. Dalam rangka memperkecil kesenjangan gender di Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2021 ditargetkan sebesar 10 persen dengan capaian 20 persen. Hal ini dapat dilihat pencapaian secara agregat meningkatnya pencapaian Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) tahun 2021 sebesar 76,32 dan ditahun sebelumnya sebesar 74,78.

Tabel II.172.
Persentase lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan yg terstandarisasi Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017-2021

Indikator	Satuan	Tahun					
		2017	2018	2019	2020	Target 2021	Capaian 2021
Persentase lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan yg terstandarisasi	%	Belum diukur	65	0	54	10	20

Sumber: DP3A Dalduk dan KB Prov. Sulawesi Selatan, Tahun 2021

2.3.2.2.2. Persentase Kabupaten/Kota yang Memenuhi Indikator Prasyarat PUG

Persentase kabupaten/kota yang memenuhi indikator prasyarat PUG merupakan gambaran penerapan Pengarusutamaan Gender (PUG) di daerah. Penerapan tujuh prasyarat PUG di Kabupaten/Kota sampai dengan 2021 mengalami perkembangan yang cukup signifikan dimana tahun 2021 ditargetkan sebesar 65 persen dengan capaian 83,33 persen.

Pencapaian tersebut disebabkan beberapa sektor pendukung prasyarat PUG seperti komitmen pimpinan, kebijakan yang dikeluarkan oleh masing-masing pemerintah kabupaten/kota maupun anggaran setiap tahunnya mengalami perbaikan yang cukup signifikan.

Tabel II.173.
Persentase kab/kota yang memenuhi indikator prasyarat PUG
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017-2021

Indikator	Satuan	Tahun					
		2017	2018	2019	2020	Target 2021	Capaian 2021
Persentase kab/kota yg memenuhi indikator prasyarat PUG	%p	Belum diukur	62,5	62,5	65	65	83,33

Sumber: DP3A Dalduk dan KB Prov. Sulsel, Tahun 2021

2.3.2.2.3. Persentase Kabupaten/Kota yang Menyediakan Layanan Perlindungan Perempuan yang Terstandarisasi

Persentase kab/kota yg menyediakan layanan perlindungan perempuan yang terstandarisasi di Provinsi Sulawesi Selatan Sejak tahun 2017 sampai dengan 2019 hanya memiliki satu layanan yang terstandarisasi yakni UPT PPA Provinsi Sulawesi Selatan, sedangkan untuk di Kabupaten/Kota memiliki layanan Perlindungan Perempuan berupa P2TP2A yang dikelola oleh Lembaga pemerintah dan Lembaga non pemerintah. Tahun 2020 beberapa Kabupaten/Kota telah membentuk UPT PPA sesuai dengan edaran Mendagri dan sampai dengan tahun 2021 terdapat 6 kabupaten/Kota atau sebesar 25 persen yang membentuk Layanan Perlindungan Perempuan yang terstandar.

Tabel II.174.
Persentase kab/kota yg menyediakan layanan perlindungan perempuan yang terstandarisasi Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017-2021

Indikator	Satuan	Tahun					
		2017	2018	2019	2020	Target 2021	Capaian 2021
Persentase kab/kota yang menyediakan layanan perlindungan perempuan yg terstandarisasi	%	4,2	4,2	4,2	16,6	25	25

Sumber : DP3A Dalduk dan KB Prov. Sulawesi Selatan, Tahun 2021

2.3.2.2.4. Persentase Kab/Kota yang Menyediakan Layanan Pembelajaran Keluarga yang Terstandarisasi

Di Provinsi Sulawesi Selatan, kabupaten/kota yang menyediakan layanan pembelajaran keluarga yang terstandarisasi belum tersedia, namun demikian telah terbentuk layanan Pusat Pembelajaran Keluarga Plus dimana

terdapat layanan Kesehatan bagi perempuan kelompok rentan terkait dengan deteksi dini cancer serta dilakukan penanganan rujukan jika terdapat klien yang mengalami penyakit dimaksud. Capaian indikator persentase kab/kota yg menyediakan layanan pembelajaran keluarga yang terstandarisasi tahun 2017 hingga 2020 belum dilakukan pengukuran karena menyesuaikan pelaksanaan program pada Perubahan RPJMD 2018-2023. Tahun 2021 dibentuk Layanan Puspaga integrasi di tingkat Provinsi yang selanjutnya disebut PUSPAGA MASAGENA sesuai dengan standarisasi yang telah ditentukan oleh Pusat, layanan PUSPAGA juga sudah terbentuk di 4 kabupaten/kota atau dengan capaian sebesar 25 persen sesuai target yang ditetapkan.

Tabel II.175.
Persentase kab/kota yg menyediakan layanan pembelajaran keluarga yang terstandarisasi Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017-2021

Indikator	Satuan	Tahun					
		2017	2018	2019	2020	Target 2021	Capaian 2021
Persentase kab/kota yg menyediakan layanan pembelajaran keluarga yg terstandarisasi	%	Belum diukur				25	25

Sumber : DP3A Dalduk dan KB Prov. Sulawesi Selatan, Tahun 2021

2.3.2.2.5. Persentase Kab/Kota yang Menyediakan Data Gender dan Anak yang Terupdate

Menyediakan Data Gender dan Anak merupakan salah satu bagian dari tujuh prasyarat PUG dan juga sekaligus sebagai alat dalam Menyusun Gender Budget Statement. Penyediaan data gender dan anak tahun 2017 -2018 kabupaten/kota belum meyediakan data secara terpilah hal ini dimana minimnya pembinaan ke kabupaten/kota terkait data pilah. Capaian indikator persentase Kab/kota yang menyediakan Data Gender dan Anak yang terupdate tahun 2017 hingga 3028 belum dilakukan pengukuran. Tahun 2019 jumlah Kabupaten/Kota yang menyiapkan data gender dan anak yg terupdate mencapai sebanyak 19 kabupaten/kota atau 80 persen telah memiliki data pilah gender dan anak kemudian meningkat menjadi 82 persen dari 24 kabupaten/kota, tahun 2021 ditargetkan sekitar 20 kabupaten/kota mengingat masa pandemi covid-19 masih melanda wilayah Sulawesi Selatan dan berpengaruh pada penyediaan anggaran pembinaan langsung ke kabupaten/kota. Adapun capaian sebesar 82,5 persen atau sekitar 20 kabupaten/kota.

Tabel II.176.
Persentase Kab/kota yg menyediakan Data Gender dan Anak yang terupdate
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017-2021

Indikator	Satuan	Tahun					
		2017	2018	2019	2020	Target 2021	Capaian 2021
Persentase Kab/kota yang menyediakan Data Gender dan Anak yang terupdate	%	Belum diukur		80	82	0	82,5

Sumber : DP3A Dalduk dan KB Prov. Sulawesi Selatan, Tahun 2021

2.3.2.2.6. Persentase Kabupaten/Kota Layak Anak

Intervensi pemerintah kabupaten/kota di wilayah Sulawesi Selatan dalam upaya tranformasi Pemenuhan Hak-hak anak dalam bentuk kebijakan program dan kegiatan sejak tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 terus mengalami peningkatan yang cukup signifikan, dimana tahun 2017 mencapai 33 persen atau sebanyak 8 kabupaten/kota dengan beberapa kategori. Sebanyak 12 atau 50 persen kabupaten/kota capaian tahun 2019 dan tahun 2020. Tahun 2021 capaian persentase kabupaten/kota layak anak mencapai 62,5 persen dari target 58,33 persen.

Tabel II.177.
Persentase kabupaten/Kota Layak Anak
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017-2021

Indikator	Satuan	Tahun					
		2017	2018	2019	2020	Target 2021	Capaian 2021
Persentase Kabupaten/Kota Layak Anak	%	33	50	58	58	58,33	62,5

Sumber : DP3A Dalduk dan KB Prov. Sulawesi Selatan, Tahun 2021

2.3.2.2.7. Persentase Kab/Kota yang Menyediakan Layanan Anak Korban Kekerasan yang Terstandarisasi

Penyediaan Layanan Anak Korban Kekerasan sama dengan layanan perlindungan perempuan yang selanjutnya disebut UPT PPA, dengan demikian perkembangan realisasi penyediaan layanan anak korban kekerasan yang terstandarisasi di Provinsi Sulawesi Selatan Sejak tahun 2017 sampai dengan 2019 sama dengan dengan penyediaan layanan perlindungan perempuan, yakni hanya memiliki satu layanan yang terstandarisasi yakni UPT PPA Provinsi Sulawesi Selatan, dan untuk di kabupaten/kota memiliki layanan Perlindungan Perempuan dan Anak disebut P2TP2A yang dikelola oleh Lembaga pemerintah dan Lembaga non pemerintah. Tahun 2020 beberapa kabupaten/kota telah membentuk UPT PPA sesuai dengan edaran Mendagri dan sampai dengan tahun 2021 terdapat 6 kabupaten/kota atau sebesar 25 persen yang membentuk layanan anak korban kekerasan yang terstandar.

Tabel II.178.
Persentase Kab/Kota yang menyediakan layanan anak korban kekerasan yang terstandarisasi
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017-2021

Indikator	Satuan	Tahun					
		2017	2018	2019	2020	Target 2021	Capaian 2021
Persentase Kab/Kota yang menyediakan layanan anak korban kekerasan yang terstandarisasi	%	4,2	8,3	12,5	16,6	25	25

Sumber : DP3A Dalduk dan KB Prov. Sulawesi Selatan, Tahun 2021

2.3.2.3. Pangan

2.3.2.3.1. Cakupan Kelompok Pengelola Infrastruktur Pendukung Ketahanan Pangan yang di Bangun

Cakupan Kelompok Pengelola Infrastruktur Pendukung Ketahanan Pangan yang di bangun meliputi Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan berupa gudang dan lantai jemur. Faktor penghambat adalah tidak adanya dukungan anggaran dana APBD tahun anggaran 2020 dan 2021, Akan tetapi di Dana APBN pada tahun 2020 terdapat 10 kelompok yang menerima bantuan lumbung pangan masyarakat berupa 10 unit bangunan infrastruktur Gudang dan bangunan infrastruktur lantai jemur sebanyak 8 unit. Pada tahun 2021 pembangunan lumbung pangan sebanyak 25 Lumbung Pangan Masyarakat. Selain itu Dinas Ketahanan Pangan mempunyai cadangan pangan pemerintah provinsi sebanyak 140 ton yang dititip di Badan Urusan Logistik (Bulog).

Tabel II.179.
Cakupan kelompok pengelola infrastruktur pendukung ketahanan pangan yang di bangun Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017-2021

Indikator	Satuan	Tahun					
		2017	2018	2019	2020	Target 2021	Capaian 2021
Cakupan kelompok pengelola infrastruktur pendukung ketahanan pangan yang di bangun	%	Belum diukur	14,93	15,19	14,98	0	14,58

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan Prov. Sulawesi Selatan, Tahun 2021

2.3.2.3.2. Persentase Ketersediaan Pangan Utama

Capaian persentase ketersediaan pangan utama yakni beras tahun 2021 sebesar 363,80 persen mengalami peningkatan sebesar 17,36 persen dari ketersediaan beras tahun lalu. Ketersediaan beras di provinsi Sulawesi Selatan

mampu memenuhi kebutuhan penduduk sehingga masuk dalam kategori aman. Faktor pendukung capaian ketersediaan pangan utama adalah bergantung pada produksi padi dan laju pertumbuhan jumlah penduduk. Ketersediaan beras pada tahun 2021 mengalami surplus beras, situasi dimana tingkat ketersediaan pangan lebih besar daripada total kebutuhan. Komoditi jagung juga mengalami surplus. Begitu pula dengan ketersediaan jagung mencapai 61,83 persen melampaui target sebesar 9,04 persen. Berbeda dengan ketersediaan kedelai mengalami defisit yakni situasi dimana tingkat ketersediaan pangan kedelai lebih kecil dari total kebutuhan. Capaian ketersediaan kedelai tahun 2021 sebesar 13,62 persen tidak mencapai target sebesar 26,22 persen. Faktor penghambat pencapaian target disebabkan karena Sulawesi Selatan bukan merupakan daerah sentra produksi kedelai. Selain itu walaupun areal luas tanam diperluas akan tetapi banyak pertanaman puso akibat banjir. Sebab lain akibat rendahnya produksi kedelai menyebabkan harga kedelai naik, dalam prespektif ketahanan pangan terkendala dalam akses ketersediaan dan akses distribusi.

Masih ada sebahagian masyarakat yang tidak mampu mengakses pangan yang cukup karena kemiskinan. Para petani lebih memilih menanam kacang tanah dan kacang hijau daripada kedelai. Panjangnya mata rantai distribusi signifikan berpengaruh pada harga pangan. Dukungan Ketersediaan Informasi distribusi, harga dan akses pangan di daerah merupakan salah satu indikator yang bisa menjelaskan kondisi ketahanan pangan di suatu wilayah pengamatan terhadap kondisi ketersediaan informasi distribusi dan harga berguna untuk mengetahui berbagai hal spererti ketersediaan pasokan, permintaan, Kelancaran distribusi, daya beli masyarakat dan akses pangan beragam, bergizi dan berimbang. Provinsi Sulawesi Selatan merupakan daerah sentra produksi beras dan termasuk daerah yang tahan pangan (prioritas 6). Distribusi pangan berfungsi mewujudkan sistem distribusi yang efektif dan efisien sebagai prasyarat untuk menjamin agar seluruh rumah tangga dapat memperoleh pangan dalam jumlah dan kualitas yang cukup sepanjang waktu dengan harga terjangkau.

Tabel II.180.
Persentase Ketersediaan Pangan Utama
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017-2021

Komoditas	Satuan	Tahun					
		2017	2018	2019	2020	Target 2021	Capaian 2021
Ketersediaan Beras	%	384	388,24	363,76	332,21	374,75	363,8
Ketersediaan Jagung	%	38,89	44,33	47,88	53,27	52,79	61,83
Ketersediaan Kedelai	%	20,88	22,55	24,96	13,66	26,22	13,62

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan Prov. Sulawesi Selatan, Tahun 2021

2.3.2.3.3. Ketersediaan Energi dan Protein Perkapita

Ketersediaan Energi dan Protein Provinsi Sulawesi Selatan menunjukkan bahwa ketersediaan energi dan protein melebihi angka kecukupan gizi (AKG) berdasarkan standar nasional sebesar 2.150

kkal/kapita/hari dan ketersediaan protein 57 gram/kapita/hari bila dikonsumsi. Capaian ketersediaan Energi dan Protein Perkapita walaupun tidak mencapai target akan tetapi cukup memenuhi angka kecukupan gizi. Bantuan Pengembangan Pekarangan Pangan Lestari (P2L) yaitu sebuah konsep lingkungan perumahan penduduk yang secara bersama-sama mengusahakan lahan pekarangannnya secara intensif untuk dimanfaatkan sebagai sumber pangan secara berkelanjutan dengan memperhatikan aspek potensi wilayah dan kebutuhan gizi warga setempat dengan pelaku utama kelompok (P2L) yaitu kelompok Wanita sebagai penerima manfaat pelaksana kegiatan. Faktor penghambat pencapaian target adalah belum optimalnya konsumsi pangan lokal serta rendahnya konsumsi masyarakat terhadap buah, sayur dan kacang-kacangan.

Tabel II.181.
Ketersediaan Energi dan Protein Perkapita
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017-2021

Indikator	Satuan	Tahun					
		2017	2018	2019	2020	Target 2021	Capaian 2021
Ketersediaan Energi Perkapita	kkal/ kapita/hari	3.906	3.572	3.879	3.168	3.904,1	3.484,4
Ketersediaan Protein Perkapita	kkal/ kapita/hari	125,41	103,75	139,92	86,16	143,59	94,78

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan Prov. Sulawesi Selatan, Tahun 2021

2.3.2.3.4. Jumlah Daerah Rawan Pangan

Jumlah daerah rawan pangan pada tahun 2021 teridentifikasi melalui peta FSVA naik sebanyak 27 daerah/kecamatan dan penanganan daerah rawan pangan hanya 25,64 persen. Pada tahun 2020 jumlah daerah rawan pangan sebanyak 22 kecamatan dan tertangani hanya 7,49 persen. Tidak mencapai target jumlah rawan pangan bertambah 5 kecamatan/daerah. Faktor penghambat pencapaian target disebabkan karena dalam menurunkan jumlah daerah rawan pangan perlu peran pemerintah dan lintas sektor terkait. Dukungan Peta ketahananan pangan dan kerentanan pangan untuk mengetahui titik pemantapan ketersediaan pangan beragam, bergizi dan seimbang dan daerah rawan pangan. Bantuan yang diserahkan ke masyarakat (20 Kelompok Tani) di tahun 2021 dalam hal penanganan kerawanan pangan melalui program pertanian keluarga (Family Farming) dan penguatan daerah yang dekat dengan daerah rawan pangan. Daerah rawan pangan mengalami peningkatan dari 22 daerah rawan pangan di tahun 2020 menjadi 27 daerah rawan pangan di tahun 2021, hal ini menunjukkan bahwa penanganan daerah rawan pangan belum maksimal.

Grafik II. 20
Sebaran Kerawanan Pangan Sulawesi Selatan Tahun 2021

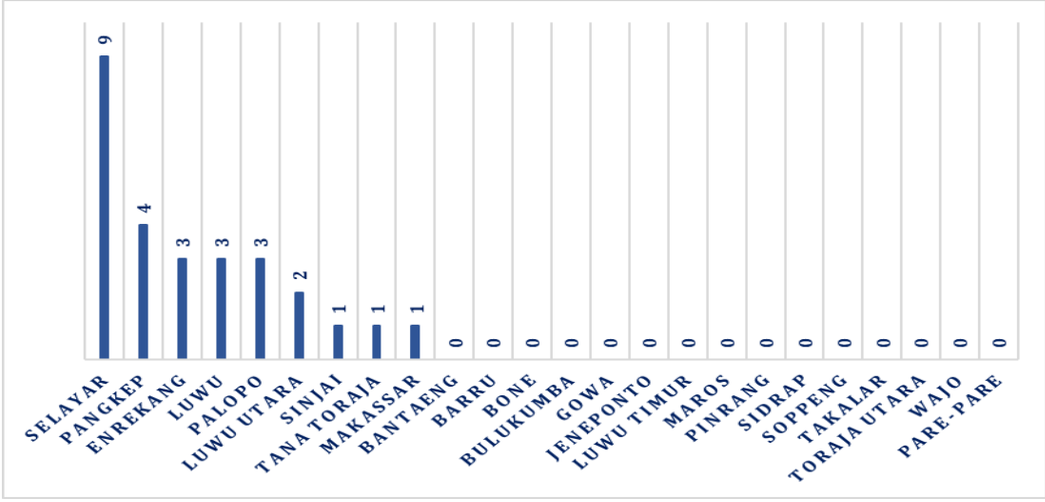

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan Prov.Sulawesi Selatan, Tahun 2021 (data diolah)

Berdasarkan analisa Ketahanan dan Kerentanan Pangan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021 faktor yang mempengaruhi terjadinya kerentanan terhadap kerawanan pangan provinsi di Sulawesi Selatan secara umum adalah persentase rasio jumlah tenaga Kesehatan terhadap jumlah penduduk dan kepadatan penduduk.

Tabel II.182.
Jumlah Daerah Rawan Pangan
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017-2021

Indikator	Satuan	Tahun					
		2017	2018	2019	2020	Target 2021	Capaian 2021
Jumlah Daerah Rawan Pangan	%	10	14	16	22	21	27

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan Prov. Sulawesi Selatan, Tahun 2021

2.3.2.3.5. Penanganan Daerah Rawan Pangan (Data Timpang)

Capaian Penanganan Daerah Rawan Pangan tahun 2021 sebesar 25,64 persen melampaui target yang ditentukan sebesar 6,97 persen. Dalam menangani daerah kerawanan pangan, perlu dukungan penganggaran di daerah penyangga yakni daerah di dekat rawan pangan.

Tabel II.183.
Penanganan Daerah Rawan Pangan (Data timpang)
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017-2021

Indikator	Satuan	Tahun					
		2017	2018	2019	2020	Target 2021	Capaian 2021
Penanganan Daerah Rawan Pangan (Data Timpang)	%	5,88	5,21	16,29	7,49	6,97	25,64

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan Prov. Sulawesi Selatan, Tahun 2021

2.3.2.3.6. Persentase Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan

Keamanan pangan adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan cemaran biologis kimia dan benda lain yang dapat menganggu, merugikan dan membahayakan Kesehatan manusia. Dukungan Penurunan kasus ketidakamanan pangan dan cemaran biologis, kima dan fisik pada pangan segar melalui pengawasan dan pembinaan keamanan pangan yang dilengkapi dengan peraturan perundang-unfangan dibidang mutu keamanan pangan. Dukungan Stakeholder terkait dalam hal ini kelompok Wanita Tani, Balai POM dan Pelaku Usaha merespon baik kegiatan pengambilan dan pengujian sampel. Hal yang perlu ditingkatkan adalah peningkatan sumber daya manusia (Petugas Pengambil Contoh) berupa pelatihan bagi petugas serta dukungan anggaran dan sarana prasarana kantor untuk penyebaran informasi.

Tabel II.184.
Persentase Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017-2021

Indikator	Satuan	Tahun					
		2017	2018	2019	2020	Target 2021	Capaian 2021
Persentase Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan	%	100	100	100	100	100	100

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan Prov. Sulawesi Selatan, Tahun 2021

2.3.2.4. Pertanahan

2.3.2.4.1. Persentase Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Yang Selesai Tepat Waktu

Pengadaan tanah untuk kepentingan umum diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 serta Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 yaitu terdiri atas empat tahapan yaitu perencanaan, persiapan, pelaksanaan dan penyerahan hasil. Tahapan persiapan menjadi kewenangan Gubernur yaitu menerbitkan Surat Keputusan tentang Penetapan Lokasi Pembangunan. Fasilitasi pengadaan tanah untuk kepentingan umum pada tahun 2017 sebanyak 7 (tujuh) pengadaan tanah dan 4 (empat) perpanjangan penetapan lokasi proyek strategis nasional. Tahun 2018 fasilitas pengadaan tanah untuk kepentingan umum 6 (enam) jenis pengadaan tanah dan diantaranya ada 1 (satu) perpanjangan penetapan lokasi proyek strategis nasional. Untuk tahun 2019 sebanyak 11 (sebelas) pengadaan tanah yang beberapa diantaranya hanya dilakukan perpanjangan penetapan lokasi, sedangkan tahun 2020 sejumlah 5 (lima) pengadaan tanah. Berdasarkan Perpres Nomor 190 Tahun 2020 bahwa Proyek Strategis Nasional dapat dilakukan Perpanjangan dan Pembaruan Penetapan Lokasi jika Pengadaan tanahnya masih terus berjalan.

Pada tahun 2021 regulasi pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum mengalami perubahan yang mengacu pada Undang-Undang

Nmor 11 Tahun 2021 tentang Cipta Kerja serta Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan pengadaan tanah untuk kepentingan umum dan ketentuan pelaksanaannya diatur oleh Permen ATR/BPN Nomor 19 Tahun 2021. Pengadaan tanah untuk kepentingan umum tahun 2021 sebanyak 3 (tiga) pengadaan tanah. Pengadaan tanah untuk kepentingan umum dapat berjalan tepat waktu didorong oleh pelaksanaan sosialisasi yang masif, koordinasi semua pihak yang berkepentingan serta transparansi dan pelibatan masyarakat dalam setiap tahapan pengadaan tanah. Faktor penghambat diantaranya alas hak pemilik lahan yang tidak lengkap atau terjadi sengketa kepemilikan, terjadi penolakan dan gugatan terkait dengan nilai yang ditetapkan oleh Appraisal, pemilik tidak diketahui keberadaannya dan adanya provokasi dari pihak yang berkepentingan. Pengadaan tanah untuk kepentingan umum dalam skala yang besar dilaksanakan secara multiyears karena luasnya lahan yang diperlukan, banyaknya pemilik bidang tanah serta anggaran yang diperlukan.

Tabel II.185.
Persentase pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang selesai tepat waktu
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017-2021

Indikator	Satuan	Tahun					
		2017	2018	2019	2020	Target 2021	Capaian 2021
Persentase pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang selesai tepat waktu	%	160	100	140	83,30	100	100

Sumber: Dinas Dinas Perumahan, Permukiman Dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2021

2.3.2.4.2. Persentase Sengketa Tanah Negara Kewenangan Provinsi yang Difasilitasi

Jumlah Sengketa Tanah diwilayah Provinsi Sulawesi Selatan yang di fasilitasi Tahun 2017 terdapat 7 pengaduan, presentase aduan yang terfasilitasi sebesar 70 persen. Jumlah Sengketa Tanah diwilayah Provinsi Sulawesi Selatan yang di fasilitasi Tahun 2018 terdapat 6 pengaduan, presentase aduan yang terfasilitasi sebesar 60 persen. Jumlah Sengketa Tanah diwilayah Provinsi Sulawesi Selatan yang di fasilitasi Tahun 2019 terdapat 10 pengaduan, presentase aduan yang terfasilitasi sebesar 100 persen. Jumlah Sengketa Tanah diwilayah Provinsi Sulawesi Selatan yang di fasilitasi Tahun 2020 terdapat 10 pengaduan, dan presentase aduan yang terfasilitasi sebesar 83,33 persen. Jumlah sengketa tanah di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan yang difasilitasi tahun 2021 sejumlah 10 pengaduan. Capaian target sengketa tanah negara kewenangan provinsi yang difasilitasi pada tahun 2021 mengalami peningkatan 20 persen dari tahun sebelumnya.

Tabel II.186.
Persentase sengketa tanah negara kewenangan provinsi yang difasilitasi Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017-2021

Indikator	Satuan	Tahun					
		2017	2018	2019	2020	Target 2021	Capaian 2021
Persentase sengketa tanah negara kewenangan provinsi yang difasilitasi	%	70	60	100	83,33	100	100

Sumber: Dinas Dinas Perumahan, Permukiman Dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2021

2.3.2.4.3. Persentase Penatagunaan Tanah Sesuai Penyelenggaraan Penatagunaan Tanah di 24 Kab/Kota

Kegiatan penatagunaan tanah mulai diprogramkan pada tahun 2021, telah dilaksanakan konsolidasi penyelenggaraan penatagunaan tanah di 24 kabupaten/kota dalam wilayah Provinsi Sulawesi Selatan sebagai dasar awal penyusunan Dokumen Data Base Pertanahan Provinsi Sulawesi Selatan. Dokumen Data Base Pertanahan akan memberikan informasi terkait dengan Penatagunaan Pertanahan dan kondisi Pertanahan dalam wilayah Provinsi Sulawesi Selatan, Dokumen Data Base Pertanahan akan terus dilakukan perbaikan dan pembaruan setiap tahun sesuai dengan data dan informasi yang diterima dari Pemerintah Kabupaten/Kota se Provinsi Sulawesi Selatan setiap tahunnya.

Tabel II.187.
Persentase penatagunaan tanah sesuai penyelenggaraan penatagunaan tanah di 24 kab/kota Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017-2021

Indikator	Satuan	Tahun					
		2017	2018	2019	2020	Target 2021	Capaian 2021
Persentase penatagunaan tanah sesuai penyelenggaraan penatagunaan **tanah** di 24 kab/kota	%	Belum diukur				100	100

Sumber: Dinas Dinas Perumahan, Permukiman Dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2021

2.3.2.5. Lingkungan Hidup

2.3.2.5.1. Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup

Dokumen RPPLH memuat tentang latar belakang, kondisi wilayah dan lingkungan hidup, permasalahan dan isi pokok lingkungan hidup, serta arahan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Selatan untuk 30 tahun mendatang. Pada tahun 2018 DPLH Prov.Sulsel telah

menyusun dokumen RPPLH Sulawesi Selatan untuk 2017-2047, sehingga target tersedianya dokumen RPPLH Provinsi Sulawesi Selatan telah tercapai pada tahun 2017. Skenario RPPLH Prov.Sulsel adalah untuk Periode I (tahun 2017 - 2026), Periode II (tahun 2027 - 2036), dan Periode III (tahun 2037 - 2047). Dengan adanya tahapan verifikasi dokumen RPPLH maka langkah selanjutnya adalah mempersiapkan penyusunan peraturan daerah tentang RPPLH. Tahun 2022 direncanakan untuk menyusun naskah akademik Ranperda RPPLH, di tahun 2023 direncanakan penyelesaian penyusunan RPPLH Prov.Sulsel menjadi Peraturan Daerah.

Tabel II.188.
Persentase pemenuhan dokumen perencanaan lingkungan hidup Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017-2021

Indikator	Satuan	Tahun					
		2017	2018	2019	2020	Target 2021	Capaian 2021
Persentase pemenuhan dokumen perencanaan lingkungan hidup	%	100	0	0	0	40,00	20,00

Sumber: Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Prov. Sulawesi Selatan, Tahun 2021

2.3.2.5.2. Persentase Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) Dari Sektor Limbah

Berdasarkan pembagian urusan Pokja Perencanaan Pembangunan Rendah Karbon, Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Selatan merupakan koordinator inventarisasi aksi mitigasi khusus sektor limbah. Beberapa kegiatan aksi mitigasi sektor pengelolaan limbah yang dilakukan inventarisasi antara lain TPS 3R, TPST, Bank Sampah, Pengomposan serta didukung dengan kegiatan Program Kampung Iklim (ProKlim). Berdasarkan RENSTRA Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup yang bertanggungjawab untuk melakukan identifikasi penurunan emisi sektor limbah dengan target 7.253 Ton CO_2 Eq. Untuk tahun 2021 realisasinya mencapai 7.135,42 Ton CO_2 Eq dengan uraian sebagai berikut :

Tabel II.189.
Jumlah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK)

No	Kegiatan	Jumlah Penurunan Emisi (Ton CO_2 Eq)
1	TPS3R	53,38
2	TPST	765,80
3	Rumah Kompos	309,67
4	Bank Sampah	200,28
5	ProKlim	3.895,29
6	Aplikasi Aksara	1.911,00
Total		**7.135,42**

Sumber: Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Prov. Sulawesi Selatan, Tahun 2021

Berdasarkan tabel diatas, penurunan emisi sektor limbah telah mendekati target pada tahun 2021 dikarnakan beberapa faktor penghambat, yakni data yang dibutuhkan untuk penyusunan laporan inventarisasi GRK sangat beragam dan berada pada pemerintah kabupaten/kota, instansi terkait dan perusahaan, sehingga butuh sistem yang dibangun agar data yang dibutuhkan berkelanjutan serta kualitasnya terjaga. Selain itu, identifikasi data inventarisasi pengelolaan limbah sangat sulit untuk didapatkan karena pendataan pelaksanaan aksi mitigasi sektor pengelolaan limbah sangat sulit untuk diperoleh karena pendataan pelaksanaan aksi mitigasi sektor pengelolaan limbah di kabupaten/kota belum berjalan baik, sebagai contoh adalah pengumpulan data di kabupaten/kota secara update belum tersedia seperti data laporan Jakstrada Pengelolaan Sampah. Terdapat beberapa faktor penghambat yang menyebabkan terjadinya tren penurunan Potensi Penurunan GRK, antara lain : a) Kurangnya kesadaran masyarakay terhadap pengelolaan lingkungan hidup ; b) Identifikasi data inventarisasi pengelolaan limbah sangat sulit didapatkan karena pendataan pelaksanaan aksi mitigasi sektor pengelolaan limbah di kabupaten/kota yang belum berjalan baik ; c) Pengumpulan data kabupaten/kota secara update belum tersedia seperti data laporan Jakstrada Pengelolaan Sampah. Capaian indikator persentase penurunan emisi gas rumah kaca (GRK) dari sektor limbah tahun 2017 hingga 2019 belum dilakukan pengukuran. Tahun 2021 capaian penurunan emisi GRK sector limbah mencapai 3,88 persen mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya.

Tabel II.190.
Persentase penurunan emisi gas rumah kaca (GRK) dari sektor limbah
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017-2021

Indikator	Satuan	Tahun					
		2017	2018	2019	2020	Target 2021	Capaian 2021
Persentase penurunan emisi gas rumah kaca (GRK) dari sektor limbah	%	Belum diukur			3,40	3,95	3,88

Sumber: Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Prov. Sulawesi Selatan, Tahun 2021

2.3.2.5.3. Persentase Tingkat Pengelolaan Keanekeragaman Hayati (KeHaTi)

Indikator presentase tingkat pengelolaan keaekaragaman hayati (KeHaTi) pada tahun 2021 telah tercapai melalui kinerja UPT Kebun Raya Pucak yang sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 bahwa pengelolaan kebun raya berada dalam kegiatan pengelolaan KeHaTi provinsi. Capaian indikator didukung oleh pelaksanaan penataan batas zona/blok kebun raya pucak, pencatatan dan registrasi tanaman koleksi, pemasangan papan nama tanaman koleksi, pengukuran jalan lingkar luar, pembibitan tanaman hias, pembuatan buku koleksi tanaman dan tumbuhan, perbaikan taman, pembuatan peta Kawasan, papan petunjuk arah dan rambu-rambu larangan, penataan lokasi kebun raya dengan system kemitraan, pembagunan monument/tugu UPT Kebun Raya Pucak, renovasi ek kendang

gajah, penanaman tanaman hias eksplorasi, pengisian polybag, penanaman bibit dalam polybag, pemeliharaan tanaman pada pembibitan, pemeliharaan tanaman koleksi, perbaikan dan pemeliharaan jalan lingkar dalam, penyiangan/pembersihan rumput pada blok prioritas, penentuan titik koordinat tanaman koleksi, survey lokasi embung dan pemasangan batas blok.

Salah satu permasalahan yang dihadapi kebun raya pucak adalah belum dilaksanakannya launching sebagai kebun raya. Hal ini terkendala belum terpenuhinya persyaratan dalam pembangunan kebun raya berdasarkan aturan yang ada. Persyaratan launching yaitu tersedianya zona penerima, zona pengelola dan zona koleksi dimana pembangunan infrastruktur untuk zona tersebut wajib dilakukan. Capaian indikator persentase Tingkat Pengelolaan Keanekeragaman Hayati (KeHaTi) tahun 2017 hingga 2020 belum dilakukan pengukuran karena menyesuaikan pelaksanaan program pada Perubahan RPJMD 2018-2023.

Tabel II.191.
Persentase Tingkat pengelolaan Keanekeragaman Hayati (KeHaTi)
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017-2021

Indikator	Satuan	Tahun					
		2017	2018	2019	2020	Target 2021	Capaian 2021
Persentase Tingkat pengelolaan Keanekeragaman Hayati (KeHaTi)	%	Belum diukur				85,71	85,71

Sumber: Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Prov. Sulawesi Selatan, Tahun 2021

2.3.2.5.4. Persentase Sampah Perkotaan yang Tertangani

Pada tahun 2017-2018 terjadi penurunan pengelolaan sampah perkotaan hingga 8,5 persen tahun 2019 -2020 (penurunan hingga 0,5 persen), hal ini disebutkan sarana dan prasarana pengelolaan sampah sebahagian sudah tidak berfungsi (rusak), seperti TPS (tempat penampungan sementara), truk pengangkut sampah, gerobak, dan lainnya. Disamping itu jumlah TPS 3R, TPST, dan Bank Sampah mengalami penurunan dari segi pengelolaannya yang disebabkan adanya beberapa mesin pencacah dalam kondisi rusak berat. Demikian halnya pada tempat pemrosesan akhir (TPA) sampah, sistem pemadatan dan penutupan (penimbunan) sampahnya tidak berjalan yang seharusnya pemadatan dan penimbunan dilakukan setiap hari agar sampah benar-benar terisolasi dari lingkungan sampai pada titik aman, yang artinya sampah yang terbuang ke TPA terdegradasi secara biologis, kimia, dan fisik. Peningkatan pengelolaan sampah pada tahun 2018-2019 mencapai hingga 6,42 persen, sedangkan untuk tahun 2020-2021 hingga 1,17 persen. Hal ini terjadi penanganan dan pengurangan sampah sudah mengalami peningkatan dari hulu ke hilir dimana pengelolaan sampah dari sumber sudah teratasi mulai dari pemilahan sampah, pengomposan, pengoperasian TPS 3R dan Bank Sampah hingga sampah yang terbuang ke TPA pengolahannya sudah cukup baik.

Tabel II.192.
Sampah Perkotaan yang Tertangani
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017-2021

Indikator	Satuan	Tahun					
		2017	2018	2019	2020	Target 2021	Capaian 2021
Persentase Sampah Perkotaan yang Tertangani	%	75,41	66,91	73,33	72,83	74,00	82,32

Sumber: Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Prov. Sulawesi Selatan, Tahun 2021

2.3.2.5.5. Cakupan Limbah yang Dikelola

Pelaksanaan kegiatan pengelolaan limbah B3 dilaksanakan secara langsung yaitu dengan melakukan pembinaan terhadap pemrakarsa usaha dan/atau kegiatan. Pembinaan ini dilakukan kepada pemrakarsa usaha dan/atau kegiatan yang tidak tertib dalam melakukan plaporan pengelolaan limbah B3 di lokasi usaha dan/atau kegiatannya. Data pelaporan pengelolaan limbah B3 yang masuk melalui aplikasi SILHD provinsi Sulawesi selatan pada tahun 2020 hanya 43 perusahaan yang melaporkan. Setelah dilakukan pembinaan sudah meningkat 50 persen menjadi 86 perusahaan. Jumlah limbah B3 yang dikelola tidak mencapai target 97,05 persen atau 3.500.000 ton dikarenakan ada perubahan kebijakan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 dimana Fly Ash dan Bottom Ash (FABA) tidak termasuk limbah B3. Capaian indikator cakupal limbah yang dikelola tahun 2017 hingga 2018 belum dilakukan pengukuran karena menyesuaikan pelaksanaan program pada Perubahan RPJMD 2018-2023. Indikator cakupan limbah yang dikelola merupakan indikator kinerja outcome Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) yang diukur dari cakupan limbah B3 yang dikelola dengan OPD pengampuh Dinas Lingkungan Hidup. Pengadaan Incenerator Limbah B3 merupakan bantuan pemerintah pusat melalui DAK Tahun 2017. Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan telah memperoleh izin operasional incenerator limbah B3 melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor S.460/MenLHK/Setjen/PLB.3/7/2019 Tanggal 15 Juli 2019 dalam mengelola limbah B3.

Tabel II.193.
Cakupan limbah yang dikelola
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017-2021

Indikator	Satuan	Tahun					
		2017	2018	2019	2020	Target 2021	Capaian 2021
Cakupan limbah yang dikelola	%	Belum diukur		57,00	69,00	97,05	16,79

Sumber: Sumber: Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Prov. Sulawesi Selatan, Tahun 2021

2.3.2.5.6. Persentase Ketaatan Pemrakarsa Usaha Terhadap Izin Lingkungan dan Izin PPLH

Pengawasan usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan hidup, izin PPLH diterbitkan oleh pemerintah daerah provinsi pada tahun 2021 mengalami penurunan dari tahun sebelumnya dikarenakan adanya beberapa faktor antara lain pandemic covid-19 yang mengakibatkan banyak perusahaan tidak memiliki biaya untuk pengelolaan lingkungan. Selain itu tidak dilakukan pembinaan terhadap perusahaan/pemrakarsa yang izin lingkungan hidup dan izin PPLHnya diterbitkan oleh pemerintah daerah provinsi.

Tabel II.194.
Persentase ketaatan pemrakarsa Usaha Terhadap Izin Lingkungan dan Izin PPLH
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017-2021

Indikator	Satuan	Tahun					
		2017	2018	2019	2020	Target 2021	Capaian 2021
Persentase ketaatan pemrakarsa Usaha Terhadap Izin Lingkungan dan Izin PPLH	%	Belum diukur	12,00	40,00	60,00	23,00	20,00

Sumber: Sumber: Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Prov. Sulawesi Selatan, Tahun 2021

2.3.2.5.7. Persentase Pengakuan Keberadaan MHA , Kearifan Lokal Dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH

Untuk mendapatkan pengakuan masyarakat dan penetapan wilayah adat/hutan adat sebagaimana diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi Nomor 35 Tahun 2012, masyarakat adat di Sulawesi Selatan harus mendapatkna pengakuan dari negara dalam hal ini pemerintah kabupaten/kota melalui peraturan daerah atau surat keputusan Bupati/Walikota. Masih terdapat beberapa kabupaten yang belum memiliki kebijakan terkait pengakuan dan perlindungan hak-hak masyarakat hukum adat. Penyamaan pemahaman dan teknis untuk melakukan identifikasi dan verifikasi wilayah adat sangat penting untuk dilakukan. Beberapa hal yang perlu dicermati dalam melakukan identifikasi dan verifikasi antara lain unsur-unsur informasi, alat (instrument) kerja, kapasitas SDM dan peta jalan dalam melakukan identifikasi dan verifikasi. Oleh karena itu Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup perlu bekerjasama dengan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) dan Badan Registrasi Wilayah Adat (BRWA).

Tabel II.195.
Persentase pengakuan keberadaan MHA , kearifan lokal dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017-2021

Indikator	Satuan	Tahun					
		2017	2018	2019	2020	Target 2021	Capaian 2021
Persentase pengakuan keberadaan MHA, kearifan lokal dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	%	2,77	0	13,80	27,70	48,61	29,16

Sumber: Sumber: Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Prov. Sulawesi Selatan, Tahun 2021

2.3.2.5.8. Cakupan Lembaga atau Kelompok Masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya dalam PPLH

Pencapaian target kinerja didukung melalui peningkatan kapasitas diantaranya: Bimtek Adiwiyata, Bimtek Sekolah Peduli dan Berbudaya Lingkungan, Bimtek Adipura, Nimtek Kalpataru, dan pendampingan calon penerima penghargaan Kalpataru.

Tabel II.196.
Cakupan Lembaga atau Kelompok Masyarakat yang di tingkatkan kapasitasnya dalam PPLH Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017-2021

Indikator	Satuan	Tahun					
		2017	2018	2019	2020	Target 2021	Capaian 2021
Cakupan Lembaga atau Kelompok Masyarakat yang di tingkatkan kapasitasnya dalam PPLH	%	87,88	97,40	0	0	64,29	64,29

Sumber: Sumber: Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Prov. Sulawesi Selatan, Tahun 2021

2.3.2.5.9. Cakupan Rekomendasi Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup yang Ditindaklanjuti

Dalam meningkatkan penanganan pengaduan terkait pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang lebih obyektif, maka diperlukan strategi diantaranya menerapkan standar operasional prosedur (SOP) penanganan pengaduan dan memaksimalkan system pengaduan online melalui aplikasi Baruga Sulsel untuk menjamin keterbukaan informasi dan peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup.

Tabel II.197.
Cakupan rekomendasi penanganan pengaduan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017-2021

Indikator	Satuan	Tahun					
		2017	2018	2019	2020	Target 2021	Capaian 2021
Cakupan rekomendasi penanganan pengaduan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti	%	100	100	100	100	100	100

Sumber: Sumber: Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Prov. Sulawesi Selatan, Tahun 2021

2.3.2.6. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

2.3.2.6.1. Persentase Penduduk ber-KTP per Satuan Penduduk

Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) merupakan salah satu identitas resmi yang wajib dimiliki oleh semua penduduk di Indonesia yang telah berumur 17 tahun ke atas atau telah kawin sebagai bukti diri bahwa orang tersebut diakui sebagai penduduk di suatu wilayah administrasi di Indonesia. Untuk memenuhi hal tersebut, Pemerintah senantiasa memberi dukungan baik sehingga dapat memenuhi kebutuhan akan akses pelayanan publik yang mensyaratkan penggunaan KTP-el serta mendorong masyarakat untuk segera memiliki KTP-el. Di sisi lain, pengadaan blangko KTP-el yang masih menjadi kewenangan pemerintah pusat sehingga ketersediaan blangko KTP-el di Kabupaten/Kota sangat tergantung akan alokasi anggaran pengadaan blangko KTP-el di Ditjen kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri dan pendistribusiannya ke instansi pelaksana di Kabupaten/Kota.

Grafik II. 21
Penduduk Ber-KTP per Satuan Penduduk Tahun 2021

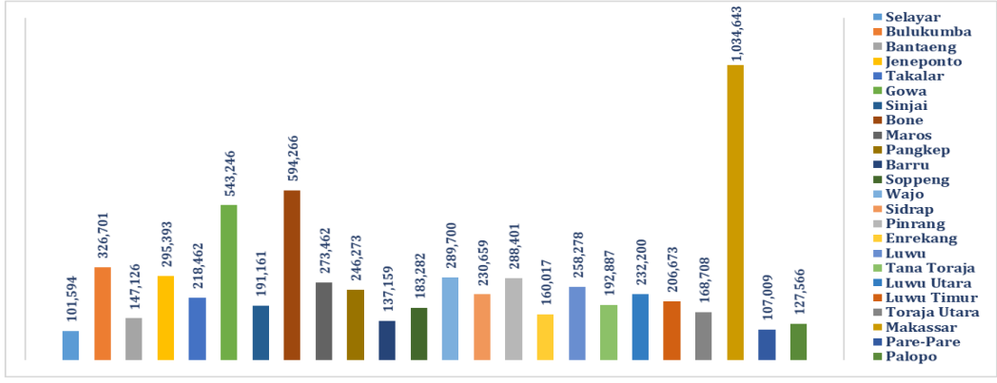

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2021 (data diolah)

Persentase Penduduk ber-KTP per Satuan Penduduk merupakan jumlah penduduk usia 17 tahun ke atas atau telah kawin yang telah memiliki KTP-el dibandingkan dengan jumlah keseluruhan penduduk wajib KTP-el dikalikan 100 persen. Berdasarkan Data Konsolidasi Bersih (DKB) semester II Tahun

2021 Jumlah Penduduk Wajib KTP-el Provinsi Sulawesi Selatan sebanyak 6,554,866 jiwa dan yang telah memiliki KTP-el sebanyak 6.321.001 dengan persentase 96,43 persen. Capaian indikator persentase penduduk ber KTP per satuan penduduk pada tahun 2021 melampaui target serta mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya dengan peningkatan 2,58 persen.

Tabel II.198.
Persentase Penduduk ber KTP persatuan Penduduk
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017-2021

Indikator	Satuan	Tahun					
		2017	2018	2019	2020	Target 2021	Capaian 2021
Persentase Penduduk ber KTP persatuan Penduduk	%	82,00	87,00	94,00	94,00	96,00	96,43

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2021

2.3.2.6.2. Persentase penerbitan KTP

Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) yang merupakan Identitas Wajib dimiliki oleh semua penduduk di Indonesia yang telah berumur 17 tahun ke atas atau telah kawin sebagaimana telah dijelaskan pada Nomor 1 (satu) diatas, maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota sebagai Instansi yang menyelenggarakan urusan pelayanan administrasi kependudukan di daerah wajib memberikan pelayanan tersebut. Persentase Penerbitan KTP-el merupakan jumlah penduduk usia 17 tahun ke atas atau telah kawin yang telah memiliki KTP-el dibandingkan dengan jumlah keseluruhan penduduk wajib KTP-el di kalikan 100 persen. Jumlah Penduduk Wajib KTP-el Provinsi Sulawesi Selatan sebanyak 6,554,866 jiwa dan yang telah memiliki KTP-el sebanyak 6.321.001 atau 96,43 persen melampaui target yang ditetapkan serta mengalami peningkatan sebesar 2,58 persen.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setiap tahun melakukan survey Indeks Kepuasan Masayarakat (IKM) terhadap pelayanan kependudukan dimana capaian nilai IKM untuk layanan kependudukan tahun 2021 mencapai 82,71 atau kategori BAIK.

Tabel II.199.
Persentase penerbitan KTP
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017-2021

Indikator	Satuan	Tahun					
		2017	2018	2019	2020	Target 2021	Capaian 2021
Persentase penerbitan KTP	%	82,00	87,00	94,00	94,00	96,00	96,43

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2021

2.3.2.6.3. Persentase Perekaman Kartu Tanda Penduduk

Perekaman KTP-el merupakan kegiatan perekaman Sidik Jari, Scan Retina Mata, Tanda Tangan serta Data Pribadi yang dilakukan oleh Penduduk Wajib KTP-el ataupun belum menjadi wajib KTP-el. Perekaman ini dimaksudkan untuk mencegah KTP-el ganda atau KTP-el yang dipalsukan sehingga menciptakan keakuratan data yang yang nantinya akan mendukung program pembangunan pemerintah. Data Demographic yang diterbitkan oleh Ditjen Dukcapil Kemendagri merupakan dasar dalam menetapkan hasil Perekaman KTP-el setiap bulannya. Persentase Penerbitan KTP-el merupakan jumlah penduduk usia 17 tahun ke atas atau telah kawin ataupun belum mencapai 17 tahun dan sudah melakukan perekaman KTP-el dibandingkan dengan jumlah keseluruhan penduduk wajib KTP-el di kalikan 100 persen. Jumlah Penduduk Wajib KTP-el Provinsi Sulawesi Selatan sebanyak 6,554,866 jiwa dan yang telah telah melakukan perekaman KTP-el sebanyak 6.697.649 atau 102,18 persen mengalami peningkatan sebesar 2,38 persen dari capaian tahun sebelumnya.

Tabel II.200.
Persentase Perekaman Kartu Tanda Penduduk
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017-2021

Indikator	Satuan	Tahun					
		2017	2018	2019	2020	Target 2021	Capaian 2021
Persentase Perekaman Kartu Tanda Penduduk	%	Belum diukur	92,32	97,90	99,80	100	102,18

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2021

2.3.2.6.4. Persentase Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA)

Kartu Identitas Anak (KIA) merupakan Kartu yang secara resmi diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota untuk anak berusia kurang dari 17 Tahun dan atau belum menikah. Pada dasarnya fungsi KIA ini sama dengan KTP-el dan KIA terbagi 2 (dua) yaitu KIA untuk anak 0-5 tahun dan KIA untuk anak 5-17 Tahun kurang 1 hari, sebagaimana telah diatur pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak. Berdasarkan Permendagri tersebut kegunaan dari KIA antara lain sebagai upaya untuk meningkatkan pendataan warga Negara, Sebagai perlindungan dan pelayanan public dan Sebagai upaya memberikan perlindungan dan pemenuhan hak konstitusional warga Negara khusunya terhadap anak-anak. Saat ini KIA merupakan salah satu target Nasional sehingga diperlukan kebijakan-kebiijakan khusus agar target Cakupan KIA di Provinsi Sulawesi Selatan dapat terpenuhi.

Grafik II. 22
Kepemilikan Kartu Identitas Anak Sulawesi Selatan Tahun 2021

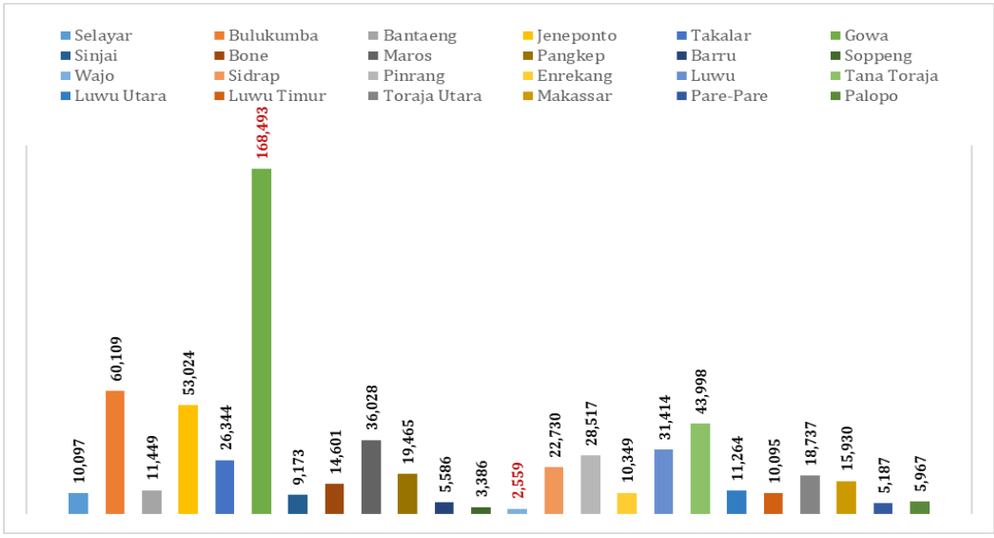

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Prov.Sulawesi Selatan, Tahun 2021 (data diolah)

Laporan Pelayanan Administrasi Kependudukan dari Disdukcapil Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan menjadi dasar perhitungan persentase kepemilikan KIA di Sulawesi Selatan dengan Jumlah Kepemilikan KIA dibagikan dengan Jumlah Penduduk berusia 0-17 Tahun berdasarkan DKB dikalikan 100 persen. Capaian persentase Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA) tahun 2017 hingga 2020 belum dilakukan pengukuran karena menyesuaikan pelaksanaan program pada Perubahan RPJMD 2018-2023. Pada tahun 2021 berdasarkan Laporan Pelayanan Administrasi Kependudukan dari Disdukcapil Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan sebanyak 1.135.887 Jiwa telah memiliki KIA dari 2.829.663 jiwa jumlah Penduduk usia 0-17 Tahun dengan persentase kepemilikan KIA 40,14 persen melampaui target yang ditetapkan serta mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya dengan peningkatan 143,7 persen.

Tabel II.201.
Persentase Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA)
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017-2021

Indikator	Satuan	Tahun					
		2017	2018	2019	2020	Target 2021	Capaian 2021
Persentase Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA)	%	Belum diukur			16,47	25,00	40,14

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2021

2.3.2.6.5. Persentase Bayi Ber Akte Kelahiran

Akta kelahiran merupakan bukti sah mengenai status dan peristiwa kelahiran seseorang yang dikeluarkan dinas kependudukan dan pencatatan

sipil. Akta kelahiran juga merupakan bukti legal dan pengakuan negara terkait hubungan keperdataan seorang anak dengan ayah dan ibunya. Akte kelahiran sangat penting peranannya untuk memperoleh akses pelayanan publik lainnya. Untuk itu, pelayanan terkait penerbitan akta kelahiran semakin dipermudah termasuk dengan adanya inovasi pelayanan secara daring atau online. Namun dalam beberapa hal, masih ada sebagian masyarakat yang tingkat kesadaran dan pemahamannya yang masih rendah sehingga tidak segera melakukan pengurusan akta kelahiran bayinya setelah lahir. Terkait dengan bayi berakte kelahiran merupakan penduduk berusia 0-5 tahun kurang 1 hari yang telah memiliki akte kelahiran. Data Konsolidasi Bersih (DKB) yang diterbitkan oleh Dirjen Dukcapil Kemendagri merupakan dasar untuk menentukan persentase bayi berakte kelahiran yaitu jumlah bayi berakte kelahiran dibanding dengan jumlah bayi dikalikan 100 persen.

Grafik II. 23
Bayi Ber Akte Kelahiran Tahun 2021

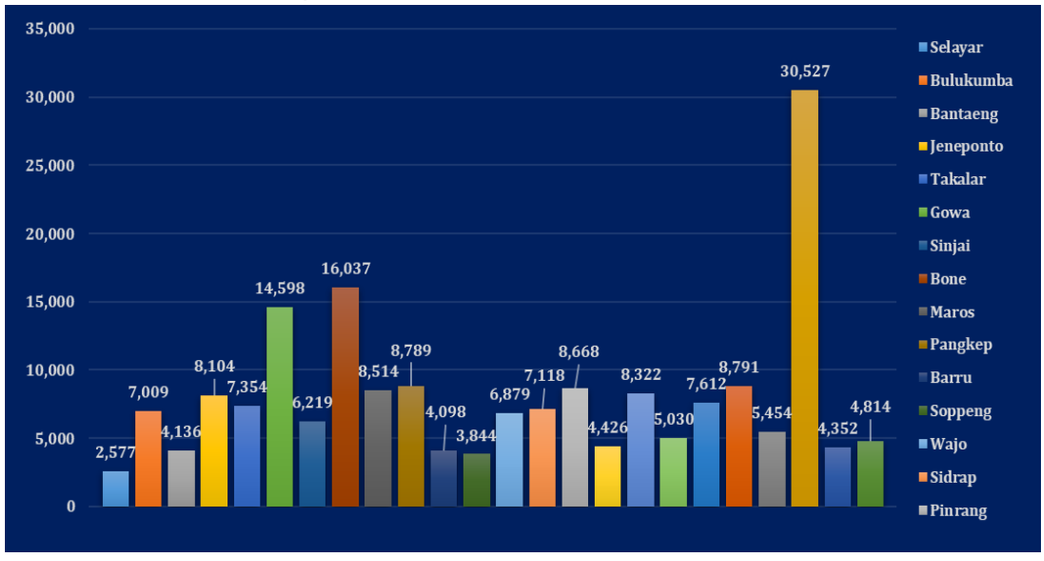

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2021 (data diolah)

Pada tahun 2021 jumlah bayi (penduduk 0-5 Tahun) di Sulawesi Selatan saat ini berjumlah 792.816 jiwa dan yang telah memiliki Akte kelahiran mencapai 768.273 jiwa atau dengan persentase sebesar 96,89 persen dengan capaian tertinggi di Kota Makassar.

Tabel II.202.
Persentase Bayi ber akte kelahiran
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017-2021

Indikator	Satuan	Tahun					
		2017	2018	2019	2020	Target 2021	Capaian 2021
Persentase Bayi ber akte kelahiran	%	86,00	87,00	92,00	94,00	95,00	96,89

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2021

2.3.2.6.6. Persentase Pasangan ber-Akte Nikah

Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 mensyaratkan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan yang berlaku. Bagi mereka yang melakukan perkawinan menurut agama Islam, pencatatan dilakukan di kantor urusan agama (KUA). Sedangkan bagi yang bergama Katolik, Protestan, Buddha, Hindu, dan Konghucu, pencatatan perkawinannya dilakukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Akta Perkawinan sangat penting bagi setiap penduduk yang telah menikah sebab merupakan alat bukti otentik kepada seorang pria dan seorang wanita dalam melaksanakan pencatatan perkawinan. Adanya program nasional percepatan penerbitan akta kelahiran, secara tidak langsung mendorong peningkatan rasio pasangan berakte nikah sebab seharusnya pemohon akta kelahiran melampirkan buku nikah/akta perkawinan orang tuanya. Masih banyaknya akte perkawinan yang telah diterbitkan sebelumnya secara konvensional dan belum terintegrasi dengan SIAK, menyebabkan datanya perkawinannya belum tercatat dalam SIAK. Demikian halnya dengan Akte perkawinan untuk penduduk muslim sepenuhnya dilakukan oleh kantor urusan agama (KUA), adapun data hasil pelayanan penerbitan buku nikah yang dilakukan KUA belum sepenuhnya terintegrasi dengan data base dinas kependudukan dan pencatatan sipil (SIAK).

Grafik II. 24
Pasangan Ber Akte Nikah Tahun 2021

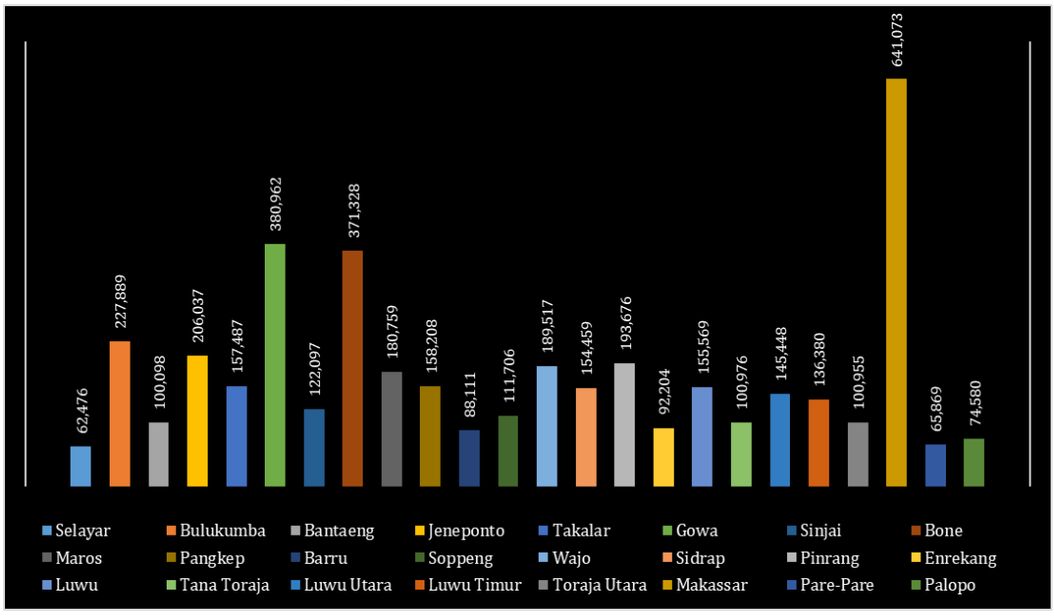

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2021 (data diolah)

Data Konsolidasi Bersih DKB digunakan sebagai dasar Persentase pasangan berakte nikah yaitu jumlah pasangan nikah berakte nikah dibandingkan dengan jumlah keseluruhan pasangan nikah dikalikan 100 persen. Pada tahun 2021 ini jumlah Penduduk atau pasangan telah menikah sebanyak 4.217.864 jiwa dan Pasangan Nikah yang beragama bergama diluar agama Islam yang memiliki buku Nikah dan atau nikah siri sebanyak 1.666.936 Jiwa dengan persentase sebesar 39,52 persen. Capaian persentase pasangan ber akte nikah pada tahun 2021 mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya sebesar 23,5 persen.

Tabel II.203.
Persentase Pasangan ber akte nikah
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017-2021

Indikator	Satuan	Tahun					
		2017	2018	2019	2020	Target 2021	Capaian 2021
Persentase Pasangan ber akte nikah	%	11,00	14,00	29,00	32,00	31,00	39,52

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2021

2.3.2.6.7. Persentase Penerbitan Akta Kelahiran

Akta kelahiran merupakan bukti sah mengenai status dan peristiwa kelahiran seseorang yang dikeluarkan dinas kependudukan dan pencatatan sipil. Akta kelahiran juga merupakan bukti legal dan pengakuan negara terkait hubungan keperdataan penduduka. Akte kelahiran sangat penting peranannya untuk memperoleh akses pelayanan publik lainnya. Untuk itu, pelayanan terkait penerbitan akta kelahiran semakin dipermudah termasuk dengan adanya inovasi pelayanan secara daring atau online. Namun dalam beberapa hal, masih ada sebagian masyarakat yang tingkat kesadaran dan pemahamannya yang masih rendah sehingga tidak segera melakukan pengurusan akta kelahiran hingga terkadang penduduk sudah berusia lanjut namun belum memiliki Akta Kelahiran. Terkait dengan penerbitan akta kelahiran ini merupakan seluruh penduduk wajib memiliki Akta Kelahiran. Data Konsolidasi Bersih (DKB) yang diterbitkan oleh Dirjen Dukcapil Kemendagri merupakan dasar untuk menentukan persentase penerbitan akta kelahiran yaitu jumlah penduduk berakte kelahiran dibanding dengan jumlah penduduk dikalikan 100 persen. Berdasarkan DKB Semester II tahun 2021 jumlah penduduk di Sulawesi Selatan saat ini berjumlah 9.218.736 jiwa dan yang telah memiliki Akte kelahiran mencapai 4.565.294 jiwa dengan persentase sebesar 49,52 persen mengalami peningkatan sebesar 23,5 persen dari tahun sebelumnya.

Tabel II.204.
Persentase penerbitan akta kelahiran
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017-2021

Indikator	Satuan	Tahun					
		2017	2018	2019	2020	Target 2021	Capaian 2021
Persentase penerbitan akta kelahiran	%	11,00	38,00	43,00	46,00	93,70	49,52

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2021

2.3.2.6.8. Persentase Penduduk Usia 0-17 Tahun dengan kepemilikan akte kelahiran

Akta kelahiran merupakan bukti sah mengenai status dan peristiwa kelahiran seseorang yang dikeluarkan dinas kependudukan dan pencatatan sipil. Akta kelahiran juga merupakan bukti legal dan pengakuan negara terkait hubungan keperdataan penduduka. Akte kelahiran sangat penting peranannya untuk memperoleh akses pelayanan publik lainnya. Untuk itu, pelayanan terkait penerbitan akta kelahiran semakin dipermudah termasuk dengan adanya inovasi pelayanan secara daring atau online. Namun dalam beberapa hal, masih ada sebagian masyarakat yang tingkat kesadaran dan pemahamannya yang masih rendah sehingga tidak segera melakukan pengurusan akta kelahiran hingga terkadang penduduk sudah berusia lanjut namun belum memiliki Akta Kelahiran. Terkait dengan penerbitan akta kelahiran penduduk 0-17 tahun Data Konsolidasi Bersih (DKB) yang diterbitkan oleh Dirjen Dukcapil Kemendagri merupakan dasar untuk menentukan persentase penerbitan akta kelahiran yaitu jumlah penduduk 0-17 tahun yang telah berakte kelahiran dibanding dengan jumlah penduduk 0-17 tahun dikalikan 100 persen.

Grafik II. 25
Penduduk Usia 0-17 Tahun dengan Kepemilikan Akta Kelahiran Tahun 2021

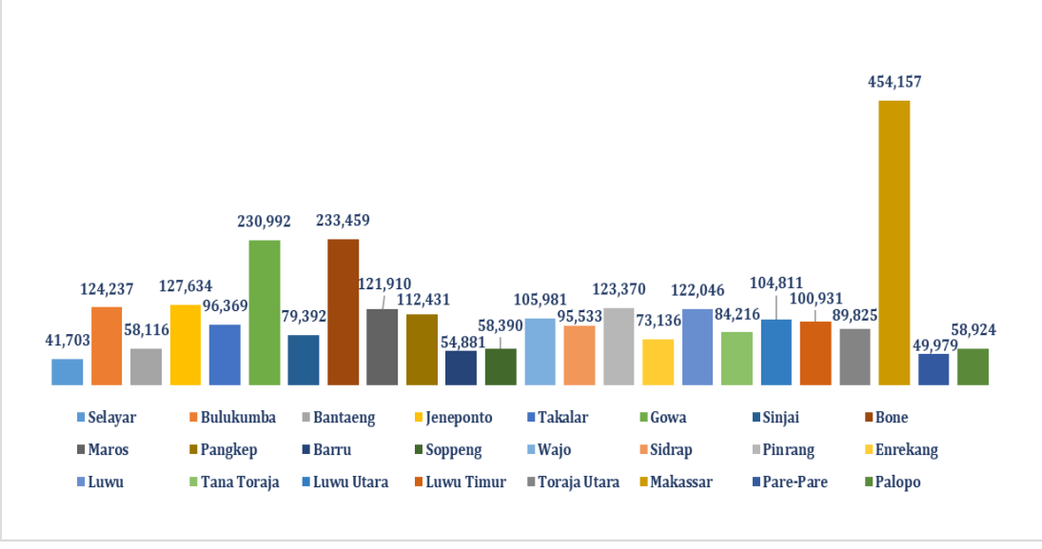

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2021 (data diolah)

Capaian indikator Persentase Penduduk Usia 0-17 Tahun dengan kepemilikan akte kelahiran tahun 2017 hingga 2018 belum dilakukan pengukuran. Berdasarkan DKB Semester II tahun 2021 jumlah penduduk yang berusia 0-17 Tahun di Sulawesi Selatan saat ini berjumlah 2.802.423 jiwa dan yang telah memiliki Akte kelahiran mencapai 2.633.969 jiwa dengan persentase sebesar 93,99 persen melampaui target serta mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya sebesar 5,28 persen.

Tabel II.205.
Persentase Penduduk Usia 0-17 Tahun dengan kepemilikan akte kelahiran
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017-2021

Indikator	Satuan	Tahun					
		2017	2018	2019	2020	Target 2021	Capaian 2021
Persentase Penduduk Usia 0-17 Tahun dengan kepemilikan akte kelahiran	%	Belum diukur		84,51	89,27	86,20	93,99

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2021

2.3.2.6.9. Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran

Akta kelahiran merupakan bukti sah mengenai status dan peristiwa kelahiran seseorang yang dikeluarkan dinas kependudukan dan pencatatan sipil. Akta kelahiran juga merupakan bukti legal dan pengakuan negara terkait hubungan keperdataan penduduka. Akte kelahiran sangat penting peranannya untuk memperoleh akses pelayanan publik lainnya. Untuk itu, pelayanan terkait penerbitan akta kelahiran semakin dipermudah termasuk dengan adanya inovasi pelayanan secara daring atau online. Namun dalam beberapa hal, masih ada sebagian masyarakat yang tingkat kesadaran dan pemahamannya yang masih rendah sehingga tidak segera melakukan pengurusan akta kelahiran hingga terkadang penduduk sudah berusia lanjut namun belum memiliki Akta Kelahiran. Terkait dengan kepemilikan akta kelahiran ini merupakan seluruh penduduk wajib memiliki Akta Kelahiran. Data Konsolidasi Bersih (DKB) yang diterbitkan oleh Dirjen Dukcapil Kemendagri merupakan dasar untuk menentukan persentase kepemilikan akta kelahiran yaitu jumlah penduduk berakte kelahiran dibanding dengan jumlah penduduk dikalikan 100 persen. Capaian indikator persentase Kepemilikan Akta Kelahiran tahun 2017 hingga 2018 belum dilakukan pengukuran. Berdasarkan DKB Semester II tahun 2021 jumlah penduduk di Sulawesi Selatan saat ini berjumlah 9.218.736 jiwa dan yang telah memiliki Akte kelahiran mencapai 4.565.294 jiwa dengan persentase sebesar 49,52 persen mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya sebesar 6,4 persen.

Tabel II.206.
Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017-2021

Indikator	Satuan	Tahun					
		2017	2018	2019	2020	Target 2021	Capaian 2021
Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran	%	Belum diukur		43,35	46,54	45,00	49,52

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2021

2.3.2.6.10. Persentase Akta Kematian yang Diterbitkan

Akta Kematian merupakan Akta yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang berkaitan dengan atas meninggalnya seseorang. Akta kematian memberikan memberikan manfaat bagi Ahli Waris diantaranya Penetapan status janda atau duda (terutama bagi Pegawai Negeri) diperlukan sebagai syarat menikah lagi, Untuk persyaratan pengurusan pembagian waris (Peralihan Hak Atas Tanah), baik bagi isteri atau suami maupun anak, Diperlukan untuk mengurus pensiun bagi ahli warisnya dan Persyaratan untuk mengurus uang duka, tunjangan kecelakaan, Taspen, Asuransi, Perbankan, Pensiun. Masyarakat Indonesia khususnya di Provinsi Sulawesi Selatan masih menganggap tidak pentingnya akta kematian sehingga untuk perhitungan persentase akta kematian ini yaitu jumlah Akta Kematian yang diterbitkan dibandingkan dengan jumlah penduduk yang melaporkan kematian keluarganya ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota dikalikan 100 persen. Capaian indikator persentase Akta Kematian yang diterbitkan tahun 2017 hingga 2019 belum dilakukan pengukuran. Berdasarkan laporan keluarga penduduk yang meninggal ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan sampai dengan Tahun 2021 dan diterbitkan sebanyak 43.834 dokumen dengan persentase sebesar 100 persen sesuai target yang ditetapkan.

Tabel II.207.
Persentase Akta Kematian yang Diterbitkan
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017-2021

Indikator	Satuan	Tahun					
		2017	2018	2019	2020	Target 2021	Capaian 2021
Persentase Akta Kematian yang Diterbitkan	%	Belum diukur		100	100	100	100

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2021

2.3.2.6.11. Persentase Ketersediaan dan Pemanfaatan Database Kependudukan Skala Provinsi

Pemanfaatan data kependudukan adalah pemanfaatan data dari hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil melalui system informasi administrasi kependudukan kepada lembaga pengguna melalui pemberian hak akses oleh menteri dalam negeri. Dalam impelementasi pemberian hak akses, menteri melalui Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil memberikan akses kedalam basis data melalui Data Warehouse (DWH) yang tersimpan secara sistematik, terstruktur dan saling berhubungan melalui jaringan komuniksi data. Dalam implementasi pemanfaatan data kependudukan telah diatur terkait tatacara dan kewenangan pemberian hak akses data kependudukan yang mana kewenangan dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dapat melaksanakan perjanjian kerjasama pemberian hak akses pemanfaatan data kependudukan kepada Dinas atau Lembaga Pengguna skala provinsi atau badan hukum yang tidak memiliki hubungan vertikal

dengan pusat sebagaimana yang diatur di dalam Peraturan menteri Dalam Negeri nomor 102 Tahun 2019 tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan data Kependudukan.

Tabel II.208.
Jumlah Penduduk Menurut Kabupaten/Kota
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017-2021

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Penduduk (Jiwa)				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Bantaeng	198.269	200.457	201.115	201.688	201.960
2	Barru	174.871	180.509	182.373	187.392	189.877
3	Bone	868.192	869.301	809.441	812.719	813.211
4	Bulukumba	434.104	437.209	439.292	441.010	448.218
5	Enrekang	241.696	236.312	226.776	227.825	228.087
6	Gowa	753.935	755.235	759.872	763.387	768.868
7	Jeneponto	410.710	412.570	413.769	415.174	415.462
8	Kepulauan Selayar	136.258	138.420	139.470	140.077	140.322
9	Luwu	377.048	378.987	370.675	372.609	372.876
10	Luwu Timur	295.904	299.975	300.374	302.039	304.938
11	Luwu Utara	367.362	368.801	327.994	329.590	329.934
12	Maros	381.480	383.921	386.408	388.330	388.738
13	Pangkajene Kepulauan	362.472	362.364	350.208	351.877	352.229
14	Pinrang	408.582	401.858	405.671	407.236	408.109
15	Sidenreng Rappang	312.366	316.951	319.285	320.537	320.761
16	Sinjai	252.120	259.385	261.220	263.141	266.479
17	Soppeng	241.430	236.156	237.115	239.391	237.875
18	Takalar	287.472	290.450	293.732	301.765	311.949
19	Tana Toraja	284.303	285.687	287.245	288.202	270.597
20	Toraja Utara	241.449	245.490	247.157	252.200	255.140
21	Wajo	453.628	372.512	374.888	378.024	392.437
22	Makassar	1.668.314	1.659.777	1.480.480	1.487.256	1.463.089
23	Palopo	185.425	187.236	181.949	182.827	183.056
24	Pare-Pare	143.079	147.322	148.634	151.763	154.524
Sulawesi Selatan		**9.480.474**	**9.426.885**	**9.145.143**	**9.206.059**	**9.218.736**

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2021

Grafik II. 26
Jumlah Penduduk Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2021

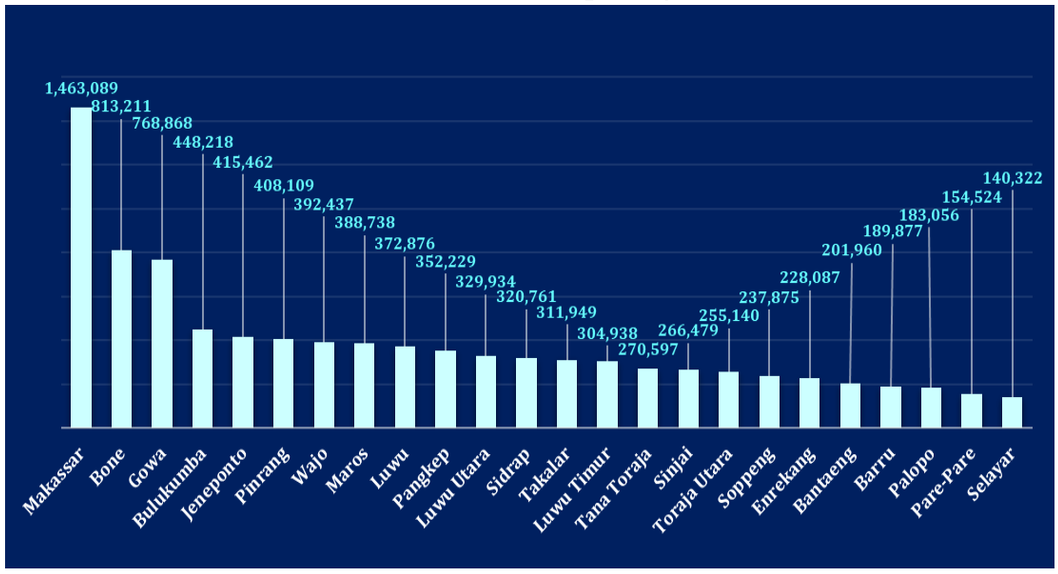

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2021

Berdasarkan hasil survey yang dilaksanakan untuk mengukur Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan kependudukan pada tahun 2021 dengan jumlah 70 responden diperoleh nilai IKM 82,71 dengan kategori BAIK.

Tabel II.209.
Persentase Ketersediaan dan Pemanfaatan Database Kependudukan Skala Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017-2021

Indikator	Satuan	Tahun					
		2017	2018	2019	2020	Target 2021	Capaian 2021
Persentase Ketersediaan dan Pemanfaatan Database Kependudukan Skala Provinsi	%	100	100	100	100	100	100

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2021

2.3.2.6.12. Persentase Penyajian Profil Kependudukan

Profil Kependudukan sebagaimana yang diamanatkan di dalam Undang-Undang nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Permendagri No.65 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan, merupakan suatu upaya pemerintah melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk meningkatkan pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasil dari pengelolaan informasi administrasi khususnya di Provinsi Sulawesi Selatan. Profil Kependudukan diterbitkan berdasarkan data hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil melalui Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) yang telah ditunggalkan dan dibersihkan oleh kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat jenderal Kependudukan dan

Pencatatan Sipil. Melalui penyajian profil kependudukan pemerintah berharap informasi terkait data kependudukan dapat diakses dan digunakan oleh semua pihak khususnya untuk mendukung perencanaan dan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan publik di provinsi Sulawesi Selatan.

Profil kependudukan pada dasarnya dapat disajikan dalam bentuk tabel, diagram, grafik, serta peta yang diimplementasikan kedalam media berupa buku profil kependudukan yang diterbitkan setiap tahunnya ataupun kedalam sistem aplikasi berbasis native maupun website. Berdasarkan implementasinya, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Selatan telah menerapkan bentuk penyajian data profil kependudukan melalui penerbitan buku profil kependudukan serta implementasi data kependudukan berbasis website. Capaian persentase penyajian profil kependudukan setiap tahun mencapai 100 persen.

Tabel II.210.
Persentase Penyajian Profil Kependudukan
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017-2021

Indikator	Satuan	Tahun					
		2017	2018	2019	2020	Target 2021	Capaian 2021
Persentase Penyajian Profil Kependudukan	%	100	100	100	100	100	100

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2021

2.3.2.7. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

2.3.2.7.1. Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Pemerintahan Desa yang Baik

Capaian persentase cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik tahun 2021 sebesar 98,89 persen atau 2.230 desa dari 2.255 jumlah total desa. Faktor pendorong pencapaian target karena adanya dukungan dan sinergitas pemerintah baik di pusat, provinsi maupun di kabupaten. Ketersediaan sarana prasarana perkantoran pemerintah desa yang baik diharapkan dapat lebih meningkatkan kinerja apparat desa dan fungsi pelayanan kepada masyarakat.

Tabel II.211.
Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Pemerintahan Desa Yang Baik
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017-2021

Indikator	Satuan	Tahun					
		2017	2018	2019	2020	Target 2021	Capaian 2021
Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Pemerintahan Desa yang Baik	%	31,47	4,08	17,38	17,38	98,89	98,89

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2021

2.3.2.7.2. Persentase Peningkatan Status Desa Mandiri

Capaian indikator persentase peningkatan status desa mandiri tahun 2017 hingga 2020 belum dilakukan pengukuran karena menyesuaikan Perubahan RPJMD 2018-2023. Capaian persentase peningkatan status desa mandiri tahun 2021 melampaui target yang ditetapkan dari target 0,88 persen atau 20 desa mandiri dari total 2.255 jumlah desa dengan capaian sebesar 4,96 persen atau 112 desa mandiri. Program yang mendukung keberhasilan pencapaian target tersebut yakni Program Administrasi Pemerintahan Desa melalui sub kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Profil Desa dan Kelurahan dengan jumlah alokasi anggaran pada APBD Perubahan 2021 mengalami peningkatan, selain itu dukungan peran aktif PMD kabupaten dalam pembinaan pemerintahan desa juga menjadi faktor pendorong pencapaian target.

Tabel II.212.
Persentase peningkatan status desa mandiri
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017-2021

Indikator	Satuan	Tahun					
		2017	2018	2019	2020	Target 2021	Capaian 2021
Persentase peningkatan status desa mandiri	%	Belum diukur				0,88	4,96

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2021

Grafik II. 27
Jumlah Desa Status "Desa Mandiri" Tahun 2021

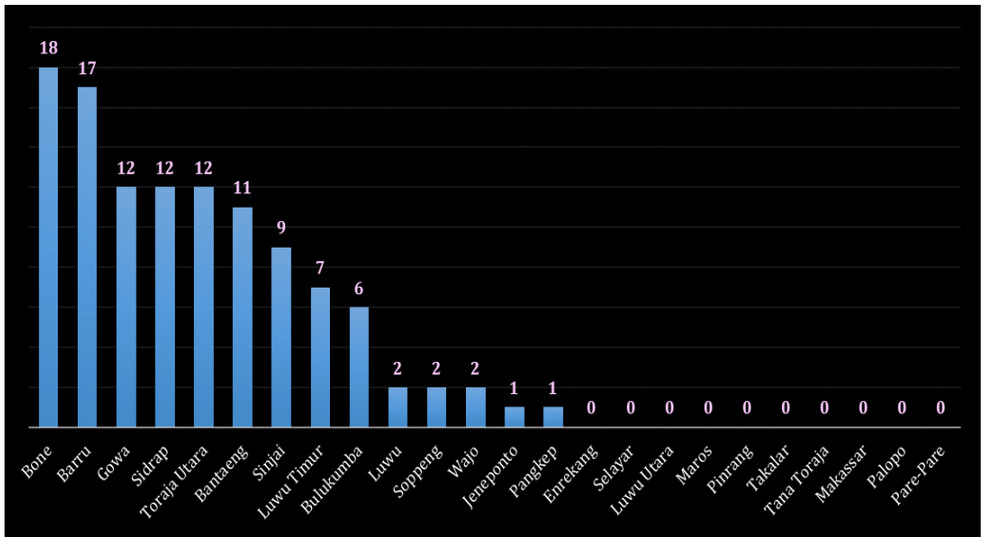

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2021 (data diolah)

2.3.2.7.3. Persentase Pengentasan Desa Tertinggal

Capaian indikator persentase pengentasan desa tertinggal tahun 2017 hingga 2018 belum dilakukan pengukuran. Capaian target persentase pengentasan desa tertinggal pada tahun 2021 melampaui target dengan capaian 11,88 persen dimana target pada tahun 2021 sejumlah 450 desa tertinggal dari 2.255 desa sementara jumlah desa tertinggal pada tahun 2021 sejumlah 268 desa.

Tabel II.213.
Persentase pengentasan desa tertinggal
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017-2021

Indikator	Satuan	Tahun					
		2017	2018	2019	2020	Target 2021	Capaian 2021
Persentase pengentasan desa tertinggal	%	Belum diukur		25,23	43,99	19,95	11,88

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2021

Grafik II. 28
Jumlah Desa Tertinggal Tahun 2021

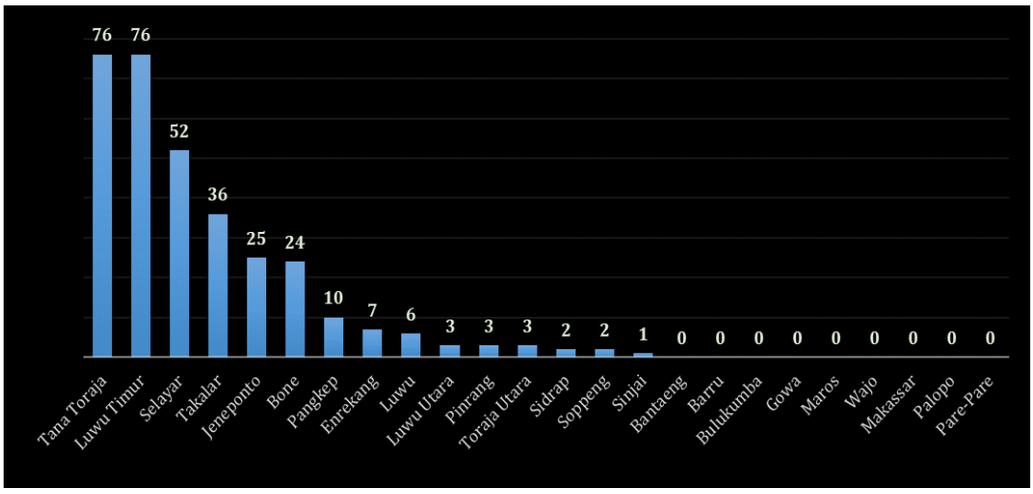

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2021 (data diolah)

2.3.2.7.4. Persentase Desa yang menjalin Kerjasama

Capaian persentase desa yang menjalin kerjasama tahun 2017 hingga 2020 belum dilakukan pengukuran karena menyesuaikan Perubahan RPJMD 2018-2023. Tahun 2021 capaian persentase desa yang menjalin kerjasama melampaui target 0,44 persen atau 10 kerjasama desa dan 45 kawasan perdesaan yang ditetapkan dengan capaian 0,62 persen atau 14 kerjasama desa dan 47 kawasan perdesaan.

Tabel II.214.
Persentase Desa yang menjalin kerjasama
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017-2021

Indikator	Satuan	Tahun					
		2017	2018	2019	2020	Target 2021	Capaian 2021
Persentase Desa yang menjalin kerjasama	%	Belum diukur				0, 44	0,62

Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2021

2.3.2.7.5. Persentase PKK Aktif

Sejumlah 3.344 PKK merupakan PKK aktif hingga tahun 2021, sehingga capaian indikator persentase PKK aktif mencapai 100 persen tahun 2018

hingga 2021. Keberhasilan pencapaian target PKK aktif karena terpenuhinya kebutuhan alokasi pendanaan dalam mendukung pemberdayaan lembaga kemasyarakatan.

Tabel II.215.
Persentase PKK Aktif
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016-2020

Indikator	Satuan	Tahun					
		2017	2018	2019	2020	Target 2021	Capaian 2021
Jumlah PKK	Klp	3.344	3.344	3.344	3.344	3.344	3.344
Jumlah PKK Aktif	Klp	3.344	3.344	3.344	3.344	3.344	3.344
Persentase PKK aktif	%	100	100	100	100	100	100

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2021

2.3.2.7.6. Persentase Posyandu Aktif

Pada tahun 2021 jumlah posyandu aktif sejumlah 10.978 mengalami peningkatan dari tahun 2020 dengan capaian 99,91 persen. Keaktifan Posyandu didukung dengan alokasi pendanaan dalam rangka pemberdayaan lembaga kemasyarakatan.

Tabel II.216.
Persentase Posyandu Aktif
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017-2021

Indikator	Satuan	Tahun					
		2017	2018	2019	2020	Target 2021	Capaian 2021
Jumlah Posyandu	Unit	10.988	10.988	10.988	10.988	10.988	10.988
Jumlah Posyandu Aktif	Unit	10.936	10.976	10.976	10.976	10.976	10.978
Persentase Posyandu Aktif	%	99,53	99,89	99,89	99,89	99,89	99,91

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2021

2.3.2.7.7. Persentase BUM Desa yang diFasilitasi

Capaian indikator persentase BUM Desa yang difasilitasi tahun 2017 hingga 2020 belum dilakukan pengukuran karena menyesuaikan Perubahan RPJMD 2018-2023. Target persentase BUM Desa yang difasilitasi untuk tahun 2021 sebesar 11,81 persen atau 180 BUM Desa dari total 1.524 BUM Desa dengan capaian 5,90 persen atau 90 BUM Desa yang difasilitasi. Belum tercapainya target dengan tingkat capaian 49,95 persen disebabkan oleh beberapa kendala antara lain masih berlanjutnya pandemic covid-19 sehingga dilakukan penerapan PPKM dengan skala yang berbeda sesuai kondisi pada masing-masing kabupaten, serta pelaksanaan program kegiatan yang harusnya berjalan sesuai perencanaan di awal tahun baru dapat dilaksanakan di akhir tahun karena keterlambatan pencairan dan recofusning anggaran.

Tabel II.217.
Persentase BUM Desa yang diFasilitasi
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017-2021

Indikator	Satuan	Tahun					
		2017	2018	2019	2020	Target 2021	Capaian 2021
Persentase BUM Desa Yang diFasilitasi	%	Belum diukur				11,81	5,90

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2021

2.3.2.7.8. Persentase Desa yang diFasilitasi

Capaian persentase desa yang difailitasi melampaui target 15,03 persen atau 339 desa dari 2.255 total jumlah desa dengan capaian 34,10 persen atau 769 desa yang difasilitasi. Pencapaian target didukung oleh 4 (empat) program dengan sasaran selain untuk peningkatan sumber daya manusia juga melakukan pembinaan dan pemberdayaan kelembagaan masyarakat di desa.

Tabel II.218.
Persentase Desa yang diFasilitasi
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017-2021

Indikator	Satuan	Tahun					
		2017	2018	2019	2020	Target 2021	Capaian 2021
Persentase Desa yang diFasilitasi	%	-	-	-	-	15,03	34,10

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2021

2.3.2.7.9. Persentase Kelembagaan Masyarakat yang difasilitasi dan ditingkatkan kapasitasnya (Kelompok Binaan LPM)

Capaian indikator persentase kelembagaan masyarakat yang difasilitasi dan ditingkatkan kapasitasnya (Kelompok Binaan LPM) tahun 2017 hingga 2020 belum dilakukan pengukuran karena menyesuaikan pelaksanaan program pada Perubahan RPJMD 2018-2023. Target persentase kelembagaan masyarakat yang difasilitasi dan ditingkatkan kapasitasnya dalam hal ini adalah Kelompok Binaan LPM pada tahun 2021 sebesar 1,51 persen atau 46 kelompok dari 3,038 kelompok binaan LPM. Pencapaian target didukung oleh pelaksanaan program pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat. Dalam pelaksanaan program sasaran yang ingin dicapai adalah peningkatan kapasitas lembaga swadaya masyarakat aktif, kelompok binaan LPM, LPM berprestasi serta partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

Tabel II.219.
Persentase Kelembagaan Masyarakat yang difasilitasi dan ditingkatkan kapasitasnya (Kelompok Binaan LPM) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017-2021

Indikator	Satuan	Tahun					
		2017	2018	2019	2020	Target 2021	Capaian 2021
Persentase Kelembagaan Masyarakat yang difasilitasi dan ditingkatkan kapasitasnya (Kelompok Binaan LPM)	%	Belum diukur				1,51	1,51

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2021

2.3.2.8. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

2.3.2.8.1. Cakupan kab/kota yang mendapatkan fasilitasi pembinaan penanganan terpadu isu kependudukan di Kampung KB

Fasilitasi pembinaan penanganan terpadu isu kependudukan di Kampung KB di wilayah Sulawesi Selatan sejak tahun 2017 hingga tahun 2020 belum dilakukan intervensi. Selain karena kurangnya koordinasi pemerintah daerah dengan instansi pemerintah yang menangani pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pemerintah daerah atau dinas yang mengampuh urusan tersebut mengalami perubahan nomenklatur kelembagaan, sehingga pembinaan ke kabupaten/kota baru di mulai tahun 2021. Fasilitasi yang dilaksanakan adalah pembinaan dan advokasi Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK). Tahun 2021 ditargetkan sebesar 12,5 persen atau 3 kabupaten/kota dengan capaian sebesar 16,7 persen atau 4 kabupaten yang berhasil difasilitasi pembinaan penanganan terpadu isu kependudukan di Kampung KB.

Tabel II.220.
Cakupan kab/kota yang mendapatkan fasilitasi pembinaan penanganan terpadu isu kependudukan di Kampung KB
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017-2021

Indikator	Satuan	Tahun					
		2017	2018	2019	2020	Target 2021	Capaian 2021
Cakupan kab/kota yang mendapatkan fasilitasi pembinaan penanganan terpadu isu kependudukan di Kampung KB	%	Belum diukur				12,5	16,7

Sumber : DP3A Dalduk dan KB Prov.Sulawesi Selalata, Tahun 2021

2.3.2.8.2. Persentase PUS peserta KB Aktif

Pasangan usia subur adalah pasangan suami istri yang istrinya berumur kurang dari 15 tahun dan telah kawin, atau pasangan suami istri yang istrinya berumur lebih dari 49 tahun tetapi belum menopause, persentase PUS peserta KB Aktif tahun 2017 hingga tahun 2020 terus mengalami penurunan. Hal tersebut memberikan gambaran bahwa unmeetneed KB di Sulawesi Selatan cukup tinggi yakni sampai dengan tahun 2020 mencapai 45,76 persen PUS yang tidak berKB. Tahun 2021 Di Provinsi Sulawesi Selatan program ber KB digalakkan dengan cukup optimis menetapkan target PUS sebesar 63,5 persen dengan capaian sebesar 64,14 persen.

Tabel II.221.
Persentase PUS peserta KB Aktif
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017-2021

Indikator	Satuan	Tahun					
		2017	2018	2019	2020	Target 2021	Capaian 2021
Persentase PUS peserta KB Aktif	%	50,7	48,23	46,99	45,76	63,5	64,14

Sumber : DP3A Dalduk dan KB Prov.Sulawesi Selalata, Tahun 2021

2.3.2.8.3. Persentase kab/kota yang meningkat capaian Indeks Pembangunan Keluarga

Capaian indikator persentase kab/kota yang meningkat capaian Indeks Pembangunan Keluarga tahun 2017 hingga 2020 belum dilakukan pengukuran karena menyesuaikan Perubahan RPJMD 2018-2023. Indeks Pembangunan Keluarga (IBangga) merupakan indeks yang digunakan untuk mengukur kualitas keluarga yang ditunjukkan melalui ketentraman, kemandirian, dan kebahagiaan keluarga. Di Provinsi Sulawesi Selatan Indeks IBangga baru diterapkan tahun 2021, selanjutnya ditetapkan target 16 persen kabupaten/kota yang meningkat capaian IBangga-nya dengan capaian IBangga sebesar 16,7 persen atau dengan sejumlah 4 kabupaten/kota dengan persentase IBangga yang cukup baik.

Tabel II.222.
Persentase kab/kota yg meningkat capaian Indeks Pembangunan Keluarga
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017-2021

Indikator	Satuan	Tahun					
		2017	2018	2019	2020	Target 2021	Capaian 2021
Persentase kab/kota yg meningkat capaian Indeks Pembangunan Keluarga	%	Belum diukur				16	16,7

Sumber : DP3A Dalduk dan KB Prov.Sulawesi Selalata, Tahun 2021

2.3.2.9. Perhubungan

2.3.2.9.1. Persentase Pengguna Moda Transportasi Umum di Perkotaan

Jumlah arus penumpang angkutan umum Pada tahun 2021 terjadi peningkatan jika dibandingkan dengan dengan tahun 2020 tetapi masih lebih rendah apabila dibandingkan dengan tahun 2017 hingga tahun 2019. Hal ini disebabkan pemberlakuan PPKM untuk menekan jumlah penularan covid-19 yang berdampak pada pembatasan pergerakan masyarakat baik itu darat, laut maupun udara. Selain itu maraknya penggunan angkutan sewa khusus/angkutan online yang menggerus penumpang angkutan umum pada kawasan perkotaan.

Grafik II. 29
Jumlah Arus Penumpang Angkutan Umum Dalam Juta Jiwa

Tabel II.223.
Persentase pengguna moda transportasi umum di perkotaan
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017-2021

Indikator	Satuan	Tahun					
		2017	2018	2019	2020	Target 2021	Capaian 2021
Persentase pengguna moda transportasi umum di perkotaan	%	22,00	19,00	10,00	11,50	29,20	12,70

Sumber : Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Selatan, tahun 2021

2.3.2.9.2. Persentase Layanan Angkutan Darat

Persentase Layanan Angkutan Darat pada tahun 2021 terjadi penurunan yang cukup drastis akibat terjadinya recofusing anggaran yang menyebabkan tidak maksimalnya pelaksanaan perencanaan program kegiatan khususnya kegiatan yang bersifat bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat. Hal ini terkait dengan keterbatasan penyediaan fasilitas keselamatan transportasi, serta adanya peraturan menteri Perhubungan tentang batasan usia fasilitas keselamatan transportasi dimaksud.

Tabel II.224.
Persentase Layanan Angkutan Darat
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017-2021

Indikator	Satuan	Tahun					
		2017	2018	2019	2020	Target 2021	Capaian 2021
Persentase Layanan Angkutan Darat	%	88,07	57,10	72,28	109,87	54,00	43,00

Sumber : Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Selatan, tahun 2021

2.3.2.9.3. Jumlah Penumpang Melalui Terminal Tipe B Per Tahun

Jumlah penumpang melalui terminal Tipe B terjadi penurunan apabila dibandingkan dengan tahun 2019 kebawah disebabkan adanya Perberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) selama wabah covid-19 tetapi apabila di bandingkan dengan tahun 2020 terjadi peningkatan yang disebabkan dengan mulai menggeliatnya kegiatan masyarakat dalam masa pemulihan ekonomi.

Tabel II.225.
Jumlah penumpang melalui terminal Tipe B per tahun
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017-2021

Indikator	Satuan	Tahun					
		2017	2018	2019	2020	Target 2021	Capaian 2021
Jumlah penumpang melalui terminal Tipe B per tahun	Orang	612.075	1.001.151	829.122	580.872	365.000	499.277

Sumber : Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Selatan, tahun 2021

2.3.2.9.4. Cakupan Prasarana LLAJ dalam Kondisi Baik

Cakupan prasarana LLAJ dalam kondisi baik terjadi penurunan pada tahun 2021 disebabkan terjadi penurunan usia fasilitas LLAJ sesuai dengan Peraturan menteri perhubungan yang mengatur tentang usia masing masing fasilitas keselamatan yang ada.

Tabel II.226.
Cakupan prasarana LLAJ dalam kondisi baik
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017-2021

Indikator	Satuan	Tahun					
		2017	2018	2019	2020	Target 2021	Capaian 2021
Cakupan prasarana LLAJ dalam kondisi baik	%	4,80	5,33	5,16	5,03	22,00	3,05

Sumber : Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Selatan, tahun 2021

2.3.2.9.5. Jumlah Penyelenggaraan Lalu Lintas Pada Ruas Jalan Provinsi

Jumlah penyelenggaraan lalu lintas pada ruas jalan provinsi terjadi peningkatan yang lumayan besar hal ini disebabkan terjadinya peningkatan penyertaan masyarakat dalam penyelenggaraan lalu lintas secara swadaya.

Tabel II.227.
Jumlah penyelenggaraan lalu lintas pada ruas jalan provinsi
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017-2021

Indikator	Satuan	Tahun					
		2017	2018	2019	2020	Target 2021	Capaian 2021
Jumlah penyelenggaraan lalu lintas pada ruas jalan provinsi	Ruas	12	12	15	15	20	45

Sumber : Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Selatan, tahun 2021

2.3.2.9.6. Jumlah Terminal Bis Terkelola

Jumlah Terminal Bis terkelola belum memenuhi target hal ini disebabkan terkendalanya penyerahan aset terminal type B dari pemerintah Kabupaten/Kota ke pemerintah Provinsi.

Tabel II.228.
Jumlah Terminal Bis terkelola
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017-2021

Indikator	Satuan	Tahun					
		2017	2018	2019	2020	Target 2021	Capaian 2021
Jumlah Terminal Bis terkelola	Terminal	0	2	4	5	10	7

Sumber: Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Selatan, diolah tahun 2021

2.3.2.9.7. Jumlah Arus Penumpang Melalui Pelabuhan

Jumlah arus penumpang melalui pelabuhan terjadi peningkatan apabila di bandingkan dengan tahun 2020, tetapi belum menyamai tahun 2018 hal ini disebabkan dengan merebaknya wabah covid 19 serta kegiatan pemulihan ekonomi.

Tabel II.229.
Jumlah arus penumpang melalui pelabuhan
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017-2021

Indikator	Satuan	Tahun					
		2017	2018	2019	2020	Target 2021	Capaian2021
Jumlah arus penumpang melalui pelabuhan	Orang	1.640.705	1.768.413	1.686.838	658.933	1.028.000	1.355.919

Sumber: Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Selatan, diolah tahun 2021

2.3.2.9.8. Jumlah Pelabuhan Strategis Provinsi

Jumlah pelabuhan strategis provinsi tidak terjadi peningkatan disebabkan tidak adanya pembangunan atau peralihan status pelabuhan yang ada.

Tabel II.230.
Jumlah pelabuhan strategis provinsi
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017-2021

Indikator	Satuan	Tahun					
		2017	2018	2019	2020	Target 2021	Capaian 2021
Jumlah pelabuhan strategis provinsi	Lokasi	11	11	11	11	11	11

Sumber: Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Selatan, diolah tahun 2021

2.3.2.9.9. Persentase Pelabuhan Yang Beroperasi

Persentase pelabuhan yang beroperasi tidak mengalami perubahan atau peningkatan hal ini disebabkan belum adanya penyerahan P3D dari kementerian perhubungan kepada dinas perhubungan.

Tabel II.231.
Persentase pelabuhan yang beroperasi
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017-2021

Indikator	Satuan	Tahun					
		2017	2018	2019	2020	Target 2021	Capaian 2021
Persentase pelabuhan yang beroperasi	%	10,00	10,00	10,00	10,00	35,00	10,00

Sumber: Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Selatan, diolah tahun 2021

2.3.2.9.10. Persentase penyelesaian pedoman standar pelayanan sarana dan prasarana transportasi

Capaian persentase penyelesaian pedoman standar pelayanan sarana dan prasarana transportasi tahun 2021 mencapai target yang ditetapkan 100 persen. Faktor pendorong pencapaian target terkait sarana dan prasarana perhubungan yang bersifat teknis SOP pelaksanaan pengadaan dan persyaratan teknisnya telah diatur dalam peraturan menteri perhubungan serta diturunkan dalam peraturan jenderal terkait.

Tabel II.232.
Persentase penyelesaian pedoman standar pelayanan
Sarana dan prasarana transportasi
Di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017-2021

Indikator	Satuan	Tahun					
		2017	2018	2019	2020	Target 2021	Capaian 2021
Persentase penyelesaian pedoman standar pelayanan Sarana dan prasarana transportasi	%	-	-	-	-	100	100

Sumber: Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Selatan, diolah tahun 2021

2.3.2.10. Komunikasi dan Informatika

2.3.2.10.1. Persentase Layanan Informasi Dan Komunikasi Publik

Capaian indikator kinerja Layanan Informasi dan Komunikasi Publik pada tahun 2021 tercapai 80 % sesuai dengan target yang direncanakan. Jumlah kerjasama dalam hubungan layanan media mengalami peningkatan dari tahun 2017 hingga 2021 dengan rata-rata peningkatan 14,28 persen.

Advetorial

Konten

Media Cetak

Media Online

Capaian target kinerja didukung antara lain: a) Capaian indikator kinerja output 1.120 Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Publik. Konten berupa video, berita, infografis dan animasi; b) Capaian indikator kinerja output 15.473 Berita Pada Pengelolaan Media. Berita terdiri dari berita melalui media online, media cetak dan media elektronik; c) Capaian indikator kinerja output yaitu 7 Jenis Pelayanan Informasi publik. Pelayanan Informasi Publik antara lain pelayanan informasi media online, media cetak, elektronik, KPID, PPID, Penyelesaian Sengketa Informasi, dan Pelayanan Aduan Masyarakat. capaian indikator kinerja output yaitu 9 Kerjasama Media Nasional, dan 50 Advetorial yang Dikelola, dan d) Capaian indikator kinerja output yaitu 8o persen Sengketa Informasi yang diselesaikan.

Dalam rangka optimalisasi pelaksanaan pelaksanaan PPID setiap badan publik, maka PPID utama melaksanakan kegiatan pembinaan pengelolaan informasi public PPID pada OPD lingkup pemerintah provinsi dengan tujuan memberikan penjelasan dan pemahaman kepada PPID pelaksana terkait urgensi keterbukaan informasi publik. Hasil evaluasi terhadap pelaksanaan PPID melalui kegiatan pembinaan cluster tahun 2021 yaitu dari sejumlah 53 perangkat daerah yang wajib melakukan pengelolaan pelaksanaan PPID untuk memberi pelayanan informasi kepada pemohon informasi, sejumlah 28 persen yang telah memiliki sarana secara umum dan 57 persen secara administrasi dimana 17 perangkat daerah memiliki ruangan PPID serta 30 perangkat daerah memiliki SK PPID.

Tabel II.233.
Persentase layanan informasi dan komunikasi publik
Di Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2017-2021

Indikator	Satuan	Tahun					
		2017	2018	2019	2020	Target 2021	Capaian 2021
Persentase layanan informasi dan komunikasi publik	%	50,00	50,00	60,00	70,00	80,00	80,00

Sumber : Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2021

2.3.2.10.2. Presentase Tindak Lanjut Pengaduan Pada Baruga Layanan Masyarakat Secara Elektronik

Persentase tindak lanjut pengaduan pada baruga layanan Masyarakat secara Elektronik setiap tahunnya tercapai 100 persen. Pada Tahun 2021 sebanyak 86 aduan dan secara keseluruhan telah ditindaklanjuti dengan disampaikan kepada OPD terkait dan dimonitoring secara berkala. Jumlah aspirasi terdiri dari jumlah aduan masyarakat pada system aplikasi baruga aduan masyarkat dan aplikasi lapor spam yang terintegrasi dengan pemerintah pusat. Rendahnya jumlah aspirasi atau terkait pengaduan masyarakat pada SP4N-Lapor disebabkan adanya aplikasi serupa fungsinya yang dikelola oleh pihak Kab/Kota bahkan OPD baik tingkat provinsi maupun kabupaten dan masih rendahnya sosialisasi dan edukasi ke masyarakat.

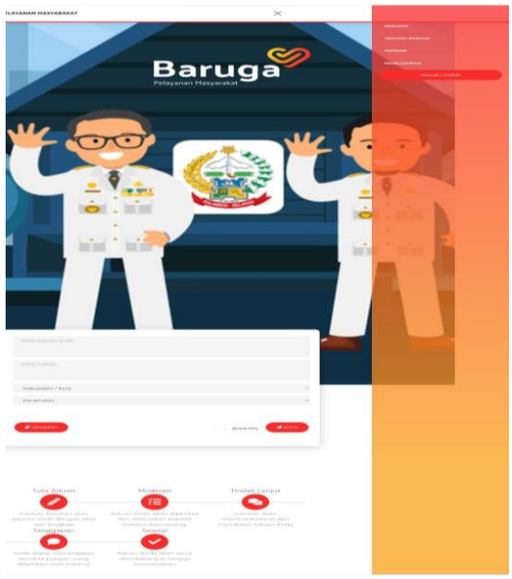

Aplikasi Baruga Layanan Aduan Masyarakat

Layanan Lapor SPAM

Tabel II.234.
Presentase tindak lanjut pengaduan pada Baruga Layanan Masyarakat secara Elektronik Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017-2021

Indikator	Satuan	Tahun					
		2017	2018	2019	2020	Target 2021	Capaian 2021
Presentase tindak lanjut pengaduan pada Baruga Layanan Masyarakat secara Elektronik	%	100	100	100	100	100	100

Sumber : Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2021

2.3.2.10.3. Indeks sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE)

Capaian indikator Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) tahun 2017 hingga 2018 belum dilakukan pengukuran. Capaian Kinerja Nilai Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Tahun 2021 sebesar 2,05 atau kategori Cukup. Nilai SPBE dengan target sebelumnya tidak terpenuhi disebabkan sebagai berikut:

a. Bertambahnya indikator penilaian SPBE sebelumnya 37 indikator menjadi 47 indikator berdasarkan Permenpan RB No 59 Tahun 2020.
b. Provinsi Sulsel masih belum memiliki kebijakan inter nal yang mengatur terkait arsitektur SPBE.
c. Provinsi Sulsel masih belum memiliki perencanaan strategis yang mengatur terkait SPBE.
d. Provinsi Sulsel masih belum memiliki tata kelola yang mengatur terkait pada pembangunan aplikasi SPBE, layanan jaringan intra dan penggunaan system penghubung layanan dimana tidak ditemukan adanya bukti dukung atau pengaturan dalam kebijakan internal yang disampaikan.

Capaian target kinerja didukung antara lain: a) Capaian indikator kinerja output 1200 Mbps Kapasitas Bandwith Global dan Domestik Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan; b) Capaian indikator kinerja output 86/Web yang dikelola dan dikembangkan; c) Capaian indikator kinerja output jumlah Bimtek

Kompetensi TIK yang diikuti, 100 SDM yang Meningkatkan Kualitasnya dalam Bidang E-Government.

Tabel II.235.
Indeks sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE)
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017-2021

Indikator	Satuan	Tahun					
		2017	2018	2019	2020	Target 2021	Capaian 2021
Indeks sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE)	Indeks	Belum diukur		2,66	3,08	2,80	2,05

Sumber : Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2021

2.3.2.11. Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah

2.3.2.11.1. Persentase Koperasi dan UKM yang memiliki Izin usaha Simpan Pinjam

Untuk melindungi masyarakat pelaku usaha pada akses permodalan salah satunya adalah mendorong dan memfasilitasi koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam koperasi di Sulawesi Selatan untuk lebih akuntable dengan cara fasilitasi KSP/USP Koperasi tersebut dalam legalitas usaha simpan pinjam. Merupakan kewajiban seluruh KSP/USP Koperasi memiliki izin usaha simpan pinjam tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Koperasi dan UKM nomor 11 tahun 2018 tentang Perizinan Usaha Simpan Pinjam Koperasi.

Diagram II.6.
Jumlah Koperasi Aktif dan Tidak Aktif

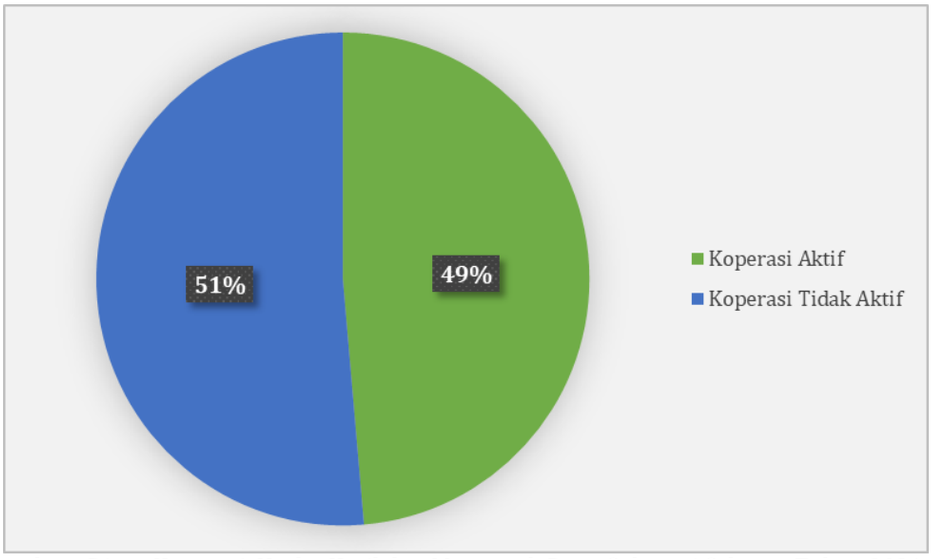

Sumber : Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Prov. Sulawesi Selatan, Tahun 2021

Jumlah KSP/USP Koperasi di Sulawesi Selatan sejak tahun 2017 adalah 78 unit KSP/USP Koperasi namun tidak semua KSP/USP Koperasi tersebut memiliki izin. Capaian persentase Koperasi dan UKM yang memiliki usaha simpan pinjam pada tahun 2021 melampaui target dengan capaian 39 persen.

Tabel II.236.
Persentase Koperasi dan UKM yang memiliki Izin usaha Simpan Pinjam
Di Provinsi Sulawesi Selatan,Tahun 2017-2021

Indikator	Satuan	Tahun					
		2017	2018	2019	2020	Target 2021	Capaian 2021
Persentase Koperasi dan UKM yang memiliki Izin usaha Simpan Pinjam	%	3,00	5,00	9,00	10,00	12,00	39,00

Sumber : Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Prov. Sulawesi Selatan, Tahun 2021

2.3.2.11.2. Persentase Koperasi yang mendapat Izin Pembukaan Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu dan Kantor Kas

Untuk mendekatkan jarak pelayanan dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada anggota, baik pelayanan simpan pijam maupun pemberian pinjaman, KSP dan USP Koperasi melalui koperasinya dapat membuka jaringan pelayanan berupa kantor cabang, kantor cabang pembantu, dan kantor kas merujuk pada Peraturan Pemerintah nomor 7 tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dalam fungsinya memberikan pembinaan dan pengawasan kepada koperasi dari luar provinsi Sulawesi selatan, atau koperasi skala kabupaten/kota yang membuka kegiatan usaha di wilayah kabupaten/kota lain. Untuk menertibkan dan memberi perlindungan para pelaku usaha dalam hal permodalan khususnya berurusan dengan koperasi, persyaratan pembukaan kantor cabang yang tidak memberatkan sehingga koperasi yang membutuhkan izin dapat lebih mudah mendapatkannya sesuai dengan kualitas koperasi. Capaian persentase koperasi yang mendapat izin pembukaan kantor cabang, kantor cabang pembantu dan kantor kas pada tahun 2021 melampaui target yang direncanakan dengan capaiam 36 persen serta mengalami peningkatan sejak tahun 2017 hingga 2021.

Tabel II.237.
Persentase Koperasi yang mendapat Izin Pembukaan Kantor Cabang,
Kantor Cabang Pembantu dan Kantor Kas
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017-2021

Indikator	Satuan	Tahun					
		2017	2018	2019	2020	Target 2021	Capaian 2021
Persentase Koperasi yang mendapat Izin Pembukaan Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu dan Kantor Kas	%	2,00	5,00	9,00	10,00	10,00	36,00

Sumber : Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Prov. Sulawesi Selatan, Tahun 2021

2.3.2.11.3. Persentase Koperasi yang Diawasi dan Diperiksa

Untuk mewujudakan koperasi yang kuat, sehat, mandiri, tangguhan berdaya saing sesuai jati diri koperasi perlu meningkatkan akuntabilitas, kepercayaan, kepatuhan, kesinambungan dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada anggota dan masyarakat pengawasan dan pemeriksaan kepada koperasi wajib dilakukan, mencegah penyimpangan transaksi dan pelanggaran aturan yang akan terjadi di masyarakat. Capaian persentase koperasi yang diawasi dan diperiksa pada tahun 2021 melampaui target yang direncanakan dengan capaian 30 persen mengalami peningkatan 50 persen dari tahun sebelumnya.

Tabel II.238.
Persentase Koperasi yang diawasi dan diperiksa
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017-2021

Indikator	Satuan	Tahun					
		2017	2018	2019	2020	Target 2021	Capaian 2021
Persentase Koperasi yang diawasi dan diperiksa	%	5,00	15,00	20,00	20,00	20,00	30,00

Sumber : Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Prov. Sulawesi Selatan, Tahun 2021

2.3.2.11.4. Persentase Koperasi yang meningkat Kepatuhannya terhadap peraturan perundang undangan

Pengawasan secara intensif akan membentuk koperasi yang kuat, sehat, mandiri, dan tangguh. Hasil dari pengawasan dan pemeriksaan selain berupa pemberian hukuman Dinas Koperasi dan UKM melakukan perbaikan terhadap kekurangan koperasi yang telah diawasi dan diperiksa dengan melakukan tindak lanjut terhadap hasil pengawasan pada aspek kepatuhan legal, kepatuhan usaha dan keuangan serta kepatuhan transaksi. Capaian persentase koperasi yang meningkat kepatuhannya terhadap peraturan perundang undangan pada tahun 2021 sesuai dengan target yang ditetapkan dengan capaian 20 persen.

Tabel II.239.
Persentase Koperasi yang meningkat Kepatuhannya terhadap peraturan perundang undangan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017-2021

Indikator	Satuan	Tahun					
		2017	2018	2019	2020	Target 2021	Capaian 2021
Persentase Koperasi yang meningkat Kepatuhannya terhadap peraturan perundang undangan	%	3,00	5,00	20,00	20,00	20,00	20,00

Sumber : Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Prov. Sulawesi Selatan, Tahun 2021

2.3.2.11.5. Persentase KSP/USP Koperasi, KSPPS/USPPS Koperasi dengan Kriteria SEHAT

Pengendalian terhadap aktifitas keuangan di masyarakat khususnya KSP/USP koperasi sangat penting agar kesalahan dan penyimpangan yang terjadi dapat teratasi. Salah satu ruang lingkup penilaian koperasi sehat adalah dengan mengukur akuntabilitas koperasi dengan pendekatan kualitatif maupun kuantitatif berdasarkan aspek penilaian yaitu permodalan, kualitas aktiva produktif, manajemen, efisensi, jati diri koperasi, pertumbuhan dan kemandirian serta kepatuhan terhadap prinsip syariah untuk usaha simpan pinjam pola syariah. Capaian indikator persentase KSP/USP Koperasi, KSPPS/USPPS Koperasi dengan Kriteria SEHAT pada tahun 2021 melampaui target dengan capaian 35 persen mengalami peningkatan dari tahun 2017 hingga 2020.

Tabel II.240.
Persentase KSP/USP Koperasi, KSPPS/USPPS Koperasi dengan Kriteria SEHAT Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017-2021

Indikator	Satuan	Tahun					
		2017	2018	2019	2020	Target 2021	Capaian 2021
Persentase KSP/USP Koperasi, KSPPS/USPPS Koperasi dengan Kriteria SEHAT	%	7,00	15,00	20,00	15,00	20,00	35,00

Sumber : Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Prov. Sulawesi Selatan, Tahun 2021

2.3.2.11.6. Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Penilaian Kesehatan Koperasi

Sertifikat penilaian kesehatan koperasi menjadi syarat wajib pembukaan kantor cabang, cabang pembantu, dan kantor kas dilakukan minimal setahun sekali. Pelaksanaan penilaian kesehatan koperasi setiap tahunnya dilakukan bersamaan dengan pengawasan dan pemeriksaan koperasi namun penilaian kesehatan koperasi hanya dilakukan kepada koperasi yang teah melaksanakan RAT (Rapat Anggota Tahunan). Didalam kertas kerja penilaian terdapat rekomendasi perbaikan yang menjadi dasar pembinaan dan tindak lanjut kepada koperasi, tindak lanjut tersebut bisa berupa pendampingan, bimbingan teknis, pendidikan pelatihan atau pemberian surat teguran. Capaian persentase penyelesaian tindak lanjut hasil penilaian kesehatan koperasi pada tahun 2021 sesuai dengan target yang direncanakan.

Tabel II.241.
Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Penilaian Kesehatan Koperasi Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017-2021

Indikator	Satuan	Tahun					
		2017	2018	2019	2020	Target 2021	Capaian 2021
Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Penilaian Kesehatan Koperasi	%	7,00	15,00	20,00	20,00	20,00	20,00

Sumber : Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Prov. Sulawesi Selatan, Tahun 2021

2.3.2.11.7. Persentase Pengurus Koperasi Aktif yang pernah mendapatkan pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian

Undang-undang perkoperasian menyebutkan perlunya menyisihkan selisih hasil usaha koperasi berupa dana Pendidikan untuk pelaksnaaan Pendidikan dan pelatihan perkoperasian. Tidak hanya dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan anggota, pengurus, pengawas, atau karyawan dalam bidang pengetahuan perkoperasian, tetapi dapat juga dijadikan sebagai alat untuk meningkatkan kegiatan dan usaha. Capaian pelaksanaan Pendidikan dan pelatihan perkoperasian bagi pengurus dan pengelola koperasi tahun 2021 melampaui target yang direncanakan dengan capaian 31 persen. Upaya melakukan fasilitasi demi peningkatan pemahaman dan pengetahuan perkoperasian serta kapasitas dan kompetensi SDM Koperasi, serta memfasilitasi uji kompetensi bagi pengurus dan pengelola Koperasi terus dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UKM. Pendidikan dan pelatihan peningkatan SDM merupakan investasi yang sangat penting bagi perekonomian dengan ditunjukkan semakin tinggi frekuensi serta kualitas pendidikan dan pelatihan yang akan meningkatkan kompetensi sumber dayam manusia.

Tabel II.242.
Persentase Pengurus Koperasi Aktif yang pernah mendapatkan pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017-2021

Indikator	Satuan	Tahun					
		2017	2018	2019	2020	Target 2021	Capaian 2021
Persentase Pengurus Koperasi Aktif yang pernah mendapatkan pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian	%	3,00	4,00	7,00	7,00	30,00	31,00

Sumber : Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Prov. Sulawesi Selatan, Tahun 2021

2.3.2.11.8. Persentase Koperasi yang Terfasilitasi Pemberdayaan

Tujun untuk melakukan pemberdayaan Koperasi dan UKM adalah upaya pemerintah mendorong pertumbuhan perekonomian di Sulawesi Selatan. Selain itu guna memberantas kemiskinan, menekan jumlah pengangguran serta kesenjangan antar daerah. Strategi yang dilakukan dalam melakukan pemberdayaan KUKM antara lain: a) Temu kemitraan rantai pasok KUKM; b) Memperluas jaringan pemasaran dengan mempertemukan investor, distribusi besar dengan para penyedia produk dan bahan baku di daerah; c) Memperbaiki kualitas usaha; 4) Menciptakan iklim usaha yang kondusif; 5) Menyediakan sarana prasarana usaha yang memadai. Capaian persentase koperasi yang terfasilitasi pemberdayaan pada tahun 2021 sesuai dengan target yang direncanakan.

Tabel II.243.
Persentase Koperasi yang terfasilitasi pemberdayaan
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017-2021

Indikator	Satuan	Tahun					
		2017	2018	2019	2020	Target 2021	Capaian 2021
Persentase Koperasi yang terfasilitasi pemberdayaan	%	3,00	4,00	7,00	5,00	30,00	30,00

Sumber : Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Prov. Sulawesi Selatan, Tahun 2021

2.3.2.11.9. Cakupan UMKM yang diberdayakan

Pada tahun 2021 persentase koperasi yang terfasilitasi pemberdayaan telah mencapai 30 persen, penciptaan tersebut dilakukan secara berkelanjutan kepada koperasi nelalui perluasan akses kepada pasar, mendampingi koperasi untuk dapat mengakses pembiayaan dengan cara membina penataan manajemen standarisasi dan restrukturisasi usaha. Sejak tahun 2019 Dinas Koperasi dan UKM menerima layanan konsultasi hukum bagi Koperasi dan UKM yang menemui permasalahan pada operasional pelaksanaan di masyarakat. Cakupan UMKM yang diberdayakan pada tahun 2021 melampaui target yang direncanakan dengan capaian 15 persen mengalami peningkatan dari tahun-tahun sebelumnya.

Tabel II.244.
Cakupan UMKM yang diberdayakan
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017-2021

Indikator	Satuan	Tahun					
		2017	2018	2019	2020	Target 2021	Capaian 2021
Cakupan UMKM yang diberdayakan	%	1,00	1,00	2,00	4,00	7,00	15,00

Sumber : Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Prov. Sulawesi Selatan, Tahun 2021

2.3.2.11.10. Persentase UMKM yang terfasilitasi Dalam Pengembangan Usaha

Proses pembangunan ekonomi provinsi Sulawesi selatan didasari oleh potensi keberhasilan masing-masing kabupaten/kota yang didukung oleh masyarakat, pengusaha kecil rumah tangga yang memiliki kapasitas yang baik, usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) memiliki peranan penting dan strategis dalam struktur perekonomian Indonesia karena memberikan pengaruh yang besar terhadap perekonomian Sulawesi Selatan. Pada tahun 2021 capaian persentase UMKM yang terfasilitasi dalam pengembangan usaha melampaui target yang direncanakan dengan capaian 30 persen mengalami peningkatan dari tahun-tahun sebelumnya.

Tabel II.245.
Persentase UMKM yang terfasilitasi Dalam Pengembangan Usaha
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017-2021

Indikator	Satuan	Tahun					
		2017	2018	2019	2020	Target 2021	Capaian 2021
Persentase UMKM yang terfasilitasi dalam pengembangan usaha	%	3,00	4,00	7,00	5,00	15,00	30,00

Sumber : Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Prov. Sulawesi Selatan, Tahun 2021

2.3.2.11.11. Cakupan Promosi Produk UMKM

Pengembangan UKM yang dilakukan antara lain dengan mendorong digitalisasi (pemanfaatan sarana teknologi yang tepat), membuka akses pembiayaan yang tepat dan ringan untuk pelaku usaha, serta menyediakan pembiayaan alternatif non bank yang akrab dengan masyarakat. Penyediaan akses pemasaran baik itu secara online maupun offline melalui Kerjasama dan mempertemukan UMKM yang telah memiliki stadarisasi berupa standarisasi produk yang dilakukan melalui kurasi produk, kurasi usaha, workshop peningkatan produk) untuk ditempatkan di area wisata, toko souvenir atau ruang pameran lainnya serta aksi lainnya yang bermanfaat bagi masyarakat untuk mendorong peningkatan sektor perekonomian di Sulawesi Selatan. Cakupan promosi produk UMKM pada tahun 2021 mencapai 1,7 persen melampaui target yang direncanakan serta mengalami peningkatan dari tahun-tahun sebelumnya.

Tabel II.246.
Cakupan promosi produk UMKM
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017-2021

Indikator	Satuan	Tahun					
		2017	2018	2019	2020	Target 2021	Capaian 2021
Cakupan promosi produk UMKM	%	0,10	0,10	0,30	0,20	1,00	1,70

Sumber : Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Prov. Sulawesi Selatan, Tahun 2021

2.3.2.12. Penanaman Modal dan Investasi

2.3.2.12.1. Persentase Peningkatan Pengelolaan Potensi Investasi yang dimanfaatkan oleh Investor

Pengelolaan potensi investasi yang dimanfaatkan oleh investor selama kurun waktu tiga tahun terakhir menunjukkan adanya peningkatan yakni pada tahun 2019 sebesar 40 persen, naik pada tahun berikutnya sebesar 60 persen dan pada tahun 2021 naik menjadi 75 persen. Rendahnya potensi investasi yang dimanfaatkan oleh calon investor pada tahun 2019 dan 2020 disebabkan karena belum tersedianya data dan informasi yang memadai dan masih banyaknya data potensi daerah yang belum diperbaharui. Adapun kenaikan pemanfaatan potensi investasi pada tahun 2021 merupakan hasil dari pemanfaatan teknologi informasi dalam menyebarluaskan potensi dan peluang investasi daerah serta pelaksanaan kegiatan pemberdayaan usaha daerah untuk membangun kemitraan dengan investor besar.

Tabel II.247.
Persentase Peningkatan Pengelolaan Potensi Investasi yang dimamfaatkan oleh Investor Provinsi Sulawesi SelatanTahun 2017– 2021

Indikator	Satuan	Tahun					
		2017	2018	2019	2020	Target 2021	Capaian 2021
Persentase Peningkatan Pengelolaan Potensi Investasi yang dimamfaatkan oleh Investor	%	Belum diukur		40,00	60,00	75,00	75,00

Sumber : Dinas Penanaman Modal dan PTSP Prov. Sulawesi Selatan Tahun 2021

2.3.2.12.2. Jumlah Realisasi PMA (Rp. Triliun)

Jumlah realisasi investasi dari tahun 2019 hingga 2021 mengalami fluktuasi selama kurun waktu 3 tahun terakhir, capaian realisasi investasi sektor PMA yang diraih pada tahun 2019 adalah sebesar Rp. 4,5 triliun kemudian mengalami peningkatan pada tahun 2020 sebesar Rp. 9,14 triliun. Jumlah realisasi PMA pada tahun 2021 mengalami penurunan serta belum mencapai target dengan capaian Rp. 2,85 triliun. Penurunan realisasi PMA pada tahun 2021 disebabkan oleh lumpuhnya kondisi ekonomi dunia imbas dari pandemi Covid-19 yang juga membatasi aktivitas masyarakat (PPKM/*Lockdown*).

Tabel II.248.
Jumlah Realisasi PMA (Rp. Triliun)
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017-2021

Indikator	Satuan	Tahun					
		2017	2018	2019	2020	Target 2021	Capaian 2021
Jumlah Realisasi PMA (Rp. Triliun)	(Rp. Triliun)	Belum diukur		4,50	9,14	3,50	2,85

Sumber : Dinas Penanaman Modal dan PTSP Prov. Sulawesi Selatan Tahun 2021

2.3.2.12.3. Jumlah Realisasi PMDN (Rp. Triliun)

Capaian indikator jumlah Realisasi PMDN tahun 2017 hingga 2018 tidak dilakukan pengukuran. Capaian realisasi investasi sektor PMDN juga mengalami fluktuasi yaitu sebesar Rp. 5,7 triliun capaian pada tahun 2019, namun pada tahun 2020 mengalami penurunan dengan capaian Rp. 3,4 triliun. Pada tahun 2021 jumlah realisasi PMDN mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya serta melampaui target yang ditetapkan dengan capaian Rp. 10,78 triliun.

Tabel II.249.
Jumlah Realisasi PMDN (Rp. Triliun)

Indikator	Satuan	Tahun					
		2017	2018	2019	2020	Target 2021	Capaian 2021
Jumlah Realisasi PMDN (Rp. Triliun)	(Rp. Triliun)	Belum diukur		5,70	3,40	4,50	10,78

Sumber:Dinas Penanaman Modal dan PTSP Prov.Sulawesi Selatan, Tahun 2021

2.3.2.12.4. Persentase Ketepatan Waktu Penyelesaian Izin yang Diterbitkan Sesuai SOP

Capaian indikator persentase Ketepatan Waktu Penyelesaian Izin yang Diterbitkan Sesuai SOP tahun 2017 hingga 2020 belum dilakukan pengukuran. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) untuk institusi pelayanan perizinan tahun 2021 sebesar 83,6 persen mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya sebesar 4,3 persen. Capaian ketepatan waktu penyelesaian dokumen perizinan dan non perizinan yang diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Sulawesi Selatan sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan pada tahun 2019 adalah sebesar 76 persen mengalami peningkatan pada tahun 2020 menjadi 78 persen. Pada tahun 2021 persentase ketepatan waktu penyelesaian dokumen perizinan dan non perizinan yang diterbitkan sesuai SOP belum mencapai target dengan capaian 78 persen. Beberapa dokumen yang penyelesaiannya belum tepat waktu diakibatkan oleh pertimbangan teknis yang kadang terlambat dikeluarkan oleh OPD teknis, sehingga hal tersebut akan mempengaruhi waktu penyelesaian dokumen perizinan.

Tabel II.250.
Persentase Ketepatan Waktu Penyelesaian Izin yang Diterbitkan Sesuai SOP Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017-2021

Indikator	Satuan	Tahun					
		2017	2018	2019	2020	Target 2021	Capaian 2021
Persentase Ketepatan Waktu Penyelesaian Izin yang Diterbitkan Sesuai SOP	%	Belum diukur		76,00	78,00	80,00	78,00

Sumber : Dinas Penanaman Modal dan PTSP Prov. Sulawesi Selatan, Tahun 2021

2.3.2.12.5. Persentase Perusahaan yang Taat Terhadap Ketentuan Peraturan Penanaman Modal

Capaian indikator persentase Perusahaan yang Taat Terhadap Ketentuan Peraturan Penanaman Modal tahun 2017 hingga 2018 belum dilakukan pengukuran. Jumlah perusahaan PMA dan PMDN yang beroperasi di Provinsi Sulawesi Selatan berjumlah kurang lebih sebesar 9.500 perusahaan. Dari keseluruhan perusahaan tersebut persentase ketaatan perusahaan PMA dan PMDN pada peraturan penanaman modal pada tahun 2019 adalah sebesar 40 persen, pada tahun 2020 mengalami peningkatan menjadi 45 persen. Pada tahun 2021 mencapai 50 persen sesuai dengan target yang ditetapkan. Masih rendahnya ketaatan perusahaan dalam hal ini mengirimkan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) diakibatkan oleh pemberlakuan Undang Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dimana salah satunya adalah perubahan pada pelaporan sistem manual menjadi pelaporan online. Hal ini belum banyak diketahui oleh para pelaku usaha, karena kurangnya sosialisasi dari pemerintah kepada pelaku usaha.

Tabel II.251.
Persentase Perusahaan yang taat Terhadap Ketentuan peraturan Penanaman modal Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017-2021

Indikator	Satuan	Tahun					
		2017	2018	2019	2020	Target 2021	Capaian 2021
Persentase Perusahaan yang taat Terhadap Ketentuan peraturan Penanaman modal	%	Belum diukur		40,00	45,00	50,00	50,00

Sumber : Dinas Penanaman Modal dan PTSP Prov. Sulawesi Selatan, Tahun 2021

2.3.2.12.6. Persentase Ketersediaan Data dan Informasi Pendukung Penanaman Modal

Capaian indikator persentase ketersediaan data dan informasi pendukung penanaman modal tahun 2017 hingga 2018 belum dilakukan pengukuran. Tahun 2019 persentase ketersediaan data dan informasi

pendukung penanaman modal adalah sebesar 65 persen. Mengalami peningkatan dari tahun 2019 menjadi 70 persen pada tahun 2020. Pada tahun 2021 persentase ketersediaan data dan informasi pendukung penanaman modal mencapai 80 persen sesuai dengan target yang ditetapkan. Pencapaian ini didukung oleh pemanfaatan teknologi informasi dalam mengelola data dan informasi pendukung penanaman modal serta meningkatnya koordinasi dengan Dinas Penanaman Modal dan PTSP kabupaten dan kota serta pelaku usaha melalui kegiatan sosialisasi dan pembinaan yang dilaksanakan secara rutin.

Tabel II.252.
Persentase ketersediaan data dan informasi pendukung penanaman modal Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017-2021

Indikator	Satuan	Tahun					
		2017	2018	2019	2020	Target 2021	Capaian 2021
Persentase ketersediaan data dan informasi pendukung penanaman modal	%	Belum diukur		65,00	70,00	80,00	80,00

Sumber : Dinas Penanaman Modal dan PTSP Prov. Sulawesi Selatan, Tahun 2021

2.3.2.13. Kepemudaan dan Olah Raga

2.3.2.13.1. Tingkat Partisipasi Pemuda Dalam Kegiatan Ekonomi Mandiri

Pemuda adalah potensi dan penerus perjuangan bangsa yang harus dipersiapkan sebagai kader masa depan. Kemajuan di berbagai bidang telah membawa dampak pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, termasuk kepada pemuda sebagai wirausahawan. Pengembangan kewirausahaan pemuda di Sulawesi Selatan dilakukan melalui pelatihan kewirausahaan pemuda yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan penyesuaian sikap seorang pemuda untuk menjadi wirausahawan. Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri di Provinsi Sulawesi Selatan dari tahun 2017 hingga tahun 2021 mengalami trend peningkatan. Peningkatan pemuda yang berwirausaha dikarenakan tingginya perhatian pemerintah terhadap peningkatan sumber daya manusia pemuda yang berwirausaha yang dilakukan melalui kegiatan pelatihan pengembangan kewirausahaan. Faktor penghambat pencapaian target partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri adalah belum adanya pendampingan wirausahawan muda dalam pengembangan usahanya yang dipandang penting dalam memaksimalkan potensinya. Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri pada tahun 2021 mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya serta melampaui target dengan capaian 0,23 persen. Jumlah pemuda yang berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi mandiri pada tahun 2021 sejumlah 4.795 orang.

Tabel II.253.
Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017-2021

Indikator	Satuan	Tahun					
		2017	2018	2019	2020	Target 2021	Capaian 2021
Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	%	0,04	0,07	0,07	0,16	0,19	0,23

Sumber: Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2021

2.3.2.13.2. Tingkat Partisipasi Pemuda Dalam Organisasi Kepemudaan Dan Organisasi Sosial

Peran pemuda sebagai generasi penerus bangsa sangat ditentukan pada pembinaan pemuda saat ini. Pembinaan pemuda dilakukan dengan melibatkan pemuda yang tergabung dalam Organisasi Kemasyarakatan Pemuda dalam pembangunan, namun keterlibatan dan kiprah organisasi pemuda di Sulawesi Selatan dari tahun 2017 hingga 2021 berfluktuasi, namun menunjukkan adanya trend peningkatan organisasi pemuda yang aktif. Peningkatan tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial di Sulawesi Selatan karena adanya Peratauran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembangunan Kepemudaan sebagai dasar dalam pembinaan dan pengembangan pemuda serta adanya sinergitas antara pemerintah dengan organisasi kepemudaan. Sementara faktor penghambat tingkat partisipasi pemuda adalah belum maksimalnya regenerasi dalam organisasi kepengurusan. Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial pada tahun 2021 mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya serta melampaui target dengan capaian 4,22 persen. Jumlah pemuda dalam organisasi kepemudaan dan sosial tahun 2021 sejumlah 96.726 orang.

Tabel II.254.
Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi social Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017-2021

Indikator	Satuan	Tahun					
		2017	2018	2019	2020	Target 2021	Capaian 2021
Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial	%	1,06	1,06	1,06	1,09	1,16	4,22

Sumber : Dinas Kepemudaan dan OlahragaProvinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2021

2.3.2.13.3. Persentase Peningkatan Prestasi Olah Raga

Olahraga adalah suatu aktivitas fisik yang bersifat positif yang dapat menyehatkan jasmani maupun rohani serta dapat mendorong, membina, serta mengembangkan potensi jasmani, rohani, dan sosial. Oleh sebab itu pembinaan

olahraga seharusnya dilakukan oleh masyarakat dan pemerintah untuk menjadikan olahraga sebagai ajang kompetisi dan prestasi. Setiap orang yang berolahraga tidak mempunyai tujuan yang sama, ada yang hanya untuk mencari kebugaran dan bagi seorang atlet tujuan utama berolahraga ialah ingin mendapatkan prestasi yang tinggi, sering disebut dengan prestasi olahraga. Berprestasi dikancah Nasional maupun Internasional, diantaranya melalui peningkatan pembinaan pelatih, pencarian bibit-bibit muda yang potensial, dan pembangunan sarana prasarana. Gambaran pembinaan olahraga di Sulawesi Selatan menunjukkan bahwa keberadaan pelatih yang bersertifikat berkontribusi terhadap peningkatan prestasi olahraga, namun tidak diikuti dengan upaya peningkatan pembinaan sehingga prestasi olahraga di Sulawesi Selatan menunjukkan adanya trend penurunan. Pembinaan cabang olah raga prestasi pada tahun 2019 hingga 2021 menjadi bagian dari binaan Dinas Kepemudaan dan Olahraga yang sebelumnya dikelola oleh Komite Olahraga Nasional Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan. Peningkatan prestasi olahraga di Sulawesi Selatan mengalami fluktuasi, pada tahun 2019 mengalami peningkatan yang signifikan dikarenakan pelaksanaan Pra PON menjadi bagian dari tugas Dinas Kepemudaan dan Olahraga, namu mengalami penurunan pada tahun 2020 yang disebabkan tidak adanya penyelenggaraan event olahraga, dan pada tahun 2021 mengalami peningkatan sengan capaian -0.84 persen.

Tabel II.255.
Persentase Peningkatan Prestasi olah raga
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017-2021

Indikator	Satuan	Tahun					
		2017	2018	2019	2020	Target 2021	Capaian 2021
Persentase Peningkatan Prestasi olah raga	%	0.14	4.1	2.9	-1	100	-0.84

Sumber : Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2021

2.3.2.13.4. Persentase Ketersediaan Sarana Dan Prasarana Olahraga

Berolahraga akan membuat badan sehat, terlebih lagi apabila menjadikan olahraga sebagai gaya hidup yang tentunya harus ditunjang dengan ketersediaan sarana dan prasarana yang refresentatif. Pembangunan sarana dan prasarana olahraga yang memiliki manfaat yang sangat strategis, tidak hanya bermanfaat untuk olahraga, tetapi juga untuk perkembangan ekonomi, pemassalan olahraga, peningkatan potensi atlet usia dini, pembinaan atlet pelajar maupun atlet professional. Indikator ketersediaan sarana dan prasarana yang dimaksud adalah pembangunan Stadion Mattoangin. Pembangunan Stadion Mattongin dimulai pada tahun 2019 hingga tahun 2021 mengalami peningkatan, namun pencapaian target pada tahun 2021 hanya mencapai 30 persen dari target 90 persen yang telah ditetapkan. Faktor pendukung pencapaian dari indikator ketersediaan sarana dan prasarana olahraga adalah telah tersusunnya beberapa dokumen persiapan dan perencanaan pembangunan stadion. Tahapan pelaksanaan pembangunan Stadion Mattoangin sebagai berikut:

a. Tahun 2019 telah dilaksanakan audit konstruksi, Reeleminasi desain.
b. Tahun 2020 telah dilaksanakan penyusunan dokumen Analisisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), dokumen Analisis Dampak Lalulintas (ANDALLALIN), Detail Engineering Design (DED) kapasitas 40 ribu penonton, Manajemen Konstruksi kapasitas 40 ribu penonton.
c. Tahun 2021 telah disusun manajemen konstruksi/pengawasan tahap II.

Pembangunan konstruksi fisik Stadion Mattoangin telah dianggarkan melalui skema anggaran Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) namun batal untuk digunakan, sehingga pembangunan fisik baru dapat dianggarkan pada tahun 2022 melalui pagu murni APBD Provinsi Sulawesi Selatan dengan pelaksanaan tender dini pada tangga 31 Desember 2021.

Tabel II.256.
Persentase ketersediaan sarana dan prasarana olahraga
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017-2021

Indikator	Satuan	Tahun					
		2017	2018	2019	2020	Target 2021	Capaian 2021
Persentase ketersediaan sarana dan prasarana olahraga	%	0	0	10,00	15,00	90,00	30,00

Sumber : Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2021

Grafik II. 30
Jumlah Gedung Olahraga Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2021

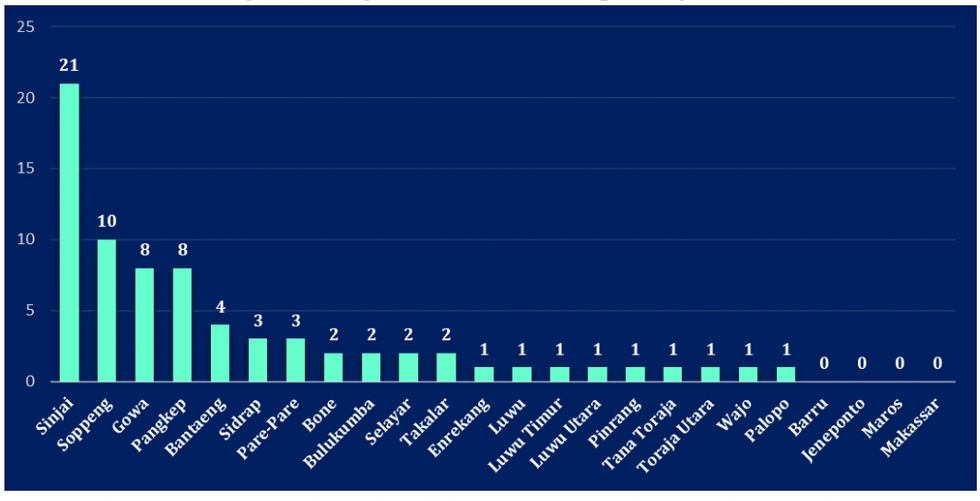

Sumber : Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2021

2.3.2.13.5. Persentase Organisasi Pramuka Aktif

Gerakan pramuka bertujuan untuk membentuk kepribadian yang beriman, bertaqwa, berakhlak mulia, berjiwa patriot, disiplin, dan menjunjung nilai-nilai luhur bangsa. Pembinaan organisasi pramuka di Sulawesi Selatan dilakukan melalui program pengembangan kapsitas kepramukaan dengan kegiatan pembinaan dan pengembangan organisasi kepramukaan. Organisasi gerakan Pramuka telah terbentuk dan aktif mulai dari tingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kota. Capaian target indikator oerganisasi pramuka yag aktif sesuai dengan target yang ditetapkan dengan capaian 100 persen. Jumlah organisasi pramuka aktif tahun 2021 sejumlah 25 organisasi.

Tabel II.257.
Persentase organisasi pramuka aktif
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017-2021

Indikator	Satuan	Tahun					
		2017	2018	2019	2020	Target 2021	Capaian 2021
Persentase organisasi pramuka aktif	%	100	100	100	100	100	100

Sumber : Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2021

2.3.2.14. Statistik

2.3.2.14.1. Cakupan Ketersediaan Data Statistik Sektoral

Cakupan Ketersediaan Data Statistik Sektoral mengalami peningkatan pada tahun 2021 sebesar 50 persen hal ini diperoleh dari jumlah data yang terkumpul pada Tahun 2021 telah mencapai 50 persen dari jumlah total statistik sektoral yang dibutuhkan. capaian indicator kinerja output yaitu 18 Laporan Hasil Pengelolaan Data Statistik Sektoral. capaian indikator kinerja output yaitu 16 Orang Peserta Peningkatan SDM. Capaian target kinerja program didukung antara lain melalui: a) Capaian indikator kinerja 4 Laporan Penyediaan Data Informasi yang terstruktur; b) Capaian indikator kinerja 3 Laporan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan yang terdiri dari laporan hasil pelaksanaan kegiatan peningkatan kapasitas kelembagaan, laporan hasil MoU tentang pembangunan Satu Data Sulawesi Selatan yang terintegrasi dengan Kab/Kota, dan laporan hasil MoU tentang Operator Data dengan OPD, serta c) Capaian indikator kinerja 1 Jenis Data Infrastruktur Pemerintah Daerah.

Tabel II.258.
Cakupan Ketersediaan Data Statistik Sektoral
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017-2021

Indikator	Satuan	Tahun					
		2017	2018	2019	2020	Target 2021	Capaian 2021
Cakupan Ketersediaan Data Statistik Sektoral	%	25,00	30,00	35,00	40,00	50,00	50,00

Sumber: Dinas Komunikasi Informatika Persandian Dan Statistik, Tahun 2021

2.3.2.15. Persandian

2.3.2.15.1. Persentase Komunikasi Daerah yang Memanfaatkan Persandian

Capaian indikator Kinerja *outcome* yaitu 50 persen daerah yang memanfaatkan persandian pada Program Penyelenggaraan Persandian mengalami peningkatan pada tahun 2021 telah mencapai 50 persen. Hal ini diperoleh dari jumlah pengguna tanda tangan elektronik dari jumlah pengguna layanan jaring komunikasi sandi. Capaian target kinerja didukung melalui: a) Capaian 6 Area Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi. Area keamanan Informasi terdiri dari tata kelola,

pengelolaan resiko, kerangka kerja, pengelolaan asset, teknologi, dan suplemen; b) Capaian indikator kinerja 3 Layanan Jaringan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah. Untuk pengamanan informasi pemerintah daerah didukung oleh: a) Capaian indikator kinerja 1 Usulan Rancangan Peraturan Daerah terkait Manajemen Keamanan Informasi; b) Capaian indikator kinerja 5 Orang aparatur pemerintah daerah yang telah mendapatkan peningkatan kompetensi/jumlah peserta penyelenggaraan forum komunikasi persandian daerah; c) Capaian indikator kinerja 2 Laporan Penyediaan Data Informasi yang terstruktur; d) Capaian indikator kinerja 2 Laporan Laporan Hasil Audit Keamanan Informasi di Lingkup Pemerintah Daerah; e) Capaian indikator kinerja 2 Layanan Keamanan Informasi yang dterapkan, yaitu layanan pengelolaan tanda tangan elektronik dan layanan penanggulangan pemulihan insiden siber; f) Capaian indikator kinerja 3 Jenis Entitas Jaringan Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah, yang terdiri dari JKS antar perangkat daerah (Pemprov dengan Kab/Kota), JKS internal perangkat daerah Prov.Sulsel (antar OPD lingkup Pemprov) dan JKS Eksternal (Pemprov dengan Instansi Pemerintah lainnya).

Tabel II.259.
Persentase Komunikasi daerah yang memanfaatkan persandian
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017-2021

Indikator	Satuan	Tahun					
		2017	2018	2019	2020	Target 2021	Capaian 2021
Persentase Komunikasi daerah yang memanfaatkan persandian	%	20,00	25,00	30,00	35,00	35,00	50,00

Sumber : Dinas Komunikasi Informatika Persandian Dan Statistik, Tahun 2021

2.3.2.16. Kebudayaan

2.3.2.16.1. Persentase Karya Budaya Yang Direvitalisasi Dan Inventarisasi

Capaian indikator jumlah Karya Budaya yang direvitalisasi dan diinventarisasi tahun 2017 hingga 2020 belum dilakukan pengukuran karena menyesuaikan Perubahan RPJMD 2018-2023. Capaian indikator tahun 2021 melampaui target disebabkan karena koordinasi yang baik dengan pemerintah pusat (Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kemendikbud R.I) maupun dengan Pemerintah Kabupaten/Kota. Dari 12 Karya Budaya yang diusulkan, ada 11 Karya Budaya dari enam Kabupaten di Sulawesi Selatan yang berhasil ditetapkan menjadi Warisan Budaya Tak Benda oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Tahun 2021.

Tabel II.260.
Persentase Karya Budaya yang direvitalisasi dan Inventarisasi
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017-2021

Indikator	Satuan	Tahun					
		2017	2018	2019	2020	Target 2021	Capaian 2021
Persentase Karya Budaya yang direvitalisasi dan Inventarisasi	%	Belum diukur				1,60	1,90

Sumber: Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Tahun 2020

2.3.2.16.2. Persentase Lembaga Sejarah yang di Fasilitasi

Capaian indikator persentase lembaga sejarah yang difasilitasi tahun 2017 hingga 2020 belum dilakukan pengukuran karena menyesuaikan Perubahan RPJMD 2018-2023. Capaian indikator tahun 2021 tidak mencapai target dengan tingkat capaian 78,5 persen dikarenakan lembaga sejarah yang ada di Kabupaten/Kota kesulitan untuk melakukan mobilisasi, serta kurangnya koordinasi dengan Dinas Kabupaten/Kota setempat.

Tabel II.261.
Persentase Lembaga Sejarah yang di Fasilitasi
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017-2021

Indikator	Satuan	Tahun					
		2017	2018	2019	2020	Target 2021	Capaian 2021
Persentase Lembaga Sejarah yang di Fasilitasi	%	Belum diukur				2,8	2,20

Sumber: Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Tahun 2020

2.3.2.16.3. Persentase Cagar Budaya yang Dilestarikan

Capaian indikator persentase Cagar Budaya yang dilestarikan tahun 2017 hingga 2020 belum dilakukan pengukuran karena menyesuaikan Perubahan RPJMD 2018-2023. Tahun 2021 capaian indikator melampaui target yang direncanakan, dari target 5 Cagar Budaya menjadi 6 Cagar budaya yang dilestarikan. Adapun kegiatan yang dilaksanakan guna mendukung tercapainya indikator yaitu melalui kegiatan Pembuatan Galeri Museum La Pawawoi Karaeng Sigeri Kabupaten Bone dan Perbaikan Ringan Rumah Adat Saoraja Bilokka Kab. Sidrap, Perbaikan Rumah Adat Bugis, Perbaikan Rumah Adat Mandar, Pemeliharaan Museum Karaeng Pattingalloang, dan Pemeliharaan Baruga Benteng Somba Opu.

Tabel II.262.
Persentase Cagar Budaya yang dilestarikan
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017-2021

Indikator	Satuan	Tahun					
		2017	2018	2019	2020	Target 2021	Capaian 2021
Persentase Cagar Budaya yang dilestarikan	%	Belum diukur				0,48	0,57

Sumber: Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Tahun 2020

2.3.2.16.4. Persentase Kunjungan ke Musium

Capaian indikator persentase kunjungan ke musium tahun 2017 hingga 2020 belum dilakukan pengukuran karena menyesuaikan Perubahan RPJMD 2018-2023. Tahun 2021 capaian indikator persentase kunjungan ke museum mencapai target yang telah ditetapkan sebesar 100 persen. Hal ini dikarenakan adanya kegiatan sosialisasi dan pelatihan ke sekolah-sekolah (SD dan SMP) melalui kegiatan Museum Masuk Sekolah/Belajar Bersama di Museum, selain itu beberapa kegiatan pameran yang menarik minat masyarakat berkunjung ke museum.

Tabel II.263.
Persentase Kunjungan ke Musium
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017-2021

Indikator	Satuan	Tahun					
		2017	2018	2019	2020	Target 2021	Capaian 2021
Persentase Kunjungan ke musium	%	Belum diukur				100	100

Sumber: Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Tahun 2020

2.3.2.17. Perpustakaan

2.3.2.17.1. Jumlah Pengunjung Perpustakaan Per Tahun

Capaian Jumlah pengunjung Perpustakaan baik elektronik dan konvensional pada tahun 2021 sejumlah 154.913 yang merupakan pengunjung dengan jenis kelamin Perempuan dan Laki-laki sesuai dengan Rekap data statsistik triwulan pada Unit Pelayanan terpadu Perpustakaan Umum di 4 (Empat) Gedung layanan Perpustakaan yang ada di bawah kewenangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Jumlah ini merupakan perhitungan data dari layanan perpustakaan umum dan juga layanan perpustakaan elektronik yang menjadi solusi pemenuhan kebutuhan pemustaka yang terbatasi oleh kebijakan pemerintahan dalam masa pandemi covid-19.

Grafik II. 31
Jumlah Perpustakaan Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2021

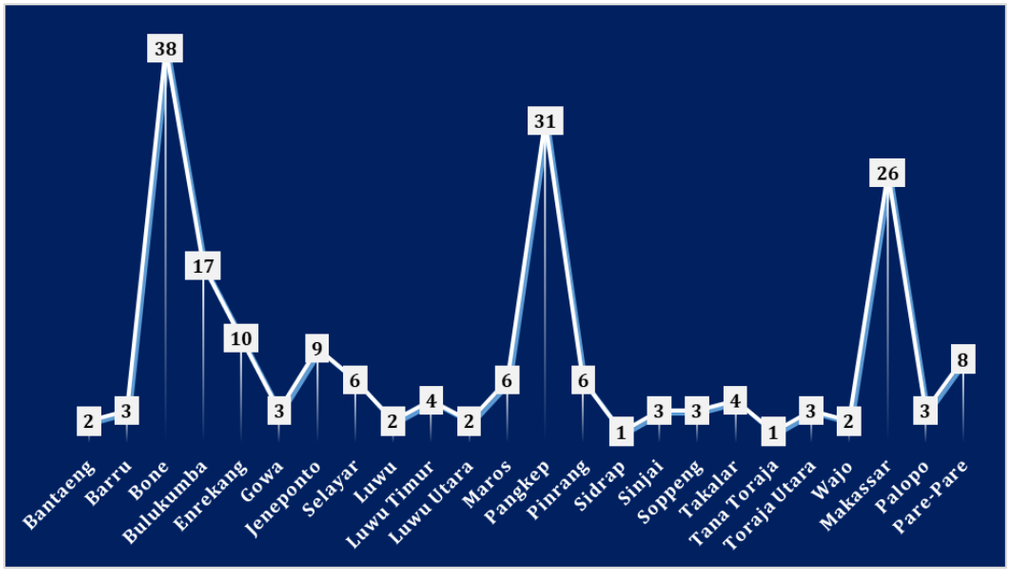

Sumber : Dinas Arsip dan Perpustakaan Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2021

Capaian jumlah pengunjung perpustakaan melampaui target, namun jumlah ini jauh menurun dibandigkan capaian tahun sebelumnya, hal ini disebabkan oleh dampak pandemi covid-19 yang mana adanya pembatasan jam layanan operasional dan juga jumlah pengunjung setiap harinya. Namun secara umum layanan perpustakaan tetap dapat memberikan pelayanan bagi pemustaka yang ingin atau yang membutuhkan bahan pustaka selama pandemi meskipun tidak maksimal sehingga jumlah pengunjung pada tahun ini menalami penurunan. Hal lain yang juga menjadi hambatan adalah karena sosialisasi terkait layanan pada perpustakaan elektronik masih belum maksimal sehingga pemanfaatannya juga belum optimal.

Tabel II.264.
Pengunjung Perpustakaan Per tahun
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017-2021

Indikator	Satuan	Tahun					
		2017	2018	2019	2020	Target 2021	Capaian 2021
Jumlah Pengunjung Perpustakaan Per Tahun	Orang	621.306	732.403	1.098.180	106.933	150.000	154.913

Sumber : Dinas Arsip dan Perpustakaan Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2021

2.3.2.17.2. Persentase Naskah Kuno yang di Lestarikan

Persentase Naskah Kuno yang dilestarikan setiap tahunnya mengalami peningkatan, namun pada capaian tahun ini yang naskah kuno dapat dilestarikan sebanyak 1.213 lembar atau sebanyak 80,86 persen dari target keseluruan adalah 1.500 lembar, hal ini disebabkan adanya pengurangan jumlah anggaran yang di refocusing pada awal tahun 2021, sehingga dalam

kegiatan pelestarian naskah mengalami penurunan capaian. Namun pada dasarnya capaian ini sudah sangat meningkat dibandingkan pada tahun 2020 yang hanya mencapai 30,10 persen atau hanya sebesar 322 lembar dari target 1.000 lembar, hal ini dikarenakan oleh dampak pandemi covid-19 yang membatasi layanan dan pelaksanaan kegiatan pelestarian pada Unit Pelayanan Terpadu Jasa Kearsipan. Faktor pendorong mendorong capaian ini adalah banyaknya permintaan dari masyarakat dan minat dari Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang menginginkan pelestarian naskah kuno.

Tabel II.265.
Persentase naskah kuno yang di lestarikan
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017-2021

Indikator	Satuan	Tahun					
		2017	2018	2019	2020	Target 2021	Capaian 2021
Persentase naskah kuno yang di lestarikan	%	64,08	54,33	42,33	30,10	100	80,86

Sumber : Dinas Arsip dan Perpustakaan Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2021

2.3.2.18. Kearsipan

2.3.2.18.1. Peningkatan Persentase Perangkat daerah yang mengelola arsip secara baku

Jumlah Perangkat Daerh yang mengelola arsip secara baku untuk tahun 2021 adalah sebesar 33,30 persen atau 25 perangkat daerah, melampaui target 18,87 persen. Hal ini disebabkan oleh aktifnya dan respons positif dari Lembaga Kearsipan Daerah yang menindaklanjuti kebijakan pemerintah tentang pentingnya pengelolaan arsip secara baku di masing-masing instansi pemerintah untuk kemudahan dalam menelusuri arsip sebagai alat bukti dalam administrasi pemerintah dan juga sebagai identitas bangsa. Keaktifan para arsiparis dalam melaksanakan pembinaan pada instansi pemerintah dan juga swasta dalam pengelolaan arsip dinamis dan statis. Pembinaan ini dilakukan sebagai langkah tertib arsip pada instansi sesuai dengan kebijakan pemerintah yang di tuangkan dalam Perka ANRi, dan juga merupakan indikator penilaian Reformasi Birokrasi bagi instansi pemerintah. Atas dorongan inilah maka seluruh arsiparis yang diberikan tanggungjawab dalam pembinaan pengelolaan arsip terus menindaklanjuti agar tata kelola arsip di Provinsi Sulawesi Selatan semakin baik dai tahun ketahun. Namun faktor penghambat pencapaian target adalah jumlah arsip yang harus dikelola atau di berikan pembinaan terikat oleh regulasi dalam pelaksanaan pembinaan.

Tabel II.266.
Persentase Perangkat daerah yang mengelola arsip secara baku
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017-2021

Indikator	Satuan	Tahun					
		2017	2018	2019	2020	Target 2021	Capaian 2021
Persentase Perangkat daerah yang mengelola arsip secara baku	%	62,00	65,00	56,00	40,00	18,87	33,30

Sumber : Dinas Arsip dan Perpustakaan Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2021

2.3.3. Layanan Urusan Pilihan

2.3.3.1. Pariwisata

2.3.3.1.1. Persentase Peningkatan Destinasi Wisata Menjadi Destinasi Wisata Unggulan

Persentase peningkatan destinasi wisata menjadi destinasi wisata unggulan di Provinsi Sulawesi selatan pada tahun 2021 hanya mengalami peningkatan sebesar 0,2 %, hal ini mengalami penurunan dari tahun 2020 yang peningkatannya mencapai 0,4 persen. Wisata unggulan merupakan wisata yang mempunyai pengaruh perting dalam pertumbuhan ekonomi, social dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam dan daya dukung. Capaian pesentase peningkatan destinasi wisata menjadi destinasi wisata unggulan belum mencapai target yang ditetapkan, kondisi ini disebabkan oleh fokus pengembangan wisata lebih diarahkan pada peningkatan minat wisatawan melalui promasi wisata. Adapun peningkatan destinasi wisata menjadi wisata unggulan dilaksanakan pada pengembangan destinasi kawasan geopark Maros-Pangkep dan Benteng Somba Opu. Data selengkapnya pada tabel berikut.

Tabel II.267.
Persentase peningkatan destinasi wisata menjadi destinasi wisata unggulan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017-2021

Indikator	Satuan	Tahun					
		2017	2018	2019	2020	Target 2021	Capaian 2021
Persentase peningkatan destinasi wisata menjadi destinasi wisata unggulan	%	0	0,3	0,2	0,4	0,5	0,2

Sumber : Dinas Kebudayaan dan Kepariwisataan Prov. Sulsel, Tahun 2022

2.3.3.1.2. Persentase Kab/Kota yang memiliki Kawasan Wisata Halal

Kawasan wisata halal menjadi salah satu indikator yang diperhitungkan dalam menilai capaian pada urusan layanan pilihan untuk pariwisata. Wisata halal merupakan konsep yangr relatif baru yang merupakan adopsi dari Negara-negara non organisasi Konferensi Islam (OKI) yang melihat potensi besar dari pertumbuhan Muslim Dunia. Mengingat wisata halal merupakan konsep yang relatif baru sehingga pengukuran indikator ini di Provinsi Sulawesi Selatan baru dilakukan tahun 2019. Capaian tahun 2021 menunjukkan nilai yang belum mencapai target yang ditetapkan sebesar 12,5 persen atau 3 Kabupaten/kota dari 24 kabupaten/kota yang terdapat di Sulawesi Selatan, namun capaian yang diperoleh pada tahun 2021 baru pada 2 kabupaten yaitu Kabupaten Maros dan Kabupaten Pangkep. hal ini dipengaruhi oleh persyaratan yang ditetapkan untuk wisata halal berupa hotel, tempat ibadah sajian dalam restoran belum sepenuhnya disesuaikan dengan konsep wisata halal yang ditetapkan, disamping itu sosialisasi terhadap kawasan wisata halal baru dilaksanakan pada 2 Kabupaten tersebut. Data selengkapnya pada tabel berikut.

Tabel II.268.
Persentase Kab/Kota yang memiliki kawasan wisata halal
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017-2021

Indikator	Satuan	Tahun					
		2017	2018	2019	2020	Target 2021	Capaian 2021
Persentase Kab/Kota yang memiliki kawasan wisata halal	%	0	0	4,20	8,30	12,5	8,30

Sumber : Dinas Kebudayaan dan Kepariwisataan Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2022

2.3.3.1.3. Kunjungan Wisata (Wisatawan Nusantara)

Kunjungan wisatan nusantara atau wisatawan domestik di Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2021 mulai mengalami perbaikan seiring dengan usaha pemulihan ekonomi pada masa pandemic covid 19, kebijakan kelonggaran dalam pembatasan aktivitas mendorong masyarakat local untuk melakukan kunjungan pada obyek-obyek wisata lokal yang mulai dilakukan pembenahan kembali. Data selengkapnya terlihat pada tabel berikut.

Tabel II.269.
Kunjungan wisata (Wisatawan Nusantara)
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017-2021

Indikator	Satuan	Tahun					
		2017	2018	2019	2020	Target 2021	Capaian 2021
Kunjungan wisata (Wisatawan Nusantara)	%	139	134	114	4,21	100	77,16

Sumber : Dinas Kebudayaan dan Kepariwisataan Prov. Sulsel, Tahun 2022

2.3.3.1.4. Kunjungan wisata (Wisatawan Mancanegara)

Kunjungan wisatawan mancanegara masuk ke Sulawesi Selatan terus mengalami penurunan dari tahun 2018 hingga tahun 2021, kondisi ini tidak terlepas dari pandemic Covid 19, yang memberlakukan kebijakan pembatasan dan larangan masuk ke Indonesia. Kondisi ini juga berdampak terhadap tidak tercapainya target yang ditetapkan sebesar 100% dengan kunjungan wisata sebanyak 87.500 kunjungan pada tahun 2021. Data selengkapnya terlihat pada tabel berikut.

Tabel II.270.
Kunjungan Wisata (Wisatawan Mancanegara)
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017-2021

Uraian	Satuan	Tahun					
		2017	2018	2019	2020	Target 2021	Capaian 2021
Kunjungan Wisata (Wisatawan Mancanegara)	%	128	131	58,27	4,52	100	4,17

Sumber :Dinas Kebudayaan dan Kepariwisataan Prov. Sulsel, Tahun 2022

2.3.3.1.5. Persentase Sub Sektor Ekonomi Kreatif yang Dikembangkan

Perkembangan ekonomi kreatif sering disebut sebagai salah satu tulang punggung perekonomian di Indonesia. Terdapat 17 sub sector ekonomi kreatif di Indonesia yang terdiri dari pengembangan permainan, arsitektur, desain interior, music, seni rupa, desain produk, fesyen, kuliner, film, animasi dan video, fotografi, desain komunikasi, telivisi dan radio, kriya, periklanan, seni pertunjukan, penerbitan dan aplikasi. Dari ke 17 sub sektor tersebut, 3 sub sektor yang dikembangkan di Provinsi Sulawesi Selatan, melalui kegiatan workshop desian produk ekonomi kreatif (Sub sector desain produk), workshop fotografi ekonomi kreatif (sub sector fotografi) dan workshop pengembangan ekonomi kreatif untuk sub sector fashion, sehingga capaian yang diperoleh adalah 17,64 persen, nilai tersebut pada dasarkan telah melampaui target yang ditetapkan. Data selengkapnya pada tabel berikut.

Tabel II.271.
Persentase Sub Sektor Ekonomi Kreatif yang Dikembangkan Di Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2017-2021

Indikator	Satuan	Tahun					
		2017	2018	2019	2020	Target 2021	Capaian 2021
Persentase Sub Sektor ekonomi kreatif yang dikembangkan	%	0	13	19	13	13	17,64

Sumber : Dinas Kebudayaan dan Kepariwisataan Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2022.

2.3.3.1.6. Persentase Sumber Daya Manusia Pariwisata yang Mendapatkan Pelatihan

Pelatihan terhadap Sumber Daya Manusia Pariwisata mulai dilaksanakan kembali pada tahun 2021, setelah tahun sebelumnya tidak dapat dilaksanakan akibat pembatasan aktivitas sebagai dampak dari pandemic covid 19. Capaian tahun 2017 belum diukur sebab indikator ini menyesuaikan dengan indikator program yang terdapat pada perubahan RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan. Data selengkapnya pada tabel berikut.

Tabel II.272.
Persentase Sumber Daya Manusia Pariwisata yang Mendapatkan Pelatihan Di Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2017-2021

Indikator	Satuan	Tahun					
		2017	2018	2019	2020	Target 2021	Capaian 2021
Persentase Sumber Daya Manusia Pariwisata yang mendapatkan Pelatihan	%	Belum diukur	1,22	1,08	0,00	3,18	1,45

Sumber : Dinas Kebudayaan dan Kepariwisataan Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2022

2.3.3.1.7. Persentase Pelaku Usaha Ekonomi Kreatif yang Mendapatkan Pelatihan

Pelatihan terhadap pelaku usaha ekonomi kreatif telah dilaksanakan sejak tahun 2017. Persentase pelaku usaha ekonomi kreatif yang mendapatkan pelatihan mengalani fluktuasi dan capaian untuk tahun 2021 melampaui target yang ditetapkan, hal ini disebabkan meningkatnya minat masyarakat dalam tahap pemulihan ekonomi dalam masa covid 19, khususnya yang bergerak pada sub sektor fashion, fotografi dan desain produk. Capaian tahun 2017 belum diukur sebab indikator ini menyesuaikan dengan indikator program yang terdapat pada perubahan RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan. Data selengkapnya pada tabel berikut.

Tabel II.273.
Persentase pelaku usaha ekonomi kreatif yang mendapatkan pelatihan
Di Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2017-2021

Indikator	Satuan	Tahun					
		2017	2018	2019	2020	Target 2021	Capaian 2021
Persentase pelaku usaha ekonomi kreatif yang mendapatkan pelatihan	%	Belum diukur	12	15	11	7,4	12

Sumber : Dinas Kebudayaan dan Kepariwisataan Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2022.

2.3.3.2. Pertanian

2.3.3.2.1. Pertanian Tanaman Pangan

2.3.3.2.1.1. Jumlah produksi Talas Satoimo (Ton)

Pengembangan tanaman Talas Satoimo dilaksanakan oleh pemerintah Sulawesi Selatan karena tanaman ini memiliki kandungan kolagen dan antioksidan tinggi dan merupakan salah satu komoditas ekspor unggulan. Produksi talas satoimo tahun 2021 belum mencapai target yang ditetapkan, hal ini disebabkan oleh perubahan iklim yang berakibat banjir pada beberapa wilayah yang menjadi lokasi penanaman komoditas ini seperti Kabupaten Bantaeng, Jeneponto, Takalar, Bone dan Soppeng, sementara itu jenis komoditas ini tidak dapat terkena banjir selama musim tanam 5 bulan. Data selengkapnya terkait produksi komoditas talas satoimo pada tabel berikut.

Tabel II.274.
Jumlah produksi Talas Satoimo (Ton)
Di Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2017-2021

Indikator	Satuan	Tahun					
		2017	2018	2019	2020	Target 2021	Capaian 2021
Jumlah produksi Talas Satoimo (Ton)	Ton	0	0	0	7.214	7.000	6.104

Sumber : Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Prov. Sulsel, Tahun 2022

2.3.3.2.2. Luas Areal Pengengembangan Jeruk Keprok Selayar (Ha)

Pengembangan Jeruk Keprok Selayar sejak tahun 2017 hingga tahun 2021 terus mengalami peningkantan luas areal penanama. Perkembangan sangat pesat mulai tahun 2018 yang mengalami penambahan luas areal sebesar 334,16 Ha. Angka yang dicapai tahun 2018 pada dasarkan telah melampaui target yang ditetapkan untuk tahun 2021 yang sebesar 100 Ha. Peningkatan luas areal pengembangan jeruk keprok selayar tahun 2021 sebesar 10,97%, penambahan luas areal ini didorong oleh adanya pemberian bantuan bibit baik yang berasal dari APBD maupun dari APBN di tahun 2021. Data selengkapnya pada tabel berikut.

Tabel II.275.
Luas Areal Pengengembangan Jeruk Keprok Selayar (Ha)
Di Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2017-2021

Indikator	Satuan	Tahun					
		2017	2018	2019	2020	Target 2021	Capaian 2021
Luas Areal Pengembangan Jeruk Keprok Selayar (Ha)	Ha	11,27	345,43	550,88	568,63	100	630,99

Sumber: Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Prov. Sulsel, Tahun 2022

2.3.3.2.3. Kontribusi Sub Sektor Pertanian, Palawija, Produksi Sektor Pertanian, Kontribusi Sektor Perkebunan, Produksi Sektor Perkebunan dan Kontribusi Produksi Kelompok Petani Terhadap PDRB

Capaian beberapa indikator yang terkait dengan bidang urusan pertanian menunjukkan bahwa kontribusi sektor pertanian/perkebunan mulai mengalami peningkatan setelah tahun 2019 menurun dari capaian tahun 2018. Kontribusi sektor pertanian menjadi penyumbang terbesar terhadap nilai PDRB provinsi Sulawesi Selatan dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, hal ini menunjukkan bahwa sektor pertanian masih menjadi sektor andalan dalam mendorong perekonomian di Sulawesi Selatan. Adapun indikator kontribusi sektor perkebunan (tanaman keras) terhadap PDRB merupakan satu-satunya indikator yang melampaui target yang ditetapnya dengan tingkat pelampauan sebesar 115,34 persen, hal ini didorong oleh peningkatan produksi dari komoditas pala, kakao, cengkeh, kopi arabika, kepala hibrida dan kelapa dalam. Data selengkapnya pada tabel berikut

Tabel II.276.
Kontribusi Sub Sektor Pertanian, Palawija, Produksi Sektor Pertanian, Kontribusi Sektor Perkebunan, Produksi Sektor Perkebunan Kontribusi Produksi Kelompok Petani Terhadap PDRB di Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2017-2021

Indikator	Satuan	Tahun					
		2017	2018	2019	2020	Target 2021	Capaian2021*
Kontribusi Sektor Pertanian/Perkebunan Terhadap PDRB*	%	23,13	22,54	21,35	21,72	23,94	22,55
Kontribusi sektor pertanian (palawija) terhadap *PDRB*	%	7,55	7,16	6,34	6,50	8,69	6,33
Produksi sektor pertanian	Trilyun Rp	231,64	225,89	60,19	156,62	125,64	398,62
Kontribusi Sektor Perkebunan (Tanaman Keras) Terhadap PDRB	%	4,33	4,26	3,88	3,94	1,89	4,07
Produksi sektor perkebunan	Trilyun Rp	8,75	11,19	10,95	8,60	11	10,91

Sumber : BPS Prov. Sulsel, 2022

2.3.3.2.4. Produktivitas Padi, Jagung, Kopi dan Kakao

Produktivitas tanaman padi, jagung, kopi dan kakao tahun 2021 menunjukkan capaian yang melampaui target. Capaian untuk tanaman padi didorong oleh bantuan benih bersertifikat, pupuk yang tepat, peningkatan SDM petani dan penyuluh, penanganan serangan hama dan penyakit serta pola taman yang baik. Untuk komoditas jagung, capaian yang melampaui target dipengaruhi oleh penggunaan benih jagung yang bersertifikat, pemakaian pupuk yang tepat dan berimbang, menanganan serangan hama dan penyakit serta penimgkatan SDM dan penyuluh pertanian. Peningkatan capaian produktivitas yang melampaui target pada komoditas jagun dipengaruhi oleh adanya kegiatan intensifikasi kopi dan peremajaan kopi arabikayang dilakukan dibeberapa kabupaten yang merupakan sentra tanaman kopi. Produktivitas komoditas kakao yang melampaui target didorong oleh adanya peremajaan kakao pada daerah-daerah sentra kakao di Provinsi Sulawesi Selatan. Data selengkapnya terlihat pada tabel berikut.

Tabel II.277.
Produktivitas Padi, Jagung, Kopi dan Kakao
Di Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2017-2021

Indikator	Satuan	Tahun					
		2017	2018	2019	2020	Target 2021	Capaian 2021
Produktifitas Padi	Kw/Ha	50,93	50,12	50,03	48,23	48,95	49,46
Produktifitas Jagung	kw/Ha	56,83	55,89	56,49	54,04	54,10	55,31
Produtifitas Kopi	kg/Ha	624	669	612	628	588	647
Produktifitas Kakao	kg/Ha	779	807	792	776	634	814

Sumber: Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Prov. Sulsel, Tahun 2022

2.3.3.2.5. Peningkatan Ketersediaan Alat dan Mesin Pertanian

Capaian penigkatan ketersediaan alat dan mesin pertanian tahun 2021 sangat tinggi yaitu 18.462 unit melebihi target yang ditetapkan. Hal ini disebabkan oleh meningkatnya bantuan alat-alat pertanian baik dari sumber pendanaan APBD maupun dari APBN. Data selengkapnya pada tabel berikut.

Tabel II.278.
Peningkatan Ketersediaan Alat dan Mesin Pertanian
Di Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2017-2021

Indikator	Satuan	Tahun					
		2017	2018	2019	2020	Target 2021	Capaian 2021
Peningkatan Ketersediaan Alat dan Mesin Pertanian	Unit	792	198	713	10.401	250	18.462

Sumber: Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Prov. Sulsel, Tahun 2022

2.3.3.2.6. Peningkatan Ketersediaan Pupuk

Peningkatan ketersediaan pupuk tahun 2021 menunjukkan peningkatan yang sangat baik, sehingga melampaui target yang ditetapkan, hal ini menjawab kelangkaan pupuk yang sering dikeluhkan petani dalam aktivitas pertanianya. Capaian tahun 2017 belum dilakukan pengukuran, sebab indikator tersebut menyesuaikan dengan indikator program yang terdapat dalam perubahan RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan. Data selengkapnya terlihat pada tabel berikut.

Tabel II.279.
Peningkatan Ketersediaan Pupuk
Di Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2017-2021

Indikator	Satuan	Tahun					
		2017	2018	2019	2020	Target 2021	Capaian 2021
Peningkatan Ketersediaan Pupuk	Ton	Belum diukur	132,63	256,34	381,30	298,65	775,23

Sumber: Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Prov. Sulsel, Tahun 2022

2.3.3.2.7. Nilai Hilirisasi Produk Tanaman Pangan, Nilai Hilirisasi Produk Perkebunan

Tabel II.280.
Nilai Hilirisasi Produk Tanaman Pangan, Nilai Hilirisasi Produk Perkebunan Di Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2017-2021

Indikator	Satuan	Tahun					
		2017	2018	2019	2020	Target 2021	Capaian 2021
Nilai Hilirisasi Produk Tanaman Pangan	Rp (000)	0	0	0	0	460.835.232	392.483.722
Nilai Hilirisasi Produk Perkebunan	Rp (000)	0	9.231.917	9.176.092	6.766.032.	6.000.000.	6.144.952

Sumber: Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Prov. Sulsel, Tahun 2022

2.3.3.2.8. Persentase Penurunan Serangan OPT

Penurunan serangan organisme penyerang tanaman (OPT) di Provinsi Sulawesi Selatan mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, namun kondisi ini belum mencapai target yng direncanakan, sebab masih terdapat lahan budidaya yang masih mengalami serangan OPT. serangan OPT tersebut juga dipicu oleh kurang tepatnya pengendalian OPT yang dilakukan petani secara swadaya. Dalam hal pengendalian secara swadaya banyak ditemukan petani menggunakan pestisida tidak sesuai dengan aturan, seperti jenis pestisida yg digunakan tdk tepat, pencampuran pestisida dengan berbagai jenis pencampur

seperti deterjen, oli, dan lainnya yang justru akan memicu terjadinya resistensi. Langkah pencegahan penyebaran yang lebih luas, perlu dilakukan melalui kesiagaan dan mengintensifkan pengamatan. Capaian tahun 2017 belum dilakukan pengukuran, sebab indikator tersebut menyesuaikan dengan indikator program yang terdapat dalam perubahan RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan. Capaian persentese penurunan serangan OPT di Provinsi Sulawesi Selatan selama tahun 2017 – 2021 ditunjukkan pada tabel berikut.

Tabel II.281.
Persentase Penurunan Serangan OPT
Di Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2017-2021

Indikator	Satuan	Tahun					
		2017	2018	2019	2020	Target 2021	Capaian 2021
Persentase Penurunan Serangan OPT (%)	%	Belum diukur	1.11	1,11	1,79	4,7	2,00

Sumber: Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Prov. Sulsel, Tahun 2022

2.3.3.2.9. Rasio Ketersediaan Penyuluh Pertanian dan Pelaku Utama Petani, Penyuluh/KEP

Rasio ketersediaan penyuluh pertanian dan pelaku utama petani penyuluh/KEP relatif sama selama 5 tahun terakhir, kondisi ini menunjukkan bahwa tidak terjadi perubahan jumlah penyuluh dan kelompok tani yang dibina, hal ini menunjukkan bahwa setiap 1 orang penyuluh membina 2 kelompok tani yang telah sesuai dengan target yang direncanakan. Data selengkapnya pada tabel berikut.

Tabel II.282.
Rasio Ketersediaan Penyuluh Pertanian dan Pelaku Utama Petani,
Penyuluh/KEP Di Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2017-2021

Indikator	Satuan	Tahun					
		2017	2018	2019	2020	Target 2021	Capaian 2021
Rasio Ketersediaan Penyuluh Pertanian dan Pelaku Utama Petani, Penyuluh/KEP	Rasio	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5

Sumber: Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Prov. Sulsel, Tahun 2022

2.3.3.3. Peternakan

2.3.3.3.1. Produktivitas Hasil Peternakan

Produktivitas hasil peternakan Provinsi Sulawawesi Selatan terhadap 3 jenis produksi ternak yaitu daging, telur dan susu menunjukkan hasil produksi yang melampaui target pada komoditas telur dan susu, hal ini didorong oleh peningkatan populasi ungags untuk produksi telur dan

peningkatan populasi sapi perah untuk komoditas susu. Adapun komoditas daging hanya mencapai 71,16 persen dari target yang ditetapkan, hal ini dipengaruhi oleh kondisi perekonomian nasional yang masih dalam tahap pemulihan yang menunjukkan daya beli masyarakat terhadap produksi ini masih rendah. Disamping itu belum optimalnya keberfungsian hotel, restoran dan kantin pada masa pandemik covid 19 berdampak pada hambatan distribusi daging pada ketiga outlet tersebut, sehingga produksi daging sapi hanya mengandalkan pada konsumsi rumah tangga. Data selengkapnya pada tabel berikut.

Tabel II.283.
Produktivitas Hasil Peternakan
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017-2021

Jenis Produksi	Satuan	Produktivitas Hasil Peternakan					
		2017	2018	2019	2020	Target 2021	Capaian 2021
Daging	Ton	126,958	136,711	150,462	97,071	167.936	119.502
Telur	Ton	151,100	170,767	250,289	254,468	191.968	251.210
Susu	Ton	3,053	3,173	1,888	1,991	2.035	2.400

Sumber: Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, Tahun 2022

2.3.3.3.2. Nilai Hilirisasi Produksi Peternakan

Capaian nilai hilirisasi produksi peternakan yang tidak sesuai target dipengaruhi oleh tidak tercapainya target produksi daging di tahun 2021, hal ini juga disebabkan karena daya beli masyakat yang rendah terdapat produk ini akibat melemahnya tingkat pendapatan masyarakat dan belum optomalnya fungsi hotel dan restoran yang merupakan konsumen yang cukup besar terhadap produk ini dimasa pandemic covid 19. Data selengkapnya pada tabel berikut.

Tabel II.284.
Nilai Hilirisasi Produksi Peternakan
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017-2021

Indikator	Satuan	Tahun					
		2017	2018	2019	2020	Target 2021	Capaian 2021
Nilai Hilirisasi Produksi Peternakan	Rp	0	0	10.233.714.519	29.493.840.000	29.494.000.000	26.861.154.720

Sumber : Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, Tahun 2022

2.3.3.3.3. Jumlah Kasus Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS)

Jumlah kasus penyakit hewan menular stategis yang ditangani di Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2021 menunjukkan capaian yang sesuai dengan target yang telah ditetapkan, hal ini ditunjang oleh kesiapan sumberdaya manusia dan fasilitas sarana dan prasarana penunjang yang terdiri atas obat hewan, vaksin dan vitamin serta materi pendukung lainnya. Data selengkapnya pada tabel berikut.

Tabel II.285.
Jumlah Kasus Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS)
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017-2021

Indikator	Satuan	Tahun					
		2017	2018	2019	2020	Target 2021	Capaian 2021
Jumlah Kasus Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS)	Kasus	NA	6.195	6.474	31.329	25.063	25.063

Sumber : Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, Tahun 2022

2.3.3.3.4. Persentase Unit Usaha Yang Memiliki Rekomendasi Usaha Obat Hewan

Capaian pada indikator unit usaha yang memiliki rekomendasi usaha obat hewan di provinsi Sulawesi Selatan menunjukkan persentase yang belum mencapai target pada tahun 2021. Kondisi ini disebabkan karena masih rendahnya dukungan kebijakan daerah dan system pengawasan yang dapat mendorong pencapaian target terhadap usaha unit obat hewan yang beroperasi. Disamping itu usaha distribusi atau layanan obat hewan tersebar diseluruh wilayah kabupaten dengan jumlah yang besar, sehingga diperlukan suatu system yang lebih mudah dalam pelaksanaannya, Syatem tersebut tidak dapat dipisahkan dengan system perizinan lainnya. Data selengkapnya pada tabel berikut.

Tabel II.286.
Persentase Unit Usaha Yang Memiliki Rekomendasi Usaha Obat Hewan
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017-2021

Indikator	Satuan	Tahun					
		2017	2018	2019	2020	Target 2021	Capaian 2021
Persentase Unit Usaha Yang Memiliki Rekomendasi Usaha Obat Hewan	%	0	0	0	0	15	12

Sumber : Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, Tahun 2022

2.3.3.3.5. Rasio Ketersediaan Penyuluh Terhadap Kelompok Tani/Ternak

Rasio ketersediaan penyuluh terhadap kelompok tani/ternak menunjukkan bahwa capaian indikator tersebut tahun 2021 telah melampaui target, dimana nilai rasio yang diperoleh menunjukkan bahwa 1 penyuluh melayani 10 kelompok tani/ternak, sehingga dapat mendukung dalam optimalisasi dalam transfer ilmu dan tehnologi peternakan yang dapat diterapkan oleh kelompok ternak yang ada. Data selengkapnya pada tabel berikut.

Tabel II.287.
Rasio Ketersediaan Penyuluh Terhadap Kelompok Tani/Ternak
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017-2021

Indikator	Satuan	Tahun					
		2017	2018	2019	2020	Target 2021	Capaian 2021
Rasio Ketersediaan Penyuluh Terhadap Kelompok Tani/Ternak	Rasio	Belum diukur	1:4	1:3	1:6	1:15	1:10

Sumber : Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, Tahun 2022

2.3.3.4. Kehutanan

2.3.3.4.1. Cakupan luas lahan kritis yang direhabilitasi

Cakupan lahan kritis yang direhabilitasi di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021 telah melampaui target yang ditetapkan. Cakupan luas lahan kritis yang direhabilitasi tahun 2017 hingga 2021 menunjukkan peningkatan setiap tahunnya,, hal ini disebabkan karena program rehabilitasi lahan kritis merupakan salah satu program prioritas pada Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan. Penambahan luas lahan kritis yang direhabilitasi, data selengkapnya pada tabel berikut.

Tabel II.288.
Cakupan luas lahan kritis yang direhabilitasi
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017-2021

Indikator	Satuan	Tahun					
		2017	2018	2019	2020	Target 2021	Capaian 2021
Cakupan luas lahan kritis yang direhabilitasi	%	48,48	48,61	55,59	60,27	57,91	65,61

Sumber:Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022

2.3.3.4.2. Persentase Kerusakan Hutan Pertahun

Persentase kerusahakan hutan di Provinsi Sulawesi selatan menunjukkan capaian yang semakin baik setiap tahunnya dengan kecenderungan yang semakin menurun. Data tahun 2021 menunjukkan capaian yang telah melampaui target yang ditetapkan sebesar 17,59 persen dengan persentase kerusakan hutan sebesar 0.08. Hal ini didorong oleh kegiatan rehabilitasi dan pengawasan yang dilakukan terhadap aktivitas penebangan liar yang sering terjadi pada kawasan hutan. Data selengkapnya pada tabel berikut.

Tabel II.289.
Persentase Kerusakan Hutan pertahun
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017-2021

Indikator	Satuan	Tahun					
		2017	2018	2019	2020	Target 2021	Capaian 2021
Luas Kerusakan Kawasan Hutan	Ha	25,18	310.783	362.264	12.440		2.088
Luas Kawasan Hutan	Ha	2.725,796	2.145.031	2.078.486	1.780.029		2.610.060
Persentase Kerusakan Hutan pertahun	%	0,0092	14,49	17,43	0,70	17,59	0,08

Sumber : Dinas Kehutanan, Provinsi Sulawesi Selatan, tahun 2022

2.3.3.4.3. Jumlah produksi hasil hutan bukan kayu

Jumlah produksi hasil hutan non kayu tahun 2021 menunjukkan capaian yang sangat tinggi dari target yang telah ditetapkan. Kenaikan produksi yang sangat significan ini dipengaruhi oleh terobosan yang dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan produktivitas hutan produksi yang ada, termasuk pengembangan hasil hutan bukan kayu. Produksi hasil hutan bukan kayu diperoleh dari produksi kelompok rotan, kelompok getah dan kelompok resin, namun kontribusi terbesar berasal dari kelompok rotan dengan jumlah produksi sebesar 1.268,84 ton pada tahun 2021. Provinsi Sulawesi Selatan berkontrobusi sebesar 8,88 persen dari total produksi hasil hutan bukan kayu. Data produksi hasil hutan bukan kayu selengkapnya pada tebel berikut.

Tabel II.290.
Jumlah produksi hasil hutan bukan kayu
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017-2021

Produksi Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)	Satuan	Tahun					
		2017	2018	2019	2020	Target 2021	Capaian 2021
Sulawesi Selatan	Ton	170,56	1.145,70	2.260,46	5.086,83	283	3.318,82
Indonesia	Ton	62.724,09	201.836,92	429.584,00	559.116,93	NA	229.384,89

Sumber : Sistem Informasi Kementeraian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2022

2.3.3.4.4. Jumlah produksi hasil hutan kayu olahan

Produksi hasil hutan kayu olahan menunjukkan penurunan dibanding capaian tahun sebelum, namun kondisi ini masih melampaui target yang ditetapkan ditahun 2021. Capaian tersebut berasal dari kelompok komoditi kayu gergajian, kayu lapis dan veener, dengan nilai produksi tersebsar berasal dari kayu lapis. Data selengkapnya pada tabel berikut.

Tabel II.291.
Jumlah produksi hasil hutan kayu olahan
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017-2021

Indikator	Satuan	Tahun					
		2017	2018	2019	2020	Target 2021	Capaian 2021
Jumlah produksi hasil hutan kayu olahan	M3	186.261	205.218	181.390	152.733	92.336,62	137.931,37

Sumber : BPS, tahun 2022

2.3.3.4.5. Jumlah jenis tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi dan/atau tidak masuk dalam lampiran (Appendix) CITES untuk kewenangan daerah provinsi yang terdata

Jumlah jenis tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi dan/atau tidak masuk dalam lampiran (Appendix) CITES untuk kewenangan daerah provinsi yang terdata di Provinsi Sulawesi Selatan sebabnyak 2 jenis, sedangkan data tahun 2017 hingga 2020 belum dipetakan sebab indikator ini baru ditetapkan target capaiannya pada perubahan RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan. Data selengkapnya pada tabel berikut.

Tabel II.292.
Jumlah jenis tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi dan/atau tidak masuk dalam lampiran (Appendix) CITES untuk kewenangan daerah provinsi yang terdata di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017-2021

Indikator	Satuan	Tahun					
		2017	2018	2019	2020	Target 2021	Capaian 2021
Jumlah jenis tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi dan/atau tidak masuk dalam lampiran (Appendix) CITES untuk kewenangan daerah provinsi yang terdata	Jenis	Belum dipetakan				2	2

Sumber : Dinas Kehutanan, Provinsi Sulawesi Selatan, tahun 2020

2.3.3.4.6. Persentase Jumlah Pemegang izin perhutanan sosial yang menjalankan pengelolaan dan pemanfaatan sesuai aturan

Persentase jumlah pemegang izin perhutanan social yang menjalankan pengelolaan dan pemanfaatan sesuai aturan dari tahun 2019 hingga tahun 2021 menunjukkan capaian yang terus meningkat, dan tahun 2021 telah melampaui target yang ditetapkan. Hal ini menunjukkan bahwa pemanfaatan perhutanan social telah semakin tertib dan dilengkapi dengan izin yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang. Data selengkapnya pada tabel berikut.

Tabel II.293.
Persentase Jumlah Pemegang izin perhutanan sosial yang menjalankan pengelolaan dan pemanfaatan sesuai aturan
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017-2021

Indikator	Satuan	Tahun					
		2017	2018	2019	2020	Target 2021	Capaian 2021
Persentase Jumlah Pemegang izin perhutanan sosial yang menjalankan pengelolaan dan pemanfaatan sesuai aturan	%	Belum diukur		12,19	15,8	15,65	24,04

Sumber : Dinas Kehutanan, Provinsi Sulawesi Selatan, tahun 2022

2.3.3.4.7. Jumlah DAS yang direhabilitasi

Berdasrkan Perda No. 10 Tahun 2015 tentang pengelolaan Daerah Alirn Sungai (DAS) disebutkan bahwa terdapat 7 DAS Lintas Provinsi, 27 DAS Lintas Kabupaten, dan 507 DAS Kabupaten. Jumlah DAS yang direhabilitasi dari tahun 2019 hingga tahun 2021 tidak mengalami perubahan sesuai target yang ditetapkan. Sedangkan DAS lainnya tetap dipertahankan kondisinya. Data jumlah DAS yang direhabilititasi selangkapnya pada tabel berikut

Tabel II.294.
Jumlah DAS yang direhabilitasi
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017-2021

Indikator	Satuan	Tahun					
		2017	2018	2019	2020	Target 2021	Capaian 2021
Jumlah DAS yang direhabilitasi	DAS	NA	NA	2	2	2	2

Sumber : Dinas Kehutanan, Provinsi Sulawesi Selatan, tahun 2020

2.3.3.5. Energi dan Sumber Daya Mineral

2.3.3.5.1. Persentase Rumah Tangga Pengguna Listrik

Persentase rumah tangga pengguna listrik di provinsi Sulawesi Selatan dari tahun 2017 hingga tahun 2021 menunjukkan kecenderungan peningkatan, meskipun demikian target yang ditetapkan untuk capaian tahun 2021 belum dapat dicapai, capaian tahun 2021 adalah 99,94 persen. Hal ini disebabkan oleh kebutuhan listrik yang semakin meningkat dan sementara dampak dari pandemic covid 19 membuat daya beli masyarakat semakin menurun. Data selengkapnya pada tabel berikut.

Tabel II.295.
Presentase Rumah Tangga Pengguna Listrik
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017-2021

Jenis	Satuan	Tahun					
		2017	2018	2019	2020	Target 2021	Capaian 2021
Persentase rumah tangga pengguna listrik	%	93,19	95,53	97,80	97,53	98,25	98,20

Sumber : Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, Tahun 2020

2.3.3.5.2. Persentase Desa Berlistrik (Prioritas Desa Kepulauan)

Persentase desa berlistrik di Provinsi Sulawesi Selatan dalam 5 tahun terakhir terus mengalami peningkatan meskipun belum mencapai target yang ditetapkan di tahun 2021. Kondisi ini dipengaruhi oleh masih terdapat desa-desa yang berada di kepalauan dan desa terpencil yang belum terjangkau dengan listrik sebanyak 1,15 persen. Data selengkapnya terlihat pada tabel berikut.

Tabel II.296.
Persentase Desa Berlistrik (Prioritas Desa Kepulauan)
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017-2021

Indikator	Satuan	Tahun					
		2017	2018	2019	2020	Target 2021	Capaian 2021
Desa Berlistrik	Desa	2.804	2.903	2.985	2.989	2.232	2.221
Jumlah Desa	Desa	3.030	3.030	3.030	3.030	2.255	2.255
Rasio Desa Berlistrik	(%)	92,51	95,8	98,51	98,64	99	98,49

Sumber : Dinas Energi Sumber Daya Mineral, Tahun 2022

2.3.3.5.3. Persentase Pelayanan Usaha Air Tanah Berbasis Konservasi

Capaian persentase layanan usaha air tanah berbasis konservasi pada tahun 2021 telah melampaui target yang ditetapkan. Factor yang mendukung capaian tersebut adalah semakin banyaknya pelaku usaha melakukan perizinan usaha air tanah, sehingga konservasi air tanah demi lingkungan dapat tercapai, disamping itu pendataan cakupan air tanah yang berwawasan konservasi sehingga cekungan air tanah menjadi acuan penbuatan tata ruang yang baik. Data selengkapnya pada tabel berikut.

Tabel II.297.
Persentase Pelayanan Usaha Air Tanah Berbasis Konservasi
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017-2021

Indikator	Satuan	Tahun					
		2017	2018	2019	2020	Target 2021	Capaian 2021
Persentase Pelayanan Usaha Air Tanah Berbasis Konservasi	(%)	NA	94	98,18	235	70	100

Sumber : Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, Tahun 2022

2.3.3.5.4. Luas Wilayah Izin Usaha Pertambangan (Komoditas Batuan, Non Logam, Non Logam Jenis Tertentu)

Capaian Luas Wilayah Izin Usaha Pertambangan (Komoditas Batuan, Non Logam, Non Logam Jenis Tertentu) tahun 2021 menunjukkan nilai 320 Ha, capaian ini tidak mencapai target yang ditetapkan sebsar 100.000 Ha, kondisi ini disebabkan oleh kewenangan provinsi untuk sector minerba telah dialihkan ke pemerintah pusat sehingga dinas ESDM Provinsi hanya melakukan fungsi penyiapan wilayah yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Data selengkapnya pada tabel berikut.

Tabel II.298.
Luas Wilayah Izin Usaha Pertambangan (Komoditas Batuan, Non Logam, Non Logam Jenis Tertentu)
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017-2021

Indikator	Satuan	Tahun					
		2017	2018	2019	2020	Target 2021	Capaian 2021
Luas Wilayah Izin Usaha Pertambangan (Komoditas Batuan, Non Logam, Non Logam Jenis Tertentu)	HA	NA	130	0	0	100.000	320

Sumber : Dinas Energi Sumber Daya Mineral, Tahun 2022

2.3.3.5.5. Penentuan dan Penetapan Blok WIUP Mineral (Komoditas Batuan, Non Logam, Non Logam Jenis Tertentu)

Capaian untuk indikator Penentuan dan Penetapan Blok WIUP Mineral (Komoditas Batuan, Non Logam, Non Logam Jenis Tertentu) pada tahun 2021 menunjukkan capaian yang tidak sesuai dengan target yang ditetapkan dan indikator tersebit baru diukur pada tahun 2021. Data selengkapnya pada tabel berikut.

Tabel II.299.
Penentuan dan Penetapan Blok WIUP Mineral (Komoditas Batuan, Non Logam, Non Logam Jenis Tertentu) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017-2021

Indikator	Satuan	Tahun					
		2017	2018	2019	2020	Target 2021	Capaian 2021
Penentuan dan Penetapan Blok WIUP Mineral (Komoditas Batuan, Non Logam, Non Logam Jenis Tertentu)	HA	NA	0	0	0	50.000	6.320

Sumber : Dinas Energi Sumber Daya Mineral, Tahun 2020

2.3.3.5.6. Persentase Penggunaan Gas Rumah Tangga

Capaian penggunaan gas rumah tangga di Provinsi Sulawesi Selatan Pada Tahun 2021 belum mencapai target yang diharapkan, kondisi ini disebabkan oleh masih terdapat 10 % masyarakat pedesaan dan daerah terpencil masih menggunakan kayu bakar dan minyak tanah serta penyediaan

gas elpiji 3 kg yang belum mencapai daerah terpencil. Data selengkapnya pada tabel berikut.

Tabel II.300.
Persentase Penggunaan Gas Rumah Tangga
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017-2021

Indikator	Satuan	Tahun					
		2017	2018	2019	2020	Target 2021	Capaian 2021
Persentase Penggunaan Gas Rumah Tangga	%	NA	86,89	88,47	90	92	91,67

Sumber : Dinas Energi Sumber Daya Mineral, Tahun 2022

2.3.3.6. Perdagangan

2.3.3.6.1. Persentase Rekomendasi SIUP MB yang dikeluarkan

Capaian rekomendasi Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Keras (SIUP MB) tahun 2021 menunjukkan nilai 0 yang berarti bahwa tidak terdapat izin usaha perdagangan minuman keras yang dikeluarkan untuk diperdagangkan secara bebas. Data selengkapnya pada tabel berikut.

Tabel II.301.
Persentase Rekomendasi SIUP MB yang dikeluarkan
Di Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2017-2021

Indikator	Satuan	Tahun					
		2017	2018	2019	2020	Target 2021	Capaian 2021
Persentase Rekomendasi SIUP MB yang dikeluarkan	%		20	0	20	100	0

Sumber : Dinas Perdagangan Provinsi Sulawesi Selatan, tahun 2020

2.3.3.6.2. Persentase Penerbitan SKA

Surat keterangan asal (SKA) atau Certificate of Origin (COO) merupakan sertifikat asal barang yang menyatakan asal dari barang yang diekspor. Capaian penerbitan surat keterangan asal (SKA) oleh dinas Perdagangan Provinsi Sulawesi Selatan menunjukkan capapain yang melampaui target pada tahun 2021. Kondisi ini seiring dengan peningkatan nilai ekspor dari tahun 2020 yang sebesar US$ 1.474,36 menjadi US$ 1.866,46 di tahun 2021 atau sebesar sebesar 26,60 persen. Data selengkapnya pada tabel berikut.

Tabel II.302.
Persentase Penerbitan SKA
Di Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2017-2021

Indikator	Satuan	Tahun					
		2017	2018	2019	2020	Target 2021	Capaian 2021
Persentase Penerbitan SKA	%	100	100	100	100	100	116,4

Sumber : Dinas Perdagangan Provinsi Sulawesi Selatan, tahun 2022

2.3.3.6.3. Persentase Ketersediaan Sarana Distribusi Perdagangan

Sarana distribusi perdagangan berupa sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2014 tentang perdagangan telah dirsedia di Provinsi Sulawesi Selatan. Sarana perdagangan tersebut adalah pasar rakyat, pusat perbelanjaan, took swalayan, gudang, perkulakan, pasar lelang komoditas, pasar berjangka komoditas dan sarana lainnya seperti terminal. Olehnya itu capaian untuk persentase ketersediaan sarana distribusi perdagangan adalah 100 persen dari tahun 2017 hingga tahun 2021, sebagaimana termuat pada tabel berikut.

Tabel II.303.
Persentase Ketersediaan Sarana Distribusi Perdagangan
Di Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2017-2021

Indikator	Satuan	Tahun					
		2017	2018	2019	2020	Target 2021	Capaian 2021
Persentase Ketersediaan Sarana Distribusi Perdagangan	%	100	100	100	100	100	100

Sumber : Dinas Perdagangan Provinsi Sulawesi Selatan, tahun 2022

2.3.3.6.4. Persentase barang kebutuhan pokok dan barang penting yang dapat dikendalikan harganya

Capaian indikator ini menunjukkan bahwa seluruh jenis barang kebutuhan pokok dan barang penting sejak tahun 2017 hingga tahun 2021 dapat dikendalikan harganya. Data selengkapnya pada tabel berikut.

Tabel II.304.
Persentase barang kebutuhan pokok dan barang penting yang dapat dikendalikan harganya Di Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2017-2021

Indikator	Satuan	Tahun					
		2017	2018	2019	2020	Target 2021	Capaian 2021
Persentase barang kebutuhan pokok dan barang penting yang dapat dikendalikan harganya	%	100	100	100	100	100	100

Sumber : Dinas Perdagangan Provinsi Sulawesi Selatan, tahun 2022

2.3.3.6.5. Nilai Ekspor Perdagangan

Nilai ekspor perdagangan tahun 2021 menunjukkan capaian yang telah melampaui target, kondisi ini didukung oleh peningkatan ekspor dari sector non migas dari $ 2.170,5 juta pada tahun 2020 menjadi $2.571,2 Juta pada tahun 2021, data selengkapnya pada tabel berikut.

Tabel II.305.
Nilai Ekspor Perdagangan Di Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2017-2021

Indikator	Satuan	Tahun					
		2017	2018	2019	2020	Target 2021	Capaian 2021
Nilai Ekspor Perdagangan	Juta $	1.185	1.445	1.557	1.474	1.466	1.869

Sumber : BPS, tahun 2022

2.3.3.6.6. Persentase Barang Beredar yang Diawasi, Tertib Niaga dan Pengaduan Konsumen

Persentase barang beredar dan diawasi, tertib niaga dan pengaduan konsumen menunjukkan kecenderungan peningkatan dari tahun 2019 hingga 2021, meskipun demikian capaian tahun 2021 belum sesuai dengan target yang ditetapkan. Data selengkapnya terlihat pada tabel berikut

Tabel II.306.
Persentase Barang Beredar yang Diawasi, Tertib Niaga dan Pengaduan Konsumen Di Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2017-2021

Indikator	Satuan	Tahun					
		2017	2018	2019	2020	Target 2021	Capaian 2021
Persentase Barang Beredar yang diawasi, tertib niaga dan Pengaduan Konsumen	%	NA	100	64,53	35,22	100	75

Sumber : Dinas Perdagangan Provinsi Sulawesi Selatan, tahun 2022

2.3.3.6.7. Persentase Jenis Produk Pelaku Usaha yang Memenuhi Standar Perdagangan Retail

Capaian persentase jenis produk usaha yang memenuhi standar perdagangan retail menunjukkan peningkatan dari tahun 2019 hingga tahun 2021. Target yang ditetapkan tahun 2021 telah terlampaui.

Tabel II.307.
Persentase jenis produk pelaku usaha yang memenuhi standar Perdagangan retail Di Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2017-2021

Indikator	Satuan	Tahun					
		2017	2018	2019	2020	Target 2021	Capaian 2021
Persentase jenis produk pelaku usaha yang memenuhi standar Perdagangan retail	%	NA	75	75	87,50	100	140

Sumber : Dinas Perdagangan Provinsi Sulawesi Selatan, tahun 2022

2.3.3.7. Perindustrian

2.3.3.7.1. Persentase pertumbuhan jumlah industry

Capaian persentase jumlah industry tahun 2021 belum mencapai target yang telah ditetapkan. Meskipun demikian capian di tahun 2021 telah mengalami peningkatan yang signifikan dari -7,81 persen ditahun 2020 menjadi 4,9 persen ditahun 2021. Kondisi ini disebabkan karena perkembangan industri baru mulai bertumbuh seiring usaha pemulihan ekonomi pada ditahun 2020. Capaian persentase pertumbuhan jumlah industry selengkapnya pada tabel berikut.

Tabel II.308.
Persentase pertumbuhan jumlah industri Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017-2021

Indikator	Satuan	Tahun					
		2017	2018	2019	2020	Target 2021	Capaian 2021
Persentase pertumbuhan jumlah industri	%	NA	- 3,14	3,40	-7,81	5	4,9

Sumber : Dinas Perindustrian Prov. Sulsel, Tahun 2022

2.3.3.7.2. Persentase peningkatan pengendalian izin usaha industri

Pengendalian izin usaha industri mengalami peningkatan dari tahun 2020 hingga tahun 2021, namun capaian tersebut belum mencapai target tahun 2021. Sehingga masih dibutuhkan usaha yang lebih optimal untuk pengendalian izin usaha industri. Data selengkapnya pada tabel berikut.

Tabel II.309.
Persentase peningkatan pengendalian izin usaha industri Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017-2021

Indikator	Satuan	Tahun					
		2017	2018	2019	2020	Target 2021	Capaian 2021
Persentase peningkatan pengendalian izin usaha industri	%		8	6	1,4	2	1,78

Sumber : Dinas Perindustrian Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2022

2.3.3.7.3. Persentase peningkatan pengelolaan SIINAS

Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS) merupakan suatu mekanisme untuk mempermudah dan mempercepat proses penyampaian data yang berasal dari dunia usaha kepada pemerintah. Persentase capaian pengelolaan SIINAS diprovinsi Sulawesi Selatan belum mencapai target, sehingga perlu usaha-usaha pengelolaan terhadap system informasi tersebut agar dapat berfungsi lebih optimal. Capaian tahun 2017 belum diukur pada tahun 2017, sebab indikator yang digunakan menyesuaikan dengan indikator program yang tersaji pada perubahan RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan. Data selengkapnya pada tabel berikut.

Tabel II.310.
Persentase peningkatan pengelolaan SIINAS
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017-2021

Indikator	Satuan	Tahun					
		2017	2018	2019	2020	Target 2021	Capaian 2021
Persentase peningkatan pengelolaan SIINAS	%	Belum di ukur	0	1	1,4	2	1,97

Sumber: Dinas Perindustrian Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2022

2.3.3.8. Transmigrasi

2.3.3.8.1. Presentase Penempatan Transmigrasi

Persentase penempatan transmigrasi pada tahun 2021 sesuai target yang ditetapkan. Penempatan transmigrasi dilakukan pada kawasan transmigrasi yang terdapat di Provinsi Sulawesi selatan, masing-masing di Kabupaten Luwu, Luwu Utara, Luwu Timur, Wajo, Soppeng dan Kota Palopo. Persentase penempatan transmigrasi di Sulawesi Selatan Capaian tahun 2017 belum diukur pada tahun 2017, sebab indikator yang digunakan menyesuaikan dengan indikator program yang tersaji pada perubahan RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan. Data selengkapnya pada tabel berikut.

Tabel II.311.
Persentase penempatan transmigrasi
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017-2021

Indikator	Satuan	Tahun					
		2017	2018	2019	2020	Target 2021	Capaian 2021
Persentase penempatan transmigrasi	%	Belum diukur	100	100	0	100	100

Sumber: Dinas tenaga kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2022

2.3.3.8.2. Persentase Transmigrasi yang Dilatih Untuk Dapat Lebih Mandiri

Pesentase transmigrasi yang dilatih untuk lebih mandiri telah mencapai target yang ditetapkan ditahun 2021. Capaian tahun 2017 belum diukur pada tahun 2017, sebab indikator yang digunakan menyesuaikan dengan indikator program yang tersaji pada perubahan RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan. Data selengkapnya pada tabel berikut.

Tabel II.312.
Persentase Transmigrasi Yang Dilatih Untuk Dapat Lebih Mandiri
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017-2021

Indikator	Satuan	Tahun					
		2017	2018	2019	2020	Target 2021	Capaian 2021
Persentase Transmigrasi yang Dilatih untuk Dapat Lebih Mandiri	%	Belum diukur	100	100	100	100	100

Sumber : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawei Selatan, tahun 2022

2.3.3.8.3. Persentase Ketersediaan data Sarana dan Prasarana Transmigrasi

Lokasi transmigrasi yang terdapat di Provinsi Sulawesi Selatan berupa lahan dan permukiman berdasarkan data capaian yang diperoleh menunjukkan bahwa sara dan prasana tersebut tersedia 100 persen sejak tahun 2017. Data selengkapnya pada tabel berikut.

Tabel II.313.
Persentase Ketersediaan Data Sarana dan Prasarana Transmigrasi
Provinsi Sulaweesi Selatan Tahun 2017 – 2021

Indikator	Satuan	Tahun					
		2017	2018	2019	2020	Target 2021	Capaian 2021
Persentase Ketersediaan Data Sarana dan Prasarana Transmigrasi	%	100	100	100	100	100	100

2.3.3.9. Kelautan dan Perikanan

2.3.3.9.1. Produksi Garam Rakyat

Produksi garam rakyat di tahun 2021 mengalami penurunan dan tidak mencapai target yang telah ditetapkan. Kondisi ini disebabkan karena banyaknya curah hujan ditahun 2021 yang mengahbat proses produksi dcamping bencana banjir yang terjadi pada sentra produksi garam diprovinsi Sulawesi Selatan, seperti di Kabupaten Jeneponto. Capaian tahun 2017 belum diukur pada tahun 2017, sebab indikator yang digunakan menyesuaikan

dengan indikator program yang tersaji pada perubahan RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan. Data selengkapnya pada tabel berikut.

Tabel II.314.
Produksi garam rakyat
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017-2021

Indikator	Satuan	Tahun					
		2017	2018	2019	2020	Target 2021	Capaian 2021
Produksi garam rakyat	Ton	Belum diukur	86.712	140.338,87	45.310,5	46.500	1.155

Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2022

2.3.3.9.2. Cakupan Ketersediaan Sarana dan Prasarana Pendukung Produksi Perikanan

Cakupan ketersediaan sarana dan prasarana pendukung produksi perikanan terus mengalami peningkatan hingga tahun 2021, namun belum mencapai target yang diharapkan. Kondisi ini dipengaruhi oleh masih terbatasnya jumlah bantuan sarana produksi perikanan yang dapat diberikan dibanding jumlah kebutuhan pembudidaya ikan dan nelayan yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan. Capaian tahun 2017 belum diukur pada tahun 2017, sebab indikator yang digunakan menyesuaikan dengan indikator program yang tersaji pada perubahan RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan. Data selengkapnya terlihat pada tabel berikut.

Tabel II.315.
Cakupan Ketersediaan Sarana dan Prasarana Pendukung Produksi Perikanan Di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017-2021

Indikator	Satuan	Tahun					
		2017	2018	2019	2020	Target 2021	Capaian 2021
Cakupan Ketersediaan Sarana dan Prasarana Pendukung Produksi Perikanan	%	Belum diukur	0	6,52	8,70	50,17	28,28

Sumber: Dinas Kelautan dan Pekanan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022

2.3.3.9.3. Cakupan Bina Kelompok Nelayan

Cakupan bina kelompok nelayan yang menunjukkan capaian yang meningkat dari tahun 2020 hingga tahun 2021, meskipun capaian tahun 2021 belum sesuai target yang diharapkan, hal ini didorong oleh semakin meningkatnya kesadaran nelayan untuk membentuk kelompok sebagai salah satu persyaratan untuk mendapatkan bantuan dan mendapatkan pembinaan dari pemerintah. Selengkapnya pada tabel berikut.

Tabel II.316.
Cakupan Bina Kelompok Nelayan
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017-2021

Indikator	Satuan	Tahun					
		2017	2018	2019	2020	Target 2021	Capaian 2021
Cakupan Bina Kelompok Nelayan	%	25.32	16.08	17.52	6.69	23,89	18,47

Sumber: Dinas Kelautan dan Pekanan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022

2.3.3.9.4. Persentase Produksi perikanan Kelompok Nelayan

Produksi perikanan kelompok nelayan pada tahun 2021 telah mengalami peningkatan dibanding capaian tahun sebelumnya, meskipun kondisi ini belum mencapai target yang telah ditetapkan. Hal ini disebabkan oleh pengaruh perubahan cuaca ekstrim yang menghambat aktivitas nelayan dalam melaksanakan kegiatan penangkapan ikan yang sering terjadi ditahun 2021. Hal ini menunjukkan bahwa produksi perikanan dari kelompok nelayan masih kurang, dibanding produksi perikanan yang berasal bukan dari kelompok nelayan seperti perusahaan penangkapan yang diusahakan oleh pihak swasta, serta produksi ikan yang berasal dari kegiatan budiaya perikanan.Data selengkapnya pada tabel berikut.

Tabel II.317.
Persentase Produksi perikanan kelompok nelayan
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017-2021

Indikator	Satuan	Tahun					
		2017	2018	2019	2020	Target 2021	Capaian 2021
Jumlah Produksi Ikan Kontribusi Hasil Kelompok Nelayan	Ton	78.394	173.412	174.620	50.174.24	115.245	77.770
Jumlah Produksi Ikan di Daerah	Ton	359.770	366.541	436.551	389.208.20	450.000	429.431,20
Produksi Perikanan Kelompok Nelayan	%	20,02	47,66	40	12.89	25,61	18,11

Sumber : Dinas Kelautan dan Pekanan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2020

2.3.3.9.5. Cakupan luas kawasan konservasi perairan yang dikelola secara berkelanjutan

Luas kawasan konservasi yang dikelolah Provinsi Sulawesi Selatan sejak tahun 2019 hingga tahun 2021 tidak mengalami perubahan yaitu sebesar 67,29 persen. Kawasan konservasi tersebut terdiri atas 1). Kawasan konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil yang meliputi Pulau Lanyukang di sebagian perairan sekitar Pulau Lanjukang di Kota Makassar, Pulau Sembilan di sebagian perairan sekitar Kepulauan Sembilan di Kabupaten Sinjai, Pulau Tanakeke disebagian perairan sekitar Pulau Tanakeke di Kabupaten Takalar, Pulau Panikiang di sebagian perairan sekitar Pulau Panikiang diKabupaten Barru, Liukang Tangaya di sebagian perairan sekitar Kecamatan Liukang Tangaya di

Kabupaten Pangkajene Kepulauandan Pulau Kakabia di Kabupaten Kepulauan Selayar; dan 2). Kawasan konservasi perairan yang meliputi Teluk Bone di Kabupaten Bone dan Kabupaten Sinjai, Bilongka di Kabupaten Luwu, Liukang Tuppabiring di Kabupaten Pangkajene Kepulauan, Pasi Gusung di Kabupaten Kepulauan Selayar, Kayuadi di Kabupaten Kepulauan Selayar, Tanalili di Kabupaten Luwu Utara, dan Kawasan konservasi perairan daerah Malili di Kabupaten LuwuTimur. Data selengkapnya pada tabel berikut.

Tabel II.318.
Cakupan luas kawasan konservasi perairan yang dikelola secara berkelanjutan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017-2021

Indikator	Satuan	Tahun					
		2017	2018	2019	2020	Target 2021	Capaian 2021
Cakupan luas kawasan konservasi perairan yang dikelola secara berkelanjutan	%	0	0	67,29	67,29	67,29	67,29

Sumber : Dinas Kelautan dan Pekanan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022

2.3.3.9.6. Nilai Produksi Perikanan Tangkap

Capaian nilai produksi perikanan tangkap terus mengalami peningkatan dari tahun 2018 hingga tahun 2021, capaian tahun 2021 juga telah melampaui target yang ditetapkan, kondisi ini seiring dengan peningkatan nilai hasil tangkapan nelayan pada tahun 2021. Adapun capaian tahun 2017 belum diukur sebab menyesuaikan dengan indikator program yang terdpat pada perubahan RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan. Data selengkapnya pada tabel berikut.

Tabel II.319.
Nilai Produksi Perikanan Tangkap Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017-2021

Indikator	Satuan	Tahun					
		2017	2018	2019	2020	Target 2021	Capaian 2021
Nilai Produksi Perikanan Tangkap	Rp (Milyar)	Belum diukur	7.987,10	8.631,7	8.678,9	8.852,48	10.742,8

Sumber : Dinas Kelautan dan Pekanan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022

2.3.3.9.7. Produksi perikanan tangkap

Capaian produksi perikanan tangkap di Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2021 telah melampaui target yang ditetapkan, hal ini didukung oleh meningkatan penyediaan bantuan sarana prasarana perikanan tangkap serta modernisasi alat tangkap bagi nelayan. Data selengkapnya pada tabel berikut.

Tabel II.320.
Produksi perikanan tangkap
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017-2021

Indikator	Satuan	Tahun					
		2017	2018	2019	2020	Target 2021	Capaian 2021
Produksi perikanan tangkap	Ton	359.772	366.540,60	398.565,30	389.208,20	396.992,3	429.431,20

Sumber : Dinas Kelautan dan Pekanan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022

2.3.3.9.8. Persentase Pelabuhan Perikanan yg memiliki sarana prasarana yang sesuai standar operasional.

Capaian persentase pelabuhan perikanan yang memiliki sarana prasarana yang sesuai dengan standar operasional mengalami peningkatan dan telah melampaui target yang ditatapkan pada tahun 2021. KOndisi ini didorong oleh usaha perbaikan sarana pelahuban perikanan yang terus dilaksanakan baik melalui dukungan anggaran APBD maupun APBN. Capaian tahun2017 belum diukur, sebab indikator yang digunakan menyesuaikan dengan indikator program yang terdapat dalam perubahan RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan. Data selangkapnya pada tabel berikut.

Tabel II.321.
Persentase Pelabuhan Perikanan yg memiliki sarana prasarana yang sesuai standar operasional Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017-2021

Indikator	Satuan	Tahun					
		2017	2018	2019	2020	Target 2021	Capaian 2021
Persentase Pelabuhan Perikanan yg memiliki sarana prasarana yang sesuai standar operasional	%	Belum diukur	0	15,79	47,37	57,89	63,16

Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2022

2.3.3.9.9. Nilai produksi perikanan budidaya

Nilai produksi perikanan budidaya mengalami peningkatan ditahun 2021 seiring dengan peningkatan produksi perikanan budidaya pada tahun 2021. Kondisi ini didorong oleh kontribusi dari komuditi budidaya bandeng dan rumput laut yang cukup baik. Data selengkapnya pada tabel berikut.

Tabel II.322.
Nilai produksi perikanan budidaya
Di Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2017-2021

Indikator	Satuan	Tahun					
		2017	2018	2019	2020	Target 2021	Capaian 2021
Nilai produksi perikanan budidaya	Rp Milyar	Belum diukur	13.729,40	14.856,30	13.785,50	14.474,73	17.944,40

Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2022

2.3.3.9.10. Produksi perikanan budidaya

Produksi perikanan budidaya menunjukkan peningkatan ditahun 2021 dan telah melampaui target yang ditetapkan, hal ino didorong oleh aktivitas budidaya perikanan baik budidaya laut, budidaya tambak dan budidaya ikan air tawar yang berkembang dengan baik dan didukung oleh usaha mengembalikan kejayaan udang windu yang dilaksanakan oleh pemerintah provinsi Sulawesi Selatan yang mendorong peningkatan hasil budiddaya khususnya udang. Data selengkapnya pada tabel berikut.

Tabel II.323.
Produksi perikanan budidaya di Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2017-2021

Indikator	Satuan	Tahun					
		2017	2018	2019	2020	Target 2021	Capaian 2021
Produksi perikanan budidaya	Ton	Belum diukur	3.568.952,30	3.662.761,40	3.713.111,30	3.898.767,4	4.388.487,40

Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2020

2.3.3.9.11. Persentase ketersediaan benur berkualitas

Persentase ketersediaan benur berkualitas mengalami penurunan di tahun 2021 dan tidak dapat mencapai target yang ditetapkan. Kondisi ini dipengaruhi oleh kondisi perubahan iklim yang cukup ekstrim sehingga mempengaruhi pertumbuhan kualitas benur pada lokasi-lokasi pembenihan yang ada. Data selengkapnya pada tabel berikut.

Tabel II.324.
Persentase ketersediaan benur berkualitas
di Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2017-2021

Indikator	Satuan	Tahun					
		2017	2018	2019	2020	Target 2021	Capaian 2021
Persentase ketersediaan benur berkualitas	%	Tidak dilakukan pengukuran		90,00	100,65	100	96,90

Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022

2.3.3.9.12. Persentase Kepatuhan Pelaku usaha KP terhadap ketentuan peraturan perundangan yang berlaku

Capaian persentase kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya dibidang kelautan dan perikanan menunjukkan capaian yang meningkat dari tahun 2019 hingga tahun 2021, meskipun kondisi ini belum mencapai target yang ditetapkan. Hal ini disebabkan oleh belum optimalnya sosialisasi yang dapat menjangkau seluruh pemangku kepentingan yang bergerak pada sector kelautan dan perikanan disamping jumlah PPNS pengawas perikanan yang masih kurang sehingga penegakan terhadap aturan perundang-undangan belum optimal dapat dilaksanakan. Data selengkapnya pada atbel berikut.

Tabel II.325.
Persentase Kepatuhan Pelaku usaha KP terhadap ketentuan peraturan perundangan yang berlaku di Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2017-2021

Indikator	Satuan	Tahun					
		2017	2018	2019	2020	Target 2021	Capaian 2021
Persentase Kepatuhan Pelaku usaha KP terhadap ketentuan peraturan perundangan yang berlaku	%	Tidak dilakukan pengukuran		50,13	63,07	87,48	69,18

Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022

2.3.3.9.13. Nilai Hilirisasi Produksi olahan Ikan konsumsi dan non konsumsi

Capaian nilai hilirisasi produk olahan ikan konsumsi dan non konsumsi terus mengalami peningkatan dari tahun 2019 hingga tahun 2021, meskipun nilai tersebut belum mencapai target yang ditetapkan, hal ini disebabkan oleh proses pemulihan ekonomi yang baru mulai pasca pandemic covid 19 ditahun 2021 termasuk halnya disektor perikanan. Data selengkapnya pada tabel berikut.

Tabel II.326.
Nilai Hilirisasi Produksi olahan Ikan konsumsi dan non konsumsi di Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2017-2021

Indikator	Satuan	Tahun					
		2017	2018	2019	2020	Target 2021	Capaian 2021
Nilai Hilirisasi Produksi olahan Ikan konsumsi dan non konsumsi	Rp M	Tidak dilakukan pengukuran		293,10	272,20	304.96	280,30

Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022

2.3.3.9.14. Produksi olahan konsumsi dan non konsumsi

Capaian produk olahan konsumsi dan non konsumsi dari sector perikanan menunjukkan capaian telah mengalami peningkatan setelah sebelumnya ditahun 2020 sedikit menurun dibanding capaian tahun 2019. Hasil yang dicapai tahun 2021 telah melampaui target yang ditetapkan. Hal ini didorong oleh meningkatnya produksi kelompok pengolah hasil perikanan dan pembinaan yang dilakukan untuk mendorong keterampilan masyarakat dalam meningkatkan nilai tambah produk perikanan dengan menghasilkan olahan berupa keupuk ikan, abon ikan, hasil olahan rumput laut dan lain sebagainya, termasuk hasil olahan non konsumsi seperti kerajinan tangan dari kulit kerang yang mulai dikembangkan khususnya pada obyek-obyek wisata laut. Data selengkapnya pada tabel berikut.

Tabel II.327.
Produksi olahan konsumsi dan non konsumsi
di Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2017-2021

Indikator	Satuan	Tahun					
		2017	2018	2019	2020	Target 2021	Capaian 2021
Produksi olahan konsumsi dan non konsumsi	Ton	NA	5.332,10	5.332,10	5.235,60	5.329,0	5.497,40

Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022

2.3.3.9.15. Persentase Pembinaan mutu produk perikanan

Capaian bina mutu produk perikanan menunjukkan capaian yang terus mengalami peningkatan dari tahun 2019, meskipun capaian tahun 2021 belum mencapai target. Kondisi ini dipengaruhi oleh langkah-langkah pemulihan ekonomi termasuk disektor perikanan yang baru dimulai pada tahun 2021, sehingga peningkatan yang terjadi belum dapat melampaui target yang diharapkan. Data selengkapnya pada tabel berikut.

Tabel II.328.
Persentase Pembinaan mutu produk perikanan
di Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2017-2021

Indikator	Satuan	Tahun					
		2017	2018	2019	2020	Target 2021	Capaian 2021
Persentase Pembinaan mutu produk perikanan	%	NA	NA	20,11	40,00	60	53,77

Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022

2.3.4. Penunjang Urusan

2.3.4.1. Sekretariat Daerah

2.3.4.1.1. Persentase kesesuaian program prioritas dengan struktur organisasi perangkat daerah

Capaian indikator persentase kesesuaian program prioritas dengan struktur organisasi perangkat daerah tahun 2017 hingga 2018 belum dilakukan pengukuran. Program prioritas RPJMD Perubahan 2018-2023 sejumlah 63 program yang dilaksanakan oleh 40 perangkat daerah. Persentase kesesuaian program prioritas dengan struktur organisasi perangkat daerah tahun 2019 hingga 2021 mencapai 100 persen.

Tabel II.329.
Persentase kesesuaian program prioritas dengan struktur organisasi perangkat daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017-2021

Indikator	Satuan	Tahun					
		2017	2018	2019	2020	Target 2021	Capaian 2021
Persentase kesesuaian program prioritas dengan struktur organisasi perangkat daerah	%	Belum diukur		100	100	100	100

Sumber: Biro Organisasi, Tahun 2021

2.3.4.1.2. Presentase Urusan Pemerintahan Yang difasilitasi, dimonitoring, dan dievaluasi

Urusan pemerintahan yang difasilitasi, dimonitoring dan dievaluasi tahun 2017 hingga 2021 sejumlah 32 urusan dari 32 urusan pemerintahan, yaitu:

a. Urusan Wajib Pelayanan Dasar: Pendidikan, Kesehatan, Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Kententraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, Sosial.
b. Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar: Ketenagakerjaan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pangan, Pertanahan, Lingkungan Hidup, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah, Penanaman Modal dan Investasi, Kepemudaan dan Olah Raga, Statistik, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan.
c. Urusan Pilihan: Pariwisata, Pertanian, Peternakan, Kehutanan, Energi dan Sumber Daya Mineral, Perdagangan, Perindustrian, Transmigrasi, Kelautan dan Perikanan.

Segmen batas yang terselesaikan sejak tahun 2019 hingga 2021 yang menjadi urusan biro pemerintahan sebagai berikut:

No	Segmen	Pengesahan
1	Kab.Maros – Kota Makassar	Permendagri 40 Tahun 2019
2	Kota Makassar – Kab.Takalar	Permendagri 41 Tahun 2019
3	Kab.Gowa – Kab.Maros	Permendagri 42 Tahun 2019
4	Kab.Jeneponto – Kab.Takalar	Permendagri 77 Tahun 2019
5	Kota Pare-Pare – Kab.Sidrap	Permendagri 42 Tahun 2020
6	Kab.Pinrang – Kab. Sidrap	Permendagri 43 Tahun 2020
7	Kab.Enrekang – Kab. Sidrap	Permendagri 44 Tahun 2020
8	Kab.Wajo – Kab. Luwu	Permendagri 14 Tahun 2021
9	Kab.Bone – Kab. Sinjai	Permendagri 15 Tahun 2021

Tabel II.330.
Presentase Urusan Pemerintahan Yang difasilitasi, dimonitoring, dan dievaluasi Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017-2021

Indikator	Satuan	Tahun					
		2017	2018	2019	2020	Target 2021	Capaian 2021
Presentase Urusan Pemerintahan Yang difasilitasi, dimonitoring, dan dievaluasi	%	100	100	100	100	100	100

Sumber: Biro Pemerintahan Dan Otonomi Daerah, Tahun 2021

2.3.4.1.3. Persentase Rumusan Kebijakan Bidang Kesejahteraan Rakyat yang dimanfaatkan

Dalam mendukung pencapaian visi dan misi Gubernur Sulawesi Selatan 2018 – 2023 Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan telah melakukan berbagai langkah utamanya dalam perumusan berbagai kebijakan bidang kesejahteraan rakyat. Pada tahun 2020 persentase Rumusan Kebijakan Bidang Kesejahteraan Rakyat yang dimanfaatkan mencapai 90,59 persen, namun pada tahun 2021 hanya mencapai 80 persen. Hal tersebut disebabkan karena terdapat rumusan kebijakan yang masih dalam proses yaitu pemberian diskon penerbangan untuk ruter penerbangan Balikpapan – Tana Toraja. Faktor Pendukung peningkatan persentase Rumusan Kebijakan Bidang Kesejahteraan Rakyat yang dimanfaatkan adalah pelaksanaan koordinasi dengan seluruh stakeholder terkait dapat dimaksimalkan. Faktor penghambat peningkatan persentase Rumusan Kebijakan Bidang Kesejahteraan Rakyat yang dimanfaatkan adalah situasi pandemi Covid-19 yang mempengaruhi semua sektor.

Tabel II.331.
Persentase Rumusan Kebijakan Bidang Kesejahteraan Rakyat yang dimanfaatkan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017-2021

Indikator	Satuan	Tahun					
		2017	2018	2019	2020	Target 2021	Capaian 2021
Persentase Rumusan Kebijakan Bidang Kesejahteraan Rakyat yang dimanfaatkan	%	Belum diukur			90,59	100	80,00

Sumber: Biro Kesejahteraan Rakyat, Tahun 2021

2.3.4.1.4. Persentase Penduduk usia 15 tahun ke atas beragama Islam yang melek aksara Al-Quran

Persentase penduduk usia 15 tahun ke atas beragama Islam yang melek aksara Al-Qur'an terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2017 terdapat 31,92 persen jumlah penduduk yang melek aksara Al-Qur'an. Angka tersebut mengalami perubahan yang berfluktuasi, pada tahun 2018 meningkat menjadi 36,36 persen disusul pada tahun 2019 juga mengalami peningkatan sebesar 36,67 persen. Namun pada tahun 2020 seiring dengan pandemi covid-19 yang melanda dunia termasuk Indonesia mengakibatkan pergerakan masyarakat yang dibatasi termasuk dunia Pendidikan sehingga mengalami penurunan menjadi 35,14 persen, setelah pemerintah mulai melonggarkan pergerakan masyarakat pada tahun 2021 mengalami peningkatan menjadi 39,22 persen. Faktor Pendukung Peningkatan Persentase usia 15 tahun ke atas beragama Islam yang melek aksara Al Quran, antara lain: a) Kebijakan pemerintah untuk mewajibkan calon siswa tingkat SMP untuk menyetorkan sertifikat mengaji; b) Peningkatan sarana prasarana rumah ibadah (masjid) melalui bantuan hibah. Faktor Penghambat Peningkatan Persentase usia 15 tahun ke atas beragama Islam yang melek aksara Al Quran adalah Kondisi pandemi sehingga membatasi pergerakan masyarakat, termasuk dalam hal proses belajar mengajar.

Tabel II.332.
Persentase Penduduk usia 15 tahun ke atas beragama Islam yang melek aksara Al-Quran Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017-2021

Indikator	Satuan	Tahun					
		2017	2018	2019	2020	Target 2021	Capaian 2021
Persentase Penduduk usia 15 tahun ke atas beragama Islam yang melek aksara Al-Quran	%	31,92	36,36	36,67	35,14	35,25	39,22

Sumber: Biro Kesejahteraan Rakyat, Tahun 2021

2.3.4.1.5. Persentase Penurunan kasus Kejahatan terhadap Kesusilaan

Kejahatan kesusilaan di Sulawesi Selatan dari tahun 2018 sampai dengan 2020 mengalami peningkatan, berdasarkan data statistik kriminal, diperoleh jumlah kasus kejahatan kesusilaan pada tahun 2018 sebesar 316 kasus, kemudian meningkat menjadi 371 kasus pada tahun 2019. Pada tahun 2020 sebagaimana data yang dirilis BPS melalui Statistik Politik dan Keamanan Sulawesi Selatan akumulasi kejahatan pemerkosaan dan kesusilaan sebanyak 305 kasus. Sampai dengan disusunnya laporan ini BPS Sulawesi Selatan belum merilis hasil untuk tahun 2021. Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk melaporkan kasus kesusilaan yang ada ditengah-tengah masyarakat tentu merupakan hal yang positif, meskipun dari hal tersebut ikut mempengaruhi peningkatan kasus kesusilaan yang dilaporkan, namun secara tidak langsung dapat mempengaruhi penurunan kasus kedepannya, karena dengan adanya laporan tersebut akan ditindaklanjuti dengan penangkapan pelaku untuk selanjutnya diproses secara hukum, sehingga diharapkan prilaku masyarakat dapat lebih mengarah ke hal yang positif. Faktor penghambat persentase Penurunan Kasus Kejahatan Terhadap Kesusilaan adalah kondisi ekonomi masyarakat cukup berpengaruh terhadap perilaku di masyarakat.

Tabel II.333.
Persentase Penurunan kasus Kejahatan terhadap Kesusilaan
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017-2021

Indikator	Satuan	Tahun					
		2017	2018	2019	2020	Target 2021	Capaian 2021
Persentase Penurunan kasus Kejahatan terhadap Kesusilaan	%	Belum diukur	316 kasus	17 (371 kasus)	20 (305 kasus)	10,00	20* (305 kasus)

Sumber: Biro Kesejahteraan Rakyat, Tahun 2021

2.3.4.1.6. Nilai Hasil Evaluasi Reformasi Birokrasi pada Penataan Peraturan Perundang-undangan

Nilai hasil evaluasi reformasi birokrasi pada penataan peraturan perundang-undangan belum mencapai target yang ditetapkan dengan tingkat capaian 80% pada tahun 2021. Pencapaian indikator dimaksud melalui pelaksanaan fasilitasi penyusunan produk hukum pengaturan, fasilitasi penyusunan produk hukum penetapan, fasilitasi dan evaluasi produk hukum kabupaten/kota, dan pendokumentasian produk hukum dan naskah hukum lainnya.

Tabel II.334.
Nilai Hasil Evaluasi Reformasi Birokrasi pada Penataan Peraturan Perundang-undangan di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017-2021

Indikator	Satuan	Tahun					
		2017	2018	2019	2020	Target 2021	Capaian 2021
Nilai Hasil Evaluasi Reformasi Birokrasi pada Penataan Peraturan Perundang-undangan	Angka	Belum diukur	2,29	2,40	2,40	3,00	3,90

Sumber: Biro Hukum, Tahun 2021

2.3.4.1.7. Persentase Perkara Hukum yang difasilitasi

Capaian indikator persentase perkara hukum yang difasilitasi pada tahun 2021 mencapai 100% melalui pelaksanaan fasilitasi penyelesaian masalah hukum dan fasilitasi penyelesaian masalah non litigasi dan HAM.

Tabel II.335.
Persentase Perkara Hukum yang difasilitasi di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017-2021

Indikator	Satuan	Tahun					
		2017	2018	2019	2020	Target 2021	Capaian 2021
Persentase Perkara Hukum yang difasilitasi	%	Belum diukur	100	100	100	100	100

Sumber: Biro Hukum, Tahun 2021

2.3.4.1.8. Persentase rumusan kebijakan bidang perekonomian yang dimanfaatkan

Dalam pengambilan/perumusan kebijakan, maka dilakukan beberapa tahapan yaitu: a) Penyiapan bahan, pengoordinasian dan perumusan kebijakan daerah bidang analisis dan kelembagaan ekonomi, sarana perekonomian dan sumber daya alam, dan administrasi pembangunan serta pelaksanaan urusan ketatausahaan Biro Perekonomian Dan Admnistrasi Pembangunan; b) Penyiapan bahan, pengoordinasian dalam rangka pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Kebijakan Daerah bidang analisis dan kelembagaan ekonomi, sarana perekonomian dan sumber daya alam, dan administrasi pembangunan, serta pelaksanaan urusan ketatausahaan Biro Perekonomian Dan Admnistrasi Pembangunan. Identifikasi permasalahan didasarkan pada hasil analisa kondisi internal maupun eksternal diantaranya: a) Harmonisasi kebijakan dimana masih terdapat kebijakan yang belum disesuaikan/diperbarui/direvisi sesuai dengan kondisi saat ini; b) Ketersediaan data dimana data mikro ekonomi belum lengkap tersedia, koordinasi dengan SKPD lain perlu ditingkatkan terkait

data; c) Kurangnya SDM dimana banyak yang telah memasuki masa purna bhakti, pendidikan pegawai belum sesuai kebutuhan/persyaratan.

Tabel II.336.
Persentase rumusan kebijakan bidang perekonomian yang dimanfaatkan di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017-2021

Indikator	Satuan	Tahun					
		2017	2018	2019	2020	Target 2021	Capaian 2021
Persentase rumusan kebijakan bidang perekonomian yang dimanfaatkan	%	Belum diukur	100	100	100	100	100

Sumber: Biro Perekonomian Dan Administrasi Pembangunan, Tahun 2021

2.3.4.1.9. Realisasi capaian program prioritas pembangunan daerah

Prioritas pembangunan daerah adalah agenda pembangunan pemerintah daerah yang menjadi tonggak capaian lima tahunan RPJMD. Prioritas pembangunan juga dapat dikategorikan sebagai operasional dari tujuan strategis daerah berdasarkan pada urgensi daya ungkit pada kesejahteraan dan target pembangunan. Realisasi capaian program prioritas pembangunan daerah tahun 2021 sebesar 98 persen belum mencapai target yang direncanakan.

Tabel II.337.
Realisasi capaian program prioritas pembangunan daerah di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017-2021

Indikator	Satuan	Tahun					
		2017	2018	2019	2020	Target 2021	Capaian 2021
Realisasi capaian program prioritas pembangunan daerah	%	Belum diukur	97	97	98	100	98

Sumber: Biro Perekonomian Dan Administrasi Pembangunan, Tahun 2020

2.3.4.1.10. Persentase Kesesuaian pengadaan barang dan jasa dengan rencana pembangunan daerah

Capaian target persentase kesesuaian pengadaan barang dan jasa dengan rencana pembangunan daerah belum mencapai target dengan capaian 99,94 persen. Faktor penghambat pencapaian target antara lain kurangnya ketelitian admin SiRUP dalam melakukan penginputan kegiatan yang akan dilelang/dipihakketigakan.

Capaian indikator persentase Kesesuaian pengadaan barang dan jasa dengan rencana pembangunan daerah tahun 2017 hingga 2020 belum dilakukan pengukuran karena menyesuaikan Perubahan RPJMD 2018-2023. Tahun 2021 persentase kesesuaian pengadaan barang dan jasa dengan rencana

pembangunan daerah tahun 2021 sebesar 99,94 persen dimana jumlah total pengadaan paket di SIRUP sebagai berikut: a) Tender/Seleksi: 350 paket, b) Pengadaan Langsung : 11.788 paket, c) Penunjukan Langsung : 311 paket, d) e-Purchasing : 466 paket, e) Dikecualikan : 54 paket.

Tabel II.338.
Persentase Kesesuaian pengadaan barang dan jasa dengan rencana pembangunan daerah di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017-2021

Indikator	Satuan	Tahun					
		2017	2018	2019	2020	Target 2021	Capaian 2021
Persentase Kesesuaian pengadaan barang dan jasa dengan rencana pembangunan daerah	%	Belum diukur				100	99,94

Sumber: Biro Pengadaan Barang Dan Jasa, Tahun 2021

2.3.4.1.11. Persentase Kepuasan pelayanan pengadaan barang dan jasa

Capaian persentase kepuasan pelayanan pengadaan barang dan jasa tahun 2017 hingga 2020 belum dilakukan pengukuran karena menyesuaikan Perubahan RPJMD 2018-2023. Tahun 2021 capaian persentase kepuasan pelayanan pengadaan barang dan jasa belum mencapai target dengan capaian 99,00 persen disebabkan oleh beberapa faktor penghambat diantaranya: a) masih terdapat kekurangan dalam penyelesaian masalah, b) prasarana dan sarana yang belum memadai, c) keterbatasan petugas pelayanan. Nilai indeks Tata Kelola Pengadaan yang diperoleh tahun 2021 adalah 71,55 dengan kategori BAIK.

Tabel II.339.
Persentase Kepuasan pelayanan pengadaan barang dan jasa di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017-2021

Indikator	Satuan	Tahun					
		2017	2018	2019	2020	Target 2021	Capaian 2021
Persentase Kepuasan pelayanan pengadaan barang dan jasa	%	Belum diukur				100	99,00

Sumber: Biro Pengadaan Barang Dan Jasa, Tahun 2021

2.3.4.2. Sekretariat Dewan

2.3.4.2.1. Persentase PROLEGDA yang terealisir

Waktu pembahasan setiap RNAPERDA dan konsultasi ke Kementerian dan Lembaga dalam proses pembahasannya yang cukup lama sehingga persentase PROLEGDA yang terealisir belum mecapai target pada tahun 2021.

Tabel II.340.
Persentase PROLEGDA yang terealisir
di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017-2021

Indikator	Satuan	Tahun					
		2017	2018	2019	2020	Target 2021	Capaian 2021
Persentase PROLEGDA yang terealisir	%	53,33	3,33	81,25	37,50	100	75

Sumber: Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2021

2.3.4.2.2. Persentase Jumlah program kerja DPRD yang terintegrasi dengan program RPJMD dan RKPD

Seluruh program kerja DPRD terintegrasi dengan RPJMD dan RKPD sehingga capaian target kinerja tahun 2021 100 persen seperti tahun-tahun sebelumnya.

Tabel II.341.
Persentase Jumlah program kerja DPRD yang terintegrasi dengan program RPJMD dan RKPD di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017-2021

Indikator	Satuan	Tahun					
		2017	2018	2019	2020	Target 2021	Capaian 2021
Persentase Jumlah program kerja DPRD yang terintegrasi dengan program RPJMD dan RKPD	%	100	100	100	100	100	100

Sumber: Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2021

2.3.4.2.3. Persentase Ranperda yang difasilitasi pembahasannya

Salah satu tugas DPRD adalah pembahasan rancangan PERDA sebelum ditetapkan diantaranya KUA PPAS dan APBD. Capaian kinerja persentase Ranperda yang difasilitasi pembahasannya mencapai 100 persen tahun 2017 hingga tahun 2020 mengalami penurunan pada tahu 2021 dengan capaian 75 persen.

Tabel II.342.
Persentase Ranperda yang difasilitasi pembahasannya
di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017-2021

Indikator	Satuan	Tahun					
		2017	2018	2019	2020	Target 2021	Capaian 2021
Persentase Ranperda yang difasilitasi pembahasannya	%	100	100	100	100	100	75,00

Sumber: Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2021

2.3.4.3. Perencanaan Pembangunan

2.3.4.3.1. Persentase Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD & APBD

Pada Tahun 2017 Program RPJMD yang diakomodir dalam RKPD sebesar 93,74 persen dengan penjelasan dari total 472 program yang terdapat di RPJMD yang terakomodir hanya 438 program di RKPD, hal itu disebabkan karena terjadinya perubahan kebijakan nasional. Pada tahun 2018, berdasarkan Perda Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua RPJMD terdapat 423 program dan berdasarkan RKPD Tahun 2018 sebanyak 422 program, sedangkan pada Tahun 2019 berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 terdapat 431 program dan berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 97 Tahun 2018 tentang RKPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019 terdapat 431 program. Hal tersebut juga dapat dilihat pada *https://e-planning.sulselprov.go.id*. Dalam pencapaian target RPJMD ini ada beberapa kendala yang dihadapi diantaranya adalah dengan terdapatnya regulasi yang saling tumpang tindih antar Kementerian/Lembaga dimana secara teknis sulit untuk diimplementasikan. Namun dengan adanya eplanning dan/atau SIPD dan dengan telah terintegrasinya sistem perencanaan, anggaran dan evaluasi pembangunan daerah maka program-program daerah dapat dikoordinasikan dengan lebih maksimal.

Tabel II.343.
Persentase Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD & APBD
di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017-2021

Indikator	Satuan	Tahun					
		2017	2018	2019	2020	Target 2021	Capaian 2021
Persentase Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD & APBD	%	94,73	100	100	100	100	100

Sumber: Bappelitbangda, Tahun 2021

2.3.4.3.2. Persentase peningkatan capaian kinerja program

Pada tahun 2021 persentase peningkatan capaian kinerja program seluruh perangkat daerah sebesar 3,68 persen melampaui target yang ditetapkan serta mengalami peningkatan dari tahun 2020. Pencapaian target kinerja didukung oleh pelaksanaan kegiatan yang sesuai rencana serta komitmen perangkat daerah dalam pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen rencana.

Tabel II.344.
Persentase peningkatan capaian kinerja program
di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017-2021

Indikator	Satuan	Tahun					
		2017	2018	2019	2020	Target 2021	Capaian 2021
Persentase peningkatan capaian kinerja program	%	N/A	-8,62	5,54	-8,49	0,5	3,68*

Sumber: Bappelitbangda, Tahun 2021

2.3.4.3.3. Persentase Kesesuaian program Perangkat Daerah dengan Sasaran Pembangunan Daerah

Dengan dilakukannya asistensi dan verifikasi dokumen perencanaan dalam bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia dan berdasarkan hasil evaluasi program untuk tahun 2021, terdapat 22 OPD mitra bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia melaksanakan program yang tergambar dalam dokumen Renja telah sesuai dengan sasaran yang termuat dalam RPJMD. Adapun 22 Perangkat Daerah tersebut adalah:

a. Dinas Kesehatan, telah melaksankan Program yang mendukung Sasaran daerah yaitu Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat dan telah sesuai dengan yang termuat dalam dokumen RPJMD dan Dokumen Renja dengan 5 Program.
b. Dinas Pendidikan, termuat di dokumen perencanaan RPJMD telah sesuai dengan Program dalam Dokuemen Renja sebanyak 6 Program dengan Sasaran Daerah 6 meningkatnya kualitas dan pemerataan Pendidikan.
c. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, pelaksanaan 9 program pada tahun 2021 telah sesuai dengan yang termuat di dokumen RPJMD.
d. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, pelaksanaan 5 program yang terdapat pada Renja tahun 2021 telah sesuai dengan yang termuat di dokumen RPJMD.
e. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, 4 program telah sesuai dengan dengan RPJMD.
f. Biro Kesejahteraan Rakyat, 2 Program telah sesuai dengan RPJMD.
g. BPSDM, 2 Program telah sesuai dengan RPJMD.
h. Rumah Sakit Khusus Daerah, 2 Program telah sesuai dengan dokumen RPJMD.
i. Dinas sosial, 7 Program telah sesuai dengan dokumen RPJMD.
j. Badan Penanggulangan Bencana Daerah, 2 Program yang telah sesuai dengan dokumen RPJMD.
k. Biro Pemerintahan, 2 program yang telah sesuai dengan dokumen RPJMD.
l. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 5 program yang telah sesuai dengan RPJMD.
m. UPT Transfusi Darah, 3 program yang sesuai dengan RPJMD.
n. UPT Pelatihan Kesehatan, 3 program yang sesuai dengan RPJMD.
o. UPT RSK Gigi dan Mulut, 3 program yang sesuai dengan RPJMD.
p. RS Labuang Baji, 3 program yang sesuai dengan RPJMD.

q. RSUD Haji Makassar, 3 program yang sesuai dengan RPJMD.
r. RSK Ibu dan Anak Pertiwi 4 program yang sesuai dengan RPJMD.
s. RSKD Ibu dan Anak Siti Fatimah, 4 program yang sesuai dengan RPJMD.
t. RSUD Sayang Rakyat, 3 program yang sesuai dengan RPJMD.
u. Dinas Kepemudaan dan Olahraga, 4 program yang sesuai dengan RPJMD.
v. Sekretariat Dewan, 3 program yang sesuai dengan RPJMD.

Dengan dilakukannya asistensi dan verifikasi dokumen perencanaan dalam bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam, dimana berdasarkan hasil evaluasi program untuk tahun 2021, terdapat 14 OPD mitra bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam melaksanakan program yang tergambar dalam dokumen Renja telah sesuai dengan sasaran yang termuat dalam RPJMD. Adapun 14 Perangkat Daerah tersebut adalah:

a. Dinaas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan telah melaksankan Program yang mendukung Sasaran pembangunan daerah yaitu Meningkatnya Pusat Pertumbuhan Ekonomi Baru yang Produktif dan meningkatnya produktifitas dan daya saing produk tanaman pangan, hortikulturan dan perkebunan dan dari 5 program telah sesuai dengan yang termuat dalam dokumen RPJMD dan Dokumen Renja.
b. Dinas Ketahanan Pangan sudah sesuai dengan Program dan Dokumen Renja dimana terdapat 4 Program yang sudah termuat di dalam dokumen perencanaan RPJMD.
c. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, terdapat 6 program yang mana telah sesuai dengan Dokumen RPJMD dan Dokumen Renja.
d. Dinas Kelautan dan Perikanan, terdapat 6 program yang sudah termuat di dalam dokumen RPJMD dan Renja.
e. Dinas Kehutanan, terdapat 5 program dan sudah termuat di dokumen RPJMD dan Renja.
f. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, dengan 5 progam dan sudah sesuai dan termuat di dalam dokumen RPJMD dan Renja.
g. Dinas Kebudayaan dan Kepariwisataan, ditetapkan 10 program 18 kegiatan dan 37 Sub Kegiatan yang terdiri dari dua urusan yakni urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar seperti urusan pemerintahan bidang kebudayaan dan urusan pemerintahan pilihan yakni urusan pemerintahan bidang pariwisata.
h. Dinas Perindustrian, terdapat 4 Program dan 10 kegiatan serta 31 sub kegiatan yang Sudah termuat dalam Dokumen RPJMD dan Renja.
i. Dinas Perdagangan secara keseluruhan terdapat 9 program yang sudah termuat di dokumen RPJMD dan Dokumen Renja.
j. Dinas Koperasi dan UMKM dengan 8 program, 17 kegiatan serta 36 sub kegiatan, yang sudah termuat di dokumen RPJMD dan Renja.
k. Dinas Penanaman Modal dan PTSP, terdapat 6 program dan sudah termuat di dokumen RPJMD dan Renja.

Pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan Renja Perangkat Lingkup Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan dilakukan untuk memastikan perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah terakomodasi pada Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah lingkup Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan. Adapun hasil pengendalian diperoleh gambaran sebagai berikut:

a. Dinas PUTR, terdapat 2 (dua) target sasaran prioritas pembangunan daerah yang tidak sesuai dengan target sasaran pembangunan daerah yang dicantumkan pada RENJA Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Provinsi Sulawesi Selatan, maka diperoleh rata-rata kesesuaian sasaran pembangunan daerah sebesar 98,6 persen.

b. Dinas Perhubungan, sasaran dan target prioritas pembangunan daerah yang termuat dalam RENJA Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Selatan telah sesuai dengan target dan sasaran pembangunan daerah sehingga diperoleh rata-rata kesesuaian sasaran pembangunan daerah sebesar 100 persen.
c. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan, terdapat 1 (satu) target sasaran prioritas pembangunan daerah yang tidak sesuai dengan target sasaran pembangunan daerah yang dicantumkan pada RENJA Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Selatan maka diperoleh rata-rata kesesuaian sasaran prioritas pembangunan daerah sebesar 97,84 persen.
d. Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup, sasaran dan target prioritas pembangunan daerah yang termuat dalam RENJA Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Selatan telah sesuai dengan target dan sasaran pembangunan daerah sehingga diperoleh rata-rata kesesuaian sasaran pembangunan daerah sebesar 100 persen.
e. Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian, sasaran dan target prioritas pembangunan daerah yang termuat dalam RENJA Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Provinsi Sulawesi Selatan telah sesuai dengan target dan sasaran pembangunan daerah dan diperoleh rata-rata kesesuaian sasaran pembangunan daerah sebesar 97,85 persen.
f. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, sasaran dan target prioritas pembangunan daerah yang termuat dalam RENJA BAPPELITBANGDA Provinsi Sulawesi Selatan telah sesuai dengan target dan sasaran pembangunan daerah sehingga diperoleh rata-rata kesesuaian sasaran pembangunan daerah sebesar 100 persen.

Memperhatikan hasil analisis kesesuaian masing-masing perangkat daerah lingkup Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan, maka diperoleh hasil persentase kesesuaian program perangkat daerah dengan sasaran pembangunan daerah lingkup bidang infrastruktr dan kewilayahan sebesar 99 persen.

Tabel II.345.
Persentase Kesesuaian program Perangkat Daerah dengan Sasaran Pembangunan Daerah di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017-2021

Indikator	Satuan	Tahun					
		2017	2018	2019	2020	Target 2021	Capaian 2021
Bidang PPM	%			100	100	60	100
Bidang Ekonomi dan SDA	%					80	100*
Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	%					90	99

Sumber: Bappelitbangda, Tahun 2021

2.3.4.4. Keuangan

2.3.4.4.1. Persentase Persetujuan Bersama Ranperda APBD Pokok dan APBD Perubahan Yang Tepat Waktu

Berdasarkan PP No. 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang selanjutnya ditindaklanjuti oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, menyatakan bahwa Kepala daerah dan DPRD wajib menyetujui bersama

rancangan Perda tentang APBD paling lambat 1 (satu) bulan sebelum dimulainya tahun anggaran setiap tahun. Berdasarkan capaian Tahun 2021 ini, terlihat bahwa Persetujuan bersama Ranperda APBD Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2022, telah dilaksanakan sesuai aturan yang ada yakni disetujui bersama pada tanggal 30 November 2021. Hal ini dapat di capai dengan adanya dukungan, Kordinasi dan Sinergi yang baik dengan seluruh Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, serta Kerja sama yang baik dengan pihak legislatif DPRD Provinsi, sehingga Ranperda APBD dapat disetujui bersama tepat waktu yakni 1 (satu) bulan sebelum dimulainya tahun anggaran setiap tahun, Hal ini sudah menjadi komitmen bersama antara pihak eksekutif (Kepala Daerah beserta jajarannya) serta DPRD Provinsi Sulawesi Selatan yang akan dipertahankan terus di tahun-tahun mendatang. Tahun 2022 mendatang juga diharapkan komitmen ini tetap terjaga.

Tabel II.346.
Persentase Persetujuan Bersama Ranperda APBD Pokok dan APBD Perubahan Yang Tepat Waktu Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017-2021

Indikator	Satuan	Tahun					
		2017	2018	2019	2020	Target 2021	Capaian 2021
Persentase Persetujuan Bersama Ranperda APBD Pokok dan APBD Perubahan Yang Tepat Waktu	%	100	100	100	100	100	100

Sumber : Badan Keuangandan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, tahun 2021

2.3.4.4.2. Tingkat Kepatuhan Kabupaten/Kota Dalam Menyampaiakan Ranperda dan Ranperkada APBD Untuk Dievaluasi Tepat Waktu

Berdasarkan PP No. 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang selanjutnya ditindaklanjuti oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Menyatakan bahwa Rancangan Perda kabupaten/kota tentang APBD yang telah disetujui bersama dan rancangan Perkada tentang penjabaran APBD disampaikan kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat paling lambat 3 (tiga) hari sejak tanggal persetujuan rancangan Perda kabupaten/kota tentang APBD untuk dievaluasi sebelum ditetapkan oleh bupati/wali kota. Berdasarkan capaian tahun 2021 ini terlihat bahwa 24 kabupaten/kota telah menyampaikan Ranperda dan Ranperkada APBD tepat waktu hal ini di dorong dengan komitmen yang tinggi dari kabupaten/ kota untuk dapat menyampaikan Ranperda dan Ranperkada APBD sesuai dengan Aturan yang berlaku.

Tabel II.347.
Tingkat Kepatuhan Kabupaten/Kota Dalam Menyampaiakan Ranperda dan Ranperkada APBD Untuk Dievaluasi Tepat Waktu Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017-2021

Indikator	Satuan	Tahun					
		2017	2018	2019	2020	Target 2021	Capaian 2021
Tingkat Kepatuhan Kabupaten/Kota Dalam Menyampaiakan Ranperda & Ranperkada APBD Untuk Dievaluasi Tepat Waktu	%	100	100	100	100	100	100

Sumber : Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, tahun 2021

2.3.4.4.3. Tingkat Kepatuhan Kabupaten/Kota Dalam Menyampaikan Ranperda dan Ranperkada Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Untuk Dievaluasi Tepat Waktu

Berdasarkan PP No. 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang selanjutnya ditindaklanjuti oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Menyatakan bahwa Rancangan Peraturan Daerah kabupaten/kota tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang telah disetujui bersama DPRD dan rancangan Peraturan Kepala Daerah kabupaten/kota tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD disampaikan kepada gubernur selaku wakil pemerintah pusat paling lambat 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal persetujuan rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/kota tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD untuk dievaluasi sebelum ditetapkan oleh Bupati/Walikota. Berdasarkan capaian tahun 2021 ini terlihat bahwa 24 kabupaten / kota telah menyampaikan Ranperda dan Ranperkada Pertanggungjawaban APBD tepat waktu hal ini di dorong dengan komitmen yang tinggi dari kabupaten/ kota untuk dapat menyampaikan Ranperda dan Ranperkada Pertanggungjawaban APBD sesuai dengan Aturan yang berlaku.

Tabel II.348.
Tingkat Kepatuhan Kabupaten/Kota Dalam Menyampaikan Ranperda dan Ranperkada Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Untuk Dievaluasi Tepat Waktu Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017-2021

Indikator	Satuan	Tahun					
		2017	2018	2019	2020	Target 2021	Capaian 2021
Tingkat Kepatuhan Kabupaten/Kota Dalam Menyampaikan Ranperda & Ranperkada Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Untuk Dievaluasi Tepat Waktu	%	100	100	100	100	100	100

Sumber : Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, tahun 2021

2.3.4.4.4. Persentase Serapan Belanja Daerah

Berdasarkan data realisasi belanja daerah tahun 2021 hingga desember dari alokasi belanja daerah sebesar Rp. 10.758.487.403.131,00, telah terealisasi sebesar Rp. 10.167.267.792.878,32 atau capaian sebesar 94,50 persen. Dari capaian tersebut terlihat bahwa Persentase Serapan Belanja Daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan telah mencapai target. Kemampuan daerah untuk menyerap belanja sesuai target sangat di tentukan oleh pencapaian target pendapatan. Realisasi Belanja pada APBD Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2021 menunjukkan kenaikan yang signifikan hingga awal Desember pada akhir tahun anggaran 2021. Persentase serapan belanja daerah tahun anggaran 2021 akan terus naik dengan pengimputan realisasi pada tiap-tiap OPD perangkat Daerah terkhusus pada penginputan realisasi dana BOS sehingga Persentase serapan belanja daerah dapat mencapai target 94 persen. Pencapaian realisasi anggaran ini tidak lepas dari komitmen pimpinan terkait kinerja pendapatan dan percepatan serapan anggaran disetiap OPD yang terkait dengan priorotas dan target rencana pembangunan jangka menengah daerah.

Tabel II.349.
Persentase Serapan Belanja Daerah
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017-2021

Indikator	Satuan	Tahun					
		2017	2018	2019	2020	Target 2021	Capaian 2021
Persentase Serapan Belanja Daerah	%	Belum diukur	96,37	95,58	88,87	94,00	94,50

Sumber : Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, tahun 2021

2.3.4.4.5. Persentase Penyampaian Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Yang Tepat Waktu

Berdasarkan PP No. 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang selanjutnya ditindaklanjuti oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, menyatakan bahwa Kepala Daerah menyampaikan rancangan Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD beserta penjelasan dan dokumen pendukung kepada DPRD paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Berdasarkan capaian Tahun 2021 ini, terlihat bahwa Ranperda dan Ranperkada Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2021, telah dilaksanakan sesuai aturan yang ada yakni Penyampaian Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tepat waktu . Hal ini dapat di capai dengan adanya dukungan, Kordinasi dan Sinergi yang baik dengan seluruh Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, serta Kerja sama yang baik dengan pihak legislatif DPRD Provinsi, sehingga Penyampaian Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dapat disampaiakan tepat waktu yakni 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Hal ini sudah menjadi komitmen bersama antara pihak eksekutif (Kepala Daerah beserta jajarannya) serta DPRD Provinsi Sulawesi Selatan yang

akan dipertahankan terus di tahun-tahun mendatang. Dan di tahun 2022 mendatang juga diharapkan komitmen ini tetap terjaga.

Tabel II.350.
Persentase Penyampaian Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Yang Tepat Waktu Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017-2021

Indikator	Satuan	Tahun					
		2017	2018	2019	2020	Target 2021	Capaian 2021
Persentase Penyampaian Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Yang Tepat Waktu	%	100	100	100	100	100	100

Sumber : Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, tahun 2021

2.3.4.4.6. Persentase keterpenuhan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan kinerja tepat waktu dibidang pendapatan PAD

Dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan kinerja pendapatan asli daerah disusun untuk memenuhi kebutuhan data capaian pendapatan dalam rangka penyusunan Ranperda APBD Pokok, Perubahan dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD setiap tahunnya sesuai jadwal dan batas waktu yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Sehingga capaian kinerja indikator persentase keterpenuhan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan kinerja tepat waktu dibidang pendapatan PAD tercapai 100 persen.

Tabel II.351.
Persentase keterpenuhan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan kinerja tepat waktu dibidang pendapatan PAD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017-2021

Indikator	Satuan	Tahun					
		2017	2018	2019	2020	Target 2021	Capaian 2021
Persentase keterpenuhan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan kinerja tepat waktu dibidang pendapatan PAD	%	100	100	100	100	100	100

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, tahun 2021

2.3.4.4.7. Persentase Tindak Lanjut Rencana Aksi Manajemen Aset Daerah

Manajemen Aset daerah Badan Keuangan Dan Aset Daerah merupakan area intervensi yang mengelola dan menentukan rentang dan tingkat aset yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan strategis dan target kinerja pengelolaan

barang milik daerah yang ingin dicapai. Dilihat dari data manajemen aset daerah badan keuangan dan aset daerah pada area intervensi yang terbagi dari beberapa indikator antara lain data base aset dengan capaian 85,25 persen, Pengelolaan aset dengan capaian 100 persen , sertifikasi aset dengan capaian 83 persen dan penertiban aset dengan capaian 100 persen yang diakumulasi menjadi satu nilai dan pada tahun berjalan 2021 manajemen aset daerah BKAD ini mencapai 91,53 persen yang telah mencapai target yang telah di tentukan. Pencapaian ini tidak lepas dari proses pengelolaan, inventarisasi dan penatausahaan barang milik daerah serta peran dari tiap-tiap perangkat daerah yang aktif dalam mendukung kegiatan rekonsiliasi aset tetap Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.

Tabel II.352.
Persentase Tindak Lanjut Rencana Aksi Manajemen Aset Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017-2021

Indikator	Satuan	Tahun					
		2017	2018	2019	2020	Target 2021	Capaian 2021
Persentase Tindak Lanjut Rencana Aksi Manajemen Aset Daerah	%					90,00	91,53

Sumber : Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, tahun 2021

2.3.4.4.8. Persentase Tanah Pemprov Yang Sudah Bersertifikat

Terkait dengan bidang tanah yang bersertifikat, Sampai dengan saat ini Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan telah melakukan permohonan penerbitan Sertifikat tanah kepada 24 Kepala Kantor Pertananahan Kabupaten/Kota, progres persertifikatan tanah pemerintah provinsi Sulawesi selatan berjumlah 916 bidang tanah dengan rincian 515 bidang tanah yang telah bersetifikat dan 372 bidang tanah yang belum bersertifikat dan 29 bidang tanah dalam proses di BPN yang di targetkan akan terbit di tahun 2022. Persentase Tanah Pememerintah Provinsi yang Telah bersertifikat yang di targetkan dalam dokumen perencanaan telah mencapai target dengan capaian 56,12 % Dari capaian kinerja yang telah dihasilkan. Ada beberapa faktor yang mendorong pencapaian tersebut antara lain dukungan dari Korsupgah KPK melalui Rencana Aksi Program Penertiban Aset Daerah, Jaksa Pengacara Negara Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan melalui Surat Kuasa Khusus (SKK) atas penanganan hukum secara litigasi/non litigasi terhadap penyelesaian aset bermasalah serta Badan Pertanahan Nasional melalui MoU Bidang Pertanahan yang memperlancar proses inventarisasi dan pengamanan dari aset yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dengan pihak ketiga. Selain itu, SDM yang dimiliki oleh BKAD dan pengelola barang di seluruh OPD lingkup Pemprov SulSel juga turut andil dalam membantu menghimpun dan menertibkan administrasi pengelolaan barang dan aset daerah yang dimiliki dengan memanfaatkan sistem informasi. Meskipun begitu, masih ada juga beberapa faktor penghambat yang dirasakan dalam pengelolaan aset ini yakni terkait masih adanya beberapa bidang aset milik Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan yang tumpang tindih dengan Pemerintah Kabupaten/Kota bahkan

pihak Pemerintah Kabupaten/Kota telah mensertifikatkan lahan tersebut, demikian juga beberapa aset milik Pemerintah yang dikuasai ataupun diserobot oleh Pihak Ketiga bahkan ada yang telah mensertifikatkan selain atas nama Pemerintah Provinsi.

Tabel II.353.
Persentase Tanah Pemprov yang Sudah Bersertifikat
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017-2021

Indikator	Satuan	Tahun					
		2017	2018	2019	2020	Target 2021	Capaian 2021
Persentase Tanah Pemprov Yang Sudah Bersertifikat	%	Belum diukur				56,00	56,22

Sumber : Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, tahun 2021

2.3.4.4.9. Persentasi Peningkatan PAD

Setelah merebaknya pandemi Covid-19 yang mengakibatkan penurunan PAD pada tahun 2020, pengelolaan PAD pada tahun 2021 berhasil meningkat kembali sebagai dampak titik balik mulai pulihnya perekonomian negara dan daerah. Hal ini tergambar dari persentase peningkatan PAD tahun 2021 dari target sebesar 5 persen, dapat dicapai sebesar 14,88 persen. Realisasi penerimaan PAD tahun 2021 juga telah melampaui realisasi PAD pada masa sebelum pandemi di 2019. Capaian persentase peningkatan PAD tersebut ditunjang oleh pertumbuhan pembayaran pajak yang merupakan hasil upaya digitalisasi pembayaran pajak secara non tunai diantaranya melalui QRIS yang sejalan dengan kebutuhan wajib pajak di masa pandemi. Pertumbuhan penerimaan pajak daerah juga ditunjang kenaikan harga nikel serta membaiknya mobilitas masyarakat yang berdampak pada naiknya konsumsi BBM. Selain pajak daerah, pertumbuhan PAD yang tinggi pada tahun 2021 juga didukung meningkatnya penerimaan sektor Lain-Lain PAD Yang Sah berupa pembayaran klaim pada unit-unit Rumah Sakit Daerah yang berstatus BLUD serta hasil upaya optimalisasi melalui pemanfaatan aset-aset daerah yang berpotensi PAD melalui mekanisme sewa Barang Milik Daerah.

Tabel II.354.
Persentasi Peningkatan PAD
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017-2021

Indikator	Satuan	Tahun					
		2017	2018	2019	2020	Target 2021	Capaian 2021
Persentasi Peningkatan PAD	%	Belum diukur	7,33	4,82	6,00	5,00	14,88

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, tahun 2021

2.3.4.5. Kepegawaian Serta Pendidikan dan Pelatihan

2.3.4.5.1. Persentase pemenuhan kebutuhan pegawai ASN

Persentase Pemenuhan Kebutuhan ASN Tahun 2021 adalah sebesar 63 persen melampaui target sebesar 60 persen. Pemenuhan Kebutuhan ASN dilakukan secara terbuka dan kompetitif melalui jalur CASN yaitu CPNS dan PPPK baik PPPK jabatan fungsional guru maupun PPPK jabatan fungsional lainnya. Pada tahun 2021, telah dibuka sekitar 349 formasi jalur CPNS, 63 Formasi jalur PPPK Jabatan Fungsional dan 8.350 formasi untuk jalur PPPK Jabatan Fungsional Guru. Penetapan formasi ini berdasarkan jenis jabatan dengan mempertimbangkan kebutuhan unit kerja, jumlah ASN yang akan pensiun, Anjab dan ABK, serta prioritas pembangunan/potensi daerah. Adanya komitmen pimpinan dan staf, budaya organisasi serta peraturan-peraturan petunjuk pelaksanaan menjadi faktor pendukung dalam pelaksanaan pengadaan CPNS maupun PPPK dalam rangka pemenuhan kebutuhan ASN sehingga kegiatan tersebut dapat terlaksana dengan baik.

Tabel II.355.
Persentase pemenuhan kebutuhan pegawai ASN
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017-2021

Indikator	Satuan	Tahun					
		2017	2018	2019	2020	Target 2021	Capaian 2021
Persentase pemenuhan kebutuhan pegawai ASN	%	Belum diukur		57,00	56,00	60,00	63,00

Sumber : Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, tahun 2021

2.3.4.5.2. Persentase ASN yang menduduki jabatan struktural dan fungsional berbasis talenta

Persentase ASN yang menduduki jabatan Strukutural dan Fungsional Berbasis Talenta tahun 2021 sebesar 83,76 persen meningkat sebesar 1,76 persen dari tahun 2020 sebesar 82 persen disebabkan pelaksanaan Assestment terhadap Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan Pejabat Fungsional Jenjang Madya, Muda Dan Pertama. Pelaksanaan Assement ini dilaksanakan terhadap Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, Pejabat Fungsional, dan Pelaksana yang potensial dalam Pengisian Talent Pool dan Talent management telah di laksanakan sejak Tahun 2020 guna mewujudkan ASN yang profesional dan berintegritas. Dimana ASN sebagai tokoh utama dalam menjalankan tugas pemerintahan wajib memiliki kualifikasi, kompetensi, dan kinerja pada tahun yang akan datang.

Tabel II.356.
Persentase ASN yang menduduki jabatan struktural dan fungsional berbasis talenta di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017-2021

Indikator	Satuan	Tahun					
		2017	2018	2019	2020	Target 2021	Capaian 2021
Persentase ASN yang menduduki jabatan struktural dan fungsional berbasis talenta	%	Belum diukur		80,00	82,00	85,00	83,76

Sumber : Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, tahun 2021

2.3.4.5.3. Persentase ASN berkinerja baik dan sangat baik

Dengan berlakuknya Permenpan No.8 Tahun 2021 tentang Sistem Manajemen Kinerja PNS diperlukan dukungan perangkat daerah untuk menyelesaikan penilaian pada masing-masing indikator penilaian yang terdapat pada aplikasi e-kinerja. Persentase ASN Berkinerja Baik dan Sangat Baik tahun 2021 sebesar 90,38 persen meningkat sebesar 0,38 persen dari tahun 2020 sebesar 90 persen disebabkan realisasi capaian kinerja pegawai secara kualitatif tercapai dan di Tahun 2021 Jumlah ASN mengalami Penurunan hal ini disebabkan adanya ASN yang sudah memasuki Usia Pensiun. Pada Tahun 2020 Jumlah ASN Berkinerja Baik dan Sangat Baik sebanyak 8.801 Orang mengalami peningkatan pada tahun 2021 sebesar 8.852 Orang.

Tabel II.357.
Persentase ASN berkinerja baik dan sangat baik
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017 – 2021

Indikator	Satuan	Tahun					
		2017	2018	2019	2020	Target 2021	Capaian 2021
Persentase ASN berkinerja baik dan sangat baik	%	Belum diukur		88,00	90,00	91,00	90,38

Sumber : Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, tahun 2021

2.3.4.5.4. Cakupan SDM Aparatur yang Lulus Diklat Kompetensi Managerial, Kompetensi Diklat Fungsional, Kompetensi Diklat Sosial Kultural

Mengalami peningkatan 1,13 persen dari tahun 2020 capaian target SDM aparatur yang lulus Diklat Kompetensi Managerial, Kompetensi Diklat Fungsional, Kompetensi Diklat Sosial Kultural mencapai 100 persen pada tahun 2021. Telah terbentuknya model maupun metode baru terkait pengembangan kompetensi ASN (Coorporate University) menjadi faktor pendorong pencapaian target. Dalam rangka peningkatan kapasitas SDM aparatur diperlukan penyusunan regulasi terkait norma standar prosedur dan kriteria pengembangan SDM. Jumlah Pejabat Struktural 1.575 orang, Jumlah ASN Provinsi Sulawesi Selatan 22.975 orang, Jumlah Peserta yang telah mengikuti

Diklat 262 orang. Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural pada tahun 2021 sebesar 0,17 persen.

Tabel II.358.
Cakupan SDM Aparatur yang Lulus Diklat Kompetensi Managerial, Kompetensi Diklat Fungsional, Kompetensi Diklat Sosial Kultural Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017-2021

Indikator	Satuan	Tahun					
		2017	2018	2019	2020	Target 2021	Capaian 2021
Cakupan SDM Aparatur yang Lulus Diklat Kompetensi Managerial, Kompetensi Diklat Fungsional, Kompetensi Diklat Sosial Kultural	%	97,3	87,3	89,58	98,88	100	100

Sumber : Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah, Tahun 2021

2.3.4.6. Penelitian Dan Pengembangan

2.3.4.6.1. Persentase Perangkat Daerah yang mendapatkan penghargaan inovasi daerah

Persentase Perangkat Daerah yang mendapatkan penghargaan inovasi daerah pada tahun 2021 mencapai 11,32 persen melampaui target yang ditetapkan. Factor pendorong pencapaian target kinerja adalah:

a) Tersedianya peraturan terkait inovasi yang memadai, antara lain:
   - Undang-undang No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 386-389
   - Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah
   - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 tahun 2014 tentang Penilaian Inovasi Daerah
   - Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan No.25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Inovasi Daerah

b) Terdapat 6 dari 53 OPD/Satker yang mendapat penghargaan dalam Innovation Government Award (IGA) Tahun 2021 yaitu:
   - Bappelitbangda (Kajian Kolaborasi dalam Mewujudkan Kebijakan berbasis Pengetahuan di Sulawesi Selatan)
   - Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Prov. Sulsel (Gerakan Mencerdaskan Anak Bangsa dari Desa /GeMAs De)
   - Dinas Perhubungan Prov.Sulsel (Forum Lalulintas Dan Angkutan Jalan)
   - Inspektorat Daerah Prov.Sulsel (Aplikasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan /e-TLHP)
   - Badan Penanggulangan Bencana Daerah Prov. Sulsel (Sistem Analisis Data dan Laporan Bencana /Si-ANDALAN)
   - Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Prov. Sulsel (Young Entrepreneur School SULSEL/YESS).

Beberapa faktor penghambat dalam pencapaian persentase perangkat daerah yang mendapatkan penghargaan inovasi daerah antara lain: a) Masih rendahnya komitmen OPD dalam menghasilkan inovasi sesuai Peraturan

Gubernur Sulawesi Selatan No.25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Inovasi Daerah; b) Belum ada ajang/event yang memberikan apresiasi OPD Terinovatif kepada OPD Lingkup Provinsi; c) Inovasi belum dirasakan sebagai kebutuhan dan seringkali dihubungkan dengan ketersediaan anggaran oleh OPD.

Tabel II.359.
Persentase Perangkat Daerah yang mendapatkan penghargaan inovasi daerah
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017 – 2021

Indikator	Tahun					
	2017	2018	2019	2020	Target 2021	Capaian 2021
Persentase Perangkat Daerah yang mendapatkan penghargaan inovasi daerah	0	11,32	11,32	5,67	3,00	11,32

Sumber : Bappelitbngda Prov. Sulsel, Tahun 2021

2.3.4.7. Pengawasan

2.3.4.7.1. Persentase Penyelesaian Tindak lanjut Perangkat Daerah terhadap Hasil Pemeriksaan APIP

Capaian persentase penyelesaian tindak lanjut perangkat daerah terhadap hasil pemeriksaan APIP pada tahun mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya serta melampaui target 70,02 persen yang telah ditetapkan dengan capaian sebesar 73,93 persen. Hal ini dipengaruhi oleh adanya komitmen inspektorat dan perangkat daerah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih yang didukung dengan regulasi dan peran komitmen pimpinan. Kendala yang dihadapi dalam peningkatan koordinasi dengan perangkat daerah antara lain kondisi pademi yang sampai saat ini masih terus berkelanjutan yang berdampak pemberlakuan pembatasan pertemuan secara tatap muka.

Tabel II.360.
Persentase Penyelesaian Tindak lanjut Perangkat Daerah terhadap Hasil Pemeriksaan APIP di Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2017-2021

Indikator	Satuan	Tahun					
		2017	2018	2019	2020	Target 2021	Capaian 2021
Persentase Penyelesaian Tindak lanjut Perangkat Daerah terhadap Hasil Pemeriksaan APIP	%	Belum diukur	67,92	67,92	64,56	70,20	73,93

Sumber: Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Selataan, Tahun 2021

2.3.4.7.2. Persentase Penyelesaian Tindak lanjut Hasil Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota

Pada tahun 2021 capaian persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan umum dan teknis kabupaten/kota mengalami peningkatan dari

tahun sebelumnya serta melampaui target yang ditetapkan dengan capaian sebesar 70,04 persen. Peningkatan ini dipengaruhi oleh adanya komitmen inspektorat dan kabupaten/kota dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih yang didukung juga adanya regulasi dan peran komitmen pimpinan.

Tabel II.361.
Persentase Penyelesaian Tindak lanjut Hasil Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/ Kota di Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2017-2021

Indikator	Satuan	Tahun					
		2017	2018	2019	2020	Target 2021	Capaian 2021
Persentase Penyelesaian Tindak lanjut Hasil Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/ Kota	%	64,55	64,13	68,83	68,10	69,59	70,04

Sumber : Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2021

2.3.4.7.3. Persentase OPD yang hasil Nilai SAKIPnya meningkat

Pada tahun 2021 Inspektorat melakukan penilaian SAKIP 2020 terhadap 37 perangkat daerah. Dari hasil evaluasi yang dilakukan, maka peningkatan capaian kinerja 100 persen. Berdasarkan kategori hasil evaluasi, maka dapat dikategorikan untuk perangkat daerah kategori A sebanyak 8 PD, kategori BB sebanyak 28 PD dan untuk kategori B sebanyak 1 PD. Dari hasil evaluasi capaian ini merupakan wujud komitmen perangkat daerah dalam memenuhi ketersediaan dokumen dalam hal perencanaan, pengukuran, pelaporan, evaluasi dan capaian kinerja. Selain itu, adanya pendampingan yang dilakukan intens dari Biro Organisasi, Bappelitbangda dan Inspektorat. Hambatan terkait teknis dalam implementasi evaluasi SAKIP adalah keterbatasan sumberdaya yang kompeten dari evaluator serta masih lambatanya upaya yang dilakukan perangkat daerah dalam melakukan perbaikan atas catatan hasil evaluasi dari Inspektorat.

Tabel II.362.
Persentase OPD yang hasil Nilai SAKIPnya meningkat
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017-2021

Indikator	Satuan	Tahun					
		2017	2018	2019	2020	Target 2021	Capaian 2021
Persentase OPD yang hasil Nilai SAKIPnya meningkat	%	100	100	100	100	100	100

Sumber : Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2021

2.3.4.7.4. Persentase kebijakan pengawasan pemerintah yang diakomodir menjadi kebijakan pengawasan daerah

Dalam melaksanakan program kerja pengawasan di tahun 2021, Inspektorat berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik

Indonesia Nomor 23 Tahun 2020 tentang Perencanaan dan Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2021. Dalam pelaksanaannya, program, kegiatan serta sub kegiatan bersifat *mandatory* dan secara keseluruhan diakomodir 100 persen menjadi kebijakan pemerintah daerah dalam bentuk Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 92/I/2021 tentang Rencana Pengawasan Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021. Peran penting komitmen pimpinan dalam melaksanakan kebijakan terkait pengawasan menjadi salah faktor terlaksanannya tugas-tugas dibidang pengawasan.

Tabel II.363.
Persentase kebijakan pengawasan pemerintah yang diakomodir menjadi kebijakan pengawasan daerah di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017-2021

Indikator	Satuan	Tahun					
		2017	2018	2019	2020	Target 2021	Capaian 2021
Persentase kebijakan pengawasan pemerintah yang diakomodir menjadi kebijakan pengawasan daerah	%	100	100	100	100	100	100

Sumber : Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2021

2.3.4.7.5. Persentase pengaduan masyarakat terhadap OPD yang ditindaklanjuti

Pada tahun 2021, jumlah pengaduan yang berasal dari beberapa perangkat daerah lingkup Provinsi Sulawesi Selatan sebanyak 21 pengaduan dan sampai akhir Desember 2021 telah ditindaklanjuti 100 persen dalam bentuk 21 laporan hasil pemeriksaan. Pengaduan ini dilakukan oleh individu, kelompok maupun organisasi yang secara umum dalam bentuk pemeriksaan terhadap indisipliner, penyalahgunaan wewenang jabatan, pelanggaran kode etik dan gratifikasi kepada perangkat daerah. Dalam upaya meningkatkan pelayanan di bidang pengaduan masyarakat, Inspektorat Provinsi Sulawesi Selatan tetap mengoptimalkan dalam menjalankan peran dan fungsinya sebagai Consulting dan sosialisasi yang intens. Dalam implementasinya pencapaian indikator ini tetap ada hambatan antara lain perlunya fasilitas yang lebih mendukung terkait pengaduan, masih terdapat beberapa pengaduan yang tidak memperhatikan aspek kewenangan, dan masih terdapat beberapa pengaduan yang belum memenuhi kriteria atau syarat.

Tabel II.364.
Presen Persentase pengaduan masyarakat terhadap OPD yang ditindaklanjuti Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017-2021

Indikator	Satuan	Tahun					
		2017	2018	2019	2020	Target 2021	Capaian 2021
Persentase pengaduan masyarakat terhadap OPD yang ditindaklanjuti	%	100	100	100	100	100	100

Sumber : Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2021

2.3.4.7.6. Persentase pengaduan masyarakat terhadap pemerintah Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti

Presentase pengaduan masyarakat terhadap pemerintah kabupaten/kota yang ditindaklanjuti pada tahun 2021, sebanyak 8 pengaduan dan sampai akhir Desember 2021 telah ditindaklanjuti 100 persen yang keluarannya dalam bentuk 8 laporan hasil pemeriksaan. Jenis pemeriksaan pada tahun 2021 meliputi indisipliner, perceraian, pengadaan barang dan jasa. Dalam upaya meningkatkan pelayanan di bidang pengaduan masyarakat, Inspektorat Provinsi Sulawesi Selatan tetap mengoptimalkan dalam menjalankan peran dan fungsinya sebagai Consulting dan sosialisasi yang intens.

Tabel II.365.
Persentase pengaduan masyarakat terhadap pemerintah Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017-2021

Indikator	Satuan	Tahun					
		2017	2018	2019	2020	Target 2021	Capaian 2021
Persentase pengaduan masyarakat terhadap pemerintah Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti	%	100	100	100	100	100	100

Sumber : Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2021

2.3.4.8. Pengelolaan Penghubung

2.3.4.8.1. Persentase Pelayanan tamu daerah

Capaian indikator kinerja persentase pelayanan tamu daerah belum mencapai target disebabkan oleh beberapa faktor penghambat diantaranya: a) Belum optimalnya pembangunan gedung Kantor, Mess dan Anjungan TMII di Jakarta, b) Keterbatasan unit mobil dinas dan jumlah kamar, c) Adanya pandemi covid-19, d) Belum optimalnya kualitas dan Kompetensi ASN maupun tenaga magang.

Tabel II.366.
Persentase Pelayanan tamu daerah
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017 – 2021

Indikator	Satuan	Tahun					
		2017	2018	2019	2020	Target 2021	Capaian 2021
Persentase Pelayanan tamu daerah	%	86	77	50	13	100	20

Sumber : Badan Penghubung Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2021

2.3.4.8.2. Persentase Peningkatan Promosi dan Kerjasama Daerah

Kurangnya sarana dan prasarana promosi kebudayaan dan pariwisata daerah, belum efektifnya koordinasi pelayanan dengan pihak terkait, masih rendahnya kemampuan SDM aparat dalam bidang teknologi informasi, dukungan stakeholder dalam Kebudayaan daerah belum optimal, TMII tutup selama masa PPKM, pandemic covid-19, serta masih terbatasnya kemampuan keuangan daerah menjadi faktor penghambat pencapaian target kinerja persentase peningkatan promosi dan kerjasama daerah pada tahun 2020 dan 2021.

Tabel II.367.
Persentase Peningkatan Promosi dan Kerjasama Daerah
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017 – 2021

Indikator	Satuan	Tahun					
		2017	2018	2019	2020	Target 2021	Capaian 2021
Persentase Peningkatan Promosi dan Kerjasama Daerah	%	100	100	50	0	100	0

Sumber : Badan Penghubung Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2021

2.3.4.9. Pemerintahan Umum

2.3.4.9.1. Persentase keikutsertaan masyarakat dalam bela negara

Capaian indikator persentase keikutsertaan masyarakat dalam bela negara tahun 2018 hingga 2020 belum dilakukan pengukuran karena menyesuaikan Perubahan RPJMD 2018-2023. Capaian kinerja persentase keikutsertaan masyarakat dalam bela negara tahun 2021 melebihi target kinerja melalui pelaksanaan kegiatan perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang ideologi pancasila dan karakter kebangsaan. Jumlah peserta gerakan bela negara sejumlah 500 orang.

Tabel II.368.
Persentase keikutsertaan masyarakat dalam bela negara
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017 – 2021

Indikator	Satuan	Tahun					
		2017	2018	2019	2020	Target 2021	Capaian 2021
Persentase keikutsertaan masyarakat dalam bela negara	%	Belum diukur				20,00	75,00

Sumber : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2021

2.3.4.9.2. Persentase Tingkat partisipasi pemilih dalam pemilu

Capaian indikator persentase tingkat partisipasi pemilih dalam pemilu tahun 2017 hingga 2020 belum dilakukan pengukuran karena menyesuaikan Perubahan RPJMD 2018-2023. Tingkat partisipasi pemilih dalam pemilu tahun 2021 melebihi target kinerja 20 persen dengan capaian 75 persen. Sejumlah 100 orang mengikuti pendidikan politik yang dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Faktor penghambat pencapaian target diantaranya kualitas DPT Pemilu, mobilisasi masyarakat untuk golongan putih atau tidak memilih serta antusiasme masyarakat yang menurun pada hari pemilu.

Tabel II.369.
Persentase Tingkat partisipasi pemilih dalam pemilu
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017 – 2021

Indikator	Satuan	Tahun					
		2017	2018	2019	2020	Target 2021	Capaian 2021
Persentase Tingkat partisipasi pemilih dalam pemilu	%	Belum diukur				81,70	99,73

Sumber : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2021

2.3.4.9.3. Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang memenuhi 4 konsensus kebangsaaan

Peran aktif dari tokoh-tokoh agama yang tergabung dalam FKUB serta dukungan dari seluruh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi/Kabupaten/Kota se Sulawesi Selatan mendorong pencapaian target kinerja pada tahun 2021 mencapai 100 persen dari target 20 persen. Capaian indikator persentase organisasi kemasyarakatan yang memenuhi 4 konsensus kebangsaaan tahun 2017 hingga 2020 belum dilakukan pengukuran karena menyesuaikan Perubahan RPJMD 2018-2023.

Tabel II.370.
Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang memenuhi 4 konsensus kebangsaaan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017 – 2021

Indikator	Satuan	Tahun					
		2017	2018	2019	2020	Target 2021	Capaian 2021
Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang memenuhi 4 konsensus kebangsaaan	%	Belum diukur				20	100

Sumber : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2021

2.3.4.9.4. Persentase Penurunan Penyalahgunaan Narkoba

Pelaksanaan kegiatan dan fasilitasi pencegahan penyalahgunaa narkoba di tingkat kabupaten/kota mendorong pencapaian target kinerja 100 persen penurunan penyalahgunaan narkoba. Dukungan terkait kebijakan penyalaghunaan narkoba melalui penetapan PERDA tentang Penyalahgunaan Narkotika diperlukan untuk mendorong keberhasilan pencapaian target kinerja program. Capaian indikator persentase Penurunan Penyalahgunaan Narkoba tahun 2017 hingga 2020 belum dilakukan pengukuran karena menyesuaikan Perubahan RPJMD 2018-2023.

Tabel II.371.
Persentase Penurunan Penyalahgunaan Narkoba
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017 – 2021

Indikator	Satuan	Tahun					
		2017	2018	2019	2020	Target 2021	Capaian 2021
Persentase Penurunan Penyalahgunaan Narkoba	%	Belum diukur				20	100

Sumber : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2021

2.3.4.9.5. Persentase Wilayah Sulsel Berpotensi Konflik Agama yang ditangani

Dukungan dari tokoh-tokoh agama khususnya yang tergabung dalam Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dalam rangka koordinasi fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di daerah menjadi faktor pendorong capaian target kinerja persentase wilayah sulsel berpotensi konflik agama yang ditangani mencapai 100 persen. Capaian indikator persentase Wilayah Sulsel Berpotensi Konflik Agama yang ditangani tahun 2017 hingga 2020 belum dilakukan pengukuran karena menyesuaikan Perubahan RPJMD 2018-2023.

Tabel II.372.
Persentase Wilayah Sulsel Berpotensi Konflik Agama yang ditangani
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017 – 2021

Indikator	Satuan	Tahun					
		2017	2018	2019	2020	Target 2021	Capaian 2021
Persentase Wilayah Sulsel Berpotensi Konflik Agama yang ditangani	%	Belum diukur				100	100

Sumber : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2021

2.3.4.9.6. Persentase Penurunan jumlah konflik di lingkungan masyarakat

Capaian indikator persentase penurunan jumlah konflik di lingkungan masyarakat tahun 2017 hingga 2020 belum dilakukan pengukuran karena menyesuaikan pelaksanaan program pada Perubahan RPJMD 2018-2023. Tahun 2021 capaian kinerja penurunan jumlah konflik di lingkungan masyarakat melampaui target kinerja dengan jumlah kasus tahun 2020 sebesar 80 kasus menurun menjadi 21 kasus pada tahun 2021. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor pendorong diantaranya; a) Optimalisasi peran forum kewasapadaan dini daerah maupun forum kewaspadaan dini masyarakat dalam deteksi dini potensi konflik yang ada, b) Meningkatnya sinergitas forum-forum yang ada di masyarakat seperti FOKDM, FKUB, FPK dan forum keagamaan lainnya, c) Meningkatnya sosialisasi konflik di masyarakat.

Tabel II.373.
Persentase Penurunan jumlah konflik di lingkungan masyarakat
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017 – 2021

Indikator	Satuan	Tahun					
		2017	2018	2019	2020	Target 2021	Capaian 2021
Persentase Penurunan jumlah konflik di lingkungan masyarakat	%	Belum diukur				20 % (64 kasus)	73,75

Sumber : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2021

2.4. Aspek Daya Saing Daerah

2.4.1 Indeks Layanan Infrastruktur

Indeks layanan infrastruktur tahun 2021 menunjukkan capaian sebesar 79,44, kondisi ini belum mencapai target yang ditetapkan sebesar 79,50. Kondisi ini disebabkan karena indikator kemantapan jalan dan konektivitas jalan provinsi yang merupakan indikator pembangun dari indeks layanan infrastruktur yang tidak mencapai target. Tidak tercapainya target pada indikator kemantapan jalan dipengaruhi oleh laju kerusakan jalan yang lebih

tinggi dibanding pembangunan dan pemeliharaan yang dilakukan, tingginya laju kerusakan jalan disebabkan oleh beberapa factor diantaranya bencana banjir dan beban jalan yang tidak sesuai dengan kemampuan jalan. Data selengkapnya pada tabel berikut.

Tabel II.374.
Indeks Layanan Infrastruktur
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018 – 2021

Indikator	Satuan	Tahun				
		2018	2019	2020	Target 2021	Capaian 2021
25% Kemantapan Jalan	%	14,74	15,38	15,65	18,08	17,50
15% Konektivitas Jalan Provinsi	%	16,28	17,58	19,40	18,32	17,84
20% Ketersediaan Pelabuhan Pengumpan Regional	%	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
20% Rasio Eletrifikasi Desa	%	19,20	19,70	19,64	19,60	19,65
20% Rasio Jaringan Irigasi	%	3,17	3,29	3,38	3,50	4,45
Indeks Layanan Infrastruktur	Nilai	73,38	75,95	78,07	79,50	79,44

Sumber : Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, 2022

Tabel II.375.
Proporsi Panjang Jaringan Jalan dalam Kondisi Baik
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017-2021

Indikator	Satuan	Tahun					
		2017	2018	2019	2020	Target 2021	Capaian 2021
Panjang Jalan Kondisi baik	Km	516.26	720.29	785.35	698,85	888,73	783,31
Panjang jalan Keseluruhan	Km	1.500,15	2.009,35	2.009,35	2.009,35	2.009,35	2.009,35
Mantap	Km	953,65	1.184,44	1.236,15	1.328,58	1.452.90	1.406,74
	%	63,57	58,95	61,52	66,12	72,30	70,01
Tidak Mantap	Km	546,5	824,91	773,2	670,81	556,45	602,62
Proporsi Panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	**%**	**34,41**	**35,85**	**39,84**	**34,78**	**44,23**	**38,98**

Sumber : Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, 2022

2.4.2 Produktivitas Total Daerah

Produktivitas total daerah Provinsi Sulawesi Selatan menunjukkan capain yang kembali mengalami perbaikan pada tahun 2021 dengan peningkatan sebesar 13,98 persen, meskipun demikian capaian tersebut belum sesuai target yang diharapkan. Kondisi ini disebabkan oleh peningkatan

angkatan kerja melebihi target yang ditetapkan dan capaian Pendapatan Regional Domestik Bruto (PDRB) yang lebih rendah. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan penduduk usia kerja cukup besar ditahun 2021. Data selengkapnya terkait produktivitas daerah tahun 2017 hingga tahun 2021 pada tebel berikut.

Tabel II.376.
Produktifitas Total Daerah Tahun 2017-2021

INDIKATOR	TAHUN					
	2017	2018	2019	2020	Target 2021	Capaian 2021
Angkatan Kerja	3.812.358	3.988.029	4.030.400	4.275.807	4.351.256	4.412.782
PDRB ADHK (Rp.Milyar)	288.814,17	309.156,19	330.506,38	328.154,57	368.751,31	343.402,51
Produktifitas Total Daerah (Rp.1000/Angkatan Kerja)	75.757,36	77.521,05	82.003,37	76.746,81	84.745.94	77.819,96

Sumber : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Tahun 2020

Tabel II.377.
Angka Partisipasi Angkatan Kerja
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017-2021

Indikator	Satuan	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	Capaian 2021*
Angkatan Kerja	Orang	3.812.358	3.988.029	4.030.400	4.276.437	4.412.782
Bekerja	Orang	3.598.663	3.774.924	3.830.096	4.006.620	4.160.433
Pengangguran	Orang	213.695	213.105	200.304	269.817	252.349
Bukan Angkatan Kerja	Orang	2.439.019	2.340.550	2.376.885	2.468.484	2.404.818
Penduduk Usia Kerja	Orang	6.251.377	6.328.579	6.407.285	6.744.921	6.817.600
Angka Partisipasi Angkatan Kerja	%	60,98	63,01	62,9	63.40	64,73

Sumber : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Tahun 2020
**Capaian Agustus 2021*

2.4.3 Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Perkapita

Capaian Pengeluaran konsumsi rumah tangga perkapita menunjukkan peningkatan dari tahun 2017 hingga tahun 2021. Kondisi ini meningkat seiring dengan peningkatan PDRB perkapita, yang menunjukkan bahwa pendapatan masyarakat terus mengalami peningkatan dan perpengaruh terhadap tingkat pengeluaran konsumsi rumah tangga. Data selengkapnya terkait pengeluran konsumsi rumah tangga pada tabel berikut.

Tabel II.378.
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Perkapita
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017-2021

Indikator	Satuan	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (PDRB-ADHB)	Milyar Rp	225.404,55	251.147,50	274.463,64	278.594,01	290.999,56
Jumlah Penduduk	Jiwa	8.690.294	8.749.052	8.819.549	8.888.762	8.956.181
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Perkapita/Tahun	Juta Rp/ Kapita/ tahun	25,94	28,71	31,12	31,34	32,38

Sumber : BPS 2018 – 2022

2.4.4 Persentase Pengeluaran Konsumsi non Pangan Perkapita

Pengeluaran konsumsi non pangan menunjukkan persentase capaian yang berfluktuasi dari tahun 2017 hingga tahun 2021, dengan rata-rata persentase pengeluaran konsumsi non pangan perkapita sebesar 51,57 persen. Kondisi ini menunjukkan bahwa pengeluarn konsumsi non pangan sedikit lebih besar dibanding dengan pengeluaran konsumsi pangan. Pengeluaran terbesar dari Dari 6 komponen pengeluaran konsumsi non pangan berapa pada biaya untuk perumahan dan fasilitas rumah tangga. Data selengkapnya terkait persentase pengeluaran konsumsi non pangan perkapita pada tabel berikut.

Tabel II.379.
Persentase Pengeluaran Konsumsi Non Pangan Perkapita
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017-2021

Indikator	Satuan	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
Pengeluaran kelompok Komoditas Non Pangan	Rp.	477.290	520.779	534.484	541.681	570.615
Total Pengeluaran	Rp.	927.908	1.016.244	1.022.418	1.057.864	1.104.097
Persentase Pengeluaran Konsumsi non Pangan Perkapita	%	51,44	51,25	52,27	51,21	51,68

Sumber : BPS, 2018 - 2022.

2.4.5 Nilai Tukar Petani

Nilai Tukar Petani (NTP) merupakan salah satu indikator untuk melihat tingkat kemampuan/daya beli petani di pedesaan. Nilai tukar petani ini merupakan perbandingan indeks harga yang diterima petani (it) terhadap indeks harga yang dibayar petani (ib). Nilai tukar juga menunjukkan daya tukar dari produk pertanian dengan barang dan jasa yang dikonsumsi maupun untuk biaya produksi. Nilai tukar petani Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2017 hingga tahun 2018 mengalami peningkatan, namun ditahun 2019 menurun sebagai dampak dari pandemic covid 19, namun ditahun 2020 hingga 2021 mulai mengalami perbaikan meskipun capaian tahun 2021 belum mencapai target yang ditetapkan ditahun 2021 yaitu 113,86, tidak tercapai target tersebut dipengaruhi oleh menurunnya nilai tukar petani dari subsektor tanaman pangan, holtikultura dan peternakan. Secara keseluruhan nilai tukar petani di Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2017 – 2021 masih dibawah rata-rata nilai tukar petani secara nasional.

Tabel II.380.
Nilai Tukar Petani (NTP)
Di Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2017-2021

Indikator	Satuan	Tahun					
		2017	2018	2019	2020	Target 2021	Capaian 2021
Nilai Tukar Petani Sulawesi Selatan	Ribu Rp	100,85	102,29	96,77	96,97	113,86	100,37
Nilai Tukar Petani Nasional	Ribu Rp.	101, 28	102,46	103,21	100,90	NA	108,34

Sumber : BPS Sulawesi Selatan, 2022

Tabel II.381.
Nilai Tukar Petani Berdasarkan Sub Sektor
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017-2021

Sub Sektor	Tahun				
	2017	2018	2019	2020	2021
Tanaman Pangan	99,17	102,25	100,54	100,66	93,79
Hortikultura	107,76	106,14	113,85	106,28	105,45
Perkebunan Rakyat	93,64	95,64	95,62	95,90	117,66
Peternakan	109,73	110,88	113,60	100,38	98,89
Perikanan	105,13	105,01	106,68	97,54	107,70
Perikanan Tangkap	110,97	107,63	107,16	99,64	107,63
Perikanan Budidaya	100,83	103,08	106,33	96,06	107,58

Sumber : Statistik Nilai Tukar Petani, BPS Tahun 2021

2.4.6 Persentase Desa Berstatus Swasembada Terhadap Total Desa

Capaian persentase desa berstatus swasembada terhadap total desa menunjukkan peningkatan dari tahun 2019 hingga 2021. Desa swasembada merupakan desa yang masyarakatnya telah mampu memanfaatkan dan mengembangkan sumberdaya alam dan potensinya sesuai dengan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan. Meskipun capaian yang diperoleh telah mengalami peningkatan namun persentasenya masih sangat kecil jika dibanding jumlah keseluruhan desa yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan, hal ini disebabkan karena pada umumnya desa berstatus swasembada baru dikemukan pada beberapa desa yang merupakan ibukota kecamatan. Data selengkapnya pada atbel berikut.

Tabel II.382.
Persentase desa berstatus swasembada terhadap total desa

Indikator	Satuan	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
Jumlah Desa	Desa	Belum diukur	3.049	3.051	3.051	3.051
Jumlah Desa Swasembada	Desa		81	81	78	96
Persentase desa berstatus swasembada terhadap total desa	%		2,66	2,65	2,56	3,15

Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Tahun 2022

2.4.7 Rasio Ekspor dan Impor Terhadap PDRB (Indikator Keterbukaan Ekonomi)

Capaian nilai eksport dan import terhadap PDRB Provinsi Sulawesi Selatan menunjukkan telah mulainya perbaikan ekonomi dalam masa pandemic covid 19, dengan nilai capaian ditahun 2021 lebih besar dibanding tahun 2020 dan capaian ini juga telah mencapai target yang ditetapkan sebesar 58,40. Kondisi ini didorong oleh terjadinya peningkatan nilai eksport sebesar 26,66 persen. Dari 17 komoditas ekspor provinsi Sulawesi Selatan, jenis komoditas yang memberikan kontribusi peningkatan nilai ekpor terbesar adalah komoditas besi dan baja dengan peningkatan sebesar 176,88 persen, dari US$ 66,35 pada tahun 2020 menjadi US$ 176,88 ditahun 2021. Data terkait rasio ekpor impor terhadap PDRB Provinsi Sulawesi Selatan selengkapnya pada tabel berikut.

Tabel II.383.
Rasio Ekspor + Impor Terhadap PDRB
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017-2021

Indikator	Satuan	Tahun					
		2017	2018	2019	2020	Target 2021	Capaian 2021*
Nilai Ekspor	Juta US$	1.185	1.455	1.557	1.474	1.466	1.867
Nilai Impor	Juta US$	1.043	1.184	1.154	800	664	653

Indikator	Satuan	Tahun					
		2017	2018	2019	2020	Target 2021	Capaian 2021*
Net eksport	Juta US$	141	271	403	674	802	1.143
Nilai PDRB di konversi, Milyar Rp. Ke Juta US$	Juta US$	34,69	32,39	35,64	34,56	36,48	38,09
Rasio Ekspor + Import Terhadap PDRB (Indikator Keterbukaan Ekonomi)	Angka	64,23	81,48	76,07	65,80	58,40	68,13

Sumber : BPS, 2022

2.4.8. Rasio Ketergantungan

Rasio ketergantungan merupakan salah satu indikator yang dapat berfungsi sebagai indikator demografi maupun indkator ekonomi. Sebagai indikator demografi, rasio ketergantungan digunakan untuk mengetahui beban ketergantungan penduduk yang belum atau tidak produktif terhadap penduduk usia produktif disuatu wilayah. Sedangkan sebagai indikator ekonomi, rasio ketergantungan untuk mengetahui suatu daerah dapat digolongkan dalam kategori maju atau masih tahap berkembang.

Tabel II.384.
Rasio Ketergantungan Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional
Tahun 2017 – 2021

Uraian/Indikator	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
Penduduk Usia 0 – 14 thn	Jiwa	2.453.009	2.454.795	2.457.016	2.213.433	2.226.095
Penduduk Usia 65+ thn	Jiwa	523.611	538.034	553.717	651.470	625.736
Jumlah penduduk Usia 0-14 dan 65+ thn	Jiwa	2.976.620	2.992.829	3.010.733	2.864.903	2.851.831
Penduduk Usia 15 –64 thn (Usia Produktif)	Jiwa	5.713.674	5.779.141	5.832.507	6.208.606	6.287.700
Rasio Ketergantungan Provinsi Sulawesi Selatan	Per 100 penduduk produktif	52,10	51,79	51,62	46,14	45,36
Rasio Ketergantungan Nasional	Per 100 penduduk produktif	48,42	48,23	47,99	47,89	45,72

Sumber : BPS, 2022

Tabel tersebut juga mengambarkan bahwa Provinsi Sulawesi Selatan sedang memasuki bonus demografi dengan jumlah penduduk usia produktif yang terus meningkat. Jika dibandingkan dengan capaian rasio ketergantungan nasional, maka nilai rasio ketergantungan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2020 dan 2021 lebih rendah dari capaian nasional yang berarti bahwa beban ketergantungan usia non produktif lebih rendah dibanding beban ketergantungan pada tingkat nasional.

2.4.9. Angka Kriminalitas

Angka kriminalitas merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat stabilitas keamanan yang sangat berpengaruh terhadap aktivitas masyarakat. Selain stabilitas politik, aspek keamanan juga merupakan salah satu indikator penting bagi investor untuk berinvestasi pada suatu wilayah tertentu. Data angka kriminalitas di Provinsi Sulawesi Selatan dari tahun 2019 hingga tahun 2021 menunjukkan terjadinya penurunan terhadap jumlah kasus yang dilaporkan. Jumlah kasus kriminal tertinggi berada di Kota Makassar sebanyak 31 persen dan jumlah kasus terendah tercatat di Kabupaten Enrekang sebanyak 0,39 persen dari kasus krimanalitas yang dilaporkan pada tahun 2021. Capaian angka kriminalitas tahun 2021 telah melampaui target yang ditetapkan tahun 2021. Sedangkan capaian angka kriminalitas tahun 2017 tbelum dilakukan pengukuran sebab indikator yang digunakan menyesuaikan dengan indikator program yang baru ditetapkan pada perubahan RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan. Data selengkapnya angka kriminalitas di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017 – 2021 selengkapnya pada tabel berikut.

Tabel II.385.
Angka Kriminalitas di Provinsi Sulawesi Selatan
Tahun 2017 – 2021

Indikator	Satuan	Tahun					
		2017	2018	2019	2020	Target 2021	Capaian 2021
Angka Kriminalitas	Kasus	Belum diukur	12.100	16.730	15.158	24.709	15.210

Sumber: BPS, 2022

2.5 Capaian Indikator Pembangunan Daerah

2.5.1 Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2020-2021

Indikator Kineja Utama (IKU) adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis operasional. RPJMD Perubahan Provinsi Sulawesi Selatan 2018-2023 menetapkan indikator kinerja utama kepala daerah melalui 6 Indikator Tujuan dan 11 Indikator Sasaran yang mendukung pencapaian visi dan misi Gubernur Sulawesi Selatan. Penjelasan terkait pencapaian masing-masing target indikator tujuan dan sasaran terdapat pada uraian aspek kesejahteraan masyarakat (subBab 2.2) dan aspek daya saing daerah (subBab 2.4).

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah Sulawesi Selatan tahun 2018-2023, maka dirumuskan program pembangunan daerah yang dilaksanakan selama 5 (lima) tahun. Berdasarkan Perubahan RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan 2018-2023 yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023, maka ditetapkan sejumlah 63 Program Prioritas untuk mendukung pencapaian IKU Gubernur Sulawesi Selatan.

Berikut matriks pencapaian indikator tujuan, sasaran, dan program prioritas Gubernur Sulawesi Selatan tahun 2021 berdasarkan target Perubahan RPJMD Provinsi Sulawesi 2018-2023 yang ditetapkan. Penjelasan terkait pencapaian masing-masing target indikator program prioritas terdapat pada uraian aspek pelayanan umum (subBab 2.3).

Tabel II.386.
Target dan Capaian IKU Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2020	Tahun 2021			Target dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2021
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)	
Tujuan 1	**Meningkatkan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang baik**	**Indeks Reformasi Birokrasi**	**Huruf/ Angka**	**B (60,07)**	**BB (71-80)**	**B (61,18)**	**86,17**	**BB (71-80)**
Sasaran 1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah	Nilai SAKIP Provinsi	Huruf/ Angka	B (63,02)	BB (>70-80)	B (65,01)	92,87	BB (>70-80)
Sasaran 2	Berkembangnya inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Indeks Pelayanan Publik	Huruf/ Angka	B	B (3,51–4)	A (4,10)	102,5	B (3,51–4)
Tujuan 2	**Meningkatkan pemerataan infrastruktur wilayah**	**Indeks Williamson**	**Angka**	**0,620**	**0,610**	**0,568**	**107,39**	**0,610**
Sasaran 3	Meningkatnya aksesibilitas infrastruktur wilayah	Indeks Layanan Infrastruktur	Indeks	77,79	79,50	79,44	99,92	81,69
Tujuan 3	**Meningkatkan Kesejahteraan masyarakat secara merata**	**PDRB Per Kapita ADHB**	**Rp. Juta**	**56,51**	**59,23**	**59,66**	**100,72**	**59,32**
		Tingkat Kemiskinan	**Persen**	**8,99**	**8,70**	**8,53**	**101,99**	**9,8**

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2020	Tahun 2021			Target dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2021
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)	
Sasaran 4	Meningkatnya penyerapan tenaga kerja sektor unggulan daerah	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Persen	6,31	6,08	5,72	106,29	7,2
Sasaran 5	Menurunnya kesenjangan Pendapatan antar lapisan masyarakat	Rasio Gini	Angka	0,382	0,382	0,377	101,32	0,414
Tujuan 4	**Meningkatkan Kualitas SDM yang Kompetitif, Inklusif dan Berkarakter**	**IPM**	**Angka**	**71,93**	**72,20**	**72,24**	**100,05**	**72,27**
Sasaran 6	Meningkatnya Kualitas dan Pemerataan Pendidikan	Indeks Pendidikan	Indeks	65,29	66,29	65,76	99,20	65,87
Sasaran 7	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Indeks Kesehatan	Indeks	77,80	77,76	77,94	100,23	77,76
Sasaran 8	Meningkatnya keberdayaan perempuan dalam pembangunan	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Indeks	74,78	75,21	74,76	99,40	75,21
Sasaran 9	Meningkatnya aktualisas nilai-nilai agama dan budaya dalam kehidupan masyarakat	Angka Kriminalitas	Angka	15.158	24.709	15.210	162,45	24.709
Tujuan 5	**Meningkatkan Produktivitas dan Nilai**	**Pertumbuhan Ekonomi**	**Persen**	**-0,70**	**4,10-5,55**	**4,65**	**113,41**	**4,10-5,55**

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2020	Tahun 2021			Target dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2021
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)	
	Tambah Produk Unggulan Daerah							
Sasaran 10	Meningkatnya hilirisasi ekonomi sektor unggulan daerah	Produktifitas Total Daerah	Rp/Angk. Kerja	76.744.453	76.913.142	77.819.958	101,18	84.745.947
Tujuan 6	**Meningkatkan kualitas lingkungan hidup secara berkelanjutan**	**IKLH**	**Poin**	**71,75**	**72,25**	**73,23**	**101,35**	**72,25**
Sasaran 11	Terpeliharanya kualitas lingkungan hidup serta kemampuan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim	Potensi Penurunan Emisi GRK	Juta Ton CO2Eq	0,96	1,07	1,13	105,61	1,07

Tabel II.387.
Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran sampai dengan Tahun 2021 terhadap Target Akhir RPJMD

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2021	Target Akhir RPJMD 2018-2023	Tingkat Capaian s.d Tahun Berjalan
Tujuan 1	**Meningkatkan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang baik**	**Indeks Reformasi Birokrasi**	**Huruf/ Angka**	**B (61,18)**	**A (81-90)**	**75,53**
Sasaran 1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah	Nilai SAKIP Provinsi	Huruf/ Angka	B (65,01)	A (>80-90)	81,26
Sasaran 2	Berkembangnya inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Indeks Pelayanan Publik	Huruf/ Angka	A (4,10)	A (4,51 – 5,0)	90,91
Tujuan 2	**Meningkatkan pemerataan infrastruktur wilayah**	**Indeks Williamson**	**Angka**	**0,568**	**0,607**	**106,86**
Sasaran 3	Meningkatnya aksesibilitas infrastruktur wilayah	Indeks Layanan Infrastruktur	Indeks	79,44	83,40	95,25
Tujuan 3	**Meningkatkan Kesejahteraan masyarakat secara merata**	**PDRB Per Kapita AHB**	**Rp. Juta**	**59,66**	**65,98**	**90,42**
		Tingkat Kemiskinan	**Persen**	**8,53**	**7,45**	**87,33**
Sasaran 4	Meningkatnya penyerapan tenaga kerja sektor unggulan daerah	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Persen	5,72	5,69	99,47

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2021	Target Akhir RPJMD 2018-2023	Tingkat Capaian s.d Tahun Berjalan
Sasaran 5	Menurunya kesenjangan Pendapatan antar lapisan masyarakat	Rasio Gini	Angka	0,377	0,380	100,79
Tujuan 4	**Meningkatkan Kualitas SDM yang Kompetitif, Inklusif dan Berkarakter**	**IPM**	**Angka**	**72,24**	**73,05**	**98,89**
Sasaran 6	Meningkatnya Kualitas dan Pemerataan Pendidikan	Indeks Pendidikan	Indeks	65,76	67,05	98,07
Sasaran 7	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Indeks Kesehatan	Indeks	77,94	77,86	100,10
Sasaran 8	Meningkatnya keberdayaan perempuan dalam pembangunan	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Indeks	74,76	77,23	98,82
Sasaran 9	Meningkatnya aktualisas nilai-nilai agama dan budaya dalam kehidupan masyarakat	Angka Kriminalitas	Angka	15.210	24.438	160,67
Tujuan 5	**Meningkatkan Produktivitas dan Nilai Tambah Produk Unggulan Daerah**	**Pertumbuhan Ekonomi**	**Persen**	**4,65**	**5,04-6,52**	**92,26**
Sasaran 10	Meningkatnya hilirisasi ekonomi sektor unggulan daerah	Produktifitas Total Daerah	Rp/Angk. Kerja	77.819.958	77.349.122	100,61

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2021	Target Akhir RPJMD 2018-2023	Tingkat Capaian s.d Tahun Berjalan
Tujuan 6	**Meningkatkan kualitas lingkungan hidup secara berkelanjutan**	**IKLH**	**Poin**	**73,23**	**72,84**	**100,53**
Sasaran 11	Terpeliharanya kualitas lingkungan hidup serta kemampuan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim	Potensi Penurunan Emisi GRK	Juta Ton CO2Eq	1,13	1,347	83,89

2.5.2 Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2017 -2021

Pengolahan informasi perencanaan pembangunan daerah berbasis data mencakup kondisi geografis, demografi, potensi sumber daya, ekonomi dan keuangan, dan informasi terkait dengan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah meliputi aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum dan aspek daya saing daerah. Untuk mengetahui capaian indikator kinerja dari setiap aspek/fokus menurut bidang urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah provinsi sesuai dengan kewenangan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan dengan malakukan evaluasi terhadap capaian indikator kinerja selama periode 5 (lima) tahun. Sebagai gambaran pencapaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintah tahun 2017-2021 capaian indikator kinerja daerah (IKD) sesuai amanah Permendagri 86 Tahun 2017 dijabarkan pada tabel berikut ini:

Tabel II.388.
Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017 – 2021

NO.	ASPEK/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	TAHUN				
			2017	2018	2019	2020	2021
	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT						
	KESEJAHTERAAN DAN PEMERATAAN EKONOMI						
1	Pertumbuhan Ekonomi	%	7,21	7,06	6,92	-0,70	4,65
2	Laju Inflasi	%	4,44	3,50	2,35	2,04	2,40
3	PDRB Perkapita (ADHB)	Triliun Rp	47,82	52,64	57,18	55,68	59,66
4	Indeks Gini	Angka	0,429	0,388	0,391	0,382	0,377
5	Indeks Wiliamson	Indeks	0,610	0,622	0,639	0,620	0,568
6	Tingkat Kemiskinan	%	9,48	8,87	8,56	8,99	8,53
	• Jumlah Penduduk Miskin	Ribu Jiwa	825,97	779,64	759,58	776,84	784,98
	• Indeks Kedalaman Kemiskinan	Angka	1,92	1,68	1,63	1,65	1,40
	• Persentase Penduduk Diatas Garis Kemiskinan	%	90,52	91,13	91,44	91,04	91,47
7	Kontribusi Sektor Pertanian (Hortikultura) terhadap PDRB	%	1,24	1,12	1,11	1,13	1,13
8	Kontribusi Sektor Pertanian (Tanaman Pangan) terhadap PDRB	%	7,55	7,16	6,34	6,50	6,33
9	Produksi Sektor Pertanian	Trilyun Rupiah	231,64	225,89	60,19	156,62	398,63
10	Kontribusi Sektor Perkebunan (Tanaman Keras) terhadap PDRB	%	4,33	4,26	3,88	3,94	4,07
11	Produksi Sektor Perkebunan	Trilyun Rupiah	8,75	11,19	10,95	8,60	10,91
12	Kontribusi Sektor Kehutanan terhadap PDRB	%	0,07	0,06	0,06	0,07	0,06
13	Kontribusi Sektor Pertambangan terhadap PDRB	%	4,91	4,80	4,62	4,67	4,75

NO.	ASPEK/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	TAHUN				
			2017	2018	2019	2020	2021
14	Kontirbusi Sektor Kelautan dan Perikanan terhadap PDRB	%	8,44	8,40	8,44	8,53	9,43
15	Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB	%	13,71	14,38	14,80	14,48	14,58
16	Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB	%	13,82	12,87	13,17	12,76	12,50
17	Kontribusi Industri Rumah Tangga terhadap PDRB sektor industri	%	7,22	6,79	7,35	7,35	8,91
18	Pertumbuhan PDRB Industri	%	5,03	0,94	9,92	-4,57	3,02
	KESEJAHTERAAN SOSIAL						
1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Angka	70,34	70,90	71,66	71,93	72,24
	• Angka Harapan Hidup (AHH)	Tahun	69,84	70,08	70,43	70,57	70,66
	• Angka Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)	Tahun	7,95	8,02	8,26	8,38	8,46
	• Angka Harapan Lama Sekolah (HLS)	Tahun	13,28	13,34	13,36	13,45	13,52
	• Pengeluaran Perkapita	Ribu Rupiah	10.489	10.814	11.118	11.079	11.184
2	Indeks Pendidikan	Angka	63,39	63,79	64,64	65,29	65,76
3	Angka Melek Huruf (AMH)	Tahun	91,65	91,81	92,45	92,56	92,49
4	Indeks Kesehatan	Angka	76,68	77,05	77,58	77,80	77,94
5	Persentase Balita Stunting	%	34,80	35,60	30,60	N/A	27,40
6	Tingkat Partispasi Angkatan Kerja	%	60,98	63,02	62,90	63,40	64,73
7	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	5,61	4,94	4,62	6,31	5,72
	• Jumlah Penganggur	Ribu Jiwa	213.695	213.105	200.304	269.817	252.349
8	Rasio Penduduk yang Bekerja	%	94,39	94,65	95,03	93,69	94,21
9	Proporsi tenaga kerja yang berusaha sendiri dan pekerja bebas keluarga terhadap total kesempatan kerja	%	37,30	36,5	36,9	36,9	37,32

NO.	ASPEK/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	TAHUN				
			2017	2018	2019	2020	2021
10	Persentase PAD terhadap Pendapatan	%	40,62	42,67	43,23	41,54	44,65
11	Opini BPK	Opini	WTP	WTP	WTP	WDP	WTP
12	Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	%	92,60	82,60	83,40	83,7	80,40
13	Penanganan Daerah Rawan Pangan (Data Timpang)	%	5,88	5,21	16,29	7,49	25,64
	SENI, BUDAYA, DAN OLAHRAGA						
1	Jumlah lembaga sanggar kesenian per 10.000 penduduk	Per 10.000 penduduk	N/A	0,0452	0,0471	0,0468	0,0468
2	Jumlah gedung kesenian per 10.000 penduduk	Per 10.000 penduduk	N/A	0,0001	0,0001	0,0001	0,0001
3	Jumlah gedung olahraga per 10.000 penduduk	Per 10.000 penduduk	N/A	0,0025	0,0026	0,0074	0,0074
	ASPEK PELAYANAN UMUM						
	PELAYANAN URUSAN WAJIB DASAR						
	Pendidikan						
1	Angka Partisipasi Kasar SMA/MA/SMK	%	83,14	81,74	86,09	86,44	90,05
2	Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket C	%	59,86	60,03	60,14	60,63	67,40
3	Angka Partisipasi Sekolah Usia 16 - 18 Tahun	%	70,60	70,18	70,85	70,89	71,21
4	Angka Putus Sekolah SMA/SMK/MA	%	1,18	1,00	0,71	1,35	1,02
5	Angka Kelulusan (AL)	%	99,95	99,98	99,99	99,99	99,99
6	Angka Melanjutkan (AM) SMP/MTs ke SMA/SMK/MA	%	94,65	98,15	97,20	92,07	93,82
7	Rasio Guru Terhadap Murid Pendidikan Menengah	Angka	1:12	1:15	1:14	1:13	1:13
8	Angka Melek Huruf Penduduk Usia 15 - 64 Tahun	%	91,65	91,38	92,54	93,58	94,16

NO.	ASPEK/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	TAHUN				
			2017	2018	2019	2020	2021
9	Guru yang Memenuhi Kualifikasi S1/D-IV	%	91,80	98,63	98,69	98,84	94,83
	Kesehatan						
1	Jumlah Kematian Bayi (berumur kurang 1 tahun) pada satu tahun tertentu	Orang	1.059	1.037	919	791	844
2	Jumlah Kematian Bayi (berumur kurang 5 tahun) pada satu tahun tertentu (Balita)	Orang	1.151	1.124	991	843	892
3	Jumlah Kematian Bayi (berumur kurang 1 bulan) pada satu tahun tertentu (Neonatal)	Orang	818	799	714	623	681
4	Angka kematian bayi per 1000 kelahiran hidup	Angka (per 1000 KH)	7,05	5,76	5,69	5,00	5,00
5	Angka kematian balita per 1000 kelahiran hidup	Angka (per 1000 KH)	7,67	6,26	6,20	5,00	6,00
6	Angka kematian neonatal per 1000 kelahiran hidup	Angka (per 1000 KH)	5,44	6,21	5,86	4,00	4,00
7	Angka Kematian Ibu per 100.000 kelahiran hidup	Angka (per 100.000 KH)	77,00	92,00	94,00	86,00	129,00
8	Rasio Posyundu peratuan Balita	Angka per 1000 balita	11,29	12,80	11,95	12,64	16,60
9	Rasio Rumah Sakit Per Satuan Penduduk	Angka per 1000 Penduduk	0,010	0,011	0,012	0,012	0,012
10	Rasio Dokter Per Satuan Penduduk	Angka per	14,00	16,00	17,00	18,00	23,00

NO.	ASPEK/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	TAHUN				
			2017	2018	2019	2020	2021
		1.000 Penduduk					
11	Rasio Tenaga Medis per satuan Penduduk	Angka per 1.000 Penduduk	38,00	43,00	41,00	43,00	34,00
12	Cakupan Komplikasi Kebidanan yang Ditangani	%	81,84	80,70	82,00	81,90	99,76
13	Cakupan Pertolongan Persalinan Oleh Tenaga Kesehatan yang Memiliki Kompetensi Kebidanan	%	94,05	91,99	90,97	92,44	95,04
14	Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	%	96,45	95,27	96,15	73,82	82,79
15	Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapatkan Perawatan	%	100	100	100	100	100
16	Persentase Anak Usia 1 Tahun yang Diimunisasi Campak	%	102	103,8	98,50	63,30	100,30
17	NonPolio AFP Rate per 100.000 Penduduk	Per 100.000 Penduduk	1,96	3,02	2,32	0,90	1,68
18	Cakupan Balita Pneumonia yang Ditangani	%	19,04	16,47	18,78	8,20	7,38
19	Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit TBC BTA	%	46,00	49,00	61,00	45,00	70,65
20	Tingkat Prevalensi Tuberkolosis	Per 100.000 Penduduk	197	208	214	160	162
21	Tingkat Kematian Karena Tuberkolosis	Per 100.000 Penduduk	7,00	8,00	8,00	6,00	7,00
22	Proporsi jumlah kasus Tuberkulosis yang terdeteksi dalam program DOTS	%	46,00	49,00	61,00	39,51	48,00
23	Proporsi Kasus Tuberkulosis yang Diobati dan Sembuh dalam	%	86,00	87,00	88,00	76.20*	86,67

NO.	ASPEK/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	TAHUN				
			2017	2018	2019	2020	2021
	Program DOTS						
24	Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit DBD	%	100	100	100	100	100
25	Penderita Diare yang ditangani	Orang	169.972	167.946	145.457	28.228	5.168
26	Angka Kejadian Malaria	Per 1000 penduduk	0,140	0,150	0,100	0,103	0,116
27	Prevalensi HIV/AIDS (Persen) dari Total Populasi	%	0,330	0,013	0,019	0,020	0,028
28	Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien Masyarakat Miskin	%	100	100	100	100	100
29	Cakupan Kunjungan Bayi	%	98,54	96,40	89,96	88,63	98,40
30	Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4	%	91,13	89,32	87,96	86,58	88,65
31	Cakupan Pelayanan Nifas	%	91,48	90,09	90,35	91,91	91,27
32	Cakupan Neonatus dengan Komplikasi yang ditangani	%	60,28	58,32	62,87	59,08	60,40
33	Cakupan Pelayanan Anak Balita	%	71,74	71,64	69,71	65,52	75,52
34	Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6 - 24 bulan keluarga miskin	%	100	91,00	83,43	91,10	100
35	Cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar Masyarakat Miskin	%	89,40	100	100	100	100
36	Cakupan Pelayanan Gawat Darurat Level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS)	%	100	100	100	100	100
37	CakupanDesa/Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan Epidemiologi < 24jam	%	100	100	100	100	100
	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang						
1	Proporsi Panjang Jaringan Jalan Dalam Kondisi Baik	%	34,41	35,85	39,84	34,78	38,98
2	Rasio Panjang Jalan dengan Jumlah Penduduk	Km/jiwa	0,00329	0,00345	0,00345	0,00341	0,00319

NO.	ASPEK/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	TAHUN				
			2017	2018	2019	2020	2021
3	Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi	%	84,41	92,34	95,15	87,32	95,88
4	Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Layanan Sanitasi Layak dan Berkelanjutan	%	84,41	84,41	85,30	87,32	88,96
5	Persentase Irigasi Provinsi Dalam Kondisi Baik	%	32,55	69,16	72,71	59,31	76,00
6	Rasio Jaringan Irigasi	M/Ha	14,77	15,83	12,08	12,65	13,03
7	Persentase Penduduk Berakses air minum	%	87,38	87,37	96,16	90,84	97,76
8	Persentase Jumlah Rumah Tangga Berakses Air Minum	%	87,45	87,50	87,81	87,81	96,76
9	Proporsi Penduduk Dengan Akses Berkelanjutan Terhadap Air Minum Layak Perkotaan dan Perdesaan	%	74,76	87,42	87,73	87,33	89,38
10	Proporsi Rumah Tangga Dengan Akses Berkelanjutan Terhadap Air Minum Layak Perkotaan dan Perdesaan	%	83,34	87,50	88,34	85,9	90,15
11	Ketaatan terhadap RTRW	%	65,00	65,00	70,00	75,00	80,00
12	Rasio Tempat Ibadah Per Satuan Penduduk	Unit/Jiwa	1,96	2,22	2,20	2,19	2,16
13	Persentase fasilitas pengurangan sampah di perkotaan	%	8,52	7,70	3,94	1,26	3,75
14	Luasan RTH public sebesar 20% dari luas wilayah kota/Kawasan perkotaan	**%**	25,00	25,00	25,00	25,00	21,87
	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman						
1	Rasio Rumah Layak Huni	%	0,194	0,195	0,200	0,219	0,216
2	Persentase Lingkungan Permukiman Kumuh	%	0,047	0,049	0,048	0,139	0,139
	Ketentraman. Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat						
1	Cakupan petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas)	per 10.000 penduduk	34,54	34,94	42,13	42,27	47,69

NO.	ASPEK/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	TAHUN				
			2017	2018	2019	2020	2021
2	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan)	%	93,00	94,00	100	100	100
3	Persentase Penegakan PERDA	%	75,00	80,00	89,00	100	100
	Sosial						
1	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial	%	26,9	70,48	57,11	77,00	88,22
2	Persentase PMKS yang tertangani	%	35,00	70,48	57,02	77,30	90,71
3	Persentase PMKS skala yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	%	100	100	100	100	88,29
4	Persentase panti sosial yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesehatan sosial	%	100	100	100	100	100
5	Persentase panti sosial yang menerima program pemberdayaan sosial melalui kelompok usaha bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya	%	100	100	100	100	0
6	Persentase WKBSM yang menyediakan sarana dan prasarana pelayanan kesejahteraan sosial	%	45,27	100	100	0	0
7	Persentase Korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat dalam satu tahun	%	82,15	1,33	20,01	15,63	100
8	Persentase penyandang cacat fisik dan mental serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial	%	6,42	1,33	2,10	13,94	17,30
9	Persentase korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap	%	82,32	100	100	100	100
	PELAYANAN URUSAN WAJIB NON DASAR						

NO.	ASPEK/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	TAHUN				
			2017	2018	2019	2020	2021
	Tenaga Kerja						
1	Tingkat partisipasi angkatan kerja	%	60,98	63,02	62,90	63,40	64,73
2	Rasio Penduduk yang bekerja	%	94,39	94,65	95,03	93,69	94,21
3	Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun	%	2,23	2,94	1,72	2,23	0
4	Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)	%	100	61,70	33,33	57,33	60,98
5	Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan	%	51,20	3,19	4,36	3,29	5,60
6	Keselamatan dan perlindungan	%	100	100	100	59,99	30,00
7	Perselisihan buruh dan pengusaha terhadap kebijakan pemerintah daerah	%	100	100	100	100	100
8	Besaran Pemeriksaan Perusahaan	%	25,48	35,34	52,89	29,34	16,35
9	Besaran Pengujian Peralatan di Perusahaan	%	5,00	6,92	5,38	13,50	12,35
10	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	%	80,49	100	70,00	0	100
11	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan	%	66,67	100	98,75	80,00	81,25
12	Persentase Penduduk yang Bekerja Terhadap Angkatan Kerja	%	94,39	94,65	95,03	93,69	94,28
13	Persentase Angkatan Kerja Berpendidikan Menengah Ketas	%	41,98	43,32	45,81	45,14	46,61
14	Persentase Tenaga Kerja yang Berusaha Sendiri dan Pekerja Bebas Keluarga Terhadap Total Penduduk yang Bekerja	%	37,26	36,52	36,85	21,18	37,32
	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak						
1	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	%	49,66	51,25	53,10	48,16	54,38
2	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPR	%	21,18	17,86	25,88	25,88	26,88
3	Partisipasi perempuan di lembaga swasta	%	71,00	71,00	69,00	74,00	72,00*

NO.	ASPEK/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	TAHUN				
			2017	2018	2019	2020	2021
4	Rasio KDRT	%	-	-	0,019	0,0065	0,07*
5	Persentase jumlah tenaga kerja dibawah umur	%	0,40	0,05	0,09	0,06	0,07*
6	Partisipasi angkatan kerja perempuan	%	43,76	50,23	50,32	48,16	49,00
7	Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum	%	54,00	100	100	100	100
8	Cakupan Layanan Reintegrasi Sosial Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan	%	22,00	27,00	21,00	35,00	22,00
9	Rasio Angka Partisipasi Murni perempuan/laki-laki di SD/MI/Sederajat	%	100,09	100,25	101,32	99,58	100,18
10	Rasio Angka Partisipasi Murni perempuan/laki-laki di SMP/MTs/sederajat	%	104,15	102,64	100,79	97,24	102,03
11	Rasio Angka Partisipasi Murni perempuan/laki-laki di SMA/MA/Sederajat	%	110,66	108,97	106,11	102,46	97,03
12	Rasio Angka Partisipasi Murni perempuan/laki-laki di Perguruan Tinggi	%	103,10	103,30	105,20	99,58	121,83
13	Rasio melek huruf perempuan terhadap laki-laki pada kelompok usia 15-24 tahun	%	100,15	100,28	100,60	100,38	97,13
	Pangan						
1	Ketersediaan Pangan Utama (Beras)	%	384,00	388,24	363,76	332,21	363,80
2	Ketersediaan Pangan Utama (Jagung)	%	38,89	44,33	47,88	53,27	61,83
3	Ketersediaan Pangan Utama (Kedelai)	%	20,88	22,55	24,96	13,66	13,62
4	Ketersediaan Energi Perkapita	%	3.906	3.572	3.879	3.168	3.484,4

NO.	ASPEK/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	TAHUN				
			2017	2018	2019	2020	2021
5	Ketersediaan Protein Perkapita	%	125,41	103,75	112,67	86,16	94,78
6	Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan	%	100	100	100	100	100
	Pertanahan						
1	Persentase luas lahan bersertifikat	%	-	-	46,62	-	-
2	Penyelesaian kasus tanah Negara	%	-	-	29,77	-	-
3	Penyelesaian izin lokasi	%	-	-	82,9	-	26,83
	Lingkungan Hidup						
1	Tersedianya dokumen RPPLH Provinsi	Ada / Tidak Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
2	Tersusunnya RPPLH Provinsi	Ada / Tidak Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
3	Terintegrasinya RPPLH dalam rencana pembangunan provinsi	Ada / Tidak Ada	Ada	Ada	Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
4	Tersedianya dokumen KLHS Provinsi	Ada / Tidak Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
5	Terselenggaranya KLHS untuk K/R/P tingkat daerah provinsi	Ada / Tidak Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Tidak Ada
6	Peningkatan Indeks Kualitas Air	%	54,29	57,70	81,47	54,00	56,82
7	Peningkatan Indeks Kualitas Udara	%	88,66	88,67	88,69	88,73	89,13
8	Peningkatan Indeks Kualitas Tutupan Lahan	%	54,81	60,41	61,14	63,56	55,40
9	Peningkatan Indeks Kualitas Air Laut	%	N/A	N/A	N/A	70,22	84,82
10	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Angka	73,24	74,83	75,12	71,74	73,23

NO.	ASPEK/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	TAHUN				
			2017	2018	2019	2020	2021
11	Laporan Inventarisasi GRK	Ada / Tidak Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
12	Laporan Pelaksanaan Aksi Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim Provinsi	Ada / Tidak Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
13	Jumlah limbah B3 yang dikelola	Ton	667,9	4.365.759	5.373.629	350.000	589.007,56
14	Pembinaan dan Pengawasan terkait ketaatan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan izin PPLH dan PUULH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	%	23,37	66,00	62,86	18,46	18,46
15	Terlaksananya pemberian penghargaan lingkungan hidup	Ada / Tidak Ada	Ada	Ada	Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
16	Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan. izin PPLH dan PUULH yang diterbitkan oleh Pemerintah daerah provinsi lokasi usaha dan dampak lintas kabupaten/kota yang ditangani	Kasus	9	10	17	12	16
17	Tersedianya data dan informasi penanganan sampah di wilayah provinsi	Ada / Tidak Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
18	Persentase jumlah sampah yang tertangani pada kondisi khusus di Provinsi	%	75,41	66,91	73,33	72,83	51,12
	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil						
1	Rasio penduduk ber-KTP per satuan penduduk	Angka	0,82	0,87	0,94	0,94	0,96
2	Rasio bayi berakte kelahiran	Angka	0,86	0,87	0,92	0,94	0,95
3	Rasio pasangan berakte nikah	Angka	0,11	0,14	0,29	0,32	0,36

NO.	ASPEK/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	TAHUN				
			2017	2018	2019	2020	2021
4	Ketersediaan database kependudukan skala provinsi	Ada / Tidak Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
5	Penerapan KTP Nasional berbasis NIK	Sudah/Belum	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah
6	Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)	%	N/A	N/A	94,39	94,00	95,43
7	Cakupan penerbitan akta kelahiran	%	N/A	N/A	43,00	46,00	47,79
	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa						
1	Cakupan sarana dan prasarana perkantoran pemerintah desa yang baik	%	31,47	4,08	17,38	17,83	98,89
2	Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM)	Kelompok	20	1	1	23	1
3	Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK	Kelompok	39	43	43	45	95
4	Persentase LPM Berprestasi	%	24,33	24,33	24,33	24,33	0
5	Persentase PKK aktif	%	97,71	100	100	100	100
6	Persentase Posyandu aktif	%	99,53	99,89	99,89	99,89	99,91
	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana						
1	Laju pertumbuhan penduduk (LPP)	%	0,99	1,02	1,05	2,51	1,04
2	Total Fertility Rate (TFR)	%	2,21	2,44	2,45	2,45	2,29
3	Rata-rata jumlah anak per keluarga	anak/keluarga	2	3	3	3	3
4	Rasio Akseptor KB	%	66,30	62,91	63,05	71,07	71,70
5	Angka pemakaian kontrasepsi/ CPR bagi perempuan menikah usia 15-49	%	66,34	66,5	71,74	71,86	71,66
6	Angka kelahiran remaja (perempuan usia 15 - 19) per 1.000	Angka	N/A	N/A	31	29,07	27,40

NO.	ASPEK/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	TAHUN				
			2017	2018	2019	2020	2021
	perempuan usia 15-19 tahun (ASFR 15-19)						
7	Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang istrinya dibawah 20 tahun	%	0	0	46,99	35,00	22,00
8	Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmet need)	%	14,14	13,90	13,70	13,05	20,00
9	Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	%	14,60	15,30	24,26	24,24	23,10
10	Persentase tingkat keberlangsungan pemakaian kontrasepsi	%	14,90	14,20	17,32	17,24	18,40*
11	Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB	%	85,78	85,93	84,91	78,75	74,50*
12	Cakupan anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber-KB	%	74,74	72,3	72,31	70,54	70,21*
13	Cakupan anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber-KB	%	44,00	50,30	72,33	71,49	70,80*
14	Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di setiap Kecamatan	%	55,00	23,00	23,00	23,00	23,00*
15	Cakupan PUS peserta KB anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB mandiri	%	15,00	17,00	17,00	18,00	78,50
16	Rasio petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) setiap desa/kelurahan	%	100,46	100,10	100,30	100,41	98,64*
17	Persentase Faskes dan jejaringnya (diseluruh tingkatan wilayah) yang bekerjasama dengan BPJS dan memberikan pelayanan KBKR sesuai dengan standarisasi pelayanan	%	64,60	72,86	74,39	76,07	76,98*
18	Persentase remaja yang terkena Infeksi Menular Seksual (IMS)	%	0,02	0,08	0,04	0,02	0,04*
19	Cakupan kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga	%	100	100	100	71,01	71,01*
20	Cakupan keluarga yang mempunyai balita dan anak yang memahami dan melaksanakan pengasuhan dan pembinaan tumbuh	%	71,00	75,00	75,00	44,21	75,00

NO.	ASPEK/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	TAHUN				
			2017	2018	2019	2020	2021
	kembang anak						
21	Persentase Pembiayaan Program Kependudukan. Keluarga Bencana dan Pembangunan Keluarga melalui APBD dan APBDes	%	0,03	1,50	1,50	0,13	1,50
	Perhubungan						
1	Jumlah arus penumpang angkutan umum	Juta Orang	13.323	14.117	13.273	7.143	8.514
2	Rasio ijin trayek		0,21	0,44	1,06	1,32	0
3	Persentase layanan angkutan darat	%	88,07	57,10	72,28	109,87	43,00
4	Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal BIS	Unit	181	75	75	75	75
5	Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan	Km/kendaraan	109,88	125,17	132,05	138,16	157,00
6	Jumlah barang yang terangkut angkutan umum	Ton	268.051.107	287.348.332	190.280.211	162.139.679	202.647.599
	Komunikasi dan Informatika						
1	Persentase penduduk yang menggunakan HP/telepon	%	60,30	63,85	65,07	85,30	87,17
2	Proporsi rumah tangga dengan akses internet	%	42,04	43,91	43,98	49,59	59,69
3	Proporsi rumah tangga yang memiliki komputer pribadi	%	26,89	29,38	22,87	21,93	31,44
	Koperasi Usaha Kecil dan Menengah						
1	Persentase koperasi aktif	%	59,08	65,83	65,31	64,22	55,66
2	Persentase Usaha Mikro dan Kecil	%	99,51	99,51	99,52	99,40	99,71
	Penanaman Modal dan Investasi						
1	Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA)	Triliun rupiah	11,48	11,55	10,21	12,54	16,60
2	Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA)	Proyek	326	911	1,548	2.506	4.506
3	Rasio Daya Serap Tenaga Kerja	Orang/ proyek	16	18	8	3	3,69

NO.	ASPEK/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	TAHUN				
			2017	2018	2019	2020	2021
4	Kenaikan / Penurunan Nilai Realisasi PMDN	Milyar Rupiah	-1,36	1,30	2,40	61	1,2
	Kepemudaan dan Olah Raga						
1	Persentase organisasi pemuda yang aktif	%	8,31	9,61	9,46	8,17	8,17
2	Persentase wirausaha muda	%	25,74	19,80	18,30	13,80	17,24
3	Cakupan pembinaan olahraga	%	32,00	30,00	96,00	64,00	64,00
4	Cakupan pelatih yang bersertifikasi	%	35,08	36,52	22,38	24,57	24,68
5	Cakupan pembinaan atlet muda	%	4,34	2,65	8,42	6,70	9,07
6	Jumlah atlet berprestasi	Atlet	81	81	246	0	84
7	Jumlah prestasi olahraga	Medali	16	81	317	0	52
	Statistik						
1	Tersedianya sistem data dan statistik yang terintegrasi	Ada/ Tidak Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
2	Buku "Provinsi Sulawesi Selatan Dalam Angka"	Ada/ Tidak Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
3	Buku PDRB	Ada/ Tidak Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
	Persandian						
1	Persentase Perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi Perangkat Daerah	%	100	100	100	100	100
	Kebudayaan						
1	Penyelenggaraan festival seni dan budaya	Kali	22	9	7	5	0
2	Benda Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	Buah	3	2	2	2	1

NO.	ASPEK/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	TAHUN				
			2017	2018	2019	2020	2021
3	Jumlah karya budaya yang direvitalisasi dan inventarisasi	Buah	6	21	5	3	11
	Perpustakaan						
1	Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun	Orang	621,306	732.403	1.098.180	106.933	154.913
2	Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah	Exp.	571.002	581.201	582.490	10.028.442	16.977
3	Rasio perpustakaan persatuan penduduk	Unit/Jiwa	0,346	0,428	0,428	0,034	0,510
4	Jumlah koleksi judul buku perpustakaan	Judul	380.579	390.672	394.251	66.408	17.535
5	Jumlah pustakawan, tenaga teknis, dan penilai yang memiliki sertifikat	Orang	29	35	475	2.350	2.775
6	**Kearsipan**						
1	Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku	%	62,00	65,00	56,00	40,00	33,30
2	Peningkatan SDM pengelola kearsipan	Orang	3.700	4.200	368	1.313	1.433
	PELAYANAN URUSAN PILIHAN						
	Pariwisata						
1	Kunjungan wisata (Wisatawan Nusantara)	kunjungan	8.367.748	8.393.024	8.681.275	1.049.546	1.612.737
2	Kunjungan wisata (Wisatawan Mancanegara)	Kunjungan	255.747	263.293	174.817	3.677	3.654
3	Lama kunjungan Wisata	Hari	5	5	5	2	1
4	PAD Sektor Pariwisata	Rupiah	451.750.000	375.900.000	401.800.000	60.200.000	66.500.000
	Pertanian						
1	Kontribusi Sektor Pertanian (Hortikultura) terhadap PDRB	%	1,24	1,12	1,11	1,13	1,13
2	Kontribusi Sektor Pertanian (Tanaman Pangan) terhadap PDRB	%	7,55	7,16	6,34	6,50	6,33
3	Kontribusi Sektor Perkebunan (Tanaman Keras) terhadap PDRB	%	4,33	4,26	3,88	3,94	4,07
4	Kontribusi Sektor Peternakan terhadap PDRB	%	1,10	1,16	1,18	1,21	1,23

NO.	ASPEK/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	TAHUN				
			2017	2018	2019	2020	2021
5	Produktivitas Hasil Peternakan (Daging)	Ton	126.958	136.711	150.462	97.071	119.502*
6	Produktivitas Hasil Peternakan (Telur)	Ton	151.100	170.767	250.289	254.468	251.210*
7	Produktivitas Hasil Peternakan (Susu)	Ton	3.053	3.173	1.888	1.991	2.400*
	Kehutanan						
1	Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kritis	%	48,48	48,61	55,73	60,42	65,61
2	Kerusakan Kawasan Hutan	%	14,46	14,49	17,43	0,70	0,08
3	Rasio luas kawasan lindung untuk menjaga kelestarian keanekaragaman hayati terhadap total luas kawasan hutan	%	76,45	76,45	75,67	75,67	75,67
	Energi dan Sumber Daya Mineral						
1	Persentase rumah tangga pengguna listrik	%	93,19	95,53	97,80	97,53	98,20
2	Rasio ketersediaan daya listrik	%	104	97,00	98,00	90,00	101
3	Persentase pertambangan tanpa ijin	%	14,22	11,33	15,57	16,6	0
	Perdagangan						
1	Ekspor Bersih Perdagangan	US$1000	1.101.321	1.353.590	1.463.153	1.384.609	1.677.394.840
2	Cakupan bina kelompok pedagang / usaha informal	%	0,74	0,74	0,89	0,98	1,08
	Perindustrian						
1	Cakupan bina kelompok pengrajin	Kelompok	1.121	1.156	1.189	1.062	1.060
	Transmigrasi						
1	Persentase transmigran umum	%	95,72	98,67	100	100	100
	Kelautan dan Perikanan						
1	Produksi perikanan	%	102,8	79,40	81,10	101,34	110,98

NO.	ASPEK/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	TAHUN				
			2017	2018	2019	2020	2021
2	Cakupan bina kelompok nelayan	%	21,79	16,23	17,52	10,51	19,11
3	Produksi perikanan kelompok nelayan	%	20,02	47,66	40,00	12,89	18,11
4	Nilai Tukar Nelayan	%	145,82	107,80	107,60	99,65	107,43
5	Proporsi Tangkapan Ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman	%	48,40	48,92	58,69	52,33	57,74
6	Rasio kawasan lindung perairan terhadap total luas perairan territorial	Angka	0,22	1,01	1,56	1,57	1,57
7	Volume produksi perikanan tangkap	Ton	359.770,10	366.540,60	398.565,30	389.208,20	429.431,20
8	Konsumsi Ikan	%	119,70	120,20	120,52	119,09	114,45
	Penunjang Urusan						
	Perencanaan Pembangunan						
1	Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA	Ada / Tidak Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
2	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA	Ada / Tidak Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
3	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA	Ada / Tidak Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
4	Tersedianya dokumen RTRW yang telah ditetapkan dengan PERDA	Ada / Tidak Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
5	Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD	%	93,74	100	100	100	100
6	Penjabaran Konsistensi Program RKPD kedalam APBD	%	99,26	100	100	96,00	100
7	Kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW	%	68,00	80,00	100	100	100

NO.	ASPEK/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	TAHUN				
			2017	2018	2019	2020	2021
	Keuangan						
1	Opini BPK terhadap laporan keuangan	Hasil Opini	WTP	WTP	WTP	WDP	WTP
2	Persentase PAD terhadap Pendapatan	%	40,62	42,67	43,23	41,54	44,65
3	Persentase SILPA terhadap APBD	%	1,78	1,99	0,58	0,64	3,61
4	Persentase belanja pendidikan (20%)	%	42,53	35,60	42,19	41,69	27,11
5	Persentase belanja kesehatan (10%)	%	10,03	8,54	9,01	13,11	10,26
6	Perbandingan antara belanja langsung dengan belanja tidak langsung (tidak sesuai perhitungan 100%)	Rasio	34,24 : 65,64	25,75 : 74,25	28,96 : 71,04	32,19 : 67,81	32,19 : 67,81
7	Bagi hasil kabupaten/kota dan desa	%	16,86	13,93	17,49	14,47	13,58
8	Penetapan APBD	Tepat Waktu/Tidak Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu
	Kepegawaian serta pendidikan dan Pelatihan						
1	Rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan	JP/ Tahun	15	15	15	15	20
2	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	%	0,10	0,20	0,10	0,10	0,01
3	Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural	%	2,9	2,9	0,6	0,6	0,17
4	Jumlah jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintah	Jabatan	60	60	59	56	56
5	Jumlah jabatan administrasi pada instansi pemerintah	Jabatan	8.877	8.546	8.536	7.907	11.846
6	Jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu pada instansi pemerintah	Orang	17.485	16.670	16.243	16.030	16.160
	Penelitian dan Pengembangan						

NO.	ASPEK/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	TAHUN				
			2017	2018	2019	2020	2021
1	Persentase implementasi rencana kelitbangan	%	100	100	100	100	100
2	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	%	24,00	42,00	46,00	46,00	50,00
3	Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah	%	49,00	50,00	50,00	50,00	100
4	Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah	%	22,00	25,00	50,00	0	50,00
	Pengawasan						
1	Persentase tindak lanjut perangkat daerah terhadap hasil pemeriksaaan APIP	%	-	67,92	67,92	64,56	73,93
2	Persentase pemyelesaian tidak lanjut hasil pengawasan umum dan teknis	%	-	64,13	68,83	68,10	70,04
3	Jumlah temuan BPK	Kasus	16	13	18	18	21
	Sekretariat Dewan						
1	Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada setiap Alat-alat Kelengkapan DPRD Provinsi/Kab/Kota	Ada/ Tidak Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
2	Tersusun dan terintegrasinya Program-Program Kerja DPRD untuk melaksanakan Fungsi Pengawasan.Fungsi Pembentukan Perda.dan Fungsi Anggaran dalam Dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJM) maupun Dokumen Rencana Tahunan (RKPD)	Ada/ Tidak Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
3	Terintegrasi program-program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan. pembentukan Perda dan Anggaran kedalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD	Ada/ Tidak Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
	ASPEK DAYA SAING						

NO.	ASPEK/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	TAHUN				
			2017	2018	2019	2020	2021
1	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Perkapita	Juta Rupiah	25,94	28,71	31,12	31,34	32,38
2	Persentase Pengeluaran Konsumsi Non Pangan Perkapita	%	12,28	13,17	14,35	17,73	27,32
3	Nilai Tukar Petani	Ribu Rupiah	100,85	102,29	96,77	96,79	100,37
4	Persentase desa berstatus swasembada terhadap total desa	%	N/A	2,66	2,65	2,56	3,15
5	Produktivitas Total Daerah	Rp/Angkatan Kerja	75.757,4	77.532,6	82.027,9	81.911,94	82.539.486
6	Rasio Ekspor + Impor terhadap PDRB (indikator keterbukaan ekonomi)	%	64,23	81,48	76,07	65,80	68,13
7	Rasio Ketergantungan	Angka	52,10	51,79	51,62	46,14	45,36
8	Angka Kriminalitas yang tertangani	Angka	N/A	12.100	11.387	12.509	15.210

Sumber: BPS dan OPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021, Diolah

2.5.3 Capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) Pemeritah Provinsi Sulawesi Selatan

Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah dilakukan untuk mendapatkan gambaran dari keberhasilan daerah dalam mengatur dan mengurus urusan yang menjadi kewenangan daerah. Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintah dilakukan dengan menggunakan Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang disusun berdasarkan pembagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah provinsi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) tahun 2020 dan tahun 2021 diuraikan pada tabel berikut ini:

Tabel II.389.
Indikator Kinerja Kunci Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2020-2021

No	IKK OUTCOME	SATUAN	CAPAIAN		No	IKK OUTPUT	SATUAN	CAPAIAN	
			2020	2021				2020	2021
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB BERKAITAN PELAYANAN DASAR								
	PENDIDIKAN								
1	Tingkat Partisipasi warga negara usia 16-18 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Menengah	%	76,62	80,55	1)	Jumlah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas/SLTA Negeri terakreditasi	Sekolah	498	496
					2)	Jumlah peserta didik sekolah menengah atas (Negeri dan Swasta) yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	Orang	0	8.205
					3)	Jumlah peserta didik jenjang sekolah menengah kejuruan (Negeri dan Swasta) yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	Orang	0	13.823
					4)	Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah menengah atas (Negeri dan Swasta) yang menerima pembebasan	Orang	189.543	219.616

No	IKK OUTCOME	SATUAN	CAPAIAN		No	IKK OUTPUT	SATUAN	CAPAIAN	
			2020	2021				2020	2021
						biaya pendidikan			
					5)	Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah menengah kejuruan (Negeri dan Swasta) yang menerima pembebasan biaya pendidikan	Orang	93.043	129.616
					6)	Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah menengah atas (Negeri dan Swasta)	Orang	4.768	2.336
					7)	Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah menengah kejuruan (Negeri dan Swasta)	Orang	4.299	5.783
					8)	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah atas (Negeri dan Swasta)	Orang	14.676	15.215
					9)	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah kejuruan (Negeri dan Swasta)	Orang	9.751	10.015
					10)	Jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah	Orang	5.292	5.292

No	IKK OUTCOME	SATUAN	CAPAIAN		No	IKK OUTPUT	SATUAN	CAPAIAN	
			2020	2021				2020	2021
						menengah atas (Negeri dan Swasta)			
					11)	Jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah kejuruan (Negeri dan Swasta)	Orang	4.050	1.380
					12)	Jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah atas (Negeri dan Swasta)	Orang	3.336	3.511
					13)	Jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah kejuruan (Negeri dan Swasta)	Orang	2.124	2.221
					14)	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah atas (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (D- IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik	Orang	7.487	8.531
					15)	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah kejuruan (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah	Orang	4.315	5.232

No	IKK OUTCOME	SATUAN	CAPAIAN		No	IKK OUTPUT	SATUAN	CAPAIAN	
			2020	2021				2020	2021
						diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik			
					16)	Jumlah kepala sekolah menengah atas (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1), sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	Orang	413	456
					17)	Jumlah kepala sekolah menengah kejuruan (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1), sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	Orang	264	285
					18)	Jumlah tenaga laboratium pada jenjang sekolah menengah atas (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah SMA/sederajat	Orang	16	67

No	IKK OUTCOME	SATUAN	CAPAIAN		No	IKK OUTPUT	SATUAN	CAPAIAN	
			2020	2021				2020	2021
					19)	Jumlah tenaga laboratorium/bengkel/workshop pada jenjang sekolah menengah kejuruan (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah SMA/sederajat	Orang	28	73
					20)	Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah menengah atas (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah SMA/sederajat	Orang	1.089	404
					21)	Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah menengah kejuruan (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah SMA/sederajat	Orang	728	208
2	Tingkat Partisipasi warga negara usia 4-18 tahun penyandang disabilitas yang berpartisipasi dalam Pendidikan Khusus	%	80,06	80,84	1)	Jumlah satuan pendidikan khusus yang terakreditasi (Negeri dan Swasta)	Sekolah	51	74
					2)	Jumlah peserta didik pendidikan khusus (Negeri dan Swasta) yang menerima perlengkapan dasar	Orang	0	0

No	IKK OUTCOME	SATUAN	CAPAIAN		No	IKK OUTPUT	SATUAN	CAPAIAN	
			2020	2021				2020	2021
						peserta didik dari Pemerintah Daerah			
					3)	Jumlah peserta didik pada pendidikan khusus (Negeri dan Swasta) yang menerima pembebasan biaya pendidikan	Orang	1.829	4.414
					4)	Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada pendidikan khusus (Negeri dan Swasta)	Orang	726	861
					5)	Jumlah pendidik pada pendidikan khusus (Negeri dan Swasta)	Orang	1.118	1.284
					6)	Jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada pendidikan khusus (Negeri dan Swasta)	Orang	60	76
					7)	Jumlah tenaga kependidikan pada pendidikan khusus (Negeri dan Swasta)	Orang	236	4.540
					8)	Jumlah pendidik pada pendidikan khusus (Negeri dan Swasta) yang	Orang	949	1.131

No	IKK OUTCOME	SATUAN	CAPAIAN		No	IKK OUTPUT	SATUAN	CAPAIAN	
			2020	2021				2020	2021
						memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik			
					9)	Jumlah kepala sekolah pendidikan khusus (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1), sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	Orang	61	61
					10)	Jumlah tenaga penunjang lainnya pada pendidikan khusus (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah SMA/sederajat	Orang	85	61
	KESEHATAN								
1	Rasio daya tampung rumah sakit rujukan	%	0,20	1,69	1)	Jumlah RS Rujukan provinsi yang memenuhi sarana prasarana dan alat kesehatan sesuai standar	RS	6	6

No	IKK OUTCOME	SATUAN	CAPAIAN		No	IKK OUTPUT	SATUAN	CAPAIAN	
			2020	2021				2020	2021
2	Persentase RS Rujukan provinsi yang terakreditasi	%	100	41,80	1)	Jumlah RS dibina dan dipersiapkan akreditasinya	RS	32	30
3	Persentase pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana	%	100	100	1)	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	Jenis	5	4
					2)	Jumlah pos kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi	Pos	80	58
					3)	Jumlah SDM kesehatan di pos kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi	Orang	800	580
					4)	Jumlah SDM kesehatan yang tergabung dalam tim penanggulangan krisis kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi	Orang	90	90

No	IKK OUTCOME	SATUAN	CAPAIAN		No	IKK OUTPUT	SATUAN	CAPAIAN	
			2020	2021				2020	2021
					5)	Jumlah kegiatan edukasi pengurangan resiko krisis kesehatan bagi penduduk yang tinggal di wilayah berpotensi bencana	Jenis	Edukasi PHBS = 80 Edukasi Covid 19 = 70	Edukasi PHBS = 2 Edukasi Covid 19 = 58
4	Persentase pelayanan kesehatan bagi orang yang terdampak dan berisiko pada situasi KLB Provinsi	%	100	100	1)	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	Jenis Logistik (Obat, Alat Kesehatan)	55	31 jenis Obat, 34 jenis Alkes
					2)	Jumlah SDM kesehatan yang tergabung dalam Tim Gerak Cepat provinsi	Orang	22	22
					3)	Jumlah pelaksanaan kajian epidemiologi terhadap data/informasi tentang kemungkinan KLB lintas kabupaten/kota	Kali	1	1
	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG								
1	Rasio luas kawasan pemukiman rawan banjir		N/A	Bukan	1)	Luas kawasan permukiman rawan banjir di WS kewenangan provinsi	Ha	N/A	Surat

No	IKK OUTCOME	SATUAN	CAPAIAN		No	IKK OUTPUT	SATUAN	CAPAIAN	
			2020	2021				2020	2021
	yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir			Kewenangan		(Ha)			Keterangan
					2)	Panjang sungai di kawasan permukiman yang rawan banjir di WS kewenangan provinsi (m)	m	N/A	Surat Keterangan
					3)	Luas kawasan permukiman sepanjang pantai yang rawan abrasi erosi dan akresi di WS kewenangan provinsi (Ha)	Ha	N/A	Surat Keterangan
					4)	Panjang pantai di kawasan permukiman yg rawan abrasi, erosi, akresi di WS kewenangan provinsi (m)	m	N/A	Surat Keterangan
					5)	Rencana Tata Pengaturan air dan tata pengairan/rencana pengelolaan sumber daya air WS Kewenangan provinsi	Ada/Tidak Ada	Tidak Ada	Surat Keterangan
					6)	Rencana Teknis tata pengaturan air dan tata pengairan/rencana pengelolaan sumber daya air	Ada/Tidak Ada	Tidak Ada	Surat Keterangan

No	IKK OUTCOME	SATUAN	CAPAIAN		No	IKK OUTPUT	SATUAN	CAPAIAN	
			2020	2021				2020	2021
						kewenangan provinsi			
					7)	Data prasarana dan sarana pengaman pantai dan sungai milik pemerintah provinsi	Jumlah	Tidak Ada	Surat Keterangan
2	Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan provinsi	%	N/A	Bukan Kewenangan	1)	Luas kawasan permukiman rawan banjir di WS kewenangan provinsi (Ha)	Ha	N/A	Surat Keterangan
					2)	Panjang sungai di kawasan permukiman yang rawan banjir di WS kewenangan provinsi (m)	m	N/A	Surat Keterangan
					3)	Luas kawasan permukiman sepanjang pantai yang rawan abrasi erosi dan akresi di WS kewenangan provinsi (Ha)	Ha	N/A	Surat Keterangan
					4)	Panjang pantai di kawasan permukiman yang rawan abrasi, erosi, akresi di WS kewenangan provinsi (m)	m	N/A	Surat Keterangan

No	IKK OUTCOME	SATUAN	CAPAIAN		No	IKK OUTPUT	SATUAN	CAPAIAN	
			2020	2021				2020	2021
					5)	Rencana Tata Pengaturan air dan tata pengairan/rencana pengelolaan sumber daya air WS Kewenangan provinsi	Ada/Tidak Ada	Tidak Ada	Surat Keterangan
					6)	Rencana Teknis tata pengaturan air dan tata pengairan/rencana pengelolaan sumber daya air kewenangan provinsi	Ada/Tidak Ada	Tidak Ada	Surat Keterangan
					7)	Data prasarana dan sarana pengaman pantai dan sungai milik pemerintah provinsi	Jumlah	Tidak Ada	Surat Keterangan
3	Rasio luas daerah irigasi kewenangan provinsi yang dilayani oleh jaringan irigasi	%	60,06	60,33	1)	Persentase panjang jaringan irigasi primer dalam kondisi baik	%	55,62	77,16
					2)	Persentase panjang jaringan irigasi sekunder dalam kondisi baik	%	58,07	76,01
					3)	Persentase panjang jaringan irigasi tersier dalam kondisi baik	%	N/A	Surat Keterangan
4	Persentase kapasitas yang	%	100	100 (Surat	1)	Pemenuhan dokumen RISPAM lintas	Kawasan	1	1

No	IKK OUTCOME	SATUAN	CAPAIAN		No	IKK OUTPUT	SATUAN	CAPAIAN	
			2020	2021				2020	2021
	dapat terlayani melalui penyaluran air minum curah lintas kabupaten/kota terhadap kebutuhan pemenuhan kapasitas yang memerlukan pelayanan air minum curah lintas kabupaten/kota			Keterangan)		kabupaten/kota			
					2)	Tersusun dan ditetapkannya JAKSTRADA provinsi	Ada/Tidak Ada	Tidak Ada	Surat Keterangan
					3)	Jumlah BUMD dan atau UPTD provinsi penyelenggaran SPAM	Lembaga	0	Surat Keterangan
					4)	Jumlah izin yang diberikan kepada Badan Usaha untuk melakukan penyelenggaraan SPAM	Izin	N/A	Surat Keterangan
					5)	Jumlah kerja sama penyelenggaran SPAM dengan pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah lain	Kerjasama	1	1
5	Rasio pelayanan pengolahan limbah domestik oleh SPAL Regional	%	0	100 (Surat Keterangan)	1)	Jumlah SPALD Regional	Unit	0	Surat Keterangan
					2)	Total kapasitas SPALD Regional	m3	0	Surat Keterangan
					3)	Total volume limbah yang masuk ke SPALD Regional	m3	0	Surat Keterangan

No	IKK OUTCOME	SATUAN	CAPAIAN		No	IKK OUTPUT	SATUAN	CAPAIAN	
			2020	2021				2020	2021
					4)	Jumlah sarana dan prasarana pengelolaan limbah domestik	Unit	17	14
					5)	Jumlah BUMD/UPTD/Badan Usaha Provinsi Pengelola Limbah	Lembaga	0	Surat Keterangan
6	Rasio kemantapan jalan	%	66,62	70,01	1)	Panjang jalan berdasarkan yang ditetapkan kepala daerah dalam SK jalan kewenangan provinsi	Km	2009,35	2009,35
					2)	Dokumen rencana induk pengembangan jaringan jalan provinsi	Afa/Tidak Ada	Ada	Ada
					3)	Panjang jalan yang dibangun	Km	75,93	72,95
					4)	Panjang jembatan yang dibangun	Meter	487	100,4
					5)	Panjang jalan yang ditingkatkan (struktur/fungsi)	Km	9,79	3,43
					6)	Panjang jembatan yang diganti/dilebarkan	Meter	315	190
					7)	Panjang jalan yang direkonstruksi	Km	16,43	83,87

No	IKK OUTCOME	SATUAN	CAPAIAN		No	IKK OUTPUT	SATUAN	CAPAIAN	
			2020	2021				2020	2021
						atau direhabilitasi			
					8)	Panjang jembatan yang direhabilitasi	Meter	0	Surat Keterangan
					9)	Panjang jalan yang dipelihara	Km	1.927,18	1871,31
					10)	Panjang jembatan yang dipelihara	Meter	80	80
7	Rasio tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah provinsi yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan ahli		N/A	2,74	1)	Jumlah Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi di wilayah provinsi	Kali	0	3
					2)	Jumlah tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah provinsi	Orang	100	9.140
					3)	Jumlah tenaga kerja konstruksi terlatih yang tersertifikasi ahli di wilayah provinsi	Orang	98	250
					4)	Terselenggaranya Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi cakupan provinsi yang aktif dengan data termutakhir		Ya	Ya
					5)	Tersedianya data dan informasi		Ada	1

No	IKK OUTCOME	SATUAN	CAPAIAN		No	IKK OUTPUT	SATUAN	CAPAIAN	
			2020	2021				2020	2021
						potensi pasar jasa konstruksi di wilayah provinsi yang bersumber dari APBD provinsi			
					6)	Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah provinsi yang bersumber dari APBN		Ada	1
					7)	Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah provinsi yang bersumber dari pendanaan lainnya		Tidak Ada	Tersedia
					8)	Tersedianya data dan profil OPD sub urusan jasa konstruksi provinsi		Ada	Tersedia
					9)	Tersedianya data dan informasi Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi di wilayah provinsi yang dilaksanakan sendiri atau melalui kerjasama dengan Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Kerja (LPKK)		Ada	Tersedia

No	IKK OUTCOME	SATUAN	CAPAIAN		No	IKK OUTPUT	SATUAN	CAPAIAN	
			2020	2021				2020	2021
					10)	Tersedianya data dan informasi tenaga kerja konsruksi yang terlatih di wilayah provinsi yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan ahli		Ada	Tersedia
					11)	Tersedianya data dan informasi tenaga kerja konsruksi terlatih yang tersertifikasi ahli di wilayah provinsi		Ada	Tersedia
					12)	Tersedianya data dan informasi hasil pengawasan ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk, dan/atau kualifikasi usaha dengan kegiatan usaha jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya		Tidak Ada	Tersedia
					13)	Tersedianya data dan informasi kecelakaan konstruksi pada proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya		Tidak Ada	Surat Keterangan
					14)	Tersedianya data dan informasi hasil pengawasan ketidaksesuaian jenis,		Tidak Ada	Tersedia

No	IKK OUTCOME	SATUAN	CAPAIAN		No	IKK OUTPUT	SATUAN	CAPAIAN	
			2020	2021				2020	2021
						sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan segmentasi pasar jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya			
	PERUMAHAN RAKYAT								
1	Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	%	100	100	1)	Jumlah rumah yang berada pada kawasan rawan bencana dan rencana penanganannya	Unit	503.986	28.573
					2)	Jumlah rumah yang terkena bencana alam	Unit	22.817	12.795
					3)	Jumlah RT, KK dan Jiwa korban yang rumahnya terkena bencana alam	KK / Jiwa	34.130 / 85.690	28.708
					4)	Jumlah unit rumah korban bencana yang direhabilitasi sesuai dengan rencana aksi	Unit	272	9.757
					5)	Jumlah unit rumah korban bencana yang dibangun kembali sesuai	Unit	6	1.199

No	IKK OUTCOME	SATUAN	CAPAIAN		No	IKK OUTPUT	SATUAN	CAPAIAN	
			2020	2021				2020	2021
						dengan rencana aksi			
					6)	Jumlah unit rumah korban bencana yang dibangun baru/relokasi sesuai dengan rencana aksi	Unit	73	1.284
					7)	Jumlah unit dan lokasi rumah sewa yang akan menjadi tempat tinggal sementara korban bencana	Unit	100	677
					8)	Jumlah RT, KK dan Jiwa korban bencana yang terfasilitasi	Jiwa	1.200	719
					9)	Jumlah, luasan dan lokasi pencadangan lahan	Ha	3.559.067	41,60
2	Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah provinsi yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	%	100	100	1)	Jumlah rumah tangga penerima layanan yang telah mendapatkan fasilitasi ganti kerugian aset properti berdasarkan rencana pemenuhan SPM	Ruta	285	411
					2)	Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan yang belum mendapatkan fasilitasi penggantian	Ruta	22.466	671

No	IKK OUTCOME	SATUAN	CAPAIAN		No	IKK OUTPUT	SATUAN	CAPAIAN	
			2020	2021				2020	2021
						hak atas tanah dan/atau bangunan berdasarkan rencana pemenuhan SPM			
					3)	Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan yang telah mendapatkan penyediaan rumah layak huni berdasarkan rencana pemenuhan SPM	Ruta	285	1.375
					4)	Jumlah rumah tangga penerima layanan yang belum mendapatkan penyediaan rumah layak huni berdasarkan rencana pemenuhan SPM	Ruta	22.466	354
3	Persentase Luas kawasan kumuh 10 – 15 Ha yang ditangani	%	6,46	18,03	1)	Jumlah luasan (ha) kawasan pemukiman kumuh ≥ 10-15 Ha	Ha	1.183,79	1.183,79
					2)	Jumlah unit peningkatan kualitas RTLH	Unit	318	125
					3)	Jumlah luasan (Ha) penanganan infrastrukur kawasan kumuh	Unit	76,53	213,46

No	IKK OUTCOME	SATUAN	CAPAIAN		No	IKK OUTPUT	SATUAN	CAPAIAN	
			2020	2021				2020	2021
4	Persentase satuan perumahan yang sudah dilengkapi PSU	%	100	100	1)	Jumlah pemukiman yang terfasilitasi PSU	Kawasan	166	28
					2)	Jumlah pengembang yang tersertifikasi	Pengembang	257	128
					3)	Jumlah pengembang yang teregistrasi	Pengembang	227	302
					4)	Jumlah pengembang yang mendapat penyuluhan atau pelatihan	Pengembang	47	88
	KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT								
1	Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	%	100	100	1)	Jumlah pelanggaran dan Pengaduan trantibum lintas Kab/Kota yang ditangani	Pengaduan	14.190	3.241
					2)	Jumlah Satlinmas yang terlatih dan dikukuhkan	Orang	46.151	43.973
					3)	Jumlah sarana prasarana minimal yang dipenuhi	Unit	464	464
					4)	Jumlah Perda dan Perkada yang ditegakkan	Perda	4	6

No	IKK OUTCOME	SATUAN	CAPAIAN		No	IKK OUTPUT	SATUAN	CAPAIAN	
			2020	2021				2020	2021
					5)	Jumlah Polisi Pamong Praja yang memiliki kualitas sebagai PPNS	Orang	4	5
					6)	Jumlah SOP dalam penegakan Perda dan Perkada serta penanganan gangguan Trantibum	SOP	6	6
2	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	%	28,57	40,00					
3	Persentase penyelesaian dokumen kebencanaan sampai dengan dinyatakan sah/legal	%	100	100	1)	Penyediaan/pemutakhiran dokumen kajian risiko bencana provinsi	Dokumen RPB	1	3
					2)	Penyediaan/pemutakhiran dokumen rencana penanggulangan bencana provinsi	Dokumen	1	Tidak Ada
					3)	Penyediaan/pemutakhiran dokumen rencana kontijensi provinsi	Dokumen	1	Tidak Ada
4	Persentase penanganan pra bencana	%	100	100	1)	Pelaksanaan pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana provinsi dan kabupaten/kota	Laporan	3	1 laporan (24 kab/ kota penanganan pra bencana)

No	IKK OUTCOME	SATUAN	CAPAIAN		No	IKK OUTPUT	SATUAN	CAPAIAN	
			2020	2021				2020	2021
					2)	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Provinsi (Per Jenis Bencana)	Kegiatan		Kegiatan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Provinsi
5	Persentase penanganan tanggap darurat bencana	%	100	100	1)	Penyediaan dokumen kaji cepat bencana provinsi	Ada/ Tidak Ada	Ada	1 (satu) buah Dokumen Kaji Cepat Bencana Provinsi
					2)	Respon cepat penanganan darurat bencana provinsi	Ada/ Tidak Ada	Ada	Ada (Tim Reaksi Cepat 13 Kabupaten)
					3)	Pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana provinsi	Ada/ Tidak Ada	Ada	Ada (1 Kegiatan)
					4)	Penyediaan logistik penyelamatan	Ada/	Ada	Ada

No	IKK OUTCOME	SATUAN	CAPAIAN		No	IKK OUTPUT	SATUAN	CAPAIAN	
			2020	2021				2020	2021
						dan evakuasi korban bencana provinsi	Tidak Ada		(4.466 Paket)
	SOSIAL								
1	Persentase penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	%	35,12	100	1)	Jumlah penyandang disabilitas terlantar yang menerima paket permakanan dalam panti sesuai dengan standar gizi	Orang	131	Surat Keterangan
					2)	Jumlah penyandang disabilitas terlantar yang menerima paket sandang di dalam panti	Orang	131	Surat Keterangan
					3)	Jumlah asrama yang tersedia dan mudah diakses (Panti)	Panti	5	Surat Keterangan
					4)	Jumlah alat bantu yang disediakan di dalam panti	Jalur alat Ramp Reglet alat cetak huruf Tongkat	20 7 6	Ada 4 (Kaki palsu bawah lutut, Alat bantu dengar, Kursi Roda,

No	IKK OUTCOME	SATUAN	CAPAIAN		No	IKK OUTPUT	SATUAN	CAPAIAN	
			2020	2021				2020	2021
									Tongkat)
					5)	Jumlah perbekalan kesehatan yang disediakan di dalam panti	LKS	5	Surat Keterangan
					6)	Jumlah tenaga perawat yang disediakan di dalam panti	Orang	17	Surat Keterangan
					7)	Jumlah perbekalan kesehatan (peralatan ksehatan) yang disediakan di dalam panti			Surat Keterangan
					8)	Jumlah tenaga Kesehatan yang disediakan di dalam panti	Orang	5	Surat Keterangan
					9)	Jumlah paket bimbingan fisik, mental, spiritual, dan social yang dilaksanakan dalam panti	Paket	3	Surat Keterangan
					10)	Jumlah paket bimbingan aktivitas hidup sehari-hari yang dilaksanakan di dalam panti	Paket	3	Surat Keterangan
					11)	Jumlah pekerja sosial/ tenaga kesejahteraan sosial yang disediakan	Tenaga	64	Surat

No	IKK OUTCOME	SATUAN	CAPAIAN		No	IKK OUTPUT	SATUAN	CAPAIAN	
			2020	2021				2020	2021
						di dalam panti	Pengajar Tenaga Honorer Pengurus Panti	28 8	Keterangan
					12)	Jumlah penyandang disabilitas terlantar yang difasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan di dalam panti	Orang	131	Surat Keterangan
					13)	Jumlah penyandang disabilitas terlantar di dalam panti yang mendapatkan akses ke layanan Pendidikan dan Kesehatan dasar	Orang	131	Surat Keterangan
					14)	Jumlah penyandang disabilitas terlantar di dalam panti yang mendapatkan pelayanan penelusuran keluarga	Orang	131	Surat Keterangan
					15)	Jumlah penyandang disabilitas terlantar di dalam panti yang	Orang	131	Surat

No	IKK OUTCOME	SATUAN	CAPAIAN		No	IKK OUTPUT	SATUAN	CAPAIAN	
			2020	2021				2020	2021
						mendapatkan pelayanan reunifikasi keluarga			Keterangan
2	Persentase Anak Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	%	3,88	100	1)	Jumlah anak terlantar yang menerima paket permakanan dalam panti sesuai dengan standar gizi	Orang	250	170
					2)	Jumlah anak terlantar yang menerima paket sandang di dalam panti	Orang	250	170
					3)	Jumlah asrama yang tersedia dan mudah diakses (Panti)	Panti	10	2 Asrama di UPT PPSBK Nirannuang Bulukumba; 6 Asrama di UPT PPSBR Makkareso Maros; 2 Ruang Kamar di UPT PPRSA Inang Matutu

No	IKK OUTCOME	SATUAN	CAPAIAN		No	IKK OUTPUT	SATUAN	CAPAIAN	
			2020	2021				2020	2021
					4)	Jumlah alat bantu yang disediakan di dalam panti	Alat Bantu	5	7
					5)	Jumlah perbekalan Kesehatan (obat-obatan) yang disediakan di dalam panti	Jenis	48	15
					6)	Jumlah tenaga perawat yang disediakan di dalam panti	Orang	8	12 perawat diluar panti dan 2 perawat dalam panti
					7)	Jumlah peralatan kesehatan yang disediakan di dalam panti	Stetoskop Alat Pnegukur Suhu	1 1	7 Alkes
					8)	Jumlah tenaga Kesehatan (dokter, psikiater, peksos medis) yang disediakan di dalam panti	Orang	2	12 dokter diluar panti ,1 dokter dalam panti, dan 1 tenaga Psikolog

No	IKK OUTCOME	SATUAN	CAPAIAN		No	IKK OUTPUT	SATUAN	CAPAIAN	
			2020	2021				2020	2021
					9)	Jumlah pekerja sosial professional/tenaga kesejahteraan sosial yang disediakan di dalam panti	Orang	46	34
					10)	Jumlah paket bimbingan fisik, mental, spiritual dan social yang dilaksanakan di dalam panti	Paket	4	9
					11)	Jumlah paket bimbingan aktivitas hidup sehari-hari yang dilaksanakan di dalam panti	Paket	4	6
					12)	Jumlah anak terlantar yang difasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan dan kartu identitas anak di dalam panti	Orang	250	170
					13)	Jumlah anak terlantar di dalam panti yang mendapatkan akses ke layanan Pendidikan dan Kesehatan dasar	Orang	250	170
					14)	Jumlah anak terlantar di dalam panti yang mendapatkan pelayanan penelusuran keluarga	Orang	250	170

No	IKK OUTCOME	SATUAN	CAPAIAN		No	IKK OUTPUT	SATUAN	CAPAIAN	
			2020	2021				2020	2021
					15)	Jumlah anak terlantar di dalam panti yang mendapatkan pelayanan reunifikasi keluarga	Orang	250	170
3	Persentase lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	%	100	100	1)	Jumlah lanjut usia terlantar yang menerima paket permakanan dalam panti sesuai dengan standar gizi	Orang	2178	75
					2)	Jumlah lanjut usia terlantar yang menerima paket sandang di dalam panti	Orang	2178	75
					3)	Jumlah asrama yang tersedia dan mudah diakses	Asrama	10	9 asrama yang ada di panti; 2 Intensive care (Isolasi)
					4)	Jumlah alat bantu yang disediakan di dalam panti	Alat Bantu	5	10 Kursi Roda, 5 Walker dan 8 Tripod
					5)	Jumlah perbekalan kesehatan yang disediakan di dalam panti	Jenis	8	7

No	IKK OUTCOME	SATUAN	CAPAIAN		No	IKK OUTPUT	SATUAN	CAPAIAN	
			2020	2021				2020	2021
					6)	Jumlah tenaga perawat yang disediakan di dalam panti	Orang	3	2
					7)	Jumlah paket bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial yang dilaksanakan di dalam panti	Paket	4	4 paket bimbingan sosial, fisik, mental dan keterampilan yang dilaksaakan didalam panti
					8)	Jumlah tenaga Kesehatan (dokter, psikiater, peksos medis) yang disediakan di dalam panti	Orang	2	10 Dokter di luar panti
					9)	Jumlah pekerja social professional/ tenaga kesejahteraan sosial yang disediakan di dalam panti	Orang	13	18
					10)	Jumlah paket bimbingan aktivitas hidup sehari-hari yang dilaksanakan di dalam panti	Paket	4	5

No	IKK OUTCOME	SATUAN	CAPAIAN		No	IKK OUTPUT	SATUAN	CAPAIAN	
			2020	2021				2020	2021
					11)	Jumlah lanjut usia terlantar yang difasilitasi Nomor Induk Kependudukan di dalam panti	Orang	2.178	36
					12)	Jumlah lanjut usia terlantar di dalam panti yang mendapat akses ke layanan dan Kesehatan dasar	Orang	2.178	75
					13)	Jumlah lanjut usia terlantar di dalam panti yang mendapatkan pelayanan penelusuran keluarga	Orang	2.178	75
					14)	Jumlah lanjut usia terlantar di dalam panti pelayanan reunifikasi keluarga	Orang	0	1
					15)	Jumlah lanjut usia terlantar yang mendapatkan layanan pemulasaran	Orang	11	13
4	Persentase gelandangan dan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	%	100	0	1)	Jumlah gelandangan dan pengemis yang menerima paket permakanan dalam panti sesuai dengan standar gizi	Orang	819	Surat Keterangan
					2)	Jumlah gelandangan dan pengemis yang menerima paket sandang di	Orang	819	Surat

No	IKK OUTCOME	SATUAN	CAPAIAN		No	IKK OUTPUT	SATUAN	CAPAIAN	
			2020	2021				2020	2021
						dalam panti			Keterangan
					3)	Jumlah asrama yang tersedia dan mudah diakses	Asrama	7	Surat Keterangan
					4)	Jumlah alat bantu yang disediakan di dalam panti	Alat Bantu	0	Surat Keterangan
					5)	Jumlah perbekalan kesehatan yang disediakan di dalam panti	Paket	7	Surat Keterangan
					6)	Jumlah tenaga perawat yang disediakan di dalam panti	Orang	5	Surat Keterangan
					7)	Jumlah paket bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial yang dilaksanakan di dalam panti	Paket	4	Surat Keterangan
					8)	Jumlah tenaga Kesehatan (dokter, psikiater, peksos medis) yang disediakan di dalam panti	Orang	1	Surat Keterangan
					9)	Jumlah pekerja sosial professional/ tenaga kesejahteraan sosial yang	Orang	7	Surat Keterangan

No	IKK OUTCOME	SATUAN	CAPAIAN		No	IKK OUTPUT	SATUAN	CAPAIAN	
			2020	2021				2020	2021
						disediakan di dalam panti			
					10)	Jumlah paket bimbingan aktivitas hidup sehari-hari yang dilaksanakan di dalam panti	Paket	3	Surat Keterangan
					11)	Jumlah gelandangan dan pengemis yang mendapat bimbingan keterampilan dasar	Orang	819	Surat Keterangan
					12)	Jumlah gelandangan dan pengemis yang difasilitasi pembuatan pembuatan Nomor Induk Kependudukan, KTP, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau KIA di dalam panti	Orang	819	Surat Keterangan
					13)	Jumlah gelandangan dan pengemis di dalam panti yang mendapatkan layanan Pendidikan dan Kesehatan dasar	Orang	819	Surat Keterangan
					14)	Jumlah gelandangan dan pengemis di dalam panti yang mendapatkan	Orang	0	Surat Keterangan

No	IKK OUTCOME	SATUAN	CAPAIAN		No	IKK OUTPUT	SATUAN	CAPAIAN	
			2020	2021				2020	2021
						pelayanan penulusuran keluarga			
					15)	Jumlah gelandangan dan pengemis yang mendapatkan layanan reunifikasi keluarga	Orang	0	Surat Keterangan
5	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana provinsi	%	15,63	100	1)	Jumlah korban bencana yang mendapat makanan	Orang	5.979	9.494 (6.790 jiwa korban bencana alam; 2.704 jiwa korban bencana sosial)
					2)	Jumlah korban bencana yang menerima paket sandang	Orang	93	4.054 (2.704 Korban bencana Sosial yang menerima Paket sandang; 1.350 korban bencana Alam yang menerima paket sandang)

No	IKK OUTCOME	SATUAN	CAPAIAN		No	IKK OUTPUT	SATUAN	CAPAIAN	
			2020	2021				2020	2021
					3)	Jumlah tempat penampungan pengungsi yang dimiliki	Titik	23	48
					4)	Jumlah paket permakanan khusus bagi kelompok rentan	Paket	2.161	952
					5)	Jumlah korban bencana yang menerima pelayanan dukungan psikososial	Orang	5.979	215 (40 org anak di Kab.Luwu Utara; 30 org remaja dan dewasa di Kab.Wajo; 35 org dewasa di Kab.Luwu; 45 org anak dan 35 org dewasa di Kab.Majene Sulbar)
					6)	Jumlah pekerja social professional/tenaga kesejahteraan sosial dan/atau relawan sosial yang	Orang	60	1.360 tenaga Tagana dan 36 tenaga Pelopor

No	IKK OUTCOME	SATUAN	CAPAIAN		No	IKK OUTPUT	SATUAN	CAPAIAN	
			2020	2021				2020	2021
						tersedia			Perdamaian
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB TIDAK BERKAITAN PELAYANAN DASAR								
	TENAGA KERJA								
1	Persentase Kabupaten/Kota yang menyusun rencana tenaga kerja	%	95,83	91,67	1)	Dokumen perencanaan tenaga kerja provinsi	Dokumen	1	1
					2)	Persentase akurasi proyeksi indikator dalam rencana tenaga kerja	%	89.06	101,10
					3)	Jumlah perusahaan yang Menyusun rencana tenaga kerja	Perusahaan	0	2
					4)	Jumlah Kabupaten/Kota yang telah dibina dalam penyusunan RTK perusahaan	Kabupaten/ Kota	0	22
2	Persentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi	%	0,003	0,048	1)	Persentase penerapan program PBK dengan kualifikasi KKNI/okupasi	%	0	20,00
					2)	Persentase instruktur bersertifikat kompetensi	%	51,85	86,89
					3)	Rasio jumlah instruktur terhadap		2,42	59,21

No	IKK OUTCOME	SATUAN	CAPAIAN		No	IKK OUTPUT	SATUAN	CAPAIAN	
			2020	2021				2020	2021
						peserta pelatihan			
					4)	Persentase penganggur yang dilatih	%	0,12	30,12
					5)	Persentase lulusan bersertifikat kompetensi	%	92,5	86,55
					6)	Persentase penyerapan lulusan	%	10,81	63,82
					7)	Persentase LPK yang terakreditasi	%	7,34	27,81
					8)	Jumlah calon pekerja migran Indonesia/ calon tenaga kerja indonesia (CPMI/CTKI) yang diberikan pelatihan		0	-
					9)	Jumlah pelatihan Calon Pekerja Migran Indonesia/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CPMI/CTKI)		0	-
3	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja		0,821619328	0,825394857	1)	Persentase perusahaan yang menerapkan program peningkatan produktivitas	%	0,074	-
					2)	Persentase lembaga pemerintah,	%	45,13	-

No	IKK OUTCOME	SATUAN	CAPAIAN		No	IKK OUTPUT	SATUAN	CAPAIAN	
			2020	2021				2020	2021
						swasta dan pendidikan yang menjadi jejaring peningkatan produktivitas			
4	Persentase perusahaan yang menerapkan tata Kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	%	60,47	47,07	1)	Persentase perusahaan yang telah memiliki Peraturan Perusahaan (PP)	%	29,89	100
					2)	Persentase perusahaan yang telah memiliki PKB	%	148,25	0,56
					3)	Rekapitulasi tahunan jumlah anggota Serikat pekerja/serikat buruh di perusahaan pada tahun n	Orang	0	43.927
					4)	Persentase perusahaan yang sudah Menyusun struktur skala upah	%	6,22	7,33
					5)	Persentase perusahaan yang telah terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan	%	133,07	30,30
					6)	Persentase perusahaan yang telah membentuk LKS Bipartit	%	0,27	3,27

No	IKK OUTCOME	SATUAN	CAPAIAN		No	IKK OUTPUT	SATUAN	CAPAIAN	
			2020	2021				2020	2021
					7)	Persentase jumlah perusahaan yang berselisih	%	2,23	0,21
					8)	Jumlah mogok kerja		5	3
					9)	Jumlah penutupan perusahaan	Perusahaan	3	1
					10)	Jumlah perselisihan kepentingan	Perselisihan	26	4
					11)	Jumlah perselisihan hak	Perselisihan	93	6
					12)	Jumlah perselisihan antar SP/SB di perusahaan	Perselisihan	0	-
					13)	Jumlah perselisihan PHK	Perselisihan	331	33
					14)	Jumlah pekerja/buruh yang ter-PHK	Orang	1.845	153
					15)	Jumlah perselisihan yang diselesaikan melalui perundingan bipartit	Perselisihan	196	4
					16)	Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit yang diberdayakan	LKS	4	3
					17)	Upah Minimum yang ditetapkan	Rp	3.165.876	3.165.876

No	IKK OUTCOME	SATUAN	CAPAIAN		No	IKK OUTPUT	SATUAN	CAPAIAN	
			2020	2021				2020	2021
						sesuai dengan peraturan perundangan			
					18)	Persentase perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan melalui Perjanjian Bersama oleh Mediator Hubungan Internasional	%	62,67	41,86
5	Persentase tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan antar kerja lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	%	3,30	5,60	1)	Jumlah rekomendasi persetujuan penempatan tenaga kerja Antar Kerja Antar Daerah (AKAD) yang diberikan oleh dinas provinsi	Rekomendasi	0	4
					2)	Jumlah surat persetujuan penempatan antar kerja lokal (SPP AKL) kabupaten/kota dalam satu wilayah provinsi yang diterbitkan oleh dinas provinsi	SPP AKL	0	2
					3)	Jumlah tenaga kerja yang ditempatkan langsung oleh swasta dalam satu wilayah provinsi	Orang	0	5.191
					4)	Jumlah lowongan pekerjaan yang	Lowongan	8.617	18.284

No	IKK OUTCOME	SATUAN	CAPAIAN		No	IKK OUTPUT	SATUAN	CAPAIAN	
			2020	2021				2020	2021
						tersedia dalam satu wilayah provinsi			
					5)	Jumlah tenaga kerja khusus terdaftar dalam satu provinsi	Orang	-	19
					6)	Jumlah pejabat fungsional pengantar kerja	Orang	11	11
					7)	Jumlah Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) yang mendapatkan izin dari Pemerintah Daerah Provinsi	LPTKS	70	6
					8)	Jumlah Lembaga Tenaga Penyalur Pekerja Rumah Tangga (LPPRT) yang mendapatkan izin dari Pemerintah Derah Provinsi	LPPRT	0	-
					9)	Jumlah penempatan tenaga kerja melalui informasi pasar kerja (IPK) online/sistem informasi ketenagakerjaan (SISNAKER)	Penempatan	20.870	17.424
					10)	Jumlah Pekerja Migran Indonesia (PMI)/ Tenaga Kerja Indonesia (TKI)	Orang	-	-

No	IKK OUTCOME	SATUAN	CAPAIAN		No	IKK OUTPUT	SATUAN	CAPAIAN	
			2020	2021				2020	2021
						yang difasilitasi kepulangannya			
					11)	Jumlah ijin kantor cabang perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia (P3MI)/ perusahaan penempatan tenaga kerja Indonesia swasta (PPTKIS) yang diterbitkan	%	-	20
					12)	Jumlah pos pelayanan keberangkatan dan kepulangan pekerja migran Indonesia (PMI)/ tenaga kerja Indonesia (TKI)	Pos	100	100
6	Persentase perusahaan yang menerapkan peraturan perundang-undangan bidang ketenagakerjaan	%	160,15	100	1)	Jumlah perusahaan yang menerapkan norma kebebasan berserikat	Perusahaan	606	-
					2)	Jumlah perusahaan yang menerapkan norma waktu kerja dan waktu istirahat	Perusahaan	9.085	-
					3)	Jumlah perusahaan yang menerapkan norma pengupahan	Perusahaan	8.076	-
					4)	Jumlah perusahaan yang menerapkan	Perusahaan	14.133	10.518

No	IKK OUTCOME	SATUAN	CAPAIAN		No	IKK OUTPUT	SATUAN	CAPAIAN	
			2020	2021				2020	2021
						norma jaminan sosial			
					5)	Jumlah perusahaan yang menerapkan norma kerja perempuan	Perusahaan	13.123	-
					6)	Jumlah perusahaan yang menerapkan norma keselamatan dan Kesehatan kerja	Perusahaan	6..567	12.113
					7)	Jumlah penyidikan tindak pidana ketenagakerjaan		-	2
					8)	Jumlah perusahaan yang mendaftar Wajib Lapor Ketenagakerjaan Perusahaan (WLKP) online	Perusahaan	5.373	7.334
	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK								
1	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	%	22,05	41,89	1)	Jumlah lembaga pemerintah tingkat daerah provinsi yang telah dilatih PUG	Lembaga	53	52
					2)	Jumlah program/kegiatan PUG pada perangkat daerah yang sudah dievaluasi melalui analisis gender di	Program Kegiatan	105 228	51

No	IKK OUTCOME	SATUAN	CAPAIAN		No	IKK OUTPUT	SATUAN	CAPAIAN	
			2020	2021				2020	2021
						tingkat provinsi			
2	Rasio kekerasan terhadap anak per 10.000 anak	%	3,10	6,41	1)	Jumlah media massa (cetak, elektronik) yang bekerja sama dengan pemprov (dinas pppa) untuk melakukan KIE pencegahan kekerasan terhadap anak	Media	2	1
					2)	Jumlah lembaga layanan anak yang telah memiliki standar pelayanan minimal	Lembaga	3	3
					3)	Persentase korban kekerasan anak yang terlayani	%	100	100
					4)	Jumlah lembaga layanan anak yang mendapat pelatihan	Lembaga	14	10
					5)	Jumlah lembaga layanan anak yang mendapatkan bantuan keuangan/fasilitas oleh Pemerintah Daerah Provinsi (APBD provinsi)	Lembaga	32	Tidak Ada
3	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO	%	34,51	31,79	1)	Jumlah kebijakan/program pencegahan kekerasan terhadap	Program		4

No	IKK OUTCOME	SATUAN	CAPAIAN		No	IKK OUTPUT	SATUAN	CAPAIAN	
			2020	2021				2020	2021
	per 100.000 penduduk perempuan					perempuan termasuk TPPO pada perangkat daerah yang sudah dievaluasi			
					2)	Jumlah lembaga penyedia layanan perlindungan hak perempuan yang telah terstandarisasi	Lembaga	1	16
					3)	Persentase korban kekerasan perempuan yang terlayani	%		100
					4)	Jumlah lembaga layanan perempuan yang mendapat pelatihan	Lembaga	0	9
					5)	Jumlah lembaga layanan perempuan yang mendapatkan bantuan keuangan/fasilitas oleh Pemerintah Daerah Provinsi (APBD provinsi)	Lembaga	14	Tidak Ada
	PANGAN								
1	Persentase Cadangan Pangan	%	15,19	411,04	1)	Tersedianya infrastruktur pergudangan dan sarana pendukung lainnya untuk penyimpanan cadangan pangan	Gudang	18	25 LPM

No	IKK OUTCOME	SATUAN	CAPAIAN		No	IKK OUTPUT	SATUAN	CAPAIAN	
			2020	2021				2020	2021
					2)	Tersedianya dan tersalurkannya pangan pokok dan pangan lainnya		Ada	Tersalurkan
						Ketersediaan Pangan Utama	%	338	
						Rata2 Jumlah ketersediaan Pangan Utama		299.418.432.000	
						Jumlah Penduduk			
						Jumlah produksi padi Tahun 2020 adalah 4.678.413 ton gkg dan konversi padi menjadi beras = 64,02%			
					3)	Tersedianya cadangan beras pemerintah provinsi	Ton	4.607,07	140
						Cadangan Beras Total Provinsi Sulsel Tahun 2020 = 0,5% x 8.851.240 Jiwa x 104,1 kg/Kap/tahun/1000			
						Cadangan Beras Total Provinsi = 20% x 4.607,07 Ton	Ton	921,41	

No	IKK OUTCOME	SATUAN	CAPAIAN		No	IKK OUTPUT	SATUAN	CAPAIAN	
			2020	2021				2020	2021
						Jadi Persentase Cadangan Pangan dengan Rumus / Perhitungan adalah = 140 Ton/921,41 Ton x 100%	%	15,19	
					4)	Tersedianya harga referensi daerah untuk pangan lokal		0	Tidak Ada
					5)	Terpromosikannya target konsumsi pangan sesuai dengan angka kecukupan gizi	Kegiatan	9	6
					6)	Tersedianya peta ketahanan dan kerentanan pangan provinsi	Ada/Tidak Ada	Ada	1 Dokumen
					7)	Tersedianya informasi situasi kerentanan pangan dan gizi Provinsi	Ada/Tidak Ada	Ada	1 Dokumen
					8)	Tertanganinya kejadian kerawanan pangan	Ada/Tidak Ada	Tidak Ada	Tertangani
					9)	Tersalurkannya cadangan pangan pada daerah rawan bencana pangan	Ada/Tidak Ada	Ada	Tidak ada pengajuan permintaan cadangan

No	IKK OUTCOME	SATUAN	CAPAIAN		No	IKK OUTPUT	SATUAN	CAPAIAN	
			2020	2021				2020	2021
									pangan
					10)	Teregistrasi dan tersertifikasi pangan segar di pasar modern	Ada/Tidak Ada	Ada	Ada
	PERTANAHAN								
1	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan	%	99,60	100	1)	Persentase Surat keputusan penetapan tanah lokasi	%	83,33	100
					2)	Jumlah masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan yang terselesaikan	%	83,33	100
					3)	SK Izin Lokasi yang diterbitkan oleh gubernur	%	96,00	100
					4)	Dokumen Peletakan lokasi rencana penggunaan tanah yang telah jelas tahapan kegiatan dan penganggarannya	%	83,33	100
2	Persentase pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang selesai tepat	%	94,5	73,63					

No	IKK OUTCOME	SATUAN	CAPAIAN		No	IKK OUTPUT	SATUAN	CAPAIAN	
			2020	2021				2020	2021
	waktu								
3	Tersedianya Lokasi Pembangunan lintas kabupaten/kota	%	100	93,76					
	LINGKUNGAN HIDUP								
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Provinsi	%	71,74	73,23		Hasil perhitungan provinsi terhadap:			
						Indeks Kualitas Air (IKA)		54,00	56,82
						Indeks Kualitas Udara (IKU)		88,73	89,13
						Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)		63,56	55,40
						Indeks Kualitas Air Laut (IKAL)		70,22	84,82
2	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah	%	70,73	80,00	1)	Data izin lingkungan PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah provinsi	%	100	100
					2)	Rasio pejabat pengawas LH di daerah (PPLHD) di provinsi terhadap usaha yang izin lingkungan, izin PPLH dan	%	78,57	185,71

No	IKK OUTCOME	SATUAN	CAPAIAN		No	IKK OUTPUT	SATUAN	CAPAIAN	
			2020	2021				2020	2021
	Provinsi					PUULH yang diterbitkan oleh pemerintah provinsi			
					3)	Penetapan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di dua atau lebih daerah kab/kota dalam 1 provinsi	%	19,40	Surat Pernyataan
					4)	Terfasilitasinya kegiatan peningkatan pengetahuan dan ketrampilan masyarakat hukum adat terkait PPLH	%	4,48	27,78
					5)	Penanganan pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan dan atau izin PPLH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah provinsi dan usaha dan atau kegiatan yang lokasi dan berdampak lintas kabupaten/kota	%	100	100
	ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL								
1	Penyajian data kependudukan skala Provinsi dalam satu tahun	%	100	100	1)	Fasilitasi pelayanan Adminduk	%	100	100

No	IKK OUTCOME	SATUAN	CAPAIAN		No	IKK OUTPUT	SATUAN	CAPAIAN	
			2020	2021				2020	2021
2	Pemanfaatan data kependudukan	%	12,82	15,38	2)	Fasilitasi pelayanan Adminduk	%	100	100
	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA								
1	Persentase pengentasan desa tertinggal	%	47,41	36,27	1)	Jumlah desa yang terfasilitasi dalam kerja sama antar desa	Desa	147	3
						Jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun berjalan dikurangi jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun sebelumnya	Desa	13	7
						Jumlah lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat di desa yang terfasilitasi dalam peningkatan kapasitas dan diberdayakan	Lembaga	3.378	2
						Jumlah peningkatan desa yang lembaga kemasyarakatan dan lembaga adatnya melaksanakan kegiatan ekonomi produktif dan pemberdayaan	Desa	274	25

No	IKK OUTCOME	SATUAN	CAPAIAN		No	IKK OUTPUT	SATUAN	CAPAIAN	
			2020	2021				2020	2021
2	Persentase Peningkatan Status Desa Mandiri	%	100	17,58	1)	Jumlah desa yang terfasilitasi dalam kerja sama antar desa	Desa	375	65
					2)	Jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun berjalan dikurangi jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun sebelumnya	Desa	36	33
					3)	Jumlah lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat di desa yang terfasilitasi dalam peningkatan kapasitas dan diberdayakan	Desa	31.181	90
					4)	Jumlah peningkatan desa yang lembaga kemasyarakatan dan lembaga adatnya melaksanakan kegiatan ekonomi produktif dan pemberdayaan	Desa	184	33
	PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA								
1	TFR (Angka Kelahiran		2,13	2,29	1)	Tersedianya dokumen Grand Design Pembangunan Kependudukan	Dokumen	2	1

No	IKK OUTCOME	SATUAN	CAPAIAN		No	IKK OUTPUT	SATUAN	CAPAIAN	
			2020	2021				2020	2021
	Total)					(GDPK) yang di-Perdakan			
					2)	Median Usia Kawin Pertama Perempuan (MUKP) seluruh wanita umur 25-49 tahun		21,9	21,5
					3)	Angka Kelahiran Remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19)		40	27,4
					4)	Persentase masyarakat yang terpapar isi pesan Program KKBPK (advokasi dan KIE)	%	100	69
					5)	Jumlah stakeholders/pemangku kepentingan dan mitra kerja (termasuk organisasi kemasyarakatan) yang berperan serta aktif dalam pengelolaan program KKBPK	%	20	50
2	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern			71,66	1)	Persentase Fasilitasi Kesehatan (Faskes) yang siap melayani KB MKJP	%	100	92,42

No	IKK OUTCOME	SATUAN	CAPAIAN		No	IKK OUTPUT	SATUAN	CAPAIAN	
			2020	2021				2020	2021
	(Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)				2)	Persentase Peserta KB Aktif (PA) Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	%	0,18	18,41
					3)	Pemerintah Daerah Provinsi yang memiliki Kelompok Kerja KKBPK yang efektif		Tidak Ada	Tidak Ada
					4)	Persentase pelayanan KB Pasca Persalinan	%	28,5	24,93
3	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	%	8,86	14,26	1)	Persentase kesertaan KB di Kabupaten dan Kota dengan kesertaan rendah	Kabupaten/ Kota	12	10
					2)	Persentase kesertaan KB keluarga Penerima Bantuan Iuran (PBI)	%	68,34	68,34
	PERHUBUNGAN								
1	Rasio konektivitas provinsi		70,50	0,69	1)	Persentase tersedianya fasilitas penyelenggaraan terminal penumpang angkutan tipe B	%	31,25	43,75

No	IKK OUTCOME	SATUAN	CAPAIAN		No	IKK OUTPUT	SATUAN	CAPAIAN	
			2020	2021				2020	2021
					2)	Penetapan tarif angkutan orang antar kota dalam provinsi serta angkutan perkotaan dan perdesaan yang melampaui 1 daerah kabupaten/kota dalam 1 daerah provinsi kelas ekonomi	%	100	100
2	V/C Ratio di Jalan Provinsi		0,45	0,45	1)	Persentase pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalulintas untu jaringan jalan provinsi	%	5,50	3,25
	KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA								
1	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	%	97,83	97,44	1)	Persentase perangkat daerah yang terkoneksi di Jaringan Intra Pemerintah atau menggunakan akses internet yang diamankan yang disediakan oleh Dinas Kominfo	%	97,82	97,4
					2)	Persentase perangkat daerah yang menggunakan akses internet yang berkualitas yang disediakan Dinas Kominfo	%	97,82	97,4

No	IKK OUTCOME	SATUAN	CAPAIAN		No	IKK OUTPUT	SATUAN	CAPAIAN	
			2020	2021				2020	2021
					3)	Tersedianya sistem elektronik komunikasi intra pemerintah yang disediakan Dinas Kominfo (berbasis suara, video, teks, data dan sinyal lainnya) dengan memanfaatkan jaringan intra pemerintah		Tersedia	Tersedia
2	Persentase Layanan Publik yang Diselenggarakan Secara Online Dan Terintegrasi	%	55,56	35,48	1)	Persentase kegiatan (event), perangkat daerah dan pelayanan publik pada Pemerintah Daerah yang dimanfaatkan secara daring dengan memanfaatkan domain dan sub domain Instansi Penyelenggara Negara sesuai dengan Peraturan Menteri Kominfo Nomor 5 Tahun 2015 tentang Registrasi Nama Domain Instansi Penyelenggara Negara	%	100	240
					2)	Persentase perangkat daerah yang memiliki portal dan situs web yang sesuai standar	%	84,78	84,78

No	IKK OUTCOME	SATUAN	CAPAIAN		No	IKK OUTPUT	SATUAN	CAPAIAN	
			2020	2021				2020	2021
					3)	Persentase perangkat daerah yang mengimplementasikan layanan aplikasi umum dan aplikasi khusus yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	%	33	51,2
					4)	Persentase layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang tercantum dalam dokumen proses bisnis yang telah diimplementasikan secara elektronik	%	37	97,67
					5)	Persentase layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang memanfaatkan sertifikat elektronik	%	1,78	5,81
					6)	Persentase sistem elektronik yang terdaftar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	%	83,11	86,88
					7)	Persentase layanan publik dan layanan administrasi yang	%	8,03	50,00

No	IKK OUTCOME	SATUAN	CAPAIAN		No	IKK OUTPUT	SATUAN	CAPAIAN	
			2020	2021				2020	2021
						terintegrasi dengan sistem penghubung layanan pemerintah			
					8)	Persentase perangkat daerah yang menggunakan layanan pusat data pemerintah	%	32,60	30,7
					9)	Persentase perangkat daerah yang menyimpan data di pusat data pemerintah	%	32,60	30,7
					10)	Persentase perangkat daerah yang memperbaharui datanya sesuai siklus jenis data (sesuai renstra kominfo)	%	21,73	61,5
					11)	Persentase data yang dapat berbagi pakai	%	8,03	40,15
					12)	Persentase perangkat daerah yang mengimplementasi inovasi yang mendukung smart city	%	26,08	66,6
					13)	Persentase ASN pengelola TIK yang tersertifikasi kompetensi di bawah	%	61,53	15,56

No	IKK OUTCOME	SATUAN	CAPAIAN		No	IKK OUTPUT	SATUAN	CAPAIAN	
			2020	2021				2020	2021
						pengelolaan Dinas Kominfo			
					14)	Tersedianya peraturan daerah atau peraturan kepala daerah terkait implementasi e-government	Ada/ Tidak Ada	Ada	Ada
3	Persentase Masyarakat yang Menjadi Sasaran Penyebaran Informasi Publik, Mengetahui Kebijakan Dan Program Prioritas Pemerintah dan Pemerintah Daerah Provinsi	%	70,78	90,94	1)	Persentase komunitas masyarakat/mitra strategis pemerintah daerah provinsi yang menyebarkan informasi dan kebijakan pemerintah dan pemerintah provinsi	%	89,75	83,26
					2)	Persentase konten informasi terkait program dan kebijakan pemerintah dan pemerintah provinsi sesuai dengan strategi komunikasi (STRAKOM)	%	31,21	51,97
					3)	Persentase diseminasi dan layanan informasi publik yang dilaksanakan sesuai dengan strategi komunikasi (STARKOM) dan SOP yang telah	%	100	100

No	IKK OUTCOME	SATUAN	CAPAIAN		No	IKK OUTPUT	SATUAN	CAPAIAN	
			2020	2021				2020	2021
						ditetapkan			
	KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH								
1	Meningkatnya Koprasi yang berkualitas	%	7,59	28,69	1)	Persentase fasilitasi penerbitan ijin usaha simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	%	21,88	20,00
					2)	Persentase fasilitasi penerbitan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas usaha simpan pinjam oleh koperasi untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	%		46,71
					3)	Persentase pemeriksaan dan pengawasan yang dilakukan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu)	%	7,31	100

No	IKK OUTCOME	SATUAN	CAPAIAN		No	IKK OUTPUT	SATUAN	CAPAIAN	
			2020	2021				2020	2021
						daerah provinsi			
					4)	Persentase usaha simpan pinjam oleh koperasi yang dinilai kesehatannya untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	%	26,83	100
					5)	Persentase koperasi yang mengikuti pelatihanuntuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	%	17,24	1,10
					6)	Persentase jumlah anggota koperasi yang telah mengikuti pelatihan perkoperasian untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	%	2,23	4,96
					7)	Persentase koperasi yang telah menyelenggarakan pendidikan dan	%	3,45	1,10

No	IKK OUTCOME	SATUAN	CAPAIAN		No	IKK OUTPUT	SATUAN	CAPAIAN	
			2020	2021				2020	2021
						pelatihan perkoperasian untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi			
					8)	Persentase fasilitasi penerbitan sertifikat Nomor Induk Koperasi (NIK) untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	%	16,2	0,09
					9)	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pembiayaan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	%	24,48	0,042
					10)	Persentase yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1	%	40	0,043

No	IKK OUTCOME	SATUAN	CAPAIAN		No	IKK OUTPUT	SATUAN	CAPAIAN	
			2020	2021				2020	2021
						(satu) daerah provinsi			
					11)	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pendampingan kelembagaan dan usaha untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	%	40	0,05
					12)	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi kemitraan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	%	40	0,01
2	Meningkatnya Usaha Kecil yang menjadi wirausaha	%	20,43	7,62	1)	Rasio pertumbuhan wirausaha baru yang berskala kecil	%	28,59	15,08
					2)	Persentase jumlah usaha kecil yang diinput ke dalam sistem online data system (ODS)	%	10,84	48,21

No	IKK OUTCOME	SATUAN	CAPAIAN		No	IKK OUTPUT	SATUAN	CAPAIAN	
			2020	2021				2020	2021
					3)	Persentase jumlah usaha kecil yang bermitra	%	0,35	6,71
					4)	Persentase jumlah usaha kecil yang diberikan dukungan fasilitasi standarisasi dan sertifikasi produk usaha	%	0,19	39,97
					5)	Persentase jumlah usaha kecil yang dberikan dukungan fasilitasi pemasaran	%	3,07	59,98
					6)	Rasio usaha kecil yang diberikan dukungan fasilitasi pelatihan	%	15,91	11,55
					7)	Persentase usaha kecil yang diberikan pendampingan kelembagaan dan usaha	%	3,97	56,05
	PENANAMAN MODAL								
1	Persentase peningkatan investasi di kabupaten/kota	%	22,81	32,37	1)	PERDA mengenai pemberian fasilitas/intensif penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah provinsi		Belum Tersedia	Perda Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pemberian

No	IKK OUTCOME	SATUAN	CAPAIAN		No	IKK OUTPUT	SATUAN	CAPAIAN	
			2020	2021				2020	2021
									Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Investasi
					2)	Standar operasional prosedur pelaksanaan pemberian fasilitas/insentif penanaman modal		Belum Tersedia	Blm tersedia (Surat Keterangan)
					3)	Laporan evaluasi pelaksanaan pemberian fasilitas/insentif penanaman modal		Belum Tersedia	Blm tersedia (Surat Keterangan)
					4)	Kegiatan seminar bisnis, forum, one on one meeting	Kegiatan	1	10
					5)	Kegiatan pameran penanaman modal	Kegiatan	1	0
					6)	Kegiatan penerimaan misi penanaman modal	Kegiatan	4	8
					7)	Konsultasi perizinan dan non perizinan penanaman modal		104	15

No	IKK OUTCOME	SATUAN	CAPAIAN		No	IKK OUTPUT	SATUAN	CAPAIAN	
			2020	2021				2020	2021
					8)	Penerbitan perizinan dan non perizinan penanaman modal		24.376	40.165
					9)	Laporan realisasi penanaman modal		12,5 T	16,6 T
					10)	Pembinaan aparatur penanaman modal tingkat kabupaten/kota			99
					11)	Pembinaan penanaman modal PMA dan PMDN		144	30
					12)	Tersedianya data dan informasi perizinan dan non peizinan provinsi kabupaten/kota	Data dan Informasi	3	6
	KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA								
1	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	%	0,09	0,21	1)	Jumlah pemuda yang mendapat pelatihan kewirausahaan	Pemuda	4.748	345
					2)	Jumlah pemuda yang mendapat bantuan kewirausahaan	Pemuda	0	5
					3)	Jumlah pemuda yang medapat pelatihan kader pengembangan kepemimpinan, kepedulian,	Pemuda	110	4.445

No	IKK OUTCOME	SATUAN	CAPAIAN		No	IKK OUTPUT	SATUAN	CAPAIAN	
			2020	2021				2020	2021
						kesukarelawanan dan kepeloporan pemuda			
2	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	%	2,34	4,07	1)	Jumlah pengelola organisasi kepemudaan yang mendapat pelatihan manajemen organisasi kepemudaan	Pengelola	53.422	96.726
3	Peningkatan prestasi olahraga	Medali	0	52	1)	Jumlah pelatih olah raga yang memiliki kompetensi di satuan2 pendidikan	Pelatih	1.151	1.226
					2)	Jumlah atlit yang dibina pada SKO, PPLP dan PPLM	Atlit	340	4.046
					3)	Jumlah penyelenggaraan event OR prestasi tingkat daerah	Event	0	15
					4)	Jumlah pemuda yang difasilitasi dalam pendidikan kepramukaan	Pemuda	0	200
					5)	Jumlah organisasi kepramukaan (kwarda) yang difasilitasi dalam pengembangan organisasi	Organisasi	0	25

No	IKK OUTCOME	SATUAN	CAPAIAN		No	IKK OUTPUT	SATUAN	CAPAIAN	
			2020	2021				2020	2021
	STATISTIK PROVINSI								
1	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	%	100	100	1)	Tersedianya buku profil daerah	Ada/ Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
					2)	Jumlah survey statistik sektoral yang dilakukan	Survei	0	0
					3)	Jumlah kompilasi statistik sektoral yang dilakukan		0	3
					4)	Jumlah survey statistik sektoral yang mendapat rekomendasi BPS	Survei	0	0
					5)	Jumlah kompilasi statistik sektoral yang mendapat rekomendasi dr BPS		0	0
					6)	Persentase kelengkapan metadata kegiatan statistik sektoral	%	0	33,3
					7)	Persentase kelengkapan metadata indikator sektoral	%	100	33,3
2	Persentase OPD yang menggunakan data statistik	%	100	100					

No	IKK OUTCOME	SATUAN	CAPAIAN		No	IKK OUTPUT	SATUAN	CAPAIAN	
			2020	2021				2020	2021
	dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah								
	PERSANDIAN PROVINSI								
1	Tingkat keamanan informasi pemerintah	%	19,07	24,65	1)	Persentase kegiatan strategis yang telah diamankan melalui kegiatan pengamanan sinyal disbanding banyaknya jumlah kegiatan strategis yang harus diamankan	%	25,00	33,00
					2)	Persentase sistem elektronik yang telah menerapkan prinsip sistem manajemen yang telah menerapkan prinsip-prinsip manajemen keamanan informasi (SMKI) dan atau aplikasi persandian dibanding jumlah sistem elektronik yang ada pada pemerintah daerah	%	8,16	80,00

No	IKK OUTCOME	SATUAN	CAPAIAN		No	IKK OUTPUT	SATUAN	CAPAIAN	
			2020	2021				2020	2021
					3)	Persentase system elektronik/asset informasi yang telah diaudit dengan resiko kategori rendah	%	0	20,69
					4)	Persentase titik yang diamankan dibanding dengan jumlah seluruh titik pada pemerin (PHKS) yang diterapkan pemerintah daerah berdasarkan pola hubungan komunikasi sandi	%	100	100
	KEBUDAYAAN								
1	Terlestarikannya Cagar Budaya	%	33,36	33,33	1)	Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dilindungi (inventarisasi, pengamanan pemeliharaan, penyelamatan dan publikasi)	Obyek	2	11
					2)	Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dikembangkan (penyebarluasan, pengkajian, penayaan keberagaman	Obyek	3	11
					3)	Jumlah obyek pemajuan kebudayaan	Obyek	2	11

No	IKK OUTCOME	SATUAN	CAPAIAN		No	IKK OUTPUT	SATUAN	CAPAIAN	
			2020	2021				2020	2021
						yang dimanfaatkan (membangun karakter bangsa, meningkatkan ketahanan budaya, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat)			
					4)	Jumlah SDM, lembaga dan pranata yang dibina (peningkatan kompetensi, standarisasi dan sertifikasi, serta peningkatan kapasitas tata kelola)		55	176
					5)	Register cagar budaya (pendaftaran, pengjasian, penetapan, pencatatan, pemeringkatan, penghapusan)	Cagar Budaya	6	3
					6)	Perlindungan cagar budaya provinsi (penyelamatan, zonasi, pemeliharaan dan pemugaran)	Cagar Budaya	2	7
					7)	Layanan perijzinan membawa cagar budaya provinsi ke luar provinsi dengan dukungan data	Cagar Budaya	0	Tidak Ada

No	IKK OUTCOME	SATUAN	CAPAIAN		No	IKK OUTPUT	SATUAN	CAPAIAN	
			2020	2021				2020	2021
					8)	Pengembangan cagar budaya Provinsi (penelitian, revitalisasi, adaptasi)	Cagar Budaya	2	7
					9)	Pemanfaatan cagar budaya Provinsi (dalam hal agama, sosial, pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan, dan pariwisata)	Cagar Budaya	6	3
					10)	Pengelolaan, pengamanan, pengembangan dan pemanfaatan koleksi museum	Koleksi Museum	300	250
						Peningkatan akses masyarakat dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan kegiatan museum	Pengunjung	9.204	25.803
					11)	Peningkatan akses masyarakat dalam pengelolaan sarana dan prasarana museum		0	
					12)	Pengelolaan, pengamanan, pengembangan dan pemanfaatan koleksi museum			1.162

No	IKK OUTCOME	SATUAN	CAPAIAN		No	IKK OUTPUT	SATUAN	CAPAIAN	
			2020	2021				2020	2021
					13)	Pembentukan tim pendaftaran cagar budaya	Tim	7	1
					14)	Pembentukan tim ahli cagar budata provinsi	Tim	5	7
					15)	Fasilitas sertifikasi tim ahli cagar budaya	Ahli CB	33	6
					16)	Pemetaan sdm cagar budaya dan permuseuman	SDM	3	31
					17)	Peningkatan kompetensi sdm cagar budaya dan permuseuman	SDM	3	3
					18)	Penyediaan sarana dan prasarana pendaftaran cagar budaya dan permuseuman	Sarpras	3	5
					19)	Penyelenggaraan kegiatan museum yang melibatkan masyarakat	Kegiatan	7	14
	PERPUSTAKAAN PROVINSI								
1	Nilai tingkat kegemaran			6,31	1)	Rasio ketercukupan koleksi	%	112,82	100,41

No	IKK OUTCOME	SATUAN	CAPAIAN		No	IKK OUTPUT	SATUAN	CAPAIAN	
			2020	2021				2020	2021
	membaca masyarakat					perpustakaan dengan penduduk			
					2)	Persentase ketermanfaatkan perpustakaan oleh masyarakat	%	1,2	69,95
					3)	Rasio ketercukupan tenaga perpustakaan dengan penduduk	%	0,1	0,04
					4)	Persentase perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan	%	8,08	36,03
					5)	Jumlah pemasyarakatan gemar membaca di masyarakat		2.987	50.931
					6)	Jumlah KCKR Daerah yang dihimpun	Judul / Exp	488 / 763	17.144 judul dan 17.726 exp
					7)	Jumlah judul yang tercantum dalam katalog induk Daerah	Judul	4497	45.256
					8)	Jumlah perpustakaan yang bergabung dalam katalog induk daerah	Perpustakaan	35	45
					9)	Jumlah terbitan yang terhimpun	Terbitan	1121	1.661

No	IKK OUTCOME	SATUAN	CAPAIAN		No	IKK OUTPUT	SATUAN	CAPAIAN	
			2020	2021				2020	2021
						dalam bibliografi Daerah			
2	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat		11,93	13,28	1)	Jumlah naskah kuno yang diakuisisi/dialih media (digitalisasi)/terdaftar yang ada di wilayahnya	Judul / Rol	4.049 / 82	4.049 judul dan 82 rol
					2)	Jumlah naskah kuno yang dialih aksara dan dialih bahasa	Naskah	1	6
					3)	Jumlah koleksi budaya etnis nusantara yang tersimpan dan/atau terdaftar yang ada di wilayahnya (item)	Judul / Exp	186 / 345	186 judul dan 346 exp
	KEARSIPAN PROVINSI								
1	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Pasal 40 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009			73.995	1)	Persentase arsip aktif yang telah dibuatkan daftar arsip	%	7,63	95,98
					2)	Persentase arsip in-aktif yang telah dibuatkan daftar arsip	%	88,61	100
					3)	Persentase arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik	%	68,57	45,00

No	IKK OUTCOME	SATUAN	CAPAIAN		No	IKK OUTPUT	SATUAN	CAPAIAN	
			2020	2021				2020	2021
	tentang Kearsipan				4)	Persentase jumlah arsip yang dimasukkan dalam SIKN+G15 melalui JIKN	%	4,17	0
2	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepetingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat			100	1)	Pemusnahan arsip yang sesuai NSPK	Berkas	490	23
					2)	Perlindungan dan penyelamatan arsip akibat bencana yang sesuai NSPK	Kabupaten	2	Surat Keterangan
					3)	Penyelamatan arsip perangkat daerah provinsi yang digabung dan atau dibubarkan dan pemekaran daerah kabupaten/kota yang sesuai NSPK di provinsi	OPD	2	Surat Keterangan
					4)	Autentifikasi arsip statis dan arsip hasil alih media yang dikelola oleh lembaga kearsipan provinsi yang sesuai NSPK	Khazanah	1	2
					5)	Pencarian arsip statis yang pengelolaannya menjadi kewenangan daerah provinsi yang dinyatakan		870	856

No	IKK OUTCOME	SATUAN	CAPAIAN		No	IKK OUTPUT	SATUAN	CAPAIAN	
			2020	2021				2020	2021
						hilang dalam bentuk daftar pencarian arsip yang sesuai NSPK			
					6)	Penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup yang disimpan di lembaga kearsipan daerah provinsi yang sesuai NSPK	Izin	64	122
	URUSAN PILIHAN								
	KELAUTAN DAN PERIKANAN								
1	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) dari seluruh kabupaten/kota di wilayah provinsi (sumber data: one data KKP)	Ton	4.051.291,9	4.817.918,6	1)	Jumlah laut pedalaman territorial dan perairan kepulauan yang terkelola sumber daya ikannya (wpp)	WPP	4	713
					2)	Jumlah izin usaha perikanan tangkap untuk kapal perikanan berukuran 5 – 30 GT	SIUP	352	407
					3)	Persentase pelabuhan perikanan yang memiliki standar operasional	%	50,00	45,45
					4)	Jumlah izin/pembangunan kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan dengan ukuran	Izin	3.291	SIPI (10 - 30 GT) = 2.190 Unit Kapal

No	IKK OUTCOME	SATUAN	CAPAIAN		No	IKK OUTPUT	SATUAN	CAPAIAN	
			2020	2021				2020	2021
						diatas 5-30 GT			SIKPI = 180 Unit Kapal BPKP (>5 - 10 GT) = 450 Unit Kapal
					5)	Jumlah kapal yang+G12 terdaftar	Unit Kapal	3.291	3.227
					6)	Jumlah izin usaha perikanan di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 provinsi yang diterbitkan	Izin Usaha	23	17
2	Persentase kepatuhan pelaku usaha KP terhadap ketentuan peraturan perundangan yang berlaku	%	1,48	63,87	1)	Persentase luas wilayah laut dan pesisir yang dikelola sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku	%	11,87	0,01
					2)	Jumlah kawasan konservasi perairan atau kawasan koservasi pesisir dan pulau-pulau kecil yang dikelola	%	28,57	28,57
					3)	Jumlah unit kapal perikanan (10-	Unit	359	357

No	IKK OUTCOME	SATUAN	CAPAIAN		No	IKK OUTPUT	SATUAN	CAPAIAN	
			2020	2021				2020	2021
						30GT) yang diperiksa kepatuhannya terhadap ketentuan peraturan perundangan yang berlaku			
					4)	Jumlah pembudidayaan ikan yang mempunyai izin usaha perikanan (IUP) provinsi dan kab/kota yang diperiksa kepatuhannya terhadap ketentuan peraturan perundangan	Izin Usaha	23	17
					5)	Jumlah unit usaha pemasaran dan pengolahan hasil perikanan provinsi yang mempunyai izin usaha perikanan provinsi yang diperiksa kepatuhannya (compliance) terhadap peraturan perundangan yang berlaku	Izin Usaha	186	145
					6)	Jumlah pemegang izin pemanfaatan ruang laut di bawah 12 mil laut (diluar minyak dan gas bumi) yang diperiksa kepatuhannya (compliance) terhadap ketentuan peraturan perundangan yang berlaku		31	19

No	IKK OUTCOME	SATUAN	CAPAIAN		No	IKK OUTPUT	SATUAN	CAPAIAN	
			2020	2021				2020	2021
					7)	Jumlah POKMASWAS yang aktif dalam mendukung pengawasan SDKP	POKMASWAS	45	54
					8)	Jumlah izin usaha pemasaran dan pengolahan hasil perikanan lintas daerah kab/kota dalam 1 daerah provinsi yang diterbitkan	Izin Usaha	186	145
	PARIWISATA								
1	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	%	-96,23	-44,76	1)	Jumlah entitas pengelolaan destinasi	Kawasan	1	2 (Kawasan geopark Maros_pangkep dan Kawasan Benteng Somba Opu)
					2)	Jumlah kelengkapan infrastruktur dasar, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata		5	1. Pembangunan toilet, 2. Pembuatan papan informasi 3. Pembuatan papan

No	IKK OUTCOME	SATUAN	CAPAIAN		No	IKK OUTPUT	SATUAN	CAPAIAN	
			2020	2021				2020	2021
									penunjuk arah 4. Musholla 5. Pusat Informasi 6. Pembangunan Jalur Pejalan Kaki (Pedestrian)
					3)	Jumlah nilai realisasi investasi di bidang pariwisata di tingkat provinsi	Rp	285.159,84	427.99.700
					4)	Jumlah investasi per sektor usaha di bidang pariwisata		179	113 Hotel dan Restoran
					5)	Jumlah tanda daftar usaha pariwisata per sub jenis usaha di provinsi		77	81
					6)	Rata-rata lama tinggal wisatawan mancanegara	Hari	3,08	1,13
					7)	Rata-rata tinggal wisatawan nusantara tingkat hunian akomodasi	Hari	1,54	1,60

No	IKK OUTCOME	SATUAN	CAPAIAN		No	IKK OUTPUT	SATUAN	CAPAIAN	
			2020	2021				2020	2021
					8)	Jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	Wisman	6.598	3.645
					9)	Jumlah perjalanan wisatawan nusantara	Wisnus	367.926	1.612.737
					10)	Jumlah promosi event daerah yang terlaksana di dalam negeri	Promosi	1	15
					11)	Jumlah event luar negeri yang diikuti provinsi	Event	0	Tidak Ada
					12)	Jumlah industri pariwisata daerah yang berpartisipasi pada event promosi pariwisata di dalam negeri	Travel	1	98 Industri
					13)	Persentase tenaga kerja di sektor parwisata yang disertifikasi	%	4,02	11,54
					14)	Persentase SDM peserta pembekalan sektor kepariwisataan	%		100
					15)	Jumlah lokasi yang memperoleh pemberdayaan masyarakat dan pembinaan kemitraan usaha			7 Lokasi

No	IKK OUTCOME	SATUAN	CAPAIAN		No	IKK OUTPUT	SATUAN	CAPAIAN	
			2020	2021				2020	2021
						masyarakat			
2	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke provinsi			338,33					
3	Tingkat hunian akomodasi			27,94					
4	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku			1,18					
	PERTANIAN								
1	Produktivitas pertanian per hektar per tahun	%	3,42	529,57	1)	Jumlah Sarana dan prasana pertanian yang diberikan	Paket	420	19.253
					2)	Jumlah penerbitan sertifikasi dan pengawasan benih tanaman holtikultura	Pohon	665.515	496.199
					3)	Dokumen pengawasan benih yang beredar	Dokumen	474	865

No	IKK OUTCOME	SATUAN	CAPAIAN		No	IKK OUTPUT	SATUAN	CAPAIAN	
			2020	2021				2020	2021
					4)	Prasarana pertanian yang digunakan		438,99	100
					5)	Pengendalian penganggulangan serangan organisme pengganggu pertanian	Ha	17.932	22.215
					6)	Luas areal pengendalian dan penganggulangan bencana	Ha	45.028	61.037
					7)	Penerbitan izin usaha pertanian	Izin Usaha	213	289
					8)	Persentase sarana pertanian yang digunakan	%	0	100
					9)	Persentase sarana pertanian yang digunakanPersentase fasilitasi penganggulangan bencana	%	71,51	70,01
					10)	Persentase jumlah usulan usaha pertanian	%	100	100
1	Persentase Penurunan Kejadian dan Jumlah Kasus Penyakit Hewan Menular	%	3,84	-66,61					

No	IKK OUTCOME	SATUAN	CAPAIAN		No	IKK OUTPUT	SATUAN	CAPAIAN	
			2020	2021				2020	2021
	KEHUTANAN								
1	Peningkatan akses legal kepada masyarakat dalam pengelolaan hutan melalui Perhutanan Sosial	%	15,80	24,04	1)	Dokumen penataan hutan wilayah KPH	%	0	100
					2)	Dokumen rencana pengelolaan hutan jangka panjang dan jangka pendek	%	100	100
					3)	Luas lahan kritis yang direhabilitasi	Ha	12.510	13.023
					4)	Luas kebakaran hutan di hutan lindung dan hutan produksi	%	0,0002	0,04
					5)	Penurunan luas gangguan kawasan hutan melalui operasi pengamanan hutan (illegal logging dan perambahan)	%	0,69	0,08
					6)	Jumlah hasil izin usaha industri primer hasil hutan kayu dengan kapasitas izin 6.000m3 per tahun yang aktif	%	55	55
					7)	Tersedianya dokumen rencana pengelolaan hutan		Tidak Tersedia	Surat Keterangan

No	IKK OUTCOME	SATUAN	CAPAIAN		No	IKK OUTPUT	SATUAN	CAPAIAN	
			2020	2021				2020	2021
					8)	Pemberdayaan masyarakat di daerah penyangga		Tidak Tersedia	Surat Keterangan
					9)	Pemulihan ekosistem pada Tahura		Tidak Tersedia	Surat Keterangan
					10)	Menurunnya gangguan kawasan Tahura		Tidak Tersedia	Surat Keterangan
					11)	Jumlah ketersediaan penyuluh kehutanan	%	47,88	57,33
					12)	Jumlah sarana dan prasarana kegiatan penyuluhan	%		Surat Keterangan
					13)	Jumlah KTH yang diberikan pendidikan dan pelatihan	%	58,33	Surat Keterangan
					14)	Fasilitasi kegiatan peningkatan kapasitas usaha pada kelompok perhutanan sosial	KTH	400	428
					15)	Terusunnya rencana pengelolaan DAS lintas daerah kabupaten/kota		Tidak Tersedia	Tidak Tersedia

No	IKK OUTCOME	SATUAN	CAPAIAN		No	IKK OUTPUT	SATUAN	CAPAIAN	
			2020	2021				2020	2021
						dalam 1 provinsi			
					16)	Terbentuknya forum komunikasi DAS yang mendukung keterpaduan lintas sektor			1
2	Persentase kerusakan hutan pertahun (deforestrasi)	%	0,70	0,08					
3	Persentase Luas Lahan Kritis yang Direhabilitasi	%	29,43	65,61					
	ESDM								
1	Persentase Usaha Tambang Sesuai Kewenangan Provinsi yang Tidak Melanggar Perda	%	100	100	1)	Perda/Pergub terkait zonasi kawasan konservasi air tanah dalam daerah provinsi (ada/tidak)	Ada/ Tidak Ada	Ada	Ada (Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan

No	IKK OUTCOME	SATUAN	CAPAIAN		No	IKK OUTPUT	SATUAN	CAPAIAN	
			2020	2021				2020	2021
									Air Tanah)
					2)	Peta konservasi air tanah dalam daerah provinsi	Ada/ Tidak Ada	Ada	Ada (Peta Potensi Air Tanah)
					3)	Perda/Pergub terkait izin penggalian, pemakaian dan izin pengusahaan air tanah dalam area provinsi	Ada/ Tidak Ada	Ada	Ada (Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Air Tanah)
					4)	Perda/Pergub terkait izin penggalian, pemakaian dan izin pengusahaan air tanah dalam area provinsi	Ada/ Tidak Ada	Ada	Ada (Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 4 Tahun 2019

No	IKK OUTCOME	SATUAN	CAPAIAN		No	IKK OUTPUT	SATUAN	CAPAIAN	
			2020	2021				2020	2021
									tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Air Tanah)
					5)	Perda/Pergub terkait penetapan nilai perolehan air tanah	Ada/ Tidak Ada	Ada	Ada (Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 30 Tahun 2020 tentang Nilai perolehan Air Tanah di Provinsi Sulawesi Selatan)
					6)	Perda/Pergub terkait dengan tata ruang wilayah RZWP3K dalam daerah provinsi	Ada/ Tidak Ada	Ada	Ada (Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor

No	IKK OUTCOME	SATUAN	CAPAIAN		No	IKK OUTPUT	SATUAN	CAPAIAN	
			2020	2021				2020	2021
									2 Tahun 2019 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019-2039)
					7)	Perda/Pergub terkait dengan perizinan mineral bukan logam dan batuan dalam daerah provinsi	Ada/ Tidak Ada	Ada	Ada (Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara)

No	IKK OUTCOME	SATUAN	CAPAIAN		No	IKK OUTPUT	SATUAN	CAPAIAN	
			2020	2021				2020	2021
					8)	Perda/Pergub terkait IUJP	Ada/ Tidak Ada	Ada	Ada (Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 26 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Terpadu Satu Pintu pada Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan)
					9)	Perda/Pergub terkait penetapan harga patokan mineral bukan logam dan batuan sesuai UU 28/2009	Ada/ Tidak Ada	Ada	Tidak Ada dikarenakan terhitung sejak 10 Desember 2020, seluruh

No	IKK OUTCOME	SATUAN	CAPAIAN		No	IKK OUTPUT	SATUAN	CAPAIAN	
			2020	2021				2020	2021
									kewenangan Pemerintah Provinsi dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batubara beralih menjadi kewenangan Pemerintah Pusat secara utuh sampai dengan diterbitkannya Rancangan Peraturan Presiden terkait pendelegasian kewenangan

No	IKK OUTCOME	SATUAN	CAPAIAN		No	IKK OUTPUT	SATUAN	CAPAIAN	
			2020	2021				2020	2021
					10)	Izin pemanfaatan langsung yang diterbitkan	Ada/ Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada dikarenakan Potensi Panas Bumi belum di optimalkan di Sulsel
					11)	Jumlah penerbitan SKT panas bumi dalam 1 tahun	Ada/ Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada dikarenakan Potensi Panas Bumi belum di optimalkan di Sulsel
					12)	SK izin usaha niaga bahan bakar nabati	Ada/ Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada yang melakukan pemintaan perizinan (Bukan Kewenangan Provinsi)
					13)	Perda/Pergub terkait usaha penyediaan tenaga listrik dalam	Ada/	Tidak Ada	Tidak Ada Pergub

No	IKK OUTCOME	SATUAN	CAPAIAN		No	IKK OUTPUT	SATUAN	CAPAIAN	
			2020	2021				2020	2021
						daerah provinsi (tata cara penerbitan, pembinaan dan pengawasan)	Tidak Ada		berkaitan tersebut masih sesuai permen
					14)	Penerbitan izin operasi yang fasilitas instalasinya dalam daerah provinsi	Ada/ Tidak Ada	Ada	Ada (Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan nomor 26 tahun 2019 tentang penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan terpadu satu pintu pada pemerintah daerah provinsi sulawesi selatan)
					15)	Perda/Pergub terkait penetapan tarif	Ada/	Ada	Tidak Ada

No	IKK OUTCOME	SATUAN	CAPAIAN		No	IKK OUTPUT	SATUAN	CAPAIAN	
			2020	2021				2020	2021
						tenaga listtik tenaga listrik pemegang izin yang ditetapkan oleh pemerintah daerah provinsi	Tidak Ada		dikarenakan sudah menjadi kewenangan pusat
					16)	Surat Persetujuan Gubernur terkait harga jual tenaga listrik dan sewa jaringan tenaga listrik, penjualan kelebihan tenaga listrik dari pemegang izin yang ditetapkan oleh pemerintah daerah provinsi	Ada/ Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada yang bermohon
					17)	Penerbitan izin usaha jasa penunjang tenaga listrik bagi badan usaha dalam negeri/mayoritas sahamnya dimiliki oleh penanam modal dalam negeri kecuali untuk jasa pemeriksaan dan pengujian di bidang tenaga istrik tegangan rendah	Izin	8	Ada (Data Pembinaan Usaha Ketenagalistrikan di Wilayah Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2021)
					18)	Pelaksanaan pembangunan listrik perdesaan dan penyambungan listrik	Ruta	56	Ada dengan pembangunan

No	IKK OUTCOME	SATUAN	CAPAIAN		No	IKK OUTPUT	SATUAN	CAPAIAN	
			2020	2021				2020	2021
						gratis bagi masyarakat tidak mampu			LTSHE 2 Lokasi Tahun 2021
2	Persentase perusahaan pemanfaatan panas bumi yang memiliki ijin di kab/kota	%	98,18	98,49	1)	Penerbitan izin pemanfaatan langsung panas bumi dalam daerah kab/kota	Ada/Tidak Ada		Tidak Ada yang melakukan perizinan tersebut
	PERDAGANGAN								
1	Pertumbuhan nilai ekspor non migas		-5,37	21,15	1)	Persentase pelaku usaha yang memperoleh fasilitas promosi dagang	%	12	16,67
					2)	Persentase pelaku usaha yang memperoleh fasilitas pengembangan produk	%	0	13,33
					3)	Persentase pelaku usaha yang memperoleh pelatihan/fasilitas peningkatan kapasitas terkait ekspor	%		6,2
					4)	Persentase pelaku usaha yang menjadi eksportir baru	%		44,40

No	IKK OUTCOME	SATUAN	CAPAIAN		No	IKK OUTPUT	SATUAN	CAPAIAN	
			2020	2021				2020	2021
2	Persentase penanganan pengaduan konsumen	%	81,69	64,04	1)	Jumlah penanganan pengaduan konsumen	Pengaduan	71	64
					2)	Jumlah konsumen dan pelaku usaha yang teredukasi			Surat Keterangan
3	Persentase komoditi potensial yang sesuai dengan ketentuan berlaku	%	80,60	49,34	1)	Jumlah komoditi potensial yang dipantau			7
					2)	Indeks Kinerja BPSMB			8
4	Tertib Usaha			100	1)	Persentase SIUP Minuman Beralkohol (MB) bebas bea yang diterbitkan	%		Surat Keterangan
					2)	Persentase rekomendasi SIUP MB bagi Distributor yang diterbitkan	%		Surat Keterangan
					3)	Persentase SIUP Bahan Berbahaya bagi pengecer yang diterbitkan	%		Surat Keterangan
					4)	Persentase penerbitan SIUP MB Gol B dan C untuk pengecer dan penjual minum di tempat	%		Surat Keterangan

No	IKK OUTCOME	SATUAN	CAPAIAN		No	IKK OUTPUT	SATUAN	CAPAIAN	
			2020	2021				2020	2021
					5)	Persentase penerbitan SKA yang tepat waktu	%		100
5	Persentasi kinerja realisasi pupuk	%	30,00	78,52	1)	Pengawasan pupuk dan pestisida terhadap pengadaan penyaluran dan penggunaan pupuk bersubsidi dan pestisida per tahun di provinsi			
6	Persentase barang beredar yang diawasi yang sesuai dengan ketentuan perundang- undangan	%	24,01	59,15	1)	Jumlah barang beredar yang diawasi		20.410	30.000
7	Persentase stabilitas dan jumlah ketersediaan harga barang kebutuhan pokok	%			1)	Persentase stabilitas dan jumlah ketersediaan harga barang kebutuhan pokok harga barang kebutuhan pokok. Beroperasinya pusat distribusi yang melayani wilayah provinsi	%		100
						Tersedianya bangunan pusat distribusi			
						Telah ditetapkannya badan usaha			

No	IKK OUTCOME	SATUAN	CAPAIAN		No	IKK OUTPUT	SATUAN	CAPAIAN	
			2020	2021				2020	2021
						pengelola pusat distribusi			
						Beroperasinya pusat industri			
						Menguasai 20% pangsa pasar pada komoditas yang ditangani			
					2)	Persentase koefisien variasi harga antar waktu	%		1. Beras = 1,43%, 2. Gula pasir : 2,13%, 3. Minyak Goreng : 28,06% 4. Tepung terigu : 9,46% 5. Daging sapi : 3,42% 6. Daging ayam : 10,12% 7.Telur : 2,11% 8.Cabe rawit : 126,19% 9. Susu kental

No	IKK OUTCOME	SATUAN	CAPAIAN		No	IKK OUTPUT	SATUAN	CAPAIAN	
			2020	2021				2020	2021
									manis : 0%
					3)	Persentase laporan harga harian melalui sistem informasi harga Kemendag	%		100
	PERINDUSTRIAN								
1	Pertambahan Jumlah Industri Besar di Provinsi Tahun 2019 berjumlah: 76 Tahun 2020 berjumlah: 75	%	-0,013	0					
2	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP			75	1)	Persentase terselesaikannya dokumen RPIP sampai dengan ditetapkannya menjadi perda = 100%	%	100	100
	Pertumbuhan Sektor Industri = 10,81%								
	Kontribusi Industri								

No	IKK OUTCOME	SATUAN	CAPAIAN		No	IKK OUTPUT	SATUAN	CAPAIAN	
			2020	2021				2020	2021
	NonMigas terhadap PDRB: 16,41%								
	Nilai Ekspor Produk Industri (Juta USD): 1.756,29								
	Jumlah Tenaga Kerja di Sektor Industri (Org) : 33.000								
	Nilai Investasi (Rp. Milyar) : 1.265,88								
	Penanaman Modal-PMA (USD Juta) : 38,95 - PMDN (Rp. Milyar) : 759,53								
3	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Besar yang dikeluarkan	%	50	100	1)	Persentase jumlah izin usaha industri (IUI) besar yang diterbitkan	%	100	Diterbitkannya Izin Usaha Industri Besar (IUI) = 1. PT. Cahaya Dinamika

No	IKK OUTCOME	SATUAN	CAPAIAN		No	IKK OUTPUT	SATUAN	CAPAIAN	
			2020	2021				2020	2021
	oleh instansi terkait								Persada. Dan 2. PT. Teguh Wira Pratama
					2)	Persentase jumlah izin perluasan industri IPUI) bagi industri besar yang diterbitkan			
					3)	Persentase jumlah penetapan izin usaha kawasan industri (IUKI) dan izin perluasan kawasan industri (IPKI) lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 provinsi			
4	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPUI) bagi Industri Besar yang dikeluarkan oleh instansi terkait			100				Surat keterangan berupa pernyataan yang ditanda tangani oleh kepala dinas	
5	Persentase jumlah hasil pemantauan dan			100	1)	Persentase jumlah penetapan izin usaha kawasan industri (IUKI) dan		Surat keterangan	

No	IKK OUTCOME	SATUAN	CAPAIAN		No	IKK OUTPUT	SATUAN	CAPAIAN	
			2020	2021				2020	2021
	pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi yang dikeluarkan oleh instansi terkait					izin perluasan kawasan industri (IPKI) lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 provinsi		berupa pernyataan yang ditanda tangani oleh kepala dinas	
6	Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini	%	125	Tersedia					
	TRANSMIGRASI								
					1)	Jumlah kawasan transmigrasi yang difasilitasi penetapannya	Kawasan	0	0
					2)	Jumlah satuan pemukiman transmigrasi yang difasilitasi pembangunannya	Satuan Permukiman	3	2
					3)	Jumlah satuan permukiman transmigrasi yang difasilitasi	Satuan Permukima	8	4

No	IKK OUTCOME	SATUAN	CAPAIAN		No	IKK OUTPUT	SATUAN	CAPAIAN	
			2020	2021				2020	2021
						pembinaannya	n		
	FUNGSI PENUNJANG URUSAN								
	PERENCANAAN DAN KEUANGAN								
1	Rasio Belanja Pegawai Di Luar Guru dan Tenaga Kesehatan	%	9,14	10,05					
2	Rasio PAD	%	1,18	0,91					
3	Rasio belanja urusan pemerintahan umum	%	46,95	52,21					
4	Opini Laporan Keuangan		WTP	WDP					
5	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)		Level 3	Level 3					
6	Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)		Level 2	Level 2					
	PENGADAAN								

No	IKK OUTCOME	SATUAN	CAPAIAN		No	IKK OUTPUT	SATUAN	CAPAIAN	
			2020	2021				2020	2021
1	Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya yang ditanda tangani pada kuartal pertama	%	0	100					
2	Persentase Jumlah Pengadaan yang Dilakukan Dengan Metode Kompetitif	%	53,67	6,03					
3	Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	%	83,39	44,47					
	KEPEGAWAIAN								
1	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	2,58	73,59					
2	Rasio pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk	%	16,28	20,91					

No	IKK OUTCOME	SATUAN	CAPAIAN		No	IKK OUTPUT	SATUAN	CAPAIAN	
			2020	2021				2020	2021
	guru dan tenaga kesehatan)								
3	Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	16,28	100					
	MANAJEMEN KEUANGAN								
1	Budget execution: Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD	%	93,05	83,83					
2	Revenue mobilization: Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD	%	86,52	96,51					
3	Assets Management		Ada	Ada					
4	Cash Management: Rasio Anggaran Sisa Terhadap Total Belanja Dalam APBD Tahun Sebelumnya	%	0,76	3,24					

No	IKK OUTCOME	SATUAN	CAPAIAN		No	IKK OUTPUT	SATUAN	CAPAIAN	
			2020	2021				2020	2021
	TRANSPARANSI DAN PARTISIPASI PUBLIK								
	Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan (Information on resources available to frontline service delivery units)	%	33,55	92,02					
	Akses publik terhadap informasi keuangan daerah (Public access to fiscal information)	%	21,82	24,85					

Sumber : LPPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021

2.5.4 Capaian Indikator Kinerka Program Penyelenggaraan Urusan Pemeritah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021

Tahun 2021 merupakan tahun ketiga pelaksanaan program periode RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan 2018-2023. Sejumlah 179 program penyelenggaraan urusan pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan yang dilaksanakan tahun 2021 dengan jumlah indikator outcome 297 untuk mendukung pencapaian sasaran dan prioritas pembangunan yang tertuang dalam RKPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021. Berikut evaluasi terhadap capaian indikator kinerja program penyelenggaraan urusan pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021 pada tabel berikut ini:

Tabel II.390.
Hasil Analisis Terhadap Capaian Indikator Kinerja Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021

No.	Program/Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Tahun 2021		Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)
			Target	Capaian	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Dengan Pelayanan dasar				
	Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan				
	Dinas Pendidikan				
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN (Prioritas)				
1	Persentase siswa SMA/SMK yang bebas buta aksara Al-Quran (Prioritas)	%	60,25	75,00	Melampaui
2	Persentase SMA/SMK yang bebas Narkoba (Prioritas)	%	91,45	91,50	Melampaui
3	Persentase jumlah warga negara usia 16 -18 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah (SPM)	%	100	100	Sesuai
4	Persentase jumlah warga negara usia 4 - 18 tahun yang termasuk dalam penduduk disabilitas yang berpartisipasi dalam pendidikan Khusus (SPM)	%	100	100	Sesuai

No.	Program/Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Tahun 2021		Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)
			Target	Capaian	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM (Prioritas)				
5	Persentase Sekolah yang menerapkan kurikulum lokal penambahan waktu pelajaran agama (Prioritas)	%	54,25	80,00	Melampaui
6	Persentase Pendidikan menengah yang telah menerapkan penyelenggaraan dan pelayanan pendidikan berbasis TIK (Prioritas)	%	80,00	81,00	Melampaui
	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN				
7	Rasio Guru terhadap murid pendidikan menengah	Angka	1:13	1:13	Sesuai
8	Persentase Guru SMA yang bersertifikat	%	52,00	56,07	Melampaui
9	Persentase Guru SMK yang bersertifikat	%	45,10	52,24	Melampaui
	PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN				
10	Persentase Satuan Pendidikan Yang memperoleh Izin Penyelenggaraan Pendidikan	%	100	100	Sesuai
	PROGRAM PENGEMBANGAN DAN SASTRA				
11	Persentase SMA/SMK yang menerbitkan karya sastra	%	48,25	48,25	Sesuai
	Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan				
	Dinas Kesehatan				

No.	Program/Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Tahun 2021		Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)
			Target	Capaian	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT (Prioritas)				
12	Persentase RS Regional yang terbangun dan ditingkatkan (Prioritas)	%	33,00	4,60	Belum Tercapai
13	Persentase RS Rujukan Provinsi yang Terakreditasi	%	87,00	75,00	Belum Tercapai
14	Persentase Penduduk/ warga pada kondisi kejadian luar biasa provinsi yang mendapatkan pelayanan kesehatan (SPM)	%	100	100	Sesuai
15	Persentase Penduduk/ warga terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi yang mendapatkan pelayanan kesehatan (SPM)	%	100	100	Sesuai
16	Persentase anak yang mendapatkan asupan gizi pada 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK)	%	6,50	4,50	Belum Tercapai
17	Persentase ibu hamil yang mendapatkan asupan gizi pada 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK)	%	12,00	38,48	Melampaui
	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBERDAYA MANUSIA (Prioritas)				
18	Rasio tenaga kesehatan persatuan	Per 100.000 Penduduk	23,00	24,00	Melampaui

No.	Program/Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Tahun 2021		Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)
			Target	Capaian	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
	penduduk (Prioritas)				
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN				
19	Persentase Kabupaten/Kota yang memiliki Kebijakan PHBS	%	66 (16 Kab/Kota)	75,00	Melampaui
	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN, MAKANAN DAN MINUMAN				
20	Persentase Pemenuhan Sediaan Farmasi	%	85,00	85,00	Sesuai
21	Persentase Pemenuhan Sediaan Alat Kesehatan	%	85,00	100	Melampaui
22	Persentase Pemenuhan Sediaan Makanan Minuman	%	45,00	35,00	Belum Tercapai
	UPT Transfusi Darah				
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT (Prioritas)				
23	Persentase Ketersediaan Stok Darah Terhadap Pemenuhan Kebutuhan Darah (Prioritas)	%	80,00	68,19	Belum Tercapai
24	Persentase Keterpenuhan SDM Kesehatan pada Fasilitas Kesehatan (Prioritas)	%	47,00	63,77	Melampaui
	UPT Pelatihan Kesehatan				
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT (Prioritas)				
25	Persentase pasien yang mendapatkan layanan sesuai dengan standar	%	100	100	Sesuai

No.	Program/Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Tahun 2021		Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)
			Target	Capaian	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
	(Prioritas)				
26	Persentase tenaga medis yang tersertifikasi (Prioritas)	%	40,00	71,34	Melampaui
27	Cakupan Pelatihan dan modul yang terakreditasi (Prioritas)	%	100	100	Sesuai
	UPT RSK Gigi dan Mulut				
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT (Prioritas)				
28	Persentase pasien yang mendapatkan layanan sesuai dengan standar (Prioritas)	%	100	100	Sesuai
	RSUD Labuang Baji				
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT (Prioritas)				
29	Cakupan Ketersediaan Sarana dan Prasarana RS dalam Kondisi Baik (Prioritas)	%	85,00	85,00	Sesuai
	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBERDAYA MANUSIA (Prioritas)				
30	Persentase SDM Kesehatan yang bersertifikasi (Prioritas)	%	100	100	Sesuai
	Rumah Sakit Khusus Daerah				
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT (Prioritas)				
31	Cakupan Ketersediaan Sarana dan Prasarana RS dalam Kondisi Baik (Prioritas)	%	100	100	Sesuai

No.	Program/Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Tahun 2021		Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)
			Target	Capaian	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
	RSUD Haji Makassar				
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT (Prioritas)				
32	Cakupan Ketersediaan Sarana dan Prasarana RS dalam Kondisi Baik (Prioritas)	%	80,00	91,49	Melampaui
	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBERDAYA MANUSIA (Prioritas)				
33	Persentase Tenaga Kesehatan dan Tenaga Kesehatan Lainnya yang mengikuti pendidikan dan pelatihan (Prioritas)	%	20,00	22,37	Melampaui
	RSK Ibu dan Anak Siti Fatimah				
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT (Prioritas)				
34	Cakupan Ketersediaan Sarana dan Prasarana RS dalam Kondisi Baik (Prioritas)	%	80,00	80,00	Sesuai
	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBERDAYA MANUSIA (Prioritas)				
35	Persentase kompetensi Sumber daya Manusia kesehatan (Prioritas)	%	55,90	90,41	Melampaui
	RSK Ibu dan Anak Pertiwi				
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT (Prioritas)				
36	Cakupan Ketersediaan	%	96,00	100	Melampaui

No.	Program/Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Tahun 2021		Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)
			Target	Capaian	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
	Sarana dan Prasarana Dalam Upaya Peningkatan Kesehatan Masyarakat (Prioritas)				
37	Meningkatnya Kompetensi teknis SDM (Prioritas)	%	70,00	98,07	Melampaui
	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBERDAYA MANUSIA (Prioritas)				
38	Persentase tenaga kesehatan RSK yang telah memperoleh pendidikan kompetensi teknis (Prioritas)	%	70,00	100	Melampaui
	RSUD Sayang Rakyat				
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT (Prioritas)				
39	Cakupan Pemenuhan Sarana dan Prasarana RSUD Sayang Rakyat Dalam Kondisi Baik (Prioritas)	%	65,76	65,76	Sesuai
	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBERDAYA MANUSIA (Prioritas)				
40	Persentase SDM Kesehatan yang bersertifikasi (Prioritas)	%	33,00	33,00	Sesuai
	Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang				
	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang				
	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) (Prioritas)				
41	Persentase Jaringan Irigasi Primer dan Sekunder kondisi baik pada DI Kewenangan	%	77,00	76,00	Belum Tercapai

No.	Program/Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Tahun 2021		Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)
			Target	Capaian	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
	Provinsi (Prioritas)				
42	Cakupan pengelolaan sungai, danau, waduk, dan pantai (Prioritas)	%	100	100	Sesuai
	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM (Prioritas)				
43	Persentase warga negara memperoleh kebutuhan air minum curah lintas kabupaten/kota (SPM)	%	100	100	Sesuai
44	Cakupan Pembinaan Layanan Air Minum Kab/Kota (Prioritas)	%	100	100	Sesuai
	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL				
45	Cakupan Pembinaan Layanan TPA (Kab/Kota	%	100	100	Sesuai
	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH				
46	Persentase warga negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik regional lintas kabupaten/kota (SPM)	%	100	100	Sesuai
47	Cakupan Pembinaan Layanan Air Limbah Domestik Kab/Kota	%	100	100	Sesuai
	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG				

No.	Program/Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Tahun 2021		Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)
			Target	Capaian	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
48	Persentase Bangunan Pamerintah Yang di Fasilitasi	%	100	85,00	Belum Tercapai
	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA (Prioritas)				
49	Jumlah kawasan strategis dan pusat pertumbuhan baru yang dilakukan penataan bangunan dan lingkungannya (Prioritas)	Kawasan	11	9	Belum Tercapai
	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN				
50	Persentase jalan provinsi dalam kondisi mantap (Prioritas)	%	72,30	70,01	Belum Tercapai
51	Persentase panjang terisolir pada ruas jalan provinsi yang terakses roda empat) (Prioritas)	%	42,72	74,53	Melampaui
	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI				
52	Rasio tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah provinsi yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan ahli		0,5	19,95	Melampaui
	PROGRAM PENYELENGGARAA N PENATAAN RUANG				
53	Rasio ketaatan pemanfaatan ruang (Prioritas)		0,8	0,8	Sesuai
	Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman				
	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan				
	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN				
54	Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program	%	100	100	Sesuai

No.	Program/Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Tahun 2021		Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)
			Target	Capaian	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
	pemerintah daerah provinsi yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni kewenagan provinsi (SPM)				
55	Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni kewenagan provinsi (SPM)	%	100	100	Sesuai
	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN (Prioritas)				
56	Persentase Luas Kawasan Kumuh Tertangani Kewenangan Provinsi (Prioritas)	%	13,69	18,03	Melampauai
	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (Prioritas)				
57	Persentase rumah tangga yang berakses air bersih layak/Arsinum di kawasan Pesisir dan Kepulauan (Prioritas)	%	100	100	Sesuai
58	Persentase rumah tangga bersanitasi di kawasan permukiman (Prioritas)	%	91	93,98	Melampauai
59	Persentase panjang jalan lingkungan yang terbangun di kawasan permukiman (Prioritas)	%	60	195,9	Melampauai
	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN				

No.	Program/Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Tahun 2021		Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)
			Target	Capaian	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
60	Persentase pengembang perumahan dengan tingkat kualifikasi menengah yang tersertifikasi dan terregistrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	%	14,29	7,15	Belum Tercapai
	Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat				
	Satuan Polisi Pamong Praja				
	PROGRAM PENINGKATAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM (Prioritas)				
61	Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkada di Provinsi (SPM)	%	100	100	Sesuai
	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA (Prioritas)				
62	Persentase Korban Bencana yang tertangani (Prioritas)	%	100	100	Sesuai
	PROGRAM PENCEGAHAN, PENGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN				
63	Cakupan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	%	37	37	Sesuai
	Badan Penanggulangan Bencana Daerah				
	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA (Prioritas)				
64	Persentase Dokumen Kebencanaan sampai dengan sah/legal yang tersedia (Prioritas)	%	100	100	Sesuai

No.	Program/Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Tahun 2021		Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)
			Target	Capaian	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
65	Persentase Aparat Kesiapsiagaan Bencana yang terlatih (Prioritas)	%	100	100	Sesuai
66	Persentase Tanggap Darurat Bencana yang tertangani (Prioritas)	%	100	100	Sesuai
	Urusan Pemerintahan Bidang Sosial				
	Dinas Sosial				
	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL				
67	Persentase Pengawasan pelaksanaan undian gratis berhadiah dan pengumpulan uang atau barang	%	100	100	Sesuai
68	Persentase PSKS yang mendapatkan peningkatan kemampuan dan pengetahuan kesejahteraan sosial	%	100	65,00	Belum Tercapai
	PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN				
69	Persentase penanganan warga negara migran korban tindak kekerasan	%	100	55,66	Belum Tercapai
	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL				
70	Persentase warga negara penyandang disabiltas terlantar yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar didalam	%	100	100	Sesuai

No.	Program/Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Tahun 2021		Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)
			Target	Capaian	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
	panti (SPM)				
71	Persentase warga negara Anak Terlantar yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar anak terlantar didalam panti (SPM)	%	100	100	Sesuai
72	Persentase warga negara lanjut usia terlantar yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar lanjut usia didalam panti (SPM)	%	100	100	Sesuai
73	Persentase warga negara gelandangan dan pengemis yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar tuna susila didalam panti (SPM)	%	100	100	Sesuai
74	Persentase warga negara Korban bencana provinsi yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana provinsi (SPM)	%	100	100	Sesuai
75	Persentase Pelayanan dan Pemenuhan	%	100	100	Sesuai

No.	Program/Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Tahun 2021		Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)
			Target	Capaian	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
	Kebutuhan dasar bagi tuna sosial di dalam panti				
	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL (Prioritas)				
76	Persentase PPKS yang mendapatkan jaminan social (Prioritas)	%	3,50	88,04	Melampaui
77	Persentase pengangkatan anak WNI oleh orang tua tunggal (Prioritas)	%	100	100	Sesuai
	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN				
78	Persentase TMP yang dikelola	%	100	100	Sesuai
	Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar				
	Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja				
	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi				
	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA				
79	Persentase Dokumen Perencanaan Tenaga Kerja Makro	%	100	91,67	Belum Tercapai
80	Persentase Perusahaan yang menyusun Perencanaan Tenaga Kerja	%	5,00	10,00	Melampaui
	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA (Prioritas)				
81	Persentase pencari kerja terlatih yang mendapatkan pekerjaan (Prioritas)	%	72,92	73,00	Melampaui
82	Persentase tenaga kerja yang dilatih berwirausaha dapat mandiri (Prioritas)	%	75,00	81,25	Melampaui

No.	Program/Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Tahun 2021		Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)
			Target	Capaian	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA (Prioritas)				
83	Persentase Pencari kerja yang yang terdaftar dan ditempatkan (Prioritas)	%	3,91	5,60	Melampaui
84	Persentase daya serap tenaga kerja (Prioritas)	%	58,78	61,58	Melampaui
	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL				
85	Persentase perusahaan yang menerapkan peraturan perundangan bidang ketengakerjaan	%	57,10	60,98	Melampaui
86	Persentase besaran pekerja /buruh yang menjadi peserta Jamsostek	%	46,60	47,12	Melampaui
	PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN				
87	Persentase Penurunan resiko kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja	%	85,00	100	Melampaui
88	Persentase kepatuhan penerapan norma ketenagakerjaan	%	80	100	Melampaui
	Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak				
	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana				
	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN (Prioritas)				
89	Persentase lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan yang terstandarisasi	%	10	20	Melampaui

No.	Program/Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Tahun 2021		Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)
			Target	Capaian	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
	(Prioritas)				
90	Persentase kab/kota yang memenuhi indikator prasyarat PUG (Prioritas)	%	65	83,33	Melampaui
	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN				
91	Persentase kab/kota yang menyediakan layanan perlindungan perempuan yang terstandarisasi	%	25	25	Sesuai
	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA (Prioritas)				
92	Persentase kab/kota yang menyediakan pembelajaran keluarga yg terstandarisasi	%	25	25	Sesuai
	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK				
93	Persentase Kab/kota yang menyediakan Data Gender dan Anak yang terupdate	%	0	82,5	Melampaui
	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK				
94	Persentase kabupaten/Kota Layak Anak	%	58,33	62,5	Melampaui
	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK				
95	Persentase Kab/Kota yang menyediakan layanan anak korban kekerasan yang terstandarisasi	%	25	25	Sesuai

No.	Program/Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Tahun 2021		Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)
			Target	Capaian	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
	Urusan Pemerintahan Bidang Pangan				
	Dinas Ketahanan Pangan				
	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT				
	Persentase Ketersediaan Pangan Utama (%):				
96	* Beras	%	374,75	363,8	Belum Tercapai
97	* Jagung	%	52,79	61,83	Melampaui
98	* Kedelai	%	26,22	13,62	Belum Tercapai
99	Ketersediaan Energi	Kkal/ Kapita/hari	3.904,10	3.484,4	Belum Tercapai
100	Ketersediaan Protein	gr/Kapita / hari	143,59	94,78	Belum Tercapai
	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN				
101	Jumlah Daerah Rawan Pangan	Lokasi	21	27	Belum Tercapai
102	Penanganan Daerah Rawan Pangan (Data Timpang)	%	6,97	25,64	Melampaui
	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN				
103	Persentase Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan	%	100	100	Sesuai
	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN				
104	Cakupan kelompok pengelola infrastruktur pendukung ketahanan pangan yang di bangun	%	0	14,58	Melampaui
	Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan				
	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan				
	PROGRAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM				

No.	Program/Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Tahun 2021		Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)
			Target	Capaian	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
105	Persentase pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang selesai tepat waktu	%	100	100	Sesuai
	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN				
106	Persentase sengketa tanah negara kewenangan provinsi yang difasilitasi	%	100	100	Sesuai
	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH				
107	Persentase penatagunaan tanah sesuai penyelenggaraan penatagunaan tanah di 24 kab/kota	%	100	100	Sesuai
	Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup				
	Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup				
	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP				
108	Persentase pemenuhan dokumen perencanaan lingkungan hidup	%	40,00	20,00	Belum Tercapai
	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP (Prioritas)				
109	Persentase penurunan emisi gas rumah kaca (GRK) dari sektor limbah (Prioritas)	%	3,95	3,88	Belum Tercapai
	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)				
110	Persentase Tingkat pengelolaan Keanekeragaman Hayati (KeHaTi)	%	85,71	85,71	Sesuai
	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH				

No.	Program/Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Tahun 2021		Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)
			Target	Capaian	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
	BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3) (Prioritas)				
111	Cakupan limbah yang dikelola (Prioritas)	%	97,05	16,79	Belum Tercapai
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN & IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)				
112	Persentase ketaatan pemrakarsa Usaha Terhadap Izin Lingkungan dan Izin PPLH	%	23,00	20,00	Belum Tercapai
	PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LIKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH				
113	Persentase pengakuan keberadaan MHA, kearifan lokal dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	%	48,61	29,16	Belum Tercapai
	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT				
114	Cakupan lembaga atau kelompok masyarakat ditingkatkan kapasitasnya dalam PPLH	%	64,29	64,29	Sesuai
	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP				
115	Cakupan rekomendasi penanganan pengaduan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti	%	100	100	Sesuai
	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN				
116	Presentase Sampah Perkotaan yang tertangani (Prioritas)	%	72,00	82,32	Melampaui

No.	Program/Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Tahun 2021		Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)
			Target	Capaian	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
	Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil				
	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil				
	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK				
117	Persentase Penduduk ber KTP persatuan Penduduk	%	96,00	96,43	Melampaui
118	Persentase penerbitan KTP	%	96,00	96,43	Melampaui
119	Persentase Perekaman Kartu Tanda Penduduk	%	100	102,51	Melampaui
120	Persentase Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA)	%	25,00	40,14	Melampaui
	PROGRAM PENCATATAN SIPIL				
121	Persentase Bayi ber akte kelahiran	%	95,00	96,89	Melampaui
122	Persentase Pasangan ber akte nikah	%	31,00	39,52	Melampaui
123	Persentase penerbitan akta kelahiran	%	93,70	49,52	Belum Tercapai
124	Persentase Penduduk umur 0-17 Tahun dengan kepemilikan akte kelahiran	%	86,20	93,99	Melampaui
125	Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran	%	45,00	49,52	Melampaui
126	Persentase Akta Kematian yang diterbitkan	%	100	100	Sesuai
	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN				
127	Persentase Ketersedian dan Pemanfaatan Database Kependudukan	%	100	100	Sesuai

No.	Program/Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Tahun 2021		Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)
			Target	Capaian	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
	Skala Provinsi				
	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN				
128	Persentase Penyajian Profil Kependudukan	%	100	100	Sesuai
	Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa				
	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa				
	PROGRAM PENATAAN DESA				
129	Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa dalam kondisi baik	%	98,89	98,89	Sesuai
130	Persentase peningkatan status desa mandiri	%	0,88	4,96	Melampaui
131	Persentase pengentasan desa tertinggal	%	19,95	11,88	Belum Tercapai
	PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA				
132	Persentase desa yang menjalin kerjasama	%	0,44	0,62	Melampaui
	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA				
133	Persentase BUM Desa Yang diFasilitas	%	11,81	5,90	Belum Tercapai
134	Persentase Desa yang diFasilitasi	%	15,03	34,10	Melampaui
	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATA N, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (Prioritas)				
135	Persentase Kelembagaan Masyarakat yang difasilitasi dan ditingkatkan kapasitasnya (Kelompok Binaan LPM) (Prioritas)	%	1,51	1,51	Sesuai

No.	Program/Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Tahun 2021		Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)
			Target	Capaian	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
136	Persentase Posyandu aktif (Prioritas)	%	99,89	99,91	Melampaui
137	Persentase PKK aktif (Prioritas)	%	100	100	Sesuai
	Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana				
	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana				
	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK				
138	Cakupan kab/kota yang mendapatkan fasilitasi pembinaan penanganan terpadu isu kependudukan di Kampung KB	%	12,5	16,7	Melampaui
	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)				
139	Persentase PUS peserta KB Aktif	%	63,5	64,14	Melampaui
	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)				
140	Persentase kab/kota yg meningkat capaian Indeks Pembangunan Keluarga	%	16	16,7	Melampaui
	Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan				
	Dinas Perhubungan				
	PROGRAM PENYELENGGARAA N LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) (Prioritas)				
141	Persentase pengguna moda transportasi umum di perkotaan (Prioritas)	%	29,20	12,70	Belum Tercapai
142	Persentase Layanan Angkutan Darat (Prioritas)	%	54,00	43,00	Belum Tercapai
143	Jumlah penumpang melalui terminal Tipe B per tahun	Orang	365.000	499.277	Melampaui

No.	Program/Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Tahun 2021		Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)
			Target	Capaian	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
	(Prioritas)				
144	Cakupan prasarana LLAJ dalam kondisi baik (Prioritas)	%	22,00	3,05	Belum Tercapai
145	Jumlah penyelenggaraan lalu lintas pada ruas jalan provinsi (Prioritas)	Ruas	20	45	Melampaui
146	Jumlah Terminal Bis terkelola (Prioritas)	Terminal	10	7	Belum Tercapai
	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN (Prioritas)				
147	Jumlah arus penumpang melalui pelabuhan (Prioritas)	Orang	1.280.000	1.355.919	Melampaui
148	Jumlah pelabuhan strategis provinsi (Prioritas)	Lokasi	11	11	Sesuai
149	Persentase pelabuhan yang beroperasi (Prioritas)	%	35,00	10,00	Belum Tercapai
	PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN				
150	Persentase penyelesaian pedoman standar pelayanan Sarana dan prasarana transportasi	%	100	100	Sesuai
	Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika				
	Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian				
	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK (Prioritas)				
151	Persentase layanan informasi dan komunikasi publik (Prioritas)	%	80	80	Sesuai
152	Presentase tindak lanjut pengaduan pada Baruga	%	100	100	Sesuai

No.	Program/Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Tahun 2021		Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)
			Target	Capaian	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
	Layanan Masyarakat secara Elektronik (Prioritas)				
	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA (Prioritas)				
153	Indeks sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) (Prioritas)	Angka	3,0	2,05	Belum Tercapai
	Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah				
	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah				
	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM				
154	Persentase Koperasi dan UKM yang memiliki Izin usaha Simpan Pinjam	%	12,00	39,00	Melampaui
155	Persentase Koperasi yang mendapat Izin Pembukaan Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu dan Kantor Kas	%	10,00	36,00	Melampaui
	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI				
156	Persentase Koperasi yang diawasi dan diperiksa	%	20,00	30,00	Melampaui
157	Persentase Koperasi yang meningkat kepatuhannya terhadap peraturan perundang-undangan	%	20,00	20,00	Sesuai
	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERAS				
158	Persentase KSP/USP Koperasi, KSPPS/USPPS Koperasi dengan	%	20,00	35,00	Melampaui

No.	Program/Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Tahun 2021		Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)
			Target	Capaian	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
	Kriteria SEHAT				
159	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Penilaian Kesehatan Koperasi	%	20,00	20,00	Sesuai
	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN				
160	Persentase Pengurus Koperasi Aktif yang pernah mendapatkan pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian	%	30,00	31,00	Melampaui
	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI (Prioritas)				
161	Persentase Koperasi yang terfasilitasi pemberdayaan (Prioritas)	%	30,00	30,00	Sesuai
	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL DAN USAHA MIKRO (UMKM) (Prioritas)				
162	Cakupan UMKM yang diberdayakan (Prioritas)	%	7,00	15,00	Melampaui
	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM				
163	Persentase UMKM yang terfasilitasi Dalam Pengembangan Usaha (Prioritas)	%	15,00	30,00	Melampaui
164	Cakupan promosi produk UMKM (Prioritas)	%	1,00	1,70	Melampaui
	Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal				
	Dinas Penanaman Modal dan PTSP				
	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL				
165	Persentase Peningkatan Pengelolaan Potensi Investasi yang	%	75,00	75,00	Sesuai

No.	Program/Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Tahun 2021		Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)
			Target	Capaian	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
	dimamfaatkan oleh Investor				
	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL (Prioritas)				
166	Jumlah Realisasi PMA (Prioritas)	Rp. Triliun	3,50	2,85	Belum Tercapai
167	Jumlah Realisasi PMDN (Prioritas)	Rp. Triliun	4,50	10,78	Melampaui
	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL (Prioritas)				
168	Persentase Ketepatan Waktu Penyelesaian Izin yang Diterbitkan Sesuai SOP (Prioritas)	%	80,00	78,00	Belum Tercapai
	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL				
169	Persentase Perusahaan yang taat Terhadap Ketentuan peraturan Penanaman modal	%	50,00	50,00	Sesuai
	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL				
170	Persentase ketersediaan data dan informasi pendukung penanaman modal	%	80,00	80,00	Sesuai
	Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga				
	Dinas Kepemuaan dan Olahraga				
	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN (Prioritas)				
171	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi social (Prioritas)	%	0,19	0,23	Melampaui
172	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri (Prioritas)	%	1,16	4,22	Melampaui
	PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN (Prioritas)				

No.	Program/Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Tahun 2021		Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)
			Target	Capaian	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
173	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana olahraga (Prioritas)	%	90	30	Belum Tercapai
174	Persentase Peningkatan Prestasi olahraga (Prioritas)	%	100	-0,84	Belum Tercapai
	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN				
175	Persentase organisasi pramuka aktif	%	100	100	Sesuai
	Urusan Pemerintahan Bidang Statistik				
	Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian				
	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL				
176	Cakupan Ketersediaan Data Statistik Sektoral	%	50,00	50,00	Sesuai
	Urusan Pemerintahan Bidang Persandian				
	Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian				
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI				
177	Persentase Komunikasi daerah yang memanfaatkan persandian	%	35,00	50,00	Melampaui
	Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan				
	Dinas Kebudayaan dan Kepariwisataan				
	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN				
178	Persentase Karya Budaya yang direvitalisasi dan Inventarisasi	%	1,60	1,90	Melampaui
	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH				
179	Persentase Lembaga Sejarah yang di Fasilitasi	%	2,8	2,2	Belum Tercapai
	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGEOLAAN CAGAR BUDAYA				
180	Persentase Cagar Budaya yang	%	0,48	0,57	Melampaui

No.	Program/Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Tahun 2021		Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)
			Target	Capaian	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
	dilestarikan				
	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN				
181	Persentase Kunjungan ke musium	%	100	100	Sesuai
	Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan				
	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan				
	PROGAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN				
182	Jumlah pengunjung perpustakaan konvensional dan elektronik	Orang	150.000	154.913	Melampaui
	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO				
183	Persentase naskah kuno yang di lestarikan	%	100	80,86	Belum Tercapai
	Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan				
	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan				
	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP				
184	Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku	%	18,87	33,30	Melampaui
	Urusan Pilihan				
	Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan				
	Dinas Kelautan dan Perikanan				
	PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL (Prioritas)				
185	Produksi garam rakyat (Prioritas)	Ton	46.500	1.155,2	Belum Tercapai
186	Cakupan ketersediaan sarana dan prasarana pendukung produksi perikanan (Prioritas)	%	50,17	28,28	Belum Tercapai

No.	Program/Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Tahun 2021		Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)
			Target	Capaian	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
187	Cakupan luas kawasan konservasi perairan yang dikelola secara berkelanjutan (Prioritas)	%	67,29	67,29	Sesuai
188	Persentase Pelabuhan Perikanan yg memiliki sarana prasarana yang sesuai standar operasional	%	57,89	63,16	Melampaui
	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP (Prioritas)				
189	Nilai Produksi Perikanan Tangkap (Prioritas)	Milyar Rupiah	8.852,48	10.742,80	Melampaui
190	Produksi perikanan tangkap (Prioritas)	Ton	396.992,3	429.431,20	Melampaui
191	Cakupan Bina Kelompok Nelayan (Prioritas)	%	23,89	18,47	Belum Tercapai
	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA (Prioritas)				
192	Nilai Produksi Perikanan Budidaya (Prioritas)	Milyar Rp	14.474,73	17.944,40	Melampaui
193	Persentase Produksi perikanan kelompok nelayan (Prioritas)	%	25,61	18,11	Belum Tercapai
194	Produksi perikanan budidaya (Prioritas)	Ton	3.898.767,40	4.388.487,40	Melampaui
195	Persentase ketersediaan benur berkualitas (Prioritas)	%	100	96,90	Belum Tercapai
	PROGRAM PENGAWASAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN (Prioritas)				

No.	Program/Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Tahun 2021		Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)
			Target	Capaian	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
196	Persentase Kepatuhan Pelaku usaha KP terhadap ketentuan peraturan perundangan yang berlaku (Prioritas)	%	87,48	69,18	Belum Tercapai
	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN (Prioritas)				
197	Nilai Hilirisasi Produksi olahan Ikan konsumsi dan non konsumsi (Prioritas)	Milyar Rp	304,96	280,30	Belum Tercapai
198	Produksi olahan konsumsi dan non konsumsi (Prioritas)	Ton	7.051,7	5.497,40	Belum Tercapai
199	Persentase Pembinaan mutu produk perikanan (Prioritas)	%	60	53,77	Belum Tercapai
	Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata				
	Dinas Kebudayaan dan Kepariwisataan				
	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA (Prioritas)				
200	Persentase peningkatan destinasi wisata menjadi destinasi wisata unggulan (Prioritas)	%	0,5	0,2	Belum Tercapai
201	Persentase Kab/Kota yang memiliki awasan wisata halal (Prioritas)	%	12,5	8,3	Belum Tercapai
	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA (Prioritas)				
202	Persentase Capaian Kunjungan wisata (Wisatawan Mancanegara) (Prioritas)	%	100	77,16	Belum Tercapai

No.	Program/Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Tahun 2021		Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)
			Target	Capaian	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
203	Persentase Capaian Kunjungan wisata (Wisatawan Nusantara) (Prioritas)	%	100	4,17	Belum Tercapai
	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL				
204	Persentase Sub Sektor ekonomi kreatif yang dikembangkan	%	13	19	Melampaui
	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF				
205	Persentase Sumber Daya Manusia Pariwisata yang mendapatkan pelatihan	%	3,18	1,45	Belum Tercapai
206	Persentase pelaku usaha ekonomi kreatif yang mendapatkan pelatihan	%	7,4	12	Melampaui
	Urusan Pemerintah Bidang Pertanian				
	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan				
	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN (Prioritas)				
207	Jumlah produksi Talas Satoimo (Prioritas)	Ton	7.000	6.104	Belum Tercapai
208	Luas Areal Pengengembangan Jeruk Keprok Selayar (Prioritas)	Ha	100	630,99*	Melampaui
209	Produktifitas Padi (Prioritas)	Kw/Ha	48,95	49,46*	Melampaui
210	Produktifitas Jagung (Prioritas)	Kw/Ha	54,10	55,31*	Melampaui
211	Produtifitas Kopi (Prioritas)	Kg/Ha	588	647	Melampaui
212	Produtifitas Kakao (Prioritas)	Kg/Ha	634	814	Melampaui
213	Peningkatan Ketersediaan Alat	Unit	250	18.384	Melampaui

No.	Program/Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Tahun 2021		Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)
			Target	Capaian	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
	dan Mesin Pertanian (Prioritas)				
214	Peningkatan Ketersediaan Pupuk (Prioritas)	Ton	298,65	775.231	Melampaui
	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN (Prioritas)				
215	Nilai Hilirisasi Produk Tanaman Pangan (Prioritas)	Rp	460.835.232.750	392.483.722.916	Belum Tercapai
216	Nilai Hilirisasi Produk Perkebunan (Prioritas)	Rp	6.000.000.000	6.144.952.080	Melampaui
	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN (Prioritas)				
217	Persentase Penurunan Serangan OPT (Prioritas)	%	5,0	2,00	Belum Tercapai
218	Persentase Penggunaan Benih Padi Bersertifikat (Prioritas)	%	78,79	76,49	Belum Tercapai
	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN				
219	Rasio Ketersediaan Penyuluh Pertanian dan Pelaku Utama Petani, Penyuluh/KEP	%	0,5	0,5	Sesuai
	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan				
	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN (Prioritas)				
220	Produksi Daging (Prioritas)	Ton	167.936	118.682*	Belum Tercapai
221	Produksi Telur (Prioritas)	Ton	191.968	245.108*	Melampaui
222	Produksi Susu (Prioritas)	Ton	2.035	2.400*	Melampaui
	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN (Prioritas)				

No.	Program/Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Tahun 2021		Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)
			Target	Capaian	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
223	Nilai Hilirisasi Produksi Peternakan (Prioritas)	Rp	29.493.840.000	26.861.154.720	Belum Tercapai
	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER (Prioritas)				
224	Jumlah Kasus Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS)	Kasus	25.063	11.123	Belum Tercapai
	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN				
225	Persentase Unit Usaha Yang Memiliki Rekomendasi Usaha Obat Hewan	%	15	12	Belum Tercapai
	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN				
226	Rasio Ketersediaan Penyuluh Terhadap Kelompok Tani/Ternak	Klp	1 : 15	1 : 10	Belum Tercapai
	Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan				
	Dinas Kehutanan				
	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN (Prioritas)				
227	Jumlah produksi hasil hutan bukan kayu (Prioritas)	Ton	283	2.688,57	Melampaui
228	Jumlah produksi hasil hutan kayu olahan (Prioritas)	M^3	92.336,62	137.931,37	Melampaui
229	Persentase Kerusakan Hutan pertahun (Prioritas)	%	17,59	0,08	Belum Tercapai
230	Cakupan luas lahan kritis yang direhabilitasi (Prioritas)	%	57,91	65,61	Melampaui
	PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA				

No.	Program/Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Tahun 2021		Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)
			Target	Capaian	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
231	Jumlah jenis tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi dan/atau tidak masuk dalam lampiran (Appendix) CITES untuk kewenangan daerah provinsi yang terdata	Jenis	2	2	Sesuai
	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN (Prioritas)				
232	Persentase Jumlah Pemegang izin perhutanan sosial yang menjalankan pengelolaan dan pemanfaatan sesuai aturan	%	15,65	24,04	Melampaui
	PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS) (Prioritas)				
233	Jumlah DAS yang direhabilitasi (Prioritas)	DAS	2	2	Sesuai
	Urusan Pemerintahan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral				
	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral				
	PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN				
234	Persentase Pelayanan Usaha Air Tanah Berbasis Konservasi	%	70	100	Melampaui
	PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA				
235	Luas Wilayah Izin Usaha Pertambangan (Komoditas Batuan, Non Logam, Non Logam Jenis Tertentu)	Ha	100.000	320	Belum Tercapai

No.	Program/Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Tahun 2021		Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)
			Target	Capaian	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
236	Penentuan dan Penetapan Blok WIUP Mineral (Komoditas Batuan, Non Logam, Non Logam Jenis Tertentu)	Ha	50.000	6.320	Belum Tercapai
	PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI TERBARUKAN (Prioritas)				
237	Persentase Penggunaan Gas Rumah Tangga (Prioritas)	%	92	91,67	Belum Tercapai
	PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN (Prioritas)				
238	Persentase Rumah Tangga Pengguna Listrik (Prioritas)	%	98,25	98,20	Belum Tercapai
239	Persentase Desa berlistrik (Prioritas Desa Kepulauan) (Prioritas)	%	99	98,49	Belum Tercapai
	Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan				
	Dinas Perdagangan				
	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN				
240	Persentase Rekomendasi SIUP MB yang dikeluarkan	%	100	0	Belum Tercapai
241	Persentase Penerbitan SKA	%	100	116,4	Melampaui
	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN				
242	Persentase Ketersediaan Sarana Distribusi Perdagangan	%	100	100	Sesuai
	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING				
243	Persentase barang kebutuhan pokok dan barang penting yang dapat dikendalikan harganya	%	100	100	Sesuai

No.	Program/Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Tahun 2021		Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)
			Target	Capaian	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR (Prioritas)				
244	Nilai Ekspor Perdagangan (Prioritas)	US $	1.466.745.670	1.677.394.840	Melampaui
	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN				
245	Persentase Barang Beredar yang diawasi, tertib niaga dan Pengaduan Konsumen	%	100	75,00	Belum Tercapai
	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI				
246	Persentaase jenis produk pelaku usaha yang memenuhi standar Perdagangan retail	%	100	140	Melampaui
	Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian				
	Dinas Perindustrian				
	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI (Prioritas)				
247	Persentase pertumbuhan jumlah industri (Prioritas)	%	5	4,90	Belum Tercapai
	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI				
248	Persentase peningkatan pengendalian izin usaha industri	%	2	1,78	Belum Tercapai
	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL				
249	Persentase peningkatan pengelolaan SIINAS	%	2	1,97	Belum Tercapai
	Urusan Pemerintahan Bidang Transmigrasi				
	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi				
	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI (Prioritas)				

No.	Program/Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Tahun 2021		Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)
			Target	Capaian	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
250	Persentase penempatan transmigrasi (Prioritas)	%	100	100	Sesuai
	PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI				
251	Persentase transmigran yang dilatih untuk dapat lebih mandiri	%	100	100	Sesuai
252	Persentase ketersediaan data sarana dan prasarana	%	100	100	Sesuai
	Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan				
	Sekretariat Daerah				
	Biro Organisasi				
	PROGRAM PENATAAN ORGANISASI (Prioritas)				
253	Persentase kesesuaian program prioritas dengan struktur organisasi perangkat daerah (Prioritas)	%	100	100	Sesuai
	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah				
	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH				
254	Presentase Urusan Pemerintahan Yang difasilitasi, dimonitoring, dan dievaluasi	%	100	100	Sesuai
	Biro Kesejahteraan				
	PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT (Prioritas)				
255	Persentase Rumusan Kebijakan Bidang Kesejahteraan Rakyat yang dimanfaatkan (Prioritas)	%	100	80,00	Belum Tercapai

No.	Program/Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Tahun 2021		Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)
			Target	Capaian	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
256	Persentase Penduduk usia 15 tahun ke atas beragama Islam yang melek aksara Al-Quran (Prioritas)	%	35,25	39,22	Melampaui
257	Persentase Penurunan kasus Kejahatan terhadap Kesusilaan (Prioritas)	%	10,00	20,00*	Melampaui
	Biro Hukum				
	PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM (Prioritas)				
258	Nilai Hasil Evaluasi Reformasi Birokrasi pada Penataan Peraturan Perundang-undangan (Prioritas)	Nilai	3,00	3,90	Belum Tercapai
259	Persentase Perkara Hukum yang difasilitasi (Prioritas)	%	100	100	Sesuai
	Biro Pengadaan Barang dan Jasa				
	PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA				
260	Persentase kesesuaian pengadaan barang dan jasa dengan rencana	%	100	99,94	Belum Tercapai
261	Persentase kepuasan pelayanan pengadaan barang dan jasa	%	100	99,00	Belum Tercapai
	Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan				
	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN				

No.	Program/Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Tahun 2021		Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)
			Target	Capaian	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
262	Persentase rumusan kebijakan bidang perekonomian yang dimanfaatkan	%	100	100	Sesuai
263	Realisasi capaian program prioritas pembangunan daerah	%	100	98	Sesuai
	Sekretariat Dewan				
	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD				
264	Persentase PROLEGDA yang terealisi	%	100	75,00	Belum Tercapai
265	Persentase Jumlah program kerja DPRD yang terintegrasi dengan program RPJMD dan RKPD	%	100	100	Sesuai
266	Persentase Ranperda yang difasilitasi pembahasannya	%	100	75,00	Belum Tercapai
	Unsur Penunggang Urusan Pemerintah				
	Perencanaan				
	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah				
	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH (Prioritas)				
267	Persentase Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD dan APBD (Prioritas)	%	100	100	Sesuai
268	Persentase peningkatan capaian kinerja program (Prioritas)	%	0,50	3,68	Melampaui
	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH				

No.	Program/Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Tahun 2021		Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)
			Target	Capaian	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
269	Persentase Kesesuaian program Perangkat Daerah dengan Sasaran Pembangunan Daerah lingkup bidang PPM	%	60,00	100	Melampaui
270	Persentase Kesesuaian program Perangkat Daerah dengan Sasaran Pembangunan Daerah lingkup bidang Ekonomi dan SDA	%	80,00	100	Melampaui
271	Persentase Kesesuaian program Perangkat Daerah dengan Sasaran Pembangunan Daerah lingkup bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	%	90,00	99,00	Melampaui
	Keuangan				
	Badan Keuangan dan Aset Daerah				
	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH				
272	Persentase Persetujuan Bersama Ranperda APBD Pokok dan APBD Perubahan Yang Tepat Waktu	%	100	100	Sesuai
273	Tingkat Kepatuhan Kabupaten/Kota Dalam Menyampaikan Ranperda & Ranperkada APBD	%	100	100	Sesuai

No.	Program/Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Tahun 2021		Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)
			Target	Capaian	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
	Untuk Dievaluasi Tepat Waktu				
274	Tingkat Kepatuhan Kab/Kota dalam menyampaikan Ranperda dan Ranperkada Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD untuk dievaluasi tepat waktu	%	100	100	Sesuai
275	Persentase Serapan Belanja Daerah	%	94,00	94,50	Melampaui
276	Persentase Penyampaian Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Yang Tepat Waktu	%	100	100	Sesuai
	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH				
277	Persentase Tindak Lanjut Rencana Aksi Manajemen Aset Daerah	%	90,00	91,53	Melampaui
278	Persentase Tanah Pemprov yang Sudah Bersertifikat	%	56,00	56,22	Melampaui
	Badan Pendapatan Daerah				
	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH				
279	Persentase keterpenuhan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan kinerja tepat waktu dibidang pendapatan PAD	%	100	100	Sesuai

No.	Program/Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Tahun 2021		Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)
			Target	Capaian	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
280	Persentasi Peningkatan PAD	%	5	14,88	Belum Tercapai
	Kepegawaian				
	Badan Kepegawaian Daerah				
	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH				
281	Persentase pemenuhan kebutuhan pegawai ASN (Prioritas)	%	60,00	63,00	Melampaui
282	Persentase ASN yang menduduki jabatan struktural dan fungsional berbasis talenta (Prioritas)	%	85,00	83,76	Belum Tercapai
283	Persentase ASN berkinerja baik dan sangat baik (Prioritas)	%	91,00	90,38	Belum Tercapai
	Pendidikan dan Pelatihan				
	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia				
	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA				
284	Cakupan SDM Aparatur yang Lulus Diklat Kompetensi Managerial, Kompetensi Diklat Fungsional, Kompetensi Diklat Sosial Kultural (Prioritas)	%	100	100	Sesuai
	Penelitian dan Pengembangan				
	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah				
	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH (Prioritas)				
285	Persentase Perangkat Daerah yang mendapatkan penghargaan	%	3,00	11,32	Melampaui

No.	Program/Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Tahun 2021		Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)
			Target	Capaian	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
	inovasi daerah (Prioritas)				
	Pengelolaan Penghubung				
	Badan Penghubung				
	PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG				
286	Persentase Pelayanan tamu daerah	%	100	20,00	Belum Tercapai
287	Persentase Peningkatan Promosi dan Kerjasama Daerah	%	100	0	Belum Tercapai
	Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan				
	Pengawasan				
	Inspektorat Daerah				
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN (Prioritas)				
288	Persentase Penyelesaian Tindak lanjut Perangkat Daerah terhadap Hasil Pemeriksaan APIP (Prioritas)	%	70,20	73,93	Melampaui
289	Persentase Penyelesaian Tindak lanjut Hasil Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/ Kota (Prioritas)	%	69,59	70,04	Melampaui
290	Persentase OPD yang hasil Nilai SAKIPnya meningkat (Prioritas)	%	100	100	Sesuai
	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI				
291	Presentase kebijakan pengawasan pemerintah yang diakomodir	%	100	100	Sesuai

No.	Program/Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Tahun 2021		Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)
			Target	Capaian	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
	menjadi kebijakan pengawasan daerah				
292	Persentase pengaduan masyarakat terhadap OPD yang ditindaklanjuti	%	100	100	Sesuai
293	Persentase pengaduan masyarakat terhadap pemerintah Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti	%	100	100	Sesuai
	Unsur Pemerintahan Umum				
	Kesatuan Bangsa dan Politik				
	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik				
	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN (Prioritas)				
294	Persentase keikutsertaan masyarakat dalam bela negara (Prioritas)	%	20,00	75,00	Melampaui
	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK				
295	Persentase Tingkat partisipasi pemilih dalam pemilu	%	81,70	99,73	Melampaui
	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN				
296	Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang memenuhi 4 konsensus kebangsaaan	%	20,00	100	Melampaui
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA (Prioritas)				

No.	Program/Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Tahun 2021		Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)
			Target	Capaian	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
297	Persentase Penurunan Penyalahgunaan Narkoba (Prioritas)	%	20,00	100	Melampaui
298	Persentase Wilayah Sulsel Berpotensi Konflik Agama yang ditangani (Prioritas)	%	100	100	Sesuai
	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL				
299	Persentase Penurunan jumlah konflik di lingkungan masyarakat	%	20,00	368,75	Melampaui

Sesuai dengan Hasil Analisis Terhadap Capaian Indikator Kinerja Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021 dari 299 total indikator terdapat 119 indikator **melampaui** dari target yang telah ditetapkan, dan sebanyak 98 indikator yang telah **sesuai** dengan target, sedangkan 83 indikator lainnya **belum mencapai** target yang telah ditetapkan. Banyaknya indikator yang belum tercapai disebabkan karena adanya rekofusing anggaran terkait penanganan covid-19 pada tahun 2020 sehingga telah mengganggu perencanaan yang telah disusun sebelumnya.

2.5.5 Capaian Target Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Kinerja pemenuhan SPM Provinsi Sulawesi Selatan diukur dari ketercapaian indikator pada masing-masing 6 (enam) bidang urusan dan jenis pelayanan pada RKPD Provinsi Sulawesi Selatan. Adapun indikator SPM untuk tahun 2020 terdapat 9 indikator yang tercapai dan 5 indikator yang melampaui. Sementara tahun 2021 dari 14 indikator, terdapat 9 indikator yang telah tercapai dan 5 indikator yang belum tercapai.

Tabel II.391.
Capaian Target Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM)
Di Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2020-2021 (%)
(Permendagri No. 100 Tahun 2018)

Bidang Urusan/Jenis Pelayanan/Indikator	Target Nasional Tahun 2021	Capaian SPM		Interpretasi Belum Tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>)
		2020	2021	
1	*2*	*3*	*4*	
Pendidikan				
Pendidikan Menengah				
Persantase Warga Negara usia 16 – 18 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah	100	76,62	100	Melampaui
Pendidikan Khusus				
Persantase Warga Negara usia 4 – 18 tahun yang termasuk dalam penduduk disabilitas yang berpartisipasi dalam pendidikan Khusus	100	80	100	Melampaui
Kesehatan				
Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Provinsi				
Persantase Warga Negara yang terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/ atau berpotensi bencana provinsi yang mendapatkan layanan kesehatan	100	100	100	Sesuai
Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Pada Kondisi Kejadian Luar Biasa Provinsi				
Persentase Warga Negara pada kondisi kejadian luar biasa provinsi yang mendapatkan layanan kesehatan	100	100	100	Sesuai
Pekerjaan Umum				
Pemenuhan kebutuhan air minum curah lintas kabupaten/kota				
Persentase Warga Negara yang memperoleh kebutuhan air minum curah lintas kabupaten/kota	100	100	100	Sesuai
Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik				

Bidang Urusan/Jenis Pelayanan/Indikator	Target Nasional Tahun 2021	Capaian SPM		Interpretasi Belum Tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>)
		2020	2021	
1	*2*	*3*	*4*	
regional lintas kabupaten/kota				
Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan pegolahan air limbah domestik regional lintas kabupaten/kota	100	100	100	Sesuai
Perumahan Rakyat				
Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana provinsi				
Persentase Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	100	100	100	Sesuai
Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintahan Daerah Provinsi				
Persentase Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah Provinsi yang memperoleh fasilitasi peyediaan rumah yang layak huni	100	100	100	Sesuai
Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat				
Pelayanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Provinsi				
Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkada	100	100	100	Sesuai
Sosial				
Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Telantar di Dalam Panti				
Persentase Warga Negara penyandang disabilitas telantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	100	35,12	100	Melampaui
Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Telantar di Dalam Panti				
Persentase Warga Negara Anak Terlantar yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar anak terlantar	100	3,88	100	Melampaui

Bidang Urusan/Jenis Pelayanan/Indikator	Target Nasional Tahun 2021	Capaian SPM		Interpretasi Belum Tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>)
		2020	2021	
1	*2*	*3*	*4*	
Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Dalam Panti				
Persentase Warga Negara Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar lanjutan usai di dalam panti	100	100	100	Sesuai
Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Dalam Panti				
Persentase Warga Negara Gelandangan dan Pengemis yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar tuna sosial di dalam panti	100	100	100	Sesuai
Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Bagi Korban Bencana Provinsi				
Persentase Warga Negara Korban Bencana provinsi yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana provinsi	100	15,63	100	Melampaui

Sumber: OPD Pengelola SPM Prov. Sulsel, Tahun 2022, diolah
*Untuk Urusan Pekerjaan Umum: *) Belum ada layanan SPAM/IPLT Regional*
**) SPAM Mamminasata Belum Selesai*

2.5.6 Capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Suistanable Development Goals (TPB/SDGs)

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau Sustainable Development Goals (TPB/SDGs) adalah Pembangunan yang menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, pembangunan yang menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, pembangunan yang menjaga kualitas lingkungan hidup serta pembangunan yang menjamin keadilan dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas hidup dari satu generasi ke generasi berikutnya. Regulasi terhadap Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, atau Sustainable Development Goals TPB/SDGs telah diatur dalam Paraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

TPB/SDGs yang merupakan penyempurnaan dari Tujuan Pembangunan Milenium (Millenium Development Goals/MDGs) yang merupakan komitmen global dan nasional dalam upaya untuk menyejahterakan masyarakat mencakup 17 tujuan yaitu:

1. Tanpa Kemiskinan;
2. Tanpa Kelaparan;
3. Kehidupan Sehat dan Sejahtera;
4. Pendidikan Berkualitas;
5. Kesetaraan Gender;
6. Air Bersih dan Sanitasi Layak;
7. Energi Bersih dan Terjangkau;
8. Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi;
9. Industri, Inovasi, dan Infrastruktur;
10. Berkurangnya Kesenjangan;
11. Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan;
12. Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab;
13. Penanganan Perubahan Iklim;
14. Ekosistem Lautan;
15. Ekosistem Daratan;
16. Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh;
17. Kemitraan untuk Mencapai Tujuan.

Upaya pencapaian target TPB/SDGs menjadi prioritas pembangunan daerah yang memerlukan sinergi kebijakan perencanaan di tingkatan provinsi. Adapun capaian target TPB/SDGs tahun 2020 dari 17 tujuan, 206 indikator dapat digambarkan bahwa masih terdapat 95 indikator yang belum tercapai, sedangkan yang sudah tercapai sebanyak 111 indikator. Capaian target dimaksud dapat dilihat pada Tabel II. 394:

Tabel II.392.
Capaian Target Indikator TPB/SDGs
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016-2019

No.	Tujuan / Indikator	Target Nasional	Target Provinsi	Capaian TPB/SDGs				OPD
				2016	2017	2018	2019	Penanggung Jawab
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
1	**Tujuan 1 : Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk Dimanapun**							
1.1	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur *	7-8%	7%	9,4	9,38	9,06	8,69	Dinas Sosial
1.2	Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan **	90%	75%	70%	75%	85,76%	87,02	Dinas Kesehatan
1.3	Persentase penyandang disabilitas yang miskin dan rentan yang terpenuhi hak dasarnya dan inklusivitas **	17,12%	11,73%	11,73	6	0,03	5,54	Dinas Sosial
1.4	Jumlah rumah tangga yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat/Program Keluarga Harapan **	2,8 Juta Rumah Tangga	178.594 Rumah Tangga	100.473	182.057	314.420	232.935	Dinas Sosial

No.	Tujuan / Indikator	Target Nasional	Target Provinsi	Capaian TPB/SDGs				OPD
				2016	2017	2018	2019	Penanggung Jawab
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
1.5	Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan (penduduk 40% pendapatan terendah)*	70%	81%	67,63%	76,90%	76,85%	83,84%	Dinas Kesehatan
1.6	Persentase anak umur 12-23 bulan yang menerima imunisasi dasar lengkap (penduduk 40% pendapatan terendah) *	63%	63%	62,29%	47,68%	56,56%	53,94%	Dinas Kesehatan
1.7	Prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin lengkap (penduduk 40% pendapatan terendah) *	65%	68%	55,30%	54,44%	53,87%	54,47%	Dinas Kesehatan

No.	Tujuan / Indikator	Target Nasional	Target Provinsi	Capaian TPB/SDGs				OPD
				2016	2017	2018	2019	Penanggung Jawab
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
1.8	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan (penduduk 40% pendapatan terendah) *	100%	100%	65,54%	66,68%	70,82%	85,84%	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
1.9	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan (penduduk 40% pendapatan terendah) *	100%	100%	63,50%	62,84%	69,4	80,54%	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
1.10	Persentase Rumah Tangga Kumuh Perkotaan (penduduk 40% pendapatan terendah) *			63,50%	62,84%	69,41%	80,54%	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
1.11	Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket C **	91,63%	63,50%	59.95	60.37	60.67	60.84	Dinas Pendidikan
1.12	Persentase penduduk umur 0-17 tahun dengan kepemilikan	77,40%	77,40%	78,48%	80,37%	82,24%	86,18%	Dinas Kependudukan,

No.	Tujuan / Indikator	Target Nasional	Target Provinsi	Capaian TPB/SDGs				OPD
				2016	2017	2018	2019	Penanggung Jawab
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
	akta kelahiran(penduduk 40% pendapatan terendah) *							Pencatatan Sipil, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1.13	Persentase rumah tangga miskin dan rentan yang sumber penerangan utamanya listrik baik dari PLN dan bukan PLN(penduduk 40% pendapatan terendah) *	100%	95%	95,26%	97,04%	97,04%	98,36%	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
1.14	Jumlah korban meninggal, hilang, dan terkena dampak bencana per 100.000 orang **	Menurun	5.598 Jiwa	14.472	Meninggal=0,22 Terdampak =64416,7	Meninggal=0 ,005 Terdampak= 5.403	Meninggal= 0,03 Terdampak =153,81	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1.15	Jumlah lokasi penguatan pengurangan risiko bencana daerah **	39 Daerah	24 Kab/	24 Kab/	24 Kab/	24 Kab/	24 Kab/	Badan Penanggulangan Bencana

No.	Tujuan / Indikator	Target Nasional	Target Provinsi	Capaian TPB/SDGs				OPD
				2016	2017	2018	2019	Penanggung Jawab
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
			Kota	Kota	Kota	Kota	Kota	Daerah
1.16	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah **	Ada	1 Dokumen	N/A	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1.17	Proporsi sumber daya yang dialokasikan oleh pemerintah secara langsung untuk program pemberantasan kemiskinan **	Meningkat	435	476	N/A	N/A	N/A	Dinas Sosial
2	**Tujuan 2 : Menghilangkan Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi yang Baik, serta Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan**							
2.1	Prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita (Kekurangan gizi) *	17%	22,10%	25,11%	22,80%	23,00%	15,30%	Dinas Kesehatan
2.2	Prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat, berdasarkan pada Skala Pengalaman Kerawanan Pangan **	Menurun	48,90%	N/A	7,61%	N/A	4,43%	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan

No.	Tujuan / Indikator	Target Nasional	Target Provinsi	Capaian TPB/SDGs				OPD
				2016	2017	2018	2019	Penanggung Jawab
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
								Hortikultura
2.3	Proporsi penduduk dengan asupan kalori minimum di bawah 1400 kkal/kapita/hari **	8,50%	15,87%	14,34	8,11	9,44	9	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
2.4	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita **	Menurun	33,86%	36%	35%	35,70%	30,59	Dinas Kesehatan
2.5	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah dua tahun/baduta **	28%	33,87%	26,70%	21,80%	33,80%	14% E-PPGBM	Dinas Kesehatan
2.6	Prevalensi malnutrisi (berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun, berdasarkan tipe **	Menurun	7,25%	9,40%	8,70%	12,30%	5,8% e-PPGBM	Dinas Kesehatan
2.7	Prevalensi anemia pada ibu	28%	28,50%	15%	13,40%	15,50%	17,64	Dinas

No.	Tujuan / Indikator	Target Nasional	Target Provinsi	Capaian TPB/SDGs				OPD
				2016	2017	2018	2019	Penanggung Jawab
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
	hamil							Kesehatan
2.8	Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapatkan ASI eksklusif *	50%	44%	57,11%	61,09%	52,19%	70,82	Dinas Kesehatan
2.9	Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH) mencapai; dan tingkat konsumsi ikan **	Skor PPH = 92,5; Tingkat Konsumsi Ikan = 54,5 kg/kapita/thn	57,67	79,9	92,6	82,60	83,40	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
3	**Tujuan 3 : Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia**							
3.1	Angka Kematian Ibu (AKI) **	306	104	156	115	139	144	Dinas Kesehatan
3.2	Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih *	95%	96%	93,53%	95,31%	95,81%	97,21	Dinas Kesehatan

No.	Tujuan / Indikator	Target Nasional	Target Provinsi	Capaian TPB/SDGs				OPD
				2016	2017	2018	2019	Penanggung Jawab
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
3.3	Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan *	85%	81%	93,53%	95,31%	95,81%	97,21	Dinas Kesehatan
3.4	Angka Kematian Balita (AKBa) per 1000 kelahiran hidup **	Menurun		8,2	7,67	6,26	6,2	Dinas Kesehatan
3.5	Angka Kematian Neonatal (AKN) per 1000 kelahiran hidup **	Menurun		5,64	5,44	6,21	5,86	Dinas Kesehatan
3.6	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup **	24		7,94	7,05	5,76	5,69	Dinas Kesehatan
3.7	Persentase kabupaten/kota yang mencapai 80% imunisasi dasar lengkap pada bayi *	95%	85%	100%	100%	79,17	96,15	Dinas Kesehatan
3.8	Prevalensi HIV pada populasi dewasa **	<0,5%	<0,5%	0,28	0,33	0,013	0,019	Dinas Kesehatan
3.9	Insiden Tuberkulosis (ITB) per 100.000 penduduk **	245	158	155	155	196	216	Dinas Kesehatan
3.10	Kejadian Malaria per 1000 orang *	Menurun	<1	0,12	0,14	0,15	0,10	Dinas Kesehatan

No.	Tujuan / Indikator	Target Nasional	Target Provinsi	Capaian TPB/SDGs				OPD
				2016	2017	2018	2019	Penanggung Jawab
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
3.11	Jumlah kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria **	300	5	14	4	18	2	Dinas Kesehatan
3.12	Persentase kabupaten/kota yang melakukan deteksi dini untuk infeksi Hepatitis B **		30%	17	50	100	100	Dinas Kesehatan
3.13	Jumlah orang yang memerlukan intervensi terhadap penyakit tropis yang terabaikan (Filariasis dan Kusta) **	Menurun	338.635	283.942	333.251	91	81	Dinas Kesehatan
3.14	Jumlah Provinsi/Kab/Kota dengan eliminasi Kusta **	34 Provinsi	14 Kab/Kota	12	11	13	11	Dinas Kesehatan
3.15	Jumlah kabupaten/kota dengan eliminasi filariasis (berhasil lolos dalam survei penilaian transmisi tahap I) **	35 Kab/Kota	1 Kab/Kota	-	-	1	-	Dinas Kesehatan
3.16	Persentase merokok pada penduduk umur ≤18 tahun **	5,40%	6%	-	1,3	2,37	3,10	Dinas Kesehatan
3.17	Prevalensi tekanan darah tinggi **	24,30%	19,82%	20,08%	5,02%	4,40%	4,7	Dinas Kesehatan

No.	Tujuan / Indikator	Target Nasional	Target Provinsi	Capaian TPB/SDGs				OPD
				2016	2017	2018	2019	Penanggung Jawab
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
3.18	Prevalensi obesitas pada penduduk umur ≥ 18 tahun **	15,40%	13,60%	10,11	3,17	4,22	4,35	Dinas Kesehatan
3.19	Angka kematian (insidens rate) akibat bunuh diri **	Menurun	3,7	NA	3,7	NA	NA	Dinas Kesehatan
3.20	Jumlah kabupaten/kota yang memiliki puskesmas yang menyelenggarakan upaya kesehatan jiwa **	280 Kab/Kota	24 Kab/Kota	24	24	18	18	Dinas Kesehatan
3.21	Prevalensi penyalahgunaan narkoba **	0,02%	1,95%	-	1,95%	1,90%	2,1	Dinas Kesehatan
3.22	Proporsi perempuan usia reproduksi (15-49 tahun) atau pasangannya yang memiliki kebutuhan keluarga berencana dan menggunakan alat kontrasepsi metode modern **	66%	1.495.547	-		97,15	97,49	Dinas Kesehatan
3.23	Angka prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49	65%	68%	72,39%	72,67%	73,28%	73	Dinas Kesehatan

No.	Tujuan / Indikator	Target Nasional	Target Provinsi	Capaian TPB/SDGs				OPD
				2016	2017	2018	2019	Penanggung Jawab
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
	tahun yang berstatus kawin **							
3.24	Angka penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) cara modern 8**	23,50%	11%	12,47	14	14,98	17,13	Dinas Kesehatan
3.25	Jumlah penduduk yang dicakup asuransi kesehatan atau sistem kesehatan masyarakat per 1000 penduduk **	Meningkat	700 Jiwa	600	750	8.138	8.200	Dinas Kesehatan
3.26	Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) **	95%	75%	70	75	85,76	87,02	Dinas Kesehatan
3.27	Persentase ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas **	Meningkat	83%	83	85	87,08	90	Dinas Kesehatan
3.28	Kepadatan dan distribusi tenaga kesehatan **	Meningkat	357	296	296	386	332,4	Dinas Kesehatan
4	**Tujuan 4 : Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat untuk Semua**							
4.1	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/ SMK/ MA/ sederajat *	91,63%	82%	83,66%	83,14%	81,74%	86,90%	Dinas Pendidikan

No.	Tujuan / Indikator	Target Nasional	Target Provinsi	Capaian TPB/SDGs				OPD
				2016	2017	2018	2019	Penanggung Jawab
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
4.2	Rata-rata lama sekolah penduduk umur ≥15 tahun *	8,8 Tahun	8,11 Tahun	8,13 Tahun	8,42 Tahun	8,45 Tahun	8,73 Tahun	Dinas Pendidikan
4.3	Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan/laki-laki di SD/MI/sederajat *	Meningkat	101	100,83	100,09	100,25	101,32	Dinas Pendidikan
4.4	Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan/laki-laki di SMP/MTs/sederajat *	Meningkat	105,4	105,19	104,15	102,64	100,79	Dinas Pendidikan
4.5	Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan/laki-laki di SMA/SMK/MA/Sederajat *	Meningkat	100	102,04	110,66	108,97	106,11	Dinas Pendidikan
4.6	Persentase angka melek aksara penduduk umur ≥15 tahun *	96,10%	93,78%	91,52%	91,65%	91,81%	92,45%	Dinas Pendidikan
4.7	Persentase angka melek aksara penduduk umur 15-24 tahun **	Meningkat	93,78%	99,34%	99,34%	99,48%	99,68%	Dinas Pendidikan
4.8	Persentase angka melek aksara penduduk umur 15-59 tahun **	Meningkat	93,78%	95,51%	95,25%	95,37%	95,78%	Dinas Pendidikan
5	**Tujuan 5 : Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan**							

No.	Tujuan / Indikator	Target Nasional	Target Provinsi	Capaian TPB/SDGs				OPD
				2016	2017	2018	2019	Penanggung Jawab
1	***2***	***3***	***4***	***5***	***6***	***7***	***8***	***9***
5.1	Jumlah kebijakan yang responsif gender mendukung pemberdayaan perempuan **	16	10	10	5	6	7	Dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
5.2	Persentase korban kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif **	70%	70%	90	100% (56 kasus)	100% (74 kasus)	100% (132 kasus)	Dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
5.3	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di parlemen tingkat pusat, parlemen daerah dan pemerintah daerah **	16,60%	60 orang	60	17	17	19	Dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
6	**Tujuan 6 : Menjamin Ketersediaan serta Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi yang Berkelanjutan**							

No.	Tujuan / Indikator	Target Nasional	Target Provinsi	Capaian TPB/SDGs				OPD
				2016	2017	2018	2019	Penanggung Jawab
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
6.1	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak *	100%	100%	76,05%	76,52%	79,52%	89,77%	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
6.2	Kualitas Air Danau**	Meningkat	Meningkat	40,25	55,05	Hanya mendata 1 titik	Tidak melakukan perhitungan	Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup
6.3	Kualitas air sungai sebagai sumber air baku**	Meningkat	Meningkat	10	12	34,64	33,3	Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup
6.4	Luas lahan kritis dalam Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) yang direhabilitasi**	5,5 Juta Ha (Skala Nasional)	6.000 Ha	27.069	11.461	385 Ha	20508 Ha	Dinas Kehutanan
7	**Tujuan 7 : Menjamin Akses Energi yang Terjangkau, Andal, Berkelanjutan dan Modern untuk Semua**							
7.1	Rasio elektrifikasi **	96,60%	96,60%	94,53	97,33%	97,8	98	Dinas Energi dan Sumber

No.	Tujuan / Indikator	Target Nasional	Target Provinsi	Capaian TPB/SDGs				OPD
				2016	2017	2018	2019	Penanggung Jawab
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
								Daya Mineral
8	**Tujuan 8 : Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, serta Pekerjaan yang Layak untuk Semua**							
8.1	Laju pertumbuhan PDRB per kapita atas dasar harga konstan *	Meningkat	9,29%	6,34%	6,17%	6,06%	5,96%	Badan Perencanaan Pembangunan penelitian dan Pengembangan Daerah
8.2	PDRB per kapita atas dasar harga berlaku *	50 Juta	48,21 Juta	43,82juta	47,82 juta	52,64 juta	57,03 juta	Badan Perencanaan Pembangunan penelitian dan Pengembangan Daerah
8.3	Persentase tenaga kerja formal*	51%	44,97%	35,11%	37,63%	36,68%	39,45%	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

No.	Tujuan / Indikator	Target Nasional	Target Provinsi	Capaian TPB/SDGs				OPD
				2016	2017	2018	2019	Penanggung Jawab
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
8.4	Persentase tenaga kerja informal sektor pertanian *	Meningkat	39,42%	92,49%	93,43%	93,07%	92,48%	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
8.5	Persentase akses UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) ke layanan keuangan **	25%	20%	20,3	20	20	20	Dinas Koperasi & UMK
8.6	Tingkat pengangguran terbuka *	Menurun	4,56%	4,80%	5,61%	4,94%	4,62%	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
8.7	Tingkat setengah pengangguran*	Menurun	Menurun	7,82%	9,52%	7,37%	7,34%	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
8.8	Persentase usia muda (15-24 tahun) yang sedang tidak sekolah, bekerja atau mengikuti pelatihan (NEET) **	Meningkat	Meningkat	22,21%	21,83%	23,07%	21,91%	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
8.9	Proporsi kontribusi pariwisata terhadap PDRB **	8%	8%	1,32	1,37	1,41	2,85	Dinas Kebudayaan dan

No.	Tujuan / Indikator	Target Nasional	Target Provinsi	Capaian TPB/SDGs				OPD
				2016	2017	2018	2019	Penanggung Jawab
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
								Kepariwisataan
8.10	Jumlah wisatawan mancanegara **	20 Juta (skala nasional)	151763 Wisman	236.491	255.747	263,293	115,000*	Dinas Kebudayaan dan Kepariwisataan
8.11	Jumlah kunjungan wisatawan nusantara **	Meningkat	6.000.000	8.426.528	8.367.748	9.616.232	6,256,376*	Dinas Kebudayaan dan Kepariwisataan
8.12	Jumlah pekerja pada ndustry pariwisata dalam proporsi terhadap total pekerja **	Meningkat	Meningkat	12,28%	-	3,55	3,73	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
8.13	Proporsi kredit UMKM terhadap total kredit **	Meningkat	20%	20,3	20	20	20	Dinas Koperasi & UMKM
9	**Tujuan 9 : Membangun Infrastruktur yang Tangguh, Meningkatkan Industri Inklusif dan Berkelanjutan, serta Mendorong Inovasi**							
9.1	Panjang jalur kereta api **	3.258 Km	145 Km	16,1	16,1	42,85	47,85	Dinas Perhubungan

No.	Tujuan / Indikator	Target Nasional	Target Provinsi	Capaian TPB/SDGs				OPD
				2016	2017	2018	2019	Penanggung Jawab
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
9.2.	Proporsi Individu yang menguasai/memiliki Telepon Gengam *		68%	58,50%	60,30%	63,85%	65,07%	Dinas Komunikasa, Informatika, Statistik, dan Persandian
9.2	Jumlah dermaga penyeberangan **	275 Unit	80 Unit	80	80	87 unit	87 unit	Dinas Perhubungan
9.3	Jumlah pelabuhan strategis **	24 Pelabuhan (skala nasional)	19 Pelabuhan (skala nasional)	19 Pelabuhan	19 Pelabuhan	20 pelabuhan	20 pelabuhan	Dinas Perhubungan
9.4	Proporsi nilai tambah sektor industri manufaktur terhadap PDB dan per kapita **	Meningkat	14,25%	13,92%	13,95%	12,87	13,56	Dinas Perindustrian
9.5	Laju pertumbuhan PDB industri manufaktur **	Lebih tinggi dari pertumbuhan PDB	9,25%	13,92%	13,95%	5,56%	5,36%	Dinas Perindustrian

No.	Tujuan / Indikator	Target Nasional	Target Provinsi	Capaian TPB/SDGs				OPD
				2016	2017	2018	2019	Penanggung Jawab
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
9.6	Proporsi tenaga kerja pada sektor industri manufaktur **	Meningkat	287.269	296.882	262.936 (7,31%)	9,05%	8,93%	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
9.7	Proporsi nilai tambah industri kecil terhadap total nilai tambah industry **	Meningkat	53.000	52.309	54.513	14.431	20.092	Dinas Perindustrian
9.8	Persentase Perubahan Emisi CO2/Emisi Gas Rumah Kaca **	26%	22,50%	7,5	-	11,41%	6,4%	Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup
10	**Tujuan 10 : Mengurangi Kesenjangan Intra dan Antarnegara**							
10.1	Koefisien Gini*	0,36	0,36	0,426	0,407	0,397	0,39	Badan Perencanaan Pembangunan penelitian dan Pengembangan Daerah
10.2	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan Sulawesi Selatan,	7-8%	7%	9,4	9,38	9,06	8,69	Dinas Sosial

No.	Tujuan / Indikator	Target Nasional	Target Provinsi	Capaian TPB/SDGs				OPD
				2016	2017	2018	2019	Penanggung Jawab
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
	menurut jenis kelamin dan kelompok umur *							
10.3	Rata-rata pertumbuhan ekonomi di daerah tertinggal **	Meningkat	Meningkat	8,32	8,25	6,29	5,97	BPS
10.4	Persentase penduduk miskin di daerah tertinggal **	14%	14%	15,49%	15,40%	15,48%	14,88%	BPS
11	**Tujuan 11 : Menjadikan Kota dan Permukiman Inklusif, Aman, Tangguh dan Berkelanjutan**							
11.1	Persentase pengguna moda transportasi umum di perkotaan **	32%	22,80%	21,20%	22,80%	NA	NA	Dinas Perhubungan
11.2	Jumlah kota sedang di luar Jawa yang diarahkan sebagai pengendali (buffer) arus urbanisasi dan sebagai pusat pertumbuhan utama **	20 kota sedang (skala nasional)	7 kota sedang (skala nasional)	7 ota sedang	7 kota sedang	7 kota sedang	7 kota sedang	Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang
11.3	Jumlah Metropolitan baru di luar Jawa sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN) **	5 Metropolitan (skala nasional)	1 Metropolitan	1	1	1	1	Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang

No.	Tujuan / Indikator	Target Nasional	Target Provinsi	Capaian TPB/SDGs				OPD
				2016	2017	2018	2019	Penanggung Jawab
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
11.4	Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang **	Menurun	5.598 Orang		Meninggal=0,22 Terdampak =64416,7	Meninggal=0 ,005 Terdampak= 5.403	Meninggal= 0,03 Terdampak =153,81	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
11.5	Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) **	30%	24%	164.65	162.59	160.05	Belum rilis dari pusat	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
11.6	Jumlah sistem peringatan dini cuaca dan iklim serta kebencanaan **	Ada	75	-	-	NA	NA	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
11.7	Persentase sampah perkotaan yang tertangani **	80%	80%	16,54	17,53	44,20%	51,93%	Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup

No.	Tujuan / Indikator	Target Nasional	Target Provinsi	Capaian TPB/SDGs				OPD
				2016	2017	2018	2019	Penanggung Jawab
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
11.8	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat daerah**	Ada	1 Dokumen	1	1	1	1	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
12	**Tujuan 12 : Menjamin Pola Produksi dan Konsumsi yang Berkelanjutan**							
12.1	Jumlah limbah B3 yang terkelola dan proporsi limbah B3 yang diolah sesuai peraturan perundangan (sektor industri) **	150 Juta Ton (skala nasional)		677,87 Ton/ Periode	743,29 Ton/ Periode	4,365,759,985 ton/periode	5,373,629,74ton/periode	Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup
12.2	Jumlah timbulan sampah yang didaur ulang **	20 Ton/Hari (skala nasional)	20 Ton/ Hari	15,15 Ton/	15,29 Ton/	15,42/ton	17,5/ton	Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup
13	**Tujuan 13 : Mengambil Tindakan Cepat untuk Mengatasi Perubahan Iklim dan Dampaknya**							
13.1	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah **	Ada	1 Dokumen	1	1	1	1	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

No.	Tujuan / Indikator	Target Nasional	Target Provinsi	Capaian TPB/SDGs				OPD
				2016	2017	2018	2019	Penanggung Jawab
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
13.2	Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang **	Menurun	5.598 Orang	17.472 Orang	Meninggal=0,22 Terdampak =64416,7	Meninggal=0 ,005 Terdampak= 5.403	Meninggal= 0,03 Terdampak =153,81	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
13.3	Dokumen pelaporan penurunan emisi gas rumah kaca (GRK) **	Ada	1 Dokumen	1	1	1	1	Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup
14	**Tujuan 14 : Melestarikan dan Memanfaatkan secara Berkelanjutan Sumber Daya Kelautan dan Samudera untuk Pembangunan Berkelanjutan**							
14.1	Jumlah nelayan yang terlindungi **	Meningkat	37.648 Nelayan	35.000 Nelayan	37.450 Nelayan	48.857 Nelayan	60.824 Nelayan	Dinas Kelautan dan Perikanan
15	**Tujuan 15 : Melindungi, Merestorasi dan Meningkatkan Pemanfaatan Berkelanjutan Ekosistem Daratan, Mengelola Hutan secara Lestari, Menghentikan Penggurunan, Memulihkan Degradasi Lahan, serta Menghentikan Kehilangan Keanekaragaman Hayati**							
15.1	Proporsi tutupan hutan terhadap luas lahan keseluruhan **	Meningkat	55,65	59,56	59,56	59,56%	57,03%	Dinas Kehutanan

No.	Tujuan / Indikator	Target Nasional	Target Provinsi	Capaian TPB/SDGs				OPD
				2016	2017	2018	2019	Penanggung Jawab
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
15.2	Jumlah Kesatuan Pengelolaan Hutan **	Meningkat	22 KPH	9 KPH	16 KPH	16 KPH	16 KPH	Dinas Kehutanan
15.3	Dokumen rencana pemanfaatan keanekaragaman hayati **	Meningkat	1 Dok	1 Dok	1 Dok	-	1 dok	Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup
16	**Tujuan 16 : Menguatkan Masyarakat yang Inklusif dan Damai untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediaan Akses Keadilan untuk Semua, dan Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di Semua Tingkatan**							
16.1	Proporsi pengeluaran utama pemerintah terhadap anggaran yang disetujui **	Meningkat	Rp. 190.759.499.612	Rp. 3583608000	Rp. 3670839640,8			Badan Pengelola Keuangan Daerah
16.2	Persentase peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan **	75%	BB	CC	B	B	B	Biro Organisasi dan Tata Laksana Setda
16.3	Persentase penggunaan E-procurement terhadap belanja pengadaan **	80%	100% (602 Paket/ Kegiatan)	100% (525)	100% (507)	100%	100%	Biro Pembangunan Setda

No.	Tujuan / Indikator	Target Nasional	Target Provinsi	Capaian TPB/SDGs				OPD
				2016	2017	2018	2019	Penanggung Jawab
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
16.4	Persentase keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) **	Meningkat	60 Orang	60 Orang	17,64	17,64	28,91	Dinas pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak
17	**Tujuan 17 : Menguatkan Sarana Pelaksanaan dan Merevitalisasi Kemitraan Global untuk Pembangunan Berkelanjutan**							
17.1	Total pendapatan pemerintah sebagai proporsi terhadap PDB menurut sumbernya **	Meningkat	Rp. 9.292.958.272.501	Rp. 7162588691182,52	Rp. 9055278907514,25	Rp. 9.252.221.942.175,45	Rp. 9574846121830,84	Badan Pendapatan Daerah
17.2	Tingkat penetrasi akses tetap pitalebar (fixed broadband) di Perkotaan dan di Perdesaan **	Meningkat menjadi: Perkotaan (20 Mbps) 71% rumah tangga dan 30% populasi; Perdesaan (10 Mbps)	71%	63%	NA	NA	NA	Dinas Komunikasa, Informatika, Statistik, dan Persandian

No.	Tujuan / Indikator	Target Nasional	Target Provinsi	Capaian TPB/SDGs				OPD
				2016	2017	2018	2019	Penanggung Jawab
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
		49% rumah tangga dan 6% populasi						
17.3	Persentase konsumen Badan Pusat Statistik (BPS) yang merasa puas dengan kualitas data statistic *	Meningkat	PM	-	92,71	96,2	100	BPS
17.4	Persentase konsumen yang menjadikan data dan informasi statistik BPS sebagai rujukan utama *	Meningkat	PM	90	85,13%	92,26	93	BPS
17.5	Jumlah metadata kegiatan statistik dasar, sektoral, dan khusus yang terdapat dalam Sistem Informasi Rujukan Statistik (SIRuSa) **	Meningkat	1	9	1	NA	NA	BPS
17.6	Tersedianya data registrasi terkait kelahiran dan kematian (Vital Statistics Register) **	Ada	ada	-	Ada	ada	ada	Dinas Kependudukan, Pencatatan

No.	Tujuan / Indikator	Target Nasional	Target Provinsi	Capaian TPB/SDGs				OPD
				2016	2017	2018	2019	Penanggung Jawab
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
								Sipil, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
17.7	Jumlah pengunjung eksternal yang mengakses data dan informasi statistik melalui website **	Meningkat	PM	45.247 User	27.712 User	NA	NA	BPS
17.8	Persentase konsumen yang puas terhadap akses data Badan Pusat Statistik (BPS) *	Meningkat	PM	95,94	90,46	88,69	97	BPS

Sumber : Bappelitbangda Prov. Sulsel, Tahun 2020

Keterangan: *) Angka Sementara

Tabel II.393.
Hasil Analisis Terhadap Capaian Target Indikator TPB/SDGs
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Tahun 2020	Tahun 2021		Interpretasi Tercapai / Tidak Tercapai
				Capaian	Target	Capaian	
	TUJUAN 1 TANPA KEMISKINAN						
	TARGET 1.2 Pada tahun 2030, mengurangi setidaknya setengah proporsi laki-laki, perempuan dan anak-anak dari semua usia, yang hidup dalam kemiskinan di semua dimensi, sesuai dengan definisi nasional.						
1.2.1*	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur	RPJMD	%	8,72	9,80	8,78* (Maret)	Tercapai
	TARGET 1.3 Menerapkan secara nasional sistem dan upaya perlindungan sosial yang tepat bagi semua, termasuk kelompok yang paling miskin, dan pada tahun 2030 mencapai cakupan substansial bagi kelompok miskin dan rentan.						
1.3.1.(a)	Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan.	Dinas kesehatan	%	86,48	99	92,97	Tidak Tercapai
1.3.1(b)	Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan.	Tenaga kerja dan transmigrasi	%	77,99	71,44	47,12	Tidak Tercapai
1.3.1.(c)	Persentase penyandang	Dinas sosial	%	35,12	100	7,40	Tidak Tercapai

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Tahun 2020	Tahun 2021		Interpretasi Tercapai / Tidak Tercapai
				Capaian	Target	Capaian	
	disabilitas yang miskin dan rentan yang terpenuhi hak dasarnya dan inklusivitas.						
1.3.1.(d)	Jumlah rumah tangga yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat/Program Keluarga Harapan.	Dinas sosial	Jiwa	313.357	332.090	365.669	Tercapai
	TARGET 1.4 Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro.						
1.4.1.(a)	Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan	BPS	%	92,72	92	94,35	Tercapai
1.4.1.(b)	Persentase anak umur 12-23 bulan yang menerima imunisasi dasar lengkap (kelompok penduduk 40 terbawah)	Dinas kesehatan	%	N/A	94	98,3	Tercapai

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Tahun 2020	Tahun 2021		Interpretasi Tercapai / Tidak Tercapai
				Capaian	Target	Capaian	
1.4.1.(c)	Prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin.	Dinas kesehatan	%	73,69	73,3	73,41	Tidak Tercapai
1.4.1.(d)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan.	BPS	%	44,39	92,4	91,18	Tercapai
1.4.1.(e)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan.	BPS	%	88,96	82,1	86,75	Tercapai
1.4.1.(f)	Persentase rumah tangga kumuh perkotaan (kelompok penduduk 40 terbawah)	BPS	%	11,62	PM	0,97	Tercapai
1.4.1.(i)	Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/MA/sederajat.	Dinas pendidikan	%	60,32	63,95	67,4	Tercapai
1.4.1.(j)	Persentase penduduk umur	Dinas	%	91,07	85,5	84,5	Tercapai

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Tahun 2020	Tahun 2021		Interpretasi Tercapai / Tidak Tercapai
				Capaian	Target	Capaian	
	0-17 tahun dengan kepemilikan akta kelahiran.	Kependudukan dan Pencatatan Sipil					
1.4.1.(k)	Persentase rumah tangga miskin dan rentan yang sumber penerangan utamanya listrik baik dari PLN dan bukan PLN. (kelompok penduduk 40 terbawah)	BPS		N/A	PM	99,41	Kosong
	TARGET 1.5 Pada tahun 2030, membangun ketahanan masyarakat miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, dan mengurangi kerentanan mereka terhadap kejadian ekstrim terkait iklim dan guncangan ekonomi, sosial, lingkungan, dan bencana.						
1.5.1*	Jumlah korban meninggal, dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.					Meninggal: 27, Terdampak: 21.470	
	Jumlah korban meninggal terkena dampak bencana per 100.000 orang	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Jiwa	Meninggal : 78 Terdampak : 70.854	PM	27	Tercapai
	Jumlah korban hilang	Badan	Jiwa	-	PM	4	Tercapai

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Tahun 2020	Tahun 2021		Interpretasi Tercapai / Tidak Tercapai
				Capaian	Target	Capaian	
	terkena dampak bencana per 100.000 orang	Penanggulangan Bencana Daerah					
	Jumlah korban terluka terkena dampak bencana per 100.000 orang	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Jiwa	-	PM	76	Tercapai
	Jumlah korban mengungsi terkena dampak bencana per 100.000 orang	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Jiwa	-	PM	21.470	Tercapai
1.5.1.(a)	Jumlah lokasi penguatan pengurangan risiko bencana daerah	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Lokasi	24	18	24	Tercapai
1.5.1.(b)	Pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana sosial	Dinas sosial	%	1414	100	100	Tercapai
1.5.1.(c)	Pendampingan psikososial korban bencana sosial	Dinas sosial	Jiwa	1414	PM	100	Tercapai
1.5.1.(e)	Indeks risiko bencana pada pusat-pusat pertumbuhan yang berisiko tinggi.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Indeks	157,55	157,6	154,87	Tercapai
1.5.2.(a)	Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana.	Badan Penanggulangan	Rupiah	620 Milyar	PM	119 Milyar	Tercapai

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Tahun 2020	Tahun 2021		Interpretasi Tercapai / Tidak Tercapai
				Capaian	Target	Capaian	
		Bencana Daerah					
1.5.3*	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Dokumen	1	1	1	Tercapai
	MATRIKS BAGIAN I TARGET PENCAPAIAN INDIKATOR TUJUAN 2						
	TUJUAN 2 : TANPA KELAPARAN						
	TARGETN 2.1 Pada tahun 2030, menghilangkan kelaparan dan menjamin akses bagi semua orang, khususnya orang miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, termasuk bayi, terhadap makanan yang aman, bergizi, dan cukup sepanjang tahun.						
2.1.1*	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment).	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura	%	10,14	6,55	10,14*	Tidak Tercapai
2.1.1.(a)	Prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita	Dinas kesehatan	%	23	18,5	19	Tidak Tercapai
2.1.2*	Prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat,	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan	%	4,3	4	0,22	Tidak Tercapai

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Tahun 2020	Tahun 2021		Interpretasi Tercapai / Tidak Tercapai
				Capaian	Target	Capaian	
	berdasarkan pada Skala Pengalaman Kerawanan Pangan.	Hortikultura					
2.1.2.(a)	Proporsi penduduk dengan asupan kalori minimum di bawah 1400 kkal/kapita/hari.	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura	%	8,12*	8,12	10,7*	Tercapai
	TARGET 2.2 Pada tahun 2030, menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi, termasuk pada tahun 2025 mencapai target yang disepakati secara internasional untuk anak pendek dan kurus di bawah usia 5 tahun, dan memenuhi kebutuhan gizi remaja perempuan, ibu hamil dan menyusui, serta manula.						
2.2.1*	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita.	Dinas kesehatan	%	30,59	24,59	27,4	Tercapai
2.2.1.(a)	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah dua tahun/baduta.	Dinas kesehatan	%	NA	32	Tidak Ada Survey	Tidak Tercapai
2.2.2*	Prevalensi malnutrisi (berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5	Dinas kesehatan	%	NA	7,75	6,2	Tidak Tercapai

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Tahun 2020	Tahun 2021		Interpretasi Tercapai / Tidak Tercapai
				Capaian	Target	Capaian	
	tahun, berdasarkan tipe.						
2.2.2.(a)	Prevalensi anemia pada ibu hamil.	Dinas kesehatan	%	13,4	27	9,94	Tercapai
2.2.2.(b)	Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapatkan ASI eksklusif.	Dinas kesehatan	%	67,8	79	74,60	Tidak Tercapai
2.2.2.(c)	Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH) mencapai; dan tingkat konsumsi ikan.	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura	%	84,9**	86,4	80	Tidak Tercapai
	Konsumsi ikan	Dinas Kelautan dan Perikanan	%	65,5	59,32	65,5	Tercapai
	MATRIKS BAGIAN I TARGET PENCAPAIAN INDIKATOR TUJUAN 3						
	TUJUAN 3 : KEHIDUPAN SEHAT DAN SEJAHTERAH						
	TARGET 3.1 Pada tahun 2030, mengurangi rasio angka kematian ibu hingga kurang dari 70 per 100.000 kelahiran hidup.						
3.1.2*	Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya	BPS	%	97,65	97	95,04	Tidak Tercapai

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Tahun 2020	Tahun 2021		Interpretasi Tercapai / Tidak Tercapai
				Capaian	Target	Capaian	
	ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih						
3.1.1*	Angka Kematian Ibu (AKI).	Dinas kesehatan	kematian per 100.000 kelahiran hidup	86	92	129	Tidak Tercapai
3.1.2.(a)	Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan	BPS	%	92,72	92,5	94,35	Tercapai
	TARGET 3.2 Pada tahun 2030, mengakhiri kematian bayi baru lahir dan balita yang dapat dicegah, dengan seluruh negara berusaha menurunkan Angka Kematian Neonatal setidaknya hingga 12 per 1000 KH (Kelahiran Hidup) dan Angka Kematian Balita 25 per 1000.						
3.2.1*	Angka Kematian Balita (AKBa) per 1000 kelahiran hidup.	Dinas kesehatan	kematian per 1000 kelahiran hidup	5	5	6	Tercapai
3.2.2*	Angka Kematian Neonatal (AKN) per 1000 kelahiran hidup.	Dinas kesehatan	kematian per 1000 kelahiran hidup	5	3	4	Tercapai
3.2.2.(a)	Angka Kematian Bayi (AKB)	Dinas kesehatan	kematian per	5	5	5	Tidak Tercapai

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Tahun 2020	Tahun 2021		Interpretasi Tercapai / Tidak Tercapai
				Capaian	Target	Capaian	
	per 1000 kelahiran hidup.		1000 kelahiran hidup				
3.2.2.(b)	Persentase kabupaten/kota yang mencapai 80 imunisasi dasar lengkap pada bayi.	Dinas kesehatan	%	73,82	95,5	91,67	Tidak Tercapai
	TARGET 3.3 Pada tahun 2030, mengakhiri epidemi AIDS, tuberkulosis, malaria, dan penyakit tropis yang terabaikan, dan memerangi hepatitis, penyakit bersumber air, serta penyakit menular lainnya.						
3.3.3*	Kejadian Malaria per 1000 orang	Dinas kesehatan	Per 1.000 Penduduk	0,103	< 1	0,11	Tercapai
3.3.1.(a)	Prevalensi HIV pada populasi dewasa.	Dinas kesehatan	%	0,02	< 0,5	0,028	Tercapai
3.3.2.(a)	Insiden Tuberkulosis (ITB) per 100.000 penduduk.	Dinas kesehatan	Per 100.000 penduduk (Capaian dihitung hanya pada data penemuan di faskes/ DOTS)	160	212	161	Tidak Tercapai
3.3.3.(a)	Jumlah kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria	Dinas kesehatan	Kabupaten	21	4	21	Tercapai
3.3.4.(a)	Persentase kabupaten/kota yang melakukan deteksi	Dinas kesehatan	%	NA	100	100	Tercapai

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Tahun 2020	Tahun 2021		Interpretasi Tercapai / Tidak Tercapai
				Capaian	Target	Capaian	
	dini untuk infeksi Hepatitis B.						
3.3.5*	Jumlah orang yang memerlukan intervensi terhadap penyakit tropis yang terabaikan (Filariasis dan Kusta).	Dinas kesehatan	Filariasis : Orang	NA	81	51.114	Tidak Tercapai
			Kusta : Orang	696	1.026		
3.3.5.(a)	Jumlah Provinsi / Kab / Kota dengan eliminasi Kusta	Dinas kesehatan	Kab/ Kota	17	18	18	Tercapai
3.3.5.(b)	Jumlah kabupaten/kota dengan eliminasi filariasis (berhasil lolos dalam survei penilaian transmisi tahap I).	Dinas kesehatan	%	N/A	4	0	Tidak Tercapai
	TARGET 3.4 Pada tahun 2030, mengurangi hingga sepertiga angka kematian dini akibat penyakit tidak menular, melalui pencegahan dan pengobatan, serta meningkatkan kesehatan mental dan kesejahteraan.						
3.4.1.(a)	Persentase merokok pada penduduk umur ≤18 tahun.	Dinas kesehatan	%	3,41	7,06	4,1	Tercapai
3.4.1.(b)	Prevalensi tekanan darah tinggi.	Dinas kesehatan	%	3,50	18,58	9,06	Tercapai

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Tahun 2020	Tahun 2021		Interpretasi Tercapai / Tidak Tercapai
				Capaian	Target	Capaian	
3.4.1.(c)	Prevalensi obesitas pada penduduk umur ≥18 tahun	Dinas kesehatan		2,76	10,1	2,33	Tercapai
3.4.2.(a)	Jumlah kabupaten/kota yang memiliki puskesmas yang menyelenggarakan upaya kesehatan jiwa	Dinas kesehatan	Kab/ Kota	22	24	24	Tercapai
	TARGET 3.5 Memperkuat pencegahan dan pengobatan penyalahgunaan zat, termasuk penyalahgunaan narkotika dan penggunaan alkohol yang membayakan						
3.5.1.(e)	Prevalensi penyalahgunaan narkoba	BNN	%	NA	1,92		
	TARGET 3.7 Pada tahun 2030, menjamin akses universal terhadap layanan kesehatan seksual dan reproduksi, termasuk keluarga berencana, informasi dan pendidikan, dan integrasi kesehatan reproduksi ke dalam strategi dan program nasional.						
3.7.1.(a)	Angka prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin.	Dinas kesehatan	%	73,69	73,57	73,41	Tidak Tercapai
3.7.1.(b)	Angka penggunaan metode	Dinas kesehatan	%	19,02	18,5	21,11	Tidak Tercapai

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Tahun 2020	Tahun 2021		Interpretasi Tercapai / Tidak Tercapai
				Capaian	Target	Capaian	
	kontrasepsi jangka panjang (MKJP) cara modern.						
3.7.2*	Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR)	DP3A	kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun	29	18	27,4	Tidak Tercapai
3.7.2.(a)	Total Fertility Rate (TFR)	DP3A		2,44	2,2	2,29	Tidak Tercapai
	TARGET 3.8 Mencapai cakupan kesehatan universal, termasuk perlindungan risiko keuangan, akses terhadap pelayanan kesehatan dasar yang baik, dan akses terhadap obat- obatan dan vaksin dasar yang aman, efektif, berkualitas, dan terjangkau bagi semua orang.						
3.8.1(a)	Unmet need pelayanan kesehatan	BPS	%	5,66	PM	4,22	Tercapai
3.8.2*	Jumlah penduduk yang dicakup asuransi kesehatan atau sistem kesehatan masyarakat per 1000 penduduk	Dinas kesehatan	Jiwa	795	900	8.484	Tercapai
3.8.2.(a)	Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).	Dinas kesehatan	%	86,48	97	92,97	Tercapai
	TARGET 3.a. Memperkuat pelaksanaan the Framework Convention on Tobacco Control WHO di seluruh negara sebagai						

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Tahun 2020	Tahun 2021		Interpretasi Tercapai / Tidak Tercapai
				Capaian	Target	Capaian	
	langkah yang tepat						
3.a.1*	Persentase merokok pada penduduk umur ≥15 tahun	BPS	%	24,89	PM	21,11	Tercapai
	TARGET 3.b. Mendukung penelitian dan pengembangan vaksin dan obat penyakit menular dan tidak menular yang terutama berpengaruh terhadap negara berkembang, menyediakan akses terhadap obat dan vaksin dasar yang terjangkau, sesuai the Doha Declaration tentang the TRIPS Agreement and Public Health, yang menegaskan hak negara berkembang untuk menggunakan secara penuh ketentuan dalam Kesepakatan atas Aspek-Aspek Perdagangan dari Hak Kekayaan Intelektual terkait keleluasaan untuk melindungi kesehatan masyarakat, dan khususnya, menyediakan akses obat bagi semua						
3.b.1.(a)	Persentase ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas	Dinas kesehatan	%	90	90	90	Tercapai
	TARGET 3.c. Meningkatkan secara signifikan pembiayaan kesehatan dan rekrutmen, pengembangan, pelatihan, dan retensi tenaga kesehatan di negara berkembang, khususnya negara kurang berkembang, dan negara berkembang pulau kecil.						
3.c.1*	Rasio Tenaga Kesehatan	Dinas kesehatan	Tenaga Kesehatan/100.000 penduduk	23,4	23	24	Tercapai
	MATRIKS BAGIAN I TARGET PENCAPAIAN INDIKATOR TUJUAN 4						
	Tujuan 4. Pendidikan Berkualitas						
	Target 4.1 Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan pendidikan dasar dan						

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Tahun 2020	Tahun 2021		Interpretasi Tercapai / Tidak Tercapai
				Capaian	Target	Capaian	
	menengah tanpa dipungut biaya, setara, dan berkualitas, yang mengarah pada capaian pembelajaran yang relevan dan efektif.						
4.1.1.(c)	Persentase SMA/MA berakreditasi minimal B	Dinas Pendidikan	%	88,49	61,67	88,09	Tercapai
4.1.1.(f)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/sederajat	BPS	%	86,44	82,99	90,05	Tercapai
4.1.1.(g)	Rata-rata lama sekolah penduduk umur ≥15 tahun.	BPS	Tahun	8,86	8,4	8,46	Tercapai
	TARGET 4.3 Pada tahun 2030, menjamin akses yang sama bagi semua perempuan dan laki-laki, terhadap pendidikan teknik, kejuruan dan pendidikan tinggi, termasuk universitas, yang terjangkau dan berkualitas.						
4.3.1.(a)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/sederajat	BPS	%	84,44	82,8	87,07	Tercapai
	TARGET 4.4 Pada tahun 2030, meningkatkan secara signifikan jumlah pemuda dan orang dewasa yang memiliki keterampilan yang relevan, termasuk keterampilan teknik dan kejuruan, untuk pekerjaan, pekerjaan yang layak dan kewirausahaan.						
4.4.1*	Proporsi remaja dan dewasa dengan keterampilan teknologi	BPS	remaja (15-24)	88,78	PM	94,10	Tercapai

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Tahun 2020	Tahun 2021		Interpretasi Tercapai / Tidak Tercapai
				Capaian	Target	Capaian	
	informasi dan komunikasi (TIK).						
			dewasa (15-59)	60,50	PM	67,29	Tercapai
	TARGET 4.5 Pada tahun 2030, menghilangkan disparitas gender dalam pendidikan, dan menjamin akses yang sama untuk semua tingkat pendidikan dan pelatihan kejuruan, bagi masyarakat rentan termasuk penyandang cacat, masyarakat penduduk asli, dan anak-anak dalam kondisi rentan.						
4.5.1*	Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan/laki-laki di (1) SD/MI/sederajat; (2) SMP/MTs/sederajat; (3) SMA/SMK/MA/sederajat; dan Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) perempuan/laki-laki di (4) Perguruan Tinggi.	BPS	Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan/laki-laki di SMA/SMK/MA/sederajat ()	102,44	84,5	97,03	Tercapai
	TARGET 4.6 Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua remaja dan proporsi kelompok dewasa tertentu, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki kemampuan literasi dan numerasi.						
4.6.1.(a)	Persentase angka melek	BPS	%	92,56	95,6	92,49	Tercapai

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Tahun 2020	Tahun 2021		Interpretasi Tercapai / Tidak Tercapai
				Capaian	Target	Capaian	
	aksara penduduk umur ≥15 tahun						
4.6.1.(b)	Persentase angka melek aksara penduduk umur 15-24 tahun dan umur 15-59 tahun	BPS	(umur 15-24 tahun)	99,73	PM	99,78	Tercapai
			(umur 15-59 tahun)	95,89	PM	96,04	Tercapai
	TARGET 4.5 Pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan pasokan guru yang berkualitas, termasuk melalui kerjasama internasional dalam pelatihan guru di negara berkembang, terutama negara kurang berkembang, dan negara berkembang kepulauan kecil.						
4.c.1*	Persentase guru TK, SD, SMP, SMA, SMK, dan PLB yang bersertifikat pendidik	Dinas Pendidikan	%		SD = 53,49	54,15	Tercapai
			%		SMP = 81,58		
			%	SMA = 51,02	SMA = 80,48		
			%	SMK = 44,25	SMK = 78,85		
			%	SLB = 55,53	SLB = 55,53		
	MATRIKS BAGIAN I TARGET PENCAPAIAN INDIKATOR TUJUAN 5						
	Tujuan 5 : KESETARAAN GENDER						
	TARGET 5.1 Mengakhiri segala bentuk diskriminasi terhadap kaum perempuan dimanapun.						
5.1.1*	Jumlah kebijakan yang responsif gender	Dinas Pemberdayaan	Kebijakan	4	7	8	Tercapai

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Tahun 2020	Tahun 2021		Interpretasi Tercapai / Tidak Tercapai
				Capaian	Target	Capaian	
	mendukung pemberdayaan perempuan	Perempuan dan Perlindungan Anak					
	TARGET 5.2 Menghapus segala bentuk kekerasan terhadap kaum perempuan di ruang publik dan pribadi, termasuk perdagangan orang dan eksploitasi seksual, serta berbagai jenis eksploitasi lainnya						
5.2.1*	Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan (fisik, seksual, atau emosional) oleh pasangan atau mantan pasangan dalam 12 bulan terakhir	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	%	0,042	0,7	0,033	Tercapai
5.2.1.(a)	Prevalensi kekerasan terhadap anak perempuan	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	%	0,086	0,0009	0,092	Tidak Tercapai
5.2.2.(a)	Persentase korban kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	%	100	88	100	Tercapai

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Tahun 2020	Tahun 2021		Interpretasi Tercapai / Tidak Tercapai
				Capaian	Target	Capaian	
5.2.2*	Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan seksual oleh orang lain selain pasangan dalam 12 bulan terakhir	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	%	0,042	0,7	0,033	Tercapai
	TARGET 5.3 Menghapuskan semua praktik berbahaya, seperti perkawinan usia anak, perkawinan dini dan paksa, serta sunat perempuan.						
5.3.1*	Proporsi perempuan umur 20-24 tahun yang berstatus kawin atau berstatus hidup bersama sebelum umur 15 tahun dan sebelum umur 18 tahun	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	18 tahun	11,25	12,1	9,25	Tidak Tercapai
			15 tahun	2,37	1,2	N/A	
5.3.1.(a)	Median usia kawin pertama perempuan pernah kawin umur 25-49 tahun	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	%	20	23	21,5	Tidak Tercapai
5.3.1.(b)	Angka kelahiran pada	Dinas	kelahiran pada	29,07	20	27,4	Tercapai

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Tahun 2020	Tahun 2021		Interpretasi Tercapai / Tidak Tercapai
				Capaian	Target	Capaian	
	perempuan umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR).	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	perempuan umur 15-19 tahun				
5.3.1.(c)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/ sederajat	BPS	%	86,44	82,8	87,07	Tercapai
	TARGET 5.5 Menjamin partisipasi penuh dan efektif, dan kesempatan yang sama bagi perempuan untuk memimpin di semua tingkat pengambilan keputusan dalam kehidupan politik, ekonomi, dan masyarakat.						
5.5.1*	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di parlemen tingkat pusat, parlemen daerah dan pemerintah daerah	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	%	25,88	16,7	25,88	Tercapai
5.5.2*	Proporsi perempuan yang berada di posisi managerial	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	%	26,42	40,4	32,14	
	TARGET 5.6 Menjamin akses universal terhadap kesehatan seksual dan reproduksi, dan hak reproduksi seperti yang telah disepakati sesuai dengan Programme of Action of the International Conference on Population andDevelopment and the Beijing Platform serta dokumen-dokumen hasil reviu dari konferensi-konferensi tersebut.						

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Tahun 2020	Tahun 2021		Interpretasi Tercapai / Tidak Tercapai
				Capaian	Target	Capaian	
5.6.1.(a)	Unmet need KB (Kebutuhan Keluarga Berencana/KB yang tidak terpenuhi).	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	%	13,12	13,8	20	Tidak Tercapai
5.b.1*	Proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam.	Dinas komunikasi & informatika	%	59,18	68	69,13	Tercapai
	MATRIKS BAGIAN I TARGET PENCAPAIAN INDIKATOR TUJUAN 6						
	Tujuan 6 : AIR BERSIH DAN SANITASILAYAK						
	TARGET 6.1 Pada tahun 2030, mencapai akses universal dan merata terhadap air minum yang aman dan terjangkau bagi semua.						
6.1.1.(a)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak	Dinas perumahan, kawasan permukiman dan pertahanan	%	44,39	78,7	91,18	Tercapai
6.1.1.(b)	Kapasitas prasarana air baku untuk melayani rumah tangga, perkotaan dan industri, serta penyediaan	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	m3/detik	9,00	10	0,39	Tidak Tercapai

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Tahun 2020	Tahun 2021		Interpretasi Tercapai / Tidak Tercapai
				Capaian	Target	Capaian	
	air baku untuk pulau-pulau.						
6.1.1.(C)	Proporsi populasi yang memiliki akses layanan sumber air minum aman dan berkelanjutan	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	%	18,80	21,03	15,13	Tidak Tercapai
	TARGET 6.2 Pada tahun 2030, mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua, dan menghentikan praktik buang air besar di tempat terbuka, memberikan perhatian khusus pada kebutuhan kaum perempuan, serta kelompok masyarakat rentan.						
6.2.1.(a)	Proporsi populasi yang memiliki fasilitas cuci tangan dengan sabun dan air	BPS	%	88,71	PM	89,08	Tercapai
6.2.1.(b)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak.	Dinas perumahan,kawasan permukiman dan pertahanan	%	88,96	87,8	91,57	Tercapai
6.2.1.(c)	Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM).	Dinas kesehatan	Desa / Kelurahan	3.047	3.000	3.047	Tercapai

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Tahun 2020	Tahun 2021		Interpretasi Tercapai / Tidak Tercapai
				Capaian	Target	Capaian	
6.2.1.(d)	Jumlah desa/kelurahan yang Open Defecation Free (ODF)/ Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS).	Dinas kesehatan	Desa / Kelurahan	2.676	2.000	2.863	Tercapai
6.2.1.(e)	Jumlah kabupaten/kota yang terbangun infrastruktur air limbah dengan sistem terpusat skala kota, kawasan dan komunal.	Dinas perumahan, kawasan permukiman dan pertahanan	Kab/ Kota	24	24	24	Tercapai
	TARGERT 6.3 Pada tahun 2030, meningkatkan kualitas air dengan mengurangi polusi, menghilangkan pembuangan, dan meminimalkan pelepasan material dan bahan kimia berbahaya, mengurangi setengah proporsi air limbah yang tidak diolah, dan secara signifikan meningkatkan daur ulang, serta penggunaan kembali barang daur ulang yang aman secara global.						
6.3.1.(a)	Jumlah kabupaten/kota yang ditingkatkan kualitas pengelolaan lumpur tinja perkotaan dan dilakukan pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT).	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	Kab/ Kota	15	15	15	Tercapai

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Tahun 2020	Tahun 2021		Interpretasi Tercapai / Tidak Tercapai
				Capaian	Target	Capaian	
6.3.2.(a)	Kualitas air danau	Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup	%	0	2,82	N/A	Tidak Tercapai
6.3.2.(b)	Kualitas air sungai sebagai sumber air baku	Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup		0	72,25	N/A	Tidak Tercapai
	TARGET 6.5 Pada tahun 2030, menerapkan pengelolaan sumber daya air terpadu di semua tingkatan, termasuk melalui kerjasama lintas batas yang tepat.						
6.5.1.(a)	Jumlah Rencana Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Terpadu (RPDAST) yang diinternalisasi ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).	Dinas kehutanan	RPDAST	0	4	2	Tidak Tercapai
6.5.1.(c)	Jumlah jaringan informasi sumber daya air yang dibentuk.	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	jaringan informasi	4	21	24	Tercapai
6.5.1.(e)	Luas pengembangan hutan serta peningkatan hasil hutan bukan kayu (HHBK) untuk pemulihan kawasan DAS.	Dinas kehutanan	Ha	90.425,79	90.425,79	175.507,49	Tercapai

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Tahun 2020	Tahun 2021		Interpretasi Tercapai / Tidak Tercapai
				Capaian	Target	Capaian	
6.5.1.(f)	Jumlah wilayah sungai yang memiliki partisipasi masyarakat dalam pengelolaan daerah tangkapan sungai dan danau.	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	wilayah sungai	4	4	15	Tercapai
6.5.1.(g)	Kegiatan penataan kelembagaan sumber daya air.	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	lembaga	5	5	5	Tercapai
	TARGET 6.6 Pada tahun 2020, melindungi dan merestorasi ekosistem terkait sumber daya air, termasuk pegunungan, hutan, lahan basah, sungai, air tanah, dan danau.						
6.6.1.(d)	Luas lahan kritis dalam Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) yang direhabilitasi.	Dinas kehutanan	Ha	12.510	25.500	13.023	Tidak Tercapai
6.6.1.(e)	Jumlah Daerah Aliran Sungai (DAS) prioritas yang dilindungi mata airnya dan dipulihkan kesehatannya.	Dinas kehutanan	DAS	4	2	2	Tercapai
	MATRIKS BAGIAN I TARGET PENCAPAIAN INDIKATOR TUJUAN 7						

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Tahun 2020	Tahun 2021		Interpretasi Tercapai / Tidak Tercapai
				Capaian	Target	Capaian	
	TUJUAN 7 : ENERGI BERSIH DAN TERJANGKAU						
	TARGET 7.1 Pada tahun 2030, menjamin akses universal layanan energi yang terjangkau, andal dan modern.						
7.1.1*	Rasio elektrifikasi	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral		98,43	98	98,72	Tercapai
7.1.1.(a)	Konsumsi listrik per kapita	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	KWh	743,58	969,88	0	
7.1.2.(b)	Rasio penggunaan gas rumah tangga.	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral		89,88	92	91,67	Tercapai
	TARGET 7.2 Pada tahun 2030, meningkat secara substansial pangsa energi terbarukan dalam bauran energi global.						
7.2.1*	Bauran energi terbarukan	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	%	20,74	21,28	22	Tidak Tercapai
	TARGET 7.3 Pada tahun 2030, melakukan perbaikan efisiensi energi di tingkat global sebanyak dua kali lipat.						
7.3.1*	Intensitas energi primer	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	SBM (setara barrel minyak)	NA	14,3	0	
	MATRIKS BAGIAN I TARGET PENCAPAIAN INDIKATOR TUJUAN 8						

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Tahun 2020	Tahun 2021		Interpretasi Tercapai / Tidak Tercapai
				Capaian	Target	Capaian	
	TUJUAN 8 : PEKERJAAN LAYAK DAN PERTUMBUHAN EKONOMI						
	TARGET 8.1 Mempertahankan pertumbuhan ekonomi per kapita sesuai dengan kondisi nasional dan, khususnya, setidaknya 7 persen pertumbuhan produk domestik bruto per tahun di negara kurang berkembang.						
8.1.1*	Laju pertumbuhan PDRB per kapita	RPJMD		Minus 1,55	PM	3,66	Tercapai
8.1.1.(a)	PDRB per kapita	RPJMD	Juta Rupiah	56,51	56,7	56,81	Tercapai
	TARGET 8.3 Menggalakkan kebijakan pembangunan yang mendukung kegiatan produktif, penciptaan lapangan kerja layak, kewirausahaan, kreativitas dan inovasi, dan mendorong formalisasi dan pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah, termasuk melalui akses terhadap jasa keuangan.						
8.3.1*	Proporsi lapangan kerja informal sektor non-pertanian, berdasarkan jenis kelamin.	BPS	%	43,18	45,1	46,27	Tercapai
8.3.1.(a)	Persentase tenaga kerja formal.	BPS	%	35,78	40,4	36,76	Tidak Tercapai
8.3.1.(b)	Persentase tenaga kerja informal sektor pertanian.	BPS	%	91,73	88,3	33,24	Tidak Tercapai
8.3.1.(c)	Persentase akses UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) ke layanan	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah	%	29	29	30,9	Tercapai

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Tahun 2020	Tahun 2021		Interpretasi Tercapai / Tidak Tercapai
				Capaian	Target	Capaian	
	keuangan.						
	TARGET 8.5 Pada tahun 2030, mencapai pekerjaan tetap dan produktif dan pekerjaan yang layak bagi semua perempuan dan laki-laki, termasuk bagi pemuda dan penyandang difabilitas, dan upah yang sama untuk pekerjaan yang sama nilainya.						
8.5.1*	Upah rata-rata per jam pekerja (Rupiah/Jam)	BPS	%	19.172	PM	19.217	Tercapai
8.5.2*	Tingkat pengangguran terbuka berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur	RPJMD	%	6,31	7,2	5,72	Tercapai
8.5.2(a)	Tingkat setengah pengangguran	BPS	%	9,96	PM	7,42	Tercapai
	TARGET 8.6 Pada tahun 2020, secara substansial mengurangi proporsi usia muda yang tidak bekerja, tidak menempuh pendidikan atau pelatihan.						
8.6.1*	Persentase usia muda (15-24 tahun) yang sedang tidak sekolah, bekerja atau mengikuti pelatihan (NEET).	Dinas tenaga kerja dan transmigrasi	%	25,48	41,5	23,78	Tidak Tercapai
	TARGET 8.9 Pada tahun 2030, menyusun dan melaksanakan kebijakan untuk mempromosikan pariwisata berkelanjutan yang menciptakan lapangan kerja dan mempromosikan budaya dan produk lokal.						

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Tahun 2020	Tahun 2021		Interpretasi Tercapai / Tidak Tercapai
				Capaian	Target	Capaian	
8.9.1*	Proporsi kontribusi pariwisata terhadap PDRB	Dinas Kebudayaan dan Kepariwisataan	%	2,82	1,0	1,18*	Tercapai
8.9.1.(a)	Jumlah wisatawan mancanegara	Dinas Kebudayaan dan Kepariwisataan	Jiwa	6.640	81,3	3.641*	Tercapai
8.9.1.(b)	Jumlah kunjungan wisatawan nusantara	Dinas Kebudayaan dan Kepariwisataan	Jiwa	402.687	1.937.500	1.448.193*	Tercapai
8.9.2*	Jumlah pekerja pada industri pariwisata dalam proporsi terhadap total pekerja.	Dinas tenaga kerja dan transmigrasi	%	3,73	18,2		
	TARGET 8.10 Memperkuat kapasitas lembaga keuangan domestik untuk mendorong dan memperluas akses terhadap perbankan, asuransi dan jasa keuangan bagi semua.						
8.10.1.(b)	Proporsi kredit UMKM terhadap total kredit.	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah	%	30	31	30,41	Tercapai
	MATRIKS BAGIAN I TARGET PENCAPAIAN INDIKATOR TUJUAN 9						
	TUJUAN 9 : INDUSTRI,INOVASI DAN INFRASTRUKTUR						
	TARGET 9.1 Mengembangkan infrastruktur yang berkualitas, andal, berkelanjutan dan tangguh, termasuk infrastruktur regional dan lintas batas, untuk mendukung pembangunan ekonomi dan kesejahteraan manusia, dengan fokus pada akses yang terjangkau dan merata bagi semua.						

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Tahun 2020	Tahun 2021		Interpretasi Tercapai / Tidak Tercapai
				Capaian	Target	Capaian	
9.1.1.(c)	Panjang jalur kereta api	Dinas perhubungan	Km	42,27	64,4	61*	Tidak Tercapai
9.1.2.(b)	Jumlah dermaga penyeberangan	Dinas perhubungan	Unit	1	1	2	Tercapai
	TARGET 9.2 Mempromosikan industrialisasi inklusif dan berkelanjutan, dan pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan proporsi industri dalam lapangan kerja dan produk domestik bruto, sejalan dengan kondisi nasional, dan meningkatkan dua kali lipat proporsinya di negara kurang berkembang.						
9.2.1*	Proporsi nilai tambah sektor industri manufaktur terhadap PDB dan per kapita	Dinas perindustrian	%	13,06	3,45	12,47	Tercapai
9.2.1.(a)	Laju pertumbuhan PDB industri manufaktur	Dinas perindustrian		-4,42	4,4	-0,27	Tidak Tercapai
9.2.2*	Proporsi tenaga kerja pada sektor industri manufaktur.	Dinas tenaga kerja dan transmigrasi	%	8,16	8,51	16,35	Tercapai
	TARGET 9.3 Meningkatkan akses industri dan perusahaan skala kecil, khususnya di negara berkembang, terhadap jasa keuangan, termasuk kredit terjangkau, dan mengintegrasikan ke dalam rantai nilai dan pasar.						
9.3.1*	Proporsi nilai tambah industri kecil terhadap total nilai tambah industri	Dinas perindustrian	%	9,11	51	8,91	Tidak Tercapai
	TARGET 9.4 Pada tahun 2030, meningkatkan infrastruktur dan retrofit industri agar dapat berkelanjutan, dengan						

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Tahun 2020	Tahun 2021		Interpretasi Tercapai / Tidak Tercapai
				Capaian	Target	Capaian	
	peningkatan efisiensi penggunaan sumberdaya dan adopsi yang lebih baik dari teknologi dan proses industri bersih dan ramah lingkungan, yang dilaksanakan semua negara sesuai kemampuan masing-masing.						
9.4.1(a)	Persentase Perubahan Emisi CO2/Emisi Gas Rumah Kaca	Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup	%	3	6	3,88	Tidak Tercapai
	TARGET 9.5 Memperkuat riset ilmiah, meningkatkan kapabilitas teknologi sektor industri di semua negara, terutama negara-negara berkembang, termasuk pada tahun 2030, mendorong inovasi dan secara substansial meningkatkan jumlah pekerja penelitian dan pengembangan per 1 juta orang dan meningkatkan pembelanjaan publik dan swasta untuk penelitian dan pengembangan.						
9.c.1*	Proporsi penduduk yang terlayani mobile broadband	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian	%	73,39	60	Tidak Ada Survey	
9.c.1.(a)	Proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian	%	85,30	73	86,75	Tercapai
9.c.1.(b)	Proporsi individu yang menggunakan internet	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian	%	49,59	54	59,69	Tercapai

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Tahun 2020	Tahun 2021		Interpretasi Tercapai / Tidak Tercapai
				Capaian	Target	Capaian	
	MATRIKS BAGIAN I TARGET PENCAPAIAN INDIKATOR TUJUAN 10						
	TUJUAN 10 : BERKURANGNYA KESENJANGAN						
	TARGET 10.1 Pada tahun 2030, secara progresif mencapai dan mempertahankan pertumbuhan pendapatan penduduk yang berada di bawah 40 dari populasi pada tingkat yang lebih tinggi dari rata-rata nasional.						
10.1.1*	Koefisien Gini	RPJMD	Indeks	0,382	0,414	0,382	Tercapai
10.1.1.(a)	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur	RPJMD		8,99	12,2	8,53	Tercapai
10.1.1.(b)	Jumlah daerah tertinggal yang terentaskan	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa	Kabupaten	-	-	0	Tercapai
	TARGET 10.3 Menjamin kesempatan yang sama dan mengurangi kesenjangan hasil, termasuk dengan menghapus hukum, kebijakan dan praktik yang diskriminatif, dan mempromosikan legislasi, kebijakan dan tindakan yang tepat terkait legislasi dan kebijakan tersebut.						
10.3.1.(a)	Indeks Kebebasan Sipil	BPS	%	68,4	PM		
	TARGET 10.4 Mengadopsi kebijakan, terutama kebijakan fiskal, upah dan perlindungan sosial, serta secara progresif mencapai kesetaraan yang lebih besar.						
10.4.1.(b)	Proporsi peserta Program	Tenaga kerja dan	%	77,99	71,4	47,12	Tidak Tercapai

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Tahun 2020	Tahun 2021		Interpretasi Tercapai / Tidak Tercapai
				Capaian	Target	Capaian	
	Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan.	transmigrasi					
	MATRIKS BAGIAN I TARGET PENCAPAIAN INDIKATOR TUJUAN 11						
	TUJUAN 11 : KOTA DAN PEMUKIMAN YANG BERKELANJUTAN						
	TARGET 11.1 Pada tahun 2030, menjamin akses bagi semua terhadap perumahan yang layak, aman, terjangkau, dan pelayanan dasar, serta menata kawasan kumuh.						
11.1.1.(a)	Proporsi rumah tangga yang memiliki akases terhadap hunian yang layak dan terjangkau	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	%	64,24	PM	69,11	Tercapai
11.1.1.(b)	Jumlah kawasan perkotaan metropolitan yang terpenuhi standar pelayanan perkotaan (SPP).	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	kawasan perkotaan	N/A	100	N/A	
11.1.1.(c)	Jumlah kota sedang dan kota baru yang terpenuhi SPP.	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	Kota sedang & Kota baru	N/A	PM	N/A	
	TARGET 11.2 Pada tahun 2030, menyediakan akses terhadap sistem transportasi yang aman, terjangkau, mudah diakses dan berkelanjutan untuk semua, meningkatkan keselamatan lalu lintas, terutama dengan memperluas jangkauan transportasi umum, dengan memberi perhatian khusus pada kebutuhan mereka yang berada dalam situasi rentan,						

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Tahun 2020	Tahun 2021		Interpretasi Tercapai / Tidak Tercapai
				Capaian	Target	Capaian	
	perempuan, anak, penyandang difabilitas dan orang tua.						
11.2.1.(a)	Persentase pengguna moda transportasi umum di perkotaan.	Dinas Perhubungan		66,45	29,20	12,70	Tidak Tercapai
	TARGET 11.3 Pada tahun 2030, memperkuat urbanisasi yang inklusif dan berkelanjutan serta kapasitas partisipasi, perencanaan penanganan permukiman yang berkelanjutan dan terintegrasi di semua negara.						
11.3.1.(a)	Jumlah kota sedang di luar Jawa yang diarahkan sebagai pengendali (buffer) arus urbanisasi dan sebagai pusat pertumbuhan utama.	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	Kota Sedang	7	PM	7	Tercapai
11.3.1.(b)	Jumlah Metropolitan baru di luar Jawa sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN).	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	Kota	1	PM	1	Tercapai
11.3.2.(a)	Rata-rata institusi yang berperan secara aktif dalam Forum Dialog Perencanaan Pembangunan Kota Berkelanjutan.	Bappelitbangda	Institusi/ Kota	N/A	PM	N/A	Tidak Tercapai
	TARGET 11.4 Mempromosikan dan menjaga warisan budaya dunia dan warisan alam dunia.						

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Tahun 2020	Tahun 2021		Interpretasi Tercapai / Tidak Tercapai
				Capaian	Target	Capaian	
11.4.1.(a)	Jumlah kota pusaka di kawasan perkotaan metropolitan, kota besar, kota sedang dan kota kecil.	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	Kota Pusaka	N/A	PM	N/A	Tidak Tercapai
	TARGET 11.5 Pada tahun 2030, secara signifikan mengurangi jumlah kematian dan jumlah orang terdampak, dan secara substansial mengurangi kerugian ekonomi relatif terhadap PDB global yang disebabkan oleh bencana, dengan fokus melindungi orang miskin dan orang-orang dalam situasi rentan.						
11.5.1*	Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	%				
	Jumlah korban meninggal terkena dampak bencana per 100.000 orang	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Jiwa	Meninggal = 78 Terdampak = 70.854	PM	Meninggal = 27 Terdampak = 21.470	Tercapai
	Jumlah korban hilang terkena dampak bencana per 100.000 orang	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Jiwa	-	PM	4	Tercapai
	Jumlah korban terluka terkena dampak bencana per 100.000 orang	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Jiwa	-	PM	76	Tercapai
	Jumlah korban mengungsi	Badan	Jiwa	-	PM	21.470	Tercapai

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Tahun 2020	Tahun 2021		Interpretasi Tercapai / Tidak Tercapai
				Capaian	Target	Capaian	
	terkena dampak bencana per 100.000 orang	Penanggulangan Bencana Daerah					
11.5.1.(a)	Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI).	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Indeks	157,55	155,05	154,87	Tercapai
11.5.1.(b)	Jumlah kota tangguh bencana yang terbentuk.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Kab/Kota	1	4	0	Tidak Tercapai
11.5.1.(c)	Jumlah sistem peringatan dini cuaca dan iklim serta kebencanaan.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Sistem	-	3	0	Tidak Tercapai
11.5.2.(a)	Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Rupiah	620 Milyar	PM	119 Milyar	Tercapai
	TARGET 11.6 Pada tahun 2020, meningkatkan secara substansial jumlah kota dan permukiman yang mengadopsi dan mengimplementasi kebijakan dan perencanaan yang terintegrasi tentang penyertaan, efisiensi sumber daya, mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim, ketahanan terhadap bencana, serta mengembangkan dan mengimplementasikan penanganan holistik risiko bencana di semua lini, sesuai dengan the Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015-2030.						
11.b.2*	Dokumen strategi	Badan	Dokumen	1	1	1	Tercapai

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Tahun 2020	Tahun 2021		Interpretasi Tercapai / Tidak Tercapai
				Capaian	Target	Capaian	
	pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat daerah.	Penanggulangan Bencana Daerah					
11.6.1.(a)	Persentase sampah perkotaan yang tertangani.	Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup	%	30	75	82,32	Tercapai
	MATRIKS BAGIAN I TARGET PENCAPAIAN INDIKATOR TUJUAN 12						
	TUJUAN 12 : KONSUMSI DAN PRODUKSI YANG BERTANGGUNG JAWAB						
	TARGET 12.4 Pada tahun 2020 mencapai pengelolaan bahan kimia dan semua jenis limbah yang ramah lingkungan, di sepanjang siklus hidupnya, sesuai kerangka kerja internasional yang disepakati dan secara signifikan mengurangi pencemaran bahan kimia dan limbah tersebut ke udara, air, dan tanah untuk meminimalkan dampak buruk terhadap kesehatan manusia dan lingkungan.						
12.4.2.(a)	Jumlah limbah B3 yang terkelola dan proporsi limbah B3 yang diolah sesuai peraturan perundangan (sektor industri)	Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup	Ton	3.500.000	3.503.844.443	589007,56	Tidak Tercapai
	TARGET 12.5 Pada tahun 2030, secara substansial mengurangi produksi limbah melalui pencegahan, pengurangan, daur ulang, dan penggunaan kembali.						
12.5.1.(a)	Jumlah timbulan sampah yang didaur ulang	Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup	Ton/ Hari	19,97	45,45	31,82	Tidak Tercapai

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Tahun 2020	Tahun 2021		Interpretasi Tercapai / Tidak Tercapai
				Capaian	Target	Capaian	
	MATRIKS BAGIAN I TARGET PENCAPAIAN INDIKATOR TUJUAN 13						
	TUJUAN 13 :PENANGANAN PERUBAHAN IKLIM						
	TARGET 13.1 Memperkuat kapasitas ketahanan dan adaptasi terhadap bahaya terkait iklim dan bencana alam di semua negara.						
13.1.1*	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Dokumen	1	1	1	
13.1.2*	Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	%	Meninggal = 78 Terdampak = 70.854		Meninggal = 27 Tercampak = 21.470	Tercapai
	Jumlah korban meninggal terkena dampak bencana per 100.000 orang	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Jiwa	N/A	PM	27	Tercapai
	Jumlah korban hilang terkena dampak bencana per 100.000 orang	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Jiwa	N/A	PM	4	Tercapai
	Jumlah korban terluka terkena dampak bencana per 100.000 orang	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Jiwa	N/A	PM	76	Tercapai

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Tahun 2020	Tahun 2021		Interpretasi Tercapai / Tidak Tercapai
				Capaian	Target	Capaian	
	Jumlah korban mengungsi terkena dampak bencana per 100.000 orang	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Jiwa	N/A	PM	21.470	Tercapai
	TARGET 13.2 Mengintegrasikan tindakan antisipasi perubahan iklim ke dalam kebijakan, strategi dan perencanaan nasional.						
13.2.1.(a)	Dokumen pelaporan penurunan emisi gas rumah kaca (GRK).	Bappelitbangda	Dokumen	-	1	1	Tercapai
	MATRIKS BAGIAN I TARGET PENCAPAIAN INDIKATOR TUJUAN 14						
	TUJUAN 14 : EKOSISTEM LAUTAN						
	TARGET 14.Pada tahun 2020, melarang bentuk-bentuk subsidi perikanan tertentu yang berkontribusi terhadap kelebihan kapasitas dan penangkapan ikan berlebihan, menghilangkan subsidi yang berkontribusi terhadap penangkapan ikan ilegal, yang tidak dilaporkan dan tidak diatur dan menahan jenis subsidi baru, dengan mengakui bahwa perlakuan khusus dan berbeda yang tepat dan efektif untuk negara berkembang dan negara kurang berkembang harus menjadi bagian integral dari negosiasi subsidi perikanan pada the World Trade Organization.						
14.6.1.(a)	Persentase kepatuhan pelaku usaha	Dinas kelautan dan perikanan	%	87,48	86,9	63,87	Tidak Tercapai
	TARGET 14.Menyediakan akses untuk nelayan skala kecil (small-scale artisanal fishers) terhadap sumber daya laut dan pasar.						
14.b.1*	Ketersediaan kerangka	Dinas kelautan dan	Regulasi/ Kebijakan	1	1	-	Tidak Tercapai

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Tahun 2020	Tahun 2021		Interpretasi Tercapai / Tidak Tercapai
				Capaian	Target	Capaian	
	hukum/ regulasi/ kebijakan/ kelembagaan yang mengakui dan melindungi hak akses untuk perikanan skala kecil	perikanan					
14.b.1.(a)	Jumlah Kab/ Kota dengan peningkatan akses pendanaan usaha nelayan	Dinas kelautan dan perikanan	Kab/ Kota	19	19	19	Tercapai
14.b.1.(b)	Jumlah nelayan yang terlindungi.	Dinas kelautan dan perikanan	Nelayan	NA	11.820	660	Tidak Tercapai
	MATRIKS BAGIAN I TARGET PENCAPAIAN INDIKATOR TUJUAN 15						
	TUJUAN 15 : EKOSISTEM DARATAN						
	TARGET 15.1 Pada tahun 2020, menjamin pelestarian, restorasi dan pemanfaatan berkelanjutan dari ekosistem daratan dan perairan darat serta jasa lingkungannya, khususnya ekosistem hutan, lahan basah, pegunungan dan lahan kering, sejalan dengan kewajiban berdasarkan perjanjian internasional.						
15.1.1.(a)	Proporsi tutupan hutan terhadap luas lahan keseluruhan.	Dinas kehutanan	%	56,64	56,64	0	
	TARGET 15.2 Pada tahun 2020, meningkatkan pelaksanaan pengelolaan semua jenis hutan secara berkelanjutan, menghentikan deforestasi, merestorasi hutan yang terdegradasi dan meningkatkan secara signifikan forestasi dan						

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Tahun 2020	Tahun 2021		Interpretasi Tercapai / Tidak Tercapai
				Capaian	Target	Capaian	
	reforestasi secara global.						
15.2.1.(a)	Luas kawasan konservasi terdegradasi yang dipulihkan kondisi ekosistemnya	Dinas kehutanan	Ha	100	100	-	
15.2.1.(b)	Luas usaha pemanfaatan hasil hutan kayu restorasi ekosistem	Dinas kehutanan	Ha	12.000	12.000	-	
15.2.1.(d)	Jumlah Kesatuan Pengelolaan Hutan.	Dinas kehutanan	KPH	16	16	16	Tercapai
	TARGET 15.3 Pada tahun 2020, menghentikan penggurunan, memulihkan lahan dan tanah kritis, termasuk lahan yang terkena penggurunan, kekeringan dan banjir, dan berusaha mencapai dunia yang bebas dari lahan terdegradasi.						
15.3.1.(a)	Proporsi luas lahan kritis yang direhabilitasi terhadap luas lahan keseluruhan	Dinas kehutanan	%	0,27	0,6	0,73	Tercapai
	TARGET 15.9 Pada tahun 2020, mengintegrasikan nilai-nilai ekosistem dan keanekaragaman hayati ke dalam perencanaan nasional dan daerah, proses pembangunan, strategi dan penganggaran pengurangan kemiskinan.						
15.9.1.(a)	Dokumen rencana pemanfaatan keanekaragaman hayati	Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup	Dokumen	1	1	1	Tercapai

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Tahun 2020	Tahun 2021		Interpretasi Tercapai / Tidak Tercapai
				Capaian	Target	Capaian	
	MATRIKS BAGIAN I TARGET PENCAPAIAN INDIKATOR TUJUAN 16						
	TUJUAN 16 : PERDAMAIAN KEADILAN DAN KELEMBAGAAN YANG TANGGUH						
	TARGET 16.1 Secara signifikan mengurangi segala bentuk kekerasan dan terkait angka kematian dimanapun.						
16.1.1.(a)	Jumlah kasus kejahatan pembunuhan pada satu tahun terakhir	BPS	Kasus	N/A	PM		
		POLDA	Kasus	N/A	87		
16.1.4*	Proporsi penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya	BPS	%	N/A	PM		
		POLDA	%	N/A	89		
	TARGET 16.2 Menghentikan perlakuan kejam, eksploitasi, perdagangan, dan segala bentuk kekerasan dan penyiksaan terhadap anak.						
16.2.3.(a)	Proporsi perempuan dan laki-laki muda umur 18-24 tahun yang mengalami kekerasan seksual sebelum umur 18 tahun.	Dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	%	0,082	1,9	0,091	Tercapai
16.2.1.(b)	Prevalensi kekerasan	Dinas	%	0,053	0,00079	0,038	Tidak Tercapai

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Tahun 2020	Tahun 2021		Interpretasi Tercapai / Tidak Tercapai
				Capaian	Target	Capaian	
	terhadap anak laki-laki dan anak perempuan.	pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak					
16.2.1.(a)	Proporsi rumah tangga yang memiliki anak umur 1-17 tahun yang mengalami hukuman fisik dan/atau agresi psikologis dari pengasuh dalam setahun terakhir.	Dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	%	51,31	0,0	N/A	Tidak Tercapai
TARGET 16.6 Mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkat.							
16.6.1*	Proporsi pengeluaran utama pemerintah terhadap anggaran yang disetujui.	Badan Pengelola Keuangan Daerah		N/A	95	98,44	Tercapai
16.6.1.(a)	Persentase peningkatan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota).	Badan Pengelola Keuangan Daerah	%	N/A	100	WTP	Tidak Tercapai

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Tahun 2020	Tahun 2021		Interpretasi Tercapai / Tidak Tercapai
				Capaian	Target	Capaian	
16.6.2.(a)	Persentase Kepatuhan pelaksanaan UU Pelayanan Publik Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota).	Biro Organisasi dan Tata Laksana Sekretariat Daerah	%	4,01 (A-)	B	4,10 (A-)	Tercapai
16.6.1.(b)	Persentase peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota).	Biro Organisasi dan Tata Laksana Sekretariat Daerah	%	63,02 (B)	70-80 (BB)	65,61 (B)	Tidak Tercapai
				NA	10		
16.6.1.(c)	Persentase penggunaan E-procurement terhadap belanja pengadaan.	Biro Pembangunan Sekretariat Daerah	%	83,39	100	28,33	Tidak Tercapai
16.6.1.(d)	Persentase instansi pemerintah yang memiliki nilai Indeks Reformasi Birokrasi Baik Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota).	Biro Organisasi dan Tata Laksana Sekretariat Daerah	%	60,07 (B)	BB (70)	B (60,07)	Tidak Tercapai

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Tahun 2020	Tahun 2021		Interpretasi Tercapai / Tidak Tercapai
				Capaian	Target	Capaian	
	TARGET 16.7 Menjamin pengambilan keputusan yang responsif, inklusif, partisipatif dan representatif di setiap tingkatan.						
16.7.2.(a)	Indeks Lembaga Demokrasi	BPS	%	NA	PM		
16.7.2.(b)	Indeks Kebebasan Sipil	BPS	%	NA	PM		
16.7.2.(c)	Indeks Hak-hak Politik	BPS	%	NA	PM		
	TARGET 16.9 Pada tahun 2030, memberikan identitas yang syah bagi semua, termasuk pencatatan kelahiran.						
16.9.1.(a)	Persentase anak berumur 0-17 tahun dengan pendapatan 40 bawah yang memiliki akta kelahiran	BPS	%	87,87	PM	89	
	MATRIKS BAGIAN I TARGET PENCAPAIAN INDIKATOR TUJUAN 17						
	TUJUAN 17 : KEMITRAAN UNTUK MENCAPAI TUJUAN						
	TARGET 17.1 Memperkuat mobilisasi sumber daya domestik, termasuk melalui dukungan internasional kepada negara berkembang, untuk meningkatkan kapasitas lokal bagi pengumpulan pajak dan pendapatan lainnya.						
17.1.1*	Total pendapatan pemerintah sebagai proporsi terhadap PDB menurut sumbernya.	Badan pendapatan daerah	%	0,67	0,8	0,82	Tercapai
17.1.1.(a)	Rasio penerimaan pajak terhadap PDB	Badan pendapatan daerah		0,56	0,6	0,71	Tercapai
17.1.2*	Proporsi anggaran domestik	Badan pendapatan	%	43,98	32,2	45,57	Tercapai

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Tahun 2020	Tahun 2021		Interpretasi Tercapai / Tidak Tercapai
				Capaian	Target	Capaian	
	yang didanai oleh pajak domestik	daerah					
	TARGET 17.6 Meningkatkan kerjasama Utara-Selatan, Selatan-Selatan dan kerjasama triangular secara regional dan internasional terkait dan akses terhadap sains, teknologi dan inovasi, dan meningkatkan berbagi pengetahuan berdasar kesepakatan timbal balik, termasuk melalui koordinasi yang lebih baik antara mekanisme yang telah ada, khususnya di tingkat Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), dan melalui mekanisme fasilitasi teknologi global.						
17.6.2.(c)	Proporsi penduduk terlayani mobile broadband	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian	%	73,39	60		
	TARGET 17.8 Mengoperasionalisasikan secara penuh bank teknologi dan sains, mekanisme pembangunan kapasitas teknologi dan inovasi untuk negara kurang berkembang pada tahun 2017 dan meningkatkan penggunaan teknologi yang memampukan, khususnya teknologi informasi dan komunikasi.						
17.8.1*	Proporsi individu yang menggunakan internet.	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian	%	49,59	57	87,17	Tercapai
17.8.1.(a)	Persentase kabupaten 3T yang terjangkau layanan akses telekomunikasi universal dan internet.	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian	%	NA	100	0	

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Tahun 2020	Tahun 2021		Interpretasi Tercapai / Tidak Tercapai
				Capaian	Target	Capaian	
	TARGET 17.18 Pada tahun 2020, meningkatkan dukungan pengembangan kapasitas untuk negara berkembang, termasuk negara kurang berkembang dan negara berkembang pulau kecil, untuk meningkatkan secara signifikan ketersediaan data berkualitas tinggi, tepat waktu dan dapat dipercaya, yang terpilah berdasarkan pendapatan, gender, umur, ras, etnis, status migrasi, difabilitas, lokasi geografis dan karakteristik lainnya yang relevan dengan konteks nasional.						
17.18.1.(a)	Persentase konsumen Badan Pusat Statistik (BPS) yang merasa puas dengan kualitas data statistik.	BPS	%	98,63	PM		
17.18.1.(b)	Persentase konsumen yang menjadikan data dan informasi statistik BPS sebagai rujukan utama.	BPS	%	93,51	PM		
17.18.1.(c)	Jumlah metadata kegiatan statistik dasar, sektoral, dan khusus yang terdapat dalam Sistem Informasi Rujukan Statistik (SIRuSa).	BPS	%	11	PM		
	TARGET 17.19 Pada tahun 2030, mengandalkan inisiatif yang sudah ada, untuk mengembangkan pengukuran atas kemajuan pembangunan berkelanjutan yang melengkapi Produk Domestik Bruto, dan mendukung pengembangan kapasitas statistik di negara berkembang.						
17.19.2.(b)	Tersedianya data registrasi	Dinas	%	Ada	Ada		

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Tahun 2020	Tahun 2021		Interpretasi Tercapai / Tidak Tercapai
				Capaian	Target	Capaian	
	terkait kelahiran dan kematian (Vital Statistics Register)	Kependudukan dan Catatan Sipil					
17.19.2.(c)	Jumlah pengunjung eksternal yang mengakses data dan informasi statistik melalui website.	BPS	%	100.933	PM		
17.19.2.(d)	Persentase konsumen yang puas terhadap akses data Badan Pusat Statistik (BPS).	BPS	%	92,69	PM		

2.6 Evaluasi Capaian Indikator Pembangunan

1. Evaluasi Pelaksanaan Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan

Tahun 2021 merupakan tahun ketiga pelaksanaan program periode RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan 2018-2023. Sejumlah 179 program penyelenggaraan urusan pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan yang dilaksanakan tahun 2021 dengan jumlah indikator outcome 297 untuk mendukung pencapaian sasaran dan prioritas pembangunan yang tertuang dalam RKPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021.

Sesuai dengan Hasil Analisis Terhadap Capaian Indikator Kinerja Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021 dari 299 total indikator terdapat 119 indikator **melampaui** dari target yang telah ditetapkan, dan sebanyak 98 indikator yang telah **sesuai** dengan target, sedangkan 83 indikator lainnya **belum mencapai** target yang telah ditetapkan. Banyaknya indikator yang belum tercapai disebabkan karena adanya rekofusing anggaran terkait penanganan covid-19 pada tahun 2020 sehingga telah mengganggu perencanaan yang telah disusun sebelumnya.

2. Evaluasi capaian indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM)

A. Bidang Urusan Pendidikan

Dinas Pendidikan adalah satu bentuk organisasi pelayanan dibidang administrasi pendidikan khususnya terkait dengan upaya pengelolaan lembaga pendidikan sebagai rujukan yang mendukung upaya lembaga-lembaga pendidikan. Sebagai lembaga pelayanan pemerintah Dinas Pendidikan akan semakin giat untuk mendapat pandangan dan penilaian positif dari masyarakat. Selain itu, masyarakat menuntut lembaga negara harus dapat memberikan layanan yang One Stop Services, artinya seluruh kebutuhan pelayanan pendidikan dan pelayanan terkait siswa, guru dan tenaga kependidikan harus dapat dilayani oleh Dinas Pendidikan secara efektif dan efisien.

Pendidikan merupakan ujung tombak kemajuan sebuah bangsa. Pendidikan yang berkualitas dapat menghasilkan sumberdaya manusia yang berkualitas dan produktif bukan saja dalam jumlah besar dan banyak tetapi juga mampu menjadi dinamisator, inovator, motivator dan penggerak pembangunan.

Untuk mengembangkan kebijakan terhadap pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan dalam upaya peningkatan wawasan dan pengetahuan untuk melaksanakan proses pembelajaran yang menyeimbangkan hard skill dan soft skill sehingga mencapai mutu yang berkualitas sesuai tuntutan Standar Nasional Pendidikan, keberpihakan terhadap masyarakat tanpa memandang status sosial dan kemampuan untuk memperoleh akses pendidikan bermutu yang seluas - luasnya pada semua jenjang pendidikan sebagai tuntutan untuk memenuhi layanan hak dasar masyarakat.

Sedemikian pentingnya pendidikan dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa, meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan membangun martabat bangsa, maka pemerintah berusaha memberikan perhatian yang sesungguh-sungguh untuk mengatasi berbagai masalah dibidang peningkatan pendidikan mulai dari tingkat dasar, menengah, sampai ketingkat tinggi. Perhatian tersebut ditujukan dengan cara menyediakan alokasi anggaran berarti serta membuat

kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan usaha meningkatakan mutu pendidikan. Bahkan yang lebih penting lagi adalah melakukan berbagai macam ikhtiar guna memperluas kesempatan bagi masyarakat dalam memperoleh pendidikan pada semua jenjang yang ada.

Sebgai gambaran permasalahan dan solusi yang dilakukan pada aspek bidang urusan pendidikan yakni:

- **Permasalahan**
  1. Adanya Pandemi Covid 19
  2. Informasi tentang pendidikan kurang diketahui masyarakat disebabkan tidak ada system informasi berbasis IT
  3. Adanya kegiatan-kegiatan fisik yang tidak berjalan maksimal
  4. Perubahan Anggaran/recofusing sehingga kegiatan berjalan tidak maksimal
- **Tindak lanjut/solusi**
  1. Pelaksanaan sosoalisasi dan evaluasi program dilakukan melalui zoom meeting
  2. Pengadaan system informasi administrasi IT terkait pendidikan sehingga mudah diakses oleh masyarakat melalui Website.
  3. Pengusulan anggaran lebih terfokus pada pelaksanaan kegiatan yang lebih prioritas.

B. Bidang Urusan Kesehatan

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Provinsi, Indikator yang harus dicapai dalam satu tahun adalah sebagai berikut :

1. Pelayanan Kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan atau berpotensi bencana provinsi.

Pelayanan kesehatan dalam krisis kesehatan sesuai standar adalah pelayanan minimal untuk memenuhi kebutuhan kesehatan dasar penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan atau penduduk yang tinggal di wilayah berpotesi bencana yang dilakukan oleh tenaga kesehatan. Pelayanan kesehatan saat tanggap darurat krisis kesehatan ditujukan untuk merespon seluruh kondisi kedaruratan secara cepat dan tepat, guna menyelamatkan nyawa, mencegah kecacatan lebih lanjut dan mengurangi angka kesakitan dengan memperhatikan kepentingan kelompok rentan yang meliputi:

- Mendapatkan layanan medis dasar dan layanan rujukan bila diperlukan
- Mendapatkan layanan pencegahan penyakit menular dan penyehatan lingkungan
- Mendapatkan layanan gizi darurat
- Mendapatkan layanan kesehatan reproduksi darurat
- Mendapatkan layanan dukungan kesehatan jiwa dan psikososial
- Mendapatkan Penyuluhan Kesehatan

2. Pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa provinsi

Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk pada kondisi Kejadian Luar Biasa Provinsi adalah pelayanan kesehatan bagi setiap orang yang terdampak dan berisiko pada situasi KLB sesuai dengan jenis penyakit dan/atau keracunan pangan yang menyebabkan KLB. Suatu KLB dinyatakan sebagai KLB provinsi jika memenuhi salah satu kriteria kondisi KLB sebagai berikut:

- KLB yang terjadi pada suatu wilayah kabupaten/kota di satu provinsi yang meluas ke kabupaten/kota lainnya dan memeliki hubungan epidemiologi pada provinsi yang sama berdasarkan kajian epidemiologi oleh Dinas Kesehatan Provinsi.
- KLB yang terjadi pada suatu wilayah kabupaten/ kota di satu provinsi berpotensi meluas ke kabupaten/kota lainnya berdasarkan hasil analisis dan evaluasi penanggulangan KLB oleh Dinas Kesehatan Provinsi.
- Pemerintah daerah kabupaten/ kota tedampak KLB tidak/ kurang mampu dan mengajukan permintaan bantuan dalam penanggulangan KLB kepada Pemerintah Daerah Provinsi. Pengajuan permintaan bantuan dengan menggunakan formulir ditanda tanagni oleh kepala daerah kabupaten/ kota terdampak.

  Sebagai gambaran permasalahan dan solusi yang dilakukan pada bidang urusan Kesehatan yakni:

- **Permasalahan**

  a. Pelayanan Kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan atau berpotensi bencana provinsi :

     1. Pelaporan SPM Belum Sesuai dengan Peraturan Pelaksanaan SPM provinsi untuk pengelolaan program provinsi dan kab/kota
     2. Ketenagaan kabupaten/ kota sebagai pendukung dalam melakukan pengumpulan data di lapangan yang masih terbatas.
     3. Kapasitas petugas kabupaten/ kota dalam melakukan pengumpulan data yang perlu ditingkatkan.
     4. Responden masyarakat yang tidak sepenuhnya memberikan data yang diperlukan dalam penanganan KLB.
     5. Petugas kesulitan dalam menentukan target awal pelayanan KLB.
     6. Kegiatan Pelayanan KLB Tahun 2021 hanya dibiayai melalui anggaran DAK Non Fisik dengan jumlah yang tidak cukup.
     7. Perencanaan kebutuhan anggaran yang tidak terakomidir melalui APBD murni.
     8. Pencairan dana KLB yang dilakukan pada akhir triwulan 4
     9. Belum ada perhitungan kebutuhan pelayanan KLB sesuai standar dari penanggung jawab pelayanan KLB di Provinsi/Kab.Kota hasil perhitungan kebutuhan anggaran melalui aplikasi SISCOBIDKES yang belum sepenuhnya digunakan dalam perencanaan dan penganggaran kegiatan pelayanan KLB.
     10. Pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan pada masa pandemi yang sangat berpotensi pada pelanggaran prokes
     11. Tidak adanya sarana dan prasarana dalam pelayanan krisis

kesehatan.
12. Tidak adanya kelembagaan khusus terkait krisis kesehatan baik di provinsi maupun di kabupaten/kota.
13. Perlunya pemahaman persepsi lintas sektor dan lintas program terkait krisis kesehatan.

b. Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada kondisi kejadian luar biasa provinsi

1. Pelaporan SPM belum sesuai dengan peraturan pelaksanaan SPM provinsi untuk pengelola program provinsi dan kabupaten/ kota
2. Ketenagaan kabupaten/kota sebagai pendukung dalam melakukan pengumpulan data di lapangan yang masih terbatas
3. Kapasitas petugas kab/kota dalam melakukan Pengumpulan Data yang perlu ditingkatkan
4. Responden/masyarakat yang tidak sepenuhnya memberikan data yang diperlukan dalam penanganan KLB.
5. Petugas kesulitan dalam menentukan target awal pelayanan KLB.
6. Kegiatan Pelayanan KLB Tahun 2021 hanya dibiayai melalui anggaran DAK Non Fisik dengan jumlah yang tidak cukup.
7. Perencanaan kebutuhan anggaran yang tidak terakomidir melalui APBD murni.
8. Pencairan dana KLB yang dilakukan pada akhir triwulan 4.
9. Belum ada perhitungan kebutuhan pelayanan KLB sesuai standar dari penanggung jawab pelayanan KLB di Provinsi/Kab.Kota hasil perhitungan kebutuhan anggaran melalui aplikasi SISCOBIDKES yang belum sepenuhnya digunakan dalam perencanaan dan penganggaran kegiatan pelayanan KLB.
10. Masih kurang pengetahuan tentang cara perhitungan kebutuhan bahan/reagen, alat dan obat.
11. Pelaksanaan pelayanan KLB banyak terkendala pndemi covid-19
12. Pengkajian data KLB belum dilakukan secara rutin dengan melibatkan tenaga ahli,lintas sektor dan lintas program.
13. Logistik belum sepenuhnya cukup tersedia dalam pelayanan KLB.
14. Koordinasi penanggulangan KLB yang belum maksimal antar kab/kota dan provinsi

- **Tindak Lanjut / Solusi**

a. Pelayanan Kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan atau berpotensi bencana provinsi

1. Pertemuan koordinasi pelaporan data krisis bencana
2. Peningkatan kapasitas petugas kab/kota dalam rangka manajemen data krisis dan bencana
3. Validasi dan verifikasi data kasus
4. Perlunya penyegaran kembali sistem pencatatan dan pelporan khususnya krisis dan bencana
5. Koordinasi lintas sektor/lintas program dalam melakukan identifikasi kebutuhan

6. Perlu dilaksanakan workshop perhitungan kebutuhan pelayanan SPM dengan melibatkan bagian penanggung jawab bidang teknis pelayanan SPM.
7. Koordinasi lintas sektor dalam perencanaan kegiatan
8. Perlu adanya pembahasan terkait pembiayaan dan anggaran khusus dalam pelayanan krisis kesehatan
9. Kegiatan yang akan dilaksanakan pada masa pandemic harus sesuai dengan protol kesehatan
10. Pengadaan sarana dan prasarana dalam pelayanan kesiap siagaan bencana.
11. Pembentukan kelembagaan khusus terkait krisis kesehatan baik di provinsi dan kabupaten/kota.
12. Pemahaman persepsi lintas sektor dan lintas program terkait krisis kesehatan

b. Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada kondisi kejadian luar biasa provinsi
   1. Perlunya sosialisasi permendagri no 100 tahun 2-18 tentang penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di kabupaten/kota.
   2. Perlu ketersediaan Tim Penanggulangan KLB di kab/ kota yang dapat dilegalkan melalui SK penetapan
   3. Peningkatan kapasitas petugas melalui pelatihan secara berjenjang
   4. Pelayanan KLB melibatkan lintas sektor/lintas program terkait seperti tenaga promkes
   5. Perlu dilakukan workshop perhitungan kebutuhan pelayanan SPM dan melibatkan bagian penanggung jawab bidang teknis pelayanan Standar Pelayanan Minimal (SPM).
   6. Koordinasi lintas program dan lintas sektoral mengenai keamanan makanan dan berbagi tanggung jawab serta segera melaporkan ke Dinas Kesehatan jika ditemukan kasus keracunan pangan.
   7. Perlunya sosialisasi tentang cara perhitungan kebutuhan bahan/reagen alat dan obat.
   8. Pelatihan tentang cara menentukan saran/target penderita berdasarkan jenis KLB/penyakit.
   9. Dukungan anggaran pelayanan KLB dari dana APBD
   10. Pengelolaan anggaran pelayanan KLB agar dapat diperioritaskan
   11. Penyediaan logistik untuk mendukung pelayanan KLB
   12. Rapat koordinasi penanggulangan KLB antara kabupaten/kota dan provinsi.

C. Bidang Urusan Pekerjaan Umum

1. Pemenuhan Kebutuhan Air Minum Curah Lintas Kabupaten/Kota

   Air Minum Curah adalah air hasil olahan instalasi pengolahan air pada Sistem Penyediaan Air Minum lintas kabupaten/kota. Mutu Pelayanan Dasar pemenuhan kebutuhan Air Minum Curah lintas kabupaten/kota berupa ukuran kuantitas dan kualitas air minum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Penyelenggara sistem penyediaan air minum dilakukan oleh badan usaha milik daerah dan unit pelaksana teknis daerah pada Pemerintah Daerah

kabupaten/kota yang menjadi penerima Air Minum Curah lintas kabupaten/kota (Permen PUPR, 2018).

2. Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik Regional Lintas Kabupaten/Kota

Air Limbah Domestik adalah air limbah yang berasal dari usaha dan/atau kegiatan pemukiman, rumah makan, perkantoran, perniagaan, apartemen, dan asrama. Mutu Pelayanan Dasar pengolahan Air Limbah Domestik meliputi kuantitas dan kualitas pelayanan sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria. Rumah Tangga yang termasuk dalam wilayah pelayanan pengolahan Air Limbah Domestik regional, terutama diprioritaskan pada masyarakat miskin atau tidak mampu dan berdomisili pada Area Berisiko Pencemaran Air Limbah Domestik dan dekat badan air (Permen PUPR, 2018).

Sebagai gambaran permasalahan dan solusi yang dilakukan pada bidang urusan Pekerjaan Umum yakni:

- **Permasalahan**
  a. Integrasi SPM dalam Dokumen Perencanaan dalam hal Pengalokasian anggaran belum terakomodir pada dokumen RPJMD yang disusul lebih awal dari hasil perhitungan kebutuhan anggaran Pembangungan SPAM Regional
  b. Pemenuhan Kebutuhan Air Minum Curah Lintas Kabupaten/Kota Kebutuhan dan pengembangan yang membutuhkan kesiapan sumber daya, anggaran dan lahan
  c. Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik regional lintas kabupaten/ kota berupa Layanan IPLT (Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja) belum dibutuhkan di tingkat regional

Solusi

a. Integrasi SPM dalam Dokumen Perencanaan dengan cara Penguatan pengalokasian pada RPJMD selanjutnya
b. Pemenuhan Kebutuhan Air Minum Curah Lintas Kabupaten/Kota guna memperkuat Kerjasama pengembangan SPAM Bersama Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Swasta
c. Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik regional lintas kabupaten/ kota dan Optimalisasi dan peningkatan pelayanan di Kabupaten / Kota.

d. Bidang Urusan Perumahan Rakyat

Jenis pelayanan dasar seperti yang tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29 tahun 2018 tentang Standar Teknis Standar pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, yaitu: a). Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban Bencana, b). Fasilitasi Penyediaan dan Rehabilitasi rumah layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah.

- **Permasalahan**
  a. Bagaimana mengimplementasikan dokumen RPJMD dalam penerpan SPM
  b. Tantangan yang dihadapi adalah minimnya pengalokasian anggaran

terhadap SPM belum lagi ditambah dengan adanya kebijakan Pemerintah merefocusing anggaran yang juga berdampak pada anggaran SPM.

c. Bagaimana menentukan lokasi relokasi atau permukiman kembali bagi para korban bencana yang memungkinkan dan aman terhadap terjadinya bencana lagi untuk membantu mereka kembali mendapatkan kualitas hidup seperti sebelum terjadinya bencana atau bahkan mungkin biasa lebih baik.
d. Penanganan SPM sepanjang tahun 2020 hingga 2021 melalui mekanisme bantuan keuangan seperti di Kabupaten Kepulauan Selayar senilai 8 milyar di akhir tahun 2021.

- **Tindak lanjut/Solusi**

a. Arah kebijakan pemerintah terkait penganggaran memprorioritaskan urusan wajib dan berkomitmen untuk mencapai target penaganan terkait layanan dasar yang termuat dalam SPM.
b. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) para pengampuh SPM di OPD yang menangani.

Perlunya monitoring dan evaluasi oleh Biro Pemerintahan selaku OPD yang mengkoordinir penerapan SPM di provinsi agar tantangan dan kendala bisa didiskusikan Bersama dalam mencari solusi atas permasalahan yang terjadi.

Salah satu upaya Pemerintah Provinsi dasar membuat proposal kepada Kementerian PUPR dalam pemenuhan target SPM untuk peningkatan kualitas rumah yang terdampak bencana.idang Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal kemudian dirubah menjadi permendagri 59 Tahun 2021. Dengan penajaman pelayanan pada trantibun yakni Jenis Pelayanan Dasar terkait Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat (TRANTIBUMLINMAS) adalah Pelayanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Provinsi.

- **Permasalahan**
  1. Menumpuknya proses pelaksanaan pekerjaan di triwulan III dan IV;
  2. Efektifitas pelaksanaan kegiatan awal tahun dilaksanakan di bulan Maret;
  3. Adanya re-focusing anggaran dalam rangka penanganan pandemic Corona Virus Disease (Covid-19);
  4. Belum optimalnya Forum koordinasi kerjasama antar daerah dan lembaga/ Instansi terkait;
  5. Belum terintegrasinya program kerja antar daerah dengan instansi terkait, sehingga penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban umum belum maksimal;
  6. Terbatasnya Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sebagai Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Menyebabkan beberapa kasus pelanggaran pada kegiatan Penegakan Perda tidak dapat diselesaikan serta belum tersedianya sekretariat PPNS berupa gedung khusus dan sarana prasarananya.
- **Solusi**
  a. Pelaksanaan Kegiatan menyesuaikan dengan jadual penggunaan anggaran dan menghindari adanya penambahan volume pekerjaan dalam APBD Perubahan Melaksanakan Forum koordinasi kerjasama antar daerah dan lembaga/Instansi terkait melalui Program kerja.;
  b. Menjalin koordinasi yang baik dan salin bersinergi antar daerah, instansi terkait jajaran TNI/Polri dalam mendukung situasi Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang kondusif;

  Diperlukan dukungan kebijakan dari Pemerintah Pusat agar memberikan peluang kepada daerah untuk melaksanakan Diklat PPNS di daerah sebagai salah satu persyaratan dalam Rekruitmen PPNS.

e. Bidang Urusan Sosial

Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota diukur dalam 5 (lima) indikator pelayanan dasar yang akan dicapai secara bertahap. Strategi dan arah kebijakan yang dituangkan provinsi Sulawesi Selatan memiliki korelasi yang sangat jelas dengan 5 (lima) indikator SPM daerah provinsi yang akan dicapai secara bertahap berdasarkan Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 9 Tahun 2018, yang meliputi:

1. Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Dalam Panti
2. Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam Panti Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Dalam Panti
3. Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Dalam Panti
4. Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Bagi Korban Bencana Daerah Provinsi

- **Permasalahan**

Mencermati capaian penerapan SPM Bidang Sosial pada Tahun 2021 khususnya semester II (dua) ada pada tabel data realisasi kinerja SPM Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan, hal yang dapat disimpulkan yakni adanya

masa pandemi Covid-19 masih menjadi hambatan dalam pemberian pelayanan pada Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) di dalam panti. Keadaan pandemi menyebabkan adanya refocusing anggaran yang kemudian berdampak pada anggaran unit pelaksana teknis Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan dan pada seksi yang menangani PPKS di dalam panti. Hal ini menyebabkan kegiatan pelayanan dan rehabilitasi di dalam panti menjadi terbatas terkait adanya keadaan pandemi Covid-19.

- **Tindak lanjut/Solusi**

Sebagai tindak lanjut dari permasalahan tersebut diatas upaya dalam melayani Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial di dalam panti adalah melakukan pembatasan jumlah PPKS di dalam panti yaitu satu angkatan dalam satu tahun pada beberapa panti. Hal ini dilakukan agar pelayanan dapat dilakukan secara maksimal namun tetap mematuhi protokol kesehatan terkait keadaan pandemi Covid-19. Selain itu, bantuan sandang dan pangan dari kementerian social, pihak luar atau CSR juga disalurkan ke beberapa panti untuk memenuhi kebutuhan dasar PPKS yang di dalam panti. Adapun gelandangan dan pengemis yang tidak mendapatkan bantuan di dalam panti, Dinas Sosial melakukan tindak lanjut dengan kegiatan razia akan didata kemudian dilakukan verifikasi dan validasi kepesertaan penerima bantuan social. Apabila sudah terdaftar sebagai penerima bansos, maka pendamping penerima bansos akan diarahkan untuk memberikan penguatan pada gelandangan dan pengemis tersebut. Apabila belum terdaftar sebagai penerima bansos, maka akan diusulkan untuk menjadi penerima bansos jika memenuhi persyaratan sebagai penerima bansos.

3. Evaluasi Capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Suistanable Development Goals (TPB/SDGs)

Kinerja pelaksanaan TPB/SDGs diindikasikan dengan pencapaian atas target pada masing-masing indikator di dalam setiap tujuan. Provinsi Sulawesi Selatan menentukan target sebanyak 193 Indikator yang termuat didalam Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Tahun 2019-2023 dengan Evaluasi Capaian Berdasarkan Target RAD SDGS Tahun 2021 yaitu 116 Indikator (60.1%) telah tercapai target, 45 Indkator (21.32%) belum tercapai target, 15 Indikator (7.77%) capaian yang membaik, dan 17 Indikator (8.81%) yang datanya tidak tersedia. Terjadi peningkatan indicator yang tercapai sebesar 4 Indikator (3,1%) dibanding tahun 2020 yang hanya mencapai 112 Indikator (57%). Hal ini menunjukkan kondisi pencapaian pada indikator TPB/SDGs pada tahun 2021 walapun tidak lepas dari pengaruh pandemi COVID-19 yang telah melanda dunia sejak awal tahun 2020 masih dapat memberikan trend positif pada pencapaian indikator. Beberapa kebijakan yang mendukung sebagai respon atas penyebaran COVID-19 seperti Pelaksanaan Mobile vaccinator yang dilaksanakan sepanjang tahun 2021. Selain itu, beberapa dukungan data dari BPS yang tidak dapat dipenuhi karena tidak melakukan survei akibat COVID-19 pada tahun 2020 dapat disediakan pada tahun 2021.

Gambar II. 6
Kinerja Pencapaian TPB/SDGs Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021

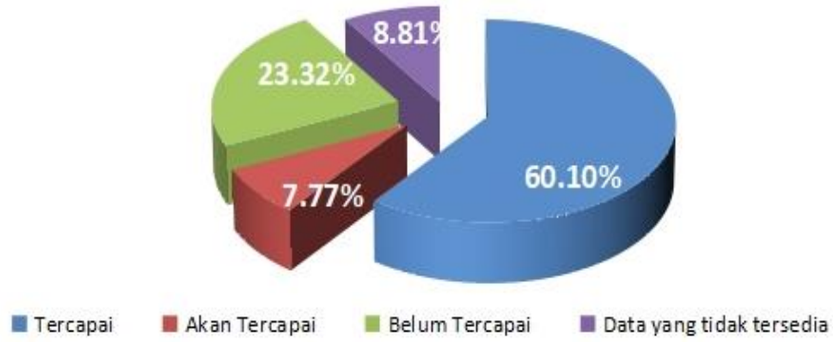

Sumber: Bappelitbangda Prov.sulsel (2021)

Pilar Pembangunan Sosial dengan 5 tujuan mencakup sebanyak 82 indikator yang di dalamnya tercatat sebanyak 54 indikator telah mencapai target. Sebanyak 9 indikator tercatat akan mencapai target/membaik dibandingkan pencapaian pada periode sebelumnya. Indikator yang masih memerlukan perhatian khusus karena pencapaiannya baik saat ini maupun periode sebelumnya masih di bawah target dan tercatat sebanyak 26 indikator (13,5%). Dalah satu capaian pada pilar pembangunan sosial ialah tujuan 2 Prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita tercatat membaik dari 23% (E-PPGBM,2020) menurun hingga mencapai angka 19% (SSGBI, 2021).

Pilar Pembangunan Ekonomi dengan 5 tujuan mencakup sebanyak 47 indikator. Pada pilar tersebut, tercatat sebanyak 29 indikator (15,0%) telah mencapai target. Sebanyak 2 indikator (1,0%) tercatat akan mencapai target/membaik dibandingkan pencapaian pada periode sebelumnya. Indikator yang masih memerlukan perhatian khusus karena pencapaiannya baik saat ini maupun periode sebelumnya masih di bawah target dan tercatat sebanyak 15 indikator (7,8%).

Pilar Pembangunan Lingkungan dengan 6 tujuan mencakup sebanyak 48 indikator. Pada pilar tersebut, tercatat sebanyak 28 indikator (14,5%) telah mencapai target. Sebanyak 15 indikator (10,4%) tercatat akan mencapai target/membaik dibandingkan pencapaian pada periode sebelumnya. Indikator yang masih memerlukan perhatian khusus karena pencapaiannya baik saat ini maupun periode sebelumnya masih di bawah target dan tercatat sebanyak 1 indikator (11,9%). Pilar Pembangunan Hukum dan Tata Kelola dengan 1 tujuan mencakup sebanyak 15 indikator. Pada pilar tersebut, tercatat sebanyak 3 indikator (1,6%) telah mencapai target. Indikator yang masih memerlukan perhatian khusus karena pencapaiannya baik saat ini maupun periode sebelumnya masih di bawah target dan tercatat sebanyak 5 indikator (2,6%).

Tabel II.394.
Kinerja Pencapaian TPB/SDGs Berdasarkan 4 Pilar Pembanguanan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021

Pilar	Jumlah Indikator	Tercapai	%	Belum Tercapai	%	Akan Tercapai	%	Data Tidak Tersedia	%
Pilar sosial	83	50	25.9%	26	13.5 %	1	0.5%	6	3.1%
Pilar Ekonomi	47	29	15.0%	15	7.8%	2	1.0%	1	0.5%
Pilar Lingkungan	48	28	14.5%	15	7.8%	1	0.5%	4	2.1%
Pilar Kelembagaan	15	3	1.6%	5	2.6%	0	0.0%	7	3.6%
	193	**110**		**61**		**4**		**18**	

Sumber: Bappelitbangda Prov. Sulsel (Data diolah), 2021

Ada beberapa permasalahan pada capaian indikator di tahun 2021. Pada Tujuan 1 Tanpa Kemiskinan, Persentase penyandang disabilitas yang miskin dan rentan yang terpenuhi hak dasarnya dan inklusivitas mengalami permasalahan akibat tidak adanya lembaga/panti pemerintah (UPTD)/Pusat Pelayanan Sosial yang khusus menangani Penyandang Disabilitas di bawah naungan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan. Yang ada hanyalah Lembaga swasta dan swadaya masyarakat dimana lembaga tersebut tidak bersifat terikat dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, hanya sebagai mitra kerja. Hal ini menyebabkan pemerintah tidak bisa membuat program khusus ataupun melaksanakan program kegiatan pemerintah yang berkaitan dengan pelayanan kesejahteraan sosial bagi penyandang disabilitas khususnya pemenuhan kebutuhan dasar. Selain itu Adanya regulasi/aturan yang membatasi pemberian bantuan kepada PPKS, dimana Pemerintah Provinsi hanya boleh memberikan bantuan kepada PPKS yang berada di dalam panti/lembaga kesejahteraan sosial .

Tujuan 2 Tanpa Kelaparan, Indikator Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita juga belum tercapai. Penyebab Belum Tercapainya target Stunting yaitu pada Intervensi Sensitif Belum terintegrasinya Penanganan Stunting dengan Penanggulangan Kemiskinan, Perbaikan Lingkungan/Sarana air bersih dan untuk Intervensi Spesifik Terdapat Beberapa cakupan Indikator yang belum mencapai target seperti Cakupan Remaja Puteri yang mendapat TTD (48%), Jumlah balita yang datang ke Posyandu (D/S) 71%, Masih tingginya angka BBLR (4%) penanggulangan underweight di Kab/ Kota Lainnya Masih rendahnya tingkat pengetahuan masyarakat tentang pola pengasuhan anak, pola pemberian makanan bayi dan anak, higiene sanitasi lingkungan, pemanfaatan layanan kesehatan. Upaya percepatan pencegahan dan penurunan stunting, membutuhkan keterpaduan penyelenggaraan intervensi gizi pada lokasi dan kelompok sasaran perioritas. Dalam mencapai keterpaduan/integrasi tersebut, diperlukan penyelarasan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan dan pengendalian kegiatan lintas sektor antara tingkat pemerintah pusat, pemerintah povinsi, pemerintah kabupaten/kota dan masyarakat.

Untuk menjamin terlaksananya keterpaduan tersebut, maka pada tahun 2018 Kementerian Dalam Negeri melalui Ditjen Bina Bangda kemudian merumuskan Delapan Program Aksi Konvergensi Penurunan Stunting Terintegrasi yang wajib diterapkan oleh semua kabupaten/kota lokus. Salah satu program yang mendukung Penurunan Angka Stunting di Provinsi Sulawesi Selatan ialah Program Gammara'na (Gerakan Masyarakat Mencegah Dan Memberantas Stunting). Program ini bertujuan untuk melaksanakan kegiatan Pencegahan Stunting Melalui Pendampingan Keluarga Khususnya Sasaran 1000 Hari Pertama Kehidupan.

Untuk penajaman penjelasan Tujuan 3 Terkait Kesehatan dan, indikator jumlah penduduk yang dicakup asuransi kesehatan atau sistem kesehatan masyarakat per 1000 penduduk tidak dapat tercapai pada tahun 2021 akibat Sosialisasi BPJS Kesehatan kepada masyarakat belum optimal. Padat tujuan 4 Pendidikan Berkualitas, Masih banyak siswa pendidikan menengah yang berusia lebih atau kurang dari 16-18 Tahun, antara lain disebabkan karena masuk sekolah dasar sebelum waktunya, Tinggal kelas, penyebab lainnya yaitu siswa putus sekolah Target tercapai namun pada dasarnya angka APM masih rendah

Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR) pada Tujuan 5 juga mengalami hambatan dalam pelaksanaannya. Yang menjadi factor utama terhambatnya indikator ini ialah masih cukup tingginya pernikahan Anak (Usia Dini) di 16 Kab/Kota di Sulawesi Selatan. Salah satu rencana tindak lanjut dalam menyikai permasalahan ini ialh dengan melakukan Kerja Sama dengan Kementerian Agama terkait Konseling Pranika tentang tidak boleh melakukan pernikahan di usia dini.

Untuk Pencapaian Tujuan 8 Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi mengalami beberapa hambatan dalam pelaksanaannya. Ketersediaan lapangan kerja yang terbatas, rendahnya tingkat pendidikan penduduk yang bekerja yang didominasi tingkat pendidikan SMP kebawah sebesar 60,16 %, adanya PHK terhadap pekerja formal tidak adanya kesesuaian ketrampilan antara pencari kerja dan kualiikasi yang diperlukan perusahaan memicu rendahnya penyerapan tenaga kerja di sektor formal, dan pada ahirnya mereka hanya terserap ke pekerjaan informal mempengaruhi pencapaian indikator Persentase tenaga kerja formal

2.7 Evaluasi Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD 2021

1. Evaluasi Pelaksanaan RPJMD tahun 2021.

Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan melaksanakan pengendalian dan evaluasi rencana pembangunan daerah dan rencana perangkat daerah sesuai dengan tahapan dan tatacara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah adalah suatu proses pemantauan dan supervisi dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan serta menilai hasil realisasi kinerja dan

keuangan untuk memastikan tercapainya target secara ekonomis, efisien, dan efektif, ini bertujuan antara lain:

1. untuk mewujudkan konsistensi antara kebijakan dengan pelaksanaan dan hasil rencana pembangunan Daerah;
2. serta konsistensi antara RKPD dengan RPJMD; dan
3. kesesuaian antara capaian pembangunan Daerah dengan indikator kinerja yang telah ditetapkan.

A. Konsistensi Program, Kegiatan dan Sub-Kegiatan

Berikut ini disajikan tabel yang menggambarkan konsistensi program, Kegiatan dan Sub-kegiatan antara RKPD dengan RPJMD, RKPD dengan APBD.

Tabel II.395.
Konsistensi Program RPJMD Kedalam RKPD dan APBD

No.	Perangkat Daerah	Jumlah Program				Program Yang Sama				Program Tidak Sama			
		RPJMD	RKPD	Renja - PD	APBD	RKPD & RPJMD	Renja & RKPD	APBD & RKPD	APBD & RPJMD	RKPD & RPJMD	Renja & RKPD	APBD & RKPD	APBD & RPJMD
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*
1	Dinas Pendidikan	6	6	6	6	6	6	6	6	-	-	-	-
2	Dinas Kesehatan	5	4	4	3	4	4	3	3	1	-	1	2
3	UPT Transfusi Darah	3	2	2	2	2	2	2	2	1	-	-	1
4	UPT Pelatihan Kesehatan	3	3	3	3	3	3	3	3	-	-	-	-
5	UPT RSK Gigi dan Mulut	4	2	2	2	2	2	2	2	2	-	-	2
6	Rumah Sakit Umum Daerah Labuang Baji	3	3	3	3	3	3	3	3	-	-	-	-
7	Rumah Sakit Umum Daerah Haji Makassar	3	2	2	2	2	2	2	2	1	-	-	1
8	Rumah Sakit Khusus Daerah	3	2	2	2	2	2	2	2	1	-	-	1
9	Rumah Sakit Khusus Ibu Dan Anak Pertiwi	4	3	3	3	3	3	3	3	1	-	-	1
10	Rumah Sakit Khusus Daerah Ibu dan Anak Sitti Fatimah	3	3	3	2	3	3	2	2	-	-	1	1
11	Rumah Sakit Umum Sayang Rakyat	3	3	3	3	3	3	3	3	-	-	-	-
12	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	11	10	10	10	10	10	10	10	1	-	-	1
13	Dinas Perumahan, Kawasan	8	8	8	8	8	8	8	8	-	-	-	-

No.	Perangkat Daerah	Jumlah Program				Program Yang Sama				Program Tidak Sama			
		RPJMD	RKPD	Renja - PD	APBD	RKPD & RPJMD	Renja & RKPD	APBD & RKPD	APBD & RPJMD	RKPD & RPJMD	Renja & RKPD	APBD & RKPD	APBD & RPJMD
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*
	Permukiman dan Pertanahan												
14	Satuan Polisi Pamong Praja	4	4	4	4	4	4	4	4	-	-	-	-
15	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2	2	2	2	2	2	2	2	-	-	-	-
16	Dinas Sosial	7	7	7	7	7	7	7	7	-	-	-	-
17	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	9	8	8	8	8	8	8	8	1	-	-	1
18	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	10	10	10	10	10	10	10	10	-	-	-	-
19	Dinas Ketahanan Pangan	5	4	4	4	4	4	4	4	1	-	-	1
20	Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup	11	10	10	10	10	10	10	10	1	-	-	1
21	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	5	5	5	5	5	5	5	5	-	-	-	-
22	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	5	5	5	5	5	5	5	5	-	-	-	-
23	Dinas Perhubungan	4	4	4	4	4	4	4	4	-	-	-	-
24	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian	5	5	5	5	5	5	5	5	-	-	-	-
25	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	8	8	8	8	8	8	8	8	-	-	-	-
26	Dinas Penanaman Modal dan	6	6	6	6	6	6	6	6	-	-	-	-

No.	Perangkat Daerah	Jumlah Program				Program Yang Sama				Program Tidak Sama			
		RPJMD	RKPD	Renja - PD	APBD	RKPD & RPJMD	Renja & RKPD	APBD & RKPD	APBD & RPJMD	RKPD & RPJMD	Renja & RKPD	APBD & RKPD	APBD & RPJMD
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*
	Pelayanan Terpadu Satu Pintu												
27	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	4	4	4	4	4	4	4	4	-	-	-	-
28	Dinas Kebudayaan Dan Kepariwisataan	10	9	9	8	9	9	8	8	1	-	1	2
29	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	6	4	4	4	4	4	4	4	2	-	-	2
30	Dinas Kelautan dan Perikanan	6	6	6	6	6	6	6	6	-	-	-	-
31	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	6	6	6	6	6	6	6	6	-	-	-	-
32	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	5	5	5	5	5	5	5	5	-	-	-	-
33	Dinas Kehutanan	5	5	5	5	5	5	5	5	-	-	-	-
34	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	5	5	5	5	5	5	5	5	-	-	-	-
35	Dinas Perdagangan	7	7	7	7	7	7	7	7	-	-	-	-
36	Dinas Perindustrian	4	4	4	4	4	4	4	4	-	-	-	-
37	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	2	2	2	2	2	2	2	2	-	-	-	-
38	Biro Kesejahteraan Rakyat	2	2	2	2	2	2	2	2	-	-	-	-
39	Biro Hukum	2	2	2	2	2	2	2	2	-	-	-	-
40	Biro Organisasi	2	2	2	2	2	2	2	2	-	-	-	-

No.	Perangkat Daerah	Jumlah Program				Program Yang Sama				Program Tidak Sama			
		RPJMD	RKPD	Renja - PD	APBD	RKPD & RPJMD	Renja & RKPD	APBD & RKPD	APBD & RPJMD	RKPD & RPJMD	Renja & RKPD	APBD & RKPD	APBD & RPJMD
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*
41	Biro Umum	1	1	1	1	1	1	1	1	-	-	-	-
42	Biro Administrasi Pimpinan	1	1	1	1	1	1	1	1	-	-	-	-
43	Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan	3	3	3	3	3	3	3	3	-	-	-	-
44	Biro Pengadaan Barang/Jasa	2	2	2	2	2	2	2	2	-	-	-	-
45	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	2	2	2	2	2	2	2	2	-	-	-	-
46	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	4	4	4	4	4	4	4	4	-	-	-	-
47	Badan Keuangan dan Aset Daerah	3	3	3	3	3	3	3	3	-	-	-	-
48	Badan Pendapatan Daerah	3	3	3	3	3	3	3	3	-	-	-	-
49	Badan Kepegawaian Daerah	2	2	2	2	2	2	2	2	-	-	-	-
50	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	2	2	2	2	2	2	2	2	-	-	-	-
51	Badan Penghubung Daerah	2	2	2	2	2	2	2	2	-	-	-	-
52	Inspektorat Provinsi Sulawesi Selatan	3	3	3	3	3	3	3	3	-	-	-	-
53	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	6	6	6	6	6	6	6	6	-	-	-	-
	Jumlah	**240**	**226**	**226**	**223**	**226**	**226**	**223**	**223**	**14**	**-**	**3**	**17**

Sumber : Bappelitbangda Prov. Sulsel, Tahun 2022

Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan konsistensi penjabaran program RPJMD ke dalam RKPD dan APBD antara lain sebagai berikut:

1. Kesesuaian program RPJMD dan RKPD
   a. Jumlah rencana program dalam RPJMD yang akan dilaksanakan pada tahun 2021 adalah 240 program (jumlah pada kolom 3), dan jumlah program dalam RKPD Tahun 2021 juga berjumlah 226 program (jumlah pada kolom 4).
   b. Antara dokumen RPJMD dan RKPD terdapat selisih 14 program diantara kedua dokumen tersebut**.**
2. Kesesuaian program RKPD dan Renja-PD
   a. Jumlah rencana program dalam RKPD adalah 226 program (jumlah pada kolom 4), dan jumlah program dalam Renja-PD adalah 226 program (jumlah pada kolom 5).
   b. Antara dokumen RKPD dan Renja-PD sudah **konsisten.**
3. Kesesuaian program RKPD dan APBD
   a. Jumlah rencana program dalam RKPD adalah 226 program (jumlah pada kolom 4), sedangkan jumlah program dalam APBD adalah 223 program (jumlah pada kolom 6). Untuk kesesuaian program yang sama antara RKPD dan APBD sejumlah 223 program namun, dari sejumlah program dalam RKPD dan APBD tersebut secara total jumlah terdapat selisih 3 yang tidak sama antara jumlah APBD dan RPKD (jumlah pada kolom 13).
   b. Program yang tidak sesuai tersebut seluruhnya adalah program yang ada di RKPD namun tidak terdapat dalam APBD.

   Konsistensi program antara RKPD dan APBD tersebut di atas dapat digambarkan sebagai berikut:

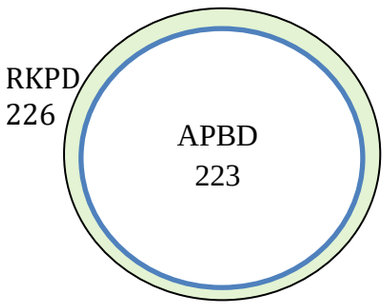

4. Kesesuaian program RPJMD dan APBD
   a. Jumlah rencana program dalam RPJMD yang akan dilaksanakan pada tahun 2021 adalah 240 program, sedangkan jumlah program dalam APBD adalah 223 program (kolom 10). Dengan demikian terdapat 17 program yang tidak sesuai antara kedua dokumen (jumlah pada kolom 14).
   b. Seluruh program yang tidak sesuai antara kedua dokumen tersebut, merupakan program RPJMD yang tidak dianggarkan dalam APBD.

   Konsistensi program antara RJPMD dan APBD tersebut di atas dapat digambarkan sebagai berikut:

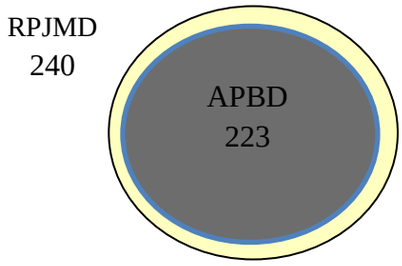

Tingkat kesesuaian program dan kegiatan RKPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021 dengan dokumen lainnya digambarkan dalam grafik sebagai berikut:

Grafik II. 32
Tingkat Kesesuaian Program dan Kegiatan
RKPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021

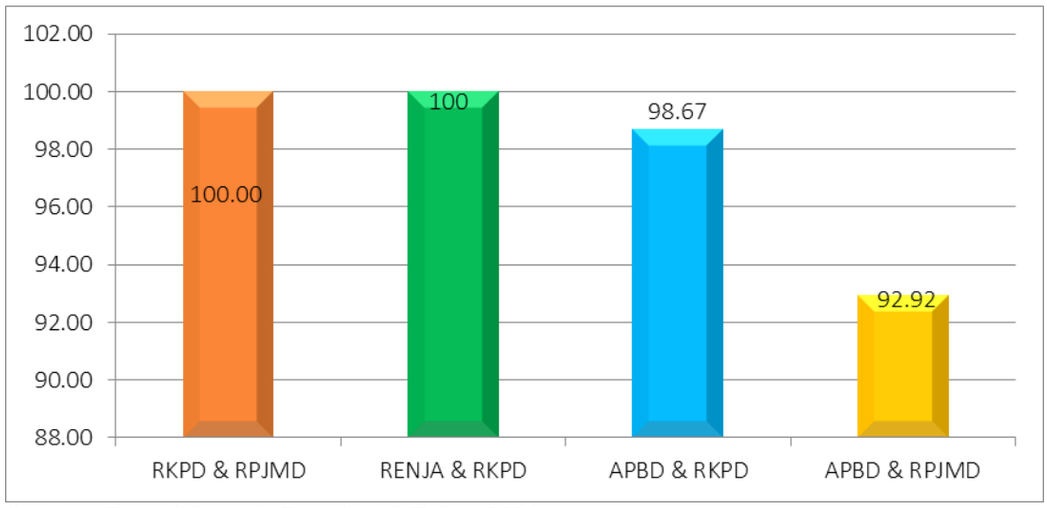

Sumber : Bappelitbangda Prov. Sulsel, Tahun 2021

Dari gambar diatas dapat dilihat bahwa penjabaran jumlah program RPJMD ke dalam RKPD serta ke Renja OPD sudah konsisten. Namun demikian, dalam penjabaran program RKPD ke dalam APBD hanya sebesar 98,67 Persen hal ini disebabkan terdapat selisih lebih 3 program sedangkan Penjabaran RPJMD kedalam APBD masih belum mencapai 100%, perbedaan tersenut karena terdapat beberapa program tidak menddapatkan alokasi Anggaran ynag sisebabkan oleh kemampuan keuangan daerah yang terbatas.

Menjadi hal penting yang termuat dalam RPJMD adalah program pembangunan daerah. Program tersebut sebagai pedoman perangkat daerah dalam menyusun kegiatan dalam Renstra-PD. Kegiatan dalam Renstra-PD menjadi pedoman perangkat daerah dalam menyusun Renja-PD. Selanjutnya kegiatan dalam Renja-PD menjadi acuan dalam penyusunan kegiatan dalam RKPD yang kemudian dijadikan sebagai dasar penyusunan kegiatan pada KUA dan PPAS dalam rangka penyusunan R-APBD untuk ditetapkan menjadi kegiatan dalam APBD dengan Peraturan Daerah. Adapun gambaran konsistensi dan pelaksanaan kegiatan RKPD sebagai berikut:

Tabel II.396.
Konsistensi dan Pelaksanaan Kegiatan RKPD

No.	Perangkat Daerah	Jumlah Kegiatan			Kegiatan Yang Sama			Kegiatan Tidak Sama		
		RKPD	RENJA	APBD	Renja & RKPD	APBD & RKPD	RENJA & APBD	Renja & RKPD	APBD & RKPD	RENJA & APBD
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*
1	Dinas Pendidikan	15	15	15	15	15	15	0	0	0
2	Dinas Kesehatan	17	17	13	17	13	13	0	4	4
3	UPT Transfusi Darah	7	7	7	7	7	7	0	0	0
4	UPT Pelatihan Kesehatan	4	4	4	4	4	4	0	0	0
5	UPT RSK Gigi dan Mulut	2	2	2	2	2	2	0	0	0
6	Rumah Sakit Umum Daerah Labuang Baji	12	12	7	7	7	7	0	5	5
7	Rumah Sakit Umum Daerah Haji Makassar	3	3	3	3	3	3	0	0	0
8	Rumah Sakit Khusus Daerah	4	4	4	4	4	4	0	0	0
9	Rumah Sakit Khusus Ibu Dan Anak Pertiwi	5	5	5	5	5	5	0	0	0
10	Rumah Sakit Khusus Daerah Ibu dan Anak Sitti Fatimah	6	6	4	6	4	4	0	2	2
11	Rumah Sakit Umum Sayang Rakyat	5	5	5	5	5	5	0	0	0
12	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	24	24	24	24	24	24	0	0	0
13	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	17	17	17	17	17	17	0	0	0
14	Satuan Polisi Pamong Praja	14	14	14	14	14	14	0	0	0
15	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	10	10	10	10	10	10	0	0	0
16	Dinas Sosial	18	18	17	18	17	17	0	1	1
17	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	18	18	18	18	18	18	0	0	0
18	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	20	20	20	20	20	20	0	0	0
19	Dinas Ketahanan Pangan	12	12	12	12	12	12	0	0	0
20	Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup	16	16	15	16	15	15	0	1	1
21	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	17	17	17	17	17	17	0	0	0
22	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	10	10	10	10	10	10	0	0	0
23	Dinas Perhubungan	18	18	18	18	18	18	0	0	0
24	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian	9	9	9	9	9	9	0	0	0
25	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	17	17	16	17	16	16	0	1	1
26	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	13	13	13	13	13	13	0	0	0
27	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	17	17	17	17	17	17	0	0	0
28	Dinas Kebudayaan Dan Kepariwisataan	16	16	16	16	16	16	0	0	0
29	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	15	15	15	15	15	15	0	0	0
30	Dinas Kelautan dan Perikanan	15	15	15	15	15	15	0	0	0
31	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	16	16	16	16	16	16	0	0	0
32	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	9	9	9	9	9	9	0	0	0
33	Dinas Kehutanan	14	14	14	14	14	14	0	0	0
34	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	14	14	14	14	14	14	0	0	0
35	Dinas Perdagangan	14	14	14	14	14	14	0	0	0
36	Dinas Perindustrian	10	10	9	10	9	9	0	1	1
37	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	8	8	7	8	7	7	0	1	1
38	Biro Kesejahteraan Rakyat	9	9	9	9	9	9	0	0	0
39	Biro Hukum	8	8	7	8	7	7	0	1	1
40	Biro Organisasi	10	10	10	10	10	10	0	0	0
41	Biro Umum	10	10	10	10	10	10	0	0	0
42	Biro Administrasi Pimpinan	8	8	8	8	8	8	0	0	0

No.	Perangkat Daerah	Jumlah Kegiatan			Kegiatan Yang Sama			Kegiatan Tidak Sama		
		RKPD	RENJA	APBD	Renja & RKPD	APBD & RKPD	RENJA & APBD	Renja & RKPD	APBD & RKPD	RENJA & APBD
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*
43	Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan	9	9	9	9	9	9	0	0	0
44	Biro Pengadaan Barang/Jasa	7	7	7	7	7	7	0	0	0
45	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	18	18	18	18	18	18	0	0	0
46	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	18	18	18	18	18	18	0	0	0
47	Badan Keuangan dan Aset Daerah	14	14	14	14	14	14	0	0	0
48	Badan Pendapatan Daerah	12	12	12	12	12	12	0	0	0
49	Badan Kepegawaian Daerah	12	12	12	12	12	12	0	0	0
50	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	9	9	9	9	9	9	0	0	0
51	Badan Penghubung Daerah	8	8	8	8	8	8	0	0	0
52	Inspektorat Provinsi Sulawesi Selatan	11	11	11	11	11	11	0	0	0
53	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	13	13	13	13	13	13	0	0	0
	Jumlah	**637**	**637**	**620**	**632**	**620**	**620**	**0**	**17**	**17**

Sumber : Bappelitbangda Prov. Sulsel, Tahun 2022

Berdasarkan data yang tercantum dalam tabel di atas dapat dijelaskan konsistensi dan pelaksanaan kegiatan RKPD antara lain sebagai berikut:

1. RKPD dan Renja-PD.
   a. Kegiatan dalam RKPD adalah sejumlah 637 (jumlah pada kolom 3) dan Renja-PD adalah sejumlah 637 (jumlah pada kolom 4). Jumlah kegiatan untuk kedua dokumen konsisten adalah 637 kegiatan. (jumlah pada kolom 6), sedangkan kegiatan yang tidak sesuai adalah 0 (jumlah pada kolom 8).
   b. Untuk jumlah kegiatan Antara RKPD dan Renja-PD telah sesuai.
   c. Persentase konsistensi kegiatan RKPD dan Renja-PD adalah sebesar 100 %.

2. RKPD dan APBD.
   a. Kegiatan dalam RKPD adalah sejumlah 637 (jumlah pada kolom 3) dan APBD adalah sejumlah 620 (jumlah pada kolom 5). Jumlah kegiatan yang sesuai antara kedua dokumen adalah 620 (jumlah pada kolom 7), sedangkan kegiatan yang tidak sesuai adalah 17 (jumlah pada kolom 10).
   b. Dari 10 kegiatan yang tidak sesuai antara RKPD dan APBD tersebut adalah kegiatan RKPD yang tidak dianggarkan dalam APBD demikian pula sebaliknya.

Persentase konsistensi kegiatan RKPD dan APBD adalah sebesar 97.33%. Ketidaksesuaian kegiatan antara RKPD dan APBD tersebut disebabkan antara lain dukungan anggaran dalam pelaksaan kegiatan yang masih kurang.

Untuk pelaksanaan RKPD tahun 2021 sudah mengacu kepada permendagri 90 tahun 2020 yang dalam pelaksanaan penjabarannya memuat rincian sampai pada sub kegiatan. Sebagai bentuk dari pelaksanaan evaluasi terkait konsistensi pelaksanaan sub kegiatan pada RKPD terhadap Renja

Perangkat daerah, RKPD terhadap APBD. Adapun gambaran konsistensi dan pelaksanaan sub kegiatan RKPD sebagai berikut:

Tabel II.397.
Konsistensi dan Pelaksanaan Sub Kegiatan RKPD

No. Urut	Perangkat Daerah	Jumlah SubKegiatan			SubKegiatan Yang Sama			SubKegiatan Tidak Sama		
		RKPD	RENJA	APBD	Renja & RKPD	APBD & RKPD	RENJA & APBD	Renja & RKPD	APBD & RKPD	RENJA & APBD
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*
1	Dinas Pendidikan	106	106	106	106	106	106	0	0	0
2	Dinas Kesehatan	40	40	40	40	40	40	0	0	0
3	UPT Transfusi Darah	20	20	20	20	20	20	0	0	0
4	UPT Pelatihan Kesehatan	4	4	4	4	4	4	0	0	0
5	UPT RSK Gigi dan Mulut	3	3	3	3	3	3	0	0	0
6	Rumah Sakit Umum Daerah Labuang Baji	9	9	9	9	9	9	0	0	0
7	Rumah Sakit Umum Daerah Haji Makassar	5	5	5	5	5	5	0	0	0
8	Rumah Sakit Khusus Daerah	5	5	5	5	5	5	0	0	0
9	Rumah Sakit Khusus Ibu Dan Anak Pertiwi	6	6	6	6	6	6	0	0	0
10	Rumah Sakit Khusus Daerah Ibu dan Anak Sitti Fatimah	6	6	6	6	6	6	0	0	0
11	Rumah Sakit Umum Sayang Rakyat	7	7	7	7	7	7	0	0	0
12	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	88	88	91	88	88	88	0	3	3
13	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	57	57	57	57	57	57	0	0	0
14	Satuan Polisi Pamong Praja	45	45	45	45	45	45	0	0	0
15	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	28	28	28	28	28	28	0	0	0
16	Dinas Sosial	52	52	52	52	52	52	0	0	0
17	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	32	32	32	32	32	32	0	0	0
18	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	38	38	39	38	38	38	0	1	1
19	Dinas Ketahanan Pangan	38	38	39	38	38	38	0	1	1
20	Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup	30	30	30	30	30	30	0	0	0
21	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	43	43	43	43	43	43	0	0	0
22	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	29	29	29	29	29	29	0	0	0
23	Dinas Perhubungan	39	39	44	39	39	39	0	5	5
24	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian	29	29	29	29	29	29	0	0	0
25	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	28	28	29	28	28	28	0	1	1
26	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	35	35	35	35	35	35	0	0	0
27	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	43	43	51	43	43	43	0	8	8
28	Dinas Kebudayaan Dan Kepariwisataan	36	36	36	36	36	36	0	0	0
29	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	40	40	40	40	40	40	0	0	0
30	Dinas Kelautan dan Perikanan	38	38	44	38	38	38	0	6	6
31	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	34	34	36	34	34	34	0	2	2
32	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	16	16	24	16	16	16	0	8	8
33	Dinas Kehutanan	27	27	29	27	27	27	0	2	2
34	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	34	34	35	34	34	34	0	1	1
35	Dinas Perdagangan	29	29	31	29	29	29	0	2	2
36	Dinas Perindustrian	30	30	30	30	30	30	0	0	0
37	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	17	17	17	17	17	17	0	0	0
38	Biro Kesejahteraan Rakyat	32	32	32	32	32	32	0	0	0
39	Biro Hukum	14	14	14	14	14	14	0	0	0
40	Biro Organisasi	31	31	31	31	31	31	0	0	0
41	Biro Umum	44	44	44	44	44	44	0	0	0
42	Biro Administrasi Pimpinan	21	21	21	21	21	21	0	0	0
43	Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan	10	10	13	10	10	10	0	3	3
44	Biro Pengadaan Barang/Jasa	17	17	17	17	17	17	0	0	0
45	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	80	80	80	80	80	80	0	0	0

No. Urut	Perangkat Daerah	Jumlah SubKegiatan			SubKegiatan Yang Sama			SubKegiatan Tidak Sama		
		RKPD	RENJA	APBD	Renja & RKPD	APBD & RKPD	RENJA & APBD	Renja & RKPD	APBD & RKPD	RENJA & APBD
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*
46	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	62	62	62	62	62	62	0	0	0
47	Badan Keuangan dan Aset Daerah	61	61	61	61	61	61	0	0	0
48	Badan Pendapatan Daerah	76	76	76	76	76	76	0	0	0
49	Badan Kepegawaian Daerah	78	78	78	78	78	78	0	0	0
50	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	34	34	35	34	34	34	0	1	1
51	Badan Penghubung Daerah	18	18	18	18	18	18	0	0	0
52	Inspektorat Provinsi Sulawesi Selatan	47	47	47	47	47	47	0	0	0
53	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	55	55	55	55	55	55	0	0	0
	Jumlah	**1846**	**1846**	**1890**	**1846**	**1846**	**1846**	**0**	**44**	**44**

Sumber : Bappelitbangda Prov. Sulsel, Tahun 2022

Berdasarkan data yang tercantum dalam table diatas, dapat dijelaskan konsistensi dan pelaksanaan sub kegiatan RKPD antara lain sebagai berikut:

1. RKPD dan Renja-PD.
   a. Sub Kegiatan dalam RKPD adalah sejumlah 1846 (jumlah pada kolom 3) dan Renja-PD adalah sejumlah 1846 (jumlah pada kolom 4). Jumlah kegiatan untuk kedua dokumen konsisten adalah 61846 (jumlah pada kolom 6), sedangkan kegiatan yang tidak sesuai adalah 0 (jumlah pada kolom 9).
   b. Untuk jumlah sub kegiatan Antara RKPD dan Renja-PD telah sesuai.
   c. Persentase konsistensi kegiatan RKPD dan Renja-PD adalah sebesar 100 %.
2. RKPD dan APBD.
   a. Sub Kegiatan dalam RKPD adalah sejumlah 1846 (jumlah pada kolom 3) dan APBD adalah sejumlah 1890 (jumlah pada kolom 5). Jumlah sub kegiatan yang sesuai antara kedua dokumen adalah 1890 (jumlah pada kolom 7), sedangkan sub kegiatan yang tidak sesuai adalah 44 (jumlah pada kolom 10).
   b. Dari 44 sub kegiatan yang tidak sesuai antara RKPD dan APBD tersebut adalah sub kegiatan pada RKPD yang tidak dianggarkan namun dalam APBD mendapatkan alokasi Anggaran.
   c. Persentase konsistensi kegiatan RKPD dan APBD adalah sebesar 102.38%. Ketidaksesuaian kegiatan antara RKPD dan APBD tersebut disebabkan antara lain dukungan alokasi anggaran dalam pelaksaan sub kegiatan.
3. Renja-PD dan APBD
   a. Sub Kegiatan dalam RKPD adalah sejumlah 1846 (jumlah pada kolom 3) dan APBD adalah sejumlah 1890 (jumlah pada kolom 5). Jumlah sub kegiatan yang sesuai antara kedua dokumen adalah 1846 (jumlah pada kolom 7), sedangkan sub kegiatan yang tidak sesuai adalah 44 (jumlah pada kolom 10).
   b. Dari 44 sub kegiatan yang tidak sesuai antara Renja-PD dan APBD tersebut adalah sub kegiatan pada RKPD yang tidak dianggarkan namun dalam APBD mendapatkan alokasi Anggaran.

B. Konsistensi Kerangka Pendanaan

Salah satu hal penting dalam muatan RPJMD dan RKPD adalah adanya kerangka pendanaan yang bersifat indikatif, yang menjadi pedoman dalam penyusunan anggaran dalam APBD. RKPD merupakan penjabaran RPJMD dan disusun dengan memperhatikan hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu. Oleh karena itu perbedaan pagu antara RPJMD dan RKPD dimungkinkan apabila kondisi keuangan daerah dan hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan kondisi yang berbeda dengan waktu yang diperhitungkan pada saat penyusunan RPJMD.

APBD disusun berpedoman pada KUA-PPAS yang dirumuskan berdasarkan RKPD setelah disepakati bersama antara pemerintah daerah dan DPRD. Oleh karena itu RPJMD sampai dengan APBD memiliki hubungan yang sangat terkait dalam pelaksanaan pembangunan daerah.

Penjabaran pendanaan belanja langsung dalam RPJMD ke dalam RKPD dan APBD selengkapnya pada setiap perangkat daerah adalah sebagaimana terlihat pada tabel berikut.

Tabel II.398.
Penjabaran Kerangka Pendanaan RPJMD kedalam RKPD dan APBD
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021 (DATA SEMENTARA)

No. Urut	Perangkat Daerah	Kerangka Pendanaan dan Anggaran OPD Tahun 2021							Selisih Kerangka Pendanaan dan Anggaran						
		RPJMD	RKPD		RENJA		APBD		RKPD & RPJMD	APBD & RKPD		RENJA & RKPD		APBD & RPJMD	
		Rp.	Rp.	% RPJMD	Rp.	% RKPD	Rp.	% RPJMD							
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*				*(5)*		*(6) = (4) - (3)*	*(7) = (6) - (4)*				*(8) = (6) - (3)*	
1	Dinas Pendidikan	3,011,008,288,182.0	3,011,008,288,182.0	100%	3,011,008,288,182.0	100%	2,868,375,647,496.0	95.26%	-	142,632,640,686.0	164%	-		142,632,640,686.0	164%
2	Dinas Kesehatan	143,517,014,342.0	142,632,014,342.0	99%	142,632,014,342.0	100%	104,526,906,078.0	72.83%	885,000,000	38,105,108,264.0	44%	-		38,990,108,264.0	45%
3	UPT Transfusi Darah	13,989,853,865.0	13,989,853,865.0	100%	13,989,853,865.0	100%	7,706,611,979.0	55.09%	-	6,283,241,886.0	7%	-		6,283,241,886.0	7%
4	UPT Pelatihan Kesehatan	5,101,435,396.0	3,372,365,396.0	66%	3,372,365,396.0	100%	6,579,165,435.0	128.97%	1,729,070,000	3,206,800,039.0	4%	-		1,477,730,039.0	2%
5	UPT RSK Gigi dan Mulut	21,077,914,000.0	21,077,914,000.0	100%	21,077,914,000.0	100%	19,788,854,325.0	93.88%	-	1,289,059,675.0	1%	-		1,289,059,675.0	1%
6	Rumah Sakit Umum Daerah Labuang Baji	168,298,584,128.0	168,298,584,128.0	100%	168,298,584,128.0	100%	191,684,331,875.0	113.90%	-	23,385,747,747.0	27%	-		23,385,747,747.0	27%
7	Rumah Sakit Umum Daerah Haji Makassar	115,242,533,153.0	115,242,533,153.0	100%	115,242,533,153.0	100%	131,133,524,338.0	113.79%	-	15,890,991,185.0	18%	-		15,890,991,185.0	18%
8	Rumah Sakit Khusus Daerah	174,127,303,570.0	174,127,303,570.0	100%	174,127,303,570.0	100%	202,667,325,211.0	116.39%	-	28,540,021,641.0	33%	-		28,540,021,641.0	33%
9	Rumah Sakit Khusus Ibu Dan Anak Pertiwi	42,410,160,472.0	42,410,160,472.0	100%	42,410,160,472.0	100%	39,837,103,528.0	93.93%	-	2,573,056,944.0	3%	-		2,573,056,944.0	3%
10	Rumah Sakit Khusus Daerah Ibu dan Anak Sitti Fatimah	45,170,194,821.0	45,170,194,821.0	100%	45,170,194,821.0	100%	42,552,013,362.0	94.20%	-	2,618,181,459.0	3%	-		2,618,181,459.0	3%
11	Rumah Sakit Umum Sayang Rakyat	55,943,415,870.0	55,943,415,870.0	100%	55,943,415,870.0	100%	81,331,715,817.0	145.38%	-	25,388,299,947.0	29%	-		25,388,299,947.0	29%
12	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	731,789,334,552.0	731,789,334,552.0	100%	731,789,334,552.0	100%	1,125,710,089,060.0	153.83%	-	393,920,754,508.0	454%	-		393,920,754,508.0	454%
13	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	44,692,920,587.0	44,692,920,587.0	100%	44,692,920,587.0	100%	43,888,738,652.0	98.20%	-	804,181,935.0	1%	-		804,181,935.0	1%
14	Satuan Polisi Pamong Praja	40,556,808,627.0	40,556,808,627.0	100%	40,556,808,627.0	100%	43,599,037,060.0	107.50%	-	3,042,228,433.0	4%	-		3,042,228,433.0	4%

No. Urut	Perangkat Daerah	Kerangka Pendanaan dan Anggaran OPD Tahun 2021							Selisih Kerangka Pendanaan dan Anggaran					
		RPJMD	RKPD		RENJA		APBD							
		Rp.	Rp.	% RPJMD	Rp.	% RKPD	Rp.	% RPJMD	RKPD & RPJMD	APBD & RKPD		RENJA & RKPD		APBD & RPJMD	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*				*(5)*		*(6) = (4) - (3)*	*(7) = (6) - (4)*				*(8) = (6) - (3)*	
15	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	58,817,532,738.0	58,817,532,738.0	100%	58,817,532,738.0	100%	16,514,212,592.0	28.08%	-	42,303,320,146.0	49%	-		42,303,320,146.0	49%
16	Dinas Sosial	75,762,670,138.0	75,762,670,138.0	100%	75,762,670,138.0	100%	52,329,179,821.0	69.07%	-	23,433,490,317.0	27%	-		23,433,490,317.0	27%
17	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	36,332,036,192.0	36,332,036,192.0	100%	36,332,036,192.0	100%	33,399,909,466.0	91.93%	-	2,932,126,726.0	3%	-		2,932,126,726.0	3%
18	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	15,146,290,986.0	15,146,290,986.0	100%	15,146,290,986.0	100%	16,869,669,826.0	111.38%	-	1,723,378,840.0	2%	-		1,723,378,840.0	2%
19	Dinas Ketahanan Pangan	48,405,412,500.0	48,405,412,500.0	100%	48,405,412,500.0	100%	39,679,817,307.0	81.97%	-	8,725,595,193.0	10%	-		8,725,595,193.0	10%
20	Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup	33,651,088,088.0	33,651,088,088.0	100%	33,651,088,088.0	100%	23,141,003,406.0	68.77%	-	10,510,084,682.0	12%	-		10,510,084,682.0	12%
21	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	13,983,006,024.0	13,983,006,024.0	100%	13,983,006,024.0	100%	12,774,280,991.0	91.36%	-	1,208,725,033.0	1%	-		1,208,725,033.0	1%
22	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	22,479,266,718.0	22,479,266,718.0	100%	22,479,266,718.0	100%	19,378,044,091.0	86.20%	-	3,101,222,627.0	4%	-		3,101,222,627.0	4%
23	Dinas Perhubungan	90,395,436,088.0	90,395,436,088.0	100%	90,395,436,088.0	100%	83,375,368,216.0	92.23%	-	7,020,067,872.0	8%	-		7,020,067,872.0	8%
24	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian	34,358,493,535.0	34,358,493,535.0	100%	34,358,493,535.0	100%	37,879,934,437.0	110.25%	-	3,521,440,902.0	4%	-		3,521,440,902.0	4%
25	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	29,754,169,410.0	29,754,169,410.0	100%	29,754,169,410.0	100%	24,707,364,602.0	83.04%	-	5,046,804,808.0	6%	-		5,046,804,808.0	6%
26	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	20,483,838,043.0	20,483,838,043.0	100%	20,483,838,043.0	100%	21,173,987,507.0	103.37%	-	690,149,464.0	1%	-		690,149,464.0	1%
27	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	60,540,327,992.0	60,540,327,992.0	100%	60,540,327,992.0	100%	67,170,911,536.0	110.95%	-	6,630,583,544.0	8%	-		6,630,583,544.0	8%
28	Dinas Kebudayaan Dan Kepariwisataan	80,756,910,147.0	80,756,910,147.0	100%	80,756,910,147.0	100%	50,256,553,238.0	62.23%	-	30,500,356,909.0	35%	-		30,500,356,909.0	35%
29	Dinas Perpustakaan dan			100%		100%		137.65%		18,916,637,871.0	22%			18,916,637,871.0	22%

No. Urut	Perangkat Daerah	Kerangka Pendanaan dan Anggaran OPD Tahun 2021							Selisih Kerangka Pendanaan dan Anggaran							
		RPJMD	RKPD		RENJA		APBD									
		Rp.	Rp.	% RPJMD	Rp.	% RKPD	Rp.	% RPJMD	RKPD & RPJMD	APBD & RKPD		RENJA & RKPD		APBD & RPJMD		
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*				*(5)*		*(6) = (4) - (3)*	*(7) = (6) - (4)*				*(8) = (6) - (3)*		
	Kearsipan	50,243,404,567.0	50,243,404,567.0		50,243,404,567.0		69,160,042,438.0		-			-				
30	Dinas Kelautan dan Perikanan	74,192,973,812.0	73,582,973,812.0	99%	73,582,973,812.0	100%	98,186,281,309.0	132.34%	610,000,000	24,603,307,497.0	28%	-		23,993,307,497.0		28%
31	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	86,770,454,264.0	86,770,454,264.0	100%	86,770,454,264.0	100%	56,273,052,397.0	64.85%	-	30,497,401,867.0	35%	-		30,497,401,867.0		35%
32	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	361,559,365,951.0	361,559,365,951.0	100%	361,559,365,951.0	100%	565,329,500,578.0	156.36%	-	203,770,134,627.0	235%	-		203,770,134,627.0		235%
33	Dinas Kehutanan	155,078,577,591.0	155,078,577,591.0	100%	155,078,577,591.0	100%	157,160,007,072.0	101.34%	-	2,081,429,481.0	2%	-		2,081,429,481.0		2%
34	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	38,262,590,855.0	38,245,270,855.0	100%	38,245,270,855.0	100%	26,267,071,388.0	68.65%	17,320,000	11,978,199,467.0	14%	-		11,995,519,467.0		14%
35	Dinas Perdagangan	19,932,998,613.0	19,932,998,613.0	100%	19,932,998,613.0	100%	16,963,914,524.0	85.10%	-	2,969,084,089.0	3%	-		2,969,084,089.0		3%
36	Dinas Perindustrian	39,042,061,829.0	39,042,061,829.0	100%	39,042,061,829.0	100%	29,013,904,499.0	74.31%	-	10,028,157,330.0	12%	-		10,028,157,330.0		12%
37	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	2,781,386,464.0	2,781,386,464.0	100%	2,781,386,464.0	100%	2,434,684,524.0	87.53%	-	346,701,940.0	0%	-		346,701,940.0		0%
38	Biro Kesejahteraan Rakyat	1,227,725,663,950.0	1,227,725,663,950.0	100%	1,227,725,663,950.0	100%	1,293,935,281,752.0	105.39%	-	66,209,617,802.0	76%	-		66,209,617,802.0		76%
39	Biro Hukum	21,791,999,964.0	21,791,999,964.0	100%	21,791,999,964.0	100%	2,573,118,072.0	11.81%	-	19,218,881,892.0	22%	-		19,218,881,892.0		22%
40	Biro Organisasi	8,089,399,368.0	8,089,399,368.0	100%	8,089,399,368.0	100%	5,373,374,586.0	66.42%	-	2,716,024,782.0	3%	-		2,716,024,782.0		3%
41	Biro Umum	195,136,096,220.0	195,136,096,220.0	100%	195,136,096,220.0	100%	174,857,920,727.0	89.61%	-	20,278,175,493.0	23%	-		20,278,175,493.0		23%
42	Biro Administrasi Pimpinan	7,766,057,154.0	7,766,057,154.0	100%	7,766,057,154.0	100%	5,957,761,493.0	76.72%	-	1,808,295,661.0	2%	-		1,808,295,661.0		2%
43	Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan	6,997,272,121.0	6,997,272,121.0	100%	6,997,272,121.0	100%	6,112,090,512.0	87.35%	-	885,181,609.0	1%	-		885,181,609.0		1%
44	Biro Pengadaan Barang/Jasa	3,361,223,584.0	3,361,223,584.0	100%	3,361,223,584.0	100%	3,603,303,064.0	107.20%	-	242,079,480.0	0%	-		242,079,480.0		0%
45	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	383,935,706,000.0	383,935,706,000.0	100%	383,935,706,000.0	100%	362,880,768,364.0	94.52%	-	21,054,937,636.0	24%	-		21,054,937,636.0		24%

No. Urut	Perangkat Daerah	Kerangka Pendanaan dan Anggaran OPD Tahun 2021							Selisih Kerangka Pendanaan dan Anggaran						
		RPJMD	RKPD		RENJA		APBD								
		Rp.	Rp.	% RPJMD	Rp.	% RKPD	Rp.	% RPJMD	RKPD & RPJMD	APBD & RKPD		RENJA & RKPD		APBD & RPJMD	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*				*(5)*		*(6) = (4) - (3)*	*(7) = (6) - (4)*				*(8) = (6) - (3)*	
46	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	74,380,012,022.2	74,380,012,022.2	100%	74,380,012,022.2	100%	63,355,617,212.0	85.18%	-	11,024,394,810.2	13%	-		11,024,394,810.2	13%
47	Badan Keuangan dan Aset Daerah	2,511,444,045,094.0	2,511,444,045,094.0	100%	2,511,444,045,094.0	100%	2,082,702,147,267.0	82.93%	-	428,741,897,827.0	494%	-		428,741,897,827.0	494%
48	Badan Pendapatan Daerah	173,375,438,152.0	173,375,438,152.0	100%	173,375,438,152.0	100%	167,700,870,948.0	96.73%	-	5,674,567,204.0	7%	-		5,674,567,204.0	7%
49	Badan Kepegawaian Daerah	29,392,668,514.0	29,392,668,514.0	100%	29,392,668,514.0	100%	34,734,189,216.0	118.17%	-	5,341,520,702.0	6%	-		5,341,520,702.0	6%
50	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	38,026,797,220.0	38,026,797,220.0	100%	38,026,797,220.0	100%	31,698,085,893.0	83.36%	-	6,328,711,327.0	7%	-		6,328,711,327.0	7%
51	Badan Penghubung Daerah	21,382,302,290.0	21,382,302,290.0	100%	21,382,302,290.0	100%	23,742,668,196.0	111.04%	-	2,360,365,906.0	3%	-		2,360,365,906.0	3%
52	Inspektorat Provinsi Sulawesi Selatan	59,839,062,993.0	59,839,062,993.0	100%	59,839,062,993.0	100%	50,622,314,579.0	84.60%	-	9,216,748,414.0	11%	-		9,216,748,414.0	11%
53	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	24,196,934,068.0	24,196,934,068.0	100%	24,196,934,068.0	100%	19,818,131,269.0	81.90%	-	4,378,802,799.0	5%	-		4,378,802,799.0	5%
	Jumlah	**10,848,496,732,824.2**	**10,845,255,342,824.2**	**100%**	**10,845,255,342,824.2**	**100%**	**10,758,487,403,131.0**	**99%**	**3,241,390,000.0**	**86,767,939,693.2**	**100%**	**-**	**0%**	**90,009,329,693.2**	**103.7%**

Sumber : Bappelitbangda Prov. Sulsel, Tahun 2021

Beberapa informasi yang diperoleh dengan melihat gambaran pada tabel di atas, antara lain adalah sebagai berikut:

a. RKPD terhadap RPJMD
   1) Jumlah pagu indikatif di dalam RKPD terdapat perbedaan dengan kerangka pendanaan RPJMD, dimana dalam RPJMD sebesar Rp. 10,848,496,732,824.2 sementara dalam RKPD sebesar Rp 10,845,255,342,824.2 Dengan demikian terdapat selisih Rp. 3,241,390,000.00 atau 0,03%
   2) Pagu indikatif RKPD dan kerangka pendanaan RPJMD diperuntukkan pada semua Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan

b. APBD terhadap RKPD
   1) Jumlah pagu indikatif di dalam APBD terdapat perbedaan terhadap kerangka pendanaan di dalam RKPD, dimana dalam APBD sebesar Rp. 10,747,487,403,131.00 sementara dalam RKPD sebesar Rp 10,842,718,685,324.20. Dengan demikian terdapat selisih Rp. 95,231,282,193.20 atau 0.88 %
   2) Pada APBD terdapat 19 (sembilan belas) perangkat daerah yang memiliki jumlah pagu indikatif dan angggaran yang lebih besar dari pagu RKPD dengan persentase penambahan dari 0-48%, sejumlah 34 (tiga puluh empat) perangkat daerah memiliki jumlah pagu APBD lebih kecil dibanding pagu indikatif RKPD.

c. APBD terhadap RPJMD
   1) Jumlah pagu APBD lebih kecil dibanding pagu RPJMD secara persentase belih sebesar 0,84% dari pada RPJMD, dengan total selisih Rp.90.009.329.693,2- (Sembilan Puluh Milyar Sembilan Juta Tiga Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Enam Ratus Sembilan Puluh Tiga Dua Rupiah).
   2) Pada APBD terdapat 19 (Sembilan belas) perangkat daerah yang memiliki jumlah pagu indikatif dan angggaran yang lebih besar dari pagu RPJMD dengan persentase penambahan dari 0-36,04%, sejumlah 34 (tiga puluh empat) perangkat daerah memiliki jumlah pagu APBD lebih kecil dibanding pagu indikatif RPJMD.

C. Capaian Kinerja dan Anggaran Sub Kegiatan RKPD Tahun 2021

Terkait penggambaran Pelaksanaan Capaian Kinerja pada subkegiatan pada pelaksanan RKPD tahun 2021 terdapat 1846 Subkegiatan dengan jumlah indikator sebanyak 3085 dengan rata-rata capaian kinerja outcome 87.49% dengan interpretasi Tinggi (T) dan rata-rata capaian kinerja keuangan sebesar 68.84% dengan interpretasi Sedang (S) untuk penggambaran pencapaian kinerja subkegiatan pada masing-masing perangkat daerah dapat digambarkan pada tabel dibawah ini sebagai berikut:

Tabel II.399.
Capaian SubKegiatan RKPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021

No. Urut	Perangkat Daerah	Keterangan Kinerja SubKegiatan					Rata-rata Capaian SubKegiatan (%) dan Predikat Kinerja			
		Jumlah Sub Kegiatan	Jumlah Indikator	Belum Tercapai	Sesuai	Melampaui	K	Rp	K	Rp
1	Dinas Pendidikan	106	106	9	92	5	100.00	79.95	ST	T
2	Dinas Kesehatan	40	223	13	22	5	58.04	13.90	R	SR
3	UPT Transfusi Darah	20	20	7	13	0	88.45	94.83	T	ST
4	UPT Pelatihan Kesehatan	4	4	4	0	0	0.00	84.65	SR	T
5	UPT RSK Gigi dan Mulut	3	5	2	1	0	46.09	44.04	SR	SR
6	Rumah Sakit Umum Daerah Labuang Baji	9	10	1	8	0	98.57	83.05	ST	T
7	Rumah Sakit Umum Daerah Haji Makassar	5	5	1	4	0	92.28	89.72	ST	T
8	Rumah Sakit Khusus Daerah	5	5	2	3	0	98.28	83.91	ST	T
9	Rumah Sakit Khusus Ibu Dan Anak Pertiwi	6	6	1	5	0	94.85	94.00	ST	ST
10	Rumah Sakit Khusus Daerah Ibu dan Anak Sitti Fatimah	6	6	3	3	0	96.90	96.64	ST	ST
11	Rumah Sakit Umum Sayang Rakyat	7	7	0	6	1	100.00	97.06	ST	ST
12	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	88	240	47	31	10	78.61	27.34	T	SR
13	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	57	68	5	41	11	100.00	64.84	ST	R
14	Satuan Polisi Pamong Praja	45	51	45	0	0	0.00	79.66	SR	T
15	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	28	31	1	27	0	99.84	88.83	ST	T
16	Dinas Sosial	52	81	3	49	0	85.43	53.37	T	R
17	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	32	36	2	29	1	100.00	84.56	ST	T
18	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	38	55	27	4	7	100.00	63.69	ST	R
19	Dinas Ketahanan Pangan	38	39	7	31	0	86.01	92.26	T	ST
20	Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup	30	32	4	20	6	100.08	77.71	ST	T
21	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	43	62	9	26	8	103.23	54.06	ST	R
22	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	29	57	0	29	0	99.12	46.62	ST	SR
23	Dinas Perhubungan	39	45	14	17	8	100.00	82.29	ST	T
24	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian	29	31	3	19	7	104.33	87.10	ST	T
25	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	28	29	0	28	0	100.00	95.07	ST	ST
26	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	35	52	2	27	6	101.28	64.54	ST	R
27	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	43	108	8	35	0	58.33	38.45	R	SR
28	Dinas Kebudayaan Dan Kepariwisataan	36	41	5	31	0	88.50	70.86	T	S
29	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	40	40	11	29	0	95.21	96.68	ST	ST
30	Dinas Kelautan dan Perikanan	38	77	8	25	5	100.00	50.86	ST	SR
31	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	34	109	11	19	4	56.90	28.54	R	SR
32	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	16	208	9	5	2	38.16	6.18	SR	SR
33	Dinas Kehutanan	27	51	9	14	4	93.18	49.80	ST	SR
34	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	34	35	4	25	5	100.00	84.57	ST	T
35	Dinas Perdagangan	29	34	11	16	2	77.04	84.16	T	T
36	Dinas Perindustrian	30	37	3	25	2	99.59	72.68	ST	S
37	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	17	22	1	14	2	100.00	73.28	ST	S

No. Urut	Perangkat Daerah	Keterangan Kinerja SubKegiatan					Rata-rata Capaian SubKegiatan (%) dan Predikat Kinerja			
		Jumlah Sub Kegiatan	Jumlah Indikator	Belum Tercapai	Sesuai	Melampaui	K	Rp	K	Rp
38	Biro Kesejahteraan Rakyat	32	44	3	29	0	95.95	60.75	ST	R
39	Biro Hukum	14	19	0	14	0	100.00	68.08	ST	S
40	Biro Organisasi	31	40	2	28	1	97.75	69.73	ST	S
41	Biro Umum	44	44	44	0	0	60.94	88.44	R	T
42	Biro Administrasi Pimpinan	21	23	2	19	0	97.17	83.84	ST	T
43	Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan	10	11	0	2	8	100.00	97.18	ST	ST
44	Biro Pengadaan Barang/Jasa	17	29	0	8	9	100.00	53.98	ST	R
45	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	80	80	72	0	8	100.00	74.02	ST	S
46	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	62	78	5	48	9	100.00	70.16	ST	S
47	Badan Keuangan dan Aset Daerah	61	156	8	52	1	96.01	32.27	ST	SR
48	Badan Pendapatan Daerah	76	204	0	75	1	100.36	30.11	ST	SR
49	Badan Kepegawaian Daerah	78	91	8	56	14	97.18	74.59	ST	S
50	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	34	45	4	30	0	84.20	66.78	T	S
51	Badan Penghubung Daerah	18	19	14	4	0	77.88	75.18	T	S
52	Inspektorat Provinsi Sulawesi Selatan	47	67	7	40	0	91.83	59.15	ST	R
53	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	55	67	1	54	0	99.63	64.42	ST	R
	Jumlah	**1846**	**3085**	**462**	**1232**	**152**	**87.49**	**68.84**	**T**	**S**

Sumber : Bappelitbangda Prov. Sulsel, Tahun 2021

Berdasarkan tabel diatas bahwa capaian kinerja subkegiatan dengan jumlah sukegiatan sebanyak 1846 menunjukkan pencapaian kinerja subKegiatan yang mendapat predikat tinggi (T), dengan interpretasi pencapaian yakni: terdapat 462 Subkegiatan yang belum tercapai atau secara persentase mencapai 25.03%, untuk Kegiatan dengan interpretasi sesuai sebanyak 1232 atau 66.70% dan ada 152 capaian Kegiatan yang melampaui atau sebesar 8.23%.

Capaian outcome program pembangunan daerah dan program perangkat daerah dalam RKPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II.400.
Capaian Target Outcome Program Pembangunan Daerah dan Program Perangkat Daerah Tahun 2021

No. Urut	Perangkat Daerah	Capaian Target Outcome				
		Jumlah Indikator	Rerata Anggaran	Belum Tercapai	Sesuai	Melampaui
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*
1	Dinas Pendidikan	14	34,42	5	9	0
2	Dinas Kesehatan	11	23,83	6	2	3
3	UPT Transfusi Darah	4	46,28	4	0	0
4	UPT Pelatihan Kesehatan	6	41,28	0	6	0
5	UPT RSK Gigi dan Mulut	4	30,42	1	3	0
6	Rumah Sakit Umum Daerah Labuang Baji	5	53,64	0	5	0
7	Rumah Sakit Umum Daerah Haji Makassar	4	44,94	4	0	0
8	Rumah Sakit Khusus Daerah	4	38,26	0	2	2

No. Urut	Perangkat Daerah	Capaian Target Outcome				
		Jumlah Indikator	Rerata Anggaran	Belum Tercapai	Sesuai	Melampaui
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*
9	Rumah Sakit Khusus Ibu Dan Anak Pertiwi	5	55,89	1	4	0
10	Rumah Sakit Khusus Daerah Ibu dan Anak Sitti Fatimah	5	38,28	3	0	2
11	Rumah Sakit Umum Sayang Rakyat	5	58,46	1	3	1
12	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	16	55,95	6	6	4
13	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	13	56,19	2	8	3
14	Satuan Polisi Pamong Praja	6	63,23	1	5	0
15	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	6	32,82	1	5	0
16	Dinas Sosial	15	35,27	11	4	0
17	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	15	50,45	1	6	8
18	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	13	71,83	10	1	2
19	Dinas Ketahanan Pangan	10	38,81	5	4	1
20	Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup	12	70,36	5	6	1
21	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	15	28,39	4	6	5
22	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	12	37,79	3	4	5
23	Dinas Perhubungan	13	27,32	9	1	3
24	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian	8	59,92	1	6	1
25	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	14	50,12	4	10	0
26	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	9	64,41	2	5	2
27	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	8	48,66	0	8	0
28	Dinas Kebudayaan Dan Kepariwisataan	14	48,72	8	4	2
29	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	6	66,27	3	3	0
30	Dinas Kelautan dan Perikanan	18	30,73	11	2	5
31	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	10	48,44	7	1	2
32	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	15	27,75	10	1	4
33	Dinas Kehutanan	10	44,45	3	3	4
34	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	9	41,84	5	3	1
35	Dinas Perdagangan	10	67,79	4	4	2
36	Dinas Perindustrian	6	60,45	3	3	0
37	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	4	48,12	0	4	0
38	Biro Kesejahteraan Rakyat	6	30,63	3	0	3
39	Biro Hukum	5	36,77	0	5	0
40	Biro Organisasi	4	43,51	4	0	0
41	Biro Umum	3	30,67	0	3	0
42	Biro Administrasi Pimpinan	3	32,37	0	3	0
43	Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan	5	58,88	0	0	5
44	Biro Pengadaan Barang/Jasa	6	30,21	3	0	3
45	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	6	29,14	6	0	0
46	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	9	41,26	0	3	6
47	Badan Keuangan dan Aset Daerah	10	25,88	2	5	3
48	Badan Pendapatan Daerah	6	45,02	1	5	0
49	Badan Kepegawaian Daerah	6	31,33	3	3	0
50	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	4	46,50	2	2	0

No. Urut	Perangkat Daerah	Capaian Target Outcome				
		Jumlah Indikator	Rerata Anggaran	Belum Tercapai	Sesuai	Melampaui
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*
51	Badan Penghubung Daerah	5	37,11	5	0	0
52	Inspektorat Provinsi Sulawesi Selatan	8	30,79	1	4	3
53	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	9	57,01	2	4	3
	Jumlah	**449**	**44,32**	**176**	**184**	**89**

Sumber : Bappelitbangda Prov. Sulsel, Tahun 2021

Berdasarkan data yang tercantum dalam tabel di atas diperoleh gambaran antara lain sebagai berikut:

1. Terdapat 449 indikator kinerja outcome dalam RKPD Tahun 2021.
2. Rata-rata capaian kinerja anggaran seluruh program pembangunan daerah tersebut adalah 44,32%.
3. Sejumlah 176 outcome belum mencapai target dari yang ditetapkan, sementara 184 outcome mencapai target 100%, dan 89 outcome melampaui target yang ditetapkan.

Hasil pelaksanaan RKPD sebagaimana digambarkan di atas merupakan gambaran kinerja perangkat daerah, mengingat pelaksanaan RKPD dalam operasionalnya dilakukan oleh perangkat daerah.

Hasil pelaksanaan RKPD sebagaimana digambarkan di atas merupakan gambaran kinerja perangkat daerah, mengingat pelaksanaan RKPD dalam operasionalnya dilakukan oleh perangkat daerah.

Terkait dengan realisasi program dan kegiatan RKPD berdasarkan tabel-tabel di atas, dapat dijelaskan hal-hal sebagai berikut:

a. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya target program/kegiatan yang direncanakan dalam RKPD antara lain adalah:
   1) Tidak dianggarkan dalam APBD.
   2) Terjadinya recofusing anggaran yang disebabkan adanya pandemic Covid 19 sehingga diperlukan penataan ulang penggangaran dan belanja daerah
   3) Tidak diperoleh data yang valid dan terferifikasi dari perangkat daerah yang menjadi penanggung jawab program/kegiatan.
   4) Tidak dilaksanakan karena perubahan peraturan perundangan dan/ atau kewenangan yang mendasari pelaksanaan suatu kegiatan.
   5) Kegiatan yang bersumber dari APBN yang akan didampingi kegiatan RKPD tidak terealisasi sebahagian besar juga dipengaruhi oleh dampak dari pandemi Covid-19 dan adanya pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat yang menghambat pelaksanaan kegiatan
   6) Permasalahan teknis lainnya seperti, lelang yang terlambat, cuaca, dan lain-lain.
b. Faktor-faktor penyebab terpenuhinya target program/kegiatan yang direncanakan dalam RKPD antara lain adalah:
   1) Dianggarkan dalam APBD.
   2) Pelaksanaan sesuai dengan rencana yang ditetapkan.

3) Anggaran yang tersedia mencukup untuk melaksanakan kegiatan sesuai rencana.

c. Faktor-faktor penyebab realisasi melebihi target program/kegiatan yang direncanakan dalam RKPD antara lain adalah:
   1) Pelaksanaan kegiatan dilakukan bersamaan dengan pelaksanaan kegiatan yang didanai APBN.
   2) Dukungan stakeholders terhadap pelaksanaan program/kegiatan.
   3) Penetapan target lebih rendah dari anggaran yang tersedia.
   4) Adanya rescheduling pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan.
d. Kebijakan atau tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut:
   1) Peningkatan pemahaman aparatur perangkat daerah dalam pelaksanaan pengendalian dan evaluasi rencana pembangunan.
   2) Penyusunan dokumen rencana dan anggaran sesuai dengan tahapan dan tatacara yang diatur dalam peraturan perundangan.
   3) Pengelolaan data yang baik.

D. Review Capaian Kinerja RPJMD

Review capaian prioritas dan target program RPJMD dimaksudkan untuk mengkaji arah kebijakan serta prioritas dan target kinerja program di tahun rencana, dengan mempertimbangkan pencapaian target kinerja sampai dengan tahun berjalan. Hasil kajian tersebut digunakan sebagai masukan dalam merumuskan permasalahan pembangunan dan perumusan prioritas dan sasaran pembangunan RKPD tahun rencana, dengan tujuan agar target kinerja RPJMD di akhir tahun periode RPJMD dapat tercapai. Review capaian kinerja RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel II.401.
Review Capaian Kinerja RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021

No.	Visi/Misi / Tujuan / Sasaran / Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Impact / Outcome	Satuan Indikator Kinerja Impact / Outcome	Kondisi Kinerja Awal (2019)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2021				Predikat Kinerja (K) dan Predikat Rp (%)				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Target	Rp	Capaian	Rp	%K	%Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Visi: Sulawesi Selatan Yang Inovatif, Produktif, Kompetitif, Inklusif, dan Berkarakter													
	Misi-1: Mewujudkan Pemerintahan yang Berorientasi Melayani dan Inovatif												
	Tujuan 1: Meningkatkan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang baik	**Indeks Reformasi Birokrasi**	**Huruf/Angka**	**B**	**BB (71 – 80)**								
	Sasaran 1: Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	**Nilai SAKIP Provinsi**	**Huruf/Angka**	**B**	**BB (>70-80)**								
1	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Cakupan SDM Aparatur yang Lulus Diklat Kompetensi Managerial, Kompetensi Diklat Fungsional, Kompetensi Diklat Sosial Kultural	Persentasi	5%	100 %	5,435,028,632.0	100	2,560,421,339.0	100.0	47.1	**ST**	**SR**	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
2	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase pemenuhan kebutuhan pegawai ASN	Persentasi	57%	60 %	5,980,746,888.0	59	8,658,394,690.0	98.3	144.8	**ST**	**ST**	Badan Kepegawaian Daerah
		Persentase ASN berkinerja baik dan sangat baik	Persentasi	88%	91 %		91		100.0		**ST**		Badan Kepegawaian Daerah
		Persentase ASN yang menduduki jabatan struktural dan fungsional berbasis talenta;	Persentase	80%	85 %		85		100.0		**ST**		Badan Kepegawaian Daerah
3	PROGRAM PENATAAN ORGANISASI	Persentase kesesuaian program prioritas dengan struktur organisasi perangkat daerah	Persentasi	100%	100 %	4,794,694,160.0	100	2,930,513,826.0	100.0	61.1	**ST**	**R**	Biro Organisasi
4	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	% Penyelesaian Tindak lanjut Hasil Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota	Persentasi	97%	69.59 %	12,256,108,048.0	70.04	8,681,931,480.0	100.6	70.8	**ST**	**S**	Inspektorat Provinsi Sulawesi Selatan

No.	Visi/Misi / Tujuan / Sasaran / Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Impact / Outcome	Satuan Indikator Kinerja Impact / Outcome	Kondisi Kinerja Awal (2019)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Predikat Kinerja (K) dan Predikat Rp (%)				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2021								
					Target	Rp	Capaian	Rp	%K	%Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		% Penyelesaian tindak lanjut Perangkat Daerah terhadap Hasil Pemeriksaan APIP	Persentase	97%	70.2 %		73.93		105.3		ST		Inspektorat Provinsi Sulawesi Selatan
		% OPD yang hasil Nilai SAKIPnya meningkat (Prioritas)	Persentase		100.00%				- .0		SR		Inspektorat Provinsi Sulawesi Selatan
5	PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH (Prioritas)	% Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD dan APBD (Prioritas)	Persentasi	100%	100 %	14,167,391,351.2	100	10,210,502,119.0	100.0	72.1	ST	S	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
		Persentase peningkatan capaian kinerja program (Prioritas)	Persentasi	0	0.5 %	-	3.68		736.0		ST		Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
6	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Indeks sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE)	indeks	60%	3 %	3,799,568,236.0	2.05	4,307,971,818.0	68.3	113.4	S	ST	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian
7	PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM	Nilai hasil evaluasi Reformasi Birokrasi pada Penataan Peraturan Perundang-undangan	Nilai	Nilai 2.40	3 Nilai	20,289,253,332.0	3	1,382,401,310.0	100.0	6.8	ST	SR	Biro Hukum
		Persentase Perkara Hukum yang difasilitasi	Persentasi	100	100 %		100		100.0		ST		Biro Hukum
8	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase BUM Desa Yang diFasilitasi	Persentasi	11.81% dari 1.524 BUMDES	11.81%	901,936,800.0	5.9	690,750,000.0	50.0	76.6	SR	T	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		Persentase Desa yang diFasilitasi	Persentasi	2.255 DESA	15.03%		34.1		226.9		ST		Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

No.	Visi/Misi / Tujuan / Sasaran / Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Impact / Outcome	Satuan Indikator Kinerja Impact / Outcome	Kondisi Kinerja Awal (2019)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Predikat Kinerja (K) dan Predikat Rp (%)				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2021								
					Target	Rp	Capaian	Rp	%K	%Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Sasaran 2: Berkembangnya inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	**Indeks Pelayanan Publik**	**indeks**	**B**	**B (3,51 – 4)**								
9	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase Perangkat Daerah yang mendapatkan penghargaan inovasi daerah (Prioritas)	Persentasi	0	3 %	11,269,424,704.0	11.32	4,166,289,653.0	377.3	37.0	**ST**	**SR**	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
10	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase layanan informasi dan komunikasi publik	Persentasi	80%	80 %	16,245,134,500.0	80	18,097,178,598.0	100.0	111.4	**ST**	**ST**	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian
		Presentase tindak lanjut pengaduan pada Baruga Layanan Masyarakat secara Elektronik	Persentasi	100%	100 %		100		100.0		**ST**		Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian
11	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase Ketepatan Waktu Penyelesaian Izin yang Diterbitkan Sesuai SOP	Persentase		80 %	1,324,672,696.0	78	1,197,761,320.0	97.5	90.4	**ST**	**T**	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	Misi-2: Mewujudkan Infrastruktur yang Berkualitas dan Aksesibel 98.49												
	Tujuan 2: Meningkatkan pemerataan infrastruktur wilayah	**Indeks Williamson**	**Indeks**	**0.639**	**0.601**								
	Sasaran 3: Meningkatnya aksesibilitas infrastruktur	**Indeks Layanan Infrastruktur**	**Indeks**	**76.06**	**79.5**		**79,44**						
12	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase jalan provinsi dalam kondisi mantap	Persentase	58	72.3 %	238,283,321,152.0	70.01	644,681,224,184.0	96.8	270.6	**ST**	**ST**	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
		Persentase panjang terisolir pada ruas jalan provinsi yang terakses roda empat)	Persentase	20.48%	71.79 %		77.12		107.4		**ST**		Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

No.	Visi/Misi / Tujuan / Sasaran / Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Impact / Outcome	Satuan Indikator Kinerja Impact / Outcome	Kondisi Kinerja Awal (2019)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Predikat Kinerja (K) dan Predikat Rp (%)				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2021								
					Target	Rp	Capaian	Rp	%K	%Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5	5	6	7	8	9	10	11	12	13
13	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Jumlah arus penumpang melalui pelabuhan (Prioritas)	Orang		1028000	45,945,652,580.0	1355919	45,612,328,874.0	131.9	99.3	ST	ST	Dinas Perhubungan
		Persentase pelabuhan yang beroperasi	Persentase		11 %		10		90.9		T		Dinas Perhubungan
14	PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN	Persentase Rumah Tangga Pengguna Listrik	Persentase	97%	98.25 %	15,474,852,036.0	98.2	800,274,396.0	99.9	5.2	ST	SR	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
		Persentase Desa berlistrik (Prioritas Desa Kepulauan)	Persentase		99 %		98.49		99.5		ST		Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
15	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR SDA (SPM/Prioritas)	Persentase Jaringan Irigasi Primer dan Sekunder kondisi baik pada DI Kewenangan Provinsi (Prioritas)	Persentase	59.33%	60.06 %	131,990,261,967.0	76	170,480,792,689.0	126.5	129.2	ST	ST	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
		Cakupan pengelolaan sungai, danau, waduk, dan pantai	Persentase	100%	100 %		100		100.0		ST		Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
16	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA SARANA DAN UTILITAS UMUM PSU	Persentase Rumah tangga bersanitasi di kawasan permukiman	Persentase	89.77	91 %	3,521,804,832.0	94.14	8,132,490,608.0	103.5	230.9	ST	ST	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
		Persentase rumah tangga yang berakses air bersih layak/Arsinum di kawasan pesisir dan Kepulauan	Persentase	2.84	100 %		100		100.0		ST		Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
		Persentase panjang jalan lingkungan yang terbangun di kawasan permukiman	Persentase	17.10	60 %		195.9		326.5		ST		Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
17	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase warga negara memperoleh kebutuhan air minum curah lintas kabupaten/kota (SPM)	Persentase	74%	82.47 %	160,619,100.0	100	102,723,200.0	121.3	64.0	ST	R	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

No.	Visi/Misi / Tujuan / Sasaran / Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Impact / Outcome	Satuan Indikator Kinerja Impact / Outcome	Kondisi Kinerja Awal (2019)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Predikat Kinerja (K) dan Predikat Rp (%)				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2021								
					Target	Rp	Capaian	Rp	%K	%Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Cakupan Pembinaan Layanan Air Minum Kab/Kota (SPM)	Persentase	100	100 %		100		100.0		ST		Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
	Misi-3: Mewujudkan Pusat-Pusat Pertumbuhan Ekonomi Baru yang Produktif												
	Tujuan 3: Meningkatkan Kesejahteraan masyarakat secara merata	**PDRB Perkapita**	**Juta Rp.**	**56,98**	**59,23**								
		Angka Kemiskinan	**%**	**8.69**	**8.70**		**8,53**						
	Sasaran 4: Meningkatnya penyerapan tenaga kerja sektor unggulan daerah	**Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)**	**%**	**4.62**	**7.20**		3						
18	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Persentase peningkatan destinasi wisata menjadi destinasi wisata unggulan	Persentase	20	0.5 %	6,983,932,500.0	0.2	3,295,822,717.0	40.0	47.2	SR	SR	Dinas Kebudayaan Dan Kepariwisataan
		Persentase Kab/Kota yang memiliki kawasan wisata halal	Persentase	30	12.5 %		8.3		66.4		S		Dinas Kebudayaan Dan Kepariwisataan
19	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Persentase Capaian Kunjungan wisata (Wisatawan Mancanegara) (Prioritas)	Peningkatan Kunjungan wisata (Wisatawan Mancanegara)	58.27	100 %	24,114,794,000.0	4.17	4,786,215,300.0	4.2	19.8	SR	SR	Dinas Kebudayaan Dan Kepariwisataan
		Persentase Capaian Kunjungan wisata (Wisatawan Nusantara) (Prioritas)	Persentase	116	100 %		77.16		77.2		T		Dinas Kebudayaan Dan Kepariwisataan
20	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Jumlah kawasan strategis dan pusat pertumbuhan baru yang dilakukan penataan bangunan dan lingkungannya	Kawasan	0	11 Kawasan	89,841,340,549.0	9	28,276,454,655.0	81.8	31.5	T	SR	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
21	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase Pencari kerja yang terdaftar dan ditempatkan	Persentase	4.36%	3.91 %	692,176,310.0	5.6	467,357,672.0	143.2	67.5	ST	S	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

No.	Visi/Misi / Tujuan / Sasaran / Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Impact / Outcome	Satuan Indikator Kinerja Impact / Outcome	Kondisi Kinerja Awal (2019)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Predikat Kinerja (K) dan Predikat Rp (%)				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2021								
					Target	Rp	Capaian	Rp	%K	%Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Persentase daya serap tenaga kerja (Prioritas)	Persentase	59.78%	58.78 %		61.58		104.8		ST		Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
22	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase pencari kerja terlatih yang mendapatkan pekerjaan	Persentase	98.75%	72.92 %	2,623,431,000.0	73	1,963,428,600.0	100.1	74.8	ST	S	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		Persentase tenaga kerja yang dilatih berwirausaha dapat mandiri	Persentase	70%	75 %		81.25		108.3		ST		Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
23	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Jumlah Realisasi PMA	Rp. triliun	4.54	3.5 Rp. Triliun	1,447,034,000.0	4.52	1,012,537,980.0	129.1	70.0	ST	S	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		Jumlah Realisasi PMDN	Rp. triliun	5.67	4.5 Rp. Triliun		12.08		268.4		ST		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
24	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial	Persentase	6.04%	22.02 %	3,966,559,500.0	22.02	3,472,298,144.0	100.0	87.5	ST	T	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
		Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	Persentase	9.46%	10.56 %		10.56		100.0		ST		Dinas Kepemudaan dan Olahraga
	Sasaran 5: Menurunnya kesenjangan pendapatan antar lapisan masyarakat	**Rasio Gini**	**Nilai**	**0.391**	**0.382**		**0,377**						
25	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase Luas kawasan kumuh tertangani kewenangan provinsi (Prioritas)	Persentase	39.88	13.69 %	8,413,514,632.0	18.03	6,722,951,185.0	131.7	79.9	ST	T	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
26	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH USAHA KECIL DAN USAHA MIKRO UMKM	Cakupan UMKM yang diberdayakan	Persentase	10	10 %	5,191,925,000.0	10	1,881,451,600.0	100.0	36.2	ST	SR	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

No.	Visi/Misi / Tujuan / Sasaran / Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Impact / Outcome	Satuan Indikator Kinerja Impact / Outcome	Kondisi Kinerja Awal (2019)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Predikat Kinerja (K) dan Predikat Rp (%)				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2021								
					Target	Rp	Capaian	Rp	%K	%Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5	5	6	7	8	9	10	11	12	13
27	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase UMKM yang terfasilitasi Dalam Pengembangan Usaha	Persentase	10	10 %	2,540,860,490.0	7	1,167,530,210.0	70.0	46.0	S	SR	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
		Cakupan promosi produk UMKM (Prioritas)		10 Produk	3 %		3		100.0		ST		Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
28	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	Persentase Jumlah Pemegang izin perhutanan sosial yang menjalankan pengelolaan dan pemanfaatan sesuai aturan	Persentase	14.90	15.65 %	20,620,155,000.0	20.12	31,121,072,752.0	128.6	150.9	ST	ST	Dinas Kehutanan
29	PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Persentase transmigran yang dilatih untuk dapat lebih mandiri	Persentase	0%	100 %	47,735,000.0	100	47,155,000.0	100.0	98.8	ST	ST	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		Persentase ketersediaan data sarana dan prasarana	Persentase	0%	100 %		100		100.0		ST		Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
30	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase PPKS yang mendapatkan jaminan sosial	Persentase	100%	3.5 Jiwa	10,019,193,024.0	0	2,475,871,319.0	- .0	24.7	SR	SR	Dinas Sosial
		Persentase pengangkatan anak WNI oleh orang tua tunggal	Persentase		100 %		100		100.0		ST		Dinas Sosial
31	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Produksi Daging	Ton	138164039 Kg	167936762 Kg	253,186,814,872.0	119502264.8	225,171,141,092.7	71.2	88.9	S	T	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
		Produksi Telur	Ton	162594471 Kg	195474499 Kg		251210205		128.5		ST		Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
		Produksi Susu	Ton	3240432 Kg	2035655 Kg		2400388		117.9		ST		Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
		Jumlah produksi Talas Satoimo	Ton	5.432,55	7000 Ton		0		- .0		SR		Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan

No.	Visi/Misi / Tujuan / Sasaran / Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Impact / Outcome	Satuan Indikator Kinerja Impact / Outcome	Kondisi Kinerja Awal (2019)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Predikat Kinerja (K) dan Predikat Rp (%)				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2021								
					Target	Rp	Capaian	Rp	%K	%Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Produktifitas Padi	Kw/Ha	48,23 Kw/Ha	48.95 Kw/Ha		49.46		101.0		ST		Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
		Luas Areal Pengengembangan Jeruk Keprok Selayar (Ha)	Ha	0	100 Ha		78		78.0		T		Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
		Produktifitas Kakao	Kg/Ha	634 Kg/Ha	634 Kg/Ha		776		122.4		ST		Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
		Produktifitas Jagung	Kw/Ha	53,27 Kw/Ha	54.1 Kw/Ha		55.31		102.2		ST		Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
		Cakupan Ketersediaan Alat dan Mesin Pertanian	Unit	377 Unit	250 Unit		0		- .0		SR		Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
		Produtifitas Kopi	Kg/Ha	588 Kg/Ha	588 Kg/Ha		647		110.0		ST		Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
		Peningkatan Ketersediaan Pupuk	Ton	266,50 Ton	298.65 Ton		0		- .0		SR		Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
32	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Persentase Kelembagaan Masyarakat yang difasilitasi dan ditingkatkan kapasitasnya (Kelompok Binaan LPM)	Persentase	1.41 % dari 3038 Kelompok Binaan LPM	1.51 %	3,179,352,637.0	1.51	2,824,551,140.0	100.0	88.8	ST	T	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		Persentase PKK aktif	Persentase	97.71 % dari Total 3.344 PKK	100 %		100		100.0		ST		Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

No.	Visi/Misi / Tujuan / Sasaran / Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Impact / Outcome	Satuan Indikator Kinerja Impact / Outcome	Kondisi Kinerja Awal (2019)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Predikat Kinerja (K) dan Predikat Rp (%)				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2021								
					Target	Rp	Capaian	Rp	%K	%Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Persentase Posyandu aktif	Persentase	99.89% dari 10.988 Posyandu	99.89 %		99.91		100.0		ST		Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
33	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase Koperasi yang terfasilitasi pemberdayaan	Persentase	10	10 %	614,535,000.0	8	328,968,000.0	80.0	53.5	T	R	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
	Misi-4: Mewujudkan Kualitas Manusia yang Kompetitif, Inklusif dan Berkarakter												
	Tujuan 4: Meningkatkan Kualitas SDM secara inklusif	**Indeks Pembangunan Manusia (IPM)**	**Angka**	**71.66**	**72.20**		**72.24**						
	Sasaran 6: Meningkatnya kualitas dan pemerataan pendidikan	**Indeks Pendidikan**	**Nilai**	**64.64**	**66.29**	**65.76**							
34	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN (SPM Prioritas)	Persentase jumlah warga negara usia 16 -18 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah (SPM)	Persentase	74,23%	100 %	1,027,685,287,047.0	100	896,845,682,705.0	100.0	87.3	ST	T	Dinas Pendidikan
		Persentase siswa SMA/SMK yang bebas buta aksara Al-Quran	Persentase	50.05 %	60.25 %		60.25		100.0		ST		Dinas Pendidikan
		Persentase SMA/SMK yang bebas Narkoba (indikator RPJMD pokok)	Persentase	90 %	91.25 %		91.25		100.0		ST		Dinas Pendidikan
		Persentase jumlah warga negara usia 4 - 18 tahun yang termasuk dalam penduduk disabilitas yang berpartisipasi dalam pendidikan Khusus (SPM)	Persentase	80%	100 %		100		100.0		ST		Dinas Pendidikan
35	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM (Prioritas)	Prosentase Sekolah yang menerapkan kurikulum lokal penambahan waktu pelajaran agama (Prioritas)	Persentase		54.25 %	894,323,500.0	0		- .0	- .0	SR	SR	Dinas Pendidikan

No.	Visi/Misi / Tujuan / Sasaran / Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Impact / Outcome	Satuan Indikator Kinerja Impact / Outcome	Kondisi Kinerja Awal (2019)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Predikat Kinerja (K) dan Predikat Rp (%)				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2021								
					Target	Rp	Capaian	Rp	%K	%Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Persentase Pendidikan menengah yang telah menerapkan penyelenggaraan dan pelayanan pendidikan berbasis TIK	Persentase		0 %		0		- .0		SR		Dinas Pendidikan
	Sasaran 7: Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	**Indeks Kesehatan**	**Nilai**	**77.58**	**77.76**	**77.94**							
36	PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana olahraga	Persentase	317%	100	37,297,729,900.0	100	43,685,835,537.0	100.0	117.1	ST	ST	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
		Persentase Peningkatan Prestasi olahraga	Persentase	291.4	100 %		100		100.0		ST		Dinas Kepemudaan dan Olahraga
37	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN (Prioritas)	Rasio tenaga kesehatan persatuan penduduk	100.000 Penduduk	17/100.000 Penduduk	23 %	6,545,556,170.0	0	1,081,421,380.0	- .0	16.5	SR	SR	Dinas Kesehatan
		Persentase Keterpenuhan SDM Kesehatan pada Fasilitas Kesehatan	Persentase		0 %				- .0		SR		**UPT Transfusi Darah**
		Persentase tenaga medis yang tersertifikasi	Persentase	100	1 %		1		100.0		ST		UPT Pelatihan Kesehatan
		Cakupan Pelatihan dan modul yang terakreditasi	Persentase	100	1 %		1		100.0		ST		UPT Pelatihan Kesehatan
		Persentase tenaga kesehatan gigi dan mulut yang telah memperoleh pendidikan dan pelatihan	Persentase		100 %				- .0		SR		UPT RSK Gigi dan Mulut
		Persentase SDM Kesehatan yang bersertifikasi	Persentase	90%	100 %		100		100.0		ST		Rumah Sakit Umum Daerah Labuang Baji
		Persentase Tenaga Kesehatan dan Tenaga Kesehatan Lainnya yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	Persentase		0 %				100.0		ST		Rumah Sakit Umum Daerah Haji Makassar

No.	Visi/Misi / Tujuan / Sasaran / Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Impact / Outcome	Satuan Indikator Kinerja Impact / Outcome	Kondisi Kinerja Awal (2019)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Predikat Kinerja (K) dan Predikat Rp (%)				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2021								
					Target	Rp	Capaian	Rp	%K	%Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Persentase tenaga kesehatan RSK yang telah memperoleh pendidikan kompetensi teknis	Persentase	100%	100 %		100		100.0		ST		Rumah Sakit Khusus Ibu Dan Anak Pertiwi
		Persentase kompetensi Sumber daya Manusia kesehatan	Persentase	0%	54.9 %		0		- .0		SR		Rumah Sakit Khusus Daerah Ibu dan Anak Sitti Fatimah
		Persentase SDM Kesehatan yang bersertifikasi	Persentase	0	33 %		100		303.0		ST		Rumah Sakit Umum Sayang Rakyat
38	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT (SPM/Prioritas)	Persentase RS Regional yang terbangun dan ditingkatkan	Unit	17% (1 Unit)	33 %	224,672,174,717.0	0	146,366,162,525.3	- .0	65.1	SR	R	Dinas Kesehatan
		Persentase penduduk/warga pada kondisi kejadian luar biasa provinsi yang mendapatkan pelayanan kesehatan (SPM)	Persentase	100 %	100 %	-	100		100.0		ST		Dinas Kesehatan
		% RS Rujukan Provinsi yang Terakreditasi	Persentase	85%	87 %	-	70		80.5		T		Dinas Kesehatan
		Persentase ibu hamil yang mendapat asupan gizi pada 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK)	Persentase	11%	12 %	-	12.1		100.8		ST		Dinas Kesehatan
		Persentase penduduk/warga terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi yang mendapatkan pelayanan kesehatan (SPM)	Persentase	100%	100 %	-	100		100.0		ST		Dinas Kesehatan

No.	Visi/Misi / Tujuan / Sasaran / Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Impact / Outcome	Satuan Indikator Kinerja Impact / Outcome	Kondisi Kinerja Awal (2019)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Predikat Kinerja (K) dan Predikat Rp (%)				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2021								
					Target	Rp	Capaian	Rp	%K	%Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Persentase anak yang mendapat asupan gizi pada 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK)	Persentase	5.5%	6.5 %	-	8.97		138.0		ST		Dinas Kesehatan
		Rasio Kebutuhan Transfusi Darah Terhadap Ketersediaan Stok Darah	Persentase	78.5	80 %	12,647,853,865.0	65		81.3		T		UPT Transfusi Darah
		Persentase pasien yang mendapatkan layanan sesuai dengan standar	Persentase	100	1 %	1,144,891,427.0	1		100.0		ST		UPT Pelatihan Kesehatan
		Persentase pasien yang mendapatkan layanan sesuai dengan standar	Persentase		100 %	1,144,891,427.0	1		1.0		SR		UPT RSK Gigi dan Mulut
		Cakupan Ketersediaan Sarana dan Prasarana RS dalam Kondisi Baik	Persentasi	90%	85 %	32,970,500,000.0	85		100.0		ST		Rumah Sakit Umum Daerah Labuang Baji
		Cakupan Ketersediaan Sarana dan Prasarana RS dalam Kondisi Baik	Persentase		80 %	32,970,500,000.0	85		106.3		ST		Rumah Sakit Umum Daerah Haji Makassar
		Cakupan Ketersediaan Sarana dan Prasarana RS dalam Kondisi Baik	Persentase	100 %	100 %	26,178,244,000.0	85		85.0		T		Rumah Sakit Khusus Daerah
		Cakupan Ketersediaan Sarana dan Prasarana dalam upaya peningkatan kesehatan masyarakat	Persentase	100%	100 %	8,733,570,656.0	100		100.0		ST		Rumah Sakit Khusus Ibu Dan Anak Pertiwi
		Cakupan Ketersediaan Sarana dan Prasarana RS dalam Kondisi Baik	Persentase	0%	80 %	32,970,500,000.0	85		106.3		ST		Rumah Sakit Khusus Daerah Ibu dan Anak Sitti Fatimah
		Cakupan pemenuhan sarana dan prasarana RSUD Sayang Rakyat dalam kondisi baik	Persentase	0	65.76 %	7,780,909,000.0	65.76		100.0		ST		Rumah Sakit Umum Sayang Rakyat
	Sasaran 8: Meningkatnya keberdayaan perempuan dalam pembangunan	**Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)**	**Nilai**	**76.01**	**75.21**								

No.	Visi/Misi / Tujuan / Sasaran / Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Impact / Outcome	Satuan Indikator Kinerja Impact / Outcome	Kondisi Kinerja Awal (2019)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Predikat Kinerja (K) dan Predikat Rp (%)				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2021								
					Target	Rp	Capaian	Rp	%K	%Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5	5	6	7	8	9	10	11	12	13
39	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	% Kab/Kota yang memenuhi indikator prasyarat PUG	Persentase	0,52%	66 %	760,754,100.0	70	1,105,844,200.0	106.1	145.4	ST	ST	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		% Lembaga Penyediaan layanan Pemberdayaan Perempuan yang terstandarisasi	Persentase	10%	20 %		20		100.0		ST		Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
40	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	% Kab/Kota yang menyediakan lembaga layanan peningkatan kualitas keluarga	Persentase	21%	25 %	154,010,300.0	25	148,721,300.0	100.0	96.6	ST	ST	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	Sasaran 9: Meningkatnya aktualisas nilai-nilai agama dan budaya dalam kehidupan masyarakat	**Angka kriminalitas**	**Kasus**	**25.121 (2018)**	**24.709**								
41	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM (SPM)	Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkada di Provinsi (SPM)	Persentase	100%	100 %	3,446,506,550.0	100	3,446,506,550.0	100.0	100.0	ST	ST	Satuan Polisi Pamong Praja
42	PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT	Jumlah rumusan kebijakan Bidang Kesejahteraan Rakyat yang dihasilkan	Persentase/Dokumen	1.75%	9 Dokumen	1,225,538,715,412.0	8	1,280,668,729,328.0	88.9	104.5	T	ST	Biro Kesejahteraan Rakyat
		Persentase Penduduk usia 15 tahun ke atas beragama Islam yang melek aksara AlQuran (Prioritas)	Persentase	10%	35.25 %		39.22		111.3		ST		Biro Kesejahteraan Rakyat

No.	Visi/Misi / Tujuan / Sasaran / Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Impact / Outcome	Satuan Indikator Kinerja Impact / Outcome	Kondisi Kinerja Awal (2019)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Predikat Kinerja (K) dan Predikat Rp (%)				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2021								
					Target	Rp	Capaian	Rp	%K	%Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Jumlah kasus Kejahatan terhadap Kesusilaan (Prioritas)	Persentase	10%	10 %		43.93		439.3		ST		Biro Kesejahteraan Rakyat
43	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Persentase keikutsertaan masyarakat dalam bela negara	Persentase	20% (N/A)	20 %	274,996,630.0	15	88,268,130.0	75.0	32.1	S	SR	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
44	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI SOSIAL DAN BUDAYA	Persentase Penurunan Penyalahgunaan Narkoba (Prioritas)	Persentase	0% (pengguna)	0 %	1,224,235,400.0	58	1,427,380,821.0	100.0	116.6	ST	ST	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		Persentase Wilayah Sulsel Berpotensi Konflik Agama yang ditangani	Persentase	100%	100 %		100		100.0		ST		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	Misi-5: Meningkatkan Produktivitas dan Daya Saing Produk Sumberdaya Alam yang Berkelanjutan												
	Tujuan 5: Meningkatkan produktivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah	**Pertumbuhan Ekonomi**	**%**	**6.92**	**4,10 – 5,55**		**4,65**						
	Sasaran 10: Meningkatnya hilirisasi ekonomi sektor unggulan daerah	**Produktifitas Total Daerah**	**Rp / Angkatan Kerja**	**82.027.871**	**76,913,143**		**77,819,958**						
45	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase Penurunan Serangan OPT	Persentase	5,00%	5 %	9,695,681,849.0	4.5	1,572,510,168.0	90.0	16.2	T	SR	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
		Persentase Penggunaan Benih Padi Bersertifikat	Persentase	70,00%	78.79 %		0		- .0		SR		Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
46	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Persentase Pelabuhan Perikanan yg memiliki sarana prasarana yang sesuai standar operasional	Persentasi	30,18%	57.89 %	27,009,431,500.0	63.16	16,790,520,331.0	109.1	62.2	ST	R	Dinas Kelautan dan Perikanan
		Nilai Produksi Perikanan Tangkap	Rp. Miliar	Rp. 6.525.95 M	8852.48 Rp. M		12668.91		143.1		ST		Dinas Kelautan dan Perikanan
		Produksi perikanan tangkap	Ton	398.565,2 Ton	396992.3 Ton		416076.4		104.8		ST		Dinas Kelautan dan Perikanan

No.	Visi/Misi / Tujuan / Sasaran / Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Impact / Outcome	Satuan Indikator Kinerja Impact / Outcome	Kondisi Kinerja Awal (2019)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Predikat Kinerja (K) dan Predikat Rp (%)				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2021								
					Target	Rp	Capaian	Rp	%K	%Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Cakupan Bina Kelompok Nelayan	Persentase		23.89 %		18.47		77.3		T		Dinas Kelautan dan Perikanan
		Persentase Produksi perikanan kelompok nelayan	Persentase		25.61 %		18.11		70.7		S		Dinas Kelautan dan Perikanan
47	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Nilai produksi perikanan budidaya	Rp. Miliar	Rp. 9.594.52 M	14474.73 Rp. M	15,530,000,000.0	15445.37	10,021,521,740.0	106.7	64.5	ST	R	Dinas Kelautan dan Perikanan
		Produksi perikanan budidaya	Ton	3.662.761,4 ton	3898767.4 Ton		3850102.4		98.8		ST		Dinas Kelautan dan Perikanan
		Persentase ketersediaan benur berkualitas	Persentase		100 %		96.99		97.0		ST		Dinas Kelautan dan Perikanan
48	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Cakupan luas lahan kritis yang direhabilitasi (prioritas)	Persentasi	55.73	57.91 %	4,771,522,850.0	65.61	7,217,555,618.0	113.3	151.3	ST	ST	Dinas Kehutanan
		Jumlah produksi hasil hutan kayu olahan	M3	132100	92336.62 M3		134211.35		145.4		ST		Dinas Kehutanan
		Persentase Kerusakan Hutan pertahun	Persentase	17.43	17.59 %		0.08		0.5		SR		Dinas Kehutanan
		Jumlah produksi hasil hutan bukan kayu	Ton	4.042 Ton	283 Ton		18423.14		6,509.9		ST		Dinas Kehutanan
49	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Nilai Hilirisasi Peternakan	Rp	9412084000 Rp	29493840000 Rp	269,894,544,475.0	22329810160	162,526,653,970.3	75.7	60.2	S	R	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
		Nilai Hilirisasi Produk Tanaman Pangan	Rp.	369485250000 Rp	0 Rp		392,483,722,916		100.0		ST		Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
		Nilai Hilirisasi Produk Perkebunan	Rp.	3578350000 Rp	0 Rp		6144952080		100.0		ST		Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
50	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Produksi olahan konsumsi dan non konsumsi	Ton	166.373.20 Ton	5329 Ton	2,390,927,923.0	5497.4	1,662,551,848.0	103.2	69.5	ST	S	Dinas Kelautan dan Perikanan
		Persentase Pembinaan mutu produk perikanan	Persentase		60 %		53.78		89.6		T		Dinas Kelautan dan Perikanan

No.	Visi/Misi / Tujuan / Sasaran / Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Impact / Outcome	Satuan Indikator Kinerja Impact / Outcome	Kondisi Kinerja Awal (2019)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Predikat Kinerja (K) dan Predikat Rp (%)				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2021								
					Target	Rp	Capaian	Rp	%K	%Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Nilai Hilirisasi Produksi olahan Ikan konsumsi dan non konsumsi	Rp. Miliar	Rp. 293,120 Milyar	304.96 Milyar		280.33		91.9		ST		Dinas Kelautan dan Perikanan
51	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase pertambahan jumlah industri	Persentase	6%	5 %	12,191,374,570.0		5,566,351,831.5	- .0	45.7	SR	SR	Dinas Perindustrian
52	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Nilai Ekspor Perdagangan	$ US	57950717 $ US	1466745670 $ US	279,005,000.0	1466745670	217,888,900.0	100.0	78.1	ST	T	Dinas Perdagangan
	Tujuan 6: Meningkatkan kualitas lingkungan hidup secara berkelanjutan	**Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)**	**Nilai**	**64.76**	**72.25**		**73,23**						
	Sasaran 11: Terpeliharanya kualitas lingkungan hidup serta kemampuan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim	**Potensi Penurunan emisi GRK**	**Juta Ton CO2Eq**	**0.86**	**1.07**		**1,13**						
53	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase Korban Bencana yang tertangani	Persentase	100%	100 %	46,705,929,600.0	0	7,914,905,932.0	- .0	16.9	SR	SR	Satuan Polisi Pamong Praja
		Persentase tanggap darurat bencana yg tertangani (Prioritas)	Persentase	100%	100 %		100		100.0		ST		Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		Persentase Aparat kesiapsiagaan bencana yg terlatih	Persentase	100%	100 %		100		100.0		ST		Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		Persentase dokumen kebencanaan sampai dengan sah/legal yang tersedia	Persentase	100%	100 %		100		100.0		ST		Badan Penanggulangan Bencana Daerah
54	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Rasio ketaatan pemanfaatan ruang	rasio	0.5	0.8	1,773,375,800.0	0.8	12,335,853,137.0	100.0	695.6	ST	ST	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
55	PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI DAS	Jumlah DAS yang direhabilitasi	Das	2	2 DAS	2,425,940,000.0	2	2,303,436,937.0	100.0	95.0	ST	ST	Dinas Kehutanan
56	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DANATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN	Persentase penurunan emisi gas rumah kaca (GRK) dari sektor limbah	Persentase	3,41 %	3.95 Ton penurunan emisi Co2 eq	2,195,449,654.0	2.51	1,402,366,028.0	63.5	63.9	R	R	Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup

No.	Visi/Misi / Tujuan / Sasaran / Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Impact / Outcome	Satuan Indikator Kinerja Impact / Outcome	Kondisi Kinerja Awal (2019)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Predikat Kinerja (K) dan Predikat Rp (%)				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2021								
					Target	Rp	Capaian	Rp	%K	%Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	HIDUP												
57	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN B DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN LIMBAH B	Cakupan limbah yang dikelola	Persentase	74%	97.05 %	10,722,500,145.0	16.29	4,652,310,213.0	16.8	43.4	SR	SR	Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup
58	PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI TERBARUKAN	Persentase Penggunaan Gas Rumah Tangga	Persentase	97%	92 %	898,336,000.0	91.67	2,693,011,070.0	99.6	299.8	ST	ST	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
59	PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN PESISIR DAN PULAU PULAU KECIL	Produksi garam rakyat	Ton	140.338,9 ton	46500 Ton	13,400,000,000.0	755.04	13,980,139,905.0	1.6	104.3	SR	ST	Dinas Kelautan dan Perikanan
		Cakupan Ketersediaan Sarana dan Prasarana Pendukung Produksi Perikanan	Persentase	4,35%	50.17 %		28.28		56.4		R		Dinas Kelautan dan Perikanan
		Cakupan luas kawasan konservasi perairan yang dikelola secara berkelanjutan	Persentase		67.29 %		67.29		100.0		ST		Dinas Kelautan dan Perikanan
60	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Persentase Kepatuhan Pelaku usaha KP terhadap ketentuan peraturan perundangan yang berlaku	Persentase		87.48 %	11,139,152,608.0	63.87	12,434,342,380.0	73.0	111.6	S	ST	Dinas Kelautan dan Perikanan
61	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN LLAJ	Persentase pengguna moda transportasi umum di perkotaan	Persentase	51	54 %	3,490,597,210.0	12.7	4,547,082,799.0	23.5	130.3	SR	ST	Dinas Perhubungan
		Persentase Layanan Angkutan Darat	Persentase	15	22 %		43		195.5		ST		Dinas Perhubungan
		Jumlah penyelenggaraan lalu lintas pada ruas jalan provinsi	Jumlah		0 Ruas		45		100.0		ST		Dinas Perhubungan
		Cakupan prasarana LLAJ dalam kondisi baik	Persentase		0 %		3.05		100.0		ST		Dinas Perhubungan

No.	Visi/Misi / Tujuan / Sasaran / Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Impact / Outcome	Satuan Indikator Kinerja Impact / Outcome	Kondisi Kinerja Awal (2019)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Predikat Kinerja (K) dan Predikat Rp (%)				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2021								
					Target	Rp	Capaian	Rp	%K	%Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Jumlah penumpang melalui terminal Tipe B per tahun	Orang		0 Orang		499277		100.0		ST		Dinas Perhubungan
		Jumlah Terminal Bis terkelola	Terminal		0 Terminal		7		100.0		ST		Dinas Perhubungan
62	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase Sampah Perkotaan yang tertangani	Persentase	46%	72 %	673,265,512.0	82.32	214,901,010.0	114.3	31.9	ST	SR	Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup

Sumber : Bappelitbangda Prov. Sulsel, Tahun 2021

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bagaimana capaian kinerja Outcome Provinsi Sulawesi Selatan untuk pelaksanaan tahun 2021, Sebesar 72,62 Persen dengan interpretasi sedang, begitupula dengan capaian kinerja keuangan sebesar 68.57 persen dengan interpretasi sedang.

2. Evaluasi Pelaksanaan RKPD sampai Tahun Berjalan

RKPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022 merupakan tahun keempat pelaksanaan RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023. Adapun komposisi program pembangunan daerah dalam rangka pencapaian sasaran RPJMD, sebagaimana terlihat pada tabel berikut.

Tabel II.402.
Komposisi Program dalam Perencanaan Pembangunan Daerah
Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2022

No	Nama OPD	RKPD/RENJA OPD			APBD/DPA OPD			Deviasi RKPD dan APBD (RKPD - APBD)		
		Prog	Keg	Subkeg	Prog	Keg	Subkeg	Prog	Keg	Subkeg
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Dinas Pendidikan	6	17	245	4	11	77	-2	-6	-168
2	Dinas Kesehatan	5	18	60	5	17	60	0	-1	0
3	UPT Transfusi Darah	2	9	28	2	7	18	0	-2	-10
4	UPT Pelatihan Kesehatan	3	10	18	3	10	18	0	0	0
5	UPT RSK Gigi dan Mulut	3	4	7	1	1	1	-2	-3	-6
6	Rumah Sakit Umum Daerah Labuang Baji	3	15	32	3	10	17	0	-5	-15
7	Rumah Sakit Umum Daerah Haji Makassar	3	7	12	3	7	11	0	0	-1
8	Rumah Sakit Khusus Daerah	2	4	5	1	3	3	-1	-1	-2
9	Rumah Sakit Khusus Ibu Dan Anak Pertiwi	4	6	7	2	4	5	-2	-2	-2
10	Rumah Sakit Khusus Daerah Ibu dan Anak Sitti Fatimah	3	9	18	1	3	3	-2	-6	-15
11	Rumah Sakit Umum Sayang Rakyat	3	5	12	3	5	7	0	0	-5
12	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	11	26	126	11	25	92	0	-1	-34
13	Satuan Polisi Pamong Praja	4	16	51	4	16	50	0	0	-1
14	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2	10	36	2	10	33	0	0	-3
15	Dinas Sosial	7	18	56	7	17	54	0	-1	-2
16	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	9	19	33	9	19	33	0	0	0

No	Nama OPD	RKPD/RENJA OPD			APBD/DPA OPD			Deviasi RKPD dan APBD (RKPD - APBD)		
		Prog	Keg	Subkeg	Prog	Keg	Subkeg	Prog	Keg	Subkeg
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
17	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	10	28	66	10	23	44	0	-5	-22
18	Dinas Ketahanan Pangan	5	16	73	4	12	38	-1	-4	-35
19	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	5	10	22	5	11	30	0	1	8
20	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	8	18	59	8	17	56	0	-1	-3
21	Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup	11	17	34	11	16	33	0	-1	-1
22	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	5	17	57	5	17	43	0	0	-14
23	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	1	1	1	5	10	36	4	9	35
24	Dinas Perhubungan	4	27	83	4	17	34	0	-10	-49
25	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian	5	9	30	5	11	31	0	2	1
26	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	8	17	34	8	18	40	0	1	6
27	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	6	13	38	6	13	36	0	0	-2
28	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	4	17	52	4	16	59	0	-1	7
29	Dinas Kebudayaan Dan Kepariwisataan	10	23	66	9	20	48	-1	-3	-18
30	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	4	19	43	4	14	38	0	-5	-5
31	Dinas Kelautan dan Perikanan	6	32	97	6	32	110	0	0	13
32	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	6	23	60	5	13	34	-1	-10	-26

No	Nama OPD	RKPD/RENJA OPD			APBD/DPA OPD			Deviasi RKPD dan APBD (RKPD - APBD)		
		Prog	Keg	Subkeg	Prog	Keg	Subkeg	Prog	Keg	Subkeg
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
33	Dinas Kehutanan	5	20	93	5	19	71	0	-1	-22
34	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	5	18	43	5	17	42	0	-1	-1
35	Dinas Perdagangan	7	20	50	5	11	29	-2	-9	-21
36	Dinas Perindustrian	4	11	37	4	9	28	0	-2	-9
37	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	2	8	20	2	8	20	0	0	0
38	Biro Kesejahteraan Rakyat	2	11	45	2	10	27	0	-1	-18
39	Biro Hukum	2	9	25	2	8	17	0	-1	-8
40	Biro Organisasi	2	10	35	2	10	27	0	0	-8
41	Biro Umum	1	10	44	1	10	42	0	0	-2
42	Biro Administrasi Pimpinan	1	8	22	1	8	21	0	0	-1
43	Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan	3	12	28	3	9	13	0	-3	-15
44	Biro Pengadaan Barang/Jasa	2	9	27	2	7	18	0	-2	-9
45	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	2	18	101	2	17	71	0	-1	-30
46	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	4	18	70	4	18	63	0	0	-7
47	Badan Keuangan dan Aset Daerah	3	15	64	3	14	61	0	-1	-3
48	Badan Pendapatan Daerah	3	12	83	3	12	80	0	0	-3
49	Badan Kepegawaian Daerah	2	12	100	2	12	79	0	0	-21
50	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	2	9	37	2	9	34	0	0	-3
51	Badan Penghubung Daerah	2	7	16	2	6	17	0	-1	1

No	Nama OPD	RKPD/RENJA OPD			APBD/DPA OPD			Deviasi RKPD dan APBD (RKPD - APBD)		
		Prog	Keg	Subkeg	Prog	Keg	Subkeg	Prog	Keg	Subkeg
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
52	Inspektorat Provinsi Sulawesi Selatan	3	12	52	3	12	50	0	0	-2
53	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	6	13	59	6	13	54	0	0	-5
	Jumlah	**231**	**742**	**2,612**	**221**	**664**	**2,056**	**-10**	**-78**	**-556**

Sumber : Bappelitbangda Prov. Sulsel, Tahun 2022

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa pada komposisi program terdapat deviasi -10 program antara jumlah program perangkat daerah yang terdapat dalam RKPD/Renja OPD Tahun 2022 sebanyak 231 program, sementara jumlah program perangkat daerah dalam APBD/DPA OPD sebanyak 221. Bagitu pula pada komposisi jumlah kegiatan, dimana dalam RKPD/Renja OPD Tahun 2022 sebanyak 742 kegiatan, sementara jumlah kegiatan perangkat daerah dalam APBD/DPA OPD sebanyak 664, terjadi deviasi -78 kegiatan. Pada komposisi sub kegiatan terjadi deviasi -556 kegiatan, dimana dalam RKPD/Renja OPD Tahun 2022 sebanyak 2.612 sub kegiatan, sementara jumlah sub kegiatan perangkat daerah dalam APBD/DPA OPD sebanyak 2.056 sub kegiatan. Secara umum faktor yang mempengaruhi sehingga adanya deviasi adalah ketidakjelasan informasi besaran anggaran pada program, kegiatan dan sub kegiatan.

Dokumen RKPD mempunyai nilai sangat strategis dan penting, karena dokumen ini merupakan instrumen pelaksanaan RPJMD hasil proses teknokratis. Selain itu, dokumen RKPD merupakan acuan penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Pereangkat Daerah (Renja SKPD), berupa program/kegiatan SKPD dan/atau lintas SKPD. Dokumen RKPD ini juga dapat digunakan untuk menjaga konsistensi program dan sinkronisasi pencapaian sasaran RPJMD. RKPD merupakan landasan penyusunan KUA dan PPAS (Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas & Plafon Anggaran Sementara) untuk menyusun RAPBD, dan merupakan pedoman dalam mengevaluasi rancangan peraturan daerah tentang APBD.

RKPD menjadi pertimbangan utama dalam penyusunan RAPBD yang dibuat oleh Kepala Daerah, DPRD dan SKPD sendiri dalam pembuatan kebijakan umum terkait rancangan anggaran di daerah. RKPD menjadi literatur utama dalam pembuatan anggaran dikarenakan di dalam dokumennya sudah memuat rencana kinerja selama satu tahun dari seluruh SKPD di level pemerintah daerah. RKPD membantu memberikan sumber informasi mengenai perkembangan capaian program yang sudah dilakukan oleh SKPD, mengetahui besaran serapan dana yang dikeluarkan oleh SKPD, mengetahui kapasitas anggaran yang dimiliki pemerintah dalam pembuatan skala prioritas kerja SKPD dan mengetahui setiap persoalan-persoalan yang sifatnya publiknes dan segera membutuhkan respon langsung dari pemerintah daerah. Pelaksanaan RKPD dalam kurung waktu sampai dengan April 2022 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel II.403.
Hasil Pelaksanaan RKPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022

NO	NAMA ORGANISASI	JUMLAH DANA (Rp)	REALISASI BULAN S/D BULAN MARET			SISA DANA / BELUM DICAIRKAN SAMPAI DENGAN BULAN MARET
			KEUANGAN		% FISIK	
			(Rp)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7
1	Dinas Pendidikan	2.842.339.921.353,00	270.476.788.017,00	9,52	11,10	2.571.863.133.336,00
2	Dinas Kesehatan	293.557.961.919,00	10.374.657.830,00	3,53	5,91	283.183.304.089,00
3	UPT Transfusi Darah	9.775.751.582,00	1.034.179.604,00	10,58	14,76	8.741.571.978,00
4	UPT Pelatihan Kesehatan	1.421.936.370,00	198.216.650,00	13,94	20,76	1.223.719.720,00
5	UPT RSK Gigi dan Mulut	10.500.000.000,00	339.819.420,00	3,24	20,00	10.160.180.580,00
6	Rumah Sakit Umum Daerah Labuang Baji	173.282.292.739,00	26.156.685.598,00	15,09	17,73	147.125.607.141,00
7	Rumah Sakit Umum Daerah Haji Makassar	94.405.356.950,00	12.502.874.747,20	13,24	19,56	81.902.482.202,80
8	Rumah Sakit Khusus Daerah	163.999.997.012,00	9.998.884.441,00	6,10	18,40	154.001.112.571,00
9	Rumah Sakit Khusus Ibu Dan Anak Pertiwi	33.534.432.764,00	4.293.501.740,00	12,80	14,07	29.240.931.024,00
10	Rumah Sakit Khusus Daerah Ibu dan Anak Sitti Fatimah	31.224.185.031,00	4.668.368.980,00	14,95	22,12	26.555.816.051,00
11	Rumah Sakit Umum Sayang Rakyat	71.440.352.016,00	5.355.318.329,00	7,50	6,22	66.085.033.687,00

NO	NAMA ORGANISASI	JUMLAH DANA (Rp)	REALISASI BULAN S/D BULAN MARET			SISA DANA / BELUM DICAIRKAN SAMPAI DENGAN BULAN MARET
			KEUANGAN		% FISIK	
			(Rp)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7
12	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	1.023.793.492.512,00	14.484.122.323,00	1,41	1,59	1.009.309.370.189,00
13	Satuan Polisi Pamong Praja	39.855.000.000,00	7.317.827.687,00	18,36	18,53	32.537.172.313,00
14	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	16.516.911.916,00	1.644.747.636,00	9,96	18,83	14.872.164.280,00
15	Dinas Sosial	59.012.395.477,00	5.942.836.887,00	10,07	10,55	53.069.558.590,00
16	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	32.519.010.241,00	4.554.407.534,00	14,01	17,34	27.964.602.707,00
17	Dinas Pemb.Perempuan, Perlindungan Anak, Pengend. Penduduk dan KB	14.393.651.219,00	1.599.988.158,00	11,12	17,23	12.793.663.061,00
18	Dinas Ketahanan Pangan	31.465.682.443,00	2.494.704.657,00	7,93	8,28	28.970.977.786,00
19	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	452.403.954.694,00	23.472.352.112,00	5,19	10,09	428.931.602.582,00
20	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	66.080.872.824,00	2.527.684.324,00	3,83	7,72	63.553.188.500,00
21	Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup	24.703.818.961,00	2.456.629.801,00	9,94	15,86	22.247.189.160,00
22	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	11.217.605.917,00	1.409.243.995,00	12,56	15,12	9.808.361.922,00

NO	NAMA ORGANISASI	JUMLAH DANA (Rp)	REALISASI BULAN S/D BULAN MARET			SISA DANA / BELUM DICAIRKAN SAMPAI DENGAN BULAN MARET
			KEUANGAN		% FISIK	
			(Rp)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7
23	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	18.363.879.658,00	1.843.164.376,00	10,04	10,17	16.520.715.282,00
24	Dinas Perhubungan	41.329.287.045,00	4.482.962.445,00	10,85	11,38	36.846.324.600,00
25	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian	40.699.942.028,00	2.863.113.708,00	7,03	11,43	37.836.828.320,00
26	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	26.655.749.550,00	2.445.848.713,00	9,18	23,28	24.209.900.837,00
27	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	17.257.286.022,00	2.166.678.721,00	12,56	19,16	15.090.607.301,00
28	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	130.143.124.408,00	17.917.891.627,00	13,77	15,96	112.225.232.781,00
29	Dinas Kebudayaan Dan Kepariwisataan	42.919.477.117,00	2.808.212.222,00	6,54	13,39	40.111.264.895,00
30	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	48.737.299.521,00	6.177.986.140,00	12,68	17,24	42.559.313.381,00
31	Dinas Kelautan dan Perikanan	76.988.055.667,00	4.428.043.670,00	5,75	7,75	72.560.011.997,00
32	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	50.195.158.290,00	2.839.095.566,00	5,66	8,53	47.356.062.724,00

NO	NAMA ORGANISASI	JUMLAH DANA (Rp)	REALISASI BULAN S/D BULAN MARET			SISA DANA / BELUM DICAIRKAN SAMPAI DENGAN BULAN MARET
			KEUANGAN		% FISIK	
			(Rp)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7
33	Dinas Kehutanan	155.481.686.505,00	16.308.054.187,00	10,49	15,78	139.173.632.318,00
34	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	42.127.474.403,00	2.833.897.843,00	6,73	7,48	39.293.576.560,00
35	Dinas Perdagangan	20.626.216.745,00	1.626.151.577,00	7,88	8,55	19.000.065.168,00
36	Dinas Perindustrian	27.783.274.874,00	1.768.418.418,00	6,37	6,62	26.014.856.456,00
37	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	3.479.353.181,00	263.683.364,00	7,58	13,63	3.215.669.817,00
38	Biro Kesejahteraan Rakyat	59.643.792.065,00	278.973.122,00	0,47	18,40	59.364.818.943,00
39	Biro Hukum	2.807.801.539,00	401.424.695,00	14,30	14,30	2.406.376.844,00
40	Biro Organisasi	3.960.932.584,00	430.355.445,00	10,87	25,85	3.530.577.139,00
41	Biro Umum	156.098.947.013,00	16.404.322.403,00	10,51	10,51	139.694.624.610,00
42	Biro Administrasi Pimpinan	7.047.149.040,00	621.723.887,00	8,82	17,64	6.425.425.153,00
43	Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan	2.645.426.165,00	243.053.387,00	9,19	14,76	2.402.372.778,00
44	Biro Pengadaan Barang/Jasa	5.070.658.251,00	139.608.004,00	2,75	6,50	4.931.050.247,00
45	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	291.207.694.371,00	53.699.186.553,00	18,44	19,00	237.508.507.818,00

NO	NAMA ORGANISASI	JUMLAH DANA (Rp)	REALISASI BULAN S/D BULAN MARET			SISA DANA / BELUM DICAIRKAN SAMPAI DENGAN BULAN MARET
			KEUANGAN		% FISIK	
			(Rp)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7
46	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	60.775.983.028,00	7.194.775.645,00	11,84	21,16	53.581.207.383,00
47	Badan Keuangan dan Aset Daerah	2.044.138.422.804,00	178.722.072.105,00	8,74	10,73	1.865.416.350.699,00
48	Badan Pendapatan Daerah	168.380.155.110,00	41.873.888.700,00	24,87	32,46	126.506.266.410,00
49	Badan Kepegawaian Daerah	23.807.094.301,00	3.826.289.578,00	16,07	18,04	19.980.804.723,00
50	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	30.617.569.648,00	3.875.224.059,00	12,66	13,16	26.742.345.589,00
51	Badan Penghubung Daerah	14.284.607.552,00	1.702.939.756,00	11,92	11,97	12.581.667.796,00
52	Inspektorat Provinsi Sulawesi Selatan	54.658.000.348,00	5.393.681.443,00	9,87	12,34	49.264.318.905,00
53	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	56.721.006.231,00	1.284.132.429,00	2,26	16,39	55.436.873.802,00
	JUMLAH	**9.222.097.089.004,0**	**800.168.694.258,20**	**8,68**	**10,98**	**8.421.928.394.745,80**

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa total anggaran RKPD Rp. 9,22 trilyun lebih, dan hingga Maret 2022 realisasi keuangan baru mencapai Rp. 800,16 milyar lebih atau 8,68 % dan realiasi fisik baru mencapai 10,98 %. Rendahnya capaian kinerja kegiatan oleh karena beberapa kegiatan / sub kegiatan masih dalam penyelesaian administrasi untuk proses tender dan proses pencairan. Diharapkan pada tahun 2022 seluruh program dan kegiatan serta sub kegiatan akan dapat tercapai sesuai dengan mekanisme dan peraturan yang berlaku.

Tabel II.404.
Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja

No.	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Simbol	Interval nilai Realisasi Kinerja1 tahun
1.	Sangat Tinggi	ST	91 % ≤ 100 %
2.	Tinggi	T	76 % ≤ 90%
3.	Sedang	S	66 % ≤ 75 %
4.	Rendah	R	51 % ≤ 65 %
5.	Sangat Rendah	SR	≤ 50 %

Sumber :Permendagri Nomor 86 Tahun 2017.

Bila melihat capaian kinerja kegiatan RKPD Provinsi Sulawesi Selatan pada Tahun 2021 dapat dijelaskan bahwa dari 53 OPD yang melaksanakan program dan kegiatan, terdapat 3.085 indikator kegiatan dan 1.846 Sub kegiatan, namun dalam proses pelaksanaannya masih terdapat 462 sub kegiatan dengan realisasi keuangan masih dalam dikategorikan rendah bahkan sangat rendah, namun dari sisi capaian kinerja kegiatan sudah dikategorikan tinggi oleh karena adanya sub kegiatan kegiatan OPD sudah melampaui dari target capaian yang telah ditentukan. Adapun rincian kategori capaian dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Untuk capaian kenerja RKPD Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2021 terdapat 37 OPD pd yang berkinerja Sangat Tinggi, 8 OPD yang bekinerja Tinggi, 0 OPD yang berkinerja Sedang, 4 OPD yang berkinerja Rendah dan 4 OPD yang berkinerja Sangat Rendah, sehingga kalau dirata ratakan kinerjanya 87,49 % (kategori Tinggi)
2. Sedangkan untuk realisasi keuangan, dari 53 OPD yang melaksanakan program/kegiatan dan sub kegiatan, 8 OPD dengan realisasi keuangan kategori Sangat Tinggi, 15 OPD dengan realisasi keuangan kategori Tinggi, 10 OPD dengan realisasi Keuangan kategori Sedang, dan 8 OPD dengan realisasi keuangan kategori Rendah, serta 11 dengan realisasi keuangan kategori Sangat Rendah sehingga secara komulatif relisasi keuangan hanya mencapai 68,84 % (kategori Sedang).

2.8. PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DAERAH

Permasalahan pembangunan daerah Provinsi Sulawesi Selatan menggambarkan hasil identifikasi bebrapa factor yang mempengaruhi pencapaian kinerja pembangunan daerah Tahun 2021, khususnya yang terkait dengan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang diamanatkan dalam RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023, permasalahan yang berhubungan dengan prioritas pembangunan daerah dan permasalahan lainnya yang berhubungan dengan penyelenggaraan urusan baik berupa layanan dasar maupun penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah.

2.8.1. Permasalahan Daerah yang berhubungan dengan prioritas dan sasaran pembangunan daerah

Permasalahan pembangunan daerah yang berhubungan dengan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah serta prioritas pembangunan daerah Sulawesi Selatan diidentifikasi berdasarkan factor penghambat pencapaian target tujuan dan sasaran pembangunan yang diamanatkan dalam Perubahan RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023. Berdasarkan gambaran target dan capaian tujuan dan sasaran pembangunan serta prioritas pembangunan daerah, sebagaimana telah dibahas pada pembahasan sebelumnya, maka dapat diidentifikasi beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Belum optimalnya upaya peningkatan akuntabilitas kinerja pemerintahan;

Pemerintah melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Pemerintah setiap tahunnya melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja yang bertujuan untuk menilai tingkat akuntabilitas atau pertanggungjawaban atas hasil (*outcome*) terhadap penggunaan anggaran dalam rangka terwujudnya pemerintahan yang berorientasi kepada hasil (*result oriented government*). Provinsi Sulawesi Selatan menargetkan nilai SAKIP Provinsi di atas 70 -80 atau dengan predikat BB pada tahun 2021.

Akan tetapi berdasarkan hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah Tahun 2021 yang dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan memperoleh nilai 65,01 atau predikat B. Hasil evaluasi tersebut menunjukkan bahwa efektifitas dan efisiensi kualitas pembangunan budaya kinerja birokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi hasil pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan sudah mulai berjalan namun masih memerlukan perbaikan.

Belum optimalnya upaya peningkatan akuntabilitasi kinerja Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan antara lain dikarenakan Indikator Kinerja Utama (IKU) Sebagian besar OPD belum sepenuhnya relevan dengan tujuan dan sasaran. Pemerintah provinsi Sulawesi Selatan telah mengembangkan dan mengimplementasikan aplikasi manajemen kinerja, namun belum terintegrasi antara perencanaan, penganggaran dan pemantauan capaian kinerja sehingga aplikasi tersebut belum dapat menggambarkan implementasi manajemen

kinerja secara keseluruhan. Selain itu, laporan kinerja pemerintah provinsi Sulawesi Selatan dan OPD belum menyajikan analisis terkait factor penghambat capaian kinerja dan analisis efisiensi penggunaan anggaran terhadap pencapaian kinerja serta belum semua hasil evaluasi internal terkait manajemen kinerja yang dilaksanakan oleh Inspektorat Provinsi Sulawesi Selatan ditindaklanjuti oleh OPD.

2. Belum optimalnya upaya peningkatan pemerataan infrastruktur wilayah;

Indeks Ketimpangan Williamson Sulawesi Selatan pada tahun 2021 mengalami peningkatan sebesar 0,039 dari tahun 2020 dengan nilai indeks 0,568. Walaupun peningkatan capaian ini menunjukkan adanya peningkatan kinerja pemerataan pembangunan, namun masih menunjukkan bahwa pemerataan pembangunan wilayah kabupaten/kota di Sulawesi Selatan belum optimal pencapaiannya.

Pembangunan infrastruktur konektivitas berupa infrastruktur jalan yang merupakan pendukung dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi wilayah Sulawesi Selatan pemenuhannya masih perlu dioptimalkan keandalan dan pemerataan konektivitasnya untuk mendukung arus distribusi komoditas unggulan wilayah. Hal ini tergambarkan pada capaian kemantapan jalan provinsi tahun 2021 yang hanya sebesar 70,01 persen dari target kemantapan jalan provinsi sebesar 72,30 persen. Sedangkan pada layanan transportasi darat sebagai sarana distribusi menunjukkan adanya penurunan persentase pelayanan yang cukup besar pada tahun 2021 yang hanya sebesar 43 persen yang menandakan bahwa masih terdapat wilayah kabupaten di Sulawesi Selatan yang belum terjangkau oleh pelayanan transportasi darat.

Selain infratsruktur konektivitas, infrastruktur layanan lainnya yang belum optimal pencapaiannya adalah infratsruktur kelistrikan, walaupun menunjukkan adanya peningkatan rasio desa berlistrik dari 97,50 persen pada tahun 2020 meningkat menjadi 98,20 persen pada tahun 2021 namun belum mencapai target yang ditetapkan pada tahun 2021 yaitu persentase desa berlistrik sebesar 99 persen.

Beberapa hal yang mempengaruhi capaian kinerja infrastruktur konektivitas jalan adalah kurangnya pengawasan pemanfaatan jalan oleh kendaraan bertonase tinggi yang mempengaruhi umur konstruksi jalan, sedangkan menurunnya kinerja layanan transportasi darat dipengaruhi oleh berkurangnya sarana transportasi. khususnya angkutan umum di kawasan perdesaan maupun kawasan perkotaan. Sedangkan target persentase desa berlistrik yang tidak tercapai pada tahun 2021 dikarenakan keterbatasan infratsruktur untuk menjangkau desa sasaran serta keterbatasan sumber energi yang akan digunakan untuk sebagai pembangkit listrik.

3. Belum optimalnya upaya pemerataan peningkatan kesejahteraan masyarakat;

Kesejahteraan masyarakat Sulawesi Selatan sebagaimana tujuan pembangunan daerah Sulawesi Selatan diharapkan terwujud pada PDRB Perkapita ADHB dan tingkat kemiskinan. Berdasarkan capaian kinerja

pembangunan tahun 2021, PDRB perkapita Sulawesi Selatan meningkat dari Rp. 59,66 Juta pada tahun 2020 menjadi sebesar Rp. 65,98 Juta pada tahun 2021. Demikian halnya dengan tingkat kemiskinan yang menunjukkan penurunan dari sebanyak 8,99 persen pada tahun 2020 (Bulan September) menurun menjadi sebanyak 8,53 persen pada tahun 2021 (Bulan September).

Akan tetapi kinerja peningkatan kesejahteraan masyarakat belum optimal pencapaiannnya, yang ditandai dengan belum tercapainya target persentase penduduk miskin Sulawesi Selatan sebesar 8,20 persen yang ditargetkan oleh Pemerintah dalam RKP Tahun 2021. Hal ini diakibatkan meningkatnya pengeluaran konsumsi rumah tangga yang belum diimbangi oleh peningkatan lapangan pekerjaan yang layak dan berkualitas untuk memenuhi kebutuhan konsumsi masyarakat.

Salah satu indikator peningkatan kesejahteraan masyarakat adalah meningkatnya Tingkat Partispasi Angkatan Kerja (TPAK) yang mengindikasikan besarnya persentase usia kerja yang aktif secara ekonomi yang pada bulan Agustus tahun 2021 meningkat sebesar 1,32 persen poin menjadi 64,73 persen dibandingkan dengan TPAK Bulan Agustus Tahun 202 sebesar 63,40. Akan tetapi peningkatan ini TPAK ini masih belum optimal karena ternyata capaian TPAK bulan Agustus 2021 mengalami penurunan sebesar 0,64 persen poin jika dibandingkan dengan TPAK bulan Februari 2021 sebesar 65,36 persen. Hal ini diakibatkan menurunnya penyerapan tenaga kerja pada beberapa sector, diantaranya sector konstruksi yang mengalami penurunan terbesar yaitu 0,83 persen poin.

Pembangunan Sulawesi Selatan diharapkan dapat menurunkan kesenjangan pendapatan antar lapisan masyarakat yang indikatornya adalah rasio gini yang capaiannya pada September Tahun 2021 sebesar 0,377 yang menunjukkan adanya penurunan kesenjangan sebesar 0,005 poin dibandingkan dengan capaian bulan September tahun 2020 sebesar 0,382. Selain menurunnya rasio gini, pemerataan kesejahteraan masyarakat di Sulawesi Selatan juga tergambar pada persentase pengeluaran pada kelompok penduduk 40 persen terbawah pada bulan September 2020 sebesar 17,95 persen yang menurun menjadi 17,67 persen pada bulan September 2021, hal tersebut menunjukkan bahwa Sulawesi Selatan termasuk ketimpangan rendah. Namun pemerintah provinsi Sulawesi Selatan perlu untuk lebih meningkatkan perencanaan pembangunan di kawasan perdesaan secara berkelanjutan agar kesenjangan antara perkotaan dan perdesaan semakin mengecil.

4. Belum optimalnya upaya peningkatan kualitas SDM;

Pembangunan manusia di Sulawesi Selatan terus menunjukkan peningkatan kinerja selama sepuluh tahun terakhir dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 0,86 persen per tahun dan meningkat dari level “sedang” menjadi “tinggi” sejak tahun 2017. Capaian IPM tahun 2021 sebesar 72,24 yang meningkat sebesar 0,31 poin dari IPM tahun 2020 sebesar 71,93 didukung oleh peningkatan semua komponen penyusunnya.

Umur Harapan Hidup saat lahir (UHH) yang merepresentasikan dimensi umur panjang dan hidup sehat terus meningkat dari tahun ke tahun. UHH

Sulawesi Selatan selama sepuluh tahun rata-rata tumbuh sebesar 0,24 persen per tahun, dan pada tahun 2021 mencapai 70,66 tahun. Dimensi pengetahuan pada IPM dibentuk oleh dua indikator, yaitu Harapan Lama Sekolah (HLS) penduduk usia 7 tahun ke atas dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) penduduk usia 25 tahun ke atas. Kedua indikator ini terus meningkat dari tahun ke tahun dengan rata-rata pertumbuhan HLS Sulawesi Selatan sebesar 1,51 persen per tahun, dan RLS tumbuh 1,37 persen per tahun. Sedangkan dimensi kualitas hidup manusia tergambarkan pada standar hidup layak yang direpresentasikan oleh pengeluaran per kapita (atas dasar harga konstan 2012) yang disesuaikan. Pada tahun 2021, pengeluaran per kapita yang disesuaikan masyarakat Sulawesi Selatan mencapai Rp11,18 juta. Angka ini meningkat dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 0,95 persen.

Akan tetapi kinerja peningkatan kualitas manusia belum menunjukkan hasil yang optimal, hal ini ditandai dengan capaian IPM Sulawesi Selatan Tahun 2021 sebesar 72,24 yang lebih rendah daripada capaian IPM Nasional sebesar 72,29. Memperhatikan laju pertumbuhan komponen penyusun IPM Sulawesi Selatan selama 10 tahun terakhir, maka pembangunan pada dimensi kesehatan dengan laju pertumbuhan rata rata 0,24 persen per tahun dan pada dimensi kualitas hidup manusia memerlukan upaya percepatan guna mengoptimalkan peningkatan kualitas manusia Sulawesi Selatan sehingga capaiannya bisa di atas capaian rata-rata nasional.

5. Belum optimalnya upaya peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah;

Peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah diharapkan terwujud melalui upaya hilirisasi komoditi bertujuan untuk meningkatkan produksi, meningkatkan kapasitas pengolahan, dan meningkatkan kapasitas pasar, yang diharapkan akan menghasilkan nilai tambah, memperkuat struktur industri, serta menyediakan lapangan kerja dan peluang usaha. Hilirisasi komoditas yang akan dikembangkan adalah program hilirisasi berbasis sektor pertanian meliputi pertanian tanaman pangan, perikanan, peternakan, perkebunan dan kehutanan. Dengan program hilirisasi ini diharapkan dapat mengembalikan kejayaan Sulawesi Selatan pada sektor produksi, industri pengolahan berbasis pertanian dan keunggulan pemasaran hasil, baik untuk pemenuhan kebutuhan dalam negeri maupun ekspor.

Sektor pertanian merupakan sector prioritas Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, karena sector ini telah terbukti menjadi penyelamat ekonomi daerah maupun nasional di masa pandemi karena dapat tumbuh positif di saat sektor lain mengalami pertumbuhan ekonomi yang negatif. Permasalahan yang dihadapi oleh pemerintah provinsi Sulawesi Selatan dalam meningkatkan produktivitas komoditas unggulan di sektor pertanian, adalah menurunnya penggunaan sarana dan prasarana pertanian dan belum optimalnya upaya pengawasan benih yang bersertifikat. Selain itu sebagai upaya mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan adalah implementasi penerapan sistem budi daya pertanian yang ramah lingkungan untuk menghindari penurunan kualitas lahan yang akan mengancam keberlanjutan usaha tani. Sedangkan permasalahan pada peningkatan produktivitas sektor

kelautan dan perikanan adalah belum optimalnya penataan Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) dari aspek pendataan stok perikanan, perizinan untuk penangkapan ikan, konektivitas antarpelabuhan perikanan beserta kelengkapan sarana prasarana.

Perbaikan ekonomi pada tahun 2021 yang digambarkan dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi menjadi 4,65 persen setelah terpuruk sebesar – 0,70 persen pada tahun 2020 diharapkan mendorong peningkatan aktivitas ekonomi dan penciptaan lapangan pekerjaan yang mampu meningkatkan pendapatan masyarakat. Meningkatnya aktivitas ekonomi masyarakat diharapkan juga dapat berkontribusi pada meningkatnya peran UMKM dalam rangka mendukung perkuatan ekonomi local. Upaya penguatan peran UMKM dalam perkuatan ekonomi Sulawesi Selatan menunjukkan hasil sesuai dengan target pembangunan, namun terdapat permasalahan yang dihadapi oleh pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dan koperasi yang masih membutuhkan peran dan fasilitasi pemerintah, khususnya Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan untuk mendorong percepatan transformasi ekonomi pada fokus peningkatan produktivitas antara lain meningkatkan nilai tambah produk UMKM, meningkatkan akses informasi terkait pembiayaan dan pemasaran, dan meningkatkan kapasitas dan kemampuan manajerial pelaku UMKM dan koperasi.

6. Peningkatan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan serta peningkatan ketahanan bencana belum optimal

Memperhatikan kinerja peningkatan kualitas lingkungan hidup Sulawesi Selatan, maka peningkatan kualitas lingkungan hidup akan berfokus pada beberapa capaian pembangunan yag belum optimal dalam rangka peningkatan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan, diantaranya upaya penanganan beban pencemaran untuk meningkatkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, meliputi upaya pemeliharaan kualitas udara, kualitas air, dan kualitas air laut, serta penanganan sampah spesifik. Selain itu, menurunnya indeks kualitas tutupan lahan dan menurunnya persentase RTH public kawasan perkotaan pada tahun 2021, sehingga diperlukan peningkatan upaya pengelolaan keanekaragaman hayati melalui fasilitasi dan pembinaan terkait penyediaaan ruang terbuka hijau kawasan perkotaan dan peningkatan kualitas tutupan lahan khususnya di kawasan hutan yang didukung dengan penguatan sistem perizinan, pengawasan, pengamanan, dan penegakan hukum dalam pengelolaan lingkungan hidup dan keanekaragaman hayati.

Saat ini Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan telah berhasil melampaui target potensi penurunan emisi GRK sebesar 105,6 persen upaya penurunan emisi GRK, yang didukung oleh peningkatan pemanfaatan EBT, namun seiring dengan akselerasi pertumbuhan ekonomi melalui penanganan pandemic COVID-19 dan pengalihan status pandemic menjadi endemic maka tantangan yang dihadapi pemerintah provinsi Sulawesi Selatan adalah mengoptimalkan kinerja pembangunan rendah karbon melalui pemulihan lahan berkelanjutan, termasuk peningkatan kuantitas dan kualitas RTH, pemulihan hutan serta peningkatan implementasi pertanian berkelanjutan, peningkatan upaya

perlindungan ekosistem *mangrove*, serta peningkatan upaya penangangan sampah perkotaan dan bahan pencemar lainnya.

Sedangkan permasalahan yang dihadapi pada upaya penguatan ketahanan bencana adalah belum tersedianya sistem peringatan dini bencana, baik yang bersifat bencana seketika (*sudden onset disasters*), seperti gempa bumi, tsunami, gerakan tanah, cuaca ekstrem, dan banjir bandang; maupun bencana yang bersifat perlahan (*slow onset disasters*), seperti kerusakan lingkungan dan kerusakan akibat perubahan iklim.

2.8.2. Permasalahan untuk Penentuan Program Prioritas Daerah (Permasalahan Menurut Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah)

Permasalahan pada bagian ini merupakan permasalahan pembangunan yang dibuat tiap urusan yang menyangkut layanan dasar dan tugas/fungsi tiap Perangkat Daerah. Identifikasi permasalahan menjelaskan apa yang menjadi masalah dimasa lalu dan masa mendatang serta gambaran solusi yang ditawarkan. Permasalahan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah harus konsisten dengan permasalahan yang dijabarkan dalam permasalahan perangkat daerah pada Renja Perangkat Daerah.

2.8.2.1. Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar

1. Pendidikan
   a. Masih terdapat Warga negara usia 16 – 18 tahun yang belum berpartisipasi dalam pendidikan menengah (SPM)
   b. Masih terdapat warga negara usia 4 – 18 tahun yang termasuk dalam penduduk dissabilitas yang berpartisipasi dalam pendidikan Khusus (SPM)
   c. Masih rendahnya Angka Partisipasi Murni (APM)
   d. Masih rendahnya Angka Partisipasi Sekolah Usia 1618 tahun.
   e. Rendahnya kualitas Penyelenggaraan pendidikan vokasional
   f. Kurangnya penguatan sekolah yang menerapkan kurikulum lokal penambahan waktu pelajaran agama.;
   g. Terbatasnya sarana dan prasarana untuk mendukung pendidikan melalui online
   h. Masih minimnya akses masyarakat terhadap layanan pendidikan daerah terpencil.
2. Kesehatan
   a. Masih rendahnya rasio tenaga kesehatan terhadap jumlah penduduk
   b. Masih rendahnya cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan.
   c. Masih rendahnya cakupan Cakupan Balita Pneumonia yang Ditangani.
   d. Rendahnya Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit TBC BTA
   e. Masih rendahnya Proporsi Kasus Tuberkulosis yang Diobati dan Sembuh dalam Program DOTS
   f. Masih rendahnya Cakupan Kunjungan Bayi
   g. Masih rendanya Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4
   h. Masih rendahnya Cakupan Pelayanan Nifas

i. Masih rendahnya Cakupan Pelayanan Anak Balita
j. Masih rendahnya Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6 24 bulan keluarga miskin.
k. Penurunan disparitas akses dan mutu pelayanan kesehatan melalui pembangunan rumah sakit regional dan ambulance siaga;
l. Kurangnya sarana prasarana dan tenaga kesehatan, khususnya pada daerah terisolir dan pulaupulau kecil;
m. Masih kurangnya akses dan kualitas pelayanan kesehatan terutama kepada ibu, anak, remaja dan lansia;
n. Masih tingginya prevalensi angka stunting
o. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
p. Belum optimalnya Warga Negara yang memperoleh kebutuhan air minum curah lintas kabupaten/kota (SPM)
q. Belum optimalnya Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik regional lintas kabupaten/kota
r. Masih kurangnya proporsi jaringan jalan dalam kondisi baik.
s. Masih rendahnya Persentase Jalan yang Memiliki Trotoar dan Drainase/Saluran Pembuangan Air(Minimal1,5Meter).
t. Masih kurangnya akses pada daerah terisolir dan daerahdaerah yang memiliki potensi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi wilayah di Kabupaten/Kota;
u. Masih rendahnya progres revisi RTRW Provinsi dan Kabupaten/kota, sertamasih terbatasnya rencana rinci tata ruang yang telah disusun
v. Belum optimalnya sinergitas rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah
w. Belum optimalnya pengembangan basis data penataan ruang dalam skala Provinsi Sulawesi Selatan

3. Perumahan Rakyat dan kawasan permukiman
   a. Belum optimalnya Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah Provinsi yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni (SPM)
   b. Masih rendahnya kawasan kumuh yang tertata
   c. Masih tingginya luasan permukiman kumuh kewenangan provinsi
   d. Belum optimalnya pemenuhan kebutuhan rumah layak huni khususnya bagi masyarakat miskin dengan keterbatasan akses pembiayaan
   e. Belum optimalnya Sistem Data dan Informasi perumahan dan Kawasan permukiman.
   f. Belum terpenuhinya air minum dan sanitasi layak
4. Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
   a. Masih terdapat potensi gangguan keamanan dan ketertiban umum.
   b. Persentase Penegakan PERDA masih belum optimal
5. Sosial
   a. Belum optimalnya Warga Negara penyandang disabilitas telantar yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di dalam panti (SPM)
   b. Belum optimalnya Warga Negara Anak Terlantar yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar anak terlantar (SPM)

c. Belum optimalnya Warga Negara Korban Bencana provinsi yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana provinsi (SPM)
d. Persentase Korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat dalam satu tahun belum optimal.
e. Masih minimnya penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial
f. Minimnya PMKS yang menerima program pemberdayaan sosial melalui kelompok usaha bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya
g. Terbatasnya SDM pengelola dan pendampingan verifikasi dan validasi Basis Data Terpadu (BDT) yang belum optimal
h. Belum optimalnya penanganan dan pemberian bantuan sosial pada korban bencana alam
i. Belum optimalnya upaya penyelenggaraan kesejahteraan bagi lanjut usia.
j. Minimnya tempattempat sosial/penampungan bagi usia lanjut.

2.8.2.2. Urusan Pemerintahan Wajib Bukan Pelayanan Dasar

6. Tenaga Kerja
   a. Tingginya Angka sengketa pengusahapekerja per tahun
   b. Masih rendahnya penyelesaian kasus dengan Perjanjian Bersama (PB)
   c. Rendahnya besaran Pengujian Peralatan di Perusahaan
   d. Masih rendahnya tenaga kerja yang berusaha sendiri dan pekerja bebas keluarga terhadap total penduduk yang bekerja.
   e. Belum optimalnya upaya peningkatan produktivitas dan kompetensi tenaga kerja melalui pelatihan berbasis kompetensi dan kewirausahaan
   f. Tingginya pemutusan hubungan kerja akibat Pandemi
   g. Menurunnya tenaga kerja yang berusaha sendiri dan pekerja bebas keluarga terhadap total kesempatan kerja di Sulawesi Selatan
   h. Rendahnya daya saing tenaga kerja
   i. Tingginya Tingkat Pengangguran Terbuka
   j. Belum kondusifnya hubungan industrial dan rendahnya kesadaran masyarakat dan pengusaha maupun syarikat pekerja/buruh dalam pelaku hubungan industrial
7. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
   a. Belum optimalnya proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPR
   b. Masih rendahnya partisipasi perempuan di lembaga swasta
   c. Masih tingginya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT)
   d. Masih rendahnya cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hokum
   e. Masih kurangnya layanan pemulangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan
   f. Masih rendahnya layanan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan
   g. Adanya kesenjangan gender di beberapa bidang pembangunan,

khususnya pada bidang ekonomi, dan politik

h. Tingginya jumlah korban kekerasan terhadap perempuan dan anak.

8. Pangan
   a. Masih rendahnya ketersediaan pangan utama (Beras, jagung dan kedelai).
   b. Masih rendahnya ketersediaan energi perkapita.
   c. Masih rendahnya ketersediaan protein perkapita
   d. Belum terwujudnya sistem logistik daerah yang terintegrasi dan informatif.
   e. Pola konsumsi pangan yang belum berimbang, khususnya untuk kelompok umbiumbian; pangan hewani; sayur dan buah; serta minyak dan lemak.
9. Pertanahan
   a. Masih minimnya penyelesaian kasus tanah Negara.
   b. Belum optimalnya proses pengadaan tanah karena masih rendahnya dukungan perencanaan pembangunan infrastruktur yang membutuhkan pengadaan lahankurangnya koordinasi dengan Kabupaten/Kota dan sosialisasi kepada masyarakat pada tahapan perencanaan, serta belum dilaksanakannya pemantauan terhadap penerbitan ijin penetapan lokasi;
   c. Belum optimalnya jangkauan dan pemahaman Reforma Agraria pada pemerintah daerah provinsi dan Kabupaten/kota di Sulawesi Selatan.
   d. Masih banyaknya ijin Hak Pakai (HP) dan Hak Guna Usaha (HGU) yang belum teridentifikasi kesesuaian pemanfaatannya serta yang telah habis masa pakainya.
   e. Belum tersedianya Perda LP2B yang yang berbasis spasial dan terintegrasi dengan RTR agar dapat berfungsi sebagai perangkat pengendalian alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B).
10. Lingkungan Hidup
   a. Masih rendahnya sampah yang tertangani pada kondisi khusus di Provinsi
   b. Belum terintegrasinya RAD Pengurangan Emisi Gas Rumah Kaca dengan dokumen perencanaan perangkat daerah
   c. Belum dilegalisasinya dokumen RPPLH sebagai acuan pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup Sulawesi Selatan
   d. Kemampuan penanganan sampah khususnya upaya mengurangan sampah dan limbah di Sulawesi Selatan masih terbatas.
   e. Belum ada rekomendasi dari pemerintah setempat untuk penunjukan lokasi TPA Regional
   f. Minimnya data dan informasi mengenai pengelolaan lingkungan hidup
   g. Kurangnya sinergitas terkait pengelolaan Lingkungan Hidup dengan Perangkat Daerah terkait.
   h. Minimnya keterlibatan masyarakat dalam menjaga kualitas lingkungan
11. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

a. Masih rendahnya pemanfaatan data kependudukan dalam berbagai sector pembangunan.
b. Belum optimalnya rasio penduduk berKTP per satuan penduduk
c. Belum seluruh masyarakat memiliki dokumen administrasi kependudukan.
d. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
e. Masih redahnya cakupan sarana dan prasarana perkantoran pemerintah desa yang baik
f. Masih belum optimalnya peran lembaga ekonomi masyarakat desa dalam mendukung perekonomian desa
g. Keluarga Berencana dan Pengendalian Penduduk
h. Rendahnya keikutsertaan Keluarga Berencana (KB) yang menggunakan alat kontrasepsi Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)

12. Perhubungan
    a. Belum optimalnya pengembangan koridor dan peningkatan jumlah armada bus angkutan umum massal berbasis jalan berupa Bus Rapid Transit (BRT) untuk membantu mengatasi kemacetan jalan dan peningkatan mobilitas antar wilayah;
    b. Masih diperlukannya upaya peningkatan pelayanan pada terminal penumpang
    c. tipe B secara kualitas bangunan utama dan penunjang terminal maupun secara kuantitas peningkatan jumlah terminal tipe B di Sulawesi Selatan.
    d. Belum terpenuhinya kebutuhan fasilitas keselamatan jalan sesuai jumlah dan standar, khususnya pada ruas jalan kewenangan provinsi
    e. Belum optimalnya kualitas dan kuantitas pelayanan pada pelabuhan pengumpan regional di Sulawesi Selatan.
13. Komunikasi dan Informatika
    a. Perlunya peningkatan efektivitas penerapan strategi dan pemanfaatan media komunikasi public
    b. Perlunya peningkatan sarpras infrastruktur Teknologi Informasi Komunikasi (TIK) yang memadai
    c. Perlunya peningkatan pemanfaatan aplikasi informatika dalam mendukung efektivitas dan efisiensi kinerja Pemerintah.
14. Koperasi dan UKM
    a. Tingkat pemahaman masyarakat tentang peran dan manfaat koperasi relative terbatas. Hal ini menjadikan koperasi belum menjadi pilihan utama masyarakat sebagai sarana perekonomian.
    b. Menurunnya jumlah koperasi aktif, akibat terbatasnya kapasitas dan kualitas SDM pengurus koperasi;
    c. Tingkat produktivitas dan daya saing UKM belum optimal akibat keterbatasan permodalan serta rendahnya penguasaaan proses produksi dan teknologi.
15. Penanaman Modal
    a. Terhambatnya investasi yang disebabkan antara lain permasalahan pada perolehan lahan dan ketersediaan tenaga

kerja yang tidak sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan perusahaan

b. Belum optimalnya upaya pemberian dukungan kemudahan berusaha dan perbaikan iklim berusaha bagi usaha kecil dan menengah (UKM) melalui penyederhanaan perizinan, peningkatan keterbukaan investasi, keterampilan tenaga kerja, teknologi serta peningkatan akses kredit bagi perusahaan kecil.

16. Kepemudaan dan Olahraga
    a. Belum optimalnya prestasi atlet termasuk atlet usia dini dan pelajar;
    b. Kurangnya sarana dan prasarana olahraga yang sesuai standar yang ditetapkan;
    c. Kurang optimalnya peran serta pemuda dalam menunjang keberhasilan pelaksanaan pembangunan daerah.
17. Statistik
    a. Perlunya peningkatan optimalisasi ketersediaan dan pemanfaatan data sektoral;
    b. Perlunya peningkatan optimalisasi peran/keterbukaan badan publik dalampenyediaan informasi;
    c. Perlunya peningkatan upaya mewujudkan single data dan penguatan pengelolaandata statistik sektoral.
18. Persandian
    a. Rebdahnya kesadaran dan sistem keamanan informasi berdasarkanhasil assessment.
19. Kebudayaan
    a. Masih kurangnya optimalisasi pelestarian dan pengembangan cagar budaya,serta nilainilai budaya lokal.
20. Perpustakaan
    a. Belum optimalnya pelayanan perpustakaan kepada masyarakat;
    b. Menurunnya minat baca dan minat pemanfaatan perpustakaan;
    c. Belum optimalnya sarpras dan SDM untuk mendukung gerakan literasi masyarakat.
21. Kearsipan
    a. Belum optimalnya pengelolaan kearsipan di instansi Pemerintah ProvinsiSulawesi Selatan.
    b. Terbatasnya sarana dan prasarana serta SDM pengelola arsip digital dalammendukung reformasi birokrasi.
    c. Belum optimalnya Penerapan Sistem Kearsipan Daerah Terintegrasi" untuk mendukung Proyek Prioritas Nasional yaitu Penerapan *earsip* terintegrasi.

2.8.2.3. Urusan Pemerintahan Pilihan

2.8.1.10.1 Kelautan dan Perikanan

2.8.1.10.1.1 Masih terbatasnya penggunaan teknologi dan infrastruktur dalam usahabudidaya garam.

2.8.1.10.1.2 Masih rendahnya penggunaan alat tangkap ramah lingkungan untuk menjaga keberlanjutan sumber daya kelautan.

2.8.1.10.1.3 Masih terbatasnya penggunaan benih berkualitas

dan terbatasnya akses dan tingginya harga pakan ikan.

2.8.1.10.1.4 Masih kurangnya ketaatan dan upaya pengendalian pemanfaatan ruang wilayah pesisir dan pulaupulau kecil serta penyusunan rencana rinci yang diamanatkan oleh RZWP3K Provinsi Sulawesi Selatan;

2.8.1.10.1.5 Belum optimalnya penguatan kelembagaan dan upaya pembinaan kepada petani untuk menerapkan Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB);

2.8.1.10.1.6 Belum optimalnya upaya penataan kawasan perikanan budidaya melalui pembangunan dan perbaikan infrastruktur.

2.8.1.10.2 Pariwisata

2.8.1.10.2.1 Belum optimalnya pengembangan pasar wisatawan ke Sulawesi Selatan.

2.8.1.10.2.2 Kurangnya kualitas dan kuantitas sarana prasarana serta pemasaran destinasi pariwisata.

2.8.1.10.2.3 Belum optimalnya kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia (SDM) dan Usaha Pariwisata yang berdaya saing di bidang pariwisata.

2.8.1.10.2.4 Rendahnya kesadaran masyarakat di sekitar destinasi pariwisata tentang sadar wisata dan kewirausahaan.

2.8.1.10.2.5 Kurangnya inovasi dan kreasi produk wisata dan produk UKM sektor pariwisata.

2.8.1.10.2.6 Pembiayaan untuk pengembangan Usaha Pariwisata di Sulawesi Selatan masih tinggi;

2.8.1.10.3 Pertanian

2.8.1.10.3.1 Terbatasnya jumlah tenaga kerja pertanian termasuk kapasitas dan kualitas SDMpertanian;

2.8.1.10.3.2 Terjadinya alih fungsi lahan pertanian pada beberapa wilayah, khususnya pada Kabupaten pendukung ketahanan pangan Sulawesi Selatan akan mempengaruhi peran Sulawesi Selatan sebagai lumbung pangan nasional;

2.8.1.10.3.3 Belum optimalnya penerapan modernisasi pertanian dan perkebunan sebagai sarana untuk mengefisienkan usaha tani di bidang tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan.

2.8.1.10.3.4 Belum optimalnya nilai tambah produk pertanian karena usaha pertanian masih berorientas pada on-farm;

2.8.1.10.3.5 Belum tercapainya mutu hasil pertanian dan perkebunan yang diharapkan, dan penerapan budidaya yang lebih ramah lingkungan;

2.8.1.10.3.6 Belum optimalnya penggunaan benih dan bibit unggul bersertifikat sehingga berdampak pada

tingkat produktivitas;

2.8.1.10.3.7 Masih dibutuhkan upaya peningkatan produksi dan produktivitas sub sector peternakan serta peningkatan upaya pendampingan kelompok peternak.

2.8.1.10.3.8 Menurunnya ketersedian beras di Sulawesi Selatan

2.8.1.10.3.9 Menurunnya ketersediaan energi dan protein perkapita di Sulawesi Selatan

2.8.1.10.3.10 Terjadi rentan Terhadap Kerawanan Pangan di Sulawesi Selatan

2.8.1.10.3.11 Menurunnya Kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB di Sulawesi Selatan

2.8.1.10.3.12 Menurunnya Produksi sektor pertanian di Sulawesi Selatan

2.8.1.10.3.13 Masih minimnya penyediaan dan pengembangan sarana dan prasarana pertanian

2.8.1.10.3.14 Menurunnya Kontribusi sektor perkebunan (tanaman keras) terhadap PDRB

2.8.1.10.3.15 Menurunnya produksi sektor perkebunan di Sulawesi Selatan.

2.8.1.10.3.16 Dampak perubahan iklim global yaitu perubahan pola dan intensitas curah hujan, makin sering terjadinya fenomena iklim ekstrim ElNino dan La-Nina yang dapat mengakibatkan kekeringan dan banjir;

2.8.1.10.3.17 Degradasi kualitas lahan disebabkan penggunaan pupuk anorganik dan pestisida yang berlebihan;

2.8.1.10.3.18 Meningkatnya alih fungsi lahan;

2.8.1.10.3.19 Terbatasnya infrastruktur pengairan dan jalan usahatani;

2.8.1.10.3.20 Belum optimalnya laboratorium pelayanan uji standar dan mutu bidang pertanian dan bidang perkebunan;

2.8.1.10.3.21 Ketersediaan benih/bibit unggul bermutu belum cukup;

2.8.1.10.3.22 Belum optimalnya penggunaan pestisida/obat-obatan pertanian yang ramah lingkungan;

2.8.1.10.3.23 Masih kurangnya alat dan mesin pertanian;

2.8.1.10.3.24 Belum berkembangnya usaha penangkaran benih/bibit yang bermutu;

2.8.1.10.3.25 Menurunnya minat generasi muda untuk menjalankan usahatani;

2.8.1.10.3.26 Belum optimalnya pengembangan kelembagaan petani baik formal maupun informal;

aa. Terbatasnya pemanfaatan kelembagaan penyuluhan untuk informasi dan promosi pertanian;

bb. Rendahnya harga komoditas tertentu tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;

cc. Rendahnya daya saing komoditas tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;

dd. Konsumsi beras masih cukup tinggi sehingga terjadi ketidakseimbangan konsumsi bahan pangan;

ee. Belum optimalnya dan belum sepenuhnya dipahami tentang keadilan dan kesetaraan gender untuk diterapkan

ff. Belum optimalnya pelayanan dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah gg. Masih terbatasnya Pemberian subsidi input produksi dan outputnya,

meningkatkan produktivitasnya

hh. Masih rendahnya jaminan harga dan Jaminan peningkatan pendapatan petani myang berlahan sempit.

ii. Belum Optimalnyai pengelolahan varietas unggulan di Sulawesi Selatan jj. Degradasi lahan disebabkan penggunaan pupuk anorganik dan pestisida yang berlebihan.

2.8.1.10.4 Kehutanan

2.8.1.10.4.1 Belum optimalnya upaya pengelolaan hutan berbasis masyarakat dalam rangkapeningkatan kesejahteraan masyarakat;

2.8.1.10.4.2 Masih terdapatnya konflik kepemilikan dan pemanfaatan kawasan hutan yang mempengaruhi pelaksanaan kegiatan pembangunan;

2.8.1.10.4.3 Masih terdapatnya lahan kritis dan belum optimalnya pelaksanaan rehabilitasi lahan kritis;

2.8.1.10.4.4 Belum Optimlnya Pemanfaatan potensi sumber daya hutan, utamanya dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat di sekitar kawasan hutan.

2.8.1.10.4.5 Menurunnya Kontribusi Sektor Kehutanan Terhadap PDRB

2.8.1.10.4.6 Kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB Sulawesi Selatan relatif rendah

2.8.1.10.4.7 Masih terbatasnya SDM tenaga teknis kehutanan yang berkompetensi Pengendali Ekosistem Hutan (PEH), Penyuluh Kehutanan, Polisi Kehutanan

2.8.1.10.4.8 Belum selesainya penataan batas kawasan hutan, sehingga belum terwujud secara fisik dan belum terpenuhinya aspek yuridis kawasan hutan.

2.8.1.10.4.9 Perubahan/ alih fungsi kawasan hutan menjadi pemukiman, perkebunan, pertanian dan penambangan yang berimplikasi pada bertambahnya lahan kritis dan degradasi fungsi kawasan hutan.

2.8.1.10.4.10 Tingginya dinamika konflik penguasaan lahan di daerah akibat belum tersosialisasikannya secara baik rangkaian proses pengukuhan kawasan hutan hingga pada tahap penetapan kawasan hutan dan kawasan Perairan Provinsi Sulawesi Selatan.

2.8.1.10.4.11 Belum maksimalnya pelayanan publik bidang keplanologian, antara lain disebabkan oleh kurangnya sumberdaya manusia dan minimnya fasilitas penunjang kegiatan seperti pengambilan dan penyusunan data spasial bidang kehutanan.

2.8.1.10.4.12 Fasilitas berupa peralatan kegiatan inventarisasi hutan masih terbatas

2.8.1.10.4.13 Tidak seimbangnya kapasitas izin industri kehutanan dengan ketersediaan bahan baku kayu.

2.8.1.10.4.14 Belum tertibnya penatausahaan hasil hutan.

2.8.1.10.4.15 Pelayanan terhadap masyarakat masih terkesan berbelit, lamban dan mahal akibat personil belum ditunjang oleh profesionalisme dan kompetensi yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat dan dunia usaha.

2.8.1.10.4.16 Belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan kawasan hutan lindung dan hutan produksi serta kontribusinya terhadap penerimaan negara bukan pajak sektor kehutanan

2.8.1.10.4.17 Belum adanya layanan informasi online terkait potensi pengembangan Kawasan hutan dan hasil hutan bukan kayu sebagai pendorong optimalisasi kerjasama dengan pihak terkait.

2.8.1.10.4.18 Data detail kondisi dan karaekteristik DAS sebagai dasar perencanaan dalam menyusun rencana kegiatan dan rencana pengelolaan belum ada, sehingga efektifitas pelaksanaan kegiatan tidak dapat mencapai sasaran secara tepat sesuai skala prioritas.

2.8.1.10.4.19 Kewenangan kegiatan RHL dan Pengelolaan DAS Provinsi Sulawesi Selatan berada di luar kawasan hutan, sementara kawasan hutan merupakan hulu dari kegiatan RHL.

2.8.1.10.4.20 Masih luasnya lahan kritis baik di dalam maupun di luar kawasan hutan.

2.8.1.10.4.21 Adanya kerusakan wilayah DAS yang diindikasikan dengan adanya banjir, erosi dan longsor yang terjadi di beberapa wilayah Sulawesi Selatan

2.8.1.10.4.22 Tingkat sedimentasi sungai masih relatif tinggi, banyak dibutuhkan bangunan perangkap sedimen (gully plug, dam penahan dan Pengendali, rorak dan embung).

2.8.1.10.4.23 Tingkat erosi permukaan masih tinggi ditandai dengan tingginya laju aliran permukaan (run off),

rendahnya penyerapan (infiltrasi) dan mempengaruhi jumlah kandungan air tanah

2.8.1.10.4.24 Konflik Tenurial yang masih berkepanjangan

2.8.1.10.4.25 Pengrusakan hutan oleh masyarakat karna alasan ekonomi, batas kawasan yang tidak jelas dan kurangnya kesadaran masyarakat dalam melestarikan kawasan hutan.

2.8.1.10.4.26 Rasio jumlah tenaga Pengamanan Hutan/ Polisi Kehutanan dibanding dengan luas Kawasan hutan yang begitu luas belum ideal.

aa. Dalam upaya penegakan hukum (Penyidikan) Polisi Kehutanan bb. Belum optimalnya kapasitas SDM Polisi Kehutanan.

cc. Keterbatasan Sarana Prasarana Perlindungan dan Pengamanan Hutan dd. Tingginya kerusakan hutan di Sulawesi Selatan

ee. Banyaknya produk hukum kehutanan yang belum tersosialisasi dan belum dipahami masyarakat dan para pihak kehutanan di daerah.

ff. Tingginya kepentingan pemodal dalam pemanfaatan sumberdaya hutan

gg. Masih terjadinya gangguan dan ancaman terhadap keamanan hutan dan kelestarian sumber daya hutan yang disebabkan oleh faktor manusia dan daya alam;

hh. Belum optimalnya pelaksanaan operasi/patrol rutin penertiban dan pengamanan hutan serta penanganan tindak pelanggaran dibidang kehutanan;

ii. Masih rendahnya dukungan dan peran serta masyarakat dan para pihak terkait dalam upaya perlindungan dan pengamanan hutan.

jj. Jejaring pemasaran produk hasil usaha kelompok tani masih bersifat local.

2.8.1.10.5 Energi dan Sumber Daya Mineral

2.8.1.10.5.1 Masih maraknya Penambangan Tanpa Ijin (PETI) yang dilakukan olehmasyarakat dan kurangnya pemahaman penambangan yang benar (good miningpractice);

2.8.1.10.5.2 Belum optimalnya pemanfaatan EBT sebagai sumber energi dalam rangka peningkatan capaian rasio desa berlistrik.

2.8.1.10.5.3 Kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB Sulawesi Selatan relatif rendah

2.8.1.10.5.4 Masih bergantung pada penyediaan energi fosil

2.8.1.10.5.5 Masih ada daerah di pulau terpencil, terisolir dan

terdepan yang belum teraliri listrik
2.8.1.10.5.6 Jumlah Produksi Komoditas Tambang Menurun
2.8.1.10.5.7 Masih banyak daerah dan pualu yang belum mendapatkan air bersih di Sulawesi Selatan
2.8.1.10.5.8 Penurunan Kuantitas Air Tanah di Sulawesi Selatan
2.8.1.10.5.9 Masih Banyak Pemanfaatan Air Tanah Tanpa Izin
2.8.1.10.5.10 Masih banyaknya penambangan tanpa izin
2.8.1.10.5.11 Sumber Daya Manusia yang belum memadai
2.8.1.10.5.12 Sarana dan prasarana yang belum memada
2.8.1.10.6 Perdagangan
2.8.1.10.6.1 Rendahnya daya saing pasar tradisional dibandingkan dengan retail modernkarena belum didukung dengan sarana dan prasarana yang memadai.
2.8.1.10.6.2 Belum optimalnya Pelayanan Pengujian dan Sertifikasi Produk dan Komoditi Unggulan Orientasi Ekspor.
2.8.1.10.6.3 Belum optimalnya perlindungan terhadap konsumen dan penerapan SNI.
2.8.1.10.7 Industri
2.8.1.10.7.1 Tingkat produktivitas pendapatan masih rendah
2.8.1.10.7.2 Rendahnya tingkat pendidikan dan kualitas manajemen usahatani.
2.8.1.10.7.3 Pembangunan sektor industri pengolahan (manufacturing industry) masih belum optimal.
2.8.1.10.7.4 Rendahnya tingkat inovasi dan penerapan teknologi telah mengakibatkan produktivitas lahan sangat terbatas peningkatannya atau bahkan cenderung turun pada beberapa komoditas.
2.8.1.10.7.5 Belum optimalnya terhadap pemberdayaan petani dirasakan turut mempengaruhi tingkat produktivitas petani.
2.8.1.10.7.6 Penempatan Industri pengolahan di daerah masih rendah karena pertimbang jarak dengan pasar.
2.8.1.10.7.7 Belum optimalnya pemenuhan standarisasi kualitas produk industri kecil dan menengah;
2.8.1.10.7.8 Belum meratanya persebaran industri di wilayah Sulawesi Selatan, sehingga pertumbuhan lapangan pekerjaan lebih banyak bertumpu pada kawasan perkotaan dibandingkan dengan pedesaan
2.8.1.10.7.9 Rendahnya kemampuan kemitraan usaha antara IKM dengan industri besar.
2.8.1.10.7.10 Tingginya ketergantungan terhadap bahan baku impor baik bahan baku, bahan penolong maupun bahan setengah jadi, terutama industri makanan, tekstil dan logam;
2.8.1.10.7.11 Kurangnya ketersediaan dukungan sarana dan prasarana industri, yang meliputi pengelolaan

lingkungan, kawasan industri, lahan industri dan infrastruktur penunjang;

2.8.1.10.7.12 Terbatasnya pemberdayaan industri kecil dan menengah, khususnya melalui upaya penguatan sentra, unit pelayanan teknis, tenaga penyuluh, konsultan dan penyediaan pusatpusat promosi;

2.8.1.10.7.13 Ketransmigrasian Masih kurangnya optimalnya pelaksanaan pemetaan calon transmigran pada saat proses seleksi sehingga pengiriman transmigran tidak sesuai dengan ketrampilan yang dibutuhkan dilokasi;

2.8.1.10.7.14 Kurangnya kesiapan provinsi penempatan transmigran untuk menyediakan sarana dan prasarana pemukiman.

2.8.1.10.7.15 Kontribusi Sektor Industri Terhadap PDRB.

2.8.2.4. Urusan Penunjang Pemerintahan

2.8.1.10.8 Perencanaan

2.8.1.10.8.1 Belum optimalnya ketersediaan, akurasi data dan informasi aktual gunapenyusunan rencana dan evaluasi program pembangunan.

2.8.1.10.8.2 Ketersediaan data terkini yang belum akurat

2.8.1.10.8.3 Monitoring dan evaluasi yang belum optimal

2.8.1.10.8.4 Koordinasi dan sinkronisasi proses perencanaan daerah belum optimal

a. Belum optimalnya pemanfaatan hasilhasil penelitian untuk pengambilan kebijakan perencanaan pembangunan daerah

2. Keuangan
   a. Belum optimalnya koordinasi antar instansi di daerah Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan terkaitidentifikasi serta pemetaan sumber PAD baru dari sektor PAP.;
   b. Belum optimalnya pemanfaatan aset daerah untuk mendorong pendapatan aslidaerah.
3. Kepegawaian dan Diklat
   a. Belum optimalnya sinergitas antara kebutuhan pengembangan kompetensi PNSdengan pelaksanaan pendidikan dan latihan formal dalam rangka peningkatankapasitas PNS;
   b. Belum optimalnya pemetaan kompetensi PNS sebagai dasar pengembangankompetensi dan karier;
4. Penelitian dan Pengembangan
   a. Pemanfaaatan hasil litbang belum sepenuhnya mendukung kebutuhanperencanaan pembangunan;
   b. Belum optimalnya upaya fasiitasi penerapan inovasi daerah terhadap perangkatdaerah.
5. Pengawasan
   a. Masih rendahnya Kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP;
   b. Belum optimalnya penyelesaian tindak lanjut temuan hasil

pemeriksaan baik internal maupun ekternal;

c. Belum optimalnya penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di SKPD Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
d. Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja OPD masih belum sepenuhnya berorientasi pada hasil yang berarti OPD belum sepenuhnya mempertanggungjawabkan kinerja berdasarkan tugas dan fungsi OPD
e. Opini atas laporan Keuangan BPKRI menjadi sebagai salah satu indicator dalam penatausahakan dan mempertanggungjawabkan keuangan secara baik harus tetap dipertahankan guna mewujudkan tata kelola keuangan secara akuntabel.
f. Implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) khususnya dilingkungan OPD belum memadai sehingga belum dapat sepenuhnya mengidentifikasi kegiatankegiatan berdasarkan analisis resiko.
g. Belum Optimalnya Keterlibatan Masyarakat dalam melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan sangat di butuhkan dalam mewujudkan kepemerintahan yang baik sehingga masih di perlukan sosialisasi serta membuka jalur pengaduan secara terbuka dan respon yang lebih cepat dalam menindaklanjuti pengaduan masyarakat.
h. Penyelesaian Rekomendasi Tindaklanjut hasil pemeriksaan eksternal maupun internal hasil audit masih belum cukup memadai. Tindak lanjut hasil pemeriksaan merupakan salah satu indikator keberhasilan suatu pemeriksaan.
i. Kualitas penyelenggaraan pemerintah Provinsi dan Pemerintah kabupaten/Kota berdasarkan hasil Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah masih menunjukkan kabupaten/kota hasil agregasi yang cukup memuaskan. Belum optimalnya pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di setiap unit kerja.
j. Pengelolaan asset pemerintah provinsi oleh OPD khususnya dalam pengelolaan administrasi kepemilikan serta inventarisasi aset masih belum tertib.
k. Tingkat Kapabilitas Berdasarkan Penilaian Mandiri (self assessment) Kapabilitas APIP oleh Inspektorat Provinsi Sulawesi Selatan diperoleh kesimpulan bahwa Kapabilitas Inspektorat Provinsi Sulawesi Selatan masih berada pada kategori “Infrastructure” atau di “Level 2” dari lima tingkatan (level).

2.9. Isu Strategis

Isu strategis merupakan suatu kondisi yang berpotensi menjadi masalah maupun menjadi peluang pembangunan bagi Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan di masa mendatang serta pemanfataan potensi daerah untuk dikelola secara tepat agar dapat menjadi modal pembangunan. Perumusan isu strategis merupakan bagian penting dan akan menentukan proses penyusunan rencana pembangunan, untuk itu isu strategis harus diperhatikan dan dikedepankan

dalam perencanaan pembangunan. Isu strategis pembangunan Sulawesi Selatan Tahun 2023, didasarkan pada hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun 2021 dan memperhatikan isu global, isu nasional dan isu daerah untuk mencapai sasaran pembangunan daerah melalui prioritas pembangunan daerah Sulawesi Selatan Tahun 2023.

2.9.1. Evaluasi Pelaksanaan RKPD Tahun 2021

2.9.1.1. Isu Global

Isu global merupakan potensi permasalahan maupun potensi peluang yang bersifat global yang berpotensi untuk mendukung maupun menghambat pencapaian sasaran pembangunan Sulawesi Selatan Tahun 2023 yang juga merupakan tahun terakhir dari RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan, yang meliputi:

1. Varian COVID-19

Persebaran pandemic COVID-19 hingga tahun 2021 terus berlanjut seiring munculnya perkembangan varian baru. COVID-19 varian Delta dan varian Omicron menyebabkan beberapa negara mengalami lonjakan hingga memunculkan gelombang baru, yang membatasi pemulihan ekonomi pada tahun 2021. Varian baru omicron menjadi tantangan dalam mendukung pertumbungan ekonomi regional maupun nasional, meskipun angka kematian telah menurun.

Vaksinasi yang telah dimulai sejak tahun 2021 terbukti mampu mengendalikan penyebran pandemic COVID-19 menuju pencapaian herd immunity, hal ini terlihat bahwa walaupun terjadi lonjakan varian Delta, namun pertumbuhan ekonomi pada periode yang sama tetap menunjukkan trend positif. Berdasarkan data vaksinasi hingga 10 Februari 2022, jumlah orang yang telah divaksinasi dosis 1 di Provinsi Sulawesi Selatan sebanyak 5,78 juta orang, atau sebesar 81,96 persen dari target vaksinasi, dosis 2 telah mencapai 3,74 juta orang, atau sebesar 53,03 persen dari target, namun dosis 3 baru mencapai 82.850 orang. Dengan memperhatikan data perkembangan COVID-19 di Indonesia berdasarkan provinsi, maka diperoleh gambaran data perkembangan COVID-19 di Sulawesi Selatan yaitu hingga bulan Juni 2022, pasien COVID-19 yang terkonfirmasi sebanyak 143.515 orang atau sebesar 2,37 persen dari pasien terkonfirmasi di Indonesia, pasien yang meninggal sebanyak 2.474 orang atau sebesar 1,58 persen dari pasien meninggal di Indonesia dan pasien yang sembuh sebanyak 141.018 orang atau sebesar 2,39 persen dari pasien yang sembuh di Indonesia sehingga diperoleh gambaran bahwa tingkat kesembuhan pasien yang terkonformasi di Sulawesi Selatan adalah sebesar 98,26 persen.

2. Pasokan Pangan dan Energi

Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa saat ini dunia, termasuk Indonesia dihadapkan pada kemungkinan kenaikan harga pangan dan energy yang signifikan. Harga pangan dunia mencapai rekor tertinggi pada Februari 2022 dengan kenaikan tahunan mencapai 20,70 persen. Saat ini harga komoditas energi dan sumber daya mineral, seperti minyak mentah, *crude palm oil* (CPO), dan komoditas mineral seperti nikel dan batu bara sudah melonjak.

Harganya diperkirakan akan semakin melambung seiring pecahnya perang Rusia-Ukraina yang akan membuat permintaan dunia tinggi, sementara pasokan berkurang yang akan meningkatkan inflasi termasuk di Indonesia.

Sebagai upaya mengatasi hal tersebut, maka Pemerintah harus memastikan stok kebutuhan pangan tercukupi untuk enam bulan ke depan dan menggalakkan pemanfaatan penggunaan sumberdaya dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan pangan dan bahan baku yang terkait dengan energi, dalam rangka mengurangi ketergantungan terhadap impor. Data menunjukkan tahun lalu importasi minyak goreng mencapai 93,3 juta dolar AS atau Rp 1,34 triliun (kurs Rp14.408 per dolar AS). Nilai ini naik 38,34 persen dibanding tahun sebelumnya. Impor minyak goreng berasal dari lima negara utama yakni Malaysia, Thailand Australia, Spanyol dan Italia. Pada Januari 2022 impor minyak goreng nabati tercatat sebanyak 4,42 juta kg. Jumlah ini naik 4,37 persen dibanding n Januari 2021 sebanyak 4,23 juta kg, setara dengan 8,2 juta dolar AS atau naik 42,29 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

3. Inflasi

Sejalan dengan kondisi ekonomi yang membaik, tingkat inflasi Sulawesi Selatan pada triwulan IV 2021 lebih tinggi dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Inflasi tahunan pada triwulan laporan utamanya disumbang oleh Kelompok Makanan, Minuman khususnya komoditas cabai rawit, minyak goreng, dan cabai merah serta Kelompok Transportasi seperti tarif angkutan udara dan tarif angkutan dalam kota. Sementara itu, penahan laju inflasi disumbang oleh penurunan harga beras, bawang merah, dan telur ayam ras. Dengan perkembangan tersebut, inflasi Provinsi Sulawesi Selatan secara keseluruhan tahun 2021 tercatat sebesar 2,40% (yoy), lebih tinggi dibandingkan dengan tahun 2020 sebesar 2,04 % (yoy). Sebagaimana telah diperkirakan sebelumnya, potensi tekanan inflasi meningkat menjelang periode Nataru akibat adanya peningkatan konsumsi dan pelonggaran aktivitas masyarakat. Inflasi Sulawesi Selatan tetap berada dalam sasaran inflasi nasional yang sebesar 3,0±1% pada tahun 2021. Pencapaian ini tidak terlepas dari berbagai upaya yang telah dilakukan oleh Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Sulawesi Selatan dalam menjaga stabilisasi harga dan mendukung pemulihan ekonomi

4. Perubahan Iklim

Melalui Undang Undang Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pengesahan Paris Agreement To The United Nations Framework Convention On Climate Change (Persetujuan Paris Atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan BangsaBangsa Mengenai Perubahan Iklim), Indonesia secara nasional (Nationally Determined Contribution) menyatakan komitmen untuk menurunkan emisi gas rumah kaca pada tahun 2030 sebesar 29% dengan upaya sendiri, dan 41% dengan bantuan dan kerjasama internasional. Sebagai bentuk dukungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dalam komitmen Pemerintah, dalam rangka mengantisipasi perubahan iklim dan meminimalisasi dampaknya maka pemerintah provinsi melakukan tiga pendekatan yaitu antisipasi, adaptasi dan mitigasi dampak perubahan iklim.

Antisipasi dampak perubahan iklim dilakukan pada tataran penyusunan rencana, kebijakan dan program dengan mempertimbangkan isu dampak perubahan iklim dalam pengambilan keputusan. Pada aspek adaptasi dilakukan penguatan kapasitas masyarakat baik individu maupun kelembagaan dalam menghadapi dampak perubahan iklim khususnya pada daerah daerah yang rentan.

Sedangkan pada pendekatan mitigasi, komitmen Pemerintah Provinsi dalam menurunkan emisi gas rumah kaca tertuang dalam Peraturan Gubernur No. 11 tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 59 Tahun 2012 tentang Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca provinsi Sulawesi Selatan. Emisi gas rumah kaca di Provinsi Sulawesi Selatan disumbang oleh beberapa sektor/bidang antara lain pertanian, kehutanan, energi dan transportasi serta bidang limbah. Secara total hasil pengkajian ulang terhadap target penurunan emisi gas rumah kaca di Provinsi Sulawesi Selatan adalah 5,6 persen atau setara dengan 300.000 ton CO2eq setiap tahun yang akan dicapai hingga tahun 2030 dengan menggunakan anggaran pemerintah provinsi.

Pelaksanaan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim tidak dapat dilakukan semata oleh pemerintah provinsi oleh karena itu diperlukan pelibatan secara aktif pihak swasta, organisasi sosial kemasyarakatan (CSO), mitra pembangunan dan pemerintah kabupaten/kota sesuai perannya masing - masing.

5. Transformasi Digital

Revolusi industri 4.0 memberikan dampak efisiensi dalam proses bisnis dan cara baru di setiap value chain dari suatu produk, walaupun juga menimbulkan disrupsi di berbagai industri. Revolusi Industri 4.0 kini telah masuk seiring dengan transformasi proses bisnis yang cepat ke arah ekonomi digital. Indonesia menjadi salah satu target bagi para pemain industri dunia yang tengah berebut masuk pasar Indonesia.

Salah satu transformasi model bisnis di era Industri 4.0 adalah penggunaan platform ecommerce oleh pelaku ekonomi. Melalui ecommerse, segala aktivitas transaksi jual beli barang, promosi, dan pembayaran dilakukan dengan menggunakan elektronik yang terhubung dengan internet. Perkembangan ecommerce sejatinya dapat dinikmati oleh segenap masyarakat, termasuk pelaku usaha. Pelaku usaha Usaha MIkro Kecil (UMK) menjadi bagian penting dalam perekonomian di Indonesia. Berdasarkan Sensus Ekonomi 2016 (SE 2016) jumlah usaha UMK mencapai 98,89 persen dan mampu menyerap tenaga kerja sekitar 85,29 persen dari total tenaga kerja non pertanian di Sulawesi Selatan. Namun, pemasaran menjadi kesulitan terbesar untuk Industri Mikro dan Kecil (IMK) di Sulawesi Selatan. Hal ini terlihat dari hasil Survei Industri Mikro Kecil tahun 2017. Selain itu, produk IMK yang dihasilkan masih dipasarkan secara lokal, hanya 8 persen produk IMK yang dipasarkan ke luar kabupaten/kota.

Transformasi digital para pelaku UMK di Sulawesi Selatan tidak bisa ditawar lagi. Hal ini perlu untuk meningkatkan kinerja usaha dan daya saing UMK itu sendiri sehingga tetap menjadi pilar yang kuat bagi perekonomian.

Selain peningkatan kinerja UMKM, pemanfaatan transformasi digital juga bisa dimanfaatkan selama proses on farm dan off farm dalam bidang pertanian. Potensi sistem pertanian digital juga memiliki peluang besar untuk meningkatkan minat dan kreativitas anak muda menggeluti bidang pertanian yang selama ini mulai menurun. Dengan adanya sistem pertanian digital pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan akan dapat mengontrol komoditas apa yang ditanam dan dipanen dari daerah satu ke daerah lainnya, sehingga memudahkan untuk mengetahui wilayah mana yang sedang surplus dan defisit pangan, mempermudah distribusi dari petani hingga konsumen dengan memperpendek sistem rantai pasok pangan serta tidak ada keterbatasan waktu dan tempat untuk mengakses segala informasi sehingga berpeluang meningkatkan keberdayaan petani.

Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan berharap dengan sistem pertanian digital akan mampu menurunkan ketimpangan akses pangan, mempercepat pemenuhan kebutuhan pangan dan berkontribusi nyata terhadap pembangunan perekonomian di Sulawesi Selatan melalui hilirisasi beberapa komoditas unggulan Sulawesi Selatan dengan sentuhan teknologi, konektivitas antar daerah, penguatan infrastruktur dan peningkatan daya saing.

Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, terus mendorong investor lokal menjadi investor hebat di daerah sendiri. Jika ini terwujud, maka daya dorong akan menjadi lebih kuat karena bagaimanapun juga pengusaha lokal yang lebih memahami kondisi SDM dan SDA di Sulawesi Selatan.

Salah satu tantangan investasi dalam era digital adalah masih minimnya kemampuan sumberdaya manusia dalam penguasaan teknologi. Dari 500 pelaku usaha yang terdaftar pada Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sulawesi Selatan, sekitar 50 % 60 % yang sudah mampu beradaptasi dengan era digitalisasi. Itupun hanya sekitar 15 % yang telah menerapkan kolaborasi teknologi dalam Enterprise Resource Planning (erp sistem).

2.9.1.2. Isu Strategis Nasional

Isu strategis nasional merupakan potensi permasalahan maupun potensi peluang yang bersifat nasional yang berpotensi untuk mendukung maupun menghambat pencapaian sasaran pembangunan Sulawesi Selatan Tahun 2023 yang juga merupakan tahun terakhir dari RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan, yang meliputi:

1. Defisit APBN dan Investasi

Defisit transaksi berjalan pada semester I 2021 tetap rendah didukung oleh surplus neraca perdagangan. Transaksi berjalan pada semester I 2021 mencatat defisit yang rendah sebesar 3,0 miliar dolar AS, setelah mencatat surplus 1,8 miliar dolar AS pada semester II 2020. Pemulihan ekonomi global seiring meluasnya proses vaksinasi menyebabkan kenaikan volume perdagangan dan harga komoditas dunia sehingga mendorong perbaikan kinerja ekspor Indonesia. Beberapa komoditas utama seperti CPO, besi dan baja, batu bara, bijih logam, kimia organik, serta kendaraan bermotor berkontribusi pada kinerja ekspor, ditopang oleh kenaikan permintaan dari negara mitra dagang utama, khususnya Tiongkok dan AS, seiring dengan

perbaikan ekonomi yang berlangsung lebih cepat di negara tersebut. Sejalan dengan kinerja ekspor yang positif dan permintaan domestik yang berangsur pulih, kinerja impor juga meningkat cukup tinggi pada paruh pertama 2021 sehingga menahan surplus neraca perdagangan lebih lanjut. Peningkatan impor terjadi menyeluruh pada seluruh jenis kelompok barang, terutama pada bahan baku dan bahan konsumsi. Defisit transaksi berjalan juga dikontribusikan oleh peningkatan defisit neraca jasa sejalan dengan aktivitas impor sehingga menyebabkan peningkatan pembayaran freight jasa transportasi. Selain itu, pemulihan kondisi domestik juga tercermin pada peningkatan pembayaran imbal hasil investasi langsung sejalan dengan membaiknya kinerja korporasi sektor migas dan nonmigas sehingga mendorong defisit neraca pendapatan primer. Sementara, neraca pendapatan sekunder membukukan kenaikan surplus di tengah relatif stabilnya transfer personal terkait penerimaan remitansi

Neraca transaksi modal dan finansial menunjukkan kinerja positif sepanjang tahun 2021, yang didorong oleh surplus yang meningkat pada investasi langsung dan investasi portofolio yang masing masing mencapai US$ 16,5 miliar dan US$ 5,3 Miliar yang kedua capaiannya meningkat dibandingkan pada tahun 2020. Positifnya kinerja investasi langsung dan invesatsi portofolio mencerminkan keyakinan investor terhadap[prospek pemukihan ekonomi Indonesia sepanjang tahun 2021 meskipun masih dalam kondisi tekanan pandemic COVID-19 terutama varian Delta pada triwulan III tahun 2021. Perkembangan tersebut kemudian mendorong cadangan devisa meningkat mencapai US$ 144,9 miliar atau setara dengan pembiayaan 8,0 bulan impor.

2. Rantai Nilai

Laju perekonomian Indonesia 2022 diprakirakan semakin meningkat didukung perbaikan perekonomian global yang diprakirakan berlanjut pada 2022. Perbaikan ekonomi global yang terus berlangsung tersebut dikonfirmasi oleh kinerja sejumlah indikator pada Desember 2021 antara lain Purchasing Managers' Index (PMI), keyakinan konsumen, dan penjualan ritel yang tetap kuat. Dengan perkembangan tersebut, Bank Indonesia memprakirakan pertumbuhan ekonomi global sekitar 5,7% pada 2021 dan 4,4% pada 2022. Volume perdagangan dan harga komoditas dunia masih meningkat, sehingga menopang prospek ekspor negara berkembang. Ketidakpastian pasar keuangan global masih berlanjut sejalan dengan percepatan kebijakan normalisasi the Fed sebagai respons tekanan inflasi di AS yang meningkat sejalan dengan gangguan rantai pasokan dan kenaikan permintaan, serta tingginya penyebaran Covid-19 varian Omicron. Hal tersebut mengakibatkan terbatasnya aliran modal dan tekanan nilai tukar negara berkembang, termasuk Indonesia.

Menguatnya keterkaitan antarwilayah dalam rantai nilai (value chains) yang ditunjukkan dengan meningkatnya proporsi penggunaan input antara domestic dan wilayah lain untuk produksi di dalam satu wilayah. Dengan kata lain aktivitas produksi di suatu wilayah semakin terkait dengan wilayah lain dan proporsi penggunaan input yang mengandalkan dari dalam wilayah sendiri menurun yang berimplikasi pada kebijakan penguatan konektivitas dan system logistic antar wilayah guna memperkuat integrase perekonomian wilayah.

3. Inflasi dan Daya Beli

Inflasi 2021 tercatat rendah dan mendukung stabilitas perekonomian. Inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) pada 2021 tercatat sebesar 1,87% (yoy), meningkat dibandingkan dengan inflasi 2020 sebesar 1,68% (yoy), meskipun berada di bawah kisaran sasaran 3,0±1%. Perkembangan tersebut dipengaruhi oleh inflasi inti yang tercatat rendah sebesar 1,56% (yoy) sedikit menurun dibandingkan inflasi inti tahun sebelumnya. Rendahnya inflasi inti terutama dipengaruhi oleh permintaan domestik yang belum kuat sebagai dampak pandemi Covid-19, nilai tukar yang stabil, dan ekspektasi inflasi yang terjaga, serta pengaruh tekanan harga global ke domestik yang minimal. Inflasi volatile food terkendali sebesar 3,20% (yoy), didukung ketersediaan pasokan dan kelancaran distribusi bahan pangan yang tetap terjaga serta sinergi kebijakan Bank Indonesia dan Pemerintah untuk menjaga stabilitas harga. Inflasi kelompok administered prices meningkat dari tahun lalu menjadi sebesar 1,79% (yoy), antara lain sejalan dengan kenaikan tarif angkutan udara di tengah peningkatan mobilitas masyarakat dan kenaikan cukai tembakau.

Pertumbuhan ekonomi nasional diprakirakan bangkit dan meningkat pada 2022, terutama didukung akselerasi konsumsi swasta dan investasi di tengah tetap terjaganya belanja fiskal Pemerintah dan ekspor. Hal ini tercermin dari kenaikan indikator hingga Desember 2021 seperti mobilitas masyarakat di berbagai daerah, penjualan eceran, dan keyakinan konsumen. Sumber pertumbuhan ekonomi 2022 diprakirakan mulai berimbang, kontribusi permintaan domestik diprakirakan meningkat, meski risiko kenaikan kasus Covid-19 perlu terlu diwaspadai.

Prakiraan perbaikan permintaan domestik tercermin pada perkembangan lapangan usaha, sementara PDRB wilayah mulai konvergen. Konsumsi di 2022 diprakirakan membaik seiring pembukaan ekonomi domestik yang didukung vaksinasi yang semakin luas dan mobilitas yang semakin membaik, serta stimulus yang berlanjut. Sementara, perbaikan investasi didukung oleh kembali berlanjutnya PSN, kinerja ekspor yang tetap kuat dan relokasi perusahaan ke dalam negeri. Di sisi eksternal, kinerja ekspor di 2022 diprakirakan tetap positif ditopang pemulihan global.

2.9.1.3. Isu Strategis Daerah

1. Belum optimalnya pelaksanaan tata kelola pemerintahan

Pada pelaksanaan tata kelola pemerintahan di Sulawesi Selatan, yang memerlukan perhatian adalah belum tercapainya target nilai SAKIP Provinsi Tahun 2021 yaitu BB dengan nilai di atas 70. Pada tahun 2021, nilai SAKIP provinsi Sulawesi Selatan hanya mencapai angka 65,01 (B) dengan tingkat capaiannya sebesar 92,87 persen. Tantangan yang dihadapi dalam peningkatan nilai SAKIP provinsi Sulawesi Selatan adalah mengimplementasikan manajemen dan anggaran berbasis kinerja secara berkesinambungan dengan meningkatkan kualitas penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja serta meningkatkan sinergitas antar perangkat daerah untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran berbasis kinerja.

2. Hilirisasi komoditas unggulan berbasis sumber daya alam belum optimal

Hilirisasi komoditi bertujuan untuk meningkatkan produksi, meningkatkan kapasitas pengolahan, dan meningkatkan kapasitas pasar, yang diharapkan akan menghasilkan nilai tambah, memperkuat struktur industri, serta menyediakan lapangan kerja dan peluang usaha. Hilirisasi komoditas yang akan dikembangkan adalah program hilirisasi berbasis sektor pertanian meliputi pertanian tanaman pangan, perikanan, peternakan, perkebunan dan kehutanan. Dengan program hilirisasi ini diharapkan dapat mengembalikan kejayaan Sulawesi Selatan pada sektor produksi, industri pengolahan berbasis pertanian dan keunggulan pemasaran hasil, baik untuk pemenuhan kebutuhan dalam negeri maupun ekspor.

Sektor pertanian merupakan sector prioritas Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, karena sector ini telah terbukti menjadi penyelamat ekonomi daerah maupun nasional di masa pandemi karena dapat tumbuh positif di saat sektor lain mengalami pertumbuhan ekonomi yang negatif. Beberapa tantangan yang dihadapi di sektor pertanian, utamanya yang terkait dengan peningkatan produktivitas yang menjadi salah satu tujuan pembangunan Sulawesi Selatan adalah menurunnya penggunaan sarana dan prasarana pertanian dan belum optimalnya upaya pengawasan benih yang bersertifikat. Selain itu sebagai upaya mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan adalah implementasi penerapan sistem budi daya pertanian yang ramah lingkungan untuk menghindari penurunan kualitas lahan yang akan mengancam keberlanjutan usaha tani. Sedangkan tantangan pada peningkatan produktivitas sektor kelautan dan perikanan pada fokus peningkatan produktivitas adalah belum optimalnya penataan Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) dari aspek pendataan stok perikanan, perizinan untuk penangkapan ikan, konektivitas antarpelabuhan perikanan beserta kelengkapan sarana prasarana.

Salah satu sector utama pendukung hilirisasi komoditas unggulan Sulawesi Selatan adalah sector industry, namun pembangunan sector industry Sulawesi Selatan juga bergantung pada penanganan risiko baik di tingkat global maupun dalam negeri di tahun 2022, diantaranya risiko gangguan rantai pasok global, peningkatan harga bahan baku sebagai dampak peningkatan harga komoditas, serta masih rendahnya dan terbatasnya konsumsi masyarakat pada produk-produk industri pengolahan komoditas unggulan berbasis sumber daya alam Sulawesi Selatan.

3. Belum optimalnya integrasi antar sector ekonomi dan ekosistem UMKM

Perbaikan ekonomi pada tahun 2021 yang digambarkan dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi menjadi 4,65 persen setelah terpuruk sebesar – 0,70 persen pada tahun 2020 diharapkan mendorong peningkatan aktivitas ekonomi dan penciptaan lapangan pekerjaan yang mampu meningkatkan pendapatan masyarakat. Meningkatnya aktivitas ekonomi masyarakat diharapkan juga dapat berkontribusi pada meningkatnya peran UMKM dalam rangka mendukung perkuatan ekonomi local.

Upaya penguatan peran UMKM dalam perkuatan ekonomi Sulawesi Selatan menunjukkan hasil sesuai dengan target pembangunan, namun terdapat berbagai tantangan yang dihadapi oleh pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dan koperasi yang masih membutuhkan peran dan fasilitasi pemerintah, khususnya Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan untuk mendorong percepatan transformasi ekonomi pada fokus peningkatan produktivitas antara lain meningkatkan nilai tambah produk UMKM, meningkatkan akses informasi terkait pembiayaan dan pemasaran, dan meningkatkan kapasitas dan kemampuan manajerial pelaku UMKM dan koperasi.

4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Diimbangi dengan Perluasan Kesempatan Kerja

Pandemi COVID-19 yang berkepanjangan berdampak pada luka memar (scarring effect), khususnya bagi pembangunan social yang membutuhkan penguatan pemulihan social, khususnya pada peningkatan kualitas SDM yang berdaya saing. Penguatan kapasitas dan kapabilitas SDM merupakan bagian terpenting dari pembangunan yang pada akhirnya mampu meningkatkan kapasitas produktif suatu perekonomian.

Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan sampai dengan tahun 2021 telah berhasil meningkatkan capaian kinerja pembangunan terkait peningkatan kualitas sumber daya manusia yang ditandai dengan meningkatnya capaian nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang meningkat dari 71,93 pada Tahun 2020 menjadi 72,20 pada tahun 2021, walapun masih terdapat sasaran pembangunan terkait peningkatan kualitas sumber daya manusia yaitu Indeks Pendidikan yang belum mencapai target.

Tingkat pendidikan dapat mengindikasikan kualitas dan produktivitas tenaga kerja, berdasarkan distribusi penduduk bekerja menurut pendidikan di Sulawesi Selatan, maka diperoleh gambaran peningkatan persentase tenaga kerja yang berpendidikan tinggi yaitu Diploma dan Universitas yang meningkat dari 16,41 persen pada Tahun 2020 menjadi sebesar 17,17 persen pada tahun 2021.

Akan tetapi peningkatan kualitas pendidikan tenaga kerja belum merata antar kabupaten/kota, yang ditandai dengan meningkatnya angka TPT tahun 2021 pada beberapa kabupaten/kota di Sulawesi Selatan, untuk itu tantangan yang dihadapi dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia adalah pelaksanaan reskilling dan upskilling pada kabupaten/kota yang teridentifikasi mengalami peningkatan TPT, revitalisasi pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi, pembangunan system informasi pasar kerja yang terintegrasi dan penguatan system perlindungan social bagi para pekerja.

5. Belum meratanya pembangunan infrastruktur dan konektivitas antar wilayah

Dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur terdapat sejumlah tantangan yang dihadapi. Tantangan dalam peningkatan infrastruktur pelayanan dasar pada sector perumahan dan kawasan permukiman adalah pencapaian akses perumahan yang layak dan terjangkau melalui pemenuhan kebutuhan prasarana, sarana, dan utilitas yang layak berupa air minum, air

limbah, persampahan, jalan lingkungan, dan drainase. Akan tetapi capaian kinerja pembangunan Sulawesi Selatan pada sector perumahan dan kawasan permukiman belum mancapai sasaran yang diindikasikan dengan menurunnya rasio rumah layak huni pada tahun 2021 sebesar 1,37 persen dari tahun 2020. Di samping itu, pemenuhan kebutuhan infrastruktur dasar berupa Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Regional dan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPAL-D) Regional juga belum terpenuhi dikarenakan belum terpenuhinya beberapa persyaratan yang harus dipersiapkan dalam pembangunan infrastruktur tersebut yang direncanakan akan dibangun oleh Pemerintah.

Selanjutnya dalam pemenuhan infrastruktur sumber daya air yang merupakan pendukung peran Sulawesi Selatan sebagai lumbung pangan nasional, walaupun telah menunjukkan peningkatan kinerja namun masih perlu perkuatan, antara lain pada aspek konservasi SDA adalah meningkatkan upaya pemeliharaan jaringan sumber daya air sebagai upaya menjaga kualitas dan kuantitas air baku. Sedangkan pada aspek pendayagunaan SDA adalah mengoptimalkan pemanfaatan waduk yang telah dibangun oleh Pemerintah.

Dalam pembangunan infrastruktur konektivitas yang mendukung produktivitas untuk mencapai transformasi ekonomi masih menghadapi tantangan antara lain pembangunan infrastruktur jalan yang merupakan pendukung dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi wilayah Sulawesi Selatan pemenuhannya masih perlu dioptimalkan keandalan dan pemerataan konektivitasnya untuk mendukung arus distribusi komoditas unggulan wilayah. Hal ini tergambarkan pada capaian kemantapan jalan provinsi tahun 2021 yang hanya sebesar 70,01 persen dari target kemantapan jalan provinsi sebesar 72,30 persen. Sedangkan pada layanan transportasi, beberapa tantangan yang masih memerlukan perhatian oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan adalah belum optimalnya pengembangan system angkutan umum massal perkotaan, yang diindikasikan dengan belum adanya kelembagaan pengelolaan transportasi perkotaan yang mampu mengintegrasikan pembangunan dan pengelolaan lintas batas administrasi dan lintas moda angkutan dalam satu wilayah metropolitan, belum optimalnya layanan, sarana dan prasarana pada beberapa simpul transportasi dan terbatasnya fasilitas keselamatan jalan pada beberapa ruas jalan provinsi.

Pembangunan infrastruktur energi dan ketenagalistrikan serta TIK berperan penting dalam mendukung agenda transformasi ekonomi. Untuk itu diperlukan peningkatan pemerataan akses serta keterjangkauan energi dan ketenagalistrikan, khususnya pada wilayah pesisir dan kepulauan serta terisolir dengan memanfaatkan energi terbarukan. Sementara itu, pada pembangunan infrastruktur TIK dan pemanfaatannya dalam mendorong transformasi digital masih diperlukan upaya berupa pemerataan jangkauan dan keandalan akses infrastruktur TIK yang berkualitas dan meningkatkan kemampuan adopsi teknologi digital pada pelaku sektor-sektor prioritas seperti pemerintahan, kesehatan, pendidikan, pariwisata maupun industri.

6. Belum Optimalnya Upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim serta peningkatan ketahanan bancana

Tantangan besar yang akan dihadapi Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2023 untuk mengoptimalkan upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim serta peningkatan ketahanan bencana, adalah mengoptimalkan upaya peningkatan kualitas lingkungan hidup, mengurangi potensi kerugian akibat bencana, dan meningkatkan kualitas upaya penurunan emisi gas rumah kaca (GRK) untuk mendukung peningkatan kualitas kehidupan masyarakat di Sulawesi Selatan. Peningkatan kualitas lingkungan hidup Sulawesi Selatan tahun 2021 telah menunjukkan peningkatan kinerja yang tergambarkan pada meningkatnya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup yang pada tahun 2021 mencapai 73,23. Beberapa upaya yang mendukung pencapaian kinerja tersebut adalah peningkatan kuantitas penanganan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), peningkatan kualitas air, peningkatan kualitas udara, dan peningkatan kualitas air laut.

Memperhatikan kinerja peningkatan kualitas lingkungan hidup Sulawesi Selatan, maka peningkatan kualitas lingkungan hidup akan berfokus pada upaya penanganan beban pencemaran untuk meningkatkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, meliputi upaya pemeliharaan kualitas udara, kualitas air, dan kualitas air laut, serta penanganan sampah spesifik. Selain itu, menurunnya indeks kualitas tutupan lahan dan menurunnya persentase RTH public kawasan perkotaan pada tahun 2021, maka diperlukan peningkatan upaya pengelolaan keanekaragaman hayati melalui fasilitasi dan pembinaan terkait penyediaaan ruang terbuka hijau kawasan perkotaan dan peningkatan kualitas tutupan lahan khususnya di kawasan hutan yang didukung dengan penguatan sistem perizinan, pengawasan, pengamanan, dan penegakan hukum dalam pengelolaan lingkungan hidup dan keanekaragaman hayati.

Saat ini Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan telah berhasil melampaui target potensi penurunan emisi GRK sebesar 105,6 persen upaya penurunan emisi GRK, yang didukung oleh peningkatan pemanfaatan EBT, namun seiring dengan akselerasi pertumbuhan ekonomi melalui penanganan pandemic COVID-19 dan pengalihan status pandemic menjadi endemic maka tantangan yang dihadapi pemerintah provinsi Sulawesi Selatan adalah mengoptimalkan kinerja pembangunan rendah karbon melalui pemulihan lahan berkelanjutan, termasuk peningkatan kuantitas dan kualitas RTH, pemulihan hutan serta peningkatan implementasi pertanian berkelanjutan, peningkatan upaya perlindungan ekosistem mangrove, serta peningkatan upaya penangangan sampah perkotaan dan bahan pencemar lainnya.

Sedangkan tantangan pada upaya penguatan ketahanan bencana adalah belum tersedianya sistem peringatan dini bencana, baik yang bersifat bencana seketika (sudden onset disasters), seperti gempa bumi, tsunami, gerakan tanah, cuaca ekstrem, dan banjir bandang; maupun bencana yang bersifat perlahan (slow onset disasters), seperti kerusakan lingkungan dan kerusakan akibat perubahan iklim.

2.10. Inovasi Daerah

Pengembangan dan penerapan suatu inovasi dapat menjadi salah satu sumber keunggulan kompetitif atau daya saing daerah. Oleh karena itu, pengembangan dan penerapan inovasi daerah dalam berbagai sektor terus didorong oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, baik dalam bentuk inovasi tata kelola pemerintahan daerah, inovasi pelayanan publik maupun inovasi daerah lainnya sesuai dengan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah dengan senantiasa memperhatikan dan penekanan pada tujuan dan arah pembangunan daerah maupun penguatan potensi dan kearifan lokal yang ada.

Berikut ini sejumlah bentuk inovasi daerah yang telah diinisiasi, diterapkan dan dikembangkan oleh pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dalam kurun waktu 2 (dua) tahun terakhir, antara lain sebagai berikut :

Tabel II.405.
Daftar Inovasi Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2020-2021

NO	NAMA INOVASI	URAIAN	OPD
1	GESIT -19 (Gerai Perizinan Sektor Kelautan dan Perikanan)	GESIT-19 diharapkan mampu mewujudkan suatu langkah strategis dan kreatif dalam memberikan solusi pelayanan di bidang perizinan yang cepat, murah, dan terjangkau kepada pelaku usaha di sektor Kelautan dan Perikanan. Adapun tujuan dari GESIT-19 adalah : 1. Mendekatkan pelayanan perizinan pada pusat kegiatan usaha perikanan; 2. Mempercepat pelaku usaha dalam melaksanakan kegiatan; 3. Mengedukasi pelaku usaha untuk taat pada peraturan; 4. Menghilangkan jasa percaloan serta memangkas birokasi dalam pengurusan izin perikanan; 5. Mewujudkan proses perizinan yang transparan, efesien, efektif dan akuntabel. Dengan hadirnya GESIT-19 sebagai implementasi dalam mewujudkan pemerintahan yang ramah investasi dan bersih melayani serta sebagai bentuk sinergitas dan kemitraan antara Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dengan Pemerintah Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan.	Dinas Penanaman Modal dan PTSP

NO	NAMA INOVASI	URAIAN	OPD
2	Sapi Bali Unggul dan Lestari Dari Sulawesi Selatan (SI BALUNG LESTARI)	Inspirasi "Si Balung Lestari" merupakan inovasi perkawinan silang antara induk sapi Bali dengan Banteng Cross Sapi Jaliteng = Jawa Bali Banteng). Banteng Cross merupakan turunan Banteng, yang dikoleksi spermanya oleh Balai Inseminasi Buatan Singosari, Jawa Timur. Perkawinan silang dengan metode Inseminasi Buatan. Inovasi "Si Balung Lestari", yaitu Persilangan Induk Sapi Bali dengan Banteng Cross (Sapi Jaliteng = Jawa Bali Banteng) dengan tujuan memperbaiki performa dan genetik sapi Bali sehingga meningkatkan minat peternak untuk memelihara sapi Bali sebagai plasma nutfah agar tetap lestari dan tidak punah.	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
3	Aplikasi Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Melalui Mobile Banking Dan Atm Bank Pembangunan Daerah Sulselbar (APPAKAMMA)	Aplikasi ini merupakan sistem pembayaran pajak secara non tunai (cashless) melalui mobile banking dan ATM Bank Sulselbar, memiliki tujuan: Peningkatan penerimaan PAD yang bersumber pada pajak kendaraan bermotor, diversifikasi pelayanan yang mudah diakses masyarakat wajib pajak, mengurangi potensi kendaraan bermotor yang tidak melakukan daftar ulang.	Badan Pendapatan Daerah

NO	NAMA INOVASI	URAIAN	OPD
4	Sistem Informasi Badan Usaha Milik Desa (SIBUMDESA)	SIBUMDESA merupakan sistem informasi yang berbasis Website sehingga mudah diupdate dan menyajikan data Badan Usaha Milik (BUM) Desa sesuai dengan kondisi terkini. Sistem ini dirancang untuk memudahkan melakukan pendataan terhadap perkembangan Badan Usaha Milik (BUM) Desa yang ada di Kabupaten, sebagai user di Kabupaten sehingga informasi terkait tingkat perkembangan BUM Desa yang ada di Kabupaten dapat tersaji dengan cepat dan akurat.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
5	Sistem Informasi Data Kemiskinan (SIDAK)	Kemajuan teknologi khususnya penggunaan Handphone yang sangat pesat tentunya sangat membantu dalam mendukung aktivitas/pekerjaan. Aplikasi Sistem Informasi Data Kemiskinan (SIDAK) yang dibuat merupakan inovasi dalam memperoleh data dan informasi kemiskinan yang dibutuhkan dalam penyusunan dokumen perencanaan dan pembangunan daerah.	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
6	Smart Office Provinsi Sulawesi Selatan	Smart Office Provinsi Sulawesi Selatan merupakan salah satu inovasi dalam bidang teknologi informasi dan komunikasi yang dikembangkan untuk mendukung pelayanan administrasi perkantoran di lingkup Pemerintahan Provinsi Sulawesi Selatan	Dinas Komunikasi dan Informasi, Statistik dan Persandian
7	Klinik Tumbuh Kembang Anak (KUMBANG ANDALAN)	Klinik Tumbuh Kembang Anak (Klinik Andalan) yaitu berupa wadah konsultasi dan bimbingan kepada masyarakat khususnya pada anak batita dan balita yang sedang dalam proses pertumbuhan. Adanya Klinik ini berupaya untuk meningkatkan partisipasi	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan KB

NO	NAMA INOVASI	URAIAN	OPD
		masyarakat dalam deteksi dini tumbuh kembang anak balita dan anak pra sekolah, dan mengoptimalkan tumbuh kembang anak balita dan anak pra sekolah. Pelayanan yang akan dilakukan yaitu berupa pelayanan jasa konseling pentingnya pemeriksaan tumbuh kembang dan persetujuan tindakan, penimbangan berat badan anak, pengukuran tinggi badan anak, pengukuran LK,LD dan LILA anak, pengukuran tumbuh kembang anak usia 3-72 bulan dengan menggunakan tes KPSP, tes IQ minat dan bakat, deteksi dini keterlambatan perkembangan pada anak, terapi mengatasi kesulitan belajar pada anak, terapi psikologi kestabilan emosi (EQ), deteksi dini terapi autism.	
8	Klinik Kesehatan Reproduksi Remaja (KESTURI REMAJA)	Klinik kesehatan reproduksi remaja (KESTURI REMAJA) dimaksudkan untuk membimbing remaja mengatasi konflik seksualnya. Kesturi Remaja dapat memberikan bekal pengetahuan kepada remaja mengenai anatomi dan fisiologi reproduksi, proses perkembangan janin, dan berbagai permasalahan reproduksi seperti kehamilan, PMS, HIV/AIDS, KTD dan dampaknya, serta pengembangan perilaku reproduksi sehat untuk menyiapkan diri melaksanakan fungsi reproduksi yang sehat (fisik, mental, ekonomi dan spiritual).	Dinas Kesehatan

NO	NAMA INOVASI	URAIAN	OPD
9	Sistem Informasi Logistik (SIMLOG) Sulsel	Simlog Sulsel merupakan inovasi dalam bidang sosial melalui aplikasi online berbasis website yang berfungsi koordinasi untuk memantau penyaluran bantuan bencana ke daerah Kabupaten/Kota. Selanjutnya fungsi Controlling untuk mengatur alur distribusi bantuan (Supply Treasury Logistic) terkait ketersediaan stock bantuan dan traffic serta timing bantuan yang masuk dan keluar dari Dinsos Pemprov Sulsel. Web Aplikasi ini sebagai media controlling penyaluran bantuan korban bencana sosial yang terjadi di Sulawesi Selatan, dan juga media untuk pengambilan keputusan yang cepat dan tepat dalam bidang sosial dan kemasyarakatan. Aplikasi penyediaan data dan informasi sosial kemasyarakatan dan bencana alam melaui teknologi informasi berbasis website yang dapat diakses secara online.	Dinas Perdagangan

NO	NAMA INOVASI	URAIAN	OPD
10	Implementasi Tanda Tangan Elektronik (TTE) dalam Sistem Informasi Publik	Salah satu pemanfaatan Layanan Sertifikat Elektronik pada SPBE berupa tanda tangan digital/elektronik. Tanda Tangan Elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas informasi elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan informasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi. TTE digunakan untuk melakukan legislasi file digital oleh pejabat publik lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan yang diprioritaskan kepada pimpinan daerah dan Pejabat Eselon I dan II untuk penyelenggaraan sistem pemerintahan secara transparan, efisien dan efektif. Tujuan inovasi daerah mendukung penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dalam pengamanan informasi digital milik pemerintah guna peningkatan mutu pelayanan publik.	Dinas Komunikasi dan Informasi, Statistik dan Persandian
11	Sistem Informasi Pengembangan Sumber Daya Manusia (SIBANG SDM)	Sibang SDM merupakan aplikasi tentang sistem informasi sumber daya manusia aparatur, berisi informasi pendaftaran peserta diklat secara online, bahan ajar peserta, jadwal kegiatan, wadah monitoring dan evaluasi terhadap widyaswara serta informasi tentang sarana dan prasarana. Inovasi ini bertujuan untuk mempercepat proses pelayanan.	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur

NO	NAMA INOVASI	URAIAN	OPD
12	Sistem Pemandirian dan Pembinaan Pada Pasien ODGJ (SIRI NA PACCE) melalui Rehabilitasi Psikososial	Inovasi ini menyediakan sarana dan pra-sarana serta pelatihan keterampilan secara kontinu kepada penderita ODGJ yang memenuhi kriteria. Manfaat yang diperoleh : peningkatan peran serta masyarakat dan keluarga dalam upaya mendukung pemulihan penderita ODGJ melalui rehabilitasi psikososial dengan mengikutsertakan penderita ODGJ pada kegiatan di masyarakat dan keluarga, penderita ODGJ dapat berfungsi sebagai warga masyarakat yang berguna melalui penyesuaian diri dalam hubungan perseorangan dan sosial secara memuaskan , penderita ODGJ mempunyai keterampilan yang bisa digunakan sebagai sumber pendapatan, mengurangi beban keluarga dengan penderita ODGJ, peningkatan kualitas hidup penderita ODGJ, penderita ODGJ rawat inap maupun rawat jalan dapat berperan sebagai manusia normal, berswasembada dan dapat kembali ke masyarakat sebagai warga yang mandiri dan berguna, pendapatan RS meningkat. Hasil Inovasi berupa upaya rehabilitatif ODGJ yang meliputi : rehabilitasi psikiatrik dan/atau psikososial; dan rehabilitasi sosial dengan menggunakan pendekatan humanis dan budaya lokal.	Dinas Kesehatan

NO	NAMA INOVASI	URAIAN	OPD
13	Inovasi Sejuta Ikan (E- Sertifikasi Mutu Produk Perikanan)	Aplikasi E-Sertifikasi Mutu Produk Perikanan yang dilengkapi dengan fitur Chat Customer Service yang dapat membantu Client dalam menggunakan Aplikasi ini. Fitur ini terintegrasi dengan Aplikasi Facebook dan Telegram Mobile. Inovasi ini bertujuan agar dalam pelayanan pengujian mutu hasil perikanan tidak terjadi kesalahan administratif baik oleh BPMPP ataupun oleh Pemohon sehingga dapat dipertanggungjawabkan keabsahannya.	Dinas Kelautan dan Perikanan
14	PASAR TANI : Protokol Kesehatan Berbasis Teknologi Non Tunai di Pasar Modern di Sulawesi Selatan	Pasar tani berkonsep modern ini berfungsi sebagai stabilizer agar harga dapat terjaga, dan berjalan normal. Selain itu konsep ini memberikan kemudahan pembeli mendapat-kan 11 komoditas bahan pangan pokok dengan harga terjangkau dan berkualitas terutama selama masa pandemik Covid-19 dan New Normal yang akan diterapkan di Indonesia. Tujuan dari Inovasi Protokol Kesehatan Berbasis Non tunai di Pasar Modern ini adalah : 1. Mewujudkan Tatanan Normal Baru Produktif dan Aman Corona Virus Desease 2019 dengan menerapkan standar pelayanan yang menjamin higienitas terhadap kebutuhan pokok masyarakat dengan tidak bersentuhan langsung dengan uang tunai yang notabenenya adalah media penyebaran berbagai macam bakteri atau virus. 2. Memberikan rasa aman kepada konsumen dan produsen yang mengunjungi pasar Modern dengan menerapkan protokol kesehatan dan memfasilitasi sistem tranksaksi non tunai.	Dinas Ketahanan Pangan

NO	NAMA INOVASI	URAIAN	OPD
15	Penyelenggaraan Transportasi Online di Masa New Normal	Grab Protect adalah pelayanan transportasi online mobil penumpang dengan menggunakan pembatas kabin dari bahan plastik mika tembus pandang untuk meminimalkan kontak langsung antara pengemudi dan penumpang, selain itu pengemudi diwajibkan menggunakan masker, sarung tangan dan melakukan disinfeksi pada kendaraan serta menyediakan hand sanitizer untuk penumpang. Untuk menjamin kepastian pemenuhan protokol kesehatan tersebut bagi masyarakat di Sulawesi Selatan, Dinas Perhubungan melakukan pengawasan secara berkala. Output berupa Grab Protect dan Pengawasan Protokol Kesehatan pada Pengemudi dan Kendaraan.	Dinas Perhubungan
16	NEw Normal Innovation Sistem Informasi Layanan Izin penelitian oNline CAmpus (NENI SI LINCA)	NENI SI LINCA ini menggunakan peralatan software-hardware dan berkolaborasi dengan pihak Perguruan Tinggi selaku validator dari dokumen yang diunggah oleh Mahasiswa. Sehingga Mahasiswa tidak perlu lagi datang ke DPMPTSP Provinsi Sulawesi Selatan untuk bermohon izin, melainkan melalui sistem informasi online yang produk pelayanannya bisa diunduh di rumah. Outputnya berupa Aplikasi/sistem NENI SI LINCA dalam pengurusan izin penelitian bagi mahasiswa di Sulawesi Selatan	Dinas Penanaman Modal dan PTSP

NO	NAMA INOVASI	URAIAN	OPD
17	WISATA COVID-19	Program Wisata Covid-19 merupakan bentuk kerjasama Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dengan sejumlah hotel untuk menerapkan isolasi mandiri. Hotel di Makassar yang telah bergabung dengan program Wisata Covid-19 ini akan menjadi tempat karantina untuk orang dalam pemantauan (ODP), pasien dalam pengawasan (PDP), orang tanpa gelaja (OTG), dan pasien positif Covid-19. Program Wisata Covid-19, difokuskan pada orang tanpa gejala (OTG) positif dan orang dalam pemantauan (ODP) yang pernah kontak dengan pasien positif. Mereka akan diinapkan di hotel dengan program khusus, misalnya: berjemur, berolahraga, dan ceramah agama. Inovasi ini selain diterapkan pada masa pandemi Covid-19 juga dapat diterapkan pada masa New Normal, dimana protokol kesehatan yang diberlakukan pada program ini sangat ketat sehingga wisatawan yang berkunjung ke Sulawesi Selatan akan merasa aman jika ingin menginap di hotel.	Dinas Kesehatan

NO	NAMA INOVASI	URAIAN	OPD
18	Protokol Kesehatan Berbasis Teknologi Non Tunai di Pasar Tradisional di Sulawesi Selatan (BARUGA PASAR)	Berdasarkan standard protokol kesehatan dari Kemenkes yang ditindaklanjuti oleh Provinsi Sulawesi Selatan, Dinas Perdagangan Provinsi Sulawesi Selatan memperhatikan anjuran New Normal terutama dari sisi higienitas dan jaga jarak di lingkungan pasar tradisional dengan penerapan sistem non tunai. Konsep ini mulai diterapkan menjelang pelaksanaan PSBB di Makassar. Proses transaksi non tunai dan order online melalui aplikasi Malltronik dan Gojek mendapat respon yang luar biasa dari pedagang dan masyarakat. Baruga pasar ini masih berlanjut hingga sekarang dan diharapkan dapat terus berkembang pada masa New Normal.	Dinas Perdagangan
19	PALLAWANA (PEMBATAS) : Inovasi Pelayanan Restoran/ Rumah Makan Berbasis Kearifan Lokal di Sulawesi Selatan	Konsep Pallawana menjadi salah satu bentuk inovasi yang dapat digunakan dalam tatanan normal baru, pengunjung tetap bisa menikmati Pallubasa yang nikmat dengan tetap menjaga protokol kesehatan dan memperhatikan estetika. Tujuan inovasi “PALLAWANA” adalah : 1. Mewujudkan Tatanan Normal Baru Produktif dan Aman Corona Virus Desease 2019 dengan menerapkan standard pelayanan yang menjamin higienitas pada restoran/rumah makan 2. Memberikan rasa aman kepada konsumen yang mengunjungi restoran/rumah makan dengan berbasis kearifan lokal sebagai salah satu opsi jaga jarak	Dinas Perdagangan

NO	NAMA INOVASI	URAIAN	OPD
20	SULSEL DALAM GENGGAMAN (Sulawesi Selatan in Our Hand" atau "South Sulawesi in Our Hand") : New Normal Inovasi berbasis aplikasi dan barcode di destinasi wisata	Inovasi ini dirancang sebagai bentuk peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan dengan mengimplementasikan standar proto-kol kesehatan dari Kementerian Kesehatan terkait dampak pandemi Covid-19 yang ditindak lanjuti oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Dinas Kebudayaan dan Kepariwisataan menginterpretasikan anjuran New Normal terutama dari segi higienitas dan jaga jarak (social/ physical distancing) dengan penggunaan aplikasi dan barcode. Output berupa Penggunaan aplikasi dan barcode Sulawesi Selatan in Our Hand dalam mempermudah informasi bagi wisatawan domestik dan mancanegara. Berdasarkan standard protokol kesehatan dari Kemenkes yang ditindaklanjuti oleh Provinsi Sulawesi Selatan, Dinas Perdagangan Provinsi Sulawesi Selatan memperhatikan anjuran New Normal terutama dari sisi higienitas dan jaga jarak di lingkungan pasar tradisional dengan penerapan sistem non tunai. Konsep ini mulai diterapkan menjelang pelaksanaan PSBB di Makassar. Proses transaksi non tunai dan order online melalui aplikasi Malltronik dan Gojek mendapat respon yang luar biasa dari pedagang dan masyarakat. Baruga pasar ini masih berlanjut hingga sekarang dan diharapkan dapat terus berkembang pada masa New Normal.	Dinas Kebudayaan dan Kepariwisataan

NO	NAMA INOVASI	URAIAN	OPD
21	Aplikasi E-ASPIRASI DPRD PROV. SULSEL	Sebuah aplikasi yang dirancang khusus untuk membantu penyampaian aspirasi masyarakat kepada DPRD Provinsi Sulawesi Selatan. Inovasi ini bertujuan untuk meningkatkan kinerja DPRD Prov. Sulsel dalam memberikan layanan dan respon secara cepat terhadap aspirasi yang masuk, masyarakat dapat dengan mudah menyampaikan aspirasinya tanpa harus ke kantor DPRD Prov. Sulsel terutama yang dari daerah, anggota DPRD Prov. Sulsel dapat dengan mudah menerima dan menjawab setiap aspirasi yang masuk dimanapun dan kapanpun selama ada internet.	Sekretariat DPRD
22	Sistem Informasi Kehutanan	Inovasi melakukan perubahan sistem informasi dari manual ke digital dengan tujuan untuk menyediakan data series dan informasi yang berkelanjutan. Inovasi bermanfaat untuk memudahkan memperoleh data dan informasi kehutanan. Outputnya berupa tampilan data digital dalam website.	Dinas Kehutanan

NO	NAMA INOVASI	URAIAN	OPD
23	Strategi Pengembangan Sistem Manajemen Surveilans Terpadu (SIMEDIS TRENDI)	Aplikasi Simedis Trendi dirancang sebagai media data dan informasi di bidang kesehatan yang dapat digunakan tidak hanya oleh tenaga kesehatan, namun juga dimanfaatkan masyarakat luas. Pengguna website dapat mengakses dan mengunduh langsung publikasi data dan informasi, peraturan perundangan bidang kesehatan, dan perangkat lunak yang dapat digunakan sesuai dengan kebutuhan. Data dan informasi kesehatan disajikan dalam bentuk produk publikasi dan ke depannya website akan juga menampilkan produk-produk informasi berupa grafik yang interaktif di Rumah Sakit Haji Makassar.	Dinas kesehatan
Tahun 2021			
NO	**NAMA INOVASI**	**URAIAN**	**OPD**

NO	NAMA INOVASI	URAIAN	OPD
1	Sistem Informasi Gender dan Anak Online (SIGA ON LINE)	Sistem Informasi Gender dan Anak berbasis website dimaksudkan untuk memberi kemudahan bagi semua pihak dalam memperoleh data gender yang terpilah menurut jenis kelamin atau menurut kelompok umur, serta informasi yang dapat dimanfaatkan untuk mengimplementasikan pembangunan yang responsif gender dan anak. Inovasi ini bertujuan untuk: 1. Meningkatkan ketersediaan data terpilah gender dan anak di OPD provinsi. 2. Meningkatkan ketersediaan informasi yang dapat digunakan para pihak dalam implementasi kegiatan yang responsif gender dan anak. 3. Membuka akses data dan informasi tentang gender dan anak kepada para pihak yang membutuhkan. 4. Memudahkan akses bagi masyarakat memberikan masukan dan saran dalam pembangunan responsif gender dan anak. 5. Mempermudah OPD dalam menyusun Anggaran Responsif Gender dalam menentukan data pembuka wawasan.	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

NO	NAMA INOVASI	URAIAN	OPD
2	Gerai Perizinan Sektor Perikanan dan Kelautan (GESIT-19)	GESIT-19 diharapkan mampu mewujudkan suatu langkah strategis dan kreatif dalam memberikan solusi pelayanan di bidang perizinan yang cepat, murah, dan terjangkau kepada pelaku usaha di sektor kelautan dan perikanan. Adapun tujuan dari GESIT-19 adalah : 1. Mendekatkan pelayanan perizinan pada pusat kegiatan usaha perikanan; 2. Mempercepat pelaku usaha dalam melaksanakan kegiatan; 3. Mengedukasi pelaku usaha untuk taat pada peraturan; 4. Menghilangkan jasa percaloan serta memangkas birokasi dalam pengurusan izin perikanan; 5. Mewujudkan proses perizinan yang transparan, efesien, efektif dan akuntabel;	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

NO	NAMA INOVASI	URAIAN	OPD
3	Kajian Kolaborasi dalam Mewujudkan Kebijakan berbasis Pengetahuan di Sulawesi Selatan	Kajian kolaborasi ini diharapkan menjadi salah satu jalan untuk pembaharuan informasi dan menyesuaikan kebijakan dengan perkembangan terkini serta menjadi acuan sebagai upaya menata peta jalan pengembangan Sutra Sulawesi Selatan untuk mewujudkan Rencana Pembangunan Industri Provinsi Sulawesi Selatan 2018-2038. Kajian Kolaborasi dalam mewujudkan Kebijakan berbasis Pengetahuan di Sulawesi Selatan bermanfaat untuk penguatan kelembagaan petani yang kini masih lemah dalam rangka peningkatan kualitas dan kuantitas produksi Kokon. Kajian Kolaborasi dalam mewujudkan kebijakan berbasis Pengetahuan di Sulawesi Selatan ini juga bermanfaat untuk mengatasi rendahnya kualitas data sebagai acuan menyusun program sehingga memperbaiki metodologis dan manajerial Data Base. Kemudian inovasi ini juga bermanfaat mengatasi kesenjangan antara fakta lapangan dan Tata Kelola Sutra karena adanya pelatihan sensitivitas gender dan inklusi sosial (termasuk prinsip Free, Prior, Informed Consent [FPIC]), yang terinternaliasi dalam mandat institusi para pihak.	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

NO	NAMA INOVASI	URAIAN	OPD
4	Strategi Pengembangan Manajemen Sistem Surveilans Terpadu Di RSUD Haji Makassar (SIMEDIS TRENDI)	Aplikasi Simedis Trendi dirancang sebagai media data dan informasi di bidang kesehatan yang dapat digunakan tidak hanya oleh tenaga kesehatan, namun juga dimanfaatkan masyarakat luas. Pengguna website dapat mengakses dan mengunduh langsung publikasi data dan informasi, peraturan perundangan bidang kesehatan, dan perangkat lunak yang dapat digunakan sesuai dengan kebutuhan. Data dan informasi kesehatan disajikan dalam bentuk produk publikasi dan ke depannya website akan juga menampilkan produk-produk informasi berupa grafik yang interaktif di Rumah Sakit Umum Daerah Haji Makassar.	Rumah Sakit Umum Daerah Haji Makassar
5	Gerakan Mencerdaskan Anak Bangsa dari Desa (GeMAs De)	Inovasi Gerakan Mencerdaskan Anak Bangsa Dari Desa (GeMAs De) hadir untuk memecahkan masalah terkait rendahnya minat baca masyarakat terutama di daerah pedesaan. Kondisi ini juga dipengaruhi oleh faktor masih kurangnya jumlah perpustakaan termasuk perpustakaan desa, masih minimnya jumlah koleksi bahan bacaan dan akses internet, serta masih rendahnya kualitas sumber daya manusia tenaga pengelola perpustakaan. Inovasi GeMAs De hadir dengan strategi memberikan bantuan stimulant berupa buku, rak buku dan komputer kepada perpustakaan desa/kelurahan, perpustakaan lorong, perpustakaan komunitas dan taman baca masyarakat .	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

NO	NAMA INOVASI	URAIAN	OPD
6	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Forum Kelompok Kerja dan Sekretariat Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Provinsi Sulawesi Selatan bertugas melakukan koordinasi antar instansi penyelenggara yang memerlukan keterpaduan dalam merencanakan, menyelenggarakan dan menyelesaikan masalah-masalah lalu lintas dan angkutan jalan di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan. Tujuan dibentuknya forum LLAJ adalah sebagai wadah untuk menyinergikan tugas pokok dan fungsi setiap instansi penyelenggara lalulintas dan angkutan jalan dalam rangka menganalisis permasalahan, menjembatani, menemukan solusi,serta meningkatkan kualitas pelayanan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan.	Dinas Perhubungan

NO	NAMA INOVASI	URAIAN	OPD
7	Aplikasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (e-TLHP)	e-TLHP merupakan aplikasi berbasis web yang digunakan untuk automisasi, dokumentasi dan efisiensi kegiatan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Inspektorat Provinsi Sulawesi Selatan terhadap Satuan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Aplikasi TLHP dirancang bangun dengan metode pembangunan aplikasi berbasis website yang memudahkan inputter untuk memasukkan data tindak lanjut hasil pemeriksaan secara online antara aparat pengawas fungsional dengan auditee. Dalam aplikasi dimaksud, pihak inputter dapat memasukkan narasi tindak lanjut, dokumen/data dukung, dan tanggapan dari pihak audit terhadap hasil tindak lanjut. Aplikasi e-TLHP berjalan dengan basis sebuah website maka aplikasi mudah untuk diakses tanpa perlu instalasi di platform yang digunakan.	Inspektorat Daerah

NO	NAMA INOVASI	URAIAN	OPD
8	Sistem Analisis Data dan Laporan Bencana (Si-ANDALAN)	Si-ANDALAN adalah media informasi mengenai potensi bencana alam di wilayah Sulawesi Selatan serta analisa mengenai terjadinya gejala alam tertentu. Mencari lokasi berdasarkan karakteristik yang diinginkan dengan koneksi internet, mengakses informasi berdasarkan potensi terjadinya gempa, longsor, puting beliung dan sebagainya. Pengaplikasian Si-ANDALAN ini memiliki sisi inovasi yakni penyajian analisis data dan fitur Lapor kejadian bencana. Pada penyajian analisis data memuat data informasi bencana beberapa tahun terakhir, kemudian klasifikasi jenis bencana yang sering terjadi di Provinsi Sulawesi Selatan dan juga kecenderungan serta persentase kejadian bencana dan dokumen kebencanaan lainnya seperti Peta Rawan Bencana, Rencana Penanggulangan Bencana (RPB), Kajian Risiko Bencana (KRB) dan Rencana Kontinjensi (RENKON).	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

NO	NAMA INOVASI	URAIAN	OPD
9	Sistem Informasi Pertiwi Berbasis Komputerisasi dan Telekomunikasi Universal (SIPAKATAU)	RSKD Ibu dan Anak Pertiwi Prov. Sulsel membuat sebuah aplikasi smartphone berbasis android yaitu Pertiwi SIPAKATAU (Sistem Informasi Pertiwi Bebasis Komputerisasi dan Telekomunikasi Universal) yang akan menjadi solusi sekaligus peningkatan fasilitas di tempat- tempat layanan kesehatan dengan menjadikan Smartphone dan penunjang teknologi lainnya untuk mengatur sistem antrian. Fasilitas yang dimaksud yaitu dalam pengambilan nomor antrian. Seiring dengan kemajuan teknologi terutama dalam bidang komputerisasi, maka diperlukan suatu teknologi untuk memudahkan pasien dalam melakukan antrian. Pada inovasi ini dirancang sebuah aplikasi antrian secara online yaitu pasien yang melakukan antrian menggunakan aplikasi berbasis Android. Hasil keluaran dari aplikasi sistem antrian ini adalah membuat proses antrian yang dapat dilakukan secara online melalui smartphone android serta disediakan juga fitur notifikasi sehingga ketika nomor antrian yang terdekat dipanggil maka pasien mendapatkan reminder berupa notifikasi pada android.	Rumah Sakit Khusus Ibu Dan Anak Pertiwi

NO	NAMA INOVASI	URAIAN	OPD
10	Sistem Informasi Logistik (SIMLOG) SULSEL	Aplikasi Simlog (Sistem Informasi Logistik) merupakan inovasi dalam bidang logistik bantuan sosial melalui aplikasi online berbasis website yang berfungsi untuk memantau penyaluran bantuan bencana ke daerah Kabupaten/Kota. Selanjutnya fungsi Controlling untuk mengatur alur distribusi bantuan (Supply Treasury Logistic) terkait ketersediaan stok bantuan dan traffic serta timing bantuan yang masuk dan keluar dari Dinsos Pemprov Sulsel ke 24 Kabupaten/Kota se-Sulawesi Selatan.	Dinas Sosial
11	Layanan Pendampingan Pasien TB (LAPAS TB)	RSUD Labuang Baji Makassar melakukan Inovasi untuk memberdayakan mantan pasien sebagai pendamping dengan membentuk Lapas TB (Layanan Pendampingan Pasien TB). Inovasi ini mereplikasi dari RSUD Dr Soetomo Surabaya dan RSUP Persahabatan Jakarta yang dimodifikasi dengan melibatkan mantan pasien (yang sudah sembuh) sebagai fasilitator Lapas TB, selain pelibatan mereka RSUD Labuang Baji bekerjasama dengan organisasi sosial lainnya dalam hal ini TB Care Aisyiah Kabupaten Gowa dalam melaksanakan pencegahan dan pengendalian TB. Bahkan telah menetapkan Peraturan Daerah (Perda) No. 02 tahun 2017 tentang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Tuberkulosis, Kusta, HIV. Adapun tujuan dari inovasi ini adalah meningkatkan kepatuhan pasien berobat secara rutin dan berkesinambungan di RSUD Labuang Baji.	Rumah Sakit Umum Daerah Labuang Baji

NO	NAMA INOVASI	URAIAN	OPD
12	Sistem Informasi Kepemudaan dan Olahraga (SIPOR)	Aplikasi sistem informasi Pemuda dan Olahraga ini merupakan suatu aplikasi yang mempermudah user dalam mengelola data kepemudaan dan olahraga yang ada pada perangkat daerahnya. Kini dengan adanya aplikasi sistem informasi kepemudaan dan olahraga, data primer yang dihasilkan oleh Dispora Kab/Kota, kemudian dikumpulkan oleh operator pengelola data melalui SK Gubernur Sulawesi Selatan, kemudian diinput pada sistem aplikasi https://sipor.sulselprov.go.id/ Sebelum bertugas para operator mendapatkan pelatihan bimbingan teknis dari Dispora Sulsel, langkah ini lebih efektif dan efisien, memangkas biaya perjalanan dan juga waktu pengumpulan data.	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
13	E-SIPAKATAU (Sistem Pelayanan Kalibrasi, Sertifikasi dan Pengujian Mutu)	Terobosan dan inovasi yang dilakukan oleh UPTD BPSMB, dalam melaksanakan proses sertifikasi produk adalah dibuatnya suatu sistem yang berbasis elektronik yang dinamakan e-Sipakatau (Sistem Pelayanan Pengujian, Kalibrasi, dan Sertifikasi Mutu). Inovasi ini memberikan beberapa kemudahan diantaranya sebagai berikut : - Tersedianya data perusahaan/pengguna jasa UPTD BSPM - Tersedianya aplikasi pelayanan sertifikasi berbasis web dan mobile APP - Terlaksananya sosialisasi pemanfaatan aplikasi kepada pengguna jasa/perusahaan. - Termanfaatkannya aplikasi olehpengguna jasa/perusahaan - Terciptanya alur pelayanan secara cepat dan tepat melalui aplikasi e- sipakatau	Dinas Perdagangan Provinsi

NO	NAMA INOVASI	URAIAN	OPD
14	Sapi Bali Unggul dan Lestari dari Sulawesi Selatan (SI BALUNG LESTARI)	Inovasi Si Balung Lestari dari SulSel (Sapi Bali Unggul dan Lestari dari Sulawesi Selatan) bertujuan untuk mempertahankan eksistensi Sapi Bali di Sulawesi Selatan melalui kawin silang Induk sapi Bali dengan straw Sapi Bantengcross. Sapi Banteng cross merupakan turunan banteng dengan sapi Bali Jawa Timur, spermanya dikoleksi oleh Balai Inseminasi Buatan Singosari Provinsi Jawa Timur. Inovasi Si Balung Lestari dari SulSel (Sapi Bali Unggul dan Lestari dari Sulawesi Selatan) dilatarbelakangi oleh adanya kekhawatiran terhadap Performa Sapi Bali yang semakin kerdil sehingga menyebabkan berkurangnya minat masyarakat peternak untuk memelihara sapi bali dan cenderung beralih kepada sapi sapi eksotik seperti Brahman, Limousin dan Simental. Apabila kondisi ini terus berlanjut akan menyebabkan populasi sapi bali di Sulawesi Selatan berkurang bahkan akan mengalami kepunahan.	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

NO	NAMA INOVASI	URAIAN	OPD
15	Sistem Informasi Pengembangan Sumber Daya Manusia (SIBANG SDM)	BPSDM Provinsi Sulawesi Selatan telah merancang model pembelajaran e-learning. Manajemen pembelajaran e-learning dengan menggunakan Learning Management System (LMS) pada kantor Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sulawesi Selatan. Learning Management System mampu memungkinkan untuk merencanakan pelatihan dan membuat laporan dengan mudah, cepat, dan lebih praktis dibandingkan sistem pembelajaran konvensional. Untuk korporasi, sistem seperti ini digunakan untuk memonev staf, dan menyimpan catatan penilaian dan pelatihan. Learning Management System memudahkan dan membantu pembelajaran berjalan dengan lancar. LMS yang baik juga akan memiliki sistem pelaporan sehingga dapat mengakses informasi yang sulit dikumpulkan sendiri.	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia

NO	NAMA INOVASI	URAIAN	OPD
16	Bantu Pasien Jiwa Di Sekitar Kita (BAJITTA)	SIRI' NA PACCE (SIstem pemandiRIan dan pembiNAan PAda paSIEN ODGJ) melalui Rehabilitasi Psikososial. Istilah SIRI' NA PACCE adalah nilai-nilai dalam budaya Makassar, yang dalam hal ini juga memberikan arti bahwa RSKD Dadi memberikan pelayanan yang tulus bagi penderita ODGJ untuk meningkatkan harga diri mereka di masyarakat. Dirancang untuk terwujudnya rehablitasi psikososial melalui pelayanan terapi okupasi bagi penderita ODGJ yang menjalani rawat inap maupun rawat jalan, dan terselenggaranya pelayanan yang paripurna bagi penderita ODGJ yang dirawat di RSKD Prov. Sulawesi Selatan.	Rumah Sakit Khusus Daerah Dadi

NO	NAMA INOVASI	URAIAN	OPD
17	Young Entrepreneur School SULSEL (YESS)	YESS Sulsel adalah pendidikan non formal yang fokus pada pengembangan jiwa entrepreneurship, menciptakan calon pengusaha-pengusaha baru dan membuka kesempatan kerja bagi orang lain (Job Creator). Konsep pembelajaran YESS dikemas dalam sebuah program pelatihan rutin oleh para mentor, trainer dan coach bisnis ditunjang dengan pendampingan secara instensif. Program YESS Sulsel berdurasi 3 bulan dan dibagi menjadi 3 tahap : 1. Calon Entrepreneur : berisi materi entrepreneur mindset, simulasi dan praktik memulai usaha (8 kali pertemuan). 2. Entrepreneur Pemula : berisi materi, simulasi dan praktik mengelola usaha (8 Kali pertemuan) Entrepreneur Siap Naik Kelas : berisi materi, simulasi dan praktik mengembangkan usaha/siap naik kelas (8 Kali pertemuan)	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
18	NENI SI LINCA (New Normal Innovation Sistem informasu Penelitian Online Campus)	Rancang Bangun dan Pokok Perubahan Yang Dilakukan : NENI SI LINCA (New Nor mal Innovation Sistem Informasi Penelitian Online Campus) dirancang untuk memproses izin penelitian mahasiswa dan peneliti lainnya secara online. Inovasi ini memanfaatkan teknologi informasi yang mudah diakses oleh masyarakat melalui komputer, laptop ataupun handphone, sistem ini lincah seperti namanya karena dapat menerbitkan izin penelitian kapanpun dan dimanapun dengan waktu kurang dari 5 menit. NENI SI LINCA hadir dalam	Dinas Penanaman Modal dan PTSP

NO	NAMA INOVASI	URAIAN	OPD
		mewujudkan tata kelola Pemerintahan yang baik, efisien dan efektif. Inovasi ini dirancang untuk mengoptimalkan tugas pokok dan fungsi DPMPTSP sebagai penyelenggara pelayanan perizinan dan non perizinan. Inovasi ini juga selaras dengan misi Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan yang berorientasi melayani, inovatif, dan berkarakter. Eksistensi NENI SI LINCA menyederhanakan sistem pelayanan perizinan, seperti penyederhanaan regulasi, SOP yang simpel, dan transparan. NENI SI LINCA merupakan inovasi asli dari DPMPTSP Provinsi Sulawesi Selatan dan pertama kali dikembangkan sebagai inovasi yang terintegrasi dengan 148 perguruan tinggi (PTN, PTS, dan PTAI) dan kelompok masyarakat peneliti lainnya di Sulawesi Selatan. Inovasi ini dapat juga dikatakan yang pertama di Indonesia. Kolaborasi tersebut menghasilkan 5 Kesepakatan Bersama dan 94 Perjanjian Kerjasama terkait penelitian dan pengembangan. Hasil Inovasi Evaluasi : NENI SI LINCA dilakukan dalam bentuk Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) atas pengguna layanan Izin Peneilitian. Nilai SKM Tahun 2020 bernilai 80,78 dengan kategori Baik. Hasil dari evaluasi tersebut berdampak sangat baik: Bagi mahasiswa, izin peneiitian bukan lagi menjadi hambatan dalam peneiitian karena diperoleh dengan mudah, murah, cepat dan efisien	

NO	NAMA INOVASI	URAIAN	OPD
		Bagi masyarakat, tidak lagi khawatir akan tertular covid-19 dan munculnya cluster baru Bagi Pemerintahan, inovasi ini sangat efektif menekan biaya operasional khususnya pada penggunaan ATK yang selama ini banyak dibutuhan pada layanan konvensional.	
19	GESIT 19 (Gerai Perizinan Sektor Perikanan dan Kelautan)	Dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan pada sektor perikanan dan kelautan yang menjadi kewenangan penerbitannya pada pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan menjadi kendala khususnya bagi pelaku usaha pada sektor perikanan dan kelautan yang harus menempuh jarak yang jauh ke ibukota provinsi untuk mengurus perizinan dan non perizinan tentunya sangat tidak effektif dan effesien baik secara finansial dan waktu. Dengan hadirnya inovasi Gesit-19 (Gerai Perizinan Sektor Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan) ditandai dengan penandatanganan perjanjian kerjasama antara Kepala DPMPTSP Provinsi Sulawesi Selatan dengan Kepala DPMPTSP Kabupaten Sinjai pada 19 Desember 2018 sebagai perwujudan membangun kolaborasi dan kemitraan dalam mendekatkan pelayanan pada kawasan perikanan kabupaten sinjai sebagai pilot project dan pada tahun 2020 dilakukan replikasi kebijakan pada 24 Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan sebagai pengembangan gerai secara terintegrasi dengan sektor ESDM dan peternakan melalui penandatanganan kesepakatan bersama dan perjanjian kerjasama. Dengan hadirnya Gesit-19 sebagai implementasi dalam mewujudkan	Dinas Penanaman Modal dan PTSP

NO	NAMA INOVASI	URAIAN	OPD
		pemerintah yang ramah investasi dan bersih melayani dan juga sebagai bentuk sinergitas dan kemitraan antara pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dengan pemerintah Kabupaten/kota di Sulawesi Selatan yang menjawab tuntutan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan yang lebih baik.	
20	Pensil Bagi Ayah (Pengembangan Sinergitas Layanan Perlindungan Khusus bagi Anak Yang Berhadapan Hukum)	Sinergitas Layanan bagi Anak yang Berhadapan Hukum, merupakan suatu gerakan yang diperuntukkan kepada Anak Berhadapan Hukum di Lembaga Pemasyarakatan atau Lembaga Pembinaan Khusus Anak. Masalah terbesar yang dihadapi Anak Berhadapan Hukum (ABH) adalah ketika keluar sebagian besar masyarakat tidak menerima di lingkungannya, sehingga tidak jarang anak yang telah dibebaskan kembali lagi ke perbuatannya semula, karena tidak diterima oleh keluarga dan masyarakat sekitarnya. Disamping hal tersebut diatas mereka sudah tidak melanjutkan pendidikan, bahkan tidak jarang dari mereka tidak mempunyai akte kelahiran. Sehingga Dinas P3A Dadluk melaksanakan program perlindungan khusus anak dimana ada 15 anak yang memerlukan perlindungan khusus (UU Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan anak, Pasal 59). Di samping hal tersebut diatas, Pengembangan Sinergitas Layanan Bagi Anak Berhadapan Hukum (PENSIL BAGI AYAH) ini dikembangkan mengingat semua anak adalah anak kita, generasi Penerus bangsa yang mempunyai hak yang sama dengan anak pada	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB

NO	NAMA INOVASI	URAIAN	OPD
		umumnya, dengan mengacu pada prinsip-prinsip hak anak yaitu : 1. Non Diskriminasi 2. Kepentingan Terbaik Anak 3. Hak Hidup, tumbuh dan berkembang 4. Partisipasi Anak	
21	Klinik Terpadu Desa "JUARA" (Jejaring Usaha Untuk Sejahtera)	Kegiatan utama berbasis desa yang mencakup : 1. Klinik berbasis terpadu 2. Klinik Pemuda 3. Klinik Literasi 4. Klinik Parenting Klinik Terpadu Desa "Juara" bertujuan untuk : 1. Membantu mengatasi permasalahan bisnis di desa (perorangan/bumdes/koperasi) melalui pelayanan, pendampingan dan intermediasi 2. Meningkatkan semangat kewirausahaan, kepeloporan dan kepemimpinan pemuda desa 3. Meningkatkan taraf pengetahuan masyarakat melalui literasi dasar (literasi baca tulis, literasi numerasi, literasi sains, literasi finansial, literasi digital, literasi budaya dan kewargaan). 4. Meningkatkan kualitas ibu rumah tangga dan perempuan dalam parenting atau ilmu pengasuhan anak sebagai upaya menyiapkan guru yang hebat dalam rumah tangga	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
22	KEDAI SAMSAT	Berbagai upaya dalam rangka peningkatan Pelayanan Publik, Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia dan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Sulawesi Selatan menuntut	UPT Samsat Makassar Wilayah I, BAPENDA Sulsel

NO	NAMA INOVASI	URAIAN	OPD
		kebutuhan Dana Pembangunan yang terus bertambah setiap tahun. Untuk itu, upaya Optimalisasi pengelolaan sumber-sumber pendapatan daerah merupakan persoalan yang sangat mendasar bagi pemerintah daerah, khususnya dalam era Otonomi Daerah dan Desentralisasi Kewenangan Penyelenggaraan Pemerintahan. Pendapatan Daerah sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode anggaran tertentu. Untuk itu salah satu upaya untuk melakukan terobosan inovasi pelayanan publik, maka Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan mengusulkan Kegiatan Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2017 yaitu "SAMSAT CARE" dalam Wilayah Samsat Makassar dengan modifikasi dari pelayanan publik yang telah ada.	
23	Model Pengembangan Kompetensi berbasis Program strategis melalui Learning Advisor Menuju ASN CorpU Prov. Sulsel.	Tidak ada uraian di website Inovasi OPD – KC JIPP SULSEL (sulselprov.go.id)	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
24	Knowledge Management Repository Inovasi Pelayanan Publik JIPP Sulsel	Tidak ada uraian di website Inovasi OPD – KC JIPP SULSEL (sulselprov.go.id)	Biro Organisasi

Sumber: Profil Inovasi Daerah berdasarkan INdeks Inovasi Daerah Provinsi Sulawesi Selatan 2020, 2021

BAB III

RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

BAB III
RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

3.1 ARAH KEBIJAKAN EKONOMI DAERAH

Perkembangan pemulihan ekonomi global dan nasional, ekonomi Sulawesi Selatan masih mampu tumbuh positif sebesar 4,65% (c to c) pada tahun 2021, kondisi ini lebih baik jika dibandingkan tahun 2020 sebelumnya yang mencapai -0,71% (c to c). Kondisi tersebut ditopang oleh berlanjutnya pemulihan konsumsi masyarakat dan perbaikan kinerja dunia usaha, seiring dengan peningkatan produksi komoditas pertanian serta berlanjutnya pembangunan proyek pemerintah dan swasta. Namun pertumbuhan terbatas dibandingkan tahun sebelumnya seiring dengan pemberlakuan PPKM Level 4 selama hampir keseluruhan triwulan merespon meningkatnya risiko penyebaran COVID-19 varian delta, sehingga mobilitas masyarakat, waktu operasional mall dan toko ritel, serta aktivitas MICE (Meeting, Incentives, Conference, and Exhibitions) menjadi tertahan. Dengan asumsi terkendalinya risiko penularan COVID-19 dan berlanjutnya akselerasi vaksinasi, kinerja positif perekonomian Sulawesi Selatan diprakirakan berlanjut serta meningkat pada tahun 2022. Ke depan, momentum pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan perlu dipertahankan dan dioptimalkan untuk mencapai sasaran pembangunan jangka menengah-panjang

Beberapa skenario disusun untuk menggenjot pertumbuhan ekonomi salah satunya melalui infrastruktur, Infrastruktur menjadi salah satu program padat karya, sehingga yang tadinya kena dampak PHK bisa kerja kembali. Sektor infrastruktur tidak hanya berpotensi meningkatkan perekonomian, tapi juga diberbagai sektor seperti kesehatan. Apalagi, pada kuartal kedua infrastruktur menjadi salah satu penyumbang atau pendongkrak investasi yang ada di Sulawesi Selatan.

Selain beberapa skenario, dibutuhkan juga suatu kebijakan yang diarahkan untuk pemulihan ekonomi dan reformasi struktural yang akan memberikan pondasi yang kuat bagi proses transformasi ekonomi dalam jangka menengah-panjang. Sehingga ditahun 2023 Pemerintah provinsi Sulawesi Selatan berupaya redesain transformasi ekonomi, mengingat dampak pandemi Covid-19 telah memberikan tantangan baru, yang menjadi perhatian khusus dalam penentuan sasaran pembangunan jangka menengah-panjang.

Dilihat dari segala perkembangan yang ada, serta mempercepat potensi pemulihan ekonomi global maupun nasional di tahun depan, maka prediksi target indikator ekonomi makro yang digunakan sebagai dasar penyusunan RAPBD Tahun 2023 yaitu: Pertumbuhan Ekonomi 4,71 – 6,18 persen; Tingkat Kemiskinan 8,26 persen; Tingkat Pengangguran Terbuka 6,28 persen; Gini Rasio 0,376; PDRB Perkapita (ADHB) Rp. 65,98 Juta dan Tingkat Inflasi 3,0-1,0 persen; Sejalan dengan hal tersebut, maka pembangunan ekonomi Provinsi Sulawesi Selatan yang akan dilaksanakan untuk mendukung kebijakan pembangunan daerah tahun 2023, diarahkan pada ***"Pemantapan Kesejahteraan Melalui Pembangunan Manusia Yang Produktif dan***

Berkarakter", dengan Prioritas Pembangunan sebagai berikut : Perlindungan dan jaminan sosial, Penyediaan dan pengembangan sarana pertanian, Penataan bangunan dan lingkungannya, Pengelolaan pendidikan, Pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat, Penempatan tenaga kerja, Pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja, Peningkatan daya tarik destinasi pariwisata, Pemasaran pariwisata, Pengembangan umkm, Perencanaan dan pembangunan industri, Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, Pengendalian bahan berbahaya dan beracun (B3) dan limbah bahan berbahaya dan beracun (limbah B3), Peningkatan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU), Pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum, Penyelenggaraan jalan

3.1.1 PROSPEK DAN TANTANGAN PEREKONOMIAN DAERAH

3.1.1.1 Prospek Perekonomian Daerah

Posisi geografis Provinsi Sulawesi Selatan yang strategis dengan beberapa kelebihan yang dimiliki secara struktural dimana Sulawesi selatan merupakan episentrum perekonomian Sulampua, hal ini menyebabkan pertumbuhan ekonomi Sulawesi selatan relative stabil dibandingkan dengan perekonomian sulampua. Dalam kaitan itu Sulawesi selatan dapat mengambil langkah langkah strategis untuk menjadi basis perekonomian utama di Kawasan Indonesia Timur.

Prospek perekonomian Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2023 diperkirakan tumbuh lebih baik dibandingkan tahun 2022. Penerapan adaptasi kebiasaan baru disertai dengan upaya pemerintah dalam menggerakkan kembali roda perekonomian diperkirakan akan meningkatkan perbaikan konsumsi rumah tangga serta investasi yang mulai terakselerasi mendorong tren pemulihan ekonomi.

Sekaitan dengan tema pembangunan Tahun 2023, Pemantapan Kesejahteraan dan Pembangunan Manusia merupakan modal utama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dan berkelanjutan. Pembangunan ekonomi akan dipacu untuk tumbuh lebih tinggi, inklusif dan berdaya saing melalui: 1) Pengelolaan sumber daya ekonomi yang mencakup pemenuhan pangan dan pertanian serta pengelolaan kelautan, sumber daya air, sumber daya energi, serta kehutanan; dan 2) Akselerasi peningkatan nilai tambah agrofishery industry, kemaritiman, energi, industri, pariwisata, serta ekonomi kreatif dan digital.

Aspek lain pembangunan ekonomi ke depan adalah aspek lingkungan. Perubahan iklim dan menurunnya daya dukung lingkungan dapat berdampak negatif terhadap pencapaian target pertumbuhan ekonomi. Oleh karenanya pembangunan ke depan harus diarahkan untuk mempertahankan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, target penurunan dan intensitas emisi serta kapasitas daya dukung SDA dan daya tampung Lingkungan Hidup saat ini dan di masa yang akan datang.

Rezim ekonomi mengalami perlambatan, Kemunduran, membutuhkan penyesuaian. Dampak pandemi Covid-19 membuat perekonomian terjerembab. Konon terparah dalam sejarah. Ditengah upaya tata ulang prioritas pembangunan, satu agenda akan tetap digenjot. Selain penguatan inovasi,

pemantapan hilirisasi pengolahan sumber daya alam juga menjadi fokus pembangunan tahun 2023. Hilirisasi bukan isu baru. Hilirisasi bahan mentah yang berasal dari industri ekstraktif diwilayah Sulawesi selatan harus dilakukan besar-besaran. Mulai produk pertanian, perkebunan, perikanan, pertambangan, hingga migas.

Ada tiga rasionalitas dalam upaya mewujudkan hilirisasi SDA. Dalam jangka pendek, hilirisasi SDA bertujuan memperbaiki neraca perdagangan. Selama ini, neraca perdagangan memang kedodoran. Meskipun kaya SDA, namun industri domestik masih sangat ekstraktif. Produk SDA langsung diekspor –sebagai komoditas nir nilai tambah- membuat tak mampu mendongkrak nilai ekspor. Ironisnya, pengolahan bahan mentah dari SDA kemudian diimpor dalam bentuk barang jadi. Dampak lanjutannya menghasilkan devisa minimalis. Konsekuensinya, Sulawesi selatan terus mengalami defisit transaksi berjalan.

Dalam jangka menengah. Hilirisasi sangat penting untuk mewujudkan lokomotif pertumbuhan ekonomi. Hilirisasi akan menciptakan berbagai industri pengolahan bahan baku yang melimpah. Selain akan menciptakan nilai tambah produk, multiplier effect-nya akan menciptakan berbagai peluang usaha lainnya. Mendatangkan investasi, menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar, dan meningkatkan pendapatan. Pada akhirnya hilirisasi bisa menjadi pintu masuk terciptanya pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru di berbagai kawasan di Sulawesi selatan.

Dalam jangka panjang, hilirisasi SDA akan membawa Sulawesi selatan menjadi Kawasan industri, menjadi daerah eksportir- produsen dengan produk akhir bernilai tinggi, dan berkembang menjadi daerah industry maju di bidang pertanian, demikian pula dengan perikanan, perkebunan, pertambangan dan industry berbasis SDA lainnya.

Inovasi dan hilirisasi bidang pertanian sangat diperlukan mengingat pandemic menjadi momentum meningkatnya kesadaran masyarakat untuk mengonsumsi produk lokal. Hilirisasi pertanian bersifat renewable lebih muda untuk dapat sustainable dan environmental friendly serta dapat mendukung kampanye global green economy,

Upaya Pemulihan Ekonomi yang dilakukan pemerintah pada tahun 2022 dan dengan mencermati perkembangan ekonomi yang ada, maka pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan tahun 2023 diperkirakan akan mengalami peningkatan kembali. Terdapat beberapa faktor yang menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan pada tahun 2023 antara lain; komoditas ekspor Sulawesi Selatan tidak terdampak perang dagang Amerika dan Tiongkok, peningkatan konsumsi rumah tangga, berlanjutnya stimulus fiskal pemerintah pada peningkatan infrastruktur di luar daerah, serta berlangsungnya beberapa proyek infrastruktur pemerintah yang ikut mendorong lapangan usaha konstruksi.

3.1.1.2 Tantangan Perekonomian Global

Perang menghadapi pandemi virus belum usai. Hampir seluruh negara, termasuk di Asia dan Asia Tenggara, harus menghadapi tantangan yang sama, di waktu yang bersamaan pula namun setelah mengalami pemulihan kuat pada tahun 2021, ekonomi global diprakirakan mengalami

perlambatan pada tahun 2023. Perekonomian negara berkembang diprakirakan belum mampu kembali menuju tren sebelum pandemi pada tahun 2022, berbeda dibandingkan dengan negara maju yang diprakirakan sudah kembali ke tren sebelum pandemi. Perlambatan ekonomi global tersebut disebabkan oleh ketidakseimbangan tingkat vaksinasi global antar negara, penyebaran varian baru COVID-19, kebijakan fiskal dan moneter yang lebih ketat, berlanjutnya gangguan rantai pasok, dan dampak luka memar akibat pandemi COVID-19 (*scarring effect*).

Luka memar tecermin juga dari kondisi keuangan korporasi yang pada akhirnya menimbulkan risiko pada ketahanan sistem keuangan. Pembatasan kegiatan sosial akibat pandemi menyebabkan penurunan pada aktivitas dunia usaha sehingga berdampak pada menurunnya tingkat penjualan, likuiditas, profitabilitas, dan permodalan korporasi. Tingkat keberhutangan (*leverage*) meningkat sejak pandemi baik di negara maju maupun negara berkembang. Beberapa kasus kegagalan korporasi juga dilaporkan terjadi di Amerika Serikat dan Cina. Sementara itu, isu perubahan kebijakan Cina terkait rencana peralihan ke energi terbarukan atau ramah lingkungan menimbulkan peningkatan risiko dalam keuangan, dengan banyaknya perusahaan padat karbon yang menghadapi profitabilitas lebih rendah dan kerentanan likuiditas.

Dari sisi moneter-fiskal, ketidakseimbangan dalam normalisasi kebijakan moneter dan fiskal di beberapa negara sebagai respons atas tingginya tekanan inflasi dan upaya menurunkan defisit anggaran fiskal menyebabkan ketatnya likuiditas global. Perkembangan pada akhir 2021, Bank Sentral Amerika Serikat telah mengumumkan siklus pengetatan kebijakan moneter yang lebih cepat. Sementara itu, Bank Sentral Korea, Norwegia, Rusia, dan Selandia Baru sudah menaikkan suku bunga kebijakannya yang disebabkan oleh tekanan inflasi seiring dengan peningkatan aktivitas ekonomi serta indikasi munculnya risiko stabilitas keuangan. Dinamika ini mendorong pelaku pasar memprakirakan kenaikan *Fed Funds Rate* lebih cepat, yakni pada paruh I-2022 dengan total kenaikan selama 2022 sebesar 75 bps.

Adanya geopolitik global, berupa ketegangan Rusia dan Ukraina juga telah memicu ketidakpastian global. Hal tersebut memberikan tekanan negatif pada perekonomian, khususnya dapat memengaruhi prospek pemulihan ekonomi, volatilitas pada pasar keuangan, dan arus perdagangan global.

Dengan berbagai perkembangan tersebut, pertumbuhan ekonomi dunia diprakirakan mengalami perlambatan pada tahun 2022, setelah mengalami *rebound* di tahun 2021. International Monetary Fund (IMF, Januari 2022) menurunkan perkiraan pertumbuhan ekonomi global menjadi sebesar 4,4 persen dari 4,9 persen pada tahun 2022, yang utamanya didorong oleh risiko seperti

perkembangan varian Omicron, keberlanjutan gangguan rantai pasok, krisis energi, konflik Ukraina-Rusia, serta tekanan peningkatan inflasi. Lembaga internasional lain, World Bank dan Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) memproyeksikan pertumbuhan ekonomi global pada tahun 2022 masing-masing sebesar 4,1 dan 4,5 persen.

Beberapa tantangan global yang menjadi perhatian antara lain :

1. Normalisasi kebijakan moneter dan fiskal di negara maju dan ketidakpastian pasar keuangan global yang belum mereda
2. Dampak luka memar pandemi pada korporasi dan stabilitas sistem keuangan
3. Meluasnya sistem pembayaran digital antarnegara dan risiko aset kripto
4. Tuntutan ekonomi keuangan hijau
5. Melebarnya kesenjangan dan perlunya inklusi keuangan

3.1.1.3 Tantangan Perekonomian Nasional

Proses pemulihan ekonomi nasional pada tahun 2023 diprakirakan akan berlanjut walaupun masih dihadapkan pada beberapa tantangan. Penyebaran varian baru COVID-19, risiko pengetatan likuiditas domestik, ketidakpastian global yang memengaruhi pola perdagangan, dan pemulihan sosial yang belum optimal dari dampak pandemi COVID-19 diprakirakan mampu memengaruhi kinerja perekonomian ke depan.

Ketidakseimbangan pemulihan yang terjadi baik antar provinsi maupun antar subsektor berpotensi menghambat akselerasi pertumbuhan ekonomi. Dari sisi kewilayahan, Provinsi Maluku Utara, Papua, dan Sulawesi Tengah merupakan provinsi yang mampu tumbuh tinggi di tahun 2021, sedangkan Provinsi Bali dan Papua Barat masih terkontraksi dan belum mampu pulih. Dari sisi subsektor, subsektor industri pengolahan tembakau, barang logam, kertas,kayu, dan tekstil masih mengalami terkontraksi.

Selain itu, dampak pandemi COVID-19 juga menyebabkan disrupsi pada pembelajaran yang mengakibatkan *learning loss* dan *earnings penalty*. Selama dua dekade terakhir, hasil pembelajaran siswa Indonesia menunjukkan stagnasi dan tertinggal jauh dari negara-negara lain. Dalam RPJMN 2020– 2024 ditetapkan target yang cukup tinggi untuk mengejar ketertinggalan. Namun, pandemi COVID-19 diprakirakan akan menurunkan skor PISA ke titik terendah dalam dua dekade terakhir.

Pandemi COVID-19 juga menyebabkan belum pulihnya dunia usaha. Rendahnya permintaan terhadap kredit baru adalah indikasi dari rendahnya kecenderungan usaha untuk berinvestasi. Turunnya omzet cenderung menjadi motivasi utama dari usaha yang mendaftar untuk mendapatkan kredit baru. Hal ini berasosiasi dengan tren pertumbuhan kredit modal kerja yang

relatif lebih baik dibandingkan dengan kredit investasi (sekalipun terdapat *base effect*). Dari sisi sosial, kondisi pengangguran dan kemiskinan Indonesia perlahan mengalami perbaikan. Namun, tingkat pengangguran dan kemiskinan tersebut belum dapat kembali ke masa sebelum pandemi COVID-19. Selain itu, proses penurunan *stunting* juga mengalami perlambatan pada saat pandemi, yang berisiko menurunkan kualitas sumber daya manusia di masa yang akan datang.

Selain itu, ekspor barang dan jasa Indonesia pada tahun 2022 diprakirakan tumbuh positif, namun tidak sebesar tahun 2021. Pertumbuhan ekspor barang diprakirakan lebih rendah pada tahun 2022 disebabkan oleh (a) pertumbuhan negara mitra yang diprakirakan positif namun lebih rendah dibandingkan tahun 2021; (b) masih berlanjutnya hambatan rantai pasok kelangkaan kontainer; (c) harga komoditas yang diprakirakan tidak setinggi di tahun 2021; dan (d) eskalasi politik Eropa Timur yang dapat mengganggu ketidakstabilan *supply-demand* beberapa komoditas penting seperti minyak bumi dan gandum. Sementara itu, risiko penyebaran COVID-19 masih akan memperlambat aktivitas perdagangan jasa yang sudah mulai pulih seiring pembukaan border di beberapa destinasi wisata. Pada tahun 2023, walaupun perekonomian negara mitra dagang diprakirakan semakin pulih seiring dengan tingkat vaksinasi yang semakin tinggi, besaran dampaknya terhadap peningkatan ekspor Indonesia masih dibayang-bayangi oleh proteksionisme yang mungkin akan tetap tinggi. Beberapa produk komoditas Indonesia diprakirakan masih akan mengalami hambatan ekspor di beberapa negara akibat isu lingkungan dan *sustainability* yang akan semakin meningkat. Sementara itu, kinerja ekspor non-komoditas masih terkendala berbagai permasalahan di dalam negeri, di antaranya terkait dengan isu produktivitas dan daya saing, akses bahan baku domestik dan impor, kemampuan inovasi, akses pembiayaan dan investasi, akses pasar dan buyer, serta integrasi program

Pada tahun 2021, pertumbuhan ekonomi Indonesia telah mencapai sebesar 3,69 % (C to C) . Kemudian pada tahun 2022 akselerasi ekonomi nasional menargetkan sebesar 5,7-6,0 % sedangkan tahun 2023 sebesar 5,3 – 5,9 %.

Dengan target tersebut, Indonesia dibidik masih menyandang predikat Upper-Middle Income Countries. Sehingga kedepan pemerintah menyiapkan lima langkah untuk meningkatkan investasi, yakni finalisasi Rancangan Undang-Undang terkait Ketentuan dan Fasilitasi Perpajakan, pemberian fasilitas kemudahan akses pinjaman perbankan, pemberian fasilitasi investasi seperti percepatan perizinan berusaha di kementerian, lembaga, dan daerah melalui sistem Online Single Submission terintegrasi, pemberian kemudahan untuk investasi berorientasi ekspor, hingga kemudahan dalam pemenuhan bahan baku dalam negeri dan ekspor.

Sementara itu, Pertumbuhan ekonomi dari sisi lapangan usaha mengandalkan sektor industri, perdagangan, serta penyediaan akomodasi dan makan minum sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi, sementara sektor terdampak negatif diharapkan pulih, seiring dengan normalnya kondisi global dan domestik yang berujung pada semakin bergeraknya roda industri dan memicu kedatangan wisatawan.

Akselerasi pertumbuhan ekonomi juga didukung peningkatan sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan yang didorong pulihnya permintaan domestik dan global serta meningkatnya produktivitas lahan dan penguatan nilai tambah produk.

Pemerintahpun optimistis dalam melakukan perbaikan (pemulihan ekonomi) berlanjut hingga 2023, meski tidak dapat dipungkiri bahwa pandemi Covid-19 masih akan mewarnai tahun depan dan proses pengendalian Covid-19 sangat bergantung pada penemuan dan distribusi vaksin hingga mencapai herd immunity.

Beberapa tantangan perekonomian nasional yang menjadi perhatian antara lain :

1. Pemulihan ekonomi global yang tidak merata
2. Pememaran (scaring effect) terhadap stabilitas sistem keuangan
3. Akselerasi ekonomi dan keuangan digital yang semakin cepat
4. Kebutuhan inklusi ekonomi, dan keuangan yang semakin nyata
5. Dorongan untuk implementasi ekonomi dan keuangan hijau

3.1.1.4 Tantangan Perekonomian Daerah

Kesadaran masyarakat dalam melaksanakan protokol Kesehatan diharapkan dapat mencegah meluasnya pandemi COVID-19. Pemanfaatan bantuan pemerintah dalam rangka penanganan COVID-19 secara optimal diharapkan dapat memberikan pengaruh positif dalam meningkatkan daya beli masyarakat. Selain itu Akselerasi pertumbuhan ekonomi akan dicapai melalui kolaborasi dan gotong royong antar daerah dalam mengembangkan ekonomi regional. Dibutuhkan effort dari masing-masing Pemda dalam memaksimalkan Sumber Daya Alam (SDA) maupun Sumber Daya Ekonomi (SDE) karena Pemda sebagai interpreneur yang harus terlibat aktif dan inovatif untuk mendorong aktifitas dan kreatifitas bisnis didaerah.

3.1.1.4.1 Laju Pertumbuhan Ekonomi

Dengan melihat kondisi Sulawesi Selatan yang saat ini masih bergelut dengan wabah covid-19 yang makin meluas, sehingga mengakibatkan pertumbuhan ekonomi masih mengalami perkembangan yang fluktuasi, maka ditahun 2022 Sulawesi Selatan memproyeksikan target capaian pertumbuhan ekonomi sebesar 4,62 – 5,98 persen dan Nasional menargetkan capaian pertumbuhan ekonomi sebesar 5,2-5,55 persen. Sementara untuk ditahun 2023 pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan ditargetkan sebesar 5,06 – 6,59 persen dan Nasional sebesar 5,3-5,9 persen.

Grafik III.1.

Pertumbuhan Ekonomi Sulawesi Selatan dan Nasional, Capaian Tahun 2021, Perkiraan Capaian Tahun 2022 dan Target Tahun 2023

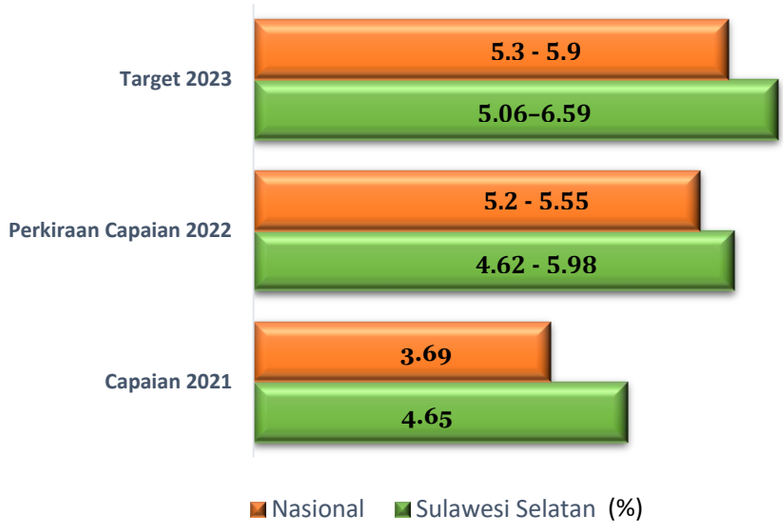

Sumber : BPS, RKPD 2022 dan Rancangan RKP 2023 Diolah oleh Bappelitbangda Prov. Sulsel Tahun 2022

Jika dilihat Dari sisi lapangan usaha (LU) pelemahan ekonomi disebabkan oleh terkontraksinya beberapa lapangan usaha dengan kontribusi yang cukup besar. Struktur PDRB Sulawesi Selatan menurut lapangan usaha atas dasar harga berlaku tidak menunjukkan perubahan berarti. Perekonomian Sulawesi Selatan masih didominasi oleh lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan sebesar 22,55 persen, diikuti oleh perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor sebesar 14,58 persen; konstruksi sebesar 14,41 persen dan industri pengolahan sebesar 12,50 persen. Kontribusi keempat lapangan usaha tersebut dalam perekonomian Sulawesi Selatan mencapai 64,04 persen.

Tabel III. 1
Laju Pertumbuhan dan Struktur PDRB Provinsi Sulawesi Selatan Menurut Lapangan Usaha Tahun 2019-2021 (persen)

Lapangan Usaha		Laju Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan			Strutur PDRB Atas Dasar Harga Berlaku		
		2019	2020	2021	2019	2020	2021
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	278	0,71	6,40	21,35	21,72	22,55
B	Pertambangan dan Penggalian	2,68	0,54	0,59	4,62	4,67	4,75
C	Industri Pengolahan	9,92	4,57	3,02	13,17	12,76	12,50
D	Pengadaan Listrik, Gas	6,21	2,59	10,87	0,06	0,06	0,07
E	Pengadaan Air	1,73	6,61	4,07	0,09	0,10	0,10
F	Konstruksi	8,92	1,56	4,14	14,11	14,37	14,41

Lapangan Usaha		Laju Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan			Strutur PDRB Atas Dasar Harga Berlaku		
		2019	2020	2021	2019	2020	2021
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepda Motor	9,04	3,07	6,50	14,80	14,48	14,58
H	Transportasi dan Pengadaan	1,74	21,46	5,17	4,21	3,07	3,07
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	6,42	13,68	2,96	1,41	1,25	1,20
J	Informasi dan Komunikasi	10,99	10,84	6,39	5,05	5,62	5,56
K	Jasa Keuangan	4,00	2,43	1,14	3,65	3,75	3,63
L	Real Estate	5,42	3,79	2,58	3,65	3,81	3,62
M,N	Jasa Perusahaan	10,53	10,05	6,23	0,47	0,43	0,43
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Sosial Wajib	9,98	0,04	2,29	4,63	4,71	4,53
P	Jasa Pendidikan	6,93	5,73	3,67	5,26	5,60	5,36
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	8,05	10,06	7,77	2,02	2,31	2,35
R,S,T,U	Jasa Lainnya	9,73	12,02	7,56	1,45	1,29	1,30
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)		**6,91**	**0,71**	**4,65**	**100,000**	**100,000**	**100,000**

Sumber : BPS Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022

Sedangkan untuk PDRB perkapita Provinsi Sulawesi Selatan menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun, seiring dengan kenaikan jumlah penduduk. Indikator ini menunjukkan bahwa secara ekonomi setiap penduduk Sulawesi Selatan rata-rata mampu menciptakan PDRB atau nilai tambah sebesar nilai perkapita setiap tahunnya. Hal ini ditunjukkan dengan capaian PDRB Perkapita (ADHB) Sulawesi Selatan pada tahun 2021 sebesar Rp. 59,66 juta. Dan pada tahun 2022, ditargetkan capaian PDRB perkapita sebesar Rp. 62,37 juta, kemudian untuk tahun 2023 ditargetkan akan mencapai sebesar Rp. 65,98 Juta.

Grafik III.2.
PDRB Perkapita Sulawesi Selatan,
Capaian 2021, Perkiraan 2022 dan Target 2023

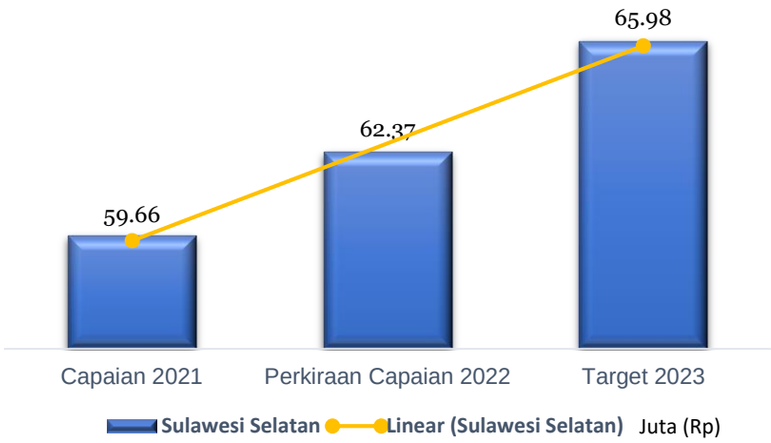

Sumber : BPS, RKPD 2022 dan Rancangan RKP 2023 Diolah oleh Bappelitbangda Prov. Sulsel Tahun 2022

3.1.1.4.2 Inflasi

Inflasi merupakan indikator yang menunjukan kecenderungan kenaikan harga barang dan jasa. Dengan tingginya inflasi, akan memberikan dampak pada daya beli masyarakat atas barang dan jasa terutama barang kebutuhan pokok yang pada akhirnya berdampak lansung terhadap kesejahteraan masyarakat. Pada tahun 2021, inflasi Sulsel (2,04 persen) lebih tinggi dibandingkan Nasional (1,68 persen). Rendahnya tekanan inflasi di tahun 2021 didorong oleh daya beli masyarakat yang menurun sebagai imbas pandemi COVID-19. Pandemi COVID-19 yang terjadi sejak minggu ke-3 di Maret 2021 menambah jumlah angka pengangguran dan menurunkan sumber pendapatan masyarakat yang berakibat penurunan daya beli. Kondisi ini merupakan hubungan terbalik antara tingkat pengangguran dan inflasi. Hubungan kedua indikator tersebut memiliki tren yang cukup linear. Penurunan inflasi menghasilkan trade-off dengan meningkatnya jumlah pengangguran. Menjaga dan meningkatkan pendapatan masyarakat untuk mendorong level konsumsi perlu mendapat prioritas kebijakan nasional saat ini. Dengan pulihnya konsumsi masyarakat, maka level produksi akan meningkat dan pada akhirnya berdampak pada penciptaan lapangan kerja dan mengakselerasi pertumbuhan ekonomi. Maka Inflasi yang terjadi ditahun 2022 diproyeksi akan mengalami peningkatan ke level 3,0-1,0 persen demikian juga tahun 2023 sebesar 3,0-1,0 persen.

Grafik III.3.
Tingkat Inflasi Sulawesi Selatan dan Nasional
Tahun 2021, Perkiraan Capaian 2022 dan Target 2023

Sumber : BPS, RKPD 2022 dan Rancangan RKP 2023 Diolah oleh Bappelitbangda Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2022

3.1.1.4.3 Tingkat Pengangguran Terbuka

Perbaikan kondisi ketenagakerjaan dibandingkan kondisi awal pandemi COVID-19 di Sulawesi Selatan pada Tahun 2021 dipengaruhi oleh peningkatan pada beberapa lapangan usaha seperti lapangan usaha konstruksi, lapangan usaha perdagangan, dan lapangan usaha industri pengolahan. Meski mengalami perlambatan pertumbuhan dibanding dengan periode sebelumnya, lapangan usaha pertanian masih menjadi sektor penyerap tenaga kerja terbanyak di Sulawesi Selatan dengan pangsa sebanyak 37,43 persen poin pada Tahun 2021 atau setara dengan 1,56 juta orang.

Melihat dari kondisi saat ini, , Pemerintah Sulawesi Selatan ditahun 2022 masih memprediksikan capaian tingkat pengangguran terbuka sebesar 6,16-6,95 persen atau masih lebih tinggi jika dibandingkan dari capaian tahun 2021 yang mencapai 5,72 persen dan lebih rendah dari capaian Nasional sebesar 6,49 persen. Sementara untuk tahun 2023, tingkat pengangguran terbuka di target oleh pemerintah sulawesi selatan sebesar 5,69 persen atau lebih tinggi dari target Nasional yaitu 5,3-6,00 persen.

Grafik III.4.
Tingkat Pengangguran Terbuka Sulawesi Selatan dan Nasional
Tahun 2021, Perkiraan Capaian 2022 dan Target 2023

Sumber : BPS, RKPD 2022 dan Rancangan RKP 2023 Diolah oleh Bappelitbangda Prov. Sulsel Tahun 2022

3.1.1.4.4 Kemiskinan

Penduduk miskin di Sulawesi Selatan pada September 2021 berjumlah 765,46 ribu orang, mengalami penurunan sebesar 34,78 ribu orang terhadap September 2020 dan menurun sebanyak 19,52 ribu orang terhadap Maret 2021. Penduduk miskin pada September 2021 tercatat sebesar 8,53 persen, turun 0,46 persen poin dari September 2020 dan turun 0,25 persen poin dari Maret 2021. Penduduk miskin di daerah perkotaan secara tahunan mengalami peningkatan sebanyak 3,76 ribu orang. Peningkatan ini terjadi sebab adanya penurunan pendapatan masyarakat akibat tekanan ekonomi serta adanya kebijakan pembatasan aktivitas yang mengakibatkan beberapa usaha tutup dan berujung sumber pendapatan masyarakat yang semakin menurun. Sedangkan pada September 2021, penduduk miskin di daerah perdesaan mengalami penurunan sebanyak 38,54 ribu orang dibandingkan periode yang sama di tahun sebelumnya. Penurunan angka kemiskinan di daerah perdesaan Sulawesi Selatan disebabkan perekonomian, terutama di sektor pertanian yang masih mengalami pertumbuhan di tahun 2021. Komposisi penduduk miskin antara daerah perkotaan dan perdesaan di Sulawesi Selatan dari tahun ke tahun relatif tidak mengalami perubahan yang signifikan. Pada September 2021, komposisi penduduk miskin di perdesaan menurun sebanyak 1,6 persen poin dari periode September 2020 menjadi 74,02 persen. Di sisi lain, kompisisi penduduk miskin di daerah perkotaan menurun sebanyak 1,6 persen poin menjadi 25,98 persen.

Akibat dampak tersebut, penduduk miskin di Sulawesi Selatan pada tahun 2022 di prediksi akan mencapai 8,38-9,19 persen. Namun pada tahun 2023, dengan asumsi bahwa kondisi perekonomian dan sosial masyarakat akan membaik, maka pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan menargetkan untuk menurunkan penduduk miskin sebesar 7,45 persen atau dibawah target Nasional yaitu 7.0-8.0 persen.

Grafik III.5.
Tingkat Kemiskinan Sulawesi Selatan dan Nasional
Tahun 2021, Perkiraan Capaian 2022 dan Target 2023

Sumber : BPS, RKPD 2022 dan Rancangan RKP 2023 Diolah oleh Bappelitbangda Prov. Sulsel Tahun 2022

3.1.1.4.5 Gini Rasio

Salah satu ukuran ketimpangan yang sering digunakan adalah Gini Ratio. Nilai Gini Ratio berkisar antara 0-1. Semakin tinggi nilai Gini Ratio menunjukkan ketimpangan yang semakin tinggi. Gini ratio di Provinsi Sulawesi Selatan berfluktuasi dari waktu ke waktu.

Gini Ratio Provinsi Sulawesi Selatan pada periode September tahun 2021 mencapai sebesar 0,377, atau berada dibawah capaian angka Nasional yaitu 0,381. Untuk tahun 2022, Gini Ratio di Sulawesi Selatan di prediksi akan mencapai angka 0,381, dan di tahun yang sama Nasional memprediksi angka Gini Rasio Indonesia sebesar 0,376–0,378, atau dibawah angka Sulawesi Selatan. Sementara pada tahun 2023, angka Gini Rasio Sulawesi Selatan di targetkan sebesar 0,376-0,381, atau menurun dari tahun sebelumnya, sedangkan target Nasional sebesar 0,375–0,378 atau dibawah angka Sulawesi Selatan. Hal Ini menunjukkan bahwa ketimpangan di Provinsi Sulawesi Selatan cukup signifikan kenaikannya dari tahun 2021 ke tahun 2022 dan 2023. Kenaikan Gini Ratio ini disebabkan karena dampak pandemi Covid-19 sehingga pendapatan penduduk (didekati dengan pengeluaran) desil 1 meningkat, sementara golongan menengah atas walaupun dari sisi pengeluaran meningkat namun pendapatannya naik. Akibat pendapatan penduduk menengah atas lebih tinggi, maka menyebabkan gap (jarak) antara penduduk miskin dan menengah atas menjadi semakin jauh.

Grafik III.6.
Gini Rasio Sulawesi Selatan dan Nasional
Capaian 2021, Perkiraan Capaian 2022 dan Target 2023

Sumber : BPS, RKPD 2022 dan Rancangan RKP 2023 Diolah oleh Bappelitbangda Prov. Sulsel Tahun 2022

Dalam pencapaian sasaran indikator makro ekonomi daerah, pemerintah daerah Sulawesi Selatan selain berperan secara langsung dalam implementasi program pembangunan yang teralokasikan dalam APBD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023, secara tidak langsung juga dituntut untuk menciptakan iklim yang kondusif bagi pelaku ekonomi lainnya dalam menjalankan aktivitas usahanya di Sulawesi Selatan. Hal ini dimaksudkan agar masing-masing memberikan kontribusi pada pencapaian sasaran makro ekonomi Sulawesi Selatan 2023 dan pencapaian target Nasional, mulai pertumbuhan ekonomi yang tinggi, laju inflasi yang stabil, PDRB per kapita meningkat tajam, persentase penduduk miskin yang menurun, serta tingkat pengangguran terbuka yang menurun dan mencapai tingkat yang terendah. Dalam perspektif itulah, arah kebijakan perekonomian daerah sangat diperlukan, bukan hanya untuk sektor pemerintah, tetapi yang jauh lebih penting untuk menjadi arahan bagi pelaku ekonomi lainnya di Sulawesi Selatan.

3.1.2 Arah Kebijakan Ekonomi Nasional Tahun 2023

Arah kebijakan Ekonomi makro secara nasional ditujukan terutama untuk mendukung prioritas pembangunan untuk mempercepat pemulihan ekonomi dengan fokus belanja untuk peningkatan kualitas kesehatan, pendidikan, infrastruktur, pangan (pertanian dan perikanan), pariwisata, jaring pengaman sosial, dunia usaha, dan UMKM.

Kebijakan tersebut dilakukan secara komprehensif dengan reformasi di bidang belanja melalui kebijakan antara lain pertama, efisiensi belanja melalui penajaman biaya operasional sejalan dengan perubahan proses kerja. Kedua, optimalisasi teknologi informasi untuk meningkatkan kualitas layanan publik dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pemberian pelayanan (service delivery). Ketiga, redesain sistem penganggaran yang menggunakan pendekatan belanja yang lebih baik (spending better) yang fokus pada pelaksanaan program prioritas berbasis pada hasil (result based) dan efisiensi kebutuhan dasar, serta antisipatif terhadap berbagai tekanan (automatic stabilizer).

Arah kebijakan ekonomi makro secara nasional menderivasi arah kebijakan perekonomian daerah. Interaksi arah kebijakan ini merupakan faktor penting guna menjamin efektifitas pendanaan dalam pencapaian sasaran perekonomian daerah dan sasaran pembangunan nasional melalui pendekatan secara holistik ini akan lebih terfokus pada penyelesaian permasalahan-permasalahan perekonomian regional dan nasional, sehingga dampak yang dihasilkan dan manfaat yang diperoleh dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat.

Gambar III.1.
Tema, Prioritas Nasional dan Arah Kebijakan RKP Tahun 2023

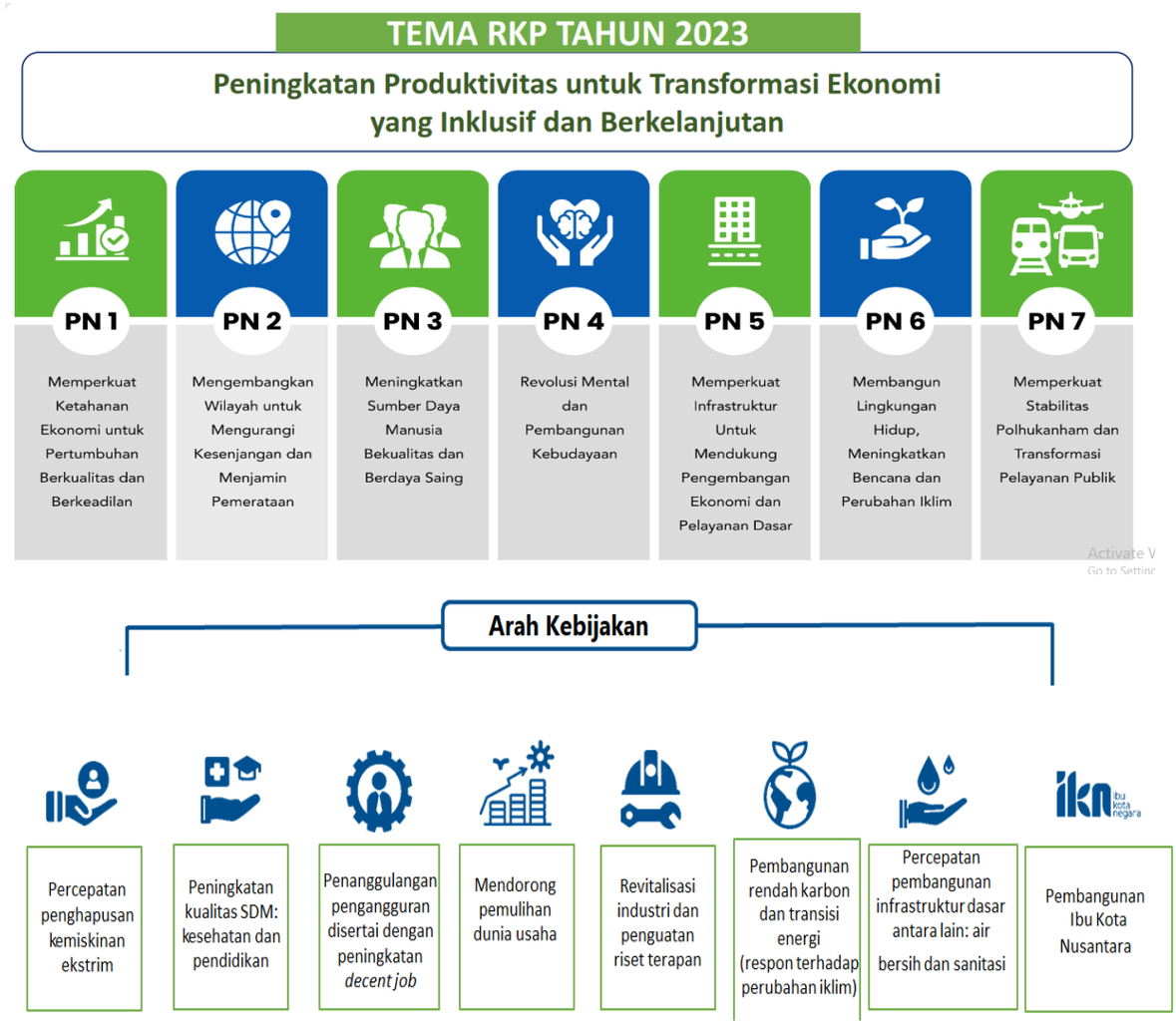

Sumber : *Rancangan awal RKP tahun 2023*

Untuk mewujudkan tema tersebut maka sasaran pembangunan nasional tahun 2023 diarahkan untuk mencapai sasaran utama yang mencakup sasaran makro perekonomian nasional yang terdampak pandemi Covid-19, yaitu sebagai berikut :

Gambar III.2.

Indikator Sasaran Pembangunan Nasional Tahun 2023

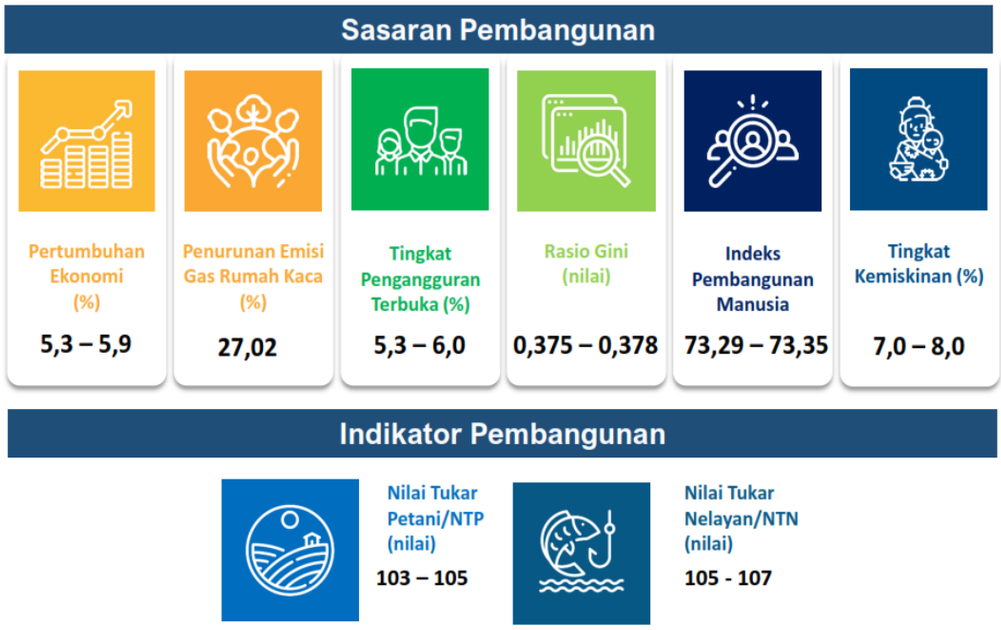

Sumber: Rancangan awal RKP tahun 2023

Berdasarkan hasil analisis pada berbagai prospek dan tantangan ekonomi daerah, dan sejalan dengan arah kebijakan ekonomi makro RKP 2023, maka strategi yang akan ditempuh oleh pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023 sebagai berikut :

1. Penguatan inovasi berbasis teknologi informasi dalam pelayanan publik;
2. Penyediaan infrastruktur sumberdaya air
3. Peningkatan lapangan kerja, investasi dan industrialisasi pengolahan produk unggulan daerah
4. Penguatan kapasitas usaha kelompok miskin dan rentan melalui kelompok usaha bersama (kube) atau kelompok sosial lainnya
5. Akselerasi peningkatan kualitas lulusan pendidikan menengah umum dalam meluluskan tamatan pada seleksi perguruan tinggi negeri bereputasi;
6. Peningkatan kapasitas tenaga kesehatan untuk penguatan fungsi pelayanan kesehatan dasar;
7. Peningkatan Kapasitas Lembaga Penyedia Layanan Permberdayaan Perempuan, Perlindungan Perempuan Dan Anak, Peningkatan Kualitas Keluarga serta Pemenuhan Hak Anak
8. Peningkatan Peran Masyarakat Dan Lembaga Keagamaan Dalam Aktualisasi Nilai-nilai Agama Dan Budaya Dalam Kehidupan Pembangunan;
9. Peningkatan Ekspor Melalui Nilai Tambah Dan Daya Saing Produk Penglolahan Hasil Pertanian, Peternakan, Perikanan serta Kemaritiman
10. Penguatan Upaya Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi Pengendalian Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Serta
11. Pembangunan Rendah Karbon;

3.2 ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

Kinerja pengelolaan keuangan daerah yang maksimal sangat dibutuhkan dalam upaya pencapaian target RKPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023 dan secara umum dalam mendukung target pembangunan daerah yang tertuang dalam Perubahan RPJMD 2018-2023. Regulasi terbaru yang menjadi rujukan kebijakan pengelolaan keuangan daerah adalah Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dimana komponen keuangan daerah meliputi komponen Pendapatan daerah, Belanja daerah dan Pembiayaan daerah yang harus dikelola secara tertib, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggungjawab dengan tetap memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Dengan demikian, arah kebijakan Keuangan Daerah akan diuraikan pada masing-masing komponen Keuangan Daerah sebagai berikut :

3.2.1 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Prediksi Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mengenai pandemi Covid-19 belum berakhir hingga tahun 2022 membawa harapan perekonomian daerah akan mulai memasuki masa pemulihan pada tahun 2023 yang akan datang namun tetap berjaga dan mempersiapkan langkah apabila pandemi masih terus berlanjut. Masa pemulihan ekonomi ini tentunya diharapkan turut berdampak positif terhadap perkembangan pendapatan daerah pada tahun 2023. Sementara itu Pemerintah Pusat sementara menyusun Undang-Undang Hubungan Keuangan Pusat Dan Daerah yang merevisi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah serta Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Hal ini berarti terdapat perubahan fundamental dalam pola pemungutan Pendapatan Daerah yang juga akan berdampak signifikan terhadap penerimaan Pendapatan Daerah.

Dikaitkan dengan Kebijakan Umum Pendapatan Daerah dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan 2018-2023, kebijakan pendapatan daerah ditujukan guna meningkatkan kemandirian fiskal daerah, mengurangi ketergantungan fiskal, serta meningkatkan ruang fiskal daerah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi obyek untuk tujuan tersebut, selain menggambarkan kapasitas fiskal daerah juga berpotensi meningkatkan ruang fiskal daerah untuk kebutuhan alokasi belanja prioritas pembangunan daerah. Untuk itu upaya intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah khususnya pendapatan asli daerah dilaksanakan dengan pengelolaan pendapatan asli daerah yang semakin inovatif dan modern. Namun upaya intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah sangat dipengaruhi oleh kebijakan maupun perubahan regulasi dari pemerintah pusat.

Sebagai bentuk pelaksanaan amanat kebijakan pendapatan daerah dalam RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan, pada tahun 2023 arah kebijakan pendapatan daerah akan diprioritaskan dalam strategi upaya optimalisasi pendapatan daerah melalui penguatan inovasi berbasis teknologi informasi dalam pelayanan publik dengan melakukan perluasan digitalisasi transaksi pajak daerah dan retribusi daerah. Selain modernisasi pelayanan pajak dalam

bentuk pembayaran online, kerjasama antar instansi terkait juga terus ditingkatkan dengan melakukan kerjasama dengan Kanwil Pajak dan Kanwil Bea Cukai, *host to host* dengan Kantor perizinan, melalukan penagihan tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) milik pribadi dan perusahaan melalui kegiatan door to door dan penertiban pajak kendaraan bermotor yang bekerjasama dengan mitra Kepolisian dan Jasa Raharja, serta meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat agar dalam membeli kendaraan baru sesuai alamat domisili di wilayah Sulawesi Selatan untuk mendukung penrimaan Pajak Daerah.

Untuk jenis pajak daerah yang bersifat *self assessment*, koordinasi dengan seluruh stakeholder dalam upaya peningkatan pendataan terhadap penjualan Bahan Bakar Minyak (BBM) dan pelaksanaan rekonsiliasi data penjualan bahan bakar minyak antara wajib pungut (WAPU) dan pengguna BBM.

Selain upaya-upaya di sektor Pajak Daerah, peningkatan hasil Retribusi Daerah juga akan mendapat perhatian melalui optimalisasi peningkatan SDM (Diklat PPNS, Juru Sita dan diklat perhitungan nilai asset. Dengan didukung peninjauan regulasi dan peninjauan tarif retribusi. Adapun upaya optimalisasi Pendapatan Asli Daerah pada sektor Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan akan tetap ditujukan untuk meningkatkan kapasitas Badan Usaha Milik Daerah sehingga dapat meningkatkan kontribusinya melaui deviden yang disetorkan ke Rekening Kas Umum Daerah dan selanjutnya pada kelompok Lain-Lain PAD Yang Sah, kebijakan optimalisasi pendapatan akan ditujukan pada keberlangsungan upaya pemanfaatan aset-aset daerah melalui skema Sewa Barang Milik Daerah.

Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD) maka diharapkan adanya peningkatkan pendapatan transfer melalui penerimaan Dana Bagi Hasil (DBH) dan Dana Alokasi Umum (DAU) dengan tetap memperhatikan jumlah penduduk, kondisi, karakteristik, dan capaian kinerja daerah. Adapun untuk penerimaan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah, akan ditujukan kepada optimalisasi partisipasi pihak ketiga kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan untuk mendukung pembangunan daerah.

3.2.2 Realisasi dan Proyeksi Pendapatan Daerah Provinsi Sulsel Tahun 2020-2024

Pemerintah Daerah berfungsi melaksanakan kewenangan otonomi daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi di bidang pendapatan daerah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Otonomi daerah dan desentralisasi berimplikasi pada semakin luasnya kewenangan daerah untuk mengatur dan mengelola pendapatan daerah. Sejalan dengan hal tersebut, maka secara bertahap terus dilakukan upaya meningkatkan kemandirian pendapatan daerah dengan mengoptimalkan seluruh potensi yang dimiliki. Pendapatan daerah Provinsi Sulawesi Selatan bersumber dari PAD, pendapatan transfer, dan Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Perbandingan realisasi pendapatan daerah selama kurun waktu tahun 2020-2021, target APBD Pokok Tahun 2022 serta proyeksi pendapatan tahun 2023 dan 2024 dari masing-masing jenis pendapatan daerah secara rinci dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel III. 2
Realisasi dan Proyeksi Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2020-2024
Berdasarkan Peraturan Pemerintah No 12 Tahun 2019

Uraian	Realisasi		Target APBD 2022	Tahun Rencana 2023 *)	Proyeksi 1 Tahun setelah tahun rencana Tahun 2024 **)
	2020	2021 (Unaudit)			
Pendapatan Asli Daerah	**3.890.209.264.433,87**	**4.470.346.745.334,42**	**5.003.467.478.294,00**	**5.241.732.200.576,92**	**5.664.768.686.319,55**
Pajak Daerah	3.362.622.269.609,30	3.846.736.206.985,26	4.241.919.986.325,00	4.511.520.871.385,93	4.855.881.181.972,68
Retribusi Daerah	36.925.738.354,50	38.157.270.913,68	53.029.583.800,00	44.269.972.001,00	46.323.808.981,69
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	115.022.553.678,00	115.551.932.611,00	137.992.055.248,00	151.242.430.015,00	145.488.355.678,96
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	375.638.702.791,87	469.901.334.824,48	570.525.852.921,00	534.698.927.175,00	617.075.339.686,22
Pendapatan Transfer	**5.399.732.629.887,00**	**5.423.940.079.398,00**	**4.095.273.480.415,00**	**4.197.489.435.321,07**	**4.108.795.781.722,40**
Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak	272.130.329.571,00	342.218.564.517,00	234.805.960.415,00	254.720.621.638,77	226.303.963.033,64
Dana Alokasi Umum	2.349.993.034.000,00	2.339.135.873.000,00	2.340.040.525.000,00	2.397.835.985.682,30	2.337.558.990.688,76
Dana Alokasi Khusus	2.773.109.266.316,00	2.718.079.808.881,00	1.520.426.995.000,00	1.520.426.995.000,00	1.520.426.995.000,00
Dana Insentif Daerah	-	24.505.833.000,00	-	24.505.833.000,00	24.505.833.000,00
Lain - lain Pendapatan yang Sah	**75.529.621.005,00**	**115.279.794.972,00**	**124.389.159.861,00**	**88.099.679.250,00**	**90.498.787.819,73**
Hibah	75.529.621.005,00	115.279.794.972,00	124.389.159.861,00	88.099.679.250,00	90.498.787.820,73
Dana Penyesuaian	-	-	-	-	
Jumlah	**9.365.471.515.325,67**	**10.009.566.619.704,40**	**9.223.130.118.570,00**	**9.527.321.315.148**	**9.864.063.255.861,68**

Sumber Data: Bapenda Provinsi Sulsel Tahun 2022
**) Proyeksi Tahun 2023 dalam RPJMD Prov. SulselTahun 2018-2023*
***) Proyeksi Tahun 2024*

Selama kurun waktu tahun 2020-2024, pendapatan daerah pada APBD Provinsi Sulawesi Selatan diharapkan dapat bertumbuh dengan baik utamanya dari sumber PAD dan pendapatan transfer dari pemerintah pusat. Kinerja Keuangan daerah provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023 diproyeksikan mencapai Rp9,52 triliun, atau terdapat penurunan pendapatan daerah sebesar 5,4 % dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 sebesar Rp.10 triliun lebih. Penurunan terjadi pada komponen Pendapatan Transfer disebabkan penyaluran Dana BOSKabupaten/Kota tidak lagi melalui APBD Provinsi melainkan langsung ke APBD Kabupaten/Kota. Adapun kontribusi sumber pendapatan selama kurun waktu 2020-2024 dapat diuraikan bahwa PAD berkontribusi rata-rata sebesar 50,57%, pendapatan transfer sebesar 48,40% dan Lain-Lain Pendapatan Yang Sah sebesar 1,03%. Adapun besaran kontribusi masing-masing sumber pendapatan secara rinci dapat dilihat pada tabel sebagai berikut

Tabel III. 3
Realisasi dan Proyeksi Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2020-2024

No.	Uraian	2020	2021	2022*)	2023*)	2024**)
I	**Pendapatan Asli Daerah**	**41,54**	**44,66**	**54,25**	**55,02**	**57,43**
A	Pajak daerah	35,90	85,05	84,78	86,07	85,72
B	Retribusl daerah	0,39	0,85	1,06	0,84	0,82
C	Hasil pengel. Kekada yg	1,23	2,58	2,76	2,89	2,57
D	Lain - lain PAD yang sah	4,02	10,51	11,40	10,20	10,89
II	**Pendapatan Transfer**	**57,66**	**54,19**	**44,40**	**44,06**	**41,65**
A	Dana Bagi Hasil Pajak/ Bukan Pajak	2,91	6,31	5,73	6,07	5,51
	- Bagi Hasil Pajak	74,97	78,78	80,12	0	0
	- Bagi Hasil SDA	91,26	21,22	19,88	0	0
B	Dana Alokasi Umum	25,09	43,13	57,14	57,13	56,89
C	Dana Alokasi Khusus	29,61	50,11	37,13	36,22	37,00
D	Dana Insentif Daerah	100	0,45	0	0,58	0,60
III	**Lain-lain Pendapatan yang Sah**	**0,80**	**1,15**	**1,35**	**0,92**	**0,92**
A	Hibah	0,80	100	100	100	100
B	Dana Penyesuaian	0	0	0	0	0
	Jumlah Pendapatan Daerah(1+2+3)	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**

Sumber Data: Bapenda Provinsi Sulsel Tahun 2022
**) Proyeksi Tahun 2023 dalam RPJMD Prov. SulselTahun 2018-2023*
***) Proyeksi Tahun 2024*

3.2.3 Arah Kebijakan Belanja Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, belanja daerah digunakan untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah dan pelaksanaan tugas organisasi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah yang kemudian dijabarkan kedalam Peraturan Gubernur nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor

10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Dalam peraturan Gubernur tersebut terdapat beberapa Organisasi Perangkat Daerah yang mengalamiperubahan Nomenkelatur. Hal ini bertujuan untuk penyesuaian terhadap perkembangan penyelenggaraan tugas dan fungsi serta penyesuaian terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Kebijakan Belanja Daerah dalam penyusunan RAPBD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023 digunakan untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah dan pelaksanaan tugas organisasi yang ditetapkan sesuai dengah ketentuan perundang-undangan.

Dalam rangka mewujudkan sinergitas rencana program dan kegiatan prioritas pembangunan daerah tahun 2023 dan menindaklanjuti Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, maka kebijakan Belanja Daerah yang terdiri dari Belanja Operasi yang diarahkan kepada Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Bunga, Belanja Subsidi, Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial. Untuk Belanja Modal hanya terdiri dari Belanja Modal, Belanja Tidak terduga hanya terdiri dari Belanja Tidak terduga dan Belanja Transfer terdiri dari Belanja Bagi Hasil dan Belanja Bantuan Keuangan.

Kebijakan belanja daerah ini disusun berdasarkan prinsip-prinsip penganggaran dengan pendekatan anggaran berbasis kinerja, dan memperhatikan prioritas pembangunan sesuai permasalahan serta perkiraan situasi dan kondisi pada tahun mendatang, secara selektif, akuntabel dan transparan.

Struktur Belanja dalam APBD Tahun Anggaran 2023 disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang dibagi ke dalam Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer dengan rincian sebagai berikut :

3.2.3.1 Belanja Operasi

Berdasarkan Pasal 56 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, menyatakan bahwa Kelompok Belanja Operasi yang meliputi Belanja Pegawai, Barang dan Jasa, Bunga, Subsidi, Hibah dan Bantuan Sosial merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah daerah yang memberi manfaat jangka pendek, yang meliputi hal-hal sebagai berikut :

1) Belanja Pegawai

Belanja pegawai berupa Penganggaran alokasi belanja gaji pokok dan tunjangan Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD); Penganggaran penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi Gubernur, Wakil Gubernur, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pegawai Negeri Sipil Daerah; Penganggaran penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja dan kematian bagi Gubernur, Wakil Gubernur, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pegawai Negeri Sipil Daerah; Penganggaran Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Daerah; Penganggaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; dan Penganggaran dana tambahan penghasilan guru Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Daerah disesuaikan dengan ketentuan perundang-undangan.

2) Belanja barang dan Jasa

Belanja barang dan jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (duabelas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga dan Pengadaan barang/jasa dalam rangka melaksanakan Program dan Kegiatan Pemerintahan Daerah.

3) Belanja Bunga

Belanja bunga digunakan untuk menganggarkan pembayaran bunga utang yang dihitung atas kewajiban pokok utang (principal outstanding) berdasarkan perjanjian pinjaman sesuai Pasal 60 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

4) Belanja Subsidi

Belanja subsidi digunakan agar harga jual produksi atau jasa yang dihasilkan oleh badan usaha milik negara, BUMD dan/atau badan Usaha milik swasta, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga dapat terjangkau oleh masyarakat. Badan usaha milik negara, BUMD dan/atau badan usaha milik swasta merupakan badan yang menghasilkan produk atau jasa Pelayanan Dasar masyarakat. Badan usaha milik negara, BUMD, badan usaha milik swasta, dan/atau badan hukum lain yang akan diberikan subsidi terlebih dahulu dilakukan audit Keuangan oleh kantor akuntan public sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 61 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Untuk tahun 2023 Pemerintah Sulawesi Selatan merencanakan memberikan subsidi penerbangan kepada masyarakat untuk meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan yang mengalami penurunan yang sangat drastis beberapa waktu belakangan ini akibat dampak pandemic covid 19.

5) Belanja Hibah dan Bantuan Sosial

Belanja hibah dan bantuan sosial dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemerintah daerah dapat memberikan Hibah kepada pemerintah pusat; pemerintah daerah lain; Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah; dan badan, lembaga dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia.

Penganggaran belanja hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dialokasikan berdasarkan Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 58 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah yang merupakan penjabaran dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan kelima atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Berdasarkan Pasal 23A Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 menyebutkan bahwa Bantuan Sosial terdiri atas Bantuan Sosial yang direncanakan dan Bantuan Sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya. Pengalokasian anggaran Hibah dan Bantuan Sosial berdasarkan usulan/proposal yang diterima oleh Pemerintah Daerah dari calon penerima Hibah dan Bantuan Sosial yang telah memenuhi syarat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

3.2.3.2 Belanja Modal

Belanja modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan asset tetap dan asset lainnya. Pengadaan asset tetap memenuhi kriteria:

a. Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (duabelas) bulan;
b. Digunakan dalam Kegiatan Pemerintahan Daerah; dan
c. Batas minimal kapitalisasi aset.

Aset tetap dianggarkan dalam belanja modal sebesar harga beli atau bangun asset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan asset sampai asset tersebut siap digunakan. Belanja modal meliputi belanja tanah, digunakan untuk menganggarkan tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai;

a. Belanja peralatan dan mesin, digunakan untuk menganggarkan peralatan dan mesin mencakup mesin dan kendaraan bermotor, alat elektonik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (duabelas) bulan dan dalam kondisi siap pakai;
b. Belanja bangunan dan gedung, digunakan untuk menganggarkan gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai;
c. Belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai;
d. Belanja asset tetap lainnya, digunakan untuk menganggarkan asset tetap lainnya mencakup asset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap a sampai dengan huruf d, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai; dan
e. Belanja asset lainnya, digunakan untuk menganggarkan aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional pemerintah, tidak memenuh idefinisi aset tetap, dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

3.2.3.3 Belanja Tidak Terduga

Penganggaran belanja tidak terduga dilakukan secara rasional dengan mempertimbangkan realisasi Tahun Anggaran 2021 dan kemungkinan adanya

kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya, diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah.

Penganggaran Belanja Tidak Terduga mengacu pada Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Tatacara Pemberian dan Pertanggungjawaban Belanja Tidak Terduga untuk Tanggap Darurat Bencana Dan Penanganan Gangguan Keamanan Serta Penghentian Konflik Sosial Provinsi Sulawesi Selatan.

Berdasarkan Pasal 68 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyatakan bahwa belanja tidak terduga merupakan pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas Penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya.

3.2.3.4 Belanja Transfer

1) Belanja Bagi Hasil Pajak kepada Kabupaten/Kota

Penganggaran Dana Bagi Hasil Pajak Daerah bersumber dari pendapatan pemerintah provinsi kepada pemerintah kabupaten/kota dengan mempedomani Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Besaran alokasi dana bagi hasil pajak daerah yang bersumber dari pendapatan pemerintah provinsi dianggarkan secara bruto. Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, penganggaran dana bagi hasil pajak daerah tersebut memperhitungkan rencana pendapatan pajak daerah Tahun Anggaran 2023, dan alokasi anggaran pelampauan target Tahun Anggaran 2022 yang belum direalisasikan kepada pemerintah kabupaten/kota atau alokasi kurang salur pada tahun sebelumnya. Dari aspek teknis penganggaran belanja bagi hasil pajak daerah maka akan diuraikan daftar nama pemerintah Kabupaten/Kota selaku penerima bagi hasil pajak daerah sesuai kode rekening berkenaan.

2) Belanja Bantuan Keuangan

Bantuan keuangan digunakan untuk menganggarkan bantuan keuangan yang bersifat umum atau khusus dari provinsi kepada kabupaten/kota, pemerintah desa, dan kepada pemerintah daerah Iainnya dalam rangka pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan. Pengalokasian Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Kabupaten/ Kota didasarkan pada pertimbangan untuk mengatasi kesenjangan fiskal, membantu pelaksanaan urusan pemerintahan daerah yang tidak tersedia atau tidak cukup tersedia alokasi dananya dan/atau menerima manfaat dari pemberian bantuan keuangan tersebut sesuai kemampuan keuangan daerah. Bantuan Keuangan bersifat stimulan, yang berdasarkan usulan/proposal yang diterima oleh Pemerintah Provinsi dari Pemerintah Kabupaten/Kota yang telah memenuhi syarat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tatacara penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban belanja bantuan keuangan mengacu dan memperhatikan ketentuan Pasal 67 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan ditindaklanjuti dengan Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 53 Tahun 2019 Tentang Tatacara Pemberian dan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.

Pemberian bantuan keuangan dapat bersifat umum dan bersifat khusus, bantuan keuangan yang bersifat umum digunakan untuk mengatasi kesenjangan fiskal dengan menggunakan formula antara lain variabel: pendapatan daerah, jumlah penduduk, jumlah penduduk miskin dan luas wilayah yang ditetapkan dengan peraturan kepala daerah.

Bantuan keuangan yang bersifat khusus digunakan untuk membantu capaian kinerja program prioritas pemerintah daerah penerima bantuan keuangan sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan penerima bantuan. Pemanfaatan bantuan keuangan yang bersifat khusus ditetapkan terlebih dahulu oleh pemberi bantuan. Bantuan keuangan terdiri atas:

a. bantuan keuangan antar Daerah provinsi;
b. bantuan keuangan antar Daerah kabupaten/kota;
c. bantuan Keuangan Daerah provinsi ke Daerah kabupaten/kota di wilayahnya dan/atau Daerah kabupaten/kota diluar wilayahnya;
d. bantuan Keuangan Daerah kabupaten/kota ke Daerah provinsinya dan/atau Daerah provinsi lainnya; dan/atau
e. bantuan Keuangan Daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa.

Secara rinci proyeksi belanja daerah tahun 2022 sesuai format Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel III. 4
Realisasi dan Proyeksi Belanja Daerah Sulawesi Selatan Tahun 2020, 2021, 2022, 2023 dan 2024
Berdasarkan Peraturan Pemerintah No 12 Tahun 2019

NO	URAIAN	REALISASI 2020	REALISASI 2021	TARGET APBD 2022	PROYEKSI 2023	PROYEKSI 2024
2.00	**BELANJA DAERAH**	**9.978.069.735.607,69**	**10.747.487.403.131**	**9.109.282.005.464**	**9.392.321.315.148**	**9,492,127,543,780**
2.10	**BELANJA OPERASI**	**6.187.005.135.176,35**	**7.380.766.399.205,00**	**5.532.311.259.558**	**5,658,346,529,007**	**5,670,442,574,693**
2.1.1	Belanja Pegawai	3.090.638.580.175,00	3.215.721.446.282	3.095.610.974.093	3.273.653.314.243	3,095,610,974,093
2.1.2	Belanja Barang dan Jasa	1.594.326.717.801,69	2.496.138.742.834	2.110.433.851.161	2.065.697.795.213	2,098,565,166,297
2.1.3	Belanja Bunga	2.476.741.949,66	15.279.131.388	2.049.717.475,58	-	2,049,717,475
2.1.4	Belanja Subsidi	0,00	0,00	-	2.000.000.000	8,000,000,000
2.1.5	Belanja Hibah	1.498.758.095.250,00	1.554.279.504.080	319.974.716.828	312.715.419.551	461,974,716,828
2.1.6	Belanja Bantuan Sosial	805.000.000,00	1.731.000.000	4.242.000.000	4.280.000.000	4,242,000,000
2.20	**BELANJA MODAL**	**1.183.515.284.427,10**	**1.624.168.814.930**	**1.673.395.114.550**	**1.630.578.496.195**	**1,673,395,114,550**
2.2.1	Belanja Modal	1.183.515.284.427,10	1.624.168.814.930	1.673.395.114.550	1.630.578.496.195	1,673,395,114,550
2.30	**BELANJA TIDAK TERDUGA**	**267.763.114.457,00**	**143.734.933.112**	**80.000.000.000**	**60.000.000.000**	**120,000,000,000**
2.3.1	Belanja Tidak Terduga	267.763.114.457,00	143.734.933.112	80.000.000.000	60.000.000.000	120,000,000,000
2.40	**BELANJA TRANSFER**	**2.339.786.201.547,24**	**1.696.433.830.505**	**1.823.575.631.356**	**2.043.396.289.946**	**2,048,289,854,536**
2.4.1	Belanja Bagi Hasil	1.534.452.968.568,24	1.434.928.871.615	1.425.075.631.356	1.525.932.742.946	1,626,789,854,536
2.4.2	Belanja Bantuan Keuangan	805.333.232.979,00	261.504.958.890	398.500.000.000	517.463.547.000	421,500,000,000

Sumber : BKAD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022

Sebagaimana dengan Kebijakan Keuangan Daerah, maka Belanja Daerah tahun 2023 diproyeksikan sebesar **Rp. 9.392.321.315.148** yang bersumber dari Belanja Operasi sebesar **Rp. 5,658,346,529,007** Belanja Modal sebesar Rp. **1.630.578.496.195** Belanja Tidak Terduga sebesar **Rp. 60.000.000.000** serta Belanja Transfer sebesar Rp. **2.043.396.289.946** Belanja Daerah tersebut akan digunakan untuk membiayai serangkaian program/kegiatan pembangunan daerah Tahun 2023.

Mendasarkan pada data realisasi belanja baik belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tak Terduga maupun belanja Transfer, maka kebijakan belanja daerah diarahkan pada pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah kota yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan. Belanja urusan wajib diprioritaskan untuk melindungi danmeningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, diantaranya pendidikan, kesehatan, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan permukiman, Ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarkat, dan fasilitas sosial yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial. Pelaksanaan urusan wajib mendasarkan pada standar pelayanan minimal **(SPM)** di tahun 2023 telah dialokasikan anggaran sebesar **Rp. 1,183,358,829,898** atau **12,59 persen** dari total Belanja Daerah dengan rincian alokasi sebagai berikut :

Tabel III. 5
Proyeksi Alokasi Anggaran Belanja terhadap Urusan Wajib mendasarkan pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) di tahun 2023

No.	Bidang	Nama Program	Pagu Anggaran	Perangkat Daerah
1	Pendidikan	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	878,210,767,699	Dinas Pendidikan
2	Kesehatan	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	179,848,009,861	Dinas Kesehatan
3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	108,292,174,400	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
4	Perumahan Rakyat dan Kawasan permukiman	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	6,472,408,088	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
5	Ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarkat	PROGRAM PENINGKATAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	4,913,681,350	Satuan Polisi Pamong Praja
6	Sosial	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	5,621,788,500	Dinas Sosial
Total			**1,183,358,829,898**	

Sumber : *Diolah* BappelitbangdaProv. Sulsel Tahun 2022

Kebijakan Belanja Daerah dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan untuk Tahun Anggaran 2023, perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Alokasi belanja daerah terkait program dan kegiatan diupayakan untuk peningkatan kualitas kehidupan masyarakat yang diwujudkan melalui prestasi kerja dalam pencapaian standar pelayanan minimal berdasarkan urusan wajib pemerintahan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan lebih berperspektif gender.
2. Perencanaan belanja daerah diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasititas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial.
3. Alokasi belanja daerah untuk setiap kegiatan dilakukan analisis kewajaran biaya yang dikaitkan dengan output yang dihasilkan dari satu kegiatan. Oleh karena itu, untuk menghindari adanya pemborosan, program dan kegiatan direncanakan dengan didasarkan pada kebutuhan riil dan mengutamakan produksi dalam negeri serta dapat melibatkan usaha mikro dan usaha kecil serta koperasi tanpa mengabaikan prinsip efisiensi, persaingan sehat, kesatuan sistem, dan kualitas kemampuan teknis.
4. Terhadap kegiatan pembangunan yang bersifat fisik, proporsi belanja modal diupayakan lebih besar dibanding dengan belanja pegawai atau belanja barang dan jasa dengan tetap memperhatikan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan mendasarkan pada perencanaan kebutuhan barang milik daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah, sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007.

Kerangka pendanaan yang merupakan perspektif rencana penganggaran untuk tahun ke depan. Sebagai perspektif rencana, maka analisis harus didasarkanatas asumsi makro ekonomi dan kondisi sosial masyarakat yang diinginkan, dan pokok-pokok kebijakan fiskal. Hal ini diawali dengan proyeksi asumsi makro ekonomi, kondisi sosial masyarakat, pokok-pokok kebijakan fiskal, kemudian proyeksi pendapatan dan belanja daerah, dan terakhir perhitungan kerangka pendanaan yang akan menunjukkan potensi kapasitas riil keuangan daerah. Terkait dengan kapasitas riil keuangan daerah, desain penganggaran telah menentukan porsi besaran anggaran terhadap prioritas pembangunan daerah tahun 2023 sebesar **Rp. 2,824,740,640,057** atau **30,07 persen** dari total Belanja Daerah sebesar **Rp. 9.392.321.315.147,99** untuk membiayai **62** program prioritas yang rinciannya telah tertuang pada tabel dibawah ini:

Tabel III. 6
Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2023

No	Prioritas Pembagunan Daerah	Sasaran Pembangunan	Program Prioritas	Indikator Kinerja Program	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja di Akhir Priode	Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Pemantapan reformasi birokrasi(Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik...RPJMD)	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Cakupan SDM Aparatur yang Lulus Diklat Kompetensi Managerial, Kompetensi Diklat Fungsional, Kompetensi Diklat Sosial Kultural	100 %	1,150,000,000	100 %	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
			PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase pemenuhan kebutuhan pegawai ASN;	65 %	4,142,331,704	65 %	Badan Kepegawaian Daerah
				Persentase ASN yang menduduki jabatan struktural dan fungsional berbasis talenta;	100 %		100 %	
				Persentase ASN berkinerja baik dan sangat baik	95 %		95 %	
			PROGRAM PENATAAN ORGANISASI	Persentase kesesuaian program prioritas dengan struktur organisasi perangkat daerah	100 %	4,335,000,000	100 %	Biro Organisasi Sekretariat Daerah
			PROGRAM	Persentase	79,50%	14,723,830,000	79,50%	Inspektorat

No	Prioritas Pembagunan Daerah	Sasaran Pembangunan	Program Prioritas	Indikator Kinerja Program	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja di Akhir Priode	Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Penyelesaian Tindak lanjut Perangkat Daerah terhadap Hasil Pemeriksaan APIP				Daerah
				Persentase Penyelesaian Tindak lanjut Hasil Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/ Kota	72,50%		72,50%	Inspektorat Daerah
				Persentase OPD yang hasil Nilai SAKIPnya meningkat	100 %		100 %	Inspektorat Daerah
			PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	% Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD & APBD	100 %	12,997,160,980	12,997,160,980	Bappelitbangda
				Persentase peningkatan capaian kinerja program	0,5%		0,5%	Bappelitbangda
			PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Indeks sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE)	3,00	8,038,171,374	3,00	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
			PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM	Nilai Hasil Evaluasi Reformasi Birokrasi pada Penataan Peraturan Perundang-	5	5,187,729,020	5	Biro Hukum Sekretariat Daerah

No	Prioritas Pembagunan Daerah	Sasaran Pembangunan	Program Prioritas	Indikator Kinerja Program	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja di Akhir Priode	Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				undangan				
				Persentase Perkara Hukum yang difasilitasi	100%		100%	
			PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase BUM Desa Yang diFasilitasi	11.81 %	1,177,531,111	11.81 %	
				Persentase Desa yang diFasilitasi	25,05, %		25,05 %	
		Berkembangnya inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase perangkat daerah yang mendapatkan penghargaan inovasi daerah	3 %	5,243,721,220	9 %	BAPPELITBANGDA
			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase layanan informasi dan komunikasi publik	100 %	34,923,430,160	100 %	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
				Presentase tindak lanjut pengaduan pada Baruga Layanan Masyarakat secara Elektronik	100 %		100 %	
			PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase Ketepatan Waktu Penyelesaian Izin yang Diterbitkan Sesuai SOP	90%	1,354,999,800	90%	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
2	Pembangunan	Meningkatnya	PROGRAM	Persentase jalan	75,09%	746,629,356,488	75,09%	Dinas Pekerjaan

No	Prioritas Pembagunan Daerah	Sasaran Pembangunan	Program Prioritas	Indikator Kinerja Program	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja di Akhir Priode	Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	dan peningkatan kualitas infrastruktur wilayah untuk akselerasi pertumbuhan(Penguatan Infrastruktur Wilayah)	aksesibilitas infrastruktur	PENYELENGGARAAN JALAN	provinsi dalam kondisi mantap				Umum dan Penataan Ruang
				Persentase panjang terisolir pada ruas jalan provinsi yang terakses roda empat)	74.25%		74.25%	
			PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Jumlah arus penumpang melalui pelabuhan (Prioritas)	1.105.000 Orang	1,657,568,462	1.105.000 Orang)	Dinas Perhubungan
				Jumlah pelabuhan strategis provinsi	11 Lokasi		11 Lokasi	
				Jumlah pelabuhan yang beroperasi;	35 %		35 %	
			PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN	Persentase Rumah Tangga Pengguna Listrik	99 %	7,053,295,800	99 %	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
				Persentase Desa berlistrik (Prioritas Desa Kepulauan)	99,50 %		99,50 %	
			PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR	Persentase Jaringan Irigasi Primer dan Sekunder kondisi baik pada DI Kewenangan Provinsi	80 %	108,292,174,400	80%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
				Cakupan pengelolaan sungai, danau, waduk, dan pantai	100%		100 %	

No	Prioritas Pembagunan Daerah	Sasaran Pembangunan	Program Prioritas	Indikator Kinerja Program	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja di Akhir Priode	Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase rumah tangga yang berakses air bersih layak/Arsinum di kawasan Pesisir dan Kepulauan	100 %	12,715,004,200	100 %	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
				Persentase rumah tangga bersanitasi di kawasan permukiman	93 %		93 %	
				Persentase panjang jalan lingkungan yang terbangun di kawasan permukiman	100 %		100 %	
			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase warga negara memperoleh kebutuhan air minum curah lintas kabupaten/kota	100 %	52,040,782,200	100 %	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
				Cakupan Pembinaan Layanan Air Minum Kab/Kota	100 %		100 %	
3	Percepatan pemulihan ekonomi dan perlindungan social (Pengembangan Kawasan Pusat	Meningkatnya Penyerapan Tenaga Kerja Sektor Unggulan Daerah	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Persentase peningkatan destinasi wisata menjadi destinasi wisata unggulan	1,0 %	2,540,781,800	1,0 %	Dinas Pariwisata
				Persentase Kab/Kota yang memiliki	20,8 %		20,8 %	

No	Prioritas Pembagunan Daerah	Sasaran Pembangunan	Program Prioritas	Indikator Kinerja Program	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja di Akhir Priode	Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Pertumbuhan)			kawasan wisata halal				
			PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Kunjungan wisata (Wisatawan Nusantara)	100%	4,131,748,200	100%	
				Kunjungan wisata (Wisatawan Mancanegara)	100%		100%	
			PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Jumlah kawasan strategis dan pusat pertumbuhan baru yang dilakukan penataan bangunan dan lingkungannya	15 Kawasan	74,340,496,920	15 Kawasan	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
			PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase Pencari kerja yang yang terdaftar dan ditempatkan	4.35 %	624,784,856	4.35 %	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
				Persentase daya serap tenaga kerja (Prioritas)	59.41 %		59.41 %	
			PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Prosentase pencari kerja terlatih yang mendapatkan pekerjaan	77,08 %	4,832,824,200	77,08 %	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
				Prosentase tenaga kerja yang dilatih berwirausaha dapat mandiri	85,00%	-	85 %	
			PROGRAM PROMOSI	Jumlah Realisasi	4,5	1,269,999,800	16,54	Dinas Penanaman

No	Prioritas Pembagunan Daerah	Sasaran Pembangunan	Program Prioritas	Indikator Kinerja Program	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja di Akhir Priode	Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			PENANAMAN MODAL	PMA (Rp. Triliun)				Modal dan PTSP
				Jumlah Realisasi PMDN (Rp. Triliun)	5,67		20,84	
			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	0,25%	4,112,712,930	0,25 %	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
				Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial	2,03%		2,03	
4	Penurunan Kesenjangan Sosial Ekonomi	Menurunnya kesenjangan Pendapatan antar Lapisan masyarakat	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase Luas Kawasan Kumuh Tertangani Kewenangan Provinsi	36,37 %	5,136,586,600	100 %	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
			PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Cakupan UMKM yang diberdayakan	11%	7,715,562,000	11%	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah
			PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase UMKM yang terfasilitasi Dalam Pengembangan Usaha	25%	8,802,255,000	25%	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah
				Cakupan promosi produk UMKM	3%		3%	

No	Prioritas Pembagunan Daerah	Sasaran Pembangunan	Program Prioritas	Indikator Kinerja Program	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja di Akhir Priode	Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				(Prioritas)				
			PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	Persentase Jumlah Pemegang izin perhutanan sosial yang menjalankan pengelolaan dan pemanfaatan sesuai aturan	16,76 %	10,184,262,300	16,76 %	Dinas Kehutanan
			PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Persentase penempatan transmigrasi	100%	90,000,000	100%	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase PPKS yang mendapatkan jaminan sosial	3,7%	4,585,700,000	3,7%	Dinas Sosial
				Persentase pengangkatan anak WNI oleh orang tua tunggal	100%		100%	
			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Jumlah produksi Talas Satoimo (Ton),	7000 Ton	231,536,704,898	26432,55 ton	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
				Luas Areal Pengengembangan Jeruk Keprok Selayar (Ha)	121 Ha (331 Ha)		331 ha	
				Produktifitas Padi	50,43 Kw/Ha		50,43 Kw/Ha	
				Produktifitas Jagung	55,73 Kw/Ha		55,73 Kw/Ha	
				Produtifitas Kopi	588,1 Kg/Ha		588,1 Kg/Ha	
				Produktifitas Kakao	12.000 Kg/Ha		39.000 Kg/Ha	

No	Prioritas Pembagunan Daerah	Sasaran Pembangunan	Program Prioritas	Indikator Kinerja Program	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja di Akhir Priode	Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				Peningkatan Ketersediaan Alat dan Mesin Pertanian	300 Unit		1.655 Unit	
				Peningkatan Ketersediaan Pupuk	323,02 ton		1.495,55 ton	
				Produksi Daging (ton)	187.450		187.450	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
				Produksi Telur (Ton)	214.274		214.274	
				Produksi Susu (Ton)	2.159		2.159	
			PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Persentase Kelembagaan Masyarakat yang difasilitasi dan ditingkatkan kapasitasnya (Kelompok Binaan LPM)	1,57 %	2,216,193,600	1,57 %	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
				Persentase Posyandu aktif;	99,98 %		99,98 %	
				Persentase PKK aktif	100 %		100 %	
			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase Koperasi yang terfasilitasi pemberdayaan	50%	461.190.000	50%	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah
5	Percepatan pembangunan Sumber daya manusia yang	Meningkatnya Kualitas dan Pemerataan Pendidikan	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase siswa SMA/SMK yang bebas buta aksara Al-Quran	62,00 %	878,210,767,699	62,00 %	Dinas Pendidikan

No	Prioritas Pembagunan Daerah	Sasaran Pembangunan	Program Prioritas	Indikator Kinerja Program	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja di Akhir Priode	Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	berkarakter dan berbuda (Pembangunan Manusia)			Persentase SMA/SMK yang bebas Narkoba (indikator RPJMD pokok)	93,90%		93,90%	
				Persentase jumlah warga negara usia 16 -18 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah (SPM)	100%		100%	
				Persentase jumlah warga negara usia 4 - 18 tahun yang termasuk dalam penduduk disabilitas yang berpartisipasi dalam pendidikan Khusus (SPM)	100%		100%	
			PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Persentase Sekolah yang menerapkan kurikulum lokal penambahan waktu pelajaran agama	57,25%	600,127,100	57,25%	Dinas Pendidikan
				Persentase Pendidikan menengah yang telah menerapkan penyelenggaraan dan pelayanan	82%		82%	

No	Prioritas Pembagunan Daerah	Sasaran Pembangunan	Program Prioritas	Indikator Kinerja Program	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja di Akhir Priode	Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				pendidikan berbasis TIK				
		Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Peningkatan Prestasi olah raga	200%	73,469,172,100	200%	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
				Persentasi ketersediaan sarana dan prasarana olahraga	100%		100%	
			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Rasio tenaga kesehatan persatuan penduduk	23/100.000 Penduduk	5,700,730,220	23/100.000 Penduduk	Dinas Kesehatan
				Persentase Keterpenuhan SDM Kesehatan pada Fasilitas Kesehatan	100%		100%	UPT Transfusi Darah
				Persentase tenaga medis yang tersertifikasi	50%		50%	UPT Pelatihan Kesehatan
				Cakupan Pelatihan dan modul yang terakreditasi	100 %		100 %	UPT Pelatihan Kesehatan
				Persentase tenaga kesehatan gigi dan mulut yang telah memperoleh pendidikan dan pelatihan	100 %		100%	UPT RSK GIGI DAN MULUT
				Persentase SDM Kesehatan yang bersertifikasi	70 %		70%	RSUD LABUANG BAJI

No	Prioritas Pembagunan Daerah	Sasaran Pembangunan	Program Prioritas	Indikator Kinerja Program	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja di Akhir Priode	Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				Persentase Tenaga Kesehatan dan Tenaga Kesehatan Lainnya yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	100 %		100 %	RSUD HAJI MAKASSAR
				Persentase kompetensi Sumber daya Manusia kesehatan	100 %		100 %	RSK IBU DAN ANAK SITI FATIMAH
				Meningkatnya Kompetensi teknis SDM	100%		100%	RSK IBU DAN ANAK PERTIWI
				Persentase SDM Kesehatan yang bersertifikasi	24 %		24%	RSUD SAYANG RAKYAT
			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase RS Regional yang terbangun dan ditingkatkan	100 %	179,848,009,861	100 %	Dinas Kesehatan
				Persentase RS Rujukan Provinsi yang terakreditasi	100 %		100 %	
				Persentase penduduk/warga terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana	100		100	

No	Prioritas Pembagunan Daerah	Sasaran Pembangunan	Program Prioritas	Indikator Kinerja Program	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja di Akhir Priode	Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				provinsi yang mendapatkan pelayanan kesehatan (SPM)				
				Persentase penduduk/warga pada kondisi kejadian luar biasa provinsi yang mendapatkan pelayanan kesehatan (SPM)	100		100	
				Prosentase Anak yang mendapat asupan gizi pada 1000 Hari Pertama Kelahiran (HPK)	7,5 %		0,075	
				Prosentase Ibu Hamil yang mendapat asupan gizi pada 1000 Hari Pertama Kelahiran (HPK)	13 %		0,130	
				Persentase Ketersediaan Stok Darah terhadap pemenuhan kebutuhan darah	100%		100%	UPT TRANSFUSI DARAH
				Persentase Pasien yang mendapatkan	100%		50%	UPT PELATIHAN KESEHATAN

No	Prioritas Pembagunan Daerah	Sasaran Pembangunan	Program Prioritas	Indikator Kinerja Program	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja di Akhir Priode	Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				layanan sesuai dengan standar				
				Persentase Pasien yang mendapatkan layanan sesuai dengan standar	100 %		100%	UPT RSK GIGI DAN MULUT
				Cakupan Ketersediaan Sarana dan Prasarana RS dalam Kondisi Baik	100 %		100 %	RSUD LABUANG BAJI
				Cakupan Ketersediaan Sarana dan Prasarana RS dalam Kondisi Baik	100 %		100 %	Rumah Sakit Khusus Daerah
				Cakupan Ketersediaan Sarana dan Prasarana RS dalam Kondisi Baik	100 %		100 %	RSUD HAJI MAKASSAR
				Cakupan Ketersediaan Sarana dan Prasarana RS dalam Kondisi Baik	100 %		100 %	RSK IBU DAN ANAK SITI FATIMAH
				Cakupan Ketersediaan Sarana dan Prasarana dalam upaya peningkatan kesehatan Masyarakat	100%		100%	RSK IBU DAN ANAK PERTIWI
				Cakupan Ketersediaan Sarana	100%		100%	RSUD SAYANG RAKYAT

No	Prioritas Pembagunan Daerah	Sasaran Pembangunan	Program Prioritas	Indikator Kinerja Program	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja di Akhir Priode	Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				dan Prasarana RS Sayang Rakyat dalam Kondisi Baik				
6	Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan	Meningkatnya keberdayaan perempuan dalam pembangunan	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan yg terstandarisasi	35%	767,852,100	35%	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB
				Persentase kab/kota yg memenuhi indikator prasyarat PUG	75%		75%	
			PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Persentase kab/kota yg menyediakan layanan pembelajaran keluarga yg terstandarisasi	60%	824,889,024	60%	
		Meningkatnya aktualisas nilai-nilai agama dan budaya dalam kehidupan masyarakat	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkada di Provinsi	100%	4,913,681,350	100%	Satuan Polisi Pamong Praja
			PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase Rumusan Kebijakan Bidang Kesejahteraan Rakyat yang dimanfaatkan.	100	73,928,270,156	100	Biro Kesejahteraan

No	Prioritas Pembagunan Daerah	Sasaran Pembangunan	Program Prioritas	Indikator Kinerja Program	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja di Akhir Priode	Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				Persentase Penduduk usia 15 tahun ke atas beragama Islam yang melek aksara Al-Quran (Prioritas)	35,55		35,55	Biro Kesejahteraan
				Persentase Penurunan kasus Kejahatan terhadap Kesusilaan (Prioritas)	10 %		10 %	Biro Kesejahteraan
			PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Persentase keikutsertaan masyarakat dalam bela negara	20 %	203,729,700	60 %	BADAN KESATUAN BANGSAN DAN POLITIK
			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Persentase Penurunan Penyalahgunaan Narkoba (Prioritas)	40 %	1,187,999,200	40 %	BADAN KESATUAN BANGSAN DAN POLITIK
				Persentase Wilayah Sulsel Berpotensi Konflik Agama yang ditangani	100%		100%	
		Meningkatnya produktifitas dan daya saing produk sektor	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase Penurunan Serangan OPT	4,5 %	9,200,000,000	4,5 %	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
				Persentase	81,15 %		81,15 %	

No	Prioritas Pembagunan Daerah	Sasaran Pembangunan	Program Prioritas	Indikator Kinerja Program	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja di Akhir Priode	Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		perekonomian berbasis sumber daya alam yang Berkelanjutan	PERTANIAN	Penggunaan Benih Padi Bersertifikat				
			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Nilai Produksi Perikanan Tangkap	Rp. 9.210,12 M	24,121,160,300	Rp. 9.210,12 M	Dinas Kelautan dan Perikanan
				Produksi perikanan tangkap	413.030,8 Ton		413.030,8 Ton	
				Cakupan Bina Kelompok Nelayan	30,25 %		30,25 %	
				Persentase Pelabuhan Perikanan yg memiliki sarana prasarana yang sesuai standar operasional	78,95%		78,95%	
				Persentase Produksi perikanan kelompok nelayan	27,17%		27,17 %	
			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Nilai produksi perikanan budidaya	Rp. 15.958,39 M	7,195,875,800	Rp. 15.958,39 M	Dinas Kelautan dan Perikanan
				Produksi perikanan budidaya	4.298.391,1 Ton		4.298.391,1 Ton	
				Persentase ketersediaan benur berkualitas	100%		100 %	
			PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Jumlah produksi hasil hutan bukan kayu	283 Ton	13,935,525,020	2.10596 Ton	Dinas Kehutanan
				Jumlah produksi hasil hutan kayu	92.336,62 M3		477175.12 M3	

No	Prioritas Pembagunan Daerah	Sasaran Pembangunan	Program Prioritas	Indikator Kinerja Program	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja di Akhir Priode	Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				olahan				
				Persentase Kerusakan Hutan pertahun	14,82 %		14,82 %	
				Cakupan luas lahan kritis yang direhabilitasi (prioritas)	65,47 %		65,47 %	
			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Nilai hilirisasi produk tanaman pangan	465.893.180.426 Rp	101,938,784,460	465.893.180.426 Rp	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
				Nilai hilirisasi produksi perkebunan	8.000.000.000 Rp		8.000.000.000 Rp	
				Nilai hilirisasi produksi peternakan	38.617.836.192 Rp		38.617.836.192 Rp	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
			PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Nilai Hilirisasi Produksi olahan Ikan konsumsi dan non konsumsi	Rp. 317.28 Milyar	912,107,400	Rp. 317.28 Milyar	Dinas Kelautan dan Perikanan
				Produksi olahan konsumsi dan non konsumsi	5.544,1 Ton		5.544,1 Ton	
				Persentase Pembinaan mutu produk perikanan	100%		100%	
			PROGRAM PERENCANAAN DAN	Persentase pertambahan jumlah	7%	23,304,427,524	7%	Dinas Perindustrian

No	Prioritas Pembagunan Daerah	Sasaran Pembangunan	Program Prioritas	Indikator Kinerja Program	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja di Akhir Priode	Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			PEMBANGUNAN INDUSTRI	industri				
			PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Nilai Ekspor Perdagangan	171.081.215 $ US	1,694,000,000	476.164.314 $ US	Dinas Perdagangan
7	Pelestarian Lingkungan Hidup	Terpeliharanya kualitas lingkungan hidup serta kemampuan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase Korban Bencana yang tertangani	100%	9,100,335,336	100%	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
				Persentase Dokumen Kebencanaan sampai dengan sah/legal yang tersedia	100%		100%	
				Persentase Aparat Kesiapsiagaan Bencana yang terlatih	100%		100%	
				Persentase Tanggap Darurat Bencana yang tertangani	100 %		100 %	
			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Rasio ketaatan pemanfaatan ruang	1	2,953,862,600	1	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
			PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)	Jumlah DAS yang direhabilitasi	2 DAS	331,423,100	2 DAS	Dinas Kehutanan
			PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU	Persentase penurunan emisi gas rumah kaca (GRK) dari sektor limbah	5,40%	1,730,198,485	5,40%	Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup

No	Prioritas Pembagunan Daerah	Sasaran Pembangunan	Program Prioritas	Indikator Kinerja Program	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja di Akhir Priode	Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP					
			PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Cakupan limbah yang dikelola	98,00%	5,549,999,754	98,00%	Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup
			PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI TERBARUKAN	Persentase Penggunaan Gas Rumah Tangga	95 %	229.997.300	95 %	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
			PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	Produksi garam rakyat	48.450 ton	11,969,196,200	48.450 ton	Dinas Kelautan dan Perikanan
				Cakupan Ketersediaan Sarana dan Prasarana Pendukung Produksi Perikanan	100%		100%	
				Cakupan luas kawasan konservasi perairan yang dikelola secara berkelanjutan (%)	67,31%		67,31%	
			PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN	Persentase Kepatuhan Pelaku usaha KP terhadap ketentuan peraturan	89,85%	3,565,142,900	89,85%	Dinas Kelautan dan Perikanan

No	Prioritas Pembagunan Daerah	Sasaran Pembangunan	Program Prioritas	Indikator Kinerja Program	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja di Akhir Priode	Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			PERIKANAN	perundangan yang berlaku				
			PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase pengguna moda transportasi umum di perkotaan	32,40 %	3,750,673,645	32,40 %	Dinas Perhubungan
				Persentase Layanan Angkutan Darat;	58 %		58 %	
				Jumlah penumpang melalui terminal Tipe B per tahun	605.000 Orang		605.000 Orang	
				Cakupan prasarana LLAJ dalam kondisi baik	30 %		30 %	
				Jumlah penyelenggaraan lalu lintas pada ruas jalan provinsi	20 Ruas		20 Ruas	
				Jumlah Terminal Bis terkelola	16		16	
			PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase sampah perkotaan yang tertangani	74%	49,999,000	74%	Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup
	TOTAL					**2,824,740,640,057**		

Sumber : Diolah Bappelitbangda Prov. Sulsel Tahun 2022

Disisi lain dalam menunjang pelaksanaan program dan kegiatan prioritas tersebut,telah ditetapkan proyeksi Pagu Belanja Perangkat Daerah Tahun 2022 yang mana nomenkelatur perangkat daerah ini telah disesuaikan dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2019 tentang perubahan atas Perda nomor 10 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah.

Tabel III.7
Proyeksi Pagu Belanja Perangkat Daerah Tahun 2023

No.	OPD	PAGU RKPD TAHUN 2023
1	DINAS PENDIDIKAN	2,883,077,934,090
2	DINAS KESEHATAN	236,559,788,802
3	UPT TRANSFUSI DARAH	7,755,398,478
4	UPT LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH (UPT PELATIHAN KESEHATAN)	4,710,001,521
5	UPT RSK GIGI DAN MULUT	12,209,335,280
6	RSUD LABUANG BAJI	145,217,677,569
7	RSUD HAJI MAKASSAR	105,661,612,828
8	RS KHUSUS DAERAH DADI	91,590,731,080
9	RSK IBU DAN ANAK PERTIWI	35,203,168,648
10	RSKD IBU DAN ANAK SITI FATIMAH	31,503,557,985
11	RSUD SAYANG RAKYAT	69,563,009,419
12	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	1,119,896,527,572
13	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	48,079,541,072
14	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	16,871,229,710
15	DINAS SOSIAL	51,051,176,074
16	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	38,060,269,958
17	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA	16,544,910,907
18	DINAS KETAHANAN PANGAN	27,842,298,157
19	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN	413,988,379,921
20	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	40,888,052,480
21	DINAS PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	23,908,712,410
22	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL (KELUARGA BERENCANA)	11,340,024,246
23	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	18,886,759,215
24	DINAS PERHUBUNGAN	43,821,328,656
25	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN	60,003,074,387
26	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	32,781,954,573
27	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP	23,025,368,733

No.	OPD	PAGU RKPD TAHUN 2023
28	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	96,266,929,874
29	DINAS KEBUDAYAAN DAN KEPARIWISATAAN	34,527,648,452
30	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	39,853,032,605
31	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	82,295,580,074
32	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	40,176,174,266
33	DINAS KEHUTANAN	139,172,247,582
34	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	29,266,516,773
35	DINAS PERDAGANGAN	21,771,000,715
36	DINAS PERINDUSTRIAN	42,780,123,253
37	BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH	4,677,581,992
38	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT	75,227,029,654
39	BIRO HUKUM	6,872,382,100
40	BIRO ORGANISASI	6,281,734,719
41	BIRO UMUM	141,671,059,111
42	BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN	9,361,124,785
43	BIRO PEREKONOMIAN DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	6,641,209,920
44	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA	5,670,386,952
45	SEKRETARIAT DPRD	305,838,521,923
46	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	59,142,024,852
47	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	2,273,258,679,464
48	BADAN PENDAPATAN DAERAH	181,232,291,729
49	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	25,324,666,418
50	BADAN PENGEMBANGAN DAN SUMBER DAYA MANUSIA	26,227,679,424
51	BADAN PENGHUBUNG	19,263,462,929
52	INSPEKTORAT	57,163,927,864
53	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	52,316,473,947
TOTAL PAGU		**9,392,321,315,148**

Sumber : Diolah Bappelitbangda Prov. Sulsel Tahun 2022

Sejak berakhirnya agenda pembangunan milenium (MDGs) pada tahun 2015,Indonesia bersama-sama dengan 193 negara lainnya sepakat untuk mengadopsi agenda pembangunan global yang dinamakan Sustainable Development Goals (SDGs). Belajar dari pengalaman MDGs lalu, kini Indonesia berusaha menghindari keterlambatan pengimplementasian SDGs. Indonesia tidak ingin kehilangan momentum dan euphoria implementasi SDGs masyarakat dunia.

Dengan mengusung tema “Mengubah Dunia Kita: Agenda 2030 untuk Pembangunan Berkelanjutan”, SDGs yang berisi 17 Tujuan dan 169 Target merupakan rencana aksi global untuk 15 tahun ke depan (berlaku sejak 2016

hingga 2030), guna mengakhiri kemiskinan, mengurangi kesenjangan dan melindungi lingkungan. SDGs berlaku bagi seluruh negara (universal), sehingga seluruh negara tanpa kecuali negara maju memiliki kewajiban moral untuk mencapai Tujuan dan Target SDGs.

Berbeda dari pendahulunya Millenium Development Goals (MDGs), SDGs dirancang dengan melibatkan seluruh aktor pembangunan, baik itu Pemerintah, Civil Society Organization (CSO), sektor swasta, akademisi, dan sebagainya. Kurang lebih 8,5 juta suara warga di seluruh dunia juga berkontribusi terhadap Tujuan dan Target SDGs.

Tidak Meninggalkan Satu Orangpun merupakan Prinsip utama SDGs. Dengan prinsip tersebut setidaknya SDGs harus bisa menjawab dua hal yaitu, Keadilan Prosedural yaitu sejauh mana seluruh pihak terutama yang selama ini tertinggal dapat terlibat dalam keseluruhan proses pembangunan dan Keadilan Subtansial yaitu sejauh mana kebijakan dan program pembangunan dapat atau mampu menjawab persoalan-persoalan warga terutama kelompok tertinggal.

Sebagai wujud komitmen politik pemerintah untuk melaksanakan SDGs, Presiden Jokowi telah menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) SDGs Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Perpres tersebut juga merupakan komitmen agar pelaksanaan dan pencapaian SDGs dilaksanakan secara partisipatif dengan melibatkan seluruh pihak.

Dalam upaya pencapaian target TPB/SDGs yang menjadi prioritas pembangunan memerlukan sinergi kebijakan perencanaan yakni Pencapaian Target, Kesesuaian, serta keselarasan TPB/SDGs dalam dokumen perencanaan RKPD. Sehinggga dalam mendukung pencapaian tersebut, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan telah mengalokasikan Anggaran sebesar **Rp. 2,475,493,381,238** atau **26.36 persen** dari total Belanja Daerah untuk membiayai program-program yang mendukung pencapaian Target-target TPB/SDGs agar dapat sejalan dengan tujuan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk meningkatkan kualitas hidup dari satu generasi ke generasi berikutnya.

Tabel III.8
Proyeksi Alokasi Pagu Anggaran Program Pembangunan Daerah terhadap Tujuan TPB/SDGS Tahun 2023

No.	Tujuan TPB/*SDGs*	Program Pembangunan Daerah		Pagu Anggaran 2023
1	**Tujuan 1**	1	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	5,621,788,500
	Tanpa Kemiskinan : Mengakhiri segala bentuk kemiskinan di manapun.	2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	179,848,009,861
		3	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	878,210,767,699
		4	PROGRAM	73,928,270,156

No.	Tujuan TPB/*SDGs*	Program Pembangunan Daerah		Pagu Anggaran 2023
			KESEJAHTERAAN RAKYAT	
		5	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	5,136,586,600
		6	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	2,216,193,600
		7	PROGAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	231,536,704,898
		8	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA(KS)	800,000,000
		9	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	101,938,784,460
		10	PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	11,969,196,200
		11	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	746,629,356,488
		12	PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN	624,272,396.20
		13	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	1,000,613,900
		14	PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN	895,802,582
		15	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	1,776,056,770.00
		16	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	242,000,000
		17	PROGRAM PENINGKATAN	12,715,004,200

No.	Tujuan TPB/*SDGs*	Program Pembangunan Daerah		Pagu Anggaran 2023
			PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	
		18	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	108,292,174,400
		19	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	662,000,000
		20	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	345,000,000
2	**Tujuan 2**	1	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	2,125,003,800
	Tanpa Kelaparan : Mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik, serta meningkatkan pertanian berkelanjutan.	2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Telah dianggarkan pada tujuan 1
		3	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Telah dianggarkan pada tujuan 1
		4	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	4,198,367,792
3	**Tujuan 3**	1	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Telah dianggarkan pada tujuan 1
	Kehidupan Sehat dan Sejahtera : Menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk di semua usia.			

No.	Tujuan TPB/*SDGs*	Program Pembangunan Daerah		Pagu Anggaran 2023
4	**Tujuan 4**	1	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Telah dianggarkan pada tujuan 1
	Pendidikan Berkualitas : Menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua;	2	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Telah dianggarkan pada tujuan 1
5	**Tujuan 5**	1	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	1,375,921,308
	Kesetaraan Gender : Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan kaum perempuan.	2	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	824,889,024
		3	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	314,999,000
		4	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	767,852,100
		5	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Telah dianggarkan pada tujuan 1
		6	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Telah dianggarkan pada tujuan 1
		7	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	749,998,612
6	**Tujuan 6**	1	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Telah dianggarkan pada tujuan 1
	Air Bersih dan Sanitasi Layak : Menjamin ketersediaan serta	2	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN	Telah dianggarkan pada tujuan 1

No.	Tujuan TPB/*SDGs*	Program Pembangunan Daerah		Pagu Anggaran 2023
	pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua.		UTILITAS UMUM (PSU)	
		3	PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA	1,334,017,000
		4	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	1,730,198,485
		5	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	9.024.330.000,0
		6	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	13,935,525,020
7	**Tujuan 7**	1	PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN	Telah dianggarkan pada tujuan 1
	Energi Bersih dan Terjangkau : Menjamin akses energi yang terjangkau, andal, berkelanjutan, dan modern untuk semua.			
8	**Tujuan 8**	1	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	23,304,427,524
	Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi : Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh, serta pekerjaan yang layak untuk semua.	2	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	56,442,700
		3	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	4,832,824,200
		4	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Telah dianggarkan pada tujuan 2

No.	Tujuan TPB/*SDGs*	Program Pembangunan Daerah		Pagu Anggaran 2023
9	**Tujuan 9**	1	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	1,657,568,462
	Industri, Inovasi dan Infrastruktur : Membangun infrastruktur yang tangguh, meningkatkan industri kreatif dan berkelanjutan, serta mendorong inovasi.	2	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	3,750,673,645
		3	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN & IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	149,997,200
		4	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	5,243,721,220
		5	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Telah dianggarkan pada tujuan 5
10	**Tujuan 10**	1	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Telah dianggarkan pada tujuan 1
	Berkurangnya kesenjangan : Mengurangi kesenjangan intra dan antar Negara.	2	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Telah dianggarkan pada tujuan 1
		4	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Telah dianggarkan pada tujuan 1
		5	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Telah Dianggarkan pada tujuan 1
		6	PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN	Telah dianggarkan pada tujuan 1
		7	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Telah dianggarkan pada tujuan 1

No.	Tujuan TPB/*SDGs*	Program Pembangunan Daerah		Pagu Anggaran 2023
		8	PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN	Telah dianggarkan pada tujuan 1
11	**Tujuan 11**	1	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Telah dianggarkan pada tujuan 9
	Kota dan Pemukiman Berkelanjutan. Menjadikan kota dan pemukiman inklusif, aman, tangguh berkelanjutan.	2	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Telah dianggarkan pada tujuan 9
		3	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Telah dianggarkan pada tujuan 1
		4	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	9,100,335,336
		5	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Telah dianggarkan pada tujuan 6
		6	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Telah dianggarkan pada tujuan 1
12	**Tujuan 12**	1	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Telah dianggarkan pada tujuan 6
	Konsumsi dan Produksi yang Berkelanjutan : Menjamin pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan;			
13	**Tujuan 13**	1	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Telah dianggarkan pada tujuan 11
	Penanganan Perubahan Iklim : Mengambil tindakan cepat untuk mengatasi perubahan iklim dan dampaknya.	2	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN & IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Telah dianggarkan pada tujuan 9
		3	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI	Telah dianggarkan pada tujuan 2

No.	Tujuan TPB/*SDGs*	Program Pembangunan Daerah		Pagu Anggaran 2023
			PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
14	**Tujuan 14**	1	PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	Telah dianggarkan pada tujuan 1
	Ekosistem Lautan : Melestarikan dan memanfaatkan secara berkelanjutan sumber daya kelautan dan samudera untuk pembangunan berkelanjutan.	2	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	24,121,160,300
		3	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	7,195,875,800
15	**Tujuan 15**	1	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Telah dianggarkan pada tujuan 6
	Ekosistem Daratan : Melindungi, merestorasi, dan meningkatkan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem daratan, mengelola hutan secara lestari, menghentikan penggunaan, memulihkan degradasi lahan, serta menghentikan kehilangan keanekaraman hayati	2	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Telah dianggarkan pada tujuan 6
16	**Tujuan 16**	1	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Telah dianggarkan pada tujuan 5

No.	Tujuan TPB/*SDGs*	Program Pembangunan Daerah		Pagu Anggaran 2023
	Perdamaian, Keadilan, dan Kelembangaan yang Tangguh : Menguatkan masyarakat yang inkluif dan damai untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan untuk semua, dan membangun kelembagaan yang efektif, akuntabel dan inklusif di semua tingkat.	2	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Telah dianggarkan pada tujuan 5
		3	PROGRAM PENATAAN ORGANISASI	4,335,000,000
17	**Tujuan 17**	1	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Telah dianggarkan pada tujuan 5
	Kemitraan untuk Mencapai Tujuan : Menguatkan sarana pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan.	2	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Telah dianggarkan pada tujuan 2
		3	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Telah dianggarkan pada tujuan 1
Total				**2,475,493,381,238**

Sumber : Diolah Bappelitbangda Prov. Sulsel Tahun 2022

3.2.4 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah adalah seluruh penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya, dan pada hakikatnya meliputi semua transaksi keuangan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus.

Dalam hal APBD diperkirakan defisit, ditetapkan pembiayaan untuk menutup defisit tersebut yang diantaranya dapat bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya, pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman, dan penerimaan kembali pemberian pinjaman atau penerimaan piutang.

Penerimaan pembiayaan daerah Provinsi Sulawesi Selatan dari tahun 2020-2022 sebagian besar bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun anggaran sebelumnya. Sedangkan pengeluaran pembiayaan

daerah diperuntukkan antara lain untuk penyertaan modal dan pembayaran pokok hutang. Sesuai Pasal 22 dan Pasal 59 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, bahwa Pembiayaan Daerah terdiri dari Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan.

Kebijakan penerimaan pembiayaan daerah diarahkan antara lain untuk :

1. Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun 2021 sebagai sumber penerimaan pada APBD Tahun Anggaran 2023, didasarkan pada perhitungan yang cermat dan rasional;
2. SiLPA diupayakan menurun seiring dengan semakin efektifnya penggunaan anggaran;

Kebijakan pengeluaran pembiayaan daerah diarahkan antara lain untuk :

1. Pembayaran pokok utang Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) kepada pihak Sarana Multi Infrastruktur (SMI) yang menjadi kewajiban untuk pembayaran cicilan pokoknya setiap tahun.
2. Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan pada PT.Bank Sulselbar setiap tahun sesuai Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pengendalian Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan pada PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat dan untuk tahun 2023 penyertaan modal tersebut belum direncanakan.
3. Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan pada beberapa Badan Usaha Milik Daerah berdasarkan Perda Nomor 5 Tahun 2014 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dan ditahun 2023 penyertaan modal kepada BUMD (Perseroda) belum direncanakan.

Selengkapnya realisasi, target dan proyeksi pembiayaan tahun 2019-2023 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel III. 9
Realisasi, Target dan Proyeksi Pembiayaan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan
Tahun 2020– 2024

No.	Jenis Penerimaan dan Pengeluaraan Pembiayaan Daerah	JUMLAH (Rp.)				
		Realisasi APBD 2020	Realisasi APBD 2021	Target APBD 2022	Proyeksi 2023	Proyeksi 2024
	Surplus/Defisit	**(612.633.148.573,82)**	**-**	**(550.340.767.965,5**	**135.000.000.000,00**	**135.000.000.000,00**
1.	**Penerimaan Pembiayaan**	**1.009.209.884.368,49**	**388.592.185.153**	**73.676.104.829**	**0,00**	**0,00**
1.1.	Sisa lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA)	72.064.281.794,49	388.592.185.153	73.676.104.829	0,00	0,00
1.2.	Pencairan dana cadangan	-	-	-	-	-
1.3.	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	-	-	-	-	-
1.4.	Penerimaan Pinjaman Daerah	937.145.602.574,00	-	-	-	-
1.5.	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	-	-	-	-	-
1.7.	Penerimaan Piutang Daerah	-	-	-	-	-
1.8.	Penerimaan Pengembalian Investasi Perusda	-	-	-	-	-
2.	**Pengeluaran Pembiayaan**	**0,00**	**22.700.000.000**	**249.659.232.034,48**	**135.000.000.000,00**	**135.000.000.000,00**
2.1.	Pembentukan Dana Cadangan	-	-	-	-	-
2.2.	Penyertaan Modal (investasi) Daerah	0,00	0,00	52.500.000.000		
2.3.	Pembayaran Pokok Utang	-	22.700.000.000	135.024.217.935	135.000.000.000,00	135.000.000.000,00
2.4.	Pembayaran Pinjaman Daerah	-	-	-	-	-
	Jumlah Pembiayaan Netto	**1.009.209.884.368,49**	**365.892.185.153**	**(113.848.113.106)**	**(135.000.000.000,00)**	**(135.000.000.000,00)**
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA)	**396.576.735.794,67**	**-**	**-**	**-**	**-**

Sumber : BKAD Prov. Sulsel Tahun 2022 dan Proyeksi RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan 2018-2023

3.2.5 Pendanaan Pembangunan Lainnya

Dengan terbatasnya sumber–sumber penerimaan dan besarnya kebutuhan dana untuk pembangunan di Provinsi Sulawesi Selatan mendorong Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan untuk mencari alternatif pendanaan dalam membangun. Sumber- sumber pendanaan pembangunan non-APBD yang dapat dimanfaatkan sebagai alternatif pembangunan antara lain: 1) APBN; 2) *Corporate Social Responsibility* (Program Kemitraaan dan Bina Lingkungan (PKBL) dan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL)); 3) Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU); 4) Pembiayaan Utang Daerah (Pinjaman Daerah, Obilgasi Daerah, Sukuk Daerah). Adapun penjelasan alternatif pendanaan pembangunan adalah sebagai berikut:

3.2.5.1 Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)

Penyelesaian pembangunan dalam suatu daerah membutuhkan banyak sumber pendanaan, pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan selain bersumber dari APBD Provinsi Sulawesi Selatan, juga memperoleh dukungan pendanaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pendanaan pembangunan yang bersumber dari APBN berupa dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang dikelola oleh perangkat daerah di kabupaten/kota maupun perangkat daerah provinsi.

Adapun alokasi pendanaan yang melalui dana dekonsestrasi dan tugas pembantuan Tahun Anggaran 2019-2021 dapat dilihat pada grafik III.7 dibawah ini :

Grafik III.7.
Alokasi Pendanaan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019-2021 (Milyar Rupiah)

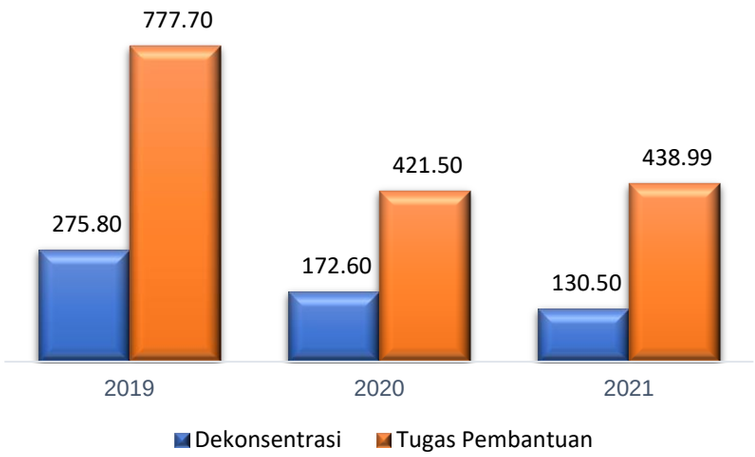

Sumber : Diolah Bappelitbangda Prov. Sulsel Tahun 2022

3.2.5.2 *Corporate Social Responsibility* (Program Kemitraaan dan Bina Lingkungan (PKBL) dan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL))

Pendanaan pembangunan selain APBN dan APBD Provinsi Sulawesi Selatan yang perlu dimaksimalkan yaitu Program Kemitraaan dan Bina Lingkungan (PKBL) dan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL). Mitra

PKBL dan TJSL yang diharapkan tidak hanya mengejar keuntungan jangka pendek, namun turut juga berkontribusi bagi peningkatan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat dan lingkungan sekitar dalam jangka panjang. Dalam artian bahwa tanggung jawab sosial yang dilakukan tidak hanya untuk mendapatkan nilai tambah dari masyarakat tetapi tanggung jawab ini harus berkesinambungan sampai waktu yang cukup panjang. Program pembangunan yang dikerjasamakan dengan mitra PKBL dan TJSL lebih diutamakan pada program yang mendukung prioritas gubernur serta yang bersentuhan langsung dengan masyarakat serta berikesinambungan dan berdampak positif terhadap masyarakat, penekanan kepada 3 (tiga) hal tersebut bahwa bantuan yang diberikan dirancang memiliki dampak yang berkelanjutan karena kerjasama program pembangunan PKBL dan TJSL berbeda dengan donasi bencana alam yang bersifat tidak terduga dan tidak dapat diprediksi. Program yang dikerjasamakan dengan mitra PKBL dan TJSL harus berdampak positif kepada masyarakat, baik secara ekonomi, lingkungan, maupun sosial.

3.2.5.3 Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU)

Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) didasari atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur, pemerintah dimungkinkan untuk melakukan kerjasama dengan badan usaha.

Kondisi yang berkembang saat ini menyebabkan banyak pemerintah daerah menyadari pentingnya kontribusi dari pihak swasta dalam mendorong pembangunan. Berdasarkan fakta, pihak swasta dapat membawa keahlian, ilmu, teknologi, efisiensi, dan permodalan yang sangat dibutuhkan sektor publik sehingga apabila dikombinasikan dengan sumberdaya publik yang tepat dapat berkontribusi lebih besar untuk pembangunan berkelanjutan. Namun pihak swasta membutuhkan lingkungan yang stabil dan dukungan peraturan dan kerangka regulasi yang kuat, persiapan kelembagaan yang jelas, dan faktor lainnya yang penting untuk “menciptakan pangsa pasar”. Salah satu persoalan yang dihadapi pemerintah daerah adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tidak mampu sepenuhnya membiayai pembangunan infrastruktur yang diinginkan atau diharapkan. Artinya, masih banyak bidang-bidang lain, seperti kesehatan, pendidikan, kebudayaan, sosial, dan agama yang juga membutuhkan penyerapan anggaran dari APBD. Di sisi lain, pembangunan infrastruktur sangat dibutuhkan. Pada kondisi ini skema pembiayaan Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) dapat menjadi solusi dengan prinsip gotong royong. Melalui skema pembiayaan KPBU, pemerintah, BUMN/BUMD, serta swasta bahu-membahu untuk membiayai pengakselerasian pembangunan.

3.2.5.4 Pembiayaan Utang Daerah

Pembiayaan Utang Daerah adalah setiap penerimaan Daerah yang harus dibayar kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan utang daerah tersebut terdiri atas : **(1) PinjamanDaerah** yaitu Pembiayaan Utang Daerah yang diikat dalam suatu perjanjian pinjaman dan bukan dalam bentuk surat berharga, yang mengakibatkan Daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain, sehingga Daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali, **(2) Obligasi Daerah** yaitu surat berharga berupa pengakuan utang yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah, **(3) Sukuk Daerah** yaitu surat berharga berdasarkan prinsip Syariah sebagai bukti atas bagian penyertaan asset Sukuk Daerah yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah. Usulan pembiayaan utang daerah tersebut harus termuat dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dengan lebih dulu menetapkan nilai bersih maksimal pembiayaan utang daerah dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan DPRD dan persetujuan DPRD diberikan pada saat pembahasan APBD.

BAB IV

PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2023

BAB IV
PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2023

Rencana pembangunan Tahun 2023 merupakan rencana akhir dari RPJMD provinsi Sulawesi Selatan 2018-2023. Dengan demikian prioritas dan sasaran pembangunan yang merupakan dasar utama untuk menentukan strategi dan arah kebijakan untuk tahun 2023 amat menentukan capaian kinerja akhir RPJMD. Demikian juga menentukan program dan kegiatan prioritas yang disertai dengan target kinerja dan besaran anggaran. Prioritas dan sasaran pembangunan daerah Sulawesi Selatan

Tahun 2023, mengacu kepada permasalahan pembangunan dan hasil evaluasi kinerja RKPD Tahun 2021, prioritas nasional dalam rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023. Selain itu rumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah tahun 2023 memperhatikan kebijakan pengembangan wilayah yang ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009-2029, khususnya yang mengedepankan fokus pengembangan wilayah dan sektor unggulan di setiap kabupaten/kota.

Pada bab ini berisi prioritas dan sasaran pembangunan nasional dan prioritas pembangunan daerah Sulawesi Selatan Tahun 2023 yang dirumuskan dalam rangka untuk mencapai target janji Gubernur yang termuat dalam visi misi Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan sebagaimana tertuang dalam Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (P-RPJMD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023. Dokumen ini juga memuat kebijakan turunan dari prioritas pembangunan nasional sebagaimana tertuang dalam rancangan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023. Prioritas pembangunan disusun memperhatikan hasil evaluasi kinerja Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2021, capaian target pelaksanaan RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023, proyeksi kerangka ekonomi daerah dan arah kebijakan keuangan daerah, serta kondisi lingkungan strategis internal- eksternal, sebagaimana dibahas dalam bab sebelumnya.

Substansi prioritas pembangunan daerah dalam RKPD Tahun 2023 disusun berdasarkan dan memperhatikan:

1. Arah kebijakan Pemerintah yang dijabarkan pada Rancangan Awal RKP 2023.
2. Arah kebijakan P-RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023 guna mencapai sasaran pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan Sulawesi Selatan.
3. Penyelesaian terhadap permaslahan pembangunan. Selanjutnya rumusan tersebut menjadi acuan dan pedoman bagi Organsasi Pemerintah Daerah (OPD) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dalam menyusun rencana kerja yang merupakan penjabaran prioritas pembangunan daerah tahun 2023.

Penyusunan prioritas dan sasaran pembangunan juga diarahkan untuk menjamin terwujudnya visi misi Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan sebagaimana tertuang dalam P-RPJMD 2018-2023 dan mendukung

terwujudnya prioritas pembangunan nasional sebagaimana tercantum dalam RKP 2023.

4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai yang akan dihasilkan setiap tahunnya dalam periode 5 Tahun. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian outcome program Perangkat Daerah. Kriteria sasaran memperhatikan hal-hal sebagai berikut: (1) dirumuskan untuk mencapai atau menjelaskan tujuan; (2) untuk mencapai satu tujuan dapat dicapai melalui beberapa sasaran; (3) disusun dengan memperhatikan permasalahan dan isu-isu strategis pembangunan daerah; dan memenuhi kriteria SMART-C.

Tujuan dan sasaran pembangunan menjadi arahan bagi pelaksanaan setiap urusan pemerintahan daerah baik urusan wajib maupun urusan pilihan dalam mendukung pelaksanaan misi dan mewujudkan visi pembangunan daerah Tahun 2018- 2023. Kedudukan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023 merupakan pelaksanaan tahun ke-5 (lima) dari proses penyelesaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018- 2023 sebagaimana yang telah diubah menjadi Perubahan RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023 dalam rangka mencapai visi pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023 sebagai berikut:

“Sulawesi Selatan Yang
Inovatif, Produktif, Kompetitif, Inklusif, dan Berkarakter”.

Rumusan visi ini mengandung lima pokok visi di dalamnya yakni inovatif, produktif, kompetitif, inklusif dan berkarakter. Kelima pokok visi ini merupakan rangkaian yang terkait satu sama lain dalam mewujudkan kondisi pada tahun 2023 yaitu provinsi Sulawesi Selatan yang “Bersih dan Melayani”, “Terkoneksi”, “Mandiri dan Sejahtera”, “Sehat dan Cerdas” serta “Berkarakter”.

Berdasarkan pemahaman itu maka penjelasan visi RPJMD Sulawesi Selatan 2018-2023 dapat dilihat pada Tabel IV.1.

Tabel IV. 1
Penjelasan Visi RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan 2018-2023

Visi	Pokok-pokok Visi	Penjelasan Visi
Sulawesi Selatan Yang Inovatif, Produktif, Kompetitif, Inklusif, Dan Berkarakter	Inovatif	Kondisi pemerintahan yang memiliki kemampuan menciptakan gagasan baru, produk baru, dan layanan baru dalam kerangka kepemerintahan yang baik sehingga terwujud Sulawesi Selatan yang “bersih dan melayani”
	Kompetitif	Kondisi masyarakat yang memiliki sumberdaya manusia (SDM) dengan kualitas tinggi sehingga terwujud

Visi	Pokok-pokok Visi	Penjelasan Visi
		Sulawesi Selatan yang "sehat dan cerdas"
	Produktif	Kondisi perekonomian yang berkemampuan menghasilkan produk barang dan jasa yang berdaya saing sehingga terwujud Sulawesi Selatan yang "mandiri dan sejahtera".
	Inklusif	Kondisi penyelenggaraan pembangunan yang melibatkan partisipasi seluruh unsur masyarakat dan seluruh bagian wilayah serta ramah terhadap lingkungan hidup sehingga terwujud Sulawesi Selatan yang "inklusif dan terkoneksi".
	Berkarakter	Kondisi penyelenggaraan pembangunan Sulawesi Selatan yang dilandasi oleh spirit dan nilai-nilai luhur kebudayaan masyarakat sehingga terwujud Sulawesi Selatan yang "berkarakter".

Sumber : Perubahan RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018 – 2023

Untuk mewujudkan visi tersebut maka upaya umum yang hendak dijalankan dinyatakan dalam rumusan misi sebagai berikut.

1. Mewujudkan Pemerintahan yang Berorientasi Melayani dan Inovatif
2. Mewujudkan Infrastruktur yang Berkualitas dan *Aksesibel*
3. Mewujudkan Pusat-Pusat Pertumbuhan Ekonomi Baru yang Produktif
4. Mewujudkan Kualitas Manusia yang Kompetitif, Inklusif dan Berkarakter
5. Meningkatkan Produktivitas dan Daya Saing Produk Sumber daya Alam yang Berkelanjutan

Penjelasan dari setiap misi dapat dilihat pada tabel IV.2.

Tabel IV. 2
Perumusan Penjelasan Misi Perubahan RPJMD

Pernyataan Visi: Sulawesi Selatan yang Inovatif, Produktif, Kompetitif, Inklusif, dan Berkarakter			
No.	**Misi**	**Penjelasan Misi**	**Pokok Visi**
1.	Mewujudkan Pemerintahan yang Berorientasi Melayani dan Inovatif	Menyelenggarakan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan yang responsif dan inklusif dengan berbasis pada inovasi	Inovatif dan Inklusif
2.	Mewujudkan Infrastruktur yang Berkualitas dan Aksesibel	Membangun infrastruktur dalam menguatkan interkoneksivitas antar wilayah pertumbuhan ekonomi dan menjangkau lokasi pelosok dan terisolir	Produktif dan Inklusif
3.	Mewujudkan Pusat-Pusat Pertumbuhan Ekonomi Baru yang Produktif	Mengembangkan dan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru sesuai keunggulan komparatif wilayah	Produktif
4.	Mewujudkan Kualitas Manusia yang Kompetitif, Inklusif dan Berkarakter	Memenuhi akses pendidikan berkualitas dan penguasaan ipteks tanpa hambatan bagi seluruh warga, menjamin akses layanan kesehatan berkualitas tanpa hambatan bagi seluruh warga, serta mendorong pelestarian dan kemajuan kebudayaan daerah, meningkatkan moralitas dan akhlak dalam kehidupan sehari-hari yang berlandaskan nilai-nilai keagamaan	Kompetitif, Inklusif dan Berkarakter
5.	Meningkatkan Produktivitas dan Daya Saing Produk Sumberdaya Alam yang Berkelanjutan	Meningkatkan produktivitas dan daya saing produk perekonomian rakyat serta melestarikan lingkungan hidup dan sumberdaya alam	Kompetitif

Sumber : Dokumen Perubahan RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018 – 2023

Rumusan tujuan dan sasaran berdasarkan prioritas pembangunan daerah menjadi landasan perumusan sasaran, strategi, dan kebijakan RKPD sebagai rencana tahunan. Rumusan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Kriteria rumusan tujuan pembangunan antara lain sebagai berikut: (1) diturunkan secara lebih operasional dari masing-masing misi pembangunan daerah yang telah ditetapkan dengan memperhatikan visi; (2) untuk mewujudkan misi dapat dicapai melalui

beberapa tujuan; (3) disusun dengan memperhatikan permasalahan dan isu-isu strategis pembangunan daerah; (4) dapat diukur dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan; dan (5) disusun dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami.

Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian outcome program Perangkat Daerah. Kriteria sasaran memperhatikan hal-hal sebagai berikut: (1) dirumuskan untuk mencapai atau menjelaskan tujuan; (2) untuk mencapai satu tujuan dapat dicapai melalui beberapa sasaran; (3) disusun dengan memperhatikan permasalahan dan isu-isu strategis pembangunan daerah; dan memenuhi kriteria SMART-C

Target dari tujuan dan sasaran tahun 2023 menjadi landasan RKPD Tahun 2023, sebagaimana yang tercantum dalam Tabel IV. 3.

Tabel IV. 3
Tujuan dan sasaran serta target Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023

Visi/Misi/Tujuan/Sasaran				Indikator KinerjaTujuan/ Sasaran		Satuan	Realisasi Tahun 2021	Asumsi Capaian Tahun 2022	Target Tahun 2023
VISI : Sulawesi Selatan yang Inovatif, Produktif, Kompetitif, Inklusif, dan Berkarakter									
Misi 1	**Mewujudkan Pemerintahan yang Berorientasi Melayani dan Inovatif**								
	Tujuan 1	Meningkatkan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang baik		1.	Indeks Reformasi Birokrasi	Huruf/ angka	**B** (61,18)	BB (71 – 80)	**A (81 – 90)**
		Sasaran 1.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah	2.	Nilai SAKIP Provinsi	Huruf/ angka	**B** (65,01)	BB (>70-80)	**A (>80–90)**
		Sasaran 2	Berkembangnya inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan public	3.	Indeks Pelayanan Publik	Huruf/ angka	**A** (4,10)	A- (4,01 – 4,50)	**A (4,51 – 5,0)**
Misi 2	**Mewujudkan Infrastruktur yang Berkualitas dan Aksesibel**								
	Tujuan 2	Meningkatkan pemerataan infrastruktur wilayah		4.	Indeks Williamson	Angka	**0,568**	0,608	**0,607**
		Sasaran 3	Meningkatnya aksesibilitas infrastruktur wilayah	5.	Indeks Layanan Infrastruktur	Angka	79,44	81,70	83,40
Misi 3	**Mewujudkan Pusat-Pusat Pertumbuhan Ekonomi Baru yang Produktif**								
	Tujuan 3	Meningkatkan Kesejahteraan masyarakat secara merata		6.	PDRB Perkapita AHB	Rp. Juta	**59,66**	62,37	**65,98**
				7.	Tingkat Kemiskinan	%	**8,53**	8,10	**7,45**
		Sasaran 4	Meningkatnya penyerapan tenaga kerja sektor unggulan daerah	8.	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	**5,72**	5,90	**5,69**
		Sasaran 5	Menurunya kesenjangan Pendapatan antar lapisan masyarakat	9.	Rasio Gini	Angka	0,377	0,381	0.381
Misi 4	**Mewujudkan Kualitas Manusia yang Kompetitif, Inklusif dan Berkarakter**								
	Tujuan 4	Meningkatkan Kualitas SDM yang Kompetitif, Inklusif dan Berkarakter		10.	IPM	Angka	72,24	72,57	73,05
		Sasaran 6	Meningkatnya Kualitas dan	11.	Indeks Pendidikan	Angka	65,76	66,57	67,05

Visi/Misi/Tujuan/Sasaran				Indikator KinerjaTujuan/ Sasaran		Satuan	Realisasi Tahun 2021	Asumsi Capaian Tahun 2022	Target Tahun 2023
VISI : Sulawesi Selatan yang Inovatif, Produktif, Kompetitif, Inklusif, dan Berkarakter									
			Pemerataan Pendidikan						
		Sasaran 7	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	12.	Indeks Kesehatan	Angka	77,94	77,82	77’86
		Sasaran 8	Meningkatnya keberdayaan perempuan dalam pembangunan	13.	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Angka	76,32	76,36	77,86
		Sasaran 9	Meningkatnya aktualisas nilai-nilai agama dan budaya dalam kehidupan masyarakat	14.	Angka kriminalitas	Kasus	15.210	24.573	24.438
Misi 5	**Meningkatkan Produktivitas dan Daya Saing Produk Sumber Daya Alam yang Berkelanjutan**								
	Tujuan 5	Meningkatkan Produktivitas dan Nilai Tambah Produk Unggulan Daerah		15.	Pertumbuhan ekonomi	%	4,65	4,62–5,98	**5,04–6,52**
		Sasaran 10	Meningkatnya hilirisasi ekonomi sektor unggulan daerah	16.	Produktifitas Total Daerah	Rp/Angkatan Kerja	77.819.958	77.086.000	**77.349.122**
	Tujuan 6	Meningkatkan kualitas lingkungan hidup secara berkelanjutan		17.	IKLH	poin	73,23	72,63	**72,84**
		Sasaran 11	Terpeliharanya kualitas lingkungan hidup serta kemampuan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim	18.	Potensi Penurunan emisi GRK (Juta Ton CO_2Eq)	Juta Ton CO2Eq	**1,130**	1,198	**1,347**

Sumber: Dokumen Perubahan RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023

4.2. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2023

Prioritas pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023 merupakan target akhir dari RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan 2018-2023 yang disusun berdasrakan arah kebijakan dan prioritas Pembangunan tahun 2023 sebagaimana yang tercantum dalam P-RPJMD 2018-2023 dan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2023 sebagai mana tercantum dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2023.

4.2.1. Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2023

4.2.1.1. Tema, Sasaran, Arah Kebijakan, dan Strategi Pembangunan

Penyusunan tema pembangunan RKP Tahun 2023 dilakukan dengan mempertimbangkan arahan Presiden, hasil evaluasi kinerja pembangunan tahun 2021, evaluasi kebijakan tahun2022, forum konsultasi publik, kerangka ekonomi makro, sasaran RPJMN 2020–2024, dinamika pandemi COVID-19, dan isu strategis yang menjadi perhatian.

Gambar IV. 1
Penyusunan Tema Pembangunan RKP Tahun 2023

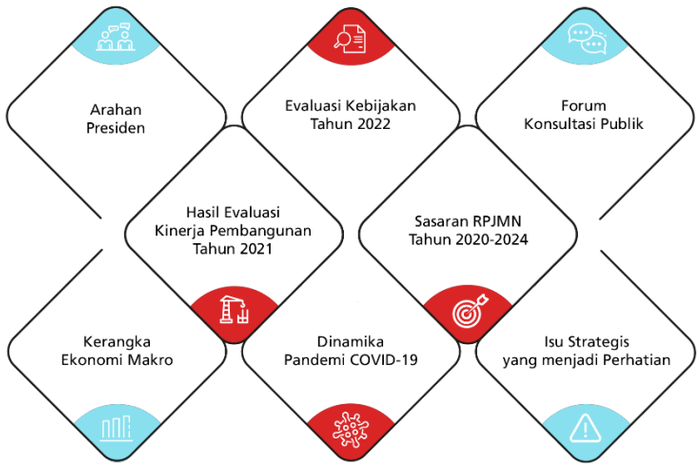

Sumber : Permen Bappenas No. 3 Tahun 2022 Tentang Rancangan Awal RKP Tahun 2023

Tema RKP Tahun 2023 juga disusun sebagai respons terhadap momentum keberlanjutan pemulihan ekonomi Indonesia yang berhasil mencapai pertumbuhan ekonomi positif pada tahun 2021. Capaian tersebut sangat fundamental dan signifikan setelah tahun sebelumnya berbagai indikator pembangunan mengalami kontraksi akibat pandemi COVID-19.

Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2020 terkontraksi 2,07 persen, pertama kali sejak krisis tahun 1998. Belajar dari pengalaman krisis di Indonesia tahun 1998, diperlukan upaya yang kuat dan konsisten untuk mengembalikan trajektori pertumbuhan ekonomi seperti sebelum krisis. Dengan menggunakan skenario business as usual (BAU), pertumbuhan potensial ekonomi Indonesia pasca COVID-19 diproyeksikan akan terus mengalami perlambatan sampai dengan tahun 2045. Hal ini antara lain disebabkan oleh menurunnya tingkat produktivitas Indonesia dibandingkan negara setara dalam kurun waktu 10 tahun terakhir.

Grafik IV. 1
Keterkaitan Pertumbuhan Ekonomi dan Tingkat Produktivitas

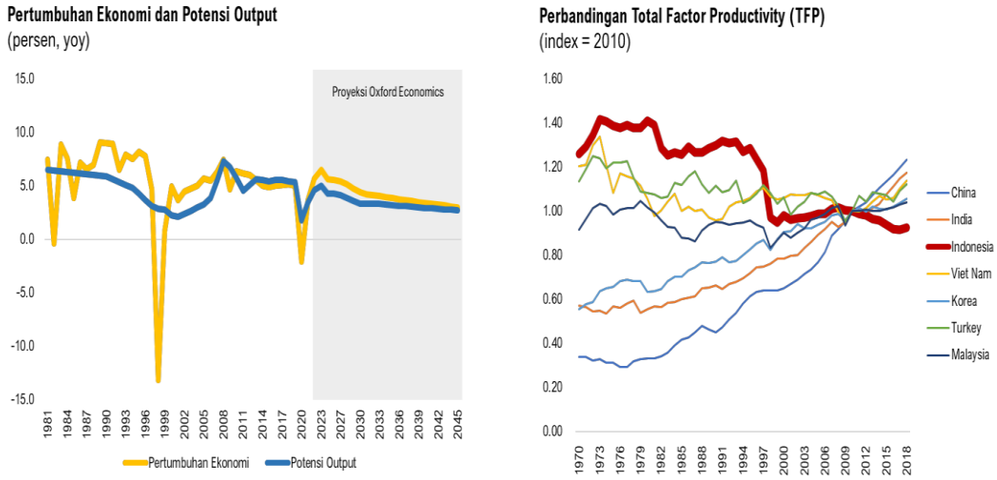

Sumber: BPS, Oxford Economics, Asian Productivity Database, 2021

Penurunan produktivitas tersebut harus segera diatasi melalui redesain transformasi ekonomi Indonesia. Urgensi redesain transformasi ekonomi Indonesia tidak hanya bertujuan untuk pulih dari krisis, namun juga meningkatkan trajektori pertumbuhan yang lebih tinggi dalam jangka menengah-panjang. Pascapandemi COVID-19, Indonesia harus tumbuh lebih tinggi dari rata- rata 5,7 persen menjadi 6,0 persen sampai dengan tahun 2045 untuk keluar dari MIT dan menjadi negara maju.

Transformasi ekonomi Indonesia akan sangat bergantung pada kebijakan peningkatan produktivitas, terutama dalam meningkatkan nilai tambah di dalam dan antar sektor ekonomi, serta melakukan pergeseran tenaga kerja dari sektor informal yang bernilai tambah relatif rendah menuju sektor formal yang bernilai tambah tinggi sehingga mendorong peningkatan pertumbuhan potensial jangka panjang.

Redesain transformasi ekonomi juga untuk menjawab tantangan perubahan situasi dan peradaban dunia yang begitu cepat dan sistematis di berbagai bidang seperti sistem kesehatan, otomasi dan digitalisasi, artificial intelegence (AI) dan big data, disrupsi rantai pasok global, dan pergeseran pola kerja menjadi telework. Selain itu, paradigma pembangunan beralih kepada ekonomi hijau.

Pada tahun 2022, pemerintah melalui kebijakan pemulihan ekonomi dan reformasi struktural mendorong sisi permintaan dan sisi penawaran untuk memulihkan utilitas dan mengembalikan pertumbuhan potensial pada level sebelum pandemi. Selanjutnya, pemulihan ekonomi dan reformasi struktural tersebut akan menjadi landasan dalam mendorong proses transformasi ekonomi Indonesia pada tahun 2023.

Gambar IV. 2
Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan

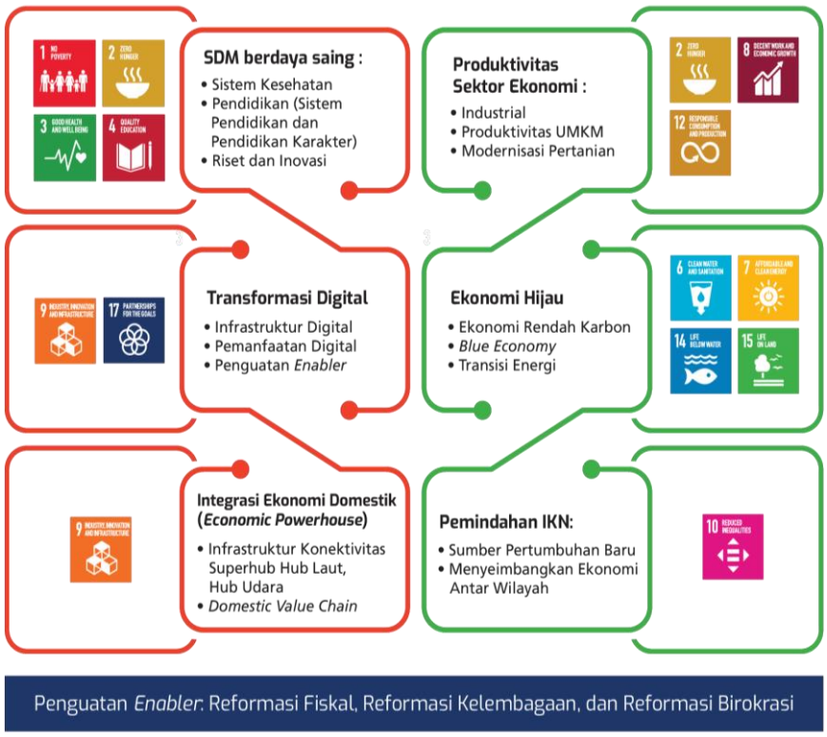

Sumber : Permen Bappenas No. 3 Tahun 2022 Tentang Rancangan Awal RKP Tahun 2023

Transformasi ekonomi Indonesia dilaksanakan pada seluruh daerah. Provinsi Bali, yang paling terdampak negatif pandemi menjadi daerah percontohan atau pilot project melalui pelaksanaan Peta Jalan Transformasi Ekonomi Kerthi Bali menuju Bali Era Baru: Hijau, Tangguh, dan Sejahtera. Dalam jangka menengah-panjang, transformasi ekonomi Bali dilakukan melalui (1) Bali Pintar dan Sehat, (2) Bali Produktif, (3) Bali Hijau, (4) Bali Terintegrasi, (5) Bali Smart Island, dan (6) Bali Kondusif. Semangat transformasi ekonomi yang dilakukan di Provinsi Bali menjadi praktik baik yang perlu diadopsi oleh provinsi lain melalui penyelarasan strategi jangka menengah-panjang dengan transformasi ekonomi Indonesia.

Tantangan besar masih akan dihadapi oleh perekonomian Indonesia, antara lain masih terdapatnya scars akibat krisis COVID-19, yaitu learning loss, belum kembalinya tingkat kemiskinan dan pengangguran ke level sebelum pandemi, belum pulihnya dunia usaha secara optimal, dan masih terbatasnya infrastruktur dasar. Untuk itu, transformasi ekonomi perlu dilakukan secara inklusif melalui tiga pilar yaitu (1) pertumbuhan dan perkembangan ekonomi; (2) pemerataan pendapatan dan pengurangan kemiskinan; dan (3) perluasan akses dan kesempatan.

Gambar IV. 3
Ekonomi Inklusif

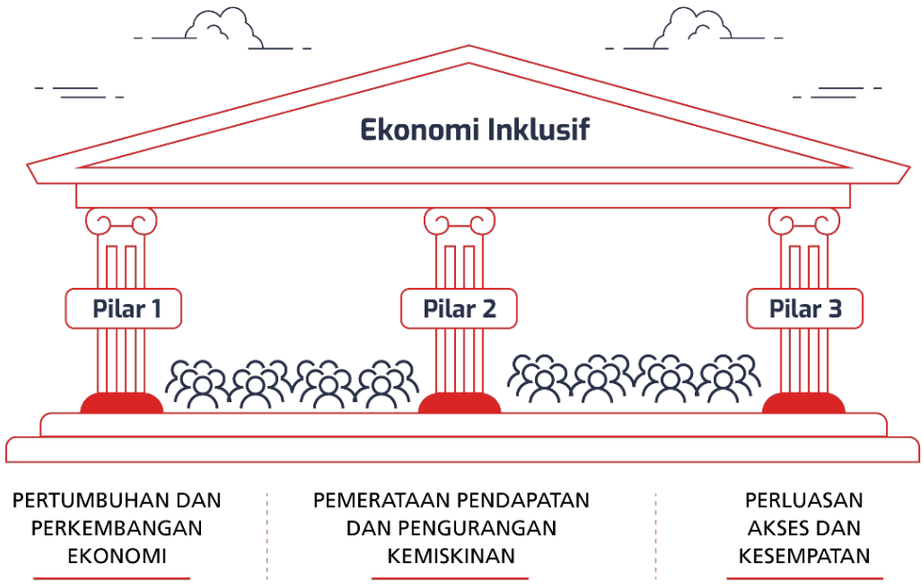

Sumber : Permen Bappenas No. 3 Tahun 2022 Tentang Rancangan Awal RKP Tahun 2023

Selain itu, pemerintah saat ini perlu meninggalkan legacy pembangunan sebagai landasan bagi pemerintahan berikutnya untuk lepas landas sehingga penciptaan lapangan kerja, penciptaan efek pengganda terhadap perekonomian dan peningkatan produktivitas perekonomian jangka menengah-panjang tetap berkelanjutan. Tanpa adanya intervensi kebijakan strategis, produktivitas dan daya saing Indonesia diperkirakan akan semakin menurun. Untuk mengejar gap pertumbuhan agar tetap sejalan dengan target keluar dari middle-income trap maka transformasi ekonomi yang didorong melalui peningkatan produktivitas menjadi semakin penting.

Dengan memperhatikan berbagai hal tersebut, maka tema pembangunan RKP Tahun 2023 adalah "Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan".

Tema pembangunan tersebut menekankan pentingnya peningkatan produktivitas melalui revitalisasi industri dan penguatan riset terapan, mendorong pemulihan dunia usaha, pembangunan Ibu Kota Nusantara, serta peningkatan infrastruktur digital dan konektivitas. Upaya transformasi ekonomi yang inklusif dilakukan melalui percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, peningkatan kualitas SDM melalui penguatan sistem pendidikan dan kesehatan, penanggulangan pengangguran disertai dengan peningkatan decent job, serta percepatan pembangunan infrastruktur dasar yang antara lain meliputi penyediaan air bersih dan sanitasi yang layak. Selanjutnya, arah pembangunan berkelanjutan difokuskan untuk dapat mendorong pembangunan rendah karbon dan transisi energi yang mampu merespons tantangan-tantangan perubahan iklim. Hal tersebut dilaksanakan dalam koridor pengembangan wilayah dan desa.

Gambar IV. 4
Kerangka Pikir Tema RKP Tahun 2023

Sumber : Permen Bappenas No. 3 Tahun 2022 Tentang Rancangan Awal RKP Tahun 2023

Dalam mendorong percepatan pencapaian target pembangunan melalui peningkatan produktivitas untuk transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, diperlukan orkestrasi dan koordinasi dimulai dari perencanaan hingga implementasi kebijakan yang terintegrasi serta bersifat lintas pelaku, sektor, wilayah, dan tingkat pemerintahan. Dengan demikian, tema pembangunan RKP Tahun 2023 menjadi acuan dalam menyusun kebijakan pembangunan pada seluruh level pemerintahan dan badan usaha dalam rangka bersama-sama mendorong peningkatan produktivitas untuk mendukung transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Sasaran Pembangunan Nasional

Sasaran pembangunan tahun 2023 adalah:

1) Mengembalikan momentum pertumbuhan melalui peningkatan produktivitas dengan indikator (a) pertumbuhan ekonomi, (b) tingkat pengangguran terbuka, (c) rasio gini, dan (d) penurunan emisi gas rumah kaca;
2) Peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia sebagai representasi pembangunan inklusif dengan indikator (a) indeks pembangunan manusia, dan (b) tingkat kemiskinan.

Selain itu, aksentuasi indikator pembangunan tahun 2023 diarahkan pada indikator nilai tukar petani dan nilai tukar nelayan. Lebih lanjut, target sasaran dan indikator pembangunan tahun 2023 ditunjukkan oleh infografis sebagai berikut.

Gambar IV. 5
Sasaran Pembangunan Nasional

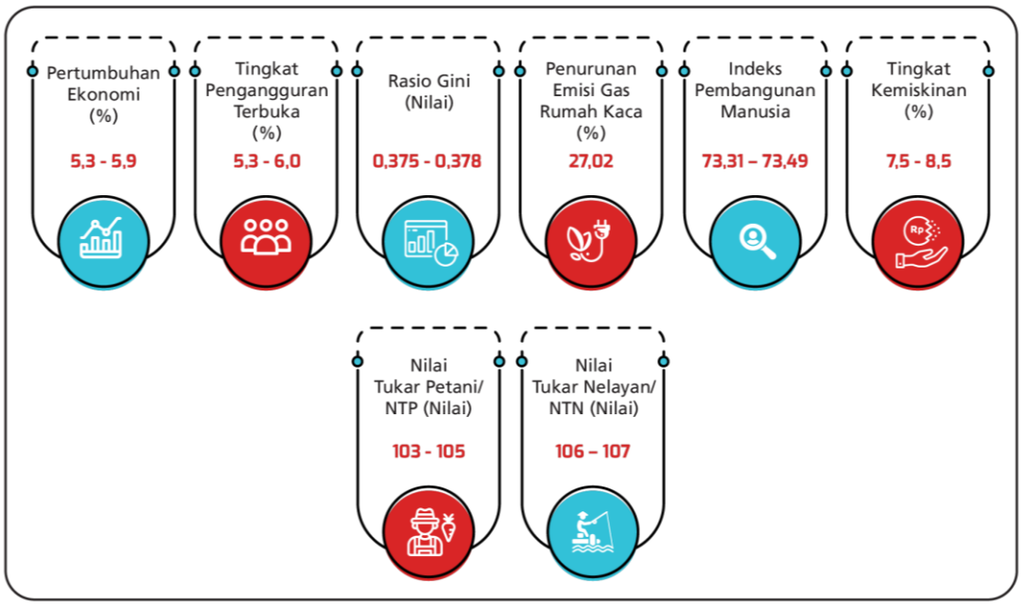

Sumber : Permen Bappenas No. 3 Tahun 2022 Tentang Rancangan Awal RKP Tahun 2023

Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan

Sesuai dengan tema dan sasaran pembangunan RKP Tahun 2023, ditetapkan 8 (delapan) arah kebijakan pembangunan untuk tahun 2023 yakni (1) percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, (2) peningkatan kualitas SDM kesehatan dan pendidikan, (3) penanggulangan pengangguran disertai dengan peningkatan decent job, (4) mendorong pemulihan dunia usaha, (5) revitalisasi industri dan penguatan riset terapan, (6) pembangunan rendah karbon dan transisi energi (respons terhadap perubahan iklim), (7) percepatan pembangunan infrastruktur dasar, antara lain air bersih dan sanitasi, dan (8) pembangunan Ibu Kota Nusantara.

Gambar IV. 6
Tema RKP Tahun 2023

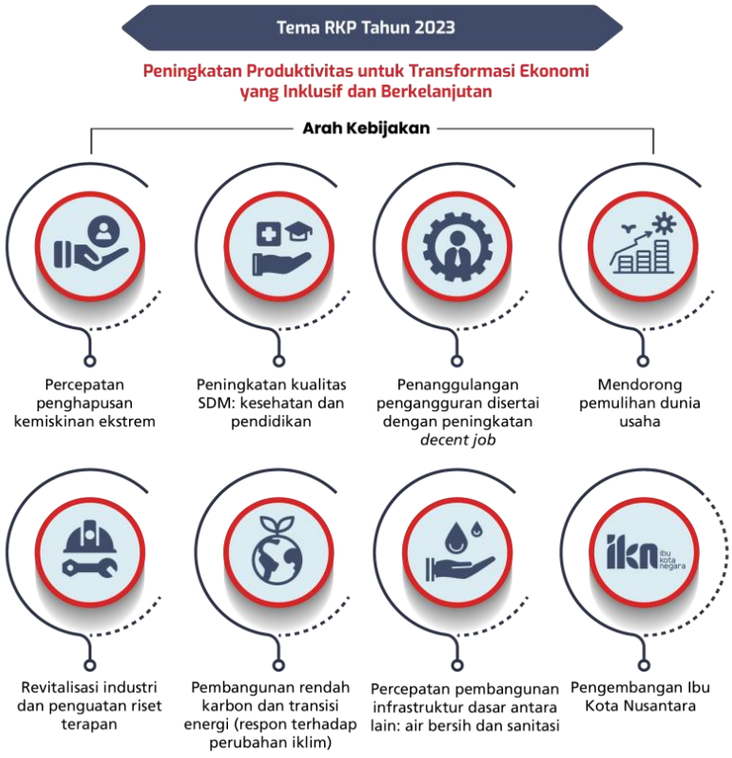

Sumber : Permen Bappenas No. 3 Tahun 2022 Tentang Rancangan Awal RKP Tahun 2023

Sebagai operasionalisasi dari arah kebijakan pembangunan tahun 2023, disusun strategi pembangunan tahun 2023 yang melekat pada masing-masing arah kebijakan sebagaimana termuat pada infografis di bawah ini.

Gambar IV. 7
Arah Kebijakan Pembangunan Tahun 2023

Sumber : Permen Bappenas No. 3 Tahun 2022 Tentang Rancangan Awal RKP Tahun 2023

4.2.1.2. Prioritas Nasional tahun 2023

Arah kebijakan dan strategi pembangunan nasional Tahun 2023 dituangkan ke dalam 7 (tujuh) Prioritas Nasional (PN) RKP Tahun 2023. Tujuh PN tersebut merupakan Agenda Pembangunan yang terkandung dalam RPJMN Tahun 2020–2024 dan tetap dilanjutkan pada RKP Tahun 2023 sebagai koridor pencapaian tema, arah kebijakan dan strategi pembangunan. Hal ini juga dimaksudkan untuk menjaga kesinambungan pembangunan serta mengoptimalkan efektivitas pengendalian pencapaian sasaran pembangunan jangka menengah. Prioritas Nasional RKP Tahun 2023 ditampilkan pada infografis di bawah ini. Secara rinci sasaran dari masing-masing PN disampaikan sebagai berikut.

Gambar IV. 8
Prioritas Nasional Tahun 2023

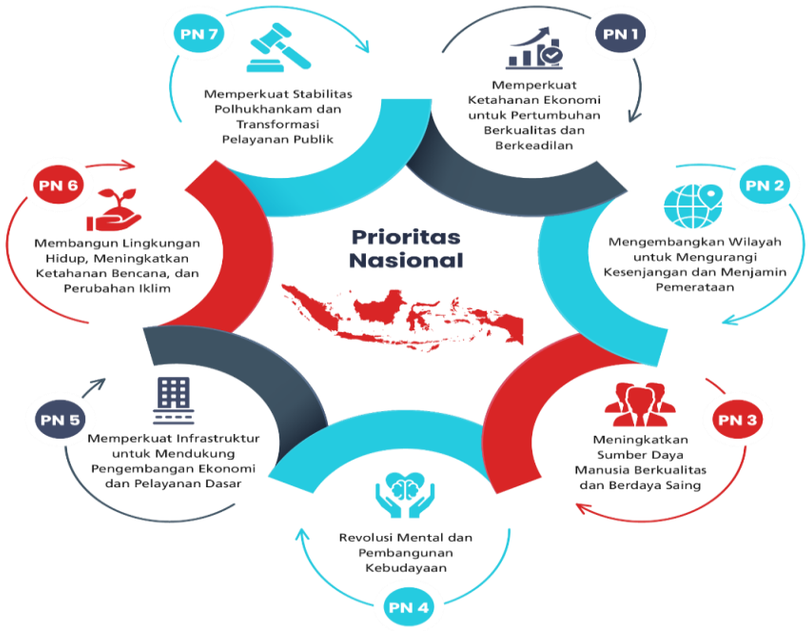

- **PN 1 : Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas Dan Berkeadilan**

  Sasaran PN 1 adalah sebagai berikut :

  1) Meningkatnya daya dukung dan kualitas sumber daya ekonomi sebagai modalitas bagi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dengan mendorong peningkatan (a) porsi energi baru terbarukan dalam bauran energi nasional, (b) skor pola pangan harapan, serta (c) pengelolaan dan pemanfaatan wilayah pengelolaan perikanan (WPP) secara berkelanjutan.
  2) Meningkatnya nilai tambah, lapangan kerja, investasi, ekspor dan daya saing perekonomian dengan mendorong peningkatan (a) rasio kewirausahaan nasional, (b) pertumbuhan PDB pertanian, (c) pertumbuhan PDB perikanan, (d) pertumbuhan PDB industri pengolahan, (e) kontribusi PDB industri pengolahan, (f) nilai devisa pariwisata, (g) kontribusi PDB pariwisata, (h) penyediaan lapangan kerja per tahun,(i) pertumbuhan investasi (PMTB), (j) pertumbuhan

ekspor industri pengolahan, (k) pertumbuhan ekspor riil barang dan jasa, serta (l) rasio perpajakan terhadap PDB.

- **PN 2 : Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan**

Sasaran PN 2 adalah sebagai berikut :

1) Meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan tingkat kesejahteraan masyarakat di Kawasan Timur Indonesia (KTI) dengan mendorong (a) laju pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) KTI, (b) Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di KTI, serta (c) penurunan persentase penduduk miskin KTI;
2) Terjaganya pertumbuhan ekonomi dan tingkat kesejahteraan masyarakat di Kawasan Barat Indonesia (KBI) dengan mendorong (a) laju pertumbuhan PDRB KBI, (b) IPM di KBI, serta (c) penurunan persentase penduduk miskin KBI.

- **PN 3 : Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing.**

Sasaran PN 3 adalah sebagai berikut:

1) Terkendalinya pertumbuhan penduduk dan menguatnya tata Kelola kependudukan dengan (a) menjaga Angka Kelahiran Total (*Total Fertility Rate*/TFR) dan (b) meningkatkan persentase cakupan kepemilikan Nomor Induk Kependudukan (NIK);
2) Meningkatnya perlindungan sosial bagi seluruh penduduk dengan mendorong peningkatan (a) proporsi penduduk yang tercakup dalam program jaminan sosial, dan (b) proporsi rumah tangga miskin dan rentan yang memperoleh bantuan sosial pemerintah;
3) Terpenuhinya layanan dasar bidang kesehatan dan pendidikan dengan (a) menurunkan Angka Kematian Ibu (AKI), (b) menurunkan Angka Kematian Bayi (AKB), (c) menurunkan prevalensi *stunting* pada balita, (d) menurunkan insidensi *tuberculosis*, (e) meningkatkan jumlah kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria, (f) meningkatkan jumlah kabupaten/ kota dengan eliminasi kusta, (g) menurunkan prevalensi obesitas pada penduduk >18 tahun, (h) menurunkan persentase merokok penduduk usia 10-18 tahun, (i) nilai rata-rata hasil PISA (membaca, matematika, sains), (j) rata-rata lama sekolah penduduk usia 15 tahun ke atas, dan (k) harapan lama sekolah;
4) Meningkatnya kualitas anak, perempuan, dan pemuda melalui peningkatan (a) Indeks Perlindungan Anak (IPA), (b) Indeks Pembangunan Gender (IPG), serta (c) Indeks Pembangunan Pemuda (IPP);
5) Meningkatnya aset produktif bagi rumah tanga miskin dan rentan dengan mendorong kenaikan persentase rumah tangga miskin dan rentan yang memiliki aset produktif;
6) Meningkatnya produktivitas dan daya saing dengan peningkatan (a) persentase angkatan kerja berpendidikan menengah ke atas, (b) jumlah perguruan tinggi (PT) yang masuk dalam *world class university*, (c) proporsi pekerja yang bekerja pada bidang keahlian menengah dan tinggi, serta (d) peningkatan peringkat *global innovation index.*

- **PN 4 : Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan**

Sasaran PN 4 adalah sebagai berikut:

1) Menguatnya revolusi mental dan pembinaan ideologi Pancasila untuk memantapkan ketahanan budaya dengan mendorong (a) peningkatan Indeks Capaian Revolusi Mental, dan (b) peningkatan Indeks Aktualisasi Nilai-nilai Pancasila;
2) Meningkatnya pemajuan kebudayaan untuk meningkatkan peran kebudayaan dalam pembangunan dengan peningkatan Indeks Pembangunan Kebudayaan;
3) Meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat dan daya rekat sosial dengan mendorong optimalisasi capaian Indeks Pembangunan Masyarakat;
4) Menguatnya moderasi beragama untuk mewujudkan kerukunan umat dan membangun harmoni sosial dalam kehidupan masyarakat dengan meningkatkan Indeks Kerukunan Umat Beragama;
5) Meningkatnya ketahanan keluarga untuk memperkukuh karakter bangsa dengan mengoptimalkan capaian (a) Indeks Pembangunan Keluarga dan (b) median usia kawin pertama perempuan;
6) Meningkatnya budaya literasi untuk mewujudkan masyarakat berpengetahuan, inovatif, dan kreatif dengan mendorong pencapaian Nilai Budaya Literasi.

- **PN 5 : Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar.**

Sasaran PN 5 adalah sebagai berikut :

1) Meningkatnya penyediaan intrastruktur layanan dasar dengan mendorong (a) peningkatan rumah tangga yang menempati hunian layak dan terjangkau, (b) penurunan rasio fatalitas kecelakaan jalan per 10.000 kendaraan terhadap angka dasar tahun 2010, (c) peningkatan persentase luas daerah irigasi yang dimodernisasi (kumulatif), dan (d) peningkatan persentase pemenuhan kebutuhan air baku (kumulatif);
2) Meningkatnya konektivitas untuk mendukung kegiatan ekonomi dan akses menuju pelayanan dasar dengan mendorong (a) penurunan waktu tempuh pada jalan lintas utama pulau (jam/ 100 Km), (b) peningkatan persentase rute pelayaran yang saling terhubung (*loop*), (c) peningkatan kondisi jalur Kereta Api (KA) sesuai standar *Track Quality Index* (TQI) kategori 1 dan 2, dan (d) peningkatan persentase capaian *On Time Performance* (OTP) transportasi udara;
3) Meningkatnya layanan infrastruktur perkotaan dengan mendorong (a) kenaikan jumlah kota metropolitan dengan sistem angkutan umum massal perkotaan yang dibangun dan dikembangkan (Kota) dan (b) peningkatan persentase rumah tanga yang menempati hunian layak dan terjangkau di perkotaan;
4) Meningkatnya layanan energi dan ketenagalistrikan dengan mendorong peningkatan (a) rasio elektrifikasi, (b) rata-rata pemenuhan kebutuhan (konsumsi) listrik (kWh/kapita), dan (c) penurunan emisi GRK sector energi (juta ton);

5) Meningkatnya layanan infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) melalui peningkatan persentase populasi yang dijangkau oleh jaringan bergerak pita lebar (4G).

- **PN 6 : Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim.**

Sasaran PN 6 adalah sebagai berikut:

1) Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dengan mendorong Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH);
2) Berkurangnya kerugian akibat dampak bencana dan bahaya iklim dengan mendorong penurunan potensi kehilangan PDB akibat dampak bencana dan iklim terhadap total PDB;
3) Meningkatkan capaian penurunan emisi dan intensitas emisi GRK terhadap baseline dengan mendorong (a) persentase penurunan emisi GRK, dan (b) persentase penurunan intensitas emisi GRK.

- **PN 7 : Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.**

Sasaran PN 7 adalah sebagai berikut:

1) Terwujudnya demokrasi yang terkonsolidasi, terpeliharanya kebebasan, menguatnya kapasitas lembaga-lembaga demokrasi, dan terjaganya kesetaraan warga negara secara optimal dengan meningkatkan (a) indeks demokrasi Indonesia, dan (b) tingkat kepercayaan masyarakat terhadap konten dan akses informasi publik terkait kebijakan dan program prioritas pemerintah;
2) Optimalnya kebijakan luar negeri dengan meningkatkan indeks pengaruh dan peran Indonesia di dunia internasional;
3) Meningkatnya penegakan hukum nasional yang mantap dengan mendorong kenaikan indeks pembangunan hukum;
4) Meningkatnya kualitas pelayanan publik dengan mendorong kenaikan indeks pelayanan publik nasional;
5) Terjaganya keutuhan wilayah Negara Kesatua Republik Indonesia dengan mendorong peningkatan persentase luas wilayah NKRI yang dapat dijaga keutuhannya.

Pencapaian tujuh PN di atas didukung oleh pelaksanaan 45 proyek prioritas strategis/Major Project (MP) sebagai leverage point yang memberikan kontribusi signifikan terhadap pencapaian target pembangunan nasional RKP Tahun 2023. Dalam Lampiran I Peraturan Presiden (Perpres) No. 18/2020 tentang RPJMN Tahun 2020–2024, disebutkan bahwa MP dirancang sebagai penekanan kebijakan dan pendanaan dalam RPJMN, RKP dan APBN Tahunannya. Dalam pelaksanaannya, indikasi pendanaan Major Project dapat dimutakhirkan melalui RKP dengan mempertimbangkan kesiapan pelaksanaan, pemutakhiran besaran dan sumber pendanaan serta direktif presiden. Hal ini untuk memastikan Major Project dapat terlaksana secara lebih efektif dan efisien sesuai dengan perkembangan pembangunan.

Dalam RPJMN Tahun 2020–2024 terdapat 41 MP yang kemudian berkembang menjadi 43 MP pada RKP Tahun 2021. Dengan mempertimbangkan perkembangan dan kebutuhan pembangunan, pada RKP

Tahun 2022 jumlah MP kembali dikembangkan menjadi 45 dan tetap dipertahankan pada RKP Tahun 2023. Penjabaran lebih rinci terkait informasi 45 MP disampaikan dalam Bab IV pada masing-masing PN.

Dalam pelaksanaannya, pencapaian target-target pembangunan RKP Tahun 2023 menuntut adanya penekanan kebijakan melalui pelaksanaan beberapa MP yang secara spesifik signifikan mendukung pencapaian sasaran, arah kebijakan, dan strategi pembangunan Tahun 2023. Untuk itu ditetapkan 14 MP yang menjadi penekanan (highlight), yakni (1) Kawasan Industri Prioritas dan Smelter, (2) Pengelolaan Terpadu UMKM, (3) Akselerasi Pengembangan Energi Terbarukan dan Konservasi Energi, (4) Food Estate (Kawasan Sentra Produksi Pangan),
(5) Destinasi Pariwisata Prioritas, (6) Wilayah Adat Papua: Wilayah Adat Laa Pago dan Wilayah Adat Domberay, (7) Pembangunan Ibu Kota Nusantara, (8) Reformasi Sistem Perlindungan Sosial, (9) Reformasi Sistem Kesehatan Nasional, (10) Pendidikan dan Pelatihan Vokasi untuk Industri 4.0, (11) Percepatan Penurunan Kematian Ibu dan Stunting, (12) Jaringan Pelabuhan Utama Terpadu, (13) Transformasi Digital, dan (14) Pembangunan Fasilitas Pengolahan Limbah B3.

Gambar IV. 9

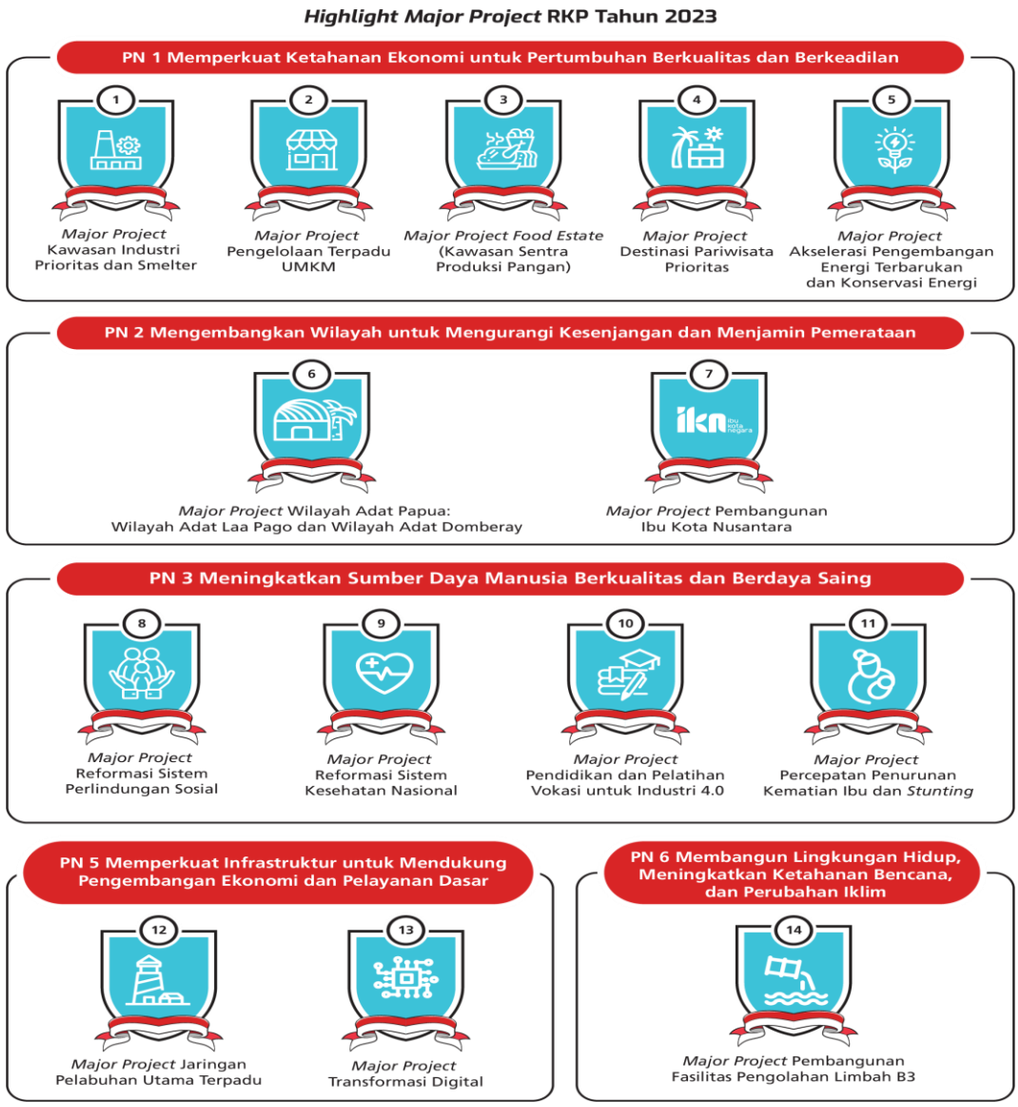

Penerapan mekanisme Clearing House (CH) dalam perencanaan MP yang telah dimulai pada RKP Tahun 2022 tetap dilaksanakan dan dipertajam pada RKP Tahun 2023. Penajaman mekanisme CH bertujuan untuk menjamin tercapainya output MP dan dipastikan bermanfaat bagi masyarakat pada akhir periode RPJMN Tahun 2020-2024 (not only sent but delivered). Penajaman antara lain meliputi (1) optimalisasi integrasi berbagai sumber daya pembangunan, termasuk dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Swasta, guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai sasaran pembangunan nasional; (2) penguatan mekanisme CH dalam penyusunan cascading, executive summary, dan info memo MP; serta (3) intensifikasi pelibatan stakeholder dalam mekanisme CH melalui rangkaian pertemuan multipihak (trilateral/multilateral meeting) guna memastikan komitmen para pihak mulai dari perencanaan hingga implementasi MP yang berorientasi pada pencapaian output MP pada Tahun 2024.

4.2.1.3. Strategi Pengembangan Wilayah Sulawesi

Pengembangan Wilayah Sulawesi diarahkan untuk (1) memantapkan peran sebagai hub kawasan timur untuk jalur perdagangan internasional, (2) meningkatkan peran sebagai salah satu lumbung pangan nasional, (3) meningkatkan diversifikasi kegiatan ekonomi untuk mempertahankan kesinambungan pertumbuhan wilayah melalui hilirisasi komoditas unggulan dan pengembangan sektor pariwisata, (4) mendorong pemerataan pembangunan, dan (5) memperkuat mitigasi bencana khususnya di daerah yang memiliki kerawanan bencana alam tinggi. Pemanfaatan peluang diversifikasi sekaligus peningkatan nilai tambah di tingkat wilayah difokuskan pada peningkatan produktivitas dan hilirisasi komoditas-komoditas unggulan seperti kelapa, lada, pala, cengkeh, kopi, kakao, tebu, dan kelapa sawit untuk sektor pertanian dan perkebunan; sektor peternakan sapi; hasil hutan berupa rotan; hasil perikanan tangkap dan budi daya; serta sumber daya alam di sektor pertambangan seperti aspal, nikel, bijih besi, dan gas bumi.

Tabel IV. 4
Strategi Percepatan Pertumbuhan dan Transformasi Wilayah Sulawesi

No.	Strategi Percepatan Pertumbuhan dan Transformasi Wilayah Sulawesi
1.	**Memperkuat pusat-pusat pertumbuhan wilayah melalui percepatan realisasi investasi serta optimalisasi peran kawasan meliputi KEK/KI Palu, KEK Bitung, KI Takalar, serta DPP Manado- Likupang/KEK Likupang, DPP Wakatobi, dan DPP Toraja-Makassar-Selayar**
2	**Meningkatkan pengembangan kawasan perkotaan untuk mendukung pengembangan sektor industri dan pariwisata, termasuk WM Makassar dan WM Manado**

No.	Strategi Percepatan Pertumbuhan dan Transformasi Wilayah Sulawesi
3	Mempercepat pengembangan infrastruktur penghubung antarwilayah yang meliputi pembangunan infrastruktur untuk meningkatkan keterkaitan kawasan strategis dengan kawasan penyangganya, serta infrastruktur laut dan udara yang dapat menghubungkan pusat- pusat pertumbuhan di Wilayah Sulawesi dengan wilayah lainnya.
4	Memperkuat forum kerja sama regional Wilayah Sulawesi serta meningkatkan investasi melalui perbaikan pelayanan perizinan untuk meningkatkan daya saing wilayah
5	Meningkatkan kepastian hukum hak atas tanah melalui pemberian sertipikat hak atas tanah.
6	Mempercepat proses penyusunan dan penetapan rencana tata ruang baik RTRW maupun RDTR sebagai acuan pemberian kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang melalui pemberian bimbingan dan bantuan teknis kepada pemerintah daerah.

Tabel IV. 5
Strategi Pemerataan Intrawilayah Sulawesi

No.	Strategi Pemerataan Intrawilayah Sulawesi
1	Memperluas cakupan dan kualitas pelayanan dasar, melalui percepatan penerapan SPM khususnya di bidang pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan rakyat (air minum dan sanitasi), permukiman dan sosial, serta pengelolaan sampah dan limbah. Fokus peningkatan bidang pendidikan diselaraskan dengan kebutuhan *input* industrialisasi Wilayah Sulawesi, yaitu pendidikan menengah, pendidikan kejuruan/vokasional, dan
2	Meningkatkan pengembangan produk unggulan di kawasan perdesaan, kawasan transmigrasi, kawasan perbatasan dan pulau-pulau terluar, serta daerah tertinggal
3	Mempercepat penyambungan jaringan transportasi pengumpan (*feeder*) yang menghubungkan kota-kota kecil dan kawasan perdesaan dengan jaringan transportasi utama Trans Sulawesi.
4	Meningkatkan tata kelola dan kapasitas pemerintah daerah dan desa (aparatur, kelembagaan, dan keuangan) melalui penyelarasan kualitas dan kuantitas ASN dengan sektor unggulan kewilayahan Sulawesi serta peningkatan pendapatan
5	Mengoptimalkan fungsi dan peran GWPP dalam memperkuat sinergi pusat-daerah, peningkatan daya saing, dan inovasi daerah
6	Menguatkan upaya pengurangan risiko bencana dan memantapkan pemulihan kondisi sosial ekonomi akibat dampak bencana di berbagai wilayah di Sulawesi, khususnya di Provinsi Sulawesi Tengah dan Sulawesi Barat

Pada tahun 2023, sasaran utama pengembangan Wilayah Sulawesi difokuskan pada (1) terakselerasinya laju pertumbuhan ekonomi, (2) menurunnya tingkat kemiskinan, dan (3) meningkatnya lapangan kerja yang berkualitas. Adapun target pengembangan Wilayah Sulawesi tertuang dalam Tabel 2.22. Sasaran utama pembangunan Wilayah Sulawesi ditetapkan dengan mempertimbangkan adanya pemulihan kondisi sosial ekonomi masyarakat setelah terdampak pandemi COVID-19.

Adapun target pembangunan wilayah Sulawesi sesuai dengan Rancangan RKP 2023 sebagai mana pada table IV.4 berikut ini.

Tabel IV. 6
Target Pengembangan Wilayah Sulawesi Tahun 2023

Target Wilayah Sulawesi Tahun 2023	
Pertumbuhan Ekonomi	**7,1% - 7,8%**
Kemiskinan	**8.8%-8.3%**
TPT	**4,7% - 4,2%**
IPM	**67,73 – 74,45**
Gini Rasio	**0,323 – 0,402**

Sumber: Rancangan RKP tahun 2023

Adapun target ekonomi makro pada tahun 2023 di wilayah sulawesei adalah sebagi berikut

Tabel IV. 7
Target Pengembangan Wilayah Sulawesi Per Provinsi Tahun 2023
(Persen)

Target Tahun 2023						
Indikator	Sulawesi Utara	Sulawesi Tengah	Sulawesi Selatan	Sulawesi Tenggara	Gorontalo	Sulawesi Barat
Pertumbuhan Ekonomia)	5,3–6,0	9,9–10,9	6,7–7,3	6,5-7,3	6,3–6,9	**5,5–6,2**
Tingkat Kemiskinanb)	5,83–6,50	8,85–9,50	7,75–8,00	9,15–10,00	12,87–14,00	**9,51-10,00**
Tingkat Pengangguran Terbukab)	**6,27–6,92**	**2,98–3,36**	**4,95–5,50**	**3,16–3,73**	**2,80–2,96**	**2,52–3,00**

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2022.

Keterangan: a) Target tahun 2023 merupakan *assessment* Kementerian PPN/Bappenas dengan mempertimbangkan dampak COVID-19 dan angka realisasi triwulan IV-2021 dan b) Target tahun 2022 merupakan hasil proyeksi Kementerian PPN/Bappenas setelah mempertimbangkan dampak COVID-19 dan *assessment* terakhir pertumbuhan ekonomi wilayah.

4.2.2. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023

Prioritas Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023 merupakan agenda tahunan pembangunan pemerintah daerah yang dijabarkan dari Perubahan RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023 dan mengacu pada prioritas nasional yang termuat pada RPJMN tahun 2020-2024 dan RKP Tahun 2023. Prioritas pembangunan daerah dirumuskan sebagai upaya untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan daerah, isu strategis dan disusun berdasarkan arah kebijakan Perubahan RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023 serta untuk menjamin sinergitas pembangunan nasional dan daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka ditetapkan tema pembangunan daerah tahun 2023 yaitu ***Pemantapan Kesejahteraan melalui Pembangunan Manusia yang Produktif dan Berkarakter***, dengan prioritas pembangunan sebagai berikut:

1. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik
2. Penguatan infrastruktur wilayah
3. Pengembangan kawasan pusat pertumbuhan
4. Penurunan kesenjangan sosial ekonomi
5. Peningkatan Pembangunan manusia
6. Pemberdayaan ekonomi kerakyatan melalui hilirisasi komoditas
7. Pelestarian lingkungan hidup

Dalam mencapai prioritas pembangunan tersebut, maka pembangunan daerah Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2023 difokuskan pada sasaran sebagai mana pada table IV.6 berikut:

Tabel IV. 8
Prioritas dan sasaran pembangunan Tahun 2023

No.	Prioritas Pembangunan Daerah	Tujuan dan Sasaran Prioritas	Indikator Kinerja Sasaran Pembangunan		Satuan	Target		
						RKPD Tahun 2023	P-RPJMD	Ranc-RKP
1	Pemantapan Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Meningkatkan tata kelola penyekenggaraan pemerintahan yang baik	1	Indeks Reformasi Birokrasi	Huruf/ angka	A (81 – 90)	A (81 – 90)	
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah	2	Nilai SAKIP Provinsi	Huruf/ angka	A (>80–90)	A (>80–90)	
		Berkembangnya inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan public	3	Indeks Pelayanan Publik	Huruf/ angka	A (4,51 – 5,0)	A (4,51 – 5,0)	
2	Penguatan infrastruktur wilayah	Meningkatkan pemerataan infrastruktur wilayah	4	Indeks Williamson	Angka	0,567-0,607	0,607	
		Meningkatnya aksesibilitas infrastruktur wilayah	5	Indeks Layanan Infrastruktur	Angka	83,4	83,4	
3	Pengembangan kawasan pusat pertumbuhan	Meningkatkan Kesejahteraan masyarakat secara merata	6	PDRB Perkapita ADHB	Rp. Juta	65,98	65,98	
			7	Tingkat Kemiskinan	%	7,45	7,45	**7,75 – 8,00**
		Meningkatnya penyerapan tenaga kerja sektor unggulan daerah	8	Tingkat Pengangguran terbuka	%	5,69	5,69	**4,95 – 5,50**

No.	Prioritas Pembangunan Daerah	Tujuan dan Sasaran Prioritas	Indikator Kinerja Sasaran Pembangunan		Satuan	Target		
						RKPD Tahun 2023	P-RPJMD	Ranc-RKP
4	Penurunan kesenjangan sosial ekonomi	Menurunya kesenjangan Pendapatan antar lapisan masyarakat	9	Rasio Gini	Angka	0,376-0,381	0,381	**0,375 – 0,378**
5	Akselerasi pembangunan Sumber daya manusia	Meningkatkan Kualitas SDM yang Kompetitif, Inklusif dan Berkarakter	10	IPM	Angka	73,17	73,05	**73,50 – 73,53**
		Meningkatnya Kualitas dan Pemerataan Pendidikan	11	Indeks Pendidikan	Angka	67,05	67,05	
		Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	12	Indeks Kesehatan	Angka	78,23	77,86	
		Meningkatnya keberdayaan perempuan dalam pembangunan	13	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Angka	77.23	77.23	
		Meningkatnya aktualisas nilai-nilai agama dan budaya dalam kehidupan masyarakat	14	Angka kriminalitas	Kasus	24,438	24,438	
6	Pemberdayaan ekonomi kerakyatan melalui hilirisasi komoditas	Meningkatkan Produktivitas dan Nilai Tambah Produk Unggulan Daerah	15	Pertumbuhan Ekonomi	%	5,06–6,59	5,04–6,52	**6,70 – 7,30**
		Meningkatnya hilirisasi ekonomi sektor unggulan daerah	16	Produktifitas Total Daerah	Rp/-Angkatan Kerja	77.349.122	77.349.122	

No.	Prioritas Pembangunan Daerah	Tujuan dan Sasaran Prioritas	Indikator Kinerja Sasaran Pembangunan		Satuan	Target		
						RKPD Tahun 2023	P-RPJMD	Ranc-RKP
7	Peningkatan Pelestarian lingkungan hidup	Meningkatkan kualitas lingkungan hidup secara berkelanjutan	17	IKLH	poin	74,07	72,84	74,07 (sesuai target SE KlHK No.4/2021)
		Terpeliharanya kualitas lingkungan hidup serta kemampuan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim	18	Potensi Penurunan emisi GRK (Juta Ton CO_2Eq)	Juta Ton CO2Eq	1,347	1,347	

Prioritas Pembangunan Tahun 2023 tersebut dimaksudkan untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan pembangunan tahun sebelumnya dan isu strategis daerah. Sinkronisasi permasalahan dan isu strategis terhadap prioritas pembangunan tahun 2023, sebagai mana tabel IV.9 sebagai berikut:

Tabel IV. 9
Hubungan Permasalahan Pembangunan Daerah Dan Isu Strategis Terhadap Prioritas Pembangunan Tahun 2023

No.	Permasalahan Pembangunan	Isu Strategis Daerah	Prioritas Pembangunan Daerah	Tujuan dan Sasaran Prioritas	Indikator Kinerja Ssaaran
1	Belum optimalnya upaya peningkatan akuntabilitas kinerja pemerintahan	Belum optimalnya pelaksanaan tata kelola pemerintahan	Pemantapan Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik (1)	Meningkatkan tata kelola penyeLenggaraan pemerintahan yang baik	Indeks Reformasi Birokrasi
				Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah	Nilai SAKIP Provinsi
				Berkembangnya inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan public	Indeks Pelayanan Publik
2	Belum optimalnya upaya peningkatan pemerataan infrastruktur wilayah	Belum meratanya pembangunan infrastruktur dan konektivitas antar wilayah	Penguatan infrastruktur wilayah (2)	Meningkatkan pemerataan infrastruktur wilayah	Indeks Williamson
				Meningkatnya aksesibilitas infrastruktur wilayah	Indeks Layanan Infrastruktur
			Pengembangan kawasan pusat pertumbuhan (3)	Meningkatkan Kesejahteraan masyarakat secara merata	PDRB Perkapita AHB
					Tingkat Kemiskinan

No.	Permasalahan Pembangunan	Isu Strategis Daerah	Prioritas Pembangunan Daerah	Tujuan dan Sasaran Prioritas	Indikator Kinerja Ssaaran
				Meningkatnya penyerapan tenaga kerja sektor unggulan daerah	Tingkat Pengangguran terbuka
3	Belum optimalnya upaya pemerataan peningkatan kesejahteraan masyarakat	Belum optimalnya integrasi antar sector ekonomi dan ekosistem UMKM	Penurunan kesenjangan sosial ekonomi (4)	Menurunya kesenjangan Pendapatan antar lapisan masyarakat	Rasio Gini
4	Belum optimalnya upaya peningkatan kualitas SDM	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Diimbangi dengan Perluasan Kesempatan Kerj	Akselerasi pembangunan Sumber daya manusia (5)	Meningkatkan Kualitas SDM yang Kompetitif, Inklusif dan Berkarakter	IPM
				Meningkatnya Kualitas dan Pemerataan Pendidikan	Indeks Pendidikan
				Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Indeks Kesehatan
				Meningkatnya keberdayaan perempuan dalam pembangunan	Gender (IDG)
				Meningkatnya aktualisas nilai-nilai agama dan budaya dalam kehidupan masyarakat	Angka kriminalitas

No.	Permasalahan Pembangunan	Isu Strategis Daerah	Prioritas Pembangunan Daerah	Tujuan dan Sasaran Prioritas	Indikator Kinerja Ssaaran
5	Belum optimalnya upaya peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah	Hilirisasi komoditas unggulan berbasis sumber daya alam belum optimal	Pemberdayaan ekonomi kerakyatan melalui hilirisasi komoditas (6)	Meningkatkan Produktivitas dan Nilai Tambah Produk Unggulan Daerah	Pertumbuhan ekonomi
				Meningkatnya hilirisasi ekonomi sektor unggulan daerah	Produktifitas Total Daerah
6	Peningkatan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan serta peningkatan ketahanan bencana belum optimal	Belum Optimalnya Upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim serta peningkatan ketahanan bancana	Terpeliharanya kualitas lingkungan hidup serta kemampuan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim (7)	Meningkatkan kualitas lingkungan hidup secara berkelanjutan	IKLH
				Terpeliharanya kualitas lingkungan hidup serta kemampuan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim	Potensi Penurunan emisi GRK (Juta Ton CO2Eq)

Prioritas Pembangunan 2023 yang merupakan penjabaran dari Visi/Misi dan arah kebijakan RPJMD 2018-2023 sebagai mana pada tabel IV. 10 yang menggambarkan arah kebijakan RPJMD terhadap Prioritas Pembangunan Daerah tahun 2023 sebagai berikut.

Tabel IV. 10
Keterkaitan Misi RPJMD dengan Prioritas Pembangunan Daerah untuk Tahun 2023

No.	Misi RPJMD	Prioritas Pembangunan Daerah	Tujuan dan Sasaran Prioritas	Indikator Kinerja Sasaran Pembangunan	
1	Mewujudkan Pemerintahan yang Berorientasi Melayani dan Inovatif (1)	Pemantapan Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Meningkatkan tata kelola penyekenggaraan pemerintahan yang baik	1	Indeks Reformasi Birokrasi
			Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah	2	Nilai SAKIP Provinsi
			Berkembangnya inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan public	3	Indeks Pelayanan Publik
2	Mewujudkan Infrastruktur yang Berkualitas dan Aksesibel (2)	Penguatan infrastruktur wilayah	Meningkatkan pemerataan infrastruktur wilayah	4	Indeks Williamson
			Meningkatnya aksesibilitas infrastruktur wilayah	5	Indeks Layanan Infrastruktur
3	Mewujudkan Pusat-Pusat Pertumbuhan Ekonomi Baru yang Produktif (3)	Pengembangan kawasan pusat pertumbuhan	Meningkatkan Kesejahteraan masyarakat secara merata	6	PDRB Perkapita ADHB
				7	Tingkat Kemiskinan
			Meningkatnya penyerapan tenaga kerja sektor unggulan daerah	8	Tingkat Pengangguran terbuka
		Penurunan kesenjangan sosial ekonomi	Menurunya kesenjangan Pendapatan antar lapisan masyarakat	9	Rasio Gini
4	Mewujudkan Kualitas Manusia yang Kompetitif, Inklusif dan Berkarakter (4)	Akselerasi pembangunan Sumber daya manusia	Meningkatkan Kualitas SDM yang Kompetitif, Inklusif dan Berkarakter	10	IPM

No.	Misi RPJMD	Prioritas Pembangunan Daerah	Tujuan dan Sasaran Prioritas	Indikator Kinerja Sasaran Pembangunan	
			Meningkatnya Kualitas dan Pemerataan Pendidikan	11	Indeks Pendidikan
			Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	12	Indeks Kesehatan
			Meningkatnya keberdayaan perempuan dalam pembangunan	13	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)
			Meningkatnya aktualisas nilai-nilai agama dan budaya dalam kehidupan masyarakat	14	Angka kriminalitas
5	Meningkatkan Produktivitas dan Daya Saing Sumber daya Alam yang Berkelanjutan (5)	Pemberdayaan ekonomi kerakyatan melalui hilirisasi komoditas	Meningkatkan Produktivitas dan Nilai Tambah Produk Unggulan Daerah	15	Pertumbuhan Ekonomi
			Meningkatnya hilirisasi ekonomi sektor unggulan daerah	16	Produktifitas Total Daerah
		Peningkatan Pelestarian lingkungan hidup	Meningkatkan kualitas lingkungan hidup secara berkelanjutan	17	IKLH
			Terpeliharanya kualitas lingkungan hidup serta kemampuan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim	18	Potensi Penurunan emisi GRK (Juta Ton CO_2Eq)

4.2.3. Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Tahun 2023

4.2.3.1. Strategi Pembangunan Tahun 2023

Pencapaian sasaran pembangunan tahun 2023 yang merupakan penjabaran dari Perubahan RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan, didasarkan pada strategi yang dirumuskan dengan melakukan analisis berdasarkan kekuatan dan kelemahan serta peluang dan ancaman dalam mencapai sasaran. Strategi Salah satu upaya mencapai sasaran pembangunan daerah Sulawesi Selatan,

sebagaimana ditetapkan dalam kaidah pelaksanaan RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan adalah memperkuat peran pemangku kepentingan dalam mendukung pelaksanaan program pembangunan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan guna menjamin pencapaian kinerja pembangunan daerah secara optimal.

Strategi pembangunan daerah Sulawesi Selatan tertuang dalam RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023 yang disusun dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Sulawesi Selatan Tahun 2023. Strategi pembangunan daerah Sulawesi Selatan meliputi:

1. **Peningkatan kapabilitas dan keunggulan SDM aparatur serta inovasi dalam pelayanan publik;**

   Meningkatkan kapabilitas dan keunggulan SDM aparatur serta memanifestasikan kelembagaan pemerintahan yang bersih dan berakuntabilitas secara beriringan dengan pemanfaatan teknologi informasi untuk inovasi bagi pelayanan yang responsif. Berdasarkan Visi dan Misi yang disampaikan oleh Gubernur salah satu program nyata adalah Birokrasi Anti Korupsi dan Pendidikan Masyarakat Madani (Sulsel Bersih Melayani). Program nyata tersebut menekankan bahwa aspek pelayanan menjadi hal utama yang perlu diupayakan untuk meningkatkan pencapaian nilai Indeks Reformasi Birokrasi melalui implementasi 8 (delapan) area perubahan yang terdiri dari:

   1. **Manajemen Perubahan;** Mengubah sistem, pola pikir dan budaya kerja menjadi lebih baik yang sesuai dengan tujuan dan sasaran Reformasi Birokrasi
   2. **Penataan Peraturan Perundang-Undangan;** Meningkatkan efektivitas pengelolaan peraturan perundang-undangan
   3. **Penataan dan Penguatan Organisasi;** Meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi secara proporsional sesuai dengan kebutuhan, sehingga organisasi menjadi tepat fungsi dan tepat ukuran
   4. **Penataan Tata Laksana;** Meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem, proses, dan prosedur kerja
   5. **Penataan Sumber Daya Manusia;** Meningkatkan profesionalisme SDM aparatur di Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang didukung oleh sistem rekrutmen dan promosi aparatur berbasis kompetensi, transparan serta memperoleh gaji dan bentuk jaminan kesejahteraan yang sepadan
   6. **Penguatan Akuntabilitas Kinerja;** Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas kinerja birokrasi
   7. **Penguatan Pengawasan;** Mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN.
   8. **Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik;** Memberikan pelayanan yang lebih cepat, lebih murah, lebih mudah, dan lebih berkualitas.

Strategi peningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah yang terwujud pada Nilai SAKIP Provinsi yaitu Nilai A dengan rentang nilai 81 sampai dengan 90 dan berkembangnya inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang terwujud pada Nilai Indeks Pelayanan Publik yaitu Nilai A dengan nilai 4,51 – 5,0. Berdasarkan analisis

yang dilakukan, maka beberapa hal yang dibutuhkan guna meningkatkan pencapaian nilai akuntabilitas kinerja pemerintahan (SAKIP) Provinsi mencapai nilai A adalah:

a. Pengembangan kompetensi sumber daya aparatur;
b. Peningkatan pertsentase berkinerja baik dan sangat baik;
c. Penataan dan penguatan kelembagaan;
d. Peningkatan Nilai SAKIP OPD;
e. Pembinaan dan pengawasan administrasi dan keuangan daerah;
f. Peningkatan upaya penataan peraturan perundang-undangan;
g. Peningkatan kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah.
h. Implementasi e-governmentt.

Selain itu, Indeks Pelayanan Publik untuk menilai kualitas penyelenggaraan pelayanan dasar. Beberapa hal yang dilakukan guna meningkatkannya antara lain:

a. Pengembangan inovasi daerah.
b. Pengelolaan informasi publik.
c. Penataan organisasi.

2. Peningkatan jangkauan dan kualitas infrastruktur wilayah;

Meningkatkan jangkauan dan kualitas infrastruktur wilayah dalam membuka wilayah terisolir, memperkuatan inter-koneksivitas pusat-pusat pertumbuhan ekonomi dan mendukung pencapaian target-target pembangunan secara berkelanjutan. Pembangunan kewilayahan Sulawesi Selatan saat ini masih menghadapi isu kesenjangan, baik kesenjangan secara ekonomi maupun sosial. Kesenjangan ekonomi ditunjukkan dari pertumbuhan ekonomi yang belum merata antar wilayah, dan kesenjangan pendapatan antar kelompok masyarakat yang masih cukup tinggi. Sedangkan kesenjangan sosial ditunjukkan dengan tingginya jumlah penduduk miskin di wilayah tertentu. Sebagai salah satu upaya untuk mengurangi tingginya kesenjangan ekonomi yang menyebabkan timbulnya kemiskinan dan pengangguran, maka distribusi pendapatan masyarakat melalui pemerataan pembangunan wilayah perlu untuk mendapatkan perhatian yang seksama, sehingga berdampak pada semakin meratanya distribusi pendapatan masyarakat.

Sasaran pembangunan Sulawesi Selatan menargetkan peningkatan indeks layanan infrastruktur. Peningkatan tersebut diharapkan dapat tercapai melalui upaya:

a. Membangun konektivitas antar wilayah dengan mengoptimalkan pemanfaatan jalur tol laut melalui peningkatan peran pelabuhan, khususnya pelabuhan pengumpan regional;
b. Mengoptimalkan aksesibilitas pada daerah terisolir dan daerah-daerah yang memiliki potensi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi wilayah di Kabupaten/Kota dan melakukan peningkatan kualitas jalan Provinsi secara terintegrasi melalui berbagai sumber pembiayaan;

c. Mengoptimalkan ketersediaan infrastruktur jaringan irigasi untuk mendukung penyediaan prasarana irigasi sektor pertanian;
d. Mengoptimalkan pemenuhan listrik bagi masyarakat serta peningkatan mutu pelayanan pada wilayah usaha penyediaan ketenagalistikan;
e. Pemenuhan sarana, prasarana dan utilitas, khususnya akses air minum dan akses sanitasi aman dan layak serta jalan lingkungan pada kawasan permukiman khususnya pada daerah rawan air, serta wilayah pesisir, dan kepulauan; dan
f. Pembangunan system penyediaan air minum regional.

3. Pengembangan komoditas sektor unggulan pada kawasan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru;

Dalam rangka pengembangan komoditas sektor unggulan dilakukan melalui dukungan sarana-prasarana pada kawasan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru serta mengoptimalkan peran sumber-sumber pertumbuhan pada kawasan tersebut disertai dengan penanggulangan kemiskinan. RTRWN dan RTRWP menetapkan pusat-pusat kegiatan yang merupakan kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai pusat kegiatan industri dan jasa, secara berjenjang berupa Pusat Kegiatan Nasional (PKN), Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) dan Pusat Kegiatan Lokal (PKL). Penetapan pusat kegiatan di Provinsi Sulawesi Selatan sebagaimana yang diatur dalam RTRWN dan RTRWP Sulawesi Selatan terdiri dari: Pusat Kegiatan Nasional (PKN) ditetapkan di Kawasan Perkotaan Makassar, Maros, Sungguminasa, dan Takalar (Mamminasata), Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) ditetapkan di Kawasan Perkotaan Bulukumba, Kawasan Perkotaan Jeneponto, Kawasan Perkotaan Pangkajene Kabupaten Pangkajene Kepulauan, Kawasan Perkotaan Barru, Kawasan Perkotaan Watampone di Kabupaten Bone, Kota Parepare dan Kota Palopo. Sedangkan Pusat Kegiatan Lokal (PKL) ditetapkan di kawasan perkotaan Bantaeng, kawasan perkotaan Enrekang, kawasan perkotaan Masamba, kawasan perkotaan Belopa, kawasan perkotaan Malili, kawasan perkotaan Pinrang/Watansawitto, kawasan perkotaan Pangkajene, Kawasan Ekonomi Khusus Emas di Kabupaten Barru, kawasan perkotaan Bantaeng dan kawasan perkotaan Pamatata, kawasan perkotaan Sinjai, kawasan perkotaan Watansoppeng, kawasan perkotaan Makale, kawasan perkotaan Rantepao, dan kawasan perkotaan Sengkang.

Berdasarkan pada kebijakan pengembangan wilayah yang diarahkan pada peningkatan kesejahteraan rakyat, maka pengembangan wilayah Sulawesi Selatan diarahkan ke dalam 5 wilayah pengembangan yang diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi masing-masing kawasan dan sekitarnya, yaitu meliputi: Kawasan Makassar dan sekitarnya, Kawasan Bulukumba dan sekitarnya, Kawasan Watampone dan sekitarnya, Kawasan Parepare dan sekitarnya, serta Kawasan Palopo dan sekitarnya.
Pengembangan komoditas unggulan pada pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru dengan memanfaatkan potensi dan keunggulan daerah diharapkan akan meningkatkan penyerapan tenaga kerja di Sulawesi Selatan yang akan diwujudkan melalui upaya sebagai berikut:

a. Pengembangan destinasi wisata berkualitas yang didukung oleh peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana penunjang pariwisata pada kawasan strategis pariwisata nasional (KSPN) maupun kawasan strategis pariwisata daerah (KSPD), khususnya pada Kawasan Toraja dan Kawasan Takabonerate yang memegang peran sebagai KSPN sekaligus serta pembangunanan potensi wisata baru berbasis Rest Area yang berbasis pemberdayaan masyarakat guna meningkatkan ekonomi masyarakat;
b. Penguatan konektivitas antara pusat-pusat kegiatan, antara kawasan perdesaan dengan kawasan perkotaan, maupun antar kawasan perdesaan khususnya pada daerah terisolir melalui pembangunan infrastruktur wilayah yang terpadu dan terintegrasi antar moda transportasi guna menghubungkan lokasi produksi usaha mikro dan kecil kepada pusat pertumbuhan;
c. Pengembangan pusat-pusat pertumbuhan melalui penyediaan bahan baku yang mendukung peningkatan produksi ekonomi unggulan serta memacu pembangunan kawasan berbasis sumber daya alam dan jasa kemaritiman.

4. Pembangunan dan Pengembangan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif.

Sasaran pembangunan pariwisata dan ekonomi kreatif adalah meningkatnya kontribusi sektor pariwisata dan ekonomi kreatif terhadap ketahanan ekonomi daerah. Hal inidapat terwujud melalui pariwisata yang berkualitas (quality tourism experience), pariwisata yang berbasis ekonomi kreatif maupun pertumbuhan nilai tambah ekonomi kreatif yang diharapkan dapat menjadi penggerak ekonomi nasional. Hal ini dapat terwujud melalui pembangunan 5 pilar strategis pariwisata dan ekonomi kreatif, yaitu Pilar destinasi pariwisata dan produk ekonomi kreatif, Pilar pemasaran pariwisata dan ekonomi kreatif, Pilar industri pariwisata dan ekonomi kreatif, Pilar SDM dan kelembagaan pariwisata dan ekonomi kreatif serta Pilar kreativitas.

Pembangunan dan Pengembangan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif diarahkan untuk:

a. Peningkatkan kesiapan destinasi pariwisata berdasarkan prioritas secara komprehensif, terintegrasi dan berkelanjutan yang menekankan kepada pengembangan dan pengelolaan destinasi pariwisata nasional dan daerah dalam menarik wisatawan mancanegara maupun wisatawan nusantara
b. Diversifikasi produk pariwisata yang bernilai tambah tinggi yang menitikberatkan pada pengembangan produk pariwisata yang mempunyai nilai tambah tinggi serta unik, sehingga menarik minat wisatawan dan pengembangan produk wisata tersebut harus mendukung pelestarian lingkungan.
c. Pemasaran Pariwisata dan ekonomi kreatif berorientasi hasil dengan fokus pasar potensial. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan nilai transaksi wisatawan dibanding dengan volume atau jumlah wisatawan yang datang.

d. Perluasan pangsa pasar produk ekonomi kreatif. Hal ini dimaksudkan untuk menekankan pada perluasan segmen pasar untuk produk-produk ekonomi kreatif. Perluasan pasar yang dilakukan tidak hanya pangsa pasar dalam negeri, namun juga pangsa pasar luar negeri. Perluasan pangsa pasar produk ekonomi kreatif diharapkan dapat meningkatkan jangkauan maupun transaksi produk ekonomi kreatif Indonesia sehingga mampu berkontribusi lebih dalam mewujudkan pondasi ketahanan ekonomi nasional yang berkelanjutan.
e. Meningkatkan citra pariwisata daerah yang berdaya saing yang menitikberatkan pada pembangunan citra (branding) pariwisata nasional meliputi citra bangsa (national branding), citra daerah/wilayah di Indonesia (regional branding) maupun citra destinasi pariwisata Indonesia (destination branding). Pengembangan citra dilakukan secara bertahap, mulai dari pengenalan, peningkatan awareness hingga citra pariwisata daerah menjadi top of mind tujuan pariwisata.
f. Pemanfaatan teknologi dalam mendukung pemasaran pariwisata dan ekonomi kreatif. Kehadiran teknologi berperan penting dalam mempermudah kehidupan masyarakat dalam berbagai hal, salah satunya sektor pariwisata. Oleh karenanya, digital marketing akan digunakan dalam pemasaran pariwisata dengan berkolaborasi dengan konten creator dan influencer.
g. Mendorong peningkatan investasi, pendanaan, dan akses pembiayaan secara merata di industri pariwisata dan ekonomi kreatif. Hal ini fokus pada upaya mendapatkan investasi, baik dalam maupun luar negeri. Serta upaya mendapatkan pendanaan dan akses pembiayaan usaha pariwisata dan ekonomi kreatif secara merata sehingga diharapkan dapat mendukung tercapainya pemerataan ekonomi
h. Melakukan penguatan komunitas dan kelembagaan pariwisata dan ekonomi kreatif yang fokus kepada penguatan komunitas maupun kelembagaan pariwisata dan ekonomi kreatif. Peran masyarakat sangat penting dalam pembangunan pariwisata dan ekonomi kreatif. Berjalannya komunitas dan kelembagaan masyarakat di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif akan mampu mendorong pertumbuhan bidang ini secara signifikan, merata dan menyeluruh.

5. Pengembangan dan peningkatan kualitas iklim usaha perekonomian daerah;

Penguatan peran pusat-pusat pertumbuhan dengan memanfaatkan potensi dan keunggulan daerah diharapkan akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta pemerataan pendapatan antar lapisan masyarakat di Sulawesi Selatan yang akan diwujudkan melalui upaya sebagai berikut: Peningkatan pendapatan masyarakat melalui program BUMDES, UMKM, KUBE serta perhutanan sosial;

6. Peningkatan akses dan pemerataan layanan pendidikan menengah;

Meningkatkan keterjangkauan penduduk terhadap layanan pendidikan

dalam rangka pemerataan akses layanan pendidikan menengah melalui penyediaan sarana dan prasarana sekolah, pendistribusian tenaga pendidik, pengembangan pendidikan vokasional serta meningkatkan kualitas belajar mengajar pada pendidikan menengah umum dalam meningkatkan kelulusan pada pendidikan tinggi bereputasi. Perbaikan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan vokasional merupakan salah satu variabel yang dapat meningkatkan kualitas tenaga kerja. Peningkatan kualitas manusia pada akhirnya akan berdampak terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan kompetensi sumber daya manusia. Peningkatan kompetensi sumber daya manusia Sulawesi Selatan akan diarahkan pada kebutuhan dunia usaha, khususnya pada sektor jasa dan industri yang dapat menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar dan dapat menggerakkan PDRB Sulawesi Selatan melalui strategi antara lain:

a. Peningkatan akses layanan Pendidikan menengah yang merata. Pemerataan dan perluasan akses pendidikan diarahkan pada upaya memperluas daya tampung satuan pendidikan, serta memberikan kesempatan yang sama bagi semua peserta didik dari berbagai golongan masyarakat yang berbeda, baik secara sosial, ekonomi, gender, lokasi tempat tinggal dan tingkat kemampuan intelektual serta kondisi fisik. Kebijakan ini ditujukan untuk meningkatkan kapasitas penduduk Sulawesi Selatan untuk dapat belajar sepanjang hayat dalam rangka peningkatan daya saing bangsa di era glogal, serta meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).
b. Mendorong Kabupaten/kota untuk pelaksanaan Penuntasan wajib belajar Pendidikan dasar 9 tahun.
c. Meningkatkan kemampuan daya saing peserta didik untuk melanjutkan ke perguruan tinggi negeri yang bereputasi melalui
d. Mengupayakan untuk menangani secara lebih efektif target-target masyarakat yang tidak terjangkau (miskin, terpencil, terisolasi) melalui pendekatan dan program pendidikan alternatif, untuk meningkatkan persamaan akses pendidikan semua jenjang melalui peningkatan koordinasi dan sinkronisasi dengan para stake holder Pendidikan.
    a. Penanganan anak tidak sekolah melalui penyusunan dan implementasi Rencana Aksi Percepatan Penanganan Anak Tidak Sekolah (RA-PPATS) Di Sulawesi Selatan yang bertujuan untuk mendorong peningkatan angka partisipasi murni dan angka partisipasi kasar peserta didik ; meningkatkan perluasan akses pendidikan dan pelatihan; mendorong peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM); pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan bermutu minimal sampai ke jenjang pendidikan menengah atas ; dan memberikan pendidikan minimal bagi peserta didik untuk dapat mengembangkan potensi dirinya agar dapat hidup mandiri secara layak di dalam masyarakat atau melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi
e. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia melalui penguatan kewirausahaan berupa penataan kurikulum kewirausahaan di lembaga

pendidikan formal untuk mengoptimalkan penyerapan lulusan SMK pada dunia usaha dan industri;

f. Meningkatkan sarana prasarana SMK untuk mendukung *link and match* antara sekolah vokasi dengan dunia industri.

g. Selain peningkatan kompetensi sumber daya manusia, peningkatan moralitas dan karakter peserta didik dan tenaga kependidikan dilakukan melalui upaya penambahan kurikulum muatan lokal dalam proses belajar mengajar.

7. **Peningkatan pemenuhan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan dan olahraga;**

Meningkatkan keterpenuhan sarana-prasarana pelayanan kesehatan berbasis regional secara beriringan dengan upaya preventif dalam penanganan kesehatan dan meningkatkan kualitas/kuantitas sarana parasarana olahraga serta meningkatkan prestasi keolahragaan melalui peningkatan koordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota dan organisasi olah raga. Kesehatan masyarakat merupakan investasi bagi pembangunan sumberdaya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomi. Beberapa terobosan telah dilakukan dalam pembangunan kesehatan, namun sampai saat ini berbagai upaya dan terobosan tersebut belum cukup untuk meningkatkan akses dan mutu layanan kesehatan di Sulawesi Selatan. Pembangunan kesehatan sebagai salah satu pelayanan dasar masyarakat khususnya di Sulawesi Selatan dihadapkan pada tantangan peningkatan upaya promotof dan preventif, peningkatan pelayanan kesehatan ibu dan anak, penurunan disparitas akses dan mutu pelayanan kesehatan serta pemenuhan sarana prasarana dan mutu pelayanan kesehatan. Olahraga merupakan salah satu upaya yang terkait dengan peningkatan upaya promotif dan preventif dalam pembangunan kesehatan. Olahraga selain berdampak terhadap peningkatan derajat kesehatan masyarakat juga merupakan modal sosial dengan membentuk watak bangsa yang akan diperoleh melalui strategi penumbuhan budaya olahraga dan prestasi.

Kinerja pembangunan kesehatan di Sulawesi Selatan pada dasarnya sudah berada di atas rata-rata kinerja pembangunan nasional. Permasalahan yang masih harus menjadi perhatian di Sulawesi Selatan antara lain adalah belum optimalnya peran upaya kesehatan berbasis masyarakat, belum optimalnya pemenuhan tenaga kesehatan dan penunjang kesehatan, khususnya pada rumah sakit di Kabupaten/Kota, dan pelayanan kesehatan ibu dan anak.

Memperhatikan gambaran tersebut, maka penanganan pembangunan kesehatan di Sulawesi Selatan akan dilakukan melalui strategi:

a. Penurunan disparitas akses dan mutu pelayanan kesehatan melalui pembangunan rumah sakit regional dan ambulance siaga;
b. Pemenuhan sarana prasarana dan tenaga kesehatan, khususnya pada daerah terisolir dan pulau-pulau kecil;
c. Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan terutama kepada ibu, anak, remaja dan lansia;

d. Peningkatan akses dan partisipasi masyarakat secara luas dan merata untuk meningkatkan kesehatan dan kebugaran jasmani melalui pengembangan dan pembinaan olahraga.

e. Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan yang difokuskan pada penguatan pelayanan kesehatan ibu dan anak dan kesehatan reproduksi, pelayanan gizi, pelayanan kesehatan usia lanjut, serta pengendalian penyakit didukung dengan percepatan penguatan sistem kesehatan nasional dan pembudayaan masyarakat hidup sehat;

8. **Peningkatan peran dan kapasitas perempuan, anak dan disabilitas dalam pembangunan;**

Meningkatkan peran dan kapasitas perempuan dalam pembangunan serta mengembangkan kelembagaan penyedia layanan pemberdayaan perempuan, perlindungan perempuan dan anak, peningkatan kualitas keluarga dan pemenuhan hak anak dan peningkatan upaya pencegahan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak merupakan kewajiban pemerintah dan pemerintah daerah. Pemerintah Provinsi sebagaimana amanat UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memiliki kewenangan melakukan penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender di provinsi yang akan dilaksanakan melalui strategi:

Meningkatkan kualitas anak, perempuan, dan pemuda. Peningkatan perlindungan anak difokuskan pada:

a. Penguatan layanan penanganan kekerasan terhadap anak secara terpadu, termasuk di ranah daring;
b. Optimalisasi pencegahan perkawinan anak dan penarikan pekerja anak dari pekerjaan terburuk dengan melibatkan berbagai pihak;
c. Optimalisasi pengasuhan berbasis hak anak pada lingkungan keluarga dan lembaga pengasuhan alternatif;
d. Peningkatan koordinasi dan sinergi pemenuhan hak anak dalam kondisi khusus termasuk anak yang berhadapan dengan hukum;
e. Peningkatan partisipasi anak dalam pembangunan; dan
f. Penciptaan lingkungan ramah anak

Peningkatan kesetaraan gender, pemberdayaan, dan perlindungan perempuan difokuskan pada:

a. Percepatan pelaksanaan pengarusutamaan gender (PUG) di daerah, dan desa melalui perbaikan tata kelola;
b. Perluasan akses, peran, dan keterlibatan perempuan dalam ekonomi dan ketenagakerjaan, termasuk perempuan kelompok miskin, kepala keluarga, disabilitas, serta penyintas kekerasan dan bencana, melalui peningkatan kapasitas, literasi keuangan, literasi digital, dan optimalisasi teknologi, informasi dan komunikasi;
c. Peningkatan keterwakilan perempuan di legislatif melalui optimalisasi pendidikan politik dan kaderisasi di tingkat nasional dan daerah;
d. Penguatan upaya pencegahan dan penanganan KTP, melalui KIE yang berkesinambungan, pelibatan laki-laki dalam mencegah dan menangani kekerasan, penerapan regulasi pencegahan dan penanganan KTP di satuan pendidikan dan tempat kerja, peningkatan cakupan dan kualitas layanan KTP yang terpadu dan komprehensif, serta peningkatan kolaborasi multipihak antarlembaga penyedia layanan;

e. Penguatan tata kelola layanan melalui peningkatan kapasitas SDM lembaga layanan termasuk Aparat Penegak Hukum (APH), penguatan sistem pencatatan dan pelaporan KTP, standardisasi lembaga layanan, percepatan pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA),

Meningkatkan layanan disabilis difokuskan pada:

a. Penguatan layanan terhadap penyandang disabilitas ;
b. Peningkatan sarana prasarana kebutuhan disabilitas;
c. Peningkatan koordinasi dan sinergi pemenuhan hak penyandang disabilitas;
d. Peningkatan partisipasi penyandang disabilitas dalam pembangunan; dan
e. Penciptaan lingkungan ramah disabilitas

9. Peningkatan moralitas dan karakter masyarakat Sulawesi Selatan berlandaskan nilai-nilai agama dan nilai-nilai budaya dalam kehidupan masyarakat

Setiap daerah memiliki identitas sosial dan karakter masyarakat yang mencerminkan nilai-nilai luhur budaya dan agama yang merupakan modal dasar pembangunan daerah. Kekayaan nilai-nilai luhur budaya dan keagamaan yang kental dan khas di Provinsi Sulawesi Selatan membuktikan dapat menjadi perekat dalam pembangunan ketentraman dan kedamaian sosial. Karakteristik ini harus terus dikembangkan menjadi karakter dasar masyarakat Sulawesi Selatan, yang dimanifestasikan pada seluruh aspek kehidupan melalui:

a. Meningkatkan Pemahaman nilai keagamaan dan budaya lokal, pencegahan konflik berbasis masyarakat. Untuk memperkuat landasan kehidupan masyarakat Sulawesi Selatan yang semakin religius, toleran, juga dilakukan upaya peningkatan peran tokoh agama dan guru agama serta Lembaga keagamaan. Hal ini sebagai upaya untuk membangun hubungan yang harmonis menuju kehidupan yang saling menghormati, serta terwujudnya kehidupan yang aman dan nyaman tanpa adanya diskriminasi.
b. Meningkatkan edukasi tentang keberagaman, toleransi, spiritualisme, kehidupan bernegara, edukasi politik kepada seluruh lapisan masyarakat sejak usia dini, kepada anak-anak usia sekolah, serta didukung upaya peningkatan koordinasi dan kerjasama dengan pemangku kepentingan yang berkaitan dengan keberagaman, toleransi, kewarganegaraan, dan politik;
c. Meningkatkan koordinasi penanganan dengan berbagai pihak dalam rangka menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat serta pencegahan tindak kriminal termasuk kekerasan terhadap perempuan, anak dan disabilitas dengan fokus pada peningkatan kebebasan sipil masyarakat, peningkatan kualitas kehidupan masyarakat yang harmonis pada aspek kerukunan dan ketertiban sosial, serta menjaga kerukunan antar umat beragama.

10. Penguatan ekonomi kerakyatan melalui hilirisasi pengelolaan komoditas berbasis sumber daya alam, pengembangan ekonomi maritim, dan pemulihan ekonomi akibat pandemic covid-19;

1) Hilirisasi pengelolaan komoditas berbasis sumber daya alam,

Memperkuat ekonomi kerakyat an melalui hilirisasi pengelolaan komoditas berbasis sumberdaya alam dengan dukungan sarana-prasarana pada proses produksi, pengolahan dan pemasaran yang berorientasi pada ketahanan pangan dan energi serta perbaikan pendapatan masyarakat. Berdasarkan analisis pertumbuhan, terlihat pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan lima tahun terakhir berfluktuatif. Pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan diharapkan tumbuh secara inklusif, efektif mengurangi angka kemiskinan, menurunkan ketimpangan, dan menyediakan lapangan kerja baru bagi para pencari kerja. Oleh karena itu, untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif di Sulawesi Selatan, maka perlu untuk mendorong pertumbuhan sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan berada di atas pertumbuhan ekonomi. Dinamika sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan tampaknya berasosiasi dengan dinamika kemiskinan di wilayah perdesaan. Sebagian besar penduduk miskin di Sulawesi Selatan bermukim di wilayah perdesaan yang bercorak pertanian. Oleh karena itu dibutuhkan hilirisasi industri komoditas unggulan, terutama komoditas rumput laut, kakao, dan jagung. Hilirisasi ini diperlukan untuk meningkatkan nilai tambah (*added value*) dan memperluas lapangan kerja baru sehingga pada akhirnya dapat menekan angka pengangguran dan mengurangi kemiskinan. Pengembangan industru sektor pertanian, perikanan dan kehutanan yang mempunyai nilai tambah tinggi menciptakan kesempatan kerja.

Hilirisasi pengelolaan komoditas berbasis sumberdaya alam merupakan penjabaran visi/misi gubernur melalui penekanan pada upaya pemberdayaan ekonomi kerakyatan dengan mendorong hilirisasi komoditas Sulawesi Selatan yang didukung oleh upaya peningkatan produksi, komoditas pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan, sehingga komoditas unggulan tersebut mempunyai nilai tambah tinggi serta dapat menciptakan kesempatan kerja.

Pemerintah melalui kebijakan percepatan peningkatan populasi sapi yang diharapkan akan meningkatkan produksi daging lokal guna mewujudkan Indonesia sebagai Lumbung Pangan Asia pada Tahun 2045. Sebagai upaya mewujudkan Indonesia yang mandiri dalam pemenuhan pangan asal hewan, maka pemerintah menetapkan Sulawesi Selatan sebagai daerah sentra peternakan dengan sistem pemeliharaan semi intensif sekaligus sebagai Lumbung Ternak Nasional melalui program peningkatan sarana dan prasarana pertanian.

Peningkatan produksi perikanan sebagai sumberdaya kelautan dan jasa maritim merupakan upaya yang dapat mendukung percepatan pembangunan ekonomi wilayah, khususnya Sulawesi

Selatan. Salah satu komoditas perikanan yang volume ekspornya bertumbuh positif adalah ikan kerapu, namun memperhatikan rendahnya produksi kerapu di Sulawesi Selatan yang sangat dipengaruhi oleh skema produksi yang dilakukan nelayan maka sangat dibutuhkan upaya peningkatan manajemen budidaya dan penangkapan ikan kerapu dengan melakukan edukasi dan pelatihan terhadap kelompok nelayan guna meingkatkan jumlah produksi dan nilai kerapu tanpa merusak ekosistem kerapu di lautan. Melalui program pengelolaan perikaan tangkap dan budi daya guna meningkatkan produksi dan program pengelolaan dan pemasaran hasil perikana antara lain : rumput laut, karaginan, gurita, udang vanamae, tuna.

Komoditas perkebunan yang paling dominan di wilayah Sulawesi adalah kakao. Sulawesi merupakan produsen terbesar di Indonesia dengan memasok produksi kakao nasional. Sulawesi Selatan merupakan salah satu pusat pengembangan kakao unggulan di Indonesia yang saat ini telah didukung oleh ketersediaan pusat peneilitian dan pengembangan kakao yang akan berperan dalam meningkatkan produktivitas petani dengan melakukan pembinaan terhadap petani untuk memproduksi kakao berkualitas tinggi, sehingga Sulawesi Selatan dapat menjadi sentra benih kakao di Indonesia.

Disamping itu peningkatan produktivitas melalui perbaikan rantai pasok dan *reskilling* dan *upskilling* tenaga kerja; Percepatan pembangunan infrastruktur, amenitas dan atraksi di destinasi Pariwisata dengan dukungan investasi, *event*, dan *meeting, incentive, conference and exhibition*; (g) *scaling-up start-up* ekonomi kreatif dan digital yang didukung akses pembiayaan dan investasi; (h) pengintegrasian sistem perizinan di tingkat. Selanjutnya strategi yang mendukung fokus berkelanjutan yakni (a) peningkatan investasi utamanya di kawasan industri, serta yang berorientasi ekspor dan hijau; (b) perluasan penerapan protokol kesehatan dan standar layanan di pariwisata dan ekonomi kreatif; serta (c) fasilitasi kemudahan investasi hijau

Pengembangan ekonomi maritim dengan mengedepankan keberlanjutan dan kelestarian sumber daya kelautan dan perikanan. Pembangunan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sangat dipengaruhi oleh kualitas dan kuantitas sumberdaya hayati, nonhayati, dan jasa-jasa lingkungan yang tersedia. Pemanfaatan sumberdaya pesisir atau jasa lingkungan secara terarah dan berkelanjutan selain dapat memberikan dampak positif terhadap pelestarian sumberdaya pesisir dan pulau-pulau kecil, perluasan kesempatan kerja dan pertumbuhan ekonomi kelautan, juga dapat memperbaiki ekonomi masyarakat pesisir.

Pemanfaataan sumberdaya pesisir dan kelautan sesuai dengan kebijakan pengembangan pusat-pusat pertumbuhan dan hilirisasi komoditas ungggulan dengan memanfaatkan sumberdaya kelautan dan jasa maritim yang diiringi dengan upaya menjaga daya dukung

dan kelestarian fungsi lingkungan laut.

Pengembangan ekonomi maritim dan kelautan yang berkelanjutan diwujudkan melalui upaya sebagai berikut:

a. Pemanfaatan sumberdaya kelautan dan pengembangan potensi kawasan pessir untuk pembangunan ekonomi dan kesejahteraan nelayan dan masyarakat pesisir melalui pengembangan wisata bahari dan pulau-pulau kecil, peningkatan produksi kelautan dan perikanan;
b. Peningkatan dan pemeliharaan kualitas, daya dukung dan kelestarian fungsi lingkungan hidup dan sumber daya hayati laut melalui konservasi dan rehabilitasi kawasan pesisir;
c. Peningkatan aksesibilitas dan konektivitas antar kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil;
d. Pembangunan dan Pengembangan industri perkapalan.

2) Pemulihan ekonomi pasca pandemic covid-19

Pasca pandemi covid COVID-19 telah menghambat pencapaian sebagian besar pertumbuhan sektor ekonomi Sulawesi Selatan. Untuk itu, pertumbuhan ekonomi harus dapat memastikan untuk meningkatkan inklusivitas pertumbuhan ekonomi, dengan strategi : (1) mendorong peningkatan pendapatan masyarakat, untuk tetap menjaga stabilitas permintaan konsumsi; serta (2) menciptakan iklim investasi untuk mendorong peningkatan investasi daerah, selain untuk merespon permintaan konsumsi domestik juga ditujukan untuk mendorong produksi unggulan daerah dalam memenuhi standar kualitas permintaan pasar ekspor. (3) Meningkatkan perbaikan sistem perlindungan sosial, yang difokuskan pada penyempurnaan penyelenggaraan program bantuan dan jaminan sosial yang lebih akurat, terintegrasi, dan adaptif dengan strategi yang terdiri dari:

1. Perluasan cakupan kepesertaan jaminan sosial yang akan difokuskan kepada Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, khususnya sektor informal, melalui mekanisme kolaboratif;
2. Perluasan akses pelayanan dan penguatan tata kelola kelembagaan antarpenyelenggara jaminan sosial dan pemangku kepentingan terkait;
3. Peningkatan pemutakhiran, perluasan, dan transformasi data penduduk miskin dan rentan menjadi registrasi sosial-ekonomi melalui monografi desa/kelurahan digital secara berkala untuk meningkatkan ketepatan sasaran program, termasuk dalam penghapusan kemiskinan ekstrem;
4. Penguatan integrasi dan digitalisasi penyaluran program bantuan sosial;
5. Perluasan asesmen dan penjangkauan rehabilitasi sosial yang terintegrasi terhadap kelompok rentan, seperti anak, lanjut usia, penyandang disabilitas, pekerja sektor informal, korban bencana, penduduk terdampak pandemi COVID-19, korban perdagangan manusia, korban penyalahgunaan Narkotika, Alkohol, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya (NAPZA), penderita HIV/AIDS, dan kelompok

rentan lainnya;

6. Pengembangan perlindungan sosial yang adaptif terhadap bencana, termasuk bencana pandemi;

11. Peningkatan kualitas lingkungan hidup serta kemampuan adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim;

Mengintegrasikan tujuan pembangunan berkelanjutan pada pilar lingkungan dalam menyelaraskan upaya-upaya pemanfaatan jasa lingkungan dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan, serta meningkatkan kemampuan adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim serta mengimplementasikan pembangunan rendah karbon. Pembangunan berkelanjutan sebagai rencana aksi global dilaksanakan hingga tahun 2030 memiliki 5 prinsip dasar yaitu; *People, Planet, Prosperity, Peace dan Partnership* dalam 3 dimensi yaitu ekonomi, sosial dan lingkungan yang selaras. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/SDGs terdiri dari 17 Tujuan dan 169 Target yang difokuskan pada pelaksanaan 4 (empat) pilar pembangunan yaitu pilar pembangunan sosial, pilar pembangunan ekonomi, pilar pembangunan hukum dan tata kelola dan pilar pembangunan lingkungan secara terintegrasi.

Pilar pembangunan lingkungan dalan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan meliputi 6 (enam) tujuan pembangunan yaitu:

- Tujuan 6 Menjamin Ketersediaan serta Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi yang Berkelanjutan untuk Semua;
- Tujuan 11 Menjadikan Kota dan Permukiman Inklusf, Aman, Tangguh dan Berkelanjutan;
- Tujuan 12 Pola Konsumsi dan Produksi Berkelanjutan;
- Tujuan 13 Mengatasi Perubahan Iklim;
- Tujuan 14 Sumber Daya Maritim Berkelanjutan, dan ;
- Tujuan 15 Pengelolaan Ekosistem Teresterial Berkelanjutan.

KLHS RPJMD Tahun 2018-2023 menghasilkan skenario terkait integrasi pilar pembangunan lingkungan hidup dalam pembangunan Sulawesi Selatan yang merujuk pada Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Sulawesi Selatan meliputi:

a. Permukiman dengan akses layanan air minum dan sanitasi yang kurang memadai akan berdampak pada kualitas lingkungan dan derajat kesehatan masyarakat yang membutuhkan upaya tambahan guna mencapai sasaran pemenuhan pelayanan dasar masyarakat melalui pemenuhan kebutuhan air minum dan sanitasi layak pada wilayah pesisir, kepulauan dan daerah rawan air lainnya;
b. Mengembangkan kawasan perkotaan sebagai kawasan yang aman dan nyaman dihuni sesuai standar pelayanan perkotaan dengan meningkatkan pengelolaan sampah yang terpadu dan memperluas jangkauan transportasi umum serta mengoptimalkan kemampuan kawasan perkotaan untuk melakukan pencegahan, mitigasi dan penanggulangan bencana;
c. Mengoptimalkan pengelolaan danau di Sulawesi Selatan, khususnya pada Danau Tempe dan Danau Matano yang ditetapkan menjadi danau

prioritas Nasional sebagaimana yang telah dituangkan dalam Nota Kesepahaman Penyelamatan Danau Prioritas Nasional dan Pencanangan Revitalisasi Gerakan Penyelamatan danau dengan melaksanakan penyelamatan danau dengan mengacu pada Rencana Pengelolaan Danau Terpadu, mengintegrasikan penyelamatan danau prioritas ke dalam rencana pembangunan daerah dan rencana perangkat daerah, melaksanakan kerja sama dengan para pihak untuk mewujudkan danau yang sehat dan lestari, serta mendukung penyusunan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi kebijakan penyelamatan danau prioritas di Sulawesi Selatan;

d. Mengoptimalkan pengelolaan kawasan hutan melalui pembagian wilayah kelola Kawasan Pengelolaan Hutan (KPH) yang merata yang belum didukung oleh hubungan koordinasi yang didukung oleh pembagian tugas yang jelas dan pendanaan yang cukup;
e. Mengoptimalkan penurunan emisi gas rumah kaca melalui identifikasi sektor penyumbang emisi gas rumah kaca tinggi, dan membangun basis data terpadu sektor penyumbang emisi gas rumah kaca serta mengintegrasikan upaya penurunan emisi gas rumah kaca kedalam rencana pembangunan kabupaten/kota dan rencana perangkat daerah;
f. Mengoptimalkan peran dan fungsi Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagai instrumen pengendalian pemanfaatan sumber daya pesisir dan kelautan guna menjaga keberlanjutan fungsi lingkungan dan sumber daya hayati laut.

Secara ringkas strategi pembangunan daerah dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel IV. 11
Prioritas dan Penjelasan Singkat Strategi Pembangunan Daerah Tahun 2023

No	Prioritas Pembangunan Daerah	Strategi Prioritas Pembangunan Daerah	Penjelasan Strategi Pembangunan
1	Pemantapan Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Peningkatan kapabilitas dan keunggulan SDM aparatur serta inovasi dalam pelayanan publik	Berdasarkan analisis yang dilakukan, maka beberapa hal yang dibutuhkan guna meningkatkan meningkatkan pencapaian nilai Indeks Reformasi Birokrasi melalui implementasi 8 (delapan) area perubahan yang terdiri dari: 1. Manajemen Perubahan; 2. Penataan Peraturan Perundang-Undangan; 3. Penataan dan Penguatan Organisasi; 4. Penataan Tata Laksana; 5. Penataan Sumber Daya Manusia; 6. Penguatan Akuntabilitas Kinerja; 7. Penguatan Pengawasan;. 8. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik; Untuk meningkatka pencapaian nilai akuntabilitas kinerja pemerintahan (SAKIP) Provinsi mencapai nilai A adalah: a. Pengembangan kompetensi sumber daya aparatur. b. Penataan dan penguatan kelembagaan. c. Pembinaan dan pengawasan administrasi dan keuangan daerah. d. Perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah. e. Implementasi e-government.

No	Prioritas Pembangunan Daerah	Strategi Prioritas Pembangunan Daerah	Penjelasan Strategi Pembangunan
			Selain itu, Indeks Pelayanan Publik untuk menilai kualitas penyelenggaraan pelayanan dasar. Beberapa hal yang dibutuhkan guna meningkatkannya antara lain: a. Pengembangan inovasi daerah. b. Pengelolaan informasi publik. c. Penataan organisasi
2	Penguatan infrastruktur wilayah	Peningkatan jangkauan dan kualitas infrastruktur wilayah	Peningkatan tersebut diharapkan dapat tercapai melalui upaya: a. Membangun konektivitas antara pusat-pusat kegiatan dan antara pusat kegiatan dengan kawasan perdesaan melalui pembangunan infrastruktur wilayah yang terpadu dan terintegrasi antar moda transportasi guna menghubungkan lokasi produksi usaha mikro dan kecil kepada pusat pertumbuhan; b. Mengoptimalkan peningkatan kualitas jalan Provinsi secara terintegrasi melalui berbagai sumber pembiayaan dan mengembangkan inovasi penggunaan skema KPBU dan/atau pembiayaan swasta. c. Membuka akses pada daerah terisolir dan daerah-daerah yang memiliki potensi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi wilayah di Kabupaten/Kota dan mengembangkan konektivitas antara daerah tersebut dengan pusat pertumbuhan ekonomi melalui pembangunan sarana dan prasarana transportasi darat dan laut; d. Mengoptimalkan ketersediaan infrastruktur jaringan irigasi untuk mendukung penyediaan prasarana irigasi sektor pertanian; e. Mengoptimalkan pemenuhan listrik bagi masyarakat serta

No	Prioritas Pembangunan Daerah	Strategi Prioritas Pembangunan Daerah	Penjelasan Strategi Pembangunan
			peningkatan mutu pelayanan pada wilayah usaha penyediaan ketenagalistikan. f. Pemenuhan akses air minum dan sanitasi aman dan layak pada kawasan permukiman khususnya pada wilayah pesisir, kepulauan dan daerah rawan air lainnya.
3	Pengembangan kawasan pusat pertumbuhan	Pengembangan komoditas sektor unggulan pada kawasan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru	Dalam rangka pengembangan komoditas sektor unggulan dilakukan melalui dukungan sarana-prasarana pada kawasan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru serta mengoptimalkan peran sumber-sumber pertumbuhan pada kawasan tersebut disertai dengan penanggulangan kemiskinan. RTRWN dan RTRWP menetapkan pusat-pusat kegiatan yang merupakan kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai pusat kegiatan industri dan jasa, secara berjenjang berupa Pusat Kegiatan Nasional (PKN), Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) dan Pusat Kegiatan Lokal (PKL). Penetapan pusat kegiatan di Provinsi Sulawesi Selatan sebagaimana yang diatur dalam RTRWN dan RTRWP Sulawesi Selatan terdiri dari: Pusat Kegiatan Nasional (PKN) ditetapkan di Kawasan Perkotaan Makassar, Maros, Sungguminasa, dan Takalar (Mamminasata), Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) ditetapkan di Kawasan Perkotaan Bulukumba, Kawasan Perkotaan Jeneponto, Kawasan Perkotaan Pangkajene Kabupaten Pangkajene Kepulauan, Kawasan Perkotaan Barru, Kawasan Perkotaan Watampone di Kabupaten Bone, Kota Parepare dan Kota Palopo. Sedangkan Pusat Kegiatan Lokal (PKL) ditetapkan di kawasan perkotaan Bantaeng, kawasan perkotaan Enrekang, kawasan perkotaan Masamba, kawasan perkotaan Belopa, kawasan perkotaan Malili, kawasan

No	Prioritas Pembangunan Daerah	Strategi Prioritas Pembangunan Daerah	Penjelasan Strategi Pembangunan
			perkotaan Pinrang/Watansawitto, kawasan perkotaan Pangkajene, Kawasan Ekonomi Khusus Emas di Kabupaten Barru, kawasan perkotaan Bantaeng dan kawasan perkotaan Pamatata, kawasan perkotaan Sinjai, kawasan perkotaan Watansoppeng, kawasan perkotaan Makale, kawasan perkotaan Rantepao, dan kawasan perkotaan Sengkang.
4	Penurunan kesenjangan sosial ekonomi	Peningkatan Pemerataan pembangunan, Pengembangan dan peningkatan kualitas iklim usaha perekonomian daerah	a. Pengembangan destinasi wisata berkualitas yang didukung oleh peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana penunjang pariwisata pada kawasan strategis pariwisata nasional (KSPN) maupun kawasan strategis pariwisata daerah (KSPD), khususnya pada Kawasan Toraja dan Kawasan Takabonerate yang memegang peran sebagai KSPN serta pembangunan potensi wisata baru termasuk Rest Area yang berbasis pemberdayaan masyarakat; b. Penguatan konektivitas antara pusat-pusat kegiatan, antara kawasan perdesaan dengan kawasan perkotaan, maupun antar kawasan perdesaan khususnya pada daerah terisolir melalui pembangunan infrastruktur wilayah yang terpadu dan terintegrasi antar moda transportasi guna menghubungkan lokasi produksi usaha mikro dan kecil dengan pusat pertumbuhan; c. Pengembangan pusat-pusat pertumbuhan melalui penyediaan bahan baku yang mendukung peningkatan produksi ekonomi unggulan serta memacu pembangunan kawasan berbasis sumber daya alam dan jasa kemaritiman.
			Penguatan peran pusat-pusat pertumbuhan dengan memanfaatkan potensi dan keunggulan daerah diharapkan akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta pemerataan pendapatan antar

No	Prioritas Pembangunan Daerah	Strategi Prioritas Pembangunan Daerah	Penjelasan Strategi Pembangunan
			lapisan masyarakat di Sulawesi Selatan yang akan diwujudkan melalui upaya sebagai berikut: Peningkatan pendapatan masyarakat melalui program BUMDES, UMKM, KUBE serta perhutanan sosial;
5	Akselerasi pembangunan Sumber daya manusia	Peningkatan akses dan pemerataan layanan pendidikan menengah;	Meningkatkan keterjangkauan penduduk terhadap layanan pendidikan dalam rangka pemerataan akses layanan pendidikan menengah melalui penyediaan sarana dan prasarana sekolah, pendistribusian tenaga pendidik, pengembangan pendidikan vokasional serta meningkatkan kualitas belajar mengajar pada pendidikan menengah umum dalam meningkatkan kelulusan pada pendidikan tinggi bereputasi. Perbaikan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan vokasional merupakan salah satu variabel yang dapat meningkatkan kualitas tenaga kerja
		Peningkatan pemenuhan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan dan olahraga	Meningkatkan keterpenuhan sarana-prasarana pelayanan kesehatan berbasis regional secara beriringan dengan upaya preventif dalam penanganan kesehatan dan meningkatkan kualitas/kuantitas sarana parasarana olahraga serta meningkatkan prestasi keolahragaan melalui peningkatan koordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota dan organisasi olah raga. Kesehatan masyarakat merupakan investasi bagi pembangunan sumberdaya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomi. Beberapa terobosan telah dilakukan dalam pembangunan kesehatan, namun sampai saat ini berbagai upaya dan terobosan tersebut belum cukup untuk meningkatkan akses dan mutu layanan kesehatan di Sulawesi Selatan. Pembangunan kesehatan sebagai salah satu pelayanan dasar masyarakat khususnya di Sulawesi Selatan dihadapkan pada

No	Prioritas Pembangunan Daerah	Strategi Prioritas Pembangunan Daerah	Penjelasan Strategi Pembangunan
			tantangan peningkatan upaya promotif dan preventif, peningkatan pelayanan kesehatan ibu dan anak, penurunan disparitas akses dan mutu pelayanan kesehatan serta pemenuhan sarana prasarana dan mutu pelayanan kesehatan. Olahraga merupakan salah satu upaya yang terkait dengan peningkatan upaya promotif dan preventif dalam pembangunan kesehatan
		Peningkatan moralitas dan karakter masyarakat Sulawesi Selatan berlandaskan nilai-nilai agama dan nilai-nilai budaya dalam kehidupan masyarakat	Setiap daerah memiliki identitas sosial dan karakter masyarakat yang mencerminkan nilai-nilai luhur budaya dan agama yang merupakan modal dasar pembangunan daerah. Kekayaan nilai-nilai luhur budaya dan keagamaan yang kental dan khas di Provinsi Sulawesi Selatan membuktikan dapat menjadi perekat dalam pembangunan ketentraman dan kedamaian sosial. Karakteristik ini harus terus dikembangkan menjadi karakter dasar masyarakat Sulawesi Selatan, yang dimanifestasikan pada seluruh aspek kehidupan
		Peningkatan peran dan kapasitas perempuan, anak dan disabilitas dalam pembangunan	Meningkatkan kualitas anak, perempuan, dan pemuda. Peningkatan perlindungan anak difokuskan pada: f. Penguatan layanan penanganan kekerasan terhadap anak secara terpadu, termasuk di ranah daring; g. Optimalisasi pencegahan perkawinan anak dan penarikan pekerja anak dari pekerjaan terburuk dengan melibatkan berbagai pihak; h. Optimalisasi pengasuhan berbasis hak anak pada lingkungan keluarga dan lembaga pengasuhan alternatif; i. Peningkatan koordinasi dan sinergi pemenuhan hak anak dalam kondisi khusus termasuk anak yang berhadapan dengan hukum;

No	Prioritas Pembangunan Daerah	Strategi Prioritas Pembangunan Daerah	Penjelasan Strategi Pembangunan
			j. Peningkatan partisipasi anak dalam pembangunan; dan k. Penciptaan lingkungan ramah anak Peningkatan kesetaraan gender, pemberdayaan, dan perlindungan perempuan difokuskan pada: f. Percepatan pelaksanaan pengarusutamaan gender (PUG) di daerah, dan desa melalui perbaikan tata kelola; g. Perluasan akses, peran, dan keterlibatan perempuan dalam ekonomi dan ketenagakerjaan, termasuk perempuan kelompok miskin, kepala keluarga, disabilitas, serta penyintas kekerasan dan bencana, melalui peningkatan kapasitas, literasi keuangan, literasi digital, dan optimalisasi teknologi, informasi dan komunikasi; h. Peningkatan keterwakilan perempuan di legislatif melalui optimalisasi pendidikan politik dan kaderisasi di tingkat nasional dan daerah; i. Penguatan upaya pencegahan dan penanganan KTP, melalui KIE yang berkesinambungan, pelibatan laki-laki dalam mencegah dan menangani kekerasan, penerapan regulasi pencegahan dan penanganan KTP di satuan pendidikan dan tempat kerja, peningkatan cakupan dan kualitas layanan KTP yang terpadu dan komprehensif, serta peningkatan kolaborasi multipihak antarlembaga penyedia layanan; j. Penguatan tata kelola layanan melalui peningkatan kapasitas SDM lembaga layanan termasuk Aparat Penegak Hukum (APH), penguatan sistem pencatatan dan pelaporan KTP, standardisasi lembaga layanan, percepatan pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA),

No	Prioritas Pembangunan Daerah	Strategi Prioritas Pembangunan Daerah	Penjelasan Strategi Pembangunan
6	Pemberdayaan ekonomi kerakyatan melalui hilirisasi komoditas	Hilirisasi pengelolaan komoditas berbasis sumber daya alam	Hilirisasi pengelolaan komoditas berbasis sumberdaya alam melalui penekanan pada upaya pemberdayaan ekonomi kerakyatan dengan mendorong hilirisasi komoditas Sulawesi Selatan yang didukung oleh upaya peningkatan produksi, komoditas pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan, sehingga komoditas unggulan tersebut mempunyai nilai tambah tinggi serta dapat menciptakan kesempatan kerja

No	Prioritas Pembangunan Daerah	Strategi Prioritas Pembangunan Daerah	Penjelasan Strategi Pembangunan
7	Peningkatan Pelestarian lingkungan hidup	Peningkatan kualitas lingkungan hidup serta kemampuan adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim	Mengintegrasikan tujuan pembangunan berkelanjutan pada pilar lingkungan dalam menyelaraskan upaya-upaya pemanfaatan jasa lingkungan dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan, serta meningkatkan kemampuan adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim serta mengimplementasikan pembangunan rendah karbon. Pembangunan berkelanjutan sebagai rencana aksi global dilaksanakan hingga tahun 2030 memiliki 5 prinsip dasar yaitu; People, Planet, Prosperity, Peace dan Partnership dalam 3 dimensi yaitu ekonomi, sosial dan lingkungan yang selaras. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/SDGs terdiri dari 17 Tujuan dan 169 Target yang difokuskan pada pelaksanaan 4 (empat) pilar pembangunan yaitu pilar pembangunan sosial, pilar pembangunan ekonomi, pilar pembangunan hukum dan tata kelola dan pilar pembangunan lingkungan secara terintegrasi. Pilar pembangunan lingkungan dalan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan meliputi 6 (enam) tujuan pembangunan yaitu: Tujuan 6 Menjamin Ketersediaan serta Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi yang Berkelanjutan untuk Semua, Tujuan 11 Menjadikan Kota dan Permukiman Inklusif, Aman, Tangguh dan Berkelanjutan, Tujuan 12 Pola Konsumsi dan Produksi Berkelanjutan, Tujuan 13 Mengatasi Perubahan Iklim, Tujuan 14 Sumber Daya Maritim Berkelanjutan, dan Tujuan 15 Pengelolaan Ekosistem Teresterial Berkelanjutan

4.2.3.2. Arah Kebijakan Pembangunan Tahun 2023

Penyusunan arah kebijakan pembangunan tahun 2023 disusun berdasarkan arah kebijakan pada Perubahan RPJMD. Adapun Keterkaitan Prioritas Pembangunan dengan Arah Kebijakan RPJMD terhadap prioritas pembangunan tahun 2023 secara lengkap dapat dilihat pada tabel IV.9. berikut.

Tabel IV. 12
Keterkaitan Prioritas Pembangunan dengan Arah Kebijakan RPJMD untuk Tahun 2023

No.	Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2023	Arah Kebijakan RPJMD Tahun 2023
1	Pemantapan Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Penguatan inovasi berbasis teknologi informasi dalam pelayanan publik
2	Penguatan infrastruktur wilayah	Meningkatkan pemerataan infrastruktur wilayah
		Penyediaan infrastruktur sumberdaya air
3	Pengembangan kawasan pusat pertumbuhan	Peningkatan lapangan kerja, investasi dan industrialisasi pengolahan produk unggulan daerah
		Peningkatan promosi wisata melalui pemanfaatan teknologi media promosi dan informasi pariwisata.
		Peningkatan kerjasama dengan pelaku wisata;
4	Penurunan kesenjangan sosial ekonomi	Penguatan kapasitas usaha kelompok miskin dan rentan melalui kelompok usaha bersama (KUBE) atau kelompok sosial lainnya
5	Akselerasi pembangunan Sumber daya manusia	Akselerasi peningkatan kualitas lulusan pendidikan menengah umum dalam meluluskan tamatan pada seleksi perguruan tinggi negeri bereputasi
		Peningkatan kapasitas tenaga kesehatan untuk penguatan fungsi pelayanan kesehatan dasar
		Peningkatan kapasitas lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan, perlindungan perempuan dan anak, peningkatan kualitas keluarga dan pemenuhan hak anak
		Peningkatan peran masyarakat dan lembaga keagamaan dalam aktualisas nilai-nilai agama dan budaya dalam kehidupan pembangunan

No.	Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2023	Arah Kebijakan RPJMD Tahun 2023
		Peningkatan pemberdayaan lembaga keagamaan, pesantren, dan penyelenggarana keagamaan dalam aktualisasi nilai-nilai agama dan budaya
6	Pemberdayaan ekonomi kerakyatan melalui hilirisasi komoditas	Peningkatan ekspor melalui nilai tambah dan daya saing produk pengolahan hasil pertanian, peternakan, dan perikanan
7	Peningkatan Pelestarian lingkungan hidup	Penyediaan infrastruktur pengelolaan air limbah dan persampahan
		Penguatan upaya pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pengendalian daya dukung dan daya tampung lingkungan serta pembangunan rendah karbon

Penjelasan Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Tahun 2023 menjadi acuan secara operasional yang dilaksanakan oleh para perangkat daerah. Secara lengkap penjelasan tersebut sebagaimana dilihat pada tabel IV.10 berikut:

Tabel IV. 13
Penjelasan arah kebijakan pembangunan daerah Tahun 2023

No	Prioritas Pembangunan Daerah	Arah Kebijakan RPJMD Tahun 2023	Penjelasan Arah Kebijakan RPJMD Tahun 2023
1	Pemantapan Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Penguatan inovasi berbasis teknologi informasi dalam pelayanan publik	• Pemanfaatan Iptek dan inovasi sebagai faktor pembentuk daya saing atau disebut dengan innovation-driven development. • Membangun dan memperkuat Sistem Inovasi Daerah sebagai landasan kinerja pembangunan berbasis inovasi. • Perwujudan penguatan sistem inovasi daerah dilakukan melalui penataan daya dukung unsur organisasi, kerangka regulasi, dan internalisasi budaya inovasi, dan penyediaan sarana prasarana inovasi. Tujuan utamanya ialah menciptakan interaksi produktif multipihak yang saling menguntungkan bagi perkembangan inovasi dan

No	Prioritas Pembangunan Daerah	Arah Kebijakan RPJMD Tahun 2023	Penjelasan Arah Kebijakan RPJMD Tahun 2023
			difusinya, penyebarluasan praktik inovasi terbaik, dan hasil-hasil kelitbangan yang sesuai dengan tantangan dan potensi unggulan di lingkup kabupaten/kota di Sulawesi selatan. Inovasi Daerah Dalam Rangka Pembaharuan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dapat berbentuk: (a) inovasi tata kelola pemerintahan daerah; (b) inovasi pelayanan publik; dan/atau (c) inovasi daerah lainnya sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Inovasi tata kelola Pemerintahan Daerah merupakan inovasi dalam pelaksanaan manajemen Pemerintahan Daerah meliputi tata laksana internal dalam pelaksanaan fungsi manajemen dan pengelolaan unsur manajemen.
2	Penguatan infrastruktur wilayah	Meningkatkan pemerataan infrastruktur wilayah	• Peningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan infrastruktur wilayah dengan meningkatkan kualitas jaringan infrastruktur wilayah yang terdiri dari peningkatan kemantapan jalan, pembangunan dan peningkatan ketersediaan ketersediaan pelabuhan pengumpan regional dan peningkatan layanan irigasi. • Pemenuhan kebutuhan energi listrik dan energi terbarukan dengan cara meningkatkan elektrifikasi desa, jaringan energi dengan lebih menumbuh-kembangkan pemanfaatan sumberdaya terbarukan yang ramah lingkungan dalam sistem kemandirian energi listrik lingkungan mikro, baik di daerah perdesaan terpencil maupun pulau-pulau kecil terpencil;

No	Prioritas Pembangunan Daerah	Arah Kebijakan RPJMD Tahun 2023	Penjelasan Arah Kebijakan RPJMD Tahun 2023
		Penyediaan infrastruktur sumberdaya air	Peningkatan cakupan irigasi kondisi baik, akses air minum dan sanitasi kawasan permukiman melalui Pemenuhan akses air minum dan sanitasi aman dan layak pada kawasan permukiman khususnya pada wilayah pesisir, kepulauan dan daerah rawan air lainnya
3	Pengembangan kawasan pusat pertumbuhan	Peningkatan lapangan kerja, investasi dan industrialisasi pengolahan produk unggulan daerah	Peningkatan lapangan kerja, investasi dan industrialisasi pengolahan produk unggulan daerah. Pembangunan yang ramah lingkungan melalui investasi infrastruktur hijau dan pengembangan teknologi. Penataan transformasi ekonomi melalui peningkatan produktivitas, dan pemulihan ekonomi sosial yang melibatkan peran serta semua lapisan masyarakat untuk menuju pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan
		Peningkatan promosi wisata melalui pemanfaatan teknologi media promosi dan informasi pariwisata.	Peningkatan promosi wisata melalui pemanfaatan teknologi media promosi dan informasi pariwisata pada berbagai media lokal maupun internasional.
		Peningkatan kerjasama dengan pelaku wisata;	Peningkatan kerjasama dengan pelaku wisata; Kerja sama antar pelaku wisata dilakukan melalui MOU dengan berbagai pelaku wisata baik domestik maupun internasional
4	Penurunan kesenjangan sosial ekonomi	Penguatan kapasitas usaha kelompok miskin dan rentan melalui kelompok usaha bersama (KUBE) atau kelompok sosial lainnya	Penguatan SDM pelaku usaha dan dukungan sarana-prasarana, teknologi, dan mikro finance pada wilayah pertumbuhan ekonomi baru. Pembangunan yang dilakukan berupa pembangunan dan revitalisasi sarana produksi bagi industri skala kecil dan menengah yang bertujuan untuk: (i) meningkatkan

No	Prioritas Pembangunan Daerah	Arah Kebijakan RPJMD Tahun 2023	Penjelasan Arah Kebijakan RPJMD Tahun 2023
			produktivitas dan kualitas sumber daya manusia IKM, (ii) meningkatkan populasi IKM khususnya industri skala menengah, (iii) membangun rantai nilai dan rantai pasok antara industri kecil dan menengah dengan industri besar, (iv) meningkatkan akses pasar wirausaha IKM yang selama ini terbatas, serta (v) meningkatkan aktivitas ekonomi lokal melalui hilirisasi sumber daya alam berbasis sentra IKM.
			Dalam rangka mendukung fokus produktivitas, strategi yang dilaksanakan mencakup (a) promosi perdagangan yang berfokus pada produk olahan bernilai tambah, (b) penguatan konektivitas domestik dan logistik ekspor; (c) peningkatan ekspor ekonomi kreatif dan digital, (d) pemanfaatan teknologi digital dan online channel (e-commerce).
5	Akselerasi pembangunan Sumber daya manusia	Peningkatan Kualitas dan pemerataan pendidikan tingkat dasar dan menengat serta akselerasi peningkatan kualitas lulusan pendidikan menengah umum dalam meluluskan tamatan pada seleksi perguruan tinggi negeri bereputasi	(a) Peningkatan kualitas pengajaran dan pembelajaran dengan penerapan kurikulum dan model pembelajaran, kualitas sistem penilaian hasil belajar termasuk penilaian pada tataran kelas oleh pendidik, peningkatan kompetensi pendidik, penguatan keterampilan nonteknis dan pendidikan karakter, peningkatan pemanfaatan TIK dalam pembelajaran, peningkatan kualitas kepemimpinan di sekolah, peningkatan pengasuhan dan peran keluarga dalam pendidikan, dan kesehatan mental dalam pendidikan; (b) Percepatan pelaksanaan wajib belajar 12 tahun, dengan meningkatkan pencegahan putus sekolah, strategi pendataan, penjangkauan, dan sinkronisasi upaya lintas sektor

No	Prioritas Pembangunan Daerah	Arah Kebijakan RPJMD Tahun 2023	Penjelasan Arah Kebijakan RPJMD Tahun 2023
			dalam penanganan Anak Tidak Sekolah (ATS), pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan berdasarkan kebutuhan, dan afirmasi pada daerah 3T, termasuk pemulihan di daerah terdampak bencana; (c) Kolaborasi lintas sektor untuk penerapan Pendidikan Anak Usia Dini Holistik Integratif (PAUD-HI), dan penguatan layanan satu tahun pra-sekolah; dan (d) Peningkatan pengelolaan, penempatan, dan pemenuhan pendidik dan tenaga kependidikan yang merata, dengan percepatan revitalisasi Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) dan penguatan Pendidikan Profesi Guru (PPG), peningkatan kualifikasi guru , penerapan strategi distribusi dan redistribusi berbasis pemetaan kebutuhan, peningkatan kualitas sistem penilaian kinerja, dan peningkatan kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan.
		Peningkatan kapasitas tenaga kesehatan untuk penguatan fungsi pelayanan kesehatan dasar	Peningkatan kapasitas tenaga kesehatan melalui pendidikan dan pelatihan. Pemenuhan sarana-prasarana pelayanan kesehatan berbasis regional secara beriringan dengan upaya preventif dalam penanganan kesehatan dan meningkatkan kualitas/kuantitas sarana parasarana kesehatan. Pembangunan kesehatan sebagai salah satu pelayanan dasar masyarakat dalam peningkatan upaya promotif dan preventif, peningkatan pelayanan kesehatan ibu dan anak, penurunan disparitas akses dan mutu pelayanan kesehatan serta pemenuhan sarana prasarana dan mutu pelayanan kesehatan.

No	Prioritas Pembangunan Daerah	Arah Kebijakan RPJMD Tahun 2023	Penjelasan Arah Kebijakan RPJMD Tahun 2023
		Peningkatan kapasitas lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan, perlindungan perempuan, anak dan disabilitas peningkatan kualitas keluarga dan pemenuhan hak anak	Peningkatan kapasitas dan pemberdayaan perempuan dalam dunia usaha dan lembaga masyarakat melalui peningkatan peran lembaga/organisasi pemerhati perempuan, anak dan disabilitas serta regulasi yang tersedia untuk mengoptimalkan kualitas pembinaan, pembimbingan, perlindungan dan fasilitasi dalam upaya pemberdayaan perempuan, anak, dan disabilitas. Pengendalian kuantitas penduduk, dan peningkatan ketahanan keluarga, pemanfaatan sistem data dan informasi untuk meningkatkan peran serta lintas lembaga dalam pencegahan dan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan, anak dan disabilitas serta penurunan total fertility rate. Meningkatkan kualitas koordinasi dengan memanfaatkan sarana prasarana yang tersedia untuk menurunkan kasus kekerasan terhadap perempuan, anak dan disabilitas. Menurunkan angka total fertility rate
		Peningkatan peran masyarakat dan lembaga keagamaan dalam aktualisas nilai-nilai agama dan budaya dalam kehidupan pembangunan	Meningkatkan edukasi tentang keberagaman, toleransi, spiritualisme, kehidupan bernegara, edukasi politik kepada seluruh lapisan masyarakat sejak usia dini, kepada anak-anak usia sekolah, serta didukung upaya peningkatan koordinasi dan kerjasama dengan pemangku kepentingan yang berkaitan dengan keberagaman, toleransi, kewarganegaraan, dan politik
		Peningkatan pemberdayaan lembaga keagamaan, pesantren, dan penyelenggarana keagamaan dalam aktualisasi nilai-	Pemberdayaan Lembaga keagamaan, pesantren, penyelenggarana keagamaan melalui penguatan kordinasi dan sinkronisasi pembangunan dengan semua stakeholder pembangunan serta pemberian bantuan keuangan

No	Prioritas Pembangunan Daerah	Arah Kebijakan RPJMD Tahun 2023	Penjelasan Arah Kebijakan RPJMD Tahun 2023
		nilai agama dan budaya dalam kehidupan sehari-sehari	pembangunan sektor keagamaan
6	Pemberdayaan ekonomi kerakyatan melalui hilirisasi komoditas	Peningkatan ekspor melalui nilai tambah dan daya saing produk pengolahan hasil pertanian, peternakan, dan perikanan	Hilirisasi pegelolaan komoditas berbasis sumberdaya alam merupakan penjabaran salah satu program nyata melalui penekanan pada upaya pemberdayaan ekonomi kerakyatan dengan mendorong hilirisasi komoditas Sulawesi Selatan yang didukung oleh upaya peningkatan produksi, komoditas pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan, sehingga komoditas unggulan tersebut mempunyai nilai tambah tinggi serta dapat menciptakan kesempatan kerja. Fokus pembangunan yang dilakukan berupa pembangunan dan revitalisasi sarana produksi bagi industri skala kecil dan menengah yang bertujuan untuk: (i) meningkatkan produktivitas dan kualitas sumber daya manusia IKM, (ii) meningkatkan populasi IKM khususnya industri skala menengah, (iii) membangun rantai nilai dan rantai pasok antara industri kecil dan menengah dengan industri besar, (iv) meningkatkan akses pasar wirausaha IKM yang selama ini terbatas, serta (v) meningkatkan aktivitas ekonomi lokal melalui hilirisasi sumber daya alam berbasis sentra IKM.

No	Prioritas Pembangunan Daerah	Arah Kebijakan RPJMD Tahun 2023	Penjelasan Arah Kebijakan RPJMD Tahun 2023
7	Peningkatan Pelestarian lingkungan hidup	Penyediaan infrastruktur pengelolaan air limbah dan persampahan	Arah kebijakan pembangunan infrastruktur pelayanan dasar yang meliputi perumahan permukiman termasuk air minum, air limbah domestik, dan persampahan untuk mendukung peningkatan kesehatan masyarakat dan lingkungan adalah (1) Meningkatkan kebermanfaatan dan efektivitas pembangunan infrastruktur perumahan permukiman, air minum, dan sanitasi dengan memastikan kesiapan masyarakat, kesiapan kelembagaan dalam pengelolaan, kesiapan pembiayaan pembangunan dan operasi pemeliharaan, serta kesiapan pembangunan infrastruktur; (2) Memperluas akses masyarakat terhadap perumahan dan permukiman yang layak dan terjangkau, pembangunan rumah susun sederhana sewa (rusunawa), rumah khusus, (3) Melanjutkan penanganan rumah tidak layak huni dan penanganan permukiman kumuh terpadu, khususnya di perkotaan melalui kolaborasi proyek prioritas perumahan dan penanganan permukiman kumuh serta pengembangan DAK Terintegrasi; (4) Menyediakan akses sanitasi aman yang berfokus kepada pengembangan layanan sistem terpusat dan setempat, termasuk pengembangan layanan lumpur tinja dan perluasan sambungan rumah; (5) Memperkuat kapasitas pemerintah daerah serta penyelenggara air minum dan sanitasi baik dari sisi perencanaan, teknis, dan strategi pendanaan; (6) Meningkatkan pengelolaan persampahan perkotaan secara terintegrasi dari hulu ke hilir yang didukung implementasi

No	Prioritas Pembangunan Daerah	Arah Kebijakan RPJMD Tahun 2023	Penjelasan Arah Kebijakan RPJMD Tahun 2023
			teknologi; (7) Meningkatkan ketersediaan akses air minum jaringan perpipaan yang difokuskan pada pemanfaatan infrastruktur air baku, pemanfaatan kapasitas SPAM terpasang, penurunan tingkat air tidak berekening (non-revenue water), peningkatan dan pembangunan SPAM, baik skala kabupaten/kota maupun lintas wilayah (SPAM Regional), dan pengembangan teknologi pengolahan dan pengamanan air minum, serta pengelolaan aset dari SPAM terbangun; (8) Memperkuat mekanisme pembinaan berjenjang untuk pemerintah daerah dan fungsi kelembagaan regulator air minum guna meningkatkan kualitas perencanaan air minum yang terintegrasi; dan (9) Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mengakses layanan air minum perpipaan atau sumber air minum bukan jaringan perpipaan yang terlindungi secara swadaya
		Penguatan upaya pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pengendalian daya dukung dan daya tampung lingkungan serta pembangunan rendah karbon	Arah kebijakan untuk membangun lingkungan hidup melalui peningkatan ketahanan bencana, dan perubahan iklim terdiri dari: (a) Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup; (b) Peningkatan Ketahanan Bencana dan Iklim; dan (c) Pembangunan Rendah Karbon

4.3. Keselaran dan Konsistensi Perencanaan Pembangunan Tahun 2023

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah Sulawesi Selatan tahun 2023, maka keselaran dan konsistensi terhadap pelaksanaan pembangunan daerah tahun 2023 baik pada kebijakan dalam dokumen RPJMD maupun kebijakan pembangunan nasional yang merupakan acuan dan pedoman terhadap pembangunan daerah. Sinkronisasi diwujudkan dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan yang merupakan acuan pelaksanaan terhadap pembangunn daerah.

4.3.1. Kesesuaian Prioritas Pembangunan Tahun 2023 dengan Sasaran RPJMD

RKPD sebagai perencanaan tahunan tetap menjaga konsistensi dengan RPJMD yang tergambarkan melalui sasaran prioritas pembangunan, dapat dilihat pada Tabel IV.12 berikut;

Tabel IV. 14
Kesesuaian Prioritas Pembangunan tahun 2023 dengan Sasaran Perubahan RPJMD untuk Tahun 2023

No.	Prioritas Pembangunan Daerah	Tujuan dan Sasaran Prioritas	Indikator Kinerja Sasaran Pembangunan		Satuan	Target RKPD Tahun 2023
1	Pemantapan Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Meningkatkan tata kelola penyekenggaraan pemerintahan yang baik	1	Indeks Reformasi Birokrasi	Huruf/ angka	A (81 – 90)
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah	2	Nilai SAKIP Provinsi	Huruf/ angka	A (>80–90)
		Berkembangnya inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan public	3	Indeks Pelayanan Publik	Huruf/ angka	A (4,51 – 5,0)
2	Penguatan infrastruktur wilayah	Meningkatkan pemerataan infrastruktur wilayah	4	Indeks Williamson	Angka	0,607
		Meningkatnya aksesibilitas infrastruktur wilayah	5	Indeks Layanan Infrastruktur	Angka	83,4
3	Pengembangan kawasan pusat pertumbuhan	Meningkatkan Kesejahteraan masyarakat secara merata	6	PDRB Perkapita ADHB	Rp. Juta	65,98
			7	Tingkat Kemiskinan	%	7,45
		Meningkatnya penyerapan tenaga kerja sektor unggulan daerah	8	Tingkat Pengangguran terbuka	%	5,69

No.	Prioritas Pembangunan Daerah	Tujuan dan Sasaran Prioritas	Indikator Kinerja Sasaran Pembangunan		Satuan	Target RKPD Tahun 2023
4	Penurunan kesenjangan sosial ekonomi	Menurunya kesenjangan Pendapatan antar lapisan masyarakat	9	Rasio Gini	Angka	0,381
5	Akselerasi pembangunan Sumber daya manusia	Meningkatkan Kualitas SDM yang Kompetitif, Inklusif dan Berkarakter	10	IPM	Angka	73,18
		Meningkatnya Kualitas dan Pemerataan Pendidikan	11	Indeks Pendidikan	Angka	67,05
		Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	12	Indeks Kesehatan	Angka	78,27
		Meningkatnya keberdayaan perempuan dalam pembangunan	13	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Angka	77.23
		Meningkatnya aktualisas nilai-nilai agama dan budaya dalam kehidupan masyarakat	14	Angka kriminalitas	Kasus	24,438
6	Pemberdayaan ekonomi kerakyatan melalui hilirisasi komoditas	Meningkatkan Produktivitas dan Nilai Tambah Produk Unggulan Daerah	15	Pertumbuhan Ekonomi	%	5,06–6,59
		Meningkatnya hilirisasi ekonomi sektor unggulan daerah	16	Produktifitas Total Daerah	Rp/-Angkatan Kerja	77.349.122
7	Peningkatan Pelestarian lingkungan hidup	Meningkatkan kualitas lingkungan hidup secara berkelanjutan	17	IKLH	poin	72,84

No.	Prioritas Pembangunan Daerah	Tujuan dan Sasaran Prioritas	Indikator Kinerja Sasaran Pembangunan		Satuan	Target RKPD Tahun 2023
		Terpeliharanya kualitas lingkungan hidup serta kemampuan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim	18	Potensi Penurunan emisi GRK (Juta Ton CO_2Eq)	Juta Ton CO2Eq	1,347

4.3.2. Keselarasan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan dan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2023

Prioritas pembangunan, tujuan, sasaran dan arah kebijakan daerah Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2023 telah selaras dengan arah kebijakan pembangunan jangka menengah daerah tahun 2018-2023 dan mendukung prioritas nasional tahun 2023 yang merupakan tahun awal dari rencana pembangunan jangka menengah nasional tahun 2020-2024. Keterkaitan dan keselarasan antara perencanaan prioritas pembangunan daerah dan prioritas pembangunan nasional tahun 2023 dijabarkan pada Tabel IV.13 berikut:

Tabel IV. 15
Keselarasan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan dan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2023

No. PD	Prioritas Pembangunan Daerah	Prioritas Pembangunan Nasional	No. PN
1	Pemantapan Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	PN 7
2	Penguatan infrastruktur wilayah	Memperkuat Infrastruktur untuk mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	PN 5
3	Pengembangan kawasan pusat pertumbuhan	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	PN 2
4	Penurunan kesenjangan sosial ekonomi	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	PN 2
5	Akselerasi pembangunan Sumber daya manusia	Meningkatkan SDM Berkualitas dan Berdaya Saing	PN 3
		Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	PN 4
6	Pemberdayaan ekonomi	Memperkuat Ketahanan	PN 1

No. PD	Prioritas Pembangunan Daerah	Prioritas Pembangunan Nasional	No. PN
	kerakyatan melalui hilirisasi komoditas	Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	
7	Peningkatan Pelestarian lingkungan hidup	Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim	PN 6

Mengacu pada tema, fokus, dan sasaran pembangunan tahun 2023, maka arah kebijakan nasional yang akan ditempuh pada RKP 2023 dalam upaya menjaga kesinambungan pembangunan serta mengoptimalkan efektivitas pengendalian dalam pencapaian RPJMN 2020-2024, tujuh Prioritas Nasional RKP Tahun 2023 tetap dipertahankan sebagai koridor pencapaian tema, arah kebijakan dan strategi pembangunan di tahun 2023. Prioritas nasional tetap didukung dengan pelaksanaan 45 proyek prioritas strategis/Major Project yang diharapkan memberikan kontribusi signifikan terhadap realisasi target-target pembangunan. Sehubungan dengan hal tersebut makan rencana prioritas pembangunan daerah tahun 2023 sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan nasional, maka hubungan sasaran pembangunan daerah dengan sasaran prioritas nasional tahun 2023 sebagai mana pada Tabel IV.16 sebagai berikut:

Tabel IV. 16
Keselarasan Sasaran pembangunan Daerah terhadap Sasaran Prioritas pembangunan Nasional Tahun 2023

Prioritas Pembangunan Daerah				Prioritas Pembangunan Nasional		
No	**Prioritas Pembangunan Daerah**	**Tujuan dan Sasaran Prioritas Pembangunan Daerah**	**Indikator Kinerja Sasaran Pembangunan daerah**	**Prioritas Pembangunan Nasional**	**Sasaran Prioritas Pembangunan Nasional**	**Indikator Sasaran Prioritas Pembangunan Nasional**
1	Pemantapan Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Meningkatkan tata kelola penyekenggaraan pemerintahan yang baik	Indeks Reformasi Birokrasi	Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik (PN 7)	meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik melalui Perbaikan tata Kelola dan Birokrasi	Indeks Pelayanaan Publik
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah	Nilai SAKIP Provinsi			
		Berkembangnya inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan public	Indeks Pelayanan Publik			
2	Penguatan infrastruktur wilayah	Meningkatkan pemerataan infrastruktur wilayah	Indeks Williamson	Memperkuat Infrastruktur untuk mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar (PN 5)	Meningkatnya Penyediaan Infrasutruktur Layanan Dasar	Rumah tangga yang menempati hunian layak dan terjangkau (%)
		Meningkatnya aksesibilitas infrastruktur wilayah	Indeks Layanan Infrastruktur			Persentase luas daerah irigasi yang dimodernisasi (kumulatif, %); peningkatan persentase pemenuhan kebutuhan air baku (kumulatif)
3	Pengembangan kawasan	Meningkatkan Kesejahteraan	PDRB Perkapita ADHB	Mengembangkan	Meningkatnya	PDRB KTI

Prioritas Pembangunan Daerah				Prioritas Pembangunan Nasional		
No	**Prioritas Pembangunan Daerah**	**Tujuan dan Sasaran Prioritas Pembangunan Daerah**	**Indikator Kinerja Sasaran Pembangunan daerah**	**Prioritas Pembangunan Nasional**	**Sasaran Prioritas Pembangunan Nasional**	**Indikator Sasaran Prioritas Pembangunan Nasional**
	pusat pertumbuhan	masyarakat secara merata	Tingkat Kemiskinan	Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan (PN 2)	perumbuhan Ekonomi dan Tingkat Kesejahteraan Masyarakat di Kawasan timur Indonesia (KTI)	Persentase Penduduk Miskin KTI
		Meningkatnya penyerapan tenaga kerja sektor unggulan daerah	Tingkat Pengangguran terbuka			
4	Penurunan kesenjangan sosial ekonomi	Menurunya kesenjangan Pendapatan antar lapisan masyarakat	Rasio Gini	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan (PN 2)	Meningkatnya perumbuhan Ekonomi dan Tingkat Kesejahteraan Masyarakat di Kawasan timur Indonesia (KTI)	Persentase penduduk miskin KTI (%)
5	Akselerasi pembangunan Sumber daya manusia	Meningkatkan Kualitas SDM yang Kompetitif, Inklusif dan Berkarakter	IPM	Meningkatkan SDM Berkualitas dan Berdaya Saing (PN 3)	Meningkatnya pemerataan layanan Pendidikan Berkualitas	(a) nilai rata-rata hasil PISA (membaca, matematika, sains), (b) rata-rata lama sekolah penduduk usia 15 tahun ke atas, dan (c) harapan lama sekolah;
		Meningkatnya Kualitas dan Pemerataan Pendidikan	Indeks Pendidikan		Terpenuhinya layanan dasar bidang kesehatan dan pendidikan	a. menurunkan Angka Kematian Ibu (AKI), (b) menurunkan Angka Kematian Bayi (AKB), (c) menurunkan prevalensi stunting pada balita, (d) menurunkan insidensi
		Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Indeks Kesehatan			

Prioritas Pembangunan Daerah				Prioritas Pembangunan Nasional		
No	**Prioritas Pembangunan Daerah**	**Tujuan dan Sasaran Prioritas Pembangunan Daerah**	**Indikator Kinerja Sasaran Pembangunan daerah**	**Prioritas Pembangunan Nasional**	**Sasaran Prioritas Pembangunan Nasional**	**Indikator Sasaran Prioritas Pembangunan Nasional**
						tuberculosis, (e) meningkatkan jumlah kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria, (f) meningkatkan jumlah kabupaten/ kota dengan eliminasi kusta, (g) menurunkan prevalensi obesitas pada penduduk >18 tahun, (h) menurunkan persentase merokok penduduk usia 10-18 tahun
		Meningkatnya keberdayaan perempuan dalam pembangunan	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)		Meningkatnya kualitas anak, perempuan	(a) Indeks Perlindungan Anak (IPA), (b) Indeks Pembangunan Gender (IPG), serta (c) Indeks Pembangunan Pemuda (IPP);
		Meningkatnya aktualisas nilai-nilai agama dan budaya dalam kehidupan masyarakat	Angka kriminalitas	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan (PN 4)	Meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat dan daya rekat sosial dengan mendorong optimalisasi capaian	Indeks Pembangunan Masyarakat

Prioritas Pembangunan Daerah				Prioritas Pembangunan Nasional		
No	**Prioritas Pembangunan Daerah**	**Tujuan dan Sasaran Prioritas Pembangunan Daerah**	**Indikator Kinerja Sasaran Pembangunan daerah**	**Prioritas Pembangunan Nasional**	**Sasaran Prioritas Pembangunan Nasional**	**Indikator Sasaran Prioritas Pembangunan Nasional**
					Menguatnya moderasi beragama untuk mewujudkan kerukunan umat dan membangun harmoni sosial dalam kehidupan masyarakat	Indeks Kerukunan Umat Beragama
6	Pemberdayaan ekonomi kerakyatan melalui hilirisasi komoditas	Meningkatkan Produktivitas dan Nilai Tambah Produk Unggulan Daerah	Pertumbuhan Ekonomi	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan (PN 1)	Meningkatnya daya dukung dan Kualitas Sumber daya ekonomi sebagai modalitas bagi Pembvangunan ekonomi yang bekelanjutan	(a) porsi energi baru terbarukan dalam bauran energi nasional, (b) skor pola pangan harapan,
		Meningkatnya hilirisasi ekonomi sektor unggulan daerah	Produktifitas Total Daerah		Meningkatnya nilai tambah, lapangan kerja, Investasi, Ekspor, dan daya saing perekonomian	(a) rasio kewirausahaan nasional, (b) pertumbuhan PDB pertanian, (c) pertumbuhan PDB perikanan, (d) pertumbuhan PDB industri pengolahan, (e) kontribusi PDB industri pengolahan, (f) nilai devisa pariwisata, (g) kontribusi PDB pariwisata, (h) penyediaan lapangan

Prioritas Pembangunan Daerah				Prioritas Pembangunan Nasional		
No	**Prioritas Pembangunan Daerah**	**Tujuan dan Sasaran Prioritas Pembangunan Daerah**	**Indikator Kinerja Sasaran Pembangunan daerah**	**Prioritas Pembangunan Nasional**	**Sasaran Prioritas Pembangunan Nasional**	**Indikator Sasaran Prioritas Pembangunan Nasional**
						kerja per tahun,(i) pertumbuhan investasi (PMTB),
7	Peningkatan Pelestarian lingkungan hidup	Meningkatkan kualitas lingkungan hidup secara berkelanjutan	IKLH	Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim (PN 6)	Meningkatnya Indeks Kualitas Lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)
		Terpeliharanya kualitas lingkungan hidup serta kemampuan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim	Potensi Penurunan emisi GRK (Juta Ton CO_2Eq)		Meningkatnya capaian Penurunan Emisi dan Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca (GRK)	(a) persentase penurunan emisi GRK, dan (b) persentase penurunan intensitas emisi GRK.

Dengan demikian terlihat bahwa sasaran pembangunan daerah Sulawesi Selatan Tahun 2023 memiliki keterkaitan secara keseluruhan dengan sasaran pembangunan nasional 2023. Mengembalikan momentum pertumbuhan melalui peningkatan Selain itu, penekanan indikator sasaran pembangunan tahun 2023 diarahkan pada indikator nilai tukarpetani dan nilai tukar nelayan.

Adapun sebagai dukungan terhadap kegiatan Prioritas Nasional tahun 2023, maka provinsi Sulawesi Selatan menetapkan program pembangunan daerah yang menjadi pendukung kegiatan tersebut sebagai mana pada Tabel IV.16 sebagai berikut:

Tabel IV. 17
Dukungan Pemerintah Daerah Terhadap Kegiatan Prioritas Nasional Tahun 2023

No.	Prioritas Pembangunan Nasional	Program Prioritas Nasional		Kegiatan Prioritas Nasional		Program Daerah Yang Mendukungan Kegiatan Prioritas Nasional (Pn)	Perangkat Daerah
1	2	3		4		5	6
1	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas Dan Berkeadilan						
		1	Pemenuhan Kebutuhan Energi Dengan Mengutamakan Peningkatan Energi Terbarukan (Ebt)	1	Akselerasi Pengembangan Pembangkit Energi Terbarukan	Program Pengelolan Energi Terbarukan	Dinas Energi Dan Sumberdaya Mineral
				2	Peningkatan Pasokan Bahan Bakar Bnabati		
				3	Peningkatan Pelaksanaan Konservasi Dan Efisinsi Energi		
				4	Peningkatan Pemenuhan Energi Domestik		
				5	Pengembangan Industri Pendukung Ebt		
		2	Peningkatan Kualitas/Ketahanan Air Untuk Mendukung Perumbuhan Ekonomi	1	Pemantapan Kawasan Berfungsi Lindungi (Kumulatif)	Program Pengelolaan Hutan	Dinas Kehutanan
				2	Pengelolaan Hutan Berkelanjutan	Program Pengelolaan Hutan	
				3	Penyediaan Air Untuk Pertanian	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda)	Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang
				4	Penyediaan Air Baku Untuk Kawasan Prioritas	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda)	
				5	Pemeliharaa, Pemulihan Dan Konserfasi Sumber Daya Air Dan Ekosistemnya Termasuk Revitalisasi Danau Dan Infrastruktur Hijau	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda)	
				6	Pengembangan Waduk Multi Guna	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda)	
		3	Peningkatan Ketersediaan, Akses Dan Kualitas Komsumsi Pangan	1	Peningkatan Kualitas Komsumsi, Keamanan, Fortifikasi Dan Bioafortifikasi Pangan	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Dinas Ketahanan Pangan
				2	Peningkatan Ketersediaan Pangan Hasil Laut Secara Berkelanjutan Untuk Menjaga Stabilitas	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Dinas Kelautan Dan Perikanan

No.	Prioritas Pembangunan Nasional	Program Prioritas Nasional		Kegiatan Prioritas Nasional		Program Daerah Yang Mendukungan Kegiatan Prioritas Nasional (Pn)	Perangkat Daerah
1	2	3		4		5	6
					Pasokan Dan Harga Kebutuhan Pokok	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	
				3	Peningkatan Produktifitas Kesejahteraan Sumber Daya Manusia (Sdm) Pertanian, Perikanan Dan Kepastian Pasar	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap; Program Penyuluhan Pertanian	Dinas Kelautan Dan Perikanan; Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura Dan Perkebunan
				4	Peningkatan Keberlanjutan Prodiktivitas Sumber Daya Pertanian, Dan Digitalisasi Pertanian	Program Penyuluhan Pertanian	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura Dan Perkebunan
				5	Peningkatan Tata Kelola Sistem Pangan Nasional	Program Pengembangan Distribusi Dan Harga Pangan	Dinas Ketahanan Pangan
		4	Peningkatan Pengelolaan Kemaritiman, Perikanan, Dan Kelautan	1	Peningkatan Pengelolaan Wilayah Penyelolaan Perikanan (Wpp) Dan Tata Ruang Laut Dan Rencana Zonasi Pesisir Serta Pengelolaan Ruang Laut	Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir Dan Pulau Pulau Kecil	Dinas Kelautan Dan Perikanan
				2	Peningkatan Ekosistem Kelautan Dan Pemanfaatan Jasa Kelautan	Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir Dan Pulau Pulau Kecil	
				3	Peningkatan Produksi, Produktifitas, Standarisasi Mutu Dan Nilai Tambah Produk Kelautan Dan Perikanan	Program Penerapan Mutu, Pengembangan Usaha Dan Daya Saing	
				4	Peningkatan Fasilitas Usaha, Pembiayaan, Dan Akses Perlindungan Usaha Kelautan Perikanan Skala Kecil Serta Akses Terhadap Pengelolaan Sumber Daya	Program Penerapan Mutu, Pengembangan Usaha Dan Daya Saing	
				5	Peningkatan Sdm Dan Riset Kemaritiman Dan Kelautan Serta Databaase Kelautan Perikanan	Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir Dan Pulau Pulau Kecil	
		5	Penguatan Kewirausahaan, Usaha Mikro, Kecil Menegah	1	Peningkatan Kemitraan Usaha Antara Usaha Mikro Kecil Dan Usaha Menengah Besar	Program Pengembangan Umkm	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan

No.	Prioritas Pembangunan Nasional	Program Prioritas Nasional		Kegiatan Prioritas Nasional		Program Daerah Yang Mendukungan Kegiatan Prioritas Nasional (Pn)	Perangkat Daerah
1	2	3		4		5	6
			(Umkm) Dan Koperasi	2	Peningkatan Kapasitas Usaha Dan Akses Pembiayaan Bagi Wirausaha	Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	Menengah
				3	Peningkatan Kapasitas, Jangkauan, Dan Inovasi Koperasi	Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian	
				4	Peningkatan Penciptaan Start-Up Dan Peluang Usaha	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil Dan Usaha Mikro (Umkm)	
				5	Peningkatan Nilai Tambah Usaha Sosial	Program Pengembangan Umkm	
		6	Peningkatatan Nilai Tambah, Lapangan Kerja, Dan Investasi Di Sektor Riil Dan Insdustrialisasi	1	Peningkatan Industri Pengelolaan Berbasis Pertanian, Kemaritiman, Dan Non Agro Yang Terintegrasi Hulu-Hilir	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Dinas Perindustrian
				2	Peningkatan Industrialisasi Berbasis Hilirisasi Sumber Daya Alam, Termasuk Melalui Pengembangan Smelter Dan Kawasan Industri Terutama Di Luar Jawa	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	
				3	Peningkatan Daya Saing Destinasi Dan Industri Pengolahan Pariwisata, Termasuk Pariwisata Alam, Yang Didukung Penguatan Rantai Pasok	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Dinas Kebudayaan Dan Kepariwisataan
				4	Peningkatran Nilai Tambah Dan Daya Saing Produk Dan Usaha Kreatif Dan Digital	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	
				5	Perbaikan Iklim Usaha Dan Peningkatan Investasi, Termasuk Reformasi Ketenagakerjaan	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal Dan Ptsp
				6	Pengembangan Industri Halal	Program Pengendalian Izin Usaha Industri	Dinas Perindustrian

No.	Prioritas Pembangunan Nasional	Program Prioritas Nasional		Kegiatan Prioritas Nasional		Program Daerah Yang Mendukungan Kegiatan Prioritas Nasional (Pn)	Perangkat Daerah
1	2	3		4		5	6
		7	Peningkatan Ekspor Bernilai Tambah Tinggi Dan Penguatan Tingkat Kandungan Dalam Negeri	1	Peningkatan Diversifikasi Nilai Tambah, Dan Daya Saing Produk Ekspor Dan Jasa	Program Pengembangan Ekspor	Dinas Perdagangan
				2	Peningkatan Akses Dan Pendalaman Pasar Ekspor		
				3	Pengelolaan Impor		
				4	Peningkatan Kandungan Dan Penggunaan Produk Dalam Negeri Termasuk Melalui Pengadaan Pemerintah Yang Efektif	Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	
				5	Peningkatan Partisipasi Dalam Jaringan Produk Global	Program Pengembangan Ekspor	
				6	Peningkatan Citra Dan Diversifikasi Pemasaran Destinasi Pariwisata Prioritas Dan Destinasi Brending, Dan Produk Kreatif	Program Pemasaran Pariwisata; Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Dinas Kebudayaan Dan Kepariwisataan
				7	Peningkatan Efektifitas Prefential Trader Agreement (Pta)/ Free Trade Agreement (Fta)/ Comprehensive Economic Partnership Agreement (Cepa) Dan Diplomasi Ekonomi	Program Pengembangan Ekspor	Dinas Perdagangan
		8	Penguatan Pilar Pertumbuhan Dan Daya Saing Ekonomi	1	Peningkatan Pendalaman Sektor Keuangan	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Badan Keuangan Dan Aset Daerah
				2	Otimalisasi Pemanfaatan Teknologi Digital Dan Industri 4.0	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Dinas Perindustrian
				3	Peningkatan Sistem Logistik Dan Stabilitas Harga	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	Dinas Perdagangan
				4	Peningkatan Penerapan Praaktik Berkelanjutan Di Industri Pengolahan Pariwisata	Program Pemasaran Pariwisata	Dinas Kebudayaan Dan Kepariwisataan

No.	Prioritas Pembangunan Nasional	Program Prioritas Nasional		Kegiatan Prioritas Nasional		Program Daerah Yang Mendukungan Kegiatan Prioritas Nasional (Pn)	Perangkat Daerah
1	2	3		4		5	6
				5	Reformasi Fiskal	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Badan Keuangan Dan Aset Daerah
				6	Peningkatan Ketersediaan Dan Kualitas Data Dan Informasi Perkembagan Ekonomi, Terutama Pangan, Kemaritiman, Pariwisata, Ekonomi Kreatif, Dan Ekonomi Digital	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Dinas Perindustrian
2	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurai Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	1	Pengembangan Wilayah Sumatra				
		5	Pengembangan Wilayah Sulawesi	1	Pengembagan Kawasan Strategis	Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya	Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang
				2	Pengembangan Sektor Unggulan	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian; Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura Dan Perkebunan; Dinas Kelautan Dan Perikanan
				3	Pengembangan Kawasan Perkotaan	Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya	Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang
				4	Pengembangan Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan, Pedesaan, Dan Transmigrasi	Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
				5	Kelembagaan Dan Keuangan Daerah	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Badan Keuangan Dan Aset Daerah
3	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas Dan Berdaya Saing	1	Pengendalian Penduduk Dan Penguatan Tata Kelola Kependudukan	1	Percepatan Cakupan Administarsi Kependudukan	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
				2	Integritas Sistem Administrasi Kependudukan	Program Pengelolaan Profil Kependudukan	
				3	Pendampingan Dan Layanan Terpadu	Program Pendaftaran Penduduk	

No.	Prioritas Pembangunan Nasional	Program Prioritas Nasional		Kegiatan Prioritas Nasional		Program Daerah Yang Mendukungan Kegiatan Prioritas Nasional (Pn)	Perangkat Daerah
1	2	3		4		5	6
				4	Pemaduan Dan Sinkronisasi Kebijakan Pengendalian Penduduk	Program Pengendalian Penduduk	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
		2	Penguatan Pelaksanaan Perlindungan Sosial	1	Sistem Jaminan Sosial Nasional	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Dinas Sosial
				2	Bantuan Sosial Dan Subsidi Tapat Sasaran	Program Rehabilitasi Sosial	
				3	Perlindungan Sosial Adatif	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	
				4	Kesejahteraan Sosial	Program Pemberdayaan Sosial	
		3	Peningkatan Akses Dan Mutu Pelayanan Kesehatan	1	Peningkatan Kesehatan Ibu, Anak, Keluarga Berencana (Kb) Dan Kesehatan Reproduksi	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat; Program Pembinaan Keluarga Berencana Kb	Dinas Kesehatan; Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
				2	Percepatan Perbaikan Gizi Masyarakat	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan
				3	Peningkatan Pengendalian Penyakit		
				4	Penguatan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas)	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	
				5	Penguatan Sistem Kesehatan Dan Pengawsan Obat Dan Makanan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	
		4	Peningkatan Pemerataan Layanan Pendidikan Berkualitas	1	Peningkatan Kualitas Pengajaran Dan Pembelajaran	Program Pengembangan Kurikulum	Dinas Pendidikan

No.	Prioritas Pembangunan Nasional	Program Prioritas Nasional		Kegiatan Prioritas Nasional		Program Daerah Yang Mendukungan Kegiatan Prioritas Nasional (Pn)	Perangkat Daerah
1	2	3		4		5	6
				2	Afirmasi Askes Dan Percepatan Wajib Belajar 12 Tahun	Program Pengelolaan Pendidikan	
				3	Peningkatan Pengelolaan Dan Penempatan Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	
				4	Penjamin Mutu Kependidikan	Program Pengendalian Perizinan Pendidikan	
				5	Peningkatan Tata Kelola Pendidikan	Program Pengelolaan Pendidikan	
		5	Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan, Dan Pemuda	1	Pemenuhan Hak Dan Perlindungan Anak	Program Pemenuhan Hak Anak (Pha)	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
				2	Peningkatan Kesetaraan Gender, Pemberdayaan, Dan Perlindungan Perempuan	Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	
				3	Kualitas Pemuda	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Dinas Kepemudaan Dan Olahraga
		6	Pengentasan Kemiskinan	1	Akselerasi Penguatan Ekonomi Keluarga	Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera Ks	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
				2	Keperantaraan Usaha Dan Dampak Sosial	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Dinas Sosial
				3	Reforma Agraria	Program Penatagunaan Tanah	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan
				4	Perhutanan Sosial	Program Perhutanan Sosial	Dinas Kehutanan
		7	Peningkatan Produktifitas Dan Daya Saing	1	Pendidikan Dan Pelatihan Vokasi Berbasis Kerjasama Industri	Program Pengelolaan Pendidikan	Dinas Pendidikan

No.	Prioritas Pembangunan Nasional	Program Prioritas Nasional		Kegiatan Prioritas Nasional		Program Daerah Yang Mendukungan Kegiatan Prioritas Nasional (Pn)	Perangkat Daerah
1	2	3		4		5	6
				2	Penguatan Pendidikan Tinggi Berkualitas	Program Pengelolaan Pendidikan	Dinas Pendidikan
				3	Peningkatan Kapabilitas Iptek Dan Penciptaan Inovasi	Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah
				4	Prestasi Olah Raga	Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan	Dinas Kepemudaan Dan Olahraga
4	Revolusi Mental Dan Pembangunan Kebudayaan	1	Revolusi Mental Dan Pembinaan Ideologi Pancasila Untuk Memperkukuh Ketahanan Budaya Bangsa Dan Membentuk Mentalias Bangsa Yang Maju, Modern, Dan Berkarakter	1	Revolusi Mental Dalam Sistem Pendidikan Untuk Memperkuat Nilai Integritas, Etos Kerja Gotong Royong, Dan Budi Pekerti	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
				2	Revolusi Mental Dalam Tata Kelola Pemerintahan Untuk Penguatan Budaya Birokrasi Yang Bersih, Melayani, Dan Responsif		
				3	Revolusi Mental Dalam Sistem Sosial Untuk Memperkuat Ketahana, Kualitas Dan Peran Keluarga Dalam Masyarakat Dalam Pembentukan Karekter		
				4	Penguatan Pusat-Pusat Perubahan Revolusi Mental		
				5	Pembangunan Dan Pemberdayaan Sistem Ekonomi Kerakyatan Berdasarkan Pancasila		
				6	Pembinaan Ideologi Pancasila, Pendidikan Kewarganegaraan, Wawasan Kebangsaan Dan Bela Negara Untuk Menumbuhkan Jiwa Nasionalisme Dan Patriotisme		
		2	Meningkatkan Pemajuan Dan Pelestarian Kebudayaan Untuk Memperkuat Karakter Dan Memperteguh Jati Diri	1	Revitalisasi Dan Aktualisasi Nilai Budaya Dan Kearifan Lokal	Program Pengembangan Kebudayaan	Dinas Kebudayaan Dan Kepariwisataan
				2	Pengembangan Dan Pemanfaatan Kekayaan Budaya Untuk Memperkuat Karakter Bangsa		

No.	Prioritas Pembangunan Nasional	Program Prioritas Nasional		Kegiatan Prioritas Nasional		Program Daerah Yang Mendukungan Kegiatan Prioritas Nasional (Pn)	Perangkat Daerah
1	2	3		4		5	6
			Bangsa, Memingkatkan Kesejahteraan Rakyat, Dan Mempengaruhi Arah Perkembangan Peradaban Dunia		Dan Kesejahteraan Rakyat		
				3	Perlindungan Hak Kebudayaan Dan Ekspresi Budaya Untuk Memperkuat Budaya Yang Inklusif		
				4	Pengembangan Diplomasi Budaya Untuk Memperkuat Pengaruh Indonesia Dalam Perkembangan Peradaban Dunia		
				5	Pengembangan Tata Kelola Pembangunan Kebudayaan		
		3	Memperkuat Modernisasi Beragama Untuk Mengukuhkan Toleransi, Kerukunan, Dan Harmoni Sosial	1	Penguatan Cara Pandang, Sikap, Dan Praktik Beragama Dalam Prespektif Jalan Tengah Untuk Memantapkan Persaudaraan Dan Kebersamaan Dikalangan Umat Beragama	Program Kesejahteraan Rakyat	Biro Kesjahteraan Rakyat
				2	Penguatan Harmini Dan Kerukunan Umat Beragama		
				3	Penyelarasan Relasi Agama Dan Budaya		
				4	Peningkatan Kualitas Pelayanan Keagamaan		
				5	Pengembagngan Ekonomi Dan Sumber Daya Keagammaan		
		4	Peningkatab Budaya Literasi, Inovasi, Dan Kreatifitas Bagi Terwujudnya Masyarakat Berpengetahuan Dan Berkarakter	1	Peningkatan Budaya Literasi	Program Pembinaan Perpustakaan	Dinas Perpustakaan
				2	Pengembangan, Pembinaan, Dan Perlindungan Bahasa Indonesia, Bahasa Dan Aksara Daerah, Serta Sastra	Program Pengembangan Bahasa Dan Sastra	Dinas Pendidikan
				3	Pengembangan Budaya Iptek, Inovasi, Kreativitas Dan Daya Cipta	Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah

No.	Prioritas Pembangunan Nasional	Program Prioritas Nasional		Kegiatan Prioritas Nasional		Program Daerah Yang Mendukungan Kegiatan Prioritas Nasional (Pn)	Perangkat Daerah
1	2	3		4		5	6
				4	Penguatan Institusi Sosial Penggerak Literasi Dan Inovasi	Program Pembinaan Perpustakaan; Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	Dinas Perpustakaan; Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah
5	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1	Infrastruktur Pelayanan Dasar	1	Penyediaan Akses Perumahan Dan Permukiman Layak, Aman, Dan Terjangkau	Program Pengembangan Perumahan; Program Kawasan Permukiman	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan
				2	Penyediaan Akses Air Minum Dan Sanitasi Layak Dan Aman	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (Psu)	
				3	Pengelolaan Air Tanah Dan Air Baku Berkelanjutan	Program Pengelolaan Aspek Kegeologian	Dinas Energi Dan Sumberdaya Mineral
				4	Keselamatan Dan Keamanan Transportasi	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Llaj	Dinas Perhubungan
				5	Ketahanan Kebencanaan Infrastruktur	Program Penanggulangan Bencana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
				6	Waduk Multipurpose Dan Modernisasi Irigasi	Program Pengelolaan Sumber Daya Air Sda	Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang
		2	Infrastruktur Ekonomi	1	Konektivitas Jalan	Program Penyelenggaraan Jalan	Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang
				2	Konektivitas Keretaapi	Program Pengelolaan Perkeretaapian	Dinas Perhubungan
				3	Konektivitas Laut	Program Pengelolaan Pelayaran	
				5	Konektivitas Darat	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Llaj	Dinas Perhubungan
		3	Infrastruktur Perkotaan	1	Transportasi Perkotaan	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Llaj)	Dinas Perhubungan

No.	Prioritas Pembangunan Nasional	Program Prioritas Nasional		Kegiatan Prioritas Nasional		Program Daerah Yang Mendukungan Kegiatan Prioritas Nasional (Pn)	Perangkat Daerah
1	2	3		4		5	6
				2	Infrastruktur Dan Ekosistem Tik Perkotaan	Program Penyelenggaraan Jalan; Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Llaj); Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik	Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang; Dinas Perhubungan; Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian
				3	Penyediaan Akses Perumahan Dan Permukiman Layak, Aman, Dan Terjangkau Di Perkotaan	Program Pengembangan Perumahan; Program Kawasan Permukiman	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan
		4	Energi Ketenaga Listrikan	1	Keberlanjutan Penyediaan Energi Dan Ketenagalistrikan	Program Pengelolaan Ketenagalistrikan	Dinas Energi Dan Sumberdaya Mineral
				2	Akses Dan Keterjangkauan Energi Dan Ketenagalistrikan		
				3	Kecukupan Penyediaan Energi Dan Tenaga Listrik		
		5	Transformasi Digital	1	Penuntasan Infrastruktur Tik	Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian
				2	Pemanfaatan Infrastruktur Tik		
				3	Fasilitas Pendukung Transformasi Digital		
6	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, Dan Perubahan Iklim	1	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	1	Pencegahan Pencemaran Dan Kerusakan Sumber Daya Alam Dan Lingkungan Hidup	Program Pengendalian Pencemaran Dan Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup
				2	Penanggulangan Pencemaran Dan Kerusakan Sumber Daya Alam Dan Lingkungan Hidup		
				3	Pemulihan Pencemaran Dan Kerusakan Sumber Daya Alam Dan Lingkungan Hidup		

No.	Prioritas Pembangunan Nasional	Program Prioritas Nasional		Kegiatan Prioritas Nasional		Program Daerah Yang Mendukungan Kegiatan Prioritas Nasional (Pn)	Perangkat Daerah
1	2	3		4		5	6
				4	Penguatan Kelembagaan Dan Penegakan Hukum Di Bidang Sumber Daya Alam Dan Lingkungan Hidup	Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Pplh); Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	
		2	Peningkatan Ketahanan Bencana Dan Iklim	1	Penanggulangan Bencana	Program Penanggulangan Bencana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
				2	Peningkatan Ketahanan Iklim	Program Pengendalian Pencemaran Dan Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup
		3	Pembangunan Rendah Karbon	1	Pembangunan Energi Berkelanjutan	Program Pengelolaan Energi Terbarukan	Dinas Energi Dan Sumberdaya Mineral
				2	Pemulihan Lahan Berkelanjutan		
				3	Pengelolaan Limbah	Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun B Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun Limbah B3	Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup
				4	Pengembangan Industri Hijau		
				5	Rendah Karbon Pesisir Dan Laut	Program Pengelolaan Kelautan Pesisir Dan Pulau Pulau Kecil	Dinas Kelautan Dan Perikanan
7	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanaan Publik	1	Konsolidasi Demokrasi	1	Penguatan Kapasitas Lembaga Demokrasi	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
				2	Penguatan Kesetaraan Dan Kebebasan		

No.	Prioritas Pembangunan Nasional	Program Prioritas Nasional		Kegiatan Prioritas Nasional		Program Daerah Yang Mendukungan Kegiatan Prioritas Nasional (Pn)	Perangkat Daerah
1	2	3		4		5	6
				3	Peningkatan Kualitas Komunikasi Publik	Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian
		2	Optimalisasi Kebijakan Luar Negeri	1	Penguatan Integritas Nkri Dan Perlindungan Wni Di Luar Negeri	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
		3	Penegakan Hukum Nasional	1	Penataan Regulasi	Program Fasilitasi Dan Koordinasi Hukum	Biro Hukum
				2	Perbaikan Sistem Hukum Pidana Dan Perdata		
				3	Penguatan Sistem Anti Korupsi		
				4	Peningkatan Akses Terhadap Keadilan		
		4	Reformasi Birokrasi Dan Tata Kelola	1	Penguatan Inplementasi Manajemen Asn Berbasis Sistem Merit	Program Kepegawaian Daerah	Badan Kepegawaian Daerah
				2	Transformasi Pelayanan Publik	Program Penataan Organisasi	Biro Kesejahteraan
				3	Penataan Kelembagaan Dan Proses Bisnis		
				4	Reformasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Pembangunan		
		5	Menjaga Stabilitas Keamanan Nasional	1	Penguatan Keamanan Dalam Negeri	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
				2	Penguatan Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat	Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Satuan Polisi Pamong Praja
				3	Penguatan Keamanan Dan Ketahanan Siber	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian

4.4. Pokok-Pokok Pikiran DPRD Provinsi Sulawesi Selatan

Pokok - pokok pikiran DPRD untuk rencana pembangunan tahun 2023 sebagai pelaksanaan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD dan RPJMD, Serta Tata Cara Perubahan Rencana RPJPD dan RPJMD, dan RKPD.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan, pasal 5 ayat (3) menjabarkan bahwa RKPD merupakan penjabaran dari RPJMD dan mengacu pada RKP, memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, rencana kerja, dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Penyusunan RKPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023 merupakan tahun kelima perencanaan dari RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023, selain itu, sesuai dengan mandat dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 pasal 153 bahwa kaidah perumusan kebijakan rencana meliputi antara lain penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD, maka dalam proses penyusunan RKPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023 harus memperhatikan pokok-pokok pikiran DPRD Provinsi Sulawesi Selatan.

Pokok-pokok Pikiran DPRD dalam kerangka penyusunan RKPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023 berisi saran dan pendapat dari DPRD berupa pokok-pokok pikiran yang berdasarkan hasil reses/penjaringan aspirasi masyarakat sebagai bahan perumusan kegiatan, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran yang selaras dengan pencapaian sasaran pembangunan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang RPJMD. Pokok-pokok Pikiran DPRD telah di integrasikan ke dalam aplikasi e–planning yang terintegrasi pula pada dokumen penyusunan RKPD dan e-budgeting di dalam penyusunan anggaran (SIPD Kemendagri). Pokok-pokok pikiran yang diusulkan sebanyak 4.005 usulan dan yang telah di intergrasikan ke dalam dokumen perencanaan sebanyak 2.854 usulan berdasarkan pada hasil telaahan dari tim penyusun RKPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023.

Pokok-pokok Pikiran DPRD merupakan dokumen pemikiran sejumlah rekomendasi kebijakan pembangunan daerah yang bersifat makro dan mikro yang berasal dari berbagai masukan, khususnya konstituen dari masing-masing Anggota DPRD untuk menjadi saran dan pendapat di dalam penyusunan Rancangan RKPD tahun 2023. Adapun pokok-pokok pikiran DPRD Provinsi Sulawesi Selatan secara garis besar adalah yang terkait hal-hal sebagai berikut:

- ✓ Peningkatan kualitas pendidikan melalui peningkatan sarana prasarana pendidikan
- ✓ Pengembangan ekonomi kreatif, UMKM dan kewirausahaan
- ✓ Peningkatan kualitas dan sarana prasarana kesehatan masyarakat
- ✓ Pelestarian dan peningkatan kualitas lingkungan hidup
- ✓ Peningkatan sarana prasarana infrastruktur jalan dan infrastruktur pertanian
- ✓ Peningkatan kualitas Perumahan dan permukiman
- ✓ Peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin dan yang berkebutuhan khusus

- ✓ Peningkatan sarana prasarana pertanian, peternakan, perkebunan dan perikanan
- ✓ Pengembangan destinasi wisata dalam menunjang ekonomi masyarakat

4.5. Peran Pemangku Kepentingan Dalam Pencapaian Sasaran Pembangunan

Pencapaian sasaran pembangunan tahun 2023 yang merupakan penjabaran dari Perubahan RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan, didasarkan pada strategi yang dirumuskan dengan melakukan analisis berdasarkan kekuatan dan kelemahan serta peluang dan ancaman dalam mencapai sasaran. Salah satu upaya mencapai sasaran pembangunan daerah Sulawesi Selatan, sebagaimana ditetapkan dalam kaidah pelaksanaan RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan adalah memperkuat peran pemangku kepentingan dalam mendukung pelaksanaan program pembangunan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan guna menjamin pencapaian kinerja pembangunan daerah secara optimal.

Para pemangku kepentingan yang berpartisipasi aktif dalam mendukung pencapaian kinerja pembangunan Sulawesi Selatan, meliputi Pemerintah, Akademisi, Pelaku Usaha, dan Organisasi Kemasyarakatan. Salah satu kontributor utama dalam mendukung pencapaian sasaran kinerja pembangunan Sulawesi Selatan adalah Pemerintah yang selain mengalokasikan pendanaan untuk program dan kegiatan pembangunan juga bekerjasama dengan pemerintah Luar Negeri melalui pengembangan program inisiatif bersama untuk mendukung pencapaian target pembangunan, khususnya target pembangunan global.

Peran pemangku kepentingan dalam melaksanakan strategi pembangunan daerah Sulawesi Selatan sebagaimana tertuang dalam RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023 dapat digambarkan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan strategi peningkatan kapabilitas dan keunggulan SDM aparatur serta inovasi dalam pelayanan publik dilaksanakan dalam rangka pencapaian sasaran Nilai SAKIP A dan Indeks Pelayanan Publik A, mendapatkan dukungan dari Pemerintah Indonesia yang bekerjasama dengan beberapa lembaga Pemerintah Luar Negeri, yang meliputi:
   a) Pemerintah Australia diantaranya melalui program PAIR (Partnership for Australia-Indonesia Research) dengan melakukan proyek penelitian kebijakan di Sulawesi Selatan dengan Tema Konektivitas, Wilayah dan Masyarakat dalam rangka mengeksplorasi solusi dan inovasi untuk mendukung pengambilan kebijakan daerah;
   b) Pemerintah Amerika Serikat melalui Badan Kerjasama Pembangunan Pemerintah Amerika Serikat (USAID) yang melakukan penguatan tata kelola pemerintahan, antara lain peningkatan tata kelola pemerintahan melalui kegiatan ERAT, kemitraan pembaruan tata pemerintahan melalui kegiatan INTEGRITAS, dan memperkuat akuntabilitas pemerintah daerah dan toleransi komunal melalui kegiatan MADANI;
   c) Bank Dunia melalui Yayasan BaKTI melaksanakan Program Rintisan Pengembangan Pengetahuan untuk Penyusunan Kebijakan

Pembelajaran dengan melakukan pengkajian dengan pendekatan kolaborasi dan melaksanakan kompetisi inovasi pelayanan publik.

2. Pelaksanaan strategi peningkatan jangkauan dan kualitas infrastruktur wilayah, diharapkan dapat memenuhi kebutuhan air minum dan sanitasi yang layak dan aman yang merupakan kebutuhan dasar masyarakat, mendapatkan dukungan dari Pemerintah Indonesia yang bekerjasama dengan lembaga Pemerintah Luar Negeri, diantaranya
   a) Bank Dunia melalui Yayasan BaKTI melaksanakan program peningkatan kapasitas pengelolaan air limbah domestik melalui pelatihan bagi operator IPLT, pelatihan penyusunan database layanan air limbah domestik, pelatihan manajemen pengelolaan air limbah domestik, dan pendayagunaan dana zakat untuk pembangunan sarana dan prasarana air minum dan sanitasi;
   b) Pemerintah Amerika Serikat melalui Badan Kerjasama Pembangunan Pemerintah Amerika Serikat (USAID) yang melakukan penguatan peran pemerintah dalam pemenuhan air minum, sanitasi dan kesehatan lingkungan melalui program IUWASH Tangguh.
3. Pelaksanaan strategi peningkatan akses dan pemerataan layanan pendidikan menengah, diharapkan dapat meningkatkan Indeks Pendidikan menjadi sebesar 67,05 pada Tahun 2023 yang komponennya adalah Rata Rata Lama Sekolah dan Harapan Lama Sekolah mendapatkan dukungan dari Pemerintah Indonesia yang bekerjasama dengan lembaga Pemerintah Luar Negeri, diantaranya UNICEF yang memberikan dukungan teknis melalui program pengentasan anak tidak sekolah yang akan dilengkapi dengan peningkatan keterampilan melalui penguatan sistem pendidikan nonformal, dan pengembangan pendidikan anak usia dini guna meningkatkan partisipasi pendidikan anak usia dini di Sulawesi Selatan;
4. Pelaksanaan strategi peningkatan pemenuhan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan dan olahraga, diharapkan akan mencapai sasaran meningkatnya derajat kesehatan masyarakat yang tercermin pada Indeks Kesehatan sebesar 77,86 pada tashun 2023. Pencapaian sasaran tersebut direncanakan akan mendapatkan dukungan dari Pemerintah Indonesia yang bekerjasama dengan lembaga Pemerintah Luar Negeri yang meliputi:
   a) UNICEF yang memberikan dukungan teknis melalui beberapa program yang diprioritaskan pada penanganan kesehatan anak, diantaranya penanganan malnutrisi anak usia dini, penyediaan sarana sanitasi sekolah yang layak dan aman, perawatan kesehatan bayi , pencegahan dan pengurangan angka kesakitan anak, dan peningkatan cakupan imunisasi anak;
   b) Pemerintah Australia melalui program AIHSP (Australia Indonesia Health Security Partnership) untuk ketahanan kesehatan yang meliputi kesehatan hewan dan kesehatan manusia di Provinsi Sulawesi Selatan, khususnya ketahanan terhadap resiko penyakit menular dan pengendalian penyakit hewan prioritas;
   c) Pemerintah Amerika Serikat melalui Badan Kerjasama Pembangunan Pemerintah Amerika Serikat (USAID) yang melakukan penanganan

kesenjangan cakupan pengobatan penyakit tuberkulosis melalui MANDIRI TB, meminimalkan resiko dan dampak penyakit hewan dan penykit infeksi baru melalui FAO GHS, percepatan penyediaan akses dan pelaksanaan vaksinasi COVID-19 melalui MENTARI-TB for COVID-19 dan BA for COVID-19, dan peningkatan cakupan dan pemerataan kualitas pelayanan ibu dan bayi baru lahir baik pada fasilitas pelayanan kesehatan pemerintah maupun swasta; dan

d) Pemerintah Jepang melalui JICA yang melakukan pengembangan kapasitas ICU dengan memanfaatkan telemedicine sebagai salah satu respon terhadap COVID-19 dan melakukan proyek penguatan kapasitas untuk peringatan dini dan respon terhadap penyakit menular.

5. Pelaksanaan strategi peningkatan kualitas lingkungan hidup serta kemampuan adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim, diharapkan dapat menurunkan potensi penurunan emisi GRK yang ditargetkan sebesar 1.347 Juta Ton CO^2Eq, yang mendapatkan dukungan dari Pemerintah Indonesia yang bekerjasama dengan lembaga Pemerintah Luar Negeri yang meliputi:
   a) Pemerintah Amerika Serikat melalui Badan Kerjasama Pembangunan Pemerintah Amerika Serikat (USAID) yang melakukan penanganan pencemaran sampah plastik agar tidak sampai ke laut melalui kegiatan CCBO, mendukung pencapaian target transformasi sektor energi untuk meningkatkan penggunaan EBT melalui SINAR, dan mempromosikan praktik agroforestri yang berkelanjutan sebagai upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim melalui kegiatan ACTIVE;
   b) Pemerintah Australia melalui program Kemitraan Indonesia Australia untuk Transportasi (KIAT) yang difasilitasi oleh BAPPENAS melakukan penyusunan dokumen Sustainable Urban Mobility Plan (SUMP) dalam rangka Pengembangan Sistem Angkutan Umum Massal Perkotaan di 6 (enam) wilayah Metropolitan yang merupakan *Major Project* RPJMN 2020-2024. Kegiatan ini dimaksudkan untuk mendukung pengurangan emisi GRK di Kawasan Perkotaan Mamminasata melalui penggunaan transportasi massal;
   c) Lembaga International Adaptation Fund yang dibentuk untuk mendanai proyek dan program adaptasi perubahan iklim melalui kerjasama KEMITRAAN DAN KONSORSIUM ADAPTASI PERUBAHANIKLIM (KAPABEL) yang mengembangkan dukungan dan p[rogran adaptasi masyarakat ekosistem DAS Saddang Berbasis pengelolaan pangan hutan.

BAB V

ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KABUPATEN/KOTA

BAB V
ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KABUPATEN/KOTA

Pandemi COVID-19 masih belum usai, namun sudah cukup melambat sehingga dapat memicu pertumbuhan ekonomi Sulawesi yang tumbuh sebesar 4,65 persen pada tahun 2021. Peningkatan kinerja ekonomi terutama terlihat pada triwulan IV yang tercatat tumbuh sebesar 7,89 persen, lebih tinggi dibandingkan dengan triwulan sebelumnya di angka 3,25 persen serta kembali tumbuh diatas nasional. Perbaikan kinerja pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan utamanya didorong oleh kinerja lapangan usaha, pertanian, pertambangan dan penggalian, perdagangan, industry pengolahan, konstruksi. Akselerasi pada lapangan usaha pertanian didorong oleh peningkatan produksi perikanan khususnya rumput laut, sedangkan peningkatan kinerja sector pertambangan dan penggalian diakibatkan oleh meningkatnya permintaan bahan baku produk galian untuk proyek konstruksi dan meningkatnya permintaan domestic dan global seiring upaya hilirisasi komoditas pertambangan.

Peningkatan pertumbuhan industry pengolahan di Sulawesi Selatan salah satunya didorong oleh peningkatan kinerja korporasi industry pengolahan smelter nikel. Peningkatan kinerja pada lapangan usaha industry mengakselerasi kinerja lapangan usaha perdagangan, khususnya pada subkomponen makanan dan minuman serta sandang. Sedangkan peningkatan kinerja lapangan usaha konstruksi diakselerasi oleh pembangunan berbagai proyek infrastruktur khususnya proyek pemerintah yang mengejar realisasi target tahunan.

Kondisi ketenagakerjaan di Sulawesi Selatan pada tahun 2021 menunjukkan perbaikan kondisi yang dipengaruhi oleh peningkatan pada lapangan usaha konstruksi yang meningkat sebesar 15,87 persen poin dengan pangsa 6,45 persen, lapangan usaha perdagangan yang meningkat sebesar 9,04 persen poin dengan pangsa 18,75 persen, dan industry pengolahan yang meningkat sebesar 7,76 persen poin dengan pangsa 8,47 persen. Meski mengalami perlambatan pertumbuhan dibandingkan dengan Agustus 2020 sebesar 2,30 persen poin, lapangan usaha pertanian pada Agustus 2021 masih menjadi sector penyerap tenaga kerja terbanyak di Sulawesi Selatan dengan pangsa sebanyak 37,34 persen. Perbaikan ini menjadikan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Sulawesi Selatan menurun sebesar 0,59 persen poin menjadi 5,72 persen pada Agustus 2021.

Penduduk miskin Sulawesi Selatan pada September 2021 tercatat sebesar 8,53 persen, dengan komposisi penduduk miskin perdesaan sebesar 74,02 persen dan penduduk miskin perkotaan sebesar 25,98 persen. Jumlah penduduk miskin di Sulawesi Selatan pada September 2021 mengalami penurunan sebesar 34,78 ribu orang terhadap September 2020, yang disebabkan meningkatnya pendapatan masyarakat seiring meningkatnya aktivitas social ekonomi dan meningkatnya produktivitas pertanian.

Memperhatikan kinerja pembangunan dan mengacu pada strategi pengembangan wilayah Sulawesi yaitu percepatan pertumbuhan dan

transformasi wilayah Sulawesi, pemerataan intrawilayah, dan penguatan ketahanan bencana, maka sasaran utama pengembangan Wilayah Sulawesi pada Tahun 2023 difokuskan pada (1) percepatan laju pertumbuhan ekonomi melalui pengembangan kawasan strategis dan penguatan sector unggulan; (2) penurunan tingkat kemiskinan melalui percepatan pemenuhan SPM; serta (3) peningkatan lapangan kerja yang berkualitas. Adapun target kontribusi Wilayah Sulawesi dalam pencapaian target pembangunan Nasional tahun 2023 di sajikan dalam Tabel V.1. Target Pengembangan Wilayah Sulawesi Tahun 2023.

Tabel V. 1
Target Pengembangan Wilayah Sulawesi Berdasarkan Provinsi Tahun 2023

Indikator	Target Tahun 2023					
	Sulawesi Utara	Sulawesi Tengah	Sulawesi Selatan	Sulawesi Tenggara	Gorontalo	Sulawesi Barat
Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,30 – 6,00	9,90 -10,90	6,70 – 7,30	6,50 – 7,30	6,30 – 6,90	5,50 – 6,20
Tingkat Kemiskinan (%)	5,83 – 6,50	8,85 -9,50	7,75 – 8,00	9,15 – 10,00	12,87 – 14,00	9,51 – 10,00
Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	6,27 – 6,92	2,98 – 3,36	4,95 – 5,50	3,16 – 3,73	2,80 – 2,96	2,52 – 3,00

Sumber: Peraturan Menteri PPN/Kepala BAPPENAS Nomor 4 Tahun 2022 tentang Rancangan Awal RKP Tahun 2023

Sebagai upaya mendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional sebagaimana tema pembangunan Tahun 2023 yaitu Peningkatan Produktivitas untuk Trnasformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, maka kebijakan pembangunan kabupaten/kota pada tahun 2023 diarahkan untuk mewujudkan Sulawesi Selatan yang Inovatif, Produktif, Kompetitif, Inklusif dan Berkarakter melalui Pemantapan Kesejahteraan Sulawesi Selatan dengan mengoptimalkan pembangunan manusia yang produktif dan berkarakter sebagaimana tema pembangunan Tahun 2023 yang diamanatkan dalam RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023.

Kebijakan pembangunan nasional mengamanatkan pembangunan wilayah di Sulawesi Selatan tahun 2023 tetap dilaksanakan berdasarkan koridor pertumbuhan dan koridor pemerataan dengan mengacu pada arahan Rencana Tata Ruang yang meliputi 5 (lima) upaya strategis, yaitu: **Pertama**, pengembangan kawasan strategis yang difokuskan pada pengembangan KI Takalar dan destinasi pariwisata pengembangan Toraja-Makassar-Selayar; **Kedua**, pengembangan sector unggulan yang akan difokuskan pada peningkatan produktivitas komoditas unggulan sumber daya alam berupa kakao, kopi, lada, pala, cengkeh, kelapa, garam dan perikanan budidaya. Pada upaya peningkatan produktivitas perikanan budidaya akan dilakukan dengan skema pemberdayaan masyarakat dengan memberikan calon induk dan benih unggul.

Ketiga, pengembangan kawasan perkotaan yang difokuskan pada pengembangan wilayah metropolitan yaitu kawasan perkotaan Mamminasata dan pengembangan Kota Parepare sebagai kawasan kota sedang, **Keempat**,

pembangunan kawasan perdesaan dan kawasan transmigrasi yang difokuskan pada revitalisasi kawasan transmigrasi Gilireng di Kabupaten Wajo, kawasan transmigrasi Masamba di kabupaten Luwu Utara, dan kawasan transmigrasi Mahalona di kabupaten Luwu Timur, dan **Kelima**, penataan kelembagaan dan keuangan daerah yang difokuskan pada peningkatan rata-rata capaian penerapan SPM, khususnya di bidang perumahan rakyat, social dan pekerjaan umum percepatan kemudahan berusaha, dan penguatan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (GWPP) pada fungsi pembinaan dan pengawasan kinerja pemerintah kabupaten/kota.

Kebijakan pembangunan nasional mengarahkan pengembangan wilayah tahun 2023 untuk mempercepat pemulihan kondisi sosial ekonomi masyarakat dan daerah, meningkatkan pemerataan pembangunan antar wilayah serta mendorong percepatan pertumbuhan dan peningkatan peran wilayah di luar Jawa-Bali dengan tetap menjaga prospek pertumbuhan di wilayah Jawa-Bali yang dilakukan melalui pendekatan pertumbuhan dan pendekatan pemerataan secara terpadu yang ditunjang dengan penguatan ketahanan terhadap bencana.

Percepatan pemulihan kondisi sosial ekonomi Sulawesi Selatan dilakukan dengan mendorong pemerataan pembangunan melalui transformasi perekonomian wilayah berbasis komoditas unggulan, pengembangan pariwisata serta diversifikasi kegiatan ekonomi lainnya dilakukan dengan meningkatkan upaya hilirisasi pengolahan sumber daya alam dengan tetap menjaga keberlanjutan lingkungan yang mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) Sulawesi Selatan.

Memperhatikan capaian pembangunan kabupaten/kota dan sasaran pembangunan Sulawesi Selatan, maka strategi pembangunan wilayah dijabarkan dalam 5 (lima) wilayah pengembangan berbasis kawasan andalan sebagaimana diatur dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) yaitu Kawasan Makassar dan sekitarnya, Kawasan Bulukumba dan sekitarnya, Kawasan Watampone dan sekitarnya, Kawasan Parepare dan sekitarnya, dan Kawasan Palopo dan sekitarnya sebagaimana gambar berikut:

Gambar V. 1
Wilayah Pengembangan Kawasan Provinsi Sulawesi Selatan

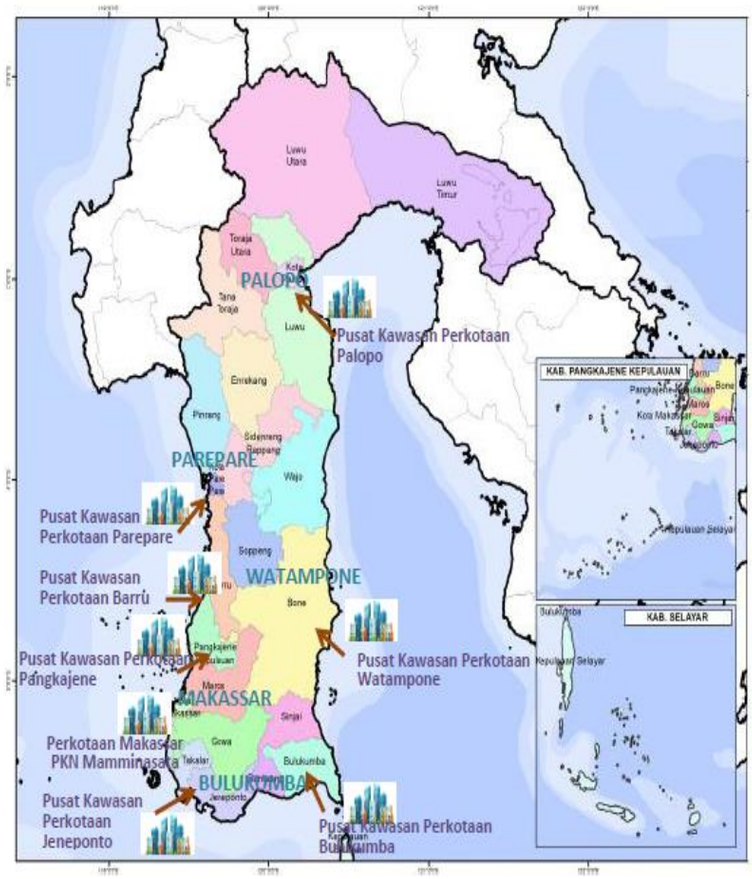

Sumber: PP 13 Tahun 2017 Tentang RTRWN, diolah Bappelitbangda, 2022

5.1. Capaian Pengembangan Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan

Pengembangan wilayah dalam pembangunan nasional, sebagaimana diamanatkan dalam RPJMN Tahun 2020-2024 dilakukan melalui dua pendekatan utama, yaitu pendekatan pertumbuhan dan pendekatan pemerataan yang berbasis wilayah pulau. Pengembangan wilayah Sulawesi Selatan berdasarkan pendekatan koridor pertumbuhan diarahkan pada kabupaten/kota yang berperan sebagai pusat-pusat pertumbuhan dengan basis keunggulan wilayah yang berperan sebagai pusat produksi, khususnya pusat produksi pertanian, dan perikanan di kabupaten Pinrang, Luwu Timur, Luwu Utara, Luwu, Wajo dan Soppeng; pusat pengolahan sumber daya alam di kabupaten Pangkajene Kepulauan; pusat perdagangan dan industri kepelabuhanan di kabupaten Barru dan Kota Parepare; pusat pengembangan jasa pariwisata di Kota Makassar dan kabupaten Maros; dan pusat pelayanan jasa dan perdagangan di Kota Palopo dan Kawasan Perkotaan Mamminasata yang meliputi wilayah Kota Makassar, dan Kabupaten Gowa, Takalar dan Maros. Sedangkan berdasarkan koridor pemerataan diarahkan pada kabupaten yang berfungsi sebagai kawasan penyangga bagi pusat pertumbuhan yang berperan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi lokal yang meliputi Kabupaten Toraja, Toraja Utara, Bone, Bantaeng, Bulukumba dan Sinjai.

Secara umum arah kebijakan pengembangan wilayah Sulawesi Selatan adalah sebagai berikut:

1. Poros pengembangan Selatan – Selatan yang membentang dari Kawasan Perkotaan Mamminasata – Kawasan Bulukumba, dikembangkan untuk memantapkan pembangunan di Kawasan Perkotaan Mamminasata dan mempercepat pembangunan di Kawasan Bulukumba dengan tetap mengarusutamakan pembangunan berkelanjutan berbasis daya dukung dan daya tampung lingkungan, sehingga mampu menjadi pendorong ekonomoi wilayah Sulawesi Selatan dengan pengembangan Kawasan Industri di Kawasan Perkotaan Mamminasata, pembangunan KA Makassar-Parepare; Pembangunan Makassar New Port; pengembangan Bandar Udara Sultan Hasanuddin; pembangunan SPAM Regional Mamminasata; pengembangan Sistem Angkutan Massal Perkotaan; dan pembangunan jalan bypass Mamminasata;
2. Poros pengembangan Selatan – Bagian Tengah yang menghubungkan Kawasan Bulukumba –Kawasan Watampone, dikembangkan untuk mempercepat peningkatan kesejajaran ekonomi pada kawasan Selatan dengan tetap mengarusutamakan pembangunan berkelanjutan berbasis daya dukung dan daya tampung lingkungan guna memantapkan pembangunan kawasan yang merupakan kawasan andalan Bulukumba-Watampone dengan pengembangan kawasan Industri Bantaeng dan kawasan industry Jeneponto; pengembangan pelabuhan pengumpul dan pelabuhan regional; pembangunan simpul transportasi antar moda dan peningkatan jaringan jalan; pengembangan bandar udara Arung Palakka; serta pembangunan bendungan dan peningkatan jaringan irigasi;
3. Poros pengembangan Selatan – Utara yang menghubungkan Kawasan Perkotaan Mamminasata dengan Kawasan Perkotaan Parepare, dikembangkan untuk untuk mempercepat peningkatan kesejajaran ekonomi pada kawasan Utara dengan tetap mengarusutamakan pembangunan berkelanjutan berbasis daya dukung dan daya tampung lingkungan guna mendukung percepatan pembangunan kawasan yang merupakan kawasan Strategis Nasional Parepare dengan pengembangan kawasan Industri Parepare; pengembangan pelabuhan pengumpul dan pelabuhan regional; pembangunan jaringan kereta api Makassar-Parepare; pembangunan simpul transportasi antar moda dan peningkatan jaringan jalan arteri dan kolektor; pembangunan pembangkit listrik; pembangunan SPAM Regional; serta peningkatan kapasitas bendungan dan jaringan irigasi;
4. Poros pengembangan Utara – Utara yang menghubungkan Kawasan Parepare dengan Kawasan Palopo, dikembangkan untuk mempercepat peningkatan kesejajaran ekonomi pada kawasan Utara dengan tetap mengarusutamakan pembangunan berkelanjutan berbasis daya dukung dan daya tampung lingkungan guna memantapkan pembangunan kawasan Palopo yang merupakan bagian dari Kawasan Strategis Nasional Sorowako dan mempercepat pembangunan Kawasan Strategis Toraja dengan pengembangan kawasan Industri Sorowako; pengembangan pelabuhan pengumpul dan pelabuhan regional; pembangunan simpul transportasi antar moda dan peningkatan jaringan jalan; pengembangan bandar udara

Buntu Kunik; serta pembangunan bendungan dan peningkatan jaringan irigasi; dan

5. Poros Pengembangan Utara – bagian Tengah yang menghubungkan Kawasan Palopo dengan Kawasan Watampone, dikembangkan dengan tetap mengarusutamakan pembangunan berkelanjutan berbasis daya dukung dan daya tampung lingkungan untuk mempercepat peningkatan kesejajaran ekonomi pada kawasan Watampone dengan pengembangan pelabuhan pengumpul dan pelabuhan regional; peningkatan jaringan jalan; serta pemanfaatan potensi gas alam di kabupaten Wajo.

Gambar V. 2
Arah Pengembangan Kawasan Provinsi Sulawesi Selatan

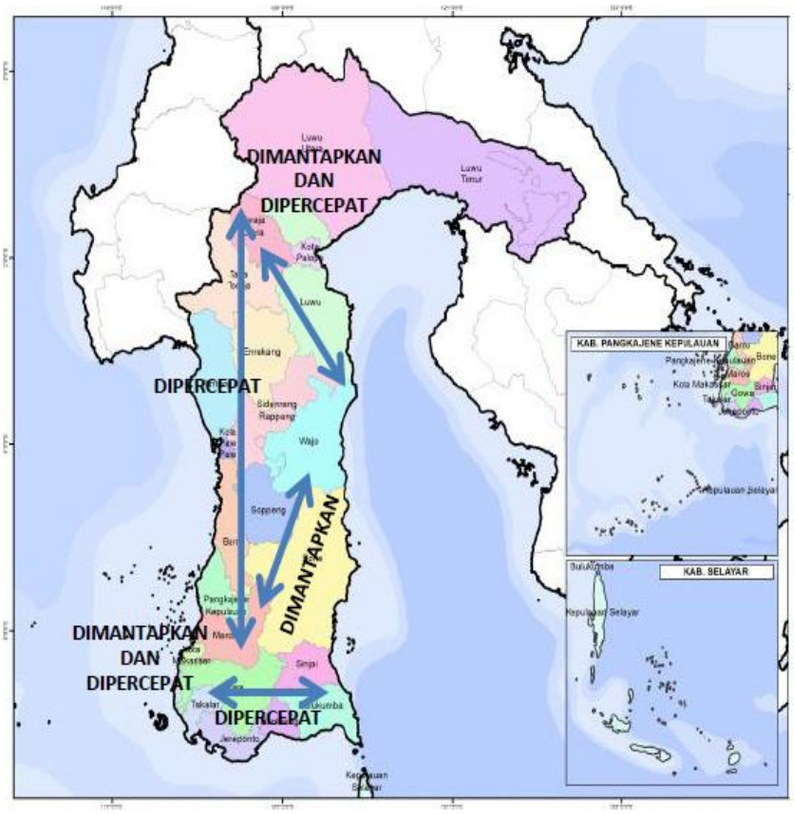

Sumber: Perda 3Tahun 2022 tentang RTRWP Sulawesi Selatan, diolah Bappelitbangda, 2022

Sasaran pembangunan kewilayahan Sulawesi Selatan yang diamanatkan dalam RPJMN Tahun 2020-2024 adalah meningkatnya produktifitas dan daya saing produk sektor perekonomian berbasis sumber daya alam, meningkatnya aksesibilitas infrastruktur termasuk aksesibilitas pelayanan dasar, dan pemerataan pertumbuhan ekonomi berbasis keunggulan wilayah yang didukung oleh peningkatan kualitas sumber daya manusia dan tata kelola pemerintahan yang baik dengan memperhatikan daya dukung dan keberlanjutan lingkungan hidup.

Sasaran pembangunan wilayah Tahun 2023 dirumuskan berdasarkan hasil evaluasi pembangunan yang dilakukan dengan ***pendekatan holistik, tematik, dan integratif*** yang mengacu pada kebijakan pembangunan nasional yang diamanatkan dalam Rancangan RKP Tahun 2023 dan kebijakan pembangunan daerah yang diamanatkan dalam Perubahan RPJMD Provinsi

Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023. Kebijakan pembangunan nasional yang terkait dengan kebijakan pembangunan Sulawesi Selatan adalah peningkatan produktivitas melalui upaya mendorong pemulihan dunia usaha dan peningkatan infrastruktur digital dan konektivitas yang diiringi dengan transformasi ekonomi yang inklusif dilakukan melalui percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, peningkatan kualitas SDM dan percepatan pembangunan infrastruktur dasar dengan tetap mengarusutamakan pembangunan berkelanjutan dengan mendorong pembangunan rendah karbon.

5.1.1. Capaian Pembangunan Kawasan Makassar

Kebijakan pengembangan kawasan pembangunan Makassar diprioritaskan pada peningkatan aksesibilitas infrastruktur wilayah melalui pengembangan konektivitas antar moda transportasi darat, laut dan udara, pengembangan transportasi massal, pembangunan infrastruktur kelistrikan di pulau pulau kecil, pemenuhan kebutuhan air minum masyarakat, khususnya pada daerah pesisir dan pulau-pulau kecil dan peningkatan kemantapan jalan provinsi. Selain itu pengembangan kawasan Makassar juga dilakukan melalui penguatan pusat-pusat pertumbuhan wilayah melalui pengembangan komoditas unggulan yang didukung oleh hilirisasi produk unggulan berbasis sumberdaya alam, pengembangan kawasan strategis prioritas berbasis pariwisata pada Destinasi Pariwisata Pengembangan (DPP) Baru Toraja-Makassar-Selayar. Pencapaian sasaran penurunan kesenjangan pendapatan antar lapisan masyarakat diprioritaskan pada pengembangan ekonomi lokal berbasis komoditas unggulan, sedangkan peningkatan kualitas sumberdaya manusia diprioritaskan pada peningkatan akses dan kualitas layanan kesehatan dan pendidikan.

Keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan di Kawasan Makassar dan sekitarnya dapat digambarkan berdasarkan beberapa indikator pembangunan yang meliputi:

1) Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi berdasarkan kabupaten/kota di Kawasan Makassar pada tahun 2021, mengalami peningkatan dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi tahun 2020, dengan rata-rata peningkatan sebesar 6,86 poin. Secara rata-rata perubahan pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Kawasan Makassar lebih tinggi daripada perubahan pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan, kecuali kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dengan perubahan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,15 poin yang lebih kecil daripada perubahan pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan sebesar 5,35 poin. Peningkatan pertumbuhan kawasan Makassar didorong oleh akselerasi lapangan usaha perdagangan, konstruksi dan industry pengolahan yang bertumpu di kawasan Makassar sebagai pusat aktivitas perekonomian Sulawesi Selatan.

Kawasan Makassar memberikan kontribusi terbesar terhadap PDRB ADHK Sulawesi Selatan tahun 2021 yaitu sebesar 51,72 persen yang disumbangkan terbesar oleh PDRB ADHK Kota Makassar sebesar 36,67 persen terhadap PDRB Sulawesi Selatan, sedangkan kabupaten yang memberikan

kontribusi terkecil terhadap PDRB ADHK Sulawesi Selatan di Kawasan Makassar adalah Kabupaten Takalar dengan kontribusi sebesar 2,01 persen.

Grafik V. 1
Capaian Pertumbuhan Ekonomi Kawasan Makassar Tahun 2020-2021

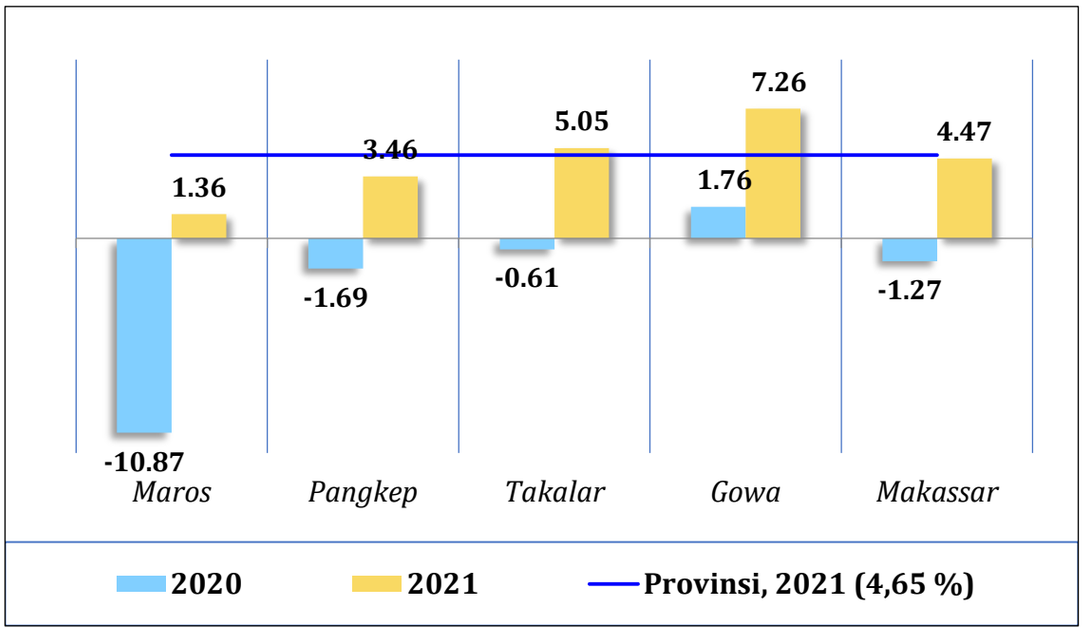

Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Selatan, diolah Tahun 2022.

2) Tingkat Kemiskinan

Persentase penduduk miskin di Kawasan Makassar tahun 2021, rata rata mengalami peningkatan dibandingkan dengan persentase penduduk miskin tahun 2020, kecuali di kabupaten Takalar dan kabupaten Maros yang menunjukkan penurunan persentase sebesar 0,19 poin persen dan 0,17 poin persen. Peningkatan persentase penduduk miskin di kawasan Makassar didorong oleh karakteristik kawasan sebagai kawasan perkotaan yang lebih berorientasi jasa sehingga kebijakan pembatasan aktivitas akibat pandemic Covid-19 sangat berpengaruh terhadap pendapatan masyarakat, sedangkan penurunan persentase penduduk miskin di kabupaten Maros dan Kabupaten Takalar dikarenakan pada kedua kabupaten tersebut berkarakter perdesaan yang perekonomiannya didukung oleh pertumbuhan sector pertanian.

Grafik V. 2
Capaian Tingkat Kemiskinan Kawasan Makassar Tahun 2020-2021 (Maret)

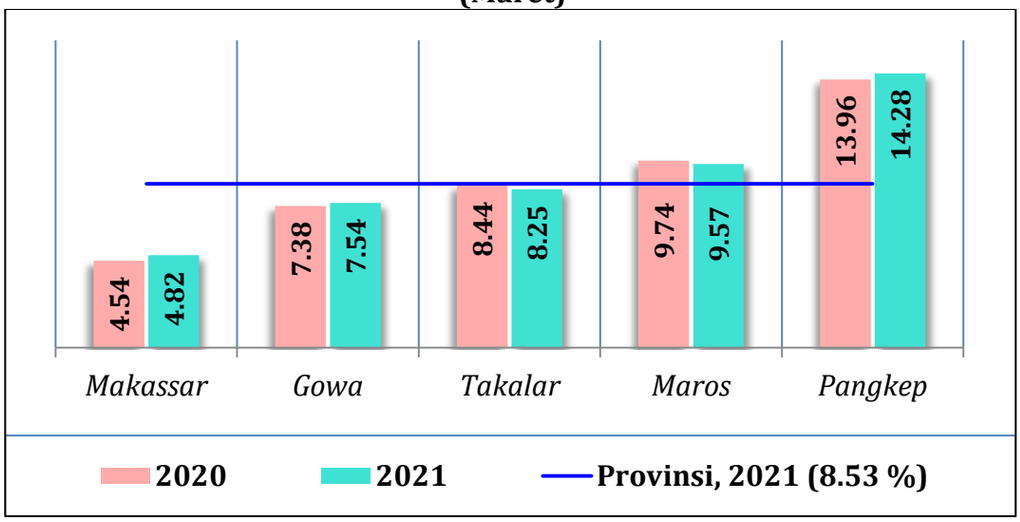

Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Selatan, diolah Tahun 2022.

3) Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Tingkat pengangguran terbuka (TPT) di Sulawesi Selatan pada Agustus 2021 sebesar 5,72 persen, menunjukkan adanya perbaikan dibandingkan TPT pada Agustus 2020 yang mencapai 6,31 persen. Capaian angka TPT di Kawasan Makassar pada Agustus 2021, menunjukkan adanya peningkatan angka TPT sebesar .

TPT berdasarkan kabupaten/kota di Kawasan Makassar pada Agustus 2021, secara rata-rata menunjukkan adanya perbaikan dibandingkan dengan TPT tahun 2020, dengan rata-rata perbaikan persentase sebesar 0,88 poin. Perbaikan kondisi ketenagakerjaan di kawasan Makassar dipengaruhi oleh peningkatan pada beberapa lapangan usaha yaitu konstruksi, perdagangan dan pertanian yang merupakan sector penyerap tenaga kerja terbanyak yang mempengaruhi penurunan TPT di kabupaten Gowa, kabupaten Takalar dan Kota Makassar.

Grafik V. 3
Capaian Tingkat Pengangguran Terbuka Kawasan Makassar Tahun 2020-2021 (Agustus)

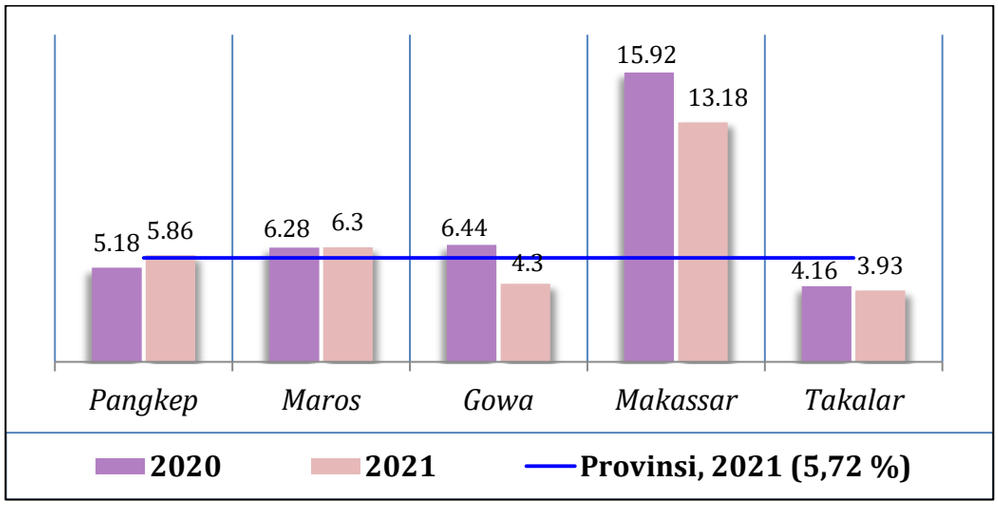

Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Selatan, diolah Tahun 2022.

4) Rasio Gini

Tingkat kesenjangan pengeluaran penduduk yang diukur dengan rasio gini di kawasan Makassar pada tahun 2021 secara rata-rata lebih baik daripada rasio gini Sulawesi Selatan, khususnya di kabupaten Maros yang menunjukkan adanya perbaikan rasio gini sebesar 0,003 poin dibandingkan dengan rasio gini pada tahun 2020. Memperhatikan capaian rasio gini menurut kabupaten/kota di kawasan Makassar, maka Kota Makassar memerlukan perhatian, karena walaupun rasio gini tidak mengalami perburukan, namun capaiannya masih paling besar di kawasan Makassar dan masih lebih besar daripada rasio gini Sulawesi Selatan.

Grafik V. 4
Capaian Rasio Gini Kawasan Makassar Tahun 2020-2021 (Maret)

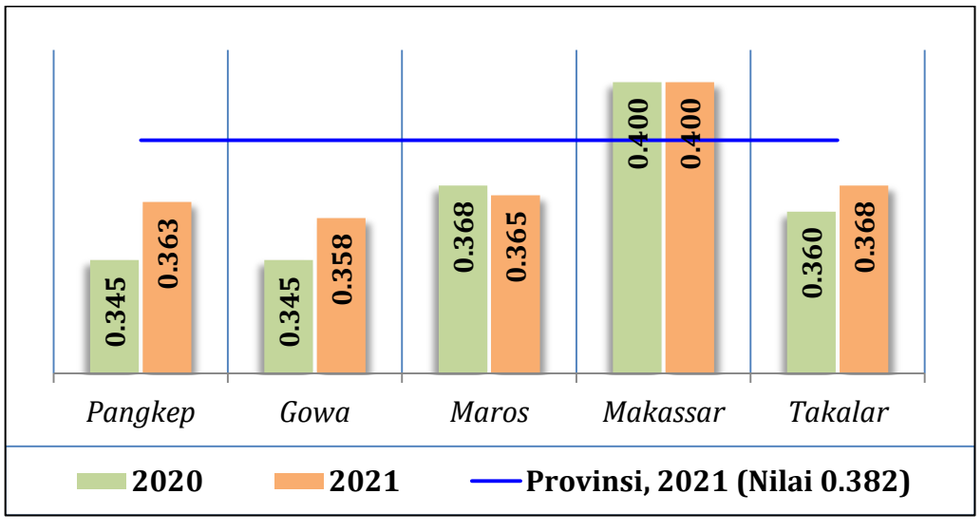

Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Selatan, diolah Tahun 2022.

5) Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

IPM Sulawesi Selatan tahun 2021 termasuk dalam kategori IPM tinggi dengan capaian sebesar 72,24, sedangkan capaian IPM menurut kabupaten/kota di kawasan Makassar tahun 2021 berada pada klasifikasi sedang di kabupaten Takalar dan Pangkajene Kepulauan, klasifikasi tinggi di kabupaten Maros dan Gowa, dan klasifikasi sangat tinggi di Kota Makassar. Secara rata rata, walaupun IPM kawasan Makassar menunjukkan peningkatan, namun rata rata capaiannya sebesar 72,06 poin masih di bawah capaian IPM Sulawesi Selatan tahun 2021 sebesar 72,24.

Grafik V. 5
Capaian IPM Kawasan Makassar Tahun 2020-2021

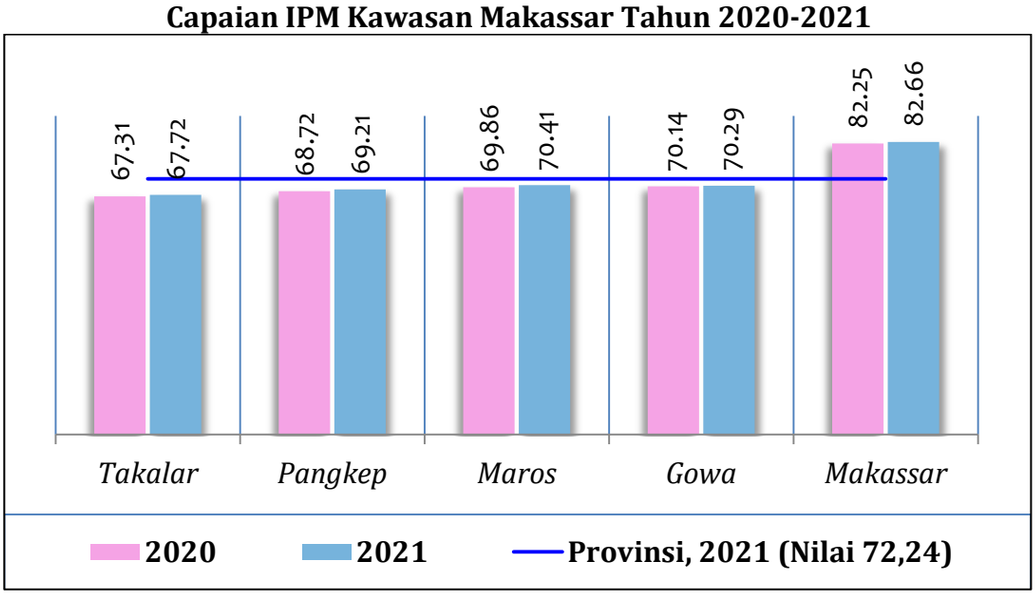

Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Selatan, diolah Tahun 2022.

5.1.2. Capaian Pembangunan Kawasan Bulukumba

Kebijakan pengembangan kawasan pembangunan Bulukumba diprioritaskan pada peningkatan aksesibilitas infrastruktur wilayah melalui pengembangan konektivitas, pembangunan simpul transportasi, pembangunan infrastruktur kelistrikan, pemenuhan kebutuhan air minum dan peningkatan kemantapan jalan provinsi. Selain itu pengembangan kawasan Bulukumba juga dilakukan melalui penguatan pusat-pusat pertumbuhan wilayah melalui pengembangan komoditas unggulan pertanian dan perikanan yang didukung oleh hilirisasi produk unggulan berbasis sumberdaya alam, pengembangan destinasi pariwisata, dengan memperhatikan keberlanjutan daya dukung lingkungan hidup dan pelaksanaan kaidah pembangunan rendah karbon. Pencapaian sasaran penurunan kesenjangan pendapatan antar lapisan masyarakat diprioritaskan pada pengembangan ekonomi lokal berbasis komoditas unggulan, sedangkan peningkatan kualitas sumberdaya manusia diprioritaskan pada peningkatan akses dan kualitas layanan kesehatan dan Pendidikan yang keberhasilannya tergambar pada beberapa indicator pembangunan sebagai berikut:

1) Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi kawasan Bulukumba pada tahun 2021 mengalami peningkatan dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi tahun 2020, dengan rata- rata peningkatan sebesar 5,48 poin yang lebih besar daripada perubahan pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan sebesar 5,35 poin. Besarnya perubahan pertumbuhan ekonomi kawasan Bulukumba dikontribusikan oleh peningkatan pertumbuhan ekonomi kabupaten Kepulauan Selayar yang bertumbuh sebesar 5,80 poin dan kabupaten Bantaeng yang bertumbuh sebesar 8,34 poin. Hal ini didorong oleh akselerasi lapangan usaha industry pengolahan dan lapangan usaha pertanian, khususnya perikanan yang merupakan komoditas unggulan kawasan Bulukumba.

Kawasan Bulukumba memberikan kontribusi sebesar 9,74 persen terhadap PDRB ADHK Sulawesi Selatan tahun 2021 yang disumbangkan

terbesar oleh PDRB ADHK Kabupaten Bulukumba sebesar 2,62 persen terhadap PDRB Sulawesi Selatan, sedangkan kabupaten yang memberikan kontribusi terkecil terhadap PDRB ADHB Sulawesi Selatan Tahun 2021 di Kawasan Bulukumba adalah Kabupaten Kepulauan Selayar dengan kontribusi sebesar 1,09 persen.

Grafik V. 6
Capaian Pertumbuhan Ekonomi Kawasan Bulukumba Tahun 2020-2021

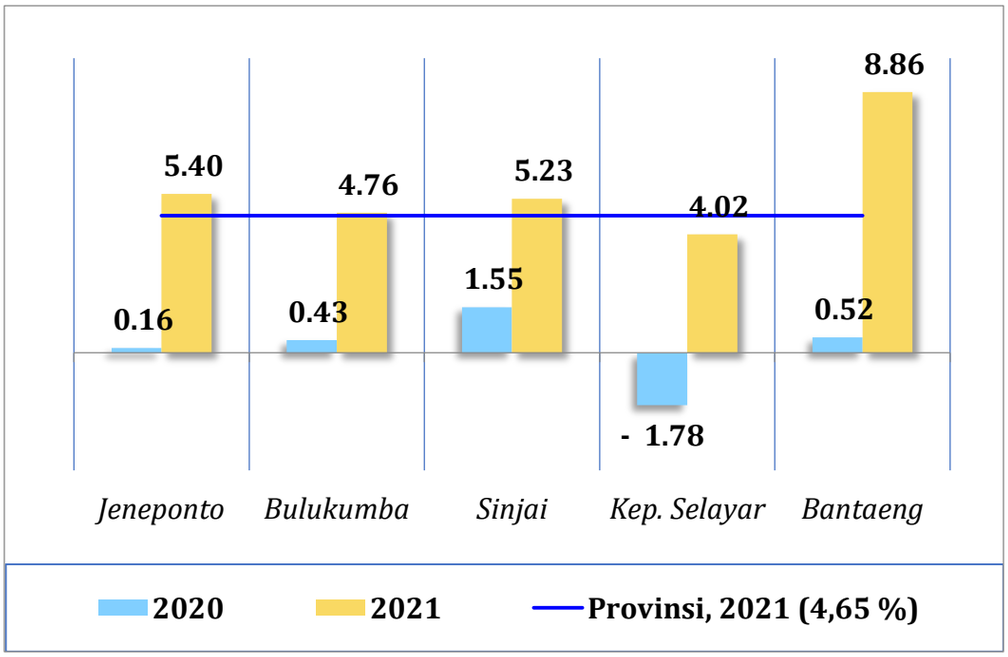

Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Selatan, diolah Tahun 2022.

2) Tingkat Kemiskinan

Persentase penduduk miskin di kawasan Bulukumba tahun 2021, secara rata- rata menunjukkan adanya peningkatan sebesar 0,06 poin dibandingkan dengan persentase penduduk miskin kawasan Bulukumba tahun 2020. Peningkatan persentase penduduk miskin di kawasan Bulukumba dikontribusikan oleh peningkatan persentase penduduk miskin di kabupaten Bulukumba sebesar 0,33 poin, dan kabupaten Bantaeng sebesar 0,46 poin.

Peningkatan persentase penduduk miskin di kawasan Bulukumba diperkirakan terjadi dikarenakan adanya penurunan pendapatan masyarakat akibat tekanan ekonomi yang mengakibatkan meningkatnya jumlah penduduk miskin di kabupaten Bulukumba dan di kabupaten Bantaeng tahun 2021. Berdasarkan persentase penduduk miskin di kawasan Bulukumba, kabupaten Kepulauan Selayar dan Jeneponto merupakan kabupaten dengan persentase penduduk miskin terbesar, namun pada tahun 2021 persentase penduduk miskin di kabupaten Kepulauan Selayar menunjukkan adanya penurunan persentase penduduk miskin sebesar 0,03 poin dan di kabupaten Jeneponto yang menurun sebesar 0,30 poin dikarenakan meningkatnya pertumbuhan sector pertanian.

Grafik V. 7
Capaian Tingkat Kemiskinan Kawasan Bulukumba Tahun 2020--2021 (Maret)

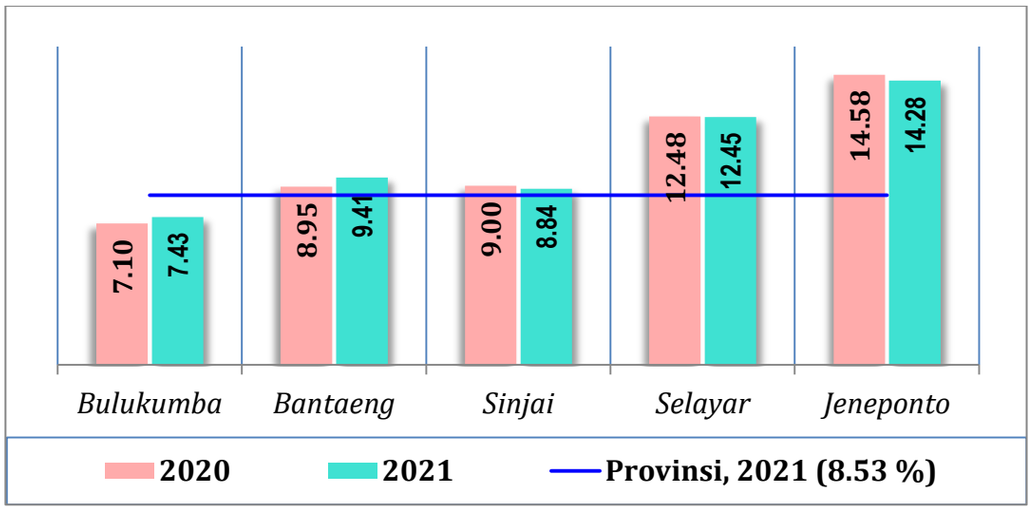

Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Selatan, diolah Tahun 2022.

3) Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Memperhatikan capaian angka TPT di Kawasan Bulukumba pada Agustus 2021, maka dapat digambarkan bahwa rata rata TPT di kawasan Bulukumba sebesar 3,00 persenlebih rendah dibandingkan dengan TPT Provinsi Sulawesi Selatan Agustus 2021 sebesar 5,72 persen.

Secara rata rata TPT di kawasan Bulukumba menunjukkan adanya perbaikan, yang ditunjukkan dengan meningkatnya perubahan TPT sebesar 0,02 poin, yang dikontribusikan oleh menurunnya TPT di kabupaten Bulukumba sebesar 0,28 poin, kabupaten Bantaeng sebesar 0,20 poin, dan kabupaten Sinjai sebesar 0,04 poin. Pemulihan kondisi ketenagakerjaan di kawasan Bulukumba didorong oleh peningkatan lapangan usaha pertanian, dan lapangan usaha konstruksi yang merupakan sector penyerap tenaga kerja.

Grafik V. 8
Tingkat Pengangguran Terbuka Kawasan Bulukumba Tahun 2020-2021 (Agustus)

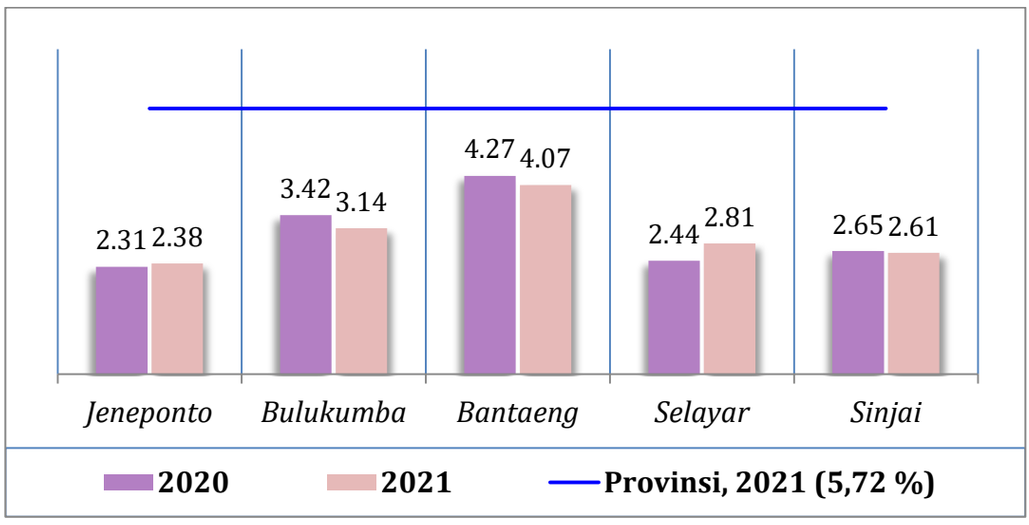

Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Selatan, diolah Tahun 2022.

4) Rasio Gini

Pelaksanaan pembangunan diharapkan dapat mengatasi ketimpangan baik ketimpangan pengeluaran penduduk maupun ketimpangan pembangunan antar wilayah. Gambaran ketimpangan pengeluaran penduduk di Kawasan Bulukumba, didasarkan pada rata rata capaian rasio gini tahun 2021 sebesar 0,357 yang pencapaiannya menunjukkan kinerja yang lebih baik daripada Provinsi Sulawesi Selatan yang capaian rasio gininya sebesar 0,382.

Tingkat kesenjangan pengeluaran penduduk yang diukur dengan rasio gini di kawasan Bulukumba pada tahun 2021 secara rata-rata lebih baik daripada rasio gini Sulawesi Selatan, kecuali kabupaten Sinjai yang rasio gininya pada tahun 2021 sebesar 0,384 lebih besar daripada rasio gini Sulawesi Selatan sebesar 0,382.

Grafik V. 9
Capaian Rasio Gini Kawasan Bulukumba Tahun 2020-2021 (Maret)

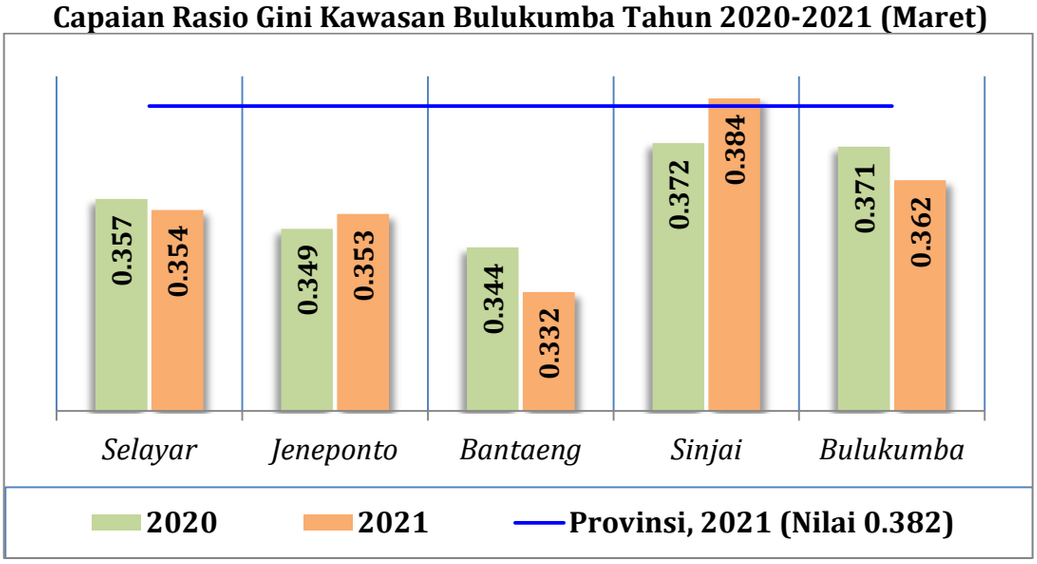

Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Selatan, diolah Tahun 2022.

5) Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

IPM Sulawesi Selatan tahun 2021 termasuk dalam kategori IPM tinggi dengan capaian sebesar 72,24, sedangkan capaian IPM menurut kabupaten/kota di kawasan Bulukumba tahun 2021 berada pada klasifikasi sedang dengan rata rata capaian IPM sebesar 67,74. Secara rata rata walaupun capaian IPM kawasan Bulukumba lebih rendah daripada capaian IPM Sulawesi Selatan tahun 2021, namun menunjukkan peningkatan kinerja yang lebih baik daripada kinerja Sulawesi Selatan yang ditunjukkan dengan perubahan IPM sebesar 0,51 poin yang lebih besar daripada perubahan IPM Sulawesi Selatan sebesar 0,43 poin.

Grafik V. 10
Capaian IPM Kawasan Bulukumba Tahun 2020-2021

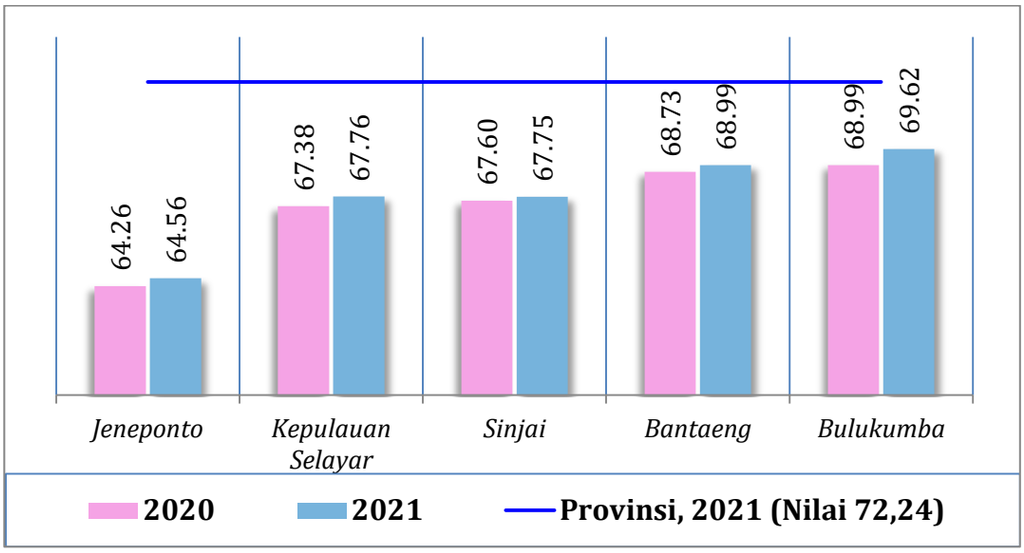

Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Selatan, diolah Tahun 2022.

5.1.3. Capaian Pembangunan Kawasan Watampone

Kebijakan pengembangan kawasan pembangunan Watampone diprioritaskan pada penguatan pusat-pusat pertumbuhan wilayah melalui pengembangan komoditas unggulan pertanian tanaman pangan, perkebunan, peternakan, dan perikanan yang didukung oleh hilirisasi produk unggulan berbasis sumberdaya alam, penguatan peran lembaga masyarakat serta usaha mikro dan kecil, pemenuhan standar pelayanan minimal, utamanya peningkatan akses dan kualitas layanan kesehatan, pendidikan, perumahan dan kawasan permukiman yang didukung oleh peningkatan konektivitas dan infrastruktur wilayah guna mendukung peran Sulawesi Selatan sebagai lumbung pangan nasional.

Keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan di Kawasan Watampone, dapat digambarkan berdasarkan beberapa indikator pembangunan yang meliputi:

1) Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi kawasan Watampone pada tahun 2021 mengalami peningkatan dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi tahun 2020, dengan rata- rata peningkatan sebesar 5,89 poin yang lebih besar daripada perubahan pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan sebesar 5,35 poin. Besarnya perubahan pertumbuhan ekonomi kawasan Watampone dikontribusikan oleh peningkatan pertumbuhan ekonomi kabupaten Wajo yang bertumbuh sebesar 7,94 poin dan kabupaten Bone yang bertumbuh sebesar 5,78 poin. Hal ini didorong oleh akselerasi lapangan usaha pertanian dan perikanan yang merupakan komoditas unggulan kawasan Watampone.

Kawasan Watampone memberikan kontribusi sebesar 12,90 persen terhadap PDRB ADHK Sulawesi Selatan tahun 2021 yang disumbangkan terbesar oleh PDRB ADHK Kabupaten Bone sebesar 6,76 persen terhadap PDRB Sulawesi Selatan, sedangkan kabupaten yang memberikan kontribusi terkecil terhadap PDRB ADHB Sulawesi Selatan Tahun 2021 di Kawasan Bulukumba adalah Kabupaten Soppeng dengan kontribusi sebesar 2,20 persen.

Grafik V. 11
Capaian Pertumbuhan Ekonomi pada Kawasan Watampone Tahun 2020-2021

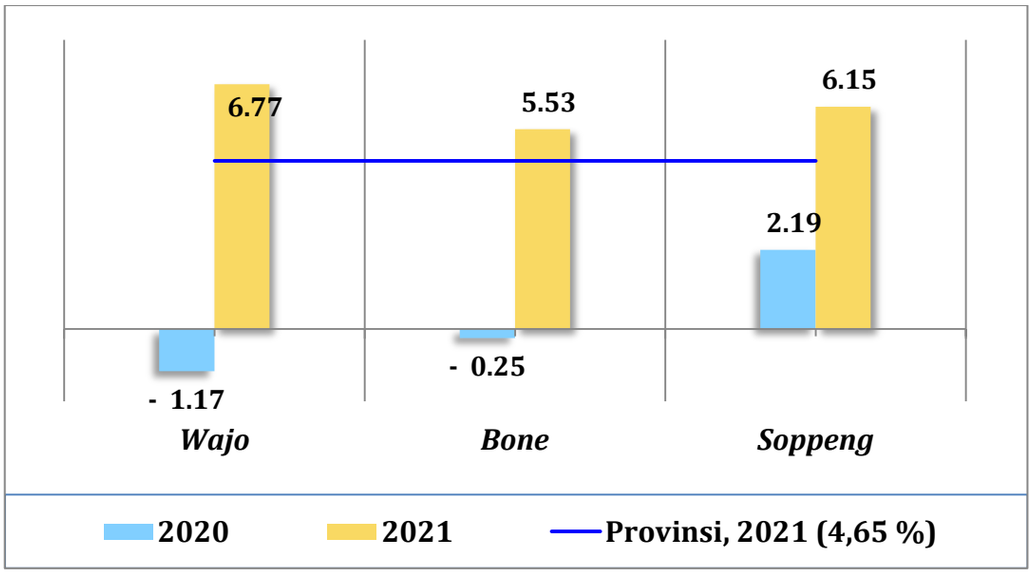

Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Selatan, diolah Tahun 2022.

2) Tingkat Kemiskinan

Persentase penduduk miskin di kawasan Watampone tahun 2021, secara rata- rata menunjukkan adanya perbaikan yang ditunjukkan dengan penurunan persentase penduduk miskin sebesar 0,24 poin dibandingkan dengan persentase penduduk miskin kawasan Watampone tahun 2020. Penurunan persentase penduduk miskin di kawasan Watampone dikontribusikan oleh menurunnya persentase penduduk miskin di semua kabupaten di kawasan Watampone, yang didorong oleh tumbuhnya sector pertanian yang merupakan sector unggulan kawasan Watampone sehingga berdampak pada peningkatan pendapatan masyarakat.

Grafik V. 12
Capaian Tingkat Kemiskinan Kawasan Watampone Tahun 2020-2021 (Maret)

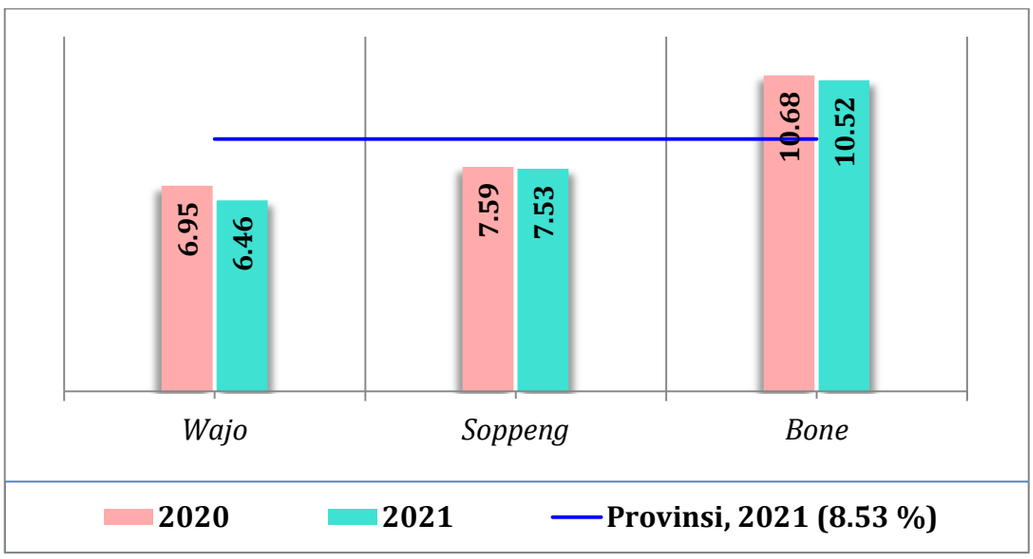

Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Selatan, diolah Tahun 2022.

3) Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Memperhatikan capaian angka TPT di Kawasan Watampone pada Agustus 2021, maka dapat digambarkan bahwa rata rata TPT di kawasan Watampone sebesar 4,13 persen lebih rendah dibandingkan dengan TPT Provinsi Sulawesi Selatan Agustus 2021 sebesar 5,72 persen.

Secara rata rata TPT di kawasan Watampone tahun 2021 sebesar 4,13 persen lebih baik daripada TPT Sulawesi Selatan sebesar 5,72 persen. Akan tetapi membandingkan capaian TPT kawasan Watampone tahun 2021 dengan capaian TPT tahun 2020 menunjukkan adanya penurunan kinerja, yang dikontribusikan dengan meningkatnya TPT di kabupaten Bone sebesar 0,95 poin. Peningkatan TPT kabupaten Bone tahun 2021 dikarenakan menurunnya pendapatan masyarakat di kabupaten Bone yang sebagian besar berada di kawasan perdesaan.

Grafik V. 13
Capaian Tingkat Pengangguran Terbuka Kawasan Watampone Tahun 2020-2021

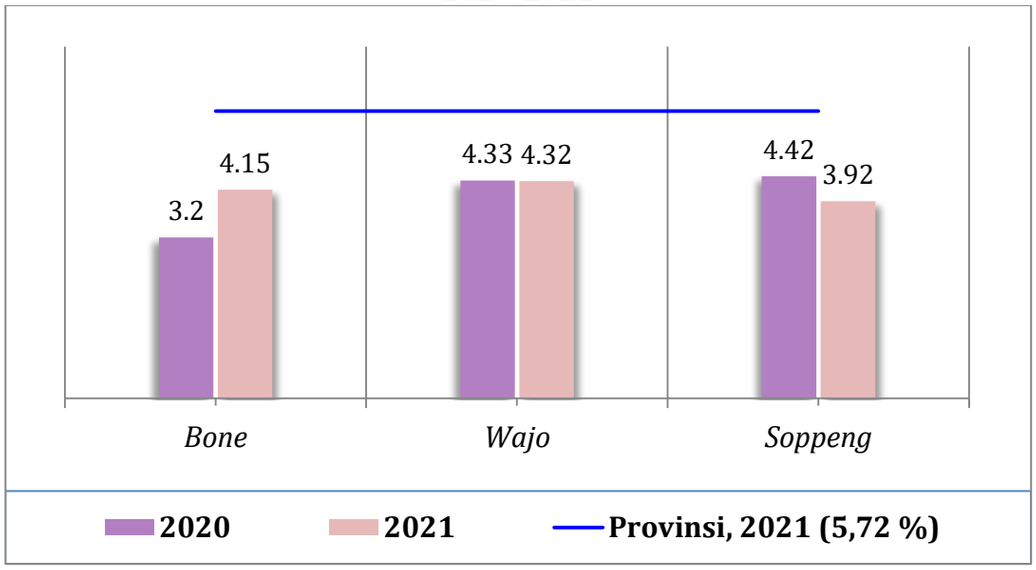

Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Selatan, diolah Tahun 2022.

4) Rasio Gini

Pelaksanaan pembangunan diharapkan dapat mengatasi ketimpangan baik ketimpangan pengeluaran penduduk maupun ketimpangan pembangunan antar wilayah. Gambaran ketimpangan pengeluaran penduduk di Kawasan Watampone, didasarkan pada rata rata capaian rasio gini tahun 2021 sebesar 0,383 yang pencapaiannya menunjukkan kinerja yang lebih buruk daripada Provinsi Sulawesi Selatan yang capaian rasio gininya sebesar 0,382.

Tingkat kesenjangan pengeluaran penduduk yang diukur dengan rasio gini di kawasan Watampone pada tahun 2021 secara rata-rata lebih buruk daripada rasio gini Sulawesi Selatan, kecuali kabupaten Wajo yang rasio gininya pada tahun 2021 sebesar 0,361 lebih baik daripada rasio gini Sulawesi Selatan sebesar 0,382.

Grafik V. 14
Capaian Rasio Gini Kawasan Watampone Tahun 2020-2021 (Maret)

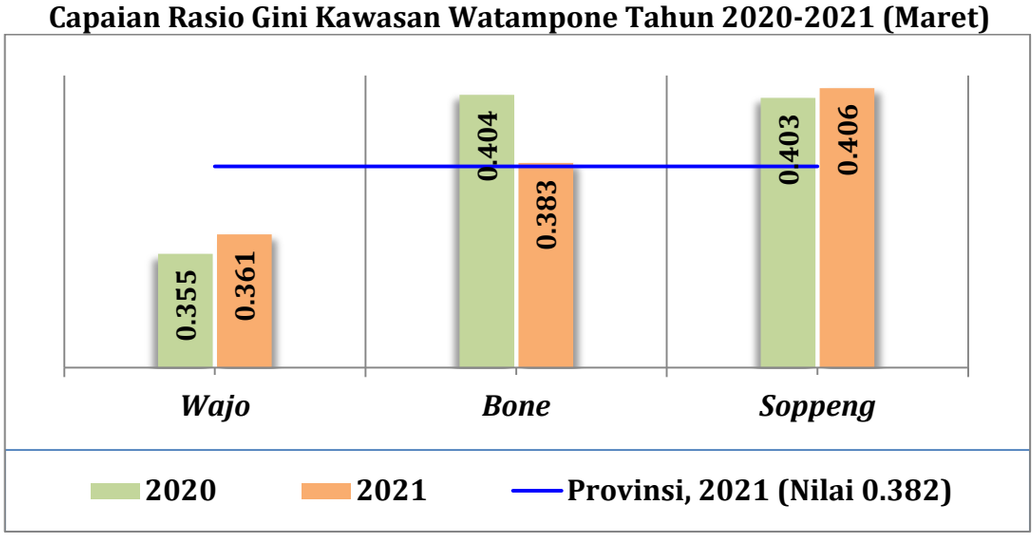

Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Selatan, diolah Tahun 2022.

5) Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

IPM Sulawesi Selatan tahun 2021 termasuk dalam kategori IPM tinggi dengan capaian sebesar 72,24, sedangkan capaian IPM menurut kabupaten/kota di kawasan Watampone tahun 2021 berada pada klasifikasi sedang dengan rata rata capaian IPM sebesar 68,34. Secara rata rata walaupun capaian IPM kawasan Watampone lebih rendah daripada capaian IPM Sulawesi Selatan tahun 2021, namun menunjukkan peningkatan kinerja yang lebih baik daripada kinerja Sulawesi Selatan yang ditunjukkan dengan perubahan IPM sebesar 0,55 poin yang lebih besar daripada perubahan IPM Sulawesi Selatan sebesar 0,43 poin.

Grafik V. 15
Capaian IPM Kawasan Watampone Tahun 2020-2021

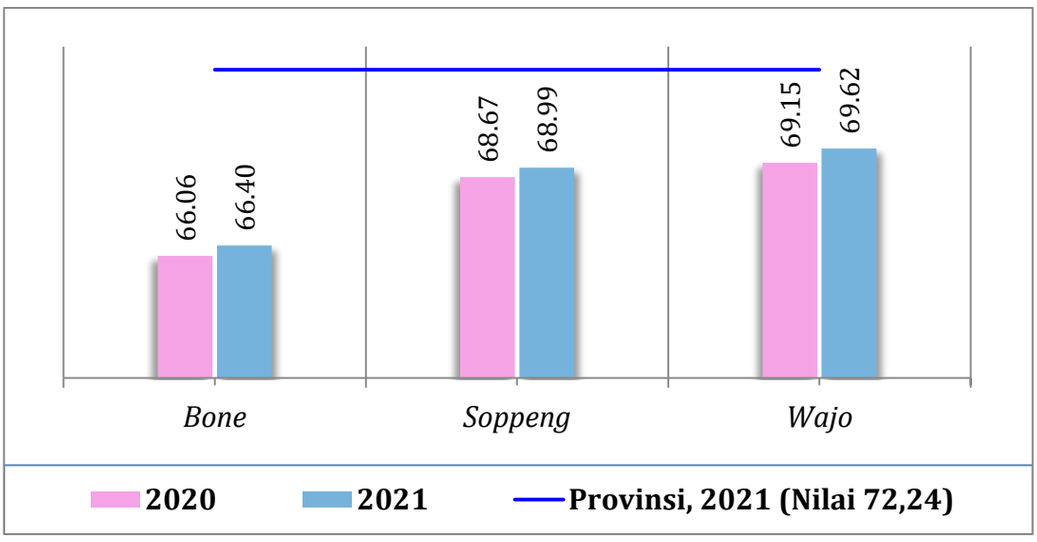

Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Selatan, diolah Tahun 2022.

5.1.4. Pembangunan Kawasan Parepare dan sekitarnya

Pengembangan kawasan pembangunan Parepare berperan mendukung Sulawesi Selatan sebagai lumbung pangan nasional, yang dilakukan melalui penguatan pusat-pusat pertumbuhan wilayah dengan mengembangkan

komoditas unggulan pertanian tanaman pangan, perkebunan, peternakan, dan perikanan yang didukung oleh hilirisasi produk unggulan berbasis sumberdaya alam, pengembangan konektivitas serta infrastruktur wilayah dan peningkatan kualitas sumberdaya manusia yang diprioritaskan pada peningkatan akses dan kualitas layanan pendidikan dan kualitas layanan kesehatan.

Keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan di Kawasan Parepare, dapat digambarkan berdasarkan beberapa indikator pembangunan yang meliputi:

1) Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi kawasan Parepare pada tahun 2021 mengalami peningkatan dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi tahun 2020, dengan rata- rata peningkatan sebesar 5,22 poin, namun lebih kecil daripada perubahan pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan sebesar 5,35 poin. Peningkatan pertumbuhan ekonomi kawasan Parepare dikontribusikan oleh peningkatan pertumbuhan ekonomi kabupaten Sidenreng Rappang yang bertumbuh sebesar 6,13 poin yang didorong oleh akselerasi lapangan usaha pertanian yang merupakan komoditas unggulan kawasan Parepare.

Kawasan Parepare memberikan kontribusi sebesar 10,87 persen terhadap PDRB ADHK Sulawesi Selatan tahun 2021 yang disumbangkan terbesar oleh PDRB ADHK Kabupaten Pinrang sebesar 3,91 persen terhadap PDRB Sulawesi Selatan, sedangkan kabupaten yang memberikan kontribusi terkecil terhadap PDRB ADHB Sulawesi Selatan Tahun 2021 di Kawasan Parepare adalah Kabupaten Enrekang dengan kontribusi sebesar 1,42 persen.

Grafik V. 16
Capaian Pertumbuhan Ekonomi Kawasan Parepare Tahun 2020-2021

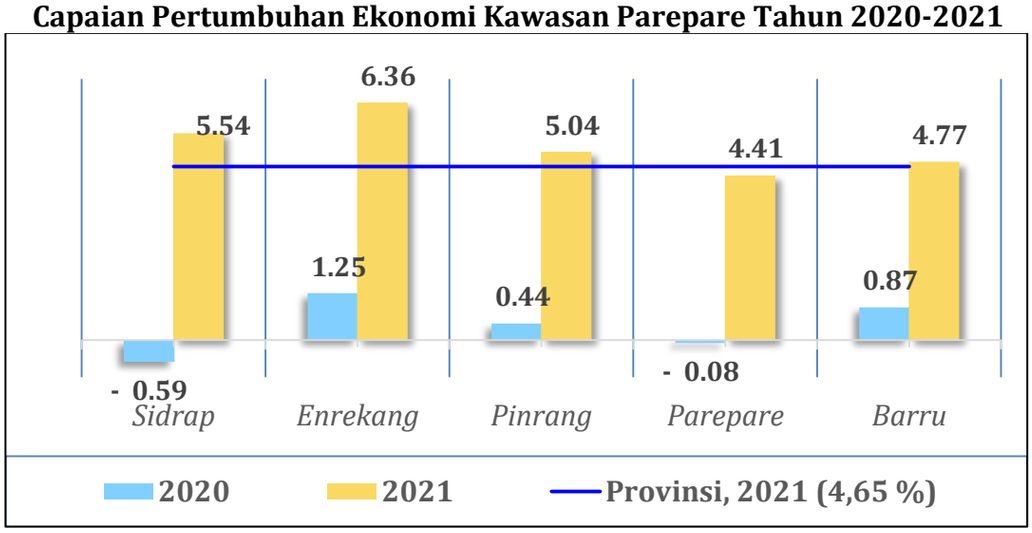

Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Selatan, diolah Tahun 2022.

2) Tingkat Kemiskinan

Persentase penduduk miskin di kawasan Parepare tahun 2021, secara rata- rata menunjukkan adanya peningkatan sebesar 0,12 poin dibandingkan dengan persentase penduduk miskin kawasan Parepare tahun 2020. Peningkatan persentase penduduk miskin di kawasan Parepare dikontribusikan oleh peningkatan persentase penduduk miskin di kabupaten Barru sebesar 0,42 poin, dan kabupaten Enrekang sebesar 0,30 poin.

Peningkatan persentase penduduk miskin di kawasan Parepare diperkirakan terjadi dikarenakan adanya penurunan pendapatan masyarakat akibat tekanan ekonomi yang mengakibatkan meningkatnya jumlah penduduk miskin di kabupaten Barru dan di kabupaten Enrekang tahun 2021. Berdasarkan persentase penduduk miskin di kawasan Parepare, maka diperoleh gambaran bahwa persentase penduduk miskin di kabupaten Barru, Pinrang dan Enrekang lebih besar daripada persentase penduduk miskin Sulawesi Selatan.

Grafik V. 17
Capaian Tingkat Kemiskinan Kawasan Parepare dan sekitarnya, Tahun 2020-2021 (Maret)

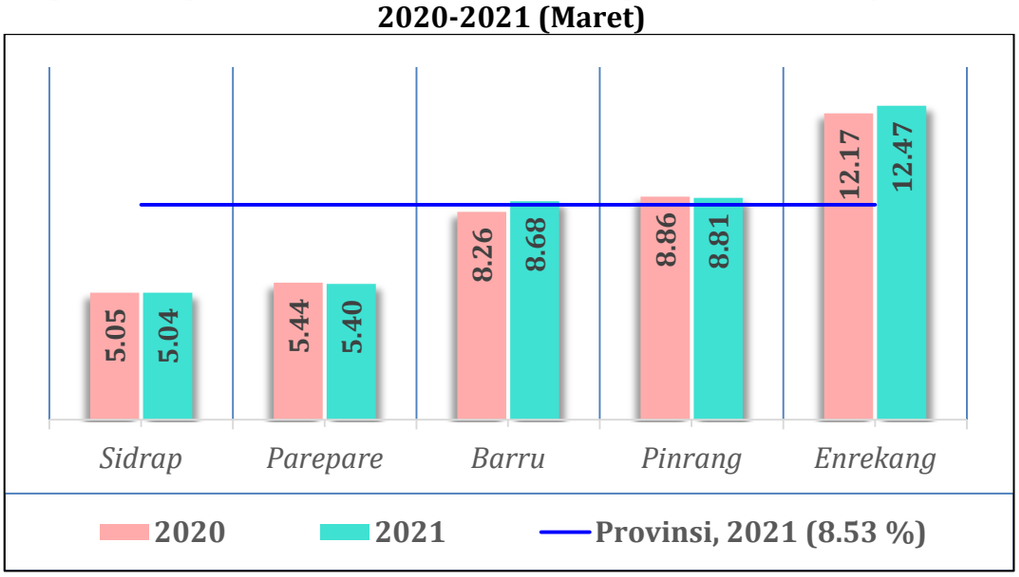

Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Selatan, diolah Tahun 2022.

3) Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Memperhatikan capaian angka TPT di Kawasan Parepare pada Agustus 2021, maka dapat digambarkan bahwa rata rata TPT di kawasan Parepare sebesar 4,96 persen lebih rendah dibandingkan dengan TPT Provinsi Sulawesi Selatan Agustus 2021 sebesar 5,72 persen.

Secara rata rata TPT di kawasan Parepare menunjukkan adanya perbaikan, yang ditunjukkan dengan meningkatnya perubahan TPT sebesar 0,26 poin, yang dikontribusikan oleh menurunnya TPT di kabupaten Enrekang sebesar 0,10 poin, kabupaten Pinrang sebesar 0,13 poin, kabupaten Sidenreng Rappang sebesar 0,98 poin dan kota Parepare sebesar 0,42 poin. Pemulihan kondisi ketenagakerjaan di kawasan Parepare didorong oleh peningkatan lapangan usaha pertanian, dan lapangan usaha konstruksi yang merupakan sector penyerap tenaga kerja.

Grafik V. 18
Capaian Tingkat Pengangguran Terbuka Kawasan Parepare Tahun 2020-2021 (Agustus)

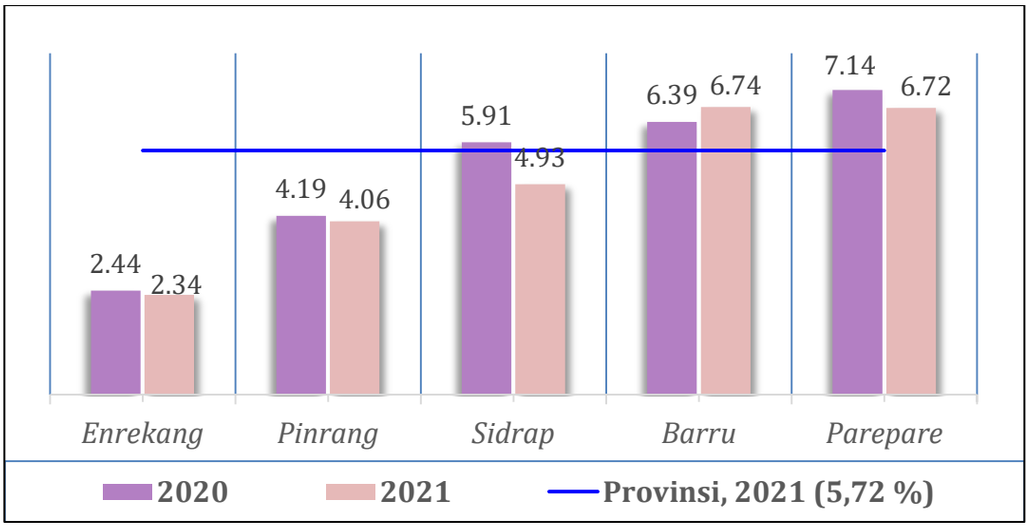

Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Selatan, diolah Tahun 2022.

4) Rasio Gini

Pelaksanaan pembangunan diharapkan dapat mengatasi ketimpangan baik ketimpangan pengeluaran penduduk maupun ketimpangan pembangunan antar wilayah. Gambaran ketimpangan pengeluaran penduduk di Kawasan Parepare, didasarkan pada rata rata capaian rasio gini tahun 2021 sebesar 0,365 yang pencapaiannya menunjukkan kinerja yang lebih baik daripada Provinsi Sulawesi Selatan yang capaian rasio gininya sebesar 0,382.

Tingkat kesenjangan pengeluaran penduduk yang diukur dengan rasio gini di kawasan Parepare pada tahun 2021 secara rata-rata lebih baik daripada rasio gini Sulawesi Selatan, namun secara rata rata capaiannya pada tahun 2021 menunjukkan adanya peningkatan kesenjangan sebesar 0,001 poin. Peningkatan kesenjangan di Kawasan Parepare dikontribusikan oleh peningkatan kesenjangan di kabupaten Sidenreng Rappang sebesar 0,009 poin, kabupaten Barru sebesar 0,002 poin dan kota Parepare sebesar 0,008 poin.

Grafik V. 19
Capaian Rasio Gini Kawasan Parepare Tahun 2020-2021 (Maret)

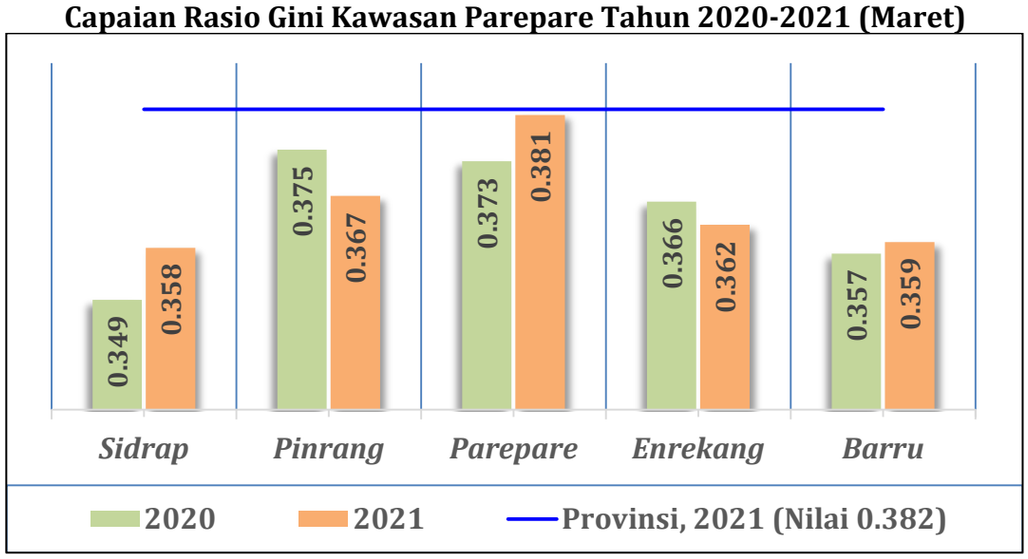

Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Selatan, diolah Tahun 2022.

5) Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

IPM Sulawesi Selatan tahun 2021 termasuk dalam kategori IPM tinggi dengan capaian sebesar 72,24, demikian halnya dengan capaian IPM kawasan Parepare yang rata rata capaiannya sebesar 73,05. Secara rata rata walaupun capaian IPM kawasan Parepare lebih tinggi daripada capaian IPM Sulawesi Selatan tahun 2021, namun menunjukkan peningkatan kinerja yang lebih rendah daripada peningkatan kinerja Sulawesi Selatan yang ditunjukkan dengan perubahan IPM sebesar 0,31 poin yang lebih kecil daripada perubahan IPM Sulawesi Selatan sebesar 0,43 poin.

Grafik V. 20
Capaian IPM Kawasan Parepare Tahun 2020-2021

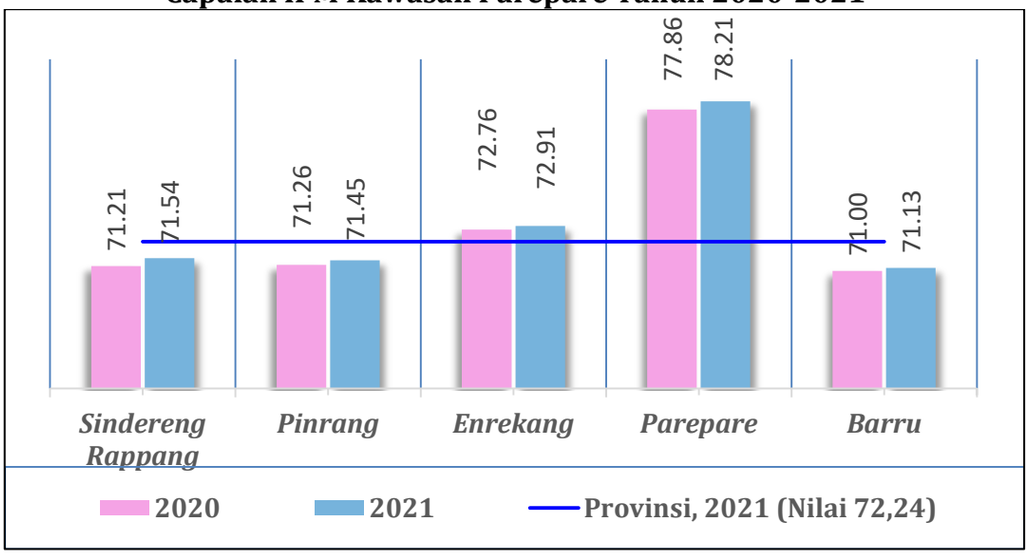

Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Selatan, diolah Tahun 2022.

5.1.5. Pembangunan Kawasan Palopo dan sekitarnya

Kebijakan pengembangan wilayah Sulawesi Selatan diarahkan pada peningkatan kesejahteraan rakyat, khususnya dalam rangka penanganan dan pemulihan ekonomi sebagai dampak pandemic Covid-19, khususnya pada Kawasan Pembangunan Palopo yang rata-rata persentase penduduk miskinnya di atas rata-rata Provinsi Sulawesi Selatan. Untuk itu, kebijakan pembangunan Kawasan Palopo diprioritaskan pada penguatan peran Kawasan Palopo sebagai bagian dari Kawasan Strategis Nasional Sorowako dan Kawasan Strategis Nasional Toraja sekaligus sebagai Kawasan Strategis Pariwisata Nasional melalui pengembangan Destinasi Pariwisata Pengembangan (DPP) Baru Toraja-Makassar-Selayar yang didukung oleh penguatan UMKM, penguatan konektivitas dan infrastruktur wilayah, peningkatan produktivitas komoditas unggulan pertanian tanaman pangan, perkebunan, peternakan, dan perikanan yang didukung oleh hilirisasi produk unggulan berbasis sumberdaya alam serta peningkatan akses dan kualitas layanan kesehatan.

Keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan di Kawasan, dapat digambarkan berdasarkan beberapa indikator pembangunan yang meliputi:

1) Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi kawasan Palopo pada tahun 2021 mengalami peningkatan dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi tahun 2020, dengan rata- rata peningkatan sebesar 3,45 poin yang lebih kecil daripada perubahan pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan sebesar 5,35 poin. Peningkatan pertumbuhan ekonomi kawasan Palopo dikontribusikan oleh peningkatan pertumbuhan ekonomi kabupaten dan kota di kawasan Palopo, kecuali kabupaten Luwu Timur yang mengalami penurunan pertumbuhan ekonomi sebesar 2,85 poin. Peningkatan pertumbuhan ekonomi kawasan Palopo didorong oleh akselerasi lapangan usaha industry pengolahan dan lapangan usaha pertanian, yang merupakan komoditas unggulan kawasan Palopo.

Kawasan Palopo memberikan kontribusi sebesar 14,77 persen terhadap PDRB ADHK Sulawesi Selatan tahun 2021 yang disumbangkan terbesar oleh PDRB ADHK Kabupaten Luwu Timur sebesar 4,65 persen terhadap PDRB Sulawesi Selatan, sedangkan kabupaten yang memberikan kontribusi terkecil terhadap PDRB ADHK Sulawesi Selatan Tahun 2021 di Kawasan Palopo adalah Kabupaten Tana Toraja dengan kontribusi sebesar 1,39 persen.

Grafik V. 21
Capaian Pertumbuhan Ekonomi Kawasan Palopo Tahun 2020-2021

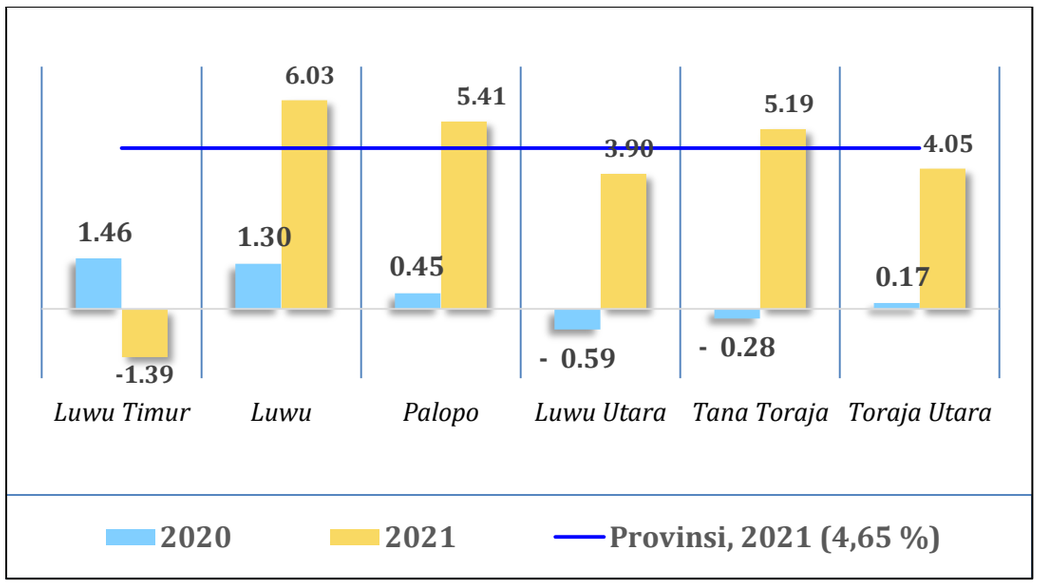

Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Selatan, diolah Tahun 2022.

2) Tingkat Kemiskinan

Persentase penduduk miskin di kawasan Palopo tahun 2021, secara rata-rata menunjukkan adanya peningkatan sebesar 0,10 poin dibandingkan dengan persentase penduduk miskin kawasan Palopo tahun 2020. Peningkatan persentase penduduk miskin di kawasan Palopo dikontribusikan oleh peningkatan persentase penduduk miskin di kabupaten Luwu Timur sebesar 0,09 poin, kabupaten Tana Toraja sebesar 0,17 poin, kabupaten Luwu Utara sebesar 0,18 poin dan kota Palopo sebesar 0,29 poin. Peningkatan persentase penduduk miskin di kawasan Palopo diperkirakan terjadi dikarenakan adanya penurunan pendapatan masyarakat akibat tekanan ekonomi.

Grafik V. 22
Capaian Tingkat Kemiskinan Kabupaten/Kota pada Kawasan Palopo dan sekitarnya, Tahun 2019-2020 (Maret)

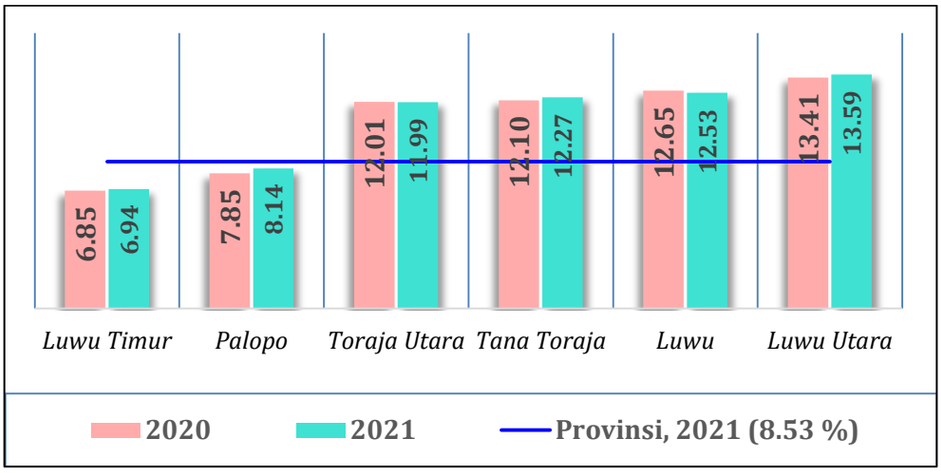

Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Selatan, diolah Tahun 2022.

3) Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Memperhatikan capaian angka TPT di Kawasan Palopo pada Agustus 2021, maka dapat digambarkan bahwa rata rata TPT di kawasan Palopo sebesar 4,70 persen lebih rendah dibandingkan dengan TPT Provinsi Sulawesi Selatan Agustus 2021 sebesar 5,72 persen.

Secara rata rata TPT di kawasan Bulukumba menunjukkan adanya perbaikan, yang ditunjukkan dengan meningkatnya perubahan TPT sebesar 0,06 poin, yang dikontribusikan oleh menurunnya TPT di kabupaten Toraja Utara sebesar 0,56 poin, kabupaten Luwu sebesar 0,14 poin, dan kota Palopo sebesar 1,54 poin. Pemulihan kondisi ketenagakerjaan di kawasan Palopo didorong oleh peningkatan lapangan usaha pertanian, dan lapangan usaha konstruksi yang merupakan sector penyerap tenaga kerja.

Grafik V. 23
Capaian Tingkat Pengangguran Terbuka Kawasan Palopo Tahun 2020-2021 (Agustus)

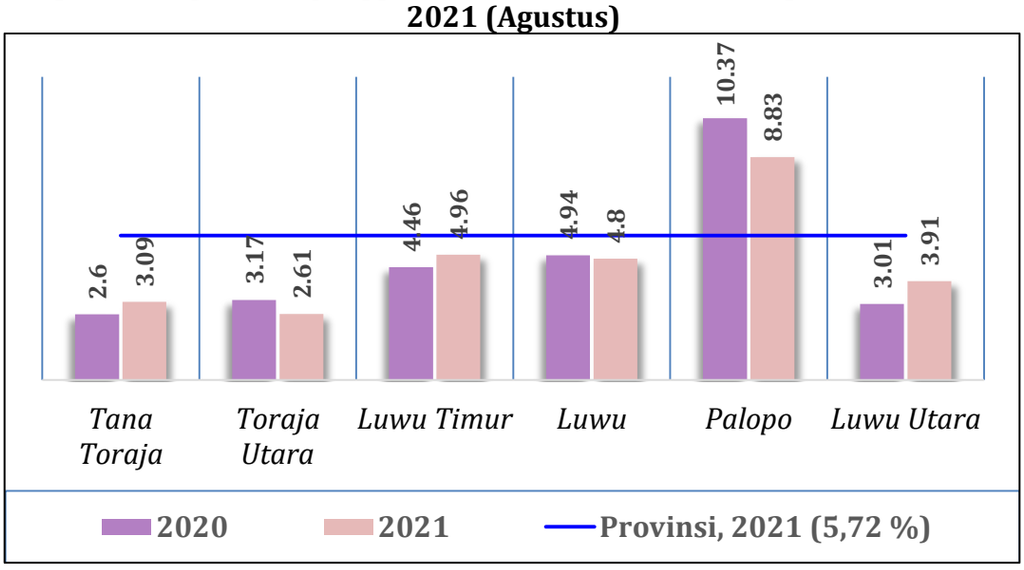

Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Selatan, diolah Tahun 2022.

4) Rasio Gini

Pelaksanaan pembangunan diharapkan dapat mengatasi ketimpangan baik ketimpangan pengeluaran penduduk maupun ketimpangan pembangunan antar wilayah. Gambaran ketimpangan pengeluaran penduduk di Kawasan Palopo, didasarkan pada rata rata capaian rasio gini tahun 2021 sebesar 0,370 yang pencapaiannya menunjukkan kinerja yang lebih baik daripada Provinsi Sulawesi Selatan yang capaian rasio gininya sebesar 0,382.

Tingkat kesenjangan pengeluaran penduduk yang diukur dengan rasio gini di kawasan Palopo pada tahun 2021 secara rata-rata lebih baik daripada rasio gini Sulawesi Selatan, kecuali kabupaten Luwu Timur yang rasio gininya pada tahun 2021 sebesar 0,396 lebih besar daripada rasio gini Sulawesi Selatan sebesar 0,382. Memperhatikan capaian kesenjangan pengeluaran penduduk di kawasan Palopo, kota Palopo dan kabupaten Tana Toraja memerlukan perhatian, dikarenakan rasio gini di kota Palopo dan kabupaten Tana Toraja mengalami peningkatan yang dipengaruhi oleh meningkatnya persentase penduduk miskin.

Grafik V. 24
Capaian Rasio Gini Kawasan Palopo Tahun 2020-2021 (Maret)

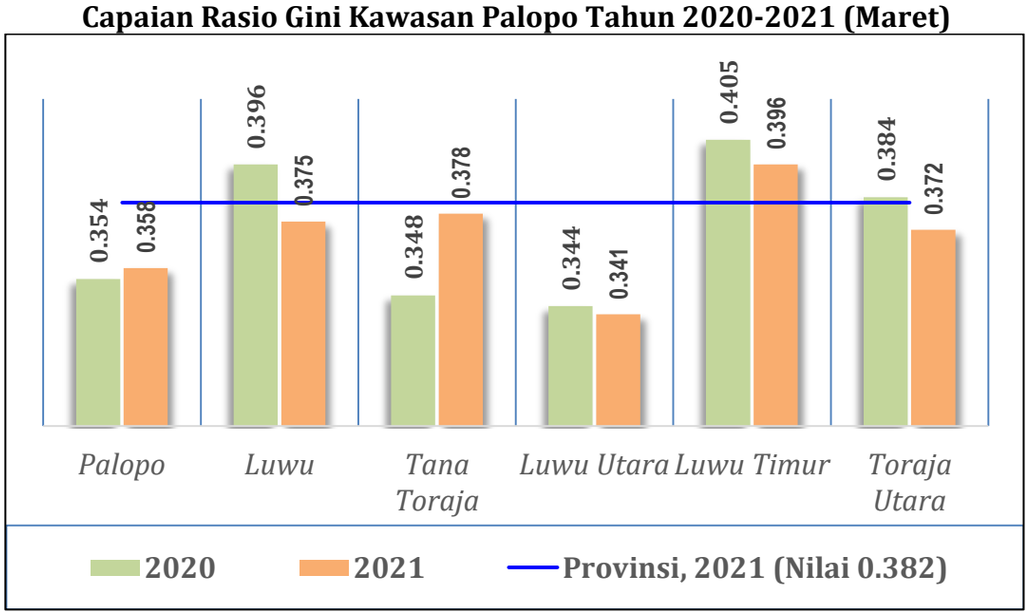

Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Selatan, diolah Tahun 2022.

5) Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

IPM Sulawesi Selatan tahun 2021 termasuk dalam kategori IPM tinggi dengan capaian sebesar 72,24, demikian halnya dengan capaian IPM di kawasan Palopo tahun 2021 dengan rata rata capaian IPM sebesar 71,97. Secara rata rata capaian IPM kawasan Palopo lebih rendah daripada capaian IPM Sulawesi Selatan tahun 2021, demikian juga dengan kinerja pencapaiannya tahun 2021 sebesar 0,37 poin yang lebih rendah daripada perubahan IPM Sulawesi Selatan Tahun 2021 sebesar 0,43 poin.

Grafik V. 25
Capaian IPM Kawasan Palopo Tahun 2020-2021

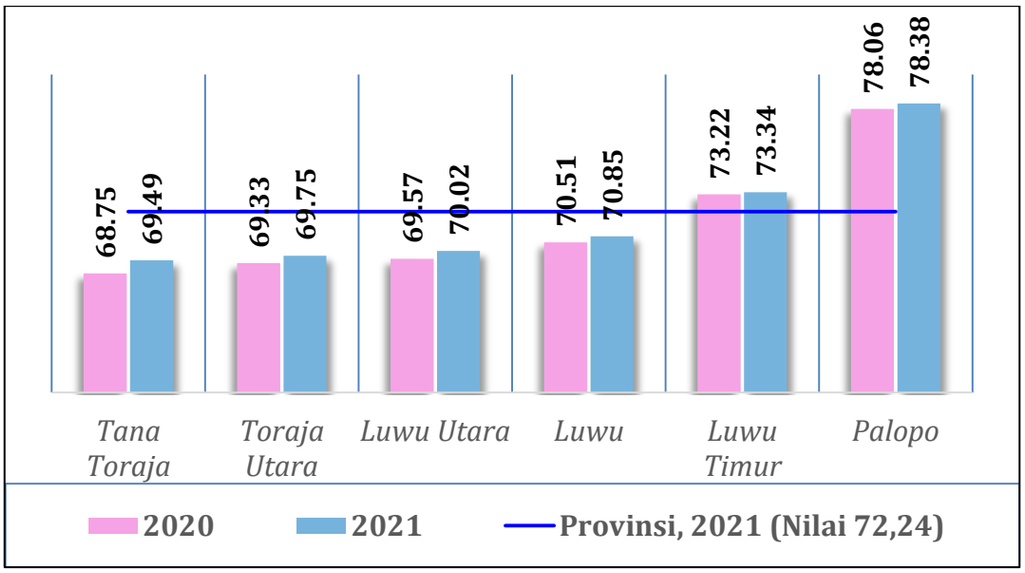

Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Selatan, diolah Tahun 2022.

5.2. Sasaran Pembangunan Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan

Tahun 2023 merupakan tahun akhir pembangunan RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023 dan merupakan tahun kunci dalam mengejar pencapaian target tujuan san sasaran pembangunan karena merupakan titik awal akselerasi pertumbuhan ekonomi pasca pandemic Covid-19 yang diharapkan dapat meningkatkan kapasitas produktif perekonomian. Kebijakan nasional memperioritaskan upaya peningkatan kapasitas produktif perekonomian yang dijabarkan kedalam kebijakan pembangunan daerah Sulawesi Selatan.

Integrasi kebijakan pembangunan nasional diwujudkan dalam pemberdayaan ekonomi kerakyatan melalui hilirisasi komoditas unggulan wilayah dan penurunan kesenjangan social ekonomi diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi wilayah. Seiring dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi dibutuhkan penguatan infrastruktur wilayah dan pengembangan kawasan pusat pertumbuhan yang didukung oleh peningkatan akselerasi pembangunan SDM dan pemantapan perbaikan tata Kelola pemerintahan dan pelayanan public dengan mengarusutamakan peningkatan pelestarian lingkungan hidup yang tergambarkan dalam target pembangunan sebagai berikut:

Tabel V. 2
Target Pembangunan Sulawesi Selatan Tahun 2023

Indikator Pembangunan	Satuan	Perda P-RPJMD No. 1 Tahun 2021(a)	RKPD TAHUN 2023	Target Nasional	
				Permen. PPN/Ka. Bappenas No. 3 Tahun 2022 (b)	PMDN No. 81 Tahun 2022 (c)
Pertumbuhan Ekonomi	%	5,04 – 6,52	5,06-6,59	6,70 – 7,30	5,30 – 5,90
Tingkat Kemiskinan (Sept.)	%	7,45	7,75-8,00	7,75 – 8,00	7,00 – 8,00

Indikator Pembangunan	Satuan	Perda P-RPJMD No. 1 Tahun 2021(a)	RKPD TAHUN 2023	Target Nasional	
				Permen. PPN/Ka. Bappenas No. 3 Tahun 2022 (b)	PMDN No. 81 Tahun 2022 (c)
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	5,69	5,69	4,95 – 5,50	5,30 – 6,00
Rasio Gini	Nilai	0,381	0,376-0,381	-	0,375 – 0,378
Indeks Pembangunan Manusia	Nilai	73,05	73,17	-	73,29 – 73,35
PDRB Perkapita ADHB	Juta Rp.	65,98	65,88	-	-
IKLH	Nilai	72,84	74,07	-	-
Penurunan emisi gas rumah kaca	%		1,347 Juta Ton CO_2Eq	-	27,02
Indeks Pelayanan Publik	Nilai	4,51 – 5,00	4,51 – 5,00	-	-

Sumber: Bappelitbangda Prov. Sulawesi Selatan, 2022
Keterangan: a) Perubahan RPJMD Prov. Sulsel Tahun 2018-2023
b) Rancangan RKP Tahun 2023;
c) Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023

Strategi dan arah kebijakan pembangunan Sulawesi Selatan Tahun 2023 diarahkan untuk mencapai sasaran pembangunan wilayah Tahun 2023 yang dilakukan dengan ***pendekatan holistik, tematik, dan integratif*** yang mengacu pada kebijakan pembangunan nasional yang diamanatkan dalam Rancangan RKP Tahun 2023 dan kebijakan pembangunan daerah yang diamanatkan dalam Perubahan RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023. Sebagai upaya mengarahkan strategi pengembangan wilayah dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan, maka ditetapkan arah kebijakan pengembangan wilayah Sulawesi Selatan yang mengacu pada rencana tata ruang dan dijabarkan ke dalam lima kawasan pembangunan yaitu Kawasan Makassar, Kawasan Bulukumba, Kawasan Watampone, Kawasan Parepare, dan Kawasan Palopo.

5.2.1. Sasaran Pembangunan Kawasan Makassar Tahun 2023

Kawasan Makassar sebagai pusat pertumbuhan Sulawesi Selatan diharapkan dapat berperan dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan dengan mengoptimalkan keunggulan wilayah sebagai kawasan wisata berbasis kepulauan dan geopark serta potensi komoditas pertanian dan perikanan melalui pengembangan industry pengolahan hasil pertanian dan perikanan yang terintegrasi dengan pemasaran produk, pengembangan wisata bahari yang didukung oleh penguatan peran lembaga masyarakat serta usaha kecil dan menengah. Optimalisasi peran Kawasan Makassar sebagai pusat pertumbuhan wilayah, pusat pelayanan jasa dan sentra pengolahan komoditas sumber daya alam diharapkan akan dapat meningkatkan kinerja investasi dan meningkatkan kembali *share* ekspor Sulawesi Selatan.

Walaupun nilai IPM kabupaten di Kawasan Makassar menunjukkan peningkatan, namun perlu untuk lebih mengoptimalkan pencapaian indeks pendidikan dan indeks Kesehatan di Kabupaten Pangkejene Kepulauan,

Kabupaten Takalar dan Kabupaten Maros dan meningkatkan pemenuhan kebutuhan air minum dan sanitasi yang layak khususnya di kawasan pesisir dan kepulauan. Selain itu, Kawasan Makassar merupakan bagian dari Kawasan Perkotaan Mamminasata, yang merupakan target utama penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) melalui peningkatan penggunaan system angkutan massal perkotaan.

Sasaran utama Pembangunan wilayah Kawasan Makassar tahun 2023 adalah pulihnya pertumbuhan ekonomi wilayah, menurunnya kemiskinan dan kesenjangan pada kawasan perkotaan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta terbukanya lapangan kerja berkualitas dengan target sebagai berikut.

Tabel V. 3
Target Pembangunan Kawasan Makassar Tahun 2023

Kab./Kota	Indikator Pembangunan	Satuan	Target 20223	
			P-RPJMD	RKPD
Makassar	Pertumbuhan Ekonomi	%	4,81-6,41	6,20 – 7,82
	Tingkat Kemiskinan	%	3.75	4,21
	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	13.22	11,05
	Gini Ratio	Nilai	0.376	0,384
	IPM	Nilai	82.74	84,31
Gowa	Pertumbuhan Ekonomi	%	4,90-6,54	6,38 – 8,00
	Tingkat Kemiskinan	%	6.34	7,25
	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	6.15	5,25
	Gini Ratio	Nilai	0.325	0,351
	IPM	Nilai	71.53	71,28
Maros	Pertumbuhan Ekonomi	%	4,56-6,08	5,93 – 7,55
	Tingkat Kemiskinan	%	7.99	9,34
	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	6.00	4,46
	Gini Ratio	Nilai	0.346	0,356
	IPM	Nilai	71.05	71,66
Takalar	Pertumbuhan Ekonomi	%	4,93-6,57	5,97 -6,41
	Tingkat Kemiskinan	%	7.23	8,57
	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	3.98	3,57
	Gini Ratio	Nilai	0.339	0,361
	IPM	Nilai	68.71	69,11
Pangkep	Pertumbuhan Ekonomi	%	4,60-6,13	5,98 – 7,60
	Tingkat Kemiskinan	%	11.78	15,35
	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	4.95	5,12
	Gini Ratio	Nilai	0.325	0,319
	IPM	Nilai	70.00	70,45

Sumber: BAPPELITBANGDA Prov. Sulawesi Selatan, diolah Tahun 2022

Pengembangan kawasan Makassar dilakukan melalui pendekatan pusat pertumbuhan untuk memacu pertumbuhan ekonomi, mengingat peran Kawasan Makassar sebagai bagian dari Pusat Kegiatan Nasional (PKN) dan Kawasan Strategis Nasional (KSN) Kawasan Perkotaan Mamminasata yang

merupakan kontributor utama PDRB Sulawesi Selatan. Strategi pengembangan Kawasan Makassar dalam rangka peningkatan kapasitas produktif perekonomian dilakukan dengan strategi mendorong pengembangan komoditas unggulan di kawasan pembangunan Makassar diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui optimalisasi peran Kawasan Makassar sebagai pusat pertumbuhan wilayah dan sentra pengolahan komoditas sumber daya alam, dengan mengembangkan industry pertanian, industry pertambangan dan industry jasa, serta sebagai pusat orientasi pelayanan berskala internasional dan penggerak utama di Kawasan Timur Indonesia yang didukung oleh peningkatan aksesibilitas dan konektivitas serta pengembangan kerjasama dan kemitraan dalam investasi, promosi, pemasaran dan perdagangan dengan multipihak.

Strategi peningkatan akselerasi pembangunan sumber daya manusia diharapkan dapat meningkatkan indeks pendidikan di Kawasan Makassar khususnya di Kabupaten Pangkejene Kepulauan, Kabupaten Takalar dan Kabupaten Maros dan meningkatkan angka harapan hidup dengan arah kebijakan pemerataan akses dan mutu pelayanan pendidikan dan kesehatan, serta pemenuhan kebutuhan air minum dan sanitasi yang layak.

Upaya penguatan infrastruktur wilayah dan pengembangan kawasan pusat pertumbuhan, dipriotitaskan pada peningkatan kualitas dan kemantapan jalan provinsi khususnya pada ruas jalan yang mendukung distribusi logistic dan pemantapan prasarana dan sarana destinasi pariwisata dan pengembangan dan penguatan kewirausahaan, khususnya pada usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).

Peningkatan pelestarian lingkungan hidup pada kawasan Makassar diprioritaskan pada upaya peningkatan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup dan penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK), yang akan dilakukan melalui arah kebijakan penguatan koordinasi antar tingkatan pemerintah dalam ketaatan pemanfaatan ruang, penanggulangan bencana, pengendalian pencemaran lingkungan, pengelolaan sumber daya kelautan pesisir dan pulau-pulau kecil dan pengembangan transportasi massal.

Gambar V. 3
Arah Pengembangan Kawasan Makassar Tahun 2023

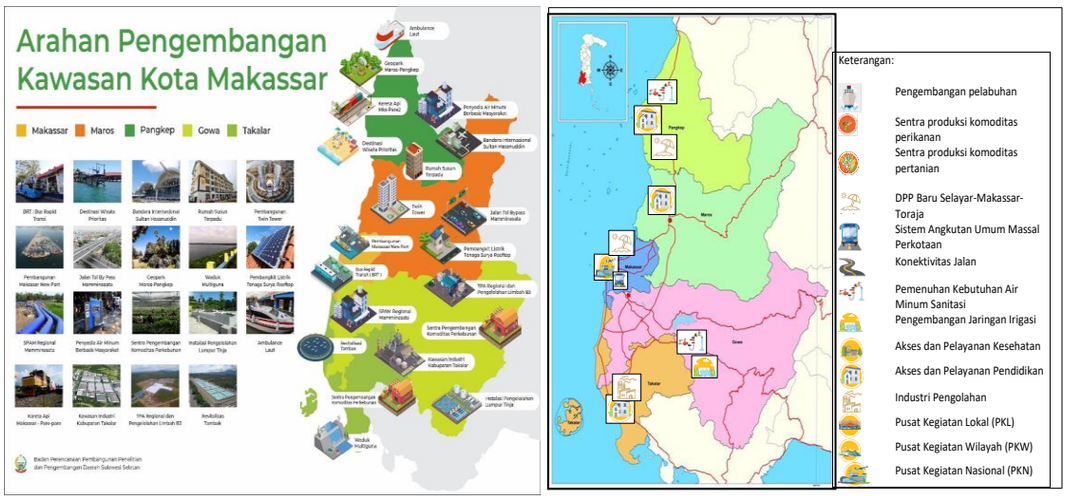

Sumber: Perubahan RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan, Bappelitbangda diolah Tahun 2022

5.2.2. Sasaran Pembangunan Kawasan Bulukumba Tahun 2023

Pembangunan kawasan Bulukumba diharapkan dapat berperan dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan dengan mengoptimalkan keunggulan wilayah sebagai kawasan wisata berbasis kepulauan, pengembangan potensi komoditas pertanian dan perikanan yang didukung oleh pengembangan industry pengolahan hasil pertanian dan perikanan yang terintegrasi dengan pemasaran produk, pengembangan wisata bahari dan peningkatan konektivitas yang didukung oleh penguatan peran lembaga masyarakat serta usaha kecil dan menengah.

Sasaran utama pembangunan wilayah Kawasan Bulukumba tahun 2023 adalah peningkatan pertumbuhan ekonomi yang didukung penguatan infrastruktur wilayah dan pengembangan kawasan pusat pertumbuhan guna mendukung pengembangan DPP Baru Selayar-Makassar-Toraja yang didukung oleh peningkatan akselerasi pembangunan SDM dengan mengarusutamakan peningkatan pelestarian lingkungan hidupdengan target sebagai berikut.

Tabel V. 4
Target Pembangunan pada Kawasan Bulukumba Tahun 2023

Kabupaten	Indikator Pembangunan	Satuan	Target 2023	
			P-RPJMD	RKPD
Bulukumba	Pertumbuhan Ekonomi	%	3,94-5,25	5,15-5,97
	Tingkat Kemiskinan	%	6.18	5,99
	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	3.27	2,91
	Gini Ratio	Nilai	0.349	0,355
	IPM	Nilai	70.61	71,09
Jeneponto	Pertumbuhan Ekonomi	%	4,68-6,23	5,66-6,48
	Tingkat Kemiskinan	%	12.16	12,84
	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	2.21	1,86
	Gini Ratio	Nilai	0.328	0,321
	IPM	Nilai	65.38	65,67
Sinjai	Pertumbuhan Ekonomi	%	4,39-5,86	5,61-6,43
	Tingkat Kemiskinan	%	7,90	7,40
	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	2.53	2,31
	Gini Ratio	Nilai	0.350	0,343
	IPM	Nilai	69.06	68,77
Bantaeng	Pertumbuhan Ekonomi	%	5,12-6,82	8,84-9,66
	Tingkat Kemiskinan	%	7.40	7,97
	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	4.08	3,79
	Gini Ratio	Nilai	0.324	0,318
	IPM	Nilai	70.07	70,22
Kepulauan Selayar	Pertumbuhan Ekonomi	%	5,27-7,03	5,19-6,01
	Tingkat Kemiskinan	%	10.54	11,01
	Tingkat Pengangguran	%	2.33	2,16

Kabupaten	Indikator Pembangunan	Satuan	Target 2023	
			P-RPJMD	RKPD
	Terbuka			
	Gini Ratio	Nilai	0.336	0,329
	IPM	Nilai	68.60	69,73

Sumber: BAPPELITBANGDA Prov. Sulawesi Selatan, diolah Tahun 2022

Pengembangan kawasan Bulukumba dilakukan melalui pendekatan pemerataan dalam mendukung pengembangan pusat pertumbuhan untuk memacu pertumbuhan ekonomi, seiring dengan ditetapkannya KPPN Selayar dan KSPN Takabonerate sebagai bagian dari daerah Destinasi Pengembangan Pariwisata (DPP) Baru. Peningkatan pertumbuhan ekonomi di Kawasan Bulukumba dilakukan dengan strategi pengembangan komoditas unggulan melalui peningkatan produktivitas sector ungggulan pertanian dan perikanan serta pertambangan melalui arah kebijakan peningkatan produktivitas komoditas pertanian dan perikanan, khususnya perikanan tangkap dan peningkatan akses kelola kawasan hutan dengan skema perhutanan social, serta optimalisasi fungsi dan peningkatan produktifitas Kawasan Industri Bantaeng sebagai kawasan industry prioritas nasional.

Kawasan Bulukumba merupakan kawasan prioritas Provinsi Sulawesi Selatan dalam peningkatan akselerasi pembangunan SDM, dengan memperhatikan capaian komponen IPM yang lebih rendah daripada rata-rata capaian Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021. Untuk itu peningkatan akselerasi pembangunan SDM akan diprioritaskan pada pemerataan akses dan mutu pelayanan pendidikan dan kesehatan, serta pemenuhan kebutuhan air minum dan sanitasi yang layak.

Sebagai upaya penguatan infrastruktur wilayah dan pengembangan kawasan pusat pertumbuhan diprioritaskan pada peningkatan kualitas dan kemantapan jalan provinsi khususnya pada ruas jalan yang mendukung distribusi logistic, pengembangan, pemantapan prasarana dan sarana destinasi pariwisata dan pengembangan dan penguatan kewirausahaan, khususnya pada usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).

Peningkatan pelestarian lingkungan hidup dalam rangka mencapai sasaran pembangunan yaitu penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK), dan peningkatan IKLH akan diprioritaskan pada peningkatan kualitas pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan, dalam rangka peningkatan produktifitas sumberdaya perikanan dan kelautan.

Gambar V. 4
Arah Pengembangan Kawasan Bulukumba Tahun 2022

Sumber: Perubahan RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan, Bappelitbangda diolah Tahun 2022

5.2.3. Sasaran Pembangunan Kawasan Watampone Tahun 2023

Pembangunan kawasan Watampone diharapkan dapat berperan dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan dengan mengoptimalkan keunggulan wilayah sebagai kawasan lumbung pangan nasional dengan mengembangkan potensi komoditas pertanian dan perikanan yang didukung oleh pengembangan industry pengolahan hasil pertanian dan perikanan yang terintegrasi dengan pemasaran produk, dan peningkatan konektivitas yang didukung oleh penguatan peran lembaga masyarakat serta usaha kecil dan menengah.

Sasaran utama Pembangunan wilayah Kawasan Watampone tahun 2023 adalah pulihnya pertumbuhan ekonomi wilayah, menurunnya kemiskinan dan kesenjangan, peningkatan kualitas manusia melalui pemenuhan kebutuhan dan peningkatan akses pelayanan dasar, serta terbukanya lapangan kerja berkualitas dengan target sebagai berikut.

Tabel V. 5
Target Pembangunan Kawasan Watampone Tahun 2023

Kabupaten	Indikator Pembangunan	Satuan	Target 2023	
			P-RPJMD	RKPD
Bone	Pertumbuhan Ekonomi	%	5,00-6,67	5,99-6,81
	Tingkat Kemiskinan	%	8.66	9,08
	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	3.06	3,95
	Gini Ratio	Nilai	0.380	0,356
	IPM	Nilai	67.37	67,72
Wajo	Pertumbuhan Ekonomi	%	4,35-5,79	6,76-7,58
	Tingkat Kemiskinan	%	5.85	5,02
	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	4.14	4,12
	Gini Ratio	Nilai	0.334	0,327
	IPM	Nilai	70.12	71,04
Soppeng	Pertumbuhan Ekonomi	%	5,44-7,25	6,15-6,97
	Tingkat Kemiskinan	%	5.82	6,09
	Tingkat Pengangguran	%	4.22	3,44

Kabupaten	Indikator Pembangunan	Satuan	Target 2023	
			P-RPJMD	RKPD
	Terbuka			
	Gini Ratio	Nilai	0.379	0,371
	IPM	Nilai	69.81	70,07

Sumber: BAPPELITBANGDA Prov. Sulawesi Selatan, diolah Tahun 2022

Pengembangan kawasan Watampone dilakukan melalui pendekatan pusat pertumbuhan untuk memacu pertumbuhan ekonomi, yang didasarkan pada peran dan fungsi kawasan Watampone sebagai pusat perdagangan dan jasa regional sekaligus sebagai pusat pengembangan kawasan budidaya pertanian pangan untuk mendukung peran Provinsi Sulawesi Selatan sebagai kawasan lumbung pangan nasional. Strategi pengembangan Kawasan Watampone dilakukan dengan mengembangkan komoditas unggulan melalui peningkatan produktivitas sector tanaman pangan, kelautan dan perikanan dengan arah kebijakan peningkatan produktivitas komoditas unggulan, hilirisasi pengolahan komoditas unggulan.

Kawasan Watampone merupakan kawasan prioritas Provinsi Sulawesi Selatan dalam peningkatan kualitas sumberdaya manusia, dengan memperhatikan capaian komponen IPM yang lebih rendah daripada rata-rata capaian Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021. Akselerasi peningkatan kualitas sumber daya manusia di Kawasan Watampone akan diprioritaskan pada pemerataan akses dan mutu pelayanan pendidikan dan kesehatan, serta pemenuhan kebutuhan air minum dan sanitasi yang layak.

Penguatan infrastruktur wilayah dan pengembangan kawasan pusat pertumbuhan di kawasan Watampone sebagai pusat produksi komoditas pertanian dan perikanan akan diprioritaskan pada peningkatan kualitas dan kemantapan jalan provinsi khususnya pada ruas jalan yang mendukung distribusi logistic dan pembangunan infrastruktur pada wilayah terisolir serta dukungan infrastruktur pada simpul transportasi yang menunjang konektivitas regional Pulau Sulawesi antara Sulawesi Selatan dengan Provinsi Sulawesi Tenggara. Selain itu optimalisasi peran kawasan Watampone sebagai lumbung pangan akan didukung melalui peningkatan infrastruktur sumber daya air, dan pengembangan industri yang ditunjang oleh integrasi dengan infrastruktur transportasi untuk perdagangan ke luar wilayah pengembangan dan penguatan kewirausahaan, khususnya pada usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).

Pengarusutamaan penanggulangan bencana akan diprioritaskan pada kawasan Watampone yang merupakan wilayah dengan kelas multi risiko bencana tinggi akan diprioritaskan pada program penanggulangan bencana dengan memperhatikan kerentanan kawasan Watampone terhadap bencana, khususnya Kabupaten Bone, dan Kabupaten Wajo. Selain itu peningkatan pelestarian lingkungan hidup yang diarahkan untuk mencapai sasaran pembangunan yaitu penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK), dan peningkatan IKLH akan diprioritaskan pada pengendalian pemanfaatan ruang, dan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan.

Gambar V. 5
Arah Pengembangan Kawasan Watampone Tahun 2023

Sumber: Perubahan RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan, Bappelitbangda diolah Tahun 2022

5.2.4. Sasaran Pembangunan Kawasan Parepare Tahun 2023

Pembangunan kawasan Parepare dilakukan melalui pendekatan pusat pertumbuhan dengan mengembangkan komoditas unggulan pertanian, peternakan dan perikanan budidaya dalam rangka mengoptimalkan perannya sebagai lumbung pangan, optrimalisasi fungsi Kawasan Parepare sebagai pusat perdagangan dan jasa regional yang didukung hilirisasi sektor pertanian, peternakan dan perikanan melalui pengembangan industri pengelolaan komoditas pertanian dan peternakan yang ditunjang oleh penguatan konektivitas antarmoda laut dan darat dan peningkatan kemantapan jalan provinsi.

Sasaran utama Pembangunan wilayah Kawasan Parepare tahun 2023 adalah pulihnya pertumbuhan ekonomi wilayah, menurunnya tingkat pengangguran, dan peningkatan kualitas manusia melalui peningkatan kualitas pelayanan dasar dengan target sebagai berikut.

Tabel V. 6
Target Pembangunan Kawasan Parepare Tahun 2023

Kab./Kota	Indikator Pembangunan	Satuan	Target 2023	
			P-RPJMD	RKPD
Parepare	Pertumbuhan Ekonomi	%	4,77-6,36	5,05-5,87
	Tingkat Kemiskinan	%	4.08	3,96
	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	6.82	6,09
	Gini Ratio	Nilai	0.351	0,324
	IPM	Nilai	78.70	79,00
Sidenreng Rappang	Pertumbuhan Ekonomi	%	4,51-6,01	5,76-6,58
	Tingkat Kemiskinan	%	4,78	3,60
	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	5.65	4,65
	Gini Ratio	Nilai	0.328	0,321
	IPM	Nilai	72.18	72,58
Barru	Pertumbuhan Ekonomi	%	4,85-6,64	5,33-6,15
	Tingkat Kemiskinan	%	6.67	7,24
	Tingkat Pengangguran	%	6.11	6,06

Kab./Kota	Indikator Pembangunan	Satuan	Target 2023	
			P-RPJMD	RKPD
	Terbuka			
	Gini Ratio	Nilai	0.336	0,333
	IPM	Nilai	72.27	72,10
Pinrang	Pertumbuhan Ekonomi	%	4,68-6,19	5,60-6,42
	Tingkat Kemiskinan	%	7.16	7,37
	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	4.00	3,68
	Gini Ratio	Nilai	0.353	0,315
	IPM	Nilai	72.11	72,35
Enrekang	Pertumbuhan Ekonomi	%	4,64-6,19	5,90-6,73
	Tingkat Kemiskinan	%	10.93	11,03
	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	2.33	2,01
	Gini Ratio	Nilai	0.344	0,357
	IPM	Nilai	73.79	74,04

Sumber: BAPPELITBANGDA Prov. Sulawesi Selatan, diolah Tahun 2022

Pengembangan kawasan Parepare dilakukan melalui pendekatan pusat pertumbuhan dengan memperhatikan peran Kawasan Parepare sebagai Kawasan Strategis Nasional yang didukung oleh pengembangan kawasan agropolitan yang memadukan agroindustri, agrobisnis, agroedukasi, dan agrowisata. Peningkatan kapasitas produktif perekonomian di kawasan Parepare diarahkan untuk pengembangan komoditas unggulan pertanian, peternakan dan perikanan budidaya dalam rangka mengoptimalkan perannya sebagai sumber penggerak utama perekonomian Sulawesi Selatan melalui pengembangan Kawasan Parepare sebagai pusat perdagangan dan jasa regional dengan arah kebijakan pengembangan hilirisasi sektor pertanian, peternakan dan perikanan melalui pengembangan industri pengelolaan komoditas pertanian dan peternakan yang ditunjang oleh penguatan infratsruktur wilayah dan pengembangan kawasan pusat pertumbuhan yang diprioritaskan pada peningkatan kualitas dan kemantapan jalan provinsi khususnya pada ruas jalan yang mendukung distribusi logistik dan peningkatan kapasitas jaringan infrastruktur sumber daya air sebagai upaya pengembangan komoditas unggulan pertanian tanaman pangan, perkebunan, peternakan, dan perikanan di Kawasan Parepare yang didukung oleh pengembangan dan penguatan kewirausahaan, khususnya pada usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).

Akselerasi pembangunan sumber daya manusia pada Kawasan Parepare dalam rangka mempertahankan capaian indeks pembangunan manusia yang rata-rata capaiannya di atas capaian Provinsi Sulawesi Selatan akan diprioritaskan pada pemerataan akses dan mutu pelayanan pendidikan, serta pemenuhan kebutuhan air minum dan sanitasi yang layak.

Peningkatan pelestarian lingkungan hidup di kawasan Parepare akan diprioritaskan pada pengendalian pemanfaatan ruang, dan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan guna mencapai peningkatan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup dan penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK).

Gambar V. 6
Arah Kebijakan Pengembangan Kawasan Parepare Tahun 2023

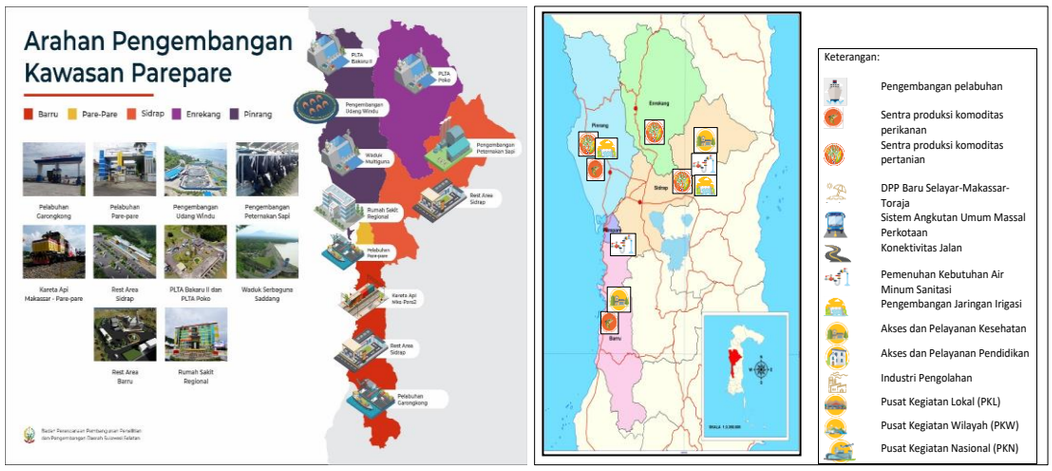

Sumber: Perubahan RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan, Bappelitbangda diolah Tahun 2022

5.2.5. Kawasan Pembangunan Palopo Tahun 2023

Pembangunan kawasan pembangunan Palopo dilakukan melalui pendekatan penguatan pusat-pusat pertumbuhan wilayah melalui pengembangan komoditas unggulan pertanian tanaman pangan, perkebunan, peternakan, dan perikanan yang didukung oleh hilirisasi produk unggulan berbasis sumberdaya alam, pengembangan ekonomi lokal berbasis komoditas unggulan yang didukung oleh penguatan peran lembaga masyarakat serta usaha kecil dan menengah.

Sasaran utama pembangunan wilayah Kawasan Palopo tahun 2023 adalah pulihnya pertumbuhan ekonomi wilayah, peningkatan kualitas lapangan pekerjaan, dan peningkatan kualitas manusia melalui peningkatan kualitas pelayanan dasar dengan target sebagai berikut.

Tabel V. 7
Target Pembangunan Kawasan Palopo Tahun 2023

Kab./Kota	Indikator Pembangunan	Satuan	Target 2023	
			P-RPJMD	RKPD
Palopo	Pertumbuhan Ekonomi	%	4,84-6,45	5,65-6,47
	Tingkat Kemiskinan	%	6.75	6,70
	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	9.91	8,22
	Gini Ratio	Nilai	0.333	0,325
	IPM	Nilai	78.84	79,20
Luwu	Pertumbuhan Ekonomi	%	4,49-5,99	6,09-6,91
	Tingkat Kemiskinan	%	10.49	11,09
	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	4.72	4,45
	Gini Ratio	Nilai	0.373	0,361
	IPM	Nilai	71.57	71,95
Luwu Utara	Pertumbuhan Ekonomi	%	5,10-6,80	4,94-5,76
	Tingkat Kemiskinan	%	12.56	12,15
	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	2.87	3,66
	Gini Ratio	Nilai	0.324	0,318

Kab./Kota	Indikator Pembangunan	Satuan	Target 2023	
			P-RPJMD	RKPD
	IPM	Nilai	70.35	71,54
Luwu Timur	Pertumbuhan Ekonomi	%	2,72-3,63	2,86-3,69
	Tingkat Kemiskinan	%	5.02	5,50
	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	4.26	4,03
	Gini Ratio	Nilai	0.381	0,373
	IPM	Nilai	74.31	74,40
Tana Toraja	Pertumbuhan Ekonomi	%	5,18-6,90	5,59-6,41
	Tingkat Kemiskinan	%	11.34	10,83
	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	2.48	2,92
	Gini Ratio	Nilai	0.328	0,319
	IPM	Nilai	70.10	70,66
Toraja Utara	Pertumbuhan Ekonomi	%	5,19-6,92	5,32-6,14
	Tingkat Kemiskinan	%	9.27	10,55
	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	3.03	1,99
	Gini Ratio	Nilai	0.361	0,361
	IPM	Nilai	70.26	70,81

Sumber: BAPPELITBANGDA Prov. Sulawesi Selatan, diolah Tahun 2022

Pengembangan kawasan Palopo dilakukan melalui pendekatan pusat pertumbuhan untuk memacu pertumbuhan ekonomi, mengingat peran Kawasan Palopo sebagai bagian dari Kawasan Sorowako yang merupakan Kawasan Strategis Nasional (KSN) dan Kabupaten Tana Toraja dan Toraja Utara sebagai bagian dari Kawasan Toraja yang merupakan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) sebagai kontributor terbesar kedua terhadap PDRB Sulawesi Selatan setelah Kawasan Makassar. Peningkatan pengembangan Kawasan Palopo dalam rangka pemberdayaan ekonomi kerakyatan melalui hilirisasi komoditas unggulan wilayah dan penurunan kesenjangan social ekonomi diprioritaskan pada pengembangan industry pengolahan dan industry jasa hasil perkebunan, peternakan dan perikanan.

Peningkatan pertumbuhan ekonomi kawasan Palopo membutuhkan dukungan penguatan infrastruktur wilayah yang diprioritaskan pada peningkatan kualitas dan kemantapan jalan provinsi khususnya pada ruas jalan yang mendukung distribusi logistic dan pembangunan infrastuktur wilayah terisolir dan peningkatan kapasitas jaringan sumber daya air guna mendukung peran Sulawesi Selatan sebagai lumbung pangan nasional. Sedangkan pengembangan kawasan pusat pertumbuhan di kawasan Palopo yang merupakan bagian dari wilayah Destinasi Pariwisata Pengembangan (DPP) DPP Baru Toraja-Makassar-Selayar diprioritaskan pada pemantapan prasarana dan sarana destinasi pariwisata dan pengembangan dan penguatan kewirausahaan.

Akselerasi pembangunan sumber daya manusia di Kawasan Palopo diharapkan dapat meningkatkan indeks pendidikan dan indeks kesehatan yang akan diprioritaskan pada upaya pemerataan akses dan mutu pelayanan pendidikan dan kesehatan, serta pemenuhan kebutuhan air minum dan sanitasi yang layak. Sedangkan dalam mengarusutamakan peningkatan pelestarian

lingkungan hidup, akan diprioritaskan pada penagawasan sumberdaya kelautan, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, optimalisasi ketaatan penyeleggaraan pemanfaatan khususnya pengendalian pemanfaatan ruang pada daerah aliran sungai untuk mendukung peningkatan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup dan pengurangan emisi GRK.

Gambar V. 7
Arah Kebijakan Pengembangan Kawasan Palopo Tahun 2023

Sumber: Perubahan RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan, Bappelitbangda diolah Tahun 2022

BAB VI

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

BAB VI
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

6.1. Kerangka Pendanaan Tahun 2023

Kerangka pendanaan pada bagian ini menggambarkan perspektif rencana penganggaran untuk tahun 2023 Provinsi Sulawesi Selatan. Penyajian kerangka pendanaan dimaksudkan untuk menampilkan Kemampuan Keuangan Daerah yang menjadi dasar dalam penyusunan target dan pendanaan program.

Dalam Kerangka Ekonomi dan Kebijakan Keuangan Daerah pada Bab III disajikan bahwa pendapatan daerah tahun 2023 diproyeksikan sebesar **Rp. 9.527.321.315.148,-** yang bersumber dari PAD sebesar **Rp 5,241,732,200,576,92,-** dan pendapatan transfer sebesar **Rp. 4.197.489.435.321,07,-** serta Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebesar **Rp. 88.099.279.250,-** Pendapatan daerah tersebut akan digunakan untuk membiayai program/kegiatan pembangunan dalam rencana belanja daerah tahun **2023**, dengan jumlah belanja daerah sebesar Rp. **Rp. 9.392.321.315.147,99,-**

Belanja daerah tahun 2023 disusun berdasarkan prinsip-prinsip penganggaran dengan pendekatan anggaran berbasis money follow program priority dengan memperhatikan prioritas pembangunan daerah dalam rangka pencapaian target sasaran pembangunan tahun 2023, serta dilakukan secara efektif, efisien, akuntabel, transparan, dan berkeadilan. Belanja daerah tahun 2023 antara lain diarahkan untuk pemenuhan pembiayaan belanja yang bersifat wajib dan mengikat untuk menjamin pelayanan dasar masyarakat, penyelenggaraan urusan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar, urusan wajib tidak terkait pelayanan dasar dan urusan pilihan sesuai dengan potensi daerah, serta membiayai kegiatan-kegiatan strategis yang menjadi prioritas pembangunan Sulawesi Selatan Tahun 2023.

Struktur Belanja Tahun Anggaran 2023 disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang dibagi ke dalam Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer, dengan rincian belanja berikut:

Tabel VI.1.
Rincian Kerangka Pendanaan Tahun 2023

NO	URAIAN	PROYEKSI 2023	PROYEKSI 2024
1	*2*	*3*	*4*
5	**BELANJA DAERAH**	**9.392.321.315.148**	**9.512.127.543.780**
05:01	**BELANJA OPERASI**	**5,658,346,529,007**	**5.670.442.574.693**
05:01:01	Belanja Pegawai	3.273.653.314.243	3.095.610.974.093
05:01:02	Belanja Barang dan Jasa	2.065.697.795.213	2.098.565.166.297
05:01:03	Belanja Bunga	-	2.049.717.475
05:01:04	Belanja Subsidi	2.000.000.000,00	8.000.000.000
05:01:05	Belanja Hibah	312.715.419.551	461.974.716.828

NO	URAIAN	PROYEKSI 2023	PROYEKSI 2024
1	*2*	*3*	*4*
05:01:06	Belanja Bantuan Sosial	4.280.000.000	4.242.000.000
05:02	**BELANJA MODAL**	**1.630.578.496.195**	**1.673.395.114.550**
05:02:01	Belanja Modal	1.630.578.496.195	1.673.395.114.550
05:03	**BELANJA TIDAK TERDUGA**	**60.000.000.000**	**120.000.000.000**
05:03:01	Belanja Tidak Terduga	60.000.000.000	120.000.000.000
05:04	**BELANJA TRANSFER**	**2.043.396.289.946,42**	**2.048.289.854.536**
05:04:01	Belanja Bagi Hasil	1.525.932.742.946	1.626.789.854.536
05:04:02	Belanja Bantuan Keuangan	517.463.547.000	421.500.000.000

Sumber : BKAD Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2022

6.2. Program Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2023

Pelaksanaan proses penyusunan penetapan program prioritas telah melalui tahapan dan prosedur perencanaan yang sesuai dengan aturan, ditetapkan dan menjadi dasar acuan dalam rangka pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan daerah untuk tahun 2023, Perumusan program prioritas pembangunan daerah yang merupakan panduan dalam menentukan kegiatan prioritas perangkat daerah yang terdiri dari 7(Tujuh) prioritas pembangunan.

Prioritas pertama Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayaan Publik dengan 2 sasaran dan dijabarkan dalam 11 (Sebelas) program prioritas, prioritas kedua Penguatan infrastruktur wilayah dengan 1(satu) sasaran dijabarkan ke dalam 6 (Enam) Program, Prioritas pembangunan ke 3 Pengembangan Kawasan Pusat Pertumbuhan dengan 1 (Satu) sasaran yang dijabarkan kedalam 7 (Tujuh) program, prioritas pembangunan ke 4 (empat) Penurunan Kesenjangan Sosial Ekonomi dengan 1 (Satu) sasaran yang dijabarkan ke dalam 9 (Sembilan) program, dan untuk prioritas pembangunan ke 5 (lima) Pembangunan Manusia, dengan 2 (dua) sasaran yang dijabarkan ke dalam 5 (Lima) program, Prioritas pembangunan ke 6 (enam) Pemberdayaan ekonomi Kerakyatan yang dijabarkan dengan 3 sasaran yang dijabarkan ke dalam 6 (Enam) program, prioritas Pembangunan ke 7 (tujuh) Pelestarian Lingkungan Hidup dengan 1 (satu) sasaran yang dijabarkan ke dalam 10 (sepuluh) Program prioritas.

Secara keseluruhan prioritas pembangunan tahun 2023 adalah sebanyak 7 (Tujuh) prioritas pembangunan dengan 11 (sebelas) sasaran, dan 62 (Enam Puluh Dua) program prioritas sebagai mana di jabarkan pada tabel VI.2. berikut.

Tabel VI.2.
Prioritas dan Program Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023

No.	Prioritas Pembangunan Daerah	Sasaran Pembangunan	Program Prioritas		Indikator Kinerja (Outcome)	Tahun 2023		Tahun 2024		Perangkat Daerah
						Target		Target		
						Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	
1	2	3	4		5			6	7	8
1	Pemantapan reformasi birokrasi	(1) Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah	1	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Cakupan SDM Aparatur yang Lulus Diklat Kompetensi Managerial, Kompetensi Diklat Fungsional, Kompetensi Diklat Sosial Kultural	100%	1.150.000.000	100%	6,963,143,000.00	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
			2	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase pemenuhan kebutuhan pegawai ASN;	95 %	4.142.331.704	95 %	0	Badan Kepegawaian Daerah
					Persentase ASN yang menduduki jabatan struktural dan fungsional berbasis talenta;	100 %		100 %		
					Persentase ASN berkinerja baik dan sangat baik	65 %		65 %		
			3	PROGRAM PENATAAN ORGANISASI	Persentase kesesuaian program prioritas dengan struktur organisasi	100%	4.180.000.000	100%	0	Biro Organisasi Sekretariat Daerah

No.	Prioritas Pembangunan Daerah	Sasaran Pembangunan	Program Prioritas		Indikator Kinerja (Outcome)	Tahun 2023		Tahun 2024		Perangkat Daerah
						Target		Target		
						Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	
1	2	3	4		5			6	7	8
					perangkat daerah					
			4	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	% OPD yang hasil nilai SAKIPnya meningkat	100 %	14.723.830.000	100 %	16,441,114,829.00	Inspektorat Daerah
					% Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Umum dan Teknis Kab/Kota	72.50 %		72.50 %		
					% Penyelesaian Tindak Lanjut Perangkat Daerah Terhadap Hasil Pemeriksaan APIP	79.50 %		79.50 %		
			5	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	% Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD & APBD	100%	13.035.250.980	100%	13.687.013.525,00	Bappelitbangda
					Persentase peningkatan capaian kinerja program	0,50%		0,50%		

No.	Prioritas Pembangunan Daerah	Sasaran Pembangunan	Program Prioritas		Indikator Kinerja (Outcome)	Tahun 2023		Tahun 2024		Perangkat Daerah
						Target		Target		
						Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	
1	2	3	4		5			6	7	8
			6	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Indeks sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE)	3,1	8.038.171.374	3,1	10.550.000.000	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
			7	PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM	Nilai Hasil Evaluasi Reformasi Birokrasi pada Penataan Peraturan Perundang-undangan	5	5.187.729.020	5		Biro Hukum Sekretariat Daerah
					Persentase Perkara Hukum yang difasilitasi	100%		100%		
			8	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase BUM Desa Yang diFasilitasi	11.81%	1.177.531.111	11.81%	3.756.544.360	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa
					Persentase Desa yang diFasilitasi	25,05, %		25,05, %		
		(2) Berkembangnya inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	9	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase Perangkat Daerah yang mendapatkan penghargaan inovasi daerah (Prioritas)	3%	5.091.179.790	3%	5.315.188.100	BAPPELITBANGDA

No.	Prioritas Pembangunan Daerah	Sasaran Pembangunan	Program Prioritas		Indikator Kinerja (Outcome)	Tahun 2023		Tahun 2024		Perangkat Daerah
						Target		Target		
						Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	
1	2	3	4		5			6	7	8
			10	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase layanan informasi dan komunikasi publik	90 %	34.923.430.160	90 %	36.900.889.968	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
					Presentase tindak lanjut pengaduan pada Baruga Layanan Masyarakat secara Elektronik	100 %		100 %		
			11	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase Ketepatan Waktu Penyelesaian Izin yang Diterbitkan Sesuai SOP	90%	1.354.999.800	90%	1.743.000.000	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
2	Pembangunan dan peningkatan kualitas infrastruktur wilayah untuk akselerasi pertumbuhan	(3) Meningkatnya aksesibilitas infrastruktur	12	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase jalan provinsi dalam kondisi mantap	75.09%	719.085.323.800	75.09%	1.773.262.112.550	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
					Persentase panjang terisolir pada ruas jalan provinsi yang terakses roda empat)	80%		80%		
			13	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Jumlah arus penumpang melalui pelabuhan (Prioritas)	1.105.000 Orang	1.657.568.462	1.105.000 Orang	1.275.000.000	Dinas Perhubungan
					Jumlah pelabuhan strategis provinsi	11 Lokasi		11 Lokasi		

No.	Prioritas Pembangunan Daerah	Sasaran Pembangunan	Program Prioritas		Indikator Kinerja (Outcome)	Tahun 2023		Tahun 2024		Perangkat Daerah
						Target		Target		
						Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	
1	2	3	4		5			6	7	8
					Persentase pelabuhan yang beroperasi	35%		35%		
			14	PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN	Persentase Rumah Tangga Pengguna Listrik	99%	6.349.609.100	99%	6.413.993.183	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
					Persentase Desa berlistrik (Prioritas Desa Kepulauan)	99,50%		99,50%		
			15	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR	Persentase Jaringan Irigasi Primer dan Sekunder kondisi baik pada DI Kewenangan Provinsi	80%	103.482.000.200	80%	108.975.401.764	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
					Cakupan pengelolaan sungai, danau, waduk, dan pantai	100%		100%		
			16	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase rumah tangga yang berakses air bersih layak/Arsinum di kawasan Pesisir dan Kepulauan	100%	12.715.004.200	100%	10,254,103,965.00	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan

No.	Prioritas Pembangunan Daerah	Sasaran Pembangunan	Program Prioritas		Indikator Kinerja (Outcome)	Tahun 2023		Tahun 2024		Perangkat Daerah
						Target		Target		
						Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	
1	2	3	4		5			6	7	8
					Persentase rumah tangga bersanitasi di kawasan permukiman	93%		93%		
					Persentase panjang jalan lingkungan yang terbangun di kawasan permukiman	100%		100%		
			17	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase warga negara memperoleh kebutuhan air minum curah lintas kabupaten/kota	100%	52.040.782.200	100%	55.322.930.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
					Cakupan Pembinaan Layanan Air Minum Kab/Kota	100%		100%		
	Percepatan pemulihan ekonomi dan perlindungan social	(4) Meningkatnya penyerapan tenaga kerja pada sektor unggulan daerah	18	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Persentase peningkatan destinasi wisata menjadi destinasi wisata unggulan	1,00%	2.540.781.800	1,00%	12,727,407,459.00	Dinas Pariwisata
					Persentase Kab/Kota yang memiliki kawasan wisata halal	20,80%		20,80%		

No.	Prioritas Pembangunan Daerah	Sasaran Pembangunan	Program Prioritas		Indikator Kinerja (Outcome)	Tahun 2023		Tahun 2024		Perangkat Daerah
						Target		Target		
						Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	
1	2	3	4		5			6	7	8
			19	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Kunjungan wisata (Wisatawan Nusantara)	100%	4.131.748.200	100%	25,762,085,108.00	Dinas Pariwisata
					Kunjungan wisata (Wisatawan Mancanegara)	100%		100%		
			20	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Jumlah kawasan strategis dan pusat pertumbuhan baru yang dilakukan penataan bangunan dan lingkungannya	15 Kawasan	74.016.032.920	15 Kawasan	88.265.650.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
			21	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase Pencari kerja yang yang terdaftar dan ditempatkan	4.35%	624.784.856	4.35%	1,044,750,000.00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
					Persentase daya serap tenaga kerja (Prioritas)	59.41%		59.41%		
			22	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase pencari kerja terlatih yang mendapatkan pekerjaan	77,08%	4.832.824.200	77,08%	1.099.000.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
					Persentase tenaga kerja yang dilatih berwirausaha dapat mandiri	85%		85%		

No.	Prioritas Pembangunan Daerah	Sasaran Pembangunan	Program Prioritas		Indikator Kinerja (Outcome)	Tahun 2023		Tahun 2024		Perangkat Daerah
						Target		Target		
						Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	
1	2	3	4		5			6	7	8
			23	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Jumlah Realisasi PMA (Rp. Triliun)	4,5	1.269.999.800	4,5	1.222.500.000	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
					Jumlah Realisasi PMDN (Rp. Triliun)	5,67		5,67		
			24	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	0.25%	4.112.712.930	0.25%	149.500.000	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
					Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial	2.03%		2.03%		
4	Penurunan Kesenjangan Sosial Ekonomi	(5) Menurunnya kesenjangan pendapatan antar lapisan masyarakat	25	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase Luas Kawasan Kumuh Tertangani Kewenangan Provinsi	36, 37 %	5.136.586.600	36.37%	11,301,690,363.00	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
			26	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Cakupan UMKM yang diberdayakan	11%	7.715.562.000	11%	7,000,000,000.00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah

No.	Prioritas Pembangunan Daerah	Sasaran Pembangunan	Program Prioritas		Indikator Kinerja (Outcome)	Tahun 2023		Tahun 2024		Perangkat Daerah
						Target		Target		
						Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	
1	2	3	4		5			6	7	8
			27	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase UMKM yang terfasilitasi Dalam Pengembangan Usaha	25%	8.341.065.000,00	25%	4,700,000,000.00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah
					Cakupan promosi produk UMKM (Prioritas)	3%		3%		
			28	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	Persentase Jumlah Pemegang izin perhutanan sosial yang menjalankan pengelolaan dan pemanfaatan sesuai aturan	16,76%	10.284.262.300	16,76%	13,650,000,000.00	Dinas Kehutanan
			29	PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Persentase penempatan transmigrasi	100%	90.000.000	100%	197,500,000.00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
			30	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase PPKS yang mendapatkan jaminan sosial	3,70%	4.585.700.000	3,70%		Dinas Sosial

No.	Prioritas Pembangunan Daerah	Sasaran Pembangunan	Program Prioritas		Indikator Kinerja (Outcome)	Tahun 2023		Tahun 2024		Perangkat Daerah
						Target		Target		
						Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	
1	2	3	4		5			6	7	8
					Persentase pengangkatan anak WNI oleh orang tua tunggal	100%		100%		
			31	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Jumlah produksi Talas Satoimo (Ton)	7000 Ton	211.419.409.350	7000 Ton	210,288,750,000	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
					Luas Areal Pengengembangan Jeruk Keprok Selayar (Ha)	121 Ha (331 Ha)		121 Ha (331 Ha)		
					Produktifitas Padi	50,43 Kw/Ha		50,43 Kw/Ha		
					Produktifitas Jagung	55,73 Kw/Ha		55,73 Kw/Ha		
					Produtifitas Kopi	588 Kg/Ha		588 Kg/Ha		
					Produktifitas Kakao	12.000 Kg/Ha		12.000 Kg/Ha		
					Peningkatan Ketersediaan Alat dan Mesin Pertanian	300 Unit		300 Unit		
					Peningkatan Ketersediaan Pupuk	323,02 ton		323,02 ton		
					Produksi Daging (ton)	187,45	20.117.295.548	187,45	25,827,807,368.00	Dinas Peternakan dan Kesehatan

No.	Prioritas Pembangunan Daerah	Sasaran Pembangunan	Program Prioritas		Indikator Kinerja (Outcome)	Tahun 2023		Tahun 2024		Perangkat Daerah
						Target		Target		
						Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	
1	2	3	4		5			6	7	8
					Produksi Telur (Ton)	214,274		214,274		Hewan
					Produksi Susu (Ton)	2,159		2,159		
			32	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Persentase Kelembagaan Masyarakat yang difasilitasi dan ditingkatkan kapasitasnya (Kelompok Binaan LPM)	1,57%	2.216.193.600	1,57%	1.709.492.390	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
					Persentase Posyandu aktif;	99,98%		99,98%		
					Persentase PKK aktif	100%		100%		
			33	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase Koperasi yang terfasilitasi pemberdayaan	50%	461.190.000,00	55 %	1.200.000.000,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah
5	Percepatan pembangunan Sumber daya manusia yang berkarakter dan berbudaya	(6) Meningkatnya kualitas dan pemerataan pendidikan	34	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase siswa SMA/SMK yang bebas buta aksara Al-Quran	62,00%	878.210.767.699,00	62,00%	899.767.721.082,00	Dinas Pendidikan

No.	Prioritas Pembangunan Daerah	Sasaran Pembangunan	Program Prioritas		Indikator Kinerja (Outcome)	Tahun 2023		Tahun 2024		Perangkat Daerah
						Target		Target		
						Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	
1	2	3	4		5			6	7	8
					Persentase SMA/SMK yang bebas Narkoba (indikator RPJMD pokok)	93.90%		93,90%		
					Persentase jumlah warga negara usia 16 -18 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah (SPM)	100%		100%		
					Persentase jumlah warga negara usia 4 - 18 tahun yang termasuk dalam penduduk disabilitas yang berpartisipasi dalam pendidikan Khusus (SPM)	100%		100%		
			35	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Persentase Sekolah yang menerapkan kurikulum lokal penambahan waktu pelajaran agama	57,25%	600.127.100,00	57,25%	4,135,000,000.00	Dinas Pendidikan

No.	Prioritas Pembangunan Daerah	Sasaran Pembangunan	Program Prioritas		Indikator Kinerja (Outcome)	Tahun 2023		Tahun 2024		Perangkat Daerah
						Target		Target		
						Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	
1	2	3	4		5			6	7	8
					Persentase Pendidikan menengah yang telah menerapkan penyelenggaraan dan pelayanan pendidikan berbasis TIK	82%		82%		
		(7) Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	36	PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Persentase Peningkatan Prestasi olah raga	200%	73.469.172.100		0	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
					Persentase ketersediaan sarana dan prasarana olahraga	200%				
			37	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Rasio tenaga kesehatan persatuan penduduk	23/100.000 Penduduk	1.677.887.000,00	23/100.000 Penduduk	13.311.782.085,00	Dinas Kesehatan
					Persentase tenaga kesehatan gigi dan mulut yang telah memperoleh pendidikan dan pelatihan	100%	99.833.000	100%	1.000.000.000	UPT RSK GIGI DAN MULUT
					Persentase SDM Kesehatan yang bersertifikasi	70%	172.500.000	70%	0	RSUD Labuang Baji

No.	Prioritas Pembangunan Daerah	Sasaran Pembangunan	Program Prioritas		Indikator Kinerja (Outcome)	Tahun 2023		Tahun 2024		Perangkat Daerah
						Target		Target		
						Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	
1	2	3	4		5			6	7	8
					Persentase Tenaga Kesehatan dan Tenaga Kesehatan Lainnya yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	100%	3.621.954.340	100%	37.219.543.400	RSUD Haji
			38	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase RS Regional yang terbangun dan ditingkatkan	100%	155.824.063.526,00	100%	67.180.615.358,00	Dinas Kesehatan
					Persentase RS Rujukan Provinsi yang Terakreditasi	100%		100%		
					Persentase warga negara pada kondisi kejadian luar biasa provinsi yang mendapatkan pelayanan kesehatan (SPM)	100%		100%		
					Persentase warga negara terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau	100%		100%		

No.	Prioritas Pembangunan Daerah	Sasaran Pembangunan	Program Prioritas	Indikator Kinerja (Outcome)	Tahun 2023		Tahun 2024		Perangkat Daerah
					Target		Target		
					Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	
1	2	3	4	5			6	7	8
				berpotensi bencana provinsi yang mendapatkan pelayanan kesehatan (SPM)					
				Persentase anak yang mendapat asupan gizi pada 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK)	7.50%		7.50%		
				Persentase ibu hamil yang mendapat asupan gizi pada 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK)	13%		13%		
				Persentase Ketersediaan Stok Darah Terhadap Pemenuhan Kebutuhan Darah	100%	6.893.025.988	100%	16,950,000,000.00	UPT Transfusi Darah
				Persentase pasien yang mendapatkan layanan sesuai dengan standar	100%	4.009.074.268	100%	7.500.000.000	UPT RSK Gigi dan Mulut

No.	Prioritas Pembangunan Daerah	Sasaran Pembangunan	Program Prioritas	Indikator Kinerja (Outcome)	Tahun 2023		Tahun 2024		Perangkat Daerah
					Target		Target		
					Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	
1	2	3	4	5			6	7	8
				Cakupan Ketersediaan Sarana dan Prasarana RS dalam Kondisi Baik	100%	1.200.000.000	100%	0	RSUD Labuang Baji
				Cakupan Ketersediaan Sarana dan Prasarana RS dalam Kondisi Baik	100%	800.000.000	100%	67,864,984,582.00	RS Khusus Daerah
				Cakupan Ketersediaan Sarana dan Prasarana RS dalam Kondisi Baik	100%	2.525.000.000	100%	125.000.000	RSUD Haji Makassar
				Cakupan Ketersediaan Sarana dan Prasarana dalam upaya peningkatan kesehatan masyarakat	100%	1.696.559.443	100%	0	Rumah Sakit Khusus Ibu Dan Anak Pertiwi
				Cakupan pemenuhan sarana dan prasarana RSUD Sayang Rakyat dalam kondisi baik	85%	4.822.854.473	85%	0	Rumah Sakit Umum Daerah Sayang Rakyat

No.	Prioritas Pembangunan Daerah	Sasaran Pembangunan	Program Prioritas		Indikator Kinerja (Outcome)	Tahun 2023		Tahun 2024		Perangkat Daerah
						Target		Target		
						Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	
1	2	3	4		5			6	7	8
6	Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan	(8) Meningkatnya keberdayaan perempuan dalam pembangunan	39	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase kab/kota yang memenuhi indikator prasyarat PUG	75 %	767.852.100	75 %	780.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB
					Persentase lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan yang terstandarisasi	35 %		35 %		
			40	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Persentase kab/kota yg menyediakan layanan pembelajaran keluarga yg terstandarisasi	60%	824.889.024	60%	875.258.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB
		(9) Meningkatnya aktualisas nilai-nilai agama dan budaya dalam kehidupan masyarakat	41	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkada di Provinsi	100%	4.910.853.350	100%	5.154.000.000	Satuan Polisi Pamong Praja
			42	PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase Rumusan Kebijakan Bidang Kesejahteraan Rakyat yang dimanfaatkan	100%	73.928.270.156	100	75.042.031.187	Biro Kesejahteraan

No.	Prioritas Pembangunan Daerah	Sasaran Pembangunan	Program Prioritas		Indikator Kinerja (Outcome)	Tahun 2023		Tahun 2024		Perangkat Daerah
						Target		Target		
						Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	
1	2	3	4		5			6	7	8
			43	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Persentase keikutsertaan masyarakat dalam bela negara	20%	203.729.700	20%	330,209,590.00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
			44	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Persentase Penurunan Penyalahgunaan Narkoba (Prioritas)	40%	1.187.999.200	40%	1,470,033,540.00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
					Persentase Wilayah Sulsel Berpotensi Konflik Agama yang ditangani	100%		100%		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		(10) Meningkatnya Hilirisasi Ekonomi Sektor Unggulan Daerah	45	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase Penurunan Serangan OPT	4,50%	9.200.000.000	4,50%	8,610,000,000.00	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
					Persentase Penggunan Benih Padi Bersertifikat	81,15%		81,15%		
			46	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Nilai Produksi Perikanan Tangkap	Rp. 9.210,12 M	24.121.160.300	Rp. 9.210,12 M	29.075.186.250	Dinas Kelautan dan Perikanan
					Produksi perikanan tangkap	413.030,8 Ton		413.030,8 Ton		

No.	Prioritas Pembangunan Daerah	Sasaran Pembangunan	Program Prioritas		Indikator Kinerja (Outcome)	Tahun 2023		Tahun 2024		Perangkat Daerah
						Target		Target		
						Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	
1	2	3	4		5			6	7	8
					Cakupan Bina Kelompok Nelayan	30,25%		30,25%		
					Persentase Pelabuhan Perikanan yg memiliki sarana prasarana yang sesuai standar operasional	78,95%		78,95%		
					Persentase Produksi perikanan kelompok nelayan	27%		27.17%		
			47	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Nilai produksi perikanan budidaya	Rp. 15.958,39 M	7.195.875.800	Rp. 15.958,39 M	7.015.948.125	Dinas Kelautan dan Perikanan
					Produksi perikanan budidaya	4.298.391,1 Ton		4.298.391,1 Ton		
					Persentase ketersediaan benur berkualitas	100%		100%		
			48	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Jumlah produksi hasil hutan bukan kayu	283 Ton	13.935.525.020	283 Ton	15,989,203,072.00	Dinas Kehutanan
					Jumlah produksi hasil hutan kayu olahan	92.336,62 M3		92.336,62 M3		

No.	Prioritas Pembangunan Daerah	Sasaran Pembangunan	Program Prioritas		Indikator Kinerja (Outcome)	Tahun 2023		Tahun 2024		Perangkat Daerah
						Target		Target		
						Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	
1	2	3	4		5			6	7	8
					Prosentase Kerusakan Hutan pertahun	14,82%		14,82%		
					Cakupan luas lahan kritis yang direhabilitasi (prioritas)	65,47%		65,47%		
			49	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Nilai Hilirisasi Produk Tanaman Pangan (Rp.)	465.893.180.426 Rp	101.283.785.360	465.893.180.426 Rp	105.615.813.057	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
					Nilai Hilirisasi Produk Perkebunan (Rp.)	8.000.000.000 Rp		8.000.000.000 Rp		
					Nilai Hilirisasi Produksi Peternakan	38.617.836.192 Rp	654.999.100	38.617.836.192 Rp	36,425,975,836.00	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
			50	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Nilai Hilirisasi Produksi olahan Ikan konsumsi dan non konsumsi	Rp. 317.28 Milyar	912.107.400	Rp. 317.28 Milyar	2.128.533.750	Dinas Kelautan dan Perikanan
					Produksi olahan konsumsi dan non konsumsi	5.544,1 Ton		5.544,1 Ton		
					Persentase Pembinaan mutu produk perikanan	100%		100%		

No.	Prioritas Pembangunan Daerah	Sasaran Pembangunan	Program Prioritas		Indikator Kinerja (Outcome)	Tahun 2023		Tahun 2024		Perangkat Daerah
						Target		Target		
						Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	
1	2	3	4		5			6	7	8
			51	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase pertumbuhan jumlah industri	7%	23.304.427.524	7%	14,889,000,000.00	Dinas Perindustrian
			52	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Nilai Ekspor Perdagangan	171.081.215 $ US	1.694.000.000	171.081.215 $ US	2.774.000.000	Dinas Perdagangan
7	Pelestarian Lingkungan Hidup	(11) Terpeliharanya kualitas lingkungan hidup serta kemampuan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim	53	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase Korban Bencana yang tertangani	100%	715.712.200	100%	940.000.000	Satuan Polisi Pamong Praja
					Persentase Dokumen Kebencanaan sampai dengan sah/legal yang tersedia	100%	8.384.623.136	100%	53,638,440,473.00	BPBD
					Persentase Aparat Kesiapsiagaan Bencana yang terlatih	100%		100%		
					Persentase Tanggap Darurat Bencana yang tertangani	100%		100%		
			54	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Rasio ketaatan pemanfaatan ruang	1	2.953.862.600	1	1.629.552.750	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

No.	Prioritas Pembangunan Daerah	Sasaran Pembangunan	Program Prioritas		Indikator Kinerja (Outcome)	Tahun 2023		Tahun 2024		Perangkat Daerah
						Target		Target		
						Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	
1	2	3	4		5			6	7	8
			55	PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)	Jumlah DAS yang direhabilitasi	2 DAS	331.423.100	2 DAS	470,000,000.00	Dinas Kehutanan
			56	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase penurunan emisi gas rumah kaca (GRK) dari sektor limbah	5,40%	1.730.198.485	5,40%	1.700.200.000	Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup
			57	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Cakupan limbah yang dikelola	98,00%	5.549.999.754	98,00%	5.550.000.000	Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup
			58	PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI TERBARUKAN	Persentase Penggunaan Gas Rumah Tangga	95%	229.997.300	95 %	1.430.190.928	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
			59	PROGRAM PENGELOLAAN	Produksi garam rakyat	48.450 ton	11.969.196.200	48.450 ton	13.321.140.000	Dinas Kelautan dan Perikanan

No.	Prioritas Pembangunan Daerah	Sasaran Pembangunan	Program Prioritas		Indikator Kinerja (Outcome)	Tahun 2023		Tahun 2024		Perangkat Daerah
						Target		Target		
						Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	
1	2	3	4		5			6	7	8
				KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	Cakupan Ketersediaan Sarana dan Prasarana Pendukung Produksi Perikanan	100%		100%		
					Cakupan luas kawasan konservasi perairan yang dikelola secara berkelanjutan (%)	67.31%		67.31%		
			60	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Persentase Kepatuhan Pelaku usaha KP terhadap ketentuan peraturan perundangan yang berlaku	89,85%	3.565.142.900	89,85%	3.865.103.689	Dinas Kelautan dan Perikanan
			61	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase pengguna moda transportasi umum di perkotaan	32,40%	3.750.673.645	32,40%	11.594.209.597	Dinas Perhubungan
					Persentase Layanan Angkutan Darat;	58%		58%		
					Jumlah penumpang melalui terminal	605.000 Orang		605.000 Orang		

No.	Prioritas Pembangunan Daerah	Sasaran Pembangunan	Program Prioritas		Indikator Kinerja (Outcome)	Tahun 2023		Tahun 2024		Perangkat Daerah
						Target		Target		
						Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	
1	2	3	4		5			6	7	8
					Tipe B per tahun					
					Cakupan prasarana LLAJ dalam kondisi baik	30%		30%		
					Jumlah penyelenggaraan lalu lintas pada ruas jalan provinsi	20 Ruas		20 Ruas		
					Jumlah Terminal Bis terkelola	16		16		
			62	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase sampah perkotaan yang tertangani	74%	668.093.099	74%	100.000.000	Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup

Sumber : Bappelitbangda Prov. Sulawesi Selatan, Tahun 2022

6.3. Indikasi Rencana Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan Yang Disertai Kebutuhan Pendanaan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023

Perumusan Rencana program dan kegiatan daerah tahun 2023 merupakan
formulasi dari hasil rangkaian pembahasan substansi program dan kegiatan dan sub kegiatan yang telah dilakukan dari proses penyusunan rancangan awal RKPD sampai dengan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tahun 2022 untuk RKPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023.Musrenbang menjadi salah satu media untuk membahas rencana program, kegiatan dan Sub kegiatan prioritas dengan pemangku kepentingan yang terdiri dari pihak akademisi, dunia usaha, komunitas, pemerintahan, dan masyarakat.

Penentuan program dan kegiatan daerah tahun 2023 berpedoman pada RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018 - 2023 yang merupakan tahun Akhir periode Gubernur dan Wakil Gubernur dengan memperhatikan target akhir yang telah ditetapkan dalam RPJMD 2018-2023, dan keterkaitan dengan prioritas pembangunan nasional tahun 2023 serta harus mempunyai keberpihakan terhadap penyelesaian permasalahan pembangunan yang terjadi dikabupaten/kota.

Perincian pagu pendanaan dalam rangka mendukung prioritas pembangunan daerah, pemenuhan standar pelayanan minimal,serta pemenuhan pelayanan perangkat daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintah daerah untuk mendukung terwujudnya capaian visi,misi, dan tujuan RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023, yang dijabarkan ke dalam program, kegiatan dan Sub Kegiatan perangkat daerah Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2023 yang disertai dengan indikator dan terget kinerja tahun 2023, serta target akhir RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023 dapat dilihat pada tabel dibawah.

Tabel VI.3
INDIKASI RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					GRAND TOTAL			**9,392,321,315,148**					**10,834,055,406,202**	
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			4,899,216,742,608					5,923,496,972,198	
1	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			2,883,077,934,090					2,885,648,974,976	
1	1				DINAS PENDIDIKAN			2,883,077,934,090					2,885,648,974,976	DINAS PENDIDIKAN
1	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Realisasi Kegiatan Perangkat Daerah, Persentase ASN Perangkat Daerah Berkinerja Kategori Minimal Baik, Persentase Penurunan Temuan Berdasarkan LHP	100 %	1,983,986,795,991				100 %	1,972,231,253,894	DINAS PENDIDIKAN
1	1	1	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Dokumen	2,097,957,500				5 Dokumen	4,345,000,000	DINAS PENDIDIKAN
1	1	1	1.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	74,811,000	Kota Makassar, Tamalanrea, Tamalanrea	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2 Dokumen	330,000,000	DINAS PENDIDIKAN
1	1	1	1.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	22,688,000	Kota Makassar, Tamalanrea, Tamalanrea	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2 Dokumen	1,100,000,000	DINAS PENDIDIKAN
1	1	1	1.01	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2 Dokumen	23,736,800	Kota Makassar, Tamalanrea, Tamalanrea	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2 Dokumen	1,100,000,000	DINAS PENDIDIKAN
1	1	1	1.01	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	22,688,000	Kota Makassar, Tamalanrea, Tamalanrea	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2 Dokumen	550,000,000	DINAS PENDIDIKAN
1	1	1	1.01	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2 Dokumen	22,688,000	Kota Makassar, Tamalanrea, Tamalanrea	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2 Dokumen	550,000,000	DINAS PENDIDIKAN
1	1	1	1.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	22,688,000	Kota Makassar, Tamalanrea, Tamalanrea	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Laporan	375,000,000	DINAS PENDIDIKAN
1	1	1	1.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	1,908,657,700	Kota Makassar, Tamalanrea, Tamalanrea	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Laporan	340,000,000	DINAS PENDIDIKAN
1	1	1	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3 Dokumen	1,970,636,345,195				3 Dokumen	1,956,577,253,894	DINAS PENDIDIKAN
1	1	1	1.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	13390 Orang/ Bulan	1,969,652,651,195	Kota Makassar, Tamalanrea, Tamalanrea	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		13390 Orang/ Bulan	1,954,487,253,894	DINAS PENDIDIKAN
1	1	1	1.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	2 Dokumen	-	Kota Makassar, Tamalanrea, Tamalanrea	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2 Dokumen	450,000,000	DINAS PENDIDIKAN
1	1	1	1.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	143,880,000	Kota Makassar, Tamalanrea, Tamalanrea	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		12 Dokumen	450,000,000	DINAS PENDIDIKAN
1	1	1	1.02	4	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD			18,000,000	Kota Makassar, Tamalanrea, Tamalanrea	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			280,000,000	DINAS PENDIDIKAN
1	1	1	1.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4 Laporan	56,465,700	Kota Makassar, Tamalanrea, Tamalanrea	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4 Laporan	280,000,000	DINAS PENDIDIKAN
1	1	1	1.02	6	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	-	Kota Makassar, Tamalanrea, Tamalanrea	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Dokumen	100,000,000	DINAS PENDIDIKAN
1	1	1	1.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	715,403,300	Kota Makassar, Tamalanrea, Tamalanrea	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		12 Laporan	190,000,000	DINAS PENDIDIKAN
1	1	1	1.02	8	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2 Dokumen	49,945,000	Kota Makassar, Tamalanrea, Tamalanrea	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2 Dokumen	340,000,000	DINAS PENDIDIKAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	1	1	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			-					607,000,000	DINAS PENDIDIKAN
1	1	1	1.03	1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	-	Kota Makassar, Tamalanrea, Tamalanrea	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Dokumen	21,000,000	DINAS PENDIDIKAN
1	1	1	1.03	2	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	-	Kota Makassar, Tamalanrea, Tamalanrea	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Dokumen	42,000,000	DINAS PENDIDIKAN
1	1	1	1.03	3	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	1 Laporan	-	Kota Makassar, Tamalanrea, Tamalanrea	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Laporan	125,000,000	DINAS PENDIDIKAN
1	1	1	1.03	4	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	-	Kota Makassar, Tamalanrea, Tamalanrea	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		12 Laporan	210,000,000	DINAS PENDIDIKAN
1	1	1	1.03	5	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	-	Kota Makassar, Tamalanrea, Tamalanrea	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2 Laporan	75,000,000	DINAS PENDIDIKAN
1	1	1	1.03	6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	-	Kota Makassar, Tamalanrea, Tamalanrea	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2 Laporan	9,000,000	DINAS PENDIDIKAN
1	1	1	1.03	7	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	-	Kota Makassar, Tamalanrea, Tamalanrea	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Dokumen	125,000,000	DINAS PENDIDIKAN
1	1	1	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	10 laporan	-				10 laporan	1,848,000,000	DINAS PENDIDIKAN
1	1	1	1.05	1	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	1 Unit	-	Kota Makassar, Tamalanrea, Tamalanrea	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Unit	28,000,000	DINAS PENDIDIKAN
1	1	1	1.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	-	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Paket	190,000,000	DINAS PENDIDIKAN
1	1	1	1.05	3	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	2 Dokumen	-	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2 Dokumen	35,000,000	DINAS PENDIDIKAN
1	1	1	1.05	4	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	2 Dokumen	-	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2 Dokumen	35,000,000	DINAS PENDIDIKAN
1	1	1	1.05	5	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	2 Dokumen	-	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2 Dokumen	35,000,000	DINAS PENDIDIKAN
1	1	1	1.05	6	Pemulangan Pegawai yang Pensiun	Jumlah Pegawai Pensiun yang Dipulangkan	12 Orang	-	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		12 Orang	30,000,000	DINAS PENDIDIKAN
1	1	1	1.05	7	Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	Jumlah Laporan Hasil Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	12 Laporan	-	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		12 Laporan	30,000,000	DINAS PENDIDIKAN
1	1	1	1.05	8	Pemindahan Tugas ASN	Jumlah ASN yang Dipindahtugaskan	12 Orang	-	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		12 Orang	30,000,000	DINAS PENDIDIKAN
1	1	1	1.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	4 Orang	-	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4 Orang	90,000,000	DINAS PENDIDIKAN
1	1	1	1.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	1190 Orang	-	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1190 Orang	675,000,000	DINAS PENDIDIKAN
1	1	1	1.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	1150 Orang	-	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1150 Orang	670,000,000	DINAS PENDIDIKAN
1	1	1	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah	2 Dokumen	4,749,746,100				2 Dokumen	4,513,000,000	DINAS PENDIDIKAN
1	1	1	1.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	36,550,000	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		12 Paket	775,000,000	DINAS PENDIDIKAN
1	1	1	1.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	593,543,600	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		12 Paket	800,000,000	DINAS PENDIDIKAN
1	1	1	1.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 Paket	37,872,500	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		12 Paket	900,000,000	DINAS PENDIDIKAN
1	1	1	1.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	-	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Paket	50,000,000	DINAS PENDIDIKAN
1	1	1	1.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	133,195,000	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Paket	140,000,000	DINAS PENDIDIKAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	1	1	1.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	-	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		12 Dokumen	100,000,000	DINAS PENDIDIKAN
1	1	1	1.06	7	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	-	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Paket	250,000,000	DINAS PENDIDIKAN
1	1	1	1.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	268,450,000	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		12 Laporan	1,100,000,000	DINAS PENDIDIKAN
1	1	1	1.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	380,135,000	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		12 Laporan	310,000,000	DINAS PENDIDIKAN
1	1	1	1.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	-	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Dokumen	8,000,000	DINAS PENDIDIKAN
1	1	1	1.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	3,300,000,000	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Dokumen	80,000,000	DINAS PENDIDIKAN
1	1	1	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			40,762,000					1,540,000,000	DINAS PENDIDIKAN
1	1	1	1.07	1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit	-	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Unit	250,000,000	DINAS PENDIDIKAN
1	1	1	1.07	2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	-	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Unit	300,000,000	DINAS PENDIDIKAN
1	1	1	1.07	5	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Paket	40,762,000	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2 Paket	140,000,000	DINAS PENDIDIKAN
1	1	1	1.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	-	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2 Unit	150,000,000	DINAS PENDIDIKAN
1	1	1	1.07	7	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	1 Unit	-	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Unit	140,000,000	DINAS PENDIDIKAN
1	1	1	1.07	8	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	1 Unit	-	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Unit	140,000,000	DINAS PENDIDIKAN
1	1	1	1.07	9	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	-	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Unit	140,000,000	DINAS PENDIDIKAN
1	1	1	1.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	-	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Unit	140,000,000	DINAS PENDIDIKAN
1	1	1	1.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	-	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Unit	140,000,000	DINAS PENDIDIKAN
1	1	1	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jasa Penunjang yang disediakan	5 Jenis	6,134,735,196				5 Jenis	171,000,000	DINAS PENDIDIKAN
1	1	1	1.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	-	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		12 Laporan	27,000,000	DINAS PENDIDIKAN
1	1	1	1.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	1,410,775,692	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		12 Laporan	65,000,000	DINAS PENDIDIKAN
1	1	1	1.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	-	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		12 Laporan	70,000,000	DINAS PENDIDIKAN
1	1	1	1.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	4,723,959,504	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		12 Laporan	9,000,000	DINAS PENDIDIKAN
1	1	1	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang diPelihara	22 Unit	327,250,000				22 Unit	2,630,000,000	DINAS PENDIDIKAN
1	1	1	1.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	29 Unit	177,750,000	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		29 Unit	470,000,000	DINAS PENDIDIKAN
1	1	1	1.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	29 Unit	102,000,000	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		29 Unit	180,000,000	DINAS PENDIDIKAN
1	1	1	1.09	3	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya	12 Unit	-	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		12 Unit	40,000,000	DINAS PENDIDIKAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	1	1	1.09	4	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Jumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya	1 Unit	-	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Unit	130,000,000	DINAS PENDIDIKAN
1	1	1	1.09	5	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	1 Unit	-	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Unit	110,000,000	DINAS PENDIDIKAN
1	1	1	1.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	50 Unit	22,500,000	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		50 Unit	260,000,000	DINAS PENDIDIKAN
1	1	1	1.09	7	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	30 Unit	-	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		30 Unit	490,000,000	DINAS PENDIDIKAN
1	1	1	1.09	8	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	18 Unit	-	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		18 Unit	190,000,000	DINAS PENDIDIKAN
1	1	1	1.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	25,000,000	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5 Unit	240,000,000	DINAS PENDIDIKAN
1	1	1	1.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	12 Unit	-	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		12 Unit	280,000,000	DINAS PENDIDIKAN
1	1	1	1.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	10 Unit	-	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		10 Unit	120,000,000	DINAS PENDIDIKAN
1	1	1	1.09	12	Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah	Luas Tanah yang Dilakukan Pemeliharaan/Rehabilitasi	1 Ha	-	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Ha	120,000,000	DINAS PENDIDIKAN
1	1	2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase siswa SMA/SMK yang bebas buta aksara Al-Quran	62,00 %	878,210,767,699				62,00 %	899,767,721,082	DINAS PENDIDIKAN
						Persentase SMA/SMK yang bebas Narkoba (indikator RPJMD pokok)	93,90%					93,90%		DINAS PENDIDIKAN
						Persentase jumlah warga negara usia 16 -18 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah (SPM)	100%					100%		DINAS PENDIDIKAN
						Persentase jumlah warga negara usia 4 - 18 tahun yang termasuk dalam penduduk disabilitas yang berpartisipasi dalam pendidikan Khusus (SPM)	100%					100%		DINAS PENDIDIKAN
1	1	2	1.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Jumlah Satuan Pendidikan Menengah Atas yang di kelola	586 Sekolah	471,708,214,484				586 Sekolah	452,225,000,000	DINAS PENDIDIKAN
1	1	2	1.01	1	Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru)	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	2 Unit	999,000,000	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2 Unit	4,500,000,000	DINAS PENDIDIKAN
1	1	2	1.01	2	Penambahan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	21 Ruang	2,999,000,000	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		21 Ruang	5,000,000,000	DINAS PENDIDIKAN
1	1	2	1.01	3	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	21 Ruang	2,999,000,000	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		21 Ruang	4,500,000,000	DINAS PENDIDIKAN
1	1	2	1.01	4	Pembangunan Ruang Laboratorium Biologi	Jumlah Ruang Laboratorium Biologi yang Telah Dibangun	20 Ruang	2,499,000,000	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		20 Ruang	4,500,000,000	DINAS PENDIDIKAN
1	1	2	1.01	5	Pembangunan Ruang Laboratorium Fisika	Jumlah Ruang Laboratorium Fisika yang Telah Dibangun	21 Ruang	3,999,000,000	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		21 Ruang	4,100,000,000	DINAS PENDIDIKAN
1	1	2	1.01	6	Pembangunan Ruang Laboratorium Kimia	Jumlah Ruang Laboratorium Kimia yang Telah Dibangun	21 Ruang	3,999,000,000	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		21 Ruang	4,100,000,000	DINAS PENDIDIKAN
1	1	2	1.01	7	Pembangunan Ruang Laboratorium Komputer	Jumlah Ruang Laboratorium Komputer yang Telah Dibangun	21 Ruang	3,999,000,000	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		21 Ruang	4,100,000,000	DINAS PENDIDIKAN
1	1	2	1.01	8	Pembangunan Ruang Laboratorium Bahasa	Jumlah Ruang Laboratorium Bahasa yang Telah Dibangun	21 Ruang	3,999,000,000	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		21 Ruang	4,100,000,000	DINAS PENDIDIKAN
1	1	2	1.01	9	Pembangunan Ruang Laboratorium IPA	Jumlah Ruang Laboratorium IPA yang Telah Dibangun	21 Ruang	3,499,000,000	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		21 Ruang	4,100,000,000	DINAS PENDIDIKAN
1	1	2	1.01	10	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	21 Ruang	2,999,000,000	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		21 Ruang	4,100,000,000	DINAS PENDIDIKAN
1	1	2	1.01	11	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	21 Ruang	2,499,000,000	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		21 Ruang	5,000,000,000	DINAS PENDIDIKAN
1	1	2	1.01	12	Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula	Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Dibangun	21 Ruang	2,499,000,000	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		21 Ruang	5,000,000,000	DINAS PENDIDIKAN
1	1	2	1.01	13	Pembangunan Asrama Sekolah	Jumlah Asrama Sekolah yang Telah Dibangun	21 Unit	1,999,000,000	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		21 Unit	4,100,000,000	DINAS PENDIDIKAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	1	2	1.01	14	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	21 Unit	743,000,000	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		21 Unit	10,000,000,000	DINAS PENDIDIKAN
1	1	2	1.01	15	Pembangunan Fasilitas Parkir	Jumlah Fasilitas Parkir yang Telah Dibangun	21 Unit	2,999,000,000	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		21 Unit	6,000,000,000	DINAS PENDIDIKAN
1	1	2	1.01	16	Pembangunan Kantin Sekolah	Jumlah Kantin Sekolah yang Telah Dibangun	21 Unit	2,999,000,000	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		21 Unit	5,000,000,000	DINAS PENDIDIKAN
1	1	2	1.01	17	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun	21 Unit	3,999,000,000	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		21 Unit	4,100,000,000	DINAS PENDIDIKAN
1	1	2	1.01	18	Pembangunan Ruang/Sudut Baca	Jumlah Ruang/Sudut Baca yang Telah Dibangun	21 Ruang	3,999,000,000	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		21 Ruang	4,100,000,000	DINAS PENDIDIKAN
1	1	2	1.01	19	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	25 Ruang	4,199,000,000	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		25 Ruang	10,000,000,000	DINAS PENDIDIKAN
1	1	2	1.01	20	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	25 Ruang	3,999,000,000	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		25 Ruang	5,500,000,000	DINAS PENDIDIKAN
1	1	2	1.01	21	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Biologi	Jumlah Laboratorium Biologi yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	25 Ruang	3,499,000,000	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		25 Ruang	4,100,000,000	DINAS PENDIDIKAN
1	1	2	1.01	22	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Fisika	Jumlah Laboratorium Fisika yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	25 Ruang	2,999,000,000	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		25 Ruang	4,100,000,000	DINAS PENDIDIKAN
1	1	2	1.01	23	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Kimia	Jumlah Laboratorium Kimia yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	25 Ruang	2,499,000,000	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		25 Ruang	4,000,000,000	DINAS PENDIDIKAN
1	1	2	1.01	24	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Komputer	Jumlah Laboratorium Komputer yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	25 Ruang	2,499,000,000	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		25 Ruang	6,500,000,000	DINAS PENDIDIKAN
1	1	2	1.01	25	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Bahasa	Jumlah Laboratorium Bahasa yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	25 Ruang	2,499,000,000	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		25 Ruang	4,000,000,000	DINAS PENDIDIKAN
1	1	2	1.01	26	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium IPA	Jumlah Laboratorium IPA yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	25 Ruang	2,499,000,000	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		25 Ruang	4,000,000,000	DINAS PENDIDIKAN
1	1	2	1.01	27	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	25 Ruang	2,499,000,000	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		25 Ruang	5,000,000,000	DINAS PENDIDIKAN
1	1	2	1.01	28	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpusatakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	25 Ruang	2,499,000,000	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		25 Ruang	5,000,000,000	DINAS PENDIDIKAN
1	1	2	1.01	29	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Serba Guna/Aula	Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	25 Ruang	2,499,000,000	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		25 Ruang	5,000,000,000	DINAS PENDIDIKAN
1	1	2	1.01	30	Rehabilitasi Asrama Sekolah	Jumlah Asrama Sekolah yang Telah Direhabilitasi	25 Unit	2,499,000,000	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		25 Unit	4,000,000,000	DINAS PENDIDIKAN
1	1	2	1.01	31	Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi	25 Unit	2,079,000,000	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		25 Unit	10,000,000,000	DINAS PENDIDIKAN
1	1	2	1.01	32	Rehabilitasi Fasilitas Parkir	Jumlah Fasilitas Parkir yang Telah Direhabilitasi	25 Unit	2,499,000,000	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		25 Unit	6,000,000,000	DINAS PENDIDIKAN
1	1	2	1.01	33	Rehabilitasi Kantin Sekolah	Jumlah Kantin Sekolah yang Telah Direhabilitasi	25 Unit	2,499,000,000	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		25 Unit	4,000,000,000	DINAS PENDIDIKAN
1	1	2	1.01	34	Rehabilitasi Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Di Rehabilitasi	25 Unit	2,499,000,000	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		25 Unit	4,000,000,000	DINAS PENDIDIKAN
1	1	2	1.01	35	Rehabilitasi Ruang/Sudut Baca	Jumlah Ruang/Sudut Baca yang Telah Direhabilitasi	25 Ruang	2,499,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		25 Ruang	4,000,000,000	DINAS PENDIDIKAN
1	1	2	1.01	36	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	35 Paket	2,500,000,000	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		35 Paket	6,000,000,000	DINAS PENDIDIKAN
1	1	2	1.01	37	Pengadaaan Alat Rumah Tangga Sekolah	Jumlah Alat Rumah Tangga Sekolah yang Tersedia	25 Paket	-	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		25 Paket	4,000,000,000	DINAS PENDIDIKAN
1	1	2	1.01	38	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	25 Paket	2,000,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		25 Paket	10,000,000,000	DINAS PENDIDIKAN
1	1	2	1.01	39	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	25 Paket	100,200,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		25 Paket	4,000,000,000	DINAS PENDIDIKAN
1	1	2	1.01	40	Pengadaaan Sarana Mobilitas Sekolah	Jumlah Sarana Mobilitas Sekolah yang Tersedia	25 Unit	3,000,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		25 Unit	4,000,000,000	DINAS PENDIDIKAN
1	1	2	1.01	41	Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	26 Paket	2,694,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		26 Paket	4,000,000,000	DINAS PENDIDIKAN
1	1	2	1.01	42	Pemeliharaan Rutin Bangunan Gedung dan Ruang Sekolah	Jumlah Bangunan Gedung dan Ruang Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	26 Unit	-	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		26 Unit	4,000,000,000	DINAS PENDIDIKAN
1	1	2	1.01	43	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	26 Unit	-	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		26 Unit	4,000,000,000	DINAS PENDIDIKAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	1	2	1.01	44	Pemeliharaan Rutin Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	26 Unit	-	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		26 Unit	4,000,000,000	DINAS PENDIDIKAN
1	1	2	1.01	45	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	26 Peserta didik	-	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		26 Peserta didik	4,000,000,000	DINAS PENDIDIKAN
1	1	2	1.01	46	Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	26 Paket	231,387,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		26 Paket	4,000,000,000	DINAS PENDIDIKAN
1	1	2	1.01	47	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	26 Satuan Pendidikan	400,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		26 Satuan Pendidikan	5,075,000,000	DINAS PENDIDIKAN
1	1	2	1.01	48	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Menengah Atas	Jumlah Satuan Pendidikan Menengah Atas yang Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi	26 Satuan Pendidikan	-	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		26 Satuan Pendidikan	4,000,000,000	DINAS PENDIDIKAN
1	1	2	1.01	49	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	26 Peserta Didik	600,014,100	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		26 Peserta Didik	4,000,000,000	DINAS PENDIDIKAN
1	1	2	1.01	50	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	26 Orang	-	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		26 Orang	4,000,000,000	DINAS PENDIDIKAN
1	1	2	1.01	51	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	26 Orang	900,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		26 Orang	4,000,000,000	DINAS PENDIDIKAN
1	1	2	1.01	52	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Dilakukan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	586 Satuan Pendidikan	100,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		586 Satuan Pendidikan	650,000,000	DINAS PENDIDIKAN
1	1	2	1.01	53	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS	586 Satuan Pendidikan	358,593,613,384	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		586 Satuan Pendidikan	202,500,000,000	DINAS PENDIDIKAN
1	1	2	1.01	54	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	586 Orang	100,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		586 Orang	400,000,000	DINAS PENDIDIKAN
1	1	2	1.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Satuan Pendidikan Menengah Kejuruan yang di kelola	443 Sekolah	306,273,517,748				443 Sekolah	281,768,669,011	DINAS PENDIDIKAN
1	1	2	1.02	1	Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru)	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	1 Unit	2,499,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Unit	1,000,000,000	DINAS PENDIDIKAN
1	1	2	1.02	2	Penambahan Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	20 Ruang	2,499,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		20 Ruang	3,500,000,000	DINAS PENDIDIKAN
1	1	2	1.02	3	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	20 Ruang	2,499,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		20 Ruang	3,500,000,000	DINAS PENDIDIKAN
1	1	2	1.02	4	Pembangunan Ruang Praktik Siswa	Jumlah Ruang Praktik Siswa yang Telah Dibangun	20 Ruang	3,499,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		20 Ruang	3,500,000,000	DINAS PENDIDIKAN
1	1	2	1.02	5	Pembangunan Ruang Laboratorium	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun	20 Ruang	2,999,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		20 Ruang	3,500,000,000	DINAS PENDIDIKAN
1	1	2	1.02	6	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	20 Ruang	2,499,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		20 Ruang	3,500,000,000	DINAS PENDIDIKAN
1	1	2	1.02	7	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	20 Ruang	2,499,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		20 Ruang	3,500,000,000	DINAS PENDIDIKAN
1	1	2	1.02	8	Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula	Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Dibangun	20 Ruang	2,499,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		20 Ruang	3,500,000,000	DINAS PENDIDIKAN
1	1	2	1.02	9	Pembangunan Asrama Sekolah	Jumlah Asrama Sekolah yang Telah Dibangun	20 Unit	2,499,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		20 Unit	3,500,000,000	DINAS PENDIDIKAN
1	1	2	1.02	10	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	20 Unit	792,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		20 Unit	5,000,000,000	DINAS PENDIDIKAN
1	1	2	1.02	11	Pembangunan Fasilitas Parkir	Jumlah Fasilitas Parkir yang Telah Dibangun	20 Unit	2,999,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		20 Unit	4,500,000,000	DINAS PENDIDIKAN
1	1	2	1.02	12	Pembangunan Kantin Sekolah	Jumlah Kantin Sekolah yang Telah Dibangun	20 Unit	2,499,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		20 Unit	3,500,000,000	DINAS PENDIDIKAN
1	1	2	1.02	13	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun	20 Unit	2,499,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		20 Unit	3,500,000,000	DINAS PENDIDIKAN
1	1	2	1.02	14	Pembangunan Ruang/Sudut Baca	Jumlah Ruang/Sudut Baca yang Telah Dibangun	20 Ruang	2,499,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		20 Ruang	3,500,000,000	DINAS PENDIDIKAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	1	2	1.02	15	Rehabilitasi Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi	24 Ruang	2,499,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		24 Ruang	3,500,000,000	DINAS PENDIDIKAN
1	1	2	1.02	16	Rehabilitasi Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi	24 Ruang	2,499,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		24 Ruang	3,500,000,000	DINAS PENDIDIKAN
1	1	2	1.02	17	Rehabilitasi Ruang Praktik Siswa	Jumlah Ruang Praktik Siswa yang Telah Direhabilitasi	24 Ruang	2,499,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		24 Ruang	3,500,000,000	DINAS PENDIDIKAN
1	1	2	1.02	18	Rehabilitasi Ruang Laboratorium	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Direhabilitasi	24 Ruang	2,499,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		24 Ruang	3,500,000,000	DINAS PENDIDIKAN
1	1	2	1.02	19	Rehabilitasi Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi	24 Ruang	2,499,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		24 Ruang	3,500,000,000	DINAS PENDIDIKAN
1	1	2	1.02	20	Rehabilitasi Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi	24 Ruang	2,499,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		24 Ruang	3,500,000,000	DINAS PENDIDIKAN
1	1	2	1.02	21	Rehabilitasi Ruang Serba Guna/Aula	Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Direhabilitasi	24 Ruang	2,499,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		24 Ruang	3,500,000,000	DINAS PENDIDIKAN
1	1	2	1.02	22	Rehabilitasi Asrama Sekolah	Jumlah Asrama Sekolah yang Telah Direhabilitasi	24 Unit	3,499,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		24 Unit	3,500,000,000	DINAS PENDIDIKAN
1	1	2	1.02	23	Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi	24 Unit	1,679,040,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		24 Unit	4,093,669,011	DINAS PENDIDIKAN
1	1	2	1.02	24	Rehabilitasi Fasilitas Parkir	Jumlah Fasilitas Parkir yang Telah Direhabilitasi	24 Unit	3,499,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		24 Unit	3,500,000,000	DINAS PENDIDIKAN
1	1	2	1.02	25	Rehabilitasi Kantin Sekolah	Jumlah Kantin Sekolah yang Telah Direhabilitasi	24 Unit	3,499,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		24 Unit	3,500,000,000	DINAS PENDIDIKAN
1	1	2	1.02	26	Rehabilitasi Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Direhabilitasi	24 Unit	3,499,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		24 Unit	3,500,000,000	DINAS PENDIDIKAN
1	1	2	1.02	27	Rehabilitasi Ruang/Sudut Baca	Jumlah Ruang/Sudut Baca yang Telah Direhabilitasi	24 Ruang	3,499,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		24 Ruang	3,500,000,000	DINAS PENDIDIKAN
1	1	2	1.02	28	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	24 Paket	3,000,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		24 Paket	3,000,000,000	DINAS PENDIDIKAN
1	1	2	1.02	29	Pengadaaan Alat Rumah Tangga Sekolah	Jumlah Alat Rumah Tangga Sekolah yang Tersedia	24 Paket	-	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		24 Paket	3,000,000,000	DINAS PENDIDIKAN
1	1	2	1.02	30	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah perlengkapan Sekolah yang Tersedia	24 Paket	2,984,892,300	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		24 Paket	3,000,000,000	DINAS PENDIDIKAN
1	1	2	1.02	31	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	24 Paket	2,996,921,600	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		24 Paket	3,000,000,000	DINAS PENDIDIKAN
1	1	2	1.02	32	Pengadaaan Sarana Mobilitas Sekolah	Jumlah Sarana Mobilitas Sekolah yang Tersedia	24 Unit	3,008,031,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		24 Unit	3,000,000,000	DINAS PENDIDIKAN
1	1	2	1.02	33	Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	24 Paket	1,200,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		24 Paket	3,000,000,000	DINAS PENDIDIKAN
1	1	2	1.02	34	Pemeliharaan Rutin Bangunan Gedung dan Ruang Sekolah	Jumlah Bangunan Gedung dan Ruang Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	24 Unit	-	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		24 Unit	3,000,000,000	DINAS PENDIDIKAN
1	1	2	1.02	35	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	24 Unit	-	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		24 Unit	3,000,000,000	DINAS PENDIDIKAN
1	1	2	1.02	36	Pemeliharaan Rutin Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	24 Unit	-	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		24 Unit	3,000,000,000	DINAS PENDIDIKAN
1	1	2	1.02	37	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	24 Peserta didik	-	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		24 Peserta didik	3,000,000,000	DINAS PENDIDIKAN
1	1	2	1.02	38	Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	24 Paket	199,998,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		24 Paket	3,000,000,000	DINAS PENDIDIKAN
1	1	2	1.02	39	Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	24 Satuan Pendidikan	100,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		24 Satuan Pendidikan	3,075,000,000	DINAS PENDIDIKAN
1	1	2	1.02	40	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Menengah Kejuruan	Jumlah Satuan Pendidikan Menengah Kejuruan yang Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi	24 Satuan Pendidikan	-	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		24 Satuan Pendidikan	3,000,000,000	DINAS PENDIDIKAN
1	1	2	1.02	41	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	24 Peserta Didik	499,900,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		24 Peserta Didik	3,000,000,000	DINAS PENDIDIKAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	1	2	1.02	42	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	24 Orang	-	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		24 Orang	3,000,000,000	DINAS PENDIDIKAN
1	1	2	1.02	43	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	24 Orang	52,711,300	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		24 Orang	3,000,000,000	DINAS PENDIDIKAN
1	1	2	1.02	44	Pembangunan Bengkel/Unit Produksi	Jumlah Bengkel/Unit Produksi yang Telah Dibangun	24 Unit	2,999,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		24 Unit	3,000,000,000	DINAS PENDIDIKAN
1	1	2	1.02	45	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	443 Satuan Pendidikan	101,047,400	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		443 Satuan Pendidikan	300,000,000	DINAS PENDIDIKAN
1	1	2	1.02	46	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Mengelola Dana BOS	443 Satuan Pendidikan	217,083,787,748	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		443 Satuan Pendidikan	135,000,000,000	DINAS PENDIDIKAN
1	1	2	1.02	47	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	443 Orang	101,188,400	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		443 Orang	300,000,000	DINAS PENDIDIKAN
1	1	2	1.03		Pengelolaan Pendidikan Khusus	Jumlah Satuan Pendidikan Khusus yang di kelola	86 Sekolah	100,229,035,467				86 Sekolah	165,774,052,071	DINAS PENDIDIKAN
1	1	2	1.03	1	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	1 Unit	999,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Unit	1,000,000,000	DINAS PENDIDIKAN
1	1	2	1.03	2	Penambahan Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Bertambah	20 Ruang	2,999,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		20 Ruang	3,000,000,000	DINAS PENDIDIKAN
1	1	2	1.03	3	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	20 Ruang	2,999,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		20 Ruang	3,000,000,000	DINAS PENDIDIKAN
1	1	2	1.03	4	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	20 Ruang	1,999,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		20 Ruang	3,000,000,000	DINAS PENDIDIKAN
1	1	2	1.03	5	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	20 Ruang	1,999,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		20 Ruang	3,000,000,000	DINAS PENDIDIKAN
1	1	2	1.03	6	Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula	Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Dibangun	20 Ruang	1,999,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		20 Ruang	3,000,000,000	DINAS PENDIDIKAN
1	1	2	1.03	7	Pembangunan Asrama Sekolah	Jumlah Asrama Sekolah yang Telah Dibangun	20 Unit	1,999,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		20 Unit	3,000,000,000	DINAS PENDIDIKAN
1	1	2	1.03	8	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	20 Unit	1,999,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		20 Unit	3,000,000,000	DINAS PENDIDIKAN
1	1	2	1.03	9	Pembangunan Fasilitas Parkir	Jumlah Fasilitas Parkir yang Telah Dibangun	20 Unit	1,999,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		20 Unit	3,000,000,000	DINAS PENDIDIKAN
1	1	2	1.03	10	Pembangunan Kantin Sekolah	Jumlah Kantin Sekolah yang Telah Dibangun	20 Unit	1,999,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		20 Unit	3,000,000,000	DINAS PENDIDIKAN
1	1	2	1.03	11	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun	20 Unit	1,999,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		20 Unit	3,000,000,000	DINAS PENDIDIKAN
1	1	2	1.03	12	Pembangunan Ruang Laboratorium	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun	20 Ruang	1,999,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		20 Ruang	3,000,000,000	DINAS PENDIDIKAN
1	1	2	1.03	13	Pembangunan Ruang Orientasi dan Mobilitas	Jumlah Ruang Orientasi dan Mobilitas yang Telah Dibangun	20 Ruang	1,999,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		20 Ruang	3,000,000,000	DINAS PENDIDIKAN
1	1	2	1.03	14	Pembangunan Ruang Bina Persepsi Bunyi dan Irama untuk Tunarungu (B)	Jumlah Ruang Bina Persepsi Bunyi dan Irama untuk Tunarungu (B) yang Telah Dibangun	20 Ruang	1,999,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		20 Ruang	3,000,000,000	DINAS PENDIDIKAN
1	1	2	1.03	15	Pembangunan Ruang Bina Diri untuk Tunagrahita (C)	Jumlah Ruang Bina Diri untuk Tunagrahita (C) yang Telah Dibangun	20 Ruang	1,999,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		20 Ruang	3,000,000,000	DINAS PENDIDIKAN
1	1	2	1.03	16	Pembangunan Ruang Bina Diri dan Bina Gerak untuk Tunadaksa (D)	Jumlah Ruang Bina Diri dan Bina Gerak untuk Tunadaksa (D) yang Telah Dibangun	20 Ruang	1,999,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		20 Ruang	3,000,000,000	DINAS PENDIDIKAN
1	1	2	1.03	17	Pembangunan Ruang Bina Pribadi dan Sosial untuk Tunalaras (E)	Jumlah Ruang Bina Pribadi dan Sosial untuk Tunalaras (E) yang Telah Dibangun	20 Ruang	1,999,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		20 Ruang	3,000,000,000	DINAS PENDIDIKAN
1	1	2	1.03	18	Rehabilitasi Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi	22 Ruang	1,999,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		22 Ruang	3,000,000,000	DINAS PENDIDIKAN
1	1	2	1.03	19	Rehabilitasi Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi	22 Ruang	1,999,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		22 Ruang	3,000,000,000	DINAS PENDIDIKAN
1	1	2	1.03	20	Rehabilitasi Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi	22 Ruang	1,999,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		22 Ruang	3,000,000,000	DINAS PENDIDIKAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	1	2	1.03	21	Rehabilitasi Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi	22 Ruang	1,999,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		22 Ruang	3,000,000,000	DINAS PENDIDIKAN
1	1	2	1.03	22	Rehabilitasi Ruang Serba Guna/Aula	Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Direhabilitasi	22 Ruang	1,999,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		22 Ruang	3,000,000,000	DINAS PENDIDIKAN
1	1	2	1.03	23	Rehabilitasi Asrama Sekolah	Jumlah Asrama Sekolah yang Telah Direhabilitasi	22 Unit	1,999,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		22 Unit	3,000,000,000	DINAS PENDIDIKAN
1	1	2	1.03	24	Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi	22 Unit	1,999,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		22 Unit	3,000,000,000	DINAS PENDIDIKAN
1	1	2	1.03	25	Rehabilitasi Fasilitas Parkir	Jumlah Fasilitas Parkir yang Telah Direhabilitasi	22 Unit	1,999,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		22 Unit	3,000,000,000	DINAS PENDIDIKAN
1	1	2	1.03	26	Rehabilitasi Kantin Sekolah	Jumlah Kantin Sekolah yang Telah Direhabilitasi	22 Unit	1,999,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		22 Unit	3,000,000,000	DINAS PENDIDIKAN
1	1	2	1.03	27	Rehabilitasi Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Direhabilitasi	22 Unit	1,999,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		22 Unit	3,000,000,000	DINAS PENDIDIKAN
1	1	2	1.03	28	Rehabilitasi Ruang Laboratorium	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Direhabilitasi	22 Ruang	1,999,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		22 Ruang	3,000,000,000	DINAS PENDIDIKAN
1	1	2	1.03	29	Rehabilitasi Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus	Jumlah Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus yang Telah Direhabilitasi	22 Ruang	1,999,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		22 Ruang	3,000,000,000	DINAS PENDIDIKAN
1	1	2	1.03	30	Rehabilitasi Ruang Orientasi dan Mobilitas	Jumlah Ruang Orientasi dan Mobilitas yang Telah Direhabilitasi	22 Ruang	1,999,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		22 Ruang	3,000,000,000	DINAS PENDIDIKAN
1	1	2	1.03	31	Rehabilitasi Ruang Bina Persepsi Bunyi dan Irama untuk Tunarungu (B)	Jumlah Ruang Bina Persepsi Bunyi dan Irama untuk Tunarungu (B) yang Telah Direhabilitasi	22 Ruang	1,999,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		22 Ruang	3,000,000,000	DINAS PENDIDIKAN
1	1	2	1.03	32	Rehabilitasi Ruang Bina Diri untuk Tunagrahita (C)	Jumlah Ruang Bina Diri untuk Tunagrahita (C) yang Telah Direhabilitasi	22 Ruang	1,999,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		22 Ruang	3,000,000,000	DINAS PENDIDIKAN
1	1	2	1.03	33	Rehabilitasi Ruang Bina Diri dan Bina Gerak untuk Tunadaksa (D)	Jumlah Ruang Bina Diri dan Bina Gerak untuk Tunadaksa (D) yang Telah Direhabilitasi	22 Ruang	1,999,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		22 Ruang	3,000,000,000	DINAS PENDIDIKAN
1	1	2	1.03	34	Rehabilitasi Ruang Bina Pribadi dan Sosial untuk Tunalaras (E)	Jumlah Ruang Bina Pribadi dan Sosial untuk Tunalaras (E) yang Telah Direhabilitasi	22 Ruang	1,999,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		22 Ruang	3,000,000,000	DINAS PENDIDIKAN
1	1	2	1.03	35	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	22 Paket	1,000,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		22 Paket	3,000,000,000	DINAS PENDIDIKAN
1	1	2	1.03	36	Pengadaaan Alat Rumah Tangga Sekolah	Jumlah Alat Rumah Tangga yang Tersedia	22 Paket	-	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		22 Paket	3,000,000,000	DINAS PENDIDIKAN
1	1	2	1.03	37	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	22 Paket	2,313,870,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		22 Paket	3,000,000,000	DINAS PENDIDIKAN
1	1	2	1.03	38	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	22 Paket	150,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		22 Paket	3,000,000,000	DINAS PENDIDIKAN
1	1	2	1.03	39	Pengadaaan Sarana Mobilitas Sekolah	Jumlah Sarana Mobilitas Sekolah yang Tersedia	22 Unit	2,313,870,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		22 Unit	3,000,000,000	DINAS PENDIDIKAN
1	1	2	1.03	40	Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	22 Paket	231,387,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		22 Paket	3,000,000,000	DINAS PENDIDIKAN
1	1	2	1.03	41	Pemeliharaan Rutin Bangunan Gedung dan Ruang Sekolah	Jumlah Bangunan Gedung dan Ruang Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	22 Unit	-	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		22 Unit	3,000,000,000	DINAS PENDIDIKAN
1	1	2	1.03	42	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	22 Unit	-	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		22 Unit	3,000,000,000	DINAS PENDIDIKAN
1	1	2	1.03	43	Pemeliharaan Rutin Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	22 Unit	-	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		22 Unit	3,000,000,000	DINAS PENDIDIKAN
1	1	2	1.03	44	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Pendidikan Khusus	Jumlah Peserta Didik Pendidikan Khusus yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	22 Peserta Didik	-	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		22 Peserta Didik	3,274,052,071	DINAS PENDIDIKAN
1	1	2	1.03	45	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	22 Paket	400,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		22 Paket	3,500,000,000	DINAS PENDIDIKAN
1	1	2	1.03	46	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	22 Satuan Pendidikan	150,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		22 Satuan Pendidikan	3,500,000,000	DINAS PENDIDIKAN
1	1	2	1.03	47	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Khusus	Jumlah Satuan Pendidikan Khusus yang Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi	22 Satuan Pendidikan	-	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		22 Satuan Pendidikan	3,500,000,000	DINAS PENDIDIKAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	1	2	1.03	48	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	22 Peserta Didik	200,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		22 Peserta Didik	3,500,000,000	DINAS PENDIDIKAN
1	1	2	1.03	49	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Khusus	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Khusus	22 Orang	-	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		22 Orang	3,500,000,000	DINAS PENDIDIKAN
1	1	2	1.03	50	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Khusus	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	22 Orang	299,150,900	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		22 Orang	3,500,000,000	DINAS PENDIDIKAN
1	1	2	1.03	51	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus	Jumlah Sekolah Pendidikan Khusus yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	86 Satuan Pendidikan	117,598,700	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		86 Satuan Pendidikan	250,000,000	DINAS PENDIDIKAN
1	1	2	1.03	52	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus	Jumlah Sekolah Pendidikan Khusus yang Mengelola Dana BOS	86 Satuan Pendidikan	23,987,158,867	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		86 Satuan Pendidikan	14,000,000,000	DINAS PENDIDIKAN
1	1	2	1.03	53	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus	Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus	86 Orang	100,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		86 Orang	250,000,000	DINAS PENDIDIKAN
1	1	3			PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Persentase Sekolah yang menerapkan kurikulum lokal penambahan waktu pelajaran agama	57,25%	600,127,100				57,25%	4,135,000,000	DINAS PENDIDIKAN
						Persentase Pendidikan menengah yang telah menerapkan penyelenggaraan dan pelayanan pendidikan berbasis TIK	82%					82%		DINAS PENDIDIKAN
1	1	3	1.01		Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah	Jumlah Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah yang ditetapkan	2 kegiatan	500,000,000				2 kegiatan	2,600,000,000	DINAS PENDIDIKAN
1	1	3	1.01	1	Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Menengah	Jumlah Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Menengah yang Tersusun	1 Dokumen	-	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Dokumen	650,000,000	DINAS PENDIDIKAN
1	1	3	1.01	2	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Menengah	Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Menengah yang Tersusun	1 Dokumen	200,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Dokumen	650,000,000	DINAS PENDIDIKAN
1	1	3	1.01	3	Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Menengah	Jumlah Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Menengah yang Tersedia	1029 Buku	100,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1029 Buku	700,000,000	DINAS PENDIDIKAN
1	1	3	1.01	4	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah	Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah yang Meningkat Kompetensinya	1 Orang	200,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Orang	600,000,000	DINAS PENDIDIKAN
1	1	3	1.02		Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus			100,127,100					1,535,000,000	DINAS PENDIDIKAN
1	1	3	1.02	1	Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Khusus	Jumlah Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Khusus yang Tersusun	86 Dokumen	100,127,100	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		86 Dokumen	550,000,000	DINAS PENDIDIKAN
1	1	3	1.02	2	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Khusus	Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Khusus yang Tersusun	86 Dokumen	-	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		86 Dokumen	350,000,000	DINAS PENDIDIKAN
1	1	3	1.02	3	Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Khusus	Jumlah Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Khusus yang Tersedia	86 Buku	-	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		86 Buku	85,000,000	DINAS PENDIDIKAN
1	1	3	1.02	4	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus	Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus yang Meningkat Kompetensinya	86 Orang	-	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		86 Orang	550,000,000	DINAS PENDIDIKAN
1	1	4			PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Rasio Guru terhadap murid pendidikan menengah	1:13	20,000,010,000				1:13	4,000,000,000	DINAS PENDIDIKAN
						Persentase Guru SMA yang bersertifikat	53,20%					53,20%		DINAS PENDIDIKAN
						Persentase Guru SMK yang bersertifikat	46,35%					46,35%		DINAS PENDIDIKAN
1	1	4	1.01		Pemindahan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Provinsi	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Provinsi Pemindahan	16000 orang	20,000,010,000				16000 orang	4,000,000,000	DINAS PENDIDIKAN
1	1	4	1.01	1	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	1115 Dokumen	20,000,010,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1115 Dokumen	2,000,000,000	DINAS PENDIDIKAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	1	4	1.01	2	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	1115 Laporan	-	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1115 Laporan	2,000,000,000	DINAS PENDIDIKAN
1	1	5			PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	Persentase Satuan Pendidikan Yang memperoleh Izin Penyelenggaraan Pendidikan	100 %	-				100 %	2,100,000,000	DINAS PENDIDIKAN
1	1	5	1.01		Penerbitan Izin Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Izin Pendidikan Menengah yang diterbitkan	24 Sekolah	-				24 Sekolah	750,000,000	DINAS PENDIDIKAN
1	1	5	1.01	1	Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	525 Dokumen	-	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		525 Dokumen	375,000,000	DINAS PENDIDIKAN
1	1	5	1.01	2	Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	525 Dokumen	-	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		525 Dokumen	375,000,000	DINAS PENDIDIKAN
1	1	5	1.02		Penerbitan Izin Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Izin Pendidikan Khusus yang diterbitkan	18 Sekolah	-				18 Sekolah	1,350,000,000	DINAS PENDIDIKAN
1	1	5	1.02	1	Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	63 Dokumen	-	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		63 Dokumen	450,000,000	DINAS PENDIDIKAN
1	1	5	1.02	2	Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	63 Dokumen	-	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		63 Dokumen	450,000,000	DINAS PENDIDIKAN
1	1	5	1.02	3	Pembinaan Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	63 Dokumen	-	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		63 Dokumen	450,000,000	DINAS PENDIDIKAN
1	1	6			PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA	Persentase SMA/SMK yang menerbitkan karya sastra	51,05 %	280,233,300				51.05 %	3,415,000,000	DINAS PENDIDIKAN
1	1	6	1.01		Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra	2 Bahasa	280,233,300				2 Bahasa	3,415,000,000	DINAS PENDIDIKAN
1	1	6	1.01	1	Koordinasi Penyusunan Kamus Bahasa Daerah Provinsi	Jumlah Kamus Bahasa Daerah yang Tersusun	60 Kamus	-	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		60 Kamus	325,000,000	DINAS PENDIDIKAN
1	1	6	1.01	2	Vitalitas, Konservasi dan Revitalisasi Bahasa dan Sastra Daerah Kewenangan Provinsi	Jumlah Bahasa dan Sastra Daerah Kewenangan Provinsi yang Terkaji Vitalitasnya, Terkonservasi dan Terevitalisasi Kewenangan Provinsi	65 Bahasa	-	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		65 Bahasa	350,000,000	DINAS PENDIDIKAN
1	1	6	1.01	3	Publikasi Bahasa dan Sastra Daerah Kewenangan Provinsi	Jumlah Publikasi Kebahasaan dan Kesastraan Daerah Kewenangan Provinsi	70 Publikasi	191,598,100	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		70 Publikasi	375,000,000	DINAS PENDIDIKAN
1	1	6	1.01	4	Penghargaan Tokoh Kebahasaan dan Kesastraan Daerah Kewenangan Provinsi	Jumlah Tokoh Kebahasaan dan Kesastraan Daerah Kewenangan Provinsi yang Mendapat Penghargaan	35 Orang	-	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		35 Orang	200,000,000	DINAS PENDIDIKAN
1	1	6	1.01	5	Penyediaan dan Pendistribusian Buku Cerita Rakyat Daerah Penunjang Literasi Kewenangan Provinsi	Jumlah Buku Cerita Rakyat Daerah Penunjang Literasi Kewenangan Provinsi yang Tersedia dan Terdistribusi	558 Buku	88,635,200	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		558 Buku	870,000,000	DINAS PENDIDIKAN
1	1	6	1.01	6	Peningkatan Apresiasi Siswa Terhadap Bahasa dan Sastra Daerah Kewenangan Provinsi	Jumlah Siswa Pengapresiasi Bahasa dan Sastra Daerah Kewenangan Provinsi	558 Peserta Didik	-	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		558 Peserta Didik	870,000,000	DINAS PENDIDIKAN
1	1	6	1.01	7	Penyusunan Modul dan Bahan Ajar Bahasa Daerah Kewenangan Provinsi	Jumlah Modul dan Bahan Ajar Bahasa Daerah Kewenangan Provinsi yang Tersusun	30 Dokumen	-	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		30 Dokumen	425,000,000	DINAS PENDIDIKAN
1	2				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			739,974,281,610					652,440,097,598	
1	2				DINAS KESEHATAN			236,559,788,802					180,878,812,294	DINAS KESEHATAN
1	2	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	% Realisasi Kegiatan Perangkat Daerah; % ASN Perangkat Daerah berkinerja Kategori Baik dan Sangat Baik; % Penurunan Temuan Berdasarkan LHP	100% 100% 0%	75,381,961,476				100% 100% 0%	96,505,707,126	DINAS KESEHATAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2	1	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	% Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tepat Waktu	100 %	442,434,400				100 %	419,837,655	DINAS KESEHATAN
1	2	1	1.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	176,836,000	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3 Dokumen	140,958,936	DINAS KESEHATAN
1	2	1	1.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	18,694,500	Kota Makassar, Tamalanrea, Tamalanrea	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Dokumen	19,629,225	DINAS KESEHATAN
1	2	1	1.01	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	19,800,000	Kota Makassar, Tamalanrea, Tamalanrea	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Dokumen	20,790,000	DINAS KESEHATAN
1	2	1	1.01	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	17,729,800	Kota Makassar, Tamalanrea, Tamalanrea	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Dokumen	18,616,500	DINAS KESEHATAN
1	2	1	1.01	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	16,651,100	Kota Makassar, Tamalanrea, Tamalanrea	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Dokumen	17,483,844	DINAS KESEHATAN
1	2	1	1.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6 Laporan	192,723,000	Kota Makassar, Tamalanrea, Tamalanrea	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		6 Laporan	202,359,150	DINAS KESEHATAN
1	2	1	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	% Penyusunan Dokumen Laporan Keuangan Tepat Waktu	100 %	63,468,685,171				100 %	89,619,479,880	DINAS KESEHATAN
1	2	1	1.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	532 Orang/ Bulan	63,116,799,771	Kota Makassar, Tamalanrea, Tamalanrea	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		532 Orang/ Bulan	89,250,000,000	DINAS KESEHATAN
1	2	1	1.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	20,253,000	Kota Makassar, Tamalanrea, Tamalanrea	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		12 Dokumen	21,265,650	DINAS KESEHATAN
1	2	1	1.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	100 Dokumen	270,725,500	Kota Makassar, Tamalanrea, Tamalanrea	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100 Dokumen	284,261,880	DINAS KESEHATAN
1	2	1	1.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	5,171,900	Kota Makassar, Tamalanrea, Tamalanrea	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2 Laporan	5,430,600	DINAS KESEHATAN
1	2	1	1.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	19 Laporan	50,563,000	Kota Makassar, Tamalanrea, Tamalanrea	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		19 Laporan	53,091,150	DINAS KESEHATAN
1	2	1	1.02	8	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	5,172,000	Kota Makassar, Tamalanrea, Tamalanrea	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Dokumen	5,430,600	DINAS KESEHATAN
1	2	1	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	% Pemenuhan Administrasi Barang Milik Daerah	100 %	159,999,110				100 %	168,000,000	DINAS KESEHATAN
1	2	1	1.03	1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	49,999,900	Kota Makassar, Tamalanrea, Tamalanrea	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Dokumen	52,500,000	DINAS KESEHATAN
1	2	1	1.03	6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	109,999,210	Kota Makassar, Tamalanrea, Tamalanrea	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Laporan	115,500,000	DINAS KESEHATAN
1	2	1	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rata-rata Nilai Perilaku Pegawai Perangkat Daerah berdasarkan Penilaian Kinerja ASN	89 (Nilai)	1,807,273,892				89 (Nilai)	2,111,793,262	DINAS KESEHATAN
1	2	1	1.05	3	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	26 Dokumen	1,807,273,892	Kab. Bulukumba, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		26 Dokumen	1,928,043,262	DINAS KESEHATAN
									Kab. Enrekang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					DINAS KESEHATAN
									Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					DINAS KESEHATAN
									Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					DINAS KESEHATAN
									Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					DINAS KESEHATAN
1	2	1	1.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	30 Orang	-	Kota Makassar, Tamalanrea, Tamalanrea	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		30 Orang	105,000,000	DINAS KESEHATAN
1	2	1	1.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	100 Orang	-	Kota Makassar, Tamalanrea, Tamalanrea	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100 Orang	78,750,000	DINAS KESEHATAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2	1	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	% Pemenuhan Administrasi Umum Kantor	100 %	864,743,756				100 %	663,123,404	DINAS KESEHATAN
1	2	1	1.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	15 Paket	149,499,750	Kota Makassar, Tamalanrea, Tamalanrea	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		15 Paket	126,000,000	DINAS KESEHATAN
1	2	1	1.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	36 Paket	353,709,306	Kota Makassar, Tamalanrea, Tamalanrea	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		36 Paket	157,500,000	DINAS KESEHATAN
1	2	1	1.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	80,000,000	Kota Makassar, Tamalanrea, Tamalanrea	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Paket	84,000,000	DINAS KESEHATAN
1	2	1	1.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	7 Paket	31,545,900	Kota Makassar, Tamalanrea, Tamalanrea	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7 Paket	33,123,404	DINAS KESEHATAN
1	2	1	1.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	249,988,800	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Laporan	262,500,000	DINAS KESEHATAN
1	2	1	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	% Pemenuhan Kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	65,000,000				100 %	68,250,000	DINAS KESEHATAN
1	2	1	1.07	5	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3 Paket	65,000,000	Kota Makassar, Tamalanrea, Tamalanrea	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3 Paket	68,250,000	DINAS KESEHATAN
1	2	1	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	% Pemenuhan Kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	859,878,648				100 %	3,066,722,925	DINAS KESEHATAN
1	2	1	1.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	859,878,648	Kota Makassar, Tamalanrea, Tamalanrea	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		12 Laporan	3,066,722,925	DINAS KESEHATAN
1	2	1	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	% Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dalam Kondisi Baik	100 %	7,713,946,499				100 %	388,500,000	DINAS KESEHATAN
1	2	1	1.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	34 Unit	299,990,000	Kota Makassar, Tamalanrea, Tamalanrea	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		34 Unit	315,000,000	DINAS KESEHATAN
1	2	1	1.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	7,344,401,499	Kota Makassar, Tamalanrea, Tamalanrea	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Unit	-	DINAS KESEHATAN
1	2	1	1.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	69,555,000	Kota Makassar, Tamalanrea, Tamalanrea	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Unit	73,500,000	DINAS KESEHATAN
1	2	2			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	% RS Rujukan Provinsi yang Terakreditasi; % Rumah Sakit Regional yang terbangun dan ditingkatkan; % Penduduk/Warga pada Kondisi Kejadian Luar Biasa Provinsi yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan; % Penduduk/Warga Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Provinsi yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan; % Anak yang mendapat Asupan Gizi pada 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK); % Ibu Hamil yang mendapat Asupan Gizi pada 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK)	100% 100% 100% 100% 7,5% 13%	155,824,063,526				100% 100% 100% 100% 7,5% 13%	67,180,615,358	DINAS KESEHATAN
1	2	2	1.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Cakupan ketersediaan Sarana, Prasarana dan Alkes UKP dan UKM Rujukan	100 %	123,221,467,002				100 %	36,071,474,759	DINAS KESEHATAN
1	2	2	1.01	1	Pembangunan Rumah Sakit Beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	Jumlah Rumah Sakit Baru yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000	1 Unit	114,155,556,456	Kab. Bone, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Unit	-	DINAS KESEHATAN
1	2	2	1.01	10	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan	1021 Unit	149,997,215	Kota Makassar, Tamalanrea, Tamalanrea	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1021 Unit	21,249,375,000	DINAS KESEHATAN
1	2	2	1.01	11	Pengadaan Sarana di Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah Sarana di Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan	1063 Unit	448,600,000	Kab. Bone, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1063 Unit	-	DINAS KESEHATAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2	2	1.01	15	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat-Alat Kesehatan/Peralatan Laboratorium Kesehatan	Jumlah Alat-Alat Kesehatan/Peralatan Laboratorium Kesehatan yang Disediakan dan Dipelihara	25 Unit	87,500,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		25 Unit	-	DINAS KESEHATAN
1	2	2	1.01	18	Pemeliharaan Sarana Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah Sarana Fasilitas Layanan Kesehatan yang Dipelihara	14 Unit	362,887,700	Kota Makassar, Tamalanrea, Tamalanrea	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		14 Unit	732,560,875	DINAS KESEHATAN
1	2	2	1.01	21	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	1 Dokumen	285,958,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Dokumen	300,255,900	DINAS KESEHATAN
										DAK Non Fisik-BOKKB-BOK				DINAS KESEHATAN
1	2	2	1.01	22	Pengadaan Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Disediakan	3 Paket	7,730,967,631	Kota Makassar, Tamalanrea, Tamalanrea	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3 Paket	13,789,282,984	DINAS KESEHATAN
										DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kefarmasian				DINAS KESEHATAN
1	2	2	1.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Cakupan layanan kesehatan UKP dan UKM Rujukan	100 %	31,545,692,524				100 %	29,999,391,399	DINAS KESEHATAN
1	2	2	1.02	1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Layanan Kesehatan yang Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Provinsi sesuai Standar	91015 orang	1,276,987,200	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		91015 orang	1,321,592,790	DINAS KESEHATAN
1	2	2	1.02	2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Layanan Kesehatan pada Kondisi Kejadian Luar Biasa Provinsi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	3826 Orang	1,375,640,200	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3826 Orang	1,522,247,160	DINAS KESEHATAN
										DAK Non Fisik-BOKKB-BOK				DINAS KESEHATAN
1	2	2	1.02	3	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	1 Dokumen	1,416,373,500	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Dokumen	1,692,579,124	DINAS KESEHATAN
										DAK Non Fisik-BOKKB-BOK				DINAS KESEHATAN
1	2	2	1.02	5	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut	1 Dokumen	258,100,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Dokumen	271,005,000	DINAS KESEHATAN
1	2	2	1.02	6	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1 Dokumen	21,927,097,900	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Dokumen	21,162,304,695	DINAS KESEHATAN
										DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penguatan Intervensi Stunting				DINAS KESEHATAN
										DAK Non Fisik-BOKKB-BOK				DINAS KESEHATAN
1	2	2	1.02	7	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1 Dokumen	163,600,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Dokumen	171,780,000	DINAS KESEHATAN
1	2	2	1.02	8	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 Dokumen	380,495,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Dokumen	399,519,855	DINAS KESEHATAN
										DAK Non Fisik-BOKKB-BOK				DINAS KESEHATAN
1	2	2	1.02	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisonal, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	1 Dokumen	1,140,000,200	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Dokumen	1,274,080,710	DINAS KESEHATAN
										Hibah				DINAS KESEHATAN
1	2	2	1.02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1 Dokumen	1,107,776,900	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Dokumen	1,181,373,900	DINAS KESEHATAN
1	2	2	1.02	12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji	1 Dokumen	169,136,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Dokumen	179,704,980	DINAS KESEHATAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2	2	1.02	13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	1 Dokumen	15,000,000	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Dokumen	15,750,000	DINAS KESEHATAN
									Kab. Bulukumba, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					DINAS KESEHATAN
									Kab. Enrekang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					DINAS KESEHATAN
									Kab. Luwu Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					DINAS KESEHATAN
									Kab. Tana Toraja, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					DINAS KESEHATAN
									Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					DINAS KESEHATAN
									Kota Pare Pare, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					DINAS KESEHATAN
1	2	2	1.02	14	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Kecanduan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapakan Rehabilitasi Medis	130 Orang	1,149,493,100	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		130 Orang	155,358,000	DINAS KESEHATAN
1	2	2	1.02	16	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	1 Dokumen	172,750,300	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Dokumen	199,500,000	DINAS KESEHATAN
1	2	2	1.02	17	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1 Dokumen	158,332,600	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Dokumen	151,252,500	DINAS KESEHATAN
1	2	2	1.02	19	Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan	1 Dokumen	781,609,624	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Dokumen	248,842,685	DINAS KESEHATAN
1	2	2	1.02	21	Investigasi Lanjutan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal oleh Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Investigasi Lanjutan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal oleh Kabupaten/Kota	1 Dokumen	53,300,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Dokumen	52,500,000	DINAS KESEHATAN
1	2	2	1.03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Cakupan ketersediaan data dan informasi kesehatan	100 %	191,904,000				100 %	201,499,200	DINAS KESEHATAN
1	2	2	1.03	1	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	1 Dokumen	131,904,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Dokumen	138,499,200	DINAS KESEHATAN
1	2	2	1.03	2	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	3 Dokumen	60,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3 Dokumen	63,000,000	DINAS KESEHATAN
1	2	2	1.04		Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	Persentase Izin RS Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang diterbitkan	100 %	865,000,000				100 %	908,250,000	DINAS KESEHATAN
1	2	2	1.04	2	Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit	Jumlah Rumah Sakit yang Melakukan Peningkatan Tata Kelola Sesuai Standar	31 Unit	740,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		31 Unit	777,000,000	DINAS KESEHATAN
1	2	2	1.04	3	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan Kesehatan	0 Unit	125,000,000	Kota Makassar, Tamalanrea, Tamalanrea	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		0 Unit	131,250,000	DINAS KESEHATAN
						Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan Kesehatan	31 Unit					31 Unit		DINAS KESEHATAN
1	2	3			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Rasio Tenaga Kesehatan per satuan penduduk	23/100.000 Penduduk	1,677,887,000				23/100.000 Penduduk	13,311,782,085	DINAS KESEHATAN
1	2	3	1.01		Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi	Cakupan pemenuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan di Unit Pelayanan Kesehatan	100 %	325,006,000				100 %	11,891,256,300	DINAS KESEHATAN
1	2	3	1.01	1	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	27510 Orang	325,006,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		27510 Orang	11,891,256,300	DINAS KESEHATAN
1	2	3	1.02		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	Cakupan Peningkatan Kompetensi Teknis SDMK	100 %	1,352,881,000				100 %	1,420,525,785	DINAS KESEHATAN
1	2	3	1.02	1	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkat	564 Orang	926,280,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		564 Orang	972,594,735	DINAS KESEHATAN
1	2	3	1.02	2	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	5 Dokumen	426,601,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5 Dokumen	447,931,050	DINAS KESEHATAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2	4			PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase Pemenuhan Sediaan Farmasi	100%	539,376,300				100%	587,345,115	DINAS KESEHATAN
						Persentase Pemenuhan Sediaan Alat Kesehatan	100%					100%		
						% Pemenuhan Sediaan Makanan Minuman	100%					100%		
1	2	4	1.01		Penerbitan Pengakuan Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang dan Cabang Penyalur Alat Kesehatan (PAK)	% pengakuan Pedagang Besar Farmasi Cabang dan Cabang Penyalur Alat Kesehatan (PAK) yang diterbitkan	100 %	539,376,300				100 %	587,345,115	DINAS KESEHATAN
1	2	4	1.01	1	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Pengakuan PBF Cabang dan Cabang PAK	Jumlah PBF Cabang dan Cabang PAK yang Dikendalikan dan Diawasi dalam rangka Penerbitan dan Tindaklanjut Penerbitan Perizinan	189 Sarana	475,376,300	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		189 Sarana	499,145,115	DINAS KESEHATAN
1	2	4	1.01	2	Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan Pengakuan PBF Cabang dan Cabang PAK Berbasis Elektronik	Jumlah Data Perizinan Pengakuan PBF Cabang yang Memenuhi Ketentuan Perizinan Berusaha dan Cabang PAK Berbasis Elektronik	1 Dokumen	64,000,000	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Dokumen	88,200,000	DINAS KESEHATAN
1	2	5			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	% Kabupaten/Kota yang memiliki Kebijakan PHBS	85% (20 Kab/Kota)	3,136,500,500				100%	3,293,362,610	DINAS KESEHATAN
1	2	5	1.01		Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	Cakupan pelaksanaan advokasi, pemberdayaan, kemitraan dan peningkatan peran serta masyarakat	100 %	470,947,200				100 %	494,497,500	DINAS KESEHATAN
1	2	5	1.01	1	Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	1 Dokumen	470,947,200	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Dokumen	494,497,500	DINAS KESEHATAN
										DAK Non Fisik-BOKKB-BOK				DINAS KESEHATAN
1	2	5	1.02		Pelaksanaan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Perilaku Hidup Bersih dan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Provinsi	Tersebarluasnya informasi PHBS melalui berbagai media	100 %	1,202,807,000				100 %	1,262,977,882	DINAS KESEHATAN
1	2	5	1.02	1	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	1 Dokumen	1,202,807,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Dokumen	1,262,977,882	DINAS KESEHATAN
										DAK Non Fisik-BOKKB-BOK				DINAS KESEHATAN
1	2	5	1.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Provinsi	Cakupan Pengembangan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	100 %	1,462,746,300				100 %	1,535,887,228	DINAS KESEHATAN
1	2	5	1.03	1	Bimbingan Teknis dan Supervisi UKBM	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi UKBM	1 Dokumen	1,462,746,300	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Dokumen	1,535,887,228	DINAS KESEHATAN
										DAK Non Fisik-BOKKB-BOK				DINAS KESEHATAN
1	2				UPT TRANSFUSI DARAH			7,755,398,478					19,011,000,000	UPT TRANSFUSI DARAH
1	2	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Realisasi Kegiatan Perangkat Daerah, Persentase ASN Perangkat Daerah Berkinerja Kategori Minimal Baik, Persentase Penurunan Temuan Berdasarkan LHP	100%	862,372,490				100%	1,881,000,000	UPT TRANSFUSI DARAH
1	2	1	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			-					240,000,000	UPT TRANSFUSI DARAH
1	2	1	1.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	-	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Paket	40,000,000	UPT TRANSFUSI DARAH
1	2	1	1.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	200 Orang	-	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		200 Orang	200,000,000	UPT TRANSFUSI DARAH
1	2	1	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah			315,000,000					681,000,000	UPT TRANSFUSI DARAH
1	2	1	1.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	10,000,000	Kota Makassar, Tamalanrea, Tamalanrea	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Paket	21,000,000	UPT TRANSFUSI DARAH

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2	1	1.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	35,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Paket	120,000,000	UPT TRANSFUSI DARAH
1	2	1	1.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	-	Kota Makassar, Tamalanrea, Tamalanrea	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Paket	40,000,000	UPT TRANSFUSI DARAH
1	2	1	1.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	-	Kota Makassar, Tamalanrea, Tamalanrea	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Paket	5,000,000	UPT TRANSFUSI DARAH
1	2	1	1.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	60,000,000	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2 Paket	125,000,000	UPT TRANSFUSI DARAH
1	2	1	1.06	7	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	-	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Paket	5,000,000	UPT TRANSFUSI DARAH
1	2	1	1.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	10,000,000	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Laporan	45,000,000	UPT TRANSFUSI DARAH
1	2	1	1.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30 Laporan	200,000,000	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		30 Laporan	320,000,000	UPT TRANSFUSI DARAH
1	2	1	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			30,000,000					80,000,000	UPT TRANSFUSI DARAH
1	2	1	1.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 Unit	30,000,000	Kota Makassar, Tamalanrea, Tamalanrea	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3 Unit	80,000,000	UPT TRANSFUSI DARAH
1	2	1	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			347,372,490					460,000,000	UPT TRANSFUSI DARAH
1	2	1	1.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	197,372,490	Kota Makassar, Tamalanrea, Tamalanrea	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		12 Laporan	210,000,000	UPT TRANSFUSI DARAH
1	2	1	1.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	150,000,000	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		12 Laporan	250,000,000	UPT TRANSFUSI DARAH
1	2	1	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			170,000,000					420,000,000	UPT TRANSFUSI DARAH
1	2	1	1.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 Unit	-	Kota Makassar, Tamalanrea, Tamalanrea	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Unit	80,000,000	UPT TRANSFUSI DARAH
1	2	1	1.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	8 Unit	170,000,000	Kota Makassar, Tamalanrea, Tamalanrea	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		8 Unit	300,000,000	UPT TRANSFUSI DARAH
1	2	1	1.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	15 Unit	-	Kota Makassar, Tamalanrea, Tamalanrea	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		15 Unit	40,000,000	UPT TRANSFUSI DARAH
1	2	2			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Ketersediaan Stok Darah Terhadap Pemenuhan Kebutuhan Darah	100%	6,893,025,988				100%	16,950,000,000	UPT TRANSFUSI DARAH
1	2	2	1.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi			2,853,814,108					11,250,000,000	UPT TRANSFUSI DARAH
1	2	2	1.01	4	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	1 Unit	-	Kota Makassar, Tamalanrea, Tamalanrea	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Unit	1,000,000,000	UPT TRANSFUSI DARAH
1	2	2	1.01	8	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan sarana, Prasarana dan Alat kesehatan	1 Unit	-	Kota Makassar, Tamalanrea, Tamalanrea	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Unit	270,000,000	UPT TRANSFUSI DARAH
1	2	2	1.01	10	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan	8000 Unit	865,000,000	Kota Makassar, Tamalanrea, Tamalanrea	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		8000 Unit	3,500,000,000	UPT TRANSFUSI DARAH
1	2	2	1.01	11	Pengadaan Sarana di Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah Sarana di Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan	4 Unit	-	Kota Makassar, Tamalanrea, Tamalanrea	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4 Unit	140,000,000	UPT TRANSFUSI DARAH
1	2	2	1.01	14	Pengadaan Bahan Habis Pakai Lainnya (Sprei, Handuk dan Habis Pakai Lainnya)	Jumlah Bahan Habis Pakai Lainnya (Sprei, Handuk dan Habis Pakai Lainnya) yang Disediakan	1 Paket	60,000,000	Kota Makassar, Tamalanrea, Tamalanrea	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Paket	150,000,000	UPT TRANSFUSI DARAH

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2	2	1.01	15	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat-Alat Kesehatan/Peralatan Laboratorium Kesehatan	Jumlah Alat-Alat Kesehatan/Peralatan Laboratorium Kesehatan yang Disediakan dan Dipelihara	6 Unit	-	Kota Makassar, Tamalanrea, Tamalanrea	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		6 Unit	150,000,000	UPT TRANSFUSI DARAH
1	2	2	1.01	18	Pemeliharaan Sarana Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah Sarana Fasilitas Layanan Kesehatan yang Dipelihara	3 Unit	-	Kota Makassar, Tamalanrea, Tamalanrea	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3 Unit	40,000,000	UPT TRANSFUSI DARAH
1	2	2	1.01	22	Pengadaan Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Disediakan	3 Paket	1,928,814,108	Kota Makassar, Tamalanrea, Tamalanrea	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3 Paket	6,000,000,000	UPT TRANSFUSI DARAH
1	2	2	1.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi			300,000,000					450,000,000	UPT TRANSFUSI DARAH
1	2	2	1.02	9	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	1 Dokumen	300,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Dokumen	250,000,000	UPT TRANSFUSI DARAH
1	2	2	1.02	19	Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan	1 Dokumen	-	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Dokumen	200,000,000	UPT TRANSFUSI DARAH
1	2	2	1.03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi			-					50,000,000	UPT TRANSFUSI DARAH
1	2	2	1.03	2	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	1 Dokumen	-	Kota Makassar, Tamalanrea, Tamalanrea	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Dokumen	50,000,000	UPT TRANSFUSI DARAH
1	2	2	1.04		Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi			3,739,211,880					5,200,000,000	UPT TRANSFUSI DARAH
1	2	2	1.04	3	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan Kesehatan	1 Unit	3,739,211,880	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Unit	5,200,000,000	UPT TRANSFUSI DARAH
1	2	3			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase Keterpenuhan SDM Kesehatan pada Fasilitas Kesehatan	100%	-				100%	180,000,000	UPT TRANSFUSI DARAH
1	2	3	1.02		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi			-					180,000,000	UPT TRANSFUSI DARAH
1	2	3	1.02	1	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkat	10 Orang	-	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		10 Orang	180,000,000	UPT TRANSFUSI DARAH
1	2				UPT LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH			4,710,001,521					6,064,000,000	UPT LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH
1	2	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Realisasi Kegiatan Perangkat Daerah, Persentase ASN Perangkat Daerah Berkinerja Kategori Minimal Baik, Persentase Penurunan Temuan Berdasarkan LHP	100%	2,504,013,419				100%	3,329,000,000	UPT LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH
1	2	1	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			156,229,528					270,000,000	UPT LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH
1	2	1	1.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12 Dokumen	29,349,976	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		12 Dokumen	45,000,000	UPT LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH
1	2	1	1.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	88,374,176	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Dokumen	100,000,000	UPT LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH
1	2	1	1.01	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	32,121,176	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Dokumen	100,000,000	UPT LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH
1	2	1	1.01	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	6,384,200	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Dokumen	25,000,000	UPT LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH
1	2	1	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			396,281,560					225,000,000	UPT LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH
1	2	1	1.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	134,889,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Laporan	25,000,000	UPT LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2	1	1.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	261,392,560	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		12 Laporan	200,000,000	UPT LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH
1	2	1	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			78,800,028					69,000,000	UPT LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH
1	2	1	1.03	1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	4 Dokumen	1,666,500	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4 Dokumen	4,000,000	UPT LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH
1	2	1	1.03	6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	77,133,528	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		12 Laporan	65,000,000	UPT LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH
1	2	1	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			25,711,176					345,000,000	UPT LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH
1	2	1	1.05	3	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12 Dokumen	25,711,176	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		12 Dokumen	45,000,000	UPT LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH
1	2	1	1.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	15 Orang	-	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		15 Orang	300,000,000	UPT LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH
1	2	1	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah			312,737,785					820,000,000	UPT LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH
1	2	1	1.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	13,402,500	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4 Paket	35,000,000	UPT LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH
1	2	1	1.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	100,040,650	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4 Paket	150,000,000	UPT LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH
1	2	1	1.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket	27,946,635	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4 Paket	80,000,000	UPT LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH
1	2	1	1.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	13,350,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4 Paket	20,000,000	UPT LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH
1	2	1	1.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	97,480,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		12 Laporan	35,000,000	UPT LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH
1	2	1	1.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	60,518,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		12 Laporan	500,000,000	UPT LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH
1	2	1	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			55,331,900					200,000,000	UPT LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH
1	2	1	1.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	11 Unit	55,331,900	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		11 Unit	200,000,000	UPT LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH
1	2	1	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			1,134,860,442					800,000,000	UPT LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH
1	2	1	1.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	438,909,450	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		12 Laporan	400,000,000	UPT LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH
1	2	1	1.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	695,950,992	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		12 Laporan	400,000,000	UPT LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH
1	2	1	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			344,061,000					600,000,000	UPT LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH
1	2	1	1.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	8 Unit	344,061,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		8 Unit	600,000,000	UPT LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH
1	2	2			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase pasien yang mendapatkan layanan sesuai dengan standar	100%	2,077,432,222				100%	2,700,000,000	UPT LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH
1	2	2	1.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi			1,589,320,462					2,000,000,000	UPT LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH
1	2	2	1.01	10	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan	3 Unit	1,031,537,962	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3 Unit	1,000,000,000	UPT LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2	2	1.01	15	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat-Alat Kesehatan/Peralatan Laboratorium Kesehatan	Jumlah Alat-Alat Kesehatan/Peralatan Laboratorium Kesehatan yang Disediakan dan Dipelihara	3 Unit	557,782,500	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3 Unit	1,000,000,000	UPT LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH
1	2	2	1.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi			231,000,000					400,000,000	UPT LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH
1	2	2	1.02	7	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	2 Dokumen	-	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2 Dokumen	200,000,000	UPT LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH
1	2	2	1.02	19	Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan	2 Dokumen	231,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2 Dokumen	200,000,000	UPT LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH
1	2	2	1.04		Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi			257,111,760					300,000,000	UPT LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH
1	2	2	1.04	3	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan Kesehatan	3 Unit	257,111,760	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3 Unit	300,000,000	UPT LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH
1	2	3			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN			128,555,880					35,000,000	UPT LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH
1	2	3	1.02		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi			128,555,880					35,000,000	UPT LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH
1	2	3	1.02	1	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkat	1 Orang	128,555,880	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Orang	35,000,000	UPT LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH
1	2				UPT RSK GIGI DAN MULUT			12,209,335,280					30,847,068,030	UPT RSK GIGI DAN MULUT
1	2	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Realisasi Kegiatan Perangkat Daerah, Persentase ASN Perangkat Daerah Berkinerja Kategori Minimal Baik, Persentase Penurunan Temuan Berdasarkan LHP	100%	8,100,428,012				100%	22,597,068,030	UPT RSK GIGI DAN MULUT
1	2	1	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			-					13,597,068,030	UPT RSK GIGI DAN MULUT
1	2	1	1.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	90 Orang/ Bulan	-	Kota Makassar, Mamajang, Maricaya Selatan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		90 Orang/ Bulan	13,597,068,030	UPT RSK GIGI DAN MULUT
1	2	1	1.10		Peningkatan Pelayanan BLUD			8,100,428,012					9,000,000,000	UPT RSK GIGI DAN MULUT
1	2	1	1.10	1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	8,100,428,012	Kota Makassar, Mamajang, Maricaya Selatan	Pendapatan dari BLUD		1 Unit Kerja	9,000,000,000	UPT RSK GIGI DAN MULUT
1	2	2			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase pasien yang mendapatkan layanan sesuai dengan standar	100%	4,009,074,268				100%	7,500,000,000	UPT RSK GIGI DAN MULUT
1	2	2	1.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi			2,899,833,800					6,500,000,000	UPT RSK GIGI DAN MULUT
1	2	2	1.01	9	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Rumah Sakit	2 Unit	-	Kota Makassar, Mamajang, Maricaya Selatan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2 Unit	500,000,000	UPT RSK GIGI DAN MULUT
1	2	2	1.01	10	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan	5 Unit	2,899,833,800	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5 Unit	4,500,000,000	UPT RSK GIGI DAN MULUT
1	2	2	1.01	21	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	6 Dokumen	-	Kota Makassar, Mamajang, Maricaya Selatan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		6 Dokumen	1,500,000,000	UPT RSK GIGI DAN MULUT
1	2	2	1.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi			1,109,240,468					1,000,000,000	UPT RSK GIGI DAN MULUT
1	2	2	1.02	22	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit	12 Dokumen	1,109,240,468	Kota Makassar, Mamajang, Maricaya Selatan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		12 Dokumen	1,000,000,000	UPT RSK GIGI DAN MULUT

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2	3			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase tenaga kesehatan gigi dan mulut yang telah memperoleh pendidikan dan pelatihan	100%	99,833,000				100%	750,000,000	UPT RSK GIGI DAN MULUT
1	2	3	1.02		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi			99,833,000					750,000,000	UPT RSK GIGI DAN MULUT
1	2	3	1.02	1	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkat	90 Orang	99,833,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		90 Orang	750,000,000	UPT RSK GIGI DAN MULUT
1	2				RSUD LABUANG BAJI			145,217,677,569					-	RSUD LABUANG BAJI
1	2	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Realisasi Kegiatan Perangkat Daerah, Persentase ASN Perangkat Daerah Berkinerja Kategori Minimal Baik, Persentase Penurunan Temuan Berdasarkan LHP	100%	143,845,177,569				100%	-	RSUD LABUANG BAJI
1	2	1	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			284,500,000					-	RSUD LABUANG BAJI
1	2	1	1.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	120,000,000	Kota Makassar, Mamajang, Labuang Baji	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3 Dokumen	-	RSUD LABUANG BAJI
1	2	1	1.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	65,000,000	Kota Makassar, Mamajang, Labuang Baji	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Dokumen	-	RSUD LABUANG BAJI
1	2	1	1.01	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	80,000,000	Kota Makassar, Mamajang, Labuang Baji	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Dokumen	-	RSUD LABUANG BAJI
1	2	1	1.01	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	4,000,000	Kota Makassar, Mamajang, Labuang Baji	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Dokumen	-	RSUD LABUANG BAJI
1	2	1	1.01	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	5,000,000	Kota Makassar, Mamajang, Labuang Baji	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Dokumen	-	RSUD LABUANG BAJI
1	2	1	1.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	6,500,000	Kota Makassar, Mamajang, Labuang Baji	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Laporan	-	RSUD LABUANG BAJI
1	2	1	1.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	4,000,000	Kota Makassar, Mamajang, Mamajang Luar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4 Laporan	-	RSUD LABUANG BAJI
1	2	1	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			69,333,084,153					-	RSUD LABUANG BAJI
1	2	1	1.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	8610 Orang/ Bulan	69,290,084,153	Kota Makassar, Mamajang, Labuang Baji	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		8610 Orang/ Bulan	-	RSUD LABUANG BAJI
										Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				RSUD LABUANG BAJI
1	2	1	1.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	6,500,000	Kota Makassar, Mamajang, Labuang Baji	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Laporan	-	RSUD LABUANG BAJI
1	2	1	1.02	6	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	2 Dokumen	6,500,000	Kota Makassar, Mamajang, Labuang Baji	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2 Dokumen	-	RSUD LABUANG BAJI
1	2	1	1.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18 Laporan	30,000,000	Kota Makassar, Mamajang, Labuang Baji	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		18 Laporan	-	RSUD LABUANG BAJI
1	2	1	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah			100,000,000					-	RSUD LABUANG BAJI
1	2	1	1.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	45 Laporan	100,000,000	Kota Makassar, Mamajang, Labuang Baji	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		45 Laporan	-	RSUD LABUANG BAJI
1	2	1	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			4,127,593,416					-	RSUD LABUANG BAJI
1	2	1	1.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	4,127,593,416	Kota Makassar, Mamajang, Labuang Baji	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		12 Laporan	-	RSUD LABUANG BAJI
1	2	1	1.10		Peningkatan Pelayanan BLUD			70,000,000,000					-	RSUD LABUANG BAJI
1	2	1	1.10	1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	70,000,000,000	Kota Makassar, Mamajang, Labuang Baji	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Unit Kerja	-	RSUD LABUANG BAJI

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2	2			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Cakupan Ketersediaan Sarana dan Prasarana RS dalam Kondisi Baik	100%	1,200,000,000				100%	-	RSUD LABUANG BAJI
1	2	2	1.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi			1,200,000,000					-	RSUD LABUANG BAJI
1	2	2	1.01	14	Pengadaan Bahan Habis Pakai Lainnya (Sprei, Handuk dan Habis Pakai Lainnya)	Jumlah Bahan Habis Pakai Lainnya (Sprei, Handuk dan Habis Pakai Lainnya) yang Disediakan	2 Paket	1,200,000,000	Kota Makassar, Mamajang, Labuang Baji	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)		2 Paket	-	RSUD LABUANG BAJI
1	2	3			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase SDM Kesehatan yang bersertifikasi	70 %	172,500,000				70 %	-	RSUD LABUANG BAJI
1	2	3	1.02		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi			172,500,000					-	RSUD LABUANG BAJI
1	2	3	1.02	1	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkat	50 Orang	172,500,000	Kota Makassar, Mamajang, Labuang Baji	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		50 Orang	-	RSUD LABUANG BAJI
1	2				RSUD HAJI MAKASSAR			105,661,612,828					141,549,061,434	RSUD HAJI MAKASSAR
1	2	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Realisasi Kegiatan Perangkat Daerah, Persentase ASN Perangkat Daerah Berkinerja Kategori Minimal Baik, Persentase Penurunan Temuan Berdasarkan LHP	100%	99,514,658,488				100%	104,204,518,034	RSUD HAJI MAKASSAR
1	2	1	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			52,632,206,565					56,322,065,653	RSUD HAJI MAKASSAR
1	2	1	1.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	293 Orang/ Bulan	52,632,206,565	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		293 Orang/ Bulan	56,322,065,653	RSUD HAJI MAKASSAR
1	2	1	1.10		Peningkatan Pelayanan BLUD			46,882,451,923					47,882,452,381	RSUD HAJI MAKASSAR
1	2	1	1.10	1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	12 Unit Kerja	46,882,451,923	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		12 Unit Kerja	47,882,452,381	RSUD HAJI MAKASSAR
										Pendapatan dari BLUD				RSUD HAJI MAKASSAR
1	2	2			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Cakupan Ketersediaan Sarana dan Prasarana RS dalam Kondisi Baik	100%	2,525,000,000				100%	125,000,000	RSUD HAJI MAKASSAR
1	2	2	1.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi			2,420,000,000					-	RSUD HAJI MAKASSAR
1	2	2	1.01	9	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Rumah Sakit	0 Unit	1,000,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		0 Unit	-	RSUD HAJI MAKASSAR
1	2	2	1.01	10	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan	0 Unit	800,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		0 Unit	-	RSUD HAJI MAKASSAR
1	2	2	1.01	11	Pengadaan Sarana di Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah Sarana di Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan	0 Unit	500,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		0 Unit	-	RSUD HAJI MAKASSAR
1	2	2	1.01	18	Pemeliharaan Sarana Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah Sarana Fasilitas Layanan Kesehatan yang Dipelihara	0 Unit	80,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		0 Unit	-	RSUD HAJI MAKASSAR
1	2	2	1.01	19	Pemeliharaan Prasarana Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah Prasarana Fasilitas Layanan Kesehatan yang Dipelihara	0 Unit	40,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		0 Unit	-	RSUD HAJI MAKASSAR
1	2	2	1.03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi			40,000,000					50,000,000	RSUD HAJI MAKASSAR
1	2	2	1.03	2	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	12 Dokumen	40,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		12 Dokumen	50,000,000	RSUD HAJI MAKASSAR
1	2	2	1.04		Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi			65,000,000					75,000,000	RSUD HAJI MAKASSAR
1	2	2	1.04	1	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Perizinan Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya	12 Unit	65,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		12 Unit	75,000,000	RSUD HAJI MAKASSAR

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2	3			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase Tenaga Kesehatan dan Tenaga Kesehatan Lainnya yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	100%	3,621,954,340				100%	37,219,543,400	RSUD HAJI MAKASSAR
1	2	3	1.02		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi			3,621,954,340					37,219,543,400	RSUD HAJI MAKASSAR
1	2	3	1.02	1	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkat	1830 Orang	3,621,954,340	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1830 Orang	37,219,543,400	RSUD HAJI MAKASSAR
1	2				RS KHUSUS DAERAH DADI			91,590,731,080					190,882,670,169	RS KHUSUS DAERAH DADI
1	2	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Realisasi Kegiatan Perangkat Daerah, Persentase ASN Perangkat Daerah Berkinerja Kategori Minimal Baik, Persentase Penurunan Temuan Berdasarkan LHP	100%	90,790,731,080				100%	123,017,685,587	RS KHUSUS DAERAH DADI
1	2	1	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			48,834,125,824					65,347,737,265	RS KHUSUS DAERAH DADI
1	2	1	1.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	5880 Orang Bulan	48,834,125,824	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5880 Orang Bulan	65,347,737,265	RS KHUSUS DAERAH DADI
1	2	1	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			1,956,605,256					5,169,948,322	RS KHUSUS DAERAH DADI
1	2	1	1.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	1,956,605,256	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		12 Laporan	5,169,948,322	RS KHUSUS DAERAH DADI
1	2	1	1.10		Peningkatan Pelayanan BLUD			40,000,000,000					52,500,000,000	RS KHUSUS DAERAH DADI
1	2	1	1.10	1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	40,000,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan dari BLUD		1 Unit Kerja	52,500,000,000	RS KHUSUS DAERAH DADI
1	2	2			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Cakupan Ketersediaan Sarana dan Prasarana RS dalam Kondisi Baik	100%	800,000,000				100%	67,864,984,582	RS KHUSUS DAERAH DADI
1	2	2	1.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi			800,000,000					67,864,984,582	RS KHUSUS DAERAH DADI
1	2	2	1.01	3	Pengembangan Rumah Sakit	Jumlah Rumah Sakit yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar Jenis Pelayanan Rumah Sakit Berdasarkan Kelas Rumah Sakit yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000	1 Unit	-	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Unit	26,250,000,000	RS KHUSUS DAERAH DADI
1	2	2	1.01	8	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan	2 Unit	428,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)		2 Unit	13,965,000,000	RS KHUSUS DAERAH DADI
1	2	2	1.01	10	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan	56 Unit	372,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)		56 Unit	26,250,000,000	RS KHUSUS DAERAH DADI
1	2	2	1.01	14	Pengadaan Bahan Habis Pakai Lainnya (Sprei, Handuk dan Habis Pakai Lainnya)	Jumlah Bahan Habis Pakai Lainnya (Sprei, Handuk dan Habis Pakai Lainnya) yang Disediakan	35 Paket	-	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		35 Paket	1,399,984,582	RS KHUSUS DAERAH DADI
1	2				RSK IBU DAN ANAK PERTIWI			35,203,168,648					-	RSK IBU DAN ANAK PERTIWI
1	2	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Realisasi Kegiatan Perangkat Daerah, Persentase ASN Perangkat Daerah Berkinerja Kategori Minimal Baik, Persentase Penurunan Temuan Berdasarkan LHP	100%	33,506,609,264				100%	-	RSK IBU DAN ANAK PERTIWI
1	2	1	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			21,256,609,264					-	RSK IBU DAN ANAK PERTIWI
1	2	1	1.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	213 Orang/ Bulan	21,256,609,264	Kota Makassar, Ujung Pandang, Sawerigading	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		213 Orang/ Bulan	-	RSK IBU DAN ANAK PERTIWI
										Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				RSK IBU DAN ANAK PERTIWI

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2	1	1.10		Peningkatan Pelayanan BLUD			12,250,000,000					-	RSK IBU DAN ANAK PERTIWI
1	2	1	1.10	1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	12,250,000,000	Kota Makassar, Ujung Pandang, Sawerigading	Pendapatan dari BLUD		1 Unit Kerja	-	RSK IBU DAN ANAK PERTIWI
1	2	2			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Cakupan Ketersediaan Sarana dan Prasarana dalam upaya peningkatan kesehatan masyarakat	100%	1,696,559,443				100%	-	RSK IBU DAN ANAK PERTIWI
1	2	2	1.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi			380,000,000					-	RSK IBU DAN ANAK PERTIWI
1	2	2	1.01	9	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Rumah Sakit	1 Unit	380,000,000	Kota Makassar, Ujung Pandang, Sawerigading	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Unit	-	RSK IBU DAN ANAK PERTIWI
1	2	2	1.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi			1,316,559,443					-	RSK IBU DAN ANAK PERTIWI
1	2	2	1.02	22	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit	7778 Dokumen	1,316,559,443	Kota Makassar, Ujung Pandang, Sawerigading	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7778 Dokumen	-	RSK IBU DAN ANAK PERTIWI
1	2				RSKD IBU DAN ANAK SITI FATIMAH			31,503,557,985					42,135,818,210	RSKD IBU DAN ANAK SITI FATIMAH
1	2	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Realisasi Kegiatan Perangkat Daerah, Persentase ASN Perangkat Daerah Berkinerja Kategori Minimal Baik, Persentase Penurunan Temuan Berdasarkan LHP	100%	31,503,557,985				100%	42,135,818,210	RSKD IBU DAN ANAK SITI FATIMAH
1	2	1	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			16,414,620,369					25,905,818,210	RSKD IBU DAN ANAK SITI FATIMAH
1	2	1	1.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	162 Orang/ Bulan	16,414,620,369	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		162 Orang/ Bulan	25,905,818,210	RSKD IBU DAN ANAK SITI FATIMAH
1	2	1	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			1,588,937,616					3,100,000,000	RSKD IBU DAN ANAK SITI FATIMAH
1	2	1	1.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	-	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		12 laporan	600,000,000	RSKD IBU DAN ANAK SITI FATIMAH
1	2	1	1.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	1,588,937,616	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		12 Laporan	2,500,000,000	RSKD IBU DAN ANAK SITI FATIMAH
1	2	1	1.10		Peningkatan Pelayanan BLUD			13,500,000,000					13,130,000,000	RSKD IBU DAN ANAK SITI FATIMAH
1	2	1	1.10	1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	13,500,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan dari BLUD		1 Unit Kerja	13,130,000,000	RSKD IBU DAN ANAK SITI FATIMAH
1	2				RSUD SAYANG RAKYAT			69,563,009,419					41,071,667,461	RSUD SAYANG RAKYAT
1	2	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Realisasi Kegiatan Perangkat Daerah, Persentase ASN Perangkat Daerah Berkinerja Kategori Minimal Baik, Persentase Penurunan Temuan Berdasarkan LHP	100%	64,740,154,946				100%	39,071,667,461	
1	2	1	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			35,243,826,199					35,239,900,232	
1	2	1	1.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	260 Orang/ Bulan	35,243,826,199	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		260 Orang/ Bulan	35,239,900,232	RSUD SAYANG RAKYAT
1	2	1	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12 Laporan	3,827,841,396				12 Laporan	3,831,767,229	
1	2	1	1.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	798,077,340	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		12 Laporan	798,093,051	RSUD SAYANG RAKYAT
1	2	1	1.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	3,029,764,056	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		12 Laporan	3,033,674,178	RSUD SAYANG RAKYAT
1	2	1	1.10		Peningkatan Pelayanan BLUD			25,668,487,351					-	
1	2	1	1.10	1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	25,668,487,351	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan dari BLUD		1 Unit Kerja	-	RSUD SAYANG RAKYAT

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2	2			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Cakupan pemenuhan sarana dan prasarana RSUD Sayang Rakyat dalam kondisi baik	85%	4,822,854,473				85%	2,000,000,000	
1	2	2	1.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi			4,822,854,473					2,000,000,000	
1	2	2	1.01	9	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Rumah Sakit	1 Unit	2,000,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik		1 Unit	2,000,000,000	RSUD SAYANG RAKYAT
1	2	2	1.01	10	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan	7 Unit	2,822,854,473	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)		7 Unit	-	RSUD SAYANG RAKYAT
										Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik				
1	3				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG			1,119,896,527,572					2,207,719,156,053	
1	3				DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG			1,119,896,527,572					2,207,719,156,053	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
1	3	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Realisasi Kegiatan Perangkat Daerah, Persentase ASN Perangkat Daerah Berkinerja Kategori Minimal Baik, Persentase Penurunan Temuan Berdasarkan LHP	100%	92,293,801,164				100%	100,832,030,986	
1	3	1	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah tepat waktu	100 %	2,647,914,600				100 %	1,509,431,490	
1	3	1	1.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	516,154,800	Kota Makassar, Panakkukang, Masale	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2 Dokumen	535,328,640	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
1	3	1	1.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	25,570,000	Kota Makassar, Panakkukang, Masale	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Dokumen	32,119,500	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
					Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Laporan	8,676,000	Kab. Gowa, Somba Upu, Bonto Bontoa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Laporan	21,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
					Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Laporan	34,048,800	Kab. Pinrang, Patampanua, Benteng	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Laporan	21,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
					Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Laporan	57,207,600	Kab. Wajo, Tanasitolo, Pajalele	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Laporan	21,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
					Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Laporan	20,000,000	Kota Palopo, Wara Barat, Tomarundung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Laporan	21,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
					Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 laporan	5,195,000	Kota Makassar, Biringkanaya, Pai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 laporan	5,250,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
					Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	4,680,000	Kota Makassar, Biringkanaya, Pai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Dokumen	5,250,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
					Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Laporan	6,256,800	Kab. Luwu Utara, Bone Bone, Bone Bone	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Laporan	21,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
					Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Laporan	22,440,100	Kab. Enrekang, Enrekang, Juppandang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Laporan	21,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Laporan	6,220,000	Kota Pare Pare, Ujung, Mallusetasi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Laporan	21,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
					Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Laporan	19,526,000	Kota Makassar, Biringkanaya, Pai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Laporan	21,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
					Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Laporan	20,000,000	Kab. Bone, Tanete Riattang Barat, Macanang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Laporan	21,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
					Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Laporan	20,283,800	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Loka	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Laporan	21,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
1	3	1	1.01	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	44,050,000	Kota Makassar, Panakkukang, Masale	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Dokumen	35,752,500	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
1	3	1	1.01	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	32,670,000	Kota Makassar, Panakkukang, Masale	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Dokumen	34,303,500	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
1	3	1	1.01	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	47,060,000	Kota Makassar, Panakkukang, Masale	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Dokumen	38,913,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
1	3	1	1.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	135,640,000	Kota Makassar, Panakkukang, Masale	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4 Laporan	110,418,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	42,643,800	Kab. Gowa, Somba Upu, Bonto Bontoa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4 Laporan	31,500,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	31,908,800	Kab. Pinrang, Patampanua, Benteng	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4 Laporan	31,500,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	49,703,200	Kab. Wajo, Tanasitolo, Pajalele	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4 Laporan	31,500,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	30,000,800	Kota Palopo, Wara Barat, Tomarundung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4 Laporan	31,500,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	835,039,200	Kota Makassar, Biringkanaya, Pai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4 Laporan	10,500,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	21,904,000	Kota Makassar, Biringkanaya, Pai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4 Laporan	10,500,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	2,610,000	Kab. Luwu Utara, Bone Bone, Bone Bone	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4 Laporan	31,500,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	101,854,800	Kab. Enrekang, Enrekang, Juppandang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4 Laporan	31,500,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	231,858,000	Kota Pare Pare, Ujung, Mallusetasi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4 Laporan	31,500,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	11,880,000	Kota Makassar, Biringkanaya, Pai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4 Laporan	31,500,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	30,000,000	Kab. Bone, Tanete Riattang Barat, Macanang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4 Laporan	31,500,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	50,645,300	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Loka	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4 Laporan	31,500,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
1	3	1	1.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	182,187,800	Kota Makassar, Panakkukang, Masale	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4 Laporan	166,096,350	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
1	3	1	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase penyusunan laporan keuangan tepat waktu	100 %	51,837,900,932				100 %	60,676,076,594	
1	3	1	1.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	560 Orang/ Bulan	50,852,177,432	Kota Makassar, Panakkukang, Masale	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		560 Orang/ Bulan	59,964,822,994	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
1	3	1	1.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	96,960,000	Kota Makassar, Panakkukang, Masale	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Dokumen	50,778,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
1	3	1	1.02	4	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1 Dokumen	9,600,000	Kota Makassar, Panakkukang, Masale	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Dokumen	5,116,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
1	3	1	1.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	62,080,000	Kota Makassar, Panakkukang, Masale	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Laporan	58,434,600	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
1	3	1	1.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	436,285,200	Kota Makassar, Panakkukang, Masale	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		12 Laporan	262,500,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	35,373,800	Kab. Gowa, Somba Upu, Bonto Bontoa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		12 Laporan	31,500,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	30,458,800	Kab. Pinrang, Patampanua, Benteng	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		12 Laporan	31,500,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	59,760,000	Kab. Wajo, Tanasitolo, Pajalele	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		12 Laporan	31,500,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	30,000,000	Kota Palopo, Wara Barat, Tomarundung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		12 Laporan	31,500,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	5,307,000	Kota Makassar, Biringkanaya, Pai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		12 Laporan	5,250,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	4,680,000	Kota Makassar, Biringkanaya, Pai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		12 Laporan	5,250,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	3,900,000	Kab. Luwu Utara, Bone Bone, Bone Bone	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		12 Laporan	31,500,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	44,900,000	Kab. Enrekang, Enrekang, Juppandang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		12 Laporan	31,500,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	43,690,000	Kota Pare Pare, Ujung, Mallusetasi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		12 Laporan	31,500,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	17,450,000	Kota Makassar, Biringkanaya, Pai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		12 Laporan	31,500,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	29,999,900	Kab. Bone, Tanete Riattang Barat, Macanang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		12 Laporan	31,500,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	65,708,800	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Loka	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		12 Laporan	31,500,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
1	3	1	1.02	8	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	4 Dokumen	9,570,000	Kota Makassar, Panakkukang, Masale	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4 Dokumen	8,925,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
1	3	1	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan pengelolaan aset	100 %	1,449,369,000				100 %	1,830,712,449	
1	3	1	1.03	1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	43,120,000	Kota Makassar, Panakkukang, Masale	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Dokumen	21,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
1	3	1	1.03	4	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	405,285,600	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Laporan	525,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
					Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	24,543,800	Kab. Gowa, Somba Upu, Bonto Bontoa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		12 Laporan	21,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
					Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	30,911,600	Kab. Pinrang, Patampanua, Benteng	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Laporan	21,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
					Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	27,391,600	Kab. Wajo, Tanasitolo, Pajalele	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Laporan	21,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
					Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	20,000,000	Kota Palopo, Wara Barat, Tomarundung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Laporan	21,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
					Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	8,571,800	Kota Makassar, Biringkanaya, Pai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Laporan	21,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
					Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	3,120,000	Kota Makassar, Biringkanaya, Pai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Laporan	21,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
					Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	143,610,000	Kab. Luwu Utara, Bone Bone, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Laporan	194,311,599	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	202,800,000	Kab. Enrekang, Enrekang, Juppandang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Laporan	125,105,400	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
					Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	147,200,000	Kota Pare Pare, Ujung, Mallusetasi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Laporan	203,036,400	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
					Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	30,880,000	Kota Makassar, Biringkanaya, Pai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Laporan	259,450,800	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
					Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	238,787,000	Kab. Bone, Tanete Riattang Barat, Macanang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		12 Laporan	250,726,350	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
					Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	63,747,600	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Loka	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Laporan	86,139,900	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
1	3	1	1.03	6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	59,400,000	Kota Makassar, Panakkukang, Masale	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Laporan	39,942,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
1	3	1	1.04		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Jumlah pendapatan daerah	8000000000 Rupiah	361,114,800				8000000000 Rupiah	393,750,000	
1	3	1	1.04	1	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah	1 Dokumen	320,123,800	Kota Makassar, Panakkukang, Masale	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Dokumen	336,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
1	3	1	1.04	7	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	12 Laporan	27,031,000	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		12 Laporan	21,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
					Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	12 Laporan	4,600,000	Kota Makassar, Biringkanaya, Pai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		12 Laporan	5,250,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
					Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	12 Laporan	9,360,000	Kota Makassar, Biringkanaya, Pai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		12 Laporan	31,500,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
1	3	1	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rata-rata nilai perilaku pegawai Perangkat Daerah berdasarkan penilaian kinerja ASN	90 Poin	1,070,375,000				90 Poin	28,087,500	
1	3	1	1.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1250 Paket	966,000,000	Kota Makassar, Panakkukang, Masale	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1250 Paket	-	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
1	3	1	1.05	3	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	84,375,000	Kota Makassar, Panakkukang, Masale	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Dokumen	28,087,500	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
1	3	1	1.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 Orang	20,000,000	Kota Makassar, Panakkukang, Masale	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		10 Orang	-	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
1	3	1	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi umum	100 %	3,610,849,057				100 %	4,468,182,419	
1	3	1	1.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	60,796,000	Kota Makassar, Panakkukang, Masale	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Paket	86,747,850	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
					Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	4,010,000	Kab. Gowa, Somba Upu, Bonto Bontoa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Paket	5,262,600	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
					Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	5,728,924	Kab. Pinrang, Patampanua, Benteng	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Paket	6,016,500	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
					Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	2,080,000	Kab. Wajo, Tanasitolo, Pajalele	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Paket	5,250,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
					Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1,992,000	Kota Palopo, Wara Barat, Tomarundung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Paket	2,100,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	8,504,000	Kota Makassar, Biringkanaya, Pai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Paket	5,250,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
					Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	7,635,000	Kota Makassar, Biringkanaya, Pai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Paket	5,250,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
					Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	6,033,200	Kab. Luwu Utara, Bone Bone, Bone Bone	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Paket	6,339,375	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
					Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	4,537,000	Kab. Enrekang, Enrekang, Juppandang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Paket	5,250,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
					Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	2,346,000	Kota Pare Pare, Ujung, Mallusetasi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Paket	2,625,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
					Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	5,864,000	Kota Makassar, Biringkanaya, Pai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Paket	5,250,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
					Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	2,205,000	Kab. Bone, Tanete Riattang Barat, Macanang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Paket	2,318,243	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
					Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	4,987,500	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Loka	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Paket	5,243,700	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
1	3	1	1.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	13 Paket	1,551,196,333	Kota Makassar, Panakkukang, Masale	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		13 Paket	2,550,529,541	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
										Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat				
1	3	1	1.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	20 Paket	113,114,000	Kota Makassar, Panakkukang, Masale	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		20 Paket	52,500,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
					Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1,522,000	Kab. Gowa, Somba Upu, Bonto Bontoa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Paket	2,100,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
					Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	2,000,000	Kab. Pinrang, Patampanua, Benteng	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Paket	2,100,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
					Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1,530,000	Kab. Wajo, Tanasitolo, Pajalele	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Paket	2,100,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
					Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	10 Paket	18,285,000	Kota Palopo, Wara Barat, Tomarundung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		10 Paket	20,111,410	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
					Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	2,367,000	Kota Makassar, Biringkanaya, Pai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Paket	2,100,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
					Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	29,916,500	Kota Makassar, Biringkanaya, Pai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Paket	2,100,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
					Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	2,118,000	Kab. Luwu Utara, Bone Bone, Bone Bone	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Paket	2,100,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
					Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1,998,000	Kab. Enrekang, Enrekang, Juppandang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Paket	2,100,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
					Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	2,340,000	Kota Pare Pare, Ujung, Mallusetasi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Paket	2,100,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1,968,000	Kota Makassar, Biringkanaya, Pai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Paket	21,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
					Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	2,000,000	Kab. Bone, Tanete Riattang Barat, Macanang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Paket	2,100,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
					Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	2,000,000	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Loka	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Paket	2,100,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
1	3	1	1.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	100 Paket	228,500,000	Kota Makassar, Panakkukang, Masale	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100 Paket	157,500,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
1	3	1	1.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	274,575,000	Kota Makassar, Panakkukang, Masale	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		12 Laporan	242,638,200	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
1	3	1	1.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	1,208,700,600	Kota Makassar, Panakkukang, Masale	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		12 Laporan	1,155,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
1	3	1	1.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	50,000,000	Kota Makassar, Panakkukang, Masale	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Dokumen	105,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
1	3	1	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	2,869,562,500				100 %	4,153,002,459	
1	3	1	1.07	2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	500,000,000	Kota Makassar, Panakkukang, Masale	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Unit	546,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
										Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat				
1	3	1	1.07	3	Pengadaan Alat Besar	Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan	1 Unit	1,313,000,000	Kota Makassar, Panakkukang, Masale	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Unit	1,501,500,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
										Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat				
1	3	1	1.07	5	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	200,000,000	Kota Makassar, Panakkukang, Masale	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Paket	184,926,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
										Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat				
1	3	1	1.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 Unit	856,562,500	Kota Makassar, Panakkukang, Masale	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3 Unit	1,920,576,459	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
										Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat				
1	3	1	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan jasa penunjang urusan	100 %	22,516,189,505				100 %	21,570,274,695	
1	3	1	1.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	4,063,221,600	Kota Makassar, Panakkukang, Masale	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		12 Laporan	3,386,082,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	60,582,000	Kab. Gowa, Somba Upu, Bonto Bontoa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		12 Laporan	89,488,980	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	10,800,000	Kab. Pinrang, Patampanua, Benteng	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		12 Laporan	15,598,800	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	16,961,400	Kab. Wajo, Tanasitolo, Pajalele	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		12 Laporan	14,268,870	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	40,915,027	Kota Palopo, Wara Barat, Tomarundung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		12 Laporan	42,960,778	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	74,665,200	Kota Makassar, Biringkanaya, Pai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		12 Laporan	71,051,400	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	142,290,468	Kota Makassar, Biringkanaya, Pai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		12 Laporan	149,404,609	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	71,757,600	Kab. Luwu Utara, Bone Bone, Bone Bone	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		12 Laporan	75,345,480	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	44,750,150	Kab. Enrekang, Enrekang, Juppandang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		12 Laporan	28,839,731	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	95,752,800	Kota Pare Pare, Ujung, Mallusetasi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		12 Laporan	73,197,600	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	37,925,400	Kota Makassar, Biringkanaya, Pai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		12 Laporan	42,987,672	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	187,387,500	Kab. Bone, Tanete Riattang Barat, Macanang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		12 Laporan	188,881,875	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	58,232,400	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Loka	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		12 Laporan	731,971,539	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
1	3	1	1.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	120,600,000	Kota Makassar, Panakkukang, Masale	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		12 Laporan	178,500,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
1	3	1	1.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	2,781,782,088	Kota Makassar, Panakkukang, Masale	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		12 Laporan	3,015,547,013	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
					Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	4,380,585,696	Kab. Gowa, Somba Upu, Bonto Bontoa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		12 Laporan	4,297,763,534	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
					Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	1,721,440,752	Kab. Pinrang, Patampanua, Benteng	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		12 Laporan	1,681,741,354	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
					Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	2,615,462,232	Kab. Wajo, Tanasitolo, Pajalele	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		12 Laporan	2,571,952,068	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
					Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	1,387,642,848	Kota Palopo, Wara Barat, Tomarundung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		12 Laporan	1,349,220,902	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
					Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	391,080,504	Kota Makassar, Biringkanaya, Pai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		12 Laporan	380,090,038	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
					Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	420,801,168	Kota Makassar, Biringkanaya, Pai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		12 Laporan	409,500,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
					Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	1,105,896,944	Kab. Luwu Utara, Bone Bone, Bone Bone	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		12 Laporan	776,530,188	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
					Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	517,058,736	Kab. Enrekang, Enrekang, Juppandang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		12 Laporan	499,790,038	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
					Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	344,689,992	Kota Pare Pare, Ujung, Mallusetasi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		12 Laporan	331,380,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	577,112,928	Kota Makassar, Biringkanaya, Pai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		12 Laporan	55,660,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
					Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	351,528,000	Kab. Bone, Tanete Riattang Barat, Macanang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		12 Laporan	343,950,113	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
					Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	895,266,072	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Loka	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		12 Laporan	768,570,113	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
1	3	1	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah dalam kondisi baik	100 %	5,930,525,770				100 %	6,202,513,380	
1	3	1	1.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	109 Unit	3,970,180,000	Kota Makassar, Panakkukang, Masale	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		109 Unit	4,023,763,380	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 Unit	62,845,770	Kota Makassar, Biringkanaya, Pai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5 Unit	84,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
1	3	1	1.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	15 Unit	1,148,000,000	Kota Makassar, Biringkanaya, Pai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		15 Unit	1,197,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
					Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 Paket	55,000,000	Kota Makassar, Biringkanaya, Pai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Paket	57,750,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
1	3	1	1.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Lokasi	694,500,000	Kota Makassar, Panakkukang, Masale	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3 Lokasi	840,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
										Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat				
1	3	2			PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase Jaringan Irigasi Primer dan Sekunder kondisi baik pada DI Kewenangan Provinsi	80 %	108,292,174,400				80 %	113,773,901,764	
						Cakupan pengelolaan sungai, danau, waduk, dan pantai	100%					100%		
1	3	2	1.01		Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah lokasi Sungai/Danau/Waduk/ Embung yang ditangani	4 Lokasi	8,024,715,800				4 Lokasi	8,582,801,764	
						Persentase ketersediaan perencanaan dan pengawasan teknis Sumber Daya Air	100 %					100 %		
1	3	2	1.01	1	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya	Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Danau dan Bangunan Penampung Air Lainnya yang Disusun	8 Dokumen	2,122,000,000	Kab. Jeneponto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8 Dokumen	2,222,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
									Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					
1	3	2	1.01	6	Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya	Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dibangun	4 Unit	2,117,617,800	Kab. Jeneponto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4 Unit	2,310,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
									Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					
1	3	2	1.01	9	Pembangunan Tanggul Sungai	Panjang Tanggul Sungai yang Dibangun	300 M	767,124,000	Kab. Jeneponto, Bangkala, Pallengu	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		300 M	853,236,764	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
1	3	2	1.01	21	Rehabilitasi Embung dan Penampungan Air Lainnya	Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Direhabilitasi	1 Unit	2,059,963,200	Kab. Pinrang, Patampanua, Malimpung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Unit	2,152,500,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	3	2	1.01	60	Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas Air WS Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Pengelolaan Sistem Hidrologi dan Kualitas Air WS Kewenangan Provinsi	1 Dokumen	317,127,600	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	315,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
1	3	2	1.01	61	Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Provinsi	Jumlah Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Provinsi yang Dibina dan Diberdayakan	40 Lembaga	346,929,600	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		40 Lembaga	355,015,500	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
1	3	2	1.01	63	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Provinsi	Jumlah Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Provinsi yang Ditingkatkan Kapasitasnya	2 Lembaga	293,953,600	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 Lembaga	375,049,500	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
1	3	2	1.02		Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Panjang Jaringan Irigasi Primer dan Sekunder kondisi baik pada DI Kewenangan Provinsi	360.982 m	100,267,458,600				360.982 m	105,191,100,000	
						Jumlah bendung irigasi yang beroperasi dan dipelihara	12 unit					12 unit		
						Panjang jaringan irigasi permukaan uang dioperasikan dan dipelihara	169003 meter					169003 meter		
						Jumlah bendung irigasi yang beroperasi dan dipelihara	8 unit					8 unit		
						Panjang jaringan irigasi permukaan uang dioperasikan dan dipelihara	86121 meter					86121 meter		
						Jumlah bendung irigasi yang beroperasi dan dipelihara	12 unit					12 unit		
						Panjang jaringan irigasi permukaan uang dioperasikan dan dipelihara	129372 meter					129372 meter		
						Jumlah bendung irigasi yang beroperasi dan dipelihara	12 unit							
						Panjang jaringan irigasi permukaan uang dioperasikan dan dipelihara	67465 meter							
1	3	2	1.02	1	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang Tersusun	18 Dokumen	10,299,308,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		18 Dokumen	10,995,600,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
1	3	2	1.02	2	Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dibangun	11000 Meter	15,074,337,600	Kab. Bone, Lappariaja, Ujung Lamuru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		11000 Meter	15,802,500,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
1	3	2	1.02	8	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan	2083 Meter	2,568,260,400	Kab. Bulukumba, Gantorang, Bonto Nyeleng	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2083 Meter	2,677,500,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
1	3	2	1.02	14	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi	39924 Meter	52,361,644,000	Kab. Bone, Tellu Siattinge, Lanca	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		39924 Meter	55,062,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
									Kab. Bone, Bengo, Selli	DAK Fisik-Bidang Irigasi-Penugasan				
									Kab. Enrekang, Curio, Curio					
									Kab. Gowa, Bontomarannu, Borongloe					
									Kab. Luwu, Suli, Murante					
									Kab. Luwu, Walenrang Utara, Basso					
									Kab. Luwu, Bajo Barat, Sampeang					
									Kab. Luwu Utara, Masamba, Bone					
									Kab. Pangkajene Kepulauan, Marang, Punranga					
									Kab. Pangkajene Kepulauan, Minasa Tene, Semua Kelurahan					
									Kab. Sinjai, Sinjai Selatan, Sangianseri					

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
									Kab. Sinjai, Sinjai Borong, Batu Belerang					
									Kab. Luwu Timur, Angkona, Mantadulu					
1	3	2	1.02	15	Rehabilitasi Bendung Irigasi	Jumlah Bendung Irigasi yang Direhabilitasi	1 Bendung	15,077,012,200	Kab. Bone, Mare, Batu Gading	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Bendung	15,802,500,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
1	3	2	1.02	21	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Jumlah Daerah Irigasi yang melaksanakan Operasi dan Pemeliharaan	40 Lokasi	32,931,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		40 Lokasi	-	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
					Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara	80 KM	1,052,114,800	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		80 KM	1,050,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
									Kab. Bulukumba, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					
									Kab. Gowa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					
									Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					
									Kab. Pangkajene Kepulauan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					
									Kab. Sinjai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					
									Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					
					Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara	80 Km	1,005,584,400	Kab. Enrekang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		80 Km	1,050,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
									Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					
									Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					
									Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					
					Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara	80 Km	1,158,400,800	Kab. Bone, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		80 Km	1,050,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
									Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					
									Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					
					Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara	80 Km	999,999,800	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		80 Km	1,050,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
									Kab. Luwu Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					
									Kota Palopo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					
									Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					
1	3	2	1.02	22	Operasi dan Pemeliharaan Bendung Irigasi	Jumlah Bendung Irigasi yang Beroperasi dan Dipelihara	23 Bendung	82,313,800	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		23 Bendung	241,500,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
									Kab. Bulukumba, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					
									Kab. Gowa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					
									Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
									Kab. Pangkajene Kepulauan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					
									Kab. Sinjai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					
									Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					
					Operasi dan Pemeliharaan Bendung Irigasi	Jumlah Bendung Irigasi yang Beroperasi dan Dipelihara	8 Bendung	80,172,400	Kab. Enrekang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8 Bendung	84,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
									Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					
									Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					
									Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					
					Operasi dan Pemeliharaan Bendung Irigasi	Jumlah Bendung Irigasi yang Beroperasi dan Dipelihara	17 Bendung	169,652,200	Kab. Bone, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		17 Bendung	178,500,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
									Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					
									Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					
					Operasi dan Pemeliharaan Bendung Irigasi	Jumlah Bendung Irigasi yang Beroperasi dan Dipelihara	9 Bendung	90,000,000	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		9 Bendung	94,500,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
									Kab. Luwu Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					
									Kota Palopo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					
									Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					
1	3	2	1.02	28	Pengelolaan dan Pengawasan Alokasi Air Irigasi	Jumlah Daerah Irigasi yang Mengelola Pengukuran Data Realisasi Alokasi Air	40 Lokasi	43,791,200	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		40 Lokasi	52,500,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
					Pengelolaan dan Pengawasan Alokasi Air Irigasi	Jumlah Daerah Irigasi yang Mengelola Pengukuran Data Realisasi Alokasi Air	13 DI	42,984,000	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		13 DI	-	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
									Kab. Bulukumba, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					
									Kab. Gowa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					
									Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					
									Kab. Pangkajene Kepulauan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					
									Kab. Sinjai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					
									Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					
					Pengelolaan dan Pengawasan Alokasi Air Irigasi	Jumlah Daerah Irigasi yang Mengelola Pengukuran Data Realisasi Alokasi Air	7 DI	42,984,000	Kab. Enrekang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7 DI	-	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
									Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					
									Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					
									Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					Pengelolaan dan Pengawasan Alokasi Air Irigasi	Jumlah Daerah Irigasi yang Mengelola Pengukuran Data Realisasi Alokasi Air	12 DI	42,984,000	Kab. Bone, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 DI	-	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
									Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					
									Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					
					Pengelolaan dan Pengawasan Alokasi Air Irigasi	Jumlah Daerah Irigasi yang Mengelola Pengukuran Data Realisasi Alokasi Air	6 DI	42,984,000	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6 DI	-	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
									Kab. Luwu Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					
									Kota Palopo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					
									Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					
1	3	3			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase warga negara memperoleh kebutuhan air minum curah lintas kabupaten/kota	100 %	52,040,782,200				100 %	55,322,930,000	
						Cakupan Pembinaan Layanan Air Minum Kab/Kota	100 %					100 %		
1	3	3	1.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah kab/kota yang dibina	24 Kab./Kota	52,040,782,200				24 Kab./Kota	55,322,930,000	
						Persentase kapasitas yang dapat terlayani melalui penyaluran air minum curah lintas kab/kota terhadap kebutuhan pemenuhan kapasitas yang memerlukan pelayanan air minum curah lintas kab/kota (SPM)	100 %					100 %		
1	3	3	1.01	2	Supervisi Pembangunan/Peningkatan/Perluasan/Perbaikan SPAM	Jumlah Konsultasi Supervisi Pembangunan/Peningkatan/Perluasan/Optimalisasi SPAM Regional	1 Dokumen	1,869,183,600	Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Dokumen	2,640,750,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
1	3	3	1.01	3	Pembangunan Baru SPAM Jaringan Perpipaan	Kapasitas Pembangunan SPAM Regional	1100 Liter/Detik	50,049,999,800	Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1100 Liter/Detik	52,552,500,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
1	3	3	1.01	7	Fasilitasi Kerja Sama Pengelolaan SPAM Regional Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Kabupaten/Kota yang mendapatkan fasilitasi kerjasama penyelenggaraan SPAM	4 Kab/Kota	30,000,000	Kota Makassar, Panakkukang, Masale	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4 Kab/Kota	31,500,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
1	3	3	1.01	8	Pembinaan Teknis SDM dan Kelembagaan Pengelolaan SPAM Provinsi	Jumlah Kabupaten/Kota yang mendapatkan pembinaan kelembagaan pengelolaan SPAM	24 Kab./Kota	91,598,800	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		24 Kab./Kota	98,180,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
1	3	4			PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Cakupan Pembinaan Layanan TPA (Kab/Kota)	100 %	49,999,000				100 %	31,500,000	
1	3	4	1.01		Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	Jumlah Kab/Kota yang dibina	24 Kab./Kota	49,999,000				24 Kab./Kota	31,500,000	
1	3	4	1.01	8	Pembinaan Teknis dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Infrastruktur Persampahan	Jumlah kelompok yang mendapatkan pembinaan pengelolaan persampahan	24 Kab/Kota	49,999,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		24 Kab/Kota	31,500,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
1	3	5			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase warga negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik regional lintas kabupaten/kota	100%	49,999,000				100 %	52,500,000	
						Cakupan Pembinaan Layanan Air Limbah Domestik Kab/Kota	100 %					100 %		
1	3	5	1.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional	Jumlah kab/kota yang dibina	24 Kab./Kota	49,999,000				24 Kab./Kota	52,500,000	
1	3	5	1.01	7	Pengembangan SDM dan Kelembagaan Pengelolaan Air Limbah Domestik	Jumlah Kabupaten/Kota mendapatkan pengembangan SDM dan kelembagaan pengelolaan Air Limbah Domestik	24 Kab/Kota	49,999,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		24 Kab/Kota	52,500,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
1	3	6			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Cakupan layanan drainase kewenangan provinsi	16.00%	30,000,000				16 %	30,000,000	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	3	6	1.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan Kawasan Strategis Provinsi	Jumlah lokasi sistem drainase yang dikelola dan dikembangkan	4 Kab./Kota	30,000,000				4 Kab./Kota	30,000,000	
1	3	6	1.01	1	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	1 Dokumen	30,000,000	Kota Makassar, Panakkukang, Masale	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Dokumen	30,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
1	3	8			PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase Bangunan Pamerintah Yang di Fasilitasi	100%	41,954,730,800				100 %	44,780,275,000	
1	3	8	1.01		Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	Jumlah lokasi bangunan gedung yang difasilitasi	8 Lokasi	41,954,730,800				8 Lokasi	44,780,275,000	
						Persentase ketersediaan layanan teknis bangunan gedung	100 %					100 %		
1	3	8	1.01	1	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	Jumlah Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	10 Lokasi	41,837,580,800	Kab. Bone, Ponre, Mappe Sangka	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		10 Lokasi	44,672,775,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
									Kota Makassar, Mariso, Mattoangin					
									Kota Makassar, Mariso, Panambungan					
									Kota Makassar, Panakkukang, Panaikang					
									Kota Makassar, Panakkukang, Tamamaung					
									Kota Makassar, Biringkanaya, Pai					
1	3	8	1.01	6	Bantuan Teknis bagi Masyarakat Pemilik Bangunan Gedung Cagar Budaya yang Ditetapkan Tingkat Provinsi	Jumlah Konsultasi Bantuan Teknis bagi Masyarakat Pemilik Bangunan Gedung Cagar Budaya yang Ditetapkan Tingkat Provinsi	1 Dokumen	58,894,000	Kota Makassar, Panakkukang, Masale	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Dokumen	52,500,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
1	3	8	1.01	10	Pelaksanaan Pengelolaan Rumah Negara	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Rumah Negara	1 Dokumen	58,256,000	Kota Makassar, Panakkukang, Masale	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Dokumen	55,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
1	3	9			PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Jumlah kawasan strategis dan pusat pertumbuhan baru yang dilakukan penataan bangunan dan lingkungannya	15 Kawasan	74,340,496,920				15 Kawasan	88,265,650,000	
1	3	9	1.01		Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah lokasi penataan kawasan dan lingkungan	100 %	74,340,496,920				100 %	88,265,650,000	
1	3	9	1.01	1	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota yang Disusun	2 Dokumen	853,373,400	Kota Makassar, Panakkukang, Masale	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2 Dokumen	630,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
1	3	9	1.01	2	Supervisi Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	Jumlah Supervisi Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Cagar Budaya dan Tradisional Bersejarah, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	20 Laporan	5,717,654,320	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		20 Laporan	7,295,400,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
1	3	9	1.01	3	Penataan Bangunan dan Lingkungan	Jumlah Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Cagar Budaya dan Tradisional Bersejarah, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	7 Lokasi	67,050,006,000	Kab. Maros, Simbang, Jenetaesa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7 Lokasi	79,742,250,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
									Kota Makassar, Mariso, Panambungan					
									Kota Makassar, Tallo, Lembo					
									Kota Makassar, Panakkukang, Panaikang					

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
									Kota Makassar, Biringkanaya, Sudiang					
1	3	9	1.01	7	Monitoring Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	Jumlah Dokumen Monitoring Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	19 Dokumen	394,999,200	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		19 Dokumen	598,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
						Terlaksananya Monitoring Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan pada UPT Laboratorium dan Pengujian	1 Dokumen	324,464,000				1 Dokumen		
1	3	10			PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase jalan provinsi dalam kondisi mantap	75.09%	746,629,356,488				75.09%	1,801,950,815,553	
						Persentase panjang terisolir pada ruas jalan provinsi yang terakses roda empat)	74.25%					74.25%		
1	3	10	1.01		Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Panjang penanganan ruas jalan	112.5 Km	746,629,356,488				112.5 Km	1,801,950,815,553	
						Persentase ketersediaan perencanaan dan pengawasan teknis jalan dan jembatan	100 %					100 %		
						Jumlah paket/pekerjaan yang dilakukan pengujian	100 %					100 %		
1	3	10	1.01	1	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Advis dan Layanan Teknis, Kajian Kebijakan, Bantuan Teknis, Bimbingan Teknis, Pengelolaan Pengendalian	1 Dokumen	194,912,200	Kota Makassar, Panakkukang, Masale	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	105,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
1	3	10	1.01	3	Pengelolaan Leger Jalan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Leger Jalan	1 Dokumen	40,224,400	Kota Makassar, Panakkukang, Masale	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	42,253,260	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
1	3	10	1.01	4	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Jumlah Data dan Informasi Terkait Kondisi Jalan/Jembatan	2 Dokumen	1,849,330,400	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 Dokumen	1,942,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
					Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Jumlah Data dan Informasi Terkait Kondisi Jalan/Jembatan Wilayah I	1 Dokumen	42,984,000	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Dokumen	-	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
									Kab. Luwu Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					
									Kota Palopo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					
									Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					
					Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Jumlah Data dan Informasi Terkait Kondisi Jalan/Jembatan	0 Dokumen	42,984,000	Kab. Enrekang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			0 Dokumen	-	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
									Kab. Tana Toraja, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					
									Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					
					Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Jumlah Data dan Informasi Terkait Kondisi Jalan/Jembatan Wilayah III	1 Dokumen	42,984,000	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Dokumen	-	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
									Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					
									Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					
									Kota Pare Pare, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					
					Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Jumlah Data dan Informasi Terkait Kondisi Jalan/Jembatan Wilayah IV	1 Dokumen	42,984,000	Kab. Gowa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Dokumen	-	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
									Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
									Kab. Pangkajene Kepulauan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					
									Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					
									Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					
					Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Jumlah Data dan Informasi Terkait Kondisi Jalan/Jembatan Wilayah V	1 Dokumen	42,984,000	Kab. Bone, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Dokumen	-	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
									Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					
									Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					
					Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Jumlah Data dan Informasi Terkait Kondisi Jalan/Jembatan Wilayah VI	1 Dokumen	42,984,000	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			1 Dokumen	-	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
									Kab. Bulukumba, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					
									Kab. Jeneponto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					
									Kab. Kepulauan Selayar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					
									Kab. Sinjai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					
1	3	10	1.01	5	Pembangunan Jalan	Panjang Jalan yang Dibangun	33.6 Km	128,248,539,200	Kab. Luwu, Basse Sangtempe, Mappetajang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		33.6 Km	152,512,500,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
									Kab. Pinrang, Lembang, Betteng					
									Kab. Kepulauan Selayar, Bontosikuyu, Patilereng					
									Kab. Soppeng, Lalabata, Ompo					
									Kab. Tana Toraja, Malimbong Balepe, Leppan					
									Kota Makassar, Mariso, Panambungan					
1	3	10	1.01	8	Rekonstruksi Jalan	Panjang jalan yang direkonstruksi/ditingkatkan	56.8 KM	409,567,324,600	Kab. Barru, Tanete Riaja, Harapan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		56.8 KM	367,605,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
									Kab. Bone, Kajuara, Gona	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik				
									Kab. Bone, Libureng, Tanah Batue					
									Kab. Bone, Libureng, Matirro Bulu					
									Kab. Gowa, Somba Upu, Paccinongang					
									Kab. Gowa, Bungaya, Mangempang					
									Kab. Gowa, Pattalasang, Pattallasang					
									Kab. Jeneponto, Kelara, Tolo Utara					
									Kab. Luwu, Walenrang Barat, Ilan Batu					
									Kab. Pangkajene Kepulauan, Bungoro, Mangilu					
									Kab. Sidenreng Rappang, Tellu Limpoe, Baula					

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
									Kab. Sidenreng Rappang, Kulo, Mario					
									Kab. Sidenreng Rappang, Pitu Riawa, Anabannae					
									Kab. Sinjai, Sinjai Borong, Bonto Katute					
									Kab. Soppeng, Marioriwawo, Marioriaja					
									Kab. Soppeng, Liliraja, Galung					
									Kab. Soppeng, Liliraja, Jampu					
									Kab. Soppeng, Lilirilau, Baringeng					
									Kab. Soppeng, Lilirilau, Masing					
									Kab. Soppeng, Lalabata, Ompo					
									Kab. Wajo, Belawa, Wele					
									Kab. Wajo, Maniangpajo, Dualimpoe					
									Kab. Wajo, Bola, Ujungtanah					
									Kab. Wajo, Penrang, Walanga					
									Kota Makassar, Panakkukang, Panaikang					
									Kota Makassar, Manggala, Antang					
									Kab. Luwu Timur, Wasuponda, Parumpanai					
1	3	10	1.01	9	Rehabilitasi Jalan	Panjang Jalan yang Direhabilitasi	120 KM	97,456,908,000	Kab. Sinjai, Sinjai Barat, Boto Lempangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		120 KM	102,701,859,290	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
									Kab. Tana Toraja, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				
									Kota Makassar, Mariso, Mario	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat				
									Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					
1	3	10	1.01	11	Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin	148 KM	3,703,600,000	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		148 KM	4,095,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
									Kab. Luwu Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					
									Kota Palopo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					
									Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					
					Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin	190 KM	5,104,889,000	Kab. Enrekang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		190 KM	5,309,062,500	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
									Kab. Tana Toraja, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					
									Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					
					Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin	125 KM	3,332,018,000	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		125 KM	3,530,100,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
									Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					
									Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					
									Kota Pare Pare, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin	153 KM	4,130,901,168	Kab. Gowa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		153 KM	4,246,860,626	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
									Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					
									Kab. Pangkajene Kepulauan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					
									Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					
									Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					
					Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin	216 KM	5,599,999,900	Kab. Bone, Tanete Riattang Barat, Macanang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		216 KM	5,880,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
									Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					
									Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					
					Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin	106 KM	2,864,920,950	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		106 KM	3,008,691,578	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
									Kab. Bulukumba, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					
									Kab. Jeneponto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					
									Kab. Kepulauan Selayar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					
									Kab. Sinjai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					
1	3	10	1.01	12	Pembangunan Jembatan	Panjang Jembatan yang Dibangun	50 meter	50,454,399,200	Kab. Luwu Utara, Sabbang, Sabbang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		50 meter	53,907,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
									Kab. Kepulauan Selayar, Bontosikuyu, Patilereng					
									Kab. Soppeng, Lalabata, Ompo					
									Kab. Wajo, Sabangparu, Tolotenreng					
									Kota Makassar, Mariso, Panambungan					
1	3	10	1.01	18	Rehabilitasi Jembatan	Panjang Jembatan yang Dilakukan Rehabilitasi	50 Meter	1,016,420,000	Kota Makassar, Mariso, Panambungan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		50 Meter	1,065,750,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
1	3	10	1.01	19	Pemeliharaan Rutin Jembatan	Panjang Jembatan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin pada wilayah UPT I	172 Meter	403,600,000	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		172 Meter	420,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
									Kab. Luwu Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					
									Kota Palopo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					
									Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					
					Pemeliharaan Rutin Jembatan	Panjang Jembatan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin pada wilayah UPT II	127 Meter	400,000,000	Kab. Enrekang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		127 Meter	420,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
									Kab. Tana Toraja, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					
									Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					Pemeliharaan Rutin Jembatan	Panjang Jembatan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin pada wilayah UPT III	186 Meter	330,000,000	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		186 Meter	346,500,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
									Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					
									Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					
									Kota Pare Pare, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					
					Pemeliharaan Rutin Jembatan	Panjang Jembatan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin pada wilayah UPT IV	379 Meter	298,230,070	Kab. Gowa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			379 Meter	313,141,574	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
									Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					
									Kab. Pangkajene Kepulauan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					
									Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					
									Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					
					Pemeliharaan Rutin Jembatan	Panjang Jembatan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin	429 Meter	400,000,000	Kab. Bone, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		429 Meter	420,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
									Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					
									Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					
					Pemeliharaan Rutin Jembatan	Panjang Jembatan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin pada wilayah UPT VI	168 Meter	166,044,500	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		168 Meter	174,346,725	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
									Kab. Bulukumba, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					
									Kab. Jeneponto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					
									Kab. Kepulauan Selayar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					
									Kab. Sinjai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					
1	3	10	1.01	21	Penanggulangan Bencana/Tanggap Darurat	Persentase ketersediaan material tanggap darurat	100 %	694,850,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		100 %	472,500,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
1	3	10	1.01	22	Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	30 Dokumen	629,387,400	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		30 Dokumen	-	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
						Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan pada UPT Laboratorium dan Pengujian	1 Dokumen	551,925,100				1 Dokumen	525,000,000	
1	3	10	1.01	23	Pengawasan Teknis Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	Jumlah Dokumen Teknis Pengawasan Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	30 Dokumen	28,933,028,400	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		30 Dokumen	28,224,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
1	3	11			PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Rasio tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah provinsi yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan ahli	0.7	1,261,325,000				0.7	1,050,000,000	
1	3	11	1.01		Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi	Jumlah pelatihan tenaga ahli konstruksi di wilayah Provinsi	300 Orang	600,450,000				300 Orang	315,000,000	
1	3	11	1.01	3	Penyiapan SOP Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi	Jumlah Dokumen SOP Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Konstruksi Kualifikasi Jabatan Ahli	1 Dokumen	136,140,000	Kota Makassar, Panakkukang, Masale	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Dokumen	-	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	3	11	1.01	4	Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Ahli yang Mengikuti Pelatihan	200 Orang	464,310,000	Kota Makassar, Panakkukang, Masale	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		200 Orang	315,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
1	3	11	1.02		Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAKI) Cakupan Daerah Provinsi	Cakupan terselenggaranya Sistem Informasi Jasa Konstruksi provinsi yang aktif dengan data termutakhir	100 %	116,100,000				100 %	-	
1	3	11	1.02	3	Penyelenggaraan Pelatihan untuk Peningkatan Kapasitas Administrator SIPJAKI	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan SIPJAKI	80 Orang	116,100,000	Kota Makassar, Panakkukang, Masale	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		80 Orang	-	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
1	3	11	1.03		Kebijakan Khusus Terhadap Penyelenggaraan Jasa Konstruksi	Persentase penyedia jasa konstruksi berkinerja baik	100 %	544,775,000				100 %	735,000,000	
1	3	11	1.03	2	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Pengelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi pada APBD Provinsi	Jumlah Laporan Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi pada APBD Provinsi	4 Laporan	544,775,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4 Laporan	735,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
1	3	12			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Rasio ketaatan pemanfaatan ruang	1	2,953,862,600				1	1,629,552,750	
1	3	12	1.01		Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Rinci Tata Ruang Provinsi	Jumlah Dokumen RTRW/RTR yang disusun/ ditetapkan	3 Dokumen	1,371,815,000				3 Dokumen	525,000,000	
						Jumlah Dokumen Tata Ruang yang disusun / ditetapkan	3 Dokumen					3 Dokumen		
						Jumlah Dokumen Tata Ruang ynag disusun / ditetapkan	3 Dokumen					3 Dokumen		
1	3	12	1.01	3	Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Pergub selain RTRW Provinsi	7 Dokumen	901,200,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7 Dokumen	-	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
1	3	12	1.01	4	Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Penataan Ruang	4 Dokumen	470,615,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4 Dokumen	525,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
1	3	12	1.02		Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang	Persentase layanan perencanaan tata ruang	100 %	329,993,000				100 %	346,500,000	
1	3	12	1.02	3	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RTRW dan RRTR Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RTRW dan RRTR Kabupaten/Kota	10 Dokumen	329,993,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		10 Dokumen	346,500,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
1	3	12	1.03		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfataan Ruang Daerah Provinsi	Persentase layanan informasi pemanfatan ruang untuk investasi dan pembangunan daerah	100 %	453,918,800				100 %	329,600,250	
1	3	12	1.03	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	4 Dokumen	174,582,800	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4 Dokumen	142,852,500	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
1	3	12	1.03	2	Sistem Informasi Penataan Ruang	Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan dari Sistem Informasi Penataan Ruang	2 Dokumen	279,336,000	Kota Makassar, Panakkukang, Masale	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2 Dokumen	186,747,750	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
1	3	12	1.04		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfataan Ruang Daerah Provinsi	Persentase wilayah yang dikendalikan pemanfaatan ruangnya	100 %	798,135,800				100 %	428,452,500	
1	3	12	1.04	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang	2 Dokumen	384,087,800	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2 Dokumen	196,402,500	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
1	3	12	1.04	3	Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang	Jumlah Kasus yang Ditangani Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang	5 Kasus	216,148,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5 Kasus	127,050,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
1	3	12	1.04	4	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	4 Dokumen	197,900,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4 Dokumen	105,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
1	4				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN			40,266,052,480					52,910,099,996	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	4				DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN			40,266,052,480					52,910,099,996	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
1	4	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase ASN Perangkat daerah berkinerja Kategori Baik dan Sangat Baik	100 %	15,280,053,592				100 %	25,834,907,189	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
						Persentase Penurunan Temuan berdasarkan LHP	100 %					100 %		DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
						Persentase Realisasi Kegiatan Perangkat Daerah	100 %					100 %		DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
1	4	1	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah tepat waktu	100 %	713,120,400				100 %	2,616,858,649	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
1	4	1	1.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	428,073,400	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Pegawai Lingkup Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Prov.SulSel	2 Dokumen	1,993,268,063	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
1	4	1	1.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	64,289,000	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Pegawai Lingkup Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Prov.SulSel	1 Dokumen	163,251,913	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
1	4	1	1.01	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	35,638,000	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Pegawai Lingkup Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Prov.SulSel	1 Dokumen	100,912,875	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
1	4	1	1.01	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	5,146,000	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Pegawai Lingkup Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Prov.SulSel	1 Dokumen	19,260,150	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
1	4	1	1.01	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	7,029,000	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Pegawai Lingkup Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Prov.SulSel	1 Dokumen	15,480,150	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
1	4	1	1.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	73,850,000	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Pegawai Lingkup Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Prov.SulSel	1 Laporan	141,317,648	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	4	1	1.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	99,095,000	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Pegawai Lingkup Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Prov.SulSel	1 Laporan	183,367,850	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
1	4	1	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase penyusunan laporan keuangan tepat waktu	100 %	12,249,915,560				100 %	19,341,491,748	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
1	4	1	1.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	119 Orang/ Bulan	11,860,280,460	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Pegawai Lingkup Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Prov.SulSel	119 Orang/ Bulan	19,015,660,410	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
										Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
1	4	1	1.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	12,668,000	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Pegawai Lingkup Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Prov.SulSel	1 Dokumen	2,808,750	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
1	4	1	1.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	50,794,800	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Pegawai Lingkup Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Prov.SulSel	1 Dokumen	83,554,825	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
1	4	1	1.02	4	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1 Dokumen	22,334,800	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Pegawai Lingkup Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Prov.SulSel	1 Dokumen	3,480,750	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
1	4	1	1.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	13,169,800	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Pegawai Lingkup Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Prov.SulSel	1 Laporan	105,631,050	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
1	4	1	1.02	6	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	238,668,900	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Pegawai Lingkup Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Prov.SulSel	1 Dokumen	42,698,788	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
1	4	1	1.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	3 Laporan	11,712,500	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Pegawai Lingkup Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Prov.SulSel	3 Laporan	5,068,350	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	4	1	1.02	8	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	40,286,300	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Pegawai Lingkup Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Prov.SulSel	1 Dokumen	82,588,825	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
1	4	1	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	4 Laporan	108,400,800				4 Laporan	291,936,263	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
1	4	1	1.03	1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	35,045,800	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Pegawai Lingkup Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Prov.SulSel	1 Dokumen	191,671,738	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
1	4	1	1.03	2	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	11,495,000	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Pegawai Lingkup Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Prov.SulSel	1 Dokumen	15,502,200	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
1	4	1	1.03	6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	61,860,000	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Pegawai Lingkup Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Prov.SulSel	2 Laporan	84,762,325	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
1	4	1	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi kepegawaian perangkat daerah	1 Laporan	368,870,000				1 Laporan	588,888,401	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
1	4	1	1.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	119 Paket	81,910,000	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Pegawai Lingkup Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Prov.SulSel	119 Paket	208,015,500	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
1	4	1	1.05	3	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	142,495,000	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Pegawai Lingkup Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Prov.SulSel	1 Dokumen	172,497,713	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
1	4	1	1.05	5	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	84,525,000	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Pegawai Lingkup Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Prov.SulSel	1 Dokumen	123,465,863	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
1	4	1	1.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	20 Orang	59,940,000	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Pegawai Lingkup Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Prov.SulSel	20 Orang	84,909,325	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
1	4	1	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi umum perangkat daerah	1 Laporan	267,991,500				1 Laporan	945,435,488	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	4	1	1.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	35,000,000	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Pegawai Lingkup Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Prov.SulSel	1 Paket	9,348,938	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
1	4	1	1.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	107,910,500	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Pegawai Lingkup Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Prov.SulSel	1 Paket	771,871,275	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
1	4	1	1.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	25,028,500	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Pegawai Lingkup Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Prov.SulSel	1 Paket	53,944,275	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
1	4	1	1.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	100,052,500	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Pegawai Lingkup Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Prov.SulSel	1 Laporan	110,271,000	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
1	4	1	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah laporan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	1 Laporan	50,000,000				1 Laporan	52,762,500	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
1	4	1	1.07	5	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	50,000,000	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Pegawai Lingkup Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Prov.SulSel	1 Paket	52,762,500	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
1	4	1	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	1 Laporan	475,083,532				1 Laporan	433,439,826	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
1	4	1	1.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	475,083,532	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Pegawai Lingkup Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Prov.SulSel	1 Laporan	433,439,826	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
1	4	1	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	1 Laporan	1,046,671,800				1 Laporan	1,564,094,314	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
1	4	1	1.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	10 Unit	624,048,000	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Pegawai Lingkup Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Prov.SulSel	10 Unit	156,796,500	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
1	4	1	1.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6 Unit	142,800,000	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Pegawai Lingkup Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Prov.SulSel	6 Unit	211,869,000	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	4	1	1.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	279,823,800	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Pegawai Lingkup Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Prov.SulSel	1 Unit	1,195,428,814	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
1	4	2			PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah provinsi yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni kewenagan provinsi (SPM)	100 %	6,472,408,088				100 %	4,922,220,971	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
						Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni kewenagan provinsi (SPM)	100 %					100 %		DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
1	4	2	1.01		Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Jumlah dokumen hasil pendataan rumah korban bencana atau relokasi program provinsi yang akan dibangun dan direhabilitasi	5 Dokumen	1,046,481,900				5 Dokumen	1,144,584,613	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
1	4	2	1.01	1	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Provinsi	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana dan Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Provinsi	1 Dokumen	594,866,000	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Masyarakat, Stakeholder dan Aparat Pemerintah	1 Dokumen	237,051,163	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
1	4	2	1.01	3	Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	Jumlah Dokumen Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertanganini	1 Dokumen	91,752,500	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Masyarakat, Stakeholder dan Aparat Pemerintah	1 Dokumen	107,470,150	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
1	4	2	1.01	4	Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana	Jumlah Dokumen Data Rumah yang Terkena Bencana Berdasarkan Tingkat Kerusakan Rumah	1 Dokumen	116,375,000	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Masyarakat, Stakeholder dan Aparat Pemerintah	1 Dokumen	109,600,075	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
1	4	2	1.01	5	Pendataan dan Verifikasi Penerima Rumah bagi Korban Bencana Alam atau Terkena Relokasi Program Provinsi	Jumlah Dokumen Data Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota atau yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota yang Terverifikasi	1 Dokumen	126,287,400	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Masyarakat, Stakeholder dan Aparat Pemerintah	1 Dokumen	103,730,575	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
1	4	2	1.01	6	Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus	Jumlah Dokumen Data Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun, dan Rumah Khusus	1 Dokumen	117,201,000	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Masyarakat, Stakeholder dan Aparat Pemerintah	1 Dokumen	586,732,650	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
1	4	2	1.02		Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Jumlah aparat yang memahami sosialisasi program penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program provinsi	195 Orang	234,079,800				195 Orang	621,839,820	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
1	4	2	1.02	1	Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana	Jumlah Orang/Sukarelawan yang Mengikuti Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota	50 Orang	71,827,000	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Masyarakat, Stakeholder dan Aparat Pemerintah	50 Orang	271,916,400	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
1	4	2	1.02	2	Sosialisasi tentang Mekanisme Penggantian Hak Atas Tanah dan Bangunan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Tentang Mekanisme Penggantian Hak atas Tanah dan Bangunan	50 Orang	50,000,000	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Masyarakat, Stakeholder dan Aparat Pemerintah	50 Orang	271,916,400	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
1	4	2	1.02	3	Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisame Akses Perumahan KPR-FLPP	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Perumahan KPR-FLPP	50 Orang	23,666,500	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Masyarakat, Stakeholder dan Aparat Pemerintah	50 Orang	61,916,400	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
1	4	2	1.02	4	Pembentukan dan Pelatihan Tim Satgas, Tim Pendamping dan Fasilitator	Jumlah Orang pada Tim Satgas, Tim Pendamping, dan Fasilitator yang Terbentuk dan Terlatih	45 Orang	8,669,000	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Masyarakat, Stakeholder dan Aparat Pemerintah	45 Orang	4,992,120	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	4	2	1.02	5	Rembug Warga untuk Menentukan Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Dokumen Data Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Provinsi	1 Dokumen	27,278,000	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Masyarakat, Stakeholder dan Aparat Pemerintah	1 Dokumen	4,000,500	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
1	4	2	1.02	6	Koordinasi untuk Menyepakati Penerima dan Jenis Pelayanan	Jumlah Dokumen Data Penerima Bantuan Berdasarkan Jenis Layanan	1 Dokumen	52,639,300	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Masyarakat, Stakeholder dan Aparat Pemerintah	1 Dokumen	7,098,000	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
1	4	2	1.03		Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Jumlah unit rumah korban bencana atau relokasi program provinsi yang dibangun	40 Unit	5,191,846,388				40 Unit	3,155,796,538	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
1	4	2	1.03	1	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah Korban Bencana Provinsi yang Terehabilitasi	40 Unit Rumah	5,052,778,388	Kab. Luwu Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Masyarakat, Stakeholder dan Aparat Pemerintah	40 Unit Rumah	2,974,722,988	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
1	4	2	1.03	2	Penyusunan Site Plan dan/atau Detail Engineering Design (DED) bagi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Jumlah Site Plan dan/atau Detail Engineering Design (DED) bagi Rumah Korban Bencana Provinsi atau yang Terkena Relokasi Program Provinsi	1 Dokumen	139,068,000	Kab. Luwu Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Masyarakat, Stakeholder dan Aparat Pemerintah	1 Dokumen	181,073,550	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
1	4	3			PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase Luas Kawasan Kumuh Tertangani Kewenangan Provinsi	36,37 %	5,136,586,600				36,37 %	11,301,690,363	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
1	4	3	1.01		Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Jumlah dokumen penataan kawasan permukiman kumuh	1 Dokumen	434,000,000				1 Dokumen	1,401,562,638	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
1	4	3	1.01	2	Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman kumuh	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh	1 Laporan	240,000,000	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Masyarakat, Stakeholder dan Aparat Pemerintahan	1 Laporan	842,722,650	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
1	4	3	1.01	3	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan Pemugaran/Peremajaan/Pemukiman Kembali Permukiman kumuh	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan Pemugaran/Peremajaan/Pemukiman Kembali Permukiman Kumuh	1 Laporan	106,000,000	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Masyarakat, Stakeholder dan Aparat Pemerintahan	1 Laporan	347,053,913	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
1	4	3	1.01	9	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman	1 Laporan	88,000,000	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Masyarakat, Stakeholder dan Aparat Pemerintahan	1 Laporan	211,786,075	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
1	4	3	1.02		Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Luas kawasan kumuh tertangani	120 Ha	4,702,586,600				120 Ha	9,900,127,725	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
1	4	3	1.02	1	Penyusunan Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Jumlah Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	9 Dokumen	282,000,000	Kab. Bone, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Masyarakat, Stakeholder dan Aparat Pemerintahan	9 Dokumen	1,203,826,075	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
									Kab. Gowa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
									Kab. Jeneponto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
									Kab. Luwu Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
									Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
									Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
									Kab. Kepulauan Selayar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
									Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
									Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
1	4	3	1.02	7	Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Luas Permukiman Kumuh Dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha yang Diremajakan/Dipugar	120 Ha	4,420,586,600	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Masyarakat, Stakeholder dan Aparat Pemerintahan	120 Ha	8,696,301,650	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
									Kab. Bone, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
									Kab. Gowa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
									Kab. Jeneponto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
									Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
									Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
									Kab. Sinjai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
									Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
									Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
									Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
									Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
									Kota Palopo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
1	4	5			PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase rumah tangga yang berakses air bersih layak/Arsinum di kawasan Pesisir dan Kepulauan	100 %	12,715,004,200				100 %	10,254,103,965	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
						Persentase rumah tangga bersanitasi di kawasan permukiman	93 %					93 %		DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
						Persentase panjang jalan lingkungan yang terbangun di kawasan permukiman	100 %					100 %		DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
1	4	5	1.01		Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman	Jumlah PSU permukiman yang terbangun di kawasan Pesisir dan Kepulauan	21 Lokasi	12,715,004,200				21 Lokasi	10,254,103,965	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
1	4	5	1.01	1	Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman	Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman	1 Dokumen	1,116,000,000	Kab. Bone, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Masyarakat, Stakeholder dan Aparat Pemerintah	1 Dokumen	870,073,613	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
									Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
									Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
									Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
									Kab. Tana Toraja, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
									Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
									Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
									Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	4	5	1.01	2	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman	Jumlah Lokasi Permukiman yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Permukiman	21 Lokasi	11,433,004,200	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Masyarakat, Stakeholder dan Aparat Pemerintah	21 Lokasi	9,094,419,839	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
									Kab. Bone, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
									Kab. Bulukumba, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
									Kab. Gowa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
									Kab. Jeneponto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
									Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
									Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
									Kab. Pangkajene Kepulauan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
									Kab. Sinjai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
									Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
									Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
									Kota Palopo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
									Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
1	4	5	1.01	3	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Dalam Rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman	1 Laporan	92,000,000	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Masyarakat, Stakeholder dan Aparat Pemerintah	1 Laporan	143,465,725	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
1	4	5	1.01	5	Kerja Sama Penyediaan/Pengelolaan PSU Permukiman	Jumlah Dokumen Kerja Sama Penyediaan/Pengelolaan PSU Permukiman	1 Dokumen	74,000,000	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Masyarakat, Stakeholder dan Aparat Pemerintah	1 Dokumen	146,144,788	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	4	6			PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	persentase pengembang perumahan dengan tingkat kualifikasi menengah yang tersertifikasi dan terregistrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	100 %	662,000,000				100 %	597,177,508	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
1	4	6	1.01		Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU Tingkat Kemampuan Menengah	Jumlah pengembang perumahan dengan tingkat kualifikasi menengah yang tersertifikasi dan terregistrasi yang melaksanakan perancangan dan perencanaan rumah serta perencanaan PSU	15 Pengembang	662,000,000				15 Pengembang	597,177,508	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
1	4	6	1.01	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Menengah	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan Dengan Kualifikasi Menengah	1 Laporan	662,000,000	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Stakeholder dan Aparat Pemerintahan	1 Laporan	597,177,508	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
1	5				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT			64,950,770,782					120,455,033,768	
1	5				SATUAN POLISI PAMONG PRAJA			48,079,541,072					53,258,709,169	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	5	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase ASN Perangkat Daerah Berkinerja Kategori Baik dan Minimal Baik	100 %	41,786,756,222				100 %	46,134,709,169	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
						Persentase Penurunan Temuan Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP)	100 %					100 %		SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
						Persentase Realisasi Kegiatan Perangkat Daerah	100 %					100 %		SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	5	1	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			417,124,700					540,878,600	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	5	1	1.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	282,541,300	Kota Makassar, Panakkukang, Panaikang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2 Dokumen	400,000,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	5	1	1.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	11,042,000	Kota Makassar, Panakkukang, Panaikang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Dokumen	15,000,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	5	1	1.01	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	14,036,200	Kota Makassar, Panakkukang, Panaikang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Dokumen	63,343,100	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	5	1	1.01	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	17,791,500	Kota Makassar, Panakkukang, Panaikang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Dokumen	15,000,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	5	1	1.01	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	60,893,900	Kota Makassar, Panakkukang, Panaikang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Dokumen	11,565,250	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	5	1	1.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	15,068,800	Kota Makassar, Panakkukang, Panaikang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Laporan	15,970,250	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	5	1	1.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	15,751,000	Kota Makassar, Panakkukang, Panaikang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4 Laporan	20,000,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	5	1	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			20,639,734,070					23,065,647,041	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	5	1	1.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1944 Orang/ Bulan	20,527,520,520	Kota Makassar, Panakkukang, Panaikang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1944 Orang/ Bulan	22,960,522,041	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	5	1	1.02	4	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 Dokumen	57,873,800	Kota Makassar, Panakkukang, Panaikang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		12 Dokumen	67,052,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	5	1	1.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	20,679,000	Kota Makassar, Panakkukang, Panaikang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Laporan	5,107,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	5	1	1.02	6	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	20 Dokumen	8,943,750	Kota Makassar, Panakkukang, Panaikang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		20 Dokumen	6,516,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	5	1	1.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18 Laporan	24,717,000	Kota Makassar, Panakkukang, Panaikang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		18 Laporan	26,450,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	5	1	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			9,498,750					22,000,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	5	1	1.03	1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen	5,442,750	Kota Makassar, Panakkukang, Panaikang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2 Dokumen	10,000,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	5	1	1.03	6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	3 Laporan	4,056,000	Kota Makassar, Panakkukang, Panaikang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3 Laporan	12,000,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	5	1	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			138,799,250					375,800,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	5	1	1.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	150 Paket	99,000,000	Kota Makassar, Panakkukang, Panaikang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		150 Paket	305,800,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	5	1	1.05	3	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	340 Dokumen	39,799,250	Kota Makassar, Panakkukang, Panaikang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		340 Dokumen	70,000,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
						Jumlah pelaksanaan penilaian Dupak Fungsional	2 kali					2 kali		SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	5	1	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah			449,260,400					697,551,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	5	1	1.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	50 Paket	4,135,000	Kota Makassar, Panakkukang, Panaikang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		50 Paket	7,500,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	5	1	1.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	250 Paket	3,307,000	Kota Makassar, Panakkukang, Panaikang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		250 Paket	17,250,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	5	1	1.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	18000 Paket	15,325,000	Kota Makassar, Panakkukang, Panaikang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		18000 Paket	52,800,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	5	1	1.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	15,728,000	Kota Makassar, Panakkukang, Panaikang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		12 Dokumen	24,200,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	5	1	1.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	10,875,000	Kota Makassar, Panakkukang, Panaikang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		12 Laporan	17,250,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	5	1	1.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 Laporan	337,745,000	Kota Makassar, Panakkukang, Panaikang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100 Laporan	450,000,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	5	1	1.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	5000 Dokumen	12,145,400	Kota Makassar, Panakkukang, Panaikang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5000 Dokumen	28,551,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	5	1	1.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	50,000,000	Kota Makassar, Panakkukang, Panaikang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Dokumen	100,000,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	5	1	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			622,919,500					1,650,000,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	5	1	1.07	2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2 Unit	-	Kota Makassar, Panakkukang, Panaikang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2 Unit	650,000,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	5	1	1.07	5	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	51,000,000	Kota Makassar, Panakkukang, Panaikang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Paket	200,000,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	5	1	1.07	9	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	150,000,000	Kota Makassar, Panakkukang, Panaikang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Unit	100,000,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	5	1	1.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	8 Unit	421,919,500	Kota Makassar, Panakkukang, Panaikang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		8 Unit	700,000,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	5	1	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			19,048,443,552					19,107,832,528	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	5	1	1.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	19,572,000	Kota Makassar, Panakkukang, Panaikang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		12 Laporan	25,000,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	5	1	1.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	19,028,871,552	Kota Makassar, Panakkukang, Panaikang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		12 Laporan	19,082,832,528	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	5	1	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			460,976,000					675,000,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	5	1	1.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	25 Unit	331,980,000	Kota Makassar, Panakkukang, Panaikang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		25 Unit	375,000,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	5	1	1.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	9 Unit	96,496,000	Kota Makassar, Panakkukang, Panaikang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		9 Unit	200,000,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	5	1	1.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	41 Unit	32,500,000	Kota Makassar, Panakkukang, Panaikang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		41 Unit	100,000,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	5	2			PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkada di Provinsi	100%	4,910,853,350				100%	5,154,000,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	5	2	1.01		Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi			3,933,093,950					3,764,000,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	5	2	1.01	1	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan dan Pengawalan	277 Kasus	806,646,500	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		277 Kasus	800,000,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	5	2	1.01	2	Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penerbitan dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	42 Kasus	2,201,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		42 Kasus	2,300,000,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	5	2	1.01	3	Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi	15 Dokumen	490,169,750	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		15 Dokumen	500,000,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	5	2	1.01	4	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	50 Dokumen	132,335,850	Kota Makassar, Panakkukang, Panaikang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		50 Dokumen	100,000,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	5	2	1.01	5	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasanya	3840 Orang	287,125,350	Kota Makassar, Panakkukang, Panaikang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3840 Orang	10,000,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	5	2	1.01	6	Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	5 Dokumen	5,731,500	Kota Makassar, Panakkukang, Panaikang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5 Dokumen	50,000,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	5	2	1.01	7	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Sarana dan Prasarana ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia	150 Unit	10,085,000	Kota Makassar, Panakkukang, Panaikang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		150 Unit	4,000,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	5	2	1.02		Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur			865,380,150					1,140,000,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	5	2	1.02	1	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	3 Laporan	305,832,650	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3 Laporan	320,000,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	5	2	1.02	2	Pengawasan atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan pengawasan yang dilakukan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	65 Laporan	294,167,350	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		65 Laporan	420,000,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	5	2	1.02	3	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur Sesuai SOP	25 Laporan	265,380,150	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		25 Laporan	400,000,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	5	2	1.03		Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi			112,379,250					250,000,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	5	2	1.03	1	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Penegakan Perda	25 Laporan	112,379,250	Kota Makassar, Panakkukang, Panaikang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		25 Laporan	250,000,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	5	3			PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase Korban Bencana yang tertangani	100%	715,712,200				100%	940,000,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	5	3	1.01		Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi			245,314,200					325,000,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	5	3	1.01	2	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Provinsi (Per Jenis Bencana)	Jumlah Orang yang Tersedia untuk Melaksanakan Sosialisasi KIE Rawan Bencana (Per Jenis Bencana) Lintas Kabupaten/Kota	80 Orang	245,314,200	Kota Makassar, Panakkukang, Panaikang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		80 Orang	325,000,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	5	3	1.02		Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana			265,798,800					315,000,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	5	3	1.02	2	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	Jumlah Aparatur Provinsi dan Kabupaten/Kota yang Memperoleh Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	100 Orang	265,798,800	Kota Makassar, Panakkukang, Panaikang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100 Orang	315,000,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	5	3	1.04		Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana			204,599,200					300,000,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	5	3	1.04	3	Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana	2 Dokumen	204,599,200	Kota Makassar, Panakkukang, Panaikang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2 Dokumen	300,000,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	5	4			PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Cakupan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	41%	666,219,300				41%	1,030,000,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	5	4	1.01		Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran			573,580,050					780,000,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	5	4	1.01	3	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota	2 Laporan	-	Kota Makassar, Panakkukang, Panaikang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2 Laporan	80,000,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	5	4	1.01	4	Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi Antar Daerah Berbatasan, Antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi Antar Wilayah Kabupaten/Kota dalam Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan	12 Dokumen	205,581,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		12 Dokumen	200,000,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	5	4	1.01	9	Bimbingan Teknis Terkait Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran Provinsi dan Kabupaten/Kota	Jumlah Aparatur Kebakaran yang Mengikuti Bimbingan Teknis Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran Provinsi dan Kabupaten/Kota)	100 Orang	367,999,050	Kota Makassar, Panakkukang, Panaikang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100 Orang	500,000,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
						Jumlah Pelatihan Dasar Pemadan Kebakaran	2 kali					2 kali		SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	5	4	1.02		Pembinaan dan Pengawasan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran			92,639,250					250,000,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	5	4	1.02	1	Pembinaan Penyelenggaraan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Penyelenggaraan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	2 Laporan	92,639,250	Kota Makassar, Panakkukang, Panaikang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2 Laporan	250,000,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	5				BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH			16,871,229,710					67,196,324,599	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	5	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase ASN Perangkat Daerah Berkinerja Kategori Baik dan Minimal Baik	100 %	8,486,606,574				100 %	13,557,884,126	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
						Persentase Penurunan Temuan Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP)	100 %					100 %		BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						Persentase Realisasi Kegiatan Perangkat Daerah	100 %					100 %		BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	5	1	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tepat Waktu	100 %	325,711,000				100 %	921,393,999	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	5	1	1.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	129,125,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Dokumen	160,650,000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	5	1	1.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	69,382,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Dokumen	388,252,448	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	5	1	1.01	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	69,397,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Dokumen	134,679,408	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	5	1	1.01	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	15,317,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Dokumen	190,580,293	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	5	1	1.01	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	4,440,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Dokumen	6,360,609	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	5	1	1.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	38,050,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2 Laporan	40,871,241	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	5	1	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Penyusunan Dokumen Laporan Keuangan Tepat Waktu	100 %	5,053,248,130				100 %	5,802,982,866	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	5	1	1.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	45 Orang/ Bulan	4,980,068,130	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		45 Orang/ Bulan	5,723,864,676	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	5	1	1.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	15 Laporan	62,790,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		15 Laporan	67,781,594	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	5	1	1.02	8	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	10,390,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Dokumen	11,336,596	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	5	1	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rata-rata Nilai Perilaku Pegawai Perangkat Daerah Berdasarkan Penilaian Kinerja ASN	100 %	272,114,000				100 %	2,853,587,775	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	5	1	1.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	95 Paket	67,880,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		95 Paket	70,799,637	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	5	1	1.05	3	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	6 Dokumen	34,734,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		6 Dokumen	40,694,918	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	5	1	1.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	5 Orang	-	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5 Orang	74,639,801	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	5	1	1.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	1500 Orang	169,500,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1500 Orang	2,667,453,419	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	5	1	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Kantor	100 %	732,098,500				100 %	1,000,104,071	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	5	1	1.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	10,420,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Paket	22,986,895	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	5	1	1.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	45,327,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5 Paket	255,050,475	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	5	1	1.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	35 Paket	97,576,500	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		35 Paket	106,575,000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	5	1	1.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	73,440,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Laporan	77,885,010	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	5	1	1.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	505,335,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Laporan	537,606,691	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	5	1	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	1,599,234,944				100 %	2,439,271,810	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	5	1	1.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	342,782,520	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3 Laporan	391,335,396	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	5	1	1.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	13 Laporan	1,256,452,424	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		13 Laporan	2,047,936,414	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	5	1	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Dalam Kondisi Baik	100 %	504,200,000				100 %	540,543,605	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	5	1	1.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	15 Unit	321,200,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		15 Unit	338,529,360	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	5	1	1.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	40 Unit	29,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		40 Unit	37,590,335	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	5	1	1.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	154,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2 Unit	164,423,910	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	5	3			PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase Dokumen Kebencanaan sampai dengan sah/legal yang tersedia	100 %	8,384,623,136				100 %	53,638,440,473	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
						Persentase Aparat Kesiapsiagaan Bencana yang terlatih	100 %					100 %		BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
						Persentase Tanggap Darurat Bencana yang tertangani	100 %					100 %		BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	5	3	1.01		Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi	Persentase Ketersediaan Sistem Peringatan Dini Bencana	100 %	535,470,200				100 %	563,468,841	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	5	3	1.01	2	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Provinsi (Per Jenis Bencana)	Jumlah Orang yang Tersedia untuk Melaksanakan Sosialisasi KIE Rawan Bencana (Per Jenis Bencana) Lintas Kabupaten/Kota	200 Orang	535,470,200	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		200 Orang	563,468,841	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	5	3	1.02		Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Persentase Aparatur yang mengikuti Pelatihan Kebencanaan	100 %	3,152,553,936				100 %	46,788,499,541	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	5	3	1.02	2	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	Jumlah Aparatur Provinsi dan Kabupaten/Kota yang Memperoleh Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	200 Orang	336,295,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		200 Orang	557,829,749	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	5	3	1.02	3	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	10 Dokumen	1,708,286,400	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		10 Dokumen	45,000,000,000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	5	3	1.02	8	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana	Jumlah Personil TRC Tingkat Provinsi yang Dikembangkan Kapasitas Teknis dan Manajerialnya Dalam Melaksanakan Penanganan Awal Darurat Bencana	200 Orang	489,440,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		200 Orang	537,932,292	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	5	3	1.02	9	Penyusunan Rencana Kontijensi	Jumlah Dokumen Rencana Kontinjensi	1 Dokumen	618,532,536	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Dokumen	692,737,500	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	5	3	1.03		Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Persentase Ketersediaan Peralatan dan Logistik serta Aparat Tanggap Darurat Bencana	100 %	2,673,684,000				100 %	3,623,369,681	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	5	3	1.03	2	Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana	Jumlah Laporan Pelaksanaan Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana	12 Laporan	632,180,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		12 Laporan	690,596,648	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	5	3	1.03	4	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	38000 Orang	2,041,504,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		38000 Orang	2,932,773,033	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	5	3	1.04		Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Persentase Ketersediaan Data Bencana Kabupaten/Kota	100 %	2,022,915,000				100 %	2,663,102,410	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	5	3	1.04	2	Penguatan Kelembagaan Bencana Daerah	Jumlah Dokumen Tata Kelola Kelembagaan Bencana Daerah	1 Dokumen	546,254,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Dokumen	575,433,926	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	5	3	1.04	4	Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	Jumlah Data dan Informasi Kebencanaan	1 Dokumen	169,500,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Dokumen	213,150,000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	5	3	1.04	5	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi	1 Laporan	239,645,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Laporan	266,437,500	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	5	3	1.04	7	Penanganan Pasca Bencana Provinsi	Jumlah Dokumen Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITU PASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P) yang Disusun	5 Dokumen	1,067,516,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5 Dokumen	1,608,080,984	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	6				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL			51,051,176,074					4,323,609,807	
1	6				DINAS SOSIAL			51,051,176,074					4,323,609,807	DINAS SOSIAL
1	6	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase ASN Perangkat Daerah Berkinerja Kategori Baik dan Minimal Baik	100 %	38,144,024,574				100 %	4,156,070,807	DINAS SOSIAL
						Persentase Penurunan Temuan Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP)	100 %					100 %		DINAS SOSIAL
						Persentase Realisasi Kegiatan Perangkat Daerah	100 %					100 %		DINAS SOSIAL
1	6	1	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			633,204,200					32,723,250	DINAS SOSIAL
1	6	1	1.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	11 Dokumen	401,506,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		11 Dokumen	-	DINAS SOSIAL
1	6	1	1.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD			10,478,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			11,001,900	DINAS SOSIAL
1	6	1	1.01	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD			10,485,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			11,009,250	DINAS SOSIAL
1	6	1	1.01	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD			5,889,400	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			6,176,100	DINAS SOSIAL
1	6	1	1.01	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD			4,329,400	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			4,536,000	DINAS SOSIAL
1	6	1	1.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	200,516,400	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3 Laporan	-	DINAS SOSIAL
1	6	1	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			33,322,276,487					210,000,000	DINAS SOSIAL
1	6	1	1.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	341 Orang/ Bulan	33,122,246,087	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		341 Orang/ Bulan	-	DINAS SOSIAL

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	6	1	1.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	7 Laporan	200,030,400	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7 Laporan	210,000,000	DINAS SOSIAL
1	6	1	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah			816,295,800					243,841,100	DINAS SOSIAL
1	6	1	1.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			19,038,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			20,000,000	DINAS SOSIAL
1	6	1	1.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	15 Paket	219,920,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		15 Paket	-	DINAS SOSIAL
1	6	1	1.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			23,441,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			24,612,000	DINAS SOSIAL
1	6	1	1.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			48,699,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			51,599,100	DINAS SOSIAL
1	6	1	1.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu			92,210,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			147,630,000	DINAS SOSIAL
1	6	1	1.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	24 Laporan	412,987,800	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		24 Laporan	-	DINAS SOSIAL
1	6	1	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			3,049,097,087					3,330,188,457	DINAS SOSIAL
1	6	1	1.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			725,023,607	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			761,275,761	DINAS SOSIAL
1	6	1	1.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	107 Orang	2,324,073,480	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		107 Orang	2,568,912,696	DINAS SOSIAL
1	6	1	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			323,151,000					339,318,000	DINAS SOSIAL
1	6	1	1.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			290,001,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			304,510,500	DINAS SOSIAL
1	6	1	1.09	7	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya			33,150,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			34,807,500	DINAS SOSIAL
1	6	3			PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	Persentase penanganan warga negara migran korban tindak kekerasan	100%	187,578,000				100%	-	DINAS SOSIAL
1	6	3	1.01		Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk Dipulangkan ke Daerah Kabupaten/Kota Asal			187,578,000					-	DINAS SOSIAL
1	6	3	1.01	1	Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk Dipulangkan ke Daerah Kabupaten/Kota Asal	Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang Dipulangkan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk Dipulangkan ke Daerah Kabupaten/Kota	300 Orang	187,578,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		300 Orang	-	DINAS SOSIAL
1	6	4			PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase warga negara penyandang disabiltas terlantar yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar didalam panti(SPM)	100%	5,621,788,500				100%	167,539,000	DINAS SOSIAL
						Persentase warga negara Anak Terlantar yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar anak terlantar didalam panti (SPM)	100%					100%		
						Persenetase warga negara lanjut usia terlantar yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar lanjut usia didalam panti(SPM)	100%					100%		
						Persentase warga negara gelandangan dan pengemis yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar tuna susila didalam panti	100%					100%		
						Persentase Pelayanan dan Pemenuhan Kebutuhan dasar bagi tuna sosial di dalam panti	100%					100%		
1	6	4	1.01		Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas TerlAntar di dalam Panti			200,000,000					-	DINAS SOSIAL

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	6	4	1.01	4	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Provinsi	20 Orang	200,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		20 Orang	-	DINAS SOSIAL
1	6	4	1.02		Rehabilitasi Sosial Dasar Anak TerlAntar di dalam Panti			3,495,882,500					-	DINAS SOSIAL
1	6	4	1.02	2	Penyediaan Makanan	Jumlah Anak yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	425 Anak	2,709,890,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		425 Anak	-	DINAS SOSIAL
1	6	4	1.02	3	Penyediaan Sandang	Jumlah anak yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	475 Anak	295,213,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		475 Anak	-	DINAS SOSIAL
1	6	4	1.02	5	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	Jumlah Anak yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	425 Anak	101,198,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		425 Anak	-	DINAS SOSIAL
1	6	4	1.02	6	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	425 Anak	200,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		425 Anak	-	DINAS SOSIAL
1	6	4	1.02	7	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi	425 Anak	88,165,500	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		425 Anak	-	DINAS SOSIAL
1	6	4	1.02	10	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi	425 Orang	101,416,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		425 Orang	-	DINAS SOSIAL
1	6	4	1.03		Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti			1,138,406,000					112,539,000	DINAS SOSIAL
1	6	4	1.03	1	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	75 Orang	841,250,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		75 Orang	-	DINAS SOSIAL
1	6	4	1.03	2	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	75 Orang	30,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		75 Orang	-	DINAS SOSIAL
1	6	4	1.03	5	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Sosial	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	75 Orang	60,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		75 Orang	-	DINAS SOSIAL
1	6	4	1.03	6	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	75 Orang	59,996,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		75 Orang	-	DINAS SOSIAL
1	6	4	1.03	7	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi	75 Orang	40,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		75 Orang	-	DINAS SOSIAL
1	6	4	1.03	10	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga			47,180,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			49,539,000	DINAS SOSIAL
1	6	4	1.03	12	Pemulasaraan			59,980,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			63,000,000	DINAS SOSIAL
1	6	4	1.05		Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti			787,500,000					55,000,000	DINAS SOSIAL
1	6	4	1.05	1	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	100 Orang	567,500,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100 Orang	-	DINAS SOSIAL
1	6	4	1.05	2	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	100 Orang	30,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100 Orang	-	DINAS SOSIAL
1	6	4	1.05	4	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	100 Orang	40,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100 Orang	-	DINAS SOSIAL
1	6	4	1.05	5	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial			50,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			55,000,000	DINAS SOSIAL
1	6	4	1.05	6	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi	100 Orang	60,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100 Orang	-	DINAS SOSIAL

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	6	4	1.05	10	Pemulangan ke Daerah Asal	Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS Kewenangan Provinsi yang Dipulangkan ke Daerah Asal	100 Orang	40,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100 Orang	-	DINAS SOSIAL
1	6	5			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase PPKS yang mendapatkan jaminan sosial	3,7%	4,585,700,000				3,7%	-	DINAS SOSIAL
						Persentase pengangkatan anak WNI oleh orang tua tunggal	100%					100%		
1	6	5	1.02		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi			4,585,700,000					-	DINAS SOSIAL
1	6	5	1.02	1	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kelompok Usaha Bersama (KUBE)	20 Kelompok	3,405,700,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		20 Kelompok	-	DINAS SOSIAL
						Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Provinsi	400 Keluarga					400 Keluarga		DINAS SOSIAL
1	6	5	1.02	3	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang mendapatkan bantuan pemenuhan kebutuhan dasar	48 Lembaga	1,180,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		48 Lembaga	-	DINAS SOSIAL
						Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Provinsi	40 Keluarga					40 Keluarga		DINAS SOSIAL
1	6	6			PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase warga negara Korban bencana provinsi yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial pada saaat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana provinsi	100%	2,512,085,000				100%	-	DINAS SOSIAL
1	6	6	1.01		Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi			2,512,085,000					-	DINAS SOSIAL
1	6	6	1.01	1	Penyediaan Permakanan	Jumlah Pengungsi yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat Kewenangan Provinsi	25692 Orang	1,808,625,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		25692 Orang	-	DINAS SOSIAL
1	6	6	1.01	2	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Provinsi	3887 Orang	200,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3887 Orang	-	DINAS SOSIAL
1	6	6	1.01	5	Pelayanan Dukungan Psikososial	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Provinsi	1775 Orang	503,460,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1775 Orang	-	DINAS SOSIAL
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			458,470,953,073					452,457,427,281	
2	7				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA			37,790,270,058					39,251,448,185	
2	7				DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI			37,790,270,058					39,251,448,185	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2	7	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase ASN Perangkat Daerah Berkinerja Kategori Baik dan Minimal Baik	100 %	30,379,801,820				100 %	35,019,745,285	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
						Persentase Penurunan Temuan Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP)	100 %					100 %		
						Persentase Realisasi Kegiatan Perangkat Daerah	100 %					100 %		
2	7	1	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			418,202,100					453,245,285	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2	7	1	1.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 Dokumen	283,205,400	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7 Dokumen	262,500,000	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2	7	1	1.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	17,498,900	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Dokumen	25,000,000	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	7	1	1.01	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	14,997,800	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Dokumen	17,500,000	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2	7	1	1.01	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	17,500,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Dokumen	20,000,000	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2	7	1	1.01	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	15,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Dokumen	17,500,000	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2	7	1	1.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	17 Laporan	40,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		17 Laporan	58,245,285	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2	7	1	1.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6 Laporan	30,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		6 Laporan	52,500,000	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2	7	1	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			26,889,943,670					30,180,500,000	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2	7	1	1.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	199 Orang/ Bulan	26,723,661,170	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		199 Orang/ Bulan	30,000,000,000	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2	7	1	1.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	9,999,100	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2 Laporan	10,500,000	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2	7	1	1.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18 Laporan	156,283,400	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		18 Laporan	170,000,000	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2	7	1	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			190,000,000					168,000,000	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2	7	1	1.05	3	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Tahun	110,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Tahun	115,500,000	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2	7	1	1.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan			80,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			52,500,000	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2	7	1	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah			402,845,600					443,000,000	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2	7	1	1.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	58,365,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2 Paket	65,000,000	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2	7	1	1.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	244,480,600	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		12 Laporan	236,250,000	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2	7	1	1.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD			-	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			36,750,000	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2	7	1	1.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD			100,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			105,000,000	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2	7	1	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			124,307,850					110,000,000	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2	7	1	1.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	124,307,850	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Unit	110,000,000	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2	7	1	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			1,119,918,000					1,365,000,000	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2	7	1	1.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	618,840,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		12 Laporan	682,500,000	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2	7	1	1.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	501,078,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		12 Laporan	682,500,000	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2	7	1	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			1,234,584,600					2,300,000,000	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	7	1	1.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	17 Unit	293,484,600	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		17 Unit	350,000,000	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2	7	1	1.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	895,700,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 unit	1,900,000,000	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2	7	1	1.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	8 Paket	45,400,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		8 Paket	50,000,000	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2	7	2			PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Persentase Dokumen Perencanaan Tenaga Kerja Makro	100%	56,442,700				100%	105,000,000	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
						Persentase Perusahaan yang menyusun Perencanaan Tenaga Kerja	10%					10%		
2	7	2	1.01		Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)			56,442,700					105,000,000	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2	7	2	1.01	1	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro	1 Dokumen	41,442,700	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Dokumen	52,500,000	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2	7	2	1.01	2	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	Jumlah SDM Kabupaten/Kota yang Mengikuti Pelatihan Penyusunan RTK Mikro	24 Orang	15,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		24 Orang	52,500,000	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2	7	3			PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase pencari kerja terlatih yang mendapatkan pekerjaan	77,08 %	4,832,824,200				77,08 %	1,099,000,000	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
						Persentase tenaga kerja yang dilatih berwirausaha dapat mandiri	85%					85%		
2	7	3	1.01		Pelaksanaan Latihan Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi			4,752,824,200					1,015,000,000	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2	7	3	1.01	1	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis kompetensi Pada Tahun n	240 Orang	4,644,992,800	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		240 Orang	1,000,000,000	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2	7	3	1.01	2	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama Dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	Jumlah Kesepakatan/Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun 2023	20 Lembaga	107,831,400	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		20 Lembaga	15,000,000	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2	7	3	1.04		Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Provinsi			80,000,000					84,000,000	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2	7	3	1.04	1	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan daya saing Tenaga Kerja di Tingkat daerah	10 Dokumen	80,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		10 Dokumen	84,000,000	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2	7	4			PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase Pencari kerja yang yang terdaftar dan ditempatkan	4.35 %	624,784,856				4.35 %	1,044,750,000	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
						Persentase daya serap tenaga kerja (Prioritas)	59.41 %					59.41 %		
2	7	4	1.03		Pengelolaan Informasi Pasar Kerja			139,772,300					152,250,000	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2	7	4	1.03	2	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja Yang Terdaftar Dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (KarirHub)	22730 Orang	39,772,300	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		22730 Orang	52,500,000	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2	7	4	1.03	3	Job Fair/Bursa Kerja			100,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			99,750,000	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2	7	4	1.04		Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Provinsi			439,999,056					735,000,000	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2	7	4	1.04	3	Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran	Jumlah CPMI yang Terlayani Sesuai Prosedur dalam LTSA	100 Orang	439,999,056	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100 Orang	735,000,000	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2	7	4	1.05		Pengesahan RPTKA Perpanjangan yang Tidak Mengandung Perubahan Jabatan, Jumlah TKA, dan Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Provinsi			45,013,500					157,500,000	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2	7	4	1.05	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengesahan RPTKA yang tidak Mengandung Perubahan Jabatan, Jumlah TKA, dan Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah TKA yang telah Mendapatkan Pengesahan RPTKA	100 Orang	45,013,500	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100 Orang	157,500,000	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	7	5			PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase perusahaan yang menerapkan peraturan perundangan bidang ketengakerjaan	60.00%	1,000,613,900				60.00%	1,218,000,000	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
						Persentase besaran pekerja /buruh yang menjadi peserta Jamsostek	47,22%					47,22%		
2	7	5	1.01		Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk yang Mempunyai Wilayah Kerja lebih dari 1 (satu) Kabupaten/Kota			67,853,400					105,000,000	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2	7	5	1.01	3	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar Sebagai Peserta Jamsostek	1 Laporan	67,853,400	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Laporan	105,000,000	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2	7	5	1.02		Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi			437,362,500					561,750,000	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2	7	5	1.02	2	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan	110 Perkara	64,471,400	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		110 Perkara	105,000,000	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2	7	5	1.02	4	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Provinsi	Jumlah LKS Tripartit yang Dibina	3 Lembaga	372,891,100	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3 Lembaga	456,750,000	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2	7	5	1.03		Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP), Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK)			495,398,000					551,250,000	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2	7	5	1.03	1	Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP)	Jumlah Penetapan UMP	1 Surat Keputusan	441,160,200	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Surat Keputusan	472,500,000	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2	7	5	1.03	5	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Terdaftar dalam Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	95000 Orang	54,237,800	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		95000 Orang	78,750,000	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2	7	6			PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN	Persentase Penurunan resiko kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja	85%	895,802,582				85%	764,952,900	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
						Persentase kepatuhan penerapan norma ketenagakerjaan	84.00%					84.00%		
2	7	6	1.01		Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan			895,802,582					764,952,900	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2	7	6	1.01	1	Pengawasan Pelaksanaan Norma Kerja di Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Menerapkan Norma Ketenagakerjaan di Perusahaan (Termasuk Perusahaan yang Mempekerjakan TKA)	900 Perusahaan	598,371,332	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		900 Perusahaan	476,202,900	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2	7	6	1.01	2	Penegakan Hukum Ketenagakerjaan di Perusahaan	Jumlah Kasus Permasalahan Hukum yang Diselesaikan	100 Kasus	170,597,500	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100 Kasus	131,250,000	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2	7	6	1.01	3	Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Menerapkan K3	100 Perusahaan	126,833,750	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100 Perusahaan	157,500,000	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2	8				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK			15,237,910,907					14,915,491,527	
2	8				DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA			15,237,910,907					14,915,491,527	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	8	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase ASN Perangkat Daerah Berkinerja Kategori Baik dan Sangat Baik	95 %	11,416,301,375				95 %	11,089,294,478	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
						Persentase Realisasi Kegiatan Perangkat Daerah	100 %					100 %		DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
						Persentase Temuan Material BPK dan APIP	2 %					2 %		DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
2	8	1	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Penyusunan dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah tepat waktu	100 %	574,746,200				100 %	550,580,568	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
2	8	1	1.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	128,772,400	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Lain-lain PAD Yang Sah	Pengelola Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Dp3A Dalduk KB, Unsur Pemerintah, Non Pemerintah Lingkup PPPA dan Dalduk KB Kab/Kota serta Sektor Terkait Tk. Provinsi	4 Dokumen	110,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
2	8	1	1.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	7,500,000	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Lain-lain PAD Yang Sah	Pengelola Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Dp3A Dalduk KB, Unsur Pemerintah, Non Pemerintah Lingkup PPPA dan Dalduk KB Kab/Kota serta Sektor Terkait Tk. Provinsi	2 Dokumen	7,500,000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	8	1	1.01	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2 Dokumen	7,500,000	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Lain-lain PAD Yang Sah	Pengelola Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Dp3A Dalduk KB, Unsur Pemerintah, Non Pemerintah Lingkup PPPA dan Dalduk KB Kab/Kota serta Sektor Terkait Tk. Provinsi	2 Dokumen	7,500,000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
2	8	1	1.01	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	6,525,800	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Lain-lain PAD Yang Sah	Pengelola Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Dp3A Dalduk KB, Unsur Pemerintah, Non Pemerintah Lingkup PPPA dan Dalduk KB Kab/Kota serta Sektor Terkait Tk. Provinsi	2 Dokumen	6,500,000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
2	8	1	1.01	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2 Dokumen	6,525,800	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Lain-lain PAD Yang Sah	Pengelola Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Dp3A Dalduk KB, Unsur Pemerintah, Non Pemerintah Lingkup PPPA dan Dalduk KB Kab/Kota serta Sektor Terkait Tk. Provinsi	2 Dokumen	6,500,000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
2	8	1	1.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	23 Laporan	417,922,200	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Lain-lain PAD Yang Sah	Pengelola Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Dp3A Dalduk KB, Unsur Pemerintah, Non Pemerintah Lingkup PPPA dan Dalduk KB Kab/Kota serta Sektor Terkait Tk. Provinsi	23 Laporan	412,580,568	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
									Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
									Kab. Bone, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					Kab. Bulukumba, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
					Kab. Enrekang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
					Kab. Gowa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
					Kab. Jeneponto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
					Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
					Kab. Luwu Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
					Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					Kab. Pangkajene Kepulauan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
					Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
					Kab. Kepulauan Selayar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
					Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
					Kab. Sinjai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
					Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
					Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					Kab. Tana Toraja, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
					Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
					Kota Pare Pare, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
					Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
					Kota Palopo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
					Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
					Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	8	1	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Penyusunan dokumen laporan keuangan tepat waktu	100 %	8,590,270,985				100 %	8,590,270,710	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
2	8	1	1.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12 Orang/ Bulan	8,499,770,985	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Lain-lain PAD Yang Sah	1. ASN Lingkup DP3A Dalduk KB 2. Pengelola Program/Kegiatan dan Pengelola Keuangan DP3A Dalduk KB Provinsi Sulsel	12 Orang/ Bulan	8,499,770,710	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
2	8	1	1.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	25,500,000	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Lain-lain PAD Yang Sah	1. ASN Lingkup DP3A Dalduk KB 2. Pengelola Program/Kegiatan dan Pengelola Keuangan DP3A Dalduk KB Provinsi Sulsel	2 Laporan	25,500,000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
2	8	1	1.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	45,000,000	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Lain-lain PAD Yang Sah	1. ASN Lingkup DP3A Dalduk KB 2. Pengelola Program/Kegiatan dan Pengelola Keuangan DP3A Dalduk KB Provinsi Sulsel	12 Laporan	45,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
2	8	1	1.02	8	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	20,000,000	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Lain-lain PAD Yang Sah	1. ASN Lingkup DP3A Dalduk KB 2. Pengelola Program/Kegiatan dan Pengelola Keuangan DP3A Dalduk KB Provinsi Sulsel	1 Dokumen	20,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
2	8	1	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Nilai Rata-Rata 80	80 Nilai Rata-Rata	111,145,000				80 Nilai Rata-Rata	113,800,000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
2	8	1	1.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	2 Paket	106,145,000	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Lain-lain PAD Yang Sah	Aparatur Sipil Negara (ASN) DP3A Dalduk KB	2 Paket	108,800,000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	8	1	1.05	3	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	3 Dokumen	5,000,000	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Lain-lain PAD Yang Sah	Aparatur Sipil Negara (ASN) DP3A Dalduk KB	3 Dokumen	5,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
2	8	1	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	95 %	867,391,800				95 %	666,151,000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
2	8	1	1.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	15 Paket	8,775,000	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Lain-lain PAD Yang Sah	Ruangan & Peralatan Kantor, Pegawai Lingkup Dinas(02),Bahan Kelengkapan Pelayanan Umum, Kepegawaian & Hukum ,Tamu dari Dalam & Luar Provinsi dari Unsur Pemerintahan & Non Pemerintahan ,Lembaga/Organisasi Mitra, Unsur Pimpinan dan Pelaksanaan Internal & Eksternal OPD ,Pengelolaan Arsip Bidang & Sekretariat ,Website Dinas	15 Paket	8,775,000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
2	8	1	1.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	25 Paket	116,535,000	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Lain-lain PAD Yang Sah	Ruangan & Peralatan Kantor, Pegawai Lingkup Dinas(02),Bahan Kelengkapan Pelayanan Umum, Kepegawaian & Hukum ,Tamu dari Dalam & Luar Provinsi dari Unsur Pemerintahan & Non Pemerintahan ,Lembaga/Organisasi Mitra, Unsur Pimpinan dan Pelaksanaan Internal & Eksternal OPD ,Pengelolaan Arsip Bidang & Sekretariat ,Website Dinas	25 Paket	55,108,000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	8	1	1.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	41,733,000	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Lain-lain PAD Yang Sah	Ruangan & Peralatan Kantor, Pegawai Lingkup Dinas(02),Bahan Kelengkapan Pelayanan Umum, Kepegawaian & Hukum ,Tamu dari Dalam & Luar Provinsi dari Unsur Pemerintahan & Non Pemerintahan ,Lembaga/Organisasi Mitra, Unsur Pimpinan dan Pelaksanaan Internal & Eksternal OPD ,Pengelolaan Arsip Bidang & Sekretariat ,Website Dinas	2 Paket	41,700,000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
2	8	1	1.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	121,700,000	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Lain-lain PAD Yang Sah	Ruangan & Peralatan Kantor, Pegawai Lingkup Dinas(02),Bahan Kelengkapan Pelayanan Umum, Kepegawaian & Hukum ,Tamu dari Dalam & Luar Provinsi dari Unsur Pemerintahan & Non Pemerintahan ,Lembaga/Organisasi Mitra, Unsur Pimpinan dan Pelaksanaan Internal & Eksternal OPD ,Pengelolaan Arsip Bidang & Sekretariat ,Website Dinas	1 Laporan	121,700,000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
2	8	1	1.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan	513,584,200	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Lain-lain PAD Yang Sah	Ruangan & Peralatan Kantor, Pegawai Lingkup Dinas(02),Bahan Kelengkapan Pelayanan Umum, Kepegawaian & Hukum ,Tamu dari Dalam & Luar Provinsi dari Unsur Pemerintahan & Non Pemerintahan ,Lembaga/Organisasi Mitra, Unsur Pimpinan dan Pelaksanaan Internal & Eksternal OPD ,Pengelolaan Arsip Bidang & Sekretariat ,Website Dinas	2 Laporan	373,868,000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
					Kab. Bone, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
					Kab. Bulukumba, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
					Kab. Enrekang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
					Kab. Gowa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
					Kab. Jeneponto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
					Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					Kab. Luwu Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
					Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
					Kab. Pangkajene Kepulauan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
					Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
					Kab. Kepulauan Selayar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
					Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
					Kab. Sinjai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
					Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
					Kab. Tana Toraja, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
					Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
					Kota Pare Pare, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
					Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
					Kota Palopo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
									Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
									Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
2	8	1	1.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	100 Dokumen	25,064,600	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Lain-lain PAD Yang Sah	Ruangan & Peralatan Kantor, Pegawai Lingkup Dinas(02),Bahan Kelengkapan Pelayanan Umum, Kepegawaian & Hukum ,Tamu dari Dalam & Luar Provinsi dari Unsur Pemerintahan & Non Pemerintahan ,Lembaga/Organisasi Mitra, Unsur Pimpinan dan Pelaksanaan Internal & Eksternal OPD ,Pengelolaan Arsip Bidang & Sekretariat ,Website Dinas	100 Dokumen	25,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
2	8	1	1.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	3 Dokumen	40,000,000	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Lain-lain PAD Yang Sah	Ruangan & Peralatan Kantor, Pegawai Lingkup Dinas(02),Bahan Kelengkapan Pelayanan Umum, Kepegawaian & Hukum ,Tamu dari Dalam & Luar Provinsi dari Unsur Pemerintahan & Non Pemerintahan ,Lembaga/Organisasi Mitra, Unsur Pimpinan dan Pelaksanaan Internal & Eksternal OPD ,Pengelolaan Arsip Bidang & Sekretariat ,Website Dinas	3 Dokumen	40,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	8	1	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan ketersediaan jasa penunjang urusan kantor	85 %	845,092,390				85 %	844,943,200	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
2	8	1	1.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	35,000,000	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Lain-lain PAD Yang Sah	ASN, Tenaga Non PNS dan OPD DP3A Dalduk KB, Objek Layanan Komunikasi, Sumberdaya Air, dan Listrik OPD dan UPT PPA, Peralatan dan Perlengkapan Kantor Lingkup Dinas , Aktivitas Rutin Pelayanan Administrasi Perkantoran Lingkup Dinas	1 Laporan	35,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
2	8	1	1.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	87,099,190	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Lain-lain PAD Yang Sah	ASN, Tenaga Non PNS dan OPD DP3A Dalduk KB, Objek Layanan Komunikasi, Sumberdaya Air, dan Listrik OPD dan UPT PPA, Peralatan dan Perlengkapan Kantor Lingkup Dinas , Aktivitas Rutin Pelayanan Administrasi Perkantoran Lingkup Dinas	1 Laporan	87,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
2	8	1	1.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	50,050,000	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Lain-lain PAD Yang Sah	ASN, Tenaga Non PNS dan OPD DP3A Dalduk KB, Objek Layanan Komunikasi, Sumberdaya Air, dan Listrik OPD dan UPT PPA, Peralatan dan Perlengkapan Kantor Lingkup Dinas , Aktivitas Rutin Pelayanan Administrasi Perkantoran Lingkup Dinas	1 Laporan	50,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	8	1	1.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	672,943,200	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Lain-lain PAD Yang Sah	ASN, Tenaga Non PNS dan OPD DP3A Dalduk KB, Objek Layanan Komunikasi, Sumberdaya Air, dan Listrik OPD dan UPT PPA, Peralatan dan Perlengkapan Kantor Lingkup Dinas , Aktivitas Rutin Pelayanan Administrasi Perkantoran Lingkup Dinas	1 Laporan	672,943,200	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
2	8	1	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipeliharah	100 %	427,655,000				100 %	323,549,000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
2	8	1	1.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	12 Unit	228,498,000	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Lain-lain PAD Yang Sah	1 Pengguna Kendaraan Roda 2 Dan 4 Dp3a Dalduk KB Prov. Sulsel 2 Kantor DP3A Dalduk KB dan UPT.PPA Prov. Sulsel	12 Unit	210,350,000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
2	8	1	1.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	199,157,000	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Lain-lain PAD Yang Sah	1 Pengguna Kendaraan Roda 2 Dan 4 Dp3a Dalduk KB Prov. Sulsel 2 Kantor DP3A Dalduk KB dan UPT.PPA Prov. Sulsel	4 Unit	113,199,000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
2	8	2			PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase kab/kota yang memenuhi indikator prasyarat PUG	75 %	767,852,100				75 %	780,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
						Persentase lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan yang terstandarisasi	35 %					35 %		DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	8	2	1.01		Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi	Persentase OPD Provinsi yang Memenuhi Prasyarat PUG	90 %	319,999,600				90 %	320,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
2	8	2	1.01	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Provinsi	2 Dokumen	-	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Lain-lain PAD Yang Sah	1. OPD Prov, Tim Pokja PUG, Pelaksana PUG di 24 Kab/Kota, 2. Focal Point PUG Perangkat DaerahProvinsi dan OPD Tk .Provinsi, 3. Perencana/auditor/calon fasilitator dari OPD Provinsi dan Tim Pokja PUG	2 Dokumen	80,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
2	8	2	1.01	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Provinsi	1 Dokumen	51,999,800	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Lain-lain PAD Yang Sah	1. OPD Prov, Tim Pokja PUG, Pelaksana PUG di 24 Kab/Kota, 2. Focal Point PUG Perangkat DaerahProvinsi dan OPD Tk .Provinsi, 3. Perencana/auditor/calon fasilitator dari OPD Provinsi dan Tim Pokja PUG	1 Dokumen	110,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
2	8	2	1.01	3	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG Kewenangan Provinsi	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) termasukPerencaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Provinsi	50 Perangkat Daerah	267,999,800	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Lain-lain PAD Yang Sah	1. OPD Prov, Tim Pokja PUG, Pelaksana PUG di 24 Kab/Kota, 2. Focal Point PUG Perangkat DaerahProvinsi dan OPD Tk .Provinsi, 3. Perencana/auditor/calon fasilitator dari OPD Provinsi dan Tim Pokja PUG	50 Perangkat Daerah	130,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
									Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
									Kab. Bone, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					Kab. Bulukumba, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
					Kab. Enrekang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
					Kab. Gowa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
					Kab. Jeneponto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
					Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
					Kab. Luwu Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
					Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					Kab. Pangkajene Kepulauan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
					Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
					Kab. Kepulauan Selayar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
					Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
					Kab. Sinjai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
					Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
					Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					Kab. Tana Toraja, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
					Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
					Kota Pare Pare, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
					Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
					Kota Palopo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
					Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
					Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	8	2	1.02		Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi KeMasyarakatan Kewenangan Provinsi	Persentase perempuan pada organisasi kemasyarakatan perempuan yg mendapatkan pemberdayaan di bidang ekonomi, politik, hukum, dan social	35 %	447,852,500				35 %	365,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
2	8	2	1.02	2	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi Kewenangan Provinsi	Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan Di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Provinsi Kepada Organisasi Masyarakat di Kabuputaen/Kota	24 Organisasi	447,852,500	Kab. Bone, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Lain-lain PAD Yang Sah	lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan Tk Provinsi dan Kabupaten kota pd bidang ekonomi, Politik,hukum, Perempuan kelompok rentan, kader partai politik, DP3A Kab/kota , LBH	24 Organisasi	365,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
									Kab. Gowa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
									Kab. Luwu Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
									Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
2	8	2	1.03		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	Jumlah lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan tingkat provinsi yg terstandarisasi	15 Organisasi/Lembaga	-				15 Organisasi/Lembaga	95,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	8	2	1.03	1	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan	15 Lembaga	-	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Lain-lain PAD Yang Sah	Perempuan Penyintas Kekerasan dan TPPO, Perempuan Dalam Kondisi Khusus (Disabilitas, Lansia dan Narapidana), Perempuan Kepala Keluarga, Organisasi Pemberdayaan Perempuan , Forum PUSPA Kab/Kota dan Provinsi	15 Lembaga	95,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
2	8	3			PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Persentase kab/kota yg menyediakan layanan perlindungan perempuan yg terstandarisasi perempuan	50 %	1,375,921,308				50 %	1,179,385,500	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
2	8	3	1.01		Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kab/kota yg difasilitasi dlm pengembangan model sinergi layanan pencegahan kekerasan terhadap perempuan	17 %	230,233,500				17 %	227,631,400	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
2	8	3	1.01	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi	1 Dokumen	150,450,000	Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	1. Pengelola Sinergi Layanan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lokasi Percontohan 2. Gugus Tugas PTPPO Provinsi Kabupaten/Kota	1 Dokumen	150,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
									Kota Pare Pare, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
									Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	8	3	1.01	2	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi	24 Perangkat Daerah	79,783,500	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Lain-lain PAD Yang Sah	1. Pengelola Sinergi Layanan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lokasi Percontohan 2. Gugus Tugas PTPPO Provinsi Kabupaten/Kota	24 Perangkat Daerah	77,631,400	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
2	8	3	1.02		Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Persentase perempuan korban kekerasan yang memperoleh layanan rujukan lanjutan komprehensif	98 %	1,073,727,608				98 %	718,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
2	8	3	1.02	1	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan Masyarakat	24 Orang	622,377,608	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Lain-lain PAD Yang Sah	Perempuan dan Anak Korban ktP/ktA, Lembaga Masyarakat, Jejaring Layanan di Provinsi , Kab/Kota	24 Orang	478,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
									Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
									Kab. Bone, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
									Kab. Bulukumba, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
									Kab. Enrekang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					Kab. Gowa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
					Kab. Jeneponto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
					Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
					Kab. Luwu Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
					Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
					Kab. Pangkajene Kepulauan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
					Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					Kab. Kepulauan Selayar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
					Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
					Kab. Sinjai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
					Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
					Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
					Kab. Tana Toraja, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
					Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
									Kota Pare Pare, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
									Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
									Kota Palopo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
									Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
									Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
2	8	3	1.02	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	24 Layanan	451,350,000	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Perempuan dan Anak Korban ktP/ktA, Lembaga Masyarakat, Jejaring Layanan di Provinsi , Kab/Kota	24 Layanan	240,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
									Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					Kab. Bone, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
					Kab. Bulukumba, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
					Kab. Enrekang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
					Kab. Gowa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
					Kab. Jeneponto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
					Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
					Kab. Luwu Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
					Kab. Pangkajene Kepulauan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
					Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
					Kab. Kepulauan Selayar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
					Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
					Kab. Sinjai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
					Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
					Kab. Tana Toraja, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
					Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
					Kota Pare Pare, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
					Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
					Kota Palopo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
					Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
									Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
2	8	3	1.03		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi	Persentase kab/kota yg menyediakan layanan perlindungan perempuan yg terstandarisasi	50 %	71,960,200				50 %	233,754,100	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
2	8	3	1.03	1	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	1 Laporan	-	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Lain-lain PAD Yang Sah	1. Lembaga pemerintah. Lembaga Non Pemerintah. Jejaring UPT PPA Provinsi dan Kab/Kota. Organisasi Masyarakat. Lembaga Pemerhati Perempuan 2. Lintas Sektor Terkait tingkat Provinsi dan Kab/Kota (Koordinasi dan Sinkronsisasi Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi)	1 Laporan	100,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
									Kab. Bone, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
									Kab. Bulukumba, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
									Kab. Luwu Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
									Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
									Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
									Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
									Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
2	8	3	1.03	2	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	Jumlah Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	110 Orang	71,960,200	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Lain-lain PAD Yang Sah	1. Lembaga pemerintah. Lembaga Non Pemerintah. Jejaring UPT PPA Provinsi dan Kab/Kota. Organisasi Masyarakat. Lembaga Pemerhati Perempuan 2. Lintas Sektor Terkait tingkat Provinsi dan Kab/Kota (Koordinasi dan Sinkronsisasi Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi)	110 Orang	71,954,100	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	8	3	1.03	3	Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Provinsi	Jumlah Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus kewenangan provinsi yang Mendapatkan pemenuhan Kebutuhan Spesifik	120 Orang	-	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	1. Lembaga pemerintah. Lembaga Non Pemerintah. Jejaring UPT PPA Provinsi dan Kab/Kota. Organisasi Masyarakat. Lembaga Pemerhati Perempuan 2. Lintas Sektor Terkait tingkat Provinsi dan Kab/Kota (Koordinasi dan Sinkronsisasi Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi)	120 Orang	61,800,000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
2	8	4			PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Persentase kab/kota yg menyediakan layanan pembelajaran keluarga yg terstandarisasi	60 %	824,889,024				60 %	875,258,000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
2	8	4	1.01		Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Kewenangan Provinsi	Jumlah layanan edukasi Keluarga yang diedukasi oleh lembaga layanan pembelajaran keluarga tingkat provinsi	24 Layanan	773,868,324				24 Layanan	800,258,000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
2	8	4	1.01	2	Pelaksanaan Komunikasi, Informasi, Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak Kewenangan Provinsi yang Tersedia	2 Dokumen	773,868,324	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Lain-lain PAD Yang Sah	Pengelola Puspaga dan Masyarakat Pengguna Layanan Puspaga Tk. Provinsi	2 Dokumen	800,258,000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
2	8	4	1.02		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak Kewenangan Provinsi	Persentase kab/kota yang menyediakan layanan pembelajaran keluarga terstandarisasi	42 %	51,020,700				42 %	75,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
2	8	4	1.02	1	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan	6 Lembaga	51,020,700	Kab. Jeneponto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Lain-lain PAD Yang Sah	Pengelola Puspaga Tk. Kab/Kota	6 Lembaga	75,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
									Kab. Luwu Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
									Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
									Kab. Kepulauan Selayar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
									Kab. Sinjai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
									Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
2	8	5			PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Persentase kab/kota yang menyediakan Data Gender dan Anak yang Terupdate	87 %	314,999,000				87 %	315,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
2	8	5	1.01		Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Provinsi	Persentase Ketersediaan Data dan Informasi Gender dan Anak di Tingkat Provinsi	87 %	314,999,000				87 %	315,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	8	5	1.01	1	Penyediaan Data Gender dan Anak Provinsi	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Provinsi yang Tersedia	2 Dokumen	129,999,000	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Lain-lain PAD Yang Sah	1. Organisasi Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, Pengelola Data Gender dan Anak Pada OPD Provinsi dan Kab/Kota (Penyediaan Data Gender dan Anak Provinsi) 2. Organisasi Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, Organisasi/Lembaga Mitra DP3A Dalduk KB (Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data Provinsi)	2 Dokumen	130,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
									Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
									Kab. Bone, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
									Kab. Bulukumba, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
									Kab. Enrekang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
									Kab. Gowa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					Kab. Jeneponto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
					Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
					Kab. Luwu Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
					Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
					Kab. Pangkajene Kepulauan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
					Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
					Kab. Kepulauan Selayar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
					Kab. Sinjai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
					Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
					Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
					Kab. Tana Toraja, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
					Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
					Kota Pare Pare, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
									Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
									Kota Palopo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
									Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
									Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
2	8	5	1.01	2	Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data Provinsi	Jumlah Dokumen Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data Provinsi	2 Dokumen	185,000,000	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Lain-lain PAD Yang Sah	1. Organisasi Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, Pengelola Data Gender dan Anak Pada OPD Provinsi dan Kab/Kota (Penyediaan Data Gender dan Anak Provinsi) 2. Organisasi Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, Organisasi/Lembaga Mitra DP3A Dalduk KB (Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data Provinsi)	2 Dokumen	185,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
									Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					Kab. Bone, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
					Kab. Bulukumba, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
					Kab. Enrekang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
					Kab. Gowa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
					Kab. Jeneponto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
					Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
					Kab. Luwu Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
					Kab. Pangkajene Kepulauan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
					Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
					Kab. Kepulauan Selayar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
					Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
					Kab. Sinjai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
					Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
					Kab. Tana Toraja, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
					Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
					Kota Pare Pare, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
					Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
					Kota Palopo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
					Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
									Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
2	8	6			PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Persentase kab/kota Layak Anak	83 %	338,175,600				83 %	376,553,549	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
2	8	6	1.01		Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi	Persentase kab/kota yg difasilitasi dlm pelembagan PHA pada lembaga pemerintah, media, dan dunia usaha	100 %	230,175,600				100 %	285,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
2	8	6	1.01	1	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi	Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Usaha Kewenangan Provinsi yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha	10 Organisasi	230,175,600	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Lain-lain PAD Yang Sah	Gugus tugas Penyelenggara Layanan PHA lingkup Prov/Kab/Kota, Organisasi Non Pemerintah, Dunia Usaha, Sekolah Madra dan Forum Anak daerah Prov dan Kab/kota	10 Organisasi	285,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
									Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
									Kab. Bulukumba, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
									Kab. Enrekang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					Kab. Gowa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
					Kab. Jeneponto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
					Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
					Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
					Kab. Pangkajene Kepulauan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
					Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
					Kab. Kepulauan Selayar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
									Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
									Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
									Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
2	8	6	1.01	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi	1 Dokumen	-	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Gugus tugas Penyelenggara Layanan PHA lingkup Prov/Kab/Kota, Organisasi Non Pemerintah, Dunia Usaha, Sekolah Madra dan Forum Anak daerah Prov dan Kab/kota	1 Dokumen	-	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
2	8	6	1.02		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	Persentase kab/kota yang difasilitasi dalam penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan kualitas hidup anak	50 %	108,000,000				50 %	91,553,549	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
2	8	6	1.02	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	1 Dokumen	108,000,000	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Lain-lain PAD Yang Sah	1. Unsur Pembina dari Kabupaten/Kota dan Unsur Pelaksana di Desa Lokasi Percontohan 2. Pengurus Forum Anak Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	91,553,549	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
									Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					Kab. Bulukumba, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
					Kab. Enrekang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
					Kab. Jeneponto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
					Kab. Luwu Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
					Kab. Pangkajene Kepulauan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
					Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
					Kab. Sinjai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
									Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
									Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
									Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
									Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
2	8	6	1.02	4	Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	-	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1. Unsur Pembina dari Kabupaten/Kota dan Unsur Pelaksana di Desa Lokasi Percontohan 2. Pengurus Forum Anak Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	-	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
2	8	7			PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase Kab/Kota yang menyediakan layanan anak korban kekerasan yang terstandarisasi	50.00%	199,772,500				50.00%	300,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
2	8	7	1.01		Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kab/kota yg difasilitasi dlm pengembangan model pencegahan kekerasan terhadap anak	16.7 %	75,002,000				16.7 %	75,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	8	7	1.01	1	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi	Jumlah Organisasi yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi	24 Organisasi	75,002,000	Kab. Bone, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Lain-lain PAD Yang Sah	1. Unsur di Desa/Kel yang Terkait Pencegahan Kekerasan Seksual/Pornografi terhadap Anak 2. Unsur Pembina di Tingkat Kab/Kota	24 Organisasi	75,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
									Kab. Luwu Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
									Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
									Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
2	8	7	1.02		Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi	Persentase anak korban kekerasan yang memperoleh layanan komprehensif	95 %	75,000,000				95 %	75,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
2	8	7	1.02	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	Jumlah Layanan tindak lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	40 Layanan	75,000,000	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Lain-lain PAD Yang Sah	1. Unsur Pemerintah dan Non Pemerintah Terkait Provinsi dan Kab/Kota 2. Pengelola PATBM Desa/Kelurahan Lokasi Percontohan 3. Pembina PATBM Kab/Kota dari Unsur Pemerintah dan non Pemerintah 4. Pengelola Lembaga Layanan AMPK Anak Korban Kekerasan di Tingkat Provinsi dan Kab/Kota	40 Layanan	75,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	8	7	1.03		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Lembaga penyedia layanan perlindungan khusus anak yang dikuatkan dan dikembangkan di tingkat provinsi dan lintas kab/kota	50 %	49,770,500				50 %	150,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
2	8	7	1.03	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Usaha Kewenangan Provinsi	1 Dokumen	49,770,500	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Lain-lain PAD Yang Sah	1. Lembaga pemerintah. Lembaga Non Pemerintah. Jejaring UPT PPA Provinsi dan Kab/Kota, Organisasi Masyarakat. Lembaga Pemerhati Perempuan 2. Lintas Sektor Terkait tingkat Provinsi dan Kab/Kota (Koordinasi dan Sinkronsisasi Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi)	1 Dokumen	150,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
2	9				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN			27,842,298,157					32,918,940,942	
2	9				DINAS KETAHANAN PANGAN			27,842,298,157					32,918,940,942	DINAS KETAHANAN PANGAN
2	9	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Realisasi Kegiatan Perangkat Daerah, Persentase ASN Perangkat Daerah Berkinerja Kategori Minimal Baik, Persentase Penurunan Temuan Berdasarkan LHP	100%	18,632,165,733				100%	22,303,081,442	DINAS KETAHANAN PANGAN
2	9	1	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			715,924,300					599,001,700	DINAS KETAHANAN PANGAN
2	9	1	1.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	473,868,100	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		6 Dokumen	332,739,000	DINAS KETAHANAN PANGAN
2	9	1	1.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	3 Dokumen	4,915,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3 Dokumen	5,406,500	DINAS KETAHANAN PANGAN
2	9	1	1.01	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	3 Dokumen	4,915,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3 Dokumen	5,406,500	DINAS KETAHANAN PANGAN
2	9	1	1.01	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	3 Dokumen	17,452,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3 Dokumen	19,197,200	DINAS KETAHANAN PANGAN
2	9	1	1.01	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	3 Dokumen	17,452,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3 Dokumen	19,197,200	DINAS KETAHANAN PANGAN
2	9	1	1.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6 Laporan	115,066,200	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		6 Laporan	126,573,700	DINAS KETAHANAN PANGAN
2	9	1	1.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	82,256,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3 Laporan	90,481,600	DINAS KETAHANAN PANGAN
2	9	1	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			14,234,532,791					15,577,985,131	DINAS KETAHANAN PANGAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	9	1	1.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	134 Orang/ Bulan	13,929,592,791	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		134 Orang/ Bulan	15,322,546,631	DINAS KETAHANAN PANGAN
2	9	1	1.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	3 Dokumen	1,370,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3 Dokumen	1,507,000	DINAS KETAHANAN PANGAN
2	9	1	1.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	2 Dokumen	10,060,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2 Dokumen	11,066,000	DINAS KETAHANAN PANGAN
2	9	1	1.02	4	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	3 Dokumen	160,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3 Dokumen	99,000,000	DINAS KETAHANAN PANGAN
2	9	1	1.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3 Laporan	8,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3 Laporan	8,800,000	DINAS KETAHANAN PANGAN
2	9	1	1.02	6	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	36 Dokumen	59,840,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		36 Dokumen	65,824,000	DINAS KETAHANAN PANGAN
2	9	1	1.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	59,910,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		12 Laporan	62,905,500	DINAS KETAHANAN PANGAN
2	9	1	1.02	8	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	3 Dokumen	5,760,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3 Dokumen	6,336,000	DINAS KETAHANAN PANGAN
2	9	1	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			43,758,300					47,097,000	DINAS KETAHANAN PANGAN
2	9	1	1.03	1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen	2,980,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2 Dokumen	3,278,000	DINAS KETAHANAN PANGAN
2	9	1	1.03	4	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	24 Laporan	20,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		24 Laporan	22,000,000	DINAS KETAHANAN PANGAN
2	9	1	1.03	5	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	10,780,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4 Laporan	11,319,000	DINAS KETAHANAN PANGAN
2	9	1	1.03	6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	9,998,300	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2 Laporan	10,500,000	DINAS KETAHANAN PANGAN
2	9	1	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			125,560,000					712,373,750	DINAS KETAHANAN PANGAN
2	9	1	1.05	1	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	4 Unit	-	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4 Unit	4,200,000	DINAS KETAHANAN PANGAN
2	9	1	1.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	134 Paket	27,060,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		134 Paket	29,768,750	DINAS KETAHANAN PANGAN
2	9	1	1.05	3	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	2 Dokumen	-	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2 Dokumen	120,750,000	DINAS KETAHANAN PANGAN
2	9	1	1.05	4	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	24 Dokumen	-	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		24 Dokumen	105,000,000	DINAS KETAHANAN PANGAN
2	9	1	1.05	5	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	2 Dokumen	-	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2 Dokumen	105,000,000	DINAS KETAHANAN PANGAN
2	9	1	1.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 Orang	28,500,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		10 Orang	210,000,000	DINAS KETAHANAN PANGAN
2	9	1	1.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	20 Orang	-	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		20 Orang	61,740,000	DINAS KETAHANAN PANGAN
2	9	1	1.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	40 Orang	70,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		40 Orang	75,915,000	DINAS KETAHANAN PANGAN
2	9	1	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah			493,306,400					668,667,950	DINAS KETAHANAN PANGAN
2	9	1	1.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	20 Paket	-	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		20 Paket	52,500,000	DINAS KETAHANAN PANGAN
2	9	1	1.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	20 Paket	102,576,900	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		20 Paket	112,860,000	DINAS KETAHANAN PANGAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	9	1	1.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	20 Paket	-	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		20 Paket	52,500,000	DINAS KETAHANAN PANGAN
2	9	1	1.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	20 Paket	24,995,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		20 Paket	27,500,000	DINAS KETAHANAN PANGAN
2	9	1	1.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	20 Dokumen	30,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		20 Dokumen	33,000,000	DINAS KETAHANAN PANGAN
2	9	1	1.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	150 Laporan	323,849,500	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		150 Laporan	356,234,450	DINAS KETAHANAN PANGAN
2	9	1	1.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	2 Dokumen	11,885,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2 Dokumen	13,073,500	DINAS KETAHANAN PANGAN
2	9	1	1.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	16 Dokumen	-	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		16 Dokumen	21,000,000	DINAS KETAHANAN PANGAN
2	9	1	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			125,000,000					1,291,500,000	DINAS KETAHANAN PANGAN
2	9	1	1.07	1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	2 Unit	-	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2 Unit	315,000,000	DINAS KETAHANAN PANGAN
2	9	1	1.07	2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2 Unit	-	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2 Unit	315,000,000	DINAS KETAHANAN PANGAN
2	9	1	1.07	5	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	20 Paket	-	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		20 Paket	105,000,000	DINAS KETAHANAN PANGAN
2	9	1	1.07	9	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	-	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2 Unit	210,000,000	DINAS KETAHANAN PANGAN
2	9	1	1.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	-	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2 Unit	52,500,000	DINAS KETAHANAN PANGAN
2	9	1	1.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	125,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2 Unit	294,000,000	DINAS KETAHANAN PANGAN
2	9	1	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			2,290,823,192					2,533,765,511	DINAS KETAHANAN PANGAN
2	9	1	1.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	36 Laporan	20,996,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		36 Laporan	23,095,600	DINAS KETAHANAN PANGAN
2	9	1	1.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan	378,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		36 Laporan	433,620,000	DINAS KETAHANAN PANGAN
2	9	1	1.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	18 Laporan	12,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		18 Laporan	13,200,000	DINAS KETAHANAN PANGAN
2	9	1	1.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1,879,827,192	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Laporan	2,063,849,911	DINAS KETAHANAN PANGAN
2	9	1	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			603,260,750					872,690,400	DINAS KETAHANAN PANGAN
2	9	1	1.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	27 Unit	199,260,750	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		27 Unit	219,190,400	DINAS KETAHANAN PANGAN
2	9	1	1.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	40 Unit	-	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		40 Unit	63,000,000	DINAS KETAHANAN PANGAN
2	9	1	1.09	5	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	50 Unit	-	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		50 Unit	10,500,000	DINAS KETAHANAN PANGAN
2	9	1	1.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	50,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4 Unit	55,000,000	DINAS KETAHANAN PANGAN
2	9	1	1.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6 Unit	304,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		6 Unit	315,000,000	DINAS KETAHANAN PANGAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	9	1	1.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	10 Unit	50,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		10 Unit	210,000,000	DINAS KETAHANAN PANGAN
2	9	2			PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	Cakupan kelompok pengelola infrastruktur pendukung ketahanan pangan yang di bangun	30%	250,000,000				60%	684,500,000	DINAS KETAHANAN PANGAN
2	9	2	1.01		Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan pada berbagai Sektor sesuai Kewenangan Daerah Provinsi			250,000,000					684,500,000	DINAS KETAHANAN PANGAN
2	9	2	1.01	1	Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan	Jumlah Lumbung Pangan yang Tersedia	6 Unit	200,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		6 Unit	220,000,000	DINAS KETAHANAN PANGAN
2	9	2	1.01	2	Penyediaan Infrastruktur Lantai Jemur	Jumlah Lantai Jemur yang Tersedia	6 Unit	-	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		6 Unit	236,250,000	DINAS KETAHANAN PANGAN
2	9	2	1.01	3	Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya	Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Yang Tersedia	2 Unit	-	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2 Unit	157,500,000	DINAS KETAHANAN PANGAN
2	9	2	1.01	4	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Infrastruktur Logistik	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi dalam Rangka Penyediaan Infrastruktur Logistik	8 Laporan	50,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		8 Laporan	55,000,000	DINAS KETAHANAN PANGAN
2	9	2	1.01	5	Penyusunan Rencana dan Peta Jalan Kebutuhan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan	Jumlah Rencana dan Peta Jalan Kebutuhan Infrastruktur untuk Mendukung Kemandirian Pangan	4 Dokumen	-	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4 Dokumen	15,750,000	DINAS KETAHANAN PANGAN
2	9	3			PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Persentase Ketersediaan Pangan Utama (%):		5,820,136,524					5,855,359,500	DINAS KETAHANAN PANGAN
						* Beras	386,08 %					386,08 %		DINAS KETAHANAN PANGAN
						* Jagung	58, 20 %					58, 20 %		DINAS KETAHANAN PANGAN
						* Kedelai	27,55 %					27,55 %		DINAS KETAHANAN PANGAN
						Ketersediaan Energi (Kkal/Kapita/hari)	3.929.20 Kkal/Kapita/hari					3.929.20 Kkal/Kapita/hari		DINAS KETAHANAN PANGAN
						Ketersediaan Protein (gr/Kapita/hari)	174.5 gr/Kapita/hari					174.5 gr/Kapita/hari		DINAS KETAHANAN PANGAN
2	9	3	1.01		Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan			1,575,000,000					1,037,359,500	DINAS KETAHANAN PANGAN
2	9	3	1.01	1	Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	4 Laporan	120,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4 Laporan	55,000,000	DINAS KETAHANAN PANGAN
2	9	3	1.01	2	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang Tersedia	4 Laporan	250,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4 Laporan	55,000,000	DINAS KETAHANAN PANGAN
2	9	3	1.01	3	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	3 Laporan	190,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3 Laporan	55,000,000	DINAS KETAHANAN PANGAN
2	9	3	1.01	4	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	12 Dokumen	290,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		12 Dokumen	55,000,000	DINAS KETAHANAN PANGAN
2	9	3	1.01	5	Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan	Jumlah Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan yang Dikembangkan	3 Unit	725,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3 Unit	440,000,000	DINAS KETAHANAN PANGAN
2	9	3	1.01	6	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	5 Dokumen	-	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5 Dokumen	377,359,500	DINAS KETAHANAN PANGAN
2	9	3	1.02		Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Provinsi			510,000,000					187,000,000	DINAS KETAHANAN PANGAN
2	9	3	1.02	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Cadangan Pangan Provinsi	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi pengendalian Cadangan Pangan Provinsi	6 Laporan	220,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		6 Laporan	55,000,000	DINAS KETAHANAN PANGAN
2	9	3	1.02	2	Penyusunan Rencana Kebutuhan Pangan Lokal	Rencana Kebutuhan Pangan Lokal	3 Dokumen	220,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3 Dokumen	55,000,000	DINAS KETAHANAN PANGAN
2	9	3	1.02	3	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	3 Laporan	50,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3 Laporan	55,000,000	DINAS KETAHANAN PANGAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	9	3	1.02	4	Pemeliharaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi yang Terpelihara	180 Ton	20,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		180 Ton	22,000,000	DINAS KETAHANAN PANGAN
2	9	3	1.03		Penentuan Harga Minimum Daerah untuk Pangan Lokal yang tidak ditetapkan oleh Pemerintah Pusat			30,000,000					33,000,000	DINAS KETAHANAN PANGAN
2	9	3	1.03	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Penentuan Harga Minimum Pangan Pokok Lokal	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi penentuan Harga Minimum Pangan Pokok Lokal	8 Laporan	30,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		8 Laporan	33,000,000	DINAS KETAHANAN PANGAN
2	9	3	1.04		Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi Melalui Media Provinsi			3,705,136,524					4,598,000,000	DINAS KETAHANAN PANGAN
2	9	3	1.04	1	Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	12 Dokumen	2,805,136,524	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		12 Dokumen	4,400,000,000	DINAS KETAHANAN PANGAN
2	9	3	1.04	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi, Edukasi, dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA)	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi, Edukasi, dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA)	12 Laporan	870,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		12 Laporan	165,000,000	DINAS KETAHANAN PANGAN
2	9	3	1.04	3	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi Per Kapita Per Tahun	4 Laporan	30,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4 Laporan	33,000,000	DINAS KETAHANAN PANGAN
2	9	4			PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Jumlah Daerah Rawan Pangan	19	2,125,003,800				19	3,680,000,000	DINAS KETAHANAN PANGAN
2	9	4	1.01		Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan kewenangan Provinsi			50,000,000					55,000,000	DINAS KETAHANAN PANGAN
2	9	4	1.01	1	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan Provinsi yang Dimutakhirkan	3 Dokumen	50,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3 Dokumen	55,000,000	DINAS KETAHANAN PANGAN
2	9	4	1.02		Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Provinsi			2,075,003,800					3,625,000,000	DINAS KETAHANAN PANGAN
2	9	4	1.02	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Provinsi	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Provinsi	3 Dokumen	2,075,003,800	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3 Dokumen	3,520,000,000	DINAS KETAHANAN PANGAN
2	9	4	1.02	2	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan Pada Kerawanan Pangan yang Mencakup Lebih Dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	4 Dokumen	-	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4 Dokumen	105,000,000	DINAS KETAHANAN PANGAN
2	9	5			PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan	100%	1,014,992,100				100%	396,000,000	DINAS KETAHANAN PANGAN
2	9	5	1.01		Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota			1,014,992,100					396,000,000	DINAS KETAHANAN PANGAN
2	9	5	1.01	1	Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Provinsi	Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Provinsi Yang Dibina	36 Dokumen	589,999,500	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		36 Dokumen	198,000,000	DINAS KETAHANAN PANGAN
2	9	5	1.01	2	Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	75 Sertifikat	225,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		75 Sertifikat	55,000,000	DINAS KETAHANAN PANGAN
2	9	5	1.01	3	Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	55 Dokumen	119,999,500	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		55 Dokumen	55,000,000	DINAS KETAHANAN PANGAN
2	9	5	1.01	4	Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	9 Dokumen	29,993,100	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		9 Dokumen	33,000,000	DINAS KETAHANAN PANGAN
2	9	5	1.01	5	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu Dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan	9 Dokumen	50,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		9 Dokumen	55,000,000	DINAS KETAHANAN PANGAN
2	10				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN			622,000,000					1,623,675,513	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	10				DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN			622,000,000					1,623,675,513	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
2	10	3			PROGRAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM	Persentase pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang selesai tepat waktu	100 %	140,000,000				100 %	182,009,150	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
2	10	3	1.01		Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum di Wilayah Provinsi	Jumlah Dokumen pengadaan tanah yang ditetapkan bagi pembangunan untuk kepentingan umum	1 Dokumen	140,000,000				1 Dokumen	182,009,150	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
2	10	3	1.01	1	Pemberitahuan, Pendataan Awal Lokasi, Konsultasi Publik Rencana Pembangunan dan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum	Jumlah Dokumen Pemberitahuan, Pendataan Awal Lokasi, Konsultasi Publik Rencana Pembangunan dan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum	1 Dokumen	140,000,000	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Masyarakat, Stakeholder dan Aparat Pemerintahan	1 Dokumen	182,009,150	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
2	10	4			PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Persentase sengketa tanah negara kewenangan provinsi yang difasilitasi	100 %	147,000,000				100 %	259,839,350	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
2	10	4	1.01		Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah sengketa tanah yang difasilitasi dalam Penyelesaian sengketa tanah	1 Kasus	147,000,000				1 Kasus	259,839,350	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
2	10	4	1.01	1	Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Data Sengketa, Konflik dan Perkara dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	7 Dokumen	49,000,000	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Masyarakat, Stakeholder dan Aparat Pemerintahan	7 Dokumen	133,405,675	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
2	10	4	1.01	2	Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Sengketa dan Konflik Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	7 Berita Acara	98,000,000	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Masyarakat, Stakeholder dan Aparat Pemerintahan	7 Berita Acara	126,433,675	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
2	10	10			PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	Persentase penatagunaan tanah sesuai penyelenggaraan penatagunaan tanah di 24 kab/kota	100 %	335,000,000				100 %	1,181,827,013	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
2	10	10	1.01		Perencanaan Penggunaan Tanah yang Hamparannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah dokumen perencanaan penggunaan tanah yang hamparannya lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	1 Dokumen	335,000,000				1 Dokumen	1,181,827,013	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
2	10	10	1.01	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam 1 (Satu) Provinsi	1 Laporan	267,000,000	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Masyarakat, Stakeholder dan Aparat Pemerintahan	1 Laporan	138,226,225	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
2	10	10	1.01	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kewenangan Provinsi	1 Dokumen	68,000,000	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Masyarakat, Stakeholder dan Aparat Pemerintahan	1 Dokumen	1,043,600,788	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
2	11				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP			23,908,712,410					24,846,730,611	
2	11				DINAS PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP			23,908,712,410					24,846,730,611	DINAS PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
2	11	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Realisasi Kegiatan Perangkat Daerah, Persentase ASN Perangkat Daerah Berkinerja Kategori Minimal Baik, Persentase Penurunan Temuan Berdasarkan LHP	100%	14,660,424,272				100%	16,246,530,611	DINAS PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
2	11	1	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			97,212,500					175,800,000	DINAS PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
2	11	1	1.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 Dokumen	7,800,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7 Dokumen	7,800,000	DINAS PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	11	1	1.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	3,500,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Dokumen	4,500,000	DINAS PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
2	11	1	1.01	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	3,500,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Dokumen	4,500,000	DINAS PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
2	11	1	1.01	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	3,500,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Dokumen	4,500,000	DINAS PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
2	11	1	1.01	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	3,500,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Dokumen	4,500,000	DINAS PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
2	11	1	1.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 Laporan	75,412,500	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		12 Laporan	150,000,000	DINAS PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
2	11	1	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			12,948,661,019					13,028,660,895	DINAS PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
2	11	1	1.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	104 Orang/ Bulan	12,878,661,019	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		104 Orang/ Bulan	12,878,660,895	DINAS PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
2	11	1	1.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5 Laporan	70,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5 Laporan	150,000,000	DINAS PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
2	11	1	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			-					58,500,000	DINAS PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
2	11	1	1.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	13 Orang	-	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		13 Orang	58,500,000	DINAS PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
2	11	1	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah			387,493,600					1,017,798,700	DINAS PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
2	11	1	1.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	10,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Paket	6,760,000	DINAS PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
2	11	1	1.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	67,500,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Paket	313,843,500	DINAS PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
2	11	1	1.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	59,997,500	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Paket	248,920,000	DINAS PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
2	11	1	1.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	45 Laporan	249,996,100	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		45 Laporan	448,275,200	DINAS PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
2	11	1	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			983,757,153					983,483,016	DINAS PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
2	11	1	1.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	931,758,216	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		12 Laporan	931,758,216	DINAS PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
2	11	1	1.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	51,998,937	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		12 Laporan	51,724,800	DINAS PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
2	11	1	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			243,300,000					982,288,000	DINAS PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
2	11	1	1.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	11 Unit	235,800,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		11 Unit	932,288,000	DINAS PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
2	11	1	1.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	7,500,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Unit	50,000,000	DINAS PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
2	11	2			PROGRAM Perencanaan LINGKUNGAN HIDUP	Persentase pemenuhan dokumen perencanaan lingkungan hidup	100%	600,000,000				100%	500,000,000	DINAS PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
2	11	2	1.01		Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi			350,000,000					250,000,000	DINAS PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
2	11	2	1.01	1	Penyusunan dan Penetapan RPPLH Provinsi	Jumlah muatan Hasil Penyusunan dan penetapan RPPLH Provinsi yang Disusun	1 Dokumen	350,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Dokumen	250,000,000	DINAS PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	11	2	1.02		Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi			250,000,000					250,000,000	DINAS PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
2	11	2	1.02	2	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Provinsi yang Disusun	1 Dokumen	250,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Dokumen	250,000,000	DINAS PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
2	11	3			PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase penurunan emisi gas rumah kaca (GRK) dari sektor limbah	5,40%	1,730,198,485				5,40%	1,700,200,000	DINAS PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
2	11	3	1.01		Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkugan Hidup			1,650,199,285					1,620,200,000	DINAS PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
2	11	3	1.01	1	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	1 Dokumen	199,999,800	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Dokumen	120,000,000	DINAS PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
2	11	3	1.01	2	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi GRK dari sektor lingkungan hidup yang Dilaksanakan	1 Dokumen	50,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Dokumen	100,000,000	DINAS PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
2	11	3	1.01	3	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Provinsi	Jumlah Pengambilan Contoh Uji, Pengujian Parameter Kualitas Lingkungan dan Dokumen Mutu yang Dilaksanakan	1 Dokumen	1,400,199,485	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Dokumen	1,400,200,000	DINAS PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
2	11	3	1.03		Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup			79,999,200					80,000,000	DINAS PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
2	11	3	1.03	4	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi	1 Dokumen	79,999,200	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Dokumen	80,000,000	DINAS PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
2	11	4			PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Persentase Tingkat pengelolaan Keanekeragaman Hayati (KeHaTi)	100%	100,000,000				100%	100,000,000	DINAS PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
2	11	4	1.01		Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Provinsi			100,000,000					100,000,000	DINAS PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
2	11	4	1.01	3	Pengelolaan Kebun Raya	Luas Kebun Raya yang Dikelola lingkup Kewenangan Provinsi	27 Ha	100,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		27 Ha	100,000,000	DINAS PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
2	11	5			PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Cakupan limbah yang dikelola	98,00%	5,549,999,754				98,00%	5,550,000,000	DINAS PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
2	11	5	1.01		Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi			5,549,999,754					5,550,000,000	DINAS PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
2	11	5	1.01	1	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Pengumpulan Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Fasilitasi Persetujuan/Izin Pengumpulan Limbah B3 lintas Kabupaten/Kota dalam Satu Provinsi yang Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	1 Dokumen	49,999,800	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Dokumen	50,000,000	DINAS PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
2	11	5	1.01	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Pusat dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan Yang Bukan Kewenangan Provinsi Serta Pelaksanaan Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi yang Sesuai Kewenangannya	1 Dokumen	5,499,999,954	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Dokumen	5,500,000,000	DINAS PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
2	11	6			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persentase ketaatan pemrakarsa Usaha Terhadap Izin Lingkungan dan Izin PPLH	26%	149,997,200				26%	150,000,000	DINAS PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
2	11	6	1.01		Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi			149,997,200					150,000,000	DINAS PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	11	6	1.01	1	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan operasi yang diberikan	7 Dokumen	50,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7 Dokumen	50,000,000	DINAS PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
2	11	6	1.01	3	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Laporan dari Usaha dan/atau Kegiatan yang Diawasi Izin Lingkungan, Persetujuan Lingkungan, surat Kelayakan Operasi oleh Pemerintah Daerah Provinsi	65 Laporan	99,997,200	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		65 Laporan	100,000,000	DINAS PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
2	11	7			PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN Masyarakat HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	Persentase pengakuan keberadaan MHA , kearifan lokal dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	100%	49,999,800				100%	50,000,000	DINAS PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
2	11	7	1.01		Pengakuan MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH			49,999,800					50,000,000	DINAS PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
2	11	7	1.01	1	Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH	1 Dokumen	49,999,800	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Dokumen	50,000,000	DINAS PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
2	11	8			PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Cakupan Lembaga atau Kelompok Masyarakat yang di tingkatkan kapasitasnya dalam PPLH	100%	100,000,000				100%	50,000,000	DINAS PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
2	11	8	1.01		Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga KeMasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi			100,000,000					50,000,000	DINAS PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
2	11	8	1.01	2	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	1 Dokumen	100,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Dokumen	50,000,000	DINAS PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
2	11	9			PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Jumlah Penghargaan Lingkungan Hidup Yang di Berikan	5 Penghargaan	149,999,900				5 Penghargaan	300,000,000	DINAS PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
2	11	9	1.01		Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi			149,999,900					300,000,000	DINAS PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
2	11	9	1.01	1	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantrophi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	138 Entitas	149,999,900	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		138 Entitas	300,000,000	DINAS PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
2	11	10			PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Cakupan rekomendasi penanganan pengaduan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti	100%	149,999,900				100%	100,000,000	DINAS PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
2	11	10	1.01		Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Provinsi			149,999,900					100,000,000	DINAS PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
2	11	10	1.01	1	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Provinsi	Jumlah Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Provinsi yang Ditindaklanjuti/Diitangani	20 Dokumen	84,999,900	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		20 Dokumen	50,000,000	DINAS PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
2	11	10	1.01	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau Melalui Pengadilan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau Melalui Pengadilan	14 Dokumen	65,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		14 Dokumen	50,000,000	DINAS PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
2	11	11			PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Presentase Sampah Perkotaan yang tertangani	74%	668,093,099				74%	100,000,000	DINAS PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
2	11	11	1.01		Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional			668,093,099					100,000,000	DINAS PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
2	11	11	1.01	1	Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Teknis Penanganan Sampah Regional	Jumlah Laporan Rencana, Kebijakan dan Teknis Penanganan Sampah Regional yang Disusun	1 Laporan	500,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Laporan	50,000,000	DINAS PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	11	11	1.01	5	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional yang Dilaksanakan	1 Dokumen	168,093,099	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Dokumen	50,000,000	DINAS PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
2	12				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL			11,340,024,246					19,176,195,325	
2	12				DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL			11,340,024,246					19,176,195,325	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
2	12	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase ASN Perangkat Daerah Berkinerja Kategori Minimal Baik	100 %	10,090,024,246				100 %	13,521,195,325	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
						Persentase Penurunan Temuan Berdasarkan LHP	100 %					100 %		DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
						Persentase Realisasi Kegiatan Perangkat Daerah	100 %					100 %		DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
2	12	1	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentasi Keterpenuhan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan kinerja tepat waktu	100 %	300,000,000				100 %	945,000,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
2	12	1	1.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	130,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3 Dokumen	525,000,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
2	12	1	1.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	5,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Dokumen	15,750,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
2	12	1	1.01	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	7,500,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Dokumen	15,750,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
2	12	1	1.01	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	5,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Dokumen	15,750,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
2	12	1	1.01	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	7,500,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Dokumen	15,750,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
2	12	1	1.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	15,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4 Laporan	78,750,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
2	12	1	1.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	130,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Laporan	278,250,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
2	12	1	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentasi Keterpenuhan Laporan Administrasi Keuangan tepat waktu	100 %	8,274,219,702				100 %	9,273,760,220	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
2	12	1	1.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	65 Orang	8,174,219,702	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		65 Orang	8,854,810,220	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
2	12	1	1.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	4 Dokumen	10,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4 Dokumen	84,000,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
2	12	1	1.02	4	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	5 Dokumen	15,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5 Dokumen	73,500,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
2	12	1	1.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	-	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Laporan	103,950,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	12	1	1.02	6	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	6 Dokumen	-	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		6 Dokumen	52,500,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
2	12	1	1.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18 Laporan	70,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		18 Laporan	57,750,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
2	12	1	1.02	8	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	5,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Dokumen	47,250,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
2	12	1	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentasi Keterpenuhan Laporan Administrasi Barang Milik Daerah	100 %	25,472,750				100 %	136,518,188	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
2	12	1	1.03	1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	25,472,750	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Dokumen	32,491,664	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
2	12	1	1.03	5	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	-	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Laporan	31,500,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
2	12	1	1.03	6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	-	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Laporan	41,026,524	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
2	12	1	1.03	7	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	-	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Dokumen	31,500,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
2	12	1	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentasi Keterpenuhan kebutuhan Pegawai	100 %	-				100 %	579,398,400	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
2	12	1	1.05	1	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	1 Unit	-	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Unit	17,325,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
2	12	1	1.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	-	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Paket	57,750,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
2	12	1	1.05	3	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	-	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Dokumen	40,748,400	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
2	12	1	1.05	4	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	-	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Dokumen	57,750,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
2	12	1	1.05	5	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	-	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Dokumen	75,075,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
2	12	1	1.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	4 Orang	-	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4 Orang	57,750,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
2	12	1	1.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	72 Orang	-	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		72 Orang	136,500,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
2	12	1	1.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	72 Orang	-	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		72 Orang	136,500,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
2	12	1	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentasi Keterpenuhan Kebutuhan Administrasi Umum	100 %	256,400,000				100 %	730,328,517	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
2	12	1	1.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	-	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Paket	11,550,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	12	1	1.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	-	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Paket	11,550,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
2	12	1	1.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	-	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Paket	17,325,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
2	12	1	1.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	4,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Paket	69,878,193	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
2	12	1	1.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	2,400,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Dokumen	28,875,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
2	12	1	1.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	50,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Laporan	115,500,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
2	12	1	1.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	200,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Laporan	378,000,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
2	12	1	1.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	-	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Dokumen	39,900,324	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
2	12	1	1.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	-	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Dokumen	57,750,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
2	12	1	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah	10 unit	-				10 unit	362,250,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
2	12	1	1.07	5	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	-	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Paket	63,000,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
2	12	1	1.07	7	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	10 Unit	-	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		10 Unit	262,500,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
2	12	1	1.07	8	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	3 Unit	-	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3 Unit	36,750,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
2	12	1	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentasi pemenuhan Jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	535,804,544				100 %	410,550,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
2	12	1	1.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	20,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Laporan	11,550,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
2	12	1	1.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	515,804,544	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Laporan	399,000,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
2	12	1	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah	10 unit	698,127,250				10 unit	1,083,390,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
2	12	1	1.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 Unit	112,130,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Unit	103,950,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
2	12	1	1.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	7 Unit	175,997,250	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7 Unit	271,425,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
2	12	1	1.09	7	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	20 Unit	10,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		20 Unit	9,240,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	12	1	1.09	8	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	2 Unit	-	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2 Unit	5,775,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
2	12	1	1.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	400,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2 Unit	693,000,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
2	12	2			PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Persentase Penduduk ber KTP persatuan Penduduk	98%	205,000,000				98%	1,260,000,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
						Persentase penerbitan KTP	98%					98%		DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
						Persentase Perekaman Kartu Tanda Penduduk	100%					100%		DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
						Persentase Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA)	40%					40%		DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
2	12	2	1.01		Pelayanan Pendaftaran Kependudukan	Persentase Kab/Kota yang mendapatkan pelayanan Pendaftaran Penduduk	100 %	125,000,000				100 %	525,000,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
2	12	2	1.01	2	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan Lintas Kabupaten/Kota dalam Satu Provinsi	Jumlah Dokumen Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan Lintas Kabupaten/Kota dalam Satu Provinsi	1 Dokumen	-	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Dokumen	210,000,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
2	12	2	1.01	3	Penataan Tata Kelola Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk Skala Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil tata kelola Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk Skala Provinsi	1 Dokumen	75,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Dokumen	157,500,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
2	12	2	1.01	5	Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Penyusunan Pelaporan Adminduk terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Penyusunan Pelaporan Adminduk terkait Pendaftaran Penduduk yang Disusun	1 Dokumen	50,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Dokumen	157,500,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
2	12	2	1.02		Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan	Persentase Kab/Kota yang difasilitasi dalam penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	100 %	5,000,000				100 %	367,500,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
2	12	2	1.02	1	Fasilitasi Terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pendaftaran Penduduk	1 Laporan	5,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Laporan	210,000,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
2	12	2	1.02	2	Sosialisasi Terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil sosialisasi Pendaftaran Penduduk	1 Laporan	-	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Laporan	157,500,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
2	12	2	1.03		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan	Persentase Kab/Kota yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	100 %	75,000,000				100 %	367,500,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
2	12	2	1.03	1	Pembinaan dan Pengawasaan terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan terkait Pendaftaran Penduduk	1 Laporan	-	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Laporan	105,000,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
2	12	2	1.03	2	Bimbingan Teknis terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pendaftaran Penduduk	1 Laporan	75,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Laporan	262,500,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
2	12	3			PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Persenyase Bayi ber akte kelahiran	98.00%	345,000,000				98.00%	1,460,000,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
						Persentase Pasangan ber akte nikah	37.00%					37.00%		DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
						Persentase penerbitan akta kelahiran	95.00%					95.00%		DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						Persentase Penduduk umur 0-17 Tahun dengan kepemilikan akte kelahiran	90.00%					90.00%		DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
						Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran	47.00%					47.00%		DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
						Persentase Akta Kematian yang Diterbitkan	100.00%					100.00%		DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
2	12	3	1.02		Penyelenggaraan Pencatatan Sipil di Provinsi	Persentasi Kab/Kota yang difasilitasi dalam penyelenggaraan Pencatatan Sipil	100 %	270,000,000				100 %	782,500,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
2	12	3	1.02	1	Fasilitasi terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pencatatan Sipil	1 Laporan	45,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Laporan	210,000,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
2	12	3	1.02	2	Sosialisasi terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi terkait Pencatatan Sipil	1 Laporan	150,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Laporan	310,000,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
2	12	3	1.02	5	Pemberian Konsultasi Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Konsultasi Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	1 Laporan	75,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Laporan	262,500,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
2	12	3	1.03		Pemberian Konsultasi Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Persentasi Kab/Kota yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pencatatan Sipil	100 %	75,000,000				100 %	677,500,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
2	12	3	1.03	1	Pembinaan dan Pengawasaan terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pencatatan Sipil	1 Laporan	75,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Laporan	367,500,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
2	12	3	1.03	2	Bimbingan Teknis terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil	1 Laporan	-	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Laporan	310,000,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
2	12	4			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Persentase Ketersediaan dan Pemanfaatan Database Kependudukan Skala Provinsi	100 %	600,000,000				100 %	2,305,000,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
2	12	4	1.01		Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentasi Pengelolaan Data Kependudukan skala provinsi	100 %	300,000,000				100 %	310,000,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
2	12	4	1.01	2	Penyusunan Tata Cara Pengelolaan Data Kependudukan yang Bersifat Data Perseorangan, Data Agregat dan Data Pribadi di Provinsi dan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Tata Cara Pengelolaan Data Kependudukan yang Bersifat Data Perseorangan, Data Agregat dan Data Pribadi di Provinsi dan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	300,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Dokumen	310,000,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
2	12	4	1.02		Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi	Persentase Kab/Kota/OPD/Lembaga yang difasilitasi dalam penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	100 %	100,000,000				100 %	1,312,500,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
2	12	4	1.02	2	Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan	1 Laporan	50,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Laporan	525,000,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
2	12	4	1.02	3	Komunikasi, Informasi dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	1 Dokumen	-	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Dokumen	262,500,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
2	12	4	1.02	5	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Hasil pemanfaatan data kependudukan	1 Dokumen	50,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Dokumen	525,000,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
2	12	4	1.03		Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi	Persentase Kab/Kota yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	100 %	200,000,000				100 %	682,500,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
2	12	4	1.03	1	Pembinaan dan Pengawasan tekait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	1 Laporan	100,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Laporan	420,000,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	12	4	1.03	2	Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	Jumlah Sumber Daya Manusia yang Mengikuti Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	60 Orang	100,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		60 Orang	262,500,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
2	12	5			PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Persentase Ketersediaan dan Pemanfaatan Database Kependudukan Skala Provinsi	100 %	100,000,000				100 %	630,000,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
2	12	5	1.01		Penyediaan Profil Kependudukan	Persentasi Ketersediaan Profil dan data Kependudukan skala Provinsi	100 %	100,000,000				100 %	630,000,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
2	12	5	1.01	1	Penyediaan Data Kependudukan Provinsi	Jumlah Dokumen penyediaan data kependudukan Provinsi	3 Dokumen	100,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3 Dokumen	630,000,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
2	13				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA			18,886,759,215					20,211,162,231	
2	13				DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA			18,886,759,215					20,211,162,231	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	13	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase ASN Perangkat Daerah Berkinerja Kategori Minimal Baik	100%	14,893,059,104				100%	13,824,797,356	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
						Persentase Penurunan Temuan Berdasarkan LHP	100%					100%		DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
						Persentase Realisasi Kegiatan Perangkat Daerah	100%					100%		DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	13	1	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			455,723,300					440,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	13	1	1.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	103,255,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3 Dokumen	100,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	13	1	1.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	40,881,300	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Dokumen	35,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	13	1	1.01	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	31,633,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Dokumen	35,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	13	1	1.01	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	34,094,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Dokumen	35,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	13	1	1.01	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	40,848,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Dokumen	35,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	13	1	1.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan	107,012,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3 Laporan	100,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	13	1	1.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Laporan	98,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5 Laporan	100,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	13	1	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			11,655,278,044					10,324,837,404	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	13	1	1.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	0 Orang/ Bulan	11,368,592,044	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		0 Orang/ Bulan	10,203,102,404	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	13	1	1.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	960 Dokumen	-	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		960 Dokumen	13,335,000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	13	1	1.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	79 Dokumen	86,389,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		79 Dokumen	10,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	13	1	1.02	4	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	16 Dokumen	-	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		16 Dokumen	7,560,000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	13	1	1.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	49,394,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2 Laporan	50,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	13	1	1.02	6	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	86,580,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Dokumen	20,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	13	1	1.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	19 Laporan	64,323,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		19 Laporan	20,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	13	1	1.02	8	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2 Dokumen	-	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2 Dokumen	840,000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	13	1	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			67,332,000					89,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	13	1	1.03	1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen	-	Kota Makassar, Rappocini, Banta-Bantaeng	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2 Dokumen	17,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	13	1	1.03	6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	67,332,000	Kota Makassar, Rappocini, Banta-Bantaeng	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		12 Laporan	72,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	13	1	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			1,241,344,160					358,791,750	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	13	1	1.05	1	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	1 Unit	1,120,352,160	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Unit	15,750,000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	13	1	1.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	4 Paket	116,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4 Paket	244,109,250	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	13	1	1.05	3	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	6 Dokumen	-	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		6 Dokumen	15,750,000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	13	1	1.05	4	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	5 Dokumen	4,992,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5 Dokumen	5,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	13	1	1.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 Orang	-	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		10 Orang	10,300,000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	13	1	1.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	85 Orang	-	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			85 Orang	67,882,500	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	13	1	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah			337,561,600					427,966,526	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	13	1	1.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	4,993,000	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4 Paket	5,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	13	1	1.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	2,499,500	Kota Makassar, Rappocini, Banta-Bantaeng	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2 Paket	2,500,000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	13	1	1.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket	20,000,700	Kota Makassar, Rappocini, Banta-Bantaeng	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2 Paket	20,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	13	1	1.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	-	Kota Makassar, Rappocini, Banta-Bantaeng	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2 Paket	24,937,500	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	13	1	1.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	2,500,000	Kota Makassar, Rappocini, Banta-Bantaeng	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2 Paket	2,500,000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	13	1	1.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	51,840,000	Kota Makassar, Rappocini, Banta-Bantaeng	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		12 Laporan	50,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	13	1	1.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	253,238,400	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		12 Laporan	318,609,026	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	13	1	1.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	2 Dokumen	2,490,000	Kota Makassar, Rappocini, Banta-Bantaeng	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2 Dokumen	2,500,000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	13	1	1.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	-	Kota Makassar, Rappocini, Banta-Bantaeng	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Dokumen	1,920,000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	13	1	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			297,102,500					999,320,100	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	13	1	1.07	2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	-	Kota Makassar, Rappocini, Banta-Bantaeng	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Unit	553,740,000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	13	1	1.07	5	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	10 Paket	188,100,000	Kota Makassar, Rappocini, Banta-Bantaeng	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		10 Paket	60,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	13	1	1.07	7	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	5 Unit	59,002,500	Kota Makassar, Rappocini, Banta-Bantaeng	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5 Unit	50,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	13	1	1.07	8	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	2 Unit	50,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2 Unit	25,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	13	1	1.07	9	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	-	Kota Makassar, Rappocini, Banta-Bantaeng	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Unit	160,580,100	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	13	1	1.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	-	Kota Makassar, Rappocini, Banta-Bantaeng	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2 Unit	150,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	13	1	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			403,817,500					964,881,576	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	13	1	1.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	16,802,500	Kota Makassar, Rappocini, Banta-Bantaeng	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		12 Laporan	30,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	13	1	1.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	302,391,000	Kota Makassar, Rappocini, Banta-Bantaeng	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		12 Laporan	302,391,000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	13	1	1.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	84,624,000	Kota Makassar, Rappocini, Banta-Bantaeng	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		12 Laporan	632,490,576	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	13	1	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			434,900,000					220,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	13	1	1.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	5 Unit	325,560,000	Kota Makassar, Rappocini, Banta-Bantaeng	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5 Unit	50,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	13	1	1.09	5	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	5 Unit	-	Kota Makassar, Rappocini, Banta-Bantaeng	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5 Unit	50,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	13	1	1.09	7	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	0 Unit	9,340,000	Kota Makassar, Rappocini, Banta-Bantaeng	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		0 Unit	25,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	15 Unit					15 Unit		DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	13	1	1.09	8	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	0 Unit	-	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		0 Unit	30,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
						Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	15 Unit					15 Unit		DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	13	1	1.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	100,000,000	Kota Makassar, Rappocini, Banta-Bantaeng	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Unit	35,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	13	1	1.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	-	Kota Makassar, Rappocini, Banta-Bantaeng	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2 Unit	30,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	13	2			PROGRAM PENATAAN DESA	Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik (Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa dalam kondisi baik)	100%	99,999,700				100%	620,328,125	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
						Persentase peningkatan status desa mandiri	1,33%					1,33%		DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
						Persentase pengentasan desa tertinggal	15 %					15 %		DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	13	2	1.01		Penatausahaan Penetapan Susunan Kelembagaan, Pengisian Jabatan, dan Masa Jabatan Kepala Desa dan Desa Adat			99,999,700					620,328,125	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	13	2	1.01	1	Identifikasi, Inventarisasi dan Fasilitasi Penataan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dan Desa Adat yang menjadi kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi, Inventarisasi dan Fasilitasi Penataan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dan Desa Adat yang menjadi kewenangan Provinsi yang Dilaksanakan	3 Dokumen	-	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3 Dokumen	100,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	13	2	1.01	2	Fasilitasi Kelembagaan Desa dan Desa Adat	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kelembagaan Desa dan Desa Adat	2 Dokumen	-	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2 Dokumen	144,703,125	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	13	2	1.01	3	Fasilitasi Kabupaten/Kota dan Desa dalam rangka Penataan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kabupaten/Kota dan Desa dalam rangka Penataan Desa	1 Dokumen	99,999,700	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Dokumen	100,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	13	2	1.01	4	Penyediaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Pemerintahan Desa	jumlah Prasarana dan Sarana Pelayanan Pemerintahan Desa	12 Unit	-	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		12 Unit	275,625,000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	13	3			PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	Persentase Desa yang menjalin kerjasama	0,88%	499,975,700				0,88%	300,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	13	3	1.01		Fasilitasi Kerja Sama antar desa yang Menjadi Kewenangan Provinsi			499,975,700					300,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	13	3	1.01	1	Fasilitasi Kerja Sama antar Desa Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Desa Lintas Kabupaten/Kota	5 Dokumen	99,996,700	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5 Dokumen	100,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	13	3	1.01	2	Fasilitasi Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga	Jumlah Dokumen Kerja Sama dengan pihak ketiga yang Dilaksanakan	5 Dokumen	99,999,300	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5 Dokumen	100,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	13	3	1.01	3	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	1 Dokumen	299,979,700	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Dokumen	100,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	13	4			PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase BUM Desa Yang diFasilitasi	11.81%	1,177,531,111				11.81%	3,756,544,360	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
						Persentase Desa yang diFasilitasi	25,05, %					25,05, %		DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	13	4	1.01		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa			1,177,531,111					3,756,544,360	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	13	4	1.01	1	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/wali kota yang Mengatur Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/wali Kota yang Mengatur Desa	1 Dokumen	-	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Dokumen	86,821,875	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	13	4	1.01	2	Pembinaan Manajemen Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Manajemen Pemerintahan Desa	2 Dokumen	-	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2 Dokumen	115,762,500	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	13	4	1.01	3	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	Jumlah Dokumen Produk Hukum desa yang Ditetapkan	2 Dokumen	19,998,500	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2 Dokumen	86,821,875	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	13	4	1.01	4	Fasilitasi Penyusunan, Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengawasan Pembangunan Desa	jumlah Dokumen hasi Fasilitasi Penyusunan, Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengawasan Pembangunan Desa	5 Dokumen	-	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5 Dokumen	68,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	13	4	1.01	5	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	2 Dokumen	67,998,700	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2 Dokumen	68,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	13	4	1.01	6	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	2 Dokumen	67,999,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2 Dokumen	68,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	13	4	1.01	7	Fasilitasi Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	jumlah orang yang Mengikuti Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	50 Orang	19,999,400	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		50 Orang	86,821,875	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	13	4	1.01	8	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	2 Dokumen	558,765,500	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2 Dokumen	1,451,166,235	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	13	4	1.01	9	Fasilitasi Pelaksanaan Profil Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Profil Desa dan Kelurahan	2 Dokumen	99,996,900	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2 Dokumen	100,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	13	4	1.01	10	Pembinaan Aparatur Pemerintah Desa	jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Dibina	60 Orang	99,977,600	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		60 Orang	100,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	13	4	1.01	11	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Jumlah orang yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	50 Orang	67,998,400	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		50 Orang	68,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	13	4	1.01	12	Pembinaan Percepatan Pembangunan Desa Melalui Bantuan Keuangan, Bantuan Pendampingan dan Bantuan Teknis	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Percepatan Pembangunan Desa Melalui Bantuan Keuangan, Bantuan Pendampingan dan Bantuan Teknis	6 Dokumen	-	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		6 Dokumen	347,287,500	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	13	4	1.01	13	Pelaksanaan Penugasan Urusan/Kewenangan Provinsi yang Dilaksanakan oleh Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penugasan Urusan/Kewenangan Provinsi yang Dilaksanakan oleh Desa	2 Dokumen	-	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2 Dokumen	57,881,250	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	13	4	1.01	14	Pembinaan dan Pengawasan atas Penetapan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dalam Pembiayaan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan atas Penetapan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dalam Pembiayaan Desa	5 Dokumen	-	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5 Dokumen	57,881,250	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	13	4	1.01	15	Pembinaan dan Pengawasan Penetapan Pengaturan BUM Desa Kabupaten/Kota dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Penetapan Pengaturan BUM Desa Kabupaten/Kota dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	12 Dokumen	67,999,100	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		12 Dokumen	68,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	13	4	1.01	16	Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penetapan dan Penegasan Batas Desa	10 Dokumen	19,997,600	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		10 Dokumen	57,881,250	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	13	4	1.01	17	Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Laporan Kepala Desa	2 Dokumen	-	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2 Dokumen	115,762,500	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	13	4	1.01	18	Fasilitasi Pencatatan Data dan Informasi mengenai Pemerintahan Desa di Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pencatatan Data dan Informasi mengenai Pemerintahan Desa di Kabupaten/Kota	7 Dokumen	-	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7 Dokumen	115,762,500	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	13	4	1.01	19	Fasilitasi Peran BPD dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Peran BPD dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	2 Dokumen	-	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2 Dokumen	86,821,875	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	13	4	1.01	20	Fasilitasi Pengembangan Inovasi Desa	Jumlah Desa yang melakukan Pengembangan Inovasi	6 Desa	-	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		6 Desa	231,525,000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	13	4	1.01	21	Fasilitasi Pekan Inovasi Perkembangan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pekan Inovasi Perkembangan Desa	1 Laporan	-	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Laporan	231,525,000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	13	4	1.01	22	Fasilitasi Penetapan Kewenangan Desa dan Desa Adat di Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penetapan Kewenangan Desa dan Desa Adat di Kabupaten/Kota	5 Dokumen	86,800,411	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5 Dokumen	86,821,875	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	13	5			PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Persentase Kelembagaan Masyarakat yang difasilitasi dan ditingkatkan kapasitasnya (Kelompok Binaan LPM)	1,57 %	2,216,193,600				1,57 %	1,709,492,390	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						Persentase Posyandu aktif;	99,98 %					99,98 %		DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
						Persentase PKK aktif	100 %					100 %		DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	13	5	1.01		Pemberdayaan Lembaga keMasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota			2,216,193,600					1,709,492,390	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	13	5	1.01	1	Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat	4 Dokumen	99,999,700	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4 Dokumen	100,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	13	5	1.01	2	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga KeMasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	5 Dokumen	-	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5 Dokumen	115,762,500	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	13	5	1.01	3	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga KeMasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan kapasitas Kelembagaannya	15 Lembaga	99,997,800	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		15 Lembaga	100,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	13	5	1.01	4	Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga KeMasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	5 Unit	-	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5 Unit	202,957,140	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	13	5	1.01	5	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	1 Dokumen	549,995,400	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Dokumen	20,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	13	5	1.01	6	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	2 Laporan	664,073,800	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2 Laporan	800,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	13	5	1.01	7	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	2 Laporan	2,160,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2 Laporan	149,916,500	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	13	5	1.01	8	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa	2 Dokumen	199,967,800	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2 Dokumen	100,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	13	5	1.01	9	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	6 Laporan	599,999,100	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		6 Laporan	120,856,250	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	14				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA			1,307,000,000					1,107,000,000	
2	14				DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA			1,307,000,000					1,107,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
2	14	2			PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Cakupan kab/kota yang mendapatkan fasilitasi pembinaan penanganan terpadu isu kependudukan di Kampung KB	45,82 %	265,000,000				45,82 %	265,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
2	14	2	1.01		Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Persentase kab/kota yang didampingi dalam penyusunan kebijakan pengendalian kuantitas penduduk	16.7 %	200,000,000				16.7 %	200,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
2	14	2	1.01	1	Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Provinsi terhadap Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK)	Jumlah Dokumen Hasil Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Provinsi terhadap Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)	1 Dokumen	-	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Lain-lain PAD Yang Sah	1. Instansi terkait Tingkat Provinsi dan Kab/Kota 2. Pembina / Pengelola Kampung KB Kab/Kota dan Desa	1 Dokumen	100,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
									Kab. Bone, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
									Kab. Gowa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
									Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
									Kab. Kepulauan Selayar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
									Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
2	14	2	1.01	3	Advokasi dan Sosialisasi GDPK	Jumlah Laporan Pelaksanaan Advokasi dan Sosialisasi GDPK	1 Laporan	200,000,000	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Lain-lain PAD Yang Sah	1. Instansi terkait Tingkat Provinsi dan Kab/Kota 2. Pembina / Pengelola Kampung KB Kab/Kota dan Desa	1 Laporan	100,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
									Kab. Bone, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
									Kab. Gowa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
									Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
									Kab. Kepulauan Selayar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
									Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
2	14	2	1.02		Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Provinsi	Jumlah dokumen pengendalian penduduk yg tersedia di tk provinsi	2 Dokumen	65,000,000				2 Dokumen	65,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
2	14	2	1.02	6	Penyusunan Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga	1 Dokumen	65,000,000	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Lain-lain PAD Yang Sah	1. OPD Terkait Tingkat Kab/Kota dan Pengelola Rumah DaTaKu 2. OPD Terkait Tingkat Provinsi dan Kab/Kota	1 Dokumen	65,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
2	14	3			PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Persentase PUS peserta KB Aktif	65,5%	242,000,000				65,5%	292,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
2	14	3	1.01		Pengembangan Desain Program, Pengelolaan dan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Persentase kab/kota yang mengembangkan percontohan inovasi, advokasi, dan KIE Pengemdalian Penduduk dan KB sesuai kearifan budaya lokal	25 %	242,000,000				25 %	211,400,000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
2	14	3	1.01	4	Pelaksanaan Advokasi dan KIE Program KKBPK Melalui Mitra Kerja	Jumlah Dokumen Hasil Advokasi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Mitra Kerja	1 Dokumen	145,400,000	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Lain-lain PAD Yang Sah	Pembina dan Pengelola/Kader Kespro dan PIK-R Lokasi Percontohan Kampung KB	1 Dokumen	145,400,000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
									Kab. Bulukumba, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
									Kab. Luwu Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
									Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
									Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
									Kota Palopo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
2	14	3	1.01	8	Pembinaan Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi	1 Laporan	96,600,000	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Lain-lain PAD Yang Sah	Pembina dan Pengelola/Kader Kespro dan PIK-R Lokasi Percontohan Kampung KB	1 Laporan	66,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
									Kab. Bulukumba, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
									Kab. Luwu Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
									Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
									Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
									Kota Palopo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
2	14	3	1.02		Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi dalam Pengelolaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Persentase kab/kota yang menjadi lokasi pengembangan kemitraan pengelolaan pelayanan dan kesertaan ber-KB	25 %	-				25 %	80,600,000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
2	14	3	1.02	1	Pengembangan Strategi Operasional dalam rangka Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dalam Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Strategi Operasional dalam Rangka Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Dalam Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	1 Dokumen	-	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Lain-lain PAD Yang Sah	0	1 Dokumen	80,600,000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
									Kab. Bone, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
									Kab. Gowa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
									Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
									Kab. Kepulauan Selayar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
									Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
2	14	4			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Persentase kab/kota yg meningkat capaian Indeks Pembangunan Keluarga	25 %	800,000,000				25 %	550,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
2	14	4	1.01		Pengelolaan Pelaksanaan Desain Program Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Persentase kab/kota yang difasilitasi dalam peningkatan IPK daerah	25 %	800,000,000				25 %	500,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
2	14	4	1.01	3	Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	1 Dokumen	100,000,000	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Lain-lain PAD Yang Sah	1. Pembina/Pengelola/Kader Pendamping Keluarga Dalam Penyiapan Pengasuhan 1000 HPK Kab/Kota (Pelaksanaan Fasilitasi, Pembimbingan, Pengembangan, dan Penguatan Penyiapan Pengasuhan 1000 HPK) 2. Pusat Informasi Konseling-Remaja (PIK-R) di Kampung KB Kabupaten/Kota (Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga)	1 Dokumen	50,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
									Kab. Bone, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
									Kab. Gowa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
									Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
									Kab. Kepulauan Selayar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
									Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
2	14	4	1.01	14	Pelaksanaan Fasilitasi, Pembimbingan, Pengembangan, dan Penguatan Penyiapan Pengasuhan 1000 HPK	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Pembimbingan, Pengembangan, dan Penguatan Penyiapan Pengasuhan 1000 HPK	1 Dokumen	700,000,000	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Lain-lain PAD Yang Sah	1. Pembina/Pengelola/Kader Pendamping Keluarga Dalam Penyiapan Pengasuhan 1000 HPK Kab/Kota (Pelaksanaan Fasilitasi, Pembimbingan, Pengembangan, dan Penguatan Penyiapan Pengasuhan 1000 HPK) 2. Pusat Informasi Konseling-Remaja (PIK-R) di Kampung KB Kabupaten/Kota (Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga)	1 Dokumen	450,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
									Kab. Bone, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
									Kab. Gowa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
									Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
									Kab. Kepulauan Selayar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
									Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
2	14	4	1.02		Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi KeMasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Persentase kab/kota yang difasilitasi dalam pembentukan percontohan BKB, BKR, BKL, dan UPPKS	25 %	-				25 %	50,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
2	14	4	1.02	2	Penguatan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga	Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga	1 Laporan	-	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Lain-lain PAD Yang Sah	Pembina/Pengelola/Kader/Calon Fasilitator Kelompok BKB, BKR, BKL dan UPPKS Kab/Kota Percontohan	1 Laporan	50,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
2	15				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN			43,821,328,656					59,476,328,023	
2	15				DINAS PERHUBUNGAN			43,821,328,656					59,476,328,023	DINAS PERHUBUNGAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	15	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	ASN Perangkat Daerah Berkinerja Baik dan Sangat Baik	100 %	38,238,086,749				100 %	42,032,118,426	
						Penurunan Temuan Berdasarkan LHP	100 %					100 %		
						Realisasi Kegiatan Perangkat Daerah	100 %					100 %		
2	15	1	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			349,999,800					350,000,000	
2	15	1	1.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	250,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Dokumen	250,000,000	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	1	1.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	0 Dokumen	15,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		0 Dokumen	15,000,000	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	1	1.01	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	0 Dokumen	15,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		0 Dokumen	15,000,000	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	1	1.01	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	0 Dokumen	15,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		0 Dokumen	15,000,000	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	1	1.01	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	0 Dokumen	15,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		0 Dokumen	15,000,000	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	1	1.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	0 Laporan	5,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		0 Laporan	5,000,000	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	1	1.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	0 Laporan	34,999,800	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		0 Laporan	35,000,000	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	1	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			24,348,791,157					24,348,791,153	
2	15	1	1.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	205 Orang/ Bulan	24,298,791,157	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		205 Orang/ Bulan	24,298,791,153	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	1	1.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	0 Laporan	25,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		0 Laporan	25,000,000	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	1	1.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	0 Laporan	25,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		0 Laporan	25,000,000	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	1	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			49,894,000					370,000,000	
2	15	1	1.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya			-	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			300,000,000	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	1	1.05	3	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian			-	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			20,000,000	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	1	1.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	0 Orang	49,894,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		0 Orang	50,000,000	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	1	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah			499,977,700					510,000,000	
2	15	1	1.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	0 Paket	19,995,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		0 Paket	20,000,000	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	1	1.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	0 Paket	49,993,300	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		0 Paket	50,000,000	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	1	1.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	0 Paket	14,999,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		0 Paket	15,000,000	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	1	1.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	0 Laporan	414,990,400	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		0 Laporan	415,000,000	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	1	1.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD			-	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			10,000,000	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	1	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			-					1,000,000,000	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	15	1	1.07	2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			-	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			400,000,000	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	1	1.07	9	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			-	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			100,000,000	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	1	1.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			-	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			500,000,000	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	1	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			5,184,969,164					5,148,806,523	
2	15	1	1.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	0 Laporan	381,642,900	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		0 Laporan	345,479,250	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	1	1.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	0 Laporan	4,803,326,264	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		0 Laporan	4,803,327,273	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	1	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			7,804,454,928					10,304,520,750	
2	15	1	1.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	53 Unit	804,455,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		53 Unit	804,520,750	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	1	1.09	7	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya			-	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			500,000,000	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	1	1.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	6,999,999,928	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Unit	9,000,000,000	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase pengguna moda transportasi umum di perkotaan	32,40 %	3,750,673,645				32,40 %	13,594,209,597	
						Persentase Layanan Angkutan Darat;	58 %					58 %		
						Jumlah penumpang melalui terminal Tipe B per tahun	605.000 Orang					605.000 Orang		
						Cakupan prasarana LLAJ dalam kondisi baik	30 %					30 %		
						Jumlah penyelenggaraan lalu lintas pada ruas jalan provinsi	20 Ruas					20 Ruas		
						Jumlah Terminal Bis terkelola	16					16		
2	15	2	1.01		Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi			-					600,000,000	
2	15	2	1.01	1	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi	1 Dokumen	-	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Dokumen	250,000,000	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	2	1.01	2	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi			-	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			250,000,000	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	2	1.01	3	Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi	Jumlah Laporan Pengendalian Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi	1 Laporan	-	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Laporan	100,000,000	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	2	1.02		Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi			1,296,185,425					3,546,186,597	
2	15	2	1.02	1	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Provinsi			-	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			250,000,000	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	2	1.02	2	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi yang Tersedia	0 Unit	1,296,185,425	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		0 Unit	1,296,186,597	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	2	1.02	3	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan			-	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			1,000,000,000	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	2	1.02	4	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan			-	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			1,000,000,000	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	2	1.03		Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B			931,564,640					4,975,000,000	
2	15	2	1.03	1	Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe B	Jumlah Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe B	2 Dokumen	349,730,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2 Dokumen	350,000,000	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	2	1.03	2	Pembangunan Gedung Terminal			-	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			1,000,000,000	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	2	1.03	3	Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal	Jumlah Sarana dan Prasarana Terminal yang dilakukan Pengembangan	3 Unit	581,834,640	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3 Unit	575,000,000	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	2	1.03	4	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)			-	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			3,000,000,000	DINAS PERHUBUNGAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	15	2	1.03	5	Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Terminal Tipe B			-	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			50,000,000	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	2	1.05		Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi			1,201,952,780					2,323,023,000	
2	15	2	1.05	1	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Provinsi	Jumlah Laporan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Provinsi	1 Laporan	49,999,800	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Laporan	50,000,000	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	2	1.05	2	Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas			-	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			1,000,000,000	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	2	1.05	3	Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi			-	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			100,000,000	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	2	1.05	4	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi	12 Laporan	28,929,200	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		12 Laporan	50,000,000	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	2	1.05	5	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Provinsi	Jumlah Laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Provinsi	1 Laporan	1,123,023,780	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Laporan	1,123,023,000	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	2	1.06		Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Provinsi			21,070,800					400,000,000	
2	15	2	1.06	1	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Andalalin			-	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			100,000,000	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	2	1.06	2	Peningkatan Kapasitas Penilai Andalalin			-	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			100,000,000	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	2	1.06	3	Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin			-	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			100,000,000	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	2	1.06	4	Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin	Jumlah Laporan Rekomendasi Andalalin yang Terawasi	1 Laporan	21,070,800	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Laporan	100,000,000	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	2	1.08		Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi			-					200,000,000	
2	15	2	1.08	1	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi			-	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			100,000,000	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	2	1.08	2	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Provinsi			-	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			100,000,000	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	2	1.09		Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Pelayanan Angkutan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi			240,000,000					240,000,000	
2	15	2	1.09	1	Perumusan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Provinsi	1 Dokumen	140,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Dokumen	140,000,000	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	2	1.09	2	Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Provinsi	1 Dokumen	100,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Dokumen	100,000,000	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	2	1.10		Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Antarkota dalam Daerah Provinsi dan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota			-					200,000,000	
2	15	2	1.10	1	Perumusan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Antarkota Kewenangan Provinsi			-	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			100,000,000	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	2	1.10	2	Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Antarkota Kewenangan Provinsi			-	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			100,000,000	DINAS PERHUBUNGAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	15	2	1.11		Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan yang Melampaui 1 (satu) Daerah Kabupaten dalam 1 (satu) Daerah Provinsi			-					100,000,000	
2	15	2	1.11	1	Perumusan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Provinsi			-	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			50,000,000	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	2	1.11	2	Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Provinsi			-	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			50,000,000	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	2	1.12		Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan yang Wilayah Operasinya Melampaui Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi			-					200,000,000	
2	15	2	1.12	1	Perumusan Kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Provinsi			-	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			100,000,000	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	2	1.12	2	Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Provinsi			-	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			100,000,000	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	2	1.13		Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi			-					200,000,000	
2	15	2	1.13	1	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik			-	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			100,000,000	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	2	1.13	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi			-	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			100,000,000	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	2	1.14		Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Melampaui Lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi			59,900,000					310,000,000	
2	15	2	1.14	1	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik			-	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			250,000,000	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	2	1.14	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Kewenangan Provinsi	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Kewenangan Provinsi	12 Laporan	59,900,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		12 Laporan	60,000,000	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	2	1.15		Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek antar Kota dalam Daerah Provinsi serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan yang Melampaui 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi			-					300,000,000	
2	15	2	1.15	1	Analisis Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi			-	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			100,000,000	DINAS PERHUBUNGAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	15	2	1.15	2	Penyediaan Data dan Informasi Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi			-	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			100,000,000	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	2	1.15	3	Pengendalian dan Pengawasan Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi			-	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			100,000,000	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	3			PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Jumlah arus penumpang melalui pelabuhan (Prioritas)	1.105.000 Orang	1,657,568,462				1.105.000 Orang	3,275,000,000	
						Jumlah pelabuhan strategis provinsi	11 Lokasi					11 Lokasi		
						Persentase pelabuhan yang beroperasi	35 %					35 %		
2	15	3	1.01		Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut bagi Badan Usaha yang Berdomisili dalam Wilayah dan Beroperasi pada Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Wilayah Daerah Provinsi			50,000,000					50,000,000	
2	15	3	1.01	1	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Angkutan Laut Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang memenuhi persyaratan perizinan	0 Unit	10,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		0 Unit	10,000,000	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	3	1.01	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Provinsi	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Provinsi	0 Laporan	40,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		0 Laporan	40,000,000	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	3	1.08		Penetapan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional			349,992,700					950,000,000	
2	15	3	1.08	1	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional	Jumlah Dokumen Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional	1 Dokumen	349,992,700	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Dokumen	350,000,000	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	3	1.08	2	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional			-	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			300,000,000	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	3	1.08	3	Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional			-	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			300,000,000	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	3	1.09		Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional			1,257,575,762					1,475,000,000	
2	15	3	1.09	1	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	Jumlah Pelabuhan Pengumpan Regional yang Memenuhi Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian	10 Unit	-	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		10 Unit	100,000,000	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	3	1.09	2	Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Regional			-	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			100,000,000	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	3	1.09	3	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Regional	Jumlah Pelabuhan Pengumpan Regional yang Beroperasi dan terpelihara	5 Unit	1,257,575,762	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5 Unit	1,275,000,000	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	3	1.10		Pembangunan dan Penerbitan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi			-					800,000,000	
2	15	3	1.10	1	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi			-	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			100,000,000	DINAS PERHUBUNGAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	15	3	1.10	2	Pembangunan Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi			-	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			100,000,000	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	3	1.10	3	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi			-	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			500,000,000	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	3	1.10	4	Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi			-	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			100,000,000	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	5			PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN	Persentase penyelesaian pedoman standar pelayanan Sarana dan prasarana transportasi	100 %	174,999,800				100 %	575,000,000	
2	15	5	1.01		Penetapan Rencana Induk Perkeretaapian			74,999,800					275,000,000	
2	15	5	1.01	1	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Perkeretaapian	Jumlah Dokumen Rencana Induk Perkeretaapian	1 Dokumen	74,999,800	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Dokumen	75,000,000	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	5	1.01	2	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Perkeretaapian			-	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			100,000,000	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	5	1.01	3	Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk Perkeretaapian			-	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			100,000,000	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	5	1.02		Penerbitan Izin Usaha, Izin Pembangunan dan Izin Operasi Prasarana Perkeretaapian Umum yang Jaringan Jalurnya Melintasi Batas Daerah			-					100,000,000	
2	15	5	1.02	1	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha, Izin Pembangunan dan Izin Operasi Prasarana Perkeretaapian Umum yang Jaringan Jalurnya Melintasi Batas Daerah dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik			-	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			50,000,000	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	5	1.02	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha, Izin Pembangunan dan Izin Operasi Prasarana Perkeretaapian Umum yang Jaringan Jalurnya Melintasi Batas Daerah			-	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			50,000,000	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	5	1.03		Penetapan Jaringan Jalur Kereta Api yang Jaringannya Melebihi Wilayah 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi			100,000,000					200,000,000	
2	15	5	1.03	1	Perumusan Kebijakan Penetapan Jaringan Jalur Kereta Api yang Jaringannya Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Kebijakan Jaringan Jalur Kereta Api yang Jaringannya Kewenangan Provinsi yang Ditetapkan	1 Dokumen	100,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Dokumen	100,000,000	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	5	1.03	2	Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Jaringan Jalur Kereta Api yang Jaringannya Kewenangan Provinsi			-	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			100,000,000	DINAS PERHUBUNGAN
2	16				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA			58,453,081,823					66,215,889,967	
2	16				DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN			58,453,081,823					66,215,889,967	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
2	16	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	ASN Perangkat Daerah Berkinerja Baik dan Sangat Baik	100 %	15,491,480,289				100 %	18,764,999,999	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						Penurunan Temuan Berdasarkan LHP	100 %					100 %		DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
						Realisasi Kegiatan Perangkat Daerah	100 %					100 %		DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
2	16	1	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Penyusunan Dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tepa Waktu	100 %	349,296,100				100 %	610,000,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
2	16	1	1.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	319,999,700	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Dokumen Perencanaan Diskominfo-SP Prov Sulsel	6 Dokumen	550,000,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
2	16	1	1.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 Laporan	29,296,400	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Dokumen Perencanaan Diskominfo-SP Prov Sulsel	12 Laporan	60,000,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
2	16	1	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan	2 Laporan	11,613,193,165				2 Laporan	12,849,999,999	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
2	16	1	1.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	90 Orang/ Bulan	11,363,193,165	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	ASN Diskominfo-SP Prov. Sulsel	90 Orang/ Bulan	12,499,999,999	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
2	16	1	1.02	4	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	0 Dokumen	250,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	ASN Diskominfo-SP Prov. Sulsel	0 Dokumen	350,000,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
						Keuangan	12 Dokumen					12 Dokumen		DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
2	16	1	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	2 Laporan	92,000,000				2 Laporan	155,000,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
2	16	1	1.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya			-	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	ASN Diskominfo Sulsel		80,000,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
2	16	1	1.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	2 Orang	92,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	ASN Diskominfo Sulsel	2 Orang	75,000,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
2	16	1	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	2 Laporan	2,129,952,874				2 Laporan	2,400,000,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
2	16	1	1.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	116,607,250	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	ASN Diskomimfo-SP Prov Sulsel	3 Paket	300,000,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
2	16	1	1.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan	2,013,345,624	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	ASN Diskomimfo-SP Prov Sulsel	4 Laporan	2,100,000,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	16	1	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			-					1,200,000,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
2	16	1	1.07	1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	0 Unit	-	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		0 Unit	1,200,000,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
2	16	1	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	3 Laporan	1,307,038,150				3 Laporan	1,550,000,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
2	16	1	1.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	22 Unit	1,136,998,400	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Barang Milik Diskominfo-SP Prov Sulsel	22 Unit	1,100,000,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
2	16	1	1.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	40,097,500	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Barang Milik Diskominfo-SP Prov Sulsel	1 Unit	150,000,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
2	16	1	1.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	59 Unit	129,942,250	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Barang Milik Diskominfo-SP Prov Sulsel	59 Unit	300,000,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
2	16	2			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase layanan informasi dan komunikasi publik	100 %	34,923,430,160				100 %	36,900,889,968	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
						Presentase tindak lanjut pengaduan pada Baruga Layanan Masyarakat secara Elektronik	100 %					100 %		DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
2	16	2	1.01		Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	2 Dokumen	34,923,430,160				2 Dokumen	36,900,889,968	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
2	16	2	1.01	2	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	4 Dokumen	337,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Media dan Publik	4 Dokumen	500,000,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
2	16	2	1.01	3	Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah	4 Dokumen	522,016,880	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Media dan Publik	4 Dokumen	350,000,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
2	16	2	1.01	4	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	4 Dokumen	597,016,780	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Media dan Publik	4 Dokumen	750,000,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
2	16	2	1.01	5	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	4 Dokumen	12,933,776,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Media dan Publik	4 Dokumen	17,000,000,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
2	16	2	1.01	6	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik	4 Dokumen	7,711,999,900	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Media dan Publik	4 Dokumen	2,917,155,560	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
2	16	2	1.01	7	Layanan Hubungan Media	Jumlah Layanan Hubungan Media	4 Layanan	11,346,922,900	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Media dan Publik	4 Layanan	12,500,000,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	16	2	1.01	11	Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	4 Dokumen	1,474,697,700	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Media dan Publik	4 Dokumen	2,883,734,408	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
2	16	3			PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Indeks sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE)	3	8,038,171,374				3	10,550,000,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
2	16	3	1.01		Pengelolaan Nama Domain yang Telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Pelaksanaan Pengelolaan Domaindan Sub Domain Pada Pemprov. Sulsel	1 Laporan	6,012,010,232				1 Laporan	7,500,000,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
2	16	3	1.01	3	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	53 Unit	6,012,010,232	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	OPD Lingkup Prov. Sulsel	53 Unit	7,500,000,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
2	16	3	1.02		Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	Terlaksananya Kegiatan Pengelolaan E-Government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	100 %	2,026,161,142				100 %	3,050,000,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
2	16	3	1.02	7	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan	76 Unit	293,674,650	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	OPD Lingkup Prov. Sulsel	76 Unit	300,000,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
2	16	3	1.02	10	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	4 Dokumen	1,131,075,492	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	OPD Lingkup Prov. Sulsel	4 Dokumen	2,000,000,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
2	16	3	1.02	12	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan SPBE	2 Dokumen	601,411,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	OPD Lingkup Prov. Sulsel	2 Dokumen	750,000,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
2	17				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH			32,781,954,573					47,749,500,003	
2	17				DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH			32,781,954,573					47,749,500,003	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
2	17	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	ASN Perangkat Daerah Berkinerja Baik dan Sangat Baik	100 %	14,952,310,573				100 %	30,999,500,000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
						Penurunan Temuan Berdasarkan LHP	100 %					100 %		DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
						Realisasi Kegiatan Perangkat Daerah	100 %					100 %		DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
2	17	1	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			332,334,000					205,000,000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
2	17	1	1.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			16,163,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			75,000,000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
2	17	1	1.01	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD			28,020,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			15,000,000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
2	17	1	1.01	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD			43,300,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			15,000,000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	17	1	1.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			244,851,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			100,000,000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
2	17	1	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			10,263,893,973					14,065,000,000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
2	17	1	1.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	0 Orang/ Bulan	10,187,958,973	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		0 Orang/ Bulan	14,000,000,000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
2	17	1	1.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD			75,935,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			65,000,000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
2	17	1	1.04		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah			-					10,000,000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
2	17	1	1.04	7	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah			-	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			10,000,000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
2	17	1	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			419,600,400					538,000,000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
2	17	1	1.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	300 Paket	295,675,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		300 Paket	375,000,000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
2	17	1	1.05	3	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian			12,875,400	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			6,500,000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
2	17	1	1.05	5	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai			11,050,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			6,500,000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
2	17	1	1.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	4 Orang	100,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4 Orang	150,000,000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
2	17	1	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah			1,286,146,000					4,101,500,000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
2	17	1	1.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	0 Paket	199,346,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		0 Paket	1,500,000,000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
2	17	1	1.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	0 Paket	1,000,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		0 Paket	1,400,000,000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
2	17	1	1.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			-	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			65,000,000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
2	17	1	1.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			30,500,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			30,000,000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
2	17	1	1.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	250 Laporan	51,300,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		250 Laporan	1,100,000,000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
2	17	1	1.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD			5,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			6,500,000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
2	17	1	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			396,250,000					900,000,000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
2	17	1	1.07	5	Pengadaan Mebel			336,250,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			800,000,000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	17	1	1.07	8	Pengadaan Aset Tak Berwujud			60,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			100,000,000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
2	17	1	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			2,089,996,200					5,350,000,000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
2	17	1	1.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			1,396,953,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			1,850,000,000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
2	17	1	1.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	80 Laporan	693,043,200	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		80 Laporan	3,500,000,000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
2	17	1	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			164,090,000					5,830,000,000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
2	17	1	1.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	25 Unit	20,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		25 Unit	230,000,000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
2	17	1	1.09	7	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya			144,090,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			550,000,000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
2	17	1	1.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0 Unit	-	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		0 Unit	5,050,000,000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
2	17	2			PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	Persentase Koperasi dan UKM yang memiliki Izin usaha Simpan Pinjam	50%	123,730,000				50%	1,050,000,000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
						Persentase Koperasi yang mendapat Izin Pembukaan Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu dan Kantor Kas	40%					40%		DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
2	17	2	1.01		Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi			120,530,000					550,000,000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
2	17	2	1.01	1	Fasilitasi Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1(Satu) Daerah Provinsi yang Memiliki Usaha Simpan Pinjam	0 Unit Usaha	120,530,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		0 Unit Usaha	550,000,000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
										Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik				DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
2	17	2	1.02		Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi			3,200,000					500,000,000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
2	17	2	1.02	1	Fasilitasi Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	100 Unit Usaha	3,200,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100 Unit Usaha	500,000,000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
										Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik				DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
2	17	3			PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase Koperasi yang diawasi dan diperiksa	50%	166,575,000				50%	1,050,000,000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						Persentase Koperasi yang meningkat Kepatuhannya terhadap peraturan perundang undangan	30%					30%		DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
2	17	3	1.01		Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi			166,575,000					1,050,000,000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
2	17	3	1.01	1	Meningkatkan Akuntabilitas, Kepercayaan, Kepatuhan, Kesinambungan, dan Memberikan Manfaat yang Sebesar-besarnya ke pada Anggota dan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Akuntabilitas, Kepercayaan, Kepatuhan, Kesinambungan, dan Pemberian Manfaat ke pada Anggota KUKM dan Masyarakat	200 Dokumen	166,575,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		200 Dokumen	550,000,000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
										Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik				DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
2	17	3	1.01	2	Peningkatan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan dan Terbentuknya Koperasi yang Kuat, Sehat, Mandiri, Tangguh, serta Akuntabel	Jumlah Koperasi Yang Memenuhi Peraturan Perundang-Undangan dan Tersedianya Koperasi yang Kuat, Sehat, Mandiri, Tangguh, serta Akuntabel	150 Unit Usaha	-	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		150 Unit Usaha	500,000,000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
										Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik				DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
2	17	4			PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Persentase KSP/USP Koperasi, KSPPS/USPPS Koperasi dengan Kriteria SEHAT	40%	59,260,000				40%	750,000,000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
						Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Penilaian Kesehatan Koperasi	40%					40%		DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
2	17	4	1.01		Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi			59,260,000					750,000,000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
2	17	4	1.01	1	Penilaian Permodalan, Kualitas Aktiva Produktif, Manajemen, Efisiensi, Likuiditas, Jatidiri Koperasi, Pertumbuhan dan Kemandirian Koperasi	Jumlah Koperasi yang Diberikan Penilaian Permodalan, Kualitas Aktiva Produktif, Manajemen, Efisiensi, Likuiditas, Jatidiri Koperasi, Pertumbuhan dan Kemandirian Koperasi	100 Unit Usaha	59,260,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100 Unit Usaha	300,000,000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
										Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik				DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
2	17	4	1.01	2	Mengukur Tingkat Kesehatan Koperasi	Jumlah Koperasi Hasil Pengukuran Tingkat Kesehatan	150 Unit Usaha	-	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		150 Unit Usaha	450,000,000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
										Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik				DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
2	17	5			PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase Pengurus Koperasi Aktif yang pernah mendapatkan pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian	40%	962,262,000				40%	1,000,000,003	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
2	17	5	1.01		Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi			962,262,000					1,000,000,003	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
2	17	5	1.01	1	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	750 Orang	962,262,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		750 Orang	1,000,000,003	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
										Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik				DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	17	6			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase Koperasi yang terfasilitasi pemberdayaan	50%	461,190,000				50%	1,200,000,000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
2	17	6	1.01		Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi			461,190,000					1,200,000,000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
2	17	6	1.01	1	Perluasan Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Jumlah Unit Usaha yang Memenuhi Standarisasi dan Restrukturisasi Ysaha	200 Unit Usaha	77,730,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		200 Unit Usaha	550,000,000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
										Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik				DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
2	17	6	1.01	2	Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	300 Unit Usaha	383,460,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		300 Unit Usaha	650,000,000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
										Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik				DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
2	17	7			PROGRAM Pemberdayaan USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Cakupan UMKM yang diberdayakan	11%	7,715,562,000				11%	7,000,000,000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
2	17	7	1.01		Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan			7,715,562,000					7,000,000,000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
2	17	7	1.01	1	Menumbuhkembangkan UMKM untuk Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	0 Unit Usaha	7,715,562,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		0 Unit Usaha	7,000,000,000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
										Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik				DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
2	17	8			PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase UMKM yang terfasilitasi Dalam Pengembangan Usaha	25%	8,341,065,000				25%	4,700,000,000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
						Cakupan promosi produk UMKM (Prioritas)	3%					3%		DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
2	17	8	1.01		Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah			8,341,065,000					4,700,000,000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
2	17	8	1.01	1	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi	0 Unit Usaha	8,341,065,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		0 Unit Usaha	4,700,000,000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
										Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik				DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
2	18				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL			23,025,368,733					25,629,086,697	
2	18				DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP			23,025,368,733					25,629,086,697	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
2	18	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	ASN Perangkat Daerah Berkinerja Baik dan Sangat Baik	100 %	18,706,869,821				100 %	21,076,161,697	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						Penurunan Temuan Berdasarkan LHP	100 %					100 %		DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
						Realisasi Kegiatan Perangkat Daerah	100 %					100 %		DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
2	18	1	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			493,999,700					534,700,000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
2	18	1	1.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	220,000,000	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3 Dokumen	231,000,000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
2	18	1	1.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	41,999,800	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Dokumen	44,100,000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
2	18	1	1.01	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	32,000,000	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Dokumen	44,100,000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
2	18	1	1.01	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	42,000,000	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Dokumen	44,100,000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
2	18	1	1.01	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	32,000,000	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Dokumen	44,100,000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
2	18	1	1.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	26,000,000	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2 Laporan	27,300,000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
2	18	1	1.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6 Laporan	99,999,900	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		6 Laporan	100,000,000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
2	18	1	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			12,579,999,755					13,188,000,000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
2	18	1	1.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	86 Orang/ Bulan	12,410,000,055	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja		86 Orang/ Bulan	13,030,500,000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
2	18	1	1.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	169,999,700	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Dokumen	157,500,000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
2	18	1	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			12,000,000					12,600,000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
2	18	1	1.03	1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	6,000,000	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Dokumen	6,300,000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
2	18	1	1.03	5	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	6,000,000	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Laporan	6,300,000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
2	18	1	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			367,775,000					386,400,000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
2	18	1	1.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	86 Paket	249,775,000	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		86 Paket	262,500,000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
2	18	1	1.05	3	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	68,000,000	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Dokumen	71,400,000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
2	18	1	1.05	5	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	50,000,000	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Dokumen	52,500,000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
2	18	1	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah			2,478,281,750					2,497,211,697	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
2	18	1	1.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	10 Paket	50,000,000	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		10 Paket	52,500,000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
2	18	1	1.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	1,199,996,950	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		12 Paket	1,155,000,000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
2	18	1	1.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	6 Paket	72,000,000	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		6 Paket	75,600,000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	18	1	1.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	7 Laporan	49,988,000	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7 Laporan	52,500,000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
2	18	1	1.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3 Laporan	1,106,296,800	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3 Laporan	1,161,611,697	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
2	18	1	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			1,894,554,416					1,701,000,000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
2	18	1	1.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	684,987,024	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		12 Laporan	651,000,000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
2	18	1	1.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	1,209,567,392	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		12 Laporan	1,050,000,000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
2	18	1	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			880,259,200					2,756,250,000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
2	18	1	1.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	15 Unit	149,000,000	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		15 Unit	157,500,000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
2	18	1	1.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit	100,000,000	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5 Unit	78,750,000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
2	18	1	1.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	100,000,000	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Unit	1,260,000,000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
2	18	1	1.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	22 Unit	531,259,200	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		22 Unit	1,260,000,000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
2	18	2			PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Persentase Peningkatan Pengelolaan Potensi Investasi yang dimamfaatkan oleh Investor	100%	738,499,900				100%	775,425,000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
2	18	2	1.01		Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi			223,999,900					235,200,000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
2	18	2	1.01	1	Penetapan Kebijakan Daerah dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi Dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	1 Dokumen	178,999,900	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Dokumen	187,950,000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
2	18	2	1.01	2	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha yang Memperoleh Insentif dan Kemudahan Berusaha Di Daerah	1 Kegiatan usaha	45,000,000	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Kegiatan usaha	47,250,000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
2	18	2	1.02		Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi			514,500,000					540,225,000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
2	18	2	1.02	1	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Provinsi	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Provinsi	1 Dokumen	55,000,000	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Dokumen	57,750,000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
2	18	2	1.02	2	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Provinsi	Jumlah Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Provinsi	10 Dokumen	459,500,000	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		10 Dokumen	482,475,000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
2	18	3			PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Jumlah Realisasi PMA (Rp. Triliun)	4,5	1,269,999,800				4,5	1,222,500,000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
						Jumlah Realisasi PMDN (Rp. Triliun)	5,67					5,67		DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
2	18	3	1.01		Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi			1,269,999,800					1,222,500,000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
2	18	3	1.01	1	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi	Jumlah Peraturan Daerah yang Mengatur pPromosi Penanaman Modal Provinsi	1 Dokumen	470,000,000	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Dokumen	472,500,000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
2	18	3	1.01	2	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Provinsi	4 Dokumen	799,999,800	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4 Dokumen	750,000,000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
2	18	4			PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase Ketepatan Waktu Penyelesaian Izin yang Diterbitkan Sesuai SOP	90%	1,354,999,800				90%	1,743,000,000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
2	18	4	1.02		Penanaman Modal yang Menurut Ketentuan Peraturan Perundangan-Undangan Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi			1,354,999,800					1,743,000,000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	18	4	1.02	1	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Terfasilitasi Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Kewenangan Daerah Provinsi	27000 Pelaku Usaha	899,999,800	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		27000 Pelaku Usaha	1,365,000,000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
2	18	4	1.02	2	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Terfasilitasi Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Penanaman Modal Kewenangan Daerah Provinsi	27000 Kegiatan Usaha	225,000,000	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		27000 Kegiatan Usaha	189,000,000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
2	18	4	1.02	3	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Kewenangan Daerah Provinsi	110 Orang	230,000,000	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		110 Orang	189,000,000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
2	18	5			PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase Perusahaan yang taat Terhadap Ketentuan peraturan Penanaman modal	100%	804,999,412				100%	644,000,000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
2	18	5	1.01		Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi			804,999,412					644,000,000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
2	18	5	1.01	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	70 Kegiatan usaha	239,999,800	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		70 Kegiatan usaha	189,000,000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
										DAK Non Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal				DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
2	18	5	1.01	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	70 Pelaku Usaha	329,999,612	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		70 Pelaku Usaha	225,000,000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
										DAK Non Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal				DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
2	18	5	1.01	3	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan	70 Kegiatan usaha	235,000,000	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		70 Kegiatan usaha	230,000,000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
										DAK Non Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal				DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
2	18	6			PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase ketersediaan data dan informasi pendukung penanaman modal	100%	150,000,000				100%	168,000,000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
2	18	6	1.01		Urusan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Provinsi			150,000,000					168,000,000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
2	18	6	1.01	1	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	1 Dokumen	150,000,000	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Dokumen	168,000,000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
2	19				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA			96,266,929,874					625,500,000	
2	19				DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA			96,266,929,874					625,500,000	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2	19	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase ASN Perangkat Daerah berkinerja kategori baik	100 %	17,935,044,844				100 %	476,000,000	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
						Persentase penurunan temuan berdasarkan LHP	100 %					100 %		DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
						Persentase realisasi kegiatan Perangkat Daerah	100 %					100 %		DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	19	1	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja tepat waktu	100 %	640,000,000				100 %	470,000,000	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2	19	1	1.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah peserta Forum Perangkat Daerah	100 orang	380,000,000	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100 orang	315,000,000	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2	19	1	1.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	85,000,000	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Dokumen	-	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2	19	1	1.01	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	85,000,000	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Dokumen	85,000,000	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2	19	1	1.01	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	15,000,000	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Dokumen	20,000,000	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2	19	1	1.01	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	15,000,000	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Dokumen	-	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2	19	1	1.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 Laporan	30,000,000	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		12 Laporan	-	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2	19	1	1.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7 Laporan	30,000,000	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7 Laporan	50,000,000	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2	19	1	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentasi penyusunan laporan keuangan tepat waktu	100 %	13,360,725,468				100 %	6,000,000	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2	19	1	1.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	115 Orang/ Bulan	13,195,725,468	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		115 Orang/ Bulan	-	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2	19	1	1.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	50,000,000	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		12 Dokumen	-	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2	19	1	1.02	4	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 Dokumen	30,000,000	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		12 Dokumen	-	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2	19	1	1.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	20,000,000	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Laporan	-	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2	19	1	1.02	6	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	20,000,000	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Dokumen	-	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2	19	1	1.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	40,000,000	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		12 Laporan	-	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2	19	1	1.02	8	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	5,000,000	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Dokumen	6,000,000	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2	19	1	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen aset milik daerah	100 %	17,000,000				100 %	-	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2	19	1	1.03	1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen	12,000,000	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2 Dokumen	-	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2	19	1	1.03	5	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	5,000,000	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2 Laporan	-	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2	19	1	1.04		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Persentase pendapatan daerah	100 %	105,000,000				100 %	-	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2	19	1	1.04	7	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	12 Laporan	105,000,000	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		12 Laporan	-	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2	19	1	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rata-rata nilai perilaku pegawai perangkat daerah berdasarkan penilaian kinerja ASN	100 %	335,720,000				100 %	-	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2	19	1	1.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	115 Paket	93,720,000	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		115 Paket	-	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2	19	1	1.05	3	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12 Dokumen	12,000,000	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		12 Dokumen	-	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	19	1	1.05	4	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	12 Dokumen	5,000,000	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		12 Dokumen	-	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2	19	1	1.05	5	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	4 Dokumen	25,000,000	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4 Dokumen	-	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2	19	1	1.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	126 Orang	200,000,000	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		126 Orang	-	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2	19	1	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentasi pemenuhan administrasi umum kantor	100 %	1,000,226,000				100 %	-	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2	19	1	1.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	2,000,000	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		12 Paket	-	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2	19	1	1.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 Paket	150,000,000	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		10 Paket	-	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2	19	1	1.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	10 Paket	2,000,000	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		10 Paket	-	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2	19	1	1.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	78,596,000	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		12 Paket	-	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2	19	1	1.06	7	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12 Paket	2,000,000	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		12 Paket	-	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2	19	1	1.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	250,000,000	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		12 Laporan	-	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2	19	1	1.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 bulan	505,630,000	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		12 bulan	-	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2	19	1	1.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12 Dokumen	10,000,000	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		12 Dokumen	-	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2	19	1	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan barang milik daerah prnunjang urusan pemerintah daeran	100 %	1,000,000				100 %	-	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2	19	1	1.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	1,000,000	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5 Unit	-	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2	19	1	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan jasa penujang urusan pemerintahan daerah	100 %	1,956,030,876				100 %	-	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2	19	1	1.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	519,998,628	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		12 Laporan	-	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2	19	1	1.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	44 Laporan	1,436,032,248	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		44 Laporan	-	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2	19	1	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentasi barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah dalam kondisi baik	100 %	519,342,500				100 %	-	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2	19	1	1.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	6 Unit	240,510,000	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		6 Unit	-	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2	19	1	1.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit	203,832,500	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2 Unit	-	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2	19	1	1.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit	25,000,000	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5 Unit	-	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2	19	1	1.09	8	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	2 Unit	50,000,000	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2 Unit	-	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2	19	2			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	0.25 %	4,112,712,930				0.25 %	149,500,000	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
						Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organsasi kemasyarakatan	2.03 %					2.03 %		DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2	19	2	1.01		Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi	Persentase pemuda kader yang diberdayakan	0.46 %	2,822,712,930				0.46 %	149,500,000	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	19	2	1.01	1	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor Provinsi	Jumlah Pemuda Pelopor Provinsi dari Seluruh Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	210 Orang	77,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		210 Orang	-	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2	19	2	1.01	2	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wirausaha Muda Provinsi	Jumlah Wirausaha Muda Provinsi dari Seluruh Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	500 Orang	500,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		500 Orang	-	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2	19	2	1.01	3	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Provinsi	Jumlah Pemuda Kader Provinsi dari Seluruh Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	650 Orang	569,950,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		650 Orang	-	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2	19	2	1.01	4	Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera	Jumlah Pemuda Kader Provinsi yang terseleksi dan Diberikan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera	75 Orang	1,176,262,930	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		75 Orang	-	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2	19	2	1.01	6	Pemberian Penghargaan kepada Pemuda dan Organisasi Pemuda Provinsi yang Berprestasi	Jumlah Dokumen Penghargaan Pemuda Provinsi yang Berprestasi dan Menerima Penghargaan	4 Dokumen	149,500,000	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4 Dokumen	149,500,000	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2	19	2	1.01	8	Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan Melalui Implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan Melalui Implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Provinsi	1 Dokumen	50,000,000	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Dokumen	-	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2	19	2	1.01	9	Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	Jumlah Pemuda yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan dari Seluruh Kabupaten/Kota	500 Orang	300,000,000	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		500 Orang	-	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2	19	2	1.02		Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Provinsi	Persentase pemberdayaan organisasi kepemudaan dan kemahasiswaan	2.61 %	1,290,000,000				2.61 %	-	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2	19	2	1.02	1	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Pemuda atau Organisasi Kepemudaan Melalui Kemitraan dengan Dunia Usaha	Jumlah Pemuda Kader yang Terfasilitasi Kemitraan dengan Dunia Usaha	200 Orang	150,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		200 Orang	-	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2	19	2	1.02	2	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan Provinsi	5 Dokumen	1,140,000,000	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5 Dokumen	-	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2	19	3			PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana olahraga	200 %	73,469,172,100				200 %	-	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
						Persentase peningkatan prestasi olahraga	200 %					200 %		DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2	19	3	1.01		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Persentase pembinaan atlet pelajar	9.47 %	64,100,000,000				9.47 %	-	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2	19	3	1.01	1	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga serta Sekolah Olahraga yang Diselenggarakan oleh Masyarakat dan Dunia Usaha	Jumlah Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga serta Sekolah Olahraga yang Diselenggarakan oleh Masyarakat dan Dunia Usaha yang Dikembangkan	3 Unit	400,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3 Unit	-	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2	19	3	1.01	2	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Menengah dan Khusus	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga oleh Perkumpulan Olahraga dan Satuan Pendidikan Menengah dan Khusus	5 Dokumen	450,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5 Dokumen	-	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2	19	3	1.01	3	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Provinsi	Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga Provinsi yang Tersedia dan Termanfaatkan	63 Unit	63,250,000,000	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		63 Unit	-	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2	19	3	1.02		Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga	Jumlah atlet berprestasi	300 Atlet	4,172,672,100				300 Atlet	-	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2	19	3	1.02	1	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Provinsi	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan Multi event dan Single Event Tingkat Provinsi	15 Dokumen	4,095,172,100	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		15 Dokumen	-	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2	19	3	1.02	2	Penyelenggaraan Kejuaraan Pekan Paralimpik Provinsi dan Pekan Paralimpik Pelajar Provinsi	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan Pekan Paralimpik Provinsi dan Pekan Paralimpik Pelajar Provinsi	1 Dokumen	500,000	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Dokumen	-	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	19	3	1.02	3	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan dalam Multi Event dan Single Event	Jumlah Peserta yang Berpartisipasi dalam Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event	100 Orang	77,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100 Orang	-	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2	19	3	1.03		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Nasional	Persentase atlet PPOD potensial	100 %	196,500,000				100 %	-	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2	19	3	1.03	1	Seleksi Atlet Daerah	Jumlah Atlet Daerah yang Diseleksi	100 Orang	50,000,000	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100 Orang	-	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2	19	3	1.03	2	Pemusatan Latihan Daerah, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	Jumlah Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	3 Pelatda	100,000,000	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3 Pelatda	-	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2	19	3	1.03	3	Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Provinsi	Jumlah Atlet Berprestasi Provinsi yang Dibina dan Diberikan Pengembangan	100 Orang	46,000,000	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100 Orang	-	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2	19	3	1.03	4	Pemberian Penghargaan Olahraga Provinsi	Jumlah Olahragawan Berprestasi Provinsi yang Menerima Penghargaan	1 Orang	500,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Orang	-	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2	19	3	1.04		Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Persentase pembinaan dan pengembangan cabang olahraga	100 %	5,000,000,000				100 %	-	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2	19	3	1.04	2	Pengembangan Organisasi Keolahragaan	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Organisasi Keolahragaan	1 Dokumen	5,000,000,000	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Dokumen	-	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2	19	4			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Persentasi organisasi pramuka aktif	100 %	750,000,000				100 %	-	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2	19	4	1.01		Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Persentase pembinaan organisasi kepramukaan	100 %	750,000,000				100 %	-	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2	19	4	1.01	2	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Provinsi	Jumlah Organisasi Kepramukaan Provinsi yang Meningkat Kapasitasnya	25 Organisasi	500,000,000	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		25 Organisasi	-	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2	19	4	1.01	3	Pengembangan Kapasitas SDM Kepramukaan Provinsi	Jumlah Pusat dan Aktivitas Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Kepramukaan di Daerah Provinsi yang Berkualitas	2 Unit	50,000,000	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2 Unit	-	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2	19	4	1.01	5	Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Provinsi	Jumlah Laporan Kegiatan Kepramukaan Provinsi	2 Laporan	200,000,000	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2 Laporan	-	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2	20				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK			749,998,612					1,110,000,000	
					DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN			749,998,612					1,110,000,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
2	20	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Cakupan Ketersediaan Data Statistik Sektoral	100 %	749,998,612				100 %	1,110,000,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA,
2	20	2	1.01		Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Statistik Sektoral	4 Laporan	749,998,612				4 Laporan	1,110,000,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
2	20	2	1.01	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	4 Dokumen	199,999,500	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4 Dokumen	300,000,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
2	20	2	1.01	2	Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Jumlah SDM yang Meningkat Kapasitasnya dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	15 Orang	100,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		15 Orang	200,000,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
2	20	2	1.01	3	Membangun Metadata Statistik Sektoral	Jumlah Metadata Statistik Sektoral yang Dihimpun	4 Dokumen	124,999,800	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4 Dokumen	200,000,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
2	20	2	1.01	4	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Pelatihan Statistik Sektoral dari BPS	53 Orang	149,999,700	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		53 Orang	220,000,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
2	20	2	1.01	5	Pengembangan Infrastruktur	Jumlah Infrastruktur Statistik	1 Unit	99,999,812	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Unit	175,000,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	20	2	1.01	6	Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah	Jumlah data Statistik Sektoral yang Dihimpun	4 Dokumen	74,999,800	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4 Dokumen	15,000,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
2	21				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN			799,993,952					1,100,000,000	
					DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN			799,993,952					1,100,000,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
2	21	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Persentase Komunikasi daerah yang memanfaatkan persandian	60 %	799,993,952				60 %	1,100,000,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
2	21	2	1.01		Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	Jumla Area Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	6 Area	642,086,752				6 Area	850,000,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
2	21	2	1.01	2	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	4 Laporan	95,799,800	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4 Laporan	150,000,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
2	21	2	1.01	3	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	4 Laporan	278,169,800	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4 Laporan	350,000,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
2	21	2	1.01	4	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi	53 Perangkat Daerah	268,117,152	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		53 Perangkat Daerah	350,000,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
2	21	2	1.02		Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi antar Perangkat Daerah Provinsi	Jumlah Layanan Jaringan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah	3 Jenis	157,907,200				3 Jenis	250,000,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
2	21	2	1.02	1	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi	53 Perangkat Daerah	157,907,200	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		53 Perangkat Daerah	250,000,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
2	22				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN			25,784,289,252					41,070,478,257	
2	22				DINAS KEBUDAYAAN DAN KEPARIWISATAAN			25,784,289,252					41,070,478,257	DINAS KEBUDAYAAN DAN KEPARIWISATAAN
2	22	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase ASN Perangkat Daerah berkinerja kategori baik	100 %	18,020,515,362				100 %	29,548,608,445	DINAS KEBUDAYAAN DAN KEPARIWISATAAN
						Persentase penurunan temuan berdasarkan LHP	100 %					100 %		
						Persentase realisasi kegiatan Perangkat Daerah	100 %					100 %		
2	22	1	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			172,278,300					450,781,316	DINAS KEBUDAYAAN DAN KEPARIWISATAAN
2	22	1	1.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	118,214,500	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2 Dokumen	385,558,635	DINAS KEBUDAYAAN DAN KEPARIWISATAAN
2	22	1	1.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD			8,228,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			8,698,536	DINAS KEBUDAYAAN DAN KEPARIWISATAAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	22	1	1.01	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD			7,208,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			7,609,895	DINAS KEBUDAYAAN DAN KEPARIWISATAAN
2	22	1	1.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	3,370,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4 Laporan	12,705,000	DINAS KEBUDAYAAN DAN KEPARIWISATAAN
2	22	1	1.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			35,257,800	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			36,209,250	DINAS KEBUDAYAAN DAN KEPARIWISATAAN
2	22	1	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			13,018,267,786					13,287,465,755	DINAS KEBUDAYAAN DAN KEPARIWISATAAN
2	22	1	1.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	135 Orang/ Bulan	12,930,531,486	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		135 Orang/ Bulan	13,224,560,969	DINAS KEBUDAYAAN DAN KEPARIWISATAAN
2	22	1	1.02	4	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 Dokumen	18,618,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		12 Dokumen	19,530,000	DINAS KEBUDAYAAN DAN KEPARIWISATAAN
2	22	1	1.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	4,998,800	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Laporan	5,250,000	DINAS KEBUDAYAAN DAN KEPARIWISATAAN
2	22	1	1.02	6	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	35,310,900	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Dokumen	7,875,000	DINAS KEBUDAYAAN DAN KEPARIWISATAAN
2	22	1	1.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18 Laporan	22,308,700	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		18 Laporan	23,424,786	DINAS KEBUDAYAAN DAN KEPARIWISATAAN
2	22	1	1.02	8	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	6,499,900	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Dokumen	6,825,000	DINAS KEBUDAYAAN DAN KEPARIWISATAAN
2	22	1	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			-					42,966,000	DINAS KEBUDAYAAN DAN KEPARIWISATAAN
2	22	1	1.03	1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen	-	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2 Dokumen	10,799,250	DINAS KEBUDAYAAN DAN KEPARIWISATAAN
2	22	1	1.03	4	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	-	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Laporan	23,677,500	DINAS KEBUDAYAAN DAN KEPARIWISATAAN
2	22	1	1.03	6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	-	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2 Laporan	8,489,250	DINAS KEBUDAYAAN DAN KEPARIWISATAAN
2	22	1	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			113,100,000					407,893,500	DINAS KEBUDAYAAN DAN KEPARIWISATAAN
2	22	1	1.05	1	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	5 Unit	-	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5 Unit	31,500,000	DINAS KEBUDAYAAN DAN KEPARIWISATAAN
2	22	1	1.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	135 Paket	113,100,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		135 Paket	157,500,000	DINAS KEBUDAYAAN DAN KEPARIWISATAAN
2	22	1	1.05	5	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai			-	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			8,893,500	DINAS KEBUDAYAAN DAN KEPARIWISATAAN
2	22	1	1.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	0 Orang	-	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		0 Orang	210,000,000	DINAS KEBUDAYAAN DAN KEPARIWISATAAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	22	1	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah			575,053,700					1,164,396,660	DINAS KEBUDAYAAN DAN KEPARIWISATAAN
2	22	1	1.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	14 Paket	20,293,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		14 Paket	10,751,265	DINAS KEBUDAYAAN DAN KEPARIWISATAAN
2	22	1	1.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	13,500,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Paket	125,787,795	DINAS KEBUDAYAAN DAN KEPARIWISATAAN
2	22	1	1.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	65,803,700	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2 Paket	197,263,185	DINAS KEBUDAYAAN DAN KEPARIWISATAAN
2	22	1	1.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	18,820,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2 Paket	36,456,840	DINAS KEBUDAYAAN DAN KEPARIWISATAAN
2	22	1	1.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	14,400,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Dokumen	7,875,000	DINAS KEBUDAYAAN DAN KEPARIWISATAAN
2	22	1	1.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	136,800,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		12 Laporan	34,715,625	DINAS KEBUDAYAAN DAN KEPARIWISATAAN
2	22	1	1.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	55 Laporan	305,437,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		55 Laporan	541,546,950	DINAS KEBUDAYAAN DAN KEPARIWISATAAN
2	22	1	1.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	0 Dokumen	-	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		0 Dokumen	210,000,000	DINAS KEBUDAYAAN DAN KEPARIWISATAAN
2	22	1	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			-					8,283,330,731	DINAS KEBUDAYAAN DAN KEPARIWISATAAN
2	22	1	1.07	2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	0 Unit	-	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		0 Unit	990,000,000	DINAS KEBUDAYAAN DAN KEPARIWISATAAN
2	22	1	1.07	9	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3 Unit	-	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3 Unit	5,701,911,356	DINAS KEBUDAYAAN DAN KEPARIWISATAAN
2	22	1	1.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3 Unit	-	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3 Unit	1,591,419,375	DINAS KEBUDAYAAN DAN KEPARIWISATAAN
2	22	1	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			3,383,126,184					4,459,526,413	DINAS KEBUDAYAAN DAN KEPARIWISATAAN
2	22	1	1.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	981,619,560	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		12 Laporan	1,225,641,065	DINAS KEBUDAYAAN DAN KEPARIWISATAAN
2	22	1	1.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	2,401,506,624	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		12 Laporan	3,233,885,348	DINAS KEBUDAYAAN DAN KEPARIWISATAAN
2	22	1	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			758,689,392					1,452,248,070	DINAS KEBUDAYAAN DAN KEPARIWISATAAN
2	22	1	1.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 Unit	125,830,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Unit	115,607,415	DINAS KEBUDAYAAN DAN KEPARIWISATAAN
2	22	1	1.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	23 Unit	363,087,500	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		23 Unit	499,550,205	DINAS KEBUDAYAAN DAN KEPARIWISATAAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	22	1	1.09	8	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	1 Unit	50,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Unit	105,000,000	DINAS KEBUDAYAAN DAN KEPARIWISATAAN
2	22	1	1.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	72,271,892	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Unit	574,590,450	DINAS KEBUDAYAAN DAN KEPARIWISATAAN
2	22	1	1.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	45 Unit	147,500,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		45 Unit	157,500,000	DINAS KEBUDAYAAN DAN KEPARIWISATAAN
2	22	2			PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Persentase Karya Budaya yang direvitalisasi dan Inventarisasi	4,5 %	707,535,200				4,5 %	1,537,182,231	DINAS KEBUDAYAAN DAN KEPARIWISATAAN
2	22	2	1.01		Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi			115,732,000					260,694,500	DINAS KEBUDAYAAN DAN KEPARIWISATAAN
2	22	2	1.01	1	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilindungi, Dikembangkan dan Dimanfaatkan	10 Objek	115,732,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		10 Objek	260,694,500	DINAS KEBUDAYAAN DAN KEPARIWISATAAN
2	22	2	1.02		Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya Lintas Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi			591,803,200					1,276,487,731	DINAS KEBUDAYAAN DAN KEPARIWISATAAN
2	22	2	1.02	1	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	2 Objek	70,304,400	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2 Objek	421,322,999	DINAS KEBUDAYAAN DAN KEPARIWISATAAN
2	22	2	1.02	2	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	4 Laporan	521,498,800	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4 Laporan	855,164,732	DINAS KEBUDAYAAN DAN KEPARIWISATAAN
2	22	3			PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Persentase Sanggar Kesenian yang Mendapatkan Pelatihan/Pembinaan	9,4 %	2,298,499,700				9,4 %	357,500,000	DINAS KEBUDAYAAN DAN KEPARIWISATAAN
2	22	3	1.01		Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota			2,298,499,700					357,500,000	DINAS KEBUDAYAAN DAN KEPARIWISATAAN
2	22	3	1.01	1	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya)	937 Orang	2,298,499,700	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		937 Orang	357,500,000	DINAS KEBUDAYAAN DAN KEPARIWISATAAN
2	22	4			PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	Persentase Lembaga Sejarah yang di Fasilitasi.	5,6 %	84,292,400				5,6 %	266,200,000	DINAS KEBUDAYAAN DAN KEPARIWISATAAN
2	22	4	1.01		Pembinaan Sejarah Lokal Provinsi			84,292,400					266,200,000	DINAS KEBUDAYAAN DAN KEPARIWISATAAN
2	22	4	1.01	1	Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi	Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi yang Diberdayakan	60 Orang	84,292,400	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		60 Orang	266,200,000	DINAS KEBUDAYAAN DAN KEPARIWISATAAN
2	22	5			PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Persentase Cagar Budaya yang dilestarikan	1%	756,552,200				1%	2,379,096,731	DINAS KEBUDAYAAN DAN KEPARIWISATAAN
2	22	5	1.01		Penetapan Cagar Budaya Peringkat Provinsi			140,520,000					962,846,731	DINAS KEBUDAYAAN DAN KEPARIWISATAAN
2	22	5	1.01	2	Penetapan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan	5 Objek	140,520,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5 Objek	962,846,731	DINAS KEBUDAYAAN DAN KEPARIWISATAAN
2	22	5	1.02		Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Provinsi			616,032,200					1,416,250,000	DINAS KEBUDAYAAN DAN KEPARIWISATAAN
2	22	5	1.02	1	Pelindungan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Diregistrasi	0 Objek	-	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		0 Objek	371,250,000	DINAS KEBUDAYAAN DAN KEPARIWISATAAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	22	5	1.02	2	Pengembangan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dikembangkan	2 Objek	393,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2 Objek	660,000,000	DINAS KEBUDAYAAN DAN KEPARIWISATAAN
2	22	5	1.02	3	Pemanfaatan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dimanfaatkan	1 Objek	223,032,200	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Objek	385,000,000	DINAS KEBUDAYAAN DAN KEPARIWISATAAN
2	22	6			PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	Persentase Kunjungan ke musium	100%	3,916,894,390				100%	6,981,890,850	DINAS KEBUDAYAAN DAN KEPARIWISATAAN
2	22	6	1.01		Pengelolaan Museum Provinsi			3,916,894,390					6,981,890,850	DINAS KEBUDAYAAN DAN KEPARIWISATAAN
2	22	6	1.01	1	Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfataan Koleksi Secara Terpadu	Jumlah Koleksi Museum yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfataan	350 Unit	1,189,889,450	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		350 Unit	1,309,894,333	DINAS KEBUDAYAAN DAN KEPARIWISATAAN
2	22	6	1.01	2	Pembinaan dan Peningkatan Mutu dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Permuseuman	Jumlah Sumber Daya Manusia Permuseuman yang Ditingkatkan Mutu dan Kapasitasnya	0 Orang	-	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		0 Orang	60,500,000	DINAS KEBUDAYAAN DAN KEPARIWISATAAN
2	22	6	1.01	3	Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap Museum	Jumlah Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap Museum	7 Unit	2,063,005,300	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7 Unit	3,162,491,937	DINAS KEBUDAYAAN DAN KEPARIWISATAAN
2	22	6	1.01	4	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum	Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Tersedia	6 Unit	663,999,640	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		6 Unit	1,734,004,580	DINAS KEBUDAYAAN DAN KEPARIWISATAAN
2	22	6	1.01	5	Revitalisasi Sarana dan Prasarana Museum	Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Direvitalisasi	0 Unit	-	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		0 Unit	715,000,000	DINAS KEBUDAYAAN DAN KEPARIWISATAAN
2	23				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN			36,840,317,769					47,320,000,000	
2	23				DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN			36,840,317,769					47,320,000,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	23	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase ASN Perangkat Daerah berkinerja kategori baik	100 %	28,156,196,769				100 %	38,470,000,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
						Persentase penurunan temuan berdasarkan LHP	100 %					100 %		DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
						Persentase realisasi kegiatan Perangkat Daerah	100 %					100 %		DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	23	1	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan	6 Dokumen	440,681,700				6 Dokumen	1,040,000,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	23	1	1.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	196,447,500	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pajak Daerah		6 Dokumen	500,000,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	23	1	1.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	18,453,500	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pajak Daerah		1 Dokumen	70,000,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	23	1	1.01	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	17,201,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pajak Daerah		1 Dokumen	110,000,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	23	1	1.01	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	10,905,100	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pajak Daerah		1 Dokumen	65,000,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	23	1	1.01	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	15,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pajak Daerah		1 Dokumen	60,000,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	23	1	1.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6 Laporan	25,358,500	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pajak Daerah		6 Laporan	85,000,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	23	1	1.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6 Laporan	157,316,100	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pajak Daerah		6 Laporan	150,000,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	23	1	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			25,143,527,873					30,950,000,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	23	1	1.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	180 Orang/ Bulan	24,927,163,873	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pajak Daerah		180 Orang/ Bulan	30,000,000,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	23	1	1.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	5,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pajak Daerah		1 Dokumen	50,000,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	23	1	1.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	37,903,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pajak Daerah		12 Dokumen	250,000,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	23	1	1.02	4	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 Dokumen	76,325,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pajak Daerah		12 Dokumen	250,000,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	23	1	1.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	51,997,500	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pajak Daerah		1 Laporan	50,000,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	23	1	1.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	20 Laporan	10,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pajak Daerah		20 Laporan	100,000,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	23	1	1.02	8	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	35,138,500	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pajak Daerah		1 Dokumen	250,000,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	23	1	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			3,000,000					200,000,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	23	1	1.03	1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	2,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pajak Daerah		1 Dokumen	50,000,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	23	1	1.03	4	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	1,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pajak Daerah		1 Laporan	50,000,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	23	1	1.03	5	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	0 Laporan	-	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pajak Daerah		0 Laporan	50,000,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	23	1	1.03	7	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	0 Dokumen	-	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pajak Daerah		0 Dokumen	50,000,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	23	1	1.04		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah			-					150,000,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	23	1	1.04	1	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah	0 Dokumen	-	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pajak Daerah		0 Dokumen	50,000,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	23	1	1.04	2	Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah	0 Dokumen	-	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pajak Daerah		0 Dokumen	50,000,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	23	1	1.04	3	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	0 Laporan	-	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pajak Daerah		0 Laporan	50,000,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	23	1	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			24,650,000					900,000,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	23	1	1.05	1	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	5 Unit	5,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pajak Daerah		5 Unit	100,000,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	23	1	1.05	3	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	2,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pajak Daerah		1 Dokumen	50,000,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	23	1	1.05	4	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	12 Dokumen	5,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pajak Daerah		12 Dokumen	200,000,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	23	1	1.05	5	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	5,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pajak Daerah		1 Dokumen	50,000,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	23	1	1.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 Orang	2,650,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pajak Daerah		10 Orang	100,000,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	23	1	1.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	0 Orang	-	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pajak Daerah		0 Orang	200,000,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	23	1	1.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	50 Orang	5,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pajak Daerah		50 Orang	200,000,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	23	1	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dos Arsip	5 Dos	611,429,800				5 Dos	1,730,000,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	23	1	1.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	7 Paket	93,950,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pajak Daerah		7 Paket	160,000,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	23	1	1.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	20 Paket	239,490,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pajak Daerah		20 Paket	750,000,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	23	1	1.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	10 Paket	20,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pajak Daerah		10 Paket	70,000,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	23	1	1.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	14,400,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pajak Daerah		12 Laporan	150,000,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	23	1	1.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	243,589,800	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pajak Daerah		12 Laporan	600,000,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	23	1	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			-					1,100,000,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	23	1	1.07	1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	0 Unit	-	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pajak Daerah		0 Unit	700,000,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	23	1	1.07	2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	0 Unit	-	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pajak Daerah		0 Unit	150,000,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	23	1	1.07	5	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	0 Paket	-	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pajak Daerah		0 Paket	250,000,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	23	1	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Umum Pelayanan Kantor	1 Laporan	853,517,396				1 Laporan	1,100,000,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	23	1	1.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	853,517,396	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pajak Daerah		12 Laporan	1,100,000,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	23	1	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			1,079,390,000					1,300,000,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	23	1	1.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	14 Unit	400,390,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pajak Daerah		14 Unit	500,000,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	23	1	1.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6 Unit	179,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pajak Daerah		6 Unit	200,000,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	23	1	1.09	8	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	0 Unit	-	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pajak Daerah		0 Unit	100,000,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	23	1	1.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	500,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pajak Daerah		5 Unit	500,000,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	23	2			PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Jumlah pengunjung perpustakaan konvensional dan elektronik	250.000 orang	7,850,911,000				250.000 orang	5,850,000,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	23	2	1.01		Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi			7,770,511,000					4,950,000,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	23	2	1.01	1	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	Jumlah perpustakaan elektronik yang dipelihara dengan Manajemen Layanan TIK Berbasis ISO20000 (ITSM : Information Technology Service	4 Perpustakaan	62,967,400	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pajak Daerah		4 Perpustakaan	600,000,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	23	2	1.01	2	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah perpustakaan yang Dikembangkan dalam mewujudkan standar nasional perpustakaan di wilayah provinsi sesuai kewenangannya	20 Perpustakaan	5,500,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pajak Daerah		20 Perpustakaan	1,500,000,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	23	2	1.01	3	Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Provinsi	Jumlah koleksi perpustakaan khas daerah tingkat provinsi yang Dikembangkan	100 Eksemplar	5,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pajak Daerah		100 Eksemplar	250,000,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	23	2	1.01	4	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus di Seluruh Wilayah Provinsi sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	Jumlah Perpustakaan pada satuan Pendidikan menengah atas dan Pendidikan khsus yang Dibina sesuai kewenangan Provinsi dalam mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	100 Perpustakaan	75,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pajak Daerah		100 Perpustakaan	200,000,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	23	2	1.01	5	Pembinaan Perpustakaan Khusus Tingkat Provinsi	Jumlah Perpustakaan khusus yang Dibina sesuai kewenangan provinsi dalam mewujdukan standar nasional perpustakaan	10 Perpustakaan	15,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pajak Daerah		10 Perpustakaan	300,000,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	23	2	1.01	6	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah tenaga perpustakaan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dan Mendapat sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Provinsi	0 Orang	-	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pajak Daerah		0 Orang	150,000,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	23	2	1.01	7	Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Daerah Provinsi yang Dikembangkan Melalui Peningkatan Koleksi	4 Perpustakaan	1,200,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pajak Daerah		4 Perpustakaan	1,500,000,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	23	2	1.01	8	Pengembangan Perpustakaan Deposit	Jumlah Perpustakaan Deposit yang Dikembangkan	5 Perpustakaan	30,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pajak Daerah		5 Perpustakaan	300,000,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	23	2	1.01	9	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dikelola dan Dikembangkan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	100 Eksemplar	775,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pajak Daerah		100 Eksemplar	100,000,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	23	2	1.01	10	Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Provinsi	10 Dokumen	107,543,600	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pajak Daerah		10 Dokumen	50,000,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	23	2	1.02		Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Pembudayaan gemar membaca	100 Orang	80,400,000				100 Orang	900,000,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	23	2	1.02	1	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Tingkat Menengah dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Pendidikan Tingkat Menengah dan Pendidikan Khusus	20 Lokus	75,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pajak Daerah		20 Lokus	500,000,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	23	2	1.02	3	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	Jumlah orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	60 Orang	5,400,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pajak Daerah		60 Orang	300,000,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	23	2	1.02	5	Pemilihan Duta Baca Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Duta Baca Tingkat Daerah Provinsi yang Dipilih dan Didukung Kegiatannya	0 Orang	-	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pajak Daerah		0 Orang	100,000,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	23	3			PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	Persentase naskah kuno yang di lestarikan	100 %	833,210,000				100 %	3,000,000,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	23	3	1.01		Pelestarian Karya Cetak dan Karya Rekam Koleksi Daerah di Daerah Provinsi	Jumlah Koleksi	3 Macam	-				3 Macam	1,200,000,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	23	3	1.01	1	Penghimpunan dan Pengelolaan Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam	Jumlah Koleksi KCKR yang Dihimpun dan Dikelola Serta Kepatuhan Serah Simpan KCKR	0 Eksemplar	-	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pajak Daerah		0 Eksemplar	700,000,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	23	3	1.01	2	Pemberian Penghargaan kepada Penerbit dan Produsen Karya Rekam yang Aktif dalam Melaksanakan Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam	Jumlah Penerima Penghargaan Kepada Penerbit dan Produsen Karya Rekam yang Aktif Dalam Melaksanakan Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam	5 Penerbit	-	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pajak Daerah		5 Penerbit	500,000,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	23	3	1.02		Penerbitan Katalog Induk Daerah dan Bibliografi Daerah	Jumlah Dokumen KID dan Literatur Sekunder Lainnya yang Diterbitkan	100 Buku	815,000,000				100 Buku	400,000,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	23	3	1.02	1	Penerbitan Katalog Induk Daerah	Jumlah Dokumen KID dan Literatur Sekunder Lainnya yang Diterbitkan	200 Entry	15,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pajak Daerah		200 Entry	250,000,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	23	3	1.02	2	Penerbitan Bibliografi Daerah	Jumlah Bibliografi Daerah yang Diterbitkan	2 Naskah	800,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pajak Daerah		2 Naskah	150,000,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	23	3	1.03		Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Provinsi	umlah Masyarakat yang Berperan dalam Pelestarian Naskah Kuno dan Pendaftaran Naskah Kuno	2 Orang	-				2 Orang	600,000,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	23	3	1.03	1	Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno	Jumlah Masyarakat yang Berperan dalam Pelestarian Naskah Kuno dan Pendaftaran Naskah Kuno	0 Orang	-	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pajak Daerah		0 Orang	250,000,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	23	3	1.03	2	Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan	Jumlah Naskah Kunah yang Dilakukan Pengembangan yang Dimiliki Oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan	0 Eksemplar	-	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pajak Daerah		0 Eksemplar	350,000,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	23	3	1.04		Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang ditemukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang Diseleksi, Di Lakukan pengadaan dan pengolah serta penyiangan oleh Perpustakaan Daerah Tingkat Provinsi	100 Exp	18,210,000				100 Exp	800,000,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	23	3	1.04	1	Seleksi dan Pengadaan Koleksi Budaya Etnis Nusantara	Jumlah Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang Diseleksi dan Dilakukan Pengadaan Oleh Perpustakaan Daerah Tingkat Provinsi	100 Eksemplar	18,210,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pajak Daerah		100 Eksemplar	500,000,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	23	3	1.04	2	Pengolahan dan Penyiangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara	Jumlah Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang Diolah dan Dilakukan penyiangan oleh Perpustakaan Daerah Tingkat Provinsi	0 Eksemplar	-	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pajak Daerah		0 Eksemplar	300,000,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	24				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN			3,012,714,836					8,110,000,000	
2	24				DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN			3,012,714,836					8,110,000,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	24	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase ASN Perangkat Daerah berkinerja kategori baik	100 %	2,050,668,336				100 %	4,100,000,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
						Persentase penurunan temuan berdasarkan LHP	100 %					100 %		DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
						Persentase realisasi kegiatan Perangkat Daerah	100 %					100 %		DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	24	1	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dos Arsip	5 Dos	11,415,000				5 Dos	100,000,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	24	1	1.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	5 Dokumen	11,415,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pajak Daerah		5 Dokumen	100,000,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	24	1	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Umum Pelayanan Kantor	1 Laporan	2,039,253,336				1 Laporan	4,000,000,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	24	1	1.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	2,039,253,336	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pajak Daerah		12 Laporan	4,000,000,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	24	2			PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Persentase Perangkat daerah yang mengelola arsip secara baku	75,47%	962,046,500				75,47%	3,460,000,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	24	2	1.01		Pengelolaan Arsip Dinamis Provinsi	Jumlah OPD yang Di awasi	10 OPD	156,068,500				10 OPD	1,110,000,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	24	2	1.01	1	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	Jumlah Naskah Dinas yang Diciptaan dan Digunakan	50 Berkas	-	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pajak Daerah		50 Berkas	10,000,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	24	2	1.01	2	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan	200 Berkas	12,120,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pajak Daerah		200 Berkas	100,000,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	24	2	1.01	3	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Provinsi	24 Laporan	143,948,500	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pajak Daerah		24 Laporan	1,000,000,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	24	2	1.02		Pengelolaan Arsip Statis Daerah Provinsi	Jumlah Naskah	1 Naskah	417,662,000				1 Naskah	850,000,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	24	2	1.02	1	Pengumpulan dan Penyampaian Salinan Otentik Naskah Asli Arsip Terjaga kepada ANRI	Jumlah Salinan Otentik Naskah Asli Arsip Terjaga yang dikumpulkan dan Disampaikan Kepada ANRI	1 Arsip	117,662,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pajak Daerah		1 Arsip	50,000,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	24	2	1.02	2	Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	Jumlah Arsip Statis yang dilakukan Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses	2 Arsip	300,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pajak Daerah		2 Arsip	800,000,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	24	2	1.03		Pengelolaan Simpul Jaringan dalam Sistem Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Provinsi	Jumlah LKD	10 LKD	388,316,000				10 LKD	1,500,000,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
						jumlah Pengunjung layanan kearsipan	100 orang					100 orang		DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	24	2	1.03	1	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Provinsi Melalui JIKN	Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Provinsi Melalui JIKN	300 Pengguna	200,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pajak Daerah		300 Pengguna	500,000,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	24	2	1.03	2	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi	10 Laporan	188,316,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pajak Daerah		10 Laporan	1,000,000,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN			778,463,381,684					970,692,147,902	
3	25				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN			82,295,580,074					92,088,450,466	
3	25				DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN			82,295,580,074					92,088,450,466	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3	25	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase ASN perangkat daerah berkinerja kategori baik dan sangat baik	100 %	34,532,097,474				100 %	36,682,538,652	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						Persentase penurunan temuan berdasarkan LHP	60 %					60 %		DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
						Persentase realisasi kegiatan perangkat daerah	100 %					100 %		DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3	25	1	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan kinerja tepat waktu	7 Dokumen	859,773,400				7 Dokumen	465,980,070	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3	25	1	1.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	15 Dokumen	267,150,300	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		15 Dokumen	117,600,000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
										Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik				DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3	25	1	1.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	31 Dokumen	50,919,500	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		31 Dokumen	42,000,000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3	25	1	1.01	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	30 Dokumen	16,214,300	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		30 Dokumen	19,577,093	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3	25	1	1.01	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	30 Dokumen	18,940,600	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		30 Dokumen	33,551,280	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3	25	1	1.01	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	30 Dokumen	25,838,200	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		30 Dokumen	27,501,697	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3	25	1	1.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10 Laporan	465,717,700	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		10 Laporan	210,000,000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
										Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik				DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3	25	1	1.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 Laporan	14,992,800	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		12 Laporan	15,750,000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3	25	1	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Adminsitrasi Keuangan Perangkat Daerah Tepat Waktu	61 Laporan	24,745,901,430				61 Laporan	26,006,938,399	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3	25	1	1.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	199 Orang/ Bulan	24,597,226,230	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		199 Orang/ Bulan	25,811,875,169	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3	25	1	1.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	0 Dokumen	-	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		0 Dokumen	11,550,000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3	25	1	1.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	14,908,900	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		12 Dokumen	15,750,000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3	25	1	1.02	4	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 Dokumen	4,806,500	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		12 Dokumen	55,813,181	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3	25	1	1.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	7,066,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Laporan	3,510,911	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3	25	1	1.02	6	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	45,048,800	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Dokumen	46,850,958	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3	25	1	1.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18 Laporan	76,845,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		18 Laporan	55,813,180	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3	25	1	1.02	8	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	0 Dokumen	-	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		0 Dokumen	5,775,000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3	25	1	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah laporan adminsitrasi Barang Milik Daerah Perangkat Daerah	7 Laporan	14,175,000				7 Laporan	40,425,000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3	25	1	1.03	1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	1,325,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Dokumen	5,775,000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	25	1	1.03	2	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	10,900,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Dokumen	5,775,000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3	25	1	1.03	3	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	1 Laporan	1,950,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Laporan	5,775,000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3	25	1	1.03	4	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	0 Laporan	-	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		0 Laporan	5,775,000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3	25	1	1.03	5	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	0 Laporan	-	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		0 Laporan	5,775,000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3	25	1	1.03	6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	0 Laporan	-	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		0 Laporan	5,775,000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3	25	1	1.03	7	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	0 Dokumen	-	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		0 Dokumen	5,775,000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3	25	1	1.04		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Pendapatan Daerah perangkat daerah	2 Laporan	11,430,000				2 Laporan	22,050,000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3	25	1	1.04	1	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah	1 Dokumen	11,430,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Dokumen	11,025,000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3	25	1	1.04	2	Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah	0 Dokumen	-	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		0 Dokumen	11,025,000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3	25	1	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah layanan Administrasi kepegawaian Perangkat daerah	100 Persen	420,138,300				100 Persen	569,739,762	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3	25	1	1.05	1	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	2 Unit	50,260,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2 Unit	52,500,000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3	25	1	1.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	333 Paket	267,940,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		333 Paket	210,775,950	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3	25	1	1.05	3	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12 Dokumen	19,560,100	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		12 Dokumen	21,000,000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3	25	1	1.05	4	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	12 Dokumen	29,323,200	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		12 Dokumen	32,571,312	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3	25	1	1.05	5	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	12 Dokumen	43,335,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		12 Dokumen	52,500,000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3	25	1	1.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	0 Orang	-	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		0 Orang	181,912,500	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3	25	1	1.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	100 Orang	9,720,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100 Orang	9,240,000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3	25	1	1.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	0 Orang	-	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		0 Orang	9,240,000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3	25	1	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah layanan administrasi administrasi umum perangkat daerah	100 Persen	1,836,995,703				100 Persen	1,980,916,638	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3	25	1	1.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	10 Paket	52,847,600	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		10 Paket	57,881,250	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3	25	1	1.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	30 Paket	927,173,103	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		30 Paket	951,562,000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3	25	1	1.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	10 Paket	90,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		10 Paket	94,500,000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3	25	1	1.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	0 Paket	-	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		0 Paket	22,050,000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3	25	1	1.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	30 Paket	85,300,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		30 Paket	103,144,388	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3	25	1	1.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	110,241,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		12 Laporan	115,762,500	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3	25	1	1.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	569,314,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		12 Laporan	597,429,000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	25	1	1.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	2,120,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Dokumen	5,512,500	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3	25	1	1.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	0 Dokumen	-	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		0 Dokumen	33,075,000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3	25	1	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang tersedia	12 Unit	400,000,000				12 Unit	945,000,000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3	25	1	1.07	5	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	5 Paket	200,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5 Paket	105,000,000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3	25	1	1.07	8	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	1 Unit	200,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Unit	210,000,000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3	25	1	1.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 Unit	-	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		0 Unit	420,000,000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3	25	1	1.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 Unit	-	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		0 Unit	210,000,000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3	25	1	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah layanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4 Jenis	4,717,482,391				4 Jenis	4,614,585,384	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3	25	1	1.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	0 Laporan	-	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		0 Laporan	11,025,000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3	25	1	1.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	1,097,158,327	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		12 Laporan	963,098,820	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3	25	1	1.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	0 Laporan	-	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		0 Laporan	16,537,500	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3	25	1	1.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	3,620,324,064	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		12 Laporan	3,623,924,064	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3	25	1	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam kondisi baik	81 Unit	1,526,201,250				81 Unit	2,036,903,400	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3	25	1	1.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	17 Unit	552,198,250	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		17 Unit	655,578,000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3	25	1	1.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	19 Unit	324,003,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		19 Unit	378,575,400	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3	25	1	1.09	8	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	1 Unit	50,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Unit	52,500,000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3	25	1	1.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	600,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3 Unit	630,000,000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
									Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
									Kab. Bone, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
									Kab. Bulukumba, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
									Kab. Kepulauan Selayar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
									Kota Pare Pare, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
									Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
									Kota Palopo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3	25	1	1.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0 Unit	-	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		0 Unit	210,000,000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	25	1	1.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0 Unit	-	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		0 Unit	110,250,000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3	25	2			PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	Produksi garam rakyat	48.450 ton	11,969,196,200				48.450 ton	13,321,140,000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
						Cakupan Ketersediaan Sarana dan Prasarana Pendukung Produksi Perikanan	100.00%					100.00%		DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
						Cakupan luas kawasan konservasi perairan yang dikelola secara berkelanjutan (%)	67.31%					67.31%		DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3	25	2	1.01		Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	Jumlah kawasan konservasi yang direhabilitasi	56.45 Ha	11,585,223,200				56.45 Ha	11,655,000,000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
						Jumlah sarana dan prasarana pengelolaan ruang laut sampai dengan 12 mil di luar minyak dan gas bumi	21 Unit					21 Unit		DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3	25	2	1.01	2	Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat	Luasan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Terkelola	1038850.36 Ha	175,323,200	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1038850.36 Ha	1,890,000,000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
									Kab. Bone, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
									Kab. Luwu Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
									Kab. Pangkajene Kepulauan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
									Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
									Kab. Kepulauan Selayar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
									Kab. Sinjai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
									Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
									Kota Pare Pare, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
									Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
									Kota Palopo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3	25	2	1.01	3	Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Luasan Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil yang Direhabilitasi	56.45 Ha	11,409,900,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		56.45 Ha	9,765,000,000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
									Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
									Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
									Kab. Bone, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
									Kab. Bulukumba, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
									Kab. Jeneponto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
									Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
									Kab. Luwu Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
									Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
									Kab. Pangkajene Kepulauan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
									Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
									Kab. Kepulauan Selayar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
									Kab. Sinjai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
									Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
									Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
									Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
									Kota Palopo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
									Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3	25	2	1.02		Penerbitan Izin Pemanfaatan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	Jumlah dokumen teknis pemanfaatan ruang laut di bawah 12 mil diluar minyak dan gas bumi	12 Rekomendasi	1,830,000				12 Rekomendasi	56,227,500	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3	25	2	1.02	1	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	Jumlah Rekomendasi Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Ruang Laut yang Menjadi Kewenangan Provinsi	0 Rekomendasi	-	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		0 Rekomendasi	11,025,000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3	25	2	1.02	2	Penerbitan Rekomendasi Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	Jumlah Rekomendasi Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut yang Menjadi Kewenangan Provinsi yang Diterbitkan	4 Rekomendasi	1,830,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4 Rekomendasi	13,230,000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3	25	2	1.02	3	Pelaksanaan Fasilitasi Penerbitan Rekomendasi Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi bagi Masyarakat Lokal dan Tradisional	Jumlah Rekomendasi Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut bagi Masyarakat Lokal dan Tradisional yang Diterbitkan	0 Rekomendasi	-	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		0 Rekomendasi	13,230,000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3	25	2	1.02	4	Penerbitan Rekomendasi Izin Pelaksanaan Reklamasi di Perairan Pesisir	Jumlah Rekomendasi Perizinan dalam Pelaksanaan Reklamasi di Perairan Pesisir yang Diterbitkan	0 Rekomendasi	-	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		0 Rekomendasi	13,230,000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3	25	2	1.02	5	Pencatatan dan Pengadministrasian Izin Lokasi Perairan dalam Sistem Kadaster Laut	Jumlah Izin Lokasi Perairan dalam Sistem Kadaster Laut	0 Dokumen	-	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		0 Dokumen	5,512,500	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3	25	2	1.03		Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Jumlah unit usaha masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil yang diberdayakan	24 Unit	382,143,000				24 Unit	1,609,912,500	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3	25	2	1.03	1	Pengembangan Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Jumlah Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Meningkat Kapasitasnya	100 Orang	200,000,000	Kab. Jeneponto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100 Orang	173,643,750	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
									Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
									Kab. Pangkajene Kepulauan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
									Kab. Kepulauan Selayar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
									Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
									Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3	25	2	1.03	2	Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Jumlah Kelompok Masyarakat yang Mengikuti Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	10 Kelompok	154,500,000	Kab. Jeneponto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		10 Kelompok	1,262,625,000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
									Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik				DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
									Kab. Pangkajene Kepulauan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
									Kab. Kepulauan Selayar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
									Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
									Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3	25	2	1.03	4	Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah kelompok Masyarakat yang memperoleh Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	20 Kelompok	27,643,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		20 Kelompok	173,643,750	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3	25	3			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Nilai Produksi Perikanan Tangkap	Rp. 9.210,12 M	24,121,160,300				Rp. 9.210,12 M	29,075,186,250	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
						Produksi perikanan tangkap	413.030,8 Ton					413.030,8 Ton		DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
						Cakupan Bina Kelompok Nelayan	30,25 %					30,25 %		DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
						Persentase Pelabuhan Perikanan yg memiliki sarana prasarana yang sesuai standar operasional	78,95%					78,95%		DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
						Persentase Produksi perikanan kelompok nelayan	27.17%					27.17%		DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3	25	3	1.01		Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil	Jumlah sarana dan prasarana pengelolaan penangkapan Ikan di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	287 Unit	15,523,425,800				287 Unit	22,089,900,000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3	25	3	1.01	1	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Jumlah data dan Informasi Sumber Daya Ikan yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	0 Dokumen	-	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		0 Dokumen	110,250,000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3	25	3	1.01	2	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	25 Unit	7,340,847,800	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		25 Unit	8,820,000,000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
									Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
									Kab. Bone, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
									Kab. Bulukumba, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
									Kab. Jeneponto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
									Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
									Kab. Luwu Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
									Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
									Kab. Pangkajene Kepulauan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
									Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
									Kab. Kepulauan Selayar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
									Kab. Sinjai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
									Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
									Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
									Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
									Kota Palopo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
									Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3	25	3	1.01	3	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	270 Unit	8,182,578,000	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		270 Unit	13,159,650,000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
									Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
									Kab. Bone, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
									Kab. Bulukumba, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
									Kab. Jeneponto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
									Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
									Kab. Luwu Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
									Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
									Kab. Pangkajene Kepulauan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
									Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
									Kab. Kepulauan Selayar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
									Kab. Sinjai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
									Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
									Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
									Kota Pare Pare, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
									Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
									Kota Palopo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
									Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3	25	3	1.02		Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah sarana dan prasarana pengelolaan penangkapan Ikan	17 Unit	63,214,500				17 Unit	568,132,500	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3	25	3	1.02	1	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan yang Tersedia di Wilayah Perairan Darat	0 Dokumen	-	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		0 Dokumen	55,125,000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3	25	3	1.02	2	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia di Wilayah Perairan Darat	2 Unit	-	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2 Unit	210,000,000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3	25	3	1.02	3	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia di Wilayah Perairan Darat	15 Unit	63,214,500	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		15 Unit	303,007,500	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
									Kab. Enrekang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
									Kab. Gowa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
									Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
									Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
									Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3	25	3	1.03		Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT	Jumlah Rekomendasi Ijin Usaha Perikanan Tangkap Untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT	100 Rekomendasi	1,440,000				100 Rekomendasi	55,125,000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3	25	3	1.03	1	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di Atas 10 GT sampai dengan 30 GT	Jumlah Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Rekomendasi Perizinan Berusaha Perikanan Tangkap yang Menjadi Kewenangan Provinsi	0 Dokumen	-	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		0 Dokumen	11,025,000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3	25	3	1.03	2	Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di Atas 10 GT sampai dengan 30 GT	Jumlah Rekomendasi Perizinan Usaha Perikanan Tangkap yang Diterbitkan	100 Rekomendasi	1,440,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100 Rekomendasi	33,075,000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3	25	3	1.03	3	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di Atas 10 GT sampai dengan 30 GT	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia	0 Dokumen	-	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		0 Dokumen	11,025,000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3	25	3	1.04		Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT yang Bukan Dimiliki oleh Nelayan Kecil	Jumlah Rekomendasi Ijin Usaha Perikanan Tangkap Untuk Kapal Perikanan Berukuran Sampai Dengan 10 GT yang Bukan di Miliki Oleh Nelayan Kecil yang diterbitkan	150 rekomendasi	-				150 rekomendasi	60,637,500	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3	25	3	1.04	1	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT yang Bukan Dimiliki oleh Nelayan Kecil	Jumlah Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Rekomendasi Perizinan Berusaha Perikanan Tangkap yang Menjadi Kewenangan Provinsi	0 Dokumen	-	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		0 Dokumen	11,025,000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3	25	3	1.04	2	Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT yang Bukan Dimiliki oleh Nelayan Kecil	Jumlah Rekomendasi Perizinan Usaha Perikanan Tangkap yang Diterbitkan	0 Rekomendasi	-	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		0 Rekomendasi	49,612,500	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3	25	3	1.05		Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Laut, Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Tanda Daftar Kapal yang telah diterbitkan	125 Laporan	-				125 Laporan	46,856,250	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3	25	3	1.05	1	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT	Jumlah Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Rekomendasi Perizinan Berusaha Perikanan Tangkap yang Menjadi Kewenangan Provinsi	0 Dokumen	-	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		0 Dokumen	5,512,500	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3	25	3	1.05	2	Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT	Jumlah Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT yang Diterbitkan	0 Dokumen	-	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		0 Dokumen	41,343,750	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3	25	3	1.06		Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi	Jumlah Pelabuhan Perikanan Provinsi yang dikelola	5 Unit	8,533,080,000				5 Unit	6,195,000,000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3	25	3	1.06	1	Penentuan Lokasi Pembangunan Pelabuhan Perikanan	Jumlah Lokasi Pembangunan Pelabuhan Perikanan	5 Pelabuhan Perikanan	51,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5 Pelabuhan Perikanan	52,500,000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3	25	3	1.06	2	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan	Jumlah Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan yang Tersedia	4 Unit	8,382,080,000	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4 Unit	5,985,000,000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
									Kab. Bulukumba, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik				DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
									Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
									Kab. Pangkajene Kepulauan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
									Kab. Sinjai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
									Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
									Kota Pare Pare, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3	25	3	1.06	3	Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan	Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan yang Terlaksana	2 Layanan	100,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2 Layanan	157,500,000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3	25	3	1.07		Penerbitan Izin Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dengan Ukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT	Jumlah rekomendasi Izin Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Pengangkut Ikan Dengan Ukuran di Atas 10 GT Sampai Dengan 30 GT	20 rekomendasi	-				20 rekomendasi	27,562,500	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3	25	3	1.07	1	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Persetujuan Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dengan Ukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT	Jumlah Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Rekomendasi Persetujuan Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan yang Menjadi Kewenangan Provinsi	0 Dokumen	-	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		0 Dokumen	5,512,500	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3	25	3	1.07	2	Penerbitan Persetujuan Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dengan Ukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT	Jumlah Rekomendasi Persetujuan Pengadaan Kapal Perikanan (PPKP) yang Diterbitkan	0 Rekomendasi	-	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		0 Rekomendasi	22,050,000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3	25	3	1.08		Penerbitan Izin Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT di Laut, Sungai, danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Rekomendasi Izin Pengadaan Kapal Penangkap Ikan & Kapal Pengangkut Ikan dgn Ukuran Sampai dgn 10 GT di Laut,Sungai,Danau,Waduk,Rawa, dan Genangan air lainnya yang dapat di usahakan Lintas kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	2 Rekomendasi	-				2 Rekomendasi	7,717,500	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3	25	3	1.08	1	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Persetujuan Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT	Jumlah Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Rekomendasi Persetujuan Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan yang Menjadi Kewenangan Provinsi	0 Dokumen	-	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		0 Dokumen	5,512,500	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3	25	3	1.08	2	Penerbitan Persetujuan Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT	Jumlah Rekomendasi Persetujuan Pengadaan Kapal Perikanan (PPKP) yang Diterbitkan yang Menjadi Kewenangan Provinsi	0 Rekomendasi	-	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		0 Rekomendasi	2,205,000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3	25	3	1.09		Pendaftaran Kapal Perikanan di atas 10 GT sampai dengan 30 GT	Jumlah laporan pendaftaran Kapal Perikanan diatas 10 GT sampai dengan 30 GT	10 Laporan	-				10 Laporan	16,537,500	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3	25	3	1.09	1	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Pendaftaran Kapal Perikanan dengan Ukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT	Jumlah Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Rekomendasi Buku Kapal Perikanan yang Menjadi Kewenangan Provinsi	0 Dokumen	-	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		0 Dokumen	5,512,500	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3	25	3	1.09	2	Penerbitan Pendaftaran Kapal Perikanan dengan Ukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT	Jumlah Rekomendasi Buku Kapal Perikanan (BKP) yang Diterbitkan	0 Rekomendasi	-	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		0 Rekomendasi	11,025,000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3	25	3	1.10		Pendaftaran Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT yang Beroperasi di Laut, Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah laporan pendaftaran Kapal Perikanan Berukuran Sampai Dengan 10 GT yang Beroperasi di Laut,Sungai,danau,waduk,Rawa,dan Genangan air Lainnya Dapat diusahakan Lintasan Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	2 Laporan	-				2 Laporan	7,717,500	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3	25	3	1.10	1	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Pendaftaran Kapal Perikanan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT	Jumlah Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Rekomendasi Buku Kapal Perikanan yang menjadi Kewenangan Provinsi	0 Dokumen	-	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		0 Dokumen	5,512,500	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	25	3	1.10	2	Penerbitan Pendaftaran Kapal Perikanan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT	Jumlah Rekomendasi Buku Kapal Perikanan (BKP) yang Diterbitkan	2 Rekomendasi	-	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 Rekomendasi	2,205,000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3	25	4			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Nilai produksi perikanan budidaya	Rp. 15.958,39 M	7,195,875,800				Rp. 15.958,39 M	7,015,948,125	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
						Produksi perikanan budidaya	4.298.391,1 Ton					4.298.391,1 Ton		DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
						Persentase ketersediaan benur berkualitas	100.00%					100.00%		DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3	25	4	1.01		Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah rekomendasi izin usaha perikanan di bidang Pembudidayaan Ikan yang usahanya lintas daerah kabupaten/kota dal (satu) daerah Provinsi	5 rekomendasi	-				5 rekomendasi	66,150,000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3	25	4	1.01	1	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan	Jumlah Rekomendasi Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Diterbitkan	0 Rekomendasi	-	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		0 Rekomendasi	5,512,500	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3	25	4	1.01	2	Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan	Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha Bidang Pembudidayaan Ikan yang Diterbitkan	0 Rekomendasi	-	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		0 Rekomendasi	5,512,500	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3	25	4	1.01	3	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan	Jumlah Data dan Informasi Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan di Laut Berdasarkan Skala Usaha dan Tingkat Risiko	1 Dokumen	-	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	55,125,000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3	25	4	1.02		Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya di Laut Sampai Dengan 12 Mil serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing	Jumlah rekomendasi Izin Usaha Perikanan yang ditertibkan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya di Laut Sampai Dengan 12 Mil Serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/Atau Tenaga Kerja Asing	100 rekomendasi	-				100 rekomendasi	16,537,500	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3	25	4	1.02	1	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan	Jumlah Rekomendasi Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Perizinan Berusaha Bidang Pembudidayaan Ikan yang Diterbitkan	0 Rekomendasi	-	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		0 Rekomendasi	5,512,500	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3	25	4	1.02	2	Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan	Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha Bidang Pembudidayaan Ikan yang Diterbitkan	0 Rekomendasi	-	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		0 Rekomendasi	11,025,000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3	25	4	1.03		Penerbitan Izin Kapal Pengangkut Hasil Pembudidayaan Ikan Berukuran sampai dengan 30 GT yang Beroperasi di Wilayah Administrasinya, serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing	Jumlah rekomendasi Izin kapal Pengangkut Hasil Pembudidayaan Ikan Berukuran sampai Dengan 30 GT yang Beroperasi di Wilayah Administrasinya, Serta tidak Menggunakan Modal Asing dan/Atau Tenaga Kerja Asing yang diterbitkan	2 rekomendasi	-				2 rekomendasi	7,717,500	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3	25	4	1.03	1	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Izin Kapal Pengangkut Hasil Pembudidayaan Ikan Berukuran sampai dengan 30 GT	Jumlah Rekomendasi Persyaratan dan Prosedur Izin Kapal Pengangkut Hasil Pembudidayaan Ikan yang menjadi Kewenangan Provinsi yang Diterbitkan	0 Rekomendasi	-	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		0 Rekomendasi	5,512,500	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3	25	4	1.03	2	Penerbitan Rekomendasi Izin Kapal Pengangkut Hasil Pembudidayaan Ikan Berukuran sampai dengan 30 GT	Jumlah Rekomendasi Izin Kapal Pengangkut Hasil Pembudidayaan Ikan yang menjadi Kewenangan Provinsi yang Diterbitkan	0 Rekomendasi	-	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		0 Rekomendasi	2,205,000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3	25	4	1.04		Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah laporan Tanda Daftar bagi Pembudidaya Ikan Kecil (TDPIK) DI Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Dalam provinsi	100 Laporan	-				100 Laporan	16,537,500	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3	25	4	1.04	1	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Rekomendasi Persyaratan dan Prosedur Perizinan Berusaha Skala Mikro dan Kecil bagi Pembudi Daya Ikan Kecil di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	0 Rekomendasi	-	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		0 Rekomendasi	5,512,500	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3	25	4	1.04	2	Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha Skala Mikro dan Kecil di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	0 Rekomendasi	-	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		0 Rekomendasi	11,025,000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	25	4	1.05		Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut	Jumlah sarana dan prasarana Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut	133 Unit	5,051,075,800				133 Unit	3,864,505,625	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3	25	4	1.05	1	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	0 Dokumen	-	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		0 Dokumen	55,125,000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3	25	4	1.05	2	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut	130 Unit	4,800,000,000	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		130 Unit	3,305,000,000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
									Kab. Bone, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
									Kab. Jeneponto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
									Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
									Kab. Luwu Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
									Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
									Kab. Pangkajene Kepulauan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
									Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
									Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
									Kota Palopo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3	25	4	1.05	4	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut	1 Unit	69,096,800	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Unit	237,313,125	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3	25	4	1.05	6	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan yang Teruji Sehat	13 Dokumen	81,640,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		13 Dokumen	162,067,500	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3	25	4	1.05	7	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Laut dan di Kawasan Konservasi yang Dikelola oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Pembudidaya	30 Orang	100,339,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		30 Orang	105,000,000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3	25	4	1.06		Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Perairan Darat	Jumlah sarana dan prasarana Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Tawar	150 Unit	2,144,800,000				150 Unit	3,044,500,000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3	25	4	1.06	1	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	18 Unit	904,800,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		18 Unit	1,417,000,000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
									Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik				DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
									Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
									Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
									Kota Pare Pare, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
									Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3	25	4	1.06	2	Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	150 Unit	1,240,000,000	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		150 Unit	1,627,500,000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
									Kab. Bone, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik				DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
									Kab. Bulukumba, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
									Kab. Gowa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
									Kab. Jeneponto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
									Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
									Kab. Luwu Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
									Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
									Kab. Pangkajene Kepulauan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
									Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
									Kab. Sinjai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
									Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
									Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
									Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
									Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3	25	5			PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Persentase Kepatuhan Pelaku usaha KP terhadap ketentuan peraturan perundangan yang berlaku	89.85 %	3,565,142,900				89.85 %	3,865,103,689	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3	25	5	1.01		Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	Jumlah sarana prasarana pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	9 Unit usaha	3,531,297,900				9 Unit usaha	3,632,948,689	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3	25	5	1.01	1	Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut sampai dengan 12 Mil	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut sampai dengan 12 Mil	1 Dokumen	108,982,300	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Dokumen	114,818,689	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3	25	5	1.01	2	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil	7 Dokumen	3,363,856,900	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7 Dokumen	3,391,500,000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
									Kab. Bone, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik				DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
									Kab. Gowa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
									Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
									Kab. Luwu Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
									Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
									Kab. Pangkajene Kepulauan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
									Kab. Kepulauan Selayar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
									Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
									Kota Pare Pare, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
									Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
									Kota Palopo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
									Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3	25	5	1.01	3	Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil	1 Dokumen	19,265,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Dokumen	52,762,500	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3	25	5	1.01	4	Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)	Jumlah Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) yang Terdaftar dan Aktif	30 Kelompok	39,193,700	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		30 Kelompok	73,867,500	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3	25	5	1.02		Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah sarana prasarana pengawasan Sumberdaya Perikanan di Wilayah Sungai, danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya	2 Unit	33,845,000				2 Unit	232,155,000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3	25	5	1.02	1	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Sesuai dengan Kewenangannya	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan di Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Sesuai dengan Kewenangannya	1 Dokumen	10,060,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Dokumen	116,077,500	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3	25	5	1.02	2	Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Sesuai dengan Kewenangannya	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Sesuai dengan Kewenangannya	1 Dokumen	8,280,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Dokumen	52,762,500	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3	25	5	1.02	3	Pengawasan Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	1 Dokumen	15,505,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Dokumen	63,315,000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3	25	6			PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Nilai Hilirisasi Produksi olahan Ikan konsumsi dan non konsumsi	Rp. 317.28 Milyar	912,107,400				Rp. 317.28 Milyar	2,128,533,750	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
						Produksi olahan konsumsi dan non konsumsi	5.544,1 Ton					5.544,1 Ton		DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
						Persentase Pembinaan mutu produk perikanan	100.00%					100.00%		DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3	25	6	1.01		Penerbitan Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah rekomendasi Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi yang diterbitkan	85 rekomendasi	-				85 rekomendasi	70,008,750	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3	25	6	1.01	1	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha Sesuai dengan Standar Usaha Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Berdasarkan Skala Usaha dan Tingkat Risiko melalui Proses Verifikasi	0 Rekomendasi	-	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		0 Rekomendasi	5,512,500	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3	25	6	1.01	2	Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha Penunjang Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	0 Rekomendasi	-		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		0 Rekomendasi	9,371,250	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3	25	6	1.01	3	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Data dan Informasi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Berdasarkan Skala Usaha dan Risiko	0 Dokumen	-	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		0 Dokumen	55,125,000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	25	6	1.02		Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	Jumlah unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar yang mendapatkan pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan	100 Unit usaha	875,856,000				100 Unit usaha	1,995,000,000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3	25	6	1.02	1	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang Mendapatkan Pembinaan Terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Skala Usaha dan Risiko	130 Unit Usaha	200,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		130 Unit Usaha	315,000,000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3	25	6	1.02	2	Pelaksanaan Bimbingan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi Terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman untuk Dikonsumsi atau Digunakan, dan Berdaya Saing	Jumlah Unit Usaha yang Diberikan Pembinaan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi Terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, dan Daya Saing serta Pemberdayaan Usaha dalam Rangka Menghasilkan Produk yang Aman dan Bermutu untuk Dikonsumsi atau Digunakan, dan Berdaya Saing	100 Unit Usaha	675,856,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100 Unit Usaha	1,680,000,000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
									Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
									Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3	25	6	1.03		Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah laporan Bahan baku Industri Pengolahan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi yang tersedia dan disalurkan	2 Laporan	36,251,400				2 Laporan	63,525,000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3	25	6	1.03	1	Pemetaaan dan Pemantauan Kebutuhan Bahan Baku Usaha Pengolahan/Distribusi Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Pemetaan dan Pemantauan Kebutuhan Bahan Baku Usaha Pengolahan/Distribusi Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	1 Dokumen	30,851,400	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Dokumen	52,500,000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3	25	6	1.03	3	Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Logistik Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Data dan Informasi yang Diintegrasikan ke dalam Sistem Informasi Manajemen Logistik Ikan dan Terkoneksi dari Hulu sampai Hilir	1 Dokumen	5,400,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Dokumen	11,025,000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3	26				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA			8,743,359,200					99,511,376,105	
3	26				DINAS KEBUDAYAAN DAN KEPARIWISATAAN			8,743,359,200					99,511,376,105	DINAS KEBUDAYAAN DAN KEPARIWISATAAN
3	26	2			PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Persentase peningkatan destinasi wisata menjadi destinasi wisata unggulan	1,0 %	2,540,781,800				1,0 %	12,727,407,459	DINAS KEBUDAYAAN DAN KEPARIWISATAAN
						Persentase Kab/Kota yang memiliki kawasan wisata halal	20,8 %					20,8 %		
3	26	2	1.01		Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi			2,180,249,600					1,312,500,000	DINAS KEBUDAYAAN DAN KEPARIWISATAAN
3	26	2	1.01	3	Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi	Jumlah Lokasi Daya Tarik Unggulan Provinsi Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)	7 Lokasi	2,180,249,600	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7 Lokasi	1,312,500,000	DINAS KEBUDAYAAN DAN KEPARIWISATAAN
3	26	2	1.02		Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi			-					315,000,000	DINAS KEBUDAYAAN DAN KEPARIWISATAAN
3	26	2	1.02	2	Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Tersedianya Dokumen Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	0 Dokumen	-	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		0 Dokumen	315,000,000	DINAS KEBUDAYAAN DAN KEPARIWISATAAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	26	2	1.03		Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi			229,746,400					10,075,107,459	DINAS KEBUDAYAAN DAN KEPARIWISATAAN
3	26	2	1.03	3	Pengembangan Destinasi Pariwisata Provinsi	Jumlah Destinasi Pariwisata Provinsi yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)	0 Lokasi	-	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		0 Lokasi	9,617,287,050	DINAS KEBUDAYAAN DAN KEPARIWISATAAN
3	26	2	1.03	5	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	1 Dokumen	98,746,400	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Dokumen	210,000,000	DINAS KEBUDAYAAN DAN KEPARIWISATAAN
3	26	2	1.03	7	Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	Jumlah Lokasi yang Menerapkan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	2 Lokasi	131,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2 Lokasi	247,820,409	DINAS KEBUDAYAAN DAN KEPARIWISATAAN
3	26	2	1.04		Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi			130,785,800					1,024,800,000	DINAS KEBUDAYAAN DAN KEPARIWISATAAN
3	26	2	1.04	4	Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pariwisata	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pariwisata	3 Laporan	67,859,200	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3 Laporan	262,500,000	DINAS KEBUDAYAAN DAN KEPARIWISATAAN
3	26	2	1.04	5	Fasilitasi Standarisasi Industri dan Usaha Pariwisata	Jumlah Unit Usaha Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Memperoleh Standarisasi dan Sertifikasi	3 Unit Usaha	62,926,600	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3 Unit Usaha	762,300,000	DINAS KEBUDAYAAN DAN KEPARIWISATAAN
3	26	3			PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Kunjungan wisata (Wisatawan Nusantara)	100%	4,131,748,200				100%	25,762,085,108	DINAS KEBUDAYAAN DAN KEPARIWISATAAN
						Kunjungan wisata (Wisatawan Mancanegara)	100%					100%		
3	26	3	1.01		Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi			4,131,748,200					25,762,085,108	DINAS KEBUDAYAAN DAN KEPARIWISATAAN
3	26	3	1.01	1	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	4 Dokumen	2,803,608,400	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4 Dokumen	1,597,200,000	DINAS KEBUDAYAAN DAN KEPARIWISATAAN
3	26	3	1.01	2	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Laporan Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	5 Laporan	937,855,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5 Laporan	23,161,141,158	DINAS KEBUDAYAAN DAN KEPARIWISATAAN
3	26	3	1.01	3	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Provinsi, Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Provinsi, Baik Dalam dan Luar Negeri	1 Dokumen	199,627,600	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Dokumen	550,000,000	DINAS KEBUDAYAAN DAN KEPARIWISATAAN
3	26	3	1.01	4	Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	1 Dokumen	190,657,200	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Dokumen	453,743,950	DINAS KEBUDAYAAN DAN KEPARIWISATAAN
3	26	4			PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Persentase Sub Sektor ekonomi kreatif yang dikembangkan	13%	-				13%	440,000,000	DINAS KEBUDAYAAN DAN KEPARIWISATAAN
3	26	4	1.01		Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif			-					440,000,000	DINAS KEBUDAYAAN DAN KEPARIWISATAAN
3	26	4	1.01	2	Perluasan Pasar Produk Kreatif Baik di Pasar Ekspor maupun Pasar Domestik	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Perluasan Akses Pasar Produk Kreatif Baik Pasar Ekspor dan Pasar Domestik	0 Laporan	-	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		0 Laporan	440,000,000	DINAS KEBUDAYAAN DAN KEPARIWISATAAN
3	26	5			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Persentase Sumber Daya Manusia Pariwisata yang mendapatkan Pelatihan	5,45 %	2,070,829,200				5,45 %	60,581,883,538	DINAS KEBUDAYAAN DAN KEPARIWISATAAN
						Persentase pelaku usaha ekonomi kreatif yang mendapatkan pelatihan	12 %					12 %		
3	26	5	1.01		Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan			707,331,200					60,416,883,538	DINAS KEBUDAYAAN DAN KEPARIWISATAAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	26	5	1.01	1	Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan	Jumlah SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan yang Dikembangkan Kompetensinya	217 Orang	191,519,400	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		217 Orang	24,242,409,411	DINAS KEBUDAYAAN DAN KEPARIWISATAAN
3	26	5	1.01	2	Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	Jumlah Orang yang Mengikuti Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	450 Orang	444,811,800	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		450 Orang	35,679,474,127	DINAS KEBUDAYAAN DAN KEPARIWISATAAN
3	26	5	1.01	4	Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	0 Orang	-	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		0 Orang	275,000,000	DINAS KEBUDAYAAN DAN KEPARIWISATAAN
3	26	5	1.01	9	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	90 Orang	71,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		90 Orang	220,000,000	DINAS KEBUDAYAAN DAN KEPARIWISATAAN
3	26	5	1.02		Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif			1,363,498,000					165,000,000	DINAS KEBUDAYAAN DAN KEPARIWISATAAN
3	26	5	1.02	1	Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	Jumlah Orang yang mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	400 Orang	1,363,498,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		400 Orang	165,000,000	DINAS KEBUDAYAAN DAN KEPARIWISATAAN
3	27				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN			454,164,554,187					509,559,728,188	
3	27				DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN			413,988,379,921					420,226,528,427	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
3	27	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persen Perangkat Daerah Berkinerja Kategori Baik dan Sangat Baik	100 %	88,189,401,711				100 %	87,023,258,541	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
						Persentase Penurunan Temuan Berdasarkan LHP	100 %					100 %		DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
						Persentase Realisasi Kegiatan Perangkat Daerah	100 %					100 %		DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
3	27	1	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			6,515,993,160					7,875,000,000	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
3	27	1	1.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	1,400,795,660	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3 Dokumen	1,470,000,000	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
3	27	1	1.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	64,910,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2 Dokumen	262,500,000	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
3	27	1	1.01	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	26,650,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Dokumen	262,500,000	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
3	27	1	1.01	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	48,417,600	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2 Dokumen	367,500,000	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
3	27	1	1.01	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	31,020,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Dokumen	262,500,000	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	27	1	1.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	7 Laporan	4,944,199,900	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7 Laporan	5,250,000,000	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
3	27	1	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	700 Orang/Bulan	71,557,250,127				700 Orang/Bulan	71,615,602,985	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
3	27	1	1.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	700 Orang/ Bulan	70,757,844,527	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		700 Orang/ Bulan	70,757,773,985	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
3	27	1	1.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	323,419,600	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Laporan	262,500,000	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
3	27	1	1.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	240,920,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		12 Laporan	332,829,000	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
3	27	1	1.02	8	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	0 Dokumen	235,066,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		0 Dokumen	262,500,000	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
						Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen					1 Dokumen		DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
3	27	1	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah			538,000,000					630,000,000	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
3	27	1	1.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	250,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Paket	262,500,000	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
3	27	1	1.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	288,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Laporan	367,500,000	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
3	27	1	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			8,578,258,424					5,852,655,556	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
3	27	1	1.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1,731,375,600	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Laporan	2,100,000,000	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
3	27	1	1.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	6,846,882,824	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Laporan	3,752,655,556	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
3	27	1	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			999,900,000					1,050,000,000	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
3	27	1	1.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	48 Unit	499,900,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		48 Unit	525,000,000	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	27	1	1.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	500,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5 Unit	525,000,000	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
3	27	2			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Jumlah produksi Talas Satoimo (Ton),	7000 Ton	211,419,409,350				26432,55 ton	210,288,750,000	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
						Luas Areal Pengengembangan Jeruk Keprok Selayar (Ha)	121 Ha (331 Ha)					331 ha		DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
						Produktifitas Padi	50,43 Kw/Ha					50,43 Kw/Ha		DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
						Produktifitas Jagung	55,73 Kw/Ha					55,73 Kw/Ha		DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
						Produtifitas Kopi	588,1 Kg/Ha					588,1 Kg/Ha		DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
						Produktifitas Kakao	12.000 Kg/Ha					39.000 Kg/Ha		DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
						Peningkatan Ketersediaan Alat dan Mesin Pertanian	300 Unit					1.655 Unit		DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
						Peningkatan Ketersediaan Pupuk	323,02 ton					1.495,55 ton		DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
3	27	2	1.01		Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian			61,567,396,000					52,500,000,000	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
3	27	2	1.01	1	Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pengawasan Ketersediaan dan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian	2 Laporan	61,567,396,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2 Laporan	52,500,000,000	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
3	27	2	1.02		Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman			149,852,013,350					157,788,750,000	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
3	27	2	1.02	1	Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Benih	Jumlah Sertifikat Benih	500 Sertifikat	94,041,800	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		500 Sertifikat	288,750,000	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
3	27	2	1.02	2	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Hortikultura	Jumlah Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Hortikultura	4 Laporan	39,999,982,850	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4 Laporan	42,000,000,000	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
3	27	2	1.02	3	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Tanaman Pangan	Jumlah Benih/Bibit Tanaman Pangan yang Memenuhi Persyaratan Mutu, Penyediaan dan Peredaran	4 Dokumen	49,757,996,400	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4 Dokumen	52,500,000,000	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	27	2	1.02	4	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Perkebunan	Jumlah Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Perkebunan	4 Laporan	59,999,992,300	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4 Laporan	63,000,000,000	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
3	27	3			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Nilai Hilirisasi Produk Perkebunan	8000000000 Rp	101,283,785,360				8000000000 Rp	105,615,813,057	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
						Nilai Hilirisasi Produk Tanaman Pangan	465893180426 Rp					465893180426 Rp		DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
3	27	3	1.01		Penataan Prasarana Pertanian			101,283,785,360					105,615,813,057	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
3	27	3	1.01	1	Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	Jumlah Rencana Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	1 Dokumen	2,581,715,360	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Dokumen	1,093,826,562	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
3	27	3	1.01	2	Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	Jumlah Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	3 Dokumen	500,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3 Dokumen	4,771,986,495	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
3	27	3	1.01	3	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jalan Usaha Tani	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengelolaan Jalan Usaha Tani	1 Dokumen	50,008,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Dokumen	52,500,000,000	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
3	27	3	1.01	4	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jaringan Irigasi di Tingkat Usaha Tani	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengelolaan Jaringan Irigasi di Tingkat Usaha Tani	1 Dokumen	39,994,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Dokumen	42,000,000,000	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
3	27	3	1.01	10	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya	Jumlah Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Dipelihara dan Direhabilitasi	5 Unit	8,200,070,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5 Unit	5,250,000,000	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
3	27	5			PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase Penggunaan Benih Padi Bersertifikat	81,15 %	9,200,000,000				81,15 %	8,610,000,000	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
						Persentase Penurunan Serangan OPT	4,5 %					4,5 %		DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
3	27	5	1.01		Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi	Luas Serangan Organisme Penganggu Tanaman (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	40 Ha	9,200,000,000				40 Ha	8,610,000,000	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
3	27	5	1.01	1	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan	40 Ha	6,000,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		40 Ha	5,250,000,000	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
3	27	5	1.01	2	Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Ditangani	5 Ha	3,000,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5 Ha	3,150,000,000	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
3	27	5	1.01	3	Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luasan Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	1 Ha	200,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Ha	210,000,000	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	27	7			PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Rasio Ketersediaan Penyuluh Pertanian dan Pelaku Utama Petani, Penyuluh/KEP (%)	0,5 %	3,895,783,500				0,5 %	8,688,706,829	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
3	27	7	1.01		Pengembangan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian			500,000,000					525,000,000	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
3	27	7	1.01	1	Pengembangan Kompetensi Penyuluh Pertanian ASN	Jumlah Penyuluh Pertanian ASN yang Telah Mengikuti Pengembangan Kompetensi melalui Pendidikan dan Pelatihan	100 Orang	250,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100 Orang	262,500,000	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
3	27	7	1.01	2	Kerja Sama Pengembangan Kompetensi Penyuluh Pertanian Swadaya dan Swasta	Jumlah Penyuluh Pertanian Swadaya dan Swasta yang Telah mengikuti Pengembangan Kompetensi	100 Orang	250,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100 Orang	262,500,000	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
3	27	7	1.02		Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian			1,420,783,500					6,090,000,000	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
3	27	7	1.02	1	Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	Jumlah Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	2 Dokumen	300,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2 Dokumen	315,000,000	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
3	27	7	1.02	2	Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani	Jumlah Kelompok Petani yang Mendapat Penyuluhan dan Pemberdayaan	10 Kelompok	1,120,783,500	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		10 Kelompok	5,775,000,000	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
3	27	7	1.03		Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan			1,975,000,000					2,073,706,829	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
3	27	7	1.03	1	Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Koorporasi Petani	Jumlah Koorporasi Petani yang Dibentuk dan Beroperasi	5 Unit	300,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5 Unit	315,000,000	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
3	27	7	1.03	2	Pendampingan Manajemen Koorporasi Petani	Jumlah Pendampingan Manajemen Koorporasi Petani	1 Laporan	200,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Laporan	210,000,000	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
3	27	7	1.03	4	Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani	Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi	5 Unit	1,475,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5 Unit	1,548,706,829	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
3	27				DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN			40,176,174,266					89,333,199,761	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
3	27	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persen Perangkat Daerah Berkinerja Kategori Baik dan Sangat Baik	100 %	18,553,887,878				100 %	22,454,753,543	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
						Persentase Penurunan Temuan Berdasarkan LHP	100 %					100 %		DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
						Persentase Realisasi Kegiatan Perangkat Daerah	100 %					100 %		DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
3	27	1	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			278,100,000					921,782,069	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	27	1	1.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	JUMLAH DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	4 Dokumen	25,215,700	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4 Dokumen	253,600,000	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
3	27	1	1.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	JUMLAH DOKUMEN RKA-SKPD DAN LAPORAN HASIL KOORDINASI PENYUSUNAN DOKUMEN RKA-SKPD	1 Dokumen	8,514,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	21,274,640	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
3	27	1	1.01	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	JUMLAH DOKUMEN PERUBAHAN RKA-SKPD DAN LAPORAN HASIL KOORDINASI PENYUSUNAN DOKUMEN PERUBAHAN RKA-SKPD	1 Dokumen	11,883,200	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	22,940,365	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
3	27	1	1.01	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	JUMLAH DOKUMEN DPA-SKPD DAN LAPORAN HASIL KOORDINASI PENYUSUNAN DOKUMEN DPA-SKPD	1 Dokumen	14,803,400	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	21,442,219	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
3	27	1	1.01	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	JUMLAH DOKUMEN PERUBAHAN DPA-SKPD DAN LAPORAN HASIL KOORDINASI PENYUSUNAN DOKUMEN PERUBAHAN DPA-SKPD	1 Dokumen	17,045,600	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	24,115,642	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
3	27	1	1.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	JUMLAH LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD DAN LAPORAN HASIL KOORDINASI PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	6 Laporan	108,305,900	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6 Laporan	367,895,474	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
3	27	1	1.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	JUMLAH LAPORAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	5 Laporan	92,332,200	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5 Laporan	210,513,729	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
3	27	1	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			14,185,523,602					18,270,795,064	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
3	27	1	1.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	JUMLAH ASN YANG MENERIMA GAJI DAN TUNJANGAN	128 Orang/ Bulan	14,000,178,902	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		128 Orang/ Bulan	17,831,305,850	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
3	27	1	1.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	-	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	52,500,000	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
3	27	1	1.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	JUMLAH DOKUMEN PENATAUSAHAAN DAN PENGUJIAN/VERIFIKASI KEUANGAN SKPD	1000 Dokumen	58,839,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1000 Dokumen	106,800,000	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
3	27	1	1.02	4	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	JUMLAH DOKUMEN HASIL KOORDINASI DAN PELAKSANAAN AKUNTANSI SKPD	2 Dokumen	18,277,500	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 Dokumen	194,009,214	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
3	27	1	1.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	JUMLAH LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN SKPD DAN LAPORAN HASIL KOORDINASI PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN SKPD	2 Laporan	12,380,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 Laporan	2,780,000	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
3	27	1	1.02	6	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	JUMLAH DOKUMEN BAHAN TANGGAPAN PEMERIKSAAN DAN TINDAK LANJUT PEMERIKSAAN	2 Dokumen	87,704,700	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 Dokumen	67,900,000	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
3	27	1	1.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	JUMLAH LAPORAN KEUANGAN BULANAN/ TRIWULANAN/SEMESTERAN SKPD DAN LAPORAN KOORDINASI PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BULANAN/TRIWULANAN/SEMESTERAN SKPD	36 Laporan	8,143,500	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		36 Laporan	15,500,000	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
3	27	1	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			-					393,750,000	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
3	27	1	1.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	4 Paket	-	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4 Paket	157,500,000	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	27	1	1.05	3	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	-	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	78,750,000	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
3	27	1	1.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	5 Orang	-	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5 Orang	52,500,000	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
3	27	1	1.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	5 Orang	-	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5 Orang	52,500,000	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
3	27	1	1.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	5 Orang	-	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5 Orang	52,500,000	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
3	27	1	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah			218,611,800					979,544,967	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
3	27	1	1.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	JUMLAH PAKET KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR YANG DISEDIAKAN	3 Paket	14,775,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3 Paket	45,629,073	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
3	27	1	1.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	JUMLAH PAKET PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR YANG DISEDIAKAN	11 Paket	30,447,600	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		11 Paket	318,379,030	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
3	27	1	1.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	250 Paket	-	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		250 Paket	63,000,000	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
3	27	1	1.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	15 Paket	-	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		15 Paket	31,500,000	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
3	27	1	1.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	JUMLAH LAPORAN FASILITASI KUNJUNGAN TAMU	12 Laporan	64,620,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 Laporan	34,073,865	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
3	27	1	1.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	JUMLAH LAPORAN PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	12 Laporan	108,769,200	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 Laporan	378,812,999	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
3	27	1	1.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	-	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	3,150,000	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
3	27	1	1.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	-	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	105,000,000	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
3	27	1	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			-					157,500,000	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
3	27	1	1.07	8	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	1 Unit	-	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Unit	10,500,000	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
3	27	1	1.07	9	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3 Unit	-	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3 Unit	73,500,000	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
3	27	1	1.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3 Unit	-	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3 Unit	73,500,000	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
3	27	1	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			3,521,981,976					655,194,960	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
3	27	1	1.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	-	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 Laporan	3,150,000	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
3	27	1	1.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	JUMLAH LAPORAN PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK YANG DISEDIAKAN	12 Laporan	771,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 Laporan	552,044,960	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	27	1	1.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	JUMLAH LAPORAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR YANG DISEDIAKAN	107 Orang/Bulan	2,750,981,976	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		107 Orang/Bulan	100,000,000	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
3	27	1	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			349,670,500					1,076,186,483	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
3	27	1	1.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	JUMLAH KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN YANG DIPELIHARA DAN DIBAYARKAN PAJAKNYA	83 Unit	159,502,500	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		83 Unit	540,375,339	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
3	27	1	1.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	JUMLAH KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN YANG DIPELIHARA DAN DIBAYARKAN PAJAK DAN PERIZINANNYA	83 Unit	100,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		83 Unit	105,000,000	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
3	27	1	1.09	8	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	1 Unit	5,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Unit	5,250,000	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
3	27	1	1.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	JUMLAH GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA YANG DIPELIHARA/DIREHABILITASI	6 Unit	85,168,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6 Unit	399,311,144	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
3	27	1	1.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	10 Unit	-	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10 Unit	26,250,000	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
3	27	2			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Produksi Daging (ton)	187450	20,117,295,548				187450	25,827,807,368	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
						Produksi Telur (Ton)	214274					214274		DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
						Produksi Susu (Ton)	2159					2159		DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
3	27	2	1.04		Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi			18,957,230,648					21,850,674,711	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
3	27	2	1.04	1	Pemberian Bimbingan Peningkatan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	JUMLAH BIMBINGAN PENINGKATAN PRODUKSI BENIH/BIBIT TERNAK TANAMAN PAKAN TERNAK, BAHAN PAKAN, SERTA PAKAN KEWENANGAN PROVINSI	3 DOKUMEN	-	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3 DOKUMEN	105,000,000	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
3	27	2	1.04	2	Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	JUMLAH PELAKSANAAN SISTEM MANAJEMEN MUTU BENIH/BIBIT TERNAK DAN TANAMAN PAKAN TERNAK, BAHAN PAKAN, SERTA PAKAN KEWENANGAN PROVINSI	5 LAPORAN	18,957,230,648	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5 LAPORAN	21,693,174,711	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
3	27	2	1.04	3	Pengembangan Kapasitas Petugas Pengawas Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	JUMLAH PENGAWAS MUTU BENIH/BIBIT TERNAK DAN TANAMAN PAKAN TERNAK, BAHAN PAKAN, SERTA PAKAN KEWENANGAN PROVINSI YANG MENGIKUTI PENGEMBANGAN KAPASITAS	10 Orang	-	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10 Orang	52,500,000	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
3	27	2	1.05		Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan Kewenangan Provinsi			1,059,997,200					3,612,672,082	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
3	27	2	1.05	1	Pengendalian Penyediaan dan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	JUMLAH KETERSEDIAAN BENIH/BIBIT TERNAK DAN HIJAUAN PAKAN TERNAK YANG TERSEDIA DAN YANG DIPRODUKSI	15 LAPORAN	1,000,000,100	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		15 LAPORAN	3,431,254,940	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
3	27	2	1.05	2	Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan, Pakan	JUMLAH BENIH/BIBIT TERNAK DAN HPT, BAHAN PAKAN, PAKAN YANG BEREDAR	1 TON	59,997,100	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 TON	181,417,142	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	27	2	1.06		Pengawasan Peredaran Obat Hewan di Tingkat Distributor			100,067,700					206,960,575	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
3	27	2	1.06	1	Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Peredaran Obat Hewan	JUMLAH PEMERIKSAAN MUTU, KHASIAT DAN KEAMANAN OBAT HEWAN YANG BEREDAR	3 LAPORAN	100,067,700	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3 LAPORAN	206,960,575	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
3	27	2	1.07		Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain			-					157,500,000	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
3	27	2	1.07	1	Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain	JUMLAH BENIH/BIBIT TERNAK YANG SUMBERNYA DARI DAERAH PROVINSI LAIN	7 Ekor	-	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7 Ekor	157,500,000	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
3	27	3			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Nilai Hilirisasi Produksi Peternakan	38.617.836.192 Rp	654,999,100				38.617.836.192 Rp	36,425,975,836	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
3	27	3	1.01		Penataan Prasarana Pertanian			654,999,100					36,284,225,836	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
3	27	3	1.01	1	Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	JUMLAH RENCANA PENGEMBANGAN PRASARANA, KAWASAN DAN KOMODITAS PERTANIAN	4 Dokumen	-	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4 Dokumen	157,500,000	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
3	27	3	1.01	2	Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	JUMLAH PENGENDALIAN DAN PEMANFAATAN PRASARANA, KAWASAN DAN KOMODITAS PERTANIAN	6 DOKUMEN	579,999,800	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6 DOKUMEN	17,094,630,866	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
3	27	3	1.01	6	Pembangunan dan Pemeliharaan Pos Pemeriksaan Kesehatan Hewan	JUMLAH POS PEMERIKSAAN KESEHATAN HEWAN YANG DIBANGUN DAN DIPELIHARA	24 Unit	-	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		24 Unit	94,500,000	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
3	27	3	1.01	8	Pembangunan dan Pemeliharaan Rumah Potong Hewan	JUMLAH RUMAH POTONG HEWAN YANG DIBANGUN DAN DIPELIHARA	8 Unit	-	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8 Unit	18,570,094,970	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
3	27	3	1.01	9	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	JUMLAH KOORDINASI, SINKRONISASI DAN PENATAAN PRASARANA PENDUKUNG PERTANIAN LAINNYA	5 LAPORAN	59,999,300	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5 LAPORAN	262,500,000	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
3	27	3	1.01	10	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya	JUMLAH GEDUNG UPTD PERTANIAN SERTA SARANA PENDUKUNGNYA YANG DIBANGUN, DIPELIHARA DAN DIREHABILITASI	4 Unit	15,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4 Unit	105,000,000	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
3	27	3	1.02		Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak yang Wilayahnya Lebih Dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi			-					141,750,000	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
3	27	3	1.02	1	Pelestarian dan Pemanfaatan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak	JUMLAH WILAYAH SUMBER BIBIT TERNAK DAN RUMPUN/GALUR TERNAK YANG DILESTARIKAN DAN DIMANFAATKAN	3 Laporan	-	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3 Laporan	89,250,000	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
3	27	3	1.02	2	Pengawasan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak	JUMLAH PENGAWASAN WILAYAH SUMBER BIBIT TERNAK DAN RUMPUN/GALUR TERNAK	1 Laporan	-	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Laporan	52,500,000	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
3	27	4			PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Jumlah Kasus Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS) (Kasus)	11.279 Kasus	749,992,140				11.279 Kasus	3,264,000,000	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
3	27	4	1.01		Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi			149,992,700					1,294,500,000	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
3	27	4	1.01	1	Pengendalian Risiko dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	JUMLAH WILAYAH PENGENDALIAN RISIKO DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT HEWAN DAN ZOONOSIS	4 LAPORAN	149,992,700	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4 LAPORAN	1,294,500,000	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	27	4	1.02		Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Lintas Daerah Provinsi			99,999,800					156,600,000	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
3	27	4	1.02	2	Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan	JUMLAH PENGAWASAN PENERAPAN PERSYARATAN TEKNIS UNTUK PEMASUKAN DAN/ATAU PENGELUARAN HEWAN DAN PRODUK HEWAN	1 LAPORAN	99,999,800	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 LAPORAN	156,600,000	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
3	27	4	1.03		Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan			499,999,640					1,163,500,000	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
3	27	4	1.03	2	Pembinaan Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Unit Usaha Produk Hewan	JUMLAH UNIT USAHA PRODUK HEWAN YANG MEMENUHI PERSYARATAN TEKNIS SERTIFIKASI NOMOR KONTROL VETERINER	2 LAPORAN	99,999,900	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 LAPORAN	52,500,000	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
3	27	4	1.03	3	Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	JUMLAH UNIT USAHA PRODUK HEWAN YANG MEMENUHI PERSYARATAN TEKNIS SERTIFIKASI NOMOR KONTROL VETERINER	7 DOKUMEN	399,999,740	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7 DOKUMEN	1,111,000,000	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
3	27	4	1.04		Sertifikasi Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner			-					649,400,000	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
3	27	4	1.04	1	Pengelolaan Penerbitan Sertifikasi Keamanan Produk Hewan	Jumlah Sertifikasi Keamanan Produk Hewan	3 Sertifikat	-	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3 Sertifikat	108,200,000	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
3	27	4	1.04	2	Pengembangan Kompetensi Petugas Penilai Penerapan Persyaratan Teknis	Jumlah Petugas Penilai Penerapan Persyaratan Teknis yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	12 Orang	-	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 Orang	541,200,000	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
3	27	6			PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Persentase Unit Usaha Yang Memiliki Rekomendasi Usaha Obat Hewan	25%	-				25%	53,832,665	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
3	27	6	1.03		Penerbitan Izin Usaha Pengecer (Toko, Retail, Sub Distributor) Obat Hewan			-					53,832,665	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
3	27	6	1.03	2	Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Pengecer Obat Hewan	Jumlah Izin Usaha Distributor Obat Hewan yang Diawasi	40 Laporan	-	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		40 Laporan	53,832,665	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
3	27	7			PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Rasio Ketersediaan Penyuluh Terhadap Kelompok Tani/Ternak	1 : 13	99,999,600				1 : 13	1,306,830,349	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
3	27	7	1.01		Pengembangan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian			-					52,500,000	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
3	27	7	1.01	2	Kerja Sama Pengembangan Kompetensi Penyuluh Pertanian Swadaya dan Swasta			-	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			52,500,000	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
3	27	7	1.02		Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian			99,999,600					1,196,580,349	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
3	27	7	1.02	1	Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	JUMLAH DISEMINASI INFORMASI TEKNIS, SOSIAL, EKONOMI DAN INOVASI PERTANIAN	6 DOKUMEN	50,000,400	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6 DOKUMEN	1,107,330,349	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
3	27	7	1.02	2	Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani	JUMLAH KELOMPOK PETANI YANG MENDAPAT PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN	50 KELOMPOK	49,999,200	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		50 KELOMPOK	89,250,000	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
3	27	7	1.03		Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan			-					57,750,000	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
3	27	7	1.03	1	Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Koorporasi Petani	Jumlah Koorporasi Petani yang Dibentuk dan Beroperasi	1 Unit	-	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Unit	57,750,000	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
3	28				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN			139,172,247,582					174,199,004,044	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	28				DINAS KEHUTANAN			139,172,247,582					174,199,004,044	DINAS KEHUTANAN
3	28	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	%Realisasi Kegiatan Perangkat Daerah, %ASN Perangkat Daerah Berkinerja Kategori Baik, %Penurunan Temuan Berdasarkan LHP	100 %	114,538,025,362				100 %	143,989,800,972	DINAS KEHUTANAN
3	28	1	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	% Penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah tepat waktu	100 %	1,417,624,500				100 %	1,550,000,000	DINAS KEHUTANAN
3	28	1	1.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	779,898,600	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2 Dokumen	850,000,000	DINAS KEHUTANAN
3	28	1	1.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	92,796,600	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2 Dokumen	90,000,000	DINAS KEHUTANAN
3	28	1	1.01	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2 Dokumen	85,000,000	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2 Dokumen	90,000,000	DINAS KEHUTANAN
3	28	1	1.01	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	94,093,200	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2 Dokumen	90,000,000	DINAS KEHUTANAN
3	28	1	1.01	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2 Dokumen	84,999,900	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2 Dokumen	90,000,000	DINAS KEHUTANAN
3	28	1	1.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan	90,974,400	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3 Laporan	90,000,000	DINAS KEHUTANAN
3	28	1	1.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	189,861,800	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4 Laporan	250,000,000	DINAS KEHUTANAN
3	28	1	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	% Penyusunan dokumen laporan keuangan tepat waktu	100 %	93,701,917,694				100 %	110,371,129,157	DINAS KEHUTANAN
3	28	1	1.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	821 Orang/ Bulan	93,302,054,394	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		821 Orang/ Bulan	109,946,129,157	DINAS KEHUTANAN
3	28	1	1.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	9 Dokumen	9,999,800	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		9 Dokumen	10,000,000	DINAS KEHUTANAN
3	28	1	1.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	5000 Dokumen	9,999,900	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5000 Dokumen	10,000,000	DINAS KEHUTANAN
3	28	1	1.02	4	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1 Dokumen	74,937,000	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Dokumen	75,000,000	DINAS KEHUTANAN
3	28	1	1.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	94,977,000	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Laporan	95,000,000	DINAS KEHUTANAN
3	28	1	1.02	6	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	3 Dokumen	129,999,800	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3 Dokumen	130,000,000	DINAS KEHUTANAN
3	28	1	1.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	14 Laporan	74,949,800	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		14 Laporan	100,000,000	DINAS KEHUTANAN
3	28	1	1.02	8	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	5,000,000	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Dokumen	5,000,000	DINAS KEHUTANAN
3	28	1	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah penyusunan dokumen laporan barang milik daerah	2 Dokumen	118,582,400				2 Dokumen	170,000,000	DINAS KEHUTANAN
3	28	1	1.03	1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	4 Dokumen	-	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4 Dokumen	50,000,000	DINAS KEHUTANAN
3	28	1	1.03	2	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	20 Dokumen	50,124,200	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		20 Dokumen	50,000,000	DINAS KEHUTANAN
3	28	1	1.03	3	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	1 Laporan	59,084,200	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Laporan	50,000,000	DINAS KEHUTANAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	28	1	1.03	4	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	24 Laporan	-	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		24 Laporan	10,000,000	DINAS KEHUTANAN
3	28	1	1.03	5	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	4,637,000	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2 Laporan	5,000,000	DINAS KEHUTANAN
3	28	1	1.03	6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	16 Laporan	4,737,000	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		16 Laporan	5,000,000	DINAS KEHUTANAN
3	28	1	1.04		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Jumlah pendapatan daerah	1712430000 Rp	68,303,400				1712430000 Rp	105,000,000	DINAS KEHUTANAN
3	28	1	1.04	1	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah	1 Dokumen	-	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Dokumen	10,000,000	DINAS KEHUTANAN
3	28	1	1.04	4	Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah	16 Dokumen	68,303,400	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		16 Dokumen	75,000,000	DINAS KEHUTANAN
3	28	1	1.04	5	Pengolahan Data Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah	1 Laporan	-	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Laporan	10,000,000	DINAS KEHUTANAN
3	28	1	1.04	7	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	1 Laporan	-	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Laporan	10,000,000	DINAS KEHUTANAN
3	28	1	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rata-rata nilai prilaku pegawai perangkat daerah berdasarkan penilaian kinerja ASN	90 %	874,771,800				90 %	1,200,000,000	DINAS KEHUTANAN
3	28	1	1.05	1	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	5 Unit	-	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5 Unit	50,000,000	DINAS KEHUTANAN
3	28	1	1.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1150 Paket	441,850,000	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1150 Paket	575,000,000	DINAS KEHUTANAN
3	28	1	1.05	3	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	24 Dokumen	72,310,000	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		24 Dokumen	75,000,000	DINAS KEHUTANAN
3	28	1	1.05	4	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	24 Dokumen	-	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		24 Dokumen	75,000,000	DINAS KEHUTANAN
3	28	1	1.05	5	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	60,611,800	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Dokumen	50,000,000	DINAS KEHUTANAN
3	28	1	1.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	125 Orang	200,000,000	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		125 Orang	200,000,000	DINAS KEHUTANAN
3	28	1	1.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	120 Orang	-	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		120 Orang	75,000,000	DINAS KEHUTANAN
3	28	1	1.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	120 Orang	100,000,000	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		120 Orang	100,000,000	DINAS KEHUTANAN
3	28	1	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	% Pemenuhan administrasi umum kantor	100 %	2,397,920,400				100 %	1,690,000,000	DINAS KEHUTANAN
3	28	1	1.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	26 Paket	62,000,000	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		26 Paket	70,000,000	DINAS KEHUTANAN
3	28	1	1.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	26 Paket	70,000,000	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		26 Paket	70,000,000	DINAS KEHUTANAN
3	28	1	1.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	26 Paket	60,001,000	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		26 Paket	50,000,000	DINAS KEHUTANAN
3	28	1	1.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	26 Paket	351,652,200	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		26 Paket	350,000,000	DINAS KEHUTANAN
3	28	1	1.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	26 Paket	168,720,000	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		26 Paket	250,000,000	DINAS KEHUTANAN
3	28	1	1.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	4 Dokumen	20,000,000	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4 Dokumen	20,000,000	DINAS KEHUTANAN
3	28	1	1.06	7	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	9,999,800	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Paket	10,000,000	DINAS KEHUTANAN
3	28	1	1.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	46,280,000	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		12 Laporan	50,000,000	DINAS KEHUTANAN
3	28	1	1.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	150 Laporan	1,511,613,600	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		150 Laporan	700,000,000	DINAS KEHUTANAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	28	1	1.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	14 Dokumen	47,653,800	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		14 Dokumen	50,000,000	DINAS KEHUTANAN
3	28	1	1.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	6 Dokumen	50,000,000	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		6 Dokumen	70,000,000	DINAS KEHUTANAN
3	28	1	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	% Pemenuhan kebutuhan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	4,845,963,000				100 %	17,566,318,352	DINAS KEHUTANAN
3	28	1	1.07	1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	24 Unit	500,000,000	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		24 Unit	5,000,000,000	DINAS KEHUTANAN
3	28	1	1.07	2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	96 Unit	984,500,000	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		96 Unit	1,000,000,000	DINAS KEHUTANAN
3	28	1	1.07	3	Pengadaan Alat Besar	Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan	12 Unit	49,497,000	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		12 Unit	60,000,000	DINAS KEHUTANAN
3	28	1	1.07	4	Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Jumlah Unit Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Disediakan	12 Unit	14,400,000	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		12 Unit	50,000,000	DINAS KEHUTANAN
3	28	1	1.07	5	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	100 Paket	478,896,000	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100 Paket	500,000,000	DINAS KEHUTANAN
3	28	1	1.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	100 Unit	445,520,000	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100 Unit	500,000,000	DINAS KEHUTANAN
3	28	1	1.07	7	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	39 Unit	54,150,000	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		39 Unit	100,000,000	DINAS KEHUTANAN
3	28	1	1.07	8	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	1 Unit	20,000,000	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Unit	100,000,000	DINAS KEHUTANAN
3	28	1	1.07	9	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	2,000,000,000	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Unit	9,556,318,352	DINAS KEHUTANAN
3	28	1	1.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	8 Unit	99,000,000	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		8 Unit	200,000,000	DINAS KEHUTANAN
3	28	1	1.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	6 Unit	200,000,000	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		6 Unit	500,000,000	DINAS KEHUTANAN
3	28	1	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	% Pemenuhan kebutuhan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	8,863,012,168				100 %	9,042,353,463	DINAS KEHUTANAN
3	28	1	1.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	5,500,000	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Laporan	25,000,000	DINAS KEHUTANAN
3	28	1	1.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	601,709,880	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Laporan	650,000,000	DINAS KEHUTANAN
3	28	1	1.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	-	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Laporan	100,000,000	DINAS KEHUTANAN
3	28	1	1.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	8,255,802,288	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Laporan	8,267,353,463	DINAS KEHUTANAN
3	28	1	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	% Barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah dalam kondisi baik	100 %	2,249,930,000				100 %	2,295,000,000	DINAS KEHUTANAN
3	28	1	1.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	13 Unit	151,200,000	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		13 Unit	107,000,000	DINAS KEHUTANAN
3	28	1	1.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	421 Unit	598,480,000	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		421 Unit	628,000,000	DINAS KEHUTANAN
3	28	1	1.09	5	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	50 Unit	19,000,000	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		50 Unit	80,000,000	DINAS KEHUTANAN
3	28	1	1.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	100 Unit	91,250,000	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100 Unit	150,000,000	DINAS KEHUTANAN
3	28	1	1.09	7	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	2 Unit	31,200,000	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2 Unit	50,000,000	DINAS KEHUTANAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	28	1	1.09	8	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	1 Unit	20,000,000	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Unit	30,000,000	DINAS KEHUTANAN
3	28	1	1.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	24 Unit	1,008,800,000	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		24 Unit	500,000,000	DINAS KEHUTANAN
3	28	1	1.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	10 Unit	130,000,000	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		10 Unit	300,000,000	DINAS KEHUTANAN
3	28	1	1.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	18 Unit	200,000,000	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		18 Unit	350,000,000	DINAS KEHUTANAN
3	28	1	1.09	12	Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah	Luas Tanah yang Dilakukan Pemeliharaan/Rehabilitasi	1693 Ha	-	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1693 Ha	100,000,000	DINAS KEHUTANAN
3	28	3			PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Jumlah produksi hasil hutan bukan kayu	283 Ton	13,935,525,020				283 Ton	15,989,203,072	DINAS KEHUTANAN
						Jumlah produksi hasil hutan kayu olahan	92.336,62 M3					92.336,62 M3		
						Persentase Kerusakan Hutan pertahun	14,82 %					14,82 %		
						Cakupan luas lahan kritis yang direhabilitasi (prioritas)	65,47 %					65,47 %		
3	28	3	1.01		Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	Luas kawasan hutan lindung dan hutan produksi yang dipertahankan fungsi dan kepastian hukumnya	1780029 Ha	788,716,120				1780029 Ha	1,180,000,000	DINAS KEHUTANAN
3	28	3	1.01	1	Penyusunan Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Disusun	1 Dokumen	190,000,000	Kab. Bone, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Dokumen	200,000,000	DINAS KEHUTANAN
									Kab. Jeneponto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					DINAS KEHUTANAN
									Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					DINAS KEHUTANAN
									Kab. Luwu Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					DINAS KEHUTANAN
									Kab. Sinjai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					DINAS KEHUTANAN
									Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					DINAS KEHUTANAN
									Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					DINAS KEHUTANAN
3	28	3	1.01	2	Pembagian Blok/Petak Pengelolaan Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Unit Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi/Lidung (KPHP/L) yang Telah Dilakukan Pembagian Blok	16 Unit	423,164,220	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		16 Unit	800,000,000	DINAS KEHUTANAN
									Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					DINAS KEHUTANAN
									Kab. Bone, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					DINAS KEHUTANAN
									Kab. Enrekang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					DINAS KEHUTANAN
									Kab. Gowa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					DINAS KEHUTANAN
									Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					DINAS KEHUTANAN
									Kab. Luwu Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					DINAS KEHUTANAN
									Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					DINAS KEHUTANAN
									Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					DINAS KEHUTANAN
									Kab. Kepulauan Selayar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					DINAS KEHUTANAN
									Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					DINAS KEHUTANAN
									Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					DINAS KEHUTANAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
									Kab. Tana Toraja, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					DINAS KEHUTANAN
									Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					DINAS KEHUTANAN
									Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					DINAS KEHUTANAN
3	28	3	1.01	3	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH	Jumlah Sarana Prasarana Operasionalisasi Resor dan Kantor Resor Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Terbangun	10 Unit	100,000,000	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		10 Unit	100,000,000	DINAS KEHUTANAN
									Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					DINAS KEHUTANAN
									Kab. Bone, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					DINAS KEHUTANAN
									Kab. Enrekang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					DINAS KEHUTANAN
									Kab. Gowa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					DINAS KEHUTANAN
									Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					DINAS KEHUTANAN
									Kab. Luwu Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					DINAS KEHUTANAN
									Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					DINAS KEHUTANAN
									Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					DINAS KEHUTANAN
									Kab. Kepulauan Selayar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					DINAS KEHUTANAN
									Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					DINAS KEHUTANAN
									Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					DINAS KEHUTANAN
									Kab. Tana Toraja, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					DINAS KEHUTANAN
									Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					DINAS KEHUTANAN
									Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					DINAS KEHUTANAN
3	28	3	1.01	4	Koordinasi dan Sinkronisasi Usulan Perubahan Fungsi dan Peruntukan Hutan	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Usulan Perubahan Peruntukkan dan Fungsi Kawasan Hutan untuk Wilayah Provinsi	1 Dokumen	75,551,900	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Dokumen	80,000,000	DINAS KEHUTANAN
3	28	3	1.02		Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	Jumlah dokumen rencana pengelolaan KPH	24 Dokumen	190,000,000				24 Dokumen	240,000,000	DINAS KEHUTANAN
3	28	3	1.02	1	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	24 Dokumen	190,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		24 Dokumen	240,000,000	DINAS KEHUTANAN
3	28	3	1.03		Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	Jumlah penerimaan dari sektor kehutanan	25000000 Rp	587,671,000				25000000 Rp	590,000,000	DINAS KEHUTANAN
3	28	3	1.03	1	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah Data dan Informasi Terkait Luas Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dalam 1 (Satu) Provinsi Secara Berkala	4 Dokumen	78,146,600	Kab. Bone, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4 Dokumen	50,000,000	DINAS KEHUTANAN
									Kab. Gowa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					DINAS KEHUTANAN
									Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					DINAS KEHUTANAN
3	28	3	1.03	2	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Lindung	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Mengenai Pemanfaatan Hutan di Kawasan HL Provinsi Secara Berkala	10 Dokumen	49,890,000	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		10 Dokumen	50,000,000	DINAS KEHUTANAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
									Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					DINAS KEHUTANAN
									Kab. Enrekang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					DINAS KEHUTANAN
									Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					DINAS KEHUTANAN
									Kab. Luwu Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					DINAS KEHUTANAN
									Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					DINAS KEHUTANAN
									Kab. Kepulauan Selayar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					DINAS KEHUTANAN
									Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					DINAS KEHUTANAN
									Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					DINAS KEHUTANAN
									Kab. Tana Toraja, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					DINAS KEHUTANAN
									Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					DINAS KEHUTANAN
									Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					DINAS KEHUTANAN
3	28	3	1.03	3	Pelayanan Perizinan Usaha/Kerja Sama Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung pada Blok Pemanfaatan Kecuali pada Wilayah Perum Perhutani	Jumlah Dokumen Analisis dalam Rangka Pemberian Pertimbangan Teknis Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH)	10 Dokumen	49,620,000	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		10 Dokumen	50,000,000	DINAS KEHUTANAN
3	28	3	1.03	4	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Produksi	10 Dokumen	60,420,000	Kab. Bone, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		10 Dokumen	70,000,000	DINAS KEHUTANAN
									Kab. Gowa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					DINAS KEHUTANAN
									Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					DINAS KEHUTANAN
3	28	3	1.03	5	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Lindung	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Lindung	10 Dokumen	-	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		10 Dokumen	70,000,000	DINAS KEHUTANAN
									Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					DINAS KEHUTANAN
									Kab. Enrekang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					DINAS KEHUTANAN
									Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					DINAS KEHUTANAN
									Kab. Luwu Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					DINAS KEHUTANAN
									Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					DINAS KEHUTANAN
									Kab. Kepulauan Selayar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					DINAS KEHUTANAN
									Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					DINAS KEHUTANAN
									Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					DINAS KEHUTANAN
									Kab. Tana Toraja, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					DINAS KEHUTANAN
									Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					DINAS KEHUTANAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
									Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					DINAS KEHUTANAN
3	28	3	1.03	6	Penilaian Rencana Pengelolaan di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah Dokumen Rencana Kerja Tahunan Pemanfaatan Hutan Produksi yang Disahkan	4 Dokumen	49,594,400	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4 Dokumen	50,000,000	DINAS KEHUTANAN
									Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					DINAS KEHUTANAN
									Kab. Bone, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					DINAS KEHUTANAN
									Kab. Bulukumba, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					DINAS KEHUTANAN
									Kab. Enrekang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					DINAS KEHUTANAN
									Kab. Gowa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					DINAS KEHUTANAN
									Kab. Jeneponto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					DINAS KEHUTANAN
									Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					DINAS KEHUTANAN
									Kab. Luwu Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					DINAS KEHUTANAN
									Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					DINAS KEHUTANAN
									Kab. Pangkajene Kepulauan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					DINAS KEHUTANAN
									Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					DINAS KEHUTANAN
									Kab. Kepulauan Selayar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					DINAS KEHUTANAN
									Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					DINAS KEHUTANAN
									Kab. Sinjai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					DINAS KEHUTANAN
									Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					DINAS KEHUTANAN
									Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					DINAS KEHUTANAN
									Kab. Tana Toraja, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					DINAS KEHUTANAN
									Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					DINAS KEHUTANAN
									Kota Palopo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					DINAS KEHUTANAN
									Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					DINAS KEHUTANAN
									Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					DINAS KEHUTANAN
3	28	3	1.03	7	Penilaian Rencana Pengelolaan di Kawasan Hutan Lindung	Jumlah Dokumen Rencana Kerja Tahunan Pemanfaatan Hutan Lindung yang Disahkan	10 Dokumen	-	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		10 Dokumen	50,000,000	DINAS KEHUTANAN
									Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					DINAS KEHUTANAN
									Kab. Enrekang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					DINAS KEHUTANAN
									Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					DINAS KEHUTANAN
									Kab. Luwu Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					DINAS KEHUTANAN
									Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					DINAS KEHUTANAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
									Kab. Kepulauan Selayar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					DINAS KEHUTANAN
									Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					DINAS KEHUTANAN
									Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					DINAS KEHUTANAN
									Kab. Tana Toraja, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					DINAS KEHUTANAN
									Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					DINAS KEHUTANAN
									Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					DINAS KEHUTANAN
3	28	3	1.03	9	Pengembangan Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu, Hasil Hutan Bukan Kayu dan/atau Jasa Lingkungan	Jumlah Lokasi Pengembangan Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu, Hasil Hutan Bukan kayu dan/atau Jasa Lingkungan	2 Lokasi	300,000,000	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2 Lokasi	200,000,000	DINAS KEHUTANAN
									Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					DINAS KEHUTANAN
									Kab. Bone, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					DINAS KEHUTANAN
									Kab. Enrekang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					DINAS KEHUTANAN
									Kab. Gowa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					DINAS KEHUTANAN
									Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					DINAS KEHUTANAN
									Kab. Luwu Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					DINAS KEHUTANAN
									Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					DINAS KEHUTANAN
									Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					DINAS KEHUTANAN
									Kab. Kepulauan Selayar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					DINAS KEHUTANAN
									Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					DINAS KEHUTANAN
									Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					DINAS KEHUTANAN
									Kab. Tana Toraja, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					DINAS KEHUTANAN
									Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					DINAS KEHUTANAN
									Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					DINAS KEHUTANAN
3	28	3	1.04		Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas rehabilitasi lahan diluar kawasan hutan negara	1571 Ha	9,599,920,300				1571 Ha	10,956,411,072	DINAS KEHUTANAN
3	28	3	1.04	1	Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)	Jumlah Dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan yang Disusun (RTnRL)	1 Dokumen	122,383,400	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Dokumen	50,000,000	DINAS KEHUTANAN
3	28	3	1.04	2	Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Hutan Rakyat yang Dibangun di Luar Kawasan Hutan Negara	450 Ha	3,267,363,800	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		450 Ha	4,645,727,500	DINAS KEHUTANAN
									Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Fisik-Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan-Penugasan-Kehutanan				DINAS KEHUTANAN
									Kab. Bone, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					DINAS KEHUTANAN
									Kab. Enrekang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					DINAS KEHUTANAN
									Kab. Gowa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					DINAS KEHUTANAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
									Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					DINAS KEHUTANAN
									Kab. Luwu Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					DINAS KEHUTANAN
									Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					DINAS KEHUTANAN
									Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					DINAS KEHUTANAN
									Kab. Kepulauan Selayar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					DINAS KEHUTANAN
									Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					DINAS KEHUTANAN
									Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					DINAS KEHUTANAN
									Kab. Tana Toraja, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					DINAS KEHUTANAN
									Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					DINAS KEHUTANAN
									Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					DINAS KEHUTANAN
3	28	3	1.04	4	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	60 Ha	676,800,000	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		60 Ha	1,224,000,000	DINAS KEHUTANAN
									Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DBH Sumber Daya Alam Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)				DINAS KEHUTANAN
									Kab. Bone, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					DINAS KEHUTANAN
									Kab. Enrekang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					DINAS KEHUTANAN
									Kab. Gowa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					DINAS KEHUTANAN
									Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					DINAS KEHUTANAN
									Kab. Luwu Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					DINAS KEHUTANAN
									Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					DINAS KEHUTANAN
									Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					DINAS KEHUTANAN
									Kab. Kepulauan Selayar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					DINAS KEHUTANAN
									Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					DINAS KEHUTANAN
									Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					DINAS KEHUTANAN
									Kab. Tana Toraja, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					DINAS KEHUTANAN
									Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					DINAS KEHUTANAN
									Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					DINAS KEHUTANAN
3	28	3	1.04	5	Penerapan Teknik Konservasi Tanah dan Air Hutan dan Lahan	Jumlah Bangunan Sipil Teknis yang Terbangun	150 Unit	4,328,711,600	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		150 Unit	4,331,734,572	DINAS KEHUTANAN
									Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Fisik-Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan-Penugasan-Kehutanan				DINAS KEHUTANAN
									Kab. Bone, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					DINAS KEHUTANAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
									Kab. Enrekang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					DINAS KEHUTANAN
									Kab. Gowa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					DINAS KEHUTANAN
									Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					DINAS KEHUTANAN
									Kab. Luwu Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					DINAS KEHUTANAN
									Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					DINAS KEHUTANAN
									Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					DINAS KEHUTANAN
									Kab. Kepulauan Selayar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					DINAS KEHUTANAN
									Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					DINAS KEHUTANAN
									Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					DINAS KEHUTANAN
									Kab. Tana Toraja, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					DINAS KEHUTANAN
									Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					DINAS KEHUTANAN
									Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					DINAS KEHUTANAN
3	28	3	1.04	6	Pengembangan Perbenihan untuk Rehabilitasi Lahan	Jumlah Bibit yang dihasilkan untuk Rehabilitasi Lahan	25000 Bibit	684,564,500	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		25000 Bibit	170,000,000	DINAS KEHUTANAN
									Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					DINAS KEHUTANAN
									Kab. Bone, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					DINAS KEHUTANAN
									Kab. Enrekang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					DINAS KEHUTANAN
									Kab. Gowa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					DINAS KEHUTANAN
									Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					DINAS KEHUTANAN
									Kab. Luwu Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					DINAS KEHUTANAN
									Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					DINAS KEHUTANAN
									Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					DINAS KEHUTANAN
									Kab. Kepulauan Selayar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					DINAS KEHUTANAN
									Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					DINAS KEHUTANAN
									Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					DINAS KEHUTANAN
									Kab. Tana Toraja, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					DINAS KEHUTANAN
									Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					DINAS KEHUTANAN
									Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					DINAS KEHUTANAN
3	28	3	1.04	8	Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	Jumlah Laporan Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam Rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	1 Laporan	68,303,400	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Laporan	80,000,000	DINAS KEHUTANAN
									Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					DINAS KEHUTANAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
									Kab. Bone, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					DINAS KEHUTANAN
									Kab. Enrekang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					DINAS KEHUTANAN
									Kab. Gowa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					DINAS KEHUTANAN
									Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					DINAS KEHUTANAN
									Kab. Luwu Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					DINAS KEHUTANAN
									Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					DINAS KEHUTANAN
									Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					DINAS KEHUTANAN
									Kab. Kepulauan Selayar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					DINAS KEHUTANAN
									Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					DINAS KEHUTANAN
									Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					DINAS KEHUTANAN
									Kab. Tana Toraja, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					DINAS KEHUTANAN
									Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					DINAS KEHUTANAN
									Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					DINAS KEHUTANAN
3	28	3	1.04	9	Rehabilitasi Mangrove di luar kawasan hutan	Luas Area Mangrove Di Luar Kawasan Hutan yang Direhabilitasi	20 Ha	451,793,600	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		20 Ha	454,949,000	DINAS KEHUTANAN
									Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Fisik-Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan-Penugasan-Kehutanan				DINAS KEHUTANAN
									Kab. Bone, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					DINAS KEHUTANAN
									Kab. Bulukumba, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					DINAS KEHUTANAN
									Kab. Jeneponto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					DINAS KEHUTANAN
									Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					DINAS KEHUTANAN
									Kab. Luwu Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					DINAS KEHUTANAN
									Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					DINAS KEHUTANAN
									Kab. Pangkajene Kepulauan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					DINAS KEHUTANAN
									Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					DINAS KEHUTANAN
									Kab. Kepulauan Selayar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					DINAS KEHUTANAN
									Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					DINAS KEHUTANAN
									Kab. Sinjai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					DINAS KEHUTANAN
									Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					DINAS KEHUTANAN
									Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					DINAS KEHUTANAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
									Kota Palopo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					DINAS KEHUTANAN
									Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					DINAS KEHUTANAN
3	28	3	1.05		Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Persentase jumlah kasus kerusakan kawasan hutan yang tertangani	100 %	1,899,532,000				100 %	1,882,792,000	DINAS KEHUTANAN
3	28	3	1.05	1	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan	Luas Hutan yang Dilakukan Patroli Pengamanan Hutan	1780029 Ha	1,377,612,000	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1780029 Ha	1,377,792,000	DINAS KEHUTANAN
									Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					DINAS KEHUTANAN
									Kab. Bone, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					DINAS KEHUTANAN
									Kab. Enrekang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					DINAS KEHUTANAN
									Kab. Gowa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					DINAS KEHUTANAN
									Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					DINAS KEHUTANAN
									Kab. Luwu Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					DINAS KEHUTANAN
									Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					DINAS KEHUTANAN
									Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					DINAS KEHUTANAN
									Kab. Kepulauan Selayar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					DINAS KEHUTANAN
									Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					DINAS KEHUTANAN
									Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					DINAS KEHUTANAN
									Kab. Tana Toraja, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					DINAS KEHUTANAN
									Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					DINAS KEHUTANAN
									Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					DINAS KEHUTANAN
3	28	3	1.05	2	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan	Luas Kawasan Hutan yang Dilakukan Patroli Pengamanan Hutan	1780029 Ha	217,850,000	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1780029 Ha	200,000,000	DINAS KEHUTANAN
									Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					DINAS KEHUTANAN
									Kab. Bone, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					DINAS KEHUTANAN
									Kab. Enrekang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					DINAS KEHUTANAN
									Kab. Gowa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					DINAS KEHUTANAN
									Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					DINAS KEHUTANAN
									Kab. Luwu Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					DINAS KEHUTANAN
									Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					DINAS KEHUTANAN
									Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					DINAS KEHUTANAN
									Kab. Kepulauan Selayar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					DINAS KEHUTANAN
									Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					DINAS KEHUTANAN
									Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					DINAS KEHUTANAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
									Kab. Tana Toraja, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					DINAS KEHUTANAN
									Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					DINAS KEHUTANAN
									Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					DINAS KEHUTANAN
3	28	3	1.05	3	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hasil Hutan	Jumlah Operasi Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hasil Hutan	2 Operasi	109,920,000	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2 Operasi	110,000,000	DINAS KEHUTANAN
									Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					DINAS KEHUTANAN
									Kab. Bone, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					DINAS KEHUTANAN
									Kab. Enrekang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					DINAS KEHUTANAN
									Kab. Gowa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					DINAS KEHUTANAN
									Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					DINAS KEHUTANAN
									Kab. Luwu Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					DINAS KEHUTANAN
									Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					DINAS KEHUTANAN
									Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					DINAS KEHUTANAN
									Kab. Kepulauan Selayar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					DINAS KEHUTANAN
									Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					DINAS KEHUTANAN
									Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					DINAS KEHUTANAN
									Kab. Tana Toraja, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					DINAS KEHUTANAN
									Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					DINAS KEHUTANAN
									Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					DINAS KEHUTANAN
3	28	3	1.05	4	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	8 Dokumen	119,470,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		8 Dokumen	120,000,000	DINAS KEHUTANAN
3	28	3	1.05	5	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	6 Laporan	74,680,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		6 Laporan	75,000,000	DINAS KEHUTANAN
3	28	3	1.06		Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)	Jumlah HHBK yang diolah oleh pemegang izin	3 Jenis	67,009,200				3 Jenis	250,000,000	DINAS KEHUTANAN
3	28	3	1.06	1	Pengolahan Bahan Baku Hasil Hutan Bukan Kayu Hayati	Jumlah Unit Managemen Pengolahan Bahan Baku	15 Unit	-	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		15 Unit	50,000,000	DINAS KEHUTANAN
3	28	3	1.06	2	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Bukan Kayu (IUIPHHBK) melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Permohonan PBPHH Bukan Kayu Skala Kecil dan Menengah yang Dilayani	5 Unit Managemen	-	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5 Unit Managemen	50,000,000	DINAS KEHUTANAN
3	28	3	1.06	3	Pembudidayaan Hasil Hutan Bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya	Jumlah Unit Managemen PBPH HHBK Skala Kecil dan Menengah Beroperasi	15 Unit Managemen	-	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		15 Unit Managemen	75,000,000	DINAS KEHUTANAN
3	28	3	1.06	4	Pengawasan Perizinan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu	Jumlah Unit Managemen PBPHH HHBK Skala Kecil dan Menengah yang Memiliki Hak Akses SI-RPBBPHH	3 Unit Managemen	67,009,200	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3 Unit Managemen	75,000,000	DINAS KEHUTANAN
3	28	3	1.07		Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	Jumlah data dan informasi nilai ekspor hasil hutan kayu	28155171.7 M3	127,080,000				28155171.7 M3	190,000,000	DINAS KEHUTANAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	28	3	1.07	1	Rencana Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	Jumlah Unit Managemen yang Melaksanakan Tertib Pelaporan RKOPHH untuk Pemegang PBPHH (Kayu dan HHBK) Skala Usaha Kecil dan Menengah	30 Unit Managemen	66,890,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		30 Unit Managemen	75,000,000	DINAS KEHUTANAN
3	28	3	1.07	2	Pembinaan dan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) untuk Skala Usaha Kecil dan Menengah yang menjadi Kewenangan Provinsi	30 Dokumen	60,190,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		30 Dokumen	75,000,000	DINAS KEHUTANAN
3	28	3	1.07	3	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Permohonan PBPHH Kayu Skala Kecil dan Menengah yang Dilayani	12 Unit Managemen	-	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		12 Unit Managemen	40,000,000	DINAS KEHUTANAN
3	28	3	1.09		Perbenihan Tanaman Hutan	Jumlah sertifikasi sumber benih, mutu benih dan mutu bibit tanaman hutan	95 Pemohon	675,596,400				95 Pemohon	700,000,000	DINAS KEHUTANAN
3	28	3	1.09	1	Penetapan Pengadaan Benih dan Pengedar Benih dan/atau Bibit Terdaftar	Jumlah Penerbitan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Perorangan dan Badan Usaha Non Perhutani) Kegiatan Usaha Pengadaan dan Pengedaran Benih, Pengadaan dan Pengedaran Bibit, Serta Pengadaan dan Pengedaran Benih dan Bibit Dalam Provinsi	14 Unit Usaha	99,980,000	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		14 Unit Usaha	100,000,000	DINAS KEHUTANAN
									Kab. Bone, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					DINAS KEHUTANAN
									Kab. Bulukumba, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					DINAS KEHUTANAN
									Kab. Gowa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					DINAS KEHUTANAN
									Kab. Jeneponto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					DINAS KEHUTANAN
									Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					DINAS KEHUTANAN
									Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					DINAS KEHUTANAN
									Kab. Pangkajene Kepulauan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					DINAS KEHUTANAN
									Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					DINAS KEHUTANAN
									Kab. Kepulauan Selayar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					DINAS KEHUTANAN
									Kab. Sinjai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					DINAS KEHUTANAN
									Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					DINAS KEHUTANAN
									Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					DINAS KEHUTANAN
									Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					DINAS KEHUTANAN
3	28	3	1.09	2	Sertifikasi Sumber Benih	Jumlah Sertifikat Sumber Benih yang Diterbitkan	7 Sertifikat	49,930,000	Kab. Jeneponto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7 Sertifikat	50,000,000	DINAS KEHUTANAN
									Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					DINAS KEHUTANAN
									Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					DINAS KEHUTANAN
									Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					DINAS KEHUTANAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
									Kab. Kepulauan Selayar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					DINAS KEHUTANAN
									Kab. Tana Toraja, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					DINAS KEHUTANAN
									Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					DINAS KEHUTANAN
3	28	3	1.09	3	Sertifikasi Mutu Benih	Jumlah Sertifikat Mutu Benih yang Diterbitkan	3 Sertifikat	49,930,000	Kab. Gowa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3 Sertifikat	50,000,000	DINAS KEHUTANAN
									Kab. Jeneponto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					DINAS KEHUTANAN
									Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					DINAS KEHUTANAN
									Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					DINAS KEHUTANAN
									Kab. Kepulauan Selayar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					DINAS KEHUTANAN
									Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					DINAS KEHUTANAN
									Kab. Tana Toraja, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					DINAS KEHUTANAN
									Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					DINAS KEHUTANAN
3	28	3	1.09	4	Sertifikasi Mutu Bibit	Jumlah Sertifikat Mutu Bibit yang Diterbitkan	7 Sertifikat	49,930,000	Kab. Gowa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7 Sertifikat	50,000,000	DINAS KEHUTANAN
									Kab. Jeneponto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					DINAS KEHUTANAN
									Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					DINAS KEHUTANAN
									Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					DINAS KEHUTANAN
									Kab. Kepulauan Selayar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					DINAS KEHUTANAN
									Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					DINAS KEHUTANAN
									Kab. Tana Toraja, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					DINAS KEHUTANAN
									Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					DINAS KEHUTANAN
3	28	3	1.09	5	Pengawasan Peredaran Benih dan/atau Bibit	Jumlah Data (Asal Usul, Jenis Mutu) Benih Atau Bibit yang Beredar	14 Laporan	99,980,000	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		14 Laporan	100,000,000	DINAS KEHUTANAN
									Kab. Bone, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					DINAS KEHUTANAN
									Kab. Bulukumba, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					DINAS KEHUTANAN
									Kab. Gowa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					DINAS KEHUTANAN
									Kab. Jeneponto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					DINAS KEHUTANAN
									Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					DINAS KEHUTANAN
									Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					DINAS KEHUTANAN
									Kab. Pangkajene Kepulauan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					DINAS KEHUTANAN
									Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					DINAS KEHUTANAN
									Kab. Kepulauan Selayar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					DINAS KEHUTANAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
									Kab. Sinjai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					DINAS KEHUTANAN
									Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					DINAS KEHUTANAN
									Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					DINAS KEHUTANAN
									Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					DINAS KEHUTANAN
3	28	3	1.09	6	Pembangunan Sumber Benih	Luas Sumber Benih yang Dibangun	5 Ha	325,846,400	Kab. Kepulauan Selayar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5 Ha	350,000,000	DINAS KEHUTANAN
3	28	4			PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	Jumlah jenis tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi dan/atau tidak masuk dalam lampiran (Appendix) CITES untuk kewenangan daerah provinsi yang terdata	2 Jenis	83,011,800				2 Jenis	100,000,000	DINAS KEHUTANAN
3	28	4	1.02		Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran (Appendix) CITES (Convension On International Trade In Endangered Species) untuk Kewenangan Daerah Provinsi	Jumlah izin penangkar tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi	100 Penangkar	83,011,800				100 Penangkar	100,000,000	DINAS KEHUTANAN
3	28	4	1.02	1	Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar yang tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar (TSL) yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES	1 Laporan	83,011,800	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Laporan	100,000,000	DINAS KEHUTANAN
									Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					DINAS KEHUTANAN
									Kab. Bone, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					DINAS KEHUTANAN
									Kab. Enrekang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					DINAS KEHUTANAN
									Kab. Gowa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					DINAS KEHUTANAN
									Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					DINAS KEHUTANAN
									Kab. Luwu Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					DINAS KEHUTANAN
									Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					DINAS KEHUTANAN
									Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					DINAS KEHUTANAN
									Kab. Kepulauan Selayar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					DINAS KEHUTANAN
									Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					DINAS KEHUTANAN
									Kab. Sinjai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					DINAS KEHUTANAN
									Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					DINAS KEHUTANAN
									Kab. Tana Toraja, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					DINAS KEHUTANAN
									Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					DINAS KEHUTANAN
									Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					DINAS KEHUTANAN
3	28	5			PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	Persentase Jumlah Pemegang izin perhutanan sosial yang menjalankan pengelolaan dan pemanfaatan sesuai aturan	16.76 %	10,284,262,300				16.76 %	13,650,000,000	DINAS KEHUTANAN
3	28	5	1.01		Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah masyarakat dan kelembagaan masyarakat yang meningkat kapasitasnya	60 Orang	10,284,262,300				60 Orang	13,650,000,000	DINAS KEHUTANAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						Jumlah SDM bidang kehutanan yang ditingkatkan kapasitasnya	60 Orang					60 Orang		DINAS KEHUTANAN
3	28	5	1.01	1	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan	Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas	200 Orang	192,063,300	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		200 Orang	200,000,000	DINAS KEHUTANAN
									Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					DINAS KEHUTANAN
									Kab. Bone, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					DINAS KEHUTANAN
									Kab. Enrekang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					DINAS KEHUTANAN
									Kab. Gowa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					DINAS KEHUTANAN
									Kab. Luwu Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					DINAS KEHUTANAN
									Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					DINAS KEHUTANAN
									Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					DINAS KEHUTANAN
									Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					DINAS KEHUTANAN
									Kab. Sinjai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					DINAS KEHUTANAN
									Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					DINAS KEHUTANAN
									Kab. Tana Toraja, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					DINAS KEHUTANAN
									Kota Pare Pare, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					DINAS KEHUTANAN
									Kota Palopo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					DINAS KEHUTANAN
									Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					DINAS KEHUTANAN
3	28	5	1.01	2	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	169 Kelompok	196,263,600	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		169 Kelompok	200,000,000	DINAS KEHUTANAN
									Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					DINAS KEHUTANAN
									Kab. Bone, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					DINAS KEHUTANAN
									Kab. Enrekang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					DINAS KEHUTANAN
									Kab. Gowa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					DINAS KEHUTANAN
									Kab. Luwu Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					DINAS KEHUTANAN
									Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					DINAS KEHUTANAN
									Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					DINAS KEHUTANAN
									Kab. Kepulauan Selayar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					DINAS KEHUTANAN
									Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					DINAS KEHUTANAN
									Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					DINAS KEHUTANAN
									Kab. Tana Toraja, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					DINAS KEHUTANAN
									Kota Palopo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					DINAS KEHUTANAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
									Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					DINAS KEHUTANAN
3	28	5	1.01	3	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	Luas Kawasan yang Disiapkan untuk Perhutanan Sosial	2000 Ha	9,895,935,400	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2000 Ha	13,250,000,000	DINAS KEHUTANAN
									Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					DINAS KEHUTANAN
									Kab. Bone, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					DINAS KEHUTANAN
									Kab. Bulukumba, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					DINAS KEHUTANAN
									Kab. Enrekang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					DINAS KEHUTANAN
									Kab. Gowa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					DINAS KEHUTANAN
									Kab. Jeneponto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					DINAS KEHUTANAN
									Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					DINAS KEHUTANAN
									Kab. Luwu Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					DINAS KEHUTANAN
									Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					DINAS KEHUTANAN
									Kab. Pangkajene Kepulauan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					DINAS KEHUTANAN
									Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					DINAS KEHUTANAN
									Kab. Kepulauan Selayar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					DINAS KEHUTANAN
									Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					DINAS KEHUTANAN
									Kab. Sinjai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					DINAS KEHUTANAN
									Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					DINAS KEHUTANAN
									Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					DINAS KEHUTANAN
									Kab. Tana Toraja, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					DINAS KEHUTANAN
									Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					DINAS KEHUTANAN
									Kota Pare Pare, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					DINAS KEHUTANAN
									Kota Palopo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					DINAS KEHUTANAN
									Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					DINAS KEHUTANAN
									Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					DINAS KEHUTANAN
3	28	6			PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)	Jumlah DAS yang direhabilitasi	2 DAS	331,423,100				2 DAS	470,000,000	DINAS KEHUTANAN
3	28	6	1.01		Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah DAS yang direhabilitasi	2 DAS	331,423,100				2 DAS	470,000,000	DINAS KEHUTANAN
3	28	6	1.01	1	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan DAS	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan DAS yang Ditetapkan	1 Dokumen	75,000,000	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Dokumen	75,000,000	DINAS KEHUTANAN
3	28	6	1.01	2	Optimalisasi Fungsi dan Daya Dukung Wilayah DAS	Jumlah Dokumen Sinkronisasi dan Koordinasi Optimalisasi DAS	1 Dokumen	82,198,500	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Dokumen	100,000,000	DINAS KEHUTANAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	28	6	1.01	4	Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan DAS	Jumlah Orang yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan DAS	450 Orang	-	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		450 Orang	120,000,000	DINAS KEHUTANAN
3	28	6	1.01	5	Pengembangan Kelembagaan Pengelolaan DAS	Jumlah Lembaga yang Dibentuk dan Dikembangkan dalam Forum Pengelolaan DAS	1 Lembaga	92,802,000	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Lembaga	100,000,000	DINAS KEHUTANAN
3	28	6	1.01	6	Peningkatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan DAS	Jumlah laporan koordinasi dan sinkronisasi pengelolaan DAS yang dihasilkan	1 Laporan	81,422,600	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Laporan	75,000,000	DINAS KEHUTANAN
3	29				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL			29,266,516,773					21,922,026,461	
3	29				DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL			29,266,516,773					21,922,026,461	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
3	29	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Realisasi Kegiatan Perangkat Daerah, Persentase ASN Perangkat Daerah Berkinerja Ketagori Baik, Persentase Penurunan Temuan Berdasarkan LHP	100 %	20,173,914,673				100 %	7,163,919,348	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
3	29	1	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Keterpenuhan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Pelaporan Kinerja	100 %	436,549,300				100 %	375,550,190	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
3	29	1	1.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	192,199,500	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2 Dokumen	193,199,500	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
3	29	1	1.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	129,534,600	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Dokumen	130,534,600	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
3	29	1	1.01	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	15,799,500	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Dokumen	16,799,500	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
3	29	1	1.01	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	86,560,000	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Dokumen	22,560,600	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
3	29	1	1.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	12,455,700	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2 Laporan	12,455,990	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
3	29	1	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan Administrasi Keuangan	100 %	15,175,615,283				100 %	1,847,864,911	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
3	29	1	1.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	130 Orang/ Bulan	14,925,244,483	Kota Makassar, Rappocini, Banta-Bantaeng	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		130 Orang/ Bulan	1,592,244,411	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
3	29	1	1.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	534 Dokumen	80,347,900	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		534 Dokumen	81,348,000	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
3	29	1	1.02	4	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1 Dokumen	136,909,000	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Dokumen	137,909,000	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
3	29	1	1.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	7,620,700	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Laporan	8,870,500	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
3	29	1	1.02	6	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	8,870,300	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Dokumen	9,870,000	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
3	29	1	1.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	16,622,900	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		12 Laporan	17,623,000	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	29	1	1.04		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah			83,476,200					100,000,000	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
3	29	1	1.04	7	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	0 Laporan	83,476,200		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		0 Laporan	100,000,000	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
3	29	1	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Keterpenuhan Administrasi Perangkat Daerah	100 %	28,742,000				100 %	457,499,831	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
3	29	1	1.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	130 Paket	-	Kota Makassar, Rappocini, Banta-Bantaeng	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		130 Paket	111,249,678	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
3	29	1	1.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	12 Orang	28,742,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		12 Orang	29,500,000	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
3	29	1	1.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	50 Orang	-	Kota Makassar, Rappocini, Banta-Bantaeng	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		50 Orang	316,750,153	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
3	29	1	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum	100 %	1,404,156,390				100 %	1,324,512,150	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
3	29	1	1.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3 Paket	10,022,250	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3 Paket	11,022,500	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
									Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
3	29	1	1.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	-	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Paket	11,022,250	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	49,590,000	Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	ASN, PPPK, Stakeholder, Masyarakat	3 Paket	52,050,000	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	39,906,500	Kab. Gowa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	ASN, PPPK, Stakeholder, Masyarakat	4 Paket	46,300,000	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	42,114,000	Kota Palopo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3 Paket	12,450,000	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	39,983,000	Kab. Bulukumba, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5 Paket	48,743,000	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Paket	39,840,000	Kab. Bone, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		6 Paket	29,300,000	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 Paket	48,873,000	Kota Pare Pare, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	ASN, PPPK, Stakeholder, Masyarakat	10 Paket	48,743,000	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	14 Paket	87,649,800		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		14 Paket	85,660,100	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
3	29	1	1.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3 Paket	20,543,000	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3 Paket	16,001,000	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
					Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	2,998,000	Kab. Gowa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	ASN, PPPK, Stakeholder, Masyarakat	1 Paket	4,000,000	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
					Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	5 Paket	3,488,000	Kota Palopo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5 Paket	-	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	17 Paket	22,737,000	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		17 Paket	23,883,500	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
									Kab. Bulukumba, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
									Kab. Kepulauan Selayar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
									Kab. Sinjai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
					Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	0 Paket	2,998,000	Kab. Bone, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		0 Paket	4,000,000	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
						Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket		Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			1 Paket		DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
									Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
					Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	11 Paket	22,139,600		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	ASN, PPPK, Stakeholder, Masyarakat	11 Paket	23,883,500	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
3	29	1	1.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	10681 Paket	84,361,900	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		10681 Paket	36,997,000	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
					Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket	9,764,800	Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	ASN, PPPK, Stakeholder, Masyarakat	5 Paket	8,476,900	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
					Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket	9,781,500	Kab. Gowa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	ASN, PPPK, Stakeholder, Masyarakat	5 Paket	6,700,000	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
					Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket	11,057,500	Kota Palopo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5 Paket	3,121,900	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
					Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket	20,075,100	Kab. Bulukumba, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5 Paket	12,314,100	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
					Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket	15,973,000	Kab. Bone, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5 Paket	12,790,000	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
					Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	10,562,800		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	ASN, PPPK, Stakeholder, Masyarakat	3 Paket	12,314,100	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
					Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket	35,089,800		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5 Paket	35,692,500	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
3	29	1	1.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	149,942,640	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		12 Laporan	150,945,000	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
3	29	1	1.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	200 Laporan	467,249,400	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		200 Laporan	468,249,800	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
					Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	5,256,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	ASN, PPPK, Stakeholder, Masyarakat	1 Laporan	6,256,000	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
					Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	4,464,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	ASN, PPPK, Stakeholder, Masyarakat	1 Laporan	14,464,000	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	8 Laporan	14,989,000	Kota Palopo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		8 Laporan	-	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
					Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	8 Laporan	19,466,800	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		8 Laporan	20,501,000	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
									Kab. Bulukumba, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
									Kab. Kepulauan Selayar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
									Kab. Sinjai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
					Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	8 Laporan	19,456,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	ASN, PPPK, Stakeholder, Masyarakat	8 Laporan	20,501,000	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
					Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	93,784,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Laporan	98,130,000	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
3	29	1	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			1,001,120,000					659,382,000	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
3	29	1	1.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	13 Unit	-	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		13 Unit	229,691,000	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
3	29	1	1.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 Unit	1,001,120,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		0 Unit	429,691,000	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
3	29	1	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	1,397,958,260				100 %	1,492,177,840	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
3	29	1	1.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan	416,657,820	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4 Laporan	503,404,400	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	14,204,300	Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	ASN, Bangunan Gedung Kantor	3 Laporan	16,000,000	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	13,999,000	Kab. Gowa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	ASN, PPPK, Stakeholder, Masyarakat	3 Laporan	15,000,000	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	16,665,300	Kota Palopo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3 Laporan	17,000,000	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	9,306,000	Kab. Bulukumba, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3 Laporan	11,126,400	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	12,942,200	Kab. Bone, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3 Laporan	14,000,000	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	10,536,600	Kota Pare Pare, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	ASN, Bangunan Gedung Kantor	12 Laporan	11,000,000	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
3	29	1	1.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan	903,647,040	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4 Laporan	904,647,040	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
3	29	1	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Barang Milik Daerah Penunajng Urusan Pemerintah Daerah	100 %	646,297,240				100 %	906,932,426	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	29	1	1.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 Unit	324,520,000	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Unit	328,210,000	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
3	29	1	1.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	15 Unit	40,630,000	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		15 Unit	41,630,000	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
3	29	1	1.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	200,000,000	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3 Unit	401,000,000	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
3	29	1	1.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	-	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3 Unit	53,792,426	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
3	29	1	1.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	125 Unit	81,147,240	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		125 Unit	82,300,000	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
3	29	2			PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN	Persentase Pelayanan Usaha Air Tanah Berbasis Konservasi	90 %	631,990,500				90 %	1,066,831,300	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
3	29	2	1.01		Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	Tingkat Pengendalian kerusakan Air Tanah dan Lingkungan Air Tanah pada Wilayah CAT	35 %	470,800,800				35 %	211,000,000	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
3	29	2	1.01	1	Pengumpulan dan Pengolahan Data Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah	Jumlah Dokumen Terkait Data Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	1 Dokumen	124,999,800	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Dokumen	126,000,000	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
3	29	2	1.01	3	Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Zona Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	1 Laporan	75,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Laporan	85,000,000	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
					Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawajumlasan Pemanfaatan Zona Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	12 Laporan	48,550,000	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		12 Laporan	-	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
									Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
									Kab. Pangkajene Kepulauan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
					Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Zona Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	12 Laporan	41,800,000	Kab. Gowa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		12 Laporan	-	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
									Kab. Jeneponto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
									Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
					Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Zona Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	12 Laporan	46,268,000	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		12 Laporan	-	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
									Kab. Luwu Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
									Kota Palopo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
									Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
									Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
					Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Zona Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	12 Laporan	37,200,000	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		12 Laporan	-	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
									Kab. Bulukumba, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
									Kab. Kepulauan Selayar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
									Kab. Sinjai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
					Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Zona Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	12 Laporan	59,783,000	Kab. Bone, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		12 Laporan	-	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
									Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
									Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
					Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Zona Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	12 Laporan	37,200,000	Kab. Enrekang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		12 Laporan	-	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
									Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
									Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
									Kab. Tana Toraja, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
									Kota Pare Pare, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
3	29	2	1.02		Penatausahaan Izin Pengeboran, Izin Penggalian, Izin Pemakaian, dan Izin Pengusahaan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	Tingkat ketaatan pengusahaan Air Tanah pada Aspek Administrasi, Teknis dan Lingkungan	30 %	-				30 %	683,640,500	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
3	29	2	1.02	1	Penetapan Prosedur dan Persyaratan Izin Pengeboran, Izin Penggalian, Izin Pemakaian, dan Izin Pengusahaan Air Tanah	Jumlah Sampel Uji Air Tanah	125 Sampel	-	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			125 Sampel	300,955,500	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
3	29	2	1.02	2	Penyusunan Rekomendasi Layanan Perizinan dan Informasi Izin Pengeboran, Izin Penggalian, Izin Pemakaian, dan Izin Pengusahaan Air Tanah	Jumlah Rekomendasi Teknis pemanfaatan Air Tanah yang diterbitkan	30 Rekomtek	-	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		30 Rekomtek	76,000,000	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
					Penyusunan Rekomendasi Layanan Perizinan dan Informasi Izin Pengeboran, Izin Penggalian, Izin Pemakaian, dan Izin Pengusahaan Air Tanah	Jumlah Rekomendasi teknis pemanfaatan air tanah yang diterbitkan	12 Dokumen	-	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Pengusahaan Air Tanah	12 Dokumen	49,550,000	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
									Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
									Kab. Pangkajene Kepulauan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
					Penyusunan Rekomendasi Layanan Perizinan dan Informasi Izin Pengeboran, Izin Penggalian, Izin Pemakaian, dan Izin Pengusahaan Air Tanah	Jumlah Rekomendasi teknis pemanfaatan air tanah yang diterbitkan	12 Dokumen	-	Kab. Gowa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		12 Dokumen	44,580,000	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
									Kab. Jeneponto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
									Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
					Penyusunan Rekomendasi Layanan Perizinan dan Informasi Izin Pengeboran, Izin Penggalian, Izin Pemakaian, dan Izin Pengusahaan Air Tanah	Jumlah Rekomendasi teknis pemanfaatan air tanah yang diterbitkan	12 Dokumen	-	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		12 Dokumen	47,264,000	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
									Kab. Luwu Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
									Kota Palopo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
									Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
									Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
					Penyusunan Rekomendasi Layanan Perizinan dan Informasi Izin Pengeboran, Izin Penggalian, Izin Pemakaian, dan Izin Pengusahaan Air Tanah	Jumlah Rekomendasi teknis pemanfaatan air tanah yang diterbitkan	12 Dokumen	-	Kab. Bone, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		12 Dokumen	64,291,000	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
									Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
									Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
3	29	2	1.02	3	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Pengeboran, Penggalian, Pemakaian, dan Pengusahaan Air Tanah	Jumlah Perizinan Air Tanah yang diawasi	55 Pengguna Air Tanah	-	Kab. Bone, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		55 Pengguna Air Tanah	101,000,000	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
									Kab. Bulukumba, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
									Kab. Gowa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
									Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
									Kota Pare Pare, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
									Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
									Kota Palopo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
3	29	2	1.03		Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	Persentase Pengguna Air Tanah	28 %	161,189,700				28 %	172,190,800	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
3	29	2	1.03	1	Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Nilai Perolehan Air Tanah	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi yang Terkumpul	1 Dokumen	99,999,900		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Dokumen	110,000,000	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
3	29	2	1.03	3	Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Air Tanah	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Implementasi Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	25 Laporan	61,189,800	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		25 Laporan	62,190,800	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
3	29	3			PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA	Luas Wilayah Izin Usaha Pertambangan (Komoditas Batuan, Non Logam, Non Logam Jenis Tertentu)	150.000 Ha	1,334,017,000				386.146,55 Ha	2,417,658,702	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
						Penentuan dan Penetapan Blok WIUP Mineral (Komoditas Batuan, Non Logam, Non Logam Jenis Tertentu)	150.000 Ha					300.000 Ha		DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
3	29	3	1.01		Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	Jumlah Lokasi Peta WIUP yang bersesuaian tata ruang	24 Kab/Kota	253,464,700				24 Kab/Kota	1,303,875,000	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
3	29	3	1.01	1	Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	Jumlah Dokumen Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dan Batuan dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi atau Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil yang Terkumpul dan Terolah	1 Dokumen	-	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Dokumen	547,535,200	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
3	29	3	1.01	2	Penentuan dan Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	Jumlah Dokumen Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dan Batuan dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi atau Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil yang Ditentukan dan Ditetapkan	1 Dokumen	253,464,700	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Dokumen	254,464,800	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
									Kab. Bulukumba, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
3	29	3	1.01	3	Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Pemanfaatan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dan Batuan dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi atau Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	90 Laporan	-	Kab. Bone, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		90 Laporan	501,875,000	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
									Kab. Bulukumba, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
									Kab. Gowa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
									Kota Pare Pare, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
									Kota Palopo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	29	3	1.03		Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	Jumlah Lokasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan	24 Kab/Kota	654,347,900				24 Kab/Kota	668,044,000	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
3	29	3	1.03	2	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyusunan Usulan Wilayah Usaha Pertambangan dalam Penetapan Wilayah Pertambangan oleh Pemerintah Pusat	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam Rangka Penyusunan Usulan Wilayah Usaha Pertambangan dalam Penetapan Wilayah Pertambangan oleh Pemerintah Pusat	6 Laporan	163,473,400	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		6 Laporan	164,473,400	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
3	29	3	1.03	3	Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	Jumlah Dokumen Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	15 Dokumen	77,155,000	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		15 Dokumen	78,155,000	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
									Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
									Kab. Pangkajene Kepulauan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
					Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	Jumlah Dokumen Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	15 Dokumen	61,180,000	Kab. Gowa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		15 Dokumen	62,600,000	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
									Kab. Jeneponto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
									Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
					Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	Jumlah Dokumen Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	15 Dokumen	75,716,000	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		15 Dokumen	76,480,000	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
									Kab. Luwu Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
									Kota Palopo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
									Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
									Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	Jumlah Dokumen Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	12 Dokumen	63,064,000	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		12 Dokumen	64,064,000	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
									Kab. Bulukumba, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
									Kab. Kepulauan Selayar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
									Kab. Sinjai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
					Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	Jumlah Dokumen Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	15 Dokumen	60,690,000	Kab. Bone, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		15 Dokumen	66,202,000	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
									Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
									Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
					Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	Jumlah Dokumen Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	12 Dokumen	63,064,000	Kab. Enrekang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Pelaku Usaha Pertambangan	12 Dokumen	64,064,000	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
									Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
									Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
									Kab. Tana Toraja, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
									Kota Pare Pare, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
3	29	3	1.03	4	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	50 Laporan	47,200,700	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		50 Laporan	48,200,800	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	29	3	1.03	5	Pengawasan Teknis Kaidah Pertambangan yang baik Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kaidah Teknis Pertambangan yang baik dan Kaidah Pengusahaan yang Baik Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	50 Laporan	42,804,800	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		50 Laporan	43,804,800	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
3	29	3	1.04		Penatausahaan Izin Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Batubara, Mineral Bukan Logam, dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat	Jumlah Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Batubara, Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat yang diawasi	25 Lokasi	175,128,900				25 Lokasi	192,664,102	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
3	29	3	1.04	2	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam Rangka Penyusunan Usulan WPR dalam penetapan Wilayah Pertambangan oleh Pemerintah Pusat	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam Rangka Penyusunan Usulan WPR dalam Penetapan Wilayah Pertambangan oleh Pemerintah Pusat	6 Laporan	175,128,900	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		6 Laporan	176,129,000	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
3	29	3	1.04	4	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Batubara, Mineral Bukan Logam, dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Mineral Bukan Logam, dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat	25 Laporan	-	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		25 Laporan	16,535,102	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
3	29	3	1.06		Penatausahaan Izin Usaha Jasa Pertambangan dalam rangka Penanaman Modal dalam Negeri yang Kegiatan Usahanya dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Pelaksanaan Perizinan Usaha Jasa Pertambangan dalam Rangka Penanaman Modal dalam Negeri yang kegiatan usahanya dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi yang diawasi	15 Izin	43,142,700				15 Izin	44,142,800	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
3	29	3	1.06	3	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Jasa Pertambangan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri yang Kegiatan Usahanya dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Jasa Pertambangan dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri yang Kegiatan Usahanya dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	15 Laporan	43,142,700	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		15 Laporan	44,142,800	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
3	29	3	1.07		Penetapan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan			207,932,800					208,932,800	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
3	29	3	1.07	1	Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan	Jumlah Dokumen Harga Patokan Mineral Bukan Logam yang Terkumpul dan Terolah	1 Dokumen	207,932,800	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Dokumen	208,932,800	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
									Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
3	29	5			PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI TERBARUKAN	Persentase Penggunaan Gas Rumah Tangga	95 %	229,997,300				95 %	3,956,190,928	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
3	29	5	1.03		Penatausahaan Izin, Pembinaan, dan Pengawasan Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain dengan Kapasitas Penyediaan sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu) Ton Per Tahun			229,997,300					230,997,300	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
3	29	5	1.03	3	Pembinaan Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain dengan Kapasitas Penyediaan sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu) Ton Per Tahun	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain dengan Kapasitas Penyediaan sampai dengan 10.000 (Sepuluh Ribu) Ton Per Tahun	1 Laporan	229,997,300	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Laporan	230,997,300	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
3	29	5	1.04		Pelaksanaan Konservasi Energi di Wilayah Provinsi	Jumlah Gedung/Ruang Publik yang melakukan Konservasi Energi	4 Gedung/Ruang Publik	-				4 Gedung/Ruang Publik	3,725,193,628	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	29	5	1.04	1	Perumusan dan Penetapan Kebijakan Strategi dan Program Konservasi Energi	Jumlah Kebijakan Strategi dan Program Konservasi Energi yang disusun	1 Dokumen	-	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Dokumen	208,875,077	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
3	29	5	1.04	3	Sosialisasi secara Menyeluruh dan Komprehensif untuk Penggunaan Teknologi yang Menerapkan Konservasi Energi	Tersedianya data & Informasi Penerima Manfaat dan Kelompok Masyarakat Tidak Mampu	15 Dokumen	-	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		15 Dokumen	151,266,500	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
3	29	5	1.04	4	Pengalokasian Anggaran untuk Program Konservasi Energi	Jumlah Pembangunan untuk program konservasi energi	50 Unit	-	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		50 Unit	579,795,500	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
					Pengalokasian Anggaran untuk Program Konservasi Energi		20	-	Kab. Pangkajene Kepulauan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		20	421,000,000	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
					Pengalokasian Anggaran untuk Program Konservasi Energi		20	-	Kab. Jeneponto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		20	421,000,000	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
									Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
					Pengalokasian Anggaran untuk Program Konservasi Energi		20	-	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		20	421,000,000	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
									Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
					Pengalokasian Anggaran untuk Program Konservasi Energi		20	-	Kab. Kepulauan Selayar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		20	421,000,000	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
					Pengalokasian Anggaran untuk Program Konservasi Energi		20	-	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		20	421,000,000	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
					Pengalokasian Anggaran untuk Program Konservasi Energi		20	-	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		20	421,000,000	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
3	29	5	1.04	6	Bimbingan Teknis Konservasi Energi Kewenangan Provinsi	Jumlah peserta bimtek yang bersertifikat	25 Orang	-	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		25 Orang	103,006,500	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
3	29	5	1.04	7	Pembinaan dan Pengawasan Konservasi Energi Kewenangan Provinsi	Jumlah kegiatan konservasi energi yang diawasi	4 Kegiatan	-	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4 Kegiatan	156,250,051	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
3	29	6			PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN	Persentase Rumah Tangga Pengguna Listrik	99 %	6,896,597,300				99 %	7,317,426,183	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
						Persentase Desa berlistrik (Prioritas Desa Kepulauan)	99,50 %					99,50 %		DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
3	29	6	1.02		Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	Jumlah Legalitas Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik yang diawasi	25 Izin	397,763,400				25 Izin	756,800,900	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
3	29	6	1.02	2	Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	Tersusunnya Rekomendasi dan Informasi Perizinan	12 Dokumen	-	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		12 Dokumen	116,794,100	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
3	29	6	1.02	3	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	25 Laporan	69,683,700	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		25 Laporan	70,683,800	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
					Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	9 Laporan	35,390,000	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik	9 Laporan	36,390,000	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
					Kab. Pangkajene Kepulauan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Pengeboran, Penggalian, Pemakaian, dan Pengusahaan Air Tanah		12 Dokumen	-	Kab. Gowa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		12 Dokumen	44,580,000	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
					Kab. Jeneponto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
					Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	10 Laporan	46,370,000	Kab. Gowa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		10 Laporan	47,490,000	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
					Kab. Jeneponto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
					Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Pengeboran, Penggalian, Pemakaian, dan Pengusahaan Air Tanah		12 Laporan	-	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		12 Laporan	47,264,000	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
					Kab. Luwu Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
					Kota Palopo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
					Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
					Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	9 Laporan	30,863,700	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		9 Laporan	31,766,000	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
					Kab. Luwu Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
					Kota Palopo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
					Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
					Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Pengeboran, Penggalian, Pemakaian, dan Pengusahaan Air Tanah	Jumlah Rekomendasi teknis pemanfaatan air tanah yang diterbitkan	12 Dokumen	-	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		12 Dokumen	38,200,000	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					Kab. Bulukumba, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
					Kab. Kepulauan Selayar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
					Kab. Sinjai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	12 Laporan	88,168,000	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		12 Laporan	89,168,000	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
					Kab. Bulukumba, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
					Kab. Kepulauan Selayar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
					Kab. Sinjai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Pengeboran, Penggalian, Pemakaian, dan Pengusahaan Air Tanah		12 Dokumen	-	Kab. Bone, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		12 Dokumen	64,291,000	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
					Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
					Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	10 Laporan	39,120,000	Kab. Bone, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		10 Laporan	42,806,000	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
					Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
					Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Pengeboran, Penggalian, Pemakaian, dan Pengusahaan Air Tanah	Jumlah laporan pengawasan izin Air Tanah	12 Laporan	-	Kab. Enrekang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Pengusahaan Air Tanah	12 Laporan	38,200,000	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
					Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
					Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
					Kab. Tana Toraja, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
					Kota Pare Pare, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	12 Laporan	88,168,000	Kab. Enrekang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik	12 Laporan	89,168,000	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
									Kab. Pangkajene Kepulauan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
									Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
									Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
									Kab. Tana Toraja, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
									Kota Pare Pare, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
3	29	6	1.05		Penatausahaan Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik bagi Badan Usaha Dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki oleh Penanam Modal Dalam Negeri	Jumlah Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik bagi Badan Usaha dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki Oleh Penanaman Modal dalam Negeri	10 Badan Usaha	204,056,300				10 Badan Usaha	152,950,700	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
3	29	6	1.05	2	Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik bagi Badan Usaha Dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki oleh Penanam Modal Dalam Negeri	Jumlah surat Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik bagi Badan Usaha dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki Oleh Penanam Modal dalam Negeri	12 Dokumen	168,286,500	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		12 Dokumen	116,180,900	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
3	29	6	1.05	3	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik bagi Badan Usaha Dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki oleh Penanam Modal Dalam Negeri	Jumlah laporan hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik bagi Badan Usaha dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki oleh Penanam Modal Dalam Negeri	10 Laporan	35,769,800	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		10 Laporan	36,769,800	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
3	29	6	1.06		Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	Jumlah KK yang telah menikmati listirk	1187 KK	6,294,777,600				1187 KK	6,407,674,583	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
3	29	6	1.06	1	Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu	Jumlah Dokumen Terkait Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu	6 Dokumen	221,823,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		6 Dokumen	222,823,000	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
					Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu	Jumlah Dokumen Terkait Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu	1 Dokumen	54,480,000	Kab. Gowa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Dokumen	55,482,000	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
									Kab. Jeneponto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
									Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
					Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu	Jumlah Dokumen Terkait Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu	1 Dokumen	-	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Dokumen	-	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
									Kab. Bulukumba, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
									Kab. Kepulauan Selayar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
									Kab. Sinjai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu	Jumlah Dokumen Terkait Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu	1 Dokumen	45,500,000	Kab. Bone, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Dokumen	48,826,000	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
									Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
									Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
3	29	6	1.06	2	Penetapan Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu	Jumlah Penerima Manfaat Dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu	175 Keluarga	1,153,528,200	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		175 Keluarga	583,438,800	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
3	29	6	1.06	4	Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Sasaran Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	Jumlah Dokumen yang Terkumpul Terkait Data dan Informasi Sasaran Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	3 Dokumen	-	Kab. Bone, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3 Dokumen	151,509,400	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
									Kab. Bulukumba, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
									Kab. Gowa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
									Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
									Kota Pare Pare, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
									Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
									Kota Palopo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
					Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Sasaran Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	Jumlah Dokumen yang Terkumpul Terkait Data dan Informasi Sasaran Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	10 Dokumen	60,090,000	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Masyarakat Belum Berlistrik	10 Dokumen	61,090,000	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
									Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
									Kab. Pangkajene Kepulauan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
					Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Sasaran Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	Jumlah Dokumen yang Terkumpul Terkait Data dan Informasi Sasaran Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	10 Dokumen	58,838,500	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		10 Dokumen	119,886,000	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
									Kab. Luwu Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
									Kota Palopo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
									Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
									Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
					Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Sasaran Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	Jumlah Dokumen yang Terkumpul Terkait Data dan Informasi Sasaran Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	1 Dokumen	-	Kab. Bone, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Dokumen	48,826,000	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
									Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
									Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
3	29	6	1.06	5	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	15 Laporan	513,009,200	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		15 Laporan	705,272,600	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
3	29	6	1.06	6	Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	Jumlah Sarana yang Terbangun dalam Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	270 Set	4,187,508,700	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		270 Set	4,140,996,900	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
3	29	6	1.06	7	Pengendalian dan Pengawasan Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	14 Laporan	-	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		14 Laporan	269,523,883	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
3	30				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN			21,771,000,715					29,973,500,000	
3	30				DINAS PERDAGANGAN			21,771,000,715					29,973,500,000	DINAS PERDAGANGAN
3	30	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Realisasi Kegiatan Perangkat Daerah, Persentase ASN Perangkat Daerah Berkinerja Ketagori Baik, Persentase Penurunan Temuan Berdasarkan LHP	100 %	14,112,023,405					19,164,500,000	DINAS PERDAGANGAN
3	30	1	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			317,849,600					456,000,000	DINAS PERDAGANGAN
3	30	1	1.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	88,510,000	Kota Makassar, Tamalate, Maccini Sombala	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2 Dokumen	89,000,000	DINAS PERDAGANGAN
3	30	1	1.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	0 Dokumen	34,999,800	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		0 Dokumen	17,000,000	DINAS PERDAGANGAN
3	30	1	1.01	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	0 Dokumen	35,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		0 Dokumen	50,000,000	DINAS PERDAGANGAN
3	30	1	1.01	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	0 Dokumen	34,990,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		0 Dokumen	50,000,000	DINAS PERDAGANGAN
3	30	1	1.01	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	0 Dokumen	29,999,800	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		0 Dokumen	50,000,000	DINAS PERDAGANGAN
3	30	1	1.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 Laporan	94,350,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		12 Laporan	200,000,000	DINAS PERDAGANGAN
3	30	1	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			9,093,724,703					12,200,000,000	DINAS PERDAGANGAN
3	30	1	1.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	0 Orang/ Bulan	8,923,724,903	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		0 Orang/ Bulan	12,000,000,000	DINAS PERDAGANGAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	30	1	1.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	0 Laporan	80,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		0 Laporan	100,000,000	DINAS PERDAGANGAN
3	30	1	1.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	0 Laporan	45,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		0 Laporan	50,000,000	DINAS PERDAGANGAN
3	30	1	1.02	8	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	0 Dokumen	44,999,800	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		0 Dokumen	50,000,000	DINAS PERDAGANGAN
3	30	1	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			259,240,000					300,000,000	DINAS PERDAGANGAN
3	30	1	1.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	0 Paket	179,240,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		0 Paket	200,000,000	DINAS PERDAGANGAN
3	30	1	1.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	0 Orang	40,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		0 Orang	50,000,000	DINAS PERDAGANGAN
3	30	1	1.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	25 Orang	40,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		25 Orang	50,000,000	DINAS PERDAGANGAN
3	30	1	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah			1,064,472,560					1,585,500,000	DINAS PERDAGANGAN
3	30	1	1.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	0 Paket	11,998,860	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		0 Paket	15,500,000	DINAS PERDAGANGAN
3	30	1	1.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	0 Paket	207,476,500	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		0 Paket	350,000,000	DINAS PERDAGANGAN
3	30	1	1.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	0 Paket	99,999,600	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		0 Paket	310,000,000	DINAS PERDAGANGAN
3	30	1	1.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	0 Laporan	44,999,600	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		0 Laporan	110,000,000	DINAS PERDAGANGAN
3	30	1	1.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	0 Laporan	699,998,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		0 Laporan	800,000,000	DINAS PERDAGANGAN
3	30	1	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			429,612,200					1,030,000,000	DINAS PERDAGANGAN
3	30	1	1.07	2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			-	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			420,000,000	DINAS PERDAGANGAN
3	30	1	1.07	8	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	0 Unit	300,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		0 Unit	400,000,000	DINAS PERDAGANGAN
3	30	1	1.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 Unit	59,904,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		0 Unit	110,000,000	DINAS PERDAGANGAN
3	30	1	1.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 Unit	69,708,200	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		0 Unit	100,000,000	DINAS PERDAGANGAN
3	30	1	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			2,152,128,092					2,661,000,000	DINAS PERDAGANGAN
3	30	1	1.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	0 Laporan	697,125,860	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		0 Laporan	750,000,000	DINAS PERDAGANGAN
3	30	1	1.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor			-	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			11,000,000	DINAS PERDAGANGAN
3	30	1	1.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	0 Laporan	1,455,002,232	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		0 Laporan	1,900,000,000	DINAS PERDAGANGAN
3	30	1	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			794,996,250					932,000,000	DINAS PERDAGANGAN
3	30	1	1.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	0 Unit	219,996,250	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		0 Unit	300,000,000	DINAS PERDAGANGAN
3	30	1	1.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0 Unit	490,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		0 Unit	500,000,000	DINAS PERDAGANGAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	30	1	1.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0 Unit	85,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		0 Unit	120,000,000	DINAS PERDAGANGAN
3	30	1	1.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			-	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			12,000,000	DINAS PERDAGANGAN
3	30	2			PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Persentase Rekomendasi SIUP MB yang dikeluarkan	100%	799,995,500				100%	1,400,000,000	DINAS PERDAGANGAN
						Persentase Penerbitan SKA	100%					100%		DINAS PERDAGANGAN
3	30	2	1.01		Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Toko Bebas Bea dan Rekomendasi Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB) bagi Distributor			149,998,500					200,000,000	DINAS PERDAGANGAN
3	30	2	1.01	1	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen SIUP-MB Toko Bebas Bea dan Rekomendasi SIUP-MB bagi Distributor melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah SIUP-MB Toko Bebas Bea dan Surat Rekomendasi SIUP-MB bagi Distributor yang Diterbitkan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	0 Dokumen	149,998,500	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		0 Dokumen	200,000,000	DINAS PERDAGANGAN
3	30	2	1.03		Pengendalian Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya Pengecer Terdaftar			150,000,000					200,000,000	DINAS PERDAGANGAN
3	30	2	1.03	3	Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya	Jumlah Laporan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya	0 Laporan	150,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		0 Laporan	200,000,000	DINAS PERDAGANGAN
3	30	2	1.04		Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) bagi Daerah Provinsi yang Telah Ditetapkan Sebagai Instansi Penerbit SKA dan Angka Pengenal Importir (API)			499,997,000					1,000,000,000	DINAS PERDAGANGAN
3	30	2	1.04	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA	Jumlah Dokumen Penerbitan Surat Keterangan Asal	0 Dokumen	499,997,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		0 Dokumen	1,000,000,000	DINAS PERDAGANGAN
3	30	3			PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase Ketersediaan Sarana Distribusi Perdagangan	100%	499,936,350				100%	850,000,000	DINAS PERDAGANGAN
3	30	3	1.01		Pembangunan dan Pengelolaan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi serta Pasar Lelang Komoditas			499,936,350					850,000,000	DINAS PERDAGANGAN
3	30	3	1.01	1	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi	Jumlah Sarana dan Prasarana Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi	0 Unit	249,999,550	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		0 Unit	350,000,000	DINAS PERDAGANGAN
3	30	3	1.01	2	Pembinaan dan Pengendalian Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi	0 Laporan	249,936,800	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		0 Laporan	500,000,000	DINAS PERDAGANGAN
3	30	4			PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG Kebutuhan POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase barang kebutuhan pokok dan barang penting yang dapat dikendalikan harganya	100%	1,166,998,300				100%	1,297,000,000	DINAS PERDAGANGAN
3	30	4	1.01		Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Provinsi			50,000,000					55,000,000	DINAS PERDAGANGAN
3	30	4	1.01	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok di Tingkat Distributor dan Sub Distributor	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok di Tingkat Distributor dan Sub Distributor	0 Laporan	50,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		0 Laporan	55,000,000	DINAS PERDAGANGAN
3	30	4	1.02		Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan			1,075,998,300					1,192,000,000	DINAS PERDAGANGAN
3	30	4	1.02	1	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota	0 Laporan	75,999,300	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		0 Laporan	92,000,000	DINAS PERDAGANGAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	30	4	1.02	2	Operasi Pasar dalam rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar dalam Rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	0 Laporan	999,999,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		0 Laporan	1,100,000,000	DINAS PERDAGANGAN
3	30	4	1.03		Pengawasan Pupuk dan Pestisida Tingkat Daerah Provinsi dalam Melakukan Pelaksanaan Pengadaan, Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi di Wilayah Kerjanya			41,000,000					50,000,000	DINAS PERDAGANGAN
3	30	4	1.03	4	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pupuk Bersubsidi dan Pestisida	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pupuk Bersubsidi dan Pestisida	0 Laporan	41,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		0 Laporan	50,000,000	DINAS PERDAGANGAN
3	30	5			PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Nilai Ekspor Perdagangan	171.081.215 $ US	1,694,000,000				476.164.314 $ US	2,774,000,000	DINAS PERDAGANGAN
3	30	5	1.01		Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi			1,694,000,000					2,774,000,000	DINAS PERDAGANGAN
3	30	5	1.01	1	Pameran Dagang Internasional/Nasional	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang	0 Pelaku Usaha	700,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		0 Pelaku Usaha	1,000,000,000	DINAS PERDAGANGAN
3	30	5	1.01	2	Pameran Dagang Lokal	Jumlah Pelaku Usaha yang Berorientasi Ekspor pada Pameran Dagang Lokal	0 Pelaku Usaha	150,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		0 Pelaku Usaha	200,000,000	DINAS PERDAGANGAN
3	30	5	1.01	3	Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan	0 Pelaku Usaha	150,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		0 Pelaku Usaha	200,000,000	DINAS PERDAGANGAN
3	30	5	1.01	4	Peningkatan Citra Produk Ekspor	Jumlah Produk Unggulan Ekspor Daerah yang Disusun menjadi Materi Promosi	0 Produk	120,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		0 Produk	700,000,000	DINAS PERDAGANGAN
3	30	5	1.01	5	Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor	Jumlah Pelaku Usaha Ekspor yang Dibina	0 Pelaku Usaha	574,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		0 Pelaku Usaha	674,000,000	DINAS PERDAGANGAN
3	30	6			PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase Barang Beredar yang diawasi, tertib niaga dan Pengaduan Konsumen	100 %	2,873,908,160				100 %	3,514,000,000	DINAS PERDAGANGAN
3	30	6	1.01		Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota			323,993,900					434,000,000	DINAS PERDAGANGAN
3	30	6	1.01	1	Pemberdayaan Konsumen dan Kelembagaan Perlindungan Konsumen	Jumah Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang Aktif	0 BPSK	323,993,900	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		0 BPSK	434,000,000	DINAS PERDAGANGAN
3	30	6	1.02		Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota			1,949,914,260					2,280,000,000	DINAS PERDAGANGAN
3	30	6	1.02	2	Pengembangan Layanan Pengujian	Jumlah Dokumen Hasil Pengujian Mutu Barang	0 Dokumen	399,993,260	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		0 Dokumen	500,000,000	DINAS PERDAGANGAN
3	30	6	1.02	3	Pengembangan Layanan Sertifikasi	Jumlah Sertifikat Produk yang Diterbitkan	0 Sertifikat	1,349,996,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		0 Sertifikat	1,500,000,000	DINAS PERDAGANGAN
3	30	6	1.02	4	Pengembangan Layanan Kalibrasi	Jumlah Sertifikat Kalibrasi yang Diterbitkan	0 Sertifikat	199,925,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		0 Sertifikat	280,000,000	DINAS PERDAGANGAN
3	30	6	1.03		Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota			600,000,000					800,000,000	DINAS PERDAGANGAN
3	30	6	1.03	1	Peningkatan Kapasitas dan Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa sesuai Parameter Ketentuan Perlindungan Konsumen	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Barang Beredar dan Jasa serta Kegiatan Perdagangan yang Diawasi	0 Laporan	600,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		0 Laporan	800,000,000	DINAS PERDAGANGAN
3	30	7			PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Persentaase jenis produk pelaku usaha yang memenuhi standar Perdagangan retail	100 %	624,139,000				100 %	974,000,000	DINAS PERDAGANGAN
3	30	7	1.02		Pelaksanaan Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri			574,139,000					874,000,000	DINAS PERDAGANGAN
3	30	7	1.02	1	Fasilitasi Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi	Jumlah UMKM yang Melakukan Pemasaran Produk Dalam Negeri Terutama Produk yang Dihasilkan oleh UMKM melalui Kemitraan dengan Retail, Marketplace, Perhotelan dan Jasa Akomodasi	0 UMKM	574,139,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		0 UMKM	874,000,000	DINAS PERDAGANGAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	30	7	1.03		Pelaksanaan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri			50,000,000					100,000,000	DINAS PERDAGANGAN
3	30	7	1.03	3	Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan	Jumlah Data dan Informasi Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan	0 Dokumen	50,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		0 Dokumen	100,000,000	DINAS PERDAGANGAN
3	31				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN			42,780,123,253					42,905,562,638	
3	31				DINAS PERINDUSTRIAN			42,780,123,253					42,905,562,638	DINAS PERINDUSTRIAN
3	31	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Realisasi Kegiatan Perangkat Daerah, Persentase ASN Perangkat Daerah Berkinerja Ketagori Baik, Persentase Penurunan Temuan Berdasarkan LHP	100 %	16,853,753,207					26,298,876,217	DINAS PERINDUSTRIAN
3	31	1	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			762,665,500					554,714,500	DINAS PERINDUSTRIAN
3	31	1	1.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	0 Dokumen	557,679,100	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pajak Daerah		0 Dokumen	468,562,500	DINAS PERINDUSTRIAN
3	31	1	1.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	0 Dokumen	10,500,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pajak Daerah		0 Dokumen	9,975,000	DINAS PERINDUSTRIAN
3	31	1	1.01	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	12,600,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pajak Daerah		1 Dokumen	13,230,000	DINAS PERINDUSTRIAN
3	31	1	1.01	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	10,440,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pajak Daerah		1 Dokumen	11,025,000	DINAS PERINDUSTRIAN
3	31	1	1.01	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	12,600,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pajak Daerah		1 Dokumen	13,230,000	DINAS PERINDUSTRIAN
3	31	1	1.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	24 Laporan	12,600,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pajak Daerah		24 Laporan	11,130,000	DINAS PERINDUSTRIAN
3	31	1	1.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	146,246,400	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pajak Daerah		4 Laporan	27,562,000	DINAS PERINDUSTRIAN
3	31	1	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			10,107,477,519					15,060,150,000	DINAS PERINDUSTRIAN
3	31	1	1.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	72 Orang/ Bulan	9,481,148,419	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pajak Daerah		72 Orang/ Bulan	14,332,500,000	DINAS PERINDUSTRIAN
3	31	1	1.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	548,806,100	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pajak Daerah		12 Dokumen	330,750,000	DINAS PERINDUSTRIAN
3	31	1	1.02	4	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	0 Dokumen	34,394,500	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pajak Daerah		0 Dokumen	385,875,000	DINAS PERINDUSTRIAN
3	31	1	1.02	6	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	12 Dokumen	43,128,500	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pajak Daerah		12 Dokumen	11,025,000	DINAS PERINDUSTRIAN
3	31	1	1.04		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah			-					220,500,000	DINAS PERINDUSTRIAN
3	31	1	1.04	1	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah	0 Dokumen	-	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pajak Daerah		0 Dokumen	110,250,000	DINAS PERINDUSTRIAN
3	31	1	1.04	2	Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah	0 Dokumen	-	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pajak Daerah		0 Dokumen	110,250,000	DINAS PERINDUSTRIAN
3	31	1	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			-					110,250,000	DINAS PERINDUSTRIAN
3	31	1	1.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	0 Orang	-	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pajak Daerah		0 Orang	110,250,000	DINAS PERINDUSTRIAN
3	31	1	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah			974,480,600					910,874,217	DINAS PERINDUSTRIAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	31	1	1.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	24,555,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pajak Daerah		4 Paket	28,874,217	DINAS PERINDUSTRIAN
3	31	1	1.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	24 Laporan	949,925,600	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pajak Daerah		24 Laporan	882,000,000	DINAS PERINDUSTRIAN
3	31	1	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			1,482,903,200					4,777,500,000	DINAS PERINDUSTRIAN
3	31	1	1.07	1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	0 Unit	-	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pajak Daerah		0 Unit	1,155,000,000	DINAS PERINDUSTRIAN
3	31	1	1.07	2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	0 Unit	-	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pajak Daerah		0 Unit	315,000,000	DINAS PERINDUSTRIAN
3	31	1	1.07	9	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 Unit	728,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pajak Daerah		0 Unit	1,102,500,000	DINAS PERINDUSTRIAN
3	31	1	1.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 Unit	754,903,200	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pajak Daerah		0 Unit	2,205,000,000	DINAS PERINDUSTRIAN
3	31	1	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			2,298,026,388					3,550,050,000	DINAS PERINDUSTRIAN
3	31	1	1.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	0 Laporan	180,001,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pajak Daerah		0 Laporan	132,300,000	DINAS PERINDUSTRIAN
3	31	1	1.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	0 Laporan	488,113,500	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pajak Daerah		0 Laporan	661,500,000	DINAS PERINDUSTRIAN
3	31	1	1.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	0 Laporan	1,629,911,888	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pajak Daerah		0 Laporan	2,756,250,000	DINAS PERINDUSTRIAN
3	31	1	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			1,228,200,000					1,114,837,500	DINAS PERINDUSTRIAN
3	31	1	1.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	0 Unit	598,200,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pajak Daerah		0 Unit	551,250,000	DINAS PERINDUSTRIAN
3	31	1	1.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	0 Unit	35,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pajak Daerah		0 Unit	38,587,500	DINAS PERINDUSTRIAN
3	31	1	1.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0 Unit	595,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pajak Daerah		0 Unit	525,000,000	DINAS PERINDUSTRIAN
3	31	2			PROGRAM Perencanaan DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase pertumbuhan jumlah industri	7%	23,304,427,524				7%	14,889,000,000	DINAS PERINDUSTRIAN
3	31	2	1.01		Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi			23,304,427,524					14,889,000,000	DINAS PERINDUSTRIAN
3	31	2	1.01	1	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri	0 Dokumen	-	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pajak Daerah		0 Dokumen	220,500,000	DINAS PERINDUSTRIAN
3	31	2	1.01	2	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	0 Dokumen	-	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pajak Daerah		0 Dokumen	367,500,000	DINAS PERINDUSTRIAN
3	31	2	1.01	3	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	0 Dokumen	6,049,688,700	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pajak Daerah		0 Dokumen	5,040,000,000	DINAS PERINDUSTRIAN
3	31	2	1.01	4	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	0 Dokumen	10,069,678,700	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pajak Daerah		0 Dokumen	4,830,000,000	DINAS PERINDUSTRIAN
3	31	2	1.01	5	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	0 Dokumen	7,185,060,124	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pajak Daerah		0 Dokumen	4,305,000,000	DINAS PERINDUSTRIAN
3	31	2	1.01	6	Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	0 Dokumen	-	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pajak Daerah		0 Dokumen	126,000,000	DINAS PERINDUSTRIAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	31	3			PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Persentase peningkatan pengendalian izin usaha industri	3 %	1,799,767,822				3 %	1,111,311,421	DINAS PERINDUSTRIAN
3	31	3	1.01		Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Provinsi			1,799,767,822					1,111,311,421	DINAS PERINDUSTRIAN
3	31	3	1.01	1	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen perolehan IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik			1,699,776,422	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pajak Daerah			900,000,000	DINAS PERINDUSTRIAN
3	31	3	1.01	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan Di Bidang Industri dalam Lingkup perizinan Usaha Industri, Perizinan Perluasan Usaha Industri, Perizinan Kawasan Industri dan Perizinan Perluasan Kawasan Industri Kewenangan Provinsi	0 Dokumen	99,991,400	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pajak Daerah		0 Dokumen	211,311,421	DINAS PERINDUSTRIAN
3	31	4			PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Persentase peningkatan pengelolaan SIINAS	4%	822,174,700				4%	606,375,000	DINAS PERINDUSTRIAN
3	31	4	1.01		Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)			822,174,700					606,375,000	DINAS PERINDUSTRIAN
3	31	4	1.01	1	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	0 Dokumen	672,181,400	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pajak Daerah		0 Dokumen	275,625,000	DINAS PERINDUSTRIAN
3	31	4	1.01	2	Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Provinsi melalui SIINas	Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Provinsi melalui SIINas	0 Dokumen	50,001,100	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pajak Daerah		0 Dokumen	165,375,000	DINAS PERINDUSTRIAN
3	31	4	1.01	3	Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Provinsi dalam Penyampaian Data ke SIINas	Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Provinsi dalam Penyampaian Data ke SIINas	0 Dokumen	99,992,200	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pajak Daerah		0 Dokumen	165,375,000	DINAS PERINDUSTRIAN
3	32				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI			269,999,900					532,500,000	
3	32				DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI			269,999,900					532,500,000	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
3	32	2			PROGRAM Perencanaan KAWASAN TRANSMIGRASI	Jumlah lokasi transmigrasi yang diklarifikasi terhadap tata batas kawasan hutan	100%	40,000,000				100%	105,000,000	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
3	32	2	1.01		Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi			40,000,000					105,000,000	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
3	32	2	1.01	3	Penyediaan Tanah untuk Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Luas Tanah untuk Pembangunan Kawasan Transmigrasi	1058 Hektar	40,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1058 Hektar	52,500,000	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
3	32	2	1.01	4	Penatausahaan Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi			-	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			52,500,000	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
3	32	3			PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI			139,999,900					230,000,000	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
3	32	3	1.01		Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi			139,999,900					230,000,000	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
3	32	3	1.01	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pembangunan Transmigrasi Antar Pemerintah Daerah Kabupaten/kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pembangunan Transmigrasi Antar Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	2 Laporan	50,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2 Laporan	52,500,000	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	32	3	1.01	3	Pelaksanaan Penataan Penduduk Setempat Sekitar Lokasi Kawasan Transmigrasi	Jumlah Verifikasi penduduk yang memiliki tanah dan rumah di kawasan transmigrasi yang berpotensi untuk menjadi Transmigan Penduduk Setempat (TPS)	40 Kepala Keluarga	20,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		40 Kepala Keluarga	52,500,000	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
3	32	3	1.01	4	Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang Berasal dari Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi			-	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			52,500,000	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
3	32	3	1.01	5	Penyuluhan Transmigrasi	Jumlah Calon Transmigran yang Mendapatkan Penyuluhan	40 Kepala Keluarga	69,999,900	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		40 Kepala Keluarga	72,500,000	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
3	32	4			PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Persentase penempatan transmigrasi	100%	90,000,000				100%	197,500,000	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
3	32	4	1.01		Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Pemantapan			90,000,000					197,500,000	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
3	32	4	1.01	1	Penguatan SDM dalam rangka Pemantapan Satuan Pemukiman	Jumlah Kepala Keluarga Transmigran yang Dibina	60 Kepala Keluarga	90,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		60 Kepala Keluarga	92,500,000	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
3	32	4	1.01	2	Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam rangka Pemantapan Satuan Pemukiman			-	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				105,000,000	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN			562,241,031,156					282,957,790,694	
4	1				SEKRETARIAT DAERAH			256,402,509,233					282,957,790,694	
4	1				BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH			4,677,581,992					7,020,000,000	BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH
4	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Realisasi Kegiatan Perangkat Daerah, Persentase ASN Perangkat Daerah Berkinerja Ketagori Baik, Persentase Penurunan Temuan Berdasarkan LHP	100 %	2,593,872,092					4,470,000,000	BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH
4	1	1	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			350,658,800					550,000,000	BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH
4	1	1	1.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10 Dokumen	249,274,300	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		10 Dokumen	350,000,000	BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH
4	1	1	1.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Dokumen	101,384,500	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2 Dokumen	200,000,000	BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH
4	1	1	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			-					1,240,000,000	BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH
4	1	1	1.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi	300 Orang	-	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		300 Orang	620,000,000	BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH
4	1	1	1.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	300 Orang	-	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		300 Orang	620,000,000	BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH
4	1	1	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah			1,198,121,100					1,430,000,000	BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH
4	1	1	1.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor	10 Paket	348,213,500	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		10 Paket	400,000,000	BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH
4	1	1	1.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	20,000,000	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2 Paket	30,000,000	BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH
4	1	1	1.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50 Laporan	829,907,600	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		50 Laporan	1,000,000,000	BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	1	1	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			477,582,192					550,000,000	BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH
4	1	1	1.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2 Laporan	477,582,192	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2 Laporan	550,000,000	BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH
4	1	1	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			567,510,000					700,000,000	BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH
4	1	1	1.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 Unit	95,710,000	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Unit	100,000,000	BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH
4	1	1	1.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	8 Unit	350,400,000	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		8 Unit	400,000,000	BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH
4	1	1	1.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	30 Unit	121,400,000	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		30 Unit	200,000,000	BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH
4	1	3			PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH	Presentase Urusan Pemerintahan Yang difasilitasi, dimonitoring, dan dievaluasi	100%	2,083,709,900				100%	2,550,000,000	BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH
4	1	3	1.01		Pelaksanaan Tugas Pemerintahan			762,723,400					1,050,000,000	BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH
4	1	3	1.01	1	Pengelolaan Administrasi Kebijakan Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kebijakan Pemerintahan	3 Dokumen	241,431,400	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3 Dokumen	300,000,000	BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH
4	1	3	1.01	2	Fasilitasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum	1 Dokumen	200,000,000	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Dokumen	300,000,000	BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH
4	1	3	1.01	3	Fasilitasi Penataan Wilayah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penataan Wilayah	8 Dokumen	321,292,000	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		8 Dokumen	450,000,000	BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH
4	1	3	1.02		Pelaksanaan Otonomi Daerah			1,020,986,900					950,000,000	BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH
4	1	3	1.02	1	Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD	13 Dokumen	379,999,900	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		13 Dokumen	450,000,000	BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH
4	1	3	1.02	2	Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan yang Dilaksanakan	24 Dokumen	99,999,700	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		24 Dokumen	200,000,000	BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH
4	1	3	1.02	3	Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan	24 Laporan	540,987,300	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		24 Laporan	300,000,000	BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH
4	1	3	1.03		Fasilitasi Kerja Sama Daerah			299,999,600					550,000,000	BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH
4	1	3	1.03	1	Fasilitasi Kerja Sama Antar Pemerintah	Jumlah Kerja Sama Antar Pemerintah yang Difasilitasi	75 Dokumen	149,999,700	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		75 Dokumen	250,000,000	BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH
4	1	3	1.03	2	Fasilitasi Kerja Sama Badan Usaha/Swasta	Jumlah Kerja Sama Badan Usaha/Swasta yang Difasilitasi	75 Dokumen	49,999,900	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		75 Dokumen	100,000,000	BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH
4	1	3	1.03	3	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Jumlah Kerja Sama yang Dievaluasi	75 Laporan	100,000,000	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		75 Laporan	200,000,000	BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	1				BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT			75,227,029,654					77,253,523,243	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
4	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	% ASN Perangkat Daerah Berkinerja Kategori Baik	100 %	1,298,759,498				100 %	2,211,492,056	
						% Penurunan Temuan Berdasarkan LHP	100 %					100 %		
						% Realisasi Kegiatan Perangkat Daerah	100 %					100 %		
4	1	1	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	% Penyusunan dokumen perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tepat Waktu	100 %	85,240,600				100 %	117,500,000	
4	1	1	1.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	35,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3 Dokumen	35,000,000	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
4	1	1	1.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	6,327,600	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Dokumen	10,000,000	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
4	1	1	1.01	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	29,913,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Dokumen	52,500,000	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
4	1	1	1.01	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	7,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Dokumen	10,000,000	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
4	1	1	1.01	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	7,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Dokumen	10,000,000	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
4	1	1	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persen Penyusunan Dokumen Laporan Keuangan Tepat Waktu	100 Persen	20,218,100				100 Persen	46,225,000	
4	1	1	1.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	7,111,500	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		12 Dokumen	10,000,000	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
4	1	1	1.02	4	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 Dokumen	-	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		12 Dokumen	7,875,000	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
4	1	1	1.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	-	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Laporan	7,875,000	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
4	1	1	1.02	6	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	2,970,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Dokumen	3,150,000	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
4	1	1	1.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18 Laporan	10,136,600	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		18 Laporan	14,175,000	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
4	1	1	1.02	8	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	0 Dokumen	-	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		0 Dokumen	3,150,000	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
						Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen					1 Dokumen		
4	1	1	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	% Penyusunan dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah tepat waktu	100 %	3,000,000				100 %	15,225,000	
4	1	1	1.03	1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen	-	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2 Dokumen	4,725,000	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
4	1	1	1.03	5	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	-	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Laporan	5,250,000	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
4	1	1	1.03	6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	3,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		12 Laporan	5,250,000	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
4	1	1	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rata-rata nilai perilaku pegawai Perangkat Daerah berdasarkan penilaian Kinerja ASN	100 Persen	31,451,000				100 Persen	46,300,000	
4	1	1	1.05	3	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	45 Dokumen	6,651,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		45 Dokumen	10,000,000	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
4	1	1	1.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	0 Orang	24,800,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		0 Orang	30,000,000	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	5 Orang					5 Orang		
4	1	1	1.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	30 Orang	-	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		30 Orang	3,150,000	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
4	1	1	1.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	30 Orang	-	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		30 Orang	3,150,000	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
4	1	1	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persen Pemenuhan Kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	278,321,535				100 Persen	518,875,000	
4	1	1	1.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3 Paket	9,891,535	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3 Paket	15,750,000	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
4	1	1	1.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	24 Paket	-	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		24 Paket	126,000,000	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
4	1	1	1.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	5 Paket	-	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5 Paket	52,500,000	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
4	1	1	1.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	15 Paket	20,442,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		15 Paket	27,875,000	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
4	1	1	1.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	14,925,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2 Paket	20,500,000	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
4	1	1	1.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	24,995,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		12 Laporan	31,000,000	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
4	1	1	1.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30 Laporan	201,233,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		30 Laporan	230,000,000	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
4	1	1	1.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12 Dokumen	6,835,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		12 Dokumen	15,250,000	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
4	1	1	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persen Pemenuhan Kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 Persen	54,525,000				100 Persen	373,500,000	
4	1	1	1.07	5	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	-	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Paket	21,000,000	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
4	1	1	1.07	7	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	3 Unit	54,525,000	Kota Makassar, Panakkukang, Panaikang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3 Unit	300,000,000	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
4	1	1	1.07	8	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	1 Unit	-	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Unit	52,500,000	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
4	1	1	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen Pemenuhan Kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	526,753,263				100 Persen	674,367,056	
4	1	1	1.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	151,867,056	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		12 Laporan	151,867,056	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
4	1	1	1.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	30,666,591	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		12 Laporan	50,000,000	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
4	1	1	1.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	344,219,616	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		12 Laporan	472,500,000	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
4	1	1	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam kondisi baik	100 Persen	299,250,000				100 Persen	419,500,000	
4	1	1	1.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	9 Unit	139,250,000	Kota Makassar, Panakkukang, Panaikang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		9 Unit	236,500,000	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
4	1	1	1.09	7	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	1 Unit	10,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Unit	10,500,000	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
4	1	1	1.09	8	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	1 Unit	-	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Unit	52,500,000	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
4	1	1	1.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	150,000,000	Kota Makassar, Panakkukang, Panaikang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2 Unit	120,000,000	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	1	4			PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase Rumusan Kebijakan Bidang Kesejahteraan Rakyat yang dimanfaatkan.	100	73,928,270,156				100	75,042,031,187	
						Persentase Penduduk usia 15 tahun ke atas beragama Islam yang melek aksara Al-Quran (Prioritas)	35,55					35,55		
						Persentase Penurunan kasus Kejahatan terhadap Kesusilaan (Prioritas)	10 %					10 %		
4	1	4	1.01		Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual	Persentase kebijakan pembinaan spritual yang dimanfaatkan	100 persen	49,815,151,056				100 persen	74,146,281,187	
4	1	4	1.01	1	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual	Jumlah Sarana dan Prasarana Spiritual yang Dikelola	4 Unit	1,147,826,756	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4 Unit	2,007,350,000	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
4	1	4	1.01	2	Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual	Jumlah Lembaga Bina Spiritual yang Difasilitasi	400 Lembaga	48,667,324,300	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		400 Lembaga	72,138,931,187	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
4	1	4	1.02		Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar	persentase kebijakan Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar yang dimanfaatkan	100 persen	21,951,647,900				100 persen	423,250,000	
4	1	4	1.02	1	Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan	1 Dokumen	21,820,696,700	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Dokumen	150,000,000	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
4	1	4	1.02	2	Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan	1 Dokumen	65,200,200	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Dokumen	157,500,000	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
4	1	4	1.02	3	Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial	1 Dokumen	65,751,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Dokumen	115,750,000	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
4	1	4	1.03		Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar	Persentase kebijakan Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar yang dimanfaatkan	100 persen	2,161,471,200				100 persen	472,500,000	
4	1	4	1.03	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata	1 Dokumen	66,890,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Dokumen	157,500,000	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
4	1	4	1.03	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja	1 Dokumen	47,287,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Dokumen	157,500,000	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
4	1	4	1.03	3	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Komunikasi, Informatika, Statistik, Persandian, dan Perhubungan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Komunikasi, Informatika, Statistik, Persandian, dan Perhubungan	1 Dokumen	2,047,294,200	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Dokumen	157,500,000	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
4	1				BIRO HUKUM			6,872,382,100					-	BIRO HUKUM
4	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Realisasi Kegiatan Perangkat Daerah, Persentase ASN Perangkat Daerah Berkinerja Ketagori Baik, Persentase Penurunan Temuan Berdasarkan LHP	100%	1,684,653,080				100%	-	BIRO HUKUM
4	1	1	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			30,217,600					-	BIRO HUKUM
4	1	1	1.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	8,121,600	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2 Dokumen	-	BIRO HUKUM
4	1	1	1.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	11,505,000	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2 Dokumen	-	BIRO HUKUM

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	1	1	1.01	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	10,591,000	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Dokumen	-	BIRO HUKUM
4	1	1	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			10,206,300					-	BIRO HUKUM
4	1	1	1.02	8	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2 Dokumen	10,206,300	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2 Dokumen	-	BIRO HUKUM
4	1	1	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			277,738,000					-	BIRO HUKUM
4	1	1	1.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	4 Orang	188,538,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4 Orang	-	BIRO HUKUM
4	1	1	1.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	160 Orang	89,200,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		160 Orang	-	BIRO HUKUM
4	1	1	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah			429,143,000					-	BIRO HUKUM
4	1	1	1.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Jenis	35,880,800	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2 Jenis	-	BIRO HUKUM
4	1	1	1.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	17,640,000	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Laporan	-	BIRO HUKUM
4	1	1	1.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50 Laporan	370,946,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		50 Laporan	-	BIRO HUKUM
4	1	1	1.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	4 Dokumen	4,676,200	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4 Dokumen	-	BIRO HUKUM
4	1	1	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			319,221,500					-	BIRO HUKUM
4	1	1	1.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang DisediakanGedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	55 Unit	319,221,500	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		55 Unit	-	BIRO HUKUM
4	1	1	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			234,391,680					-	BIRO HUKUM
4	1	1	1.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	234,391,680	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Laporan	-	BIRO HUKUM
4	1	1	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			383,735,000					-	BIRO HUKUM
4	1	1	1.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	6 Unit	234,025,000	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		6 Unit	-	BIRO HUKUM
4	1	1	1.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	125,000,000	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2 Unit	-	BIRO HUKUM
4	1	1	1.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	30 Unit	24,710,000	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		30 Unit	-	BIRO HUKUM
4	1	5			PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM	Nilai Hasil Evaluasi Reformasi Birokrasi pada Penataan Peraturan Perundang-undangan	5	5,187,729,020				5	-	BIRO HUKUM
						Persentase Perkara Hukum yang difasilitasi	100%					100%		
4	1	5	1.01		Fasilitasi Penyusunan Perundang-Undangan			1,539,369,012					-	BIRO HUKUM
4	1	5	1.01	1	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Pengaturan	Jumlah Produk Hukum Pengaturan yang Disusun	40 Dokumen	627,457,100	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		40 Dokumen	-	BIRO HUKUM
4	1	5	1.01	2	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Penetapan	Jumlah Produk Hukum Penetapan yang Disusun	600 Dokumen	231,271,700	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		600 Dokumen	-	BIRO HUKUM
4	1	5	1.01	3	Pendokumentasian Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya	Jumlah Produk Hukum yang Didokumentasi dan Dikelola Informasi Hukumnya	20 Dokumen	74,999,700	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		20 Dokumen	-	BIRO HUKUM
4	1	5	1.01	4	Fasilitasi dan Evaluasi Produk Hukum Kabupaten/Kota	Jumlah Produk Hukum Kabupaten/Kota yang Difasilitasi dan Dievaluasi	300 Dokumen	605,640,512	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		300 Dokumen	-	BIRO HUKUM
4	1	5	1.02		Fasilitasi Bantuan Hukum			3,648,360,008					-	BIRO HUKUM
4	1	5	1.02	1	Fasilitasi Penyelesaian Masalah Hukum	Jumlah Masalah Hukum yang Diselesaikan	1 Kasus	2,412,805,608	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Kasus	-	BIRO HUKUM

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	1	5	1.02	2	Fasilitasi Penyelesaian Masalah Non Litigasi dan HAM	Jumlah Masalah Non Litigasi dan HAM yang Diselesaikan	1 Kasus	1,235,554,400	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Kasus	-	BIRO HUKUM
4	1				BIRO ORGANISASI			6,281,734,719					45,000,000	BIRO ORGANISASI
4	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Realisasi Kegiatan Perangkat Daerah, Persentase ASN Perangkat Daerah Berkinerja Ketagori Baik, Persentase Penurunan Temuan Berdasarkan LHP	100%	2,101,734,770					45,000,000	BIRO ORGANISASI
4	1	1	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			300,000,000					-	BIRO ORGANISASI
4	1	1	1.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	220,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2 Dokumen	-	BIRO ORGANISASI
4	1	1	1.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	15,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Dokumen	-	BIRO ORGANISASI
4	1	1	1.01	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	15,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Dokumen	-	BIRO ORGANISASI
4	1	1	1.01	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	15,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Dokumen	-	BIRO ORGANISASI
4	1	1	1.01	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	15,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Dokumen	-	BIRO ORGANISASI
4	1	1	1.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	10,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Laporan	-	BIRO ORGANISASI
4	1	1	1.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	10,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4 Laporan	-	BIRO ORGANISASI
4	1	1	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan akuntansi yang tersusun	12 Laporan	30,000,000				12 Laporan	-	BIRO ORGANISASI
4	1	1	1.02	4	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1 Dokumen	30,000,000	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	0	1 Dokumen	-	BIRO ORGANISASI
4	1	1	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen	10,000,000				2 Dokumen	-	BIRO ORGANISASI
						Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen					2 Dokumen		BIRO ORGANISASI
4	1	1	1.03	1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	0 Dokumen	10,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	0	0 Dokumen	-	BIRO ORGANISASI
4	1	1	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah data pegawai ASN yang tersedia	38 ASN	20,000,000				38 ASN	-	BIRO ORGANISASI
4	1	1	1.05	3	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	20,000,000	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	0	1 Dokumen	-	BIRO ORGANISASI
4	1	1	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Kantor	100 %	698,301,258				100 %	-	BIRO ORGANISASI
4	1	1	1.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	1 Paket	10,000,000	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	0	1 Paket	-	BIRO ORGANISASI
4	1	1	1.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	35,000,000	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	0	2 Paket	-	BIRO ORGANISASI
4	1	1	1.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	10 Paket	13,250,000	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	0	10 Paket	-	BIRO ORGANISASI
4	1	1	1.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	10,750,000	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	0	1 Paket	-	BIRO ORGANISASI
4	1	1	1.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	100,051,258	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	0	1 Laporan	-	BIRO ORGANISASI
4	1	1	1.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	1 Laporan	529,250,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	0	1 Laporan	-	BIRO ORGANISASI
4	1	1	1.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	1 Dokumen	-	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	0	1 Dokumen	-	BIRO ORGANISASI

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	1	1	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			210,000,000					-	BIRO ORGANISASI
4	1	1	1.07	7	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah unit aset tetap lainnya yang disediakan	5 Unit	210,000,000	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5 Unit	-	BIRO ORGANISASI
4	1	1	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			535,843,512					-	BIRO ORGANISASI
4	1	1	1.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	1 Laporan	-	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Laporan	-	BIRO ORGANISASI
4	1	1	1.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	535,843,512	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Laporan	-	BIRO ORGANISASI
4	1	1	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			297,590,000					45,000,000	BIRO ORGANISASI
4	1	1	1.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	6 Unit	252,590,000	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		6 Unit	-	BIRO ORGANISASI
4	1	1	1.09	8	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah aset tak berujud yang dipelihara	1 Unit	45,000,000	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Unit	45,000,000	BIRO ORGANISASI
4	1	2			PROGRAM PENATAAN ORGANISASI	Persentase kesesuaian program prioritas dengan struktur organisasi perangkat daerah	100 %	4,180,000,000				100 %	-	BIRO ORGANISASI
4	1	2	1.01		Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Persentase Perangkat Daerah Provinsi dan Kab/Kota yang difasilitasi dalam rangka pelaksanaan analisis jabatan	100 %	1,500,000,000				100 %	-	BIRO ORGANISASI
						Persentase Perangkat Daerah Provinsi dan Kab/Kota yang difasilitasi dalam rangka penataan kelembagaan berdasarkan peraturan perundang-undangan	100 %					100 %		BIRO ORGANISASI
4	1	2	1.01	1	Fasilitasi Penataan Kelembagaan Provinsi	Jumlah dokumen hasil penataan kelembagaan Provinsi	1 dokumen	600,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	0	1 dokumen	-	BIRO ORGANISASI
4	1	2	1.01	2	Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen hasil fasilitasi penataan kelembagaan Kab/Kota	1 dokumen	400,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	0	1 dokumen	-	BIRO ORGANISASI
4	1	2	1.01	3	Penataan Analisis Jabatan	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan analisis jabatan, analisis beban kerja, dan evaluasi jabatan	1 Dokumen	500,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	0	1 Dokumen	-	BIRO ORGANISASI
4	1	2	1.02		Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja	Jumlah perangkat daerah Provinsi dan Kab/Kota yang difasilitasi reformasi birokrasi akuntabilitas kinerja, budaya kerja, tatalaksana pemerintahan dan pelayanan publik	100 %	2,680,000,000				100 %	-	BIRO ORGANISASI
4	1	2	1.02	1	Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	1 Dokumen	1,300,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	0	1 Dokumen	-	BIRO ORGANISASI
4	1	2	1.02	2	Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	1 Dokumen	475,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	0	1 Dokumen	-	BIRO ORGANISASI
4	1	2	1.02	3	Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja	1 Laporan	250,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	0	1 Laporan	-	BIRO ORGANISASI
4	1	2	1.02	4	Pengelolaan Tatalaksana Pemerintahan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan tatalaksana pemerintahan	1 dokumen	300,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	0	1 dokumen	-	BIRO ORGANISASI
4	1	2	1.02	5	Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik	Jumlah dokumen hasil fasilitasi peningkatan pelayanan publik	1 dokumen	355,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	0	1 dokumen	-	BIRO ORGANISASI
4	1				BIRO UMUM			141,671,059,111					170,594,612,388	BIRO UMUM
4	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Realisasi Kegiatan Perangkat Daerah, Persentase ASN Perangkat Daerah Berkinerja Ketagori Baik, Persentase Penurunan Temuan Berdasarkan LHP	100%	141,671,059,111				100%	170,594,612,388	BIRO UMUM
4	1	1	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			182,558,900					192,222,450	BIRO UMUM
4	1	1	1.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	32 Dokumen	76,715,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pajak Daerah		32 Dokumen	80,594,325	BIRO UMUM

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	1	1	1.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	150 Laporan	105,843,900	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pajak Daerah		150 Laporan	111,628,125	BIRO UMUM
4	1	1	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			66,542,716,507					70,548,430,372	BIRO UMUM
4	1	1	1.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	832 Orang/ Bulan	65,518,521,707	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pajak Daerah		832 Orang/ Bulan	69,838,412,497	BIRO UMUM
4	1	1	1.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	151 Dokumen	126,217,500	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pajak Daerah		151 Dokumen	132,528,375	BIRO UMUM
4	1	1	1.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	2388 Dokumen	546,552,100	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pajak Daerah		2388 Dokumen	208,481,700	BIRO UMUM
4	1	1	1.02	4	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	32 Dokumen	135,764,200	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pajak Daerah		32 Dokumen	142,553,775	BIRO UMUM
4	1	1	1.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	9 Laporan	69,966,800	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pajak Daerah		9 Laporan	73,469,025	BIRO UMUM
4	1	1	1.02	6	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	8 Dokumen	77,043,800	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pajak Daerah		8 Dokumen	80,896,725	BIRO UMUM
4	1	1	1.02	8	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	13 Dokumen	68,650,400	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pajak Daerah		13 Dokumen	72,088,275	BIRO UMUM
4	1	1	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			978,640,500					223,284,075	BIRO UMUM
4	1	1	1.03	2	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1778 Dokumen	505,362,400	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pajak Daerah		1778 Dokumen	44,480,625	BIRO UMUM
4	1	1	1.03	4	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	16 Laporan	42,210,900	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pajak Daerah		16 Laporan	44,323,125	BIRO UMUM
4	1	1	1.03	5	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	16 Laporan	42,684,900	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pajak Daerah		16 Laporan	44,820,825	BIRO UMUM
4	1	1	1.03	6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	345,483,900	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pajak Daerah		12 Laporan	44,612,925	BIRO UMUM
4	1	1	1.03	7	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	12 Dokumen	42,898,400	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pajak Daerah		12 Dokumen	45,046,575	BIRO UMUM
4	1	1	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			11,433,898,244					13,028,218,942	BIRO UMUM
4	1	1	1.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	842 Paket	503,580,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pajak Daerah		842 Paket	529,200,000	BIRO UMUM
4	1	1	1.05	3	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	482 Dokumen	10,453,672,844	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pajak Daerah		482 Dokumen	11,964,943,267	BIRO UMUM
4	1	1	1.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	13 Orang	175,145,400	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pajak Daerah		13 Orang	132,975,675	BIRO UMUM
4	1	1	1.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	20 Orang	301,500,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pajak Daerah		20 Orang	401,100,000	BIRO UMUM
4	1	1	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah			22,170,735,135					29,398,130,937	BIRO UMUM
4	1	1	1.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4047 Paket	917,283,500	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pajak Daerah		4047 Paket	1,758,097,950	BIRO UMUM
4	1	1	1.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	48 Paket	-	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pajak Daerah		48 Paket	779,464,350	BIRO UMUM
4	1	1	1.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	36 Paket	1,548,301,335	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pajak Daerah		36 Paket	640,173,975	BIRO UMUM
4	1	1	1.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	368,041,100	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pajak Daerah		12 Paket	388,164,525	BIRO UMUM
4	1	1	1.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	48 Laporan	14,711,259,300	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pajak Daerah		48 Laporan	18,688,557,657	BIRO UMUM

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	1	1	1.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	782 Laporan	4,529,727,900	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pajak Daerah		782 Laporan	7,039,918,305	BIRO UMUM
4	1	1	1.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	19179 Dokumen	96,122,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pajak Daerah		19179 Dokumen	103,754,175	BIRO UMUM
4	1	1	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			1,480,000,000					17,505,706,456	BIRO UMUM
4	1	1	1.07	2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	8 Unit	-	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pajak Daerah		8 Unit	1,049,381,025	BIRO UMUM
4	1	1	1.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4 Unit	-	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pajak Daerah		4 Unit	2,730,000,000	BIRO UMUM
4	1	1	1.07	9	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	1,480,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pajak Daerah		2 Unit	13,201,325,431	BIRO UMUM
4	1	1	1.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	4 Unit	-	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pajak Daerah		4 Unit	525,000,000	BIRO UMUM
4	1	1	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			6,998,972,647					8,246,308,665	BIRO UMUM
4	1	1	1.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	109,230,200	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pajak Daerah		12 Laporan	114,697,275	BIRO UMUM
4	1	1	1.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan	6,723,070,947	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pajak Daerah		36 Laporan	7,738,690,365	BIRO UMUM
4	1	1	1.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	20 Laporan	166,671,500	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pajak Daerah		20 Laporan	392,921,025	BIRO UMUM
4	1	1	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			9,064,641,000					9,072,391,883	BIRO UMUM
4	1	1	1.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	20 Unit	2,128,065,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pajak Daerah		20 Unit	2,219,895,825	BIRO UMUM
4	1	1	1.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	40 Unit	5,333,860,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pajak Daerah		40 Unit	4,953,958,800	BIRO UMUM
4	1	1	1.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	4 Unit	311,916,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pajak Daerah		4 Unit	751,916,025	BIRO UMUM
4	1	1	1.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	17 Unit	1,290,800,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pajak Daerah		17 Unit	919,180,733	BIRO UMUM
4	1	1	1.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	7 Unit	-	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pajak Daerah		7 Unit	227,440,500	BIRO UMUM
4	1	1	1.11		Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah			9,520,803,087					9,642,584,603	BIRO UMUM
4	1	1	1.11	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang/Bulan	137,291,809	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pajak Daerah		2 Orang/Bulan	308,281,902	BIRO UMUM
4	1	1	1.11	2	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	26 Paket	253,050,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pajak Daerah		26 Paket	391,293,525	BIRO UMUM
4	1	1	1.11	3	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	1 Orang	1,250,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pajak Daerah		1 Orang	840,000,000	BIRO UMUM
4	1	1	1.11	4	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang/ Bulan	7,880,461,278	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pajak Daerah		2 Orang/ Bulan	8,103,009,176	BIRO UMUM
4	1	1	1.12		Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah			13,298,093,091					12,737,334,005	BIRO UMUM
4	1	1	1.12	1	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	360 Paket	6,986,377,800	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pajak Daerah		360 Paket	5,997,966,660	BIRO UMUM
4	1	1	1.12	2	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	360 Paket	814,716,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pajak Daerah		360 Paket	2,315,957,070	BIRO UMUM

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	1	1	1.12	3	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	360 Paket	5,496,999,291	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pajak Daerah		360 Paket	4,423,410,275	BIRO UMUM
4	1				BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN			9,361,124,785					10,251,817,740	BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN
4	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Realisasi Kegiatan Perangkat Daerah, Persentase ASN Perangkat Daerah Berkinerja Ketagori Baik, Persentase Penurunan Temuan Berdasarkan LHP	100%	9,361,124,785				100%	10,251,817,740	BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN
4	1	1	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			233,401,200					233,401,500	BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN
4	1	1	1.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	206,101,200	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5 Dokumen	193,801,500	BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN
4	1	1	1.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Laporan	12,400,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5 Laporan	14,350,000	BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN
4	1	1	1.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Laporan	14,900,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5 Laporan	25,250,000	BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN
4	1	1	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			447,216,000					458,795,000	BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN
4	1	1	1.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	59,920,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Paket	58,795,000	BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN
4	1	1	1.05	3	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	600 Dokumen	387,296,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		600 Dokumen	400,000,000	BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN
4	1	1	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah			1,306,836,200					1,180,000,000	BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN
4	1	1	1.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	20 Paket	10,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		20 Paket	10,000,000	BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN
4	1	1	1.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	100,305,600	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Paket	-	BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN
4	1	1	1.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	74,978,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		12 Laporan	75,000,000	BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN
4	1	1	1.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	1,121,552,600	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		12 Laporan	1,095,000,000	BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN
4	1	1	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			850,131,200					1,036,802,000	BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN
4	1	1	1.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	75 Unit	850,131,200	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		75 Unit	1,036,802,000	BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN
4	1	1	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			1,810,376,420					1,817,010,240	BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN
4	1	1	1.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	199,251,500	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		12 Laporan	200,000,000	BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN
4	1	1	1.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	1,611,124,920	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		12 Laporan	1,617,010,240	BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN
4	1	1	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			734,600,000					1,748,000,000	BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN
4	1	1	1.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			-	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			78,750,000	BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN
4	1	1	1.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	16 Unit	666,600,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		16 Unit	500,000,000	BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN
4	1	1	1.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	70 Unit	68,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		70 Unit	89,250,000	BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	1	1	1.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	-	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4 Unit	1,080,000,000	BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN
4	1	1	1.13		Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan			1,391,872,700					1,191,882,300	BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN
4	1	1	1.13	1	Penyiapan Materi Pimpinan	Jumlah Dokumen Materi Pimpinan yang Disiapkan	120 Dokumen	218,154,400	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		120 Dokumen	218,128,500	BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN
4	1	1	1.13	2	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	12 Laporan	337,920,800	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		12 Laporan	325,884,200	BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN
4	1	1	1.13	3	Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan	Jumlah Laporan Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan	12 Laporan	835,797,500	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		12 Laporan	647,869,600	BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN
4	1	1	1.14		Fasilitasi Keprotokolan			2,586,691,065					2,585,926,700	BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN
4	1	1	1.14	1	Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara	3200 Laporan	1,690,915,465	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3200 Laporan	1,793,615,500	BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN
4	1	1	1.14	2	Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	500 Laporan	630,070,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		500 Laporan	526,605,600	BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN
4	1	1	1.14	3	Pengelolaan Hubungan Keprotokolan	Jumlah Laporan Pengelolaan Hubungan Keprotokolan	3200 Laporan	265,705,600	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3200 Laporan	265,705,600	BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN
4	1				BIRO PEREKONOMIAN DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN			6,641,209,920					8,429,992,888	BIRO PEREKONOMIAN DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
4	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Realisasi Kegiatan Perangkat Daerah, Persentase ASN Perangkat Daerah Berkinerja Ketagori Baik, Persentase Penurunan Temuan Berdasarkan LHP	100%	3,127,246,920				100%	3,197,315,946	BIRO PEREKONOMIAN DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
4	1	1	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			326,300,000					304,400,000	BIRO PEREKONOMIAN DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
4	1	1	1.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	29,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4 Dokumen	29,400,000	BIRO PEREKONOMIAN DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
4	1	1	1.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang tersusun dan terkoordinasi (Laporan)	4 Laporan	297,300,000	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4 Laporan	275,000,000	BIRO PEREKONOMIAN DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
4	1	1	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			50,000,000					210,000,000	BIRO PEREKONOMIAN DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
4	1	1	1.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	2 dokumen	50,000,000	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2 dokumen	50,000,000	BIRO PEREKONOMIAN DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
4	1	1	1.02	6	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Tersedianya Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	2 dokumen	-	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2 dokumen	105,000,000	BIRO PEREKONOMIAN DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
4	1	1	1.02	8	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	-	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Dokumen	55,000,000	BIRO PEREKONOMIAN DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
4	1	1	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			-					96,589,500	BIRO PEREKONOMIAN DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
4	1	1	1.03	6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD			-	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			96,589,500	BIRO PEREKONOMIAN DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
4	1	1	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			45,000,000					114,500,000	BIRO PEREKONOMIAN DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
4	1	1	1.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	42 Paket	45,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		42 Paket	64,500,000	BIRO PEREKONOMIAN DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	1	1	1.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah laporan diklat pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang telah diikuti / jumlah orang yang mengikuti pendidikan/pelatihan berdasarkan tugas dan fungsinya ()	5 Orang	-	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5 Orang	50,000,000	BIRO PEREKONOMIAN DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
4	1	1	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah			1,796,973,000					785,692,322	BIRO PEREKONOMIAN DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
4	1	1	1.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1 Paket	2,500,000	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Paket	5,000,000	BIRO PEREKONOMIAN DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
4	1	1	1.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	50 Paket	-	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		50 Paket	200,000,000	BIRO PEREKONOMIAN DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
4	1	1	1.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang tersedia (Jenis)	19 Jenis	-	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		19 Jenis	63,000,000	BIRO PEREKONOMIAN DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
4	1	1	1.06	7	Penyediaan Bahan/Material	Tersedianya Bahan/Material	1 Paket	-	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Paket	8,500,000	BIRO PEREKONOMIAN DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
4	1	1	1.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	"Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD"	1 Laporan	1,794,473,000	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Laporan	205,000,000	BIRO PEREKONOMIAN DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
4	1	1	1.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	-	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Dokumen	55,000,000	BIRO PEREKONOMIAN DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
4	1	1	1.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang dikelola SKPD (Jenis)	4 Web	-	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4 Web	249,192,322	BIRO PEREKONOMIAN DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
4	1	1	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			-					333,600,012	BIRO PEREKONOMIAN DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
4	1	1	1.07	5	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	21 Paket	-	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		21 Paket	223,600,012	BIRO PEREKONOMIAN DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
4	1	1	1.07	7	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	1 Unit	-	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Unit	110,000,000	BIRO PEREKONOMIAN DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
4	1	1	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			363,651,408					434,534,112	BIRO PEREKONOMIAN DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
4	1	1	1.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Orang	363,651,408	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		12 Orang	434,534,112	BIRO PEREKONOMIAN DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
						Makan Minum Tamu	4 Paket					4 Paket		BIRO PEREKONOMIAN DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
4	1	1	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			545,322,512					918,000,000	BIRO PEREKONOMIAN DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
4	1	1	1.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	10 Unit	295,322,512	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		10 Unit	268,000,000	BIRO PEREKONOMIAN DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
4	1	1	1.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	3 Unit	250,000,000	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3 Unit	200,000,000	BIRO PEREKONOMIAN DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
4	1	1	1.09	8	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	4 Unit	-	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4 Unit	250,000,000	BIRO PEREKONOMIAN DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	1	1	1.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	-	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Unit	200,000,000	BIRO PEREKONOMIAN DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
4	1	6			PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase rumusan kebijakan bidang perekonomian yang dimanfaatkan	100%	3,114,200,700				100%	4,832,676,942	BIRO PEREKONOMIAN DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
4	1	6	1.01		Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian			1,689,627,100					2,700,000,000	BIRO PEREKONOMIAN DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
4	1	6	1.01	1	Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro	2 Dokumen	785,000,000	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2 Dokumen	1,600,000,000	BIRO PEREKONOMIAN DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
4	1	6	1.01	2	Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro	2 Dokumen	904,627,100	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2 Dokumen	1,100,000,000	BIRO PEREKONOMIAN DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
4	1	6	1.02		Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam			424,573,400					732,676,942	BIRO PEREKONOMIAN DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
4	1	6	1.02	1	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	2 Dokumen	424,573,400	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2 Dokumen	732,676,942	BIRO PEREKONOMIAN DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
4	1	6	1.03		Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD			1,000,000,200					1,400,000,000	BIRO PEREKONOMIAN DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
4	1	6	1.03	1	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha	2 Dokumen	1,000,000,200	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2 Dokumen	1,000,000,000	BIRO PEREKONOMIAN DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
4	1	6	1.03	4	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah	2 Dokumen	-	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2 Dokumen	400,000,000	BIRO PEREKONOMIAN DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
4	1	8			PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	Realisasi capaian program prioritas pembangunan daerah	100.00%	399,762,300				100.00%	400,000,000	BIRO PEREKONOMIAN DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
4	1	8	1.01		Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah			299,762,300					300,000,000	BIRO PEREKONOMIAN DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
4	1	8	1.01	1	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD	4 Laporan	99,762,400	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4 Laporan	100,000,000	BIRO PEREKONOMIAN DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
4	1	8	1.01	2	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN	4 Laporan	99,999,900	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4 Laporan	100,000,000	BIRO PEREKONOMIAN DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
4	1	8	1.01	3	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah	4 Laporan	100,000,000	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4 Laporan	100,000,000	BIRO PEREKONOMIAN DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
4	1	8	1.02		Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah			100,000,000					100,000,000	BIRO PEREKONOMIAN DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
4	1	8	1.02	2	Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pembangunan Daerah	4 Laporan	100,000,000	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4 Laporan	100,000,000	BIRO PEREKONOMIAN DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
4	1				BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA			5,670,386,952					9,362,844,435	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
4	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Realisasi Kegiatan Perangkat Daerah, Persentase ASN Perangkat Daerah Berkinerja Ketagori Baik, Persentase Penurunan Temuan Berdasarkan LHP	100%	2,909,426,752				100%	1,885,376,257	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	1	1	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			20,000,000					41,717,500	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
4	1	1	1.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	20,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4 Dokumen	16,197,500	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
4	1	1	1.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	-	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Dokumen	3,300,000	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
4	1	1	1.01	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	-	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Dokumen	3,960,000	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
4	1	1	1.01	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	-	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Dokumen	3,300,000	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
4	1	1	1.01	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	-	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Dokumen	3,960,000	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
4	1	1	1.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	-	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4 Laporan	5,500,000	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
4	1	1	1.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	-	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4 Laporan	5,500,000	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
4	1	1	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			-					16,500,000	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
4	1	1	1.03	1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen	-	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2 Dokumen	5,500,000	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
4	1	1	1.03	5	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	-	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2 Laporan	5,500,000	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
4	1	1	1.03	7	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen	-	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2 Dokumen	5,500,000	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
4	1	1	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			-					165,000,000	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
4	1	1	1.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	2 Paket	-	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2 Paket	165,000,000	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
4	1	1	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah			1,575,718,900					939,150,300	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
4	1	1	1.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	5,697,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2 Paket	6,121,500	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
4	1	1	1.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	25 Paket	1,180,071,500	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		25 Paket	31,075,000	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
4	1	1	1.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan	389,950,400	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4 Laporan	901,953,800	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
4	1	1	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			232,000,000					-	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
4	1	1	1.07	5	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	30 Paket	232,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		30 Paket	-	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
4	1	1	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			503,166,542					349,089,857	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
4	1	1	1.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Laporan	18,384,350	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4 Laporan	96,152,478	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
4	1	1	1.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan	484,782,192	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4 Laporan	252,937,379	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
4	1	1	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			578,541,310					373,918,600	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
4	1	1	1.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	15 Unit	339,182,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		15 Unit	359,420,600	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	1	1	1.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	30 Unit	39,359,310	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		30 Unit	14,498,000	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
4	1	1	1.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	200,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2 Unit	-	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
4	1	7			PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	Persentase Kesesuaian pengadaan barang dan jasa dengan rencana	100%	2,760,960,200				100%	7,477,468,178	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
						Persentase Kepuasan pelayanan pengadaan barang dan jasa	100%					100%		BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
4	1	7	1.01		Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa			1,284,604,700					3,019,346,182	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
4	1	7	1.01	1	Pengelolaan Strategi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Laporan Hasil Strategi Pengadaan Barang dan Jasa	4 Laporan	50,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4 Laporan	554,219,807	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
4	1	7	1.01	2	Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa	4 Laporan	1,184,604,700	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4 Laporan	1,633,680,058	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
4	1	7	1.01	3	Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Laporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa	12 Laporan	50,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		12 Laporan	831,446,317	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
4	1	7	1.02		Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik			885,942,200					2,088,680,166	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
4	1	7	1.02	1	Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah Laporan Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik	4 Laporan	443,483,100	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4 Laporan	769,229,877	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
4	1	7	1.02	2	Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Laporan Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	2 Laporan	385,156,400	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2 Laporan	760,722,683	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
4	1	7	1.02	3	Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Laporan Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	12 Laporan	57,302,700	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		12 Laporan	558,727,606	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
4	1	7	1.03		Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa			590,413,300					2,369,441,830	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
4	1	7	1.03	1	Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah O+A2922:I2929rang yang Mengikuti Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa	40 Orang	306,455,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		40 Orang	972,839,850	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
4	1	7	1.03	2	Pembinaan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa	4 Dokumen	154,819,500	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4 Dokumen	732,406,813	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
4	1	7	1.03	3	Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa	4 Dokumen	129,138,800	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4 Dokumen	664,195,167	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
4	2				SEKRETARIAT DPRD			305,838,521,923					-	SEKRETARIAT DPRD
4	2	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	% Realisasi Kegiatan Perangkat Daerah, % ASN Perangkat Daerah Berkinerja Kategori Baik, % Penurunan Temuan Berdasrkan LHP	100 %	120,880,303,227				100 %	-	SEKRETARIAT DPRD
4	2	1	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	% Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Pelaporan Kinerja Tepat Waktu	100 %	929,765,200				100 %	-	SEKRETARIAT DPRD
4	2	1	1.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	94,566,500	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3 Dokumen	-	SEKRETARIAT DPRD
4	2	1	1.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4 Dokumen	244,377,700	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4 Dokumen	-	SEKRETARIAT DPRD
4	2	1	1.01	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	4 Dokumen	224,658,500	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4 Dokumen	-	SEKRETARIAT DPRD
4	2	1	1.01	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	4 Dokumen	89,755,500	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4 Dokumen	-	SEKRETARIAT DPRD
4	2	1	1.01	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	4 Dokumen	101,293,900	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4 Dokumen	-	SEKRETARIAT DPRD
4	2	1	1.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	67,001,400	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2 Laporan	-	SEKRETARIAT DPRD

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	2	1	1.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6 Laporan	108,111,700	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		6 Laporan	-	SEKRETARIAT DPRD
4	2	1	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	% Pemenuhan Gaji dan Tunjangan ASN, Laporan Keuangan serta Bahan Tanggapan Pemerintahan	100 %	13,500,796,679				100 %	-	SEKRETARIAT DPRD
4	2	1	1.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	120 Orang/ Bulan	11,939,705,479	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		120 Orang/ Bulan	-	SEKRETARIAT DPRD
4	2	1	1.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	4 Dokumen	33,711,500	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4 Dokumen	-	SEKRETARIAT DPRD
4	2	1	1.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	4 Dokumen	357,833,300	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4 Dokumen	-	SEKRETARIAT DPRD
4	2	1	1.02	4	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	4 Dokumen	208,334,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4 Dokumen	-	SEKRETARIAT DPRD
4	2	1	1.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4 Laporan	170,411,500	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4 Laporan	-	SEKRETARIAT DPRD
4	2	1	1.02	6	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	5 Dokumen	533,668,700	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5 Dokumen	-	SEKRETARIAT DPRD
4	2	1	1.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18 Laporan	205,945,200	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		18 Laporan	-	SEKRETARIAT DPRD
4	2	1	1.02	8	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	5 Dokumen	51,187,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5 Dokumen	-	SEKRETARIAT DPRD
4	2	1	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	% Pemenuhan Kebutuhan Barang Milik Daerah dan Penataausahaannya	100 %	74,561,500				100 %	-	SEKRETARIAT DPRD
4	2	1	1.03	6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	14 Laporan	74,561,500	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		14 Laporan	-	SEKRETARIAT DPRD
4	2	1	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	% Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 %	1,101,264,000				100 %	-	SEKRETARIAT DPRD
4	2	1	1.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	6 Paket	93,775,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		6 Paket	-	SEKRETARIAT DPRD
4	2	1	1.05	3	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	6 Dokumen	104,845,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		6 Dokumen	-	SEKRETARIAT DPRD
4	2	1	1.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	285 Orang	902,644,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		285 Orang	-	SEKRETARIAT DPRD
4	2	1	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	% Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	3,366,552,520				100 %	-	SEKRETARIAT DPRD
4	2	1	1.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	148,634,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2 Paket	-	SEKRETARIAT DPRD
4	2	1	1.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	25 Paket	380,112,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		25 Paket	-	SEKRETARIAT DPRD
4	2	1	1.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	10 Paket	242,070,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		10 Paket	-	SEKRETARIAT DPRD
4	2	1	1.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	480,960,020	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3 Paket	-	SEKRETARIAT DPRD
4	2	1	1.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	720,610,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3 Paket	-	SEKRETARIAT DPRD
4	2	1	1.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	908,248,500	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		12 Laporan	-	SEKRETARIAT DPRD
4	2	1	1.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	6 Laporan	485,918,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		6 Laporan	-	SEKRETARIAT DPRD
4	2	1	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	% Pemenuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	542,962,000				100 %	-	SEKRETARIAT DPRD
4	2	1	1.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	5 Unit	542,962,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5 Unit	-	SEKRETARIAT DPRD

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	2	1	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Tahun	12,574,474,728				1 Tahun	-	SEKRETARIAT DPRD
4	2	1	1.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	24 Laporan	2,538,975,120	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		24 Laporan	-	SEKRETARIAT DPRD
4	2	1	1.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	96 Laporan	10,035,499,608	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		96 Laporan	-	SEKRETARIAT DPRD
4	2	1	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	% Pemenuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	6,447,513,000				100 %	-	SEKRETARIAT DPRD
4	2	1	1.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	10 Unit	1,123,832,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		10 Unit	-	SEKRETARIAT DPRD
4	2	1	1.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	25 Unit	902,826,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		25 Unit	-	SEKRETARIAT DPRD
4	2	1	1.09	8	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	3 Unit	100,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3 Unit	-	SEKRETARIAT DPRD
4	2	1	1.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	10 Unit	2,791,750,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		10 Unit	-	SEKRETARIAT DPRD
4	2	1	1.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	10 Unit	1,529,105,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		10 Unit	-	SEKRETARIAT DPRD
4	2	1	1.15		Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Pemenuhan Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	12 Bulan	73,793,787,800				12 Bulan	-	SEKRETARIAT DPRD
4	2	1	1.15	1	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	85 Orang/ Bulan	70,050,894,410	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		85 Orang/ Bulan	-	SEKRETARIAT DPRD
4	2	1	1.15	2	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	7 Paket	2,702,372,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7 Paket	-	SEKRETARIAT DPRD
4	2	1	1.15	3	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	85 Orang	1,040,521,390	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		85 Orang	-	SEKRETARIAT DPRD
4	2	1	1.16		Layanan Administrasi DPRD	% Pemenuhan Layanan Administrasi DPRD	100 %	8,548,625,800				100 %	-	SEKRETARIAT DPRD
4	2	1	1.16	2	Fasilitasi Fraksi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD	9 Laporan	359,305,800	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		9 Laporan	-	SEKRETARIAT DPRD
4	2	1	1.16	3	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	5 Laporan	166,970,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5 Laporan	-	SEKRETARIAT DPRD
4	2	1	1.16	4	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan	5 Paket	8,022,350,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5 Paket	-	SEKRETARIAT DPRD
4	2	2			PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	% Ranperda yang difasilitasi Pembahasannya, % Cakupan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah, % Cakupan DPRD yang Kompeten di Bidangnya, % Fasilitasi Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat serta Fasilitasi Tugas DPRD	100 %	184,958,218,696				100 %	-	SEKRETARIAT DPRD
4	2	2	1.01		Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD	% Fasilitasi Pembahasan Ranperda	100 %	26,436,557,500				100 %	-	SEKRETARIAT DPRD
4	2	2	1.01	1	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	12 Dokumen	385,330,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		12 Dokumen	-	SEKRETARIAT DPRD
4	2	2	1.01	2	Pembahasan Rancangan Perda	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Perda	12 Dokumen	23,231,788,300	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		12 Dokumen	-	SEKRETARIAT DPRD
4	2	2	1.01	3	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan	12 Dokumen	1,176,961,300	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		12 Dokumen	-	SEKRETARIAT DPRD
4	2	2	1.01	4	Fasilitasi Penyusunan Naskah Akademik	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi	6 Dokumen	869,068,400	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		6 Dokumen	-	SEKRETARIAT DPRD
4	2	2	1.01	5	Penyusunan Tata Tertib DPRD	Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun	1 Dokumen	773,409,500	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Dokumen	-	SEKRETARIAT DPRD

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	2	2	1.02		Pembahasan Kebijakan Anggaran	% Pemenuhan Fasilitasi Pembahasan Ranperda APBD	100 %	12,615,548,400				100 %	-	SEKRETARIAT DPRD
4	2	2	1.02	1	Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	1 Dokumen	814,764,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Dokumen	-	SEKRETARIAT DPRD
4	2	2	1.02	2	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	1 Dokumen	812,372,500	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Dokumen	-	SEKRETARIAT DPRD
4	2	2	1.02	3	Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	1 Dokumen	2,856,646,600	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Dokumen	-	SEKRETARIAT DPRD
4	2	2	1.02	4	Pembahasan Perubahan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan APBD	1 Dokumen	2,903,940,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Dokumen	-	SEKRETARIAT DPRD
4	2	2	1.02	5	Pembahasan Laporan Semester	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester	2 Dokumen	2,687,999,400	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2 Dokumen	-	SEKRETARIAT DPRD
4	2	2	1.02	6	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	1 Dokumen	2,539,825,900	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Dokumen	-	SEKRETARIAT DPRD
4	2	2	1.03		Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	% Pemenuhan Fasilitasi Kegiatan DPRD	100 %	22,816,592,700				100 %	-	SEKRETARIAT DPRD
4	2	2	1.03	1	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	2 Laporan	1,284,167,900	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2 Laporan	-	SEKRETARIAT DPRD
4	2	2	1.03	2	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	2 Laporan	1,490,869,200	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2 Laporan	-	SEKRETARIAT DPRD
4	2	2	1.03	3	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	2 Laporan	1,495,943,500	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2 Laporan	-	SEKRETARIAT DPRD
4	2	2	1.03	4	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	2 Laporan	1,449,824,100	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2 Laporan	-	SEKRETARIAT DPRD
4	2	2	1.03	5	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	2 Laporan	1,320,165,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2 Laporan	-	SEKRETARIAT DPRD
4	2	2	1.03	6	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	1 Dokumen	1,779,272,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Dokumen	-	SEKRETARIAT DPRD
4	2	2	1.03	7	Pengawasan Penggunaan Anggaran	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran	340 Dokumen	11,735,976,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		340 Dokumen	-	SEKRETARIAT DPRD
4	2	2	1.03	8	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	1 Dokumen	2,260,375,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Dokumen	-	SEKRETARIAT DPRD
4	2	2	1.04		Peningkatan Kapasitas DPRD	% Anggota DPRD yang Kompeten di Bidangnya	100 %	65,263,681,896				100 %	-	SEKRETARIAT DPRD
4	2	2	1.04	1	Orientasi DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Orientasi DPRD	85 Dokumen	-	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		85 Dokumen	-	SEKRETARIAT DPRD
4	2	2	1.04	2	Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	6 Dokumen	3,648,178,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		6 Dokumen	-	SEKRETARIAT DPRD
4	2	2	1.04	3	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Jumlah Dokumen Penyebarluasan Produk Hukum Daerah, Publikasi dan Dokumentasi Dewan	510 Dokumen	29,824,161,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		510 Dokumen	-	SEKRETARIAT DPRD
4	2	2	1.04	4	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	15 Orang	569,857,680	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		15 Orang	-	SEKRETARIAT DPRD
4	2	2	1.04	5	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	18 Orang	683,829,216	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		18 Orang	-	SEKRETARIAT DPRD
4	2	2	1.04	6	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	510 Dokumen	28,709,292,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		510 Dokumen	-	SEKRETARIAT DPRD
4	2	2	1.04	7	Penyusunan Program Kerja DPRD	Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD	1 Dokumen	1,828,364,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Dokumen	-	SEKRETARIAT DPRD
4	2	2	1.05		Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Cakupan Fasilitasi Kegiatan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	100 %	43,900,407,700				100 %	-	SEKRETARIAT DPRD
4	2	2	1.05	2	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun	9 Dokumen	957,185,200	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		9 Dokumen	-	SEKRETARIAT DPRD
4	2	2	1.05	3	Pelaksanaan Reses	Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	3 Dokumen	42,943,222,500	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3 Dokumen	-	SEKRETARIAT DPRD
4	2	2	1.06		Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	Cakupan Fasilitasi Penyusunan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	100 %	651,836,500				100 %	-	SEKRETARIAT DPRD

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	2	2	1.06	2	Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD	1 Laporan	651,836,500	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Laporan	-	SEKRETARIAT DPRD
4	2	2	1.07		Pembahasan Kerja Sama Daerah	% Cakupan Fasilitasi Pembahasan Kerjasama Daerah	100 %	773,061,000				100 %	-	SEKRETARIAT DPRD
4	2	2	1.07	1	Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah	Jumlah Dokumen Rekomendasi Hasil Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah	5 Dokumen	773,061,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5 Dokumen	-	SEKRETARIAT DPRD
4	2	2	1.08		Fasilitasi Tugas DPRD	% Cakupan Fasilitasi Tugas-tugas DPRD, Badan Musyawarah dan Pimpinan DPRD	100 %	12,500,533,000				100 %	-	SEKRETARIAT DPRD
4	2	2	1.08	1	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	10 Dokumen	6,530,767,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		10 Dokumen	-	SEKRETARIAT DPRD
4	2	2	1.08	2	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun	1 Laporan	147,867,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Laporan	-	SEKRETARIAT DPRD
4	2	2	1.08	3	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	9 Dokumen	2,480,607,500	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		9 Dokumen	-	SEKRETARIAT DPRD
4	2	2	1.08	4	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	17 Dokumen	2,611,319,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		17 Dokumen	-	SEKRETARIAT DPRD
4	2	2	1.08	5	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus	4 Dokumen	729,972,500	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4 Dokumen	-	SEKRETARIAT DPRD
5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN			2,584,448,804,816					3,107,767,458,644	
5	1				PERENCANAAN			53,898,303,632					56,862,627,700	
5	1				BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH			53,898,303,632					56,862,627,700	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	%Realisasi Kegiatan Perangkat Daerah, %ASN Perangkat Daerah Berkinerja Kategori minimal Baik, %Penurunan Temuan Berdasarkan LHP	100 %	36,702,774,860				100 %	38,819,799,725	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5	1	1	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Rekomendasi hasil evaluasi pembangunan daerah	100 %	630,576,528				100 %	662,105,350	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5	1	1	1.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	67,000,376	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2 Dokumen	70,350,400	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5	1	1	1.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	24,073,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Dokumen	25,276,650	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5	1	1	1.01	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	24,073,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Dokumen	25,276,650	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5	1	1	1.01	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	44,400,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Dokumen	46,620,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	1	1	1.01	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	40,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Dokumen	42,000,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5	1	1	1.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8 Laporan	431,030,152	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		8 Laporan	452,581,650	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5	1	1	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	% Penyusunan dokumen Laporan Keuangan Tepat Waktu	100 %	29,111,762,660				100 %	30,745,452,400	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5	1	1	1.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	194 Orang/ Bulan	28,692,872,532		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		194 Orang/ Bulan	30,305,617,800	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5	1	1	1.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	2400 Dokumen	319,290,528	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2400 Dokumen	335,255,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5	1	1	1.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	99,599,600	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		12 Laporan	104,579,600	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5	1	1	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	% Pengadministrasian Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang sesuai peraturan perundang-undangan	100 %	119,358,200				100 %	125,326,100	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5	1	1	1.03	1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen	21,159,900	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2 Dokumen	22,217,900	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5	1	1	1.03	6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	3 Laporan	98,198,300	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3 Laporan	103,108,200	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5	1	1	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rata-rata nilai perilaku pegawai Perangkat daerah berdasarkan penialian Kinerja ASN	100 %	657,036,300				100 %	689,888,100	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5	1	1	1.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	194 Paket	307,015,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		194 Paket	322,365,750	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5	1	1	1.05	3	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	215 Dokumen	127,282,200	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		215 Dokumen	133,646,300	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	1	1	1.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	100 Orang	64,025,300	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100 Orang	67,226,550	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5	1	1	1.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	215 Orang	158,713,800	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		215 Orang	166,649,500	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5	1	1	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	% Pemenuhan Administrasi Umum Kantor	100 %	1,782,484,200				100 %	1,871,608,400	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5	1	1	1.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	120,605,900	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		12 Paket	126,636,200	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5	1	1	1.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	206,114,900	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		12 Paket	216,420,650	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5	1	1	1.06	7	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	89,795,100	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Paket	94,284,850	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5	1	1	1.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	194,609,500	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Laporan	204,339,950	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5	1	1	1.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	80 Laporan	1,171,358,800	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		80 Laporan	1,229,926,750	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5	1	1	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	% Pemenuhan Kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	589,567,600				100 %	722,830,500	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5	1	1	1.07	8	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	1 Unit	5,197,600	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Unit	109,242,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5	1	1	1.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	10 Unit	584,370,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		10 Unit	613,588,500	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5	1	1	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	% Pemenuhan Kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	1,100,608,312				100 %	1,155,638,750	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	1	1	1.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	117,604,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		12 Laporan	123,484,200	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5	1	1	1.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	983,004,312	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Laporan	1,032,154,550	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5	1	1	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	% Pemenuhan Kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	2,711,381,060				100 %	2,846,950,125	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5	1	1	1.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	41 Unit	726,481,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		41 Unit	762,805,050	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5	1	1	1.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	13 Unit	334,163,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		13 Unit	350,871,150	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5	1	1	1.09	8	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	1 Unit	105,347,500	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Unit	110,614,875	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5	1	1	1.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	752,059,560	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2 Unit	789,662,550	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5	1	1	1.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	10 Unit	793,330,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		10 Unit	832,996,500	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5	1	2			PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN, DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase peningkatan capaian kinerja program	0.5 %	12,997,160,980				0.5 %	13,687,013,525	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
						Persentase Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD dan APBD	100 %					100 %		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5	1	2	1.01		Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Persentase Kesesuaian perencanaan dan pendanaan dengan dokumen pelaksanaan pembangunan	100 %	3,248,321,000				100 %	3,406,169,550	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5	1	2	1.01	2	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	1 Dokumen	479,530,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Dokumen	498,939,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	1	2	1.01	6	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	2 Dokumen	2,768,791,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2 Dokumen	2,907,230,550	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5	1	2	1.02		Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	% Ketersediaan dokumen data dan Informasi yang telah dianalisis untuk perencanaan pembangunan	100 %	254,417,000				100 %	267,137,850	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5	1	2	1.02	1	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Masukan Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	1046 Masukan	254,417,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1046 Masukan	267,137,850	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5	1	2	1.03		Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Rekomendasi hasil evaluasi pembangunan daerah	24 Kab/Kota	9,494,422,980				24 Kab/Kota	10,013,706,125	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
						% Kesesuaian hasil evaluasi pembangunan dengan dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	100 %					100 %		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5	1	2	1.03	1	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	2 Laporan	8,299,840,280	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2 Laporan	8,714,832,300	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5	1	2	1.03	3	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	4 Laporan	864,759,200	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4 Laporan	952,559,150	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5	1	2	1.03	4	Fasilitasi/Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Kabupaten/Kota yang Difasilitasi/Evaluasi	48 Dokumen	329,823,500	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		48 Dokumen	346,314,675	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5	1	3			PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Kesesuaian program Perangkat Daerah dengan Sasaran Pembangunan Daerah lingkup bidang PPM	100 %	4,198,367,792				100 %	4,355,814,450	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
						Persentase Kesesuaian program Perangkat Daerah dengan Sasaran Pembangunan Daerah lingkup bidang Ekonomi dan SDA	95 %					95 %		
						Persentase Kesesuaian program Perangkat Daerah dengan Sasaran Pembangunan Daerah lingkup bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	95 %					95 %		
5	1	3	1.01		Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Jumlah Data dan Informasi perencanaan dan hasil monitoring dan evaluasi bidang pemerintahan dan Pembangunan Manusia	8 Data dan Informasi	1,464,251,704				8 Data dan Informasi	1,537,464,400	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						Jumlah Rekomendasi hasil pelaksanaan koordinasi perencanaan Bidang Pemerintahan, Jumlah Rekomendasi hasil pelaksanaan koordinasi perencanaan Bidang Pembangunan Manusia	12 Rekomendasi					12 Rekomendasi		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5	1	3	1.01	1	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen	136,571,152	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Dokumen	143,399,700	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5	1	3	1.01	3	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pemerintahan	5 Perangkat Daerah	181,940,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5 Perangkat Daerah	191,037,100	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5	1	3	1.01	4	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	1 Laporan	271,700,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Laporan	285,285,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5	1	3	1.01	5	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen	287,968,952	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Dokumen	302,367,400	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5	1	3	1.01	7	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pembangunan Manusia	17 Perangkat Daerah	231,851,888	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		17 Perangkat Daerah	243,444,500	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5	1	3	1.01	8	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	1 Laporan	354,219,712	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Laporan	371,930,700	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5	1	3	1.02		Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Jumlah Rekomendasi hasil pelaksanaan koordinasi perencanaan Bidang Perekonomian, Jumlah Rekomendasi hasil pelaksanaan koordinasi perencanaan Bidang SDA	10 Data dan Informasi	1,148,807,480				10 Data dan Informasi	1,206,247,875	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5	1	3	1.02	1	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen	150,008,476	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Dokumen	157,508,900	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5	1	3	1.02	3	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Perekonomian	7 Perangkat Daerah	155,925,476	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7 Perangkat Daerah	163,721,750	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5	1	3	1.02	4	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	7 Laporan	255,372,976	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7 Laporan	268,141,625	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5	1	3	1.02	5	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen	150,570,800	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Dokumen	158,099,350	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	1	3	1.02	7	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang SDA	7 Perangkat Daerah	158,270,376	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7 Perangkat Daerah	166,183,900	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5	1	3	1.02	8	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	7 Laporan	278,659,376	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7 Laporan	292,592,350	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5	1	3	1.03		Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Jumlah Data dan Informasi perencanaan dan hasil monitoring dan evaluasi bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	25 Data dan Informasi	1,585,308,608				25 Data dan Informasi	1,612,102,175	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
						Jumlah Rekomendasi hasil pelaksanaan koordinasi perencanaan Bidang Infrastruktur, Jumlah Rekomendasi hasil pelaksanaan koordinasi perencanaan Bidang kewilayahan	12 Rekomendasi					12 Rekomendasi		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5	1	3	1.03	1	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen	198,412,752	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Dokumen	208,333,400	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5	1	3	1.03	3	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Infrastruktur	4 Perangkat Daerah	151,690,876	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4 Perangkat Daerah	159,275,400	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5	1	3	1.03	4	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	4 Laporan	662,421,952	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4 Laporan	643,071,200	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5	1	3	1.03	5	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen	170,386,376	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Dokumen	178,905,700	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5	1	3	1.03	7	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Kewilayahan	3 Perangkat Daerah	139,047,976	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3 Perangkat Daerah	146,000,375	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5	1	3	1.03	8	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	3 Laporan	263,348,676	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3 Laporan	276,516,100	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5	2				KEUANGAN			2,454,490,971,193					2,981,709,408,167	
5	2				BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH			2,273,258,679,464					2,765,872,323,460	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	2	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase ASN Perangkat Daerah Berkinerja Kategori Baik dan Sangat Baik	100 %	58,201,567,143				100 %	107,249,516,008	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
						Persentase Penurunan Temuan Berdasarkan LHP (%)	25 %					25 %		BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
						Persentase Realisasi Kegiatan Perangkat Daerah	100 %					100 %		BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	2	1	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tepat Waktu	100 %	1,600,000,000				100 %	2,060,000,000	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	2	1	1.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	16 Dokumen	400,000,000	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		16 Dokumen	700,000,000	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	2	1	1.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4 Dokumen	367,920,000	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4 Dokumen	250,000,000	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	2	1	1.01	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	4 Dokumen	132,080,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4 Dokumen	350,000,000	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	2	1	1.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	58 Laporan	700,000,000	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		58 Laporan	760,000,000	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	2	1	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	% Penyusuan dokumen Laporan Keuangan Tepat Waktu	100 %	47,228,642,177				100 %	94,909,516,008	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	2	1	1.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	137 Orang/ Bulan	46,163,641,977	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		137 Orang/ Bulan	93,024,516,008	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	2	1	1.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	3077 Dokumen	129,999,300	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3077 Dokumen	330,000,000	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	2	1	1.02	4	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	17 Dokumen	234,995,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		17 Dokumen	250,000,000	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	2	1	1.02	6	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	11 Dokumen	199,998,600	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		11 Dokumen	345,000,000	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	2	1	1.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	25 Laporan	500,007,300	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		25 Laporan	960,000,000	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	2	1	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Penyusunan Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah Tepat Waktu	100 %	220,000,000				100 %	350,000,000	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	2	1	1.03	6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	13 Laporan	220,000,000	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		13 Laporan	350,000,000	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	2	1	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rata-Rata Nilai Perilaku Pegawai Perangkat Daerah Berdasarkan Penilaian Kinerja ASN	100 %	3,435,592,712				100 %	2,380,000,000	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	2	1	1.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	435 Paket	499,990,000	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		435 Paket	650,000,000	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	2	1	1.05	3	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	16 Dokumen	2,451,902,712	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		16 Dokumen	590,000,000	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	2	1	1.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	50 Orang	130,000,000	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		50 Orang	140,000,000	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	2	1	1.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	28 Orang	353,700,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		28 Orang	1,000,000,000	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	2	1	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Kantor	100 %	1,299,783,000				100 %	3,300,000,000	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	2	1	1.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	520 Paket	99,995,000	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		520 Paket	300,000,000	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	2	1	1.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1160 Paket	300,000,000	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1160 Paket	1,050,000,000	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	2	1	1.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	400,000,000	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		12 Laporan	600,000,000	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	2	1	1.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	499,788,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		12 Laporan	1,350,000,000	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	2	1	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	1,247,416,000				100 %	1,350,000,000	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	2	1	1.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	122 Unit	1,247,416,000	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		122 Unit	1,350,000,000	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	2	1	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	120,133,920				100 %	250,000,000	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	2	1	1.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	120,133,920	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		12 Laporan	250,000,000	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	2	1	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Dalam Kondisi Baik	100 %	2,649,999,334				100 %	2,650,000,000	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	2	1	1.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	44 Unit	1,149,999,334		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		44 Unit	1,250,000,000	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	2	1	1.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1,200,000,000	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Unit	900,000,000	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	2	1	1.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	323 Unit	300,000,000	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		323 Unit	500,000,000	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	2	2			PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase Persetujuan Bersama Ranperda APBD Pokok dan APBD Perubahan Yang Tepat Waktu	100 %	2,210,107,112,321				100 %	2,654,421,807,452	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
						Tingkat Kepatuhan Kabupaten/Kota Dalam Menyampaiakan Ranperda & Ranperkada APBD Untuk Dievaluasi Tepat Waktu	100 %					100 %		
						Tingkat Kepatuhan Kabupaten/Kota Dalam Menyampaikan Ranperda & Ranperkada Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Untuk Dievaluasi Tepat Waktu	100 %					100 %		
						Persentase Serapan Belanja Daerah	96%					96%		
						Persentase Penyampaian Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Yang Tepat Waktu	100 %					100 %		
5	2	2	1.01		Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Capaian Pelaksanaan Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	100 %	4,260,105,400				100 %	4,901,000,000	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	2	2	1.01	1	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	2 Dokumen	132,967,600	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2 Dokumen	145,000,000	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	2	2	1.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	2 Dokumen	17,988,000	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2 Dokumen	20,000,000	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	2	2	1.01	3	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	53 Dokumen	268,655,000	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		53 Dokumen	350,000,000	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	2	2	1.01	4	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi	53 Dokumen	268,655,000	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		53 Dokumen	350,000,000	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	2	2	1.01	5	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Jumlah DPA-SKPD yang Diverifikasi	53 Dokumen	20,000,000	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		53 Dokumen	22,000,000	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	2	2	1.01	6	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi	53 Dokumen	20,000,000	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		53 Dokumen	22,000,000	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	2	2	1.01	7	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	4 Dokumen	2,437,029,000	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4 Dokumen	2,450,000,000	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	2	2	1.01	8	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	3 Dokumen	445,242,000	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3 Dokumen	600,000,000	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	2	2	1.01	9	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	0 Dokumen	649,568,800	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		0 Dokumen	900,000,000	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
						Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	5 Dokumen					5 Dokumen		BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	2	2	1.01	11	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	4 Dokumen	-	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			4 Dokumen	42,000,000	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	2	2	1.02		Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota	Capaian Pelaksanaan Pembinaan Terhadap Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Daerah Kabupaten/Kota	100 %	2,250,865,500				100 %	3,060,000,000	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	2	2	1.02	2	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Kabupaten/Kota	24 Laporan	347,029,000	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		24 Laporan	500,000,000	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	2	2	1.02	3	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota	24 Laporan	312,235,000	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		24 Laporan	350,000,000	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	2	2	1.02	4	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	74 Laporan	499,986,100	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		74 Laporan	550,000,000	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	2	2	1.02	5	Asistensi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen yang Mendapatkan Layanan Asistensi	0 Dokumen	-	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		0 Dokumen	160,000,000	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
						Jumlah Dokumen yang Mendapatkan Layanan Asistensi	4 Dokumen					4 Dokumen		BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	2	2	1.02	6	Sosialisasi Regulasi Bidang Keuangan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Regulasi Bidang Keuangan	2 Laporan	611,623,000	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2 Laporan	950,000,000	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	2	2	1.02	10	Konsultasi dan Koordinasi Pembinaan Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Konsultasi dan Koordinasi Pembinaan Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	24 Dokumen	299,994,800	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		24 Dokumen	350,000,000	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	2	2	1.02	12	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasian Provinsi dan Kabupaten/Kota dan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasian Provinsi dan Kabupaten/Kota dan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah	361 Dokumen	179,997,600	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		361 Dokumen	200,000,000	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	2	2	1.03		Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Capaian Pelaksanaan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	100 %	3,750,000,000				100 %	4,790,000,000	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	2	2	1.03	1	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	10 Dokumen	1,900,000,000	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		10 Dokumen	2,210,000,000	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	2	2	1.03	3	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	721 Dokumen	250,000,000	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		721 Dokumen	300,000,000	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	2	2	1.03	5	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	8 Dokumen	450,000,000	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		8 Dokumen	650,000,000	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	2	2	1.03	6	Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	13 Dokumen	370,000,000	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		13 Dokumen	400,000,000	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	2	2	1.03	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	28 Laporan	150,000,000	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		28 Laporan	450,000,000	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	2	2	1.03	9	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	4 Dokumen	130,000,000	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4 Dokumen	180,000,000	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	2	2	1.03	11	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	75 Orang	500,000,000	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		75 Orang	600,000,000	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	2	2	1.04		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Capaian Pelaksanaan Koordinasi, Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	100 %	2,949,964,000				100 %	3,850,000,000	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	2	2	1.04	2	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	131 Dokumen	299,989,700	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		131 Dokumen	450,000,000	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	2	2	1.04	4	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	1166 Laporan	649,986,800	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1166 Laporan	850,000,000	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	2	2	1.04	5	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi	9 Dokumen	1,199,998,100	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		9 Dokumen	1,500,000,000	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	2	2	1.04	6	Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Dokumen Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	25 Dokumen	299,999,600	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		25 Dokumen	350,000,000	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	2	2	1.04	11	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi	288 Orang	499,989,800	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		288 Orang	700,000,000	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	2	2	1.05		Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Capaian Pelaksanaan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	100 %	2,196,896,177,421				100 %	2,637,820,807,452	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	2	2	1.05	4	Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	4 Laporan	2,049,717,475	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4 Laporan	4,466,445,356	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	2	2	1.05	8	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	4 Laporan	608,913,717,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4 Laporan	902,000,961,011	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	2	2	1.05	9	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	4 Laporan	60,000,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4 Laporan	150,000,000,000	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	2	2	1.05	10	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi	4 Laporan	1,525,932,742,946	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4 Laporan	1,581,353,401,085	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	2	3			PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase Tanah Pememerintah Provinsi yang Telah bersertifikat	58 %	5,350,000,000				58 %	4,201,000,000	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
						Persentase Tindak Lanjut Rencana Aksi Manajemen Aset Daerah	92 %					92 %		BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	2	3	1.01		Pengelolaan Barang Milik Daerah	Capaian Pelaksanaan Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah	100 %	5,350,000,000				100 %	4,201,000,000	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	2	3	1.01	1	Penyusunan Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang Disusun	6 Dokumen	450,000,000	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		6 Dokumen	300,000,000	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	2	3	1.01	2	Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	2 Dokumen	20,000,000	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2 Dokumen	21,000,000	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	2	3	1.01	3	Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	5 Dokumen	120,000,000	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5 Dokumen	150,000,000	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	2	3	1.01	5	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	191 Laporan	250,000,000	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		191 Laporan	350,000,000	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	2	3	1.01	6	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	55 Laporan	1,040,000,000	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		55 Laporan	1,100,000,000	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	2	3	1.01	7	Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	5 Laporan	2,380,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5 Laporan	1,430,000,000	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	2	3	1.01	8	Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	1 Laporan	120,000,000	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Laporan	150,000,000	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	2	3	1.01	9	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	3 Laporan	300,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3 Laporan	400,000,000	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	2	3	1.01	10	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	59 Dokumen	670,000,000	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		59 Dokumen	300,000,000	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	2				BADAN PENDAPATAN DAERAH			181,232,291,729					215,837,084,707	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase ASN Perangkat Daerah Berkinerja Kategori Baik dan Sangat Baik	100 %	160,406,857,298				100 %	185,689,601,110	BADAN PENDAPATAN DAERAH
						Persentase Penurunan Temuan Berdasarkan LHP (%)	100 %					100 %		
						Persentase Realisasi Kegiatan Perangkat Daerah	100 %					100 %		
5	2	1	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			932,178,300					1,476,757,461	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1	1.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	225,999,500		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2 Dokumen	334,454,362	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1	1.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	214,609,300	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Dokumen	278,066,547	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1	1.01	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	137,134,400	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Dokumen	163,842,773	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1	1.01	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	144,015,400	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Dokumen	297,246,241	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1	1.01	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	114,719,800	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Dokumen	279,725,622	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1	1.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6 Laporan	53,599,900	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		6 Laporan	76,453,322	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1	1.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	42,100,000	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4 Laporan	46,968,594	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			132,472,015,606					158,666,296,986	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1	1.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	484 Orang/ Bulan	131,586,912,806		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		484 Orang/ Bulan	156,938,038,247	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1	1.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	36,840,000	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		12 Dokumen	105,668,771	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1	1.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	400,646,700	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		12 Dokumen	601,910,591	BADAN PENDAPATAN DAERAH

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	2	1	1.02	4	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 Dokumen	91,386,000	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		12 Dokumen	210,433,112	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1	1.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	31,668,000	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Laporan	58,729,044	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1	1.02	6	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	178,333,800	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Dokumen	542,329,275	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1	1.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	142,962,400	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		12 Laporan	199,650,000	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1	1.02	8	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	0 Dokumen	3,265,900	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		0 Dokumen	9,537,946	BADAN PENDAPATAN DAERAH
						Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen					1 Dokumen		BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			347,258,000					620,994,618	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1	1.03	1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen	12,719,400	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2 Dokumen	16,936,176	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1	1.03	2	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	152,999,800	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Dokumen	246,900,500	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1	1.03	3	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	1 Laporan	6,000,000	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Laporan	7,852,900	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1	1.03	4	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	25 Laporan	5,052,000	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		25 Laporan	6,756,156	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1	1.03	5	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	159,986,800	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4 Laporan	227,442,643	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1	1.03	6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	6,000,000	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4 Laporan	109,116,743	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1	1.03	7	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	4,500,000	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Dokumen	5,989,500	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1	1.04		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah			785,364,200					1,435,647,244	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1	1.04	2	Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah	1 Dokumen	302,442,900	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Dokumen	797,948,225	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1	1.04	3	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	1 Laporan	117,826,700	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Laporan	93,452,438	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1	1.04	5	Pengolahan Data Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah	12 Laporan	365,094,600	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		12 Laporan	544,246,581	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			1,197,545,300					3,631,591,062	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1	1.05	1	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	11 Unit	241,956,200	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		11 Unit	733,478,259	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1	1.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	510 Paket	102,410,000	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		510 Paket	554,161,850	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1	1.05	3	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	207,728,200	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Dokumen	886,752,875	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1	1.05	4	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	48,000,000	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Dokumen	353,957,600	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1	1.05	5	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	250,978,000	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Dokumen	512,967,400	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1	1.05	6	Pemulangan Pegawai yang Pensiun	Jumlah Pegawai Pensiun yang Dipulangkan	30 Orang	11,340,000	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		30 Orang	15,093,540	BADAN PENDAPATAN DAERAH

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	2	1	1.05	8	Pemindahan Tugas ASN	Jumlah ASN yang Dipindahtugaskan	50 Orang	6,237,900	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		50 Orang	8,302,645	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1	1.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	506 Orang	120,547,000	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		506 Orang	197,230,242	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1	1.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	150 Orang	6,400,000	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		150 Orang	75,584,828	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1	1.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	30 Orang	201,948,000	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		30 Orang	294,061,823	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah			4,365,430,850					5,663,500,262	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1	1.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	484 Paket	107,712,000	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		484 Paket	108,200,983	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1	1.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	400 Paket	55,000,000	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		400 Paket	61,226,000	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1	1.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	60 Paket	336,424,000	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		60 Paket	874,825,039	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1	1.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	30 Paket	2,682,500,000	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		30 Paket	3,240,252,950	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1	1.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	376,101,550	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		12 Laporan	413,191,647	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1	1.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	575,503,000	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		12 Laporan	542,555,530	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1	1.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	2 Dokumen	3,648,000	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2 Dokumen	50,565,371	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1	1.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	4 Dokumen	228,542,300	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4 Dokumen	372,682,742	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			3,856,522,186					2,566,452,691	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1	1.07	5	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	20 Paket	221,220,000	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		20 Paket	453,673,480	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1	1.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	30 Unit	2,287,802,186	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		30 Unit	1,307,923,511	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1	1.07	8	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	1 Unit	50,000,000	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Unit	266,200,000	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1	1.07	9	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	1,297,500,000	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2 Unit	264,869,000	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1	1.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	600 Unit	-	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		600 Unit	256,217,500	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1	1.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	300 Unit	-	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		300 Unit	17,569,200	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			10,121,181,224					7,740,239,012	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1	1.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Laporan	211,990,000	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4 Laporan	501,474,758	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1	1.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	6,718,524,376	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		12 Laporan	6,695,499,932	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1	1.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Laporan	96,000,000	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4 Laporan	208,947,816	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1	1.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan	3,094,666,848	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4 Laporan	334,316,506	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			6,329,361,632					3,888,121,774	BADAN PENDAPATAN DAERAH

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	2	1	1.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	155 Unit	1,114,030,000	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		155 Unit	1,129,989,395	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1	1.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	155 Unit	654,840,000	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		155 Unit	624,734,000	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1	1.09	5	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	50 Unit	55,500,000	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		50 Unit	61,435,000	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1	1.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	120 Unit	422,370,000	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		120 Unit	660,000,000	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1	1.09	8	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	5 Unit	495,085,720	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5 Unit	586,685,000	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1	1.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	26 Unit	3,587,535,912	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		26 Unit	825,278,379	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	2			PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase keterpenuhan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan kinerja tepat waktu dibidang pendapatan PAD	100 %	969,376,000				100 %	2,498,495,679	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	2	1.01		Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah			575,258,800					1,597,904,593	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	2	1.01	1	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	1 Dokumen	81,244,900	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Dokumen	198,024,849	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	2	1.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	1 Dokumen	78,664,200	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Dokumen	113,590,868	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	2	1.01	3	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	0 Dokumen	22,135,700	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		0 Dokumen	536,452,123	BADAN PENDAPATAN DAERAH
						Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	1 Dokumen					1 Dokumen		BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	2	1.01	4	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi	1 Dokumen	24,788,900	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Dokumen	33,933,180	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	2	1.01	5	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Jumlah DPA-SKPD yang Diverifikasi	0 Dokumen	27,429,900	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		0 Dokumen	39,812,872	BADAN PENDAPATAN DAERAH
						Jumlah DPA-SKPD yang Diverifikasi	1 Dokumen					1 Dokumen		BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	2	1.01	6	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi	1 Dokumen	24,720,700	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Dokumen	36,477,719	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	2	1.01	7	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	0 Dokumen	66,073,500	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		0 Dokumen	39,276,005	BADAN PENDAPATAN DAERAH
						Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	1 Dokumen					1 Dokumen		BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	2	1.01	8	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	0 Dokumen	38,395,100	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		0 Dokumen	220,000,000	BADAN PENDAPATAN DAERAH
						Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	1 Dokumen					1 Dokumen		BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	2	1.01	10	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	1 Dokumen	211,805,900	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Dokumen	380,336,977	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	2	1.04		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah			394,117,200					900,591,086	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	2	1.04	4	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	12 Laporan	338,386,100	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		12 Laporan	663,211,894	BADAN PENDAPATAN DAERAH

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	2	2	1.04	5	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi	2 Dokumen	55,731,100	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2 Dokumen	237,379,192	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	4			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentasi Peningkatan PAD	5 %	19,856,058,431				5 %	27,648,987,918	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	4	1.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah			19,856,058,431					27,648,987,918	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	4	1.01	1	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	4 Dokumen	757,418,200	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4 Dokumen	659,026,547	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	4	1.01	2	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah	6 dokumen	170,355,900	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		6 dokumen	638,969,177	BADAN PENDAPATAN DAERAH
						Jumlah Laporan Pengembangan Pajak daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	5 Laporan					5 Laporan		BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	4	1.01	4	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	30 Sarana dan Prasarana	444,586,900	Kab. Pangkajene Kepulauan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		30 Sarana dan Prasarana	680,341,738	BADAN PENDAPATAN DAERAH
					Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	30 Sarana dan Prasarana	472,346,150	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		30 Sarana dan Prasarana	642,232,843	BADAN PENDAPATAN DAERAH
					Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	30 Sarana dan Prasarana	495,734,100	Kab. Kepulauan Selayar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		30 Sarana dan Prasarana	593,468,468	BADAN PENDAPATAN DAERAH
					Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	40 Sarana dan Prasarana	458,772,000	Kab. Gowa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		40 Sarana dan Prasarana	866,933,858	BADAN PENDAPATAN DAERAH
					Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	40 Sarana dan Prasarana	387,642,900	Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		40 Sarana dan Prasarana	605,477,388	BADAN PENDAPATAN DAERAH
					Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	35 Sarana dan Prasarana	567,372,000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		35 Sarana dan Prasarana	755,298,268	BADAN PENDAPATAN DAERAH
					Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	30 Sarana dan Prasarana	635,163,350		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		30 Sarana dan Prasarana	750,110,338	BADAN PENDAPATAN DAERAH
					Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	30 Sarana dan Prasarana	489,999,250	Kab. Luwu Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		30 Sarana dan Prasarana	772,876,928	BADAN PENDAPATAN DAERAH
					Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	30 Sarana dan Prasarana	373,905,500	Kab. Enrekang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		30 Sarana dan Prasarana	508,084,838	BADAN PENDAPATAN DAERAH
					Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	30 Sarana dan Prasarana	553,627,400	Kota Palopo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		30 Sarana dan Prasarana	955,427,868	BADAN PENDAPATAN DAERAH
					Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	30 Sarana dan Prasarana	375,118,000	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		30 Sarana dan Prasarana	652,004,363	BADAN PENDAPATAN DAERAH
					Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	30 Sarana dan Prasarana	369,475,340	Kota Pare Pare, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		30 Sarana dan Prasarana	828,374,898	BADAN PENDAPATAN DAERAH
					Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	35 Sarana dan Prasarana	396,731,000	Kab. Bulukumba, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		35 Sarana dan Prasarana	866,595,168	BADAN PENDAPATAN DAERAH
					Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	35 Sarana dan Prasarana	362,381,640	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		35 Sarana dan Prasarana	866,337,218	BADAN PENDAPATAN DAERAH
					Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	30 Sarana dan Prasarana	376,093,400	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		30 Sarana dan Prasarana	609,664,098	BADAN PENDAPATAN DAERAH
					Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	30 Sarana dan Prasarana	423,610,800	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		30 Sarana dan Prasarana	645,541,258	BADAN PENDAPATAN DAERAH
					Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	30 Sarana dan Prasarana	539,195,800	Kab. Tana Toraja, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		30 Sarana dan Prasarana	676,018,848	BADAN PENDAPATAN DAERAH
					Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	30 Sarana dan Prasarana	454,866,100	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		30 Sarana dan Prasarana	664,858,083	BADAN PENDAPATAN DAERAH
					Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	30 Sarana dan Prasarana	549,110,150	Kab. Sinjai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		30 Sarana dan Prasarana	765,559,673	BADAN PENDAPATAN DAERAH
					Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	50 Sarana dan Prasarana	1,213,742,201	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		50 Sarana dan Prasarana	1,342,747,547	BADAN PENDAPATAN DAERAH
					Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	30 Sarana dan Prasarana	488,611,300	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		30 Sarana dan Prasarana	600,104,548	BADAN PENDAPATAN DAERAH

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	30 Sarana dan Prasarana	424,153,300	Kab. Jeneponto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		30 Sarana dan Prasarana	940,279,768	BADAN PENDAPATAN DAERAH
					Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	40 Sarana dan Prasarana	369,168,900	Kab. Bone, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		40 Sarana dan Prasarana	797,106,408	BADAN PENDAPATAN DAERAH
					Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	30 Sarana dan Prasarana	434,429,000	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		30 Sarana dan Prasarana	748,520,068	BADAN PENDAPATAN DAERAH
					Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	50 Sarana dan Prasarana	503,640,250	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		50 Sarana dan Prasarana	1,134,817,298	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	4	1.01	5	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	4 Laporan	15,199,600	Kab. Pangkajene Kepulauan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4 Laporan	14,311,312	BADAN PENDAPATAN DAERAH
					Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	4 Laporan	61,499,900	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4 Laporan	50,941,532	BADAN PENDAPATAN DAERAH
					Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	4 Laporan	13,000,000	Kab. Kepulauan Selayar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4 Laporan	3,256,532	BADAN PENDAPATAN DAERAH
					Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	4 Laporan	59,100,000	Kab. Gowa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4 Laporan	51,601,532	BADAN PENDAPATAN DAERAH
					Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	4 Laporan	45,880,000	Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4 Laporan	37,059,532	BADAN PENDAPATAN DAERAH
					Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	4 Laporan	65,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4 Laporan	34,781,762	BADAN PENDAPATAN DAERAH
					Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	0 Laporan	63,600,000	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		0 Laporan	56,551,532	BADAN PENDAPATAN DAERAH
					Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	4 Laporan	50,520,000	Kab. Luwu Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4 Laporan	42,070,802	BADAN PENDAPATAN DAERAH
					Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	4 Laporan	55,300,000	Kab. Enrekang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4 Laporan	29,458,532	BADAN PENDAPATAN DAERAH
					Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	4 Laporan	37,499,500	Kota Palopo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4 Laporan	18,931,532	BADAN PENDAPATAN DAERAH
					Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	4 Laporan	37,499,900	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4 Laporan	6,761,132	BADAN PENDAPATAN DAERAH
					Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	4 Laporan	31,800,000	Kota Pare Pare, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4 Laporan	21,571,532	BADAN PENDAPATAN DAERAH
					Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	4 Laporan	56,099,900	Kab. Bulukumba, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4 Laporan	43,627,595	BADAN PENDAPATAN DAERAH
					Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	4 Laporan	75,100,000	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4 Laporan	44,022,532	BADAN PENDAPATAN DAERAH
					Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	4 Laporan	62,000,000	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4 Laporan	42,251,532	BADAN PENDAPATAN DAERAH
					Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	4 Laporan	34,499,900	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4 Laporan	24,541,532	BADAN PENDAPATAN DAERAH
					Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	4 Laporan	45,530,000	Kab. Tana Toraja, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4 Laporan	36,674,532	BADAN PENDAPATAN DAERAH

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	4 Laporan	28,499,800	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4 Laporan	2,652,082	BADAN PENDAPATAN DAERAH
					Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	4 Laporan	50,350,000	Kab. Sinjai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4 Laporan	41,976,532	BADAN PENDAPATAN DAERAH
					Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	4 Laporan	36,550,000	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4 Laporan	26,796,532	BADAN PENDAPATAN DAERAH
					Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	4 Laporan	12,000,000	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4 Laporan	16,708,468	BADAN PENDAPATAN DAERAH
					Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	0 Laporan	47,249,800	Kab. Jeneponto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		0 Laporan	29,271,532	BADAN PENDAPATAN DAERAH
					Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	4 Laporan	63,660,000	Kab. Bone, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4 Laporan	56,617,532	BADAN PENDAPATAN DAERAH
					Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	4 Laporan	34,450,000	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4 Laporan	31,086,532	BADAN PENDAPATAN DAERAH
					Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	4 Laporan	58,002,800	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4 Laporan	50,391,532	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	4	1.01	3	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	1 Laporan	90,833,900	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Laporan	759,277,368	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	4	1.01	6	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	4 Laporan	867,120,400	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4 Laporan	948,040,485	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	4	1.01	7	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	4 Dokumen Ketetapan	17,339,900	Kab. Pangkajene Kepulauan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4 Dokumen Ketetapan	20,132,748	BADAN PENDAPATAN DAERAH
					Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	4 Dokumen Ketetapan	39,000,000	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4 Dokumen Ketetapan	51,062,108	BADAN PENDAPATAN DAERAH
					Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	4 Dokumen Ketetapan	300,000	Kab. Kepulauan Selayar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4 Dokumen Ketetapan	12,553,748	BADAN PENDAPATAN DAERAH
					Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	4 Dokumen Ketetapan	38,896,700	Kab. Gowa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4 Dokumen Ketetapan	46,100,118	BADAN PENDAPATAN DAERAH
					Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	4 Dokumen Ketetapan	38,949,500	Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4 Dokumen Ketetapan	53,580,888	BADAN PENDAPATAN DAERAH
					Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	4 Dokumen Ketetapan	35,500,000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4 Dokumen Ketetapan	50,102,798	BADAN PENDAPATAN DAERAH
					Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	4 Dokumen Ketetapan	7,950,000	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4 Dokumen Ketetapan	20,803,748	BADAN PENDAPATAN DAERAH
					Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	4 Dokumen Ketetapan	52,919,500	Kab. Luwu Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4 Dokumen Ketetapan	50,297,608	BADAN PENDAPATAN DAERAH
					Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	4 Dokumen Ketetapan	40,000,000	Kab. Enrekang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4 Dokumen Ketetapan	21,326,248	BADAN PENDAPATAN DAERAH
					Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	4 Dokumen Ketetapan	22,000,000	Kota Palopo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4 Dokumen Ketetapan	27,018,748	BADAN PENDAPATAN DAERAH
					Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	4 Dokumen Ketetapan	27,110,000	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4 Dokumen Ketetapan	35,923,028	BADAN PENDAPATAN DAERAH
					Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	4 Dokumen Ketetapan	33,000,000	Kota Pare Pare, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4 Dokumen Ketetapan	19,208,748	BADAN PENDAPATAN DAERAH
					Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	4 Dokumen Ketetapan	76,050,000	Kab. Bulukumba, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4 Dokumen Ketetapan	45,926,868	BADAN PENDAPATAN DAERAH
					Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	4 Dokumen Ketetapan	35,102,700	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4 Dokumen Ketetapan	48,559,718	BADAN PENDAPATAN DAERAH
					Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	4 Dokumen Ketetapan	13,250,000	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4 Dokumen Ketetapan	20,803,748	BADAN PENDAPATAN DAERAH

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	4 Dokumen Ketetapan	37,999,800	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4 Dokumen Ketetapan	46,202,748	BADAN PENDAPATAN DAERAH
					Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	4 Dokumen Ketetapan	22,400,000	Kab. Tana Toraja, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4 Dokumen Ketetapan	36,698,748	BADAN PENDAPATAN DAERAH
					Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	4 Dokumen Ketetapan	48,750,000	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4 Dokumen Ketetapan	18,400,248	BADAN PENDAPATAN DAERAH
					Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	4 Dokumen Ketetapan	27,500,000	Kab. Sinjai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4 Dokumen Ketetapan	34,673,868	BADAN PENDAPATAN DAERAH
					Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	4 Dokumen Ketetapan	74,172,000	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4 Dokumen Ketetapan	45,608,748	BADAN PENDAPATAN DAERAH
					Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	4 Dokumen Ketetapan	34,503,600	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4 Dokumen Ketetapan	46,153,358	BADAN PENDAPATAN DAERAH
					Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	4 Dokumen Ketetapan	33,930,000	Kab. Jeneponto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4 Dokumen Ketetapan	39,536,748	BADAN PENDAPATAN DAERAH
					Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	4 Dokumen Ketetapan	38,794,800	Kab. Bone, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4 Dokumen Ketetapan	54,733,028	BADAN PENDAPATAN DAERAH
					Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	4 Dokumen Ketetapan	35,724,000	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4 Dokumen Ketetapan	47,744,178	BADAN PENDAPATAN DAERAH
					Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	4 Dokumen Ketetapan	59,002,800	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4 Dokumen Ketetapan	49,458,748	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	4	1.01	8	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti.	12 Laporan	361,960,400	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		12 Laporan	654,158,166	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	4	1.01	9	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	4 Dokumen	359,576,300	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4 Dokumen	197,419,643	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	4	1.01	10	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.	4 Dokumen SSPD	74,300,000	Kab. Pangkajene Kepulauan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4 Dokumen SSPD	15,419,111	BADAN PENDAPATAN DAERAH
					Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.	4 Dokumen SSPD	109,000,000	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4 Dokumen SSPD	16,500,000	BADAN PENDAPATAN DAERAH
					Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.	4 Dokumen SSPD	41,450,000	Kab. Kepulauan Selayar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4 Dokumen SSPD	11,000,000	BADAN PENDAPATAN DAERAH
					Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.	4 Dokumen SSPD	129,500,000	Kab. Gowa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4 Dokumen SSPD	88,000,000	BADAN PENDAPATAN DAERAH
					Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.	4 Dokumen SSPD	60,900,000	Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4 Dokumen SSPD	27,500,000	BADAN PENDAPATAN DAERAH
					Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.	4 Dokumen SSPD	100,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4 Dokumen SSPD	8,370,424	BADAN PENDAPATAN DAERAH
					Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.	4 Dokumen SSPD	66,000,000	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4 Dokumen SSPD	27,500,000	BADAN PENDAPATAN DAERAH
					Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.	4 Dokumen SSPD	121,242,000	Kab. Luwu Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4 Dokumen SSPD	16,500,000	BADAN PENDAPATAN DAERAH
					Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.	4 Dokumen SSPD	63,000,000	Kab. Enrekang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4 Dokumen SSPD	16,500,000	BADAN PENDAPATAN DAERAH
					Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.	4 Dokumen SSPD	107,500,000	Kota Palopo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4 Dokumen SSPD	16,500,000	BADAN PENDAPATAN DAERAH
					Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.	4 Dokumen SSPD	122,500,000	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4 Dokumen SSPD	27,500,000	BADAN PENDAPATAN DAERAH
					Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.	4 Dokumen SSPD	63,000,000	Kota Pare Pare, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4 Dokumen SSPD	16,500,000	BADAN PENDAPATAN DAERAH
					Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.	4 Dokumen SSPD	70,950,000	Kab. Bulukumba, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4 Dokumen SSPD	16,500,000	BADAN PENDAPATAN DAERAH
					Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.	4 Dokumen SSPD	93,599,900	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4 Dokumen SSPD	16,500,000	BADAN PENDAPATAN DAERAH
					Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.	4 Dokumen SSPD	103,000,000	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4 Dokumen SSPD	11,000,000	BADAN PENDAPATAN DAERAH
					Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.	4 Dokumen SSPD	66,600,000	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4 Dokumen SSPD	16,500,000	BADAN PENDAPATAN DAERAH
					Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.	4 Dokumen SSPD	79,778,700	Kab. Tana Toraja, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4 Dokumen SSPD	16,500,000	BADAN PENDAPATAN DAERAH

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.	4 Dokumen SSPD	79,050,000	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4 Dokumen SSPD	27,500,000	BADAN PENDAPATAN DAERAH
					Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.	4 Dokumen SSPD	99,900,000	Kab. Sinjai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4 Dokumen SSPD	27,500,000	BADAN PENDAPATAN DAERAH
					Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.	4 Dokumen SSPD	371,250,000	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4 Dokumen SSPD	165,000,000	BADAN PENDAPATAN DAERAH
					Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.	4 Dokumen SSPD	76,200,000	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4 Dokumen SSPD	22,000,000	BADAN PENDAPATAN DAERAH
					Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.	4 Dokumen SSPD	63,570,000	Kab. Jeneponto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4 Dokumen SSPD	22,000,000	BADAN PENDAPATAN DAERAH
					Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.	4 Dokumen SSPD	65,050,000	Kab. Bone, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4 Dokumen SSPD	33,000,000	BADAN PENDAPATAN DAERAH
					Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.	4 Dokumen SSPD	51,600,000	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4 Dokumen SSPD	11,000,000	BADAN PENDAPATAN DAERAH
					Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.	4 Dokumen SSPD	222,003,000	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4 Dokumen SSPD	110,000,000	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	4	1.01	11	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Keberatan yang Telah Ditindaklanjuti	1 dokumen	138,117,900	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 dokumen	496,520,366	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	4	1.01	12	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil pemeriksaan	1 dokumen	319,557,900	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 dokumen	950,587,571	BADAN PENDAPATAN DAERAH
						Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	4 Laporan					4 Laporan		BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	4	1.01	13	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	4 Laporan	100,660,800	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4 Laporan	536,890,262	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	3				KEPEGAWAIAN			25,324,666,418					-	
5	3				BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH			25,324,666,418					-	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
5	3	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase ASN Perangkat Daerah berkinerja kategori baik dan sangat baik	96 %	21,182,334,714				96 %	-	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
						Persentase penurunan temuan berdasarkan LHP	0 %					0 %		BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
						Persentase realisasi kegiatan Perangkat Daerah	100 %					100 %		BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
5	3	1	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah tepat waktu	100 %	191,583,100				100 %	-	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
5	3	1	1.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	17,393,900	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2 Dokumen	-	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
5	3	1	1.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	11,127,800	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Dokumen	-	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
5	3	1	1.01	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	10,512,300	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Dokumen	-	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
5	3	1	1.01	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	13,132,100	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Dokumen	-	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
5	3	1	1.01	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	17,740,300	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Dokumen	-	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
5	3	1	1.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 Laporan	8,080,000	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		12 Laporan	-	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
5	3	1	1.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 Laporan	113,596,700	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		12 Laporan	-	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
5	3	1	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen laporan keuangan Perangkat Daerah tepat waktu	100 %	18,883,802,930				100 %	-	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
5	3	1	1.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	140 Orang/ Bulan	18,730,319,054	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		140 Orang/ Bulan	-	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
										Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
										Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
5	3	1	1.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	40,899,676	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		12 Dokumen	-	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
5	3	1	1.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	24,900,500	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		12 Dokumen	-	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
5	3	1	1.02	4	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	4 Dokumen	4,481,000	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4 Dokumen	-	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
5	3	1	1.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	8,710,500	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Laporan	-	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
5	3	1	1.02	6	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	8,247,600	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Dokumen	-	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
5	3	1	1.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	66,244,600	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		12 Laporan	-	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
5	3	1	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase pengelolaan administrasi barang milik daerah pada Perangkat Daerah	100 %	49,490,676				100 %	-	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
5	3	1	1.03	1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen	5,182,600	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2 Dokumen	-	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
5	3	1	1.03	3	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	1 Laporan	2,400,000	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Laporan	-	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
5	3	1	1.03	4	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	3,500,000	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Laporan	-	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
5	3	1	1.03	5	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	8,624,800	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2 Laporan	-	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
5	3	1	1.03	6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	29,783,276	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2 Laporan	-	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
5	3	1	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rata-rata nilai perilaku pegawai Perangkat Daerah berdasarkan penilaian kinerja ASN	92 %	218,047,976				92 %	-	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
5	3	1	1.05	3	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	48,921,776	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Dokumen	-	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
5	3	1	1.05	4	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	5,146,700	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Dokumen	-	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
										PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
5	3	1	1.05	5	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	17,199,900	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Dokumen	-	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
5	3	1	1.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	600 Orang	97,479,600	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		600 Orang	-	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
5	3	1	1.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	450 Orang	49,300,000	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		450 Orang	-	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
5	3	1	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi umum kantor	100 %	895,344,328				100 %	-	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
5	3	1	1.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	115 Paket	46,964,500	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		115 Paket	-	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
5	3	1	1.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	55 Paket	15,814,400	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		55 Paket	-	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
5	3	1	1.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	30 Paket	150,000,000	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		30 Paket	-	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	3	1	1.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	249,993,600	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Laporan	-	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
5	3	1	1.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	220 Laporan	333,763,976	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		220 Laporan	-	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
5	3	1	1.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	140 Dokumen	34,684,676	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		140 Dokumen	-	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
5	3	1	1.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	12 Dokumen	64,123,176	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		12 Dokumen	-	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
5	3	1	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah	100 %	421,954,000				100 %	-	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
5	3	1	1.07	5	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	30 Paket	16,000,000	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		30 Paket	-	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
5	3	1	1.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	60 Unit	405,954,000	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		60 Unit	-	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
5	3	1	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	97,551,704				100 %	-	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
5	3	1	1.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	11000 Laporan	97,551,704	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		11000 Laporan	-	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
5	3	1	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam kondisi baik	100 %	424,560,000				100 %	-	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
5	3	1	1.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	40 Unit	357,260,000	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		40 Unit	-	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
5	3	1	1.09	5	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	50 Unit	8,700,000	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		50 Unit	-	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
5	3	1	1.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	60 Unit	58,600,000	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		60 Unit	-	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
5	3	2			PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase pemenuhan kebutuhan pegawai ASN;	65 %	4,142,331,704				65 %	-	
						Persentase ASN yang menduduki jabatan struktural dan fungsional berbasis talenta;	100 %					100 %		
						Persentase ASN berkinerja baik dan sangat baik	95 %					95 %		
5	3	2	1.01		Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Persentase pengangkatan ASN sesuai dengan rencana kebutuhan yang transparan	100 %	903,267,684				100 %	-	
5	3	2	1.01	1	Perumusan Bahan Kebijakan Pengadaan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Perumusan Bahan Kebijakan Pengadaan ASN	1 Dokumen	48,668,700	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Dokumen	-	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
5	3	2	1.01	2	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	2 Dokumen	67,927,852	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2 Dokumen	-	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
5	3	2	1.01	3	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	3 Dokumen	181,697,900	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3 Dokumen	-	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
5	3	2	1.01	4	Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pengadaan ASN	1 Laporan	30,580,000	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Laporan	-	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
5	3	2	1.01	5	Perumusan Bahan Kebijakan Pemberhentian ASN	Jumlah Dokumen Hasil Perumusan Bahan Kebijakan Pemberhentian ASN	1 Dokumen	24,721,000	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Dokumen	-	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
5	3	2	1.01	6	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	1 Dokumen	75,892,476	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Dokumen	-	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
5	3	2	1.01	7	Evaluasi Pemberhentian ASN	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pemberhentian ASN	1 Laporan	28,910,000	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Laporan	-	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
5	3	2	1.01	8	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi	1 Lembaga	270,619,728	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Lembaga	-	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
5	3	2	1.01	9	Perumusan Bahan Kebijakan Pengelolaan Data dan Informasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Perumusan Bahan Kebijakan Pengelolaan Data dan Informasi ASN	1 Dokumen	36,100,900	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Dokumen	-	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	3	2	1.01	10	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	38,763,876	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Dokumen	-	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
5	3	2	1.01	11	Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	1 Dokumen	65,151,252	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Dokumen	-	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
5	3	2	1.01	12	Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Laporan	34,234,000	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Laporan	-	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
5	3	2	1.02		Mutasi dan Promosi ASN	Persentase Mutasi dan Promosi ASn yang Obyektif dan tepat waktu	100 %	1,421,855,232				100 %	-	
5	3	2	1.02	1	Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN Antar Daerah	4 Dokumen	322,473,452	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4 Dokumen	-	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
5	3	2	1.02	2	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	2 Laporan	595,726,928	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2 Laporan	-	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
5	3	2	1.02	3	Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	1 Dokumen	503,654,852	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Dokumen	-	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
5	3	2	1.03		Pengembangan Kompetensi ASN	Persentase pengembagan kompetensi ASN	100 %	1,126,299,332				100 %	-	
5	3	2	1.03	1	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Jumlah ASN yang Meningkat Kapasitasnya	100 Orang	140,000,200	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100 Orang	-	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
5	3	2	1.03	2	Pengelolaan Assessment Center	Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center	1 Dokumen	526,999,804	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Dokumen	-	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
5	3	2	1.03	3	Pengeloaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	1 Dokumen	47,623,476	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Dokumen	-	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
5	3	2	1.03	4	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pendidikan Lanjutan ASN yang Dikelola	1 Dokumen	51,468,100	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Dokumen	-	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
5	3	2	1.03	5	Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat	1 Dokumen	26,266,900	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Dokumen	-	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
5	3	2	1.03	6	Fasilitasi Sertifikasi Jabatan ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Layanan Sertifikasi Jabatan ASN	200 Orang	19,611,900	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		200 Orang	-	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
5	3	2	1.03	7	Evaluasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan ASN	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pemberhentian ASN	1 Laporan	16,561,000	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Laporan	-	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
5	3	2	1.03	8	Penyusunan Administrasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan Fungsional	Jumlah ASN yang Mendapatkan Layanan Diklat dan Sertifikasi Jabatan Fungsional	550 Orang	117,678,576	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		550 Orang	-	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
5	3	2	1.03	9	Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat Jabatan Fungsional	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat Jabatan Fungsional	1 Dokumen	20,000,000	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Dokumen	-	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
5	3	2	1.03	10	Fasilitasi Sertifikasi Fungsional ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Layanan Fasilitasi Sertifikasi Fungsional ASN	100 Orang	14,000,000	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100 Orang	-	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
5	3	2	1.03	11	Evaluasi Diklat dan Sertfikasi Pejabat Fungsional	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Diklat dan Sertfikasi Pejabat Fungsional	1 Laporan	-	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Laporan	-	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
5	3	2	1.03	12	Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN	1 Laporan	18,659,400	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Laporan	-	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
5	3	2	1.03	13	Pembinaan Jabatan Fungsional ASN	Jumlah Fungsional ASN yang Dibina	120 Orang	89,149,476	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		120 Orang	-	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
5	3	2	1.03	14	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	4 Dokumen	38,280,500	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4 Dokumen	-	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
5	3	2	1.03	15	Evaluasi Pengembangan Jabatan Fungsional	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Pengembangan Jabatan Fungsional	1 Laporan	-	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Laporan	-	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
5	3	2	1.04		Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Persentase evaluasi kinerja pegawai berbasis TI	100 %	690,909,456				100 %	-	
5	3	2	1.04	1	Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	1 Dokumen	120,553,500	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Dokumen	-	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
5	3	2	1.04	2	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	1 Dokumen	160,637,952	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Dokumen	-	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
5	3	2	1.04	3	Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	1 Laporan	36,499,600	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Laporan	-	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	3	2	1.04	4	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	30 Orang	90,086,652	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		30 Orang	-	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
5	3	2	1.04	5	Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Tanda Jasa	300 Orang	54,144,100	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		300 Orang	-	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
5	3	2	1.04	6	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Penghargaan dan Tanda Jasa Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Penghargaan dan Tanda Jasa Aparatur	1 Dokumen	32,327,800	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Dokumen	-	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
5	3	2	1.04	7	Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	50 Orang	114,660,252	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		50 Orang	-	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
5	3	2	1.04	8	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	23 Laporan	48,000,000	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		23 Laporan	-	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
5	3	2	1.04	9	Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	Jumlah Dokumen Proses Izin Perceraian Pegawai yang Dilayani	27 Dokumen	17,999,700	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		27 Dokumen	-	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
5	3	2	1.04	10	Evaluasi Disiplin ASN	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Disiplin ASN	1 Laporan	15,999,900	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Laporan	-	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
5	4				PENDIDIKAN DAN PELATIHAN			26,227,679,424					44,023,858,435	
5	4				BADAN PENGEMBANGAN DAN SUMBER DAYA MANUSIA			26,227,679,424					44,023,858,435	BADAN PENGEMBANGAN DAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	4	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase ASN Perangkat daerah berkinerja Kategori Baik dan Sangat Baik Persentase Penurunan Temuan berdasarkan LHP Persentase Realisasi Kegiatan Perangkat Daerah	100 %	25,077,679,424				100 %	37,060,715,435	BADAN PENGEMBANGAN DAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	4	1	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	184,316,000				100 %	1,083,262,401	BADAN PENGEMBANGAN DAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	4	1	1.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	140,190,000	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4 Dokumen	724,537,001	BADAN PENGEMBANGAN DAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	4	1	1.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	8,976,000	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Dokumen	55,159,500	BADAN PENGEMBANGAN DAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	4	1	1.01	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	8,600,000	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Dokumen	24,385,900	BADAN PENGEMBANGAN DAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	4	1	1.01	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	9,000,000	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Dokumen	95,700,000	BADAN PENGEMBANGAN DAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	4	1	1.01	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	9,000,000	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Dokumen	22,347,600	BADAN PENGEMBANGAN DAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	4	1	1.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10 Laporan	8,550,000	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		10 Laporan	161,132,400	BADAN PENGEMBANGAN DAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	4	1	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	21,908,737,302				100 %	26,266,704,065	BADAN PENGEMBANGAN DAN SUMBER DAYA MANUSIA

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	4	1	1.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	134 Orang/ Bulan	21,758,737,302	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		134 Orang/ Bulan	25,512,384,429	BADAN PENGEMBANGAN DAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	4	1	1.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	113,400,000	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		12 Dokumen	550,508,996	BADAN PENGEMBANGAN DAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	4	1	1.02	4	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 Dokumen	7,350,000	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		12 Dokumen	38,360,410	BADAN PENGEMBANGAN DAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	4	1	1.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	7,500,000	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2 Laporan	61,270,000	BADAN PENGEMBANGAN DAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	4	1	1.02	6	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	2 Dokumen	7,350,000	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2 Dokumen	38,500,000	BADAN PENGEMBANGAN DAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	4	1	1.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	3 Laporan	7,200,000	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3 Laporan	44,902,330	BADAN PENGEMBANGAN DAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	4	1	1.02	8	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	4 Dokumen	7,200,000	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4 Dokumen	20,777,900	BADAN PENGEMBANGAN DAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	4	1	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Kegiatan Perangkat Daerah, Persentase ASN Perangkat Daerah Berkinerja Baik, Persentase Penurunan Temuan berdasarkan LHP	100 %	138,000,000				100 %	796,779,500	BADAN PENGEMBANGAN DAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	4	1	1.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	185 Paket	-	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		185 Paket	174,735,000	BADAN PENGEMBANGAN DAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	4	1	1.05	3	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	138,000,000	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Dokumen	622,044,500	BADAN PENGEMBANGAN DAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	4	1	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	240,000,000				100 %	3,363,537,804	BADAN PENGEMBANGAN DAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	4	1	1.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Paket	-	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5 Paket	66,000,000	BADAN PENGEMBANGAN DAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	4	1	1.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	80 Paket	-	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		80 Paket	2,750,000,000	BADAN PENGEMBANGAN DAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	4	1	1.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	30 Paket	-	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		30 Paket	59,788,300	BADAN PENGEMBANGAN DAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	4	1	1.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	100,000,000	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Laporan	212,415,104	BADAN PENGEMBANGAN DAN SUMBER DAYA MANUSIA

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	4	1	1.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	140,000,000	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Laporan	275,334,400	BADAN PENGEMBANGAN DAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	4	1	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	-				100 %	638,000,000	BADAN PENGEMBANGAN DAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	4	1	1.07	5	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	-	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Paket	88,000,000	BADAN PENGEMBANGAN DAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	4	1	1.07	9	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	-	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Unit	550,000,000	BADAN PENGEMBANGAN DAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	4	1	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	2,388,462,372				100 %	2,584,153,185	BADAN PENGEMBANGAN DAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	4	1	1.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	936,792,468	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Laporan	1,739,791,900	BADAN PENGEMBANGAN DAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	4	1	1.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1,451,669,904	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Laporan	844,361,285	BADAN PENGEMBANGAN DAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	4	1	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	218,163,750				100 %	2,328,278,480	BADAN PENGEMBANGAN DAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	4	1	1.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	13 Unit	119,163,750	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		13 Unit	495,836,000	BADAN PENGEMBANGAN DAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	4	1	1.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	13 Unit	24,000,000	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		13 Unit	198,429,000	BADAN PENGEMBANGAN DAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	4	1	1.09	8	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	3 Unit	-	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3 Unit	114,950,000	BADAN PENGEMBANGAN DAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	4	1	1.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	13 Unit	-	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		13 Unit	983,708,000	BADAN PENGEMBANGAN DAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	4	1	1.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	40 Unit	75,000,000	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		40 Unit	535,355,480	BADAN PENGEMBANGAN DAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	4	2			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Cakupan SDM Aparatur yang Lulus Diklat Kompetensi Managerial, Kompetensi Diklat Fungsional, Kompetensi Diklat Sosial Kultural	100 %	1,150,000,000				100 %	6,963,143,000	BADAN PENGEMBANGAN DAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	4	2	1.01		Pengembangan Kompetensi Teknis	Persentase Pengembangan Kompetensi Teknis	100 %	150,000,000				100 %	1,983,845,600	BADAN PENGEMBANGAN DAN SUMBER DAYA MANUSIA

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	4	2	1.01	3	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	244 Orang	50,000,000	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		244 Orang	1,081,595,900	BADAN PENGEMBANGAN DAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	4	2	1.01	4	Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknisumum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi	3 Dokumen	100,000,000	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3 Dokumen	902,249,700	BADAN PENGEMBANGAN DAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	4	2	1.02		Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Persentase Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	100 %	1,000,000,000				100 %	4,979,297,400	BADAN PENGEMBANGAN DAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	4	2	1.02	1	Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerjasama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, serta Jabatan Fungsional	Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, dan Pengembangan Kompetensi,	1 Dokumen	-	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Dokumen	614,779,000	BADAN PENGEMBANGAN DAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	4	2	1.02	4	Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar	Jumlah Laporan Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar	1 Laporan	-	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Laporan	1,697,604,700	BADAN PENGEMBANGAN DAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	4	2	1.02	5	Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga	1 Dokumen	-	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Dokumen	222,997,500	BADAN PENGEMBANGAN DAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	4	2	1.02	7	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	310 Orang	1,000,000,000	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		310 Orang	1,668,328,200	BADAN PENGEMBANGAN DAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	4	2	1.02	8	Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama, serta Pengembangan Kompetensi	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama, serta Pengembangan	3 Dokumen	-	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3 Dokumen	775,588,000	BADAN PENGEMBANGAN DAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	5				PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN			5,243,721,220					5,315,188,100	
					BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH			5,243,721,220					5,315,188,100	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5	5	2			PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase Perangkat Daerah yang mendapatkan penghargaan inovasi daerah	3 %	5,243,721,220				3 %	5,315,188,100	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5	5	2	1.01		Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	4 Rekomendasi	1,150,711,104				4 Rekomendasi	1,176,032,650	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	5	2	1.01	1	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	1 Laporan	94,981,100	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Laporan	99,730,150	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5	5	2	1.01	2	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	2 Laporan	355,821,152	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2 Laporan	341,398,200	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5	5	2	1.01	14	Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan	1 Laporan	699,908,852	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Laporan	734,904,300	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5	5	2	1.02		Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	4 Rekomendasi	1,120,935,552				4 Rekomendasi	1,270,771,100	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5	5	2	1.02	1	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	1 Dokumen	587,981,800	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Dokumen	617,380,900	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5	5	2	1.02	2	Penelitian dan Pengembangan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1 Dokumen	240,765,700	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Dokumen	287,111,800	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5	5	2	1.02	6	Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	1 Dokumen	292,188,052	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Dokumen	366,278,400	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5	5	2	1.03		Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	5 Rekomendasi	1,369,357,780				5 Rekomendasi	1,421,949,700	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5	5	2	1.03	4	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	2 Dokumen	589,581,180	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2 Dokumen	600,307,250	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5	5	2	1.03	5	Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan	1 Dokumen	273,439,800	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Dokumen	287,111,800	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5	5	2	1.03	7	Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	1 Dokumen	506,336,800	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Dokumen	534,530,650	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5	5	2	1.04		Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Jumlah Perangkat Daerah yang Mengembangkan Inovasi dan Teknologi	11 OPD	1,602,716,784				11 OPD	1,446,434,650	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	5	2	1.04	1	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	1 Dokumen	1,109,040,102	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Dokumen	928,140,500	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5	5	2	1.04	2	Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	1 Laporan	139,084,954	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Laporan	145,972,850	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5	5	2	1.04	3	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	3 Laporan	196,912,676	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3 Laporan	206,758,300	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5	5	2	1.04	4	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	1 Laporan	74,049,200	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Laporan	77,751,650	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5	5	2	1.04	5	Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	1 Laporan	83,629,852	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Laporan	87,811,350	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5	7				PENGELOLAAN PENGHUBUNG			19,263,462,929					19,856,376,242	
5	7				BADAN PENGHUBUNG			19,263,462,929					19,856,376,242	BADAN PENGHUBUNG
5	7	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase ASN Perangkat daerah berkinerja Kategori Baik dan Sangat Baik Persentase Penurunan Temuan berdasarkan LHP Persentase Realisasi Kegiatan Perangkat Daerah	100 %	14,055,102,000				100 %	15,005,234,618	BADAN PENGHUBUNG
5	7	1	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			1,352,110,600					1,370,225,200	BADAN PENGHUBUNG
5	7	1	1.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	57,609,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Dokumen	63,212,100	BADAN PENGHUBUNG
5	7	1	1.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	199,173,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Dokumen	153,300,000	BADAN PENGHUBUNG
5	7	1	1.01	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	146,987,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Dokumen	153,300,000	BADAN PENGHUBUNG
5	7	1	1.01	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	173,080,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Dokumen	173,392,800	BADAN PENGHUBUNG
5	7	1	1.01	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	174,647,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Dokumen	165,136,000	BADAN PENGHUBUNG
5	7	1	1.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	255,502,600	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Laporan	282,117,150	BADAN PENGHUBUNG
5	7	1	1.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	345,112,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Laporan	379,767,150	BADAN PENGHUBUNG
5	7	1	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			7,240,042,869					7,240,042,592	BADAN PENGHUBUNG
5	7	1	1.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	51 Orang/ Bulan	7,240,042,869	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		51 Orang/ Bulan	7,240,042,592	BADAN PENGHUBUNG
5	7	1	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah			644,809,200					1,092,801,991	BADAN PENGHUBUNG
5	7	1	1.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	5 Paket	72,280,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5 Paket	314,767,691	BADAN PENGHUBUNG

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	7	1	1.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	7 Paket	55,702,300	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7 Paket	81,090,500	BADAN PENGHUBUNG
5	7	1	1.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	100 Orang	283,696,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100 Orang	329,443,800	BADAN PENGHUBUNG
5	7	1	1.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	48 Rapat	233,130,900	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		48 Rapat	367,500,000	BADAN PENGHUBUNG
5	7	1	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			2,508,606,197					2,621,798,335	BADAN PENGHUBUNG
5	7	1	1.07	5	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	0 Paket	768,640,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		0 Paket	807,072,000	BADAN PENGHUBUNG
5	7	1	1.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 Unit	1,739,966,197	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		0 Unit	1,814,726,335	BADAN PENGHUBUNG
5	7	1	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			1,093,758,634					1,145,445,000	BADAN PENGHUBUNG
5	7	1	1.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	151,500,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Laporan	159,075,000	BADAN PENGHUBUNG
5	7	1	1.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	942,258,634	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3 Laporan	986,370,000	BADAN PENGHUBUNG
5	7	1	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			1,215,774,500					1,534,921,500	BADAN PENGHUBUNG
5	7	1	1.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	0 Unit	694,030,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		0 Unit	799,081,500	BADAN PENGHUBUNG
5	7	1	1.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	0 Unit	521,744,500	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		0 Unit	735,840,000	BADAN PENGHUBUNG
5	7	2			PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG	Persentase Pelayanan tamu daerah	100 %	5,208,360,929				100 %	4,851,141,624	BADAN PENGHUBUNG
						Persentase Peningkatan Promosi dan Kerjasama Daerah	100 %					100 %		
5	7	2	1.01		Pelaksanaan Pelayanan Penghubung			5,208,360,929					4,851,141,624	BADAN PENGHUBUNG
5	7	2	1.01	1	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Aparatur dan Masyarakat	Jumlah Tenaga Pendukung	101 orang	5,208,360,929	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		101 orang	4,851,141,624	BADAN PENGHUBUNG
6					UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN			57,163,927,864					67,630,149,625	
6	1				INSPEKTORAT DAERAH			57,163,927,864					67,630,149,625	INSPEKTORAT
6	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	% ASN Perangkat Daerah Berkinerja Kategori Sangat Baik	98 %	38,341,617,864				98 %	44,721,725,010	INSPEKTORAT
						% Penurunan Temuan Berdasarkan LHP	0 %					0 %		INSPEKTORAT
						% Realisasi Kegiatan Perangkat Daerah	97 %					97 %		INSPEKTORAT
6	1	1	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	% Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tepat Waktu	100 %	609,400,152				100 %	844,370,364	INSPEKTORAT
6	1	1	1.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	149,900,352	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2 Dokumen	153,750,000	INSPEKTORAT
6	1	1	1.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	20,000,000	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Dokumen	20,500,000	INSPEKTORAT
6	1	1	1.01	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	17,500,000	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Dokumen	17,937,500	INSPEKTORAT
6	1	1	1.01	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	67,000,000	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Dokumen	153,750,000	INSPEKTORAT
6	1	1	1.01	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	65,000,000	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Dokumen	153,750,000	INSPEKTORAT

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	1	1	1.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	124,999,800	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Laporan	175,525,292	INSPEKTORAT
6	1	1	1.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	165,000,000	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Laporan	169,157,572	INSPEKTORAT
6	1	1	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	% Penyusunan Dokumen Laporan Keuangan Tepat Waktu	100 %	30,956,610,128				100 %	35,755,152,343	INSPEKTORAT
6	1	1	1.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	153 Orang/Bulan	30,629,935,544	Kota Makassar, Rappocini, Buakana	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		153 Orang/Bulan	35,286,006,754	INSPEKTORAT
6	1	1	1.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	169,227,056	Kota Makassar, Rappocini, Buakana	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		12 Dokumen	204,481,656	INSPEKTORAT
6	1	1	1.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	128,237,528	Kota Makassar, Rappocini, Buakana	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		12 Dokumen	234,723,683	INSPEKTORAT
6	1	1	1.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	9,500,000	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Laporan	9,737,500	INSPEKTORAT
6	1	1	1.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	13,210,000	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		12 Laporan	13,540,250	INSPEKTORAT
6	1	1	1.02	8	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	6,500,000	Kota Makassar, Rappocini, Buakana	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Dokumen	6,662,500	INSPEKTORAT
6	1	1	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	% Penyusunan Dokumen Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah Tepat Waktu	100 %	20,500,000				100 %	50,625,000	INSPEKTORAT
6	1	1	1.03	1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	10,400,000	Kota Makassar, Rappocini, Buakana	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Dokumen	25,000,000	INSPEKTORAT
6	1	1	1.03	6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	17 Dokumen	10,100,000	Kota Makassar, Rappocini, Buakana	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		17 Dokumen	25,625,000	INSPEKTORAT
6	1	1	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rata-Rata Nilai Capaian Kinerja Bulanan Pegawai	87 %	2,281,454,352				87 %	2,215,787,160	INSPEKTORAT
6	1	1	1.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	345 Paket	292,380,000	Kota Makassar, Rappocini, Buakana	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		345 Paket	444,652,918	INSPEKTORAT
6	1	1	1.05	3	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12 Dokumen	112,184,352	Kota Makassar, Rappocini, Buakana	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		12 Dokumen	161,232,977	INSPEKTORAT
6	1	1	1.05	5	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	175 Dokumen	290,000,000	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		175 Dokumen	407,048,871	INSPEKTORAT
6	1	1	1.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	59 Orang	1,586,890,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		59 Orang	1,202,852,394	INSPEKTORAT
6	1	1	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Kebutuhan Administrasi Perangkat Daerah	100 %	1,194,680,000				100 %	2,179,345,890	INSPEKTORAT
6	1	1	1.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	10,500,000	Kota Makassar, Rappocini, Buakana	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Paket	10,762,500	INSPEKTORAT
6	1	1	1.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	9,500,000	Kota Makassar, Rappocini, Buakana	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Paket	9,737,500	INSPEKTORAT
6	1	1	1.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	15 Paket	33,570,000	Kota Makassar, Rappocini, Buakana	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		15 Paket	51,250,000	INSPEKTORAT
6	1	1	1.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	201,970,000	Kota Makassar, Rappocini, Buakana	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		12 Paket	207,029,295	INSPEKTORAT
6	1	1	1.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	58,240,000	Kota Makassar, Rappocini, Buakana	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2 Paket	185,137,515	INSPEKTORAT
6	1	1	1.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	500,000	Kota Makassar, Rappocini, Buakana	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Dokumen	51,250,000	INSPEKTORAT
6	1	1	1.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	230,400,000	Kota Makassar, Rappocini, Buakana	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		12 Laporan	446,332,389	INSPEKTORAT

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	1	1	1.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	650,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		12 Laporan	1,217,846,691	INSPEKTORAT
6	1	1	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	% Pemenuhan Kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang urusan	100 %	1,177,700,000				100 %	1,272,937,239	INSPEKTORAT
6	1	1	1.07	5	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	100,000,000	Kota Makassar, Rappocini, Buakana	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Paket	168,226,986	INSPEKTORAT
6	1	1	1.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	100 Unit	1,077,700,000	Kota Makassar, Rappocini, Buakana	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100 Unit	1,104,710,253	INSPEKTORAT
6	1	1	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Tersediannya Jasa Penunjang Urusan Kantor	100 %	1,059,363,232				100 %	1,222,820,080	INSPEKTORAT
6	1	1	1.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	5,400,000	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Laporan	28,700,000	INSPEKTORAT
6	1	1	1.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	488,139,600	Kota Makassar, Rappocini, Buakana	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		12 Laporan	546,005,260	INSPEKTORAT
6	1	1	1.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	192 Laporan	565,823,632	Kota Makassar, Rappocini, Buakana	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		192 Laporan	648,114,820	INSPEKTORAT
6	1	1	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang dipelihara	100 %	1,041,910,000				100 %	1,180,686,934	INSPEKTORAT
6	1	1	1.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	9 Unit	106,230,000	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		9 Unit	97,375,000	INSPEKTORAT
6	1	1	1.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 Unit	357,750,000	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5 Unit	358,750,000	INSPEKTORAT
6	1	1	1.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	50 Unit	80,430,000	Kota Makassar, Rappocini, Buakana	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		50 Unit	86,277,891	INSPEKTORAT
6	1	1	1.09	8	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	1 Unit	-				1 Unit	52,280,125	INSPEKTORAT
6	1	1	1.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	497,500,000	Kota Makassar, Rappocini, Buakana	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Unit	586,003,918	INSPEKTORAT
6	1	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	% OPD yang hasil nilai SAKIPnya meningkat	100 %	14,723,830,000				100 %	16,441,114,829	INSPEKTORAT
						% Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Umum dan Teknis Kab/Kota	72.50 %					72.50 %		INSPEKTORAT
						% Penyelesaian Tindak Lanjut Perangkat Daerah Terhadap Hasil Pemeriksaan APIP	79.50 %					79.50 %		INSPEKTORAT
6	1	2	1.01		Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Cakupan Perangkat Daerah yang diawasi kinerjanya	100 %	10,212,830,000				100 %	11,815,932,069	INSPEKTORAT
6	1	2	1.01	1	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	52 Laporan	688,620,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		52 Laporan	2,064,819,040	INSPEKTORAT
6	1	2	1.01	2	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	52 Laporan	4,034,948,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		52 Laporan	3,797,491,915	INSPEKTORAT
6	1	2	1.01	3	Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	152 Laporan	517,764,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		152 Laporan	994,555,294	INSPEKTORAT
6	1	2	1.01	4	Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	52 Laporan	608,690,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		52 Laporan	336,612,317	INSPEKTORAT
6	1	2	1.01	5	Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota	45 Laporan	3,212,950,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		45 Laporan	3,361,238,357	INSPEKTORAT
6	1	2	1.01	6	Kerjasama Pengawasan Internal	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	2 Kesepakatan	138,800,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2 Kesepakatan	222,197,188	INSPEKTORAT
6	1	2	1.01	7	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	87 Dokumen	1,011,058,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		87 Dokumen	1,039,017,958	INSPEKTORAT
6	1	2	1.02		Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Cakupan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	100 %	4,511,000,000				100 %	4,625,182,760	INSPEKTORAT
6	1	2	1.02	1	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	20 Laporan	159,000,000	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		20 Laporan	163,460,416	INSPEKTORAT

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	1	2	1.02	2	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	61 Laporan	4,352,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		61 Laporan	4,461,722,344	INSPEKTORAT
6	1	3			PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Presentase kebijakan pengawasan pemerintah yang diakomodir menjadi kebijakan pengawasan daerah	100 %	4,098,480,000				100 %	6,467,309,786	INSPEKTORAT
						Persentase pengaduan masyarakat terhadap OPD yang ditindaklanjuti	100 %					100 %		INSPEKTORAT
						Persentase pengaduan masyarakat terhadap pemerintah Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti	100 %					100 %		INSPEKTORAT
6	1	3	1.01		Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	% Kebijakan Pengawasan Pemerintah Provinsi yang diakomodir menjadi kebijakan pengawasan pemerintah Kab/Kota	100 %	950,000,000				100 %	1,383,750,000	INSPEKTORAT
6	1	3	1.01	1	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	1 Rekomendasi	750,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Rekomendasi	1,178,750,000	INSPEKTORAT
6	1	3	1.01	2	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun	1 Rekomendasi	200,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Rekomendasi	205,000,000	INSPEKTORAT
6	1	3	1.02		Pendampingan dan Asistensi	Cakupan Pendampingan dan Asistensi kepada Perangkat Daerah	100 %	3,148,480,000				100 %	5,083,559,786	INSPEKTORAT
6	1	3	1.02	1	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	27 Perangkat Daerah	157,500,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		27 Perangkat Daerah	253,595,058	INSPEKTORAT
6	1	3	1.02	2	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	40 Perangkat Daerah	289,730,000	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		40 Perangkat Daerah	302,375,000	INSPEKTORAT
6	1	3	1.02	3	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	1 Kegiatan	2,500,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Kegiatan	4,314,045,392	INSPEKTORAT
6	1	3	1.02	4	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	3 Perangkat Daerah	201,250,000	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3 Perangkat Daerah	213,544,336	INSPEKTORAT
8					UNSUR PEMERINTAHAN UMUM			52,316,473,947					29,053,459,858	
8	1				BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK			52,316,473,947					29,053,459,858	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	% ASN Perangkat Daerah Berkinerja Kategori Sangat Baik	100%	9,400,382,733				100%	13,944,497,994	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
						% Penurunan Temuan Berdasarkan LHP	100%					100%		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
						% Realisasi Kegiatan Perangkat Daerah	100%					100%		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	1	1	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			475,289,876					568,016,801	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	1	1	1.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	134,479,100	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2 Dokumen	254,507,863	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	1	1	1.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	264,278,600	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Dokumen	78,476,772	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	1	1	1.01	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	9,901,500	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Dokumen	81,146,579	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	1	1	1.01	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	5,901,500	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Dokumen	13,220,553	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	1	1	1.01	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	4,095,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Dokumen	12,067,807	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	1	1	1.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	21 Laporan	25,711,176	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		21 Laporan	113,756,225	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	1	1	1.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	30,923,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Laporan	14,841,002	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	1	1	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			6,373,864,589					9,191,561,769	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	1	1	1.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	50 Orang/ Bulan	6,123,865,137	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		50 Orang/ Bulan	8,740,099,179	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	1	1	1.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	-	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		12 Dokumen	65,982,688	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	1	1	1.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	61,527,100	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		12 Dokumen	38,964,489	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	1	1	1.02	4	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 Dokumen	10,931,800	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		12 Dokumen	23,249,442	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	1	1	1.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	3,843,600	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Laporan	65,915,445	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	1	1	1.02	6	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	1,996,800	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Dokumen	994,243	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	1	1	1.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	161,063,352	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		12 Laporan	185,493,637	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	1	1	1.02	8	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	10,636,800	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Dokumen	70,862,646	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	1	1	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			51,348,000					49,942,111	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	1	1	1.03	1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	31,170,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Dokumen	21,760,478	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	1	1	1.03	5	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	20,178,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Laporan	28,181,633	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	1	1	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			88,135,752					565,745,731	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	1	1	1.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	8,350,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Paket	122,377,174	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	1	1	1.05	3	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12 Dokumen	52,379,776		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		12 Dokumen	57,109,562	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	1	1	1.05	5	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	12 Dokumen	27,405,976	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		12 Dokumen	52,188,779	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	1	1	1.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	1 Orang	-	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Orang	55,235,736	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	1	1	1.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	100 Orang	-	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100 Orang	251,817,001	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	1	1	1.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	10 Orang	-	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		10 Orang	27,017,479	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	1	1	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah			738,237,776					1,745,181,928	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	1	1	1.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	13,500,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Paket	10,338,689	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	1	1	1.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	35,500,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Paket	56,751,116	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	1	1	1.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	66,855,500	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Paket	113,852,859	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	1	1	1.06	7	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	19,805,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Paket	91,571,243	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	1	1	1.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	176,289,500	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Laporan	296,815,829	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	1	1	1.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	397,833,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Laporan	986,355,780	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	1	1	1.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	100 Dokumen	-	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100 Dokumen	22,719,899	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	1	1	1.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	12 Dokumen	28,454,776	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		12 Dokumen	166,776,513	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	1	1	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			802,645,500					1,004,930,196	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	1	1	1.07	1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit	630,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Unit	735,000,000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	1	1	1.07	5	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	69,730,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Paket	28,818,645	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	1	1	1.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	29 Unit	102,915,500	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		29 Unit	241,111,551	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	1	1	1.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 Unit	-	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		0 Unit	-	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	1	1	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			144,816,240					212,311,200	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	1	1	1.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	-	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Laporan	21,613,983	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	1	1	1.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	-	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Laporan	53,842,834	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	1	1	1.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	144,816,240	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		12 Laporan	136,854,383	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	1	1	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			726,045,000					606,808,258	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	1	1	1.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	23 Unit	598,545,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		23 Unit	528,658,824	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	1	1	1.09	5	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	0 Unit	-	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		0 Unit	-	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	1	1	1.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	0 Unit	30,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		0 Unit	43,408,084	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	1	1	1.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	97,500,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Unit	34,741,350	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	1	2			PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Persentase keikutsertaan masyarakat dalam bela negara	20 %	203,729,700				60 %	330,209,590	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	1	2	1.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan			203,729,700					330,209,590	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	1	2	1.01	1	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun	6 Dokumen	52,460,500	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		6 Dokumen	113,874,029	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	1	2	1.01	2	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun	0 Dokumen	93,676,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		0 Dokumen	-	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	1	2	1.01	4	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	8 Orang	57,593,200	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		8 Orang	216,335,562	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	1	3			PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Persentase Tingkat partisipasi pemilih dalam pemilu	82,01%	6,462,854,312				82,01%	9,169,359,135	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	1	3	1.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik			6,462,854,312					9,169,359,135	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	1	3	1.01	1	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun	1 Dokumen	5,466,500	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Dokumen	48,925,773	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	1	3	1.01	2	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun	3 Dokumen	124,161,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3 Dokumen	208,262,739	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	1	3	1.01	3	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	200 Orang	6,264,564,112	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		200 Orang	8,731,230,361	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	1	3	1.01	4	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	6 Orang	7,630,500	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		6 Orang	65,474,760	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	1	3	1.01	5	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	2 Laporan	61,032,200	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2 Laporan	115,465,502	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	1	4			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang memenuhi 4 konsensus kebangsaaan	20 %	106,377,800				60%	1,865,211,755	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	1	4	1.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan			106,377,800					1,865,211,755	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	1	4	1.01	2	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun	1 Dokumen	32,520,600	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Dokumen	63,719,224	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	1	4	1.01	3	Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	200 Orang	21,961,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		200 Orang	1,764,226,061	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	1	4	1.01	4	Pelaksanaan Koordinasi Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	0 Orang	23,567,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		0 Orang	-	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	1	4	1.01	5	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	1 Laporan	28,329,200	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Laporan	37,266,470	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	1	5			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Persentase Penurunan Penyalahgunaan Narkoba (Prioritas)	40 %	1,187,999,200				40 %	1,470,033,540	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
						Persentase Wilayah Sulsel Berpotensi Konflik Agama yang ditangani	100%					100%		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	1	5	1.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya			1,187,999,200					1,470,033,540	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	1	5	1.01	2	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun	4 Dokumen	67,624,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4 Dokumen	203,875,100	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	1	5	1.01	3	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	200 Orang	1,037,033,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		200 Orang	1,206,904,425	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	1	5	1.01	4	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	200 Orang	47,134,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		200 Orang	53,635,580	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	1	5	1.01	5	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	3 Laporan	36,208,200	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3 Laporan	5,618,435	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	1	6			PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase Penurunan jumlah konflik di lingkungan masyarakat	10 % (40 kasus)	34,955,130,202				50 % (40 kasus)	2,274,147,844	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	1	6	1.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial			34,955,130,202					2,274,147,844	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	1	6	1.01	1	Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun	1 Dokumen	1,572,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Dokumen	20,413,208	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	1	6	1.01	2	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun	12 Dokumen	1,572,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		12 Dokumen	39,331,446	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	1	6	1.01	3	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	300 Orang	34,615,891,502	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		300 Orang	1,122,856,678	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	1	6	1.01	4	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	8 Orang	59,370,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		8 Orang	177,623,716	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	1	6	1.01	5	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	93 Laporan	209,879,200	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		93 Laporan	284,968,365	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	1	6	1.01	6	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi	12 Dokumen	66,845,500	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		12 Dokumen	628,954,431	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

BAB VII

KINERJA PENYELENGARAAN PEMERINTAH DAERAH

BAB VII
KINERJA PENYELENGARAAN PEMERINTAH DAERAH

Indikator kinerja adalah alat ukur kuantitatif untuk mengetahui dampak dari pembangunan daerah yang dilaksanakan. Tujuan dalam penetapan indikator kinerja daerah adalah memberikan gambaran tentang pencapain visi dan misi dari kepala daerah terpilih. Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel, serta berorientasi pada hasil. Penetapan indikator kinerja daerah dituangkan dalam bentuk target kinerja yang akan dicapai pada waktu tertentu yang bertujuan untuk memberikan gambaran tentang ukuran target dalam pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah yang ditetapkan berupa indikator makro pembangunan, Indikator Kinerja Utama (IKU), indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK).

7.1. Indikator Makro Pembangunan

Indikator makro pembanguan merupakan indikator kinerja pembangunan yang menggambarkan keberhasilan pembangunan daerah secara umum. Pencapaian kinerja makro dihasilkan dari berbagai program yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, pemerintah pusat, pihak swasta dan pihak terkait lainnya dalam pembangunan nasional. Kinerja makro merupakan akumulasi dari pencapaian kinerja beberapa sektor, urusan, dan bidang pemerintahan. Adapun indikator makro pembangunan terdiri dari:

1. Pertumbuhan Ekonomi
2. Kemiskinan
   - Tingkat kemiskinan
   - Jumlah Penduduk Miskin (Ribu Orang)
   - Indeks Kedalaman Kemiskinan
3. Tingkat Penganggurasn Terbuka (TPT)
   - Jumlah Penganggur (Ribu orang)
4. Gini Ratio
5. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
   - Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)
   - Harapan Lama Sekolah (HLS)
   - Angka Harapan Hidup (AHH)
   - Pengeluaran Per Kapita (Disesuaikan)
6. PDRB Perkapita
   - ADHB
   - ADHK

Target kinerja makro pembangunan secara lengkap dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel VII.1.
Capaian dan Target Indikator Makro Provinsi Sulawesi Selatan
Tahun 2021-2023

No.	Indikator Makro	Satuan	Capaian Tahun 2021	Asumsi Capaian Tahun 2022	Target P-RPJMD Tahun 2023	Target RKPD Tahun 2023
1	Pertumbuhan Ekonomi	%	4,65	4.62-5.98	5,04-6,52	**5,04–6,52**
2	Kemiskinan					
	• Tingkat Kemiskinan (September)	%	8,53	8.10	7,45	7,45
	• Jumlah Penduduk Miskin	Ribu Orang	784,98	754.4	754.4	754.4
	• Indeks Kedalaman Kemiskinan	Angka/ Nilai	1,40	1.527	1.527	1.527
3	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) *(Agust)*	%	5,72	5.90	5,69	5,69
	• Jumlah Penganggur	Ribu Orang	252.349	256.110	256.110	256.110
4	Indeks Gini	Angka/Nilai	0,377	0,381	0.381	0.381
5	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Angka/Nilai	72,24	72.57	73,05	73,05
	• Angka Harapan Hidup (AHH)	Tahun	70,66	70.58	70.58	70.58
	• Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)	Tahun	8,46	8.47	8.47	8.47
	• Harapan Lama Sekolah (HLS)	Tahun	13,52	13.80	13.80	13.80
	• Pengeluaran Per Kapita (Disesuaikan)	Ribu Rupiah/Orang	11.184	11.273	11.273	11.273
6	PDRB Perkapita					
	• ADHB	Jt Rp.	59,66	62,37	65,88	65,98
	• ADHK	Jt Rp.	37,57	38,95	38,95	38,95

Sumber : BPS dan Perubahan RPJMD Sulsel 2018-2023

Target Indikator Makro Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023, merupakan target periode akhir Perubahan RPJMD 2018-2023. Oleh Karena itu RPKD Tahun 2023 merupakan dasar pengukuran keberhasilan pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan.

Capaian Pertumbuhan Ekonomi pada tahun 2021 telah mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya dengan capaian 4,65 persen, pertumbuhan ekonomi tersebut berada diatas angka nasional yang sebesar 3,96 persen. Asumsi capaian pertumbuhan Ekonomi tahun 2022 dan target tahun 2023 diproyeksikan semakin meningkat seiring dengan usaha-usaha pemulihan Pertumbuhan Ekonomi pada setiap sektor lapangan usaha melalui: (1) Penyediaan infrastruktur ; (2) Peningkatan lapangan kerja dan industrialisasi pengolahan produk unggulan daerah; (3) Kemudahan

berinvestasi; (4) Peningkatan Ekspor Melalui Nilai Tambah Dan Daya Saing Produk Penglolahan Hasil Pertanian, Peternakan, Perikanan serta Kemaritiman.

Capaian Tingkat Kemiskinan pada tahun 2021 sebesar 8,53 persen telah mengalami perbaikan dari tahun sebelumnya dengan penurunan sebesar 0,46 poin. Hal ini disebabkan oleh pertumbuhan di sektor pertanian yang berdampak pada peningkatan pendapatan di wilayah pedesaan. Asumsi capaian Tahun 2022 dan target tahun 2023 diharapkan terus mengalami perbaikan melalui penurunan tingkat kemiskinan, yang didukung dengan strategi penguatan kapasitas usaha kelompok miskin dan rentan melalui kelompok usaha bersama (kube) atau kelompok sosial lainnya.

Dampak positif dari perbaikan pertumbuhan ekonomi di Sulawesi Selatan adalah menurunnya Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dengan capaian 5,72 % pada Tahun 2021. Pada tahun 2022 dan tahun 2023 Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan menargetkan angka TPT turun menjadi 5,69% dengan strategi pemberian pelatihan keterampilan kepada para pencari kerja, mendorong pengembangan usaha kecil dan menengah dan meningkatkan kualitas pendidikan vokasi.

Pencapaian kinerja Pemerintah Daerah dari segi pemerataan pendapatan dengan indikator indeks gini menunjukkan perbaikan dari tahun sebelumnya, yaitu sebesar 0,377 pada tahun 2021. Asumsi capaian Pada tahun 2022 dan target tahun 2023 yang diharapkan terus mengalami perbaikan. Untuk mendukung target tersebut, kebijakan Pemerintah daerah melalui pembangunan infrastruktur pada wilayah terisolir diharapkan dapat mengurangi ketimpangan pendapatan masyarakat perdesaan dan perkotaan, diantaranya melalui pemberian bantuan keuangan dari Pemerintah Provinsi kepada Pemerintah Kabupaten/Kota.

Indikator pembangunan Makro berikutnya yang perlu diperhatikan adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Hasil capaian IPM Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2021 adalah 72,20. Searah dengan program dan kebijakan pembangunan manusia di Sulawesi Selatan, asumsi pertumbuhan IPM Sulawesi Selatan terus mengalami kenaikan menjadi 72,57 dan pada periode akhir RPJMD 2023, target capaian IPM menjafi 73,05.

Trend indeks IPM yang bertumbuh positif, dapat dilihat dari bertambahnya angka PDRB perkapita di Sulawesi Selatan. Jika pada tahun 2021 capaian angka PDRB perkapita Rp. 59,23 juta, maka pada tahun 2023 ditargetkan tumbuh positif menjadi Rp. 65,88 juta. Keenam indikator Makro Pembangunan yang menunjukkan trend yang lebih baik, akan berdampak baik pada capaian Target Visi dan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan periode 2018-2023.

7.2. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah alat ukur kuantitatif untuk mengetahui hasil dari pelaksanaan sasaran pembangunan daerah oleh Kepala Daerah. Tujuan penetapan IKU adalah memberikan gambaran tentang keberhasilan pencapaian target indikator tujuan dan sasaran daerah. Pencapaian indikator tujuan dan sasaran tersebut merupakan akumulasi dari

pencapaian beberapa target indikator program. Penetapan Target indikator kinerja utama selanjutnya disajikan pada table berikut ini:

Tabel VII.2.
Capaian Indikator Kinerja Utama 2021, Asumsi Capaian Target Indikator Kinerja Utama Tahun 2022, dan Penetapan Target Indikator Kinerja Utama Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023

No.	Indikator	Tahun 2021		Asumsi Capaian Tahun 2022	Target Tahun 2023
		Target	Capaian		
1	*2*	*3*		*4*	*5*
1	Indeks Reformasi Birokrasi	B	B (61,18)	BB (71 - 80)	BB (81 -90)
2	Nilai SAKIP	B	B (65,01)	A (>80-90)	A (>80 - 90)
3	Indeks Pelayanan Publik	B	A (4,10)	A (4,01–4,50)	A (4,51-5,00)
4	Indeks Williamson	0,610	0,568	0,608	0,607
5	Indeks Layanan Infrastruktur	79,50	79,44	81,70	83,40
6	PDRB Perkapita ADHB	59,23	59,66	62,37	65,98
7	Tingkat Kemiskinan	8,70	8,53	8,10	7,45
8	Tingkat Pengangguran terbuka	8,79%	5,72	5,90	5,69
9	Rasio Gini	0,382	0,377	0,381	0,381
10	IPM	72,20	72,24	72,57	73,05
11	Indeks Pendidikan	66,29	65,76	66,57	67,05
12	Indeks Kesehatan	77,76	77,94	77,82	77,86
13	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	75,21	74.76	76,36	77,86
14	Angka kriminalitas	24,709	15.210	24,573	24,438
15	Pertumbuhan ekonomi	4.10–5.55	4,65	4.62–5.98	5,04 - 6,52
16	Produktifitas Total Daerah	76,913,142.88	77.819.958	77.086,000,10	77.349.122
17	IKLH	72,25	73,23	72,63	72,84
18	Potensi Penurunan emisi GRK (Juta Ton CO_2Eq)	1,07	1,13	1,198	1,347

Sumber : BPS dan Perubahan RPJMD Sulsel 2018-2023

Indikator kinerja utama perangkat daerah merupakan indikator kinerja yang menjadi tanggung jawab perangkat daerah. Indikator ini berada pada level intermediate outcome. Yang menghubungkan kinerja program dengan tujuan dan sasaran pembangunan. Indikator kinerja utama sebagai suatu prioritas program kegiatan yang mengacu pada sasaran strategis dalam RPJMD dan Renstra Satuan Perangkat Daerah. Penetapan Target Indikator Kinerja Utama Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022 target tahun 2023 adalah indeks reformasi capaian tahun 2021 ke tahun 2023 dengan target Indeks Reformasi BB (81-90), Nilai Sakip kisaran A (>80-90), Indeks pelayanan publik kisaran A(4.51-5.00), Indeks Willamson tahun 2023 (0.607).

Target utama setiap daerah adalah bagaimana mengurangi tingkat kemiskinan target (tahun 2023) adalah 7.45 (Permendagri No. 17/2021) pengurangan tenaga pengangguran dari 5,90 (tahun 2022) target (tahun 2023) 5.69 persen (Permendagri No. 17/2021), Pertumbuhan ekonomi ditargetkan pada tahun 2023 kisaran (5.06-6.59) dan IPM sebagai ukuran setiap daerah dan negara semakin tinggi tingkat IPM maka mengalami kemajuan dalam hal sumber daya manusia untuk mengejar bonus demografi dengan target kisaran dari 72.57 (tahun 2022) dan target (2023) 73.05

7.3. Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah merupakan indikator yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada masa jabatan pemerintah daerah. Indikator Kinerja Kunci disusun sesuai dengan urusan penyelenggaraan pemerintah dan kewenangan pemerintah provinsi.

Indikator kinerja daerah secara teknis pada dasarnya dirumuskan dengan mengambil indikator dari program prioritas yang telah ditetapkan (outcome) maupun indikator sasaran (impact). Suatu indikator kinerja daerah dapat dirumuskan berdasarkan hasil analisis pengaruh dari satu atau lebih indikator capaian kinerja program (outcome) terhadap tingkat capaian indikator kinerja daerah berkenaan setelah program prioritas ditetapkan. Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai ukuran keberhasilan pencapaian visi misi Gubernur dan wakil Gubernur dari sisi penyelenggaraan pemerintahan daerah pada akhir periode masa jabatan.

Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir periode masa jabatan.

Penyajian indikator indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) dibagi menjadi 3 (tiga) aspek, yaitu: aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, serta aspek daya saing daerah. Indikator pada aspek kesejahteraan masyarakat menggambarkan suatu kondisi indikator makro ekonomi dan sosial, seperti laju pertumbuhan ekonomi, inflasi, persentase penduduk miskin, Tingkat Pengangguran Terbuka, dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Indikator pada aspek Pelayanan Umum memberikan tolok ukur atas pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangan urusan baik wajib maupun pilihan sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Indikator kinerja pada aspek daya saing daerah memberikan gambaran daya dukung untuk mencapai pertumbuhan tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan. Pentahapan dan tema kerja 2018-2023 skenario pelaksanaan IKK . Penetapan target indikator kinerja kunci selanjutnya disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel VII.3.
Indikator Kinerja Penyelenggraan Urusan Pemerintah Daerah

NO.			ASPEK/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Asumsi Capaian Tahun 2022	Target Tahun 2023
1			**ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT**			
1	**1**		**KESEJAHTERAAN DAN PEMERATAAN EKONOMI**			
1	**1**	**1**	**Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Umum, Perangkat daerah, Kepegawaian, dan Persandian**			
1	1	2	Persentase Penduduk Diatas Garis Kemiskinan	%	90,81	90,84
1	1	3	Angka Melek Huruf (AMH)	%	95,93	95,95
1	1	4	Persentase Balita Stunting	%	21,59	18,59
1	1	5	Angka Partispasi Angkatan Kerja	%	61,91	62,10
1	1	6	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	%	62,80	62,99
1	1	7	Persentase penduduk yang bekerja	%	94,77	94,84
1	1	8	Proporsi tenaga kerja yang berusaha sendiri dan pekerja bebas keluarga terhadap total kesempatan kerja	%	37,5	38,03
1	1	9	Persentase PAD terhadap Pendapatan	%	42,3	42,48
1	1	10	Opini BPK	OPINI	WTP	WTP
1	1	11	Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	%	86,20	87.10
1	1	12	Penguatan Cadangan Pangan (Data timpang)	%	90	100
1	1	13	Penanganan Daerah Rawan Pangan (Data timpang)	%	86,66	100
1	1	14	Kontribusi Sektor Pertanian / Perkebunan terhadap PDRB	%	24,12	24,29
1	1	15	Kontribusi Sektor Pertanian (Palawija) Terhadap PDRB	%	9,38	10,07
1	1	16	Produksi sektor pertanian	Trilyun Rp	154,59	183,34
1	1	17	Kontribusi Sektor Perkebunan (Tanaman Keras) Terhadap PDRB	%	1,9	1,92
1	1	18	Produksi sektor perkebunan	Trilyun Rp	12,69	14,37
1	1	19	Kontribusi Produksi Kelompok Petani Terhadap PDRB	%	93,55	94,74
1	1	20	Kontribusi Sektor Kehutanan Terhadap PDRB	%	0,09	0,10

NO.			ASPEK/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Asumsi Capaian Tahun 2022	Target Tahun 2023
1	1	21	Kontribusi Sektor Pertambangan Terhadap PDRB	%	7,18	7,63
1	1	22	Kontirbusi Sektor Kelautan dan Perikanan Terhadap PDRB	%	10,14	10,46
1	1	23	Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB	%	15,22	15,49
1	1	24	Kontribusi Sektor Industri Terhadap PDRB	%	8,30	8,31
1	1	25	Kontribusi Industri Rumah Tangga terhadap PDRB sektor industri	%	9,60	9,80
1	1	26	Pertumbuhan PDRB Industri	%	7,71	8,63
2			**ASPEK PELAYANAN UMUM**			
2	1		**URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR**			
2	1		**PENDIDIKAN**			
2	1	1	Persentase siswa SMA/SMK yang bebas buta aksara Al-Quran	%	61.15	62,00
2	1	2	Persentase SMA/SMK yang bebas Narkoba (indikator RPJMD pokok)	%	92,9	93,90
2	1	3	Persentase Sekolah yang menerapkan kurikulum lokal penambahan waktu pelajaran agama	%	55,6	57,25
2	1	4	Persentase Pendidikan menengah yang telah menerapkan penyelenggaraan dan pelayanan pendidikan berbasis TIK	%	81	82
2	1	5	Rasio Guru terhadap murid pendidikan menengah	Rasio	01:13	01:13
2	1	6	Persentase Guru SMA yang bersertifikat	%	52,65	53,20
2	1	7	Persentase Guru SMK yang bersertifikat	%	45,85	46,35
2	1	8	Persentase Satuan Pendidikan Yang memperoleh Izin Penyelenggaraan Pendidikan	%	100	100
2	1	9	Persentase SMA/SMK yang menerbitkan karya sastra	%	49,65	51,05
2	2		**KESEHATAN**			
2	2	1	Persentase RS Regional yang terbangun dan ditingkatkan	%	50	100
2	2	2	Persentase RS Rujukan Provinsi yang Terakreditasi	%	90	100
2	2	3	Persentase anak yang mendapat asupan gizi pada 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK)	%	7	7,5
2	2	4	Persentase ibu hamil yang mendapat asupan gizi pada 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK)	%	12.5	13
2	2	5	Persentase Ketersediaan Stok Darah Terhadap Pemenuhan Kebutuhan Darah	%	85	100
2	2	6	Persentase pasien yang mendapatkan layanan sesuai dengan standar	%	100	100

NO.			ASPEK/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Asumsi Capaian Tahun 2022	Target Tahun 2023
2	2	7	Persentase pasien yang mendapatkan layanan sesuai dengan standar	%	100	100
2	2	8	Cakupan Ketersediaan Sarana dan Prasarana RS dalam Kondisi Baik	%	90	100
2	2	9	Cakupan Ketersediaan Sarana dan Prasarana RS dalam Kondisi Baik	%	100	100
2	2	10	Cakupan Ketersediaan Sarana dan Prasarana RS dalam Kondisi Baik	%	90	100
2	2	11	Cakupan Ketersediaan Sarana dan Prasarana RS dalam Kondisi Baik	%	95	100
2	2	12	Cakupan Ketersediaan Sarana dan Prasarana dalam upaya peningkatan kesehatan masyarakat	%	98	100
2	2	13	Cakupan pemenuhan sarana dan prasarana RSUD Sayang Rakyat dalam kondisi baik	%	75	85
2	2	14	Rasio tenaga kesehatan persatuan penduduk	Rasio	23/100.000 Penduduk	23/100.000 Penduduk
2	2	15	Persentase Keterpenuhan SDM Kesehatan pada Fasilitas Kesehatan	%	97	100
2	2	16	Persentase tenaga medis yang tersertifikasi	%	45	50
2	2	17	Cakupan Pelatihan dan modul yang terakreditasi	%	100	100
2	2	18	Persentase tenaga kesehatan gigi dan mulut yang telah memperoleh pendidikan dan pelatihan	%	100	100
2	2	19	Persentase SDM Kesehatan yang bersertifikasi	%	65	70
2	2	20	Persentase Tenaga Kesehatan dan Tenaga Kesehatan Lainnya yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	%	90	100
2	2	21	Persentase kompetensi Sumber daya Manusia kesehatan	%	77,4	100
2	2	22	Meningkatnya Kompetensi teknis SDM	%	85	100
2	2	23	Persentase SDM Kesehatan yang bersertifikasi	%	12	24
2	2	24	Persentase Pemenuhan Sediaan Farmasi	%	95	100
2	2	25	Persentase Pemenuhan Sediaan Alat Kesehatan	%	95	100
2	2	26	Persentase Pemenuhan Sediaan Makanan Minuman	%	95	100
2	2	27	Persentase Kabupaten/Kota yang memiliki Kebijakan PHBS	%	75 (18 Kab/Kota)	85 (20 Kab/Kota)
2	2	28	Cakupan Pasien Yang Tertangani Sesuai Standar Pelayanan	%	0	100
2	3		**PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**			

NO.			ASPEK/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Asumsi Capaian Tahun 2022	Target Tahun 2023
2	3	1	Persentase Jaringan Irigasi Primer dan Sekunder kondisi baik pada DI Kewenangan Provinsi	%	78,5	80
2	3	2	Cakupan pengelolaan sungai, danau, waduk, dan pantai	%	100	100
2	3	3	Persentase warga negara memperoleh kebutuhan air minum curah lintas kabupaten/kota	%	100	100
2	3	4	Cakupan Pembinaan Layanan Air Minum Kab/Kota	%	100	100
2	3	5	Cakupan Pembinaan Layanan TPA (Kab/Kota	%	100	100
2	3	6	Persentase warga negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik regional lintas kabupaten/kota	%	100	100
2	3	7	Cakupan Pembinaan Layanan Air Limbah Domestik Kab/Kota	%	100	100
2	3	8	Cakupan layanan drainase kewenangan provinsi	%	16	16
2	3	9	Persentase Bangunan Pamerintah Yang di Fasilitasi	%	100	100
2	3	10	Jumlah kawasan strategis dan pusat pertumbuhan baru yang dilakukan penataan bangunan dan lingkungannya	Kawasan	13 Kawasan	15 Kawasan
2	3	11	Persentase jalan provinsi dalam kondisi mantap	%	74,24	75,09
2	3	12	Persentase panjang terisolir pada ruas jalan provinsi yang terakses roda empat	%	71.79	74,25
2	3	13	Rasio tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah provinsi yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan ahli	Rasio	0.6	0,7
2	3	14	Rasio ketaatan pemanfaatan ruang	Rasio	0.8	1,0
2	4		**PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN**			
2	4	1	Persentase Luas Kawasan Kumuh Tertangani Kewenangan Provinsi	%	23,42	36,37
2	4	2	Persentase rumah tangga yang berakses air bersih layak/Arsinum di kawasan Pesisir dan Kepulauan	%	100	100
2	4	3	Persentase rumah tangga bersanitasi di kawasan permukiman	%	92	93
2	4	4	Persentase panjang jalan lingkungan yang terbangun di kawasan permukiman	%	80	100
2	4	5	persentase pengembang perumahan dengan tingkat kualifikasi menengah yang tersertifikasi dan terregistrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	%	57,14	100
2	5		**KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT**			
2	5	1	Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkada di Provinsi	%	100	100

NO.			ASPEK/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Asumsi Capaian Tahun 2022	Target Tahun 2023
2	5	2	Persentase Korban Bencana yang tertangani	%	100	100
2	5	3	Persentase Dokumen Kebencanaan sampai dengan sah/legal yang tersedia	%	50	100
2	5	4	Persentase Aparat Kesiapsiagaan Bencana yang terlatih	%	75	100
2	5	5	Persentase Tanggap Darurat Bencana yang tertangani	%	100	100
2	5	6	Cakupan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	%	40	41
2	6		**SOSIAL**			
2	6	1	Persentase Pengawasan pelaksanaan undian gratis berhadiah dan pengumpulan uang atau barang	%	100	100
2	6	2	Persentase PSKS yang mendapatkan peningkatan kemampuan dan pengetahuan kesejahteraan sosial	%	100	100
2	6	3	Persentase penanganan warga negara migran korban tindak kekerasan	%	3,6	3,7
2	6	4	Persentase warga negara gelandangan dan pengemis yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar tuna susila didalam panti	%	100	100
2	6	5	Persentase Pelayanan dan Pemenuhan Kebutuhan dasar bagi tuna sosial di dalam panti	%	100	100
2	6	6	Persentase PPKS yang mendapatkan jaminan sosial	%	100	100
2	6	7	Persentase pengangkatan anak WNI oleh orang tua tunggal	%	100	100
2	6	8	Persentase warga negara Korban bencana provinsi yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial pada saaat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana provinsi	%	100	100
2	6	9	Persentase TMP yang dikelola	%	3,6	37
3			**TIDAK TERKAIT PELAYANAN DASAR**			
3	1		**TENAGA KERJA**			
3	1	1	Persentase Dokumen Perencanaan Tenaga Kerja Makro	%	100	100
3	1	2	Persentase Perusahaan yang menyusun Perencanaan Tenaga Kerja	%	7	10
3	1	3	Persentase pencari kerja terlatih yang mendapatkan pekerjaan	%	75	77,08
3	1	4	Persentase tenaga kerja yang dilatih berwirausaha dapat mandiri	%	80	85
3	1	5	Persentase Pencari kerja yang yang terdaftar dan ditempatkan	%	4.13	4.35
3	1	6	Persentase daya serap tenaga kerja (Prioritas)	%	59.09	59,41

NO.			ASPEK/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Asumsi Capaian Tahun 2022	Target Tahun 2023
3	1	7	Persentase perusahaan yang menerapkan peraturan perundangan bidang ketengakerjaan	%	50	60
3	1	8	Persentase besaran pekerja /buruh yang menjadi peserta Jamsostek	%	46,81	47,22
3	1	9	Persentase Penurunan resiko kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja	%	85	85
3	1	10	Persentase kepatuhan penerapan norma ketenagakerjaan	%	82	84
3	2		**PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**			
3	2	1	Persentase lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan yg terstandarisasi	%	25	35
3	2	2	Persentase kab/kota yg memenuhi indikator prasyarat PUG	%	71	75
3	2	3	Persentase kab/kota yg menyediakan layanan perlindungan perempuan yg terstandarisasi	%	37,5	50
3	2	4	Persentase kab/kota yg menyediakan layanan pembelajaran keluarga yg terstandarisasi	%	37,5	60
3	2	5	Persentase Kab/kota yg menyediakan Data Gender dan Anak Yg terupdate	%	85	87
3	2	6	Persentase kabupaten/Kota Layak Anak	%	75	83
3	2	7	Persentase Kab/Kota yang menyediakan layanan anak korban kekerasan yang terstandarisasi	%	37,5	50
3	3		**PANGAN**			
3	3	1	Cakupan kelompok pengelola infrastruktur pendukung ketahanan pangan yang di bangun	%	30	30
3	3	2	Persentase Ketersediaan Pangan Utama (%):			
			* Beras	%	380,38	386,08
			* Jagung	%	55, 43	58,20
			* Kedelai	%	26,88	27,55
			Ketersediaan Energi (Kkal/Kapita/hari)	Kkal/ Kapita/ hari	3.916.65 Kkal/Kapita/hari	3.929,20 Kkal/Kapita/hari
			Ketersediaan Protein (gr/Kapita/hari)	gr/Kapita/hari	159.04 gr/Kapita/hari	174,50 gr/Kapita/hari
3	3	3	Jumlah Daerah Rawan Pangan		20	19
3	3	4	Persentase Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan	%	100	100
3	4		**PERTANAHAN**			

NO.			ASPEK/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Asumsi Capaian Tahun 2022	Target Tahun 2023
3	4	1	Persentase pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang selesai tepat waktu	%	100	100
3	4	2	Persentase sengketa tanah negara kewenangan provinsi yang difasilitasi	%	100	100
3	4	3	Persentase penatagunaan tanah sesuai penyelenggaraan penatagunaan tanah di 24 kab/kota	%	100	100
3	5		**LINGKUNGAN HIDUP**			
3	5	1	Persentase pemenuhan dokumen perencanaan lingkungan hidup	%	60	100
3	5	2	Persentase penurunan emisi gas rumah kaca (GRK) dari sektor limbah	%	4,59	5,40
3	5	3	Persentase Tingkat pengelolaan Keanekeragaman Hayati (KeHaTi)	%	92,85	100
3	5	4	Cakupan limbah yang dikelola	%	97,5	98
3	5	5	Persentase ketaatan pemrakarsa Usaha Terhadap Izin Lingkungan dan Izin PPLH	%	25	26
3	5	6	Persentase pengakuan keberadaan MHA , kearifan lokal dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	%	73,61	100
3	5	7	Cakupan Lembaga atau Kelompok Masyarakat yang di tingkatkan kapasitasnya dalam PPLH	%	87	100
3	5	8	Jumlah Penghargaan Lingkungan Hidup Yang di Berikan	Penghargaan	5 Penghargaan	5 Penghargaan
3	5	9	Cakupan rekomendasi penanganan pengaduan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti	%	100	100
3	5	10	Presentase Sampah Perkotaan yang tertangani	%	73	74
3	6		**ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**			
3	6	1	Persentase Penduduk ber KTP persatuan Penduduk	%	97	98
3	6	2	Persentase penerbitan KTP	%	97	98
3	6	3	Persentase Perekaman Kartu Tanda Penduduk	%	100	100
3	6	4	Persentase Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA)	%	30	40
3	6	5	Persentase Bayi ber akte kelahiran	%	97	98
3	6	6	Persentase Pasangan ber akte nikah	%	34	37
3	6	7	Persentase penerbitan akta kelahiran	%	94	95
3	6	8	Persentase Penduduk Usia 0-17 Tahun dengan kepemilikan akte kelahiran	%	87,37	90
3	6	9	Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran	%	46	47
3	6	10	Persentase Akta Kematian yang Diterbitkan	%	100	100
3	6	11	Persetase Ketersediaan dan Pemanfaatan Database Kependudukan Skala Provinsi	%	100	100

NO.			ASPEK/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Asumsi Capaian Tahun 2022	Target Tahun 2023
3	6	12	Persentase Penyajian Profil Kependudukan	%	100	100
3	7		**PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**			
3	7	1	Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik (Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa dalam kondisi baik)	%	99	100
3	7	2	Persentase peningkatan status desa mandiri	%	1,1	1,33
3	7	3	Persentase pengentasan desa tertinggal	%	17	15
3	7	4	Persentase Desa yang menjalin kerjasama	%	0,66	0,88
3	7	5	Persentase BUM Desa Yang diFasilitasi	%	11.81	11.81
3	7	6	Persentase Desa yang diFasilitasi	%	20,04	25,05
3	7	7	Persentase Kelembagaan Masyarakat yang difasilitasi dan ditingkatkan kapasitasnya (Kelompok Binaan LPM)	%	1,54	1,57
3	7	8	Persentase Posyandu aktif;	%	99,91	99,98
3	7	9	Persentase PKK aktif	%	100	100
3	8		**PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**			
3	8	1	Cakupan kab/kota yang mendapatkan fasilitasi pembinaan penanganan terpadu isu kependudukan di Kampung KB	%	29,16	45,82
3	8	2	Persentase PUS peserta KB Aktif	%	64,50	65,50
3	8	3	Persentase kab/kota yg meningkat capaian Indeks Pembangunan Keluarga	%	24	25
3	9		**PERHUBUNGAN**			
3	9	1	Persentase pengguna moda transportasi umum di perkotaan	%	30,8	32,40
3	9	2	Persentase Layanan Angkutan Darat;	%	56	58
3	9	3	Jumlah penumpang melalui terminal Tipe B per tahun	Orang	485.000	605.000
3	9	4	Cakupan prasarana LLAJ dalam kondisi baik	%	22	30
3	9	5	Jumlah penyelenggaraan lalu lintas pada ruas jalan provinsi	Ruas	20	20
3	9	6	Jumlah Terminal Bis terkelola	Terminal	13	13
3	9	7	Jumlah arus penumpang melalui pelabuhan (Prioritas)	Orang	1.074.000	1.074.000

NO.			ASPEK/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Asumsi Capaian Tahun 2022	Target Tahun 2023
3	9	8	Jumlah pelabuhan strategis provinsi	Lokasi	11	11
3	9	9	Persentase pelabuhan yang beroperasi	%	35	35
3	10		**KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**			
3	10	1	Persentase layanan informasi dan komunikasi publik	%	90	100
3	10	2	Presentase tindak lanjut pengaduan pada Baruga Layanan Masyarakat secara Elektronik	%	100	100
3	10	3	Indeks sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE)		2,9	3,0
3	11		**KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH**			
3	11	1	Persentase Koperasi dan UKM yang memiliki Izin usaha Simpan Pinjam	%	30	50
3	11	2	Persentase Koperasi yang mendapat Izin Pembukaan Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu dan Kantor Kas	%	30	40
3	11	3	Persentase Koperasi yang diawasi dan diperiksa	%	40	50
3	11	4	Persentase Koperasi yang meningkat Kepatuhannya terhadap peraturan perundang undangan	%	25	30
3	11	5	Persentase KSP/USP Koperasi, KSPPS/USPPS Koperasi dengan Kriteria SEHAT	%	30	40
3	11	6	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Penilaian Kesehatan Koperasi	%	30	40
3	11	7	Persentase Pengurus Koperasi Aktif yang pernah mendapatkan pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian	%	35	40
3	11	8	Persentase Koperasi yang terfasilitasi pemberdayaan	%	40	50
3	11	9	Cakupan UMKM yang diberdayakan	%	9	11
3	11	10	Persentase UMKM yang terfasilitasi Dalam Pengembangan Usaha	%	20	25
3	11	11	Cakupan promosi produk UMKM (Prioritas)	%	2	3
3	12		**PENANAMAN MODAL**			
3	12	1	Persentase Peningkatan Pengelolaan Potensi Investasi yang dimamfaatkan oleh Investor	%	85	100
3	12	2	Jumlah Realisasi PMA (Rp. Triliun)	(Rp. Triliun)	4	4,50
3	12	3	Jumlah Realisasi PMDN (Rp. Triliun)	(Rp. Triliun)	5	5,67
3	12	4	Persentase Ketepatan Waktu Penyelesaian Izin yang Diterbitkan Sesuai SOP	%	85	90
3	12	5	Persentase Perusahaan yang taat Terhadap Ketentuan peraturan Penanaman modal	%	75	100

NO.			ASPEK/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Asumsi Capaian Tahun 2022	Target Tahun 2023
3	12	6	Persentase ketersediaan data dan informasi pendukung penanaman modal	%	90	100
3	13		**KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**			
3	13	1	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	%	0,22	0,25
3	13	2	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial	%	1, 19	2,03
3	13	3	Persentase Peningkatan Prestasi olah raga	%	0	200
3	13	4	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana olahraga	%	95	100
3	13	5	Persentase organisasi pramuka aktif	%	100	100
3	14		**STATISTIK**			
3	14	1	Cakupan Ketersediaan Data Statistik Sektoral	%	80	100
3	15		**PERSANDIAN**			
3	15	1	Persentase Komunikasi daerah yang memanfaatkan persandian	%	50	60
3	16		**KEBUDAYAAN**			
3	16	1	Persentase Karya Budaya yang direvitalisasi dan Inventarisasi	%	2,8	4,5
3	16	2	Persentase Sanggar Kesenian yang Mendapatkan Pelatihan/Pembinaan	%	7,5	9,4
3	16	3	Persentase Lembaga Sejarah yang di Fasilitasi.	%	3,9	5,6
3	16	4	Persentase Cagar Budaya yang dilestarikan	%	0,78	1,00
3	16	5	Persentase Kunjungan ke musium	%	100	100
3	17		**PERPUSTAKAAN**			
3	17	1	Jumlah pengunjung perpustakaan konvensional dan elektronik	Orang	200.000	250.000
3	17	2	Persentase naskah kuno yang di lestarikan	%	100	100
3	18		**KEARSIPAN**			
3	18	1	Persentase Perangkat daerah yang mengelola arsip secara baku	%	37,74	75.47
4			**PELAYANAN URUSAN PILIHAN**			
4	1		**PARIWISATA**			
4	1	1	Persentase peningkatan destinasi wisata menjadi destinasi wisata unggulan	%	0,7	1,0
4	1	2	Persentase Kab/Kota yang memiliki kawasan wisata halal	%	12,5	20,8

NO.			ASPEK/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Asumsi Capaian Tahun 2022	Target Tahun 2023
4	1	3	Kunjungan wisata (Wisatawan Nusantara)	%	100	100
4	1	4	Kunjungan wisata (Wisatawan Mancanegara)	%	100	100
4	1	5	Persentase Sub Sektor ekonomi kreatif yang dikembangkan	%	13	13
4	1	6	Persentase Sumber Daya Manusia Pariwisata yang mendapatkan Pelatihan	%	4,09	5,45
4	1	7	Persentase pelaku usaha ekonomi kreatif yang mendapatkan pelatihan	%	10	12
4	2		**PERTANIAN**			
4	2	1	Jumlah produksi Talas Satoimo (Ton),	Ton	7000	7000
4	2	2	Luas Areal Pengengembangan Jeruk Keprok Selayar (Ha)	Ha	110 Ha (210 Ha)	331
4	2	3	Produktifitas Padi	kw/Ha	49,68	50,43
4	2	4	Produktifitas Jagung	kw/Ha	54,91	55,73
4	2	5	Produtifitas Kopi	kg/Ha	588	588.10
4	2	6	Produktifitas Kakao	kg/Ha	10.500	12.000
4	2	7	Peningkatan Ketersediaan Alat dan Mesin Pertanian	Unit	275	300
4	2	8	Peningkatan Ketersediaan Pupuk	Ton	310,6	323,02
4	2	9	Produksi Daging (ton)	ton	177.425	187,450
4	2	10	Produksi Telur (Ton)	ton	202.814	214,274
4	2	11	Produksi Susu (Ton)	Ton	2.096	2,159
4	2	12	Nilai Hilirisasi Produk Tanaman Pangan (Rp.)	Rp	463.034.340.435	465.893.180.426
4	2	13	Nilai Hilirisasi Produk Perkebunan (Rp.)	Rp	7.000.000.000	8.000.000.000
4	2	14	Nilai Hilirisasi Produksi Peternakan	Rp	37.059.609.113	38.617.836.192
4	2	15	Jumlah Kasus Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS) (Kasus)	Kasus	12.532	11.279
4	2	16	Persentase Penurunan Serangan OPT (%)	%	4,6	4,5
4	2	17	Persentase Penggunaan Benih Padi Bersertifikat (%)	%	78,79	81,15
4	2	18	Persentase Unit Usaha Yang Memiliki Rekomendasi Usaha Obat Hewan	%	20	25
4	2	19	Rasio Ketersediaan Penyuluh Pertanian dan Pelaku Utama Petani, Penyuluh/KEP (%)	Rasio	0,5	0,5
4	2	20	Rasio Ketersediaan Penyuluh Terhadap Kelompok Tani/Ternak	Rasio	01:14	01:13

NO.			ASPEK/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Asumsi Capaian Tahun 2022	Target Tahun 2023
4	3		**KEHUTANAN**			
4	3	1	Jumlah produksi hasil hutan bukan kayu	Ton	283	283
4	3	2	Jumlah produksi hasil hutan kayu olahan	M3	92.336,62	477.175,12
4	3	3	Persentase Kerusakan Hutan pertahun	%	16,2	14,82
4	3	4	Cakupan luas lahan kritis yang direhabilitasi (prioritas)	%	61,6	65,47
4	3	5	Jumlah jenis tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi dan/atau tidak masuk dalam lampiran (Appendix) CITES untuk kewenangan daerah provinsi yang terdata	Jenis	2	2
4	3	6	Persentase Jumlah Pemegang izin perhutanan sosial yang menjalankan pengelolaan dan pemanfaatan sesuai aturan	%	16,25	16,76
4	3	7	Jumlah DAS yang direhabilitasi	DAS	2	2
4	4		**ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL**			
4	4	1	Persentase Pelayanan Usaha Air Tanah Berbasis Konservasi	%	80	90
4	4	2	Luas Wilayah Izin Usaha Pertambangan (Komoditas Batuan, Non Logam, Non Logam Jenis Tertentu)	Ha	130.000	150.000
4	4	3	Penentuan dan Penetapan Blok WIUP Mineral (Komoditas Batuan, Non Logam, Non Logam Jenis Tertentu)	Ha	100.000	150.000
4	4	4	Persentase Penggunaan Gas Rumah Tangga	%	93.4	95
4	4	5	Persentase Rumah Tangga Pengguna Listrik	%	98.50	99
4	4	6	Persentase Desa berlistrik (Prioritas Desa Kepulauan)	%	99,25	100
4	5		**PERDAGANGAN**			
4	5	1	Persentase Rekomendasi SIUP MB yang dikeluarkan	%	100	100
4	5	2	Persentase Penerbitan SKA	%	100	100
4	5	3	Persentase Ketersediaan Sarana Distribusi Perdagangan	%	100	100
4	5	4	Persentase barang kebutuhan pokok dan barang penting yang dapat dikendalikan harganya	%	100	100
4	5	5	Nilai Ekspor Perdagangan	$	158.408.532	171.081.215
4	5	6	Persentase Barang Beredar yang diawasi, tertib niaga dan Pengaduan Konsumen	%	100	100
4	5	7	Persentaase jenis produk pelaku usaha yang memenuhi standar Perdagangan retail	%	100	100

NO.			ASPEK/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Asumsi Capaian Tahun 2022	Target Tahun 2023
4	6		**PERINDUSTRIAN**			
4	6	1	Persentase pertumbuhan jumlah industri	%	6	7
4	6	2	Persentase peningkatan pengendalian izin usaha industri	%	2,5	3
4	6	3	Persentase peningkatan pengelolaan SIINAS	%	3	4
4	7		**TRANSMIGRASI**			
4	7	1	Persentase lokasi transmigrasi yang diklarifikasi terhadap tata batas kawasan hutan	%	0	100
4	7	2	Persentase penempatan transmigrasi	%	100	100
4	7	3	Persentase penempatan transmigrasi	%	100	100
4	8		**KELAUTAN DAN PERIKANAN**			
4	8	1	Produksi garam rakyat	Ton	47.500	48.450
4	8	2	Cakupan Ketersediaan Sarana dan Prasarana Pendukung Produksi Perikanan	%	74,08	100
4	8	3	Cakupan luas kawasan konservasi perairan yang dikelola secara berkelanjutan (%)	%	67,30	67,31
4	8	4	Nilai Produksi Perikanan Tangkap	Rp	Rp. 9.029,52 M	Rp. 9.210,12 M
4	8	5	Produksi perikanan tangkap	Ton	404.932,20	413.030,80
4	8	6	Cakupan Bina Kelompok Nelayan	%	27,07	30,25
4	8	7	Persentase Pelabuhan Perikanan yg memiliki sarana prasarana yang sesuai standar operasional	**%**	68,42	78,95
4	8	8	Persentase Produksi perikanan kelompok nelayan	%	26,79	27,17
4	8	9	Nilai produksi perikanan budidaya	Rp	15.198,47 M	15.958,39 M
4	8	10	Produksi perikanan budidaya	Ton	4.093.705,80	4.298.391,10
4	8	11	Persentase ketersediaan benur berkualitas	%	100	100
4	8	12	Persentase Kepatuhan Pelaku usaha KP terhadap ketentuan peraturan perundangan yang berlaku	%	88,73	89,95
4	8	13	Nilai Hilirisasi Produksi olahan Ikan konsumsi dan non konsumsi	Rp	Rp. 311,06 Milyar	Rp. 317,28 Milyar
4	8	14	Produksi olahan konsumsi dan non konsumsi	Ton	5.436,2 Ton	5.544,10 Ton
4	8	15	Persentase Pembinaan mutu produk perikanan	%	80	100
5			**PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**			
5	1		**SEKRETARIAT DAERAH**			

NO.			ASPEK/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Asumsi Capaian Tahun 2022	Target Tahun 2023
5	1	1	Persentase kesesuaian program prioritas dengan struktur organisasi perangkat daerah	%	100	100
5	1	2	Presentase Urusan Pemerintahan Yang difasilitasi, dimonitoring, dan dievaluasi	%	100	100
5	1	3	Persentase Rumusan Kebijakan Bidang Kesejahteraan Rakyat yang dimanfaatkan.	%	100	100
5	1	4	Persentase Penduduk usia 15 tahun ke atas beragama Islam yang melek aksara Al-Quran (Prioritas)	%	35,50	35,55
5	1	5	Persentase Penurunan kasus Kejahatan terhadap Kesusilaan (Prioritas)	%	10	10
5	1	6	Nilai Hasil Evaluasi Reformasi Birokrasi pada Penataan Peraturan Perundang-undangan		4	5
5	1	7	Persentase Perkara Hukum yang difasilitasi	%	100	100
5	1	8	Persentase rumusan kebijakan bidang perekonomian yang dimanfaatkan	%	100	100
5	1	9	Realisasi capaian program prioritas pembangunan daerah	%	100	100
5	1	10	Persentase Kesesuaian pengadaan barang dan jasa dengan rencana	%	100	100
5	1	11	Persentase Kepuasan pelayanan pengadaan barang dan jasa	%	100	100
5	2		**SEKRETARIAT DEWAN**			
5	2	1	Persentase PROLEGDA yang terealisir	%	100	100
5	2	2	Persentase Jumlah program kerja DPRD yang terintegrasi dengan program RPJMD dan RKPD	%	100	100
5	2	3	Persentase Ranperda yang difasilitasi pembahasannya	%	100	100
6			**PENUNJANG URUSAN**			
6	1		**PERENCANAAN**			
6	1	1	Persentase Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD & APBD	%	100	100
6	1	2	Persentase peningkatan capaian kinerja program	%	0,5	0,5
6	1	3	Persentase Kesesuaian program Perangkat Daerah dengan Sasaran Pembangunan Daerah lingkup bidang PPM	%	80	100
6	1	4	Persentase Kesesuaian program Perangkat Daerah dengan Sasaran Pembangunan Daerah lingkup bidang Ekonomi dan SDA	%	90	95
6	1	5	Persentase Kesesuaian program Perangkat Daerah dengan Sasaran Pembangunan Daerah lingkup bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	%	90	95
6	2		**PENGADAAN / KEUANGAN**			

NO.			ASPEK/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Asumsi Capaian Tahun 2022	Target Tahun 2023
6	2	1	Persentase Persetujuan Bersama Ranperda APBD Pokok dan APBD Perubahan Yang Tepat Waktu	%	100	100
6	2	2	Tingkat Kepatuhan Kabupaten/Kota Dalam Menyampaiakan Ranperda & Ranperkada APBD Untuk Dievaluasi Tepat Waktu	%	100	100
6	2	3	Tingkat Kepatuhan Kabupaten/Kota Dalam Menyampaikan Ranperda & Ranperkada Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Untuk Dievaluasi Tepat Waktu	%	100	100
6	2	4	Persentase Serapan Belanja Daerah	%	95	96
6	2	5	Persentase Penyampaian Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Yang Tepat Waktu	%	100	100
6	2	6	Persentase keterpenuhan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan kinerja tepat waktu dibidang pendapatan PAD	%	100	100
6	2	7	Persentase Tindak Lanjut Rencana Aksi Manajemen Aset Daerah	%	91	92
6	2	8	Persentase Tanah Pemprov Yang Sudah Bersertifikat	%	57	58
6	2	9	Persentasi Peningkatan PAD	%	5	5
6	3		**KEPEGAWAIAN SERTA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**			
6	3	1	Persentase pemenuhan kebutuhan pegawai ASN;	%	63	65
6	3	2	Persentase ASN yang menduduki jabatan struktural dan fungsional berbasis talenta;	%	90	100
6	3	3	Persentase ASN berkinerja baik dan sangat baik	%	93	95
6	4		**PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**			
6	4	1	Cakupan SDM Aparatur yang Lulus Diklat Kompetensi Managerial, Kompetensi Diklat Fungsional, Kompetensi Diklat Sosial Kultural	%	100	100
6	5		**PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**			
6	5	1	Persentase Perangkat Daerah yang mendapatkan penghargaan inovasi daerah (Prioritas)	%	3	3
6	6		**PENGELOLAAN PENGHUBUNG**			
6	6	1	Persentase Pelayanan tamu daerah	%	100	100
6	6	2	Persentase Peningkatan Promosi dan Kerjasama Daerah	%	100	100
7			**PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN**			
7	1		**INSPEKTORAT DAERAH**			

NO.			ASPEK/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Asumsi Capaian Tahun 2022	Target Tahun 2023
7	1	1	Persentase Penyelesaian Tindak lanjut Perangkat Daerah terhadap Hasil Pemeriksaan APIP	%	75,4	79,50
7	1	2	Persentase Penyelesaian Tindak lanjut Hasil Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/ Kota	%	71,04	72,50
7	1	3	Persentase OPD yang hasil Nilai SAKIPnya meningkat	%	100	100
7	1	4	Presentase kebijakan pengawasan pemerintah yang diakomodir menjadi kebijakan pengawasan daerah	%	100	100
7	1	5	Persentase pengaduan masyarakat terhadap OPD yang ditindaklanjuti	%	100	100
7	1	6	Persentase pengaduan masyarakat terhadap pemerintah Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti	%	100	100
8			**PEMERINTAHAN UMUM**			
8	1		**KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**			
8	1	1	Persentase keikutsertaan masyarakat dalam bela negara	%	20	20
8	1	2	Persentase Tingkat partisipasi pemilih dalam pemilu	%	81,89	82,01
8	1	3	Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang memenuhi 4 konsensus kebangsaaan	%	20	20
8	1	4	Persentase Penurunan Penyalahgunaan Narkoba (Prioritas)	%	20	40
8	1	5	Persentase Wilayah Sulsel Berpotensi Konflik Agama yang ditangani	%	100	100
8	1	6	Persentase Penurunan jumlah konflik di lingkungan masyarakat	%	20 % (48 kasus)	10 % (40 kasus)
9	1		**ASPEK DAYA SAING DAERAH**			
9	1		**FOKUS KEMAMPUAN EKONOMI**			
9	1	1	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Perkapita	Juta Rp	36,31	38,40
9	1	2	Nilai Tukar Petani	Ribu Rp	11.613	11.841
9	1	3	Persentase Pengeluaran Konsumsi Non Pangan Perkapita	Poin	19,97	21,09
9	1	4	Produktivitas total daerah	Rp/Angk atan Kerja	86.643.579	90.557.327
9	1	5	Persentase desa berstatus swasembada terhadap total desa	%	288,6	300,14
9	1	6	Ekspor + Impor terhadap PDB (indikator keterbukaan ekonomi)	%	64,76	71,48

7.4. Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Keterbatasan sumberdaya yang dimiliki daerah, maka yang perlu didorong dan diutamakan adalah penerapan SPM sebagai pelaksanaan urusan wajib sekaligus perwujudan penyediaan pelayanan publik yang bersifat dasar. Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 65 tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) sebagai acuan penyusunan SPM oleh Kementerian/Lembaga dan penerapannya oleh Pemerintahan Daerah. Hingga kuartal ketiga tahun 2011 telah ditetapkan 14 SPM oleh Kementerian/Lembaga.

Salah satu isu utama penerapan SPM di daerah adalah terbatasnya kapasitas pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pelayanan dasar dan belum dituangkannya SPM dalam proses perencanaan dan penganggaran. Pengintegrasian SPM dalam perencanaan dan penganggaran akan memastikan prioritas dan komitmen pemda dalam mengalokasikan belanja langsung terutama untuk pelayanan dasar. Untuk membantu pengintegrasian SPM di daerah, maka perlu disusun sebuah buku panduan yang dapat digunakan sebagai acuan bagi pemerintah daerah berdasarkan berbagai peraturan yang terkait dengan perencanaan dan penganggaran daerah.

Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal. SPM ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal kemudian lebih teknis dijelaskan dalam Permendagri Nomor 100 Tahun 2018 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal yang diterapkan berdasarkan prinsip kesesuaian kewenangan, ketersediaan, keterjangkauan, kesinambungan, keterukuran, dan ketepatan sasaran. Mekanisme penerapan SPM tidak lagi ditentukan berdasarkan indikator SPM dan batas waktu pencapaian tetapi mengutamakan penerapan SPM dengan berdasarkan: (i) pengumpulan data secara empiris dengan tetap mengacu secara normatif sesuai standar teknis; (ii) perhitungan kebutuhan pemenuhan pelayanan dasar; (iii) penyusunan rencana pemenuhan pelayanan dasar; dan (iv) pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar yang kesemuanya itu dilaksanakan oleh pemerintah daerah.

Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar terdiri atas:

1. Pendidikan
2. Kesehatan
3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
5. Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
6. Sosial

Pengintegrasian rencana pencapaian SPM dalam dokumen perencanaan dan penganggaran;

Pemerintah daerah menyusun rencana pencapaian SPM yang dituangkan dalam RPJMD dan dijabarkan dalam target tahunan pencapaian SPM. Rencana pencapaian SPM menjadi salah satu faktor dalam menyusun Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran (PPA).

a. Mekanisme pembelanjaan penerapan SPM;

Nota kesepakatan tentang KUA dan PPA yang disepakati bersama antara kepala daerah dengan pimpinan DPRD wajib memuat target pencapaian dan

penerapan SPM. Selanjutnya, nota kesepakatan tentang KUA dan PPA menjadi dasar penyusunan RKA-SKPD dengan menggunakan pendekatan kerangka pengeluaran jangka menengah daerah, penganggaran terpadu dan penganggaran tahunan berdasarkan tingkat prestasi kerja yang mengacu pada rencana pencapaian dan penerapan SPM.

Penyusunan RKA-SKPD program dan kegiatan yang terkait dengan pencapaian SPM mengacu pada indikator kinerja, capaian atau target kinerja, Analisis Standar Belanja (ASB), dan satuan harga. RKA-SKPD yang disahkan oleh kepala SKPD menggambarkan secara rinci dan jelas progam dan kegiatan dalam rangka pencapaian dan penerapan SPM.

Pendanaan yang berkaitan dengan rencana pencapaian dan penerapan SPM yang merupakan tugas dan fungsi pemerintah dibebankan pada APBN. Sedangkan pendanaan yang berkaitan dengan rencana pencapaian dan penerapan SPM yang merupakan tugas dan fungsi pemerintah daerah dibebankan pada APBD.

Penetapan target indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) Tahun 2023 disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel VII.4.
Penetapan Target Indikator SPM
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023 (Persen)
(Permendagri No 100 Tahun 2018)

No.	Bidang Urusan/Jenis Pelayanan/Indikator	Target Nasional	Capaian		Rencana Capaian Tahun 2022	Target Tahun 2023
			Tahun 2020	Tahun 2021		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
1	**PENDIDIKAN**					
1.1	**Pendidikan Menengah**					
1	warga negara usia 16 – 18 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah	100	76,62	100	100	100
1.2	**Pendidikan Khusus**					
2	warga negara usia 4 – 18 tahun yang termasuk dalam penduduk dissabilitas yang berpartisipasi dalam pendidikan Khusus	100	81	100	100	100
2	**KESEHATAN**					
2.1	**Pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi**					
3	Jumlah Warga Negara yang terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/ atau berpotensi bencana provinsi yang mendapatkan layanan kesehatan	100	100	100	100	100
2.2	**Pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa provinsi**					

No.	Bidang Urusan/Jenis Pelayanan/Indikator	Target Nasional	Capaian		Rencana Capaian Tahun 2022	Target Tahun 2023
			Tahun 2020	Tahun 2021		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
4	Jumlah Warga Negara pada kondisi kejadian luar biasa provinsi yang mendapatkan layanan kesehatan	100	100	100	100	100
3	**PEKERJAAN UMUM**					
3.1	**Pemenuhan kebutuhan air minum curah lintas kabupaten/kota**					
5	Persentase Warga Negara yang memperoleh kebutuhan air minum curah lintas kabupaten/kota	100	0	100	100	100
3.2	**Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik regional lintas kabupaten/kota**					
6	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik regional lintas kabupaten/kota	100	0	100	100	100
4	**PERUMAHAN RAKYAT**					
4.1	**Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana provinsi**					
7	Jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	100	100	100	100	100
4.2	**Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah provinsi**					
8	Jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah provinsi yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	100	0	100	100	100
5	**KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PELINDUNGAN MASYARAKAT**					
5.1	**Pelayanan ketentraman dan ketertiban Umum Provinsi**					
9	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkada di Provinsi	100	100	100	100	100
6	**SOSIAL**					
6.1	**Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di dalam panti**					
10	Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas telantar yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di dalam panti	100	35,12	100	100	100

No.	Bidang Urusan/Jenis Pelayanan/Indikator	Target Nasional	Capaian		Rencana Capaian Tahun 2022	Target Tahun 2023
			Tahun 2020	Tahun 2021		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
6.2	**Rehabilitasi sosial dasar anak telantar di dalam panti**					
11	Jumlah Warga Negara anak telantar yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar anak terlantar	100	38,88	100	100	100
6.3	**Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia telantar di dalam panti**					
12	Jumlah Warga Negara lanjut usia telantar yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar lanjut usia di dalam panti	100	100	100	100	100
6.4	**Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di dalam panti**					
13	Jumlah Warga Negara/gelandangan dan Pengemis yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar tuna sosial di dalam panti	100	100	100	100	100
6.5	**Perlindungan dan jaminansosial pada saat dan setelah tanggap Darurat bencana bagi korban bencana provinsi**					
14	Jumlah Warga Negara Korban bencana provinsi yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana provinsi	100	15,63	100	100	100

Sumber : OPD Pengelola SPM Prov. Sulsel, Tahun 2021, diolah
*Untuk Urusan Pekerjaan Umum Tahun 2019-2020: *) Belum ada layanan SPAM/IPLT Regional*
**) SPAM Mamminasata Belum Selesai*

7.5. Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan / Sustainable Development Goals (TPB/SDGs)

Sebagai pelaksanaan amanat Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang mengamanatkan kepada pemerintah daerah untuk mengintegrasikan indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Suistainable Development Goals (TPB/SDGs) kedalam dokumen perencanaan pembangunan daerah yang merupakan dokumen yang memuat tujuan dan sasaran global. TPB/SDGs bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, menjaga kualitas lingkungan hidup serta pembangunan yang inklusif dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas kehidupan dari satu generasi ke generasi berikutnya. TPB/SDGs merupakan komitmen global dan nasional dalam upaya untuk menyejahterakan

masyarakat masyarakat mencakup 17 tujuan yang dapat dikelompokkan dalam empat pilar, yakni pembangunan manusia, pembangunan ekonomi,pembangunan lingkungan hidup, dan governance.

Pilar pembangunan manusia lekat dengan penyediaan pelayanan dasar sehingga tujuan SDGs yang dapat dikelompokkan dalam beberapa sektor. Sektor-sektor itu adalah menjamin kehidupan yang sehat, memastikan pemerataan kualitas pendidikan dan pendidikan inklusif serta pembelajaran seumur hidup untuk semua, mengakhiri kemiskinan dan mencapai kesetaraan gender, serta memberdayakan semua perempuan dan anak perempuan.

Tujuan SDGs pada pilar pembangunan lingkungan hidup antara lain memastikan ketahanan pangan dan gizi yang baik, mencapai akses universal ke air dan sanitasi, menjamin energi yang berkelanjutan, memastikan pola konsumsi dan produksi berkelanjutan, mengambil tindakan untuk memerangi perubahan iklim dan dampaknya, mengelola aset sumber daya alam secara berkelanjutan, mengelola ekosistem yang berkelanjutan dan menghentikan hilangnya keanekaragaman hayati.

Sedangkan tujuan SDGs di pilar ekonomi yakni mempromosikan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan pekerjaan yang layak untuk semua, membangun infrstruktur, mempromosikan industrialisasi yang inklusif dan berkesinambungan dan mendorong inovasi, membuat kota-kota dan pemukiman manusia inklusif, aman, ulet, dan berkelanjutan.

Dalam bidang governance, tujuan SDGs antara lain mengurangi kesenjangan dalam dan antarnegara, memastikan masyarakat stabil dan damai, dan memperkuat cara pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan.

Upaya pencapaian target TPB/SDGs menjadi prioritas pembangunan nasional, yang memerlukan sinergi kebijakan perencanaan di tingkat Provinsi. Penetapan target tahun 2023 indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Suistainable Development Goals (TPB/SDGs) disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel VII.5.
Penetapan Target Indikator TPB/SDGs
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Target 2023	OPD Penang. Jawab
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
TUJUAN 1 TANPA KEMISKINAN					
TARGET 1.2 Pada tahun 2030, mengurangi setidaknya setengah proporsi laki-laki, perempuan dan anak-anak dari semua usia, yang hidup dalam kemiskinan di semua dimensi, sesuai dengan definisi nasional.					
1.2.1*	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur	RPJMD	%	9,16	Bappelitbangda
TARGET 1.3 Menerapkan secara nasional sistem dan upaya perlindungan sosial yang tepat bagi semua, termasuk kelompok yang paling miskin, dan pada tahun 2030 mencapai cakupan substansial bagi kelompok miskin dan rentan.					
1.3.1.(a)	Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan.	Dinas kesehatan	%	100	Dinas kesehatan
1.3.1(b)	Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang	Tenaga kerja & Transmigrasi	%	71,58	Dinas Tenaga kerja & Transmigrasi

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Target 2023	OPD Penang. Jawab
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
	Ketenagakerjaan.				
1.3.1.(c)	Persentase penyandang disabilitas yang miskin dan rentan yang terpenuhi hak dasarnya dan inklusivitas.	Dinas sosial	%	100	Dinas sosial
1.3.1.(d)	Jumlah rumah tangga yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat/Program Keluarga Harapan.	Dinas sosial	Jiwa	366,129	Dinas sosial
TARGET 1.4 Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro.					
1.4.1.(a)	Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan	Dinas kesehatan	%	93	Dinas kesehatan
1.4.1.(b)	Persentase anak umur 12-23 bulan yang menerima imunisasi dasar lengkap (kelompok penduduk 40% terbawah)	Dinas kesehatan	%	95	Dinas kesehatan
1.4.1.(c)	Prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin.	Dinas kesehatan	%	74,17	Dinas kesehatan
1.4.1.(d)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan.	Dinas perumahan,kawasan permukiman dan pertahanan	%	100	Dinas perumahan,kawasan permukiman dan pertahanan
1.4.1.(e)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan.	Dinas perumahan,kawasan permukiman dan pertahanan	%	87,64	Dinas perumahan,kawasan permukiman dan pertahanan
1.4.1.(f)	Persentase rumah tangga kumuh perkotaan (kelompok penduduk 40% terbawah)	Dinas perumahan,kawasan permukiman dan pertahanan	%	PM	Dinas perumahan,kawasan permukiman dan pertahanan
1.4.1.(i)	Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/MA/sederajat.	Dinas pendidikan	%	65	Dinas pendidikan
1.4.1.(j)	Persentase penduduk umur 0-17 tahun dengan kepemilikan akta kelahiran.	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	%	90,10	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Target 2023	OPD Penang. Jawab
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
1.4.1.(k)	Persentase rumah tangga miskin dan rentan yang sumber penerangan utamanya listrik baik dari PLN dan bukan PLN. (kelompok penduduk 40% terbawah)	BPS	%	PM	Dinas ESDM
TARGET 1.5 Pada tahun 2030, membangun ketahanan masyarakat miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, dan mengurangi kerentanan mereka terhadap kejadian ekstrim terkait iklim dan guncangan ekonomi, sosial, lingkungan, dan bencana.					
1.5.1*	Jumlah korban meninggal, dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.				
	Jumlah korban meninggal terkena dampak bencana per 100.000 orang	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Jiwa	PM	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	Jumlah korban hilang terkena dampak bencana per 100.000 orang	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Jiwa	PM	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	Jumlah korban terluka terkena dampak bencana per 100.000 orang	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Jiwa	PM	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	Jumlah korban mengungsi terkena dampak bencana per 100.000 orang	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Jiwa	PM	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1.5.1.(a)	Jumlah lokasi penguatan pengurangan risiko bencana daerah	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Lokasi	24	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1.5.1.(b)	Pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana sosial	Dinas sosial	%	100	Dinas sosial
1.5.1.(c)	Pendampingan psikososial korban bencana sosial	Dinas sosial	Jiwa	PM	Dinas sosial
1.5.1.(e)	Indeks risiko bencana pada pusat-pusat pertumbuhan yang berisiko tinggi.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Indeks	152,55	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1.5.2.(a)	Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Rupiah	PM	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1.5.3*	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Dokumen	1	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
MATRIKS BAGIAN I TARGET PENCAPAIAN INDIKATOR TUJUAN 2					
TUJUAN 2 : TANPA KELAPARAN					
TARGET 2.1 Pada tahun 2030, menghilangkan kelaparan dan menjamin akses bagi semua orang, khususnya orang miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, termasuk bayi, terhadap makanan yang aman, bergizi, dan cukup sepanjang tahun.					

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Target 2023	OPD Penang. Jawab
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
2.1.1*	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment).	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura	%	6,22	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
2.1.1.(a)	Prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita	Dinas kesehatan	%	17	Dinas kesehatan
2.1.2*	Prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat, berdasarkan pada Skala Pengalaman Kerawanan Pangan.	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura	%	3,61	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
2.1.2.(a)	Proporsi penduduk dengan asupan kalori minimum di bawah 1400 kkal/kapita/hari.	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura	%	7,32	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
TARGET 2.2 Pada tahun 2030, menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi, termasuk pada tahun 2025 mencapai target yang disepakati secara internasional untuk anak pendek dan kurus di bawah usia 5 tahun, dan memenuhi kebutuhan gizi remaja perempuan, ibu hamil dan menyusui, serta manula.					
2.2.1*	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita.	Dinas kesehatan	%	18,59	Dinas kesehatan
2.2.1.(a)	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah dua tahun/baduta.	Dinas kesehatan	%	31,00	Dinas kesehatan
2.2.2*	Prevalensi malnutrisi (berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun, berdasarkan tipe.	Dinas kesehatan	%	7,25	Dinas kesehatan
2.2.2.(a)	Prevalensi anemia pada ibu hamil.	Dinas kesehatan	%	26,00	Dinas kesehatan
2.2.2.(b)	Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapatkan ASI eksklusif.	Dinas kesehatan	%	85	Dinas kesehatan
2.2.2.(c)	Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH) mencapai; dan tingkat konsumsi ikan.	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura	%	90,3	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
	Konsumsi ikan	Dinas Kelautan dan Perikanan	%	61,72	Dinas Kelautan dan Perikanan
MATRIKS BAGIAN I TARGET PENCAPAIAN INDIKATOR TUJUAN 3					
TUJUAN 3 : KEHIDUPAN SEHAT DAN SEJAHTERAH					
TARGET 3.1 Pada tahun 2030, mengurangi rasio angka kematian ibu hingga kurang dari 70 per 100.000 kelahiran hidup.					

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Target 2023	OPD Penang. Jawab
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
3.1.2*	Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih	Dinas kesehatan	%	98	Dinas kesehatan
3.1.1*	Angka Kematian Ibu (AKI).	Dinas kesehatan	kematian per 100.000 kelahiran hidup	90/100.000 KH	Dinas kesehatan
3.1.2.(a)	Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan	Dinas kesehatan	%	93	Dinas kesehatan
TARGET 3.2 Pada tahun 2030, mengakhiri kematian bayi baru lahir dan balita yang dapat dicegah, dengan seluruh negara berusaha menurunkan Angka Kematian Neonatal setidaknya hingga 12 per 1000 KH (Kelahiran Hidup) dan Angka Kematian Balita 25 per 1000.					
3.2.1*	Angka Kematian Balita (AKBa) per 1000 kelahiran hidup.	Dinas kesehatan	kematian per 1000 kelahiran hidup	4/1.000KH	Dinas kesehatan
3.2.2*	Angka Kematian Neonatal (AKN) per 1000 kelahiran hidup.	Dinas kesehatan	kematian per 1000 kelahiran hidup	3/1.000KH	Dinas kesehatan
3.2.2.(a)	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup.	Dinas kesehatan	kematian per 1000 kelahiran hidup	4/1.000KH	Dinas kesehatan
3.2.2.(b)	Persentase kabupaten/kota yang mencapai 80% imunisasi dasar lengkap pada bayi.	Dinas kesehatan	%	96	Dinas kesehatan
TARGET 3.3 Pada tahun 2030, mengakhiri epidemi AIDS, tuberkulosis, malaria, dan penyakit tropis yang terabaikan, dan memerangi hepatitis, penyakit bersumber air, serta penyakit menular lainnya.					
3.3.3*	Kejadian Malaria per 1000 orang	Dinas kesehatan	Per 1.000 Penduduk	< 1/1000 Penduduk	Dinas kesehatan
3.3.1.(a)	Prevalensi HIV pada populasi dewasa.	Dinas kesehatan	%	< 0,5%	Dinas kesehatan
3.3.2.(a)	Insiden Tuberkulosis (ITB) per 100.000 penduduk.	Dinas kesehatan	Per 100.000 penduduk (Capaian dihitung hanya pada data penemuan di faskes/ DOTS)	222/100.000 Penduduk	Dinas kesehatan

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Target 2023	OPD Penang. Jawab
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
3.3.3.(a)	Jumlah kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria	Dinas kesehatan	Kabupaten	6	Dinas kesehatan
3.3.4.(a)	Persentase kabupaten/kota yang melakukan deteksi dini untuk infeksi Hepatitis B.	Dinas kesehatan	%	100	Dinas kesehatan
3.3.5*	Jumlah orang yang memerlukan intervensi terhadap penyakit tropis yang terabaikan (Filariasis dan Kusta).	Dinas kesehatan	Filariasis : Orang	81	Dinas kesehatan
			Kusta : Orang	930	
3.3.5.(a)	Jumlah Provinsi / Kab / Kota dengan eliminasi Kusta	Dinas kesehatan	Kab/ Kota	24	Dinas kesehatan
3.3.5.(b)	Jumlah kabupaten/kota dengan eliminasi filariasis (berhasil lolos dalam survei penilaian transmisi tahap I).	Dinas kesehatan	%	4	Dinas kesehatan
TARGET 3.4 Pada tahun 2030, mengurangi hingga sepertiga angka kematian dini akibat penyakit tidak menular, melalui pencegahan dan pengobatan, serta meningkatkan kesehatan mental dan kesejahteraan.					
3.4.1.(a)	Persentase merokok pada penduduk umur ≤18 tahun.	Dinas kesehatan	%	7,02	Dinas kesehatan
3.4.1.(b)	Prevalensi tekanan darah tinggi.	Dinas kesehatan	%	17,58	Dinas kesehatan
3.4.1.(c)	Prevalensi obesitas pada penduduk umur ≥18 tahun	Dinas kesehatan	%	10,11	Dinas kesehatan
3.4.2.(a)	Jumlah kabupaten/kota yang memiliki puskesmas yang menyelenggarakan upaya kesehatan jiwa	Dinas kesehatan	Kab/ Kota	24	Dinas kesehatan
TARGET 3.5 Memperkuat pencegahan dan pengobatan penyalahgunaan zat, termasuk penyalahgunaan narkotika dan penggunaan alkohol yang membahayakan					
3.5.1.(e)	Prevalensi penyalahgunaan narkoba	BNN	%	1,90%	Badan Kesatuan Bangsa dan politik
TARGET 3.7 Pada tahun 2030, menjamin akses universal terhadap layanan kesehatan seksual dan reproduksi, termasuk keluarga berencana, informasi dan pendidikan, dan integrasi kesehatan reproduksi ke dalam strategi dan program nasional.					
3.7.1.(a)	Angka prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin.	Dinas kesehatan	%	74,17	Dinas kesehatan
3.7.1.(b)	Angka penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) cara modern.	Dinas kesehatan	%	21,50	Dinas kesehatan

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Target 2023	OPD Penang. Jawab
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
3.7.2*	Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR)	DP3A	kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun	14	DP3A
3.7.2.(a)	Total Fertility Rate (TFR)	DP3A	%	2,10	DP3A
TARGET 3.8 Mencapai cakupan kesehatan universal, termasuk perlindungan risiko keuangan, akses terhadap pelayanan kesehatan dasar yang baik, dan akses terhadap obat- obatan dan vaksin dasar yang aman, efektif, berkualitas, dan terjangkau bagi semua orang.					
3.8.1(a)	Unmet need pelayanan kesehatan	BPS	%	PM	Dinas kesehatan
3.8.2*	Jumlah penduduk yang dicakup asuransi kesehatan atau sistem kesehatan masyarakat per 1000 penduduk	Dinas kesehatan	Jiwa	1.000 Jiwa	Dinas kesehatan
3.8.2.(a)	Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).	Dinas kesehatan	%	100 %	Dinas kesehatan
TARGET 3.a. Memperkuat pelaksanaan the Framework Convention on Tobacco Control WHO di seluruh negara sebagai langkah yang tepat					
3.a.1*	Persentase merokok pada penduduk umur ≥15 tahun	BPS	%	PM	Dinas kesehatan
TARGET 3.b. Mendukung penelitian dan pengembangan vaksin dan obat penyakit menular dan tidak menular yang terutama berpengaruh terhadap negara berkembang, menyediakan akses terhadap obat dan vaksin dasar yang terjangkau, sesuai the Doha Declaration tentang the TRIPS Agreement and Public Health, yang menegaskan hak negara berkembang untuk menggunakan secara penuh ketentuan dalam Kesepakatan atas Aspek-Aspek Perdagangan dari Hak Kekayaan Intelektual terkait keleluasaan untuk melindungi kesehatan masyarakat, dan khususnya, menyediakan akses obat bagi semua					
3.b.1.(a)	Persentase ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas	Dinas kesehatan	%	95%	Dinas kesehatan
TARGET 3.c. Meningkatkan secara signifikan pembiayaan kesehatan dan rekrutmen, pengembangan, pelatihan, dan retensi tenaga kesehatan di negara berkembang, khususnya negara kurang berkembang, dan negara berkembang pulau kecil.					
3.c.1*	Rasio Tenaga Kesehatan	Dinas kesehatan	Tenaga Kesehatan/100.000 penduduk	23/100.000 penduduk	Dinas kesehatan
MATRIKS BAGIAN I TARGET PENCAPAIAN INDIKATOR TUJUAN 4					
Tujuan 4. Pendidikan Berkualitas					
Target 4.1 Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah tanpa dipungut biaya, setara, dan berkualitas, yang mengarah pada capaian pembelajaran yang relevan dan efektif.					
4.1.1.(c)	Persentase SMA/MA berakreditasi minimal B	Dinas Pendidikan	%	62,45	Dinas Pendidikan
4.1.1.(f)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/sederajat	Dinas Pendidikan	%	83,65	Dinas Pendidikan
4.1.1.(g)	Rata-rata lama sekolah penduduk umur ≥15 tahun.	Dinas Pendidikan	Tahun	8,44	Dinas Pendidikan

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Target 2023	OPD Penang. Jawab
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
TARGET 4.3 Pada tahun 2030, menjamin akses yang sama bagi semua perempuan dan laki-laki, terhadap pendidikan teknik, kejuruan dan pendidikan tinggi, termasuk universitas, yang terjangkau dan berkualitas.					
4.3.1.(a)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/sederajat	BPS	%	83,65	Dinas Pendidikan
TARGET 4.4 Pada tahun 2030, meningkatkan secara signifikan jumlah pemuda dan orang dewasa yang memiliki keterampilan yang relevan, termasuk keterampilan teknik dan kejuruan, untuk pekerjaan, pekerjaan yang layak dan kewirausahaan.					
4.4.1*	Proporsi remaja dan dewasa dengan keterampilan teknologi informasi dan komunikasi (TIK).	BPS	% remaja (15-24)	PM	Dinas Pendidikan
			% dewasa (15-59)	PM	Dinas Pendidikan
TARGET 4.5 Pada tahun 2030, menghilangkan disparitas gender dalam pendidikan, dan menjamin akses yang sama untuk semua tingkat pendidikan dan pelatihan kejuruan, bagi masyarakat rentan termasuk penyandang cacat, masyarakat penduduk asli, dan anak-anak dalam kondisi rentan.					
4.5.1*	Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan/laki-laki di (1) SD/MI/sederajat; (2) SMP/MTs/sederajat; (3) SMA/SMK/MA/sederajat; dan Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) perempuan/laki-laki di (4) Perguruan Tinggi.	Dinas Pendidikan	Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan/laki-laki di SMA/SMK/MA/sederajat (%)	91,10	Dinas Pendidikan
TARGET 4.6 Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua remaja dan proporsi kelompok dewasa tertentu, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki kemampuan literasi dan numerasi.					
4.6.1.(a)	Persentase angka melek aksara penduduk umur ≥15 tahun	Dinas Pendidikan	%	96,51	Dinas Pendidikan
4.6.1.(b)	Persentase angka melek aksara penduduk umur 15-24 tahun dan umur 15-59 tahun	BPS	% (umur 15-24 tahun)	PM	Dinas Pendidikan
			% (umur 15-59 tahun)	PM	Dinas Pendidikan
TARGET 4.5 Pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan pasokan guru yang berkualitas, termasuk melalui kerjasama internasional dalam pelatihan guru di negara berkembang, terutama negara kurang berkembang, dan negara berkembang kepulauan kecil.					
4.c.1*	Persentase guru TK, SD, SMP, SMA, SMK, dan PLB yang bersertifikat pendidik	Dinas Pendidikan	%	SD = 60,02	Dinas Pendidikan
			%	SMP = 83,60	Dinas Pendidikan
			%	SMA = 86,29	Dinas Pendidikan
			%	SMK = 85,30	Dinas Pendidikan
			%	SLB =	Dinas

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Target 2023	OPD Penang. Jawab
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
				63,71	Pendidikan
MATRIKS BAGIAN I TARGET PENCAPAIAN INDIKATOR TUJUAN 5					
Tujuan 5 : KESETARAAN GENDER					
TARGET 5.1 Mengakhiri segala bentuk diskriminasi terhadap kaum perempuan dimanapun.					
5.1.1*	Jumlah kebijakan yang responsif gender mendukung pemberdayaan perempuan	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Kebijakan	7	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
TARGET 5.2 Menghapus segala bentuk kekerasan terhadap kaum perempuan di ruang publik dan pribadi, termasuk perdagangan orang dan eksploitasi seksual, serta berbagai jenis eksploitasi lainnya					
5.2.1*	Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan (fisik, seksual, atau emosional) oleh pasangan atau mantan pasangan dalam 12 bulan terakhir	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	%	0,62	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
5.2.1.(a)	Prevalensi kekerasan terhadap anak perempuan	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	%	0,0006	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
5.2.2.(a)	Persentase korban kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	%	95	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
5.2.2*	Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan seksual oleh orang lain selain pasangan dalam 12 bulan terakhir	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	%	0,62	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
TARGET 5.3 Menghapuskan semua praktik berbahaya, seperti perkawinan usia anak, perkawinan dini dan paksa, serta sunat perempuan.					
5.3.1*	Proporsi perempuan umur 20-24 tahun yang berstatus kawin atau berstatus hidup bersama sebelum umur 15 tahun dan sebelum umur 18 tahun	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	% 18 tahun	12,8	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
			% 15 tahun	1,19	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
5.3.1.(a)	Median usia kawin pertama perempuan pernah kawin umur 25-49 tahun	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	%	24	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Target 2023	OPD Penang. Jawab
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
5.3.1.(b)	Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR).	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun	14	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
5.3.1.(c)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/ sederajat	Dinas Pendidikan	%	83,65	Dinas Pendidikan
TARGET 5.5 Menjamin partisipasi penuh dan efektif, dan kesempatan yang sama bagi perempuan untuk memimpin di semua tingkat pengambilan keputusan dalam kehidupan politik, ekonomi, dan masyarakat.					
5.5.1*	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di parlemen tingkat pusat, parlemen daerah dan pemerintah daerah	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	%	16,72	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
5.5.2*	Proporsi perempuan yang berada di posisi managerial	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	%	44,90	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
TARGET 5.6 Menjamin akses universal terhadap kesehatan seksual dan reproduksi, dan hak reproduksi seperti yang telah disepakati sesuai dengan Programme of Action of the International Conference on Population andDevelopment and the Beijing Platform serta dokumen-dokumen hasil reviu dari konferensi-konferensi tersebut.					
5.6.1.(a)	Unmet need KB (Kebutuhan Keluarga Berencana/KB yang tidak terpenuhi).	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	%	13,29	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
5.b.1*	Proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam.	Dinas komunikasi & informatika	%	83	Dinas komunikasi & informatika
MATRIKS BAGIAN I TARGET PENCAPAIAN INDIKATOR TUJUAN 6					
Tujuan 6 : AIR BERSIH DAN SANITASILAYAK					
TARGET 6.1 Pada tahun 2030, mencapai akses universal dan merata terhadap air minum yang aman dan terjangkau bagi semua.					
6.1.1.(a)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak	Dinas perumahan,kawasan permukiman dan pertahanan	%	89,62	Dinas perumahan,kawasan permukiman dan pertahanan
6.1.1.(b)	Kapasitas prasarana air baku untuk melayani rumah tangga, perkotaan dan industri, serta penyediaan air baku untuk pulau-pulau.	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	m3/detik	13.370	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
6.1.1.(C)	Proporsi populasi yang memiliki akses layanan sumber air minum aman dan berkelanjutan	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	**%**	28,11	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
TARGET 6.2 Pada tahun 2030, mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua, dan menghentikan praktik buang air besar di tempat terbuka, memberikan perhatian khusus pada kebutuhan kaum perempuan, serta kelompok masyarakat rentan.					

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Target 2023	OPD Penang. Jawab
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
6.2.1.(a)	Proporsi populasi yang memiliki fasilitas cuci tangan dengan sabun dan air	BPS	%	PM	Dinas perumahan,kawasan permukiman dan pertahanan
6.2.1.(b)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak.	Dinas perumahan,kawasan permukiman dan pertahanan	%	93,55	Dinas perumahan,kawasan permukiman dan pertahanan
6.2.1.(c)	Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM).	Dinas kesehatan	Desa / Kelurahan	3,047	Dinas kesehatan
6.2.1.(d)	Jumlah desa/kelurahan yang Open Defecation Free (ODF)/ Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS).	Dinas kesehatan	Desa / Kelurahan	2.500	Dinas kesehatan
6.2.1.(e)	Jumlah kabupaten/kota yang terbangun infrastruktur air limbah dengan sistem terpusat skala kota, kawasan dan komunal.	Dinas perumahan,kawasan permukiman dan pertahanan	Kab/ Kota	24	Dinas perumahan,kawasan permukiman dan pertahanan
TARGERT 6.3 Pada tahun 2030, meningkatkan kualitas air dengan mengurangi polusi, menghilangkan pembuangan, dan meminimalkan pelepasan material dan bahan kimia berbahaya, mengurangi setengah proporsi air limbah yang tidak diolah, dan secara signifikan meningkatkan daur ulang, serta penggunaan kembali barang daur ulang yang aman secara global.					
6.3.1.(a)	Jumlah kabupaten/kota yang ditingkatkan kualitas pengelolaan lumpur tinja perkotaan dan dilakukan pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT).	Dinas perumahan,kawasan permukiman dan pertahanan	Kab/ Kota	21	Dinas perumahan,kawasan permukiman dan pertahanan
6.3.2.(a)	kualitas air danau	Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup	%	6,66	Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup
6.3.2.(b)	Kualitas air sungai sebagai sumber air baku	Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup	%	72,63	Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup
TARGET 6.5 Pada tahun 2030, menerapkan pengelolaan sumber daya air terpadu di semua tingkatan, termasuk melalui kerjasama lintas batas yang tepat.					
6.5.1.(a)	Jumlah Rencana Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Terpadu (RPDAST) yang diinternalisasi ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).	Dinas kehutanan	RPDAST	4 RPDAST	Dinas kehutanan

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Target 2023	OPD Penang. Jawab
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
6.5.1.(c)	Jumlah jaringan informasi sumber daya air yang dibentuk.	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	jaringan informasi	21	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
6.5.1.(e)	Luas pengembangan hutan serta peningkatan hasil hutan bukan kayu (HHBK) untuk pemulihan kawasan DAS.	Dinas kehutanan	Ha	120.425, 79	Dinas kehutanan
6.5.1.(f)	Jumlah wilayah sungai yang memiliki partisipasi masyarakat dalam pengelolaan daerah tangkapan sungai dan danau.	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	wilayah sungai	4	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
6.5.1.(g)	Kegiatan penataan kelembagaan sumber daya air.	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	lembaga	5	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
TARGET 6.6 Pada tahun 2030, melindungi dan merestorasi ekosistem terkait sumber daya air, termasuk pegunungan, hutan, lahan basah, sungai, air tanah, dan danau.					
6.6.1.(d)	Luas lahan kritis dalam Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) yang direhabilitasi.	Dinas kehutanan	Ha	55.508	Dinas kehutanan
6.6.1.(e)	Jumlah Daerah Aliran Sungai (DAS) prioritas yang dilindungi mata airnya dan dipulihkan kesehatannya.	Dinas kehutanan	DAS	2	Dinas kehutanan
MATRIKS BAGIAN I TARGET PENCAPAIAN INDIKATOR TUJUAN 7					
TUJUAN 7 : ENERGI BERSIH DAN TERJANGKAU					
TARGET 7.1 Pada tahun 2030, menjamin akses universal layanan energi yang terjangkau, andal dan modern.					
7.1.1*	Rasio elektrifikasi	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	%	99	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
7.1.1.(a)	Konsumsi listrik per kapita	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	KWh	1.148,80	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
7.1.2.(b)	Rasio penggunaan gas rumah tangga.	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	%	95	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
7.2.1*	Bauran energi terbarukan	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	%	23,66	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
7.3.1*	Intensitas energi primer	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	SBM (setara barrel minyak)	13,80	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
TUJUAN 8 : PEKERJAAN LAYAK DAN PERTUMBUHAN EKONOMI					
TARGET 8.1 Mempertahankan pertumbuhan ekonomi per kapita sesuai dengan kondisi nasional dan, khususnya, setidaknya 7 persen pertumbuhan produk domestik bruto per tahun di negara kurang berkembang.					
8.1.1*	Laju pertumbuhan PDRB per kapita	RPJMD	**%**	PM	Bappelitbangda
8.1.1.(a)	PDRB per kapita	RPJMD	Juta Rupiah	66,01	Bappelitbangda

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Target 2023	OPD Penang. Jawab
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
TARGET 8.3 Menggalakkan kebijakan pembangunan yang mendukung kegiatan produktif, penciptaan lapangan kerja layak, kewirausahaan, kreativitas dan inovasi, dan mendorong formalisasi dan pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah, termasuk melalui akses terhadap jasa keuangan.					
8.3.1*	Proporsi lapangan kerja informal sektor non-pertanian, berdasarkan jenis kelamin.	Dinas tenaga kerja dan transmigrasi	%	45,90	Dinas tenaga kerja dan transmigrasi
8.3.1.(a)	Persentase tenaga kerja formal.	Dinas tenaga kerja dan transmigrasi	%	41,61	Dinas tenaga kerja dan transmigrasi
8.3.1.(b)	Persentase tenaga kerja informal sektor pertanian.	Dinas tenaga kerja dan transmigrasi	%	83,23	Dinas tenaga kerja dan transmigrasi
8.3.1.(c)	Persentase akses UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) ke layanan keuangan.	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah	%	30,50	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah
TARGET 8.5 Pada tahun 2030, mencapai pekerjaan tetap dan produktif dan pekerjaan yang layak bagi semua perempuan dan laki-laki, termasuk bagi pemuda dan penyandang difabilitas, dan upah yang sama untuk pekerjaan yang sama nilainya.					
8.5.1*	Upah rata-rata per jam pekerja (Rupiah/Jam)	BPS	%	PM	Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi
8.5.2*	Tingkat pengangguran terbuka berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur	RPJMD	%	6,27	Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi
8.5.2(a)	Tingkat setengah pengangguran	BPS	%	PM	Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi
TARGET 8.6 Pada tahun 2030, secara substansial mengurangi proporsi usia muda yang tidak bekerja, tidak menempuh pendidikan atau pelatihan.					
8.6.1*	Persentase usia muda (15-24 tahun) yang sedang tidak sekolah, bekerja atau mengikuti pelatihan (NEET).	Dinas tenaga kerja dan transmigrasi	%	40,59	Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi
TARGET 8.9 Pada tahun 2030, menyusun dan melaksanakan kebijakan untuk mempromosikan pariwisata berkelanjutan yang menciptakan lapangan kerja dan mempromosikan budaya dan produk lokal.					
8.9.1*	Proporsi kontribusi pariwisata terhadap PDRB	Dinas Kebudayaan dan Kepariwisataan	%	1,03	Dinas Kebudayaan dan Kepariwisataan
8.9.1.(a)	Jumlah wisatawan mancanegara	Dinas Kebudayaan dan Kepariwisataan	Jiwa	100.000	Dinas Kebudayaan dan Kepariwisataan
8.9.1.(b)	Jumlah kunjungan wisatawan nusantara	Dinas Kebudayaan dan Kepariwisataan	Jiwa	2.125.000	Dinas Kebudayaan dan Kepariwisataan
8.9.2*	Jumlah pekerja pada industri pariwisata dalam proporsi terhadap total pekerja.	Dinas tenaga kerja dan transmigrasi	%	18,33	Dinas tenaga kerja dan transmigrasi

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Target 2023	OPD Penang. Jawab
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
TARGET 8.10 Memperkuat kapasitas lembaga keuangan domestik untuk mendorong dan memperluas akses terhadap perbankan, asuransi dan jasa keuangan bagi semua.					
8.10.1.(b)	Proporsi kredit UMKM terhadap total kredit.	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah	%	32	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah
TUJUAN 9 MATRIKS BAGIAN I TARGET PENCAPAIAN INDIKATOR					
TARGET 9.1 Mengembangkan infrastruktur yang berkualitas, andal, berkelanjutan dan tangguh, termasuk infrastruktur regional dan lintas batas, untuk mendukung pembangunan ekonomi dan kesejahteraan manusia, dengan fokus pada akses yang terjangkau dan merata bagi semua.					
9.1.1.(c)	Panjang jalur kereta api	Dinas perhubungan	Km	91,92	Dinas perhubungan
9.1.2.(b)	Jumlah dermaga penyeberangan	Dinas perhubungan	Unit	5,30	Dinas perhubungan
TARGET 9.2 Mempromosikan industrialisasi inklusif dan berkelanjutan, dan pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan proporsi industri dalam lapangan kerja dan produk domestik bruto, sejalan dengan kondisi nasional, dan meningkatkan dua kali lipat proporsinya di negara kurang berkembang.					
9.2.1*	Proporsi nilai tambah sektor industri manufaktur terhadap PDB dan per kapita	Dinas perindustrian	**%**	4,15	Dinas perindustrian
9.2.1.(a)	Laju pertumbuhan PDB industri manufaktur	Dinas perindustrian	**%**	5,30	Dinas perindustrian
9.2.2*	Proporsi tenaga kerja pada sektor industri manufaktur.	Dinas tenaga kerja dan transmigrasi	**%**	9,33	Dinas tenaga kerja dan transmigrasi
TARGET 9.3 Meningkatkan akses industri dan perusahaan skala kecil, khususnya di negara berkembang, terhadap jasa keuangan, termasuk kredit terjangkau, dan mengintegrasikan ke dalam rantai nilai dan pasar.					
9.3.1*	Proporsi nilai tambah industri kecil terhadap total nilai tambah industri	Dinas perindustrian	**%**	54	Dinas perindustrian
TARGET 9.4 Pada tahun 2030, meningkatkan infrastruktur dan retrofit industri agar dapat berkelanjutan, dengan peningkatan efisiensi penggunaan sumberdaya dan adopsi yang lebih baik dari teknologi dan proses industri bersih dan ramah lingkungan, yang dilaksanakan semua negara sesuai kemampuan masing-masing.					
9.4.1(a)	Persentase Perubahan Emisi CO2/Emisi Gas Rumah Kaca	Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup	**%**	6	Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup
TARGET 9.5 Memperkuat riset ilmiah, meningkatkan kapabilitas teknologi sektor industri di semua negara, terutama negara-negara berkembang, termasuk pada tahun 2030, mendorong inovasi dan secara substansial meningkatkan jumlah pekerja penelitian dan pengembangan per 1 juta orang dan meningkatkan pembelanjaan publik dan swasta untuk penelitian dan pengembangan.					
9.c.1*	Proporsi penduduk yang terlayani mobile broadband	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian	%	75	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian
9.c.1.(a)	Proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian	%	83	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Target 2023	OPD Penang. Jawab
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
9.c.1.(b)	Proporsi individu yang menggunakan internet	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian	%	62	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian
TUJUAN 10 MATRIKS BAGIAN I TARGET PENCAPAIAN INDIKATOR					
TUJUAN 10 : BERKURANGNYA KESENJANGAN					
TARGET 10.1 Pada tahun 2030, secara progresif mencapai dan mempertahankan pertumbuhan pendapatan penduduk yang berada di bawah 40% dari populasi pada tingkat yang lebih tinggi dari rata-rata nasional.					
10.1.1*	Koefisien Gini	RPJMD	Indeks	0,396	
10.1.1.(a)	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur	RPJMD	%	9,16	Bappelitbangda
10.1.1.(b)	Jumlah daerah tertinggal yang terentaskan	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa	Kabupaten	-	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa
TARGET 10.3 Menjamin kesempatan yang sama dan mengurangi kesenjangan hasil, termasuk dengan menghapus hukum, kebijakan dan praktik yang diskriminatif, dan mempromosikan legislasi, kebijakan dan tindakan yang tepat terkait legislasi dan kebijakan tersebut.					
10.3.1.(a)	Indeks Kebebasan Sipil	BPS	%	PM	Biro Hukum
TARGET 10.4 Mengadopsi kebijakan, terutama kebijakan fiskal, upah dan perlindungan sosial, serta secara progresif mencapai kesetaraan yang lebih besar.					
10.4.1.(b)	Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan.	Tenaga kerja dan transmigrasi	%	71,58	Tenaga kerja dan transmigrasi
TUJUAN 11 : KOTA DAN PEMUKIMAN YANG BERKELANJUTAN					
TARGET 11.1 Pada tahun 2030, menjamin akses bagi semua terhadap perumahan yang layak, aman, terjangkau, dan pelayanan dasar, serta menata kawasan kumuh.					
11.1.1.(a)	Proporsi rumah tangga yang memiliki akases terhadap hunian yang layak dan terjangkau	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	%	PM	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
11.1.1.(b)	Jumlah kawasan perkotaan metropolitan yang terpenuhi standar pelayanan perkotaan (SPP).	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	kawasan perkotaan	100	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
11.1.1.(c)	Jumlah kota sedang dan kota baru yang terpenuhi SPP.	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	Kota sedang & Kota baru	PM	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
TARGET 11.2 Pada tahun 2030, menyediakan akses terhadap sistem transportasi yang aman, terjangkau, mudah diakses dan berkelanjutan untuk semua, meningkatkan keselamatan lalu lintas, terutama dengan memperluas jangkauan transportasi umum, dengan memberi perhatian khusus pada kebutuhan mereka yang berada dalam situasi rentan, perempuan, anak, penyandang difabilitas dan orang tua.					
11.2.1.(a)	Persentase pengguna moda transportasi umum di perkotaan.	Dinas perhubungan	%	32,40	Dinas perhubungan
TARGET 11.3 Pada tahun 2030, memperkuat urbanisasi yang inklusif dan berkelanjutan serta kapasitas partisipasi, perencanaan penanganan permukiman yang berkelanjutan dan terintegrasi di semua negara.					

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Target 2023	OPD Penang. Jawab
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
11.3.1.(a)	Jumlah kota sedang di luar Jawa yang diarahkan sebagai pengendali (buffer) arus urbanisasi dan sebagai pusat pertumbuhan utama.	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	Kota sedang	PM	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
11.3.1.(b)	Jumlah Metropolitan baru di luar Jawa sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN).	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	Kota	PM	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
11.3.2.(a)	Rata-rata institusi yang berperan secara aktif dalam Forum Dialog Perencanaan Pembangunan Kota Berkelanjutan.	Bappelitbangda	Institusi/ Kota	PM	Bappelitbangda
TARGET 11.4 Mempromosikan dan menjaga warisan budaya dunia dan warisan alam dunia.					
11.4.1.(a)	Jumlah kota pusaka di kawasan perkotaan metropolitan, kota besar, kota sedang dan kota kecil.	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	Kota Pusaka	PM	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
TARGET 11.5 Pada tahun 2030, secara signifikan mengurangi jumlah kematian dan jumlah orang terdampak, dan secara substansial mengurangi kerugian ekonomi relatif terhadap PDB global yang disebabkan oleh bencana, dengan fokus melindungi orang miskin dan orang-orang dalam situasi rentan.					
11.5.1*	Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah			Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	Jumlah korban meninggal terkena dampak bencana per 100.000 orang	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Jiwa	PM	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	Jumlah korban hilang terkena dampak bencana per 100.000 orang	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Jiwa	PM	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	Jumlah korban terluka terkena dampak bencana per 100.000 orang	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Jiwa	PM	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	Jumlah korban mengungsi terkena dampak bencana per 100.000 orang	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Jiwa	PM	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
11.5.1.(a)	Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI).	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Indeks	150,05	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
11.5.1.(b)	Jumlah kota tangguh bencana yang terbentuk.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Kab/Kota	10	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
11.5.1.(c)	Jumlah sistem peringatan dini cuaca dan iklim serta kebencanaan.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Sistem	6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
11.5.2.(a)	Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana	Badan Penanggulangan Bencana	Rupiah	PM	Badan Penanggulangan Bencana

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Target 2023	OPD Penang. Jawab
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
		Daerah			Daerah
TARGET 11.6 Pada tahun 2030, meningkatkan secara substansial jumlah kota dan permukiman yang mengadopsi dan mengimplementasi kebijakan dan perencanaan yang terintegrasi tentang penyertaan, efisiensi sumber daya, mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim, ketahanan terhadap bencana, serta mengembangkan dan mengimplementasikan penanganan holistik risiko bencana di semua lini, sesuai dengan the Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015-2030.					
11.b.2*	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat daerah.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Dokumen	1	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
11.6.1.(a)	Persentase sampah perkotaan yang tertangani.	Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup	%	72	Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup
TARGET 12.4 Pada tahun 2030 mencapai pengelolaan bahan kimia dan semua jenis limbah yang ramah lingkungan, di sepanjang siklus hidupnya, sesuai kerangka kerja internasional yang disepakati dan secara signifikan mengurangi pencemaran bahan kimia dan limbah tersebut ke udara, air, dan tanah untuk meminimalkan dampak buruk terhadap kesehatan manusia dan lingkungan.					
12.4.2.(a)	Jumlah limbah B3 yang terkelola dan proporsi limbah B3 yang diolah sesuai peraturan perundangan (sektor industri)	Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup	Ton	5.089.634,94 Ton	Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup
TARGET 12.5 Pada tahun 2030, secara substansial mengurangi produksi limbah melalui pencegahan, pengurangan, daur ulang, dan penggunaan kembali.					
12.5.1.(a)	Jumlah timbulan sampah yang didaur ulang	Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup	Ton/ Hari	45,60Ton /Hari	Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup
TUJUAN 13 MATRIKS BAGIAN I TARGET PENCAPAIAN INDIKATOR					
TARGET 13.1 Memperkuat kapasitas ketahanan dan adaptasi terhadap bahaya terkait iklim dan bencana alam di semua negara.					
13.1.1*	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Dokumen	1	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
13.1.2*	Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah			Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	Jumlah korban meninggal terkena dampak bencana per 100.000 orang	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Jiwa	PM	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	Jumlah korban hilang terkena dampak bencana per 100.000 orang	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Jiwa	PM	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	Jumlah korban terluka terkena dampak bencana per 100.000 orang	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Jiwa	PM	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	Jumlah korban mengungsi terkena dampak bencana per 100.000 orang	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Jiwa	PM	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Target 2023	OPD Penang. Jawab
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
TARGET 13.2 Mengintegrasikan tindakan antisipasi perubahan iklim ke dalam kebijakan, strategi dan perencanaan nasional.					
13.2.1.(a)	Dokumen pelaporan penurunan emisi gas rumah kaca (GRK).	Bappelitbangda	Dokumen	-	Bappelitbangda
TUJUAN 14 : EKOSISTEM LAUTAN					
TARGET 14.Pada tahun 2030, melarang bentuk-bentuk subsidi perikanan tertentu yang berkontribusi terhadap kelebihan kapasitas dan penangkapan ikan berlebihan, menghilangkan subsidi yang berkontribusi terhadap penangkapan ikan ilegal, yang tidak dilaporkan dan tidak diatur dan menahan jenis subsidi baru, dengan mengakui bahwa perlakuan khusus dan berbeda yang tepat dan efektif untuk negara berkembang dan negara kurang berkembang harus menjadi bagian integral dari negosiasi subsidi perikanan pada the World Trade Organization.					
14.6.1.(a)	Persentase kepatuhan pelaku usaha	Dinas kelautan dan perikanan	**%**	88,95	Dinas kelautan dan perikanan
14.b.1*	Ketersediaan kerangka hukum/ regulasi/ kebijakan/ kelembagaan yang mengakui dan melindungi hak akses untuk perikanan skala kecil	Dinas kelautan dan perikanan	Regulasi/ Kebijakan	-	Dinas kelautan dan perikanan
14.b.1.(a)	Jumlah Kab/ Kota dengan peningkatan akses pendanaan usaha nelayan	Dinas kelautan dan perikanan	Kab/ Kota	19	Dinas kelautan dan perikanan
14.b.1.(b)	Jumlah nelayan yang terlindungi.	Dinas kelautan dan perikanan	Nelayan	11,860	Dinas kelautan dan perikanan
TUJUAN 15 MATRIKS BAGIAN I TARGET PENCAPAIAN INDIKATOR					
TARGET 15.1 Pada tahun 2030, menjamin pelestarian, restorasi dan pemanfaatan berkelanjutan dari ekosistem daratan dan perairan darat serta jasa lingkungannya, khususnya ekosistem hutan, lahan basah, pegunungan dan lahan kering, sejalan dengan kewajiban berdasarkan perjanjian internasional.					
15.1.1.(a)	Proporsi tutupan hutan terhadap luas lahan keseluruhan.	Dinas kehutanan	%	56.64	Dinas kehutanan
TARGET 15.2 Pada tahun 2030, meningkatkan pelaksanaan pengelolaan semua jenis hutan secara berkelanjutan, menghentikan deforestasi, merestorasi hutan yang terdegradasi dan meningkatkan secara signifikan forestasi dan reforestasi secara global.					
15.2.1.(a)	Luas kawasan konservasi terdegradasi yang dipulihkan kondisi ekosistemnya	Dinas kehutanan	Ha	100	Dinas kehutanan
15.2.1.(b)	Luas usaha pemanfaatan hasil hutan kayu restorasi ekosistem	Dinas kehutanan	Ha	12.000 Ha	Dinas kehutanan
15.2.1.(d)	Jumlah Kesatuan Pengelolaan Hutan.	Dinas kehutanan	KPH	16	Dinas kehutanan
TARGET 15.3 Pada tahun 2030, menghentikan penggurunan, memulihkan lahan dan tanah kritis, termasuk lahan yang terkena penggurunan, kekeringan dan banjir, dan berusaha mencapai dunia yang bebas dari lahan terdegradasi.					
15.3.1.(a)	Proporsi luas lahan kritis yang direhabilitasi terhadap luas lahan keseluruhan	Dinas kehutanan	%	1,21	Dinas kehutanan

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Target 2023	OPD Penang. Jawab
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
TARGET 15.9 Pada tahun 2030, mengintegrasikan nilai-nilai ekosistem dan keanekaragaman hayati ke dalam perencanaan nasional dan daerah, proses pembangunan, strategi dan penganggaran pengurangan kemiskinan.					
15.9.1.(a)	Dokumen rencana pemanfaatan keanekaragaman hayati	Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup	Dokumen	1 Dokumen Keanekaragaman hayati Pucak	Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup
TUJUAN 16 : PERDAMAIAN KEADILAN DAN KELEMBAGAAN YANG TANGGUH					
TARGET 16.1 Secara signifikan mengurangi segala bentuk kekerasan dan terkait angka kematian dimanapun.					
16.1.1.(a)	Jumlah kasus kejahatan pembunuhan pada satu tahun terakhir	BPS	Kasus	PM	Satpol PP
		POLDA	Kasus	41	Satpol PP
16.1.4*	Proporsi penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya	BPS	%	PM	Satpol PP
		POLDA	%	93	Satpol PP
TARGET 16.2 Menghentikan perlakuan kejam, eksploitasi, perdagangan, dan segala bentuk kekerasan dan penyiksaan terhadap anak.					
16.2.3.(a)	Proporsi perempuan dan laki-laki muda umur 18-24 tahun yang mengalami kekerasan seksual sebelum umur 18 tahun.	Dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	%	1,93	Dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
16.2.1.(b)	Prevalensi kekerasan terhadap anak laki-laki dan anak perempuan.	Dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	%	0,00078	Dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
16.2.1.(a)	Proporsi rumah tangga yang memiliki anak umur 1-17 tahun yang mengalami hukuman fisik dan/atau agresi psikologis dari pengasuh dalam setahun terakhir.	Dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	%	0,023	Dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
TARGET 16.6 Mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkat.					
16.6.1*	Proporsi pengeluaran utama pemerintah terhadap anggaran yang disetujui.	Badan Pengelola Keuangan Daerah	%	97	Badan Pengelola Keuangan Daerah
16.6.1.(a)	Persentase peningkatan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/	Badan Pengelola Keuangan Daerah	%	100	Badan Pengelola Keuangan Daerah

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Target 2023	OPD Penang. Jawab
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
	Kota).				
16.6.2.(a)	Persentase Kepatuhan pelaksanaan UU Pelayanan Publik Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota).	Biro Organisasi dan Tata Laksana Sekretariat Daerah	%	PM	Biro Organisasi dan Tata Laksana Sekretariat Daerah
16.6.1.(b)	Persentase peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota).	Biro Organisasi dan Tata Laksana Sekretariat Daerah	%	85,00(A)	Biro Organisasi dan Tata Laksana Sekretariat Daerah
				24	
16.6.1.(c)	Persentase penggunaan E-procurement terhadap belanja pengadaan.	Biro Barang dan Jasa Sekretariat Daerah	%	100	Biro Barang dan Jasa Sekretariat Daerah
16.6.1.(d)	Persentase instansi pemerintah yang memiliki nilai Indeks Reformasi Birokrasi Baik Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota).	Biro Organisasi dan Tata Laksana Sekretariat Daerah	%	80,00 (A)	Biro Organisasi dan Tata Laksana Sekretariat Daerah
TARGET 16.7 Menjamin pengambilan keputusan yang responsif, inklusif, partisipatif dan representatif di setiap tingkatan.					
16.7.2.(a)	Indeks Lembaga Demokrasi	BPS	%	PM	Badan Kesbangpol
16.7.2.(b)	Indeks Kebebasan Sipil	BPS	%	PM	Badan Kesbangpol
16.7.2.(c)	Indeks Hak-hak Politik	BPS	%	PM	Badan Kesbangpol
TARGET 16.9 Pada tahun 2030, memberikan identitas yang syah bagi semua, termasuk pencatatan kelahiran.					
16.9.1.(a)	Persentase anak berumur 0-17 tahun dengan pendapatan 40% bawah yang memiliki akta kelahiran	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	%	PM	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
MATRIKS BAGIAN I TARGET PENCAPAIAN INDIKATOR TUJUAN 17					
TUJUAN 17 : KEMITRAAN UNTUK MENCAPAI TUJUAN					
TARGET 17.1 Memperkuat mobilisasi sumber daya domestik, termasuk melalui dukungan internasional kepada negara berkembang, untuk meningkatkan kapasitas lokal bagi pengumpulan pajak dan pendapatan lainnya.					
17.1.1*	Total pendapatan pemerintah sebagai proporsi terhadap PDB menurut sumbernya.	Badan pendapatan daerah	%	0.70	Badan pendapatan daerah
17.1.1.(a)	Rasio penerimaan pajak terhadap PDB	Badan pendapatan daerah	%	0.63	Badan pendapatan daerah

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Target 2023	OPD Penang. Jawab
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
17.1.2*	Proporsi anggaran domestik yang didanai oleh pajak domestik	Badan pendapatan daerah	%	40.92	Badan pendapatan daerah
TARGET 17.6 Meningkatkan kerjasama Utara-Selatan, Selatan-Selatan dan kerjasama triangular secara regional dan internasional terkait dan akses terhadap sains, teknologi dan inovasi, dan meningkatkan berbagi pengetahuan berdasar kesepakatan timbal balik, termasuk melalui koordinasi yang lebih baik antara mekanisme yang telah ada, khususnya di tingkat Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), dan melalui mekanisme fasilitasi teknologi global.					
17.6.2.(c)	Proporsi penduduk terlayani mobile broadband	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian	%	75	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian
TARGET 17.8 Mengoperasionalisasikan secara penuh bank teknologi dan sains, mekanisme pembangunan kapasitas teknologi dan inovasi untuk negara kurang berkembang pada tahun 2017 dan meningkatkan penggunaan teknologi yang memampukan, khususnya teknologi informasi dan komunikasi.					
17.8.1*	Proporsi individu yang menggunakan internet.	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian	%	67	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian
17.8.1.(a)	Persentase kabupaten 3T yang terjangkau layanan akses telekomunikasi universal dan internet.	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian	%	100	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian
TARGET 17.18 Pada tahun 2030, meningkatkan dukungan pengembangan kapasitas untuk negara berkembang, termasuk negara kurang berkembang dan negara berkembang pulau kecil, untuk meningkatkan secara signifikan ketersediaan data berkualitas tinggi, tepat waktu dan dapat dipercaya, yang terpilah berdasarkan pendapatan, gender, umur, ras, etnis, status migrasi, difabilitas, lokasi geografis dan karakteristik lainnya yang relevan dengan konteks nasional.					
17.18.1.(a)	Persentase konsumen Badan Pusat Statistik (BPS) yang merasa puas dengan kualitas data statistik.	BPS	%	PM	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian
17.18.1.(b)	Persentase konsumen yang menjadikan data dan informasi statistik BPS sebagai rujukan utama.	BPS	%	PM	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian
17.18.1.(c)	Jumlah metadata kegiatan statistik dasar, sektoral, dan khusus yang terdapat dalam Sistem Informasi Rujukan Statistik (SIRuSa).	BPS	%	PM	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian
TARGET 17.19 Pada tahun 2030, mengandalkan inisiatif yang sudah ada, untuk mengembangkan pengukuran atas kemajuan pembangunan berkelanjutan yang melengkapi Produk Domestik Bruto, dan mendukung pengembangan kapasitas statistik di negara berkembang.					
17.19.2.(b)	Tersedianya data registrasi terkait kelahiran dan kematian (Vital Statistics Register)	DP3A	%	Ada	DP3A
17.19.2.(c)	Jumlah pengunjung eksternal yang mengakses data dan informasi statistik melalui website.	BPS	%	PM	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Target 2023	OPD Penang. Jawab
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
17.19.2.(d)	Persentase konsumen yang puas terhadap akses data Badan Pusat Statistik (BPS).	BPS	%	PM	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian

Sumber : Perubahan RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018 – 2023

BAB VIII
PENUTUP

BAB VIII
PENUTUP

Bab Penutup Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023 terbagi menjadi 2 (dua) sub bab yaitu : Kaidah Pelaksanaan dan Kesimpulan.

8.1. Kaidah Pelaksanaan

Tahun 2023 merupakan tahun terakhir pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023 dengan focus pada pemantapan kesejahteraan melalui pembangunan manusia yang produktif dan berkarakter sesuai yang tertuang pada arah kebijakan Tahun 2023 pada RPJMD Prov. Sulsel Tahun 2018-2023.

Dalam rangka meningkatkan kinerja Pemerintah Daerah yang lebih efektif, efisien dan optimal dalam mencapai sasaran yang sudah ditetapkan maka proses penyusunannya RKPD berlandaskan pada prioritas pembangunan yang akan mendukung pelaksanaan RKP Tahun 2023 sebagaimana tertuang dalam RPJMN 2020-2024, Perubahan RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan dan RPJPD. Keterkaitan antara dokumen-dokumen ini sangat erat dimana kedudukan dokumen yang lebih tinggi ini masih bersifat makro dan dalam peraturan yang ada dokumen yang lebih tinggi menjadi dasar pijakan dalam penjabaran dokumen lainnya secara operasional.

Perencanaan pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2023 menggunakan pendekatan perencanaan berbasis Tematik, Holistik, Integratif, dan Spasial (THIS). Perencanaan pembangunan daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023 diimplementasikan dengan:

1. Tetap memperhatikan prioritas pembangunan daerah sesuai yang tertuang dalam Perubahan RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023;
2. Memastikan konsistensi perencanaan dan penganggaran prioritas dan sasaran prioritas pembangunan provinsi dengan pendekatan penganggaran berbasis program (money follows program), serta program prioritas yang akan dilaksanakan pada tahun 2023;
3. Kolaborasi antar berbagai sumber pendanaan, antara lain pendanaan kabupaten/kota (APBD kabupaten/kota), APBD Provinsi, APBN, CSR, KPBU, dana pinjaman dan hibah untuk membiayai pelaksanaan pembangunan Sulawesi Selatan;
4. Melibatkan secara aktif stakeholder di luar pemerintahan dalam rangka perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah, dengan penerapan konsep spasial di dalam penjabaran prioritas pembangunan di Provinsi Sulawesi Selatan dalam rangka pemulihan ekonomi dan mencapai target sasaran pembangunan guna mewujudkan visi dan misi RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023.

Perwujudan prioritas pembangunan tersebut melalui sejumlah strategi dan arah kebijakan, serta program dan kegiatan/sub kegiatan. Rencana program dan kegiatan/sub kegiatan tahun 2023 selain diarahkan untuk mendukung prioritas pembangunan, juga sebagai bentuk penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai kewenangan provinsi.

Dokumen RKPD Provinsi Sulawesi Selatan berfungsi sebagai landasan, pedoman dan acuan resmi bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun Kebijakan Umum APBD (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dalam bentuk nota kesepakatan antara Eksekutif dan Legislatif, yang mana nota kesepakatan KUA dan PPAS ini sebagai dasar penyusunan RAPBD. Adapun fungsi RKPD lainnya adalah sebagai bahan evaluasi RAPBD yang mana untuk memastikan APBD telah disusun berlandaskan RKPD dan juga sebagai acuan/pedoman bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam menyusun dan melaksanakan tugas dan fungsinya dalam penyelenggaraan-penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan.

Pembangunan pada dasarnya merupakan upaya sadar dan terencana yang dilakukan untuk mencapai suatu kondisi yang lebih baik dimasa yang akan datang dengan memanfaatkan dan mengelola potensi sumberdaya yang dimiliki oleh daerah, upaya tersebut pada akhirnya ditujukan untuk meningkatkan taraf hidup, meningkatkan kualitas sumberdaya manusia dan kesejahteraan masyarakat. Untuk mempercepat capaian target pembangunan maka harus memperhatikan kunci sukses pembangunan Daerah,

Kunci sukses pembangunan daerah adalah perencanaan yang baik, berkualitas, akuntabel dan benar benar dijadikan dasar pelaksanaan. Kualitas suatu rencana pembangunan dapat mendukung keberhasilan dan kelancaran pelaksanaan pembangunan daerah, dengan prasarat dokumen tersebut ditaati oleh seluruh pemangku kepentingan dengan dilandasi oleh komitmen dan konsistensi kebijakan yang tinggi serta menjadi acuan proses selanjutnya. Selain hal tersebut diatas juga diperlukan adanya sikap, mental, tekad, semangat, kejujuran dan disiplin kerja yang tinggi bagi para pelaku pembangunan dan penyelenggara Pemerintah Daerah.

RKPD sebagai dokumen perencanaan tahunan daerah, berisi tentang rancangan kerangka ekonomi daerah, program prioritas pembangunan daerah dan rencana kerja, pendanaan/pagu indikatif dan prakiraan maju. Dalam rangka keterbukaan dandan transparasi informasi publik, maka RKPD agar dipublikasikan dengan tujuan diketahui oleh semua pihak.

Untuk menjamin agar program dan kegiatan masing-masing OPD pelaksanaannya dapat berjalan sesuai dengan rencana yang sudah ditetapkan dan dalam rangka meningkatkan efektifitas dan efisiensi alokasi sumberdaya serta meningkatkan transparasi dan akuntabilitas pengelolaan program pembangunan, maka diperlukan instrumen pengendalian dan evaluasi.

Adapun Instrumen pengendalian terhadap pelaksanaan program dan kegiatan mendasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD.

Dalam tata cara pengendalian tersebut dapat disajikan program dan kegiatan yang sudah direncanakan dengan target target tertentu dan bagaimana pelaksanaan program dan kegiatan tersebut oleh masing masing OPD dan yang dievaluasi tidak hanya kesesuaian antara rencana dengan pelaksanaan saja, akan tetapi mencakup juga tingkat capaian kinerja pada setiap tahapan pelaksanaannya. Pada tata cara pengendalian tersebut menempatkan OPD pada posisi strategis, dimana OPD mempunyai kewenangan untuk melakukan

pengendalian dan evaluasi terhadap program dan kegiatan yang dilaksanakan sendiri dan diharapkan apabila terjadi ketidak sesuaian dapat segera diambil langkah tindak lanjut sebagai upaya preventif dan korektif sebelum pelaksanaan program dan kegiatan tersebut menyimpang, sehingga dalam hal ini kemandirian OPD dalam memahami setiap proses dan langkah pengendalian menjadi suatu hal yang penting.

Sehubungan dengan tata cara pengendalian tersebut di atas maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan RKPD Tahun 2023 sebagai berikut :

1. Untuk mengupayakan keterpaduan, sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan setiap program dalam rangka koordinasi perencanaan, masing-masing OPD agar menyempurnakan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD) Tahun 2023.
2. OPD dan masyarakat termasuk didalamnya dunia usaha berkewajiban untuk melaksanakan program-program yang ada di RKPD Tahun 2023 dengan sebaik baiknya.
3. Masyarakat luas dapat berperan serta dalam pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan dan kegiatan dalam program-program pembangunan.
4. Untuk menjaga efektifitas dan efisiensi pelaksanaan program, setiap OPD wajib melakukan tindakan koreksi yang diperlukan, dan melaporkan hasil-hasil pemantauan secara berkala kepada Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku.
5. Pada akhir tahun anggaran 2023, setiap OPD wajib melakukan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan yang meliputi evaluasi terhadap pencapaian sasaran kegiatan yang sudah ditetapkan, kesesuaian dengan rencana alokasi anggaran yang ditetapkan dalam APBD, kesesuaian dengan target RPJMD serta kesesuaian dengan ketentuan peraturan perundangan yang mengatur pelaksanaan APBD dan peraturan peraturan lainnya.

8.2. Kesimpulan

1. RKPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023 penyusunannya dilakukan secara partisipatif berdasarkan usulan masyarakat, Organisasi Perangkat Daerah, DPRD melalui pokok-pokok pikiran dan pemangku pembangunan lainnya.
2. RKPD merupakan acuan/pedoman bagi penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dalam rangka penyusunan RAPBD Tahun 2023.
3. Pelaksanaan pembangunan daerah diarahkan untuk mencapai target sasaran sesuai dengan arah kebijkan pembangunan yang dimuat dalam Perubahan RPJMD Prov. Sulsel untuk Tahun 2023 yaitu : ***"pemantapan kesejahteraan melalui pembangunan manusia yang produktif dan berkarakter"*** sehingga program kegiatan di masing-masing OPD mengarah pada pencapaian tersebut dan untuk menjamin pelaksanaan program kegiatan tersebut dapat sesuai dengan rencana yang sudah ditetapkan, maka harus dilakukan evaluasi dan analisis sebagai tahapan dalam melakukan pengendalian.

4. RKPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023, diupayakan pelaksanaannya dapat sinergis dengan prioritas-prioritas pembangunan Nasional. Dalam rangka sinergitas dan mengingat kemampuan keuangan daerah sangat terbatas, maka untuk melaksanakan hal tersebut ditempuh dengan cara sharing pembiayaan pembangunan dengan Pemerintah Pusat berupa pendanaan dari APBN maupun sumber dana lainnya.
5. Kerja keras, semangat, komitmen, partisipasi, konsistensi dan disiplin yang tinggi dari pelaksana pemerintahan dan segenap pemangku pembangunan sangat diperlukan dalam pelaksanaan rencana pembangunan daerah, sehingga masing-masing dapat berperan dan bertanggungjawab terhadap proses, hasil dan kinerja pembangunan sesuai dengan tanggung jawabnya masing-masing.

Plh. GUBERNUR SULAWESI SELATAN

ttd

ABDUL HAYAT

Sulsel
Colorful Experience

#bangga melayani bangsa

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN & PENGEMBANGAN DAERAH
(BAPPELITBANGDA) PROVINSI SULAWESI SELATAN
Jalan Urip Sumoharjo No. 269 Makassar | Telp. (0411) 453 586 | Facs. (0411) 453 869
https://bappelitbangda.sulselprov.go.id/